INDONESIA POWER

Enhancing Clean Energy

for Better Indonesia Power

ANNUAL REPORT

LAPORAN TAHUNAN 2016

PT INDONESIA POWER

Enhancing Clean Energy

for Better Indonesia Power

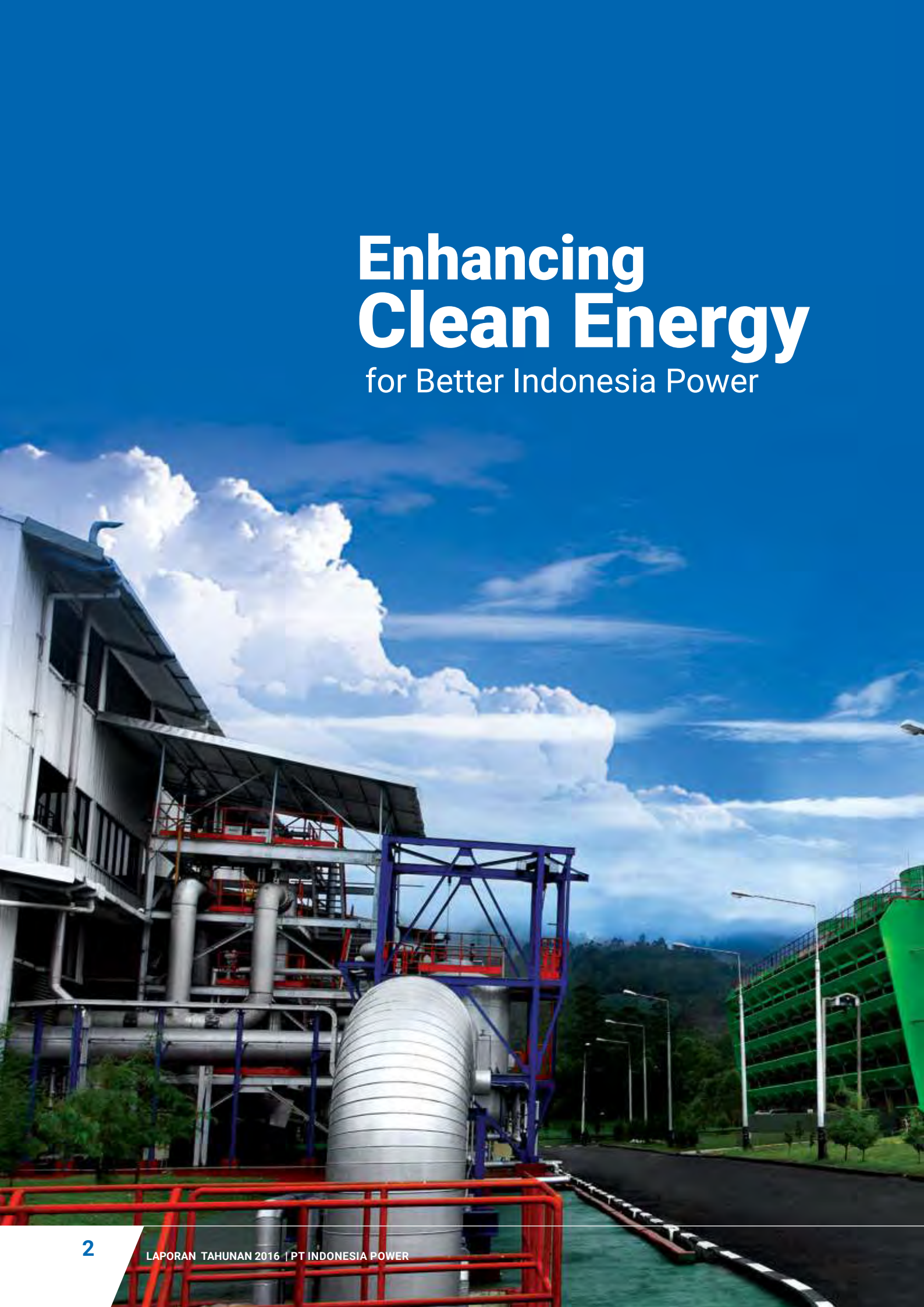

Ditengah semangat percepatan perkembangan elektrifikasi Indonesia untuk menjangkau mayoritas penduduk di seluruh nusantara, Indonesia Power berkomitmen mendukung upaya pemerintah dalam program reformasi sektor energi serta siap berkontribusi dalam berbagai inisiatif penting untuk mewujudkan efisiensi energi dan mempercepat pengembangan energi terbarukan.

Indonesia Power serius mewujudkan penyediaan akses energi yang lebih bersih secara luas dan berkelanjutan, melalui perumusan kebijakan perusahaan, pemanfaatan teknologi dan inovasi, dan berbagai program kegiatan yang berorientasi pada pelestarian lingkungan.

Upaya nyata Indonesia Power pada peningkatan energi bersih akan mendorong peran Indonesia Power menjadi lebih baik dalam kerangka menjaga keamanan, keterjangkauan dan keseimbangan energi listrik guna mewujudkan kemajuan industri dan perbaikan kesejahteraan masyarakat.

Amidst the passion for accelerating the electrification development in Indonesia for reaching the majority of population throughout the archipelago, Indonesia Power is committed to support the government's effort in the program to reform energy sector, and is ready to contribute in many important initiatives to cultivate energy efficiency and accelerate renewable energy development.

Indonesia Power is serious in realizing the provision of cleaner energy access in a wider and sustainable manner, through the formulation of Company's policy, technology and innovation utilization, and various programs oriented in environmental conservation.

The real effort of Indonesia Power in improving clean energy will promote the role of Indonesia Power to become better in the framework of maintaining security, affordability, and electricity balance, in order to realize industrial growth and improvement for community's welfare.

DAFTAR ISI
Contents

02 **Pendahuluan** Introduction

45 **Laporan Kepada Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan** Report to Shareholders and Stakeholders

83 **Profil Perusahaan** Company Profile

02 **PENDAHULUAN**
Introduction

02 Enhancing Clean Energy for Better Indonesia Power

04 Daftar Isi
Contents

08 Kesinambungan Tema
Kesinambungan Tema

10 Ringkasan Kinerja Utama 2016
2016 Key Performance Highlights

18 Ikhtisar Data Keuangan Penting
Important Financial Data Overview

32 What Stakeholders Say About Indonesia Power

33 Peristiwa Penting Tahun 2016
2016 Event Highlights

35 Penghargaan dan Sertifikasi 2016
Awards and Certification in 2016

45 **LAPORAN KEPADA PEMEGANG SAHAM DAN PEMANGKU KEPENTINGAN**
Reports From Shareholders and Stakeholders

46 Laporan Dewan Komisaris
Report of the Board of Commissioners

56 Profil Dewan Komisaris
Board of Commissioners' Profiles

60 Laporan Direksi
Report of the Board of Directors

74 Profil Direksi
Board of Directors' Profiles

80 Tanggung Jawab Atas Laporan Tahunan 2016
Responsibility of Annual Report 2016

83 **PROFIL PERUSAHAAN**
Company Profile

84 Identitas Perusahaan
Corporate Identity

86 Informasi Website Perusahaan
Company's Website

87 Kronologis Pencatatan Saham
Chronology of Share Listing

87 Kronologis Pencatatan Efek Lainnya
Chronology of Other Securities Listing

88 Sejarah Singkat Indonesia Power
Indonesia Power Brief History

90 Jejak Langkah
Milestones

92 Visi, Misi, Kompetensi Inti dan Budaya Perusahaan
Company Vision, Mission, Core Competence and Culture

98 Tujuan, Sasaran dan Strategi Prusahaan
Corporate's Objectives, Target, and Strategy

103 Bidang Usaha
Business Sector

110 Struktur dan Komposisi Pemegang Saham
Structure and Composition of Shareholders

112 Struktur Organisasi Perusahaan
Company's Organization Structure

116 Profil Pegawai Perusahaan
Employee's Profile

129 Struktur Grup Perusahaan
Corporate Group Structure

131 Daftar Anak Perusahaan, Perusahaan Patungan dan Perusahaan Asosiasi
List of Subsidiaries, Joint Venture Companies, and Associate Companies

135 Sekilas Kinerja Anak Perusahaan, Perusahaan Patungan dan Perusahaan Asosiasi
Brief Performance of Subsidiaries, Joint Venture Companies, and Associate Companies

159 **Analisis dan Pembahasan Manajemen**
Management Discussion and Analysis

329 **Tinjauan Pendukung Bisnis**
Businesss Support

377 **Tata Kelola Perusahaan**
Good Corporate Governance

149 Lembaga Profesi Penunjang Perusahaan
Company's Supporting Institutions

150 Peta Wilayah Operasional Perusahaan
Work Area of Indonesia Power

154 Kerjasama Dengan Pihak Ketiga
Cooperation with Third Parties

159 **ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN**
Management Discussion and Analysis

160 Tinjauan Industri
Industrial Review

176 Tinjauan Kinerja Operasi Per Segmen
Operational Performance Review Per Segment

180 · Penyediaan Tenaga Listrik
· Electricity Provision

202 · Jasa *Operation and Maintenance* (O&M)
· Operation and Maintenance (O&M) Services

207 Profitabilitas Per Segmen
Segmentation Profitability

209 Tinjauan Kinerja Keuangan
Financial Performance Analysis

209 · Laporan Posisi Keuangan
· Financial Position Statements

233 · Laba Rugi Komprehensif
· Comprehensive Profit of Loss

240 · Laporan Arus Kas
· Statement of Cash Flows

246 Kemampuan Membayar Utang, Kolektibilitas Piutang dan Rasio Keuangan Lainnya
Solvency, Receivables Collectability, and Other Financial Ratios

256 Struktur Modal
Capital Structure

259 Pencapaian Target 2016, Realisasi 2016, dan Proyeksi 2017
2016 Achievements, 2016 Realization, and 2017 Projections

269 Tingkat Kesehatan Perusahaan dan Pencapaian KPI
KPI Achievement and Company's Soundness Level

273 Kontribusi kepada Negara
Contribution to the State

275 Kebijakan Dividen
Dividend Policy

278 Informasi Ikatan Material untuk Investasi Barang Modal
Material Agreement Information for Capital Goods Investment

289 Investasi Barang Modal
Capital Goods Investment

295 Informasi Transaksi Material yang Mengandung Benturan Kepentingan dan/atau dengan Pihak Afiliasi/Berelasi
Information on Material Transaction with Conflict of Interest and/or with Affiliated/Related Parties

303 Informasi Material Terkait Investasi, Ekspansi, Divestasi, Akuisisi dan Restrukturisasi
Material Information Related to Investment, Expansion, Divestment, Acquisition, and Restructuration

308 Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
Use of Funds from Public Offerings

309 Program Kepemilikan Saham oleh Karyawan dan/atau Manajemen (MSOP/ESOP)
Share Ownership Program by Employee and/or Management (MSOP/ESOP)

310 Informasi dan Fakta Material Setelah Tanggal Laporan Akuntan
Material Information and Fact after Accountant Report Date

311 Perubahan Kebijakan Akuntansi dan Dampaknya
Changes in Accounting Policy and their Impact

314 Perubahan Peraturan yang Signifikan dan Dampaknya terhadap Perusahaan
Significant Regulation Changes and the Impact on the Company

315 Informasi Kelangsungan Usaha
Business Continuity Information

DAFTAR ISI
Contents

607 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Corporate Social Responsibility

697 Laporan Keuangan
Financial Report

317 Prospek Usaha
Business Prospect

329 **TINJAUAN PENDUKUNG BISNIS**
Business Support

330 Pemasaran
Marketing

335 Sumber Daya Manusia
Human Resources

351 Teknologi Informasi
Information Technology

361 Teknologi Pembangkitan
Power Generation Technology

368 *Indonesia Power Integrated Management System* (InPower IMS)

377 **TATA KELOLA PERUSAHAAN**
Good Corporate Governance

378 Pendahuluan
Introduction

382 *Roadmap* Tata Kelola Perusahaan
Good Corporate Governance Roadmap

383 Komitmen Penerapan Tata kelola Secara Berkelanjutan
Commitment to Sustainable Governance Implementation

397 Struktur, Kebijakan dan Mekanisme Tata Kelola Perusahaan
Structure, Policy, and Mechanism of Corporate Governance

404 Informasi Mengenai Pemegang Saham Utama dan Pengendali
Information on Major Shareholders and Controllers

405 Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
General Meeting of Shareholders (GMS)

413 Dewan Komisaris
Board of Commissioners

438 Komite-Komite di Bawah Dewan Komisaris
Committees Reporting Directly to the Board of Commissioners

450 a) Laporan Pelaksanaan Kegiatan Komite Audit tahun 2016
a) Audit Committee Activity Report in 2016

462 b) Laporan Pelaksanaan Kegiatan Komite Manajemen Risiko Tahun 2016
b) Risk Management Committee Activity Report in 2016

464 c) Fungsi Nominasi dan Remunerasi
c) Nomination and Remuneration Function

469 Direksi
Board of Directors

494 Kebijakan Remunerasi Dewan Komisaris & Direksi
Remuneration Policy for the Board of Commissioners and Board of Directors

500 Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris dan Direksi
Diversity of the Board of Commissioners and Board of Directors Composition

507 Penilaian Kinerja Dewan Komisaris dan Direksi
Performance Assessment of Board of Commissioners and Board of Directors

509 Hubungan Afiliasi Antara Anggota Direksi , Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Utama dan/atau Pengendali
Affiliation Between Fellow Member of Board of Directors, Board of Commissioners, and Major Shareholders and/or Controller

511 Sekretaris Dewan Komisaris
Secretary of Board of Commissioners'

515 Sekretaris Perusahaan
Corporate Secretary

520 Internal Audit
Internal Audit

531 Sistem Pengendalian Internal
Internal Control

539 Manajemen Risiko
Risk Management

571 Akuntan Publik
Public Accountant

575 Kode Etik Perusahaan
Code of Conduct

580 Whistleblowing System (WBS)

587 Perkara Penting yang Sedang Dihadapi oleh Perusahaan, Entitas Anak, Anggota Direksi atau Anggota Dewan Komisaris
Legal Issues Faced by the Company, Subsidiaries, Member of Board of Director or Board of Commissioners

594 Akses Informasi dan Data Perusahaan
Access to the Company's Information and Data

599 Pengadaan Barang dan Jasa
Procurement of Goods and Services

607 **TANGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN**
Corporate Social Responsibility

608 Pendahuluan
Introduction

614 Metode dan Program Pelaksanaan CSR Indonesia Power
Indonesia Power CSR Implementation Methods and Program

618 Pelaksana Pengelolaan CSR
CSR Manager

619 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Lingkungan Hidup
Corporate Social Responsibility towards the Environment

645 Tanggung Jawab Perusahaan Terhadap Ketenagakerjaan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
Corporate Social Responsibility to Employment, Occupational Health and Safety (OHS)

664 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan terhadap Pengembangan Sosial dan Kemasyarakatan
Social Responsibility to Products and Customers

683 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Konsumen
Corporate Social Responsibility to Customer

697 **LAPORAN KEUANGAN**
Financial Report

810 **Referensi Kriteria ARA 2016**
ARA Criteria References 2016

KESINAMBUNGAN TEMA
Theme Continuity

2013

Excellent Execution Towards World Class Service Company

Kami terus berkarya yang fokus pada hasil terbaik dengan mengedepankan eksekusi ekselen yang bersungguh-sungguh dan berkelanjutan agar Indonesia Power dapat terus mencapai kinerja yang optimal.

We continue to work with a focus on best results by emphasizing on earnest and sustainable excellent execution, enabling Indonesia Power to achieve optimal performance continuously.

2014

Towards Excellent Business Proces

Kami melakukan transformasi menuju proses bisnis yang ekselen dalam mendukung pencapaian sasaran Perusahaan melalui perubahan visi dan misi baru, program efisiensi secara menyeluruh dan pertumbuhan yang berkelanjutan.

We implement transformation towards excellent business process in supporting the achievement of the Company through a new vision and mission, overall efficiency program, and sustainable growth.

2016

Enhancing Clean Energy for Better Indonesia Power

Memperoleh berbagai pencapaian penting serta aktif menggali potensi dan mengembangkan energi terbarukan yang ramah lingkungan.

Obtaining various important achievements and actively exploring potential and developing renewable energy that is environmentally friendly.

2015

Sumber Daya Unggul Untuk Menjawab Tantangan Pertumbuhan

Excellent Resources to Meet the Challenge of Growth

Kami berhasil terus memperkuat sumber daya yang dimiliki Indonesia Power sebagai strategi pertumbuhan berkelanjutan.

We continue to strengthen Indonesia Power's resources as a sustainable growth strategy.

RINGKASAN KINERJA UTAMA 2016
Main Performance Overview 2016

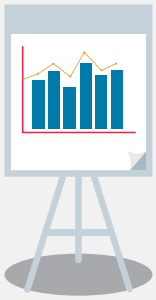

Pendapatan Usaha
Operating Revenues

Rp36.705.954

juta | million

Laba Tahun Berjalan
Income for the year

Rp2.886.704

juta | million

Produksi listrik
Electricity Production

43.180 GWh

Peningkatan peran dari Asset Operator menjadi
Asset Manager

Promotion of the role from Asset Operator to Asset Manager

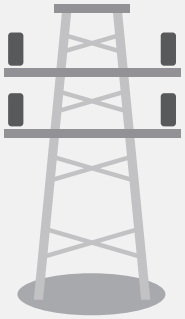

Jumlah Aset
Total Assets

Rp220.888.024

juta | million

Realisasi anggaran CSR melalui kegiatan InPower-Care
CSR budget realization through Inpower-Care activities

Rp20.592

juta | million

PROPER Hijau
Green PROPER for 9 Units

9 unit

The Best Power Plants Company with Environmentally Friendly of the Year

dalam ajang Indonesian Entrepreneur & Education Award

The Best Power Plants Company with Environmentally Friendly of the Year in the event of Indonesian Entrepreneur & Education Award

Kontribusi Pajak
Tax contribution
Rp924.503
juta | million

Akselerasi kompetensi penyiapan Operator dari 5 tahun menjadi 2,5 tahun

Competence Acceleration for Operator preparation from 5 years to only 2,5 years

Rating GCG 2016 mendapatkan predikat "The Trusted Company" dengan capaian skor

The GCG 2016 Rating received the predicate of "The Trusted Company" with a score of

82,94

Top 5 O & M Company

dalam ajang Indonesia Best Electricity Awards

in the event of Indonesia Best Electricity Award

Score Assessment GCG 91,99%
mendapatkan predikat "Sangat Baik"
GCG Assessment Score 91.99% received "Very Good" predicate

Sumber Daya Manusia
Human Capital
3.725
orang | employees

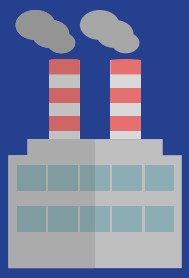

11 Unit Pembangkit mendapatkan penghargaan Zero Accident secara nasional dan bertambah menjadi 16 Unit Pembangkit di tahun 2016

11 Generating Units achieved the award Zero Accident nationally, and the number became 16 Generating Units in 2016.

Indonesia Power terus berkomitmen membangun bisnis hijau melalui implementasi "GO 90", yaitu serangkaian langkah dan strategi untuk membangkitkan listrik dengan aman, bersih, hijau, andal dan efisien

Indonesia Power is committed to build green business through the implementation of "GO 90", i.e. a series of step and strategies to generate electricity safely, clean, environmentally friendly, reliably, and efficiently.

Bidang usaha pembangkitan dan jasa pembangkitan, menjadikan keandalan sebagai tolak ukurnya yaitu berdasarkan indikator *Equivalent Availability Factor* (EAF). Keandalan dan efisien ini merupakan fundamental dalam menyediakan energi listrik bagi masyarakat karena masyarakat membutuhkan listrik yang andal dengan harga yang terjangkau. Untuk mewujudkan hal tersebut, keandalan dan efisiensi membutuhkan sebuah pondasi yang kuat didasarkan tata kelola pembangkit (*asset management*) yang *best practice*). Keandalan ini diwujudkan melalui komitmen dalam menjalankan manajemen aset, *Life Cycle Management* (LCM) operasi dan pemeliharaan pembangkit yang ekselen, serta *continuos improvement* yang didukung oleh operator dan teknisi pembangkit yang memiliki keahlian dan kompetensi di bidangnya.

The power generation and power plant services business makes reliability as its benchmark, i.e. by using the indicator of Equivalent Availability Factor (EAF). The reliability and efficiency are fundamental in providing electricity for the society, because the society needs affordable yet reliable electricity. To realize that, the reliability and efficiency must have strong foundation based on the best practice of asset management. Reliability is realized through commitment to conduct asset management, Life Cycle Management (LCM) of excellent power plant operation and maintenance, as well as continuous improvement supported by expert operators and technicians.

Bisnis hijau terbukti memberikan kontribusi positif bagi kinerja perusahaan. Disamping itu, atas upaya dan komitmen Indonesia Power dalam pelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan telah mendapatkan apresiasi sebagai The Best Power Plants Company with Environmentally Friendly of the Year dalam ajang Indonesian Entrepreneur & Education Award.

Green business is proven to have given positive contribution to the Company's performance. In addition, on the effort and commitment of Indonesia Power in environmental conservation and sustainable development, Indonesia Power obtained the appreciation as the Best Power Plants Company with Environmentally Friendly of the year in the event of Indonesian Entrepreneur & Education Award.

PENGEMBANGAN ENERGI HIJAU UNTUK MENDUKUNG TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Developing Green Energy to Support Sustainable Development Goals

Indonesia Power meyakini bahwa melalui pengembangan energi hijau/EBT ini menjadi langkah dalam menjaga keberlanjutan energi yang menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan Perusahaan.

Indonesia Power believes that the development of green energy/NRE is a step towards maintaining energy sustainability, which is an important factor in maintaining the Company's sustainability.

Dalam rangka mendukung Program Pemerintah untuk mewujudkan ketahanan energi, mewujudkan kesinambungan usaha, mengurangi ketergantungan terhadap hanya satu energi primer, menambah kapasitas produksi energi listrik melalui cara yang ramah lingkungan, Indonesia Power terus aktif menggali potensi dan mengembangkan pembangkit-pembangkit Energi Baru Terbarukan (EBT).

In order to support the Government's Program to realize the energy endurance and business sustainability, reduce dependence on one primary energy, add capacity of electricity production in an environmentally friendly way, Indonesia Power actively explores and develops power plants that use New and Renewable Energy (NRE).

Pada tahun 2016, produksi listrik EBT Indonesia Power adalah sebesar 8.084,23 GWh atau 18,74% dari bauran energi Perusahaan. Komposisi tersebut terdiri dari 5.307,08 GWh atau 12,30% untuk tenaga air dan 2.777,15 GWh atau 6,44% untuk panas bumi. Produksi listrik EBT ini terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan peran nyata Indonesia Power dalam mendukung tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan dengan terus meningkatkan porsi energi baru terbarukan dalam produksi listrik Perusahaan.

In 2016, the NRE electricity generated by Indonesia Power is at 8,0845.23GWh or 18.74% out of all the Company's energy. The composition consists of 5,307.08 GWh or 12.30% for hydropower and 2,777.15 GWh or 6.44% for geothermal power. Each year, the NRE power generation continues to increase. This reflects Indonesia Power's concrete role in supporting the achievement of sustainable development goals by continuously increasing the new renewable energy portion in the Company's power generation activities.

AKADEMI AKSELERASI KOMPETENSI: MEMBANGUN SDM PEMBANGKITAN YANG UNGGUL

Competence Acceleration Academy: Building Excellent Power Generation Human Resources

"Dengan semangat, kerja keras dan komitmen untuk terus meningkatkan kompetensi dan kapabilitas SDM di bidang O&M pada akhirnya mendapatkan pengakuan PLN yaitu dengan diberikannya amanah baru bagi Indonesia Power sebagai *asset manager* sekaligus juga *asset operator* bagi sejumlah pembangkit PLN. Pengakuan kompetensi SDM di bidang O&M dibuktikan dengan perolehan penghargaan *Top 5 O&M Company* dalam ajang Indonesia *Best Electricity Award*."

"With the passion, hard work, and commitment to improve the human resources' competence and capability in the O&M field, PLN mandates Indonesia Power to be the asset manager as well as the asset operator in numerous PLN Power Plant, as a form of recognition from PLN. Human Resources Competence recognition in O&M field is proven by obtaining the award of Top 5 O&M Company in the event of Indonesia Best Electricity Award."

Program 35 GW yang dicanangkan Pemerintah serta perubahan peran dan tugas Indonesia Power menjadi *asset manager* khususnya untuk proyek FTP-1, menuntut kesiapan SDM Indonesia Power agar mampu menghadapi tantangan industri pembangkitan dan kelistrikan saat ini dan masa mendatang. Sejak berdirinya pembangkit-pembangkit FTP-1, Indonesia Power dipercaya PLN sebagai *asset* operator untuk mengelola sejumlah pembangkit FTP-1 dan di bawah pengelolaannya, pembangkit-pembangkit ini pun menunjukkan kinerja yang baik dan andal.

35 GW Program proposed by the Government, as well as the role and duties changes of Indonesia Power to become the asset manager, specifically for FTP-1 Project, require the readiness of Indonesia Power's readiness in order to face the challenge in the power generation and electricity industry now and in the future. Since the establishment of power plants in FTP-1, PLN appointed Indonesia Power as the asset operator to manage some power plants in FTP -1, and under the management of IP, these power plants show good and reliable performance.

ROADMAP: AKADEMI AKSLERASI KOMPETENSI O&M | O&M COMPETENCE ACCELERATION ACADEMY

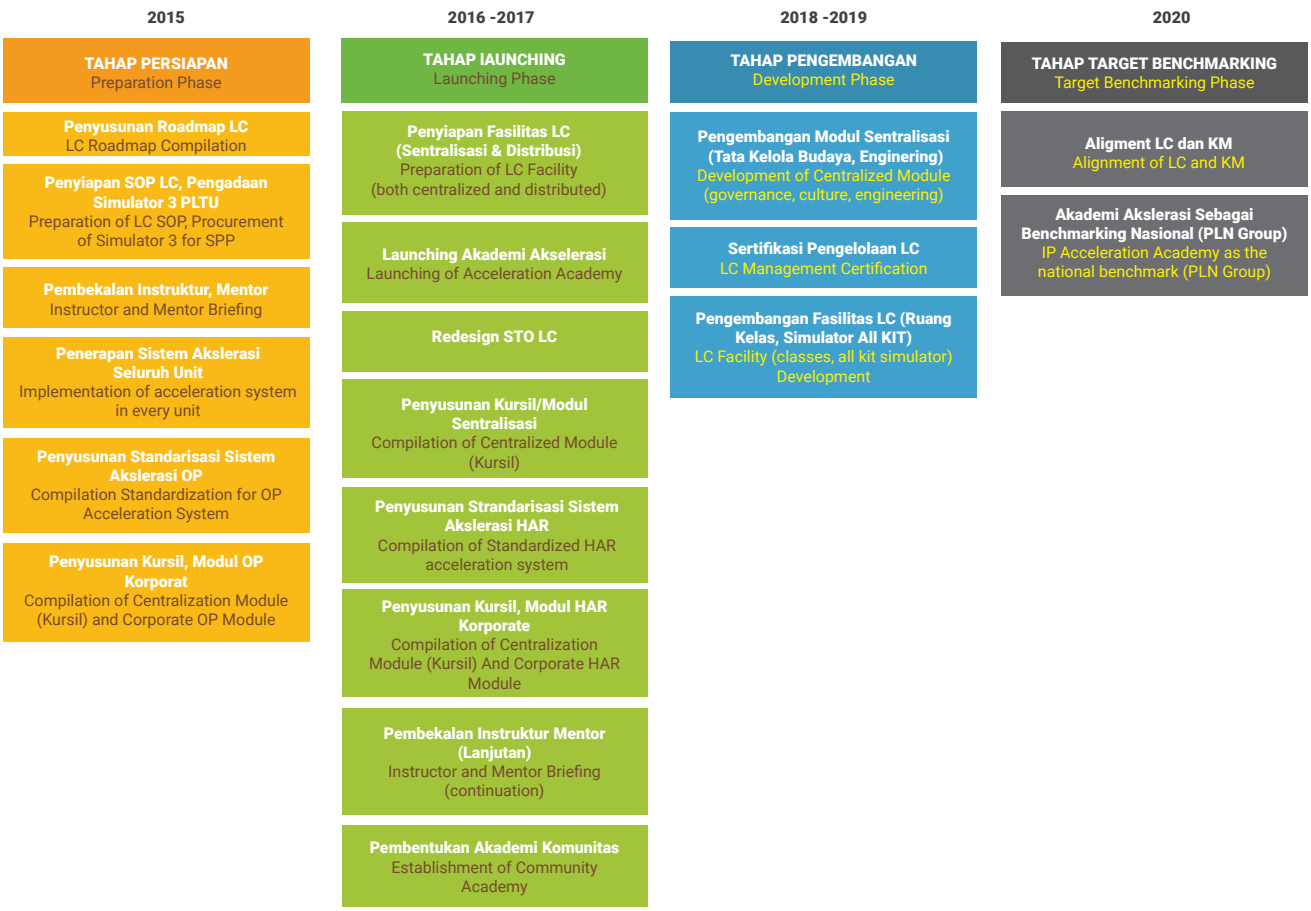

Untuk itulah, percepatan kompetensi SDM terutama di bidang operasional yang berada di garda terdepan dalam industri pembangkitan menjadi kebutuhan sekaligus tantangan yang dihadapi. Oleh karena itu sejak tahun 2015 dibentuklah Akademi Akselerasi Kompetensi sebagai solusinya. Tak seperti akademi pada umumnya, waktu pembelajaran pada Akademi Akselerasi ini dilaksanakan setiap waktu, setiap hari, secara terus menerus, hingga suatu kompetensi dapat terpenuhi sesuai dengan target waktu pembelajaran yang ditentukan.

Therefore, Human Resources competence acceleration, especially in the operational field in the as the forefront of power generation industry, becomes a necessity as well as challenges to be faced. Hence, since2015, Competence Acceleration Academy is established as the solution. Unlike general academy, the learning period in Acceleration Academy is conducted every time, every year, continuously, until specific competence is achieved in line with the predetermined target for the learning time.

INDONESIA POWER BUDAYAKAN INOVASI: CAPAI KEANDALAN, EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PEMBANGKIT

Indonesia Power Cultivates Innovation: Achieve the Reliability, Effectivity, and Efficiency of Power Plants

"Indonesia Power fokus dalam membangun budaya kreatif dan inovatif dalam rangka meningkatkan kemandirian teknologi yang dapat diaplikasikan secara nyata pada bidang ketenagalistrikan Indonesia"

"Indonesia Power focuses on building a culture that is creative and innovative, to improve technological independence that can be applied in Indonesia electricity sector"

Sebagai salah satu perusahaan pembangkit di tanah air, Indonesia Power memandang inovasi sebagai salah satu prioritas dalam upaya meningkatkan keandalan pembangkit yang dimiliki dan dikelolanya. Melalui inovasi peningkatan mutu, efektivitas, dan efisiensi bagi peralatan maupun tata kelola bisnis pembangkitan dapat terus ditingkatkan. Sebanyak 90 makalah karya inovasi terkumpul dari seluruh unit Indonesia Power dan 15 karya terpilih sebagai "*Best of The Best*" untuk 3 kategori, yaitu Pembangkitan, *Technical Supporting,* dan *Non-Technical Supporting.*

As one of the power generation company in the country, Indonesia Power sees innovation as one of the priorities in the effort to improve the reliability of the power plants owned and managed. Power plants' equipment and business governance are continuously improved through the innovation to improve quality, effectivity, and efficiency. A total of 90 papers on innovation is collected from all Indonesia Power's units, and 15 papers are chosen as "Best of The Best" in 3 categories, i.e. Power Generation, Technical Supporting, and Non-Technical Supporting.

INPOWER-CARE: MENDORONG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SEKITAR

INPOWER-CARE: Promoting the Empowerment of the Surrounding Community

"Pemberdayaan masyarakat sekitar diarahkan untuk pembangunan manusia Indonesia agar lebih berdaya, berkarakter dan berbudaya. Untuk itulah, Indonesia Power hadir melaksanakan perannya sebagai *good corporate citizen* sehingga mendorong terciptanya kesinambungan usaha dalam jangka panjang."

"The surrounding community empowerment is directed to develop Indonesia's human to be more capable, have more character, and cultured. Therefore, Indonesia Power exists to carry out its role as good corporate citizen to promote the long-term creation of business continuity."

Program InPower-Care

- Pengembangan Ekonomi Masyarakat Pesisir
- Pengembangan Ekonomi Masyarakat Pedesaan
- Program Pengembangan Komunitas terkait Energi Alternatif
- *Self-Powering Community*
- Sehat Bersama Indonesia Power
- CSR Pendidikan
- *Powering Indonesia's Heritage*
- Indonesia Power *Life Skills*
- Pengembangan Ekonomi Masyarakat Miskin di Kota
- Program Donasi

Program InPower-Care

- Economic Development for Coastal Communities
- Economic Development for Rural Communities
- Community Development Program related to Alternative Energy
- Self-Powering Community
- Healthy with Indonesia Power
- Education CSR
- Powering Indonesia's Heritage
- Indonesia Power Life Skills
- Economic Development of the Urban Poor Community
- Donation Program

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING
Financial Performance Highlights

IKHTISAR KEUANGAN
Financial Performance

POSISI KEUANGAN	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Jumlah Aset	**58.805.467**	**56.235.865**	**60.875.757**	**55.543.679**	**53.722.889**	**52.338.415**
Aset Tidak Lancar	39.959.358	38.351.841	36.781.798	36.103.941	35.017.461	32.999.750
Aset Lancar	18.149.109	17.884.024	24.093.959	19.439.738	18.705.428	19.338.665
Jumlah Liabilitas	**11.630.725**	**11.309.471**	**16.885.976**	**11.160.875**	**9.443.417**	**7.936.548**
Liabilitas Jangka Panjang	5.036.980	4.818.025	4.752.621	4.167.521	3.956.819	3.779.738
Liabilitas Jangka Pendek	6.593.744	6.491.446	12.133.355	6.993.354	5.486.598	4.156.810
Jumlah Ekuitas	**47.106.795**	**44.855.329**	**43.916.318**	**44.301.534**	**44.177.379**	**44.295.763**

	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Modal Kerja Bersih	10.880.679	11.392.578	11.960.604	12.446.384	13.218.830	15.181.855
Investasi pada Entitas Asosiasi (Entitas Lain)	16.094	13.414	7.499	42.272	42.381	1.152

LABA RUGI	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Pendapatan Usaha	21.937.529	28.410.435	28.412.898	42.475.291	33.499.823	34.511.234
Beban Usaha	18.024.408	24.821.081	25.712.671	41.447.663	31.918.610	33.018.675
Laba Usaha	**3.913.121**	**3.589.354**	**2.700.227**	**1.027.628**	**1.581.213**	**1.492.559**
Penghasilan (Beban) Lain-lain	**(240.533)**	**(334.453)**	**(871.582)**	**12.392**	**(48.085)**	**345**
Laba Sebelum Pajak	**3.672.588**	**3.254.901**	**1.828.645**	**1.040.020**	**1.533.128**	**1.492.904**
Beban Pajak	**(1.170.393)**	**(1.098.686)**	**(825.635)**	**151.202**	**(578.908)**	**(433.235)**
Laba Bersih	**2.502.195**	**2.156.215**	**1.003.010**	**1.191.222**	**954.220**	**1.059.669**
diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk	2.497.064	2.151.821	997.629	1.183.326	940.839	1.051.397
diatribusikan kepada Kepentingan Non-Pengendali	5.131	4.394	5.381	7.896	13.381	8.272
Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan setelah pajak	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Total Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan	**2.502.195**	**2.156.215**	**1.003.010**	**1.191.222**	**954.220**	**1.059.669**
diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk	-	-	-	-	-	-
diatribusikan kepada Kepentingan Non-Pengendali	-	-	-	-	-	-
Laba Per Saham (Rp penuh)	**480**	**414**	**192**	**228**	**181**	**202**

(Rp juta)
(Rp million)

2011	2012	2013	2014	2015*	2016	FINANCIAL POSITION
53.924.650	**53.557.380**	**53.480.492**	**53.248.058**	**226.720.248**	**220.888.024**	**Asset**
32.001.327	29.643.591	27.886.878	27.491.959	198.594.427	194.855.586	Non-Current Asset
21.923.323	23.913.789	25.593.614	25.756.099	28.125.821	26.032.438	Current Asset
9.313.375	**8.743.489**	**8.633.813**	**8.598.429**	**11.963.977**	**7.665.482**	**Liabilities**
4.262.309	4.483.093	4.743.253	5.353.506	2.757.598	3.111.035	Long-Term Liabilities
5.051.066	4.483.093	3.890.560	3.244.923	9.206.379	4.554.447	Short-Term Liabilities
44.611.275	**44.813.891**	**44.846.679**	**44.649.629**	**214.756.271**	**213.222.542**	**Equity**

(Rp juta)
(Rp million)

2011	2012	2013	2014	2015*	2016	
16.872.257	19.653.393	21.703.054	22.434.320	25.624.954	21.477.991	Net working capital
1.152	54.256	168.850	198.540	203.696	267.047	Investment on other entities

(Rp juta)
(Rp million)

2011	2012	2013	2014	2015*	2016	PROFIT/LOSS
43.416.117	32.472.481	33.531.493	35.723.617	32.020.186	36.705.954	Revenues
41.704.149	30.621.358	31.514.317	33.527.047	29.895.661	32.610.030	Operating Expenses
1.711.968	**1.851.123**	**2.017.176**	**2.196.570**	**2.124.525**	**4.095.924**	**Operating Income**
(38.930)	**34.763**	**(129.950)**	**73.881**	**(34.982)**	**(171)**	**Other Income (Expenses)**
1.673.038	**1.885.886**	**1.887.226**	**2.270.451**	**2.089.543**	**4.095.753**	**Profit Before Tax**
(515.405)	**(619.142)**	**(644.756)**	**(623.219)**	**2.582.979**	**(1.209.049)**	**Tax Expense**
1.157.633	**1.266.744**	**1.242.470**	**1.647.232**	**4.672.522**	**2.886.704**	**Net income**
1.154.187	1.255.981	1.240.108	1.642.422	4.668.403	2.885.017	attributable to Owners of the parent
3.446	10.763	2.362	4.810	4.119	1.687	attributable to Non-controlling interests
-	**-**	**-**	**(169.707)**	**167.014.505**	**(221.710)**	**Comprehensive income for the year after tax**
1.157.633	**1.266.744**	**1.242.470**	**1.477.525**	**171.687.027**	**2.664.994**	**Total comprehensive income for the year**
-	-	-	1.472.715	171.682.908	2.663.307	attributable to Owners of the parent
-	-	-	4.810	4.119	1.687	attributable to Non-controlling interests
223	**241**	**238**	**315**	**895**	**553**	**Earnings per Share (in Rupiah full amount)**

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING
Financial Performance Highlights

RASIO KEUANGAN	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Rasio Likuiditas						
Rasio Kas (%)	2,68	6,12	5,08	5,74	11,85	17,27
Rasio Cepat (%)	226,83	246,71	180,62	233,64	289,74	404,59
Rasio Lancar (%)	249,70	275,50	198,58	277,97	352,73	465,23
Rasio Profitabilitas						
Margin Operasi (%)	17,84	12,63	9,50	2,42	4,72	4,32
Margin Laba Bersih (%)	11,38	7,57	3,51	2,79	2,81	3,05
Tingkat Pengembalian Modal (%)	5,60	5,04	2,32	2,74	2,18	3,43
Tingkat Pengembalian Investasi (%)	11,84	10,98	6,56	6,40	7,92	7,88
Rasio Solvabilitas						
Rasio Utang (%)	19,89	20,24	27,86	20,24	17,77	15,37
Rasio Utang Terhadap Modal (%)	24,69	25,21	38,45	25,19	21,38	17,92
Rasio Aktivitas						
Perputaran Persediaan (hari)	22,00	21,00	26,00	26,00	34,00	24,00
Periode Penagihan (hari)	271,00	201,00	274,00	137,00	161,00	170,00
Perputaran Aset (%)	39,33	51,99	46,96	77,54	62,81	66,49
Rasio Modal Terhadap Aset (%)	80,11	79,76	72,14	79,76	82,23	84,63

* Penyampaian kembali angka keuangan tahun 2015 sesuai dengan ISAK 8
* Restatement of financial figures in 2015 is in line with ISFAS 8

IKHTISAR OPERASIONAL	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Equivalent Availability Factor/EAF (%)	86,12	86,04	86,09	85,11	86,84	88,43
Equivalent Forced Outage Rate/EFOR (%)	3,67	3,37	10,65	9,59	4,98	4,22
Sudden Outage Frequency/SdOF (kali)	-	-	-	-	8,40	2,63
Efesiensi Thermal Netto (%)	34,83	34,65	33,05	33,00	32,99	33,03
Jumlah Daya Mampu Netto (MW)	8.365.00	8.281.00	8.952.00	8.212.00	8.249.00	8.074.00
Tingkat Kesehatan Perusahaan (%)	74,80	81,25	66,05	77,95	90,75	91,92
Jumlah Pegawai (orang)	3.796	3.678	3.623	3.509	3.245	3.375
Skor Assessement GCG (%)	-	-	-	-	56,97	78,84

IKHTISAR SAHAM
Share Overview

Sampai dengan akhir tahun 2016, Indonesia Power tidak melakukan perdagangan saham sehingga tidak ada informasi terkait dengan jumlah saham yang beredar, kapitalisasi pasar, harga saham tertinggi, harga saham terendah dan harga saham penutupan serta volume saham yang diperdagangkan.

Until the end of 2016, Indonesia Power did not do any share trading, therefore there is no information related to the published shares, market capitalization, highest share prices, lowest share prices, and closing share prices, as well as share volume traded.

2011	2012	2013	2014	2015*	2016	FINANCIAL RATIOS
						Liquidity Ratio
9,32	19,25	25,23	13,96	9,85	32,09	Cash Ratio (%)
378,76	484,57	585,84	696,07	268,31	455,60	Quick Ratio (%)
437,34	561,30	712,66	794,87	308,69	554,16	Current Ratio (%)
						Profitability Ratio
3,87	5,70	6,02	6,15	6,53	11,16	Operating Margin (%)
2,73	3,90	3,71	4,61	14,60	7,86	Net Income Margin (%)
2,73	2,89	2,84	3,74	2,22	1,37	Return on Equity (ROE) (%)
8,30	8,74	8,77	9,62	2,13	4,05	Return on Investment (ROI) (%)
						Solvability Ratio
16,54	16,54	16,21	16,15	5,13	3,47	Debt to Total Assets Ratio (%)
20,47	20,13	19,80	19,26	5,40	3,59	Debt to Total Equity Ratio (%)
						Activity Ratio
15,00	33,00	20,00	21,00	25,00	19,52	Inventory Turn Over (ITO) (days)
170,00	155,00	223,00	237,00	269,00	197,88	Collection Period (CP) (days)
66,49	81,17	60,63	63,80	14,16	16,68	Total Assets Turn Over (TATO) (%)
84,63	83,26	83,67	83,86	92,81	96,53	Total Equity to Total Assets (TETA) (%)

2011	2012	2013	2014	2015	2016	OPERATIONAL PERFORMANCE
91,09	92,33	93,04	89,88	90,85	85,63	Equivalent Availability Factor/EAF (%)
2,99	2,37	1,66	7,16	3,16	7,23	Equivalent Forced Outage Rate/EFOR (%)
2,84	1,70	1,89	1,83	2,00	2,89	Sudden Outage Frequency/SdOF (times)
33,72	33,93	33,81	33,97	33,76	34,27	Net Thermal Efficiency (%)
8.193,00	7.981,62	8.048,00	8.167,00	8.230,00	8.155,06	Total of Net Maximum Capacity (MW)
93,53	99,11	99,64	91,67	95,25	95,53	Corporate Soundness Level
3.659	3.498	3.463	3.553	3.639	3.725	Total Employee
91,99	83,66	92,04	90,06	91,19	91,99	GCG Assessment Score(%)

IKHTISAR OBLIGASI
Bonds Overview

Sampai dengan akhir tahun 2016, Indonesia Power tidak menerbitkan obligasi, sukuk dan obligasi konversi sehingga tidak ada informasi terkait dengan jumlah obligasi/sukuk/obligasi konversi yang beredar, tingkat bunga/imbalan, tanggal jatuh tempo dan peringkat obligasi/sukuk.

Until the end of 2016, Indonesia Power did not publish bonds, sukuk, and convertible bonds, therefore there is no information related to the total of bonds/sukuk/convertible bonds published, interest rate/yield, maturity date, and ratings of bonds/sukuk.

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING
Financial Performance Highlights

Jumlah Aset (Rp juta)
Asset (Rp million)

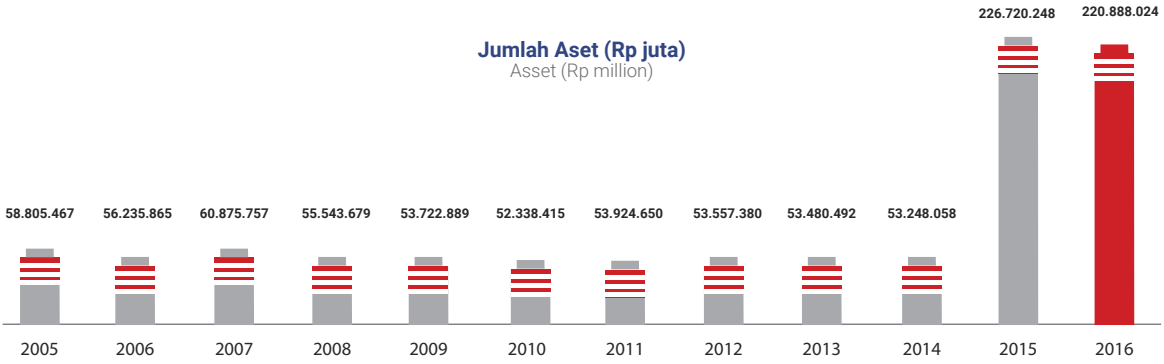

Aset Tidak Lancar (Rp juta)
Non-Current Asset (Rp million)

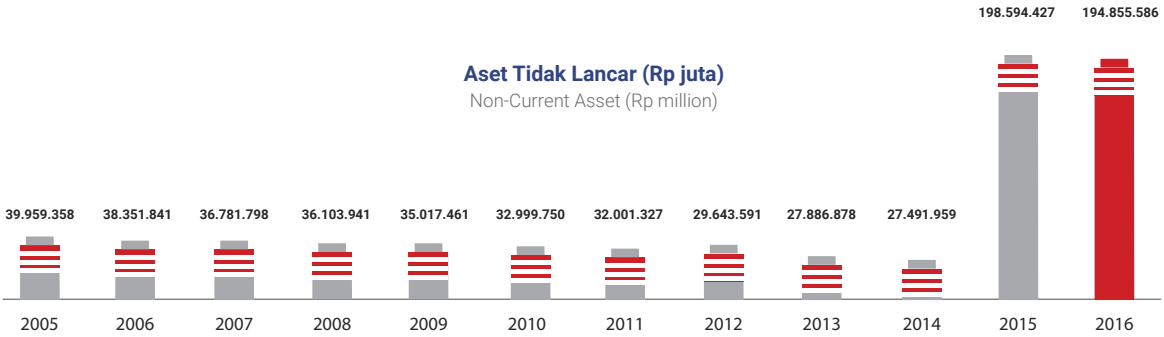

Aset Lancar (Rp juta)
Current Asset (Rp million)

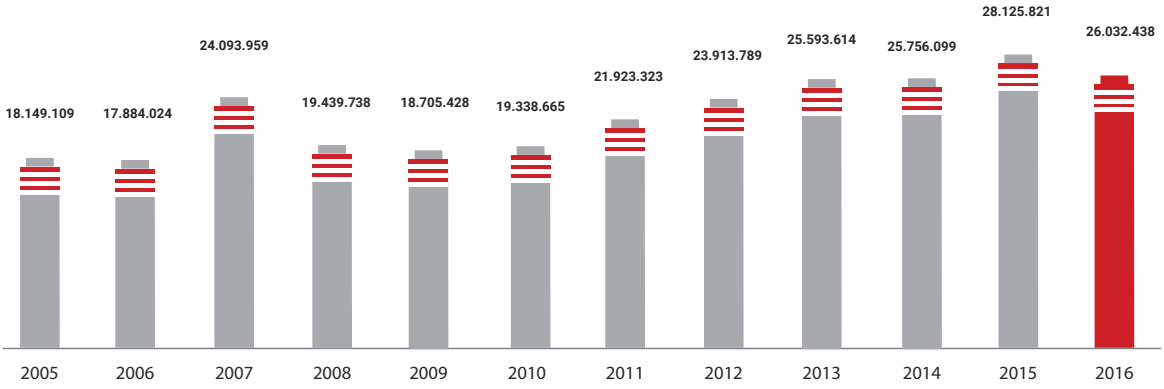

Jumlah Liabilitas (Rp juta)
Liabilities (Rp million)

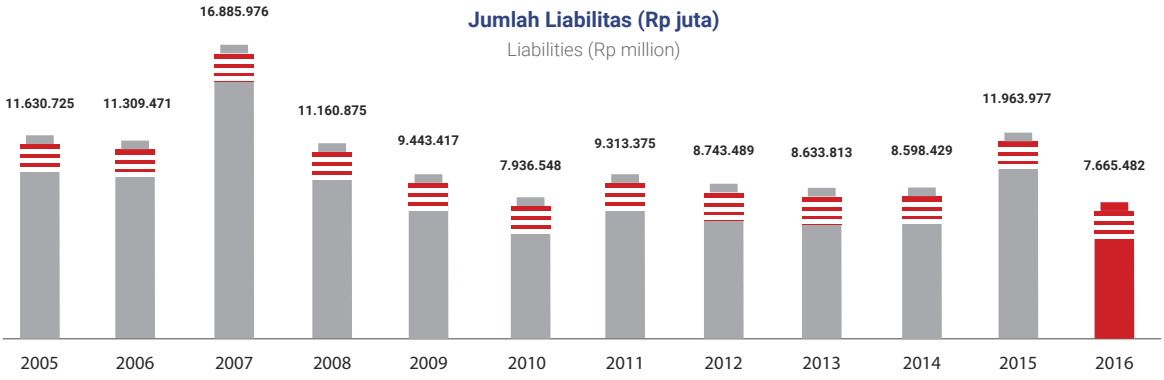

Liabilitas Jangka Panjang (Rp juta)
Long-Term Liabilities (Rp million)

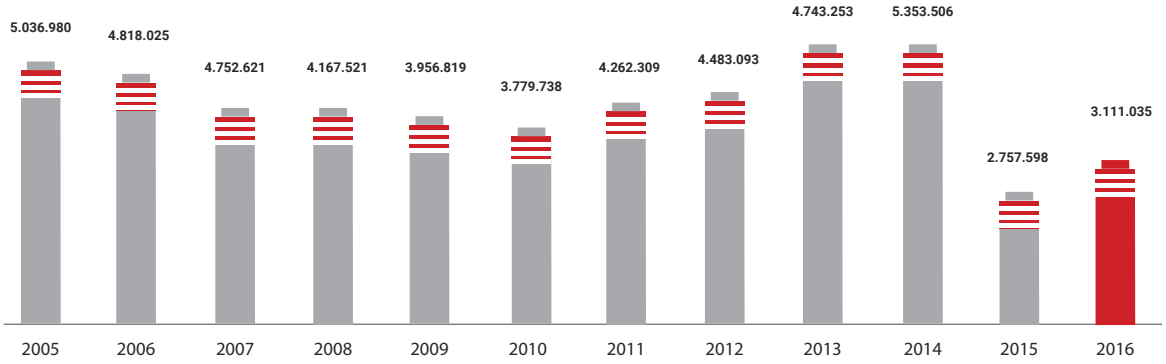

Liabilitas Jangka Pendek (Rp juta)
Short-Term Liabilities (Rp million)

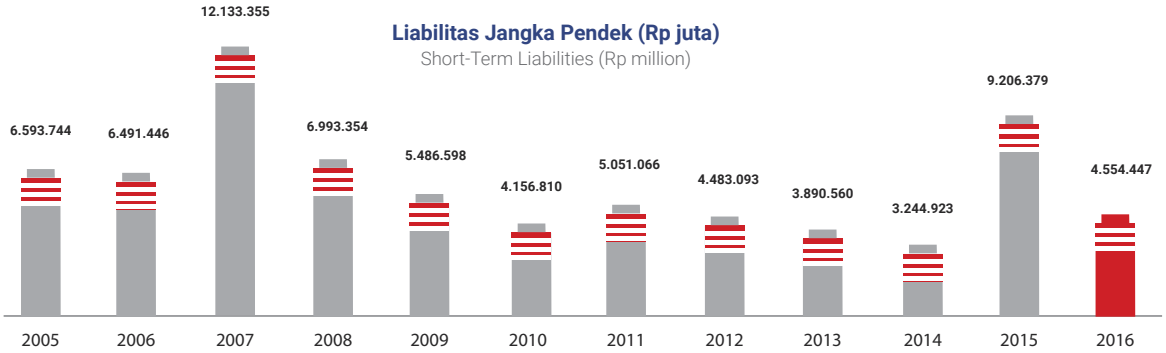

Jumlah Ekuitas (Rp juta)
Equity (Rp million)

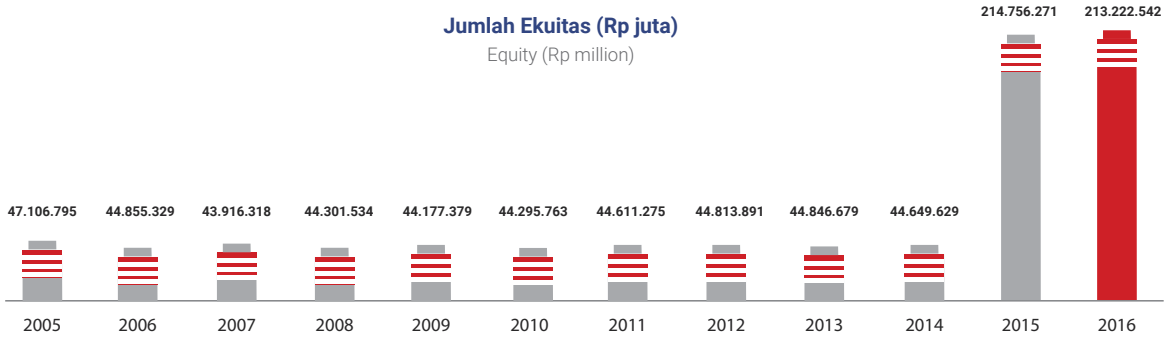

Modal Kerja Bersih (Rp juta)
Net working capital (Rp million)

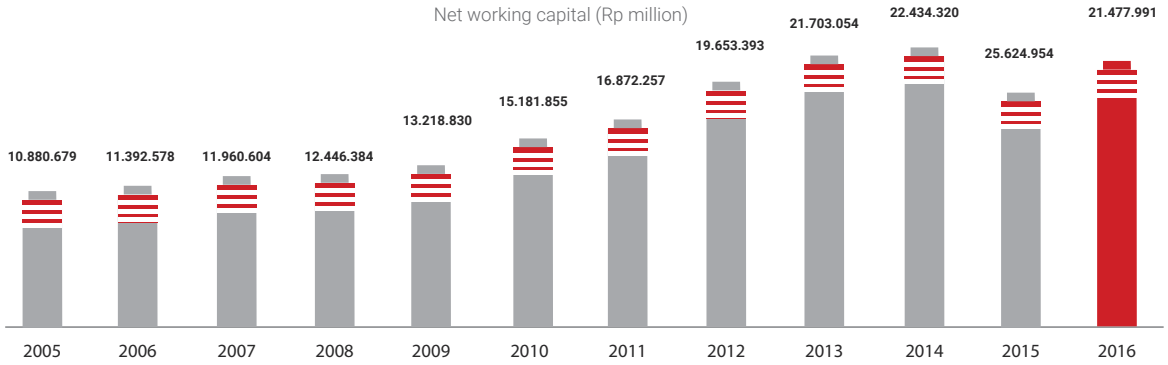

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING
Financial Performance Highlights

Pendapatan Usaha (Rp juta)
Revenues (Rp million)

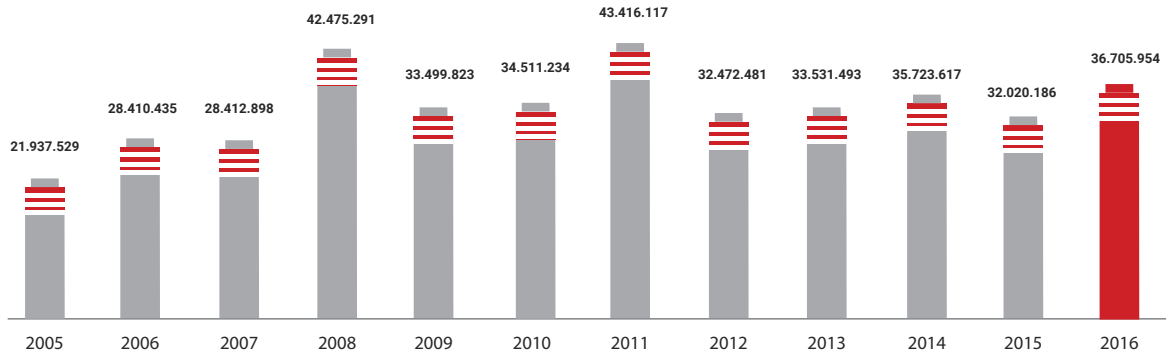

Beban Usaha (Rp juta)
Operating Expenses (Rp million)

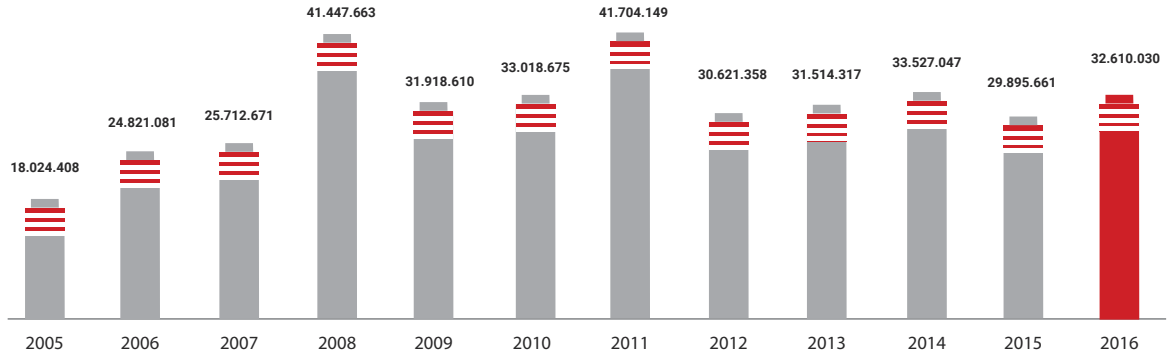

Laba Usaha (Rp juta)
Operating Income (Rp million)

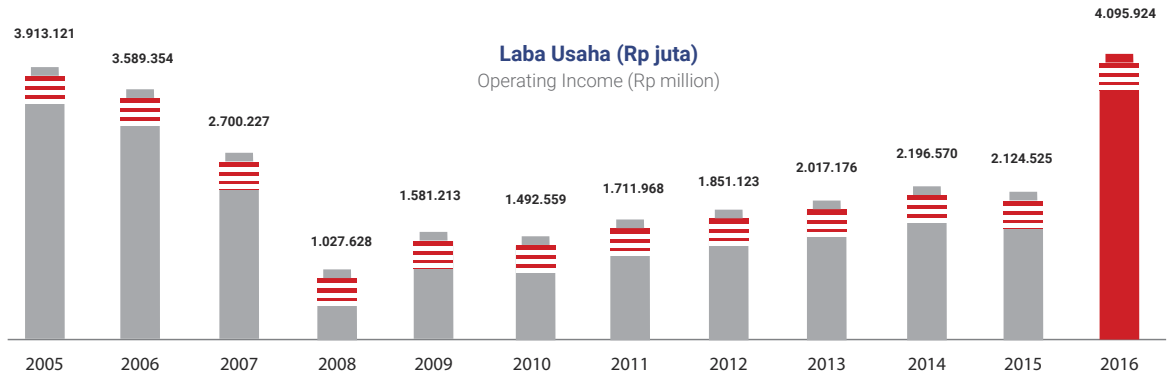

Beban Pajak (Rp juta)

Tax Expense (Rp million)

Laba Bersih (Rp juta)

Net Income (Rp million)

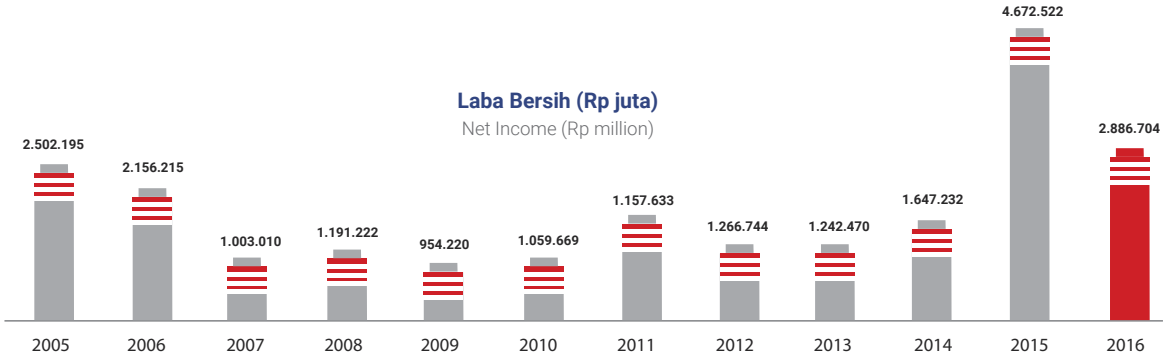

Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan Setelah Pajak (Rp juta)

Comprehensive income for the year after tax (Rp million)

Laba Per Saham (Rp Penuh)

Earnings per Share (in Rupiah full amount)

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING
Financial Performance Highlights

Rasio Kas (%)
Cash Ratio (%)

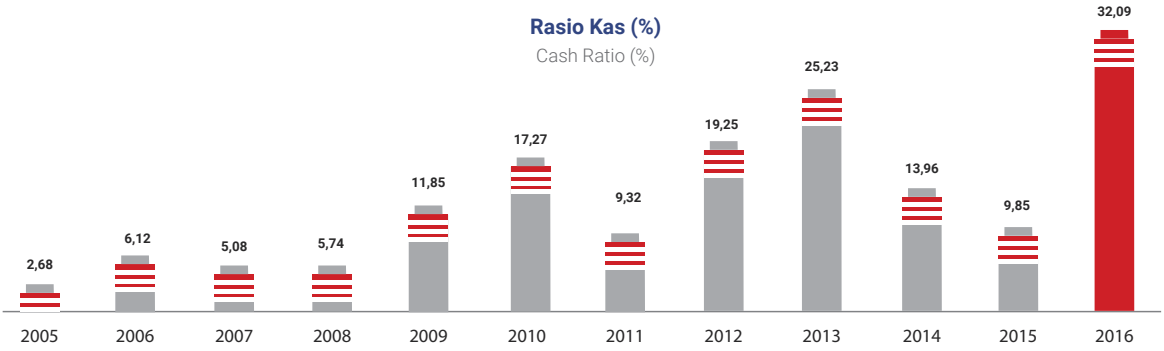

Rasio Cepat (%)
Quick Ratio (%)

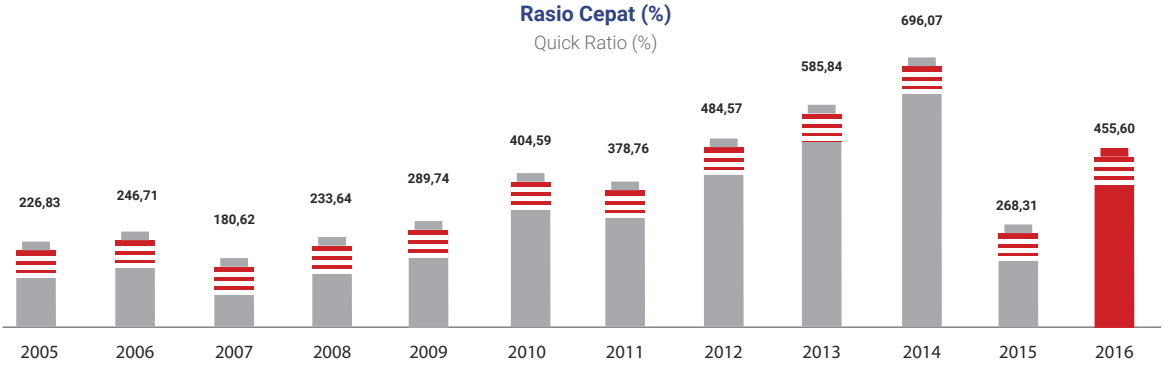

Rasio Lancar (%)
Current Ratio (%)

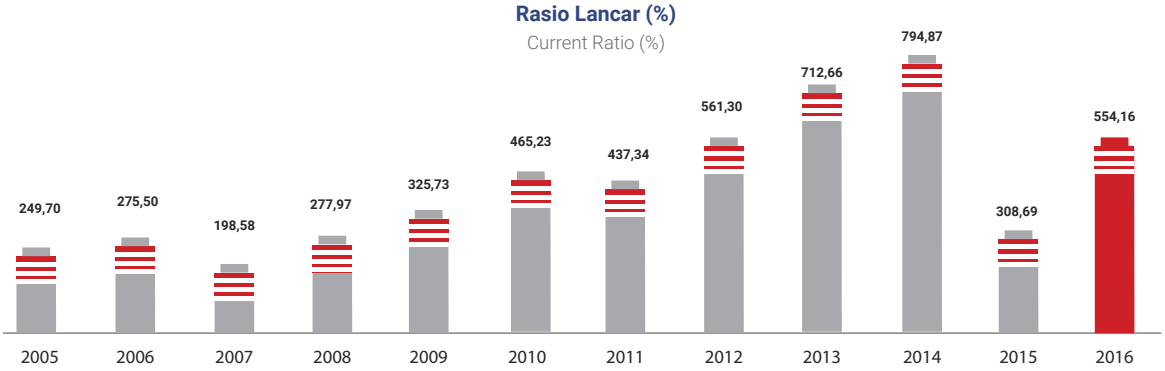

Margin Operasi (%)
Operating Margin (%)

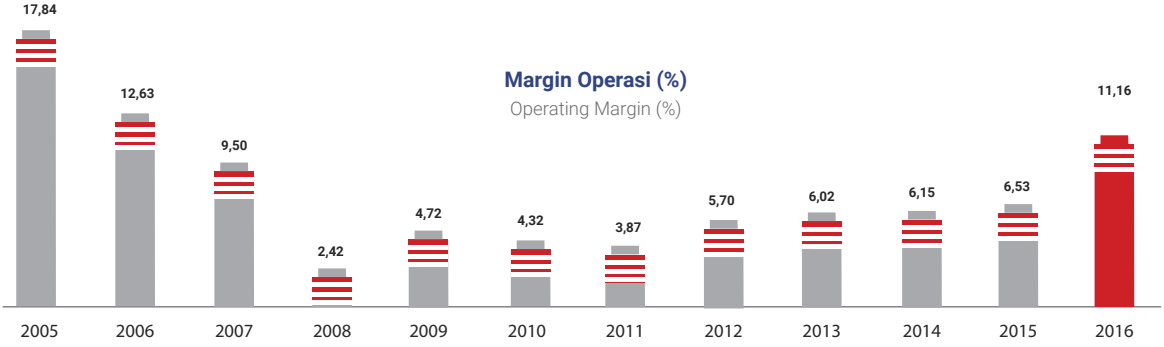

Margin Laba Bersih (%)

Net Income Margin (%)

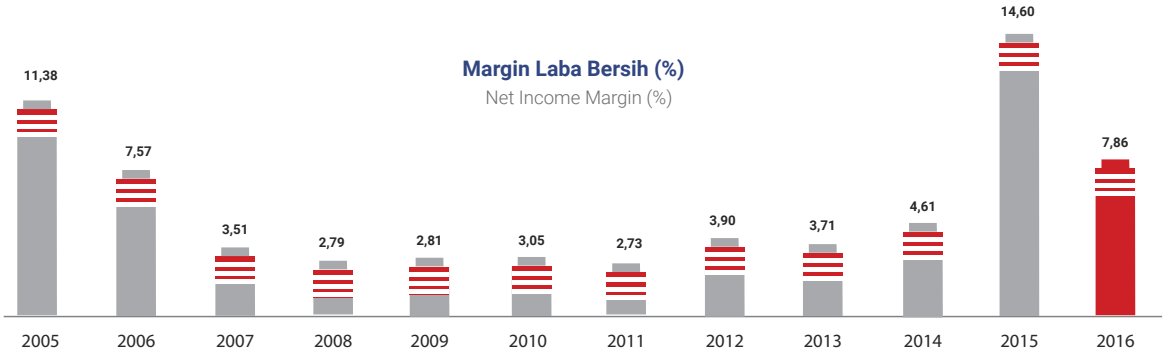

Tingkat Pengembalian Modal (%)

Return on Equity (ROE) (%)

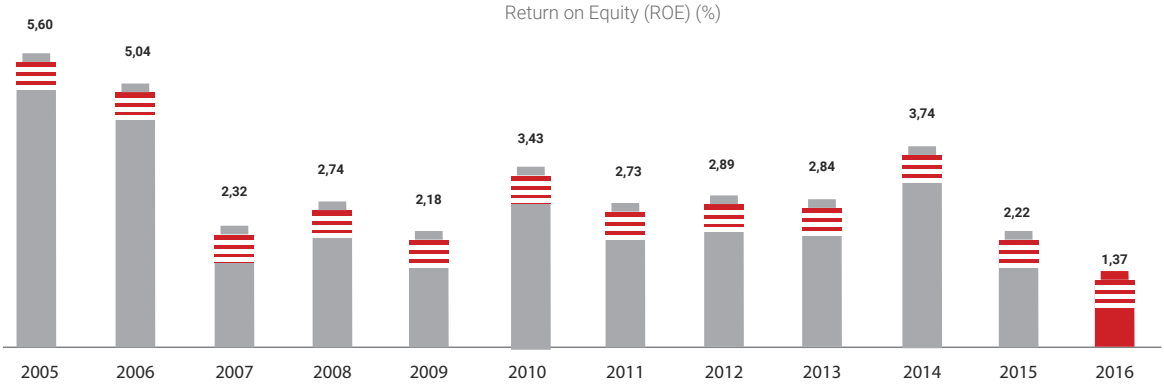

Tingkat Pengembalian Investasi (%)

Return on Investment (ROI) (%)

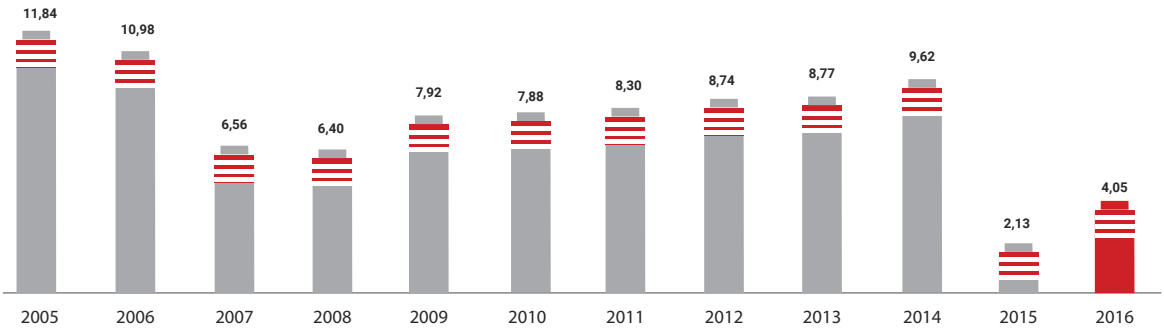

Rasio Utang (%)

Debt to Total Assets Ratio (%)

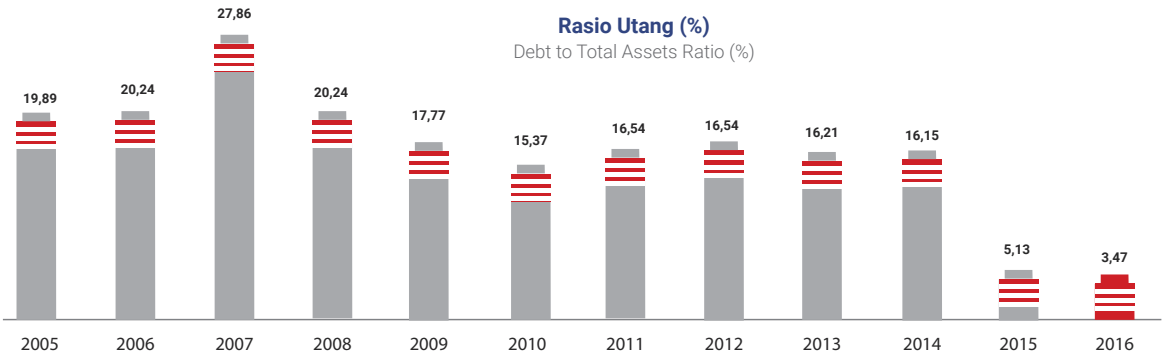

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING
Financial Performance Highlights

Rasio Utang Terhadap Modal (%)
Debt to Total Equity Ratio (%)

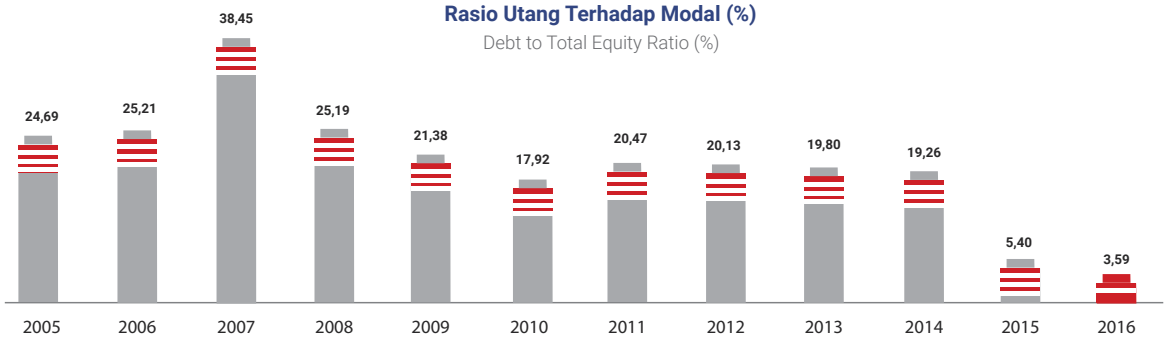

Perputaran Persediaan (hari)
Inventory Turn Over (ITO) (days)

Periode Penagihan (hari)
Collection Period (CP) (days)

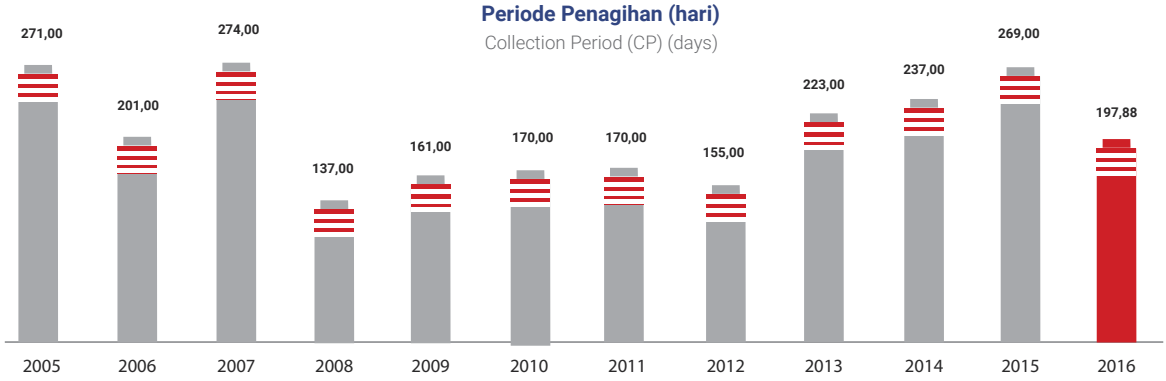

Perputaran Aset (%)
Total Assets Turn Over (TATO) (%)

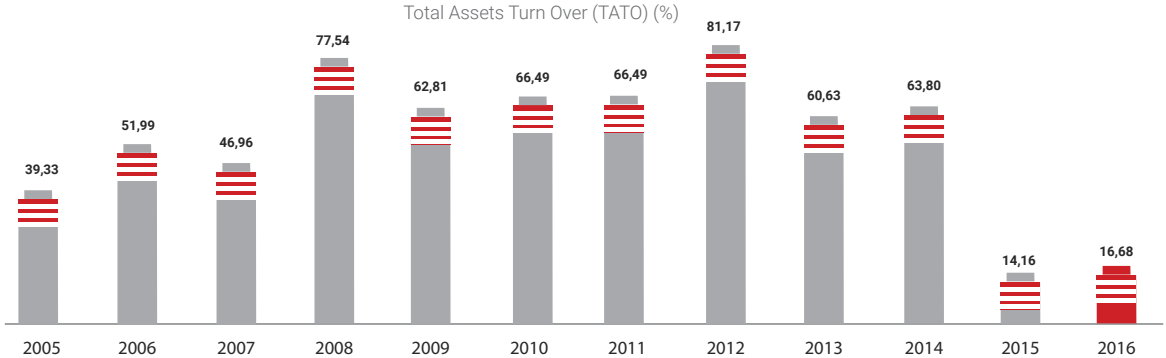

Rasio Modal Terhadap Aset (%)

Total Equity to Total Assets (TETA) (%)

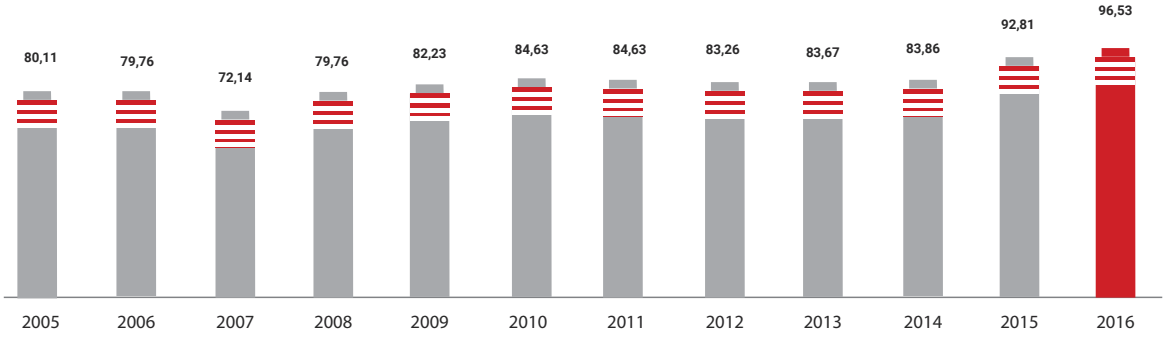

Equivalent Availability Factor/EAF (%)

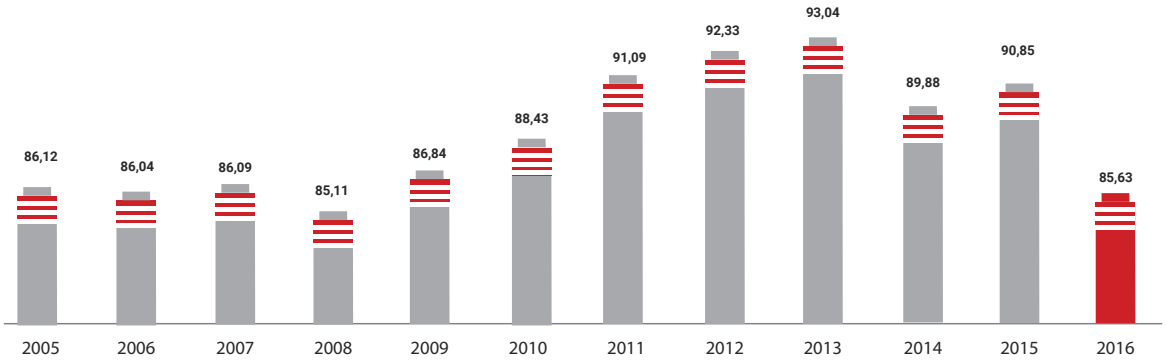

Equivalent Forced Outage Rate/EFOR (%)

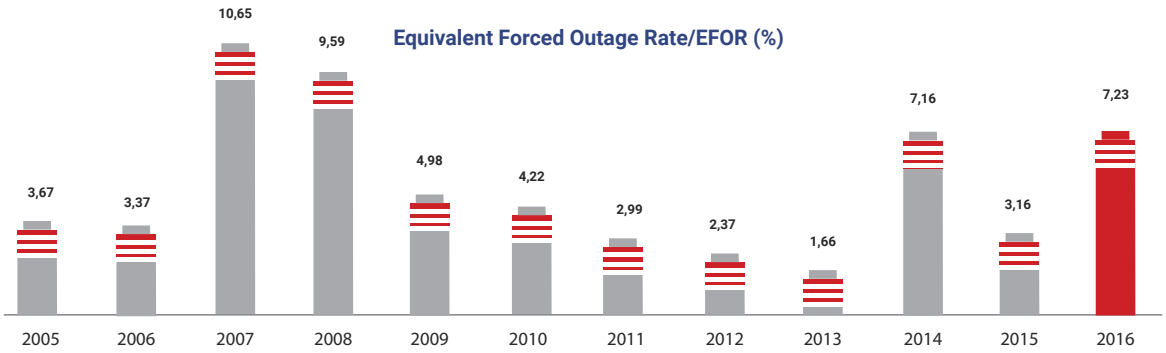

Sudden Outage Frequency/SdOF (Kali/times)

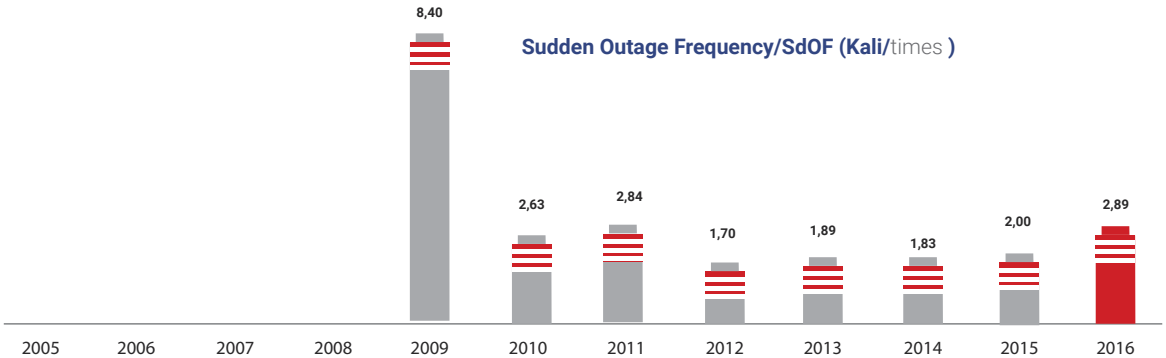

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING
Financial Performance Highlights

Efisiensi Thermal Netto (%)
Net Thermal Efficiency (%)

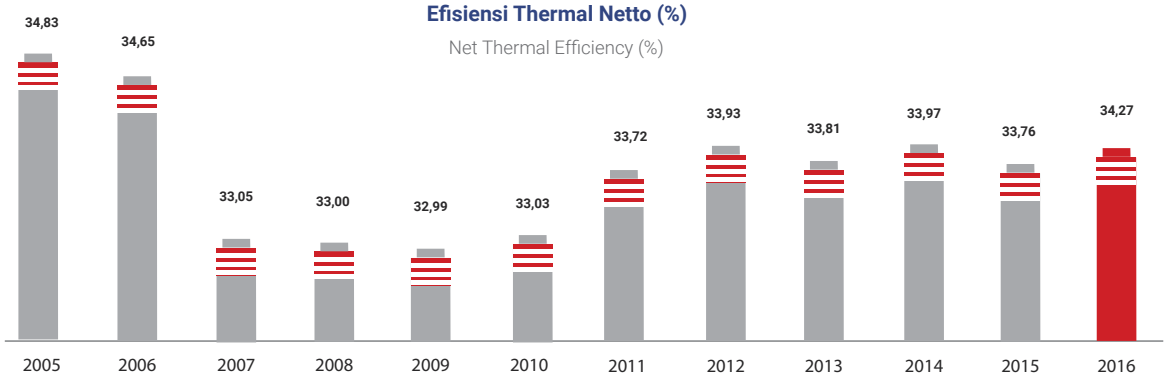

Jumlah Daya Mampu Netto (MW)
Total of Net Maximum Capacity (MW)

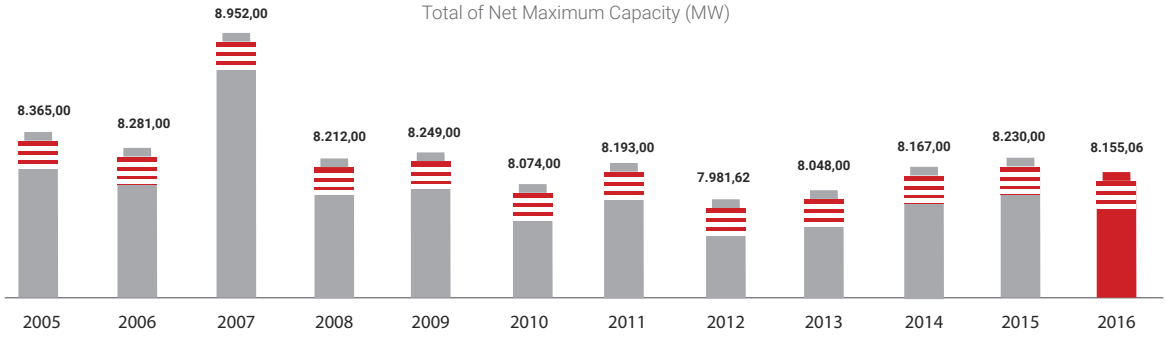

Tingkat Kesehatan Perusahaan
Corporate Soundness Level

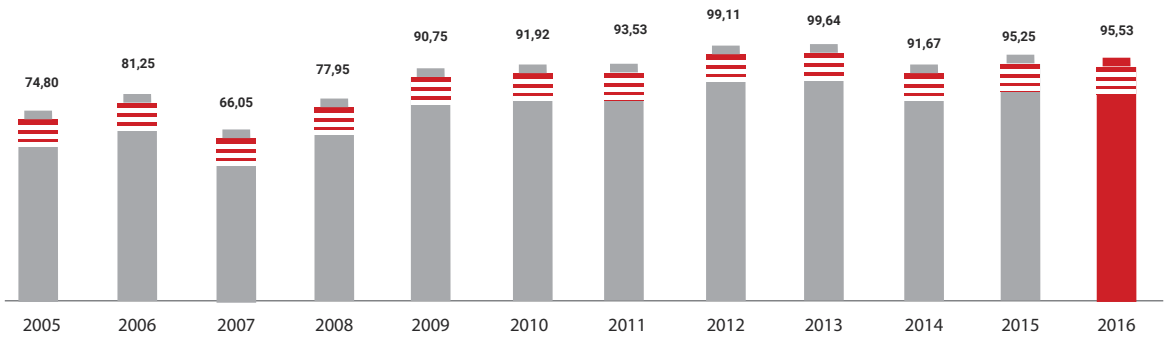

Jumlah Pegawai

Total Employee

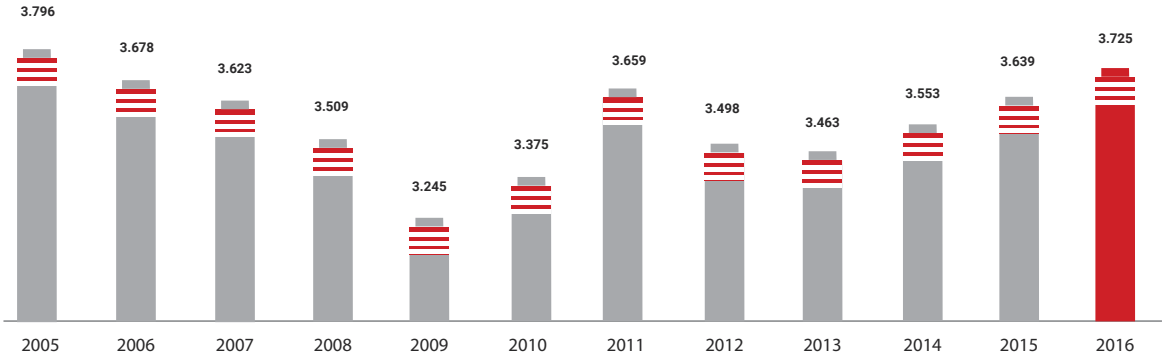

Skor Assessement GCG (%)

GCG Assessment Score(%)

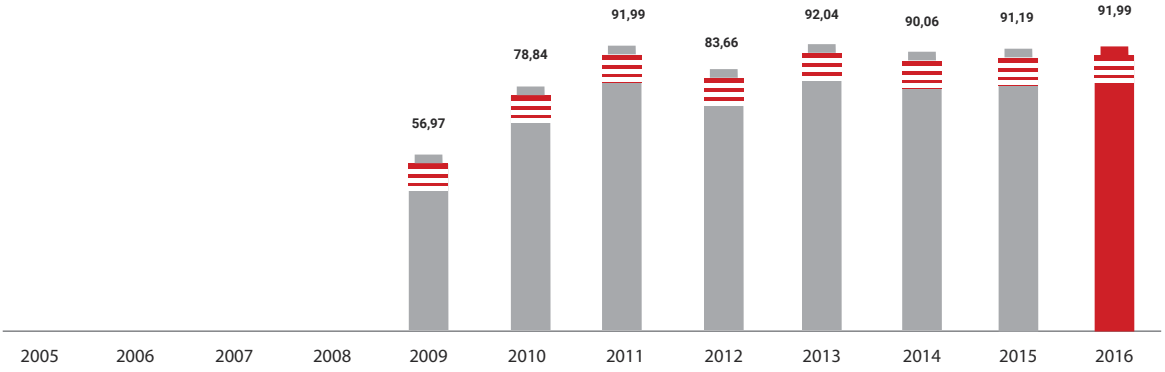

WHAT STAKEHOLDERS SAY ABOUT INDONESIA POWER

M. R. Karliansyah
Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan – PPKL KLHK

Directorate General of Pollution and Environmental Damage Control - PPKL KLHK

"Selama ini, Indonesia Power telah berkontribusi aktif dalam berbagai kegiatan lingkungan. Salah satunya pengembangan ekowisata di Srengseng Sawah. Selain memfasilitasi ekoriparian dengan sejumlah saung dan arboretum bambu, Indonesia Power turut aktif melakukan kegiatan penanaman pohon endemik di sekitar Ciliwung."

"So far, Indonesia Power has been contributing to various environmental activities. One of which is the ecotourism development in Srengseng Sawah. In addition to facilitation of ecoparian with saung and bamboo arboretum, Indonesia Power actively replants endemic trees around Ciliwung."

Dr. Anang Sudarna M.Sc., PhD
Kepala BPLHD Jawa Barat
Kepala BPLHD Jawa Barat

"Kontribusi positif Indonesia Power juga telah menyentuh Tataran Parahyangan. Bersama dengan BPLHD Jawa Barat, Indonesia Power berperan aktif dalam berbagai kegiatan pelestarian dan perbaikan lingkungan. Salah satunya, perbaikan lingkungan di Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum. Saya berharap, Indonesia Power dapat terus berkembang dan berperan aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan masyarakat, khususnya yang berada di sekitar pembangkit-pembangkitnya."

"Indonesia Power's positive contribution has also touched Tataran Parahyangan. In cooperation with West Java Environmental Agency, Indonesia Power actively participates in various conservation and environmental improvement activities. One of which, is by environmental improvement in Citarum Watershed (DAS). I hope, Indonesia Power keeps developing and participating in conserving environmental, especially those around the power plants."

PERISTIWA PENTING TAHUN 2016

Significant Events in 2016

1 Januari 2016
January 1, 2016

Peningkatan peran Perusahaan dari yang sebelumnya sebagai *asset operator* menjadi *asset manager* pembangkit FTP-1 (UJP Labuan, UJP Suralaya 8, UJP Lontar, UJP Palabuhan Ratu, PLTGU Priok Blok 3 dan UJP Cilegon).

The Company's promotion stepped up the role of an asset operator into asset manager of FTP-1 Power Plants (Labuan GSU, Suralaya 8 GSU, Lontar GSU, Pelabuhan Ratu GSU, Priok Block 3 CCPP, and Cilegon GSU).

11 Februari 2016
February 11, 2016

Penandatangan Amandemen dan Perjanjian Jual Beli Panas Bumi PLTP Kamojang Unit 1, 2 dan 3 dengan PT Pertamina Geothermal Energy.

The signing of Amendment and Geothermal Steam Procurement Agreement, Kamojang Unit 1, 2, and 3 GPP with PT Pertamina Geothermal Energy.

24 Februari 2016
February 24, 2016

Penandatanganan kerjasama antara Indonesia Power dengan Taicang Harbour Golden Concord Electric Power Generation Ltd. dalam rangka pengembangan Proyek IPP untuk PLTU Kalbar 2 x 100 MW.

The signing of Cooperation Agreement between Indonesia Power with Taicang Harbour Golden Concord Electric Power Generation Ltd. In order to develop IPP Project for Kalbar SPP 2x100 MW.

10 Juni 2016
June 10, 2016

Pelaksanaan *groundbreaking* PLTU Lontar Unit 4 (1x315 MW).

Groundbreaking of Lontar unit 4 SPP (1x315 MW).

15 Agustus 2016
August 15, 2016

Penandatanganan kerjasama antara Indonesia Power dengan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) dalam Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

The signing of Cooperation Agreement between Indonesia Power and Assistant Attorney General for Civil and State Administrative Cases related to Civil and State Administrative Matters

23-25 September 2016
September 23-25, 2016

Sinergi Indonesia Power dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bersama Pramuka melalui kegiatan penanaman pohon dengan program bertajuk "Kawan Hijaunesia Power".

Synergy of Indonesia Power with Ministry of Environment and Forestry, with Scout Movement through replantation program called "Kawan Hijaunesia Power".

PERISTIWA PENTING TAHUN 2016
Significant Events in 2016

24 Maret 2016
March 24, 2016

Penandatanganan Kerjasama antara Indonesia Power, PT Pembangkitan Jawa Bali dengan Mitsubshi Hitachi Power Systems, Ltd Mitsubshi Corporation dalam rangka Pekerjaan Pemeliharaan dan Pengiriman Tenaga Kerja dan Pelatihan untuk Turbin Gas, Turbin Uap dan Boiler di Indonesia.

The signing of Cooperation Agreement between Indonesia Power, PT Pembangkitan Jawa Bali, and Mitsubishi Hitachi Power Systems, Ltd Mitsubishi Corporation, in the Maintenance Work and Manpower Training and Delivery for Gas Turbine, Steam Turbine, and Boiler in Indonesia.

8 April 2016
April 8, 2016

Kunjungan kerja Komisi C DPRD Kabupaten Pekalongan Bidang Pembangunan perihal koordinasi proyek perkembangan PLTMH di Kecamatan Kandangserang, Kabupaten Pekalongan.

Visit of DPRD Commission C Pekalongan Regency, Development Sector, related to MHPP project development in Kandangserang District, Pekalongan Regency.

30 Mei 2016
May 30, 2016

Peresmian PLTD Legon Bajak, Karimunjawa (2x2 MW).

Inauguration of Legon Bajak DPP, Karimunjawa (2x2 MW).

28 September 2016
September 28, 2016

Penandatanganan kerjasama dengan PT PAL Indonesia dalam rangka mendukung *Engineering* dan Pemeliharaan Pembangkit.

The signing of Cooperation Agreement with PT PAL Indonesia to support Engineering and Power Plant Maintenance.

3 Oktober 2016
October 3, 2016

Go live aplikasi ERP pada tanggal 3 Oktober 2016 untuk modul *Human Capital Managament* (HCM), modul *Financial* (FIN) dan modul *Supply Chain Management* (SCM).

ERP application Go Live on October 3, 2016, on modules: Human Capital Management (HCM), Financial (FIN), and Supply Chain Management (SCM).

2 Desember 2016
December 2, 2016

Penandatanganan kerjasama antara Indonesia Power dengan Perusahaan Umum Jasa Tirta I dalam pengelolaan sumber daya air.

The signing of Cooperation Agreement between Indonesia Power with Public Company Jasa Tirta I on water resources management.

PENGHARGAAN DAN SERTIFIKASI TAHUN 2016
Awards and Certification in 2016

Penghargaan

Beberapa penghargaan yang diperoleh Indonesia Power pada tahun 2016 adalah:

Awards

Awards received by Indonesia Power in 2016 are:

12 Maret 2016
March 12, 2016

Nama Penghargaan
Vision Award - Annual Report:
- *Platinum Award*
- *The 100 Annual Repots World Wide ranking at #27*
- *The 80 Annual Repots in the Asia-Pacific ranking at #7*
- *The 10 Indonesian Annual Repots of 2015*
- *Best Letter to Shareholder-Platinum-in the Asia Pacific Region*
- *Best Letter to Shareholder-Silver-world wide Vision Award - Sustainability Report: Gold Award*

Badan Pemberi Penghargaan
League of American Comunication Professional

Award
Vision Award - Annual Report:
- Platinum Award
- The 100 Annual Repots World Wide ranking at #27
- The 80 Annual Repots in the Asia-Pacific ranking at #7
- The 10 Indonesian Annual Repots of 2015
- Best Letter to Shareholder-Platinum-in the Asia Pacific Region
- Best Letter to Shareholder-Silver-world wide Vision Award - Sustainability Report: Gold Award

Appreciator
League of American Comunication Professional

30 Maret 2016
March 30, 2016

Nama Penghargaan
Indonesia Human Capital Award
2nd The Best Human Capital untuk kategori Anak perusahaan BUMN

Badan Pemberi Penghargaan
IPMI dan *Economic Review*

Award
Indonesia Human Capital Award
2nd Best Human Capital for the State Owned Enterprise Subsidiary Category

Appreciator
IPMI and Economic Review

18 Mei 2016
May 18, 2016

Nama Penghargaan
K3 Award
- *Zero Accident* 2015 untuk 11 Unit yaitu UP Suralaya, UPJP Priok, UPJP Kamojang, UP Semarang, UP Saguling, UP Perak Grati, UP Bali, UP Mrica, UJH, UJP Suralaya 8, UJP Labuan.
- Peduli Program Penanggulangan P2HIV – AIDS untuk UP Bali

Badan Pemberi Penghargaan
Kementrian Ketenagakerjaan Republik Indonesia

Award
OHS Award
- Zero Accident 2015 for 11 Units, i.e. Suralaya GU, Priok GGSU, Kamojang GGSU, Semarang GU, Saguling GU, Perak Grati GU, Bali GU, Mrica GU, MSU, Suralaya 8 GSU, Labuan GSU.
- P2HIV-AIDS Prevention Care Program for Bali GU

Appreciator
Ministry of Manpower and Transmigration of the Republic of Indonesia

PENGHARGAAN DAN SERTIFIKASI TAHUN 2016

Awards and Certification in 2016

19 Agustus 2016
August 19, 2016

Nama Penghargaan
Indonesian Entrepreneur & Education Award
The Best Power Plants Company with Environmentally Friendly of the Year

Badan Pemberi Penghargaan
PT Sembilan Bersama Media

Award
Indonesian Entrepreneur & Education Award
The Best Power Plants Company with Environmentally Friendly of the Year

Appreciator
PT Sembilan Bersama Media

25 Agustus 2016
August 25, 2016

Nama Penghargaan
Social Business Innovation Award & Best Green CEO Award
Renewable Energy (PLTP) –
Program Efisiensi Energi

Badan Pemberi Penghargaan
Warta Ekonomi Intelligence Unit bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Award
Social Business Innovation Award & Best Green CEO Award
Renewable Energy (GPP) – Program Efisiensi Energi

Appreciator
Warta Ekonomi Intelligence Unit in cooperation with the Ministry of Environment and Forestry

8 September 2016
September 8, 2016

Nama Penghargaan
Indonesia Human Capital Study (IHCS)
Appreciation of Human Capital Management System Improvement Development

Badan Pemberi Penghargaan
Dunamis Organization Services

Award
Indonesia Human Capital Study (IHCS)
Appreciation of Human Capital Management System Improvement Development

Appreciator
Dunamis Organization Services

21 September 2016
September 21, 2016

Nama Penghargaan
Asian Power Awards 2016
Gold Awards kategori Dual Fuel Power Plant of the Year PLTDG Pesanggaran 200 MW

Badan Pemberi Penghargaan
Charlton Media Group

Award
Asian Power Awards 2016
Gold Awards kategori Dual Fuel Power Plant of the Year Pesanggaran DGPP 200 MW

Appreciator
Charlton Media Group

14 Oktober 2016
October 14, 2016

Nama Penghargaan
Indonesia Best Electricity Award
Top 5 O&M Company

Award
Indonesia Best Electricity Award
Top 5 O&M Company

Badan Pemberi Penghargaan
Majalah Listrik Indonesia
bekerja sama dengan Majalah SWA

Appreciator
Listrik Indonesia Magazine in cooperation with SWA Magazine

19 Oktober 2016
October 19, 2016

Nama Penghargaan
Learning Innovation Knowledge Exhibition (LIKE) PLN
Juara 2 Kategori *Non Technical Supporting* Manajemen – UP Suralaya
Juara Kategori *Technical Supporting* – UPJP Kamojang

Award
Learning Innovation Knowledge Exhibition (LIKE) PLN
2nd Prize for the Non-Technical Supporting Management Category – Suralaya GU
Winner of the Technical Supporting Category – Kamojang GGSU

Badan Pemberi Penghargaan
PT PLN (Persero)

Appreciator
PT PLN (Persero)

7 November 2016
November 7, 2016

Nama Penghargaan
Spotlight Award - Annual Report:
1. *Gold Award*
2. *Top 100 Communications Materials of 2016 ranking at #36*

Award
Spotlight Award - Annual Report:
1. Gold Award
2. Top 100 Communications Materials of 2016 ranking at #36

Spotlight Award - Sustainability Report:
1. *Platinum Award*
2. *Top 100 Communications Materials of 2016 ranking at #8*
3. *Best Narrative across all categories of competition for the past year with the production*

Spotlight Award - Sustainability Report:
1. Platinum Award
2. Top 100 Communications Materials of 2016 ranking at #8
3. Best Narrative across all categories of competition for the past year with the production

Badan Pemberi Penghargaan
League of American Comunication Professional

Appreciator
League of American Comunication Professional

PENGHARGAAN DAN SERTIFIKASI TAHUN 2016

Awards and Certification in 2016

15 November 2016
November 15, 2016

Nama Penghargaan
Indonesia Quality Award (IQA)
Band of Excellence Achievement untuk sektor bisnis *"Emerging Industry Leader "* dengan skor 601.

Badan Pemberi Penghargaan
Indonesia Quality Award Foundation (IQAF) dengan BUMN Executive Club

Award
Indonesia Quality Award (IQA)
1st rank under the Band of Excellence Achievement Category for the "Emerging Industry Leader with Score 601" Business Sector.

Appreciator
Indonesia Quality Award Foundation (IQAF) and BUMN Executive Club

23 November 2016
November 23, 2016

Nama Penghargaan
Top IT & Telco
Top IT implementation Of Energy & Mining Sector

Badan Pemberi Penghargaan
Majalah Itech dengan beberapa asosiasi TI TELCO (ASPEKTI, IKTII, AiTI dan MASTEL) dan didukung oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika RI

Award
Top IT & Telco 2016
Top IT implementation Of Energy & Mining Sector

Appreciator
Itech Magazine with a number of TI TELCO associations (ASPEKTI, IKTII, AiTI, and MASTEL) and supported by the Ministry of Communication and Information Technology of the Republic of Indonesia

7 Desember 2016
Desember 7, 2016

Nama Penghargaan
Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan (PROPER)
9 Penghargaan Proper Hijau untuk PLTDG Pesanggaran, PLTG Gilimanuk, UP Perak Grati, UP Semarang, UPJP Kamojang, UPJP Priok, UP Suralaya, UJP Labuan dan PLTGU Cilegon.

Badan Pemberi Penghargaan
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Award
Company's Performance Evaluation on Environmental Sector Program (PROPER)
9 Green PROPER Awards for Pesanggaran DGPP, Gilimanuk GTPP, Perak Grati GU, Semarang GU, Kamojang GGSU, Priok GGSU, Suralaya GU, Labuan GSU, and Cilegon CCPP.

Appreciator
Ministry of Environment and Forestry

19 Desember 2016
December 19, 2016

Nama Penghargaan
CGPI Award
Trusted Company

Badan Pemberi Penghargaan
The Indonesian Institute of Corporate Governance (IICG) bekerjasama dengan majalah SWA

Award
CGPI Award
Trusted Company

Appreciator
The Indonesian Institute of Corporate Governance (IICG) in cooperation with SWA Magazine

8 Desember 2016
December 8, 2016

Nama Penghargaan
ASEAN Risk Awards
Juara 1 ASEAN *Risk Awards* 2016 dengan kategori *Risk Innovation*

Badan Pemberi Penghargaan
ERMA (*Enterprise Risk Management Academy*)

Award
ASEAN Risk Awards
1st Prize ASEAN Risk Awards 2016 under the Risk Innovation category

Appreciator
ERMA (Enterprise Risk Management Academy)

20 Desember 2016
December 20, 2016

Nama Penghargaan
Padmamitra Award
Padmamitra 2016 untuk UP Mrica

Badan Pemberi Penghargaan
Kementerian Sosial Republik Indonesia

Award
Padmamitra Award
Mrica GU won the Padmamitra 2016

Appreciator
Ministry of Social Affairs of the Republic of Indonesia

PENGHARGAAN DAN SERTIFIKASI TAHUN 2016

Awards and Certification in 2016

Sertifikat

Beberapa sertifikat yang diperoleh Indonesia Power adalah:

Certifications

Certificates obtained by Indonesia Power are:

Nama Sertifikasi
Certification
ISO 9001:2015
1. UP | GU Suralaya
2. UPJP | GGSU Priok
3. UP | GU Mrica
4. UP | GU Semarang
5. UP | GU Perak Grati
6. UP | GU Bali
7. UPJP | GGSU Kamojang
8. UP | GU Saguling
9. UJH | MSU
10. UJP | GSU Suralaya 8
11. UJP | GSU Labuan
12. UJP | GSU Lontar
13. UJP | GSU Pelabuhan Ratu
14. UJP | GSU Adipala
15. UJP | GSU Cilegon

Tanggal Perolehan
14 Februari 2017

Date Obtained
February 14, 2017

Badan Pemberi Sertifikasi
PT Sucofindo

Certifying Body
PT Sucofindo

Masa Berlaku Sertifikasi
3 tahun s.d.
13 Februari 2020

Expiry
3 years until
February 13, 2020

Nama Sertifikasi
Certification
ISO 14001:2015
1. UP | GU Suralaya
2. UPJP | GGSU Priok
3. UP | GU Mrica
4. UP | GU Semarang
5. UP | GU Perak Grati
6. UP | GU Bali
7. UPJP | GGSU Kamojang
8. UP | GU Saguling
9. UJH | MSU
10. UJP | GSU Suralaya 8
11. UJP | GSU Labuan
12. UJP | GSU Lontar
13. UJP | GSU Pelabuhan Ratu
14. UJP | GSU Adipala
15. UJP | GSU Cilegon

Tanggal Perolehan
14 Februari 2017

Date Obtained
February 14, 2017

Badan Pemberi Sertifikasi
PT Sucofindo

Certifying Body
PT Sucofindo

Masa Berlaku Sertifikasi
3 tahun s.d.
13 Februari 2020

Expiry
3 years until
February 13, 2020

Nama Sertifikasi
Certification

OHSAS 18001:2007

1. UP | GU Suralaya
2. UPJP | GGSU Priok
3. UP | GU Mrica
4. UP | GU Semarang
5. UP | GU Perak Grati
6. UP | GU Bali
7. UPJP | GGSU Kamojang
8. UP | GU Saguling
9. UJH | MSU
10. UJP | GSU Suralaya 8
11. UJP | GSU Labuan
12. UJP | GSU Lontar
13. UJP | GSU Pelabuhan Ratu
14. UJP | GSU Adipala
15. UJP | GSU Cilegon

Tanggal Perolehan
14 Februari 2017

Date Obtained
February 14, 2017

Badan Pemberi Sertifikasi
PT Sucofindo

Certifying Body
PT Sucofindo

Masa Berlaku Sertifikasi
3 tahun s.d.
13 Februari 2020

Expiry
3 years until
February 13, 2020

Nama Sertifikasi
Certification

ISO 28000:2007 /SNI ISO 28000:2009

1. UP | GU Suralaya
2. UPJP | GGSU Priok
3. UP | GU Mrica
4. UP | GU Semarang
5. UP | GU Perak Grati
6. UP | GU Bali
7. UPJP | GGSU Kamojang
8. UP | GU Saguling
9. UJH | MSU
10. UJP | GSU Suralaya 8
11. UJP | GSU Labuan
12. UJP | GSU Lontar
13. UJP | GSU Pelabuhan Ratu
14. UJP | GSU Adipala
15. UJP | GSU Cilegon

Tanggal Perolehan
14 Februari 2017

Date Obtained
February 14, 2017

Badan Pemberi Sertifikasi
PT Sucofindo

Certifying Body
PT Sucofindo

Masa Berlaku Sertifikasi
3 tahun s.d.
13 Februari 2020

Expiry
3 years until
February 13, 2020

PENGHARGAAN DAN SERTIFIKASI TAHUN 2016

Awards and Certification in 2016

Nama Sertifikasi
Certification
SMK3

1. UP | GU Suralaya
2. UPJP | GGSU Priok
3. UP | GU Mrica
4. UP | GU Semarang
5. UP | GU Perak Grati
6. UP | GU Bali
7. UPJP | GGSU Kamojang
8. UP | GU Saguling
9. UJH | MSU
10. UJP | GSU Suralaya 8
11. UJP | GSU Labuan
12. UJP | GSU Lontar
13. UJP | GSU Pelabuhan Ratu
14. UJP | GSU Adipala
15. UJP | GSU Cilegon

Tanggal Perolehan
31 Agustus 2015 dan 16 Mei 2015

Date Obtained
August 31, 2015 and May 16, 2015

Badan Pemberi Sertifikasi
Kementrian Ketenagakerjaan RI

Certifying Body
Ministry of Manpower of the Republic of Indonesia

Masa Berlaku Sertifikasi
3 tahun

Expiry
3 years

Nama Sertifikasi
Certification
SMP

1. UP | GU Suralaya
2. UPJP | GGSU Priok
3. UP | GU Mrica
4. UP | GU Semarang
5. UP | GU Perak Grati
6. UP | GU Bali
7. UPJP | GGSU Kamojang
8. UP | GU Saguling

Tanggal Perolehan
2014 dan 2015

Date Obtained
2014 and 2015

Badan Pemberi Sertifikasi
Kepolisian Negara RI

Certifying Body
Indonesian National Police

Masa Berlaku Sertifikasi
3 Tahun

Expiry
3 Years

Nama Sertifikasi
Certification
ISO 55001:2014

Tanggal Perolehan
27 Oktober 2015

Date Obtained
October 27, 2015

Badan Pemberi Sertifikasi
PT BSI Group Indonesia

Certifying Body
PT BSI Group Indonesia

Masa Berlaku Sertifikasi
26 Oktober 2018

Expiry
October 26, 2018

Nama Sertifikasi
Certification
ISO 50001:2011

Tanggal Perolehan
25 Agustus 2016

Date Obtained
August 25, 2016

Badan Pemberi Sertifikasi
PT BSI Group Indonesia

Certifying Body
PT BSI Group Indonesia

Masa Berlaku Sertifikasi
24 Agustus 2019

Expiry
August 24, 2019

LAPORAN KEPADA PEMEGANG SAHAM DAN PEMANGKU KEPENTINGAN

REPORT TO SHAREHOLDERS AND STAKEHOLDERS

Indonesia Power terus berkomitmen memberikan kontribusi positif bagi pengembangan energi terbarukan secara berkelanjutan.

Indonesia Power is committed to contribute positively to the renewable energy development in a sustainable manner.

LAPORAN DEWAN KOMISARIS

Report from the Board of Commissioners

Bagus Setiawan
Komisaris Utama | President Commissioner

Perusahaan perlu terus memperkuat strategi bisnis dengan mengedepankan pengelolaan pembangkit yang aman, bersih, andal dan efisien. Dewan Komisaris menilai bahwa prospek usaha yang telah disusun dan dikembangkan Direksi dipandang dapat menciptakan *sustainable value* bagi para Pemegang Saham maupun bagi para Pemangku Kepentingan lainnya.

The Company needs to strengthen the business strategies conducted by prioritizing safe, clean, reliable, and efficient power plant management. The Board of Commissioners considers the business prospects that have been compiled and developed by the Directors, are deemed able to create sustainable value for Shareholders and other Stakeholders.

Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang terhormat

Dear Shareholders and Stakeholders,

Atas berkat rahmat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, kami Dewan Komisaris PT Indonesia Power selanjutnya disebut "Indonesia Power atau Perusahaan" dapat melalui Tahun 2016 dengan baik, dengan mengelola berbagai tantangan dan tekanan yang dihadapi dengan sebaik-baiknya sehingga kinerjanya menunjukkan pertumbuhan dibanding tahun sebelumnya. Kami senantiasa mengawasi dan memberikan arahan kepada Manajemen Perusahaan agar berjalan sesuai rencana kerja yang menjadi target perusahaan. Selanjutnya perkenankan kami sebagai Dewan Komisaris untuk memaparkan laporan pelaksanaan tugas pengawasan pengelolaan Perusahaan untuk Tahun Buku 2016.

All the praise to Almighty God, that We, the Board of Commissioners of PT Indonesia Power, hereinafter refers to as 'Indonesia Power' or 'the Company' has passed 2016 with flying color, by managing the challenges and facing the pressures with our best efforts, so that the performance grew, compared from the previous year. We always supervise and provide direction to the Company's management so that it is in line with the work program that is the Company's target. Furthermore, let us as the Board of Commissioners, present the report of our supervisory duty to manage the Company for the Fiscal Year of 2016.

LAPORAN DEWAN KOMISARIS
Report from the Board of Commissioners

Kondisi perekonomian global belum sepenuhnya stabil dan menghadapi berbagai risiko dan ketidakpastian. Pertumbuhan ekonomi global berdasarkan *World Economic Outlook* (WEO) tumbuh 3,1% sedangkan ekonomi nasional tumbuh lebih baik, yaitu tercatat sebesar 5,02%, dibandingkan tahun lalu sebesar 4,88%. Tingkat inflasi mencapai 3,02% (yoy) dan rendahnya pencapaian tersebut didukung oleh kebijakan Bank Indonesia dan koordinasi yang semakin solid antara pemerintah pusat maupun daerah dalam mengendalikan inflasi. Nilai kurs Rupiah per 31 Desember 2016 mencapai nilai Rp13. 473/USD, dan rasio elektrifikasi yang mencapai 91,16% lebih tinggi dibandingkan tahun 2015 sebesar 88,30%. Faktor-faktor tersebut mempengaruhi perkembangan industri listrik nasional.

The unstable global economic condition faces many risks and uncertainties. The global economic growth based on *World Economic Outlook* (WEO) will grow 3.1%, and the national economy will grow better, i.e. recorded at 5.02% compared to the previous year which was 4.88%. The inflation rate reached 3.02% (yoy) and how low this achievement is, is supported by Bank Indonesia's policy and coordination with the Government that are more solid, both at central and regional levels, in controlling the inflation. Rupiah exchange rate as of 31 December 2016 reached Rp13,473/USD, and the electrification ratio reached 91.16%, higher than that of 2015 which was 88.30%. These factors influence the development of national electricity industry.

Sebagai perusahaan pengelola berbagai jenis pembangkit, Indonesia Power terus menciptakan suatu strategi yang tepat dalam menghadapi berbagai tantangan dan persaingan yang makin ketat sebagai modal dasar dalam meraih peluang dan mengoptimalkan pencapaiannya.

As a company that manages many types of power plant, Indonesia Power continues to create proper strategies in facing the challenges and the tight competition as the authorized capital to grab the opportunity and optimize the achievements.

Pandangan atas Prospek Usaha Perusahaan

Pertumbuhan ekonomi nasional untuk Tahun 2017 diperkirakan lebih baik dibanding tahun sebelumnya, dengan telah mempertimbangkan potensi dan berbagai risiko ekonomi baik yang berasal dari eksternal maupun domestik. Perekonomian global yang diperkirakan membaik di Tahun 2017 diharapkan mampu mendukung kinerja perekonomian nasional. Walaupun tetap menghadapi sejumlah risiko antara lain terkait dengan perkiraan penurunan kinerja ekonomi Tiongkok, ketidakpastian ekonomi Eropa yang sedang melakukan penyesuaian terhadap Brexit, dan risiko stabilitas akibat perubahan arah kebijakan ekonomi AS setelah pemilihan umum.

Disamping itu, jika dilihat dari potensi energi panas bumi di Indonesia sangat besar yaitu 28.910 MW yang tersebar dari Sumatera hingga Papua dengan pertumbuhan ekonomi serta jumlah penduduk Indonesia yang terus mengalami peningkatan dapat memicu kenaikan jumlah konsumsi listrik.

Perspective on the Company's Business Prospect

The national economic growth in 2017 is predicted to be better than the previous year, taking into account the various potential and economic risk, both from the external or domestic sources. The global economy that is predicted to improve in 2017 is expected to be able to support the national economic performance. However, the Company still faces some risks, such as the expected downturn of the China's economic performance, the uncertainty from Europe economy that is adjusting to Brexit, and the stability risk due to the changes in the US economic policy after the Presidential election.

In addition, the geothermal potential in Indonesia is very big, i.e. 28,910 MW which spread across from Sumatera until Papua, and the economic growth and the population of Indonesia keep increasing and may be able to trigger an increase in electricity consumption.

Dengan mengedepankan pengelolaan pembangkit yang aman, bersih, hijau, andal dan efisien, Dewan Komisaris menilai bahwa prospek usaha yang telah disusun dan dikembangkan Direksi dipandang dapat menciptakan *sustainable value* bagi para pemegang saham maupun bagi para pemangku kepentingan lainnya. Peningkatan pangsa pasar 0,68% di sistem Jawa Bali Tahun 2016 menjadi sebesar 23,65% dibandingkan tahun sebelumnya. Dewan Komisaris optimis jika upaya dan langkah strategi yang dilakukan oleh Direksi dan seluruh pegawai dalam meningkatkan pertumbuhan yang berkelanjutan telah berada pada jalur yang benar dalam mencapai Visinya "Menjadi perusahaan energi tepercaya yang tumbuh berkelanjutan".

Dewan Komisaris berpendapat bahwa Indonesia Power perlu terus melakukan penyempurnaan proses bisnis dengan terus mengembangkan energi baru terbarukan yang aman dan bersih, strategi maupun operasional yang andal agar dapat terus tumbuh berkelanjutan di masa mendatang. Kemampuan dan pengembangan individu pegawai, serta kerjasama tim yang solid perlu terus ditingkatkan melalui inovasi tiada henti karena pencapaian yang diperoleh merupakan bukti kepercayaan pelanggan semakin baik dan kompetensi yang semakin diakui.

The Board of Commissioners considers the business prospects that have been compiled and developed by the Directors, are deemed able to create sustainable value for shareholders and other stakeholders by prioritizing safe, clean, reliable, and efficient power plant management. Market share increase of 0.68% in the Java-Bali system in 2016 is 23.65% more than the previous year. The Board of Commissioners is optimistic that if the efforts and strategic measures conducted by the Directors and all employee are able to improve the sustainable growth, then the Company is on the right track to achieve its Vision, i.e. "To Become a Trusted Energy Company with Sustainable Growth".

The Board of Commissioners believes that Indonesia Power must continue to improve the business process by developing safe and clean new renewable energy, reliable strategies and operations, in order to keep growing sustainably in the future. The capabilities and development of the employee individually, as well as solid teamwork, must be improved through continuous innovation because the achievements obtained are proof of the customer's better confidence and recognized competence.

Penilaian Atas Kinerja Direksi

Indonesia Power telah menunjukkan kinerja keuangan maupun operasional yang cukup membanggakan sepanjang tahun 2016 dibandingkan dengan kinerja tahun sebelumnya. Realisasi produksi energi listrik tahun 2016 meningkat 8,68% menjadi sebesar 43.180,60 GWh dibandingkan tahun 2015 sebesar 39.730,11 GWh. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan produksi yang signifikan di UP Semarang, UP Perak Grati, serta pembangkit listrik tenaga air di UP Saguling dan UP Mrica. Adapun realisasi penjualan energi listrik pada tahun 2016 meningkat 8,65% menjadi sebesar 38.011,11 GWh dibandingkan tahun 2015 sebesar 37.804,95 GWh. Peningkatan penjualan energi listrik tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan produksi listrik pada tahun 2016.

Assessment of Directors' Performance

Indonesia Power has demonstrated strong financial and operational performance throughout 2016 compared to the performance in the previous year. Electricity production realization in 2016 increased by 8.68% GWh, or 43,180.60 GWh compared to 2015, which was 39,730.11 GWh. The increase is mainly due to the significant production increase at Semarang GU, Perak Grati GU, and hydropower plants at Saguling GU and Mrica GU. Electricity sales realization in 2016 increased by 8.65% GWh, or 38,011.11 GWh compared to 2015, which was 37,804.95 GWh. The increase is mainly influenced by the increase in electricity production in 2016.

LAPORAN DEWAN KOMISARIS
Report from the Board of Commissioners

Pencapaian indikator kinerja operasi pembangkit mencakup faktor keandalan (*Equivalent Availability Factor*/EAF), faktor gangguan (*Equivalent Forced Outage Rate*/EFOR), dan Efisiensi Thermal. Nilai EAF tahun 2016 mencapai sebesar 85,63%, tidak lebih baik dibandingkan tahun 2015 sebesar 90,85%. Pencapaian *Equivalent Forced Outage Rate* (EFOR) tahun 2016 sebesar 7,23% tidak lebih baik dibandingkan tahun 2015 sebesar 3,16% dan realisasi Efisiensi Thermal Netto tahun 2016 lebih baik menjadi 34,27% dibandingkan tahun 2015 yang mencapai 33,76%.

The achievement of power plant's operation performance indicator includes reliability factor (Equivalent Availability Factor/EAF), disruption factor (Equivalent Forced Outage Rate/EFOR), and Thermal Efficiency. The EAF in 2016 reached 85.63%, not better compared to 2015 which was 90.85%. The achievement of Equivalent Forced Outage Rate (EFOR) in 2016 in the amount of 7.23% is not better compared to 2015 which was 3.16%, and the Net Thermal Efficiency realization in 2016 is better, at 34.27% compared to 2015 which reached 33.76%.

Indonesia Power terus mendorong setiap strategi dan berbagai upaya dalam meningkatkan kinerja perusahaan secara keseluruhan. Pada tahun 2016 Indonesia Power mencapai kinerja keuangan yang positif dibandingkan tahun lalu, dimana pendapatan usaha meningkat sebesar 14,63%, laba tahun berjalan mengalami penurunan sebesar 38,22%, total aset menurun sebesar 2,57% dan liabilitas menurun 35,93%. Pendapatan usaha tahun 2016 meningkat 14,63% menjadi sebesar Rp36.705.954 juta dibandingkan tahun 2015 sebesar Rp32.020.186juta, yang didorong oleh kenaikan tarif pendapatan penjualan listrik dan pendapatan jasa O&M. Jumlah laba tahun berjalan menurun menjadi sebesar Rp 2.886.704juta dibandingkan tahun 2015 sebesar Rp4.672.522 juta. Penurunan ini terutama dipengaruhi manfaat pajak tangguhan atas revaluasi aset di tahun 2015 dimana pada tahun 2016 tidak dilakukan revaluasi aset.

Indonesia Power strives to promote strategies and efforts in enhancing the overall Company's performance. In 2016, Indonesia Power achieved positive financial performance compared to the previous year, in which the revenues increased by 14.63%, income for the year decreased by 38.22%, and total assets decreased by 2.57% and liabilities decreased by 35.93%. The revenues in 2016 increased by 14.63% or Rp36,705,954 million compared to 2015, which was Rp32,020,186juta million, which is driven by an increase in electricity sales revenue and O&M services revenues. The income for the year decreased to Rp2,886,704 million, compared to 2015 which was Rp4,672,522 million. The decrease was due to the deferred tax benefit on the revaluation of property, plant, and equipment in 2015, which was not conducted in 2016.

Selain itu, Dewan Komisaris juga mendukung langkah Direksi untuk melakukan restrukturisasi organisasi sejalan dengan peningkatan peran Indonesia Power sebagai *asset manager*, penguatan kompetensi dan pengembangan usaha di bidang O&M dan pengembangan usaha pembangkitan termasuk proyek pembangkit dari penugasan oleh Pemegang Saham. Adapun terkait dengan efisiensi energi, Dewan Komisaris mendorong Direksi untuk terus melanjutkan implementasi program Peningkatan & Pembudayaan Manajemen Efisiensi Energi (PPE), yang saat ini telah dilakukan pada 7 unit pembangkit dalam rangka kegiatan penurunan BPP (Biaya Pokok Pembangkitan).

In addition, the Board of Commissioners also supports the Directors' step to restructure the organization, in line with the increasing role of Indonesia Power as an asset manager and the strengthening of competence and business development in the O&M sector, and power plant development including power plant project assigned by the Shareholders. In terms of energy efficiency, the Board of Commissioners encourages the Directors to continue implementing the Energy Efficiency Management Culture and Enhancement (PPE), which currently has been conducted at 7 Generating Units in order to reduce the BPP (Generating Main Cost).

Komitmen Implementasi Tata Kelola Perusahaan

Dewan Komisaris menyampaikan apresiasi terhadap kemajuan yang dicapai oleh Indonesia Power sepanjang tahun 2016 di berbagai bidang baik terkait dengan kinerja usaha maupun operasional Perusahaan. Dewan Komisaris senantiasa mendorong Direksi dan seluruh jajaran Perusahaan untuk selalu mematuhi prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Dalam upaya mencapai keunggulan dan meraih kepercayaan, Indonesia Power senantiasa mendorong peningkatan implementasi GCG dan berupaya menciptakan budaya yang menjunjung tinggi integritas, profesionalisme dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Di tahun 2016, sinergi GCG pada Anak Perusahaan, *Vendor Meeting* dan Survei Perilaku Etis Kepada mitra kerja, *review* serta melakukan evaluasi penerapan GCG secara berkala. Selain itu, adanya pembagian tugas yang jelas antar anggota Dewan Komisaris, dimana tiga orang anggota Dewan Komisaris ditunjuk sebagai penanggung jawab dalam pengawasan implementasi GCG.

Untuk tahun 2016, Indonesia Power telah melakukan *assessment* mengacu pada Keputusan Sekretaris Menteri BUMN Nomor SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 dengan memperoleh skor GCG sebesar 92,04 dari total nilai maksimal sebesar 100,00 yang setara dengan 91,99 sehingga secara *overall* hasil *assessment* GCG mendapatkan predikat "Sangat Baik". Rating GCG yang diselenggarakan oleh The Institute for Corporate Governance (IICG) mendapatkan predikat "*The Trusted Company*" dengan capaian skor 82,94. Dengan demikian, Dewan Komisaris meyakini penerapan GCG mampu mendorong penciptaan nilai tambah dalam jangka panjang sekaligus mencapai kinerja ekselen.

Commitment to Corporate Governance Implementation

The Board of Commissioners expressed appreciation for the progress achieved by Indonesia Power throughout 2016 in many fields, related to the Company's business performance and operations. The Board of Commissioners always encourages the Directors and all level of the Company to comply with the good corporate governance principles. In the effort to achieve excellence and gain confidence, Indonesia Power keeps encouraging the enhancement of GCG implementation and seeking to cultivate the culture that upholds integrity, professionalism, and compliance with the prevailing regulations. In 2016, the GCG synergy with Subsidiaries, Vendor Meeting, and Partner Ethical Behavior Survey, review, and GCG implementation evaluation are conducted regularly. In addition, there is a clear job description in between the member of Board of Commissioners, and three members of Board of Commissioners shall be appointed to be the persons in charge in the supervision of GCG implementation.

For 2016, Indonesia Power has conducted assessment referring to the Decree of Secretary of the Ministry of State-Owned Enterprises (BUMN) Number SK-16/S.MBU/2012 dated 6 June 2012, and the Company achieved GCG score of 92.04 out of the total 100.00, which is equivalent to 91.99. Hence, the GCG assessment result overall has the predicate of "Excellent". GCG Rating is held by The Institute for Corporate Governance (IICG) and achieved the predicate "The Trusted Company", with a score of 82.94. Therefore, Board of Commissioners believes that the GCG implementation is able to encourage the cultivation of added value in the long term, as well as to achieve excellent performance.

LAPORAN DEWAN KOMISARIS
Report from the Board of Commissioners

Evaluasi Kinerja Komite Dewan Komisaris

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan dan monitoring, Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Audit dan Komite Manajemen Risiko sesuai peran dan fungsinya sebagaimana diatur dalam pedoman kerja (piagam) masing-masing komite.

Komite Audit bertugas membantu Dewan Komisaris dalam memastikan efektivitas pengendalian internal yang dilakukan oleh audit internal maupun eksternal serta pengawasan penerapan GCG. Dalam melaksanakan fungsi dan perannya, Komite Audit dilengkapi pedoman kerja yang ditetapkan dalam Piagam Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris Nomor: 240.K/010/IP/2016 dan Nomor: 014. SK/DEKOM-IP/2016. Sepanjang tahun 2016, Komite Audit telah melaksanakan rapat sebanyak 15 kali sesuai program kerja yang ditetapkan antara lain membahas telaah atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perusahaan, telaah atas program audit tahunan maupun telaah atas atas kecukupan pemeriksaan yang dilakukan auditor baik internal maupun eksternal. Seluruh temuan, catatan dan rekomendasi dari hasil pelaksanaan kegiatan, penelaahan dan analisa Komite Audit selama tahun 2016 telah dikomunikasikan dan didiskusikan dengan manajemen Indonesia Power, Satuan Audit Internal (SAI) dan auditor eksternal, serta telah dilaporkan kepada Dewan Komisaris untuk perbaikan dan tindak lanjut dari Manajemen Perusahaan.

Komite Manajemen Risiko bertugas membantu Dewan Komisaris dalam bidang pengawasan penerapan manajemen risiko yang efektif serta melaksanakan fungsi nominasi dan remunerasi. Pelaksanaan fungsi dan peran Komite Manajemen Risiko sebagai pedoman kerja yang ditetapkan dalam Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Nomor 241/010/IP/2016 dan Nomor 016.SK/DEKOM-IP/2016. Komite Manajemen Risiko secara aktif memberikan masukan penyempurnaan terkait dengan pengawasan dan pengendalian risiko serta pelaksanaan fungsi nominasi dan remunerasi telah berjalan efektif.

Selain itu, Dewan Komisaris mengangkat Sekretaris Dewan Komisaris yang bertugas memberikan dukungan administratif dan kesekretariatan kepada Dewan Komisaris dalam memperlancar pelaksanaan tugas-tugas Dewan Komisaris.

Performance Evaluation of Board of Commissioners' Committees

In order to improve the effectivity of supervision and monitoring, the Board of Commissioners is assisted by Audit Committee and Risk Management Committee, in line with the roles and functions as stipulated in the Charter of each Committee.

Audit Committee is responsible for assisting the Board of Commissioners in ensuring the effectivity of internal control, conducted through internal or external audit, and in monitoring the GCG implementation. In carrying out its functions and roles, Audit Committee of Indonesia Power is equipped with Work Guidelines that is set forth based on the Joint Decree of the Directors and Board of Commissioners Number 240.K/010/IP/2016 and Number 014.SK/DEKOM IP/2016. Throughout 2016, Audit Committee has held 15 meetings, in line with the work program set, such as discussing the review on financial statements that will be published by the Company, review on the annual audit, and review of the adequacy of audit conducted by both internal and external auditor. In terms of findings, record and recommendation from the activities' report, review and analysis of Audit Committee throughout 2016 has been communicated and discussed by the Indonesia Power's management, Internal Audit Unit (SAI) and external auditor, and has been reported to the Board of Commissioners for improvement and follow up from the Company's management.

Risk Management Committee is responsible for assisting the Board of Commissioners in the effective risk management implementation supervision, and carrying out the function of nomination and remuneration. Duties and roles of Risk Management Committee as the work guidelines has been set forth in the Joint Decree of the Directors and Board of Commissioners Number 241/010/IP/2016 and Number 016.SK/DEKOM IP/2016. Risk Management Committee has actively given input of refinement related to supervision and risk control, as well as nomination and remuneration function, which has been carried out effectively.

In addition, Board of Commissioners appointed a Secretary of the Board of Commissioners who functions to give administrative and secretariat support to the Board of Commissioners in facilitating the implementation of the Board of Commissioners' duties.

Perubahan Komposisi Dewan Komisaris

Pada tahun 2016, telah terjadi perubahan komposisi Dewan Komisaris sehingga jumlah dan komposisinya menjadi berjumlah 6 (enam) orang. Berdasarkan Keputusan RUPS Sirkuler tanggal 25 Agustus 2016, 2 Mei 2016 dan 10 November 2015 telah terjadi perubahan komposisi Direksi Indonesia Power menjadi sebagai berikut, yaitu Sdr. Bagus Setiawan sebagai Komisaris Utama dan anggota komisaris lainnya yang terdiri dari Sdr. Ahmad Yani, Sdr. Abdi Mustakim, Sdr. Agus Hernawan, Sdr. Munir Ahmad dan Sdr. Tri Setyo Nugroho. Tiga orang Komisaris adalah Komisaris Independen dan hal tersebut telah sejalan dengan ketentuan dalam parameter penilaian praktek GCG.

Kami ucapkan terima kasih atas kontribusi, dedikasi, semangat dan loyalitas kepada Dewan Komisaris yang berakhir masa jabatannya. Kami akan terus meningkatkan peran aktif setiap anggota Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan dan penasehatan agar kinerja Indonesia Power terus tumbuh berkelanjutan di masa depan.

Change in Board of Commissioners' Composition

In 2016, there had been changes in the composition of the Board of Commissioners, and the number and composition became 6 (six) people. Based on Circular GMS Decree on August 25, 2016, May 2, 2016, and November 10, 2015, there had been changes in the composition of Indonesia Power's Board of Commissioners as follow, i.e. Mr. Bagus Setiawan as the President Commissioner, and other commissioners' member consists of Mr. Ahmad Yani, Mr. Abdi Mustakim, Mr. Agus Hernawan, Mr. Munir Ahmad, and Mr. Tri Setyo Nugroho. There are three Independent Commissioners, in line with the provision in the GCG practice assessment parameter.

We express sincere gratitude to the contribution, dedication, passion, and loyalty of the retired members of the Board of Commissioners. We will always improve our active role in carrying out the supervision and advisory functions, so Indonesia Power's performance continues to grow sustainably in the future.

Apresiasi

Saya atas nama Dewan Komisaris menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada seluruh pihak atas pencapaian kinerja Indonesia Power Tahun 2016 kepada Pemegang Saham, Direksi, Pelanggan, Pegawai, Mitra Kerja dan seluruh Pemangku Kepentingan atas kepercayaan dan dukungannya sehingga Indonesia Power mampu mencapai kinerja positif dan terus tumbuh berkelanjutan. Dengan tetap menjalin sinergi positif dengan berbagai pihak, Indonesia Power berkomitmen untuk dapat mengatasi tantangan sekaligus meraih peluang-peluang baru di tahun mendatang.

Appreciation

I, on the behalf of Board of Commissioners express our appreciation and gratitude for all parties on the achievement of Indonesia Power's performance in 2016, to the Shareholders, Board of Directors, Customer, Employees, Partners, and all Stakeholders for the trust and support, so that Indonesia Power is able to achieve positive performance and grow sustainably. By maintaining positive synergies with various parties, Indonesia Power is committed to overcome challenges whilst grab new opportunities in the coming year.

Jakarta, 30 Mei 2017
Atas Nama Dewan Komisaris
PT Indonesia Power
On behalf of the Board of Commissioners of PT Indonesia Power

Bagus Setiawan
Komisaris Utama
President Commissioner

LAPORAN DEWAN KOMISARIS
Report from the Board of Commissioners

Keterangan foto (dari kiri ke kanan)
Photo Caption (left to right)

1. **Abdi Mustakim**
   Komisaris
   Commissioner
2. **Tri Setyo Nugroho**
   Komisaris
   Commissioner
3. **Bagus Setiawan**
   Komisaris Utama
   President Commissioner
4. **Munir Ahmad**
   Komisaris
   Commissioner
5. **Ahmad Yani**
   Komisaris
   Commissioner
6. **Agus Hernawan**
   Komisaris
   Commissioner

PROFIL DEWAN KOMISARIS
Board of Commissioners Profile

Bagus Setiawan
Komisaris Utama
President Commissioner

Warga Negara Indonesia, berdomisili di Bandung, berusia 50 tahun. Meraih gelar Magister Manajemen Bisnis dari University Of Missouri (2006) dan Sarjana Mesin dari ITB (1993)

Indonesian Citizen, domiciled in Bandung, age 50. Have a Magister of Business Management from University of Missouri (2006) and Bachelor of Machine Engineering from ITB (1993)

Perjalanan Karir:
Selain menjabat sebagai Komisaris Utama Indonesia Power, beliau juga menjabat sebagai Kepala Divisi Human Capital Management System PT PLN (Persero) tahun 2015 - sekarang. Beberapa jabatan lain yang pernah dipegangnya adalah Kepala Divisi Pengembangan Sistem SDM PT PLN (Persero) (2013-2015), General Manager PT PLN (Persero) Wilayah Bangka Belitung (2010-2011), General Manager PT PLN (Persero) Wilayah Maluku Dan Maluku Utara (2009-2010) serta Manajer Perencanaan Strategis Korporat PT PLN (Persero) (2009).

Training yang diikuti antara lain:
Beliau telah mengikuti program pelatihan diantaranya *Project Management Office*

Dasar Pengangkatan Pertama:
RUPS Sirkuler Penggantian dan Penambahan Anggota Dewan Komisaris Perseroan tanggal 25 Agustus 2016

Penugasan Khusus (jabatan lain): -

Career:
He serves not only as President Commissioner of Indonesia Power, but also as Head of Human Capital Management System Division of PT PLN (Persero), 2015-now. Some of the position he held, among others, are, Head of Human Resources System Development Division of PT PLN (Persero) (2013-2015), General Manager of PT PLN (Persero) in Bangka Belitung Area (2010-2011), General Manager of PT PLN (Persero) in Maluku and North Maluku Area (2009-2010), and Manager of Corporate Strategic Planning of PT PLN (Persero) (2009).

Training attended, namely:
He attended a Project Management Office training.

First Appointment Basis:
Circular GMS on Replacement and Addition of Company's Members of Board of Commissioners dated August 25, 2016

Special Assignment (other position): -

Ahmad Yani
Komisaris
Commissioner

Warga Negara Indonesia, berdomisili di Jakarta, berusia 54 tahun. Meraih gelar Doktor dari Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung (2013), Magister Hukum dari Universitas Indonesia (2003), Sarjana Hukum dari Universitas Islam Jakarta (1988) dan Sarjana Muda Hukum dari Universitas Islam Jakarta (1986)

Indonesian citizen, domiciled in Jakarta, age 54. Have a Doctorate from Law Faculty of Padjajaran University, Bandung (2013), Magister of Law from University of Indonesia (2003), Bachelor of Law from Universitas Islam Jakarta (1986)

Perjalanan Karir:
Sebelum menjabat sebagai Komisaris Indonesia Power, beliau menjabat sebagai Anggota DPR/MPR RI Periode 2009-2014. Beberapa jabatan lain yang pernah dipegangnya adalah Law Office Ahmad Yani & Associates sebagai Founder (2003-2009), Dosen Hukum Universitas Islam Atthariyah Jabatan Lektor Kepala (2000-2008), Law Firm DYT & Partner sebagai Managing Director (2003) dan Law Firm H.D.Y sebagai Senior Partner (1994 – 1996).

Training yang diikuti antara lain:
Beliau telah mengikuti program pelatihan diantaranya *International Law & The Law International Treates, International Human Rights Law Attorney Australia,* Pelatihan Penyusunan Rancangan Undang-undang Dalam Perubahan Masyarakat Yang Demokratis dan Pelatihan Perpu No. 1 Tentang Kepailitan.

Dasar Pengangkatan Pertama:
RUPS Sirkuler Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris Perseroan tanggal 2 Mei 2016.

Penugasan Khusus (jabatan lain): -

Career:
Before serving as Commissioner of Indonesia Power, he was a Member of DPR/MRP RI (2009-2014). Some other positions he held were Founder at Law Office Ahmad Yani & Associates (2003-2009), Law Professor at Universitas Islam Atthariyah as Head Lecturer (2000-2008), Managing Director at Law Firm DYT & Partner (2003), and Senior Partner at Law Firm H.D.Y (1994–1996).

Training attended, namely:
He had attended numerous training, such as International Law & The Law International Treaties, International Human Rights Law Attorney Australia, Training to Compile Bills in the Change of Democratic Society, and Training of Government Regulation in Lieu of Law No. 1 on Bankruptcy.

First Appointment Basis:
Circular GMS on Appointment of Company's Member of Board of Commissioners dated May 2, 2016.

Special Assignment (other position): -

Abdi Mustakim
Komisaris
Commissioner

Warga Negara Indonesia, berdomisili di Jakarta, berusia 40 tahun. Meraih gelar Magister of Business Administration dari Maastricht School Of Management (2006), Sarjana Ekonomi dari Universitas Mercu Buana (2004) dan Sarjana Muda Akuntansi dari STAN (1997)

Indonesian citizen, domiciled in Jakarta, age 40. Have a Magister of Business Administration from Maastricht School of Management (2006), Bachelor of Economy from Universitas Mercu Buana (2004) and Diploma in Accountancy from STAN (1997)

Perjalanan Karir:
Selain menjabat sebagai Komisaris Indonesia Power, beliau juga menjabat sebagai Kepala Bagian Perencanaan dan Manajemen Kinerja tahun 2015 – sekarang. Beberapa jabatan lain yang pernah dipegangnya adalah Plt. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan (2014 – 2015), Kepala Sub Bagian Pelaporan (2013 – 2014), Kepala Sub Bagian Perencanaan (2010 – 2013) serta Plt. Kepala Sub Bidang Tata Kelola dan Manajemen Risiko Usaha Perdagangan, Pergudangan, Distribusi dan Jasa Sertifikasi II (2006 – 2010).

Training yang diikuti antara lain:
Beliau telah mengikuti program pelatihan diantaranya *Strategy Management & Corporate Culture, Holding Company Management, Risk Management & Internal Control System* serta *Project Financing.*

Dasar Pengangkatan Pertama:
RUPS Sirkuler Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris Perseroan tanggal 10 November 2015.

Penugasan Khusus (jabatan lain): -

Career:
He serves not only as Indonesia Power's Commissioner, but also as the Head of Performance Management and Planning Division, 2015-now. Some other positions he held were Acting Head of Planning and Finance (2014-2015), Head of Reporting Subdivision (2013-2014), Head of Planning Subdivision (2010-2013), and Acting Head of Governance and Risk Management of Trading Business, Warehouse, Distribution, and Services, Certification II (2006 – 2010).

Training attended, namely:
He had attended numerous training, such as Strategy Management & Corporate Culture, Holding Company Management, Risk Management & Internal Control System, as well as Project Financing.

First Appointment Basis:
Circular GMS on Dismissal and Appointment of Company's Member of Board of Commissioners dated November 10, 2015.

Special Assignment (other position): -

Agus Hernawan
Komisaris
Commissioner

Warga Negara Indonesia, berdomisili di Jakarta, berusia 56 tahun. Meraih gelar Magister Management dari Universitas Padjadjaran.

Indonesian citizen, domiciled in Jakarta age 56. Have a Magister of Management from Universitas Padjadjaran

Perjalanan Karir:
Sebelum menjabat sebagai Komisaris Indonesia Power, beliau menjabat sebagai Direktur Retail Business Banking Bank Bukopin tahun 2013-2015. Beberapa jabatan lain yang pernah dipegangnya adalah Direktur Pelayanan & Distribusi Bank Bukopin (2006-2013), Direktur Consumer Banking Bank Bukopin (2000-2006), Group Head Bisnis Bank Bukopin (1997-2000) dan Pemimpin Cabang Bank Bukopin (1988-1997).

Training yang diikuti antara lain:
Beliau telah mengikuti program pelatihan diantaranya *Project Management Office*

Dasar Pengangkatan Pertama:
RUPS Sirkuler Penggantian dan Penambahan Anggota Dewan Komisaris Perseroan tanggal 25 Agustus 2016

Penugasan Khusus (jabatan lain): -

Career:
Before serving as Indonesia Power's Commissioner, he was the Director of Retail Business Banking in Bank Bukopin, 2013 – 2015. Some other positions he held were Director of Services & Distribution in Bank Bukopin (2006-2013), Director of Consumer Banking in Bank Bukopin (2000 – 2006), Group Head Business in Bank Bukopin (1997-2000), and Head of Branch Office Bank Bukopin (1988 – 1997).

Training attended, namely:
He attended a Project Management Office training.

First Appointment Basis:
Circular GMS on Replacement and Addition of Company's Members of Board of Commissioners dated August 25, 2016.

Special Assignment (other position): -

PROFIL DEWAN KOMISARIS
Board of Commissioners Profile

Munir Ahmad
Komisaris
Commissioner

Warga Negara Indonesia, berdomisili di Jakarta, berusia 55 tahun. Meraih gelar Sarjana Teknik Elektro dari Universitas Hasanudin (1987).

Indonesian citizen, domiciled in Jakarta age 55. Have a Bachelor of Electrical Engineering from Universitas Hasanudin, 1987

Perjalanan Karir:
Selain menjabat sebagai Komisaris Indonesia Power, beliau juga menjabat sebagai Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan tahun 2015 – Sekarang. Beberapa jabatan lain yang pernah dipegangnya adalah Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan (2014 – 2015), Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (2010-2014), Kepala Pusdiklat Ketenagalistrikan Dan Energi Baru Terbarukan (2010) serta Kepala Bidang Pelatihan dan Sarana – Pusdiklat KEBT (2006-2010).

Training yang diikuti antara lain:
Beliau telah mengikuti program pelatihan diantaranya *Indonesian Japan Technology and Introduction and Dialogue on Energy Mineral Resource, Clean Coal Technology* dan Pelatihan Teknis Penggunaan Alat-Alat Ukur Listrik.

Dasar Pengangkatan Pertama:
RUPS Sirkuler Penggantian dan Penambahan Anggota Dewan Komisaris Perseroan tanggal 25 Agustus 2016.

Penugasan Khusus (jabatan lain): -

Career:
He serves not only as Indonesia Power's Commissioner, but also as Director of Electricity Engineering and Environment, 2015-now. Some other positions he held were Director of Electricity Program Coaching (2014-2015), Head of Education and Training Centre for Electricity, New and Renewable Energy, and Energy Conservation (2010-2014), Head of Training for Electricity and New and Renewable Energy (2010, and Head of Training and Facilities – KEBT Training (2006-2010).

Training attended, namely:
He had attended numerous programs, such as Indonesian Japan Technology and Introduction and Dialogue on Energy Mineral Resource, Clean Coal Technology, and Technical Training on Electrical Measurement Equipment.

First Appointment Basis:
Circular GMS on Replacement and Addition of Company's Members of Board of Commissioners dated August 25, 2016.

Special Assignment (other position): -

Tri Setyo Nugroho
Komisaris
Commissioner

Warga Negara Indonesia, berdomisili di Depok, berusia 58 tahun. Meraih gelar Magister Terapan Project Management Dari PM Box Institute (2004), Sarjana Teknik Sipil Dari ISTA (1996) dan Sarjana Muda Teknik Sipil Dari Universitas Diponegoro (1981).

Indonesian citizen, domiciled in Jakarta age 58. Have a Magister in Management Project Implementation from PM Box Institute (2004), Bachelor of Civil Engineering from ISTA (1996), and Diploma in Bachelor Engineering from Universitas Diponegoro (1981).

Perjalanan Karir:
Selain menjabat sebagai Komisaris Indonesia Power, beliau juga menjabat sebagai Tenaga Ahli Manajemen Proyek PT PLN (Persero tahun 2014-sekarang. Beberapa jabatan lain yang pernah dipegangnya adalah Kepala Divisi Pengadaan Strategis PT PLN (Persero) (2013-2014), Kepala Divisi Administrasi Konstruksi PT PLN (Persero) (2012-2013), Project Director Administrasi Investasi Pembangunan PT PLN (Persero) (2010-2012) serta Deputi Direktur Administrasi Konstruksi pada Direktorat Konstruksi Strategis (2008-2010).

Training yang diikuti antara lain:
Beliau telah mengikuti program pelatihan diantaranya *Project Management Office*

Dasar Pengangkatan Pertama:
RUPS Sirkuler Penggantian dan Penambahan Anggota Dewan Komisaris Perseroan tanggal 25 Agustus 2016

Penugasan Khusus (jabatan lain): -

Career:
He serves not only as Indonesia Power's Commissioner, but also as Project Management Specialist of PT PLN (Persero), 2014 – now. Some other positions he held were Head of Strategic Procurement Division, PT PLN (Persero) (2013 – 2014), Head of Construction Administration Division, PT PLN (Persero) (2012 – 2013), Project Director of Development Investment Administration, PT PLN (Persero) (2010 – 2012), and Deputy Director of Construction Administration, on Strategic Construction Directorate (2008 – 2010).

Training attended, namely:
He attended a Project Management Office training.

First Appointment Basis:
Circular GMS on Replacement and Addition of Company's Members of Board of Commissioners dated August 25, 2016.

Special Assignment (other position): -

Halaman ini sengaja dikosongkan

This page is intentionally left blank

LAPORAN DIREKSI
Report from the Board of Directors

Sripeni Inten Cahyani
Direktur Utama | President Director

Indonesia Power terus berupaya memberikan yang terbaik bagi segenap pemangku kepentingan dengan pencapaian kinerja di bidang ekonomi, sosial dan lingkungan. Diperolehnya penghargaan *The Best Power Plants Company with Environmentally Friendly of the Year*, *Renewable Energy* (PLTP) – Program Efisiensi Energi, *Top 5 O&M Company, 2nd The Best Human Capital* untuk kategori Anak perusahaan BUMN, *Appreciation of Human Capital Management System Improvement Development* dan *Vision Award - Annual Report* merupakan hasilnya. Pencapaian tersebut merupakan hasil sinergi, kolaborasi dan dukungan dari segenap pemangku kepentingan.

Indonesia power strives to provide the best for all stakeholders in the achievements of economic, social, and environmental performance. The result is the achievement of The Best Power Plants Company with Environmentally Friendly of the Year, Renewable Energy (GPP) – Energy Efficiency Program, Top 5 O&M Company, 2nd Best Human Capital for the category of Subsidiary of State-Owned Enterprises (BUMN), Appreciation of Human Capital Management System Improvement Development, and Vision Award - Annual Report. The achievements are the result of all stakeholders' synergies, collaborations, and supports.

Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang terhormat

Dear Shareholders and Stakeholders,

Tahun 2016 merupakan milestone penting dalam perjalanan Indonesia Power sebagai perusahaan pembangkit listrik dan jasa pembangkitan, karena pada tahun ini Perusahaan telah melakukan transformasi dan penguatan organisasi untuk mendukung kinerja jasa *Operation & Maintenance* pembangkit milik PT PLN (Persero) berdasarkan *Asset Management Contract* (AMC) serta melakukan akselerasi kompetensi teknis sebagai *asset operator* dan teknisi pemeliharaan pembangkit listrik.

The year 2016 is the most important milestone in Indonesia Power's journey as a power generation and generation services company, because this year, the Company has transformed and strengthened the organization to support the performance of Operation & Maintenance owned by PT PLN (Persero), based on the Asset Management Contract (AMC), and conducted acceleration as asset operator and maintenance technicians for power plants.

LAPORAN DIREKSI
Report from the Board of Directors

Di tengah kondisi perekonomian global yang belum sepenuhnya stabil dan pertumbuhan ekonomi nasional sampai dengan akhir tahun 2016 mengalami pertumbuhan menjadi sebesar 5,02%, dibandingkan tahun lalu sebesar 4,79%. Tingkat inflasi mencapai 3,02%, kurs Rupiah per 31 Desember 2016 mencapai nilai Rp13.473/USD, realisasi pertumbuhan permintaan listrik mencapai 8,4% dan rasio elektrifikasi yang mencapai 91,16% lebih tinggi dibandingkan tahun 2015 sebesar 88,30%. Semakin tinggi rasio elektrifikasi, maka pemerataan pelayanan listrik semakin merata dan luas kepada masyarakat. Faktor-faktor tersebut mempengaruhi permintaan listrik nasional dan mempengaruhi kinerja Perusahaan.

In the midst of unstable global economic condition and national economic growth until the end of 2016, the Company growth by 5.02%, compared to the previous year, 4.79%. The inflation rate reached 3.02%, Rupiah exchange rate as of 31 December 2016 reached Rp13,473/USD, the realization demand of electricity needs reached 8.4% and electrification ratio reached 91.16%, higher than that of 2015 which was 88.30%. The higher the electrification ratio, the more widespread the distribution of electricity services to the public. Those factors influence the national electricity demands and Company's performance

Untuk meningkatkan daya saing nasional serta pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, Pemerintah telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019, yang salah satu sasarannya adalah menciptakan ketahanan energi dengan meningkatkan porsi energi terbarukan dan kapasitas terpasang pembangkit listrik menjadi 92,9 Gigawatt. Sasaran tersebut memberikan optimisme kepada kami untuk lebih meningkatkan kinerja untuk mendukung program Pemerintah, khususnya dalam mendukung ketahanan dan keamanan energi nasional.

To enhance the national competitiveness and sustainable economic growth, the Government has set the National Medium-Term Development Plan 2015-2019, one of the targets is to create energy endurance by improving the renewable energy portion and the power plant installed capacity into 92.9 Gigawatt. The target gives us optimism to improve the performance more to support Government's program, especially in supporting the national energy endurance and security.

Dalam kesempatan ini, perkenankanlah kami menyampaikan Laporan Tahunan 2016 yang memaparkan pencapaian kinerja Indonesia Power tahun 2016, serta berbagai upaya manajemen dalam meningkatkan daya saing dan memperkokoh posisi Perusahaan di sektor pembangkit tenaga listrik dan jasa pembangkit di industri ketenagalistrikan masa mendatang.

On this occasion, please allow us to deliver the Annual Report 2016, which describes the performance achievements of Indonesia Power in 2016, and our management efforts in improving the competitiveness and strengthening Company's position in the power generation industry and power plant services in the future.

Indonesia Power terus membangun pondasi dalam implementasi O&M yang andal, penerapan prinsip transparansi dan tata kelola perusahaan yang baik, dan berbagai upaya dalam mengajak setiap insan Indonesia Power untuk membangkitkan listrik dengan aman, bersih, hijau, andal, dan efisien untuk mencapai target kinerja perusahaan. Hal tersebut akan semakin mendekatkan Perusahaan dalam mencapai tujuannya yaitu menyelenggarakan bisnis pembangkitan tenaga listrik yang bersahabat dengan lingkungan.

Indonesia Power keeps building the foundation in implementing reliable O&M, transparency principles, and good corporate governance, in the effort to invite all Indonesia Power's personnel to generate electricity in a safe, clean and environmentally friendly, reliable, and efficient manner to achieve the Company's performance target. This will make the Company closer to the target, i.e. to conduct electricity generation business that is environmentally friendly.

Berbagai pengakuan dan prestasi menjadi bukti bahwa Indonesia Power terus berupaya memberikan yang terbaik bagi segenap pemangku kepentingan dengan

As proof that Indonesia Power keeps striving to give the best for all stakeholders in achieving the economic, social, and environmental performance, the Company obtained

pencapaian kinerja di bidang ekonomi, sosial dan lingkungan antara lain *The Best Power Plant Company with Environmentally Friendly of the Year, Renewable Energy* (PLTP) – Program Efisiensi Energi, *Top 5 O&M Company, 2nd The Best Human Capital* untuk kategori Anak perusahaan BUMN, *Appreciation of Human Capital Management System Improvement Development* dan *Vision Award - Annual Report.* Pencapaian tersebut tentunya merupakan hasil sinergi yang menjadi *value* Perusahaan, kolaborasi dan dukungan dari segenap pemangku kepentingan dan Indonesia Power meyakini dapat terus melanjutkan pertumbuhan usaha dalam mencapai visi Perusahaan menjadi perusahaan energi tepercaya dan tumbuh berkelanjutan.

Pencapaian Kinerja Perusahaan Tahun 2016

Kebijakan Strategis

Indonesia Power fokus pada 3 (tiga) aspek yaitu *Performance System, Process System*, dan *People System* dan telah menetapkan kebijakan dan strategi yang diarahkan untuk mengelola 3 (tiga) risiko utama yang mempengaruhi pencapaian kinerja Perusahaan yaitu (a) keandalan pembangkit, (b) efisiensi pembangkit serta (c) keamanan dan ketersediaan pasokan energi. Adapun kebijakan, strategi dan program kinerja Perusahaan tahun 2016 yang difokuskan di bidang *performance system* adalah peningkatan efisiensi, pengelolaan jumlah pasokan dan kualitas batubara; mencari sumber pasokan gas baru; standarisasi Manajemen K3, di bidang *process system* dilakukan melalui implementasi ISO 50001 (Manajemen Energi), *integrasi Enterprise Asset Management* dengan *Enterprise Resource Planning* serta otomatisasi proses bisnis. Dan terakhir, di bidang *People System* diantaranya meliputi akselerasi kompetensi bidang O&M; peningkatan kompetensi *problem-solving* serta kerjasama strategis dengan perguruan tinggi untuk penyediaan tenaga kerja dengan keahlian teknis pembangkit.

Di samping itu, peningkatkan keandalan pembangkit (*availability*) dan efisiensi terus dilakukan melalui implementasi manajemen aset, inovasi dalam teknologi pembangkitan, optimalisasi peran Anak Perusahaan untuk mendukung bisnis Indonesia Power di bidang Jasa O&M dan energi serta mengembangkan *Green Power Plant* secara berkelanjutan. Indonesia Power akan terus berupaya untuk meningkatkan kinerja operasi berdasarkan standar NERC (*North America Electric*

various acknowledgment and achievements, such as The Best Power Plants Company with Environmentally Friendly of the Year, Renewable Energy (GPP) – Energy Efficiency Program, Top 5 O&M Company, 2nd Best Human Capital for the category of Subsidiary of State-Owned Enterprises (BUMN), Appreciation of Human Capital Management System Improvement Development, and Vision Award - Annual Report. The achievements are the result of stakeholders' synergies, collaborations, and supports that became the Company's value. Indonesia Power believes that we can continue the business growth in achieving the Company's vision to become a trustworthy energy company with sustainable growth.

Company's Performance Achievements in 2016

Strategic Policies

Indonesia Power focuses on 3 (three) aspects, i.e. Performance System, Process System, and People system. The Company also has set policies and strategies to direct the 3 (three) main risk management that influence the Company's performance achievement, i.e. (a) power plant's reliability, (b) power plant's efficiency, and (c) security and availability of energy supply. The Company's policies, strategies, and performance program in 2016 are focused on performance system to improve efficiency and management of supply and quality of coal; find a new gas supply sources; standardize OHS Management, such as implementation of ISO 50001 (Energy Management); integrate Enterprise Asset Management with Enterprise Resource Planning; and automate business process. Lastly, in the People System sector, which includes the focus on accelerating O&M sector competence; improving problem-solving competence, and cooperating strategically with universities for manpower provision with the power plant technical expertise.

In addition, the improvement of power plants availability and efficiency is continuously carried out to implement asset management, power plant technology innovation, Subsidiaries' role optimization to support Indonesia Power's business in O&M Services and energy, and to develop sustainable Green Power Plant. Indonesia Power keeps striving to improve the Company's operational performance based on the NERC (North America Electric Reliability Corporation) Standard, and corporate

LAPORAN DIREKSI
Report from the Board of Directors

Reliability Corporation) dan kinerja korporat dengan memanfaatkan keunggulan kompetensi O&M serta mengoptimalkan potensi pasar di masa mendatang.

Direksi telah melakukan restrukturisasi organisasi dalam rangka optimalisasi peran sebagai asset manager dan perkuatan proses bisnis perusahaan yang ditetapkan melalui Keputusan Direksi Nomor: No.239.K/010/IP/2016 tanggal 6 Desember 2016. Untuk mendorong pencapaian kinerja yang ekselen, Perusahaan juga telah menerapkan Indonesia Power *Integrated Management System* (InPower IMS) yang merupakan sistem terintegrasi berbasiskan persyaratan Standar Internasional yang meliputi ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007, ISO 28000:2007, ISO 55001:2014, ISO 50001:2011, ISO 26000:2010, ISO 31000:2009, Kriteria Baldrige, SMK3, dan Sistem Manajemen Pengamanan (SMP).

Perbandingan Hasil dengan Target 2016

Secara umum target kinerja operasional di bidang pembangkitan tercermin dari indikator produksi, penjualan, PS, EAF, EFOR, dan tara kalor. Terkait dengan pencapaian indikator kinerja operasional target tahun 2016, terdapat 2 (dua) indikator kinerja yang melampaui target, yaitu Pemakaian Sendiri (PS) mencapai 4,36% atau 104% dari target sebesar 4,53% dan tara kalor sebesar 2.510 kcal/kWh atau 102% dari target sebesar 2.557 kcal/kWh. Sedangkan indikator yang tidak mencapai target adalah produksi dan penjualan mencapai 43.181 GWh dan 41.299 GWh atau 99,7% dari target 43.323 GWh dan 41.404 GWh, EAF mencapai 85,63% atau 97% dari target 88%, serta EFOR mencapai 7,23% atau 55% dari target 5%. Tidak tercapainya target-target di atas dipengaruhi oleh banyak faktor, untuk itulah Indonesia Power terus berupaya membenahi berbagai kendala dan permasalahan yang terjadi.

Dengan kapasitas produksi daya terpasang yang berasal dari pembangkit milik Perusahaan pada sistem Jawa Bali sebesar 8.877,68 MW, realisasi produksi energi listrik tahun 2016 meningkat 8,68% menjadi sebesar 43.180,60 GWh dibandingkan tahun 2015 sebesar 39.730,11 GWh, terutama dikontribusi oleh peningkatan produksi yang signifikan di UP Semarang, UP Perak Grati, serta pembangkit listrik tenaga air di UP Saguling dan UP Mrica. Volume penjualan energi listrik pada tahun 2016 naik 8,85% menjadi sebesar 41.299,01 GWh dibandingkan tahun 2015 yang berjumlah 38.011,11

performance, by utilizing the O&M competence excellence, and optimizing market potential in the future.

Directors has restructured the organization in order to optimize the role as an asset manager and to strengthen the Company's business process, set forth in Director's Decree Number 239.K/010/IP/2016 dated December 6, 2016. To encourage excellent performance achievement, the Company has also implemented Indonesia Power Integrated Management System (InPower IMS) that is an International Standard requirement-based integrated system, which covers ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007, ISO 28000:2007, ISO 55001:2014, ISO 50001:2011, ISO 26000:2010, ISO 31000:2009, Baldrige Criteria, SMK3, and Security Management System (SMP).

Comparison of Result and Target in 2016

Generally, the operational performance targets in the generation field are reflected in productions, sales, PS, EAF, EFOR, and heat rate indicators. In terms of operational performance indicator achievement of the 2016 targets, there are 2 (two) performance targets that exceeded the target, i.e. Self-Consumption (PS) which reached 4.36% or 104% of the target in the amount of 4.53%, and heat rate in the amount of 2,510 kcal/kWh or 102% of the target in the amount of 2,557 kcal/kWh. Indicators that did not reach the targets are production and sales, that reached 43,181 GWh and 41,299 GWh, or 99.7% of target 43,323 GWh and 41,404 GWh, EAF reached 85.63% or 97% of target that was 88%, and EFOR reached 7.23% or 55% of target that was 5%. The targets were not achieved due to many factors. Therefore, Indonesia Power keeps striving to fix various obstacles and problems that occur.

The Company's power plants on Java-Bali system have the installed capacity production in the amount of 8,877.68 MW. The realization of electricity generation in 2016 increased by 8.68%, to 43,180.60 GWh compared to 2015 which was 39,730.11 GWh, especially through the contribution of significant increase in production at Semarang GU, Perak Grati GU, and HPP at Saguling GU and Mrica GU. The volume of electricity sales in 2016 increased by 8.85% to 41,299.01 GWh compared to 2015 which was 38,011.11 GWh, in line with the increase of electricity production in 2016. The efficiency of self-

GWh seiring dengan peningkatan produksi listrik pada tahun 2016. Efisiensi pemakaian sendiri pada tahun 2016 meningkat menjadi sebesar 9,37%, dibandingkan dengan tahun 2015, pemakaian sendiri terhadap jumlah produksi mengalami penurunan 0,68% yang dipengaruhi oleh optimalisasi pengoperasian PLTA.

consumption in 2016 increased by 9.37% compared to 2015, the self-consumption to the total production experienced a decline of 0.68%, which was influenced by the HPP operation optimization.

Pendapatan usaha Indonesia Power diperoleh dari penjualan tenaga listrik dan pendapatan jasa yang diberikan. Untuk tahun 2016 pendapatan usaha meningkat 14,63% menjadi sebesar Rp36.705.954 juta dibandingkan tahun 2015 sebesar Rp32.020.186 juta, yang terdiri dari penjualan tenaga listrik sebesar Rp34.504.119 juta dan pendapatan O&M lain-lain sebesar Rp2.201.835 juta. Adapun beban usaha mengalami peningkatan 9,08% menjadi Rp32.610.030 juta dibanding tahun sebelumnya, namun masih lebih rendah dibandingkan peningkatan pendapatan usaha yang diperoleh. Mengingat terdapat peningkatan beban pajak sebagai dampak dari revaluasi aset tetap pada tahun 2015, maka terjadi penurunan laba bersih perusahaan sebesar 38% menjadi Rp2.886.704 juta dibandingkan tahun 2015 sebesar Rp4.672.522 juta.

Indonesia Power's revenues consists of electricity sales and services revenues. In 2016, the revenues increased by 14.63% to Rp36,705,954 million compared to 2015, which was Rp32,020,186 million, which consists of the electricity sales in the amount of Rp34,504,119 million and services revenues and other in the amount of Rp2,201,835 million. The operational expenses increased by 9.08% to Rp32,610,030 million compared to the previous year, but still lower than the increase of obtained revenues. Considering the increase in tax expenses as an impact of revaluation of property, plant, and equipment in 2015, the Company's net income decreased by 38% to Rp2,886,704 million when compared in 2015 Rp4,672,522 million.

Pada tahun 2016 Indonesia Power mencatatkan posisi keuangan yang optimal. Total aset mengalami sedikit penurunan 2,57% menjadi sebesar Rp220.888.024 juta dibandingkan tahun 2015 sebesar Rp226.720.248 juta terutama disebabkan oleh rugi fiskal tahun 2016 sebagai dampak dari pelaksanaan revaluasi aset tahun 2015. Sedangkan total liabilitas menurun 35,93% menjadi sebesar Rp7.665.482 juta dibandingkan tahun 2015, yang disebabkan oleh turunnya liabilitas jangka pendek sebesar 50,53% dibandingkan tahun 2015 dan liabilitas jangka panjang meningkat 12,82%.

In 2016, Indonesia Power recorded an optimum financial position. Total assets decreased by 2.57% to Rp220,888,024 million, compared to 2015 which was Rp226,720,248 million, due to the fiscal loss in 2016 as an impact of asset revaluation in 2015. Meanwhile, total liabilities decreased by 35.93% to Rp7,665,482 million compared to 2015, which is due to the decrease in current liabilities in the amount of 50.53% compared to 2015, and the increase in non-current liabilities in the amount of 12.82%.

Dalam hal efisiensi energi, Indonesia Power terus melanjutkan implementasi program Peningkatan & Pembudayaan Manajemen Efisiensi Energi (PPE) yang dimulai sejak tahun 2015 dan di tahun 2016 diimplementasikan kepada 7 unit pembangkit.

In terms of energy efficiency, Indonesia Power keeps implementing the Energy Efficiency Management Culture & Enhancement (PPE) Program since 2015, and in 2016, the program is implemented at 7 generating units.

Kendala yang dihadapi Perusahaan

Indonesia Power memandang bahwa kendala yang dihadapi saat ini dalam menjalankan bisnis ketenagalistrikan adalah berkaitan dengan pengembangan proyek-proyek pembangkit baru dengan skema IPP (*Independent Power Producer*) dimana Perusahaan menghadapi kendala perijinan

Obstacles faced by the Company

Indonesia Power considers the current obstacle in conducting the electricity business is related to the new power plants project with IPP (Independent Power Producer) scheme, in which the Company faces obstacle

LAPORAN DIREKSI
Report from the Board of Directors

dan pembebasan lahan dalam pembangunan pembangkit baru yang menyebabkan mundurnya waktu penyelesaian proyek (COD/Commercial Operation Date).

Adanya ketidakpastian jangka waktu proses perijinan yang harus diperoleh dalam mengembangkan proyek pembangkit baru disikapi oleh Indonesia Power bersama PT PLN (Persero) sebagai induk perusahaan, dengan terus melakukan koordinasi kepada pihak-pihak berwenang dan berkepentingan. Tujuannya agar Indonesia Power mendapatkan kepastian perolehan perizinan serta kepastian hukum terkait pelaksanaan pengembangan pembangkit baru. Untuk itulah, Indonesia Power terus berupaya menjadikan kendala tersebut sebagai tantangan yang perlu dicarikan solusinya dalam mendukung program pemerintah untuk membangun infrastruktur ketenagalistrikan di Indonesia.

in the permit and land acquisition to construct new power plants, which caused the delay in the project completion (COD/Commercial Operation Date).

Indonesia Power, together with the PT PLN (Persero) as the parent company, have to address the uncertainty in the permit process that must be obtained to develop the new power plant projects, by coordinating with the authorities and interested parties. The objective is Indonesia Power shall obtain certainty in the permitting license and law related to the development of new power plants. Therefore, Indonesia Power continues to face these obstacles as a challenge to be solved, in order to support the Government's program to build the electricity infrastructures in Indonesia.

Prospek Usaha Perseroan ke Depan

Pemakaian tenaga listrik Indonesia yang diperkirakan meningkat dari 483 TWh, atau mengalami pertumbuhan rata-rata 8,3% selama 10 tahun mendatang. Meningkatnya kebutuhan listrik Jawa - Bali yang diperkirakan dari 144 TWh menjadi 275 TWh, atau tumbuh rata-rata 7,6% per tahun, merupakan indikasi bahwa perkembangan industri listrik di masa depan merupakan peluang yang baik bagi Indonesia Power.

Pengembangan kapasitas pembangkit tenaga listrik diarahkan untuk memenuhi pertumbuhan beban, dan pada beberapa wilayah tertentu diutamakan untuk memenuhi kekurangan pasokan tenaga listrik. Pengembangan kapasitas pembangkit tenaga listrik dilaksanakan sesuai dengan kebijakan pemerintah, misalnya dalam pengembangan Energi Baru dan Terbarukan (EBT) serta peran dalam program 35.000 MW.

Indonesia Power mengelola berbagai jenis pembangkit (PLTU, PLTGU, PLTG, PLTA, PLTD dan PLTP) dan menjadi modal dasar dalam meraih berbagai peluang di masa depan. Keunggulan tersebut perlu dikelola dan diciptakan suatu strategi yang sesuai dalam menghadapi tantangan dan persaingan yang makin ketat. Indonesia Power juga ikut berpartisipasi dalam pengembangan pembangkit 35.000 MW yang dicanangkan oleh pemerintah, yang dilakukan melalui 2 (dua) cara, yaitu: (1) pemanfaatan area pembangkit eksisting untuk pembangunan pembangkit baru yang

Company's Business Prospect in the Future

The electricity consumption in Indonesia is predicted to increase from 483 TWh, or an average growth of 8.3% in the next 10 years. The increasing demand for electricity in Java-Bali is estimated from 144 TWh to 275 TWh, or an average growth of 7.6% per year, an indication that the development of electricity industry in the future is a very good opportunity for Indonesia Power.

Power plant capacity development is directed to fulfill the load growth, and in some areas, to meet the shortage of electricity supply. The power plant capacity development is conducted in line with the government's regulation, such as the development of New and Renewable Forms of Energy (NRE), and 35,000 MW Program.

Indonesia Power manages various types of power plant (SPP, CCPP, GTPP, HPP, DPP, and GPP), and becomes the authorized capital in achieving many opportunities in the future. These advantages need to be managed and an appropriate strategy needs to be created in order to face the increasingly stringent challenges and competition. Indonesia Power also participates in the 35,000 MW generator development planned by the Government, which is carried out through 2 (two) ways, i.e.: (1) utilization of area in the existing power plant to develop new power plant that will be owned by the Company, and

akan dimiliki oleh perusahaan, dan (2) mengikuti *tender Independent Power Producer* (IPP) yang diselenggarakan oleh PLN, bekerjasama dengan *investor/developer* nasional maupun internasional.

Berdasarkan data pasokan energi listrik di Jawa Bali tahun 2016 (menurut data operasional Jawa Bali) sebesar 175.140 GWh, Indonesia Power memberikan kontribusi sebesar 23,65% atau 41.405 GWh. Kontribusi tersebut meningkat jika dibandingkan tahun 2015 yang hanya sebesar 22,97% atau 38.129 GWh. Selain itu, Indonesia Power juga melakukan pengembangan sejumlah pembangkit energi terbarukan yang saat ini dalam tahap *feasibility study, engineering* dan *survey* serta proses perijinan. Dengan berbagai perkembangan tersebut serta upaya efisensi di segenap lini operasi, kami optimis kinerja Indonesia Power akan terus tumbuh secara berkelanjutan.

Membangun Sumber Daya Manusia Berkelanjutan yang Kompeten dan Profesional

Dalam hal pengelolaan sumber daya manusia, Indonesia Power terus berkomitmen menerapkan pengelolaan sistem *human capital* yang efektif. Hal tersebut ditunjukkan dengan diperolehnya penghargaan *2nd The Best Human Capital* untuk kategori Anak perusahaan BUMN yang diselengarakan oleh IPMI dan *Economic Review* serta *Appreciation of Human Capital Management System Improvement Development* oleh Dunamis Organization Service. Penghargaan tersebut menjadi motivasi Indonesia Power untuk terus meningkatkan pengelolaan SDM dengan praktek terbaik, yaitu dengan terus berupaya membantu pegawai meningkatkan kualitas hidup mereka dan menjamin seluruh hak-hak pegawai, termasuk memperoleh remunerasi yang layak, serta kesempatan untuk meniti karir dan mengembangkan diri mereka secara profesional.

Perusahaan juga melanjutkan program kerja implementasi Sistem Manajemen Kinerja yang dimulai sejak tahun 2012 dan sedang dalam penyusunan kebijakan pengelolaan *talent management*. Indonesia Power telah melakukan *Survei Human Resources Satisfaction Engagement* (HRSE) secara berkala untuk mengetahui sejauhmana tingkat implementasi dan kepuasan pegawai serta efektifitas kebijakan SDM yang telah diterapkan. Untuk tahun 2016, realisasi *action plan* hasil *survey* tersebut di triwulan IV mencapai 96% untuk

(2) participation in tender of Independent Power Producer (IPP), conducted by PLN, in cooperation with national and/or international investor/developer.

From the electricity supply of Java Bali in 2016 (according to operational data of Java Bali) amounted to 175,140 GWh, Indonesia Power contributed to 23.65% of them or 41,405 GWh. The contribution increased compared to 2015, which was 22.97% or 38,129 GWh. In addition, Indonesia Power also develops various renewable energy power plants in the phase of the feasibility study, engineering, and survey, as well as permits. With the various developments as well as efficiency efforts in all the lines of operations, we are optimistic that Indonesia Power's performance will continue to grow sustainably.

Building Sustainable Human Resources that is Competent and Professional

In terms of human resources management, Indonesia Power is committed to implement effective human capital system management. This is shown by the achievement of 2nd Best Human Capital for the category of Subsidiary of State-Owned Enterprises (BUMN), held by IPMI and Economic Review, and Appreciation of Human Capital Management System Improvement Development by Dunamis Organization Service. The awards become Indonesia Power's motivation to continue improving the Human Resources management with best practice, i.e. by striving to help the employee improve their quality of life, and to ensure every employee's right, including fair remuneration, and the opportunities to pursue career and develop themselves professionally.

The Company also continues the implementation work program of Performance Management System, which started in 2012, and currently is formulating the talent management policy. Indonesia Power has conducted Human Resources Satisfaction Engagement (HRSE) survey regularly to know how far is the implementation and satisfaction level of the employee, as well as the applied Human Resources policies. In 2016, the action plan realization of survey results in the Fourth Quarter reached 96% for the follow-up achievement in the annual

LAPORAN DIREKSI
Report from the Board of Directors

pencapaian tindak lanjutnya dalam target tahunan. Sosialisasi dan internalisasi untuk meningkatkan *awareness* terkait program korporat dan nilai-nilai Perusahaan IP - AKSI melalui berbagai media baik di Kantor Pusat maupun di unit melalui media TV Wall, email, In Power Weekly News, Desktop PC dan Kuis Budaya yang disesuaikan dengan tema bulanan Budaya Perusahaan.

target. The socialization and internalization to increase awareness related to corporate programs and values (IP-AKSI) through various media, both in Head Office and units, are conducted through TV Wall media, email, InPower Weekly News, Desktop PC, and Culture Quiz, in line with the monthly theme of Corporate Culture.

Sejalan dengan program peningkatan kompetensi pegawai, di tahun 2016 Indonesia Power melaksanakan *launching* program Sistem Pembelajaran Akselerasi Operasi dan Pemeliharaan Pembangkit. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesiapan kompetensi operator dan teknisi menjadi unggul dan kompetetif selaras dengan pertumbuhan Perusahaan. Adapun metode pembelajarannya yaitu *In Class Training* sebesar 30% dan *On The Job Training* sebesar 70%. Dengan sistem akselerasi ini diharapkan Indonesia Power dapat menciptakan operator dan teknisi yang kompeten dimana semula membutuhkan waktu 5 hingga 6 tahun menjadi 2,5 tahun saja. Sistem pembelajaran akselerasi kompetensi bidang operasi dilaksanakan dengan 10 prinsip pembelajaran dan sistem pembelajaran akselerasi kompetensi bidang pemeliharaan dilaksanakan dengan 8 prinsip pembelajaran.

In line with the employee competence development program, in 2016, Indonesia Power launched Power Plant Operation & Maintenance Acceleration Training Program. The program aims to improve the competence readiness of operator and technician to excel and compete, in line with the Company's growth. The education method is 30% In Class Training and 70% On The Job Training. With the acceleration system, Indonesia Power hopes to create competence operator and technician, in which the time needed was 5 to 6 years, and now it is shortened to 2.5 years. The operation competence acceleration training is conducted with 10 education principles, and the maintenance competence acceleration training is conducted with 8 education principles.

Kami meyakini bahwa pegawai yang kompeten, profesional, dan berdedikasi tinggi terhadap Indonesia Power merupakan mitra kerja yang terbaik bagi Perusahaan untuk dapat mengoptimalkan bisnisnya melalui inovasi dan kinerja unggul yang mereka tunjukkan. Melalui upaya-upaya tersebut, Direksi optimis bahwa Indonesia Power akan terus mengembangkan diri menjadi yang terbaik di tengah tantangan industri yang makin meningkat.

We believe that the competent, professional, and highly dedicated employees in Indonesia Power are the best partner for the Company to optimize its business through excellent innovation and performance that they have shown. Through those efforts, Directors is optimistic that Indonesia Power will continue to develop itself to be the best in the midst of increasing industry challenges.

Komitmen Tata Kelola Perusahaan yang Berkelanjutan

Indonesia Power memandang praktik tata kelola perusahaan yang baik merupakan alat untuk menjaga kelangsungan usaha, menjaga kepercayaan *stakeholders*, dan menumbuhkan integritas perusahaan dalam jangka panjang. Dalam meningkatkan kualitas implementasi tata kelolanya, Indonesia Power melakukan berbagai inisiatif dengan mengembangkan dan menyempurnakan sistem yang dimiliki, internalisasi

Commitment to Sustainable Corporate Governance

Indonesia Power views a proper corporate governance practice as a tool to protect business continuity, protect stakeholders' trust, and develop a long-term company's integrity. In improving the quality of governance implementation, Indonesia Power conducts various initiatives by developing and improving the existing

budaya Perusahaan, dan pengelolaan sumber daya manusia yang andal.

Untuk mengetahui tingkat implementasi GCG yang telah dilakukan, Indonesia Power melakukan *assessment* dan *review* GCG secara berkala, minimal setahun sekali. Selain itu, implementasi GCG juga menjadi salah satu *Key Performance Indicator* (KPI) dalam Kontrak Manajemen Perusahaan, yaitu pada bagian Perspektif *Leadership* dalam bentuk pencapaian skor *assessment* GCG. *Assessment* GCG dilakukan dengan mengacu pada Keputusan Sekretaris Menteri BUMN Nomor SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012. Untuk tahun buku 2016 telah dilakukan *assessment* GCG oleh BPKP dengan perolehan skor 91,99 dengan predikat Sangat Baik, di atas target yang ditetapkan yaitu sebesar 90. Selain itu, Perusahaan juga mengikuti rating GCG *Corporate Governance Perception Index* (CGPI) tahun 2016 yang diselenggarakan oleh The Institute for Corporate Governance (IICG) untuk mengetahui persepsi *stakeholder* terhadap praktik GCG yang telah dilakukan mendapatkan predikat "*The Trusted Company*" dengan capaian skor 82,94.

Fokus tata kelola perusahaan yang dilakukan sepanjang tahun 2016 mengacu pada *Road Map* GCG dilakukan untuk mendorong peningkatan kualitas dan cakupan implementasi GCG secara menyeluruh, mulai tingkat Unit, Korporat dan Anak Perusahaan. Yaitu dengan melakukan sinergi GCG pada Anak Perusahaan dengan menjadikan skor GCG sebagai KPI korporat Anak Perusahaan, *vendor meeting*, dan Survei Perilaku Etis Kepada Mitra Kerja.

Implementasi etika Perusahaan sebagai unsur penting dalam menegakkan prinsip-prinsip GCG, antara lain dilakukan dengan menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) yang berlaku bagi Direksi sesuai dengan instruksi PT PLN (Persero) selaku pemegang saham, penerapan program pengendalian gratifikasi sejalan dengan program IP Bersih dan penerapan kebijakan sistem pelaporan pelanggaran (*Whistle Blowing System*) secara konsisten. Seluruh Direksi dan Dewan Komisaris telah menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Perusahaan (LHKPN) secara berkala dengan tepat waktu sesuai ketentuan. Penerapan kebijakan sistem pelaporan pelanggaran (*Whistleblowing System Policy*) juga dipandang cukup efektif dalam mengantisipasi adanya potensi pelanggaran yang dapat menimbulkan kerugian perusahaan yang lebih besar.

system, Company's cultural internalization, and reliable human resource management.

To discover the level of practiced GCG implementation, Indonesia Power conducts a periodical GCG assessment and review, at least once a year. In addition, GCG implementation has become one of the Key Performance Indicators (KPI) on Corporate Management Contract, specifically on the part of Leadership Perspective in the form of GCG assessment score achievement. GCG Assessment is conducted in accordance with the Secretary of the Minister of State-Owned Enterprises Decree Number SK-16/S.MBU/2012 dated June 6, 2012. For 2016 fiscal year, BPKP had conducted GCG assessment obtaining the score of 91.99 with the predicate of Excellent, above the intended target that was 90. In addition, the Company also participated in GCG rating process of Corporate Governance Perception Index (CGPI) in 2016, held by The Institute for Corporate Governance (IICG) to discover the stakeholders' perception of GCG practices conducted by the Company, and it received the predicate of "The Trusted Company" with the score of 82.94.

The focus of corporate governance conducted throughout 2016 was in reference to GCG Road Map, carried out to encourage the improvement of quality and thorough GCG implementation scope, starting from the level of Unit, Corporate, and Subsidiaries, by synergizing GCG onto Subsidiaries and setting the GCG score as Subsidiary Corporate KPI, vendor meeting, and Ethical Behavior Survey toward Partners.

The implementation of corporate code of conduct as an essential element in establishing GCG principles, among them conducted by delivering State's Official Wealth Report (LHKPN) applied for the Board of Directors accordingly with the instruction of PT PLN (Persero) as shareholder, a consistent implementation of gratification control program aligned with IP Bersih program and the implementation of Whistle Blowing System. The Board of Directors and Board of Commissioners had submitted a periodical and punctual State's Official Wealth Report (LHKPN) accordingly with regulation. The implementation of Whistleblowing System Policy has been quite effective in anticipating the potential of violation that may cause a bigger loss for the Company.

LAPORAN DIREKSI
Report from the Board of Directors

Hubungan Dewan Komisaris dan Direksi dibangun atas dasar prinsip saling menghormati dan memahami tugas, tanggung jawab dan wewenang masing-masing sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun Anggaran Dasar Perusahaan. Adapun pedoman kerja dan hubungan antara Dewan Komisaris dan Direksi telah ditetapkan dalam pedoman *Board Manual* yang mengatur aspek antara lain tanggung jawab, wewenang, hak, kewajiban, etika Dewan Komisaris dan Direksi, serta pengaturan rapat dan mekanisme hubungan kerja antara Dewan Komisaris dan Direksi.

The relationship of Board of Directors and Board of Commissioners is build based on the principles of respect and understanding of their duties, responsibilities, and authorities in accordance with rules and legislations and Articles Of Association. Work guideline for the relationship between the Board of Commissioners and Directors had been set on Board Manual guideline that regulates several aspects, such as responsibilities, authorities, rights, obligations, code of conduct, and meeting management and work relation mechanism between Board of Commissioners and Directors.

Komitmen Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Sebagai perusahaan energi yang memiliki dampak langsung pada kehidupan masyarakat, Indonesia Power terus berupaya menyediakan produk dan jasa yang memenuhi harapan pelanggan dan ramah lingkungan. Yaitu mensinergikan aktivitas bisnis dalam pengelolaan lingkungan hidup, ketenagakerjaan, kesehatan dan keselamatan kerja, tanggung jawab terhadap pelanggan serta pengembangan sosial kemasyarakatan untuk mendorong peningkatan kualitas kehidupan dan lingkungan yang lebih baik. Kelestarian lingkungan dan alam selain menjamin kelancaran proses bisnis juga menjamin ketersediaan pasokan bahan baku produksi yang bersumber dari alam.

Salah satu upaya pengelolaan lingkungan dilakukan melalui pelaksanaan Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER) oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Pada tahun 2016, Indonesia Power telah mendapatkan 9 (sembilan) PROPER Hijau. Program konservasi lingkungan di sekitar pembangkit juga terus dilakukan.

InPower-Care merupakan komimen sekaligus wujud tanggung jawab sosial Indonesia Power untuk memperluas akses masyarakat dalam mencapai kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang lebih baik sehingga menjadi lebih berdaya dan mandiri dengan kualitas dan kesejahteraan yang semakin baik. Realisasi anggaran CSR melalui kegiatan InPower-Care tahun 2016 mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp20.591 juta dibandingkan tahun lalu sebesar Rp18.153 juta.

Commitment to Corporate Social Responsibility

As an energy company that has a direct impact on the life of society, Indonesia Power consistently attempts to provide products and services that would fulfill customer's aspiration and are environmentally friendly. The Company strives to synergize business activities in the environment management, employment, occupational health and safety, responsibility toward the customer, and community's social development to encourage the improvement of life quality and the environment. Environmental and natural sustainability would guarantee the continuity of business process and the availability of production materials supply sourced from nature.

One of the efforts in environmental management is the implementation of Industrial Performance Assessment Program for environmental management (PROPER) by the Ministry of Environment. In 2016, Indonesia Power received 9 (nine) Green PROPER. The Company constantly conducts environmental conservation program around the area of generating units.

InPower-Care is a commitment and embodiment of Indonesia Power's social responsibility to expand community access in achieving better social, economic, and cultural conditions so that the community can be more empowered and independent with proper life quality and welfare. CSR budget realization through InPower-Care activity in 2016 experienced an increase in the amount of Rp20,591 million compared to last year's budget in the amount of Rp18,153 million.

Perubahan Komposisi Direksi

Selama tahun 2016 terdapat beberapa kali perubahan susunan komposisi Direksi Perusahaan. Komposisi dan jumlah anggota Direksi yang ditetapkan RUPS telah memperhatikan visi, misi, dan rencana strategis Perusahaan yang memungkinkan pengambilan keputusan dilakukan secara efektif.

Berdasarkan Keputusan RUPS Sirkuler tanggal 21 Maret 2016 telah terjadi perubahan komposisi Direksi Indonesia Power menjadi sebagai berikut, yaitu Sdri. Sripeni Inten Cahyani sebagai Direktur Utama, Sdr. Eri Prabowo sebagai Direktur Operasi I, Sdr. Antonius RT Artono sebagai Direktur Operasi II, Sdr. Hudiono sebagai Direktur Keuangan, Sdr. Adi Supriono sebagai Direktur Pengembangan dan Niaga serta Sdr. Roikhan sebagai Direktur Sumber Daya Manusia dan Administrasi.

Saya atas nama Direksi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh anggota Direksi yang telah berakhir masa jabatannya atas kontribusi yang sangat berharga selama menjabat sebagai Direksi Perusahaan.

Apresiasi

Dukungan dari semua pihak menjadi landasan keberhasilan Indonesia Power untuk terus tumbuh dan berkelanjutan dalam menghadapi tantangan mendatang. Oleh karena itu, Kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih atas arahan pemegang saham, Dewan Komisaris, dedikasi para pegawai serta mitra usaha atas kepercayaan, kontribusi dan dukungan yang telah diberikan. Kami yakin bahwa dengan kompetensi dan kemampuan yang dimiliki, diiringi dengan kerja keras dan semangat yang kuat oleh seluruh jajaran manajemen dan pegawai, Indonesia Power akan dapat terus memanfaatkan setiap peluang di depan dengan memberikan kinerja yang optimal.

Change in Board of Directors' Composition

Throughout 2016, there had been several changes in the composition of the Company's Directors. Composition and number of Directors' Member are set forth by GMS, taking into account the vision, mission, and strategic plan of the Company to enable decision making that is effective, precise, fast, and able to act independently.

Based on Circular GMS Decree on March 21, 2016, there had been changes in the composition of Indonesia Power's Board of Directors as follows, i.e. Mrs. Sripeni Inten Cahyani as President Director, Mr. Eri Prabowo as Operational Director I, Mr. Antonius RT Artono as Operational Director II, Mr. Hudiono as Financial Director, Mr. Adi Supriono as Director of Development and Commerce, and Mr. Roikhan as Human Resource and Administration Director.

On behalf of the Board of Directors, I express my sincere gratitude to all retired members of the Board of Directors that had provided valuable contribution during their tenure as Company's Board of Directors.

Appreciation

Support from all parties has become the successful foundation for Indonesia Power to grow continuously and sustainably in overcoming future challenges. Therefore, We express our appreciation and gratitude for the directions given by Shareholders, Board of Commissioners, employees and partners dedication for the trust, contribution and support granted to us. We are certain that with our competence and skill, accompanied with hard work and strong passion from all level of management and employee, Indonesia Power will continue to benefit from any future opportunity ahead by delivering optimum performance.

Jakarta, 30 Mei 2017
Atas Nama Direksi
PT Indonesia Power
On behalf of the Board of Directors of PT Indonesia Power

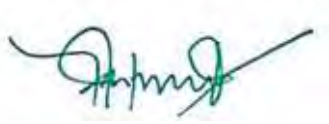

Sripeni Inten Cahyani
Direktur Utama
President Director

LAPORAN DIREKSI
Report from the Board of Directors

Keterangan foto (dari kiri ke kanan)
Photo Caption (left to right)

1. **Hudiono**
   Direktur Keuangan
   Director of Finance

2. **Antonius RT Artono**
   Direktur Operasi II
   Director of Operations II

3. **Eri Prabowo**
   Direktur Operasi I
   Director of Operations I

4. **Sripeni Inten Cahyani**
   Direktur Utama
   President Director

5. **Adi Supriono**
   Direktur Pengembangan dan Niaga
   Director of Development and Commerce

6. **Roikhan**
   Direktur SDM dan Administrasi
   Director of Human Resources and Administration

PROFIL DIREKSI
Board of Directors Profile

Sripeni Inten Cahyani
Direktur Utama
President Director

Warga Negara Indonesia, berdomisili di Jakarta, berusia 48 tahun. Meraih gelar Sarjana Teknik Kimia dari Universitas Diponegoro (1992), Magister Manajemen Keuangan dari STM PPM Jakarta (2001), serta gelar Profesi Ajun Ahli Asuransi Indonesia Kerugian (AAAIK).

Indonesian citizen, domiciled in Jakarta age 48. Have a Bachelor of Chemical Engineering from Universitas Diponegoro (1992), Magister of Financial Management from STM PPM Jakarta (2001), and Profession: *Ajun Ahli Asuransi Indonesia Kerugian* (AAAIK).

Perjalanan Karir:
Sebelum menjabat sebagai Direktur Utama Indonesia Power, beliau menjabat sebagai Direktur Keuangan Indonesia Power (2013 - 2016). Beberapa jabatan lain yang pernah dipegangnya adalah Eksekutif Utama Bidang Keuangan Indonesia Power yang ditugaskaryakan sebagai Senior Spesialis Keuangan Divisi Keuangan Korporat PLN (2013), Kepala Divisi Pendanaan dan Asuransi Indonesia Power (2010-2013), Vice President Indonesia Power (2009-2010) dan Manager Perencanaan & Administrasi Pendanaan (2007-2009).

Career:
Before serving as the President Director of Indonesia Power, she was the Financial Director of Indonesia Power (2013 - 2016). Some of the positions she held were Finance Executive Indonesia Power who was assigned as Financial Specialist Senior of Corporate Finance Division of PLN (2013), Head of Funding and Insurance Division of Indonesia Power (2010-2013), Vice President of Indonesia Power (2009-2010), and Manager of Funding Planning and Administration (2007-2009).

Training yang diikuti antara lain:
Beliau aktif mengikuti berbagai program *Leadership* antara lain *Enterprise Risk Management Certified Professional* (ERMCP) dan *Chartered Financial Analyst* (CFA) level 1, *Profesional Director Program* - IICD, *Certified Strategic Execution Profesional* (CSEP), *Mission – Vision Review and Core Competency Development, Program General Electric – Executive Leadership Training, Pricing and Settlement* Pembangkit, *Project Financing Modelling,* Perpajakan, *Trade Finance, Business Model, Negotiation skill, Enterprise Risk Management*, Asuransi dan Manajemen Risiko serta *Energy Modelling,* ISO 31000 *International Risk Management Standard* ERM *Fundamentals,* pelatihan ASEAN *Corporate Governance Scorecard, Strategic Leadership, GRC Best Practise and Board Governance, Introduction to Technical Risk Assessment Process* (TRAP), *Business Continuity Management System* (BCMS) *for Power Plants, Enterprise Value Mapping,* UU No. 40, *Commercial Dispute & Arbitration, GCG, Stakeholder Management, Board Duties, Responsibilities & Liabilities, Building Trust into Sustainable Business* dan *Project Management Office.*

Training attended, namely:
She actively attends numerous Leadership Program, such as Enterprise Risk Management Certified Professional (ERMCP) and Chartered Financial Analyst (CFA) level 1, Profesional Director Program - IICD, Certified Strategic Execution Profesional (CSEP), Mission – Vision Review and Core Competency Development, General Electric – Executive Leadership Training, Power Plant Pricing and Settlement, Project Financing Modelling, Taxes, Trade Finance, Business Model, Negotiation skill, Enterprise Risk Management, Insurance and Risk Management, and Energy Modelling, ISO 31000 International Risk Management Standard ERM Fundamentals, ASEAN Corporate Governance Scorecard Training, Strategic Leadership, GRC Best Practice and Board Governance, Introduction to Technical Risk Assessment Process (TRAP), Business Continuity Management System (BCMS) for Power Plants, Enterprise Value Mapping, Law No. 40, Commercial Dispute & Arbitration, GCG, Stakeholder Management, Board Duties, Responsibilities & Liabilities, Building Trust into Sustainable Business, and Project Management Office.

Dasar Pengangkatan Pertama:
Keputusan Pemegang Saham secara Sirkuler tanggal 21 Maret 2016.

First Appointment Basis:
Circular GMS Resolution dated March 21, 2016.

Penugasan Khusus (jabatan lain):
Komisaris PT Putra Indo Tenaga dan Komisaris PT Tangkuban Parahu Geothermal Power.

Penugasan Khusus (jabatan lain):
Commissioner of PT Putra Indo Tenaga and Commissioner of PT Tangkuban Parahu Geothermal Power.

Eri Prabowo
Direktur Operasi I
Director of Operations I

Warga Negara Indonesia, berdomisili di Jakarta, berusia 50 tahun. Meraih gelar Teknik Mesin dari Universitas Indonesia (1990), Magister Information Technology dari Universitas Indonesia (1998) dan Doctor of Philosophy (PhD) in Economics dari Universitas Airlangga (2010).

Indonesian citizen, domiciled in Jakarta age 50. Have a Bachelor of Machine Engineering from Universitas Indonesia (1990), Magister of Information Technology from Universitas Indonesia (1998), and Doctor of Philosophy (PhD) in Economics from Universitas Airlangga (2010).

Perjalanan Karir:
Sebelum menjabat sebagai sebagai Direktur Operasi I, pernah menjabat sebagai Direktur Produksi Indonesia Power (2013-2016). Beberapa jabatan lain yang pernah dipegangnya adalah Sekretaris Perusahaan Indonesia Power (2012-2013), General Manager UBP Saguling Indonesia Power (2010-2012) serta Deputy General Manager Energi Primer UBP Suralaya Indonesia Power (2008-2010) dan Ahli Kajian Kelayakan Proyek Indonesia Power (2007-2008). Memiliki pengalaman kerja internasional sebagai Maintenance Team Leader untuk proyek Annual Inspection dan Steam Turbine and Generator Remaining Life Assessment di Rabegh Steam Power Plant, Saudi Arabia. Aktif di Chairman HAPUA Workgroup 1.

Career:
Before serving as Operation Director I, he served as Production Director of Indonesia Power (2013-2016). Some of the positions he held were Corporate Secretary of Indonesia Power (2012-2013), General Manager of Saguling GUIndonesia Power (2010-2012), as well as Deputy General Manager of Primary Energy of Suralaya GU Indonesia Power (2008-2010), and Project Feasibility Study Expert of Indonesia Power (2007-2008). Have international work experience as Maintenance Team Leader for Annual Inspection and Steam Turbine and Generator Remaining Life Assessment Project in Rabegh Steam Power Plant, Saudi Arabia.
Active as a Chairman at HAPUA Workgroup 1.

Training yang diikuti antara lain:
Beliau telah mengikuti program pelatihan diantaranya, *Leadership Capacity Building, Business Negotiation Skill, Financial Modelling For Project, Professional Director Program,* IHT Tata Kelola Batu Bara dan *Workshop Senior Leader Capacity Building* Manajemen Risiko, pelatihan ASEAN *Corporate Governance Scorecard, Strategic Leadership, GRC Best Practise and Board Governance, Introduction to Technical Risk Assessment Process* (TRAP), *Business Continuity Management System* (BCMS) *for Power Plants, Enterprise Value Mapping*, UU No. 40, *Commercial Dispute & Arbitration, GCG, Stakeholder Management, Board Duties, Responsibilities & Liabilities, Building Trust into Sustainable Business* dan *Project Management Office*.

Training attended, namely:
He had attended numerous training, such as Leadership Capacity Building, Business Negotiation Skill, Financial Modelling For Project, Professional Director Program, Coal Governance IHT and Risk Management Capacity Building for Senior Leader Workshop, ASEAN Corporate Governance Scorecard, Strategic Leadership Training, GRC Best Practice and Board Governance, Introduction to Technical Risk Assessment Process (TRAP), Business Continuity Management System (BCMS) for Power Plants, Enterprise Value Mapping, Law No. 40, Commercial Dispute & Arbitration, GCG, Stakeholder Management, Board Duties, Responsibilities & Liabilities, Building Trust into Sustainable Business, and Project Management Office.

Dasar Pengangkatan Pertama:
Keputusan Pemegang Saham secara Sirkuler tanggal 21 Maret 2016

First Appointment Basis:
Circular GMS dated March 21, 2016

Penugasan Khusus (jabatan lain):
Komisaris Utama PT Indo Pusaka Berau dan Komisaris PT Rajamandala Electric Power.

Special Assignment (other position):
President Commissioner of PT Indo Pusaka Berau and Commissioner of PT Rajamandala Electric Power.

PROFIL DIREKSI
Board of Directors Profile

Antonius RT Artono
Direktur Operasi II
Director of Operations II

Warga Negara Indonesia, berdomisili di Jakarta, berusia 53 tahun. Meraih gelar Sarjana Teknik Kimia dari Institut Teknologi Sepuluh November (1986) dan Sarjana Teknik Geothermal dari Institute University of Auckland (1995) serta Magister of Business Administration dari University of Missouri St. Louis.

Indonesian Citizen, domiciled in Jakarta, age 53. Have a a Bachelors Degree in Chemical Engineering from the Technological Institute of Sepuluh November (1986) and a Bachelors Degree in Geothermal Engineering from the Institute University of Auckland (1995) as well as a Masters Degree in Business Administration from the University of Missouri St. Louis.

Perjalanan Karir:
Sebelum menjabat sebagai Direktur Operasi II, pernah menjabat sebagai PLT Direktur Utama (2014-2015). Beberapa jabatan lain yang pernah dipegangnya adalah Direktur Pengembangan dan Niaga Indonesia Power (2012-2014), Ahli Utama Pengembangan Bisnis (2012), General Manager UBP Bali Indonesia Power (2010-2012) dan Vice President Pengembangan Usaha Pembangkit Besar (2008-2010).

Career:
Before serving as Operation Director II, he served as Acting President Director (2014-2015). Some of the positions he held were Director of Commerce and Development in Indonesia Power (2012-2014), Business Development Expert (2012), General Manager of UBP Bali Indonesia Power (2010-2012), and Vice President of Large Power Plant Business Development (2008-2010).

Training yang diikuti antara lain:
Beliau telah mengikuti program pelatihan diantaranya IICD *Board Leadership, Coaching Top Level Management, Workshop* Manajemen Risiko, Sosialisasi "Polis Asuransi 2012", *Check Point* 2LE4ECI, *Workshop* & Evaluasi LE4ECI, *Capacity Building For Non - OEM Turbine Hot Gas Path Parts & Super Alloy,* Seminar Nasional Bendungan Besar 2013, *Strategy Formulation with Balanced Scorecard* dan *Workshop* Visi, Misi dan Kompetensi Inti, IHT Tata Kelola Batu Bara, pelatihan ASEAN *Corporate Governance Scorecard, Strategic Leadership, GRC Best Practise and Board Governance, Introduction to Technical Risk Assessment Process* (TRAP), *Business Continuity Management System* (BCMS) for *Power Plants, Enterprise Value Mapping, UU No. 40, Commercial Dispute & Arbitration, GCG, Stakeholder Management, Board Duties, Responsibilities & Liabilities, Building Trust into Sustainable Business* dan *Project Management Office*.

Training attended, namely:
He had attended numerous training, such as IICD Board Leadership, Coaching of Top Level Management, Risk Management Workshop, Socialization of "Insurance Police 2012", Check Point 2LE4ECI, Workshop & Evaluation of LE4ECI, Capacity Building For Non-OEM Turbine Hot Gas Path Parts & Super Alloy, Bendungan Besar National Seminar 2013, Strategy Formulation with Balanced Scorecard and Workshop of Vision, Mission, and Core Competencies, Coal Governance IHT, ASEAN Corporate Governance Scorecard Training, Strategic Leadership, GRC Best Practice and Board Governance, Introduction to Technical Risk Assessment Process (TRAP), Business Continuity Management System (BCMS) for Power Plants, Enterprise Value Mapping, Law No. 40, Commercial Dispute & Arbitration, GCG, Stakeholder Management, Board Duties, Responsibilities & Liabilities, Building Trust into Sustainable Business, and Project Management Office

Dasar Pengangkatan Pertama:
Keputusan Pemegang Saham secara Sirkuler tanggal 21 Maret 2016.

First Appointment Basis:
Circular GMS dated March 21, 2016

Penugasan Khusus (jabatan lain):
Komisaris Utama PT Tangkuban Parahu Geothermal Power, Komisaris Utama PT Perta Daya Gas, Komisaris Utama PT Indo Ridlatama Power dan President Commissioner PT GCL Indo Tenaga.

Special Assignment (other position):
President Commissioner of PT Tangkuban Parahu Geothermal Power, President Commissioner of PT Perta Daya Gas, President Commissioner of PT Indo Ridlatama Power, and President Commissioner of PT GCL Indo Tenaga.

Hudiono
Direktur Keuangan
Director of FInance

Warga Negara Indonesia, berdomisili di Jakarta, berusia 60 tahun. Meraih gelar Sarjana Teknik Elektro dari ITB (1981), Sarjana Ekonomi Perusahaan dari Universitas Terbuka (1991), dan Master Teknik dari ITB (1999).

Indonesian Citizen, domiciled in Jakarta, age 60. Have a Bachelor of Electrical Engineering from ITB (1981), Bachelor of Corporate Economy from Universitas Terbuka (1991), and Master of Engineering from ITB (1999).

Perjalanan Karir:
Sebelum menjabat sebagai Direktur Keuangan, pernah menjabat sebagai Direktur Keuangan PT Pembangkitan Jawa-Bali (2012-2016). Beberapa jabatan lain yang pernah dipegangnya adalah Kepala Divisi Perencanaan dan Pengendalian Anggaran PLN (2010-2012), Deputi Direktur Perencanaan Pengendalian Anggaran dan Kinerja PLN (2009-2010), General Manager PLN Wilayah Sumatera Barat (2008-2009) dan Manajer Bidang Niaga PLN Distribusi Jawa Barat dan Banten (2001-2008).

Career:
Before serving as Financial Director, he served as Financial Director PT Pembangkitan Jawa-Bali (2012-2016). Some of the positions he held were Head of Planning and Budget Control Division in PLN (2009-2012), Deputy Director of Budget Control Planning and Performance in PLN (2009-2010), General Manager of PLN in West Sumatera Area (2008-2009), and Manager of Commerce Division in PLN Distribution of West Java and Banten (2001-2008).

Training yang diikuti antara lain:
Beliau telah mengikuti program pelatihan ASEAN *Corporate Governance Scorecard, Strategic Leadership, GRC Best Practise and Board Governance, Introduction to Technical Risk Assessment Process* (TRAP), *Business Continuity Management System* (BCMS) *for Power Plants, Enterprise Value Mapping,* UU No. 40, *Commercial Dispute & Arbitration, GCG, Stakeholder Management, Board Duties, Responsibilities & Liabilities, Building Trust into Sustainable Business* dan *Project Management Office.*

Training attended, namely:
He had attended trainings such as ASEAN Corporate Governance Scorecard Training, Strategic Leadership, GRC Best Practice and Board Governance, Introduction to Technical Risk Assessment Process (TRAP), Business Continuity Management System (BCMS) for Power Plants, Enterprise Value Mapping, Law No. 40, Commercial Dispute & Arbitration, GCG, Stakeholder Management, Board Duties, Responsibilities & Liabilities, Building Trust into Sustainable Business, and Project Management Office.

Dasar Pengangkatan Pertama:
Keputusan Pemegang Saham secara Sirkuler tanggal 21 Maret 2016.

First Appointment Basis:
Circular GMS dated March 21, 2016

Penugasan Khusus (jabatan lain):
Komisaris Utama PT Rekadaya Elektrika.

Special Assignment (other position):
President Commissioner of PT Rekadaya Elektrika.

PROFIL DIREKSI
Board of Directors Profile

Adi Supriono
Direktur Pengembangan dan Niaga
Director of Development and Commerce

Warga Negara Indonesia, berdomisili di Jakarta, berusia 57 tahun. Meraih gelar Sarjana Teknik dari Institut Teknologi Bandung (1984) dan gelar Master Master of Business Administration (MBA) di bidang Finance dari University of Missouri-Saint Louis (2006).

Indonesian Citizen, domiciled in Jakarta, age 57. Have a Bachelor of Engineering from Institut Teknologi Bandung (1984), and Master of Business Administration (MBA) in Finance, from University of Missouri-Saint Louis (2006).

Perjalanan Karir:
Sebelum menjabat sebagai Direktur Pengembangan dan Niaga, pernah menjabat sebagai Sekretaris Perusahaan PT PLN (Persero) (2012 – 2016). Beberapa jabatan lain yang pernah dipegangnya adalah Direktur Pengembangan dan Niaga PT Pembangkitan Jawa Bali (2010 – 2012), Direktur Sumber Daya Manusia dan Administrasi PT Pembangkitan Jawa Bali (2009 – 2010) dan Direktur Keuangan di PT Bajradaya Sentranusa (2003– 2004).

Training yang diikuti antara lain:
Beliau telah mengikuti program pelatihan diantaranya pelatihan ASEAN *Corporate Governance Scorecard, Strategic Leadership, GRC Best Practise and Board Governance, Introduction to Technical Risk Assessment Process* (TRAP), *Business Continuity Management System* (BCMS) *for Power Plants, Enterprise Value Mapping, UU No. 40, Commercial Dispute & Arbitration, GCG, Stakeholder Management, Board Duties, Responsibilities & Liabilities, Building Trust into Sustainable Business* dan *Project Management Office.*

Dasar Pengangkatan Pertama:
Keputusan Pemegang Saham secara Sirkuler tanggal 21 Maret 2016.

Penugasan Khusus (jabatan lain): -

Career:
Before serving as Director of Development and Commerce, he served as Corporate Secretary of PT PLN (Persero) (2012 – 2016). Some of the positions he held were Director of Development and Commerce PT Pembangkitan Jawa Bali (2010 – 2012), Director of Human Resources and Administration PT Pembangkitan Jawa Bali (2009 – 2010), and Financial Director in PT Bajradaya Sentranusa (2003 – 2004).

Training attended, namely:
He had attended trainings such as ASEAN Corporate Governance Scorecard Training, GRC Best Practice and Board Governance, Introduction to Technical Risk Assessment Process (TRAP), Business Continuity Management System (BCMS) for Power Plants, Enterprise Value Mapping, Law No. 40, Commercial Dispute & Arbitration, GCG, Stakeholder Management, Board Duties, Responsibilities & Liabilities, Building Trust into Sustainable Business, and Project Management Office.

First Appointment Basis:
Circular GMS dated March 21, 2016

Special Assignment (other position):

Roikhan
Direktur SDM dan Administrasi
Director of Human Resources and Administration

Warga Negara Indonesia, berdomisili di Jakarta, berusia 57 tahun. Meraih gelar Sarjana Listrik dari Institut Teknologi Bandung (1986) dan Magister di Bidang Industri di Institut Teknologi Bandung (1998).

Indonesian Citizen, domiciled in Jakarta, age 57. Have a Bachelors degree in Electricity from the Bandung Institute of Technology (1986) and a Masters degree in Industry from the Bandung Institute of Technology (1998).

Perjalanan Karir:
Sebelum menjabat sebagai Direktur Sumber Daya Manusia (SDM) dan Administrasi, pernah menjabat sebagai Expert Manajemen SDM pada Direktorat SDM dan Umum PLN (2013). Beberapa jabatan lain yang pernah dipegangnya adalah Kepala Divisi Pengembangan SDM dan Talenta PLN (2010-2013), Asisten Deputi Direktur Pengelolaan Karir & Taleta PLN (2009), Manager Regional Jawa Timur & Bali PT PLN Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban (2008-2009) dan Manager Regional Jawa Tengah & DIY PT PLN Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban (2005-2008).

Career:
Before serving as Director of Human Resources (SDM) and Administration, he served as SDM Management Expert on Directorate of Human Resources and General in PLN (2013). Some of the positions he held were Head of Human Resources and Talent Development in PLN (2010-2013), Deputy Assistant to Director of Career Management and Talents in PLN (2009), Regional Manager of East Java & Bali PT PLN in distribution and load control center (2008-2009), and Regional Manager of Central Java and Special Region of Yogyakarta PT PLN in distribution and load control center (2005-2008).

Training yang diikuti antara lain:
Beliau telah mengikuti program pelatihan diantaranya Diklat Manajemen Umum dan Pensiun, 5th *Training and Development Summit* 2013 dan *Balancing Leader & Manager, Workshop* Pembahasan Pembinaan Kompetensi dan *Grade, Professional Director Program* dan *Workshop Senior Leader Capacity Building* Manajemen Risiko, pelatihan ASEAN *Corporate Governance Scorecard, Strategic Leadership, GRC Best Practise and Board Governance, Introduction to Technical Risk Assessment Process* (TRAP), *Business Continuity Management System* (BCMS) *for Power Plants, Enterprise Value Mapping, UU No. 40, Commercial Dispute & Arbitration, GCG, Stakeholder Management, Board Duties, Responsibilities & Liabilities, Building Trust into Sustainable Business* dan *Project Management Office.*

Training attended, namely:
He had attended few training programs, such as General Management and Pension Training, 5th Training and Development Summit 2013 and Balancing Leader & Manager, Workshop on Discussion of Grade and Competence Mentoring, Professional Director Program and Workshop of Risk Management Capacity Building for Senior Leader, ASEAN Corporate Governance Scorecard Training, Strategic Leadership, GRC Best Practice and Board Governance, Introduction to Technical Risk Assessment Process (TRAP), Business Continuity Management System (BCMS) for Power Plants, Enterprise Value Mapping, Law No. 40, Commercial Dispute & Arbitration, GCG, Stakeholder Management, Board Duties, Responsibilities & Liabilities, Building Trust into Sustainable Business, and Project Management Office.

Dasar Pengangkatan Pertama:
Keputusan Pemegang Saham secara Sirkuler tanggal 21 Maret 2016.

First Appointment Basis:
Circular GMS dated March 21, 2016.

Penugasan Khusus (jabatan lain):
Komisaris Utama PT Artha Daya Coalindo dan PLT. Komisaris Utama PT Cogindo DayaBersama.

Special Assignment (other position):
President Commissioner of PT Artha Daya Coalindo and Acting President Commissioner of PT Cogindo DayaBersama.

TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN TAHUNAN 2016

Responsibility of Annual Report 2016

Laporan Tahunan 2016 Indonesia Power menyajikan informasi mengenai kinerja perusahaan, penerapan tata kelola perusahaan, pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan, Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, dan informasi lainnya yang relevan dan signifikan bagi para pemangku kepentingan.

Kami, segenap Direksi dan Dewan Komisaris Indonesia Power yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan 2016 Indonesia Power.

Dewan Komisaris
Board of Commisioners

Bagus Setiawan
Komisaris Utama
President Commissioner

Abdi Mustakim
Komisaris
Commissioner

Munir Ahmad
Komisaris
Commissioner

Ahmad Yani
Komisaris
Commissioner

Agus Hernawan
Komisaris
Commissioner

Tri Setyo Nugroho
Komisaris
Commissioner

The 2016 Annual Report of Indonesia Power provides information on the company's performance, corporate governance practices, implementation of corporate social responsibility, Financial Statements for the period ended December 31, 2016 and other relevant and significant information to stakeholders.

The Board of Directors and the Board of Commissioners of Indonesia Power are fully accountable for the accuracy of the content of the 2016 Annual Report of Indonesia Power.

Direksi
Board of Directors

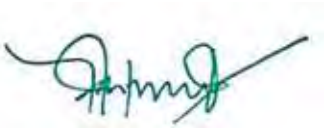

Sripeni Inten Cahyani
Direktur Utama
President Director

Antonius RT Artono
Direktur Operasi II
Director of Operations II

Adi Supriono
Direktur Pengembangan dan Niaga
Director of Development and Commerce

Eri Prabowo
Direktur Operasi I
Director of Operations I

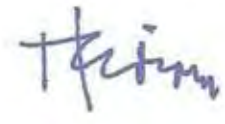

Hudiono
Direktur Keuangan
Director of Finance

Roikhan
Direktur SDM dan Administrasi
Director of Human Resources and Administration

PROFIL PERUSAHAAN
COMPANY PROFILE

Menghadapi tantangan dengan peningkatan peran sebagai *Asset Manager* telah mendorong Indonesia Power mengembangkan strategi Go 90, yaitu mengedepankan pengelolaan pembangkit yang Aman, Bersih, Hijau, Andal dan Efisien.

Facing the challenge of its increasing role as the Asset Manager has encouraged Indonesia Power to develop the Go 90 strategy, i.e. promoting Safe, Clean, Environmentally friendly, Green, reliable, and Efficient power plants management.

IDENTITAS PERUSAHAAN
Corporate Identity

Nama
PT Indonesia Power

Name
PT Indonesia Power

Bidang Usaha
Penyediaan tenaga listrik dan jasa Operation & Maintenance

Business Sector
Provision of electricity and Operation & Maintenance Services

Status Perusahaan
Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Corporate Status
Subsidiary of a State-Owned Enterprises (BUMN)

Dasar Hukum Pendirian
1. Akta Pendirian PT PLN Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa-Bali I (PT PLN PJB I) tanggal 3 Oktober 1995
2. Akta Perubahan Nama dari PT PLN PJB I menjadi PT Indonesia Power tanggal 8 Agustus 2000

Legal Framework of Establishment
1. Deed of Establishment of PT PLN Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa-Bali I (PT PLN PJB I) dated October 3, 1995
2. Deed of Change of Name from PT PLN PJB I into PT Indonesia Power dated 8 August 2000

Pemegang Saham
1. PT PLN (Persero) sebanyak 1 lembar Saham Seri 1 dan 5.215.647.598 lembar Saham Seri 2
2. Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan PT PLN (Persero) sebanyak 1 lembar Saham Seri 2

Shareholders
1. PT PLN (Persero) with 1 Share of Series 1 and 5,215,647,598 Shares of Stock Series 2
2. Foundation for Education and Welfare PT PLN (Persero) with 1 Share of Series 2

Tanggal Pendirian
3 Oktober 1995

Date of Establishment
October 3, 1995

Modal Dasar
Rp10.000.000.000.000,- (Sepuluh triliun Rupiah)

Authorized Share Capital
Rp10.000.000.000.000,- (Ten trillion Rupiah)

Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh

Rp2.607.823.800.000,- (Dua triliun enam ratus tujuh miliar delapan ratus dua puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah)

Issued and Fully Paid-Up Capital

Rp2,607,823,800,000 (Two trillion six hundred seven billion eight hundred twenty-three million eight hundred thousand Rupiah)

Wilayah Operasional

- 6 Unit Pembangkitan (UP)
- 2 Unit Pembangkitan dan Jasa Pembangkitan (UPJP)
- 10 Unit Jasa Pembangkitan (UJP) serta
- 1 Unit Jasa Pemeliharaan (UJH)

Operational Areas

- 6 Generating Units (GU)
- 2 Generating and Generating Service Units (GGSU)
- 10 Generating Service Units (GSU) and
- 1 Maintenance Service Unit (MSU)

Jumlah Karyawan

3.725 orang

Number of Employees

3.725 people

Anak Perusahaan

1. PT Cogindo DayaBersama (99,9%)
   Bidang usaha: *co-generation*, energi ketenagalistrikan, operasi dan pemeliharaan pembangkit tenaga listrik
2. PT Artha Daya Coalindo (80%),
   Bidang usaha: penyediaan, transportasi, bongkar muat batubara, dan jasa pendukung kepelabuhanan
3. PT Indo Ridlatama Power (93,96%)
   Bidang usaha: pembangkit tenaga listrik
4. PT Tangkuban Parahu Geothermal Power (95,20%)
   Bidang usaha: pengusahaan tenaga panas bumi dan pembangkit tenaga listrik
5. PT Putra Indotenaga (99,9%)
   Bidang usaha: pembiayaan proyek dan *participating interest*

Subsidiaries

1. PT Cogindo DayaBersama (99.9%)
   Business sector: co-generation, electricity power, operation and maintenance of power plant
2. PT Artha Daya Coalindo (80%),
   Business sector: provision, transportation, loading and unloading of coal, and ports and harbors supporting services
3. PT Indo Ridlatama Power (93.96%)
   Business sector: power plant
4. PT Tangkuban Parahu Geothermal Power (95.20%)
   Business sector: geothermal power cultivation and power plant
5. PT Putra Indotenaga (99.9%)
   Business sector: project and participating interest financing

Kantor Pusat

Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav.18
Jakarta Selatan Kode Pos 12950
Telp: (62-21) 5267666 (Hunting)
Fax: (62-21) 5251923, 5252623

Head Office

Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav.18
Jakarta Selatan Kode Pos 12950
Telp: (62-21) 5267666 (Hunting)
Fax: (62-21) 5251923, 5252623

Website www.indonesiapower.co.id

Website www.indonesiapower.co.id

Email kontak-ip@indonesiapower.co.id

Email kontak-ip@indonesiapower.co.id

Contact Center

- Facebook: indonesiapower
- Instagram: @pt.indonesiapower

Contact Center

- Facebook: indonesiapower
- Instagram: @pt.indonesiapower

INFORMASI *WEBSITE* PERUSAHAAN

Company's Website

Indonesia Power memiliki situs web resmi korporasi yang dapat diakses di *http://www.indonesiapower.co.id,* yang tersedia dalam Bahasa Indonesia dan Inggris. Situs web perusahaan menampilkan informasi dan data mengenai Indonesia Power yang dapat diakses oleh pemangku kepentingan maupun masyarakat umum sesuai dengan prinsip transparansi dan keterbukaan informasi.

Secara umum, informasi pada situs web Indonesia Power mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Tentang Kami terdiri dari Sekilas Indonesia Power, Manajemen (Dewan Komisaris dan Direksi), Sejarah, Penghargaan dan Sertifikat, Kamus dan Istilah serta Keterbukaan Informasi Publik.
2. Produk & Layanan terdiri dari Produk, Layanan, Anak Perusahaan dan Perusahaan Patungan.
3. GCG terdiri dari informasi Pedoman Etika, Kebijakan GCG, Penghargaan GCG, Kegiatan GCG dan *Whistle Blowing System*.
4. Komunitas & Lingkungan terdiri dari informasi Lingkungan, Dokumen Lingkungan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja, Tanggung Jawab Sosial Perusahaan serta Pemasaran Produk Mitra Binaan.
5. Komunikasi Berkelanjutan terdiri dari informasi Berita, Dokumentasi Video, Keterangan Pers, InPower Magz dan Report.
6. Karir terdiri dari informasi Insan IP, Bekerja Bersama Kami, *Internship* Program, dan Peluang Bergabung.
7. Kontak
8. Informasi RUPS

Informasi tambahan dapat dilihat di bagian Akses Informasi dan Data Perusahaan pada Bab Tata Kelola Perusahaan.

Indonesia Power has a corporate official website, accessible in http://www.indonesiapower.co.id, available in both Indonesian and English. The website shows the information and data on Indonesia Power, which is accessible by stakeholders and the general public, in line with the transparency and information disclosure principles.

Generally, information on Indonesia Power's website includes:

1. About Us, consists of Overview of Indonesia Power, Management (Board of Commissioners and Directors), History, Awards and Certificates, Dictionaries and Terms, and Public Information Transparency.
2. Products & Services, consists of Products, Services, Subsidiaries, and Joint Venture Companies.
3. GCG, consists of Code of Conduct, GCG Policy, GCG Awards, GCG Program, and Whistle Blowing System.
4. Community & Environment, consists of Environmental information, Environmental Document, Occupational Health and Safety, Corporate Social Responsibility, and Partner Product Marketing.
5. Sustainable Communication, consists of News, Video Documentation, Press Release, InPower Magz, and Report.
6. Careers, consists of IP Personnel, Work with Us, Internship Program, and Employment Opportunities.
7. Contact Us
8. GMS

Additional information can be seen in the Information Access and Corporate Data on Chapter Good Corporate Governance.

KRONOLOGIS PENCATATAN SAHAM

Chronology of Share Listing

Sampai dengan tahun 2016, Indonesia Power belum pernah mencatatkan saham di Bursa Saham, sehingga tidak ada informasi terkait kronologis pencatatan, jenis tindakan korporasi (*corporate action*), perubahan jumlah saham, maupun nama bursa.

As of 2016, Indonesia Power has never listed shares on Stock Exchange. Hence, there is no information related to listing chronology, corporate action, changes in the number of shares, or the name of the exchange.

KRONOLOGIS PENCATATAN EFEK LAINNYA

Chronology of Other Securities Listing

Sampai dengan tahun 2016, Indonesia Power belum pernah mencatatkan efek lainnya di Bursa Efek, sehingga tidak ada informasi terkait kronologis pencatatan, jenis tindakan korporasi, perubahan jumlah efek, nama bursa maupun peringkat efek.

As of 2016, Indonesia Power has never listed other securities on Stock Exchange. Hence, there is no information related to listing chronology, corporate action, changes in the number of securities, the name of the exchange, or rate of the securities.

SEJARAH SINGKAT INDONESIA POWER

Indonesia Power Brief History

Indonesia Power merupakan salah satu anak Perusahaan PT PLN (Persero) yang didirikan pada tanggal 3 Oktober 1995 dengan nama PT PLN Pembangkitan Jawa Bali I (PT PJB I). Pada tanggal 8 Oktober 2000, PT PJB I berganti nama menjadi Indonesia Power sebagai penegasan atas tujuan Perusahaan untuk menjadi Perusahaan pembangkit tenaga listrik independen yang berorientasi bisnis murni.

Kegiatan utama bisnis Perusahaan saat ini yakni fokus sebagai penyedia tenaga listrik melalui pembangkitan tenaga listrik dan sebagai penyedia jasa operasi dan pemeliharaan pembangkit listrik yang mengoperasikan pembangkit yang tersebar di Indonesia. Selain mengelola Unit Pembangkit, Indonesia Power memiliki 5 Anak Perusahaan, 1 Perusahaan Patungan, 1 Perusahaan Asosiasi serta 2 Afiliasi dari Anak Perusahaan untuk mendukung strategi dan proses Bisnis Perusahaan.

Guna mendukung pencapaian Visi dan Misi Perusahaan, Indonesia Power menetapkan prinsip yang menjadi landasan dalam mengarahkan perilaku individu sesuai dengan budaya Perusahaan yang tercermin dalam "Indonesia Power Way" dengan tata nilai perusahaan yaitu "IP AkSi (Integritas, Profesional, Proaktif, Sinergi)".

Untuk mendukung terealisasinya keinginan tersebut, Indonesia Power dan seluruh unitnya telah berbenah diri melalui implementasi Indonesia Power-*Integrated Management System* (InPower-IMS) yang mengintegrasikan berbagai standar antara lain ISO 14001 (Sistem Manajemen Lingkungan), ISO 9001 (Sistem Manajemen Mutu), OHSAS 18001 (Sistem Manajemen K3), ISO 28000 (Sistem Manajemen Keamanan Rantai Pasok), SMP (Sistem Manajemen

Indonesia Power is a subsidiary of PT PLN (Persero) which was established on October 3, 1995 under the name of PT PLN Pembangkitan Jawa Bali I (PT PJB I). On October 8, 2000, PT PJB I changed its name to Indonesia Power to affirm the Company's objective to become an independent power generation company that is purely business-oriented.

The Company's main business is to focus as an electricity provider through electricity generation, and as a provider of power plants operation and maintenance services that operate power plants spread across Indonesia. In addition to Generating Unit management, Indonesia Power has 5 Subsidiaries, 1 Joint Venture Company, 1 Associate Company, and 2 Second-Tier Subsidiaries to support the business process and strategy of the Company.

To support the achievement of Company's Vision and Mission, Indonesia Power implements the foundation principles to direct the individual behavior in line with the Corporate Culture, which is reflected in the "Indonesia Power Way", with the corporate value of "IP AkSi (Integritas, Profesional, Proaktif, Sinergi)".

To support the realization, Indonesia Power and all its unit have been improving through the implementation of Indonesia Power-Integrated Management System (InPower-IMS), that integrates many standards, such as ISO 14001 (Environmental Management System), ISO 9001 (Quality Management System), OHSAS 18001 (OHS Management System), ISO 28000 (Supply Chain Security Management System), SMP (Security Management System), SMK3 (OHS Management System), ISO 55001 (Asset Management

Sejak tahun 2000 sampai dengan saat ini, Indonesia Power belum pernah mengalami perubahan nama Perusahaan.

Since 2000 until now, Indonesia Power has never changed the Company's name

Pengamanan), SMK3 (Sistem Manajemen K3), ISO 55001 (Sistem Manajemen Aset), ISO 50001 (Sistem Manajemen Energi), ISO 26000 (Standar Tanggung Jawab Sosial Perusahaan), ISO 31000 (Sistem Manajemen Risiko) dan Kriteria Baldrige.

Untuk menindaklanjuti berbagai program dan strategi yang telah dilakukan sepanjang tahun 2016, Indonesia Power fokus kepada *O&M Excellence* dengan senantiasa berkomitmen dalam mengembangkan pembangkit yang aman, bersih, hijau, andal dan efisien. Sejalan dengan tema Perusahaan "GO 90", pengembangan ini menjadi salah satu kekuatan masa depan Perusahaan untuk "menerangi Indonesia".

Konsistensi dan komitmen yang kuat untuk terus memberikan yang terbaik kepada segenap pemangku kepentingannya,

System), ISO 50001 (Energy Management System), ISO 26000 (Guideline on Social Responsibility), ISO 31000 (Risk Management-Principles and Guidelines) and Baldrige Criteria.

To follow-up the program and strategy conducted throughout 2015, Indonesia Power focuses on the achievement of Company's business theme, i.e. to become O&M Excellence in 2016 by committing to develop safe, clean, environmentally friendly, reliable, and efficient power plants. In line with Corporate theme "GO 90", this development is one of the company's future strength to "light up Indonesia".

Strong consistency and commitment to keep providing the best for the stakeholders.

Sepanjang tahun 2016, Indonesia Power telah memperoleh apresiasi dan penghargaan di berbagai bidang baik di tingkat nasional maupun internasional. Sejumlah penghargaan yang berhasil diraih antara lain adalah The Best Power Plants Company with Environmentally Friendly of the Year dalam ajang Indonesian Entrepreneur & Education Award, Top 5 O&M Company dalam ajang Indonesia Best Electricity Award, Gold Awards kategori Dual Fuel Power Plant of the Year PLTDG Pesanggaran 200 MW dalam ajang Asian Power Awards, Top IT implementation Of Energy & Mining Sector dalam ajang Top IT & Telco, 9 PROPER Hijau, Zero Accident, Emerging Industry Leader dalam ajang Indonesia Quality Award, Trusted Company dalam ajang CGPI Award, Indonesia Sustainability Report Award, Vision Award, 2nd the Best Human Capital dalam ajang Indonesia Human Capital Award.

Throughout 2016, Indonesia Power has been appreciated and awarded in many sectors, both in the national and international level. Some awards obtained are The Best Power Plants Company with Environmentally Friendly of the Year, in the event of Indonesian Entrepreneur & Education Award, Top 5 O&M Company in the event Indonesia Best Electricity Award, Gold Awards in the category of Dual Fuel Power Plant of the Year DGPP Pesanggaran 200 MW in the event Asian Power Awards, Top IT implementation Of Energy & Mining Sector in the event Top IT & Telco, 9 Green PROPER, Zero Accident, Emerging Industry Leader in the event Indonesia Quality Award, Trusted Company in CGPI Award, Indonesia Sustainability Report Award, Vision Award, 2nd the Best Human Capital in Indonesia Human Capital Award.

JEJAK LANGKAH
Milestones

1995

Pendirian PT PLN Pembangkitan Jawa-Bali (PT PJB I).

Establishment of PT PLN Pembangkit Tenaga Listrik Jawa-Bali I (PLN PJB I).

1996 - 2000

- Perubahan Nama PT PJB I menjadi PT Indonesia Power pada 8 Agustus 2000;
- Mencanangkan Visi dan Misi Perusahaan;
- Pendirian Anak Perusahaan:
  - PT Artha Daya Coalindo (ADC) pada 21 Oktober 1997
  - PT Cogindo Dayabersama (CDB) pada 15 April 1998
  - PT Rekadaya Elektrika (RE) pada 20 Oktober 2000.

- Change of Name from PT PLN PJB I to PT Indonesia Power on 8 August 2000;
- Announcing Company's Vision and Mission;
- Establishment of Subsidiaries:
  - PT Artha Daya Coalindo (ADC) on October 21, 1997
  - PT Cogindo Dayabersama (CDB) on April 15, 1998
  - PT Rekadaya Elektrika (RE) on 20 October 2000.

2001 - 2005

- Penajaman Misi Perusahaan untuk fokus pada bidang pembangkit tenaga listrik di tahun 2004;
- Pendirian Anak Perusahaan PT Indo Pusaka Berau (IPB) pada 12 Januari 2005.

- Company's mission sharpening to focus on electricity power generation sector in 2004;
- Establishment of Subsidiary, PT Indo Pusaka Berau (IPB) on January 12, 2005.

2006 - 2010

- Pengembangan usaha di bidang penyediaan Jasa *Operation & Maintenance* (O&M) dimulai tahun 2009;
- Penetapan sasaran untuk perwujudan visi perusahaan, yaitu mempertahankan dan meningkatkan kapasitas dan kinerja jangka panjang untuk kelangsungan dan pertumbuhan perusahaan dengan "LANDASAN YANG KUAT" dan penetapan target pencapaian 10% perusahaan pembangkit kelas dunia di tahun 2015;
- Pendirian anak perusahaan PT Indo Ridlatama Power (IRP) pada 28 September 2007;
- Pembentukan UJP Banten 2 Labuan pada 11 Januari 2010.

- Business development in the provision of Operation & Maintenance (O&M) Services, starting in 2009;
- Establishment of objectives for the realization of company's vision, i.e. to maintain and improve the long-term capacity and performance for the sustainability and growth with "A STRONG FOUNDATION" and the target to become the 10% world-class power generating company in 2015.
- Establishment of Subsidiary, PT Indo Ridlatama Power (IRP) on September 28, 2007;
- Establishment of Banten 2 Labuan GSU on January 11, 2010.

- Transformasi menuju *Operation and Maintenance (O&M) Exellence;*
- Penetapan target *World Class Services* (WCS) 2015;
- Pembentukan unit:
  - UJP Jabar 1 Palabuhan Ratu pada 21 Februari 2011.
  - UJP Jateng 2 Adipala pada 26 Juli 2013;
- Pengembangan Portofolio Usaha di tahun 2012;
- Penetapan pentahapan pencapaian Visi Perusahaan melalui *Destination Statement* di tahun 2012;
- Pelaksanaan Program Strategis dan Pengembangan Organisasi Perusahaan.
- Pendirian anak Perusahaan PT Putra Indotenaga pada 20 Desember 2013.
- Indonesia Power dan unit pembangkitnya telah menerapkan *Indonesia Power-Integrated Management System* (InPower IMS), yang mensinergikan berbagai standar meliputi: ISO 14001, ISO 9001, OHSAS 18001, ISO 28000, SMP, SMK3, PAS 55 dan Kriteria Baldrige di tahun 2013.

- Transformation towards Operation and Maintenance (O&M) Excellence;
- Target establishment of World Class Services (WCS) 2015;
- Establishment of new units:
  - Jabar 1 Palabuhan Ratu GSU on February 21, 2011.
  - Jateng 2 Adipala GSU on July 26, 2013;
- Business Portfolio Development in 2012;
- Determination of Phases to achieve Company's Vision through Destination Statement in 2012;
- Organization Strategy and Development Program.
- Establishment of Subsidiary, PT Putra Indotenaga on December 20, 2013.
- Indonesia Power and its Generating Units has implemented Indonesia Power-Integrated Management System (InPower IMS), and has synergized standards, consist of: ISO 14001 ISO 9001, OHSAS 18001, ISO 28000, SMP, SMK3, PAS 55, and Baldrige Criteria in 2013.

2011 - 2013

2014

- Pembentukan UJP Pangkalan Susu pada 20 Januari 2014;
- Pembentukan unit baru:
  - UPJP Priok yang mengelola pembangkit milik Indonesia Power dan mengelola jasa O&M PLTGU Priok Blok 3;
  - UPJP Kamojang yang mengelola pembangkit milik Indonesia Power dan mengelola jasa O&M PLTP Ulumbu, NTT;
  - UPJP Bali yang mengelola pembangkit milik Indonesia Power dan mengelola jasa O&M di Indonesia Timur dari PLTU Barru; PLTU Jeranjang; PLTU Holtekamp; PLTU Ambon dan PLTU Sanggau.

- Establishment of Pangkalan Susu GSU on January 20, 2014;
- Establishment of new units:
  - Priok GGSU manages Indonesia Power's plants and manages O&M services at Priok Block 3 CCPP;
  - Kamojang GGSU manages Indonesia Power's plants and manages O&M services at Ulumbu GPP, East Nusa Tenggara;
  - Bali GGSU manages Indonesia Power's plants and manages O&M services in East Indonesia, i.e. Barru SPP; Jeranjang SPP; Holtekamp SPP; Ambon SPP, and Sanggau SPP.

- Pengoperasian PLTDG Pesanggaran 200 MW di Bali.
- Peletakan batu pertama pembangunan PLTM Lambur.
- Sertifikasi ISO 55001 dan implementasi ISO 26000.

- Operations of the 200 MW Pesanggaran DGPP in Bali
- Laying of the first stone for the construction of Lambur MPP
- Certification of ISO 55001 and implementation of ISO 26000.

2015

2016

- **Pendirian Afiliasi dari Anak Perusahaan PT GCL Indotenaga pada 25 Februari 2016;**
- **Penambahan UJP PLTGU Cilegon ke Indonesia Power dari UPJB sejak tanggal 1 Januari 2016;**
- **Sertifikasi ISO 50001.**

- **Establishment of Affiliation of Subsidiaries, PT GCL Indotenaga on February 25, 2016;**
- **Adding Cilegon CCPP GSU to Indonesia Power from UPJB, since January 1, 2016;**
- **Certification of ISO 50001.**

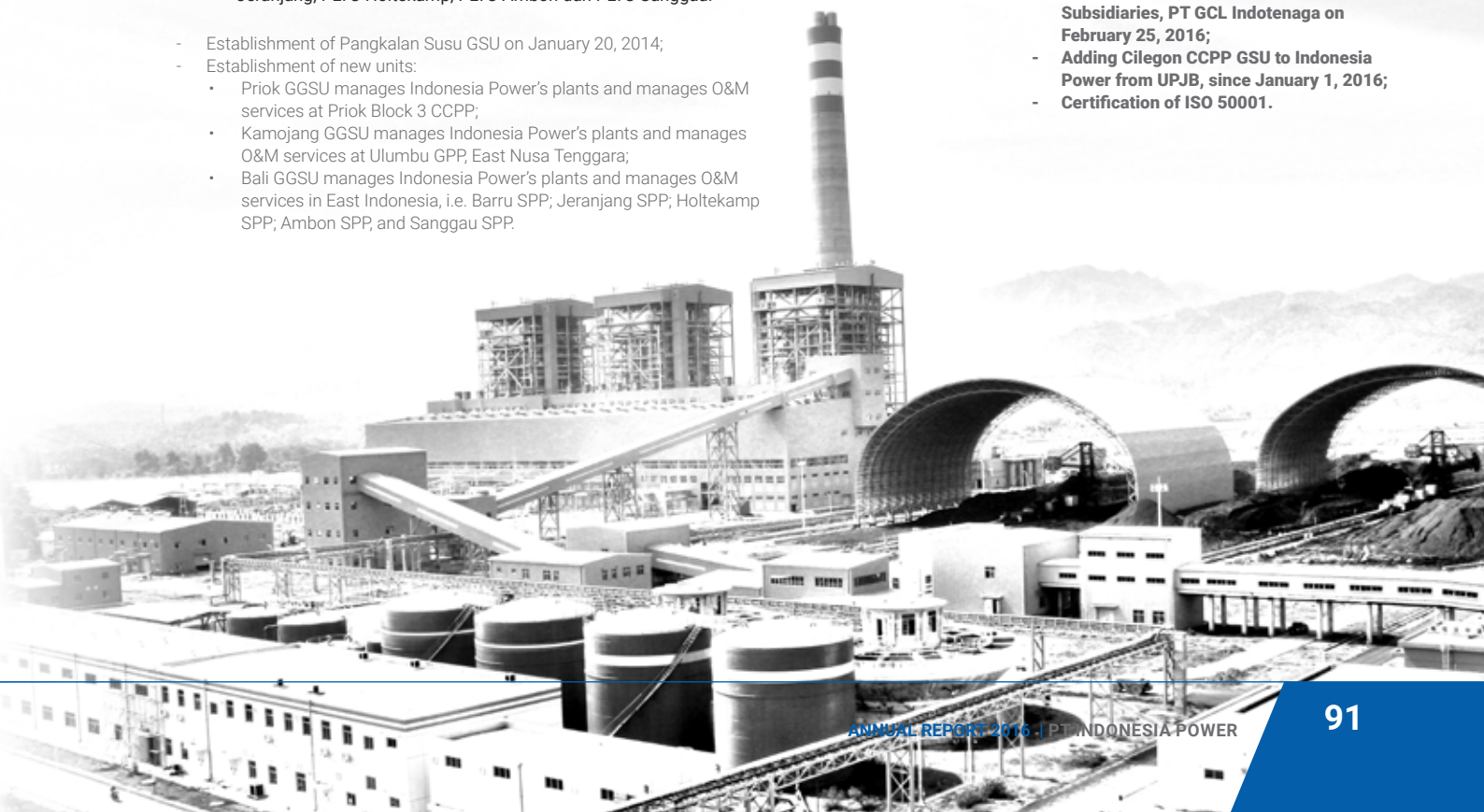

VISI, MISI, KOMPETENSI INTI DAN BUDAYA PERUSAHAAN
Corporate Vision, Mission, Core Competence and Culture

Indonesia Power telah melakukan review secara berkala atas Visi, Misi dan Budaya Perusahaan guna memastikan kesesuaiannya dengan perkembangan lingkungan bisnis serta tantangan yang dihadapi Perusahaan.

Indonesia Power has periodically reviewed the Vision, Mission, and Corporate Culture to ensure its compliance with the progress of business environment as well as the challenges for the Company.

Visi Vision

"Menjadi Perusahaan Energi Tepercaya yang Tumbuh Berkelanjutan"

"To Become a Trusted Energy Company with Sustainable Growth"

Penjelasan Visi:

Untuk Menjadi Perusahaan Energi Tepercaya yang Tumbuh Berkelanjutan memiliki harapan bahwa Indonesia Power dapat:

1) Mencapai trust dari pemegang saham melalui:
   a. kinerja operasional kelas dunia berdasarkan data pembanding NERC,
   b. tata kelola pembangkit yang ekselen yang diukur melalui pencapaian maturitas ISO 55001 *beyond compliance*, dan
   c. penyelesaian proyek pengembangan sesuai target.
2) Mengelola aset pembangkit yang *sustainable* dan kompetitif
3) Mencapai pertumbuhan yang optimal dalam pengembangan pembangkit dan jasa terkait lainnya khususnya jasa O&M dan MRO termasuk bisnis energi primer (transportasi gas, pengelolaan tambang batubara) dan port management.
4) Memiliki portofolio bisnis jasa O&M untuk pemenuhan O&M IPP dan afiliasi IP.

Vision Explanation:

To Become a Trusted Energy Company with Sustainable Growth implies a hope that Indonesia power can:

1) Obtain the trust of its shareholders through:
   a. world class operational performance based on NERC comparative data,
   b. excellent power plant governance measured through the maturity achievement of ISO 55001 beyond compliance, and
   c. completion of development project as per target.
2) Manage sustainable and competitive power plant assets
3) Achieve an optimum growth in developing the power plant and other related services in particular O&M services and MRO including primary energy business (gas transportation, coal mine management) and port management.
4) Has portfolio of O&M services business to meet the needs of O&M IPP and IP affiliates.

"Menyelenggarakan bisnis pembangkitan tenaga listrik dan jasa terkait yang bersahabat dengan lingkungan."

"To conduct green electricity power plant business and other related services"

Misi Mission

Penjelasan Misi:

1) Bisnis utama Perusahaan adalah pembangkitan tenaga listrik
2) Bisnis Perusahaan yang terkait pembangkitan tenaga listrik yaitu jasa O&M dan jasa yang terkait supply energi primer
3) Komitmen untuk mengurangi dampak atas proses produksi terhadap lingkungan dan masyarakat dan memastikan seluruh proses produksi sesuai baku mutu lingkungan serta menjalin hubungan yang harmonis dengan masyarakat.

Mission Explanation:

1) The Company's main business is power generation
2) The Company's businesses related to the electricity power plant are O&M services and services related to primary energy supply
3) Commitment in reducing impacts of the production process to the environment and society and in ensuring that all production processes are aligned with the environment quality standards and to build a harmonious relationship with the society.

Persetujuan Dewan Komisaris dan Direksi Atas Visi, Misi dan Nilai Perusahaan

Seluruh hal yang tercantum dalam Visi, Misi, nilai dan budaya Perusahaan ini telah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris dan Direksi.

Approval from the Board of Commissioners and the Board of Directors for the Corporate Vision, Mission, and Values

All matters set forth in the Corporate Vision, Mission, Values, and Culture have been approved by the Board of Commissioners and the Board of Directors.

Kompetensi Inti Perusahaan

Corporate Core Competence

Operasi dan Pemeliharaan Pembangkit
Power Plant Operation & Maintenance

Pengelolaan pembangkit dengan kekuatan pada pengoperasian dan pemeliharaan berdasarkan tata kelola sesuai praktik terbaik (*best practice*) dan metode rekayasa (*engineering method*) yang ekselen.

Power plant management with the strength on operation and mainteannce based on goverance of best practice and excellent engineering method.

Pengembangan Pembangkit
Power Plant Development

Pengembangan bisnis pembangkit, energi dan jasa terkait, dengan kekuatan pada enjiniring dan prokurmen. (Enjiniring meliputi *basic design, engineering review, project supervision*, dan *project integrator*).

Development of power generation, energy, and related services business, with the strength on engineering and procurement. Engineering covers the basic design, engineering review, project supervision, and project integrator.

VISI, MISI, KOMPETENSI INTI DAN BUDAYA PERUSAHAAN
Corporate Vision, Mission, Core Competence and Culture

Budaya Perusahaan

Indonesia Power telah merumuskan pedoman tata nilai Perusahaan yang berperan dalam pembentukan karakter insan Indonesia Power yang disebut dengan **IP AkSi (Integritas, Profesional, Proaktif, Sinergi).** Adapun pedoman cara berpikir (*The Way We Think*), cara bertindak (*The Way We Act*) dan cara berbisnis (*The Way We Do Business*) yang disebut **Indonesia Power Way.** Kedua pedoman tersebut berperan dalam pembentukan budaya Indonesia Power.

Sejalan dengan perkembangan bisnis, Perusahaan melakukan *review* dan transformasi nilai-nilai budaya yang mengedepankan strategi terutama pada sumber daya manusia dengan harapan lebih mudah dipahami, dimengerti dan diimplementasikan oleh seluruh Insan Indonesia Power.

Corporate Culture

Indonesia Power has formulated guidelines on the Company's values which play a role in developing the characters of Indonesia Power's professionals, named as **IP AkSi (Integrity, Professional, Proactive, Synergy)**. There are also guidelines on The Way We Think, The Way We Act, and The Way We Do Business named as **Indonesia Power Way**. Both guidelines have a role in creating the culture of Indonesia Power.

Aligned with its business progress, the Company conducts review and transformation of cultural values which prioritize strategies, in particular regarding human resources which hopefully would be easier to understand, comprehend, and implement by all of Indonesia Power's professionals.

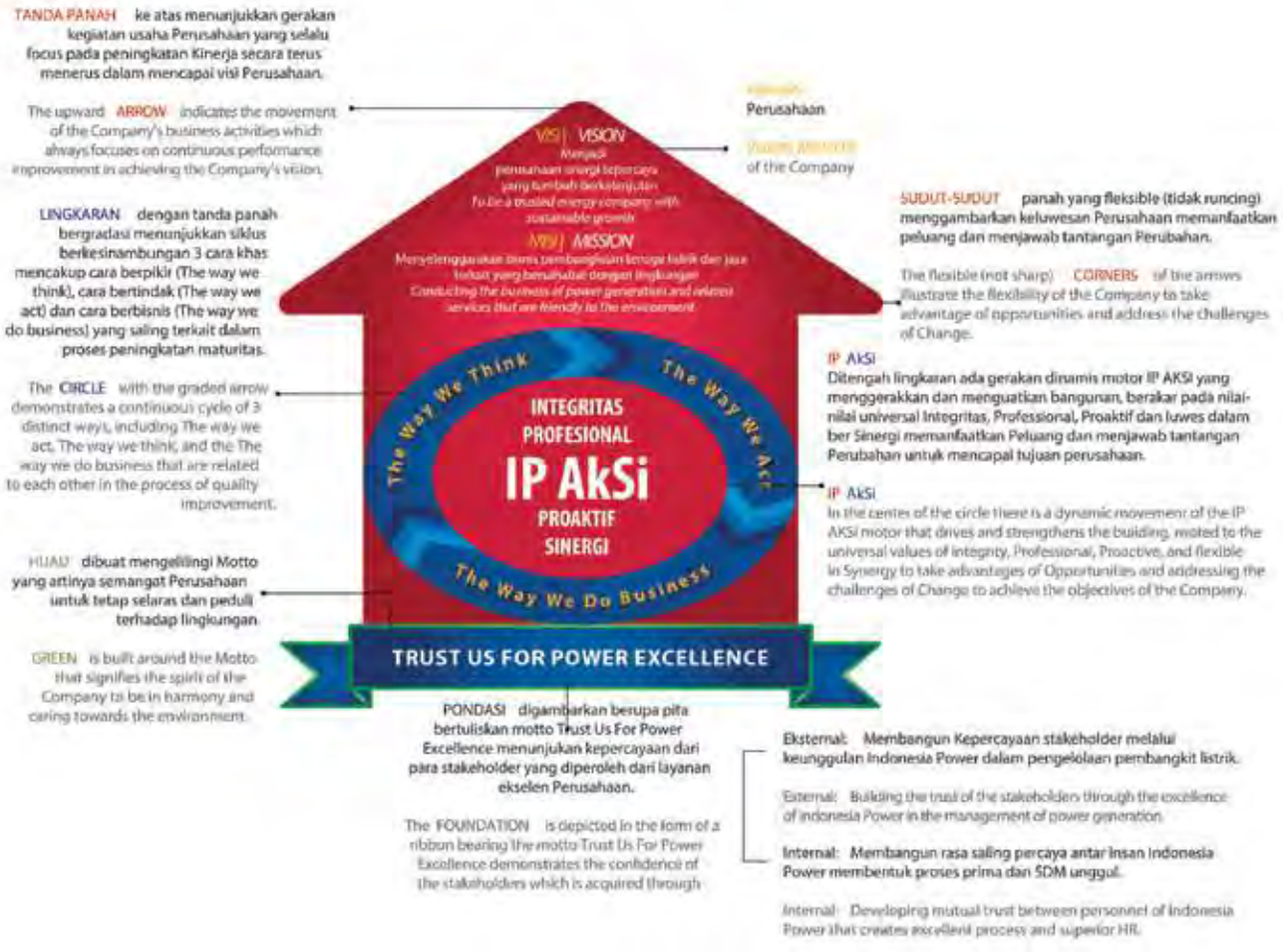

Nilai-Nilai Perusahaan
Corporate Values

VISI, MISI DAN BUDAYA PERUSAHAAN
Vision, Mission, and Corporate Culture

Hubungan Indonesia Power Way, IP AkSi dan Budaya Perusahaan

Secara umum nilai-nilai yang dimiliki seseorang akan menentukan tingkah laku (*behaviour*) dan mempengaruhi pilihan atau keputusan yang dibuat. IP AkSi adalah nilai yang akan mewarnai perilaku, sudut pandang, keputusan dari semua insan Indonesia Power. Sedangkan Indonesia Power Way merumuskan pedoman cara berpikir, cara bertindak serta bersikap dan cara melakukan kegiatan bisnis dalam lingkungan Indonesia Power. Jika keduanya dijalankan bersama-sama akan saling mendukung dan melengkapi untuk pembentukan budaya Indonesia Power.

Relations among Indonesia Power Way, IP AkSi, and Culture of the Company

In general, the values of a person will determine his behaviors and influence his choices or decisions. IP AkSi consists of values which shall influence the behaviors, point of view, decisions of all Indonesia Power's professionals. While Indonesia Power Way formulates the guidelines on how to think, how to act, and how to do business within Indonesia Power. When both are simultaneously applied, they will support and complement each other in creating the culture of Indonesia Power.

Internalisasi Budaya Perusahaan

Perusahaan telah menyusun formula internalisasi Indonesia Power Way dan IP AkSi dengan melakukan pembagian peran dan tugas yang ditetapkan dalam SK Budaya Perusahaan No.187.K/010.IP/2015 sebagai berikut:

1) Direksi memberikan arah kebijakan dan mengawal secara ketat penerapannya yang dipimpin oleh Direktur Utama dibantu oleh *Learning Management* Tim atau Tim Budaya Perusahaan yang bersifat *ad hoc*.
2) GM dan *Senior Leader* sebagai *learning champion* bertugas menanamkan dan menumbuhkan penerapan Indonesia Power Way dan IP AkSi di Unit, Satuan atau Divisi masing-masing. Para *Senior Leader* dibantu oleh Agen Perubahan yang ditunjuk oleh Perusahaan.

Corporate Culture Internalization

The Company has formulated the internalization of Indonesia Power Way and IP AkSi by dividing the roles and tasks stipulated in the Decree of the Corporate Culture No.187.K/010.IP/2015 as follows:

1) The Board of Directors provides policy directions and follows closely their implementation led by the Managing Director assisted by the ad hoc Learning Management Team or Corporate Culture Team.
2) GM and Senior Leader as learning champion have a task to plant and let grow the application of Indonesia Power Way and IP AkSi in their respective Unit, Section, or Division. Senior Leaders are assisted by Agents of Change appointed by the Company.

Skema Internalisasi Budaya Perusahaan
Scheme of the Corporate Culture Internalization

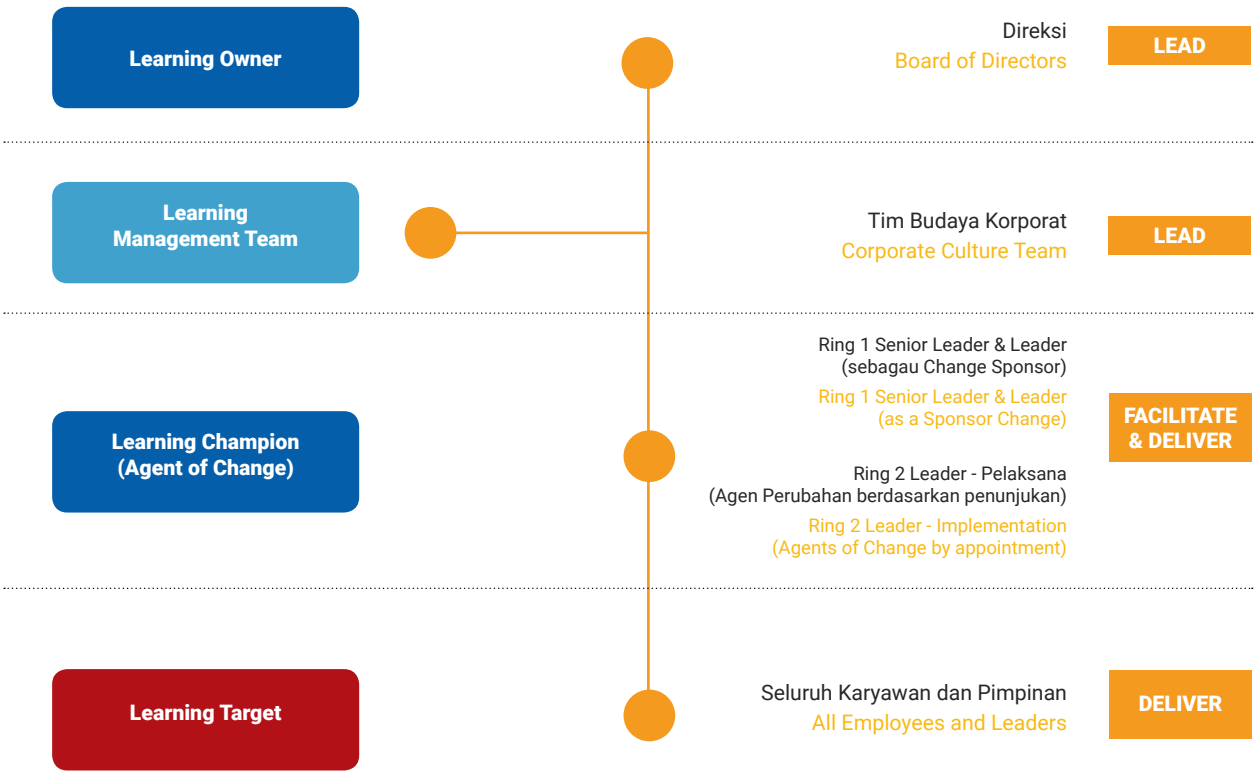

TUJUAN, SASARAN DAN STRATEGI PERUSAHAAN
Corporate's Objectives, Target, and Strategy

Tujuan Perusahaan

Sesuai dengan Anggaran Dasar, maksud dan tujuan Perusahaan ini adalah:

Corporate's Objectives

In accordance with the Articles of Association, the Company's intention and objectives are:

"Untuk menyelenggarakan usaha ketenagalistrikan berdasarkan prinsip industri dan niaga yang sehat dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas".

"To conduct electricity business based on healthy industrial and commercial principles, by implementing the Limited Liabilities Company principles".

Dalam rangka mencapai maksud dan tujuan tersebut, Indonesia Power melaksanakan kegiatan usaha sesuai ruang lingkup bisnis Perusahaan dengan selalu berusaha memenuhi harapan stakeholders-nya untuk:

In order to achieve the intention and objectives, Indonesia Power conducts business activities in the scope of Company's business by always striving to meet the expectations of the stakeholders, to:

No.	Pemangku Kepentingan Stakeholder	Harapan	Expectation
1)	Pelanggan | Customer • Bisnis Penyedia Tenaga Listrik untuk pembangkit Grid (PLN melalui PLN P2B) Electricity Provider Business for Grid Power Plants (PLN through PLN P2B)	- Keandalan - Ketepatan jadwal pemeliharaan - Harga yang sesuai dengan ukuran/indikator - Kesiapan pembangkit - *Ramping rate* - Kontinuitas pasokan - *Responsiveness* - Dapat dihubungi dalam 24 jam sehari, 7 hari, 1 minggu	- Reliability - Maintenance schedule accuracy - Affordable prices in line with indicator - Power plant readiness - Ramping rate - Supply continuity - Responsiveness - Contactable 24/7
	• Bisnis Penyedia Tenaga Listrik untuk pembangkit Embedded (PLN melalui PLN Distribusi Jateng & DIY) Electricity Provider Business for Embedded Power Plans (PLN Trough PLN Jateng & DIY Distribution)	- Harga yang sesuai keekonomiannya - Kontinuitas Pasokan	- Economical price - Supply continuity
	• Bisnis Pengelolaan Jasa O&M O&M Service Management Business	Tahap *Supporting* - Pemenuhan *deployment* sebagai persyaratan dalam menjalankan O&M Pembangkit Tahap *Performance* - Pemenuhan Kinerja Pembangkit sesuai kontrak (keandalan, ketepatan waktu, dan lain-lain)	**Supporting Phase** - Deployment fulfillment as requirement in running the O&M Generator **Performance Phase** - Generator Performance Fulfilment in line with the contract (reliability, timeliness, etc.)
2)	Pemegang Saham Shareholders	- Pemenuhan Kontrak Manajemen - Tingkat Kesehatan Perusahaan minimal "Sehat"	- Management Contract Fulfillment - Soundness Level of the Company, at the bare minimum "Healthy"

No.	Pemangku Kepentingan Stakeholder	Harapan	Expectation
3)	Pegawai Employee	- Kejelasan peran dan tanggung jawab pekerjaan - Kebijakan Perusahaan yang mendukung pelaksanaan kerja pegawai - Kemampuan pimpinan dalam mengelola organisasi - Ketersediaan fasilitas kerja - Lainnya: Kejelasan karir, hubungan dengan rekan kerja yang kondusif dan ketersediaan fasilitas keamanan kerja	- Clarity of job descriptions - Company's policy to support the employee's work - Leadership skill of the leader - Availability of work facilities - Others: Career clarity, conducive relationship with coworkers, availability of job security facilities
4)	Pemasok Supplier	- Transparasi & *fairness* - Kelangsungan bisnis jangka panjang	- Transparency & fairness - Long-term business sustainability
5)	Pemerintah Government	- Ketaatan atau kepatuhan terhadap perundangan Pemerintah	- Compliance with the Government's regulations
6)	Masyarakat sekitar Pembangkit Local community around the Power Plant	- Dukungan Perusahaan terhadap pemberdayaan masyarakat (ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan keamanan) - Bebas dari pencemaran lingkungan	- Company's Support on the community empowerment (economy, education, health, and safety) - Free from environmental pollution

Pencapaian tujuan Indonesia Power dilakukan secara bertahap dan terencana guna meningkatkan nilai Perusahaan sehingga Indonesia Power dapat menjadi pelaku bisnis yang diperhitungkan dalam sektor ketenagalistrikan.

Indonesia Power's goal towards the achievement is conducted gradually and planned in order to improve the Company's value. Therefore, Indonesia Power is able to become an important business actor in the electricity sector.

Sasaran Perusahaan

Indonesia Power telah menetapkan sasaran Perusahaan, yaitu mempertahankan dan meningkatkan kapasitas dan kinerja jangka panjang untuk kelangsungan serta pertumbuhan Perusahaan dengan "Landasan yang Kuat".

Sasaran Utama Perusahaan:
1. *Operation and Maintenance Excellence*
2. *Business Development Exccellence*
3. *Human Capital Excellence*

Guna mendukung pencapaian Visi dan Misi Perusahaan, Indonesia Power menggunakan pendekatan *Balance Scorecard*. Sasaran tersebut dijabarkan dalam *Destination Statement* yang dimuat dalam Rencana Jangka Panjang (RJP) Tahun 2016-2020 yang menjadi RJP terakhir sebagaimana digambarkan dalam skema berikut:

Corporate's Target

Indonesia Power has determined the target, i.e. to maintain and improve capacity and long-term performance for the sustainability of Company's growth with "Strong Foundation".

Company's Main Target:
1. Operation and Maintenance Excellence
2. Business Development Excellence
3. Human Capital Excellence

To support the achievement of Company's Vision and Mission, Indonesia Power uses the Balance Scorecard approach. The targets are described in Destination Statement that consists of Long-term Plan (RJP) 2016-2020, which is the updated RJP as pictured on the following scheme:

TUJUAN, SASARAN DAN STRATEGI PERUSAHAAN
Corporate's Objectives, Target, and Strategy

Roadmap Menuju Visi Perusahaan
Roadmap Towards Company Vision

No	Penta Sasaran Utama / Five Main Targets		2015	2016	2020	2025
1	*Operational Excellence* (UP dan UJP)	Operational Excellence (GU and GSU)	D1 PLTU SLA | D1 SPP SLA	Top 10% NERC PLTU SLA	D1 PLTU SLA | D1 SPP SLA	D1 PLTU SLA | D1 SPP SLA
	• EAF (NERC)	• EAF (NERC)	Q4 PLTU FTP 1 | Q4 SPP FTP 1	Top 60% NERC PLTU FTP 1	Q2 PLTU FTP 1 | Q2 SPP FTP 1	D1 PLTU FTP 1 | D1 SPP FTP 1
			Q2 PLTGU | Q2 CCPP	Top 30% NERC PLTGU	Q1 NERC PLTGU | Q1 NERC CCPP	D1 PLTGU NERC | D1 CCPP NERC
	• NPHR	• NPHR	Q4	Q4	Q3	Q2
2	*Growth*	Growth				
	• Total Kapasitas Pembangkit yang dimiliki, termasuk afiliasi dan transfer aset	• Total Capacity of Power Plant Under Management, Including affiliations and transfer of assets	9.385 MW	BAU= 0 GW Target= 10,9 GW	18.545 MW	20.905 MW tahun | year
	• Total bisnis jasa O&M	• Total business of O&M Services	5.232 MW		3.437 MW	3.437 MW tahun | year
3	*Sustainability*	Sustainability				
	• Rata-rata usia pembangkit	• Average age of power plants	23 tahun | year	BAU= 24 tahun Target= 19 tahun	18 tahun | year	19 tahun | year
	• Merit order PLTU Batubara	• Merit order of Coal SPP	TOP 15	BAU= Top 15		TOP 5
4	*Return*	Return				
	• *Return On Invested Capacity* (ROIC)	• Return On Invested Capacity (ROIC)	2%		6%	11%
5	*Financing Independence*	Financing Independence				
	• Jumlah Pengembangan Pembangkit Melalui PIT	• Total Power Plant Development Through PIT			263 MW	3.049 MW

Keterangan:
Q1 : Triwulan Pertama pembangkit listrik internasional (yaitu aset berkinerja terbaik)
Q2 : Triwulan Kedua pembangkit listrik internasional (yaitu aset rata-rata)
Q3 : Triwulan Ketiga pembangkit listrik internasional (yaitu aset di bawah rata-rata)
Q4 : Triwulan Keempat pembangkit listrik internasional (yaitu aset berkinerja terburuk).
D1 : Desil Pertama

Remark: :
Q1: First Quarter of international power plant (i.e. assets with the best performance)
Q2: Second Quarter of international power plant (i.e. average assets)
Q3: Third Quarter of international power plant (i.e. assets below the average)
Q4: Fourth Quarter of international power plant (i.e. asset with the worst performance).
D1: First Decil

Strategi Perusahaan

Untuk mencapai sasaran tersebut di atas, Indonesia Power menetapkan 7 (tujuh) strategi Perusahaan tahun 2016 yang disusun berdasarkan analisis SWOT yang mencakup:

Corporate's Strategy

To achieve the targets, Indonesia Power sets 7 (seven) Company's strategies in 2016, which are compiled based on SWOT analysis, that includes:

1. **Mencapai operational *excellence* dengan meningkatkan ketersediaan, keandalan dan efisiensi thermal pembangkit;**
   To achieve operational excellence by increasing availability, reliability, and thermal efficency of power plant;
2. **Mencapai *supply chain excellence* untuk meningkatkan *security supply* energi primer, *procurement excellence* dan penurunan *level inventory*;**
   To achieve supply chain excellence to improve primary energy security supply, procurement excellence, and decrease of inventory level;
3. **Mencapai *business development excellence*;**
   To achieve business development excellence;
4. **Mengembangkan *green power plant*;**
   To develop green power plant;
5. **Mencapai kemandirian pendanaan;**
   To achieve funding independence;
6. **Mencapai *human resources excellence*; dan**
   To achieve human resources excellence; and
7. **Mencapai *business process excellence*.**
   To achieve business process excellence.

TUJUAN, SASARAN DAN STRATEGI PERUSAHAAN

Corporate's Objectives, Target, and Strategy

Disamping itu, Indonesia Power telah menetapkan 13 (tiga belas) *Strategic Objectives* yang dipetakan ke dalam 4 (empat) Perspektif *Balance Scorecard* menjadi peta strategi sebagai berikut:

In addition, Indonesia Power has determined 13 (thirteen) Strategic Objectives, mapped into 4 (four) Balance Scorecard perspectives into the following strategy map:

Skema Strategic Objectives dalam Perspektif Balance Scorecard

Scheme of Strategic Objectives in Balance Scorecard Perspective

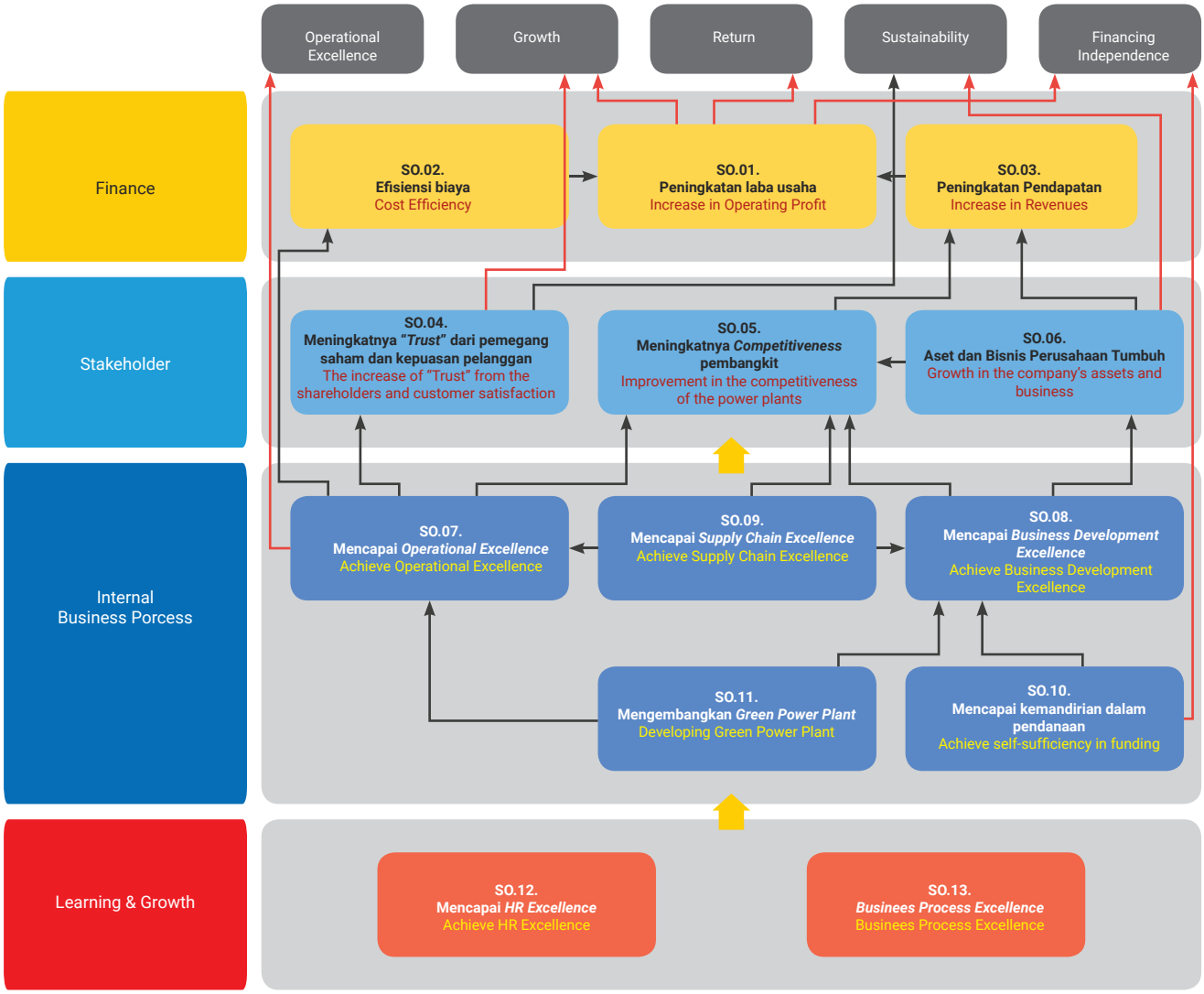

BIDANG USAHA
Business Sector

Bidang Usaha Menurut Anggaran Dasar

Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, bidang usaha Indonesia Power adalah menyelenggarakan usaha ketenagalistrikan berdasarkan prinsip industri dan niaga yang sehat dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan terbatas yang meliputi produk dan layanan sebagai berikut:

1. Penyediaan tenaga listrik yang ekonomis bermutu tinggi dan dengan keandalan yang baik.
2. Usaha yang berkaitan dengan penyediaan tenaga listrik yang meliputi:
   a. Jasa survey, investigasi, disain, konstruksi/ pemasangan instalasi, operasi dan pemeliharaan, persewaan peralatan pembangkitan, serta pendidikan dan pelatihan;
   b. Produksi, perbaikan dan perdagangan dan peralatan tenaga listrik;
   c. Produksi, pengolahan, pengangkutan dan perdagangan batubara, gambut, biomas dan gas alam;
   d. Produksi dan pengusahaan energi panas bumi;
   e. *Cogeneration*.

Business Sector Based on Articles of Association

In accordance with Article 3 of Company's Articles of Association, Indonesia Power's business sector is to provide electricity business based on the healthy industrial and commercial principles by implementing the Limited Liabilities Company's principles, which includes products and services as follows:

1. Economical electricity provision with high quality and reliability.
2. Business related with electricity provision includes:
   a. Survey, investigation, design, construction/ installation, operation and maintenance, power plants equipment rental, and education and training;
   b. Production, repair, and trading of electricity equipment;
   c. Production, processing, transporting, and trading of coal, peat moss, biomass, and natural gas;
   d. Production and cultivation of geothermal energy;
   e. Cogeneration.

Kegiatan Usaha yang Dijalankan Saat Ini

Adapun untuk kegiatan usaha Indonesia Power yang dijalankan saat ini sebagai berikut:

1. Penyediaan tenaga listrik yang ekonomis bermutu tinggi dan dengan keandalan yang baik, dan
2. Usaha penyediaan jasa operasi dan pemeliharaan.

Sedangkan kegiatan usaha lainnya seperti pengangkutan dan perdagangan batubara, *cogeneration* serta pengusahaan energi panas bumi dilakukan oleh Anak Perusahaan dan Perusahaan Patungan.

Current Business Activity

The current business activity conducted by Indonesia Power is as follows:

1. Economical electricity provision with high quality and reliability, and
2. Provision of operation and maintenance service.

Other business activities, such as coal transportation and trading, cogeneration, and geothermal energy cultivation, are carried out by Subsidiaries and Joint Venture Companies.

BIDANG USAHA
Business Sector

Produk dan Jasa

Indonesia Power memiliki segmen usaha utama sebagai penyediaan tenaga listrik melalui 6 Unit Pembangkitan (selanjutnya disingkat UP) serta 2 Unit Pembangkitan dan Jasa Pembangkitan (selanjutnya disingkat UPJP) yang dimilikinya dengan total kapasitas terpasang sebesar 8.877,68 MW. Dalam penyediaan jasa Operasi dan Pemeliharaan (*Operation and Maintenance*/O&M), Indonesia Power mengoperasikan dan memelihara pembangkit Program Percepatan Diversifikasi Energi (PPDE) 10.000 MW dengan total kapasitas terpasang sebesar 5.948 MW melalui 10 Unit Jasa Pembangkitan (selanjutnya disingkat UJP) serta 2 entitas pembangkit di bawah pengelolaan 2 UPJP. Adapun fungsi kegiatan pemeliharaan pembangkit untuk seluruh pembangkit yang dimiliki dan dikelola oleh Indonesia Power dilakukan oleh Unit Jasa Pemeliharaan (UJH).

Di samping itu sebagai fungsi pendukung, Indonesia Power juga memiliki pembangkit di sebagian wilayah Sumatera dengan total kapasitas terpasang sebesar 81 MW, serta melakukan pembelian tenaga listrik di Bali dengan total kapasitas terpasang sebesar 73 MW.

Saat ini, Indonesia Power mengelola pembangkit yang tersebar di Jawa, Bali, NTB, NTT, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan dan Jambi. Hal tersebut sejalan dengan program restrukturisasi organisasi yang telah dilakukan, yaitu dalam rangka penguatan proses bisnis Perusahaan dan optimalisasi peran sebagai *Asset Manager* sehingga unit kerja Indonesia Power saat ini terdiri dari:

a. Enam (6) UP sebagai penyedia fungsi operasional penyediaan tenaga listrik ;
b. Dua (2) UPJP sebagai penyedia fungsi operasional penyediaan tenaga listrik serta fungsi jasa pengelolaan O&M;
c. Sepuluh (10) UJP sebagai penyedia fungsi jasa pengelolaan O&M; dan
d. Satu (1) Unit Jasa Pemeliharaan (selanjutnya disingkat UJH) sebagai penyedia fungsi kegiatan pemeliharaan.

Products and Services

Indonesia Power has the main business segment as a provider of electricity through 6 Generating Units (hereinafter abbreviated as GU), and 2 Generating and Generating Service Units (hereinafter abbreviated as GGSU), owned by the Company, with a total installed capacity of 8,877.68 MW. In providing Operation and Maintenance (O&M) Service, Indonesia Power operates and maintains plant through Energy Diversification Acceleration Program (PPDE) of 10,000 MW, with a total installed capacity of 5,948 MW through 10 Generating Service Units (hereinafter abbreviated as GSU), as well as 2 power plant entities under the management of 2 GGSU. Maintenance Service Unit (MSU) carries out the function of power plant maintenance for every power plant owned and managed by Indonesia Power.

As a supporting function, Indonesia Power also has power plants in some area of Sumatera, with a total installed capacity of 81 MW, and electricity purchase in Bali with a total installed capacity of 73 MW.

Currently, Indonesia Power manages power plants spread across Java, Bali, West Nusa Tenggara, East Nusa Tenggara, West Kalimantan, South Sulawesi, South Sumatera, and Jambi. This is in accordance with organization restructuring program conducted, i.e. in order to strengthen Company's business process and optimization of the role as Asset Manager. Hence, the Indonesia Power work units consist of:

a. Six (6) GU as the provider of electricity operations function;
b. Two (2) GGSU as the provider of electricity operations function and O&M management services function;
c. Ten (10) GSU as the provider of O&M management services function; and
d. One (1) Maintenance Service Unit (hereinafter abbreviated as MSU) as the provider of the maintenance function.

Unit Pembangkitan Indonesia Power meliputi:

Indonesia Power Generating Unit, comprises of:

Tabel Unit Pembangkitan
Table: Generating Unit

No.	Unit	Jumlah Unit Number of Units	Kapasitas Terpasang (MW) Installed Capacity (MW)	Jenis Pembangkit Type of Power Plant	Lokasi Location
1.	UP Suralaya | Suralaya GU	7	3.400	PLTU | SPP	Merak
2.	UP Saguling | Saguling GU	29	797,36	PLTA | HPP	Bandung
3.	UP Mrica | Mrica GU	25	309,74	PLTA, PLTM | HPP, MPP	Banjarnegara
4.	UP Semarang | Semarang GU	17	1.408,93	PLTU | SPP, PLTGU | CCPP, PLTG | GTPP	Semarang
5.	UP Perak Grati | Perak Grati GU	9	864,08	PLTGU | CCPP, PLTG | GTPP	Pasuruan
6.	UP Bali | Bali GU	30	556,49	PLTG | GTPP , PLTDG | DGPP	Bali

Unit Pembangkitan dan Jasa Pembangkitan Indonesia Power meliputi:

Indonesia Power Generating and Generating Service Unit, comprises of:

Tabel Unit Pembangkitan dan Jasa Pembangkitan
Table: Generating and Generating Service Unit

No.	Unit	Jumlah Unit Number of Units	Unit Pembangkitan Generating Unit		Jasa Pembangkitan Generating Service		Lokasi Location
			Kapasitas Terpasang (MW) Installed Capacity (MW)	Jenis Pembangkit Type of Power Plant	Kapasitas Terpasang (MW) Installed Capacity (MW)	Jenis Pembangkit Type of Power Plant	
1	UPJP Priok Priok GGSU	18	1.196,08	PLTGU | CCPP, PLTD | DPP	-	-	Jakarta
	Priok Blok 3	3	-	-	740	PLTGU | CCPP	Jakarta
2	UPJP Kamojang Kamojang GGSU	7	345	PLTP | GPP	-	-	Garut
	Ulumbu	4	-	-	9,60	PLTP | GPP	NTT

BIDANG USAHA
Business Sector

Unit Jasa Pembangkitan Indonesia Power meliputi: Indonesia Power Generating Service Unit, comprises of:

Tabel Unit Jasa Pembangkitan
Table: Generating Service Unit

No	Unit	Jumlah Unit Number of Units	Kapasitas Terpasang (MW) Installed Capacity (MW)	Jenis Pembangkit Type of Power Plant	Lokasi Location
1	UJP PLTU | GSU SPP Banten 1 Suralaya	1	625	PLTU | SPP	Merak
2	UJP PLTU | GSU SPP Banten 2 Labuan	2	600	PLTU | SPP	Pandeglang
3	UJP PLTU | GSU SPP Banten 3 Lontar	3	945	PLTU | SPP	Tangerang
4	UJP PLTU | GSU SPP Jawa Barat 2 Pelabuhan Ratu	3	1.050	PLTU | SPP	Sukabumi
5	UJP PLTU | GSU SPP Jawa Tengah 2 Adipala	1	660	PLTU | SPP	Cilacap
6	UJP PLTU | GSU SPP Pangkalan Susu	2	440	PLTU | SPP	Langkat
7	UJP PLTGU | GSU CCPP Cilegon	3	739,4	PLTGU | CCPP	Serang
8	UJP PLTU | GSU SPP Barru	2	100	PLTU | SPP	Barru
9	UJP PLTU | GSU SPP Jeranjang	1	25	PLTU | SPP	Lombok Barat
10	UJP PLTU | GSU SPP Sanggau	2	14	PLTU | SPP	Sanggau

Pembelian tenaga listrik di pembangkit Area Bali meliputi: Purchase of Power in Bali Area, covers:

Tabel Pembelian Tenaga Listrik
Table: Purchase of Power

Pembangkit Power Plant	Kapasitas Terpasang (MW) Installed Capacity (MW)	Jenis Pembangkit Type of Power Plant	Lokasi Location
Pesanggaran	65	PLTD | DPP	Bali
Nusa Penida	8	PLTD | DPP	Bali

Pembangkit milik perusahaan di Area Sumatera meliputi: Purchase of Power in Sumatera Area Generator, covers:

Tabel Pembangkit Milik Indonesia Power di Sumatera
Table: Generating Unit owned by Indonesia Power in Sumatera

Pembangkit Power Plant	Kapasitas Terpasang (MW) Installed Capacity (MW)	Jenis Pembangkit Type of Power Plant	Lokasi Location
Keramasan	18	PLTG | GTPP	Palembang
Jambi	18	PLTG | GTPP	Jambi
Indralaya 1	45	PLTG | GTPP	Palembang

Selain itu, Indonesia Power memiliki 5 Anak Perusahaan, 1 Perusahaan Patungan, 1 Perusahaan Asosiasi dan 2 Afiliasi dari Anak Perusahaan dalam menunjang kegiatan usaha yang dijalankannya.

In addition, Indonesia Power has 5 Subsidiaries, 1 Joint Venture Company, 1 Associate Company, and 2 Second-Tier Subsidiaries to support the business activities.

Mekanisme Distribusi Tenaga Listrik Sampai Kepada Pelanggan

Secara fisik, bisnis pembangkit tenaga listrik dibagi dalam 3 (tiga) bagian, yaitu pembangkitan, transmisi, dan distribusi. Tenaga listrik yang diperlukan oleh konsumen akhir dihasilkan oleh pembangkit, disalurkan melalui sistem penyaluran (transmisi) dan didistribusikan melalui jaringan distribusi.

Jumlah kapasitas terpasang Indonesia Power di Jawa-Bali Grid sebesar 8.840, 72 MW tersebut dioperasikan atas permintaan PLN Pusat Pengatur Beban (PLN P2B) untuk memenuhi kebutuhan sistem Jawa-Bali di tahun 2016 dan Jawa Embedded.

Energi yang dihasilkan Unit Pembangkitan tersebut dijual/disalurkan melalui Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) sistem Jawa – Bali yang dikelola oleh PLN dan didistribusikan kepada pelanggan retail.

Electricity Distribution Mechanism to the Customer

Physically, the electricity power business is divided into 3 (three) parts, i.e. generation, transmission, and distribution. The end customer needs the electricity power generated by a generator, and it is circulated by a transmission system, and will be distributed through a distribution network.

Indonesia Power's total installed capacity in JJava Bali Grid in 8.840, 72 MW. Those are operated at the request of PLN Pusat Pengatur Beban (PLN P2B) to fulfill the needs of Java-Bali Embedded system in 2016.

The energy generated by Generating Unit is sold/ distributed through High Voltage Overhead Lines (SUTT) Java-Bali System, managed by PLN. It is distributed to the retail customer.

BIDANG USAHA
Business Sector

Skema Distribusi Tenaga Listrik Sampai Kepada Pelanggan

Electricity Distribution Mechanism to the Customer Scheme

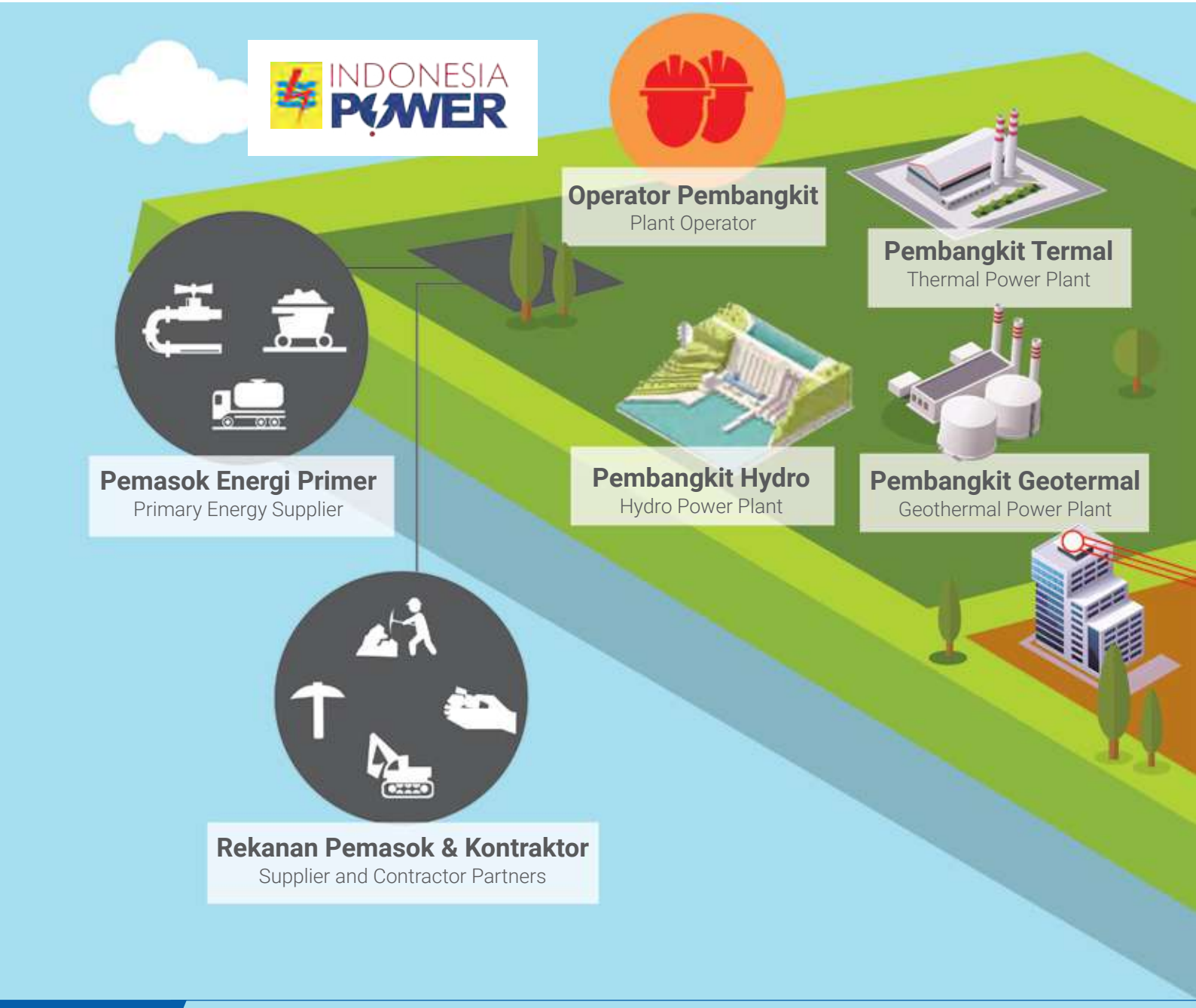

Secara fisik, bisnis pembangkit tenaga listrik dibagi dalam tiga bagian, yaitu pembangkit, transmisi, dan distribusi. Tenaga listrik yang diperlukan oleh konsumen akhir dihasilkan oleh pembangkit, disalurkan melalui sistem penyaluran (transmisi) dan didistribusikan melalui jaringan distribusi.

Physically, the electricity power business divided into three parts namely generating, transmission and distribution. The electricity power required by the last consumer generated by a generator, circulated by a transmission system and distributed by a distribution network.

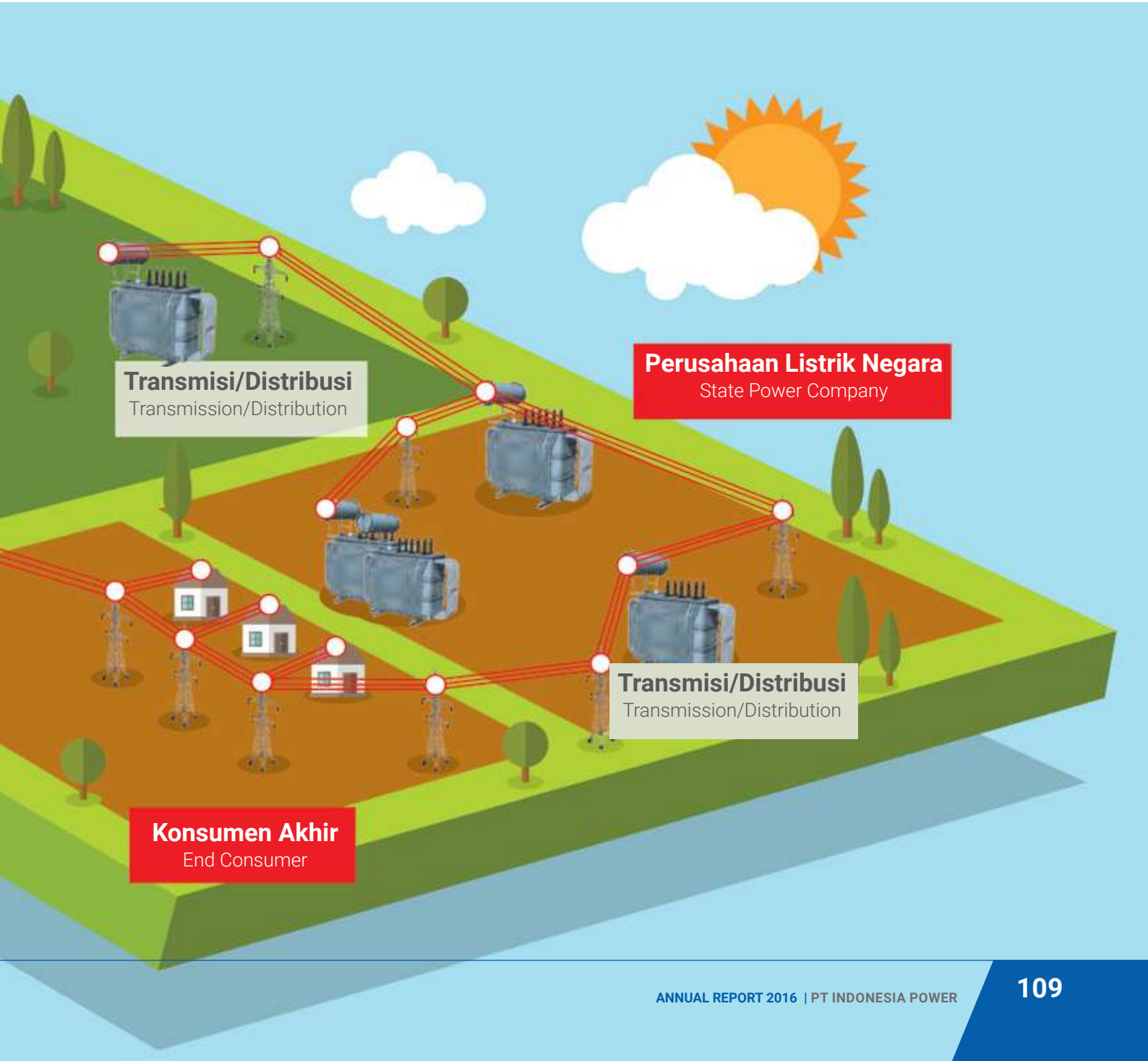

STUKTUR DAN KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM

Structure and Composition of Shareholders

Pemegang saham Indonesia Power terdiri dari:

a. PT PLN (Persero) sebanyak 1 lembar Saham Seri 1 dan 5.215.647.598 lembar Saham Seri 2, dan
b. Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan PT PLN (Persero) sebanyak 1 lembar Saham Seri 2.

Komposisi Saham Indonesia Power tidak ada yang dimiliki oleh Dewan Komisaris maupun Direksi Perusahaan. Adapun skema struktur dan komposisi pemegang saham sampai dengan pemegang saham pengendali akhir (*ultimate shareholder*) dapat dilihat pada skema berikut:

The shareholders of Indonesia Power consist of:

a. PT PLN (Persero), 1 Share of Series 1 and 5,215,647,598 Shares of Series 2, and
b. Foundation for Education and Welfare PT PLN (Persero), 1 Share of Series 2.

Board of Commissioners or Board of Directors of Indonesia Power does not have any Shares of Indonesia Power. Scheme of shareholders' structure and composition to the ultimate shareholder is as follows:

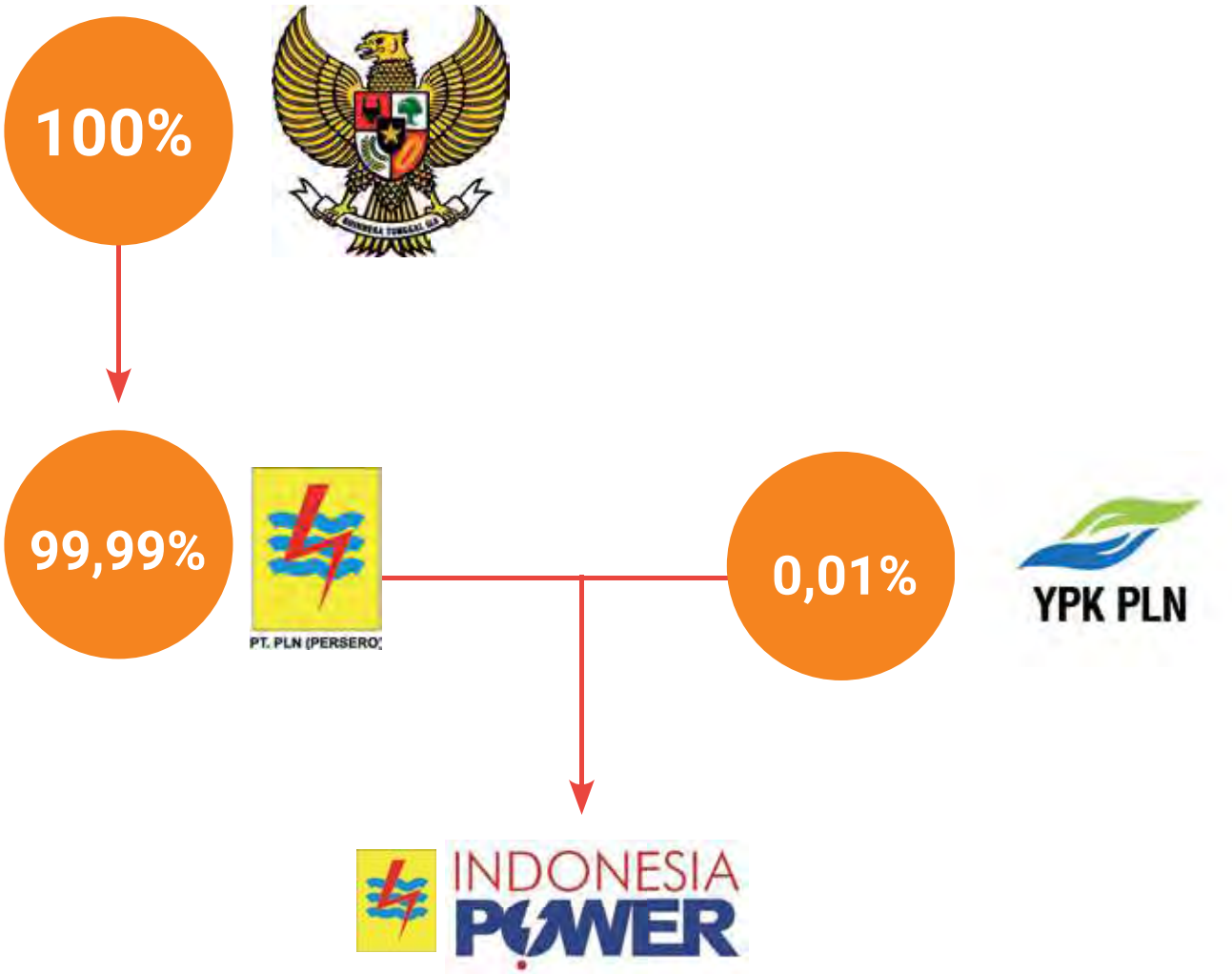

STRUKTUR ORGANISASI PERUSAHAAN

Company's Organization Structure

Indonesia Power telah melakukan restrukturisasi organisasi yang selaras serta fokus pada eksekusi ekselen dan dapat memenuhi tantangan pengembangan Perusahaan yang berkelanjutan dengan dikeluarkannya Keputusan Direksi No.239.K/010/IP/2016 tentang Struktur Organisasi Indonesia Power tanggal 6 Desember 2016 sebagai berikut:

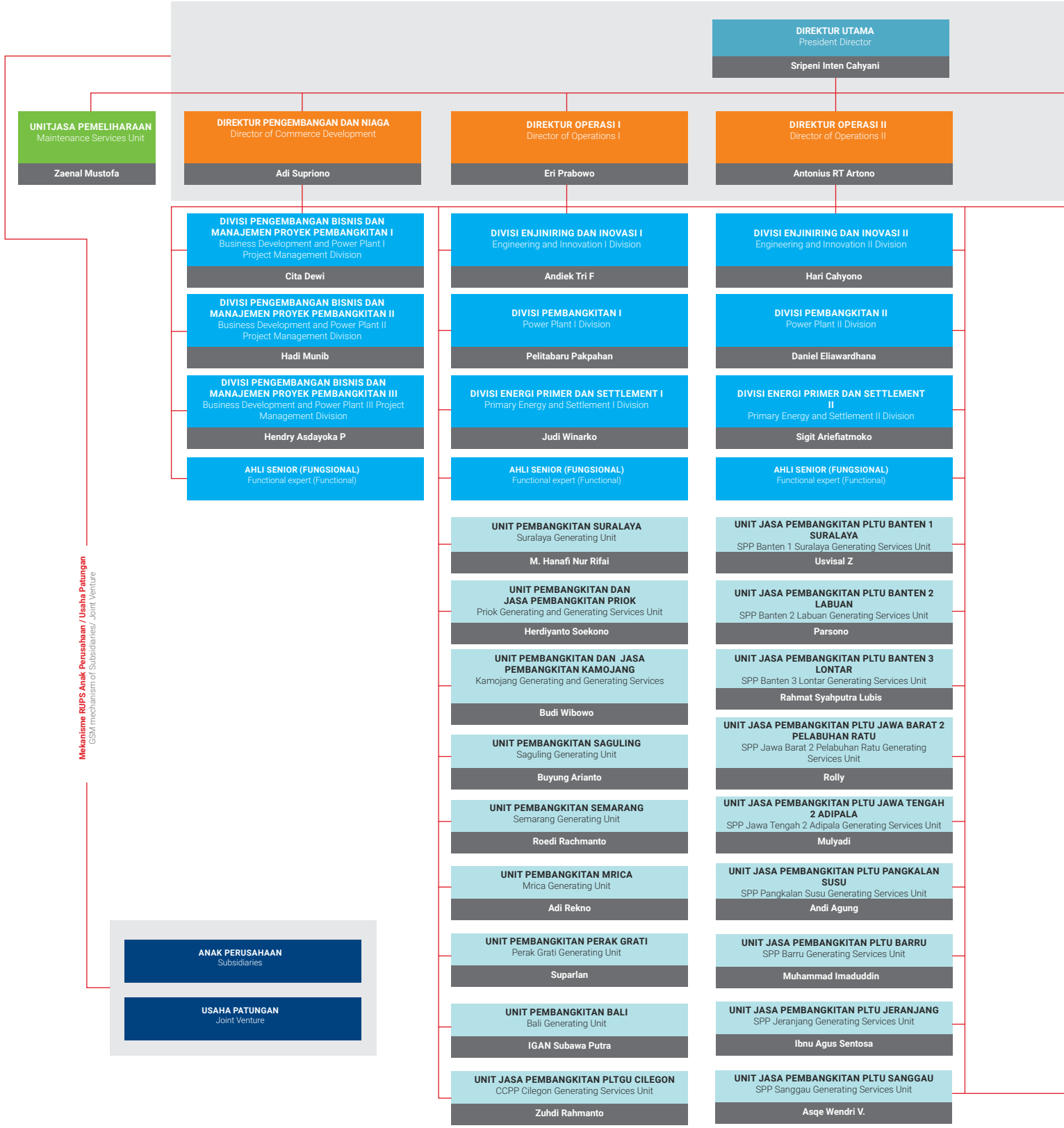

Indonesia Power has restructured the organization aligned and focused on excellent execution and shall be able to face the Company's sustainable development challenges by issuing Directors' Decree No. 239.K/010/IP/2016 on Organization Structure of Indonesia Power dated December 6, 2016 as follows:

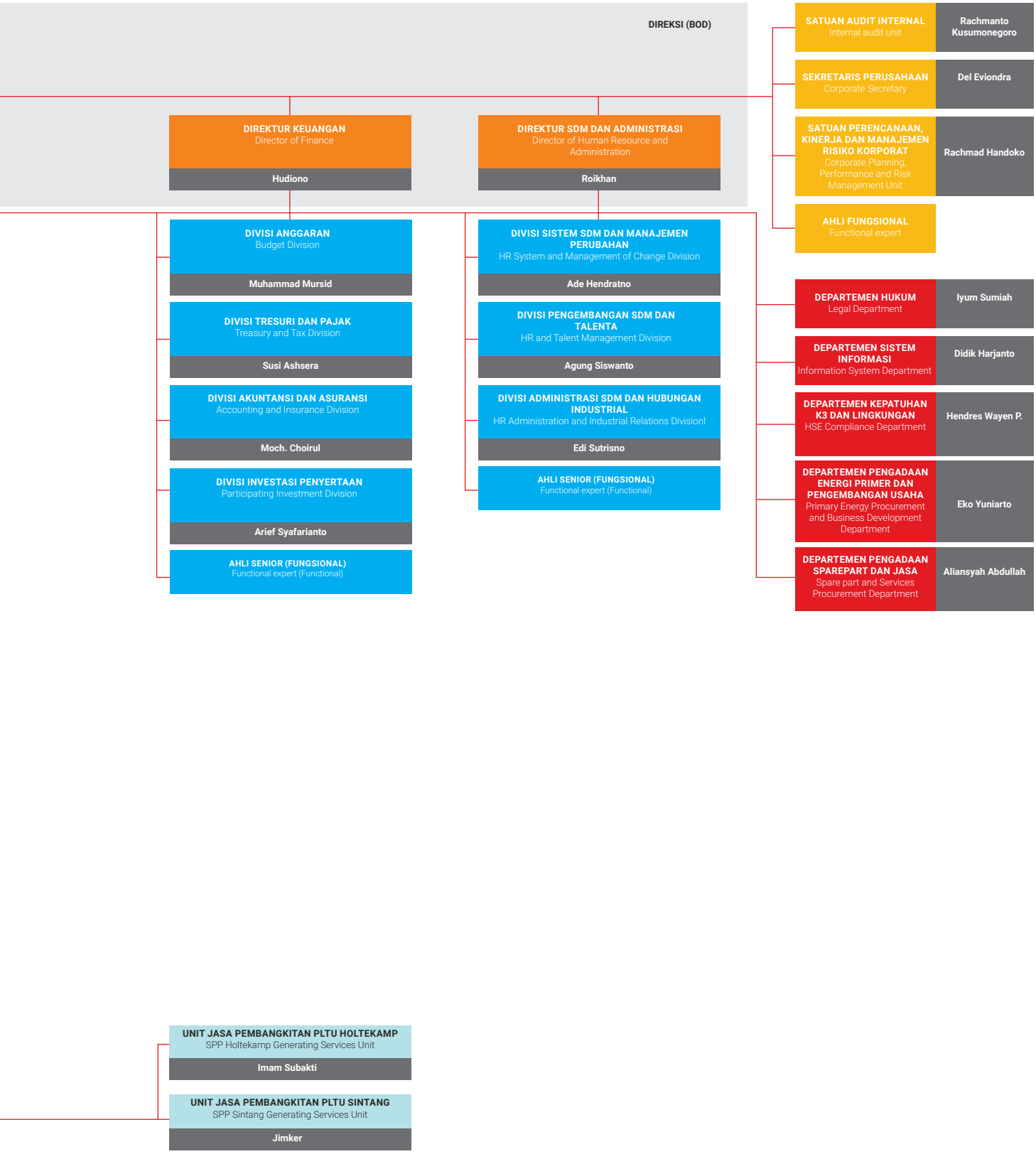

ASPEK SINERGI DALAM GRUP INDONESIA POWER

Synergy within the Indonesia Power Group

Selama tahun 2016, Indonesia Power memiliki hubungan dengan sejumlah perusahaan afiliasi yaitu perusahaan yang berada di bawah grup Indonesia Power dan PT PLN (Persero). Adapun kerjasama dan penggunaan jasa diantara Anak Perusahaan dalam Indonesia Power dan PLN Grup dapat dilihat pada tabel berikut:

Throughout 2016, Indonesia Power has relationships with numerous affiliated companies, i.e. company in the Indonesia Power and PT PLN (Persero) group. The cooperation and services utilization between the Subsidiaries within Indonesia Power and PLN Group can be seen in the following table:

No.	Anak Perusahaan Subsidiary	Bentuk Sinergi	Form of Synergy
1.	PT Cogindo DayaBersama	• Pelaksanaan Penugasan O&M di UJP dan UP PT Indonesia Power; • Pengembangan bisnis *stockist sparepart engine Wartsila* untuk PLTDG Pesanggaran UP Bali, PLTG Durri dengan PT PLN KITSBU dan PLTG Arun dengan PT Pembangkitan Jawa Bali; • MRO untuk CI *Inspection* PLTG Lot 3 Belawan dengan PT PLN (Persero); • *Deployment* jasa O&M untuk PLTU Muara Jawa Kaltim 2x27,5 MW yang sedang dalam tahap konstruksi oleh PT Indo Ridlatama Power.	• O&M Assignment in GSU and GU of PT Indonesia Power; • Business development of Wartsila engine spare part stockist for Pesanggaran DGPP Bali GU, Durri GTPP with PT PLN KITSBU, and Arun GTPP with PT Pembangkitan Jawa Bali; • MRO for CI Inspection at Lot 3 Belawan GTPP with PT PLN (Persero); • Deployment of O&M services for Muara Java East Kalimantan SPP 2x27.5 MW, which is under construction by PT Indo Ridlatama Power.
2.	PT Artha Daya Coalindo	• Penyediaan pasokan batubara untuk UP Suralaya • Jasa bongkar muat di PLTU Suralaya 1-7 dan Unit 8, dimana PT Artha Daya Coalindo bekerjasama dengan mitra; • Pekerjaan pembongkaran batubara tongkang di Jetty SPOJ Suralaya; • Jasa O & M pembongkaran batubara di PLTU Holtekamp – Papua sebagai penugasan Indonesia Power; • *Port Management* di UP Suralaya.	• Coal supply procurement for Suralaya GU • Loading and unloading services at Suralaya 1-7 and Unit 8 SPP, in which PT Artha Daya Coalindo is cooperating with a partner; • Coal unloading at barge in Jetty Suralaya GU; • O&M Service on coal unloading at Holtekamp SPP – Papua as an assignment from Indonesia Power; • Port Management at GU Suralaya.
3.	PT Indo Ridlatama Power	• Kontrak penyediaan tenaga listrik PLTU Muara Jawa Kaltim 2x27,5 MW dengan PT PLN (Persero) dengan estimasi *Commercial Operation Date* (COD) pada November 2017; • Kerjasama dengan PT Cogindo DayaBersama dalam penyediaan jasa O&M untuk PLTU Muara Jawa Kaltim 2x27,5 MW.	• Power Purchase Agreement between Muara Java East Kalimantan SPP 2x27.5 MW with PT PLN (Persero), and estimated Commercial Operation Date (COD) in November 2017; • Cooperation with PT Cogindo DayaBersama in providing O&M Service for Muara Java East Kalimantan SPP 2x27.5 MW.
4.	PT Putra Indotenaga	Merupakan anak perusahaan Indonesia Power yang telah ditetapkan sebagai *unrestricted subsidiary* terhadap *Indenture Covenant Global Bond* PT PLN (Persero) sehingga dapat melakukan pendanaan mandiri untuk proyek pengembangan usaha Indonesia Power ke depannya. Sampai dengan tahun 2016, PT Putra Indotenaga telah melakukan pendanaan untuk: a. Proyek PLTA Rajamandala 1x47 MW kepada PT Rajamandala Electric Power (Tahan konstruksi, estimasi COD Mei 2019, kontrak PPA dengan PT PLN (Persero); b. Proyek PLTU Kalbar-1 2x100 MW kepada PT GCL Indo Tenaga (Tahap konstruksi, estimasi COD Juli 2020, kontrak PPA dengan PT PLN (Persero).	PT Putra Indotenaga is a subsidiary of Indonesia Power that has been established as unrestricted subsidiary towards Indenture Covenant Global Bond PT PLN (Persero). Hence, it can conduct independent funding for business development project of Indonesia Power in the future. As of 2016, PT Putra Indotenaga has funded: a. Rajamandala HPP 1x47 MW project for PT Rajamandala Electric Power (construction on hold, estimated COD in May 2019, PPA with PT PLN (Persero)); b. Kalbar-1 SPP 2x100 MW Project for PT GCL Indo Tenaga (Construction phase, estimated COD in July 2020, PPA with PT PLN (Persero).

No.	Anak Perusahaan Subsidiary	Bentuk Sinergi	Form of Synergy
5.	PT Perta Daya Gas	Kontrak penyediaan jasa kompresi CNG Plant dengan Indonesia Power guna memenuhi beban puncak di PLTGU Tambak Lorok Semarang.	Service Procurement Contract for CNG Plant compression with Indonesia Power in order to fulfill peak load at Tambak Lorok CCPP Semarang.
6.	PT Indo Pusaka Berau	Kontrak penyediaan tenaga listrik PLTU Kaltim 3x7 MW dengan PT PLN (Persero) Wilayah Kaltimra sejak tahun 2005.	Power Purchase Agreement for Kaltim SPP 3x7 MW with PT PLN (Persero) for East and North Kalimantan since 2005.

PROFIL PEGAWAI PERUSAHAAN
Employee's Profile

Indonesia Power terus melakukan pemenuhan dan pengembangan kompetensi pegawai secara berkesinambungan sesuai kebutuhan dinamika industri listrik yang terjadi. Indonesia Power menyadari arti dan keberadaan pegawai yang memiliki posisi strategis dalam upaya mencapai visi menjadi perusahaan Perusahaan Energi Tepercaya yang Tumbuh Berkelanjutan.

Indonesia Power keeps fulfilling and developing the employee profile continuously, in line with the requirement of electrical industry dynamics. Indonesia Power recognizes the employee's meaning and existence have strategic position in the effort to achieve Company's vision to become a Trusted Energy Company with Sustainable Growth.

Komposisi Pegawai Komparatif Tahun 2014-2016

Prinsip kesetaraan dalam pengelolaan pegawai merupakan prinsip yang dipegang teguh oleh Indonesia Power. Karena itu, dalam setiap pengembangan pegawai, pendidikan dan pelatihan, sertifikasi, penempatan serta promosi, Indonesia Power memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh pegawai untuk terus bertumbuh dan berkembang bersama Perusahaan.

Comparative of Employee Composition 2014-2016

Equality in employee management is a principle that Indonesia Power holds firmly. Therefore, in employee's development, education and training, certification, placement and promotion, Indonesia Power gives equal opportunities to every employee to grow and develop with the Company.

Berdasarkan Jenis Kelamin

Berdasarkan jenis kelamin, komposisi pegawai Perusahaan didominasi oleh pegawai pria yaitu sebanyak 90,12% dan pegawai wanita sebanyak 9,88%. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

Based on Gender

Based on gender, the Company's employee composition is dominated by male, i.e. 90.12% and female, 9.88%. The details are as follow:

Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2014-2016
Employee Composition Based on Gender 2014-2016

Jenis Kelamin	Tahun | year			Gender
	2014	2015	2016	
Pria	3.165	3.269	3.357	Male
Wanita	385	370	368	Female
Jumlah	**3.553**	**3.639**	**3.725**	**Total**

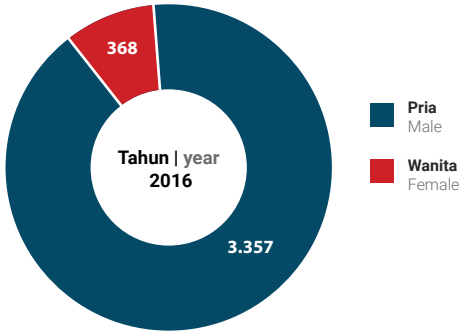

Berdasarkan Status Pegawai

Based on Status

Komposisi Pegawai Berdasarkan Status Pegawai Tahun 2014-2016
Employee Composition Based on Status 2014-2016

Status Pegawai	Tahun | year			Employment Status
	2014	2015	2016	
Organik IP	3.465	3.538	3.549	Organic IP
Tugas Karya PLN	88	101	176	PLN Work task
Outsources	**4.089**	**1.521**	**2.568**	Outsources
Jumlah Pegawai	**7.642**	**5.160**	**5.715**	**Number of Employees**

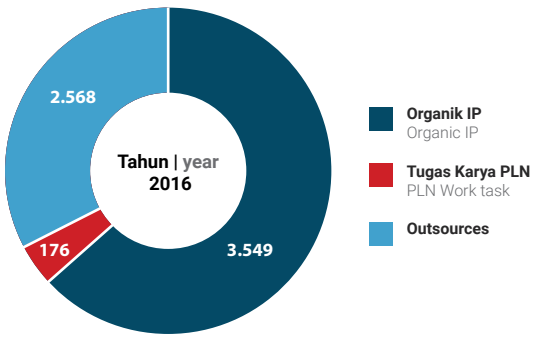

PROFIL PEGAWAI PERUSAHAAN
Employee Profile

Berdasarkan Jenjang Jabatan

Pada tahun 2016, komposisi pegawai berdasarkan jenjang jabatan didominasi oleh pelaksana yang mencapai 1.670 pegawai atau 44,76% dari total keseluruhan pegawai Indonesia Power, di mana sebagian besar berada di UP Suralaya.

Based on Position Level

In 2016, employee composition based on position is dominated by the practitioner, who reached 1,670 employees or 44.76% of a total employee in Indonesia Power, and most of them are in Suralaya GU.

Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenjang Jabatan Tahun 2014-2016
Employee Composition Based on Position Level 2014-2016

Jenjang Jabatan	Tahun | year			Position Level
	2014	2015	2016	
Direksi	5	4	6	Directors
Eksekutif Utama	5	6	6	Top Executive
Eksekutif Senior	75	73	68	Senior Executive
Eksekutif	237	245	266	Executive
Penyelia Atas	603	629	678	Senior Supervisor
Penyelia Dasar	890	986	1.037	Supervisor
Pelaksana	1.743	1.700	1.670	Officer
Jumlah Pegawai	**3.558***	**3.643***	**3.731***	**Number of Employees**

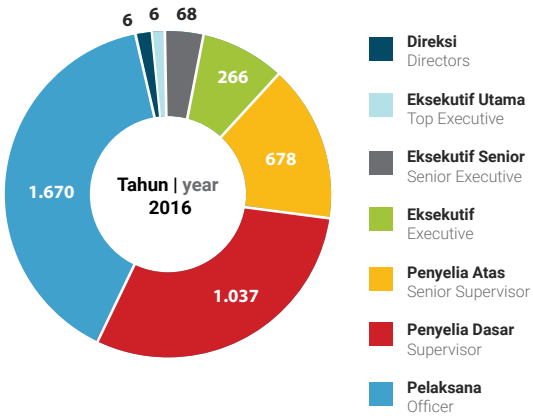

***) Termasuk Direksi |** Including Directors

Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Sejumlah prestasi dan penghargaan yang diraih Indonesia Power merupakan implikasi langsung dari keberadaan sumber daya manusia yang memiliki kapasitas dan kapabilitas yang sesuai dengan kebutuhan dan strategi bisnis Perusahaan. Indonesia Power memberikan perhatian besar dalam hal jenjang pendidikan dan pengembangan pegawai.

Based on Education Level

The achievements and awards achieved by Indonesia Power are the direct implication of the existence of human resources that have the capacity and capability in accordance with the Company's requirement and business strategy. Indonesia Power puts great attention in the education level and employee development.

Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2014-2016
Employee Composition Based on Education Level 2014-2016

Tingkat Pendidikan	Tahun | year			Education
	2014	2015	2016	
S3	0	0	0	Doctoral
S2	90	88	83	Master's Degree (S2)
S1	1.012	990	992	Bachelor's Degree (S1)
Diploma	486	720	933	Diploma
SMA/K	1.884	1.778	1.669	Senior High School
SLTP/SD	81	63	48	Primary – Junior High School
Jumlah Pegawai	**3.553**	**3.639**	**3.725**	**Number of Employees**

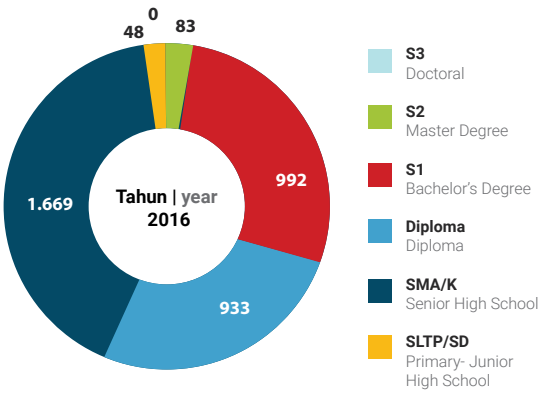

Berdasarkan Wilayah Kerja

Pada tahun 2016, jumlah pegawai di wilayah kerja UP Suralaya berjumlah 711 pegawai. Komposisi tersebut merupakan jumlah pegawai terbanyak dibandingkan dengan wilayah kerja lain. Hal ini terjadi mengingat UP Suralaya merupakan unit dengan kapasitas terpasang terbesar dibandingkan seluruh unit yang ada di Indonesia Power.

Based on Work Area

In 2016, there are 711 employees who work on the Suralaya GU work area. That is the most employee in one work area, compared to other work area. This is because Suralaya GU is the unit with the biggest installed capacity compared to other unit in Indonesia Power.

Komposisi Pegawai Berdasarkan Wilayah Kerja Tahun 2014-2016
Employee Composition Based on Work Area 2014-2016

Wilayah Kerja	Tahun | year			Work Area
	2014	2015	2016	
Kantor Pusat	374	356	375	Head Office
UP Suralaya	703	722	711	Suralaya GU
UPJP Priok	315	308	302	Priok GGSU
UP Saguling	232	209	191	Saguling GU
UPJP Kamojang	254	247	231	Kamojang GGSU
UP Semarang	298	298	277	Semarang GU
UP Mrica	196	180	167	Mrica GU
UP Perak Grati	203	210	208	Perak Grati GU
UP Bali	292	351	223	Bali GU
UJH	207	210	234	MSU
UJP PLTU Banten 1 Suralaya	71	77	76	Banten 1 Suralaya GSU SPP
UJP PLTU Banten 2 Labuan	75	69	75	Banten 2 Labuan GSU SPP
UJP PLTU Banten 3 Lontar	119	124	147	Banten 3 Lontar GSU SPP
UJP PLTU Jawa Barat 2 Pelabuhan Ratu	97	115	114	Jawa Barat 2 Pelabuhan Ratu GSU SPP

PROFIL PEGAWAI PERUSAHAAN
Employee Profile

Wilayah Kerja	Tahun | year			Work Area
	2014	2015	2016	
UJP PLTU Jawa Tengah 2 Adipala	46	81	92	Jawa Tengah 2 Adipala GSU SPP
UJP PLTU Pangkalan Susu	71	82	90	Pangkalan Susu GSU SPP
UJP PLTGU Cilegon	-	-	79	Cilegon GSU CCPP
UJP PLTU Barru	-	-	70	Barru GSU SPP
UJP PLTU Jeranjang	-	-	56	Jeranjang GSU SPP
UJP PLTU Sanggau	-	-	1	Sanggau GSU SPP
UJP PLTU Holtekamp	-	-	6	Holtekamp GSU SPP
Jumlah Pegawai	**3.553**	**3.639**	**3.725**	**Number of Employees**

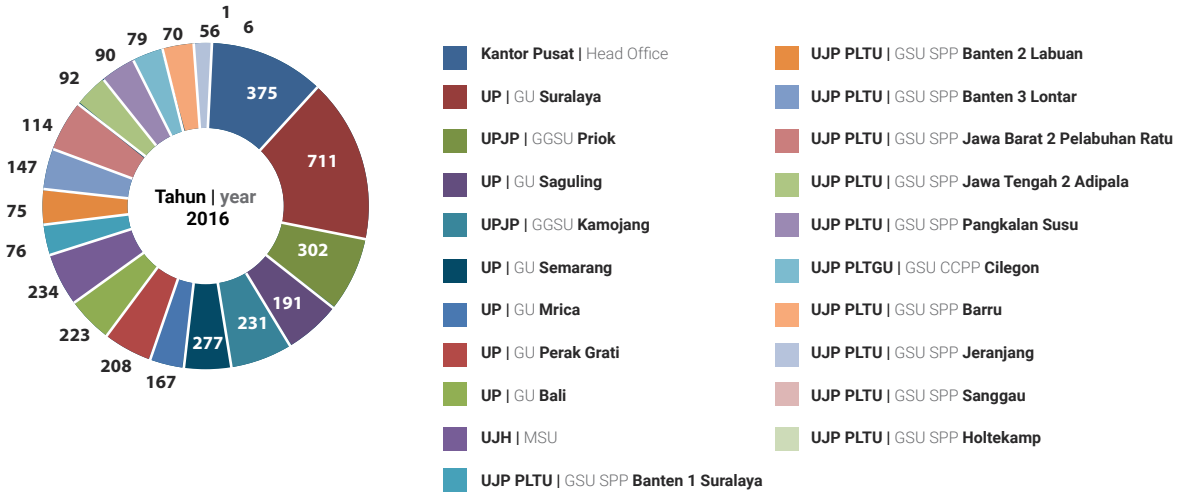

Berdasarkan Usia

Pada tahun 2016, komposisi pegawai Indonesia Power berdasarkan usia didominasi oleh kelompok usia produktif, yaitu sebanyak 72,81% untuk usia 19-45 tahun. Berikut rincian jumlah pegawai berdasarkan usia dalam 3 tahun terakhir:

Based on Age

In 2016, the employees of Indonesia Power is dominated by the productive age group, i.e. 72.81% of 19-45 years old age. The following is the details of employee based on age in the last 3 years:

Komposisi Pegawai Berdasarkan Usia Tahun 2014-2016
Employee Composition Based on Age 2014-2016

Usia (Tahun) Age	Tahun | year		
	2014	2015	2016
19-25	579	819	715
26-30	687	698	806
31-35	338	340	556
36-40	202	202	144
41-45	569	566	491
46-50	388	383	412
51-54	658	620	516
>55	132	11	85
Jumlah Pegawai Aktif | Active Employees	**3.553**	**3.639**	**3.725**

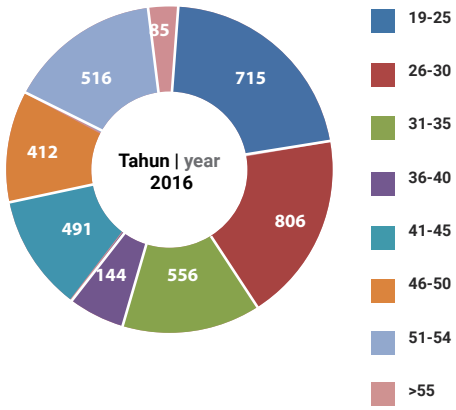

Pengembangan Kompetensi Pegawai

Indonesia Power menjamin persamaan kesempatan kepada seluruh pegawai dalam hal pengembangan kompetensi. Kebijakan atas pengembangan kompetensi pegawai dibuat berdasarkan pertimbangan dan evaluasi profesional tanpa memandang ras, kepercayaan, warna kulit, agama, jenis kelamin, keturunan, usia, status perkawinan, dan sebagainya. Ini merupakan salah satu komitmen Indonesia Power untuk menghargai hak asasi manusia yang berlaku universal.

Dalam rangka meningkatkan kompetensi pegawai, Indonesia Power senantiasa memberikan kesempatan kepada seluruh pegawai untuk mengikuti program-program pengembangan dan meningkatkan kapasitasnya baik yang diselenggarakan secara internal maupun eksternal. Indonesia Power terus berupaya untuk memperkuat strategi sistem pengelolaan SDM, merekrut *talent* terbaik melalui serangkaian program pelatihan dan pengembangan yang komprehensif.

Employee Competence Development

Indonesia Power guarantees equal opportunities to every employee in competence development. The policy on employee competence development is compiled based on the consideration and professional evaluation regardless of race, belief, skin color, religion, gender, heredity, age, marital status, etc. This is one of Indonesia Power's commitments to respect universal human rights.

In order to improve competence development, Indonesia Power always gives opportunities to employee to improve their capacity and to participate in development programs, both held internally or externally. Indonesia Power keeps striving to strengthen the Human Resources Management system, recruiting best talent through training programs and comprehensive development.

PROFIL PEGAWAI PERUSAHAAN
Employee Profile

Program dan Tujuan Pengembangan Pegawai

Perusahaan senantiasa mengembangkan kompetensi pegawai melalui berbagai program pelatihan dan pengembangan, yaitu untuk meningkatkan kemampuan keahlian dan pengetahuan pegawai dalam keahlian teknis, operasional, manajemen, *soft skills* dan kepemimpinan.

Employee's Development Program and Objective

The Company continues to develop employee competence through various training and development program, i.e. to improve the skills and expertise of the employee in technical, operational, management, soft skills, and leadership skills.

Pendidikan dan Pelatihan

Pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan Indonesia Power dilakukan untuk memastikan pegawai mampu melakukan pekerjaannya. Karena itu, Perusahaan mensyaratkan pegawai untuk memenuhi kompetensi bidang sesuai Kebutuhan Kompetensi Jabatan (KKJ) yang diembannya agar tercipta lingkungan kerja yang kondusif.

Education and Training

Indonesia Power holds education and training to ensure that the employees are able to do their job. Therefore, the Company requires the employee to fulfill the Position Competence Requirement (KKJ) in his/her respective position so as to create conducive working environment.

Tabel Pelatihan Tahun 2014-2016
Table of Training in 2014-2016

No	Jenis Pendidikan dan Pelatihan	Education and Training	2014		2015		2016	
			Jumlah Pelatihan Training	Jumlah Peserta Participant	Jumlah Pelatihan Training	Jumlah Peserta Participant	Jumlah Pelatihan Training	Jumlah Peserta Participant
1	Seleksi Pegawai Baru	New Employee's Selection	5	292	2	128	5	484
2	Program Pendidikan Formal	Formal Education Program	2	25	3	24	4	9
3	Diklat Penjenjangan	Job Grading Training	2	76	2	131	18	229

Pengembangan kompetensi pegawai melalui pendidikan dan pelatihan sangat penting guna mendukung kinerja Perusahaan. Karena itulah, Perusahaan menjadikan program pendidikan sebagai agenda rutin. Berikut ini jenis program pendidikan dan pelatihan dalam dua tahun terakhir yang bertujuan untuk memenuhi gap kompetensi:

Employee competence development through education and training is essential in order to support the Company's performance. Therefore, the Company provides education program regularly. The following is the type of education and training program in the last two years in order to closing competence gap:

Jenjang Jabatan Position Level	2015 Jenis Pelatihan Training	Jenjang Jabatan Position Level	2016 Jenis Pelatihan Training
Eksekutif Utama Top Executive	*Public Training, Workshop*, IHT, Sertifikasi, *Benchmark* Public Training, Workshop, IHT, Certification, Benchmark	Eksekutif Utama Top Executive	*Public Training, Workshop*, IHT, Sertifikasi Public Training, Workshop, IHT, Certification
	Training Pengelolaan *Stakeholder* PT. Indonesia Power Public Training, Workshop, IHT, Certification, Benchmark		1. *Workshop Capacity Building for Senior Leaders*
	IHT *Governance, Risk and Compliance*		2. *Workshop* Perjanjian Kerja Bersama Tahun 2. Workshop of Collective Labor Agreement
			3. *Audit Intern* Tingkat II 3. Internal Audit Level II
Eksekutif Senior Senior Executive	*Public Training, Workshop*, IHT, Sertifikasi, *Benchmark* Public Training, Workshop, IHT, Certification, Benchmark	Eksekutif Senior Senior Executive	*Public Training, Workshop*, IHT, Sertifikasi Public Training, Workshop, IHT, Certification
	Workshop Persiapan Raihan Proper Emas Batch I Preparation to achieve Gold PROPER Batch I Workshop		1. Pelatihan Audit Tingkat Lanjutan I 1. Advanced Audit Training Level I
	Workshop K3L		2. *Conference Human Capital*
	Workshop Tax Management Tax Management Workshop		3. Pelatihan *Auditor Internal* ISO 55001:2014 3. Internal Auditor ISO 55001:2014 Training
	Analisis Laporan Keuangan Financial Statements Analysis		4. *Training of Trainers*
	Training Pengelolaan *Stakeholder* PT. Indonesia Power Management Training for Stakeholder PT Indonesia Power		5. *Workshop* EUT ERP *Modul Finance* dan *Budget* 5. EUT ERP for Finance and Budget Modules Workshop
	IHT *Capacity Building* ISO 55001		6. *Workshop* Energi Baru dan Panas Bumi 6. Renewable and Geothermal Energy Workshop
	IHT *Governance, Risk and Compliance*		7. *Core Competence in Disruptive Economy*
	IHT *Malcolm Baldrige*		8. *Certified Strategy Execution Professional*
	IHT LNG *Process and Plant Operations*		9. *Capacity Building CSR*
	Pelatihan dan Sertifikasi SK Pengadaan Barang dan Jasa Training and Certification of Procurement of Goods and Services		10. *National Anti Fraud Conference*
Eksekutif Executive	*Public Training, Workshop*, IHT, Sertifikasi, *Benchmark* Public Training, Workshop, IHT, Certification, Benchmark	Eksekutif Executive	*Public Training, Workshop*, IHT, Sertifikasi Public Training, Workshop, IHT, Certification
	Sertfikasi Manajer Pengendalian Pencemaran Air (MPPA) Certification of Water Pollution Control Manager (MPPA)		1. Pelatihan *High Performance,Concept Strategy & Implementation* 1. High Performance, Concept Strategy, and Implementation Training
	Sertifikasi Penanggungjawab Pengendalian Pencemaran Udara (PPPU) Certification of Air Pollution Control Officer (PPPU)		2. IHT dan Sertifikasi Pengadaan Barang / Jasa *Batch* 1 (13 - 16 Des) Bli 2. IHT and Certification of Procurement of Goods/Services Batch 1 (13-16 December)
	IHT Malcolm Baldrige		3. IHT *Fire Prevention & Protection System Design &Engineering* Bidang K3 3. IHT Fire Prevention & Protection System Design & Engineering in OHS Field
	Workshop Perencanaan Jasa O&M Workshop on O&M Service Planning		4. Sertifikasi PPPU 4. PPPU Certification
	Pelatihan Executive Education III Executive Education III Training		5. *Workshop Capacity Building For Senior Leaders*
	Pelatihan Human Resource Management Strategy Human Resource Management Strategy Training		6. *Workshop It Infrastructure Library*
	Workshop Plant Efficiency and Gate Cycle		7. *Certified Risk Management Professional*
	IHT Change Agent PLN Berintegritas		8. *Asset Management*
	Pelatihan Certified Strategy Execution Professional (CSEP)		9. Sertifikasi Manajer Energi 9. Energy Manager Certification
	Pelatihan Audit Operasi Pembangkit Power Plant Operation Audit Training		10. Sertifikasi *Scurity Management*/Gada Utama Angkatan III/2016 10. Certification of Security Management, Main Force III/2016

PROFIL PEGAWAI PERUSAHAAN
Employee Profile

Jenjang Jabatan Position Level	2015 Jenis Pelatihan Training	Jenjang Jabatan Position Level	2016 Jenis Pelatihan Training
Penyelia Atas Senior Supervisor	Public Training, Workshop, IHT, Sertifikasi, Benchmark Public Training, Workshop, IHT, Certification, Benchmark	Penyelia Atas Senior Supervisor	*Public Training, Workshop*, IHT, Sertifikasi Public Training, Workshop, IHT, Certification
	Workshop Inventory Management		1. Pelatihan *Training of Trainers* 1. Training of Trainers
	Workshop Aplikasi Pro RBA Workshop on Pro RBA Application		2. *Workshop* Sosialisasi Sistem *Online* Pelayanan 2. Workshop on Online System Socialization
	Pelatihan Sistem Pemantauan Deformasi Bendungan (Dam) Training of Dam Deformation Monitoring System		3. Manajemen Resiko 3. Risk Management
	Pelatihan Career Planning & Development Career Planning & Development Training		4. Pelatihan Manajemen Sdm & Manajemen Keuangan Dasar 4. Human Resource & Basic Financial Management Training
	Benchmark Implementasi LCM		5. Pelatihan *Training for Trainer* 5. Training of Trainers
	Pelatihan General Affair General Affair Training		6. *Workshop* LCM Lanjutan 6. Advanced LCM Workshop
	Pelatihan dan Sertifikasi Petugas P3K Training and Certification of First Aid Officer		7. IHT Pemeliharaan dan Pengoperasian *Valve* 7. IHT on Maintenance and Operation of Valve
	IHT Witholding Tax dan Pph Badan IHT Withholding Tax and Corporate Tax		8. IHT Pengoperasian Mill dan *Boiler Combustion - Ge Alstom* 8. IHT of Mill Operation & Boiler Combustion – Ge Alstom
	Sertifikasi Memelihara Mesin Diesel Certification of Diesel Machine Maintenance		9. Sertifikasi Ahli K3 Listrik 9. Certification of Electricity OHS Expert
	Sertifikasi Pengawas Bendungan Dam Supervisor Certification		10. Sertifikasi Memelihara Turbin Gas 10. Certification of Gas Turbine Maintenance
Penyelia Dasar Supervisor	Public Training, Workshop, IHT, Sertifikasi, Benchmark Public Training, Workshop, IHT, Certification, Benchmark	Penyelia Dasar Supervisor	*Public Training, Workshop*, IHT, Sertifikasi Public Training, Workshop, IHT, Certification
	IHT QA, QC Inspection		1. Pelatihan *Alignment and Balancing in Rotating Equipment*
	Workshop Kataloging & Mapping Material		2. *Workshop* Integrasi ISO 26000 ke dalam IP IMS 2. Workshop on Integration of ISO 26000 to IP IMS
	IHT Ketidakpuasan Pelanggan & Manajemen Komplain IHT Customer Dissatisfaction & Complaint Management		3. *Workshop Settlement* 2016
	Workshop Life Cycle Management (LCM)		4. *Effective Leadership*
	Pelatihan Logistic & Supply Chain Management Logistic & Supply Chain Management Training		5. *Workshop* Pronia 3.14 Batch III 2016
	Pelatihan Maintenance Planning And Scheduling Maintenance Planning And Scheduling Training		6. ICT *Chlorination Plant, Sampling Rack & Auxiliary Boiler* (Batch II)
	Pelatihan Community Development Towards Social Responsibility Community Development Towards Social Responsibility Training		7. IHT Pengoperasian Mill Dan *Boiler Combustion - Ge Alstom*
	Pelatihan Total Productive Maintenance (Tpm) Total Productive Maintenance (TPM) Training		8. Sertifikasi Petugas Pemadam Kebakaran Kelas C 8. Certification of Firefighter Officer Class C
	Sertifikasi Ahli K3 Listrik Certification of OHS Electricity Expert		9. Sertifikasi Ahli K3 Konstruksi 9. Certification of OHS Construction Expert
	Sertifikasi Memelihara Lingkungan Hidup Certification of Environmental Conservation		10. Sertifikasi Ahli K3 Kimia 10. Certification of OHS Chemistry Expert
Pelaksana Officer	Sertifikasi Mengoperasikan Unit PLTU Batubara (3) Certification for Unit SPP Batubara (3) Operation	Pelaksana Officer	1. IHT dan Sertifikasi Pengadaan Barang / Jasa 1. IHT and Certification of Procurement of Goods/Services
	Sertifikasi Memelihara Motor Listrik Certification of Electric Motor Maintenance		2. Pelatihan *Project Management Office* 2. Project Management Office Training
	Pelatihan Lock Out Tag Out (Loto) Lock Out Tag (Loto) Training		3. Pelatihan Pembekalan Agen Perubahan 3. Agent of Change Briefing
	Pelatihan Operator Forklift Forklift Operator Training		4. *Workshop* Integrasi ISO 26000 ke dalam IP IMS 4. Workshop on Integration of ISO 26000 to IP IMS
	IHT Pengembangan Kwh Meter IHT of kWh Meter Development		5. *Workshop* Management Komplain 5. Complaint Management Workshop
	Pelatihan Coal dnd Ash Handling Coal and Ash Handling Training		6. Pelatihan *Fire Protection Certification* 6. Fire Protection Certification Training
	IHT Fire Fighting Training		7. Pelatihan Modul 2 Pengoperasian Unit PLTU 7. Operating SPP Unit Module 2 Training

Jenjang Jabatan Position Level	2015 Jenis Pelatihan Training	Jenjang Jabatan Position Level	2016 Jenis Pelatihan Training
	Pelatihan Modul 1 Pengoperasian PLTU Dasar Operating SPP Unit Module 1 Basic Training		8. Pelatihan Deklarasi Kondisi Dan Indeks Kinerja Pembangkit (DKIKP) 8. Condition Declaration and Plant Performance Index (DKIKP) Training
	Workshop Implementasi ICOFR dan Evaluasi Pelaksanaan CSA Workshop on ICOFR Implementation and CSA Evaluation		9. Sertifikasi Memelihara Generator 9. Generator Maintenance Certification
	Workshop Failure Analysis Failure Analysis Workshop		10. Sertifikasi Mengoperasikan Unit PLTGU 10. Certification for Unit CCPP Operation

Training Work Station (Simulator)

Learning Center Indonesia Power telah dibentuk sejak tahun 2013 berdasarkan Keputusan Direksi Nomor: 79.K/010/IP/2013 Tanggal 30 April 2013 Tentang Bagan Susunan Jabatan, Tingkat Jabatan dan Formasi Jabatan *Learning Center.*

Learning Centre berada di PLTU Perak, Surabaya memiliki fasilitas yang terdiri dari 6 *Operation Station*, 2 EWS, 1 HIS, 1 Logic Server dan terdapat 2 ruang training berkapasitas 24 orang, 2 ruang training berkapasitas 12 orang dan 1 ruang training berkapasitas 6 orang. Modul Pembelajaran yang dikembangkan adalah Modul Operasi dan Pemeliharaan Pembangkit khususnya PLTU. Sedangkan modul pembelajaran yang telah dilaksanakan sampai dengan 2016 adalah Modul 1,2,3 Operasi dan *Refreshment* Operasi PLTU.

Training Work Station (Simulator)

Indonesia Power's Learning Center is established since 2013 based on the Directors' Decree Number 79.K/010/IP/2013 dated April 30, 2013 on Position Chart, Position Level, and Formation Position of the Learning Center.

Learning Center is located at Perak SPP, Surabaya, and has facilities that consist of 6 Operation Station, 2 EWS, 1 HIS, 1 Logic Server, and 2 training rooms with a capacity of 24 people, 2 training rooms with a capacity of 12 people, and 1 training room with a capacity of 6 people. Operation Module and Power Plant Maintenance Module (specifically SPP) are being developed. Operation Module 1, 2, 3, and Operation Refreshment Module for SPP are some of the learning modules that have been conducted.

Tabel Training Work Station
Table: Training Work Station

Jumlah Training Work Station	Training Work Station	2014	2015	2016
Modul 1	Modul 1	2	4	4
Modul 2	Modul 2	5	5	3
Modul 3	Modul 3	4	7	4
Refreshment Pengoperasian PLTU (Simulator)	Refreshment Pengoperasian SPP (Simulator)	8	6	10

PROFIL PEGAWAI PERUSAHAAN
Employee Profile

Tabel Peserta Training Work Station
Table: Participants of Training Work Station

Jumlah Peserta Training Work Station	Participants	2014	2015	2016
Modul 1	Modul 1	49	80	62
Modul 2	Modul 2	62	54	35
Modul 3	Modul 3	24	45	27
Refreshment Pengoperasian PLTU (Simulator)	Refreshment Pengoperasian SPP (Simulator)	48	36	60

Simulator PLTU

Kebutuhan pengembangan kompetensi di bidang pemeliharaan dan operasi pembangkit semakin meningkat seiring dengan perkembangan Perusahaan. Dalam rangka menyikapi hal tersebut, Indonesia Power telah mengembangkan 4 simulator di PLTU Suralaya, Pangkalan Susu, Adipala dan Lontar. Simulator ini digunakan untuk simulasi penanganan gangguan operasi sebagai media mempertajam kompetensi operator melalui training *refreshment* pengoperasian PLTU level 4.

Steam Power Plant Simulator

The need for competence development in the power plant operation & maintenance services sector increases in line with the Company's development. In response to this, Indonesia Power has developed 4 simulators at Suralaya SPP, Pangkalan Susu SPP, Adipala SPP, and Lontar SPP. This simulator is utilized to simulate the handling of operational disruption as a media to sharpen operator's competence through refreshment training of Operating SPP Level 4.

Sertifikasi

Indonesia Power secara berkala melakukan sertifikasi kompetensi bagi pegawainya terutama yang berada pada bidang operasi dan pemeliharaan. Pada tahun 2016, realisasi sertifikasi baru adalah 912 pegawai dengan 913 unit kompetensi dan sertifikasi perpanjangan sebanyak 186 pegawai dengan 192 unit kompetensi. Masa berlaku sertifikasi ini selama 3 (tiga) tahun.

Jenis sertifikasi yang dilakukan oleh Indonesia Power:
1. Sertifikasi Kompetensi (Sertifikasi Baru dan Perpanjangan) Bidang Ketenagalistrikan;
2. Sertifikasi Manajemen Pengendalian Pencemaran Udara (MPPU);
3. Sertifikasi Manajemen Pengendalian Pencemaran Air (MPPA);
4. Sertifikasi Manajer Energi;
5. Sertifikasi Ahli K3 Umum;
6. Sertifikasi Ahli K3 Listrik;
7. Sertifikasi Ahli K3 Kimia;
8. Sertifikasi Petugas Pemadam Kebakaran;
9. Sertifikasi petugas P3K.

Certification

Indonesia Power routinely conducts competency certification for its employee, especially those in the operation and maintenance. In 2016, the new certification is granted to 912 employees with 913 competence units and it includes the renewal certification for 186 employees with 192 competence units. The certification lasts for 3 (three) years.

Type of certification conducted by Indonesia Power:
1. Competence Certification (New and Renewal) in Electricity;
2. Certification of Air Pollution Control Management (MPPU);
3. Certification of Water Pollution Control Management (MPPA);
4. Energy Manager Certification;
5. OHS General Expert Certification;
6. OHS Electricity Expert Certification;
7. OHS Chemistry Expert Certification;
8. Certification of Firefighter Officer;
9. Certification of First Aid Officer.

Tabel Sertifikasi Tahun 2015-2016
Table: Certification in 2015-2016

Program Sertifikasi Kompetensi Competence Certification	Ukuran Measurement	2015			2016		
		Target	Realisasi Realization	Pencapaian Achievement	Target	Realisasi Realization	Pencapaian Achievement
Sertifikasi Baru New Certification	Jumlah Pegawai Number of Employees	680	603	89%	840	912	109%
	Jumlah Unit Kompetensi Competence Units	759	610	80%	990	913	92%
Sertifikasi Perpanjangan Renewal Certification	Jumlah Pegawai Number of Employees	200	180	90%	103	186	181%
	Jumlah Unit Kompetensi Competence Units	207	199	96%	131	192	147%

Adapun anggaran program sertifikasi, terpisah dengan anggaran pendidikan dan pelatihan yaitu sebesar Rp3,14 miliar.

The certification program budget is separated from the education and training budget. The certification program budget amounted to Rp3.14 billion.

Peserta Pelatihan

Program pelatihan dan pengembangan ini dirancang untuk seluruh pegawai dari tingkat senior manajer, manajer, supervisor, sampai dengan operator di lapangan. Berikut adalah tabel jumlah peserta pelatihan berikut HOP dalam 3 tahun terakhir:

Participants

The training and development program is compiled for every employee from the level of senior manager, manager, supervisor, until the field operator. The following table showed training participants and the HOP in the last 3 years:

Tabel Peserta Pelatihan dan Hari Orang Pelatihan Tahun 2014-2016
Table of Training Participants and Day, People, Training in 2014-2016

Tahun | years	Jumlah Pegawai Employees	Jumlah HOP (hari, orang, pelatihan) HOP (day, people, training)
2016	3.725	62.171
2015	3.639	65.057
2014	3.553	45.704

PROFIL PEGAWAI PERUSAHAAN
Employee Profile

Biaya Pengembangan Kompetensi Pegawai

Selama tahun 2016, Indonesia Power telah menyediakan anggaran pengembangan kompetensi pegawai untuk membiayai penyelenggaraan pelatihan serta pengembangan kompetensi dalam rangka meningkatkan *hard* dan *soft competency* termasuk pelatihan pengembangan *leadership*.

Pada tahun 2016, anggaran untuk pengembangan SDM sebesar Rp146,64 miliar mengalami penurunan sebesar 30% jika dibandingkan dengan tahun 2015. Penurunan ini disebabkan karena efisiensi, namun tetap melakukan optimalisasi pengembangan kompetensi melalui simulator di beberapa unit.

Employee Competence Development Cost

Throughout 2016, Indonesia Power has provided the budget for employee competence development, to finance the training and competence development, in order to improve hard and soft competency, including leadership development training.

In 2016, budget for HR development is Rp146.64 billion, decreased by 30% compared to 2015. The decrease is caused by efficiency, but optimization on competence development through simulators in some units was conducted.

Tabel Anggaran Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2014-2016
Table of Education and Training Budget in 2014-2016

	Tahun (Rp Miliar) | Year (Rp billion)		
	2014	2015	2016
Anggaran Pendidikan dan Pelatihan Education and Training Budget	131,42	191,56	146,64

STRUKTUR GRUP PERUSAHAAN
Corporate Group Structure

Indonesia Power memiliki struktur grup Perusahaan yang terdiri dari 5 Anak Perusahaan, 1 Perusahaan Patungan (*Joint Venture Company*) dan 1 Perusahaan Asosiasi, dan sebagaimana tergambar dalam struktur di bawah ini:

Indonesia Power has Corporate Group Structure that consists of 5 Subsidiaries, 1 Joint Venture Company, and 1 Associate Company, as pictured on the structure below

Anak Perusahaan
Subsidiaries

Perusahaan Asosiasi
Associate Company

Perusahaan Patungan
Joint Venture Company

Afiliasi dari Anak Perusahaan
Affiliation of Subsidiaries

CDB : Cogindo DayaBersama
ADC : Artha Daya Coalindo
IRP : Indo Ridlatama Power
TPGP : Tangkuban Parahu Geothermal Power
PIT : Putra Indotenaga
IPB : Indo Pusaka Berau
PDG : Perta Daya Gas
REP : Rajamandala Electric Power
GCLIT : GCL Indotenaga

STRUKTUR GRUP PERUSAHAAN
Corporate Group Structure

Skema Alignment Anak Perusahaan Indonesia Power
Scheme: Alignment of Indonesia Power's Subsidiaries

Alignment Anak Perusahaan/Patungan/ Afiliasi Indonesia Power
Alignment Subsidiaries/Joint Venture/ Afiliated of Indonesia Power

Anak Perusahaan Indonesia Power beserta afiliasi, bersinergi bersama Perusahaan di dalam memberikan *value chain benefit* bagi PT PLN (Persero)
The subsidiaries of Indonesia Power, along with its affiliations, synergizes with the Company in providing value chain benefit for PT PLN (Persero).

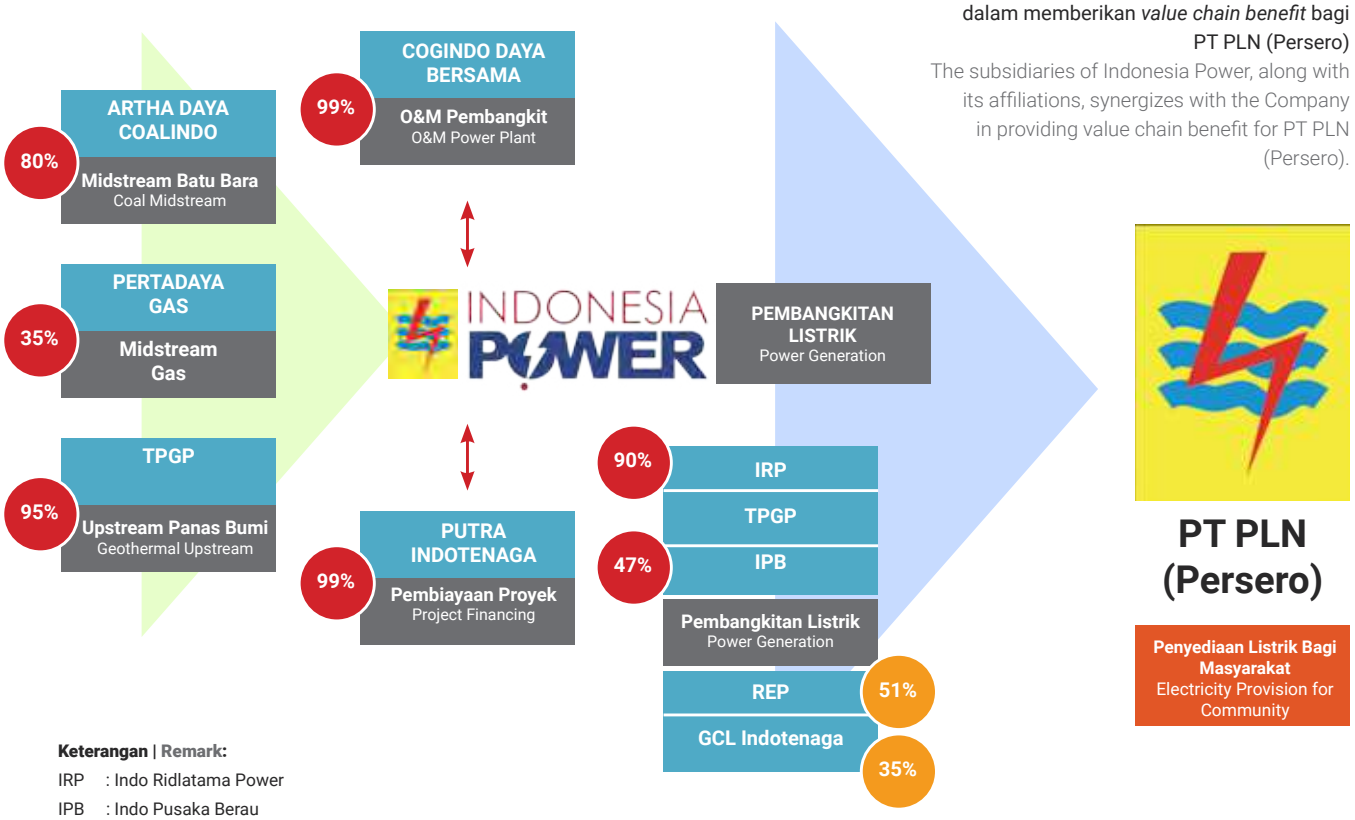

Keterangan | Remark:
IRP : Indo Ridlatama Power
IPB : Indo Pusaka Berau
REP : Rajamandala Electric Power
TPGP : Tangkuban Perahu Geothermal Power

DAFTAR ANAK PERUSAHAAN, PERUSAHAAN PATUNGAN DAN PERUSAHAAN ASOSIASI

List of Subsidiaries, Joint Venture Companies, and Associate Companies

Anak Perusahaan merupakan suatu perusahaan yang dikendalikan oleh Indonesia Power, memiliki kekuasaan untuk mengatur kebijakan keuangan dan operasional anak perusahaan untuk memperoleh manfaat dari aktivitas Anak Perusahaan tersebut.

Subsidiaries Company refers to a company controlled by Indonesia Power, with the authority to regulate financial policies and the operations of subsidiaries to obtain benefits from the Subsidiaries' activities.

Perusahaan *Joint Venture* (Perusahaan Patungan) merupakan perusahaan bersama dimana para pihak mempunyai bagian partisipasi, dan diatur oleh persetujuan untuk berbagi pengendalian atas suatu aktivitas. Pada perusahaan ini, keputusan keuangan dan operasional strategis terkait dengan aktivitasnya, dipersyaratkan secara konsensus dari seluruh pihak yang berbagi pengendalian.

Joint Venture Company refers to a joint venture company where the parties have their own participating interest, and an agreement regulates the control shared for an activity. The strategic financial and operational decisions related to the activities in this company are required to be taken through consensus by all parties sharing control.

Perusahaan Asosiasi merupakan suatu perusahaan dimana Indonesia Power mempunyai pengaruh signifikan, dan bukan merupakan entitas anak ataupun bagian partisipasi dalam ventura bersama. Sedangkan definisi "Pengaruh Signifikan" adalah kekuasaan untuk berpartisipasi dalam keputusan kebijakan keuangan dan operasional, tetapi tidak mengendalikan maupun mengendalikan bersama atas kebijakan tersebut.

Associate Company refers to a company where Indonesia Power holds significant influence, and is not a subsidiary or does not hold a participating interest in a joint venture company. On the other hand, the definition of "Significant Influence" refers to the authority to participate in formulating financial and operational policies, but not controlling or jointly controlling the policies.

Berikut adalah daftar Anak Perusahaan dan Perusahaan Asosiasi Indonesia Power saat ini:

The list of Indonesia Power's Subsidiaries, Joint Venture Companies, and Associate Companies at present are:

No.	Nama Perusahaan Company	Tanggal Pendirian Date of Incorporation	Status Operasi Perusahaan Company's Operational Status	Alamat Perusahaan Address	Kepemilikan Saham Indonesia Power Participating Interest of Indonesia Power	Bidang Usaha	Field of Business
Anak Perusahaan | Subsidiaries							
1.	PT Cogindo DayaBersama	15 April 1998 April 15, 1998	Beroperasi Operational	PT Cogindo DayaBersama Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 18 Lantai 9 Jakarta Selatan 12950 Telp. : (62 - 21) 5214515 Fax : (62 - 21) 5214516 Email: cogindo@cogindo.co.id Website: http://www.cogindo.co.id/	99,99%	Co-generation, energi ketenagalistrikan; operasi dan pemeliharaan pembangkit tenaga listrik, dengan kegiatan usaha: a. Penjualan Tenaga Listrik b. Jasa OM c. Sewa Genset d. *Maintenance, Repair and Overhaul* (MRO) dan *Stockiest*	Co-generation, electricity; power plant operation and maintenance, with the following business activities: a. Sale of Electricity b. OM Services c. Generator Renting d. Maintenance, Repair, and Overhaul (MRO) and Stockiest

DAFTAR ANAK PERUSAHAAN, PERUSAHAAN PATUNGAN DAN PERUSAHAAN ASOSIASI

List of Subsidiaries, Joint Venture Companies, and Associate Companies

No.	Nama Perusahaan Company	Tanggal Pendirian Date of Incorporation	Status Operasi Perusahaan Company's Operational Status	Alamat Perusahaan Address	Kepemilikan Saham Indonesia Power Participating Interest in Indonesia Power	Bidang Usaha	Field of Business
2.	PT Artha Daya Coalindo	21 Oktober 1997 October 21, 1997	Beroperasi Operational	PT Artha Daya Coalindo Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 18 Jakarta Selatan 12950 Telp.: (62-21) 5203725 (62-21)5226447 Email: support@arthadayacoalindo.co.id Website: http://www.arthadayacoalindo.co.id/	80%	Perdagangan, penambangan, pengangkutan, bongkar muat, pemasaran dan keagenan batubara, dengan kegiatan usaha: a. Penjualan Batubara b. Jasa Transportasi Batubara c. *Port Management*	Trade, mining, transportation, loading and unloading coal marketing and agency, with the following business activities: a. Sale of Coal b. Coal Transportation Services c. Port Management
3.	PT Tangkuban Parahu Geothermal Power	1 Oktober 2009 October 1, 2009	Beroperasi Operational	PT Tangkuban Parahu Geothermal Power Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 18 Lantai 7 Jakarta Selatan 12950 Telp: (6221) 526 7666 Fax: (6221) 525 3467 Email: - Website: -	95,20%	Pengusahaan tenaga panas bumi dan pembangkit tenaga listrik	Geothermal power cultivation and power plants
4.	PT Indo Ridlatama Power	28 September 2007 September 28, 2007	Beroperasi Operational	Kantor Pusat: PT Indo Ridlatama Power Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 18 Lantai 1 Jakarta Selatan 12950 Telp: (62 21) 29035409 Fax: (62 21) 29035410 Email: - Website: http://www.indoridlatamapower.com Kantor Pembangkit: Power Plant Office: Jalan Moh. Hatta RT 023 Handil II Muara Jawa Kutai Kartanegara – Kalimantan Timur	93,96%	Ketenagalistrikan, dengan kegiatan usaha pengembangan PLTU Muara Jawa 2x27,5 MW di Muara Jawa Kalimantan Timur	Electricity, with business activities developing Muara Jawa SPP 2x27.5 MW in Muara Jawa, East Kalimantan

No.	Nama Perusahaan Company	Tanggal Pendirian Date of Incorporation	Status Operasi Perusahaan Company's Operational Status	Alamat Perusahaan Address	Kepemilikan Saham Indonesia Power Participating Interest in Indonesia Power	Bidang Usaha	Field of Business
5.	PT Putra Indotenaga	20 Desember 2013 December 20, 2013	Beroperasi Operational	PT Putra Indotenaga Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 18 Lantai 7 Jakarta Selatan 12950 Telp: (62 21) 526 7666 Fax: (62 21) 525 2623 Email: info@putraindotenaga.co.id Website: http://www.putraindotenaga.co.id/	99,99%	Participating interest – sebagai AP PT IP yang ditetapkan *unrestricted* terhadap *Indenture Covenant Global Bond*, untuk keperluan Pendanaan proyek, dengan kegiatan usaha: a. Penyertaan pada PT Rajamandala Electric Power untuk pengembangan PLTA Rajamandala 47 MW b. Penyertaan pada PT GCL Indo Tenaga untuk pengembangan PLTU Kalbar-1 2x100 MW	Participating interest – as PT IP's subsidiary deemed to be unrestricted to the Indenture Covenant Global Bond, for project financing, with the following business activities: a. Participating interest in PT Rajamandala Electric Power to develop Rajamandala HPP 47 MW b. Participating interest in PT GCL Indo Tenaga to develop Kalbar-1 SPP 2x100 MW
Perusahaan Patungan | Joint Venture Companies							
6.	PT Perta Daya Gas	26 April 2012 April 26, 2012	Beroperasi Operational	PT Perta Daya Gas Patra Jasa Office Tower Lantai 2 Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 32-34 Jakarta Selatan, 12950 Telp: (62 21) 529 00881 Fax: (62 21) 52900882 Email: mail@pertadayagas.co.id Website: http://www.pertadayagas.co.id/	35%	LNG dan transportasi gas, kegiatan usaha: CNG Plant Tambak Lorok	LNG and gas transportation, business activities: CNG Plant Tambak Lorok

DAFTAR ANAK PERUSAHAAN, PERUSAHAAN PATUNGAN DAN PERUSAHAAN ASOSIASI

List of Subsidiaries, Joint Venture Companies, and Associate Companies

No.	Nama Perusahaan Company	Tanggal Pendirian Date of Incorporation	Status Operasi Perusahaan Company's Operational Status	Alamat Perusahaan Address	Kepemilikan Saham Indonesia Power Participating Interest in Indonesia Power	Bidang Usaha	Field of Business
Perusahaan Asosiasi | Perusahaan Asosiasi							
7.	PT Indo Pusaka Berau	12 Januari 2005 January 12, 2005	Beroperasi Operational	PT Indo Pusaka Berau Kantor Pusat: Head Office: Jalan Pemuda No. 356 Tanjung Redeb, Berau 77311 Kalimantan Timur Telp. : (62 554) 2021672 (62 554) 2021691 Fax : (62 554) 2027003 Email: secretary@ipb.co.id Website: http://www.ipb.co.id/ Kantor Perwakilan Jakarta | Jakarta Representative Office: Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 18 Jakarta Selatan 12950 Telp: (62 21) 526 7666 ext 6446 Fax: (62 21) 525 0912	46,53%	Ketenagalistrikan, dengan kegiatan usaha penjualan tenaga listrik melalui PLTU Lati 3 x 7 MW di Tanjung Redeb Kalimantan Timur.	Electricity, with business activities of selling electricity through Lati SPP 3 x 7 MW in Tanjung Redeb, East Kalimantan
Kepemilikan melalui Anak Perusahaan, PT Putra Indotenaga | Ownership through Subsidiary, PT Putra Indotenaga							
8.	PT Rajamandala Electric Power	14 Februari 2012 February 14, 2012 February2012	Beroperasi Operational	Wisma PMI Lantai 2 Suite 202 Jalan Wijaya I No. 63 Kebayoran Baru - Jakarta Selatan 12170 Telp. : (62 21) 7265145 Fax : (62 21) 7279370 Email : - Website: -	51%	Ketenagalistrikan, dengan kegiatan usaha pengembangan PLTA Rajamandala 47 MW	Electricity, with business activities developing Rajamandala HPP 47 MW
9.	PT GCL Indotenaga	25 Februari 2016 February 25, 2016	Beroperasi Operational	PT GCL Indo Tenaga Chase Plaza Lantai 9 Jalan Jenderal Sudirman Kav. 21 Jakarta Selatan 12920 Telp. : (62 21) 25989710 Fax : (62 21) 25989712 Email : - Website : -	35%	Ketenagalistrikan, dengan kegiatan usaha saat ini adalah pengembangan PLTU Kalbar-1 2x100 MW	Electricity, with recent business activities developing Kalbar-1 SPP 2x100 MW

SEKILAS KINERJA ANAK PERUSAHAAN, PERUSAHAAN PATUNGAN DAN PERUSAHAAN ASOSIASI

Brief Performance of Subsidiaries, Joint Venture Companies and Associate Companies

Anak Perusahaan Subsidiaries

PT Cogindo DayaBersama (CDB)

Profil Perusahaan

PT Cogindo DayaBersama (CDB) didirikan pada tanggal 15 April 1998 berdasarkan Akta No. 52 Notaris Siti Pertiwi Henny Singgih, SH dengan tempat kedudukan di Jl Gatot Subroto kav 18 Jakarta dengan penyertaan saham Indonesia Power sebesar 99,9% dan 1 lembar saham dimiliki oleh YPK-Indonesia Power. CDB bergerak dalam bidang usaha pelayanan energi dengan konsep *Cogeneration* dan *Distributed generation*, serta jasa operasi & pemeliharaan (O&M) pembangkit.

Company Profile

PT Cogindo DayaBersama (CDB) is established on April 15, 1998 based on Notarial Deed No. 52 of Siti Pertiwi Henny Singgih, SH, at Jl. Gatot Subroto Kav. 18 Jakarta, with the investment of Indonesia Power of 99.9% and 1 Share owned by YPK-Indonesia Power. CDB conducts business activity in the energy services sector, with Cogeneration and Distributed Generation concept, and Power Plant Operation & Maintenance (O&M services).

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Tahun 2016

Composition of Board of Commissioners and Board of Directors in 2016

Jabatan	Position	Nama | Name	Masa Jabatan | Tenure
PLT Komisaris Utama	Acting President Commissioner	Roikhan	2 Agustus 2015 s.d Pejabat Komisaris Definitif ditentukan oleh Keputusan RUPS Sirkuler August 2, 2015 until the Definitive commissioner is determined by Circular GMS Decision
PLT Komisaris	Acting Commissioner	Didy Poeriadi	
Direktur Utama	President Director	Mangampin Saragi	1 Agustus 2015 - 31 Juli 2018 August 1, 2015 - July 31, 2018
Direktur (Sumber Daya Manusia)	Director (Human Resources)	Asep Yanyan Herdiyana	
Direktur (Operasi)	Director (Operation)	Amlan	
Direktur (Keuangan)	Director (Finance)	Rachmanto Kusomonegoro	

SEKILAS KINERJA ANAK PERUSAHAAN, PERUSAHAAN ASOSIASI DAN PERUSAHAAN PATUNGAN

Brief Performance of Subsidiaries, Associate Companies, and Joint Venture Companies

Kinerja Keuangan Tahun 2016 (Rp miliar) **Financial Performance in 2016 (Rp billion)**

Keterangan	Description	2016	2015	2014	Perubahan 2016 terhadap 2015 (%) Changes in 2016 against 2015 (%)
Total Aset	Total Assets	899,01	779,98	773,83	115,25
Pendapatan Usaha	Revenues	608,85	459,67	575,92	132,45
Beban Usaha	Operating Expenses	(558,77)	(407,95)	(494,36)	136,97
Laba (Rugi) Usaha	Operating Income (Loss)	50,08	51,72	81,56	96,83
Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan	Profit (Loss) for the year	39,46	31,52	25,49	125,19
Total Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan	Comprehensive Income for the year	38,82	30,56	24,9	127,03

Penjelasan atas naik/turunnya realisasi kinerja tahun 2016 terhadap realisasi tahun 2015 Explanation on the increase/decrease of performance realization in 2016 to the realization in 2015	Total Aset CDB per 31 Desember 2016 sebesar Rp899,01 miliar meningkat 15,25% dibandingkan tahun 2015, yaitu sebesar Rp779,98 miliar. Realisasi pendapatan tahun 2016 sebesar Rp899,01 miliar meningkat 32,45% dari realisasi tahun 2015 yaitu sebesar Rp459,67 miliar dipengaruhi oleh penambahan portofolio unit jasa O&M yaitu atas UJP Holtekamp, UJP Sintang dan UP PT Indonesia Power, serta kontribusi signifikan dari portofolio *stockiest sparepart engine* Wartsila untuk PT Indonesia Power UP Bali, PLN Tarakan, PLTG Aru PT PJB dan PLTG Duri PT PLN Kitsu. Pendapatan jasa O&M berkontribusi sebesar 58,52% dari total pendapatan usaha, diikuti oleh portofolio penjualan tenaga listrik sebesar 20,69%, pendapatan jasa teknis sebesar 12,67% dan terakhir dari portofolio pendapatan sewa genset berkontribusi sebesar 8,13% dari total pendapatan usaha. Beban Usaha sebesar Rp558,77 miliar meningkat 36,97% dibandingkan tahun 2015 yaitu sebesar Rp407,95 miliar. Laba Usaha sebesar Rp50,08 miliar menurun 3,17% dibandingkan tahun 2015 yaitu sebesar Rp51,72 miliar. Laba Bersih per 31 Desember 2016 tercatat sebesar Rp39,46 miliar meningkat 25,49% dibandingkan tahun 2015 yaitu sebesar Rp31,52 miliar. Meningkatnya pencapaian laba bersih tahun 2016 dibandingkan tahun 2015 disebabkan antara lain karena peningkatan pendapatan usaha serta peningkatan signifikan pada pendapatan lain-lain atas peningkatan bunga bank dari jasa giro penempatan deposito.	CDB Total Assets per December 31, 2016 is Rp899.01 billion, increased by 15.25% compared to 2015, i.e. Rp779.98 billion. Revenue realization for 2016 is in the amount of Rp899.01 billion, an increase of 32.45% from 2015 realization, which was Rp459.67 billion. It was influenced by additional portfolio from O&M Service Unit, i.e. Holtekamp GSU, Sintang GSU, and GU PT Indonesia Power, and significant contribution from portfolio of Wartsila engine spare part stockist for PT Indonesia Power Bali GU, PLN Tarakan, Aru GTPP PT PJB, and Duri GTPP PT PLN Kitsu. The revenue from O&M Services contributed to 58.52% of total revenue, followed by the portfolio of power purchase of 20.69%, technical services revenue of 12.67%, and lastly, portfolio of generator rental of 8.13% of total revenue. Operating Expenses amounted to Rp558.77 billion, increased by 36.97% compared to 2015, i.e. Rp407.95 billion. Operating Income amounted to Rp50.08 billion, decreased by 3.17% compared to 2015, i.e. Rp51.72 billion. Net Income per December 31, 2016 was recorded at Rp39.46 billion, increased by 25.49% compared to 2015, i.e. Rp31.52 billion. The increase in net income in 2016 compared to 2015 is caused by the increase in revenues and significant increase in other income on the increase of bank's interest from demand deposit service.

PT. ARTHA DAYA COALINDO
Subsidiary of PT. INDONESIA POWER

PT Artha Daya Coalindo (ADC)

Profil Perusahaan

PT Artha Daya Coalindo (ADC) didirikan pada tanggal 21 Oktober 1997, dengan kepemilikan saham Indonesia Power sebesar 80%, PT Arthindo Utama sebesar 10% dan PT Desira Pratama Line sebesar 10%. ADC bergerak dalam bidang usaha trading, transportasi dan jasa pembongkaran batubara.

Company Profile

PT Artha Daya Coalindo (ADC) is established on October 21, 1997, with 80% ownership of Indonesia Power, 10% ownership of PT Arthindo Utama, and 10% of PT Desira Pratama Line. ADC conducts business activities in trading, transportation, and coal unloading services sectors.

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Tahun 2016

Composition of Board of Commissioners and Board of Directors in 2016

Jabatan	Position	Nama | Name	Masa Jabatan | Tenure
Komisaris Utama	President Commissioner	Roikhan	2 Agustus 2015 - 1 Agustus 2018 August 2, 2015 - August 1, 2018
Komisaris	Commissioner	Seta Perdana	
Komisaris	Commissioner	Marco Rosihan Yakub	
Direktur Utama	President Director	Slamet Riyanto	1 Agustus 2015 -31 Juli 2018 August 1, 2015 - July 31, 2018
Direktur Operasi	Operation Director	Rozano Faizal	
Direktur Keuangan dan Administrasi	Director of Finance and Administration	Rizaldi	

Kinerja Keuangan Tahun 2016 (Rp miliar)

Financial Performance in 2016 (Rp billion)

Keterangan	Description	2016	2015	2014	Perubahan 2016 terhadap 2015 (%) Changes in 2016 against 2015 (%)
Total Aset	Total Assets	171,56	103,81	81,74	165,26
Pendapatan Usaha	Revenues	408,32	380,35	400,26	107,35
Beban Usaha	Operating Expenses	(390,89)	(361,62)	(374,15)	108,09
Laba (Rugi) Usaha	Operating Income (Loss)	17,43	18,73	26,11	93,06
Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan	Profit (Loss) for the year	10,68	13,72	10,15	77,84
Total Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan	Comprehensive income for the year	10,65	13,72	10,15	77,62

SEKILAS KINERJA ANAK PERUSAHAAN, PERUSAHAAN ASOSIASI DAN PERUSAHAAN PATUNGAN

Brief Performance of Subsidiaries, Associate Companies, and Joint Venture Companies

Penjelasan atas naik/ turunnya realisasi kinerja tahun 2016 terhadap realisasi tahun 2015 Explanation on the increase/ decrease of performance realization in 2016 to the realization in 2015	Total Aset ADC per 31 Desember 2016 sebesar Rp171,56 miliar meningkat 65,26% dibandingkan tahun 2015 yaitu sebesar Rp103,81 miliar dikarenakan peningkatan piutang usaha atas penjualan batubara, *port management* dan pembongkaran batubara, serta tingginya posisi kas akhir tahun dimana terdapat tambahan modal disetor oleh Indonesia Power kepada PT ADC sebesar Rp15 miliar.	Total Assets of ADC per December 31, 2016 is Rp171.56 billion, increased by 65.26% compared to 2015, i.e. Rp103.81 billion. This is due to the increase in trade receivables on the coal sales, port management, and coal unloading, and cash position at the end of the year went high due to the additional paid-in capital from Indonesia Power to PT ADC in the amount of Rp15 billion.
	Realisasi pendapatan tahun 2016 sebesar Rp408,32 miliar meningkat 7,35% dibandingkan tahun 2015 yaitu sebesar Rp380,35 miliar, antara lain disebabkan oleh peningkatan volume pasokan batu bara ADC ke Indonesia Power dari 482 ribu Mton pada tahun 2015 menjadi 518 ribu Mton pada tahun 2016 atau meningkat 7,32%, serta peningkatan volume pembongkaran batubara dari 2,18 juta MTon pada tahun 2015 menjadi 3,14 juta MTon pada tahun 2016 atau meningkat 43,22%.	Revenue realization for 2016 is in the amount of Rp408.32 billion, an increase of 7.35% from 2015 realization, which was Rp380.35 billion. It was due to the increase in coal supply volume from ADC to Indonesia Power, from 482 thousand MTon in 2015 to 518 thousand MTon in 2016, or increased by 7.32%, and an increase in the coal unloading volume, from 2.18 million MTon in 2015 to 3.14 million MTon in 2016 or equivalent to an increase of 43.22%.
	Beban Usaha sebesar Rp390,89 miliar meningkat 8,09% dibandingkan tahun 2015 yaitu sebesar Rp361,62 miliar sejalan dengan peningkatan pendapatan.	Operating Expenses amounted to Rp390.89 billion, increased by 8.09% compared to 2015, i.e. Rp361.62 billion, aligned with the increase in the income.
	Laba usaha sebesar Rp17,43 miliar menurun 6,94% dibandingkan tahun 2015 yaitu sebesar Rp18,73 miliar.	Operating Income amounted to Rp17.43 billion, decreased by 6.94% compared to 2015, i.e. Rp18.73 billion.
	Posisi Laba tahun berjalan dan jumlah laba komprehensif tahun 2016 tercatat sebesar Rp10,65 miliar menurun sebesar 22,38% dibanding tahun 2015 sebesar Rp13,72 miliar.	Income for the year and the comprehensive income for 2016 is recorded at Rp10.65 billion, decreased by 22.38% compared to 2015, which was Rp13.72 billion.

PT Indo Ridlatama Power (IRP)

Profil Perusahaan

PT Indo Ridlatama Power adalah anak perusahaan PT Indonesia Power yang didirikan pada tanggal 28 September 2007 berdasarkan Akta No. 211 Notaris Ingrid Lannywaty, SH dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor C-06299 HT.01.01-TH.2007 yang berlokasi di Jl Gatot Subroto Kav. 18 Jakarta dengan kepemilikan saham Indonesia Power sebesar 93,96% dan PT Ridlatama Bangun Mandiri sebesar 6,04%. IRP didirikan untuk mengembangkan PLTU Kaltim 2x27,5 MW di Muara Jawa, Kalimantan Timur.

Company Profile

PT Indo Ridlatama Power is a subsidiary of PT Indonesia Power, which is established on September 28, 2007 based on Notarial Deed No. 211 of Ingrid Lannywaty, SH, and Decree of Minister of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia Number C-06299 HT.01.01-TH.2007, which is located at Jl. Gatot Subroto Kav. 18 Jakarta, with 93.96% ownership of Indonesia Power and 6.04% ownership of PT Ridlatama Bangun Mandiri. IRP was established to develop Kaltim SPP 2x27.5 MW in Muara Jawa, East Kalimantan.

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Tahun 2016

Composition of Board of Commissioners and Board of Directors in 2016

Jabatan	Position	Nama | Name	Masa Jabatan | Tenure
Komisaris Utama	President Commissioner	Antonius RTA	20 Mei 2016 s.d tercapainya target COD PLTU Kaltim May 20, 2016 until the COD Target in SPP Kaltim is achieved
Komisaris	Commissioner	Doddy Sumantyawan	22 Juli 2016 s.d tercapainya target COD PLTU Kaltim July 22, 2016 until the COD Target in SPP Kaltim is achieved
Direktur Utama	President Director	Makmur Marzuki	20 Mei 2016 s.d tercapainya target COD PLTU Kaltim May 20, 2016 until the COD Target in SPP Kaltim is achieved
Direktur Keuangan dan Administrasi	Director of Finance and Administration	Hardiman	
Direktur Operasi	Operation Director	R. Triyono Budi P	

SEKILAS KINERJA ANAK PERUSAHAAN, PERUSAHAAN ASOSIASI DAN PERUSAHAAN PATUNGAN

Brief Performance of Subsidiaries, Associate Companies, and Joint Venture Companies

Kinerja Keuangan Tahun 2016 (Rp miliar)

Financial Performance in 2016 (Rp billion)

Keterangan	Description	2016	2015	2014	Perubahan 2016 terhadap 2015 (%) Changes in 2016 against 2015 (%)
Total Aset	Total Assets	688,15	221,22	158,40	311,07
Pendapatan Usaha	Revenues	0	0	0	-
Beban Usaha	Operating Expenses	(5,86)	(4,78)	(2,52)	122,52
Laba (Rugi) Usaha	Operating Income (Loss)	(5,86)	(478)	(2,52)	122,52
Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan	Profit (Loss) for the year	(5,13)	(2,33)	(2,20)	219,79

Penjelasan atas naik/turunnya realisasi kinerja tahun 2016 terhadap realisasi tahun 2015 Explanation on the increase/decrease of performance realization in 2016 to the realization in 2015	Total Aset IRP per 31 Desember 2016 sebesar Rp688,15 miliar meningkat 211,07% dibandingkan tahun 2015 yaitu sebesar Rp221,22 miliar dikontribusi oleh setoran modal Indonesia Power sebesar Rp135 miliar serta *progress* pekerjaan proyek PLTU Kaltim 2x27,5 MW yang dibukukan sebagai Pekerjaan Dalam Pelaksanaan (PDP). Proyek PLTU Kaltim 2x27,5 MW diestimasikan COD pada akhir tahun 2017.	Total Assets of IRP per December 31, 2016 is Rp688.15 billion, increased by 211.07% compared to 2015, i.e. Rp221.22 billion. This is due to the contribution of paid-in capital from Indonesia Power in the amount of Rp135 billion, and the progress of project Kaltim SPP 2x27.5 MW that is booked under Work in Progress (PDP). The Kaltim SPP 2x27.5 MW project is estimated to reach COD in the end of 2017.
	IRP belum membukukan pendapatan usaha dengan status saat ini masih dalam proses *Engineering, Procurement and Construction* (EPC) untuk proyek PLTU Kaltim 2x27,5 MW.	IRP has not booked the revenue due to its status as a project in the process of Engineering, Procurement, and Construction (EPC) for SPP Kaltim 2x27.5 MW.
	Beban usaha sebesar Rp5,86 miliar meningkat 22,52% dibanding tahun 2015 sebesar Rp4,78 miliar. Rugi usaha sebesar Rp5,86 miliar meningkat 22,52% dibanding tahun 2015 sebesar Rp4,78 miliar.	Operating Expenses amounted to Rp5.86 billion, increased by 22.52% compared to 2015, i.e. Rp4.78 billion. Expenses amounted to Rp5.86 billion, increased by 22.52% compared to 2015, i.e. Rp4.78 billion.
	Rugi bersih tahun berjalan dan jumlah rugi komprehensif tahun berjalan sebesar Rp5,13 miliar.	Loss for the year and comprehensive loss for the year amounted to Rp5.13 billion.

PT Tangkuban Parahu Geothermal Power (TPGP)

Profil Perusahaan

PT Tangkuban Parahu Geothermal Power (TPGP) didirikan tanggal 1 Oktober 2009 berdasarkan Akta No. 2 Notaris Humberg Lie, SH dengan kepemilikan saham Indonesia Power sebesar 95,2% dan Raser Technology Inc sebesar 4,8%. Raser Technology Inc selanjutnya berganti nama menjadi Cyrq Energy Inc berdasarkan Akta No. 2 Notaris Erni Rohaini, SH tanggal 3 April 2012. TPGP didirikan untuk mengoperasikan PLTP WKP Tangkuban Perahu di Jawa Barat.

Company Profile

PT Tangkuban Parahu Geothermal Power (TPGP) is established on 1 October 2009 based on the Notarial Deed No. 2 of Humberg Lie, SH, with 95.2% ownership of Indonesia Power and 4.8% ownership of Raser Technology Inc. Raser Technology Inc changed its name into Cyrq Energy Inc based on the Notarial Deed No. 2 of Erni Rohaini, SH, dated 3 April 2012. TPGP was established to operate Working Area (WKP) Tangkuban Perahu GPP in West Java.

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Tahun 2016

Composition of Board of Commissioners and Board of Directors in 2016

Jabatan	Position	Nama | Name	Masa Jabatan | Tenure
PLT Komisaris Utama	Acting President Commissioner	Antonius RTA	28 Februari 2016 s.d ditetapkannya Dekom secara definitif February 28, 2016 until the definitive commissioner is determined
PLT Komisaris	Acting Commissioner	Sripeni Inten Cahyani	
Direktur Utama	President Director	Sugeng Triyono	29 Februari 2016 s.d 31 Januari 2019 February 29, 2016 until January 31, 2019
Direktur Keuangan dan Administrasi	Director of Finance and Administration	Sjafvitri Sari Dewi	
Direktur Operasi	Operation Director	Agoes Danarto	

SEKILAS KINERJA ANAK PERUSAHAAN, PERUSAHAAN ASOSIASI DAN PERUSAHAAN PATUNGAN

Brief Performance of Subsidiaries, Associate Companies, and Joint Venture Companies

Kinerja Keuangan Tahun 2016 (USD) / Financial Performance in 2016 (USD)

Keterangan	Description	2016	2015	2014	Perubahan 2016 terhadap 2015 (%) Changes in 2016 against 2015 (%)
Total Aset	Total Assets	6.733.065	6.599.269	6.990.967	102,03
Pendapatan Usaha	Revenues	-	-	-	-
Beban Usaha	Operating Expenses	(153.376)	(531.514)	(95.535)	28,86
Laba (Rugi) Usaha	Operating Income (Loss)	(304.429)	(546.680)	(316.111)	55,69
Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan	Profit (Loss) for the year	(304.429)	(546.680)	(47.114)	55,69

Penjelasan atas naik/turunnya realisasi kinerja tahun 2016 terhadap realisasi tahun 2015 Explanation on the increase/decrease of performance realization in 2016 to the realization in 2015	Total aset TPGP per 31 Desember 2016 sebesar USD6,733,065 meningkat sebesar 2,03% dibandingkan tahun 2015 yaitu sebesar USD6,599,269, dimana peningkatan disebabkan pencatatan PDP (Pekerjaan Dalam Pelaksanaan) atas kegiatan eksplorasi TPGP di WKP Tangkuban Parahu. TPGP belum membukukan pendapatan usaha, dimana masih dalam proses *drilling* eksplorasi sumber panas bumi di WKP Tangkuban Parahu. Beban usaha tahun 2016 sebesar USD153,376 menurun 71,14% dibandingkan tahun 2015 yaitu sebesar USD531,514. Rugi sebelum Pajak Penghasilan tahun 2016 sebesar USD 304,429 lebih baik dibandingkan tahun 2015 sebesar USD 546,680 dengan upaya efisiensi untuk operasional TPGP. Posisi Rugi bersih tahun berjalan dan jumlah rugi komprehensif tahun berjalan tahun 2016 tercatat sebesar USD 304,429.	Total Assets of TPGP per December 31, 2016 is USD6,733,065, increased by 2.03% compared to 2015, i.e. USD6,599,269. This is due to the recording of PDP (Work in Progress) on the TGPG exploration in WKP Tangkuban Parahu. TPGP has not yet booked any revenues, due to the exploration drilling process of the geothermal source in WKP Tangkuban Parahu. Operating expenses in 2016 amounted to USD153,376, a decline of 71.14% compared to 2015, which was USD531,514. Loss before Income Tax in 2016 amounted to USD304,429, better than 2015 which was USD546,680 with the effort to make better efficiency for TPGP operations. Loss for the year and comprehensive loss for the year in 2016 amounted to USD304,429.

PT Putra Indotenaga

Profil Perusahaan

PT Putra Indotenaga (PIT) adalah anak perusahaan PT Indonesia Power yang berdiri sejak 20 Desember 2013 berdasarkan Akta No. 24 Notaris Muhammad Hanafi, SH dengan tempat kedudukan di Jl Gatot Subroto kav 18 Jakarta dengan kepemilikan saham Indonesia Power sebesar 99,99% dan YPK Indonesia Power sebesar 0,01%.

Bidang usaha sesuai Anggaran Dasar antara lain menyelenggarakan kegiatan usaha di bidang ketenagalistrikan, serta penyertaan saham dan kepemilikan participating interest di dalam maupun luar negeri. PIT merupakan anak perusahaan yang ditetapkan sebagai *unrestricted subsidiary* terhadap *indenture covenant global bond* PT PLN (Persero) dalam rangka mendukung pendanaan proyek, antara lain:

1. Penyertaan pada PT Rajamandala Electric Power sebesar 51% untuk pengembangan PLTA Rajamandala 47 MW dan
2. Penyertaan pada PT GCL Indotenaga sebesar 35% untuk pengembangan PLTU Kalbar-1 2x100 MW

Company Profile

PT Putra Indotenaga (PIT) is a subsidiary of PT Indonesia Power, which is established since December 20, 2013, based on the Notarial Deed No. 24 of Muhammad Hanafi, SH, located at Jl. Gatot Subroto Kav. 18 Jakarta, with 99.99% ownership of Indonesia Power and 0.01% ownership of YPK Indonesia Power.

In line with the Articles of Association, the business field of PIT is to provide business activity in the electricity sector, as well as participation in shares, and ownership of participating interests both domestic and abroad. PIT is a subsidiary that is established as unrestricted subsidiary to indenture covenant global bond of PT PLN (Persero), in order to support the project fund, such as:

1. Participation in PT Rajamandala Electric Power in the amount of 51% to develop Rajamandala HPP 47 MW, and
2. Participation in PT GCL Indotenaga in the amount of 35% to develop Kalbar-1 SPP 2x100 MW

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Tahun 2016

Composition of Board of Commissioners and Board of Directors in 2016

Jabatan	Position	Nama | Name	Masa Jabatan | Tenure
PLT Komisaris	Acting Commissioner	Sripeni Inten Cahyani	20 Desember 2016 s.d ditetapkannya Komisaris secara definitive December 20, 2016 until the Board of Commissioners is set definitively
PLT Direktur	Acting Director	Hermanugroho	22 Desember 2016 s.d ditetapkannya Direktur secara definitive December 22, 2016 until the Board of Directors is set definitively

SEKILAS KINERJA ANAK PERUSAHAAN, PERUSAHAAN ASOSIASI DAN PERUSAHAAN PATUNGAN

Brief Performance of Subsidiaries, Associate Companies, and Joint Venture Companies

Kinerja Keuangan Tahun 2016 (Rp miliar)

Financial Performance in 2016 (Rp billion)

Keterangan	Description	2016	2015	2014	Perubahan 2016 terhadap 2015 (%) Changes in 2016 against 2015 (%)
Total Aset	Total Assets	411,99	273,44	239,07	150,67
Pendapatan Usaha	Revenues	10,58	25,58	11,50	41,39
Beban Usaha	Operating Expenses	(8,16)	(5,40)	(0,86)	151,19
Laba (Rugi) Usaha	Operating Income (Loss)	2,42	20,18	10,64	12,01
Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan	Profit (Loss) for the year	0,94	15,55	9,06	6,06
Total Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan	Comprehensive Income for the year	(2,02)	29,63	11,97	(6,82)

Penjelasan atas naik/turunnya realisasi kinerja tahun 2016 terhadap realisasi tahun 2015 Explanation on the increase/decrease of performance realization in 2016 to the realization in 2015	Total Aset PIT per 31 Desember 2016 sebesar Rp411.99 miliar meningkat sebesar 50,67% dibandingkan tahun 2015 yaitu sebesar Rp273,44 miliar dikarenakan peningkatan investasi pada ventura bersama yaitu adanya tambahan investasi kepada GCL Indotenaga untuk pengembangan PLTU Kalbar-1 2x100 MW, serta pengakuan piutang atas bunga *shareholder loan* (SHL) PIT kepada Rajamandala Electric Power. Pendapatan PIT diperoleh dari akrual penghasilan bunga SHL dari PT REP. Pendapatan tahun 2016 sebesar Rp10,58 miliar menurun 58,61% dibandingkan tahun 2015 sebesar Rp25,58 miliar. Beban usaha atau Bagian rugi bersih investasi serta beban lain-lain sebesar Rp8,16 miliar meningkat 51,19% dibandingkan tahun 2014 sebesar Rp5,40 miliar. Laba sebelum pajak penghasilan sebesar Rp2,42 miliar menurun 87,99% dibandingkan tahun 2015 sebesar Rp20,18 miliar. Laba bersih tahun berjalan sebesar Rp0,94 miliar menurun 93,94% dibandingkan tahun 2015 sebesar Rp15,55 miliar. Penurunan laba dikontribusi oleh besarnya kenaikan kerugian bersih pada ventura bersama dari Rp1,82 Miliar menjadi Rp5,05 Miliar pada tahun 2016.	Total Assets of PIT per December 31, 2016 is Rp411.99 billion, increased by 50.67% compared to 2015, i.e. Rp273.44 billion. This is due to the increase in investment on the joint venture, i.e. additional investment to GCL Indotenaga to develop Kalbar-1 SPP 2x100 MW, as well as recognition of shareholder loan (SHL) receivables of PIT to Rajamandala Electric Power. PIT revenues come from accrued SHL interest income form PT REP. Income in 2016 amounted to Rp10.58 billion, decreased by 58.61% compared to 2015, i.e. Rp25.58 billion. Operating Expenses or Net Investment Loss and other expenses amounted to Rp8.16 billion, increased by 51.19% compared to 2014, i.e. Rp5.40 billion. Profit before tax amounted to Rp2.42 billion, decreased by 87.99% compared to 2015, i.e. Rp20.18 billion. Income for the year amounted to Rp0.94 billion, decreased by 93.94% compared to 2015, i.e. Rp15.55 billion. The decrease in profit is contributed to the increase in net loss on the joint venture, from Rp1.82 billion to Rp5.05 billion in 2016.

Perusahaan Asosiasi Associate Companies

PT Indo Pusaka Berau (IPB)

Profil Perusahaan

PT Indo Pusaka Berau (IPB) adalah perusahaan asosiasi PT Indonesia Power yang berdiri sejak 12 Januari 2005 berdasarkan Akta No.8 Notaris Sukawaty Sumadi, SH yang mengoperasikan PLTU Lati 3 x 7 MW yang berlokasi di Kabupaten Berau Kalimantan Timur dengan kepemilikan saham Indonesia Power sebesar 47 %, Pemkab Berau sebesar 49%, dan PT Pusaka Jaya Baru sebesar 4%. IPB memiliki bidang usaha pokok yaitu penyediaan tenaga listrik berupa kegiatan pembangkitan tenaga listrik.

Company Profile

PT Indo Pusaka Berau (IPB) is an associate company of PT Indonesia Power, which is established since 12 January 2005 based on the Notarial Deed No. 8 of Sukawaty Sumadi, SH, and it operates Lati SPP 3x7 MW, located at Berau Regency, East Kalimantan. Indonesia Power has share ownership of 47%, Berau Regency has 49%, and PT Pusaka Jaya Baru has the rest of 4%. Main business field of IPB is electricity provider in the form of electricity generation activity.

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Tahun 2016

Composition of Board of Commissioners and Board of Directors in 2016

Jabatan	Position	Nama | Name	Masa Jabatan | Tenure
PLT Komisaris	President Commissioner	Eri Prabowo	1 Mei 2016 - 30 April 2019 May 1, 2016 - April 30, 2019
PLT Direktur	Commissioner	Syamsul Abidin	1 Mei 2016 - 20 Januari 2017 May 1, 2016 - January 20, 2017
		Digantikan oleh: Mansyah Kelana	20 Januari 2017 - 30 April 2019 January 20, 2017 - April 30, 2019
Direktur Utama	President Director	Najemuddin	29 April 2016 - 31 Maret 2019 April 29, 2016 - March 31, 2019
Direktur Keuangan dan Administrasi	Director of Finance and Administration	Edy Prasetyo	
Direktur Operasi	Operation Director	Mulyono	

SEKILAS KINERJA ANAK PERUSAHAAN, PERUSAHAAN ASOSIASI DAN PERUSAHAAN PATUNGAN

Brief Performance of Subsidiaries, Associate Companies, and Joint Venture Companies

Kinerja Keuangan Tahun 2016 (Rp miliar) — Financial Performance in 2016 (Rp billion)

Keterangan	Description	2016	2015	2014	Perubahan 2016 terhadap 2015 (%) Changes in 2016 against 2015 (%)
Total Aset	Total Assets	286,04	302,88	273,11	94,44
Pendapatan Usaha	Revenues	105,41	102,59	85,42	102,75
Beban Usaha	Operating Expenses	(84,66)	(82,15)	(65,81)	103,06
Laba (Rugi) Usaha	Operating Income (Loss)	20,75	20,44	19,60	101,52
Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan	Profit (Loss) for the year	13,16	11,94	12,62	110,22
Total Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan	Comprehensive Income for the year	13,99	11,20	12,17	124,91

Penjelasan atas naik/ turunnya realisasi kinerja tahun 2016 terhadap realisasi tahun 2015 Explanation on the increase/ decrease of performance realization in 2016 to the realization in 2015	Total Aset IPB per 31 Desember 2016 sebesar Rp286,04 Miliar mengalami penurunan 5,56% dibandingkan tahun 2015, yaitu sebesar Rp302,88 miliar atas penurunan piutang kepada Berau Coal sehubungan *net off* dengan utang pemakaian batubara kepada Berau Coal. Pendapatan Usaha sebesar Rp105,41 miliar meningkat 2,75% dibandingkan tahun 2015 yaitu sebesar Rp102,59 miliar disebabkan karena peningkatan penjualan KwH listrik dari 123.187 MwH pada tahun 2015 menjadi 126.797 MwH di tahun 2015 atau meningkat 2,93%. Beban usaha sebesar Rp84,66 miliar meningkat sebesar 3,06% dibandingkan tahun 2015 yaitu sebesar Rp82,15 miliar. Laba usaha sebesar Rp20,75 miliar meningkat sebesar 1,52% dibandingkan tahun 2015 yaitu sebesar Rp20,44 miliar. Laba bersih tahun berjalan tercatat sebesar Rp13,16 miliar meningkat 10,22% dibandingkan tahun 2015 sebesar Rp11,20 miliar.	Total Assets of IPB per December 31, 2016 is Rp286.04 billion, decreased by 5.56% compared to 2015, i.e. Rp302.88 billion. This is due to the decrease of receivables to Berau Coal, in relation to net off of the coal utilization debt to Berau Coal. Revenues amounted to Rp105.41 billion, increased by 2.75% compared to 2015, i.e. Rp102.59 billion, due to the increase in electricity sales from 123,187 MwH in 2015 to 126,797 MwH in 2015 or equivalent to an increase of 2.93%. Operating Expenses amounted to Rp84.66 billion, increased by 3.06% compared to 2015, i.e. Rp82.15 billion. Operating Expenses amounted to Rp20.75 billion, increased by 1.52% compared to 2015, i.e. Rp20.44 billion. Income for the year amounted to Rp13.16 billion, decreased by 10.22% compared to 2015, i.e. Rp11.20 billion.

*) Laporan keuangan tahun 2015 disajikan kembali, sehubungan rekonsiliasi utang piutang dengan Berau Coal atas harga pembelian batubara yang dilakukan peninjauan kembali atas harga tahun 2012 – 2015.

*) Financial Statements of 2015 are restated, in relation to reconciliation of debt and receivables with Berau Coal on the price of coal sales under review based on the price of 2012-2015.

Perusahaan Patungan Joint Venture Companies

PT Perta Daya Gas (PDG)

Profil Perusahaan

PT Perta Daya Gas (PDG) adalah perusahaan patungan (joint venture) antara PT Indonesia Power dengan PT Pertamina Gas yang didirikan berdasarkan Akta No 60 Notaris Marianne Vincentia Hamdani SH tanggal 26 April 2012 dengan tempat kedudukan di Patra Office Tower Lantai 2 Jl Jend. Gatot Subroto Kav 32-34 Jakarta Selatan 12950 dengan kepemilikan saham Indonesia Power sebesar Indonesia Power sebesar 35% dan PT Pertagas sebesar 65%.

Bidang usaha sesuai Anggaran Dasar antara lain Menjalankan usaha di bidang LNG, Penyimpanan dan regasifikasi, serta transportasi LNG.Kegiatan usaha PDG saat ini mengoperasikan CNG Plant Tambak Lorok Semarang.

Company Profile

PT Perta Daya Gas (PDG) is a joint venture between PT Indonesia Power with PT Pertamina Gas, which is established based on Notarial Deed No. 60 of Marianne Vincentia Hamdani SH dated April 26, 2012, located at Patra Office Tower 2nd Floor, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav 32-34 Jakarta Selatan 12950, with 35% ownership of Indonesia Power and 65% ownership of PT Pertagas.

Business field, in line with Articles of Association is to conduct business in the LNG field, storage and regasification, and LNG transportation. The current PDG business activities is operating CNG Plant Tambak Lorok Semarang.

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Tahun 2016

Composition of Board of Commissioners and Board of Directors in 2016

Jabatan	Position	Nama | Name	Masa Jabatan | Tenure
Komisaris Utama	President Commissioner	Antonius RTA	30 April 2014 - 30 April 2017 April 30, 2014 - April 30, 2017
Komisaris	Commissioner	Ahmad Kudus	28 Maret 2016 - 28 Maret 2019 March 28, 2016 - March 28, 2019
Direktur Utama	President Director	Kurniawan Rahardjo	10 September 2013 - 9 September 2016 Dan diperpanjang s.d 31 Maret 2017 September 10, 2013 - September 9, 2016 Extended until March 31, 2017
Direktur Keuangan dan Administrasi	Director of Finance and Administration	Riyanto I.U Siregar	1 Agustus 2015 - 31 Juli 2018 August 1, 2015 - July 31, 2018
Direktur Operasi	Operation Director	Razli	1 Mei 2013 - 31 Agustus 2016 Sejak 31 Agustus 2016, jabatan Dirop dirangkap oleh DIRUT May 1, 2013 - August 31, 2016 Since August 31, 2016, the position of Operation Director is concurrently the President Director as well

SEKILAS KINERJA ANAK PERUSAHAAN, PERUSAHAAN ASOSIASI DAN PERUSAHAAN PATUNGAN

Brief Performance of Subsidiaries, Associate Companies, and Joint Venture Companies

Kinerja Keuangan Tahun 2016 (USD) / Financial Performance in 2016 (USD)

Keterangan	Description	2016	2015	2014	Perubahan 2016 terhadap 2015 (%) Changes in 2016 against 2015 (%)
Total Aset	Total Assets	59.459.943	64.955.692	64.870.450	91,54
Pendapatan Usaha	Revenues	12.842.412	7.951.799	1.701.780	161,50
Beban Usaha	Operating Expenses	(8.525.314)	(5.670.187)	(4.928.343)	150,35
Laba (Rugi) Usaha	Operating Income (Loss)	4.317.098	2.281.612	(3.226.563)	189,21
Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan	Profit (Loss) for the year	156.508	(1.643.445)	(4.746.278)	(9,52)

Penjelasan atas naik/turunnya realisasi kinerja tahun 2016 terhadap realisasi tahun 2015 Explanation on the increase/decrease of performance realization in 2016 to the realization in 2015	Total Aset PDG per 31 Desember 2016 sebesar USD59,46 juta menurun 8,54% dibandingkan 2015 yang sebesar USD64,96 juta dikarenakan depresiasi atas CNG Plant. Pada tahun 2016, PDG membukukan Pendapatan Usaha sebesar USD12,84 juta meningkat 61,50% dibandingkan tahun 2015 yang sebesar USD7,95 juta atas pendapatan CNG Plant Tambak Lorok untuk memasok kebutuhan gas PLTGU Tambak Lorok Semarang pada saat beban puncak. Beban Usaha sebesar USD8,53 juta meningkat 50,35% dibandingkan tahun 2015 yaitu sebesar USD5,67 juta terutama dikontribusi oleh beban depresiasi atas CNG Plant. Pada tahun 2016, PDG membukukan laba usaha sebesar USD4,32 juta karena peningkatan pendapatan. Laba tahun berjalan dan jumlah laba komprehensif tahun 2016 tercatat sebesar USD156,508 dimana hingga tahun 2015 PDG masih membukukan kerugian terutama disebabkan besarnya beban bunga *Shareholder Loan* kepada pemegang saham.	Total Assets of PDG per December 31, 2016 is USD59.46 million, decreased by 8.54% compared to 2015, i.e. USD64.96 million due to the depreciation of CNG Plant. In 2016, PDG recorded the Revenues in the amount of USD12.84 million, increased by 61.50% compared to 2015 which was USD7.95 million on the income of CNG Plant Tambak Lorok to supply the gas needs of Tambak Lorok CCPP Semarang during peak load. Operating Expenses amounted to USD8.53 million, increased by 50.35% compared to 2015, i.e. USD5.67 million, mainly contributed by the depreciation expense of CNG Plant. In 2016, PDG recorded the operating income amounted to USD4.32 million due to the increase of revenue. Income for the year and comprehensive income in 2016 amounted to USD156,508. In 2015, PDG still recorded loss mainly due to the shareholder loan interest expense to the shareholders.

LEMBAGA PROFESI PENUNJANG PERUSAHAAN

Company's Supporting Institutions

Kantor Akuntan Publik
Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (RSM)
Plaza ASIA Level 10
Jl. Jend. Sudirman Kav.59
Jakarta 12190 Indonesia
Tel: +62 21 514 01340
Fax: +62 21 514 01350

Public Accounting Firm
Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (RSM)
Plaza ASIA Level 10
Jl. Jend. Sudirman Kav.59
Jakarta 12190 Indonesia
Tel: +62 21 514 01340
Fax: +62 21 514 01350

Konsultan Hukum
Nah'r Murdono Law Office
Mitra Building 9th Floor Suite 902
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav.21 Jakarta 12930
Tel: +62 21 522 00278
Fax: +62 21 522 0029

Legal Consultant
Nah'r Murdono Law Office
Mitra Building 9th Floor Suite 902
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav.21 Jakarta 12930
Tel: +62 21 522 00278
Fax: +62 21 522 0029

Notaris
Lenny Janis Ishak, SH
Graha MIK Lantai 5
Jl. Hang Lekir IX No. 1 Jakarta 12120
Tel: +62 21 7221077
Fax: +62 21 7233855

Notary
Lenny Janis Ishak, SH
Graha MIK Lantai 5
Jl. Hang Lekir IX No. 1 Jakarta 12120
Tel: +62 21 7221077
Fax: +62 21 7233855

Lembaga Pemerintah
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP)
Gedung SMESCO UKM Lt. 8
Jln. Gatot Subroto Kav 94 Jakarta - 12780
Tel: +62 21 7991025
Fax: +62 21 7996033 / 021-7991125

Government Institution
National Public Procurement Agency (LKPP)
Gedung SMESCO UKM Lt. 8
Jln. Gatot Subroto Kav 94 Jakarta - 12780
Tel: +62 21 7991025
Fax: +62 21 7996033 / 021-7991125

Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun)
Jl. Sultan Hasanuddin No.1
Kebayoran Baru Jakarta Selatan - Indonesia
Tel: +62 21 722 1269
Email: humas.puspenkum@kejaksaan.go.id

Assistant Attorney General for Civil and State Administrative Cases (Jamdatun)
Jl. Sultan Hasanuddin No.1
Kebayoran Baru Jakarta Selatan - Indonesia
Tel: +62 21 722 1269
Email: humas.puspenkum@kejaksaan.go.id

Konsultan GCG
PT Multi Utama Indojasa (MUC Consulting)
MUC Building
Jl TB Simatupang No 15 Tanjung Barat Jakarta Selatan 12530
Tel: +62 21 7884 1036
Fax: +62 21 7884 1035

GCG Consultant
PT Multi Utama Indojasa (MUC Consulting)
MUC Building
Jl TB Simatupang No 15 Tanjung Barat Jakarta Selatan 12530
Tel: +62 21 7884 1036
Fax: +62 21 7884 1035

Komisi Pengawas
Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU)
Jalan Ir. H. Juanda 36
Jakarta 10120 Indonesia
Tel: +62 21 350 7015, 350 7016, 350 7043
Fax: +62 21 350 7008

Supervisory Commission
Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU)
Jalan Ir. H. Juanda 36
Jakarta 10120 Indonesia
Tel: +62 21 350 7015, 350 7016, 350 7043
Fax: +62 21 350 7008

PETA WILAYAH OPERASIONAL PERUSAHAAN
Work Area of Indonesia Power

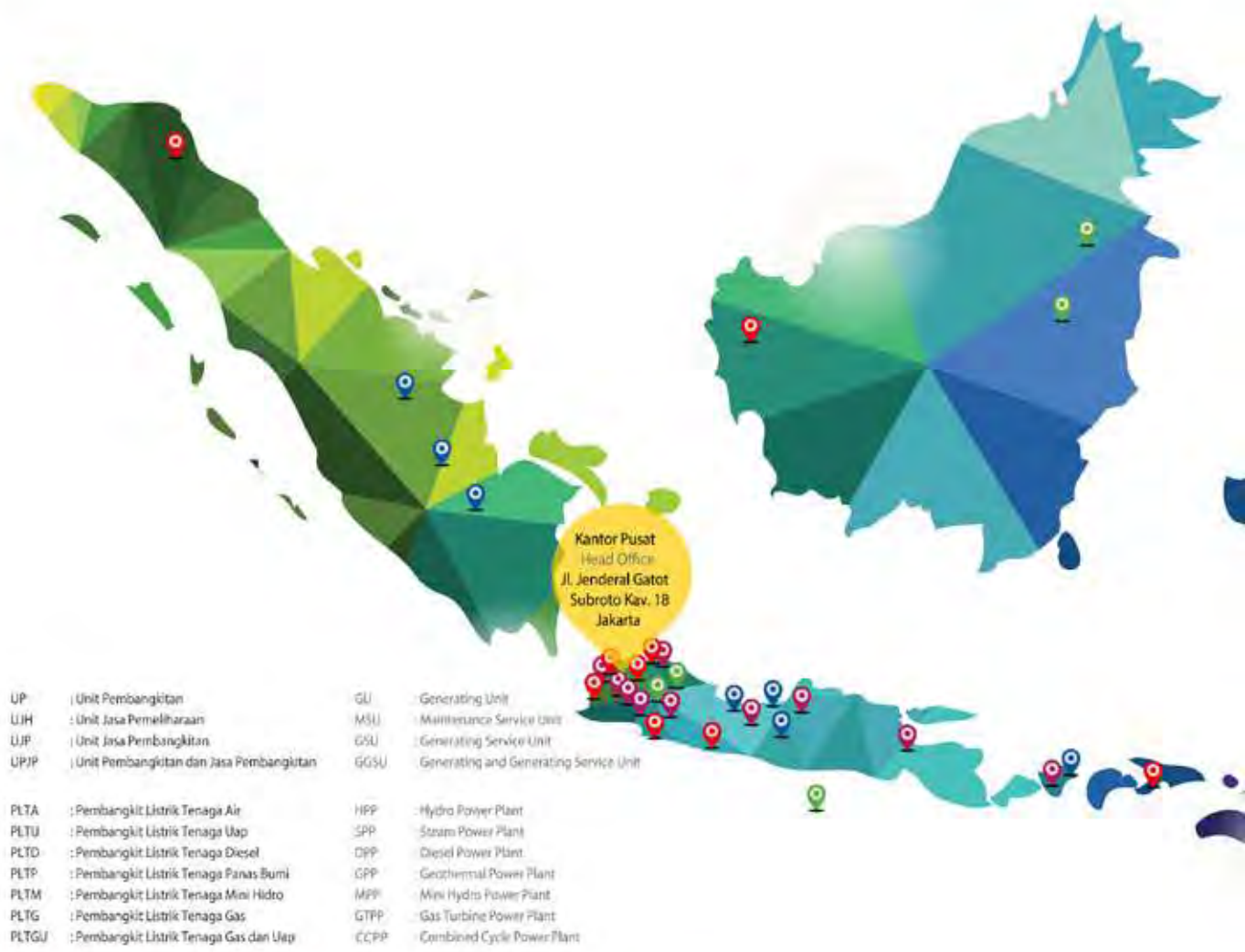

Unit Pembangkitan, Pemeliharaan
Electricity Generating Unit, Maintenance

3,400.00 MW	1,196.08 MW	345 MW	797.36 MW	
UP | GU Suralaya (PLTU) | (SPP) Merak, Banten	UPJP | GGSU Priok (PLTG, PLTGU) (GTPP,CCPP) Priok DKI Jakarta	UPJP | GGSU Kamojang (PLTP) | (GPP) Garut Jawa Barat West Java	UP | GU Saguling (PLTA) | (HPP) Bandung Jawa Barat West Java	UJH | MSU KS Tubun DKI Jakarta
309.75 MW	1,408.93 MW	864.08 MW	556.49 MW	
UP | GU Mrica (PLTA,PLTM) (HPP,MPP) Banjarnegara Jawa Tengah Central Java	UP | GU Semarang (PLTG, PLTGU) (GTPP, CCPP,) Semarang Jawa Tengah Central Java	UP | GU Perak Grati (PLTG, PLTGU) (GTPP,CCPP) Surabaya Jawa Timur East Java	UP | GU Bali (PLTDG, PLTG) (DGPP, GTPP) Bali	

Proyek Pengembangan
Development Project

1200 MW	450 MW	30 MW	2000 MW	100 MW	800 MW	700 MW
PLTU | SPP Jambi	PLTG/ PLTU | GTPP/ SPP Grati Blok 3	PLTA | HPP Sibundong	PLTU | SPP Suralaya 9 & 10	Cogen Senayan	PLTGU | CCPP Priok Blok 4	PLTGU | CCPP Tambak Lorok 3

90 MW	400 MW	360 MW	30 MW	150 MW
PLTA | HPP Simanggo	PLTGU | CCPP Perak	PLTA | HPP Maung	PLTA | HPP Poigar	Grati add on Blok 2

Anak Perusahaan
Subsidiaries

2 x 27.5 MW	110MW	40 MW
PLTU | SPP Kaltim Kalimantan Timur East Kalimantan	PLTP | GPP Tangkuban Parahau Bandung	PLTD | DPP Batakan

3 x 7 MW	47 MW	2x100 MW
PLTU | SPP Lati Berau	PLTA | HPP Rajamandala Padalarang Bandung	PLTU | SPP Kalbar-1 Kalimantan Barat

Jasa O&M serta Lainnya
O& M Services and Others

1 x 25 MW	4 x 2.4 MW	740 MW	2 x 50 MW	2 x 7 MW	2 x 10 MW	2 x 220 MW	1 x 45 MW	1 x 18 MW
UJP PLTU | GSU SPP Jeranjang Lombok	PLTP | GPP Ulumbu Nusa Tenggara Timur	UJP PLTGU | GSU CCPP Cilegon	UJP PLTU | GSU SPP Barru Sulawesi Selatan South Sulawesi	PLTU | SPP Ambon Maluku	UJP PLTU | GSU CCPP Haultecamp Jayapura	UJP | GSU Pangkalan Susu Sumatera Utara North Sumatera	PLTG | GTPP Indralaya Sumatera Selatan South Sumatera	PLTG | GTPP Payo Selincah Jambi

1 x 625 MW	2 x 300 MW	3 x 315 MW	740 MW	3 x 350 MW	1 x 660 MW	2 x 7 MW	1 x 18 MW
UJP PLTU | GSU SPP Banten 1 Suralaya , Banten	UJP PLTU | GSU SPP Banten 2 Labuan , Banten	UJP PLTU | GSU SPP Banten 3 Lontar , Banten	PLTGU | CCPP Priok Blok 3 Priok , DKI Jakarta	UJP PLTU | GSU CCPP Jawa Barat 2 Palabuhan Ratu Jawa Barat West Java	UJP PLTU I GSU CCPP Jawa Tengah 2 Adipala Jawa Tengah Central Java	UJP PLTU | GSU GPP Sanggau	PLTG | GTPP Keramasan Sumatera Selatan South Sumatera

PETA WILAYAH OPERASIONAL PERUSAHAAN

Work Area of Indonesia Power

Alamat Kantor Jaringan Kerja
Office Network Address

Unit Pembangkit (UP) | Generating Unit (GU)	
UP Suralaya | Suralaya GU	Jl. Raya PLTU Suralaya PO Box 15 Cilegon Banten 42439, Indonesia Telp: (62-254) 571 230, 571 240, 571 242 Faks: (62-254) 571 235 Email: upsla@indonesiapower.co.id
UPJP Priok | Priok GGSU	Jl. Laks. RE Martadinata Jakarta 14310, Indonesia Telp: (62-21) 4353 9114 - 19 (Hunting) Faks: (62-21) 4393 6461 Email:upjptgp@indonesiapower.co.id
UPJP Kamojang | Kamojang GGSU	Jl. Komplek Perumahan,PLTP Kamojang Kotak Pos 125 Garut 44101, Indonesia Telp: (+62-22) 780 5475 - 780 4478 Email:upjpkmj@indonesiapower.co.id
UP Mrica | Mrica GU	Jl. Raya Banyumas KM. 8, Kotak Pos 38 Banjarnegara 53471, Indonesia Telp: (62-286) 597 081 Faks: (62-286) 597 044, 597 100 Email:upmrc@indonesiapower.co.id
UP Perak Grati | Perak Grati GU	Jl. Raya Surabaya – Probolinggo Km.73 PO BOX 11, Grati 67184, Desa Wates, Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan. Telp: (62-343) 413 582, 413 583 Faks: (62-343) 413 693, 413 524, 425 588 Email:uppgt@indonesiapower.co.id
UP Bali | Bali GU	Jl. Brigjen I.G. Ngurah Rai Pesanggaran, Denpasar 80001, Bali, Indonesia Telp: (62-361) 720 421, 720 422 Faks: (62-361) 720 519 Email:upjpbli@indonesiapower.co.id
UP Saguling | Saguling GU	Komplek PLN Cioray, Tromol Pos No. 7 Rajamandala, Kab. Bandung 40554 Kode pos 40754 Telp:. (62-22) 690 3497, 6903489 Faks: (62-22) 690 3613 Email:upjsgl@indonesiapower.co.id
UP Semarang | Semarang GU	Jl. Ronggowarsito,Komplek Pelabuhan Tanjung Emas Semarang 50127, Indonesia Telp: (62-24) 3518371 (Hunting) Faks: (62-24) 3546835 Email:upsmg@indonesiapower.co.id
Unit Jasa Pemeliharaan | Maintenance Service Unit	
Unit Jasa Pemeliharaan (UJH) | Maintenance Services Unit (MSU)	Jl. Aipda KS. Tubun No. 8, Jakarta Pusat 11420 Telp: (62-21) 563 8666 Faks: (62-21) 563 8622 Email:ujh@indonesiapower.co.id

Unit Jasa Pembangkitan | Generating Services Unit	
UJP Banten 1 Suralaya | Banten 1 Suralaya GSU	Gedung Ex. Pengembangan Usaha Komplek PLTU Suralaya-PO. Box. 15 Cilegon, Merak Banten Telp: (62-254) 570 402 Faks: (62-254) 571 869 Email:ujpbsr@indonesiapower.co.id
UJP Banten 2 Labuan | Banten 2 Labuan GSU	Jl. Laba Terusan Panimbang Desa Sukamaju Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang, Banten 42246 Telp: (62-253) 803 312, 805 015 Email:ujpblb@indonesiapower.co.id
UJP Banten 3 Lontar | Banten 3 Lontar GSU	Jl. Ir Sutami Desa Lontar Kecamatan Kemiri Kabupaten Tangerang, Banten Telp: (62-21) 5939 0660 Faks: (62-21) 5939 0659 Email:ujpblt@indonesiapower.co.id
UJP Jawa Barat 2 Palabuhan Ratu | Jawa Barat 2 Palabuhan Ratu GSU	Jalan Pelita Desa Jayanti Kecamatan Pelabuhan Ratu Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat Telp: (62-266) 434 192 Faks: (62-266) 644 1111 Email:ujpjpr@indonesiapower.co.id
UJP Jawa Tengah 2 Adipala | Jawa Tengah 2 Adipala GSU	Desa Bunton, Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah 53271 Telp: (62-282) 525 9647 Faks: (62-282) 526 4037 Email:ujpadp@indonesiapower.co.id
UJP Pangkalan Susu | Pangkalan Susu GSU	PLN Pangkalan Susu, Dusun 6 Desa Tanjung pasir, Kec Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara 20858 Email:ujppns@indonesiapower.co.id
UJP Barru | Barru GSU	Dusun Bawasalo, Desa Lampoko, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru Sulawesi Selatan Email:ujpbarru@indonesiapower.co.id
UJP Jeranjang | Jeranjang GSU	Jalan Raya PLTU Jeranjang, Dusun Jeranjang, Desa Taman Ayu, Kecamatan Gerung, Kabupat Email:ujpjeranjang@indonesiapower.co.id
UJP Sanggau | Sanggau GSU	Desa Sungai Batu Kec. Kapuas Kab. Sanggau -Kalimantan Barat Email:ujp.sanggau@indonesiapower.co.id
UJP Cilegon | Cilegon GSU	Jalan Raya Bojonegara Salira Desa Margasari Kecamatan Pulo Ampel Kabupaten Serang Telp: (62-254) 575 1555, 575 1444 Faks: (62-254) 575 1501 Email:ujpcilegon@indonesiapower.co.id

KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA

Cooperation with Third Parties

Dalam meningkatkan kinerja kelistrikan, Indonesia Power senantiasa berupaya memperluas jangkauannya melalui kerjasama dan kemitraan dengan berbagai pihak, baik pihak mitra nasional maupun dengan pihak asing. Beberapa bentuk kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia Power pada periode pelaporan antara lain:

a. Kerjasama dengan Pemerintah dan BUMN

Kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia Power dengan Pemerintah dan BUMN selama tahun 2016 dilakukan pada bidang-bidang berikut:

1. Penyediaan tenaga panas bumi dilakukan dengan PT Pertamina Geothermal Energy dikukuhkan dengan Penandatangan Amandemen dan Perjanjian Jual Beli Panas Bumi PLTP Kamojang Unit 1, 2 dan 3 per tanggal 1 Januari 2016 untuk masa berlaku perjanjian selama 25 tahun.
2. Lingkungan hidup dilakukan dengan:
   a) Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dikukuhkan dalam bentuk Perjanjian Kerjasama Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup tanggal 22 Maret 2016 untuk masa berlaku kerjasama selama 2 tahun.
   b) Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang dikukuhkan dalam bentuk Perjanjian Kerjasama Pembangunan dan Pengembangan Taman Keanekaragaman Hayati di Kabupaten Jombang tanggal 4 November 2015 untuk masa berlaku kerjasama selama 5 tahun.
3. Hukum dilakukan dengan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) dikukuhkan dalam bentuk Perjanjian Kerjasama dalam Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara pada tanggal 15 Agustus 2016 untuk masa perjanjian selama 2 tahun.
4. Engineering dan Pemeliharaan Pembangkit dengan PT PAL Indonesia dikukuhkan dalam bentuk Perjanjian Kerjasama Strategis Jangka Panjang Dalam Rangka Mendukung Engineering dan Pemeliharaan Pembangkit pada tanggal 28 September 2016.
5. Pengelolaan energi primer dengan Perusahaan Umum Jasa Tirta I dikukuhkan dalam bentuk

In improving the electricity performance, Indonesia Power strives to widen the network through cooperation and partnership with numerous parties, both national partner and international partner. Indonesia has formed some cooperation on this reporting period, such as:

a. Cooperation with Government and State-Owned Enterprises (BUMN)

Indonesia Power has performed cooperation with Government and BUMN throughout 2016 in these sectors:

1. Provision of geothermal power by PT Pertamina Geothermal Energy, officiated by the signing of Geothermal Procurement Agreement and Amendment for Kamojang Unit 1, 2, and 3 GPP, per January 1, 2016, for a 25-year agreement validity.
2. Environment, performed by:
   a) West Java Provincial Government, officiated in the form of Environmental Management and Protection Cooperation Agreement dated March 22, 2016, for a two-year cooperation period.
   b) Jombang Environmental Agency, officiated in the form of Biodiversity Park Development and Construction Cooperation Agreement in Jombang Regency dated November 4, 2015, for a 5-year cooperation period.
3. Law, performed by Assistant Attorney General for Civil and State Administrative Cases (Jamdatun), officiated in the form of Cooperation Agreement in Civil and State Administrative Cases dated August 15, 2016, for a two-year cooperation period.
4. Engineering and Power Plant Maintenance with PT PAL Indonesia, officiated in the form of Long-Term Strategic Cooperation Agreement in Engineering and Power Plant Maintenance Support dated September 28, 2016.
5. Primary energy management with Public Company Jasa Tirta I, officiated in the form

Perjanjian Kerjasama dalam pengelolaan sumber daya air pada tanggal 2 Desember 2016 untuk masa perjanjian selama 4 tahun.

of Cooperation Agreement to manage water resources dated December 2, 2016, for a 4-year cooperation period.

b. Kerjasama dengan Mitra Usaha Lain

Indonesia Power telah melakukan kerjasama di berbagai bidang dengan banyak mitra, selama tahun 2016 meliputi kegiatan kerjasama sebagai berikut:

1. Pengembangan proyek yang dilaksanakan melalui kerjasama kemitraan adalah Kerjasama di bidang rekrutmen dengan STT PLN dan Sekolah Vokasi UGM dikukuhkan dalam bentuk Perjanjian Kerjasama dalam rangka Program Pendidikan D3 pada tahun 2015 dengan masa kerjasama selama 2 tahun.
2. Bidang rekrutmen dengan Sekolah Vokasi UGM dikukuhkan dalam bentuk Perjanjian Kerjasama dalam rangka Program Pendidikan D3 pada tahun 2015 dengan masa kerjasama selama 1 tahun.
3. Bidang pekerjaan pemeliharaan dengan Mitsubshi Hitachi Power Systems, Ltd Mitsubshi Corporation dan PT PJB dikukuhkan dalam bentuk Perjanjian Kerjasama dalam rangka Pekerjaan Pemeliharaan dan Pengiriman Tenaga Kerja dan Pelatihan untuk Turbin Gas, Turbin Uap dan Boiler di Indonesia pada tanggal 24 Maret 2016 untuk masa perjanjian selama 3 tahun.
4. Bidang pengamanan energi primer dengan Komando Daerah Militer Siliwangi dikukuhkan dalam bentuk Perjanjian Kerjasama dalam rangka Penyelenggaraan Pendampingan Pengamanan dan Pelatihan Bersama atas Penerimaan serta Pengujian Batubara di lingkungan UP Suralaya pada tanggal 6 April 2016.
5. Bidang penyediaan *sparepart* dengan *Joint Operation* Mitsubishi Corporation, PT Poeser Indonesia dan PT Power Systems Service Indonesia dikukuhkan dalam bentuk Perjanjian Kerjasama dalam rangka perjanjian jangka panjang *parts* dan *service* turbin gas dan turbin uap untuk PLTGU Grati pada tanggal 3 Juni 2016.

b. Cooperation with Partners

IIndonesia Power has cooperated in many sectors with many partners. Throughout 2016, the cooperation activities are as follow:

1. Project development with partners in the recruitment process with STT PLN and UGM Vocational School, officiated in the form of Cooperation Agreement in the framework of Diploma (D3) Education Program in 2015, for a 2-year cooperation period.
2. Recruitment process with UGM Vocational School, officiated in the form of Cooperation Agreement in the framework of Diploma (D3) Education Program in 2015, for a 1-year cooperation period.
3. Maintenance sector with Mitsubishi Hitachi Power Systems, Ltd Corporation and PT PJB, officiated in the form of Cooperation Agreement for Maintenance and Employment Delivery, and Training for Gas Turbine, Steam Turbine, and Boiler in Indonesia, dated March 24, 2016, for a 3-year cooperation period.
4. Primary energy security with Siliwangi Regional Military Command, officiated in the form of Cooperation Agreement for Security Guidance and Joint Training on Coal Reception and Testing within Suralaya GU, dated April 6, 2016.
5. Spare part provision with Joint Operation Mitsubishi Corporation, PT Poeser Indonesia, and PT Power Systems Service Indonesia, officiated in the form of Cooperation Agreement for Long-term Agreement for gas turbine and steam turbine parts and services for Grati CCPP, dated June 3, 2016.

KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA

Cooperation with Third Parties

6. Bidang pengembangan pembangkit dengan PT Narada Satu Papua dikukuhkan dalam bentuk Perjanjian Kerjasama dalam pengembangan PLT Biomassa di Wilayah Indonesia Timur pada tanggal 8 November 2016 untuk masa perjanjian selama 2 tahun.
7. Bidang *Corporate Social Responsibility* (CSR) dengan Yayasan Absindo Desa Emas dikukuhkan dalam bentuk Perjanjian Kerjasama melalui pembangunan Program Desa Mandiri, Bermartabat dan Sejahtera (Emas) pada tanggal 18 November 2016 untuk masa perjanjian selama 1 tahun.

6. Power Plant Development with PT Narada Satu Papua, officiated in the form of Cooperation Agreement for PLT Biomassa Development within East Indonesia Area, dated November 8, 2016, for a 2-year cooperation period.
7. Corporate Social Responsibility (CSR) with Yayasan Absindo Desa Emas, officiated in the form of Cooperation Agreement through Construction of *Desa Mandiri, Bertamarbat, dan Sejahtera (Emas)* Program or Independent, Dignified, and Prosperous Village Program, dated November 18, 2016, for a 1-year cooperation period.

c. Kerjasama Luar Negeri

Indonesia Power juga mengembangkan *networking* dengan Perusahaan luar negeri yang mempunyai kompetensi di bidangnya, dengan kerjasama antara lain:

1. Bidang pengembangan pembangkit dengan Taicang Harbour Golden Concord Electric Power Generation Ltd dikukuhkan dengan penandatanganan Kerjasama dalam rangka pengembangan Proyek IPP untuk PLTU Kalbar 2 x 100 MW pada tanggal 24 Februari 2016.
2. Bidang pengembangan pembangkit dengan Doosan dan PT PP dikukuhkan dalam bentuk Perjanjian Kerjasama dalam pembangunan pembangkit Add on Grati Blok 2 pada tanggal 22 Desember 2016.

c. International Cooperation

Indonesia Power also develops networking with overseas company with competence in their field, with cooperation as follows:

1. Power plant development with Taicang Harbour Golden Concord Electric Power Generation Ltd, officiated by the signing of Cooperation Agreement to develop IPP Project for Kalbar SPP 2x100 MW, dated February 24, 2016.
2. Power Plant Development with Doosan and PT PP, officiated in the form of Cooperation Agreement for Add-on Plant Construction on Grati Block 2, dated December 22,2016.

INDONESIA POWER

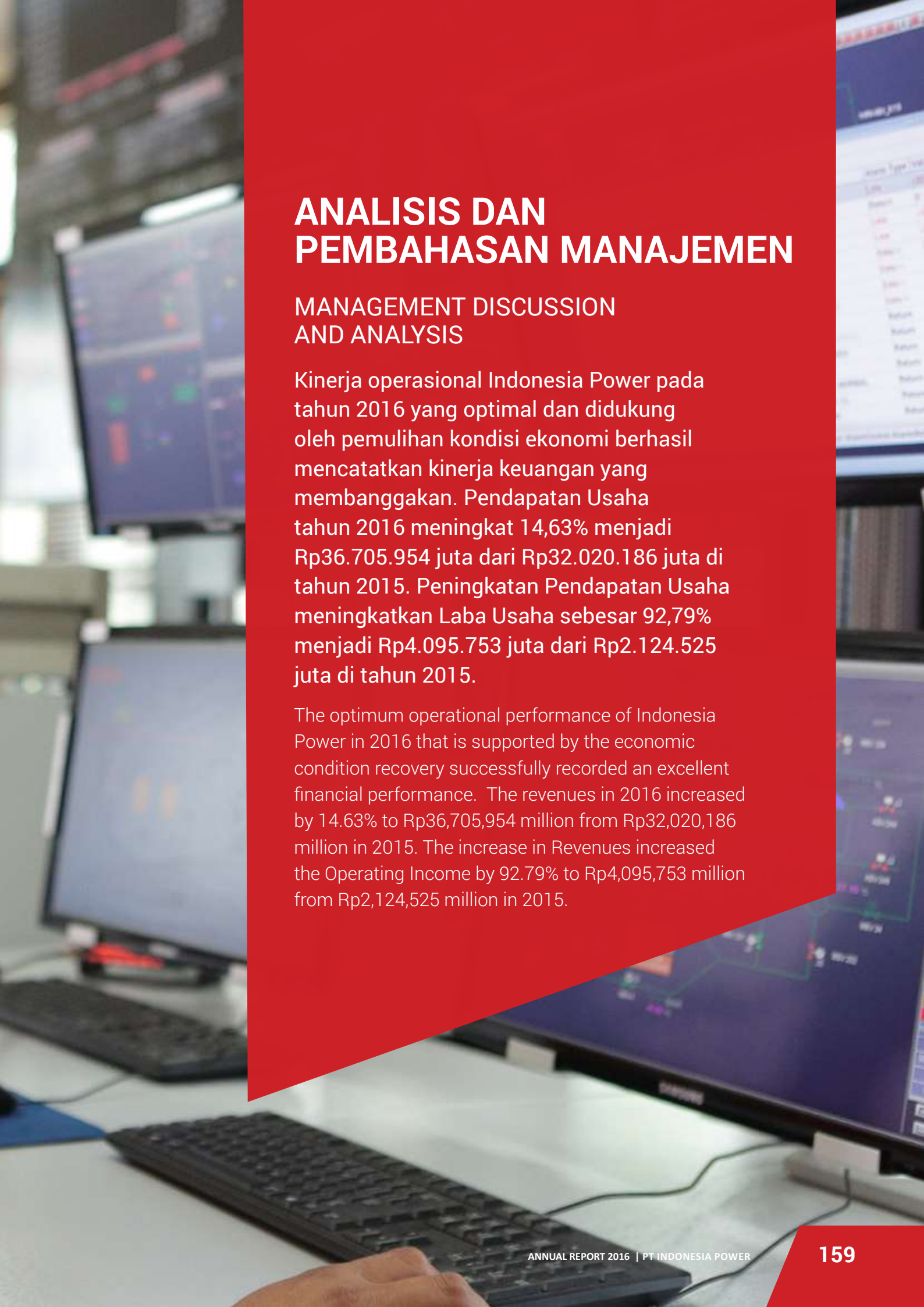

ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN

MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS

Kinerja operasional Indonesia Power pada tahun 2016 yang optimal dan didukung oleh pemulihan kondisi ekonomi berhasil mencatatkan kinerja keuangan yang membanggakan. Pendapatan Usaha tahun 2016 meningkat 14,63% menjadi Rp36.705.954 juta dari Rp32.020.186 juta di tahun 2015. Peningkatan Pendapatan Usaha meningkatkan Laba Usaha sebesar 92,79% menjadi Rp4.095.753 juta dari Rp2.124.525 juta di tahun 2015.

The optimum operational performance of Indonesia Power in 2016 that is supported by the economic condition recovery successfully recorded an excellent financial performance. The revenues in 2016 increased by 14.63% to Rp36,705,954 million from Rp32,020,186 million in 2015. The increase in Revenues increased the Operating Income by 92.79% to Rp4,095,753 million from Rp2,124,525 million in 2015.

TINJAUAN INDUSTRI
Industrial Review

Kondisi ekonomi nasional dipengaruhi oleh kondisi ekonomi global yang memasuki tahap pemulihan. Tingkat sensitivitas Perusahaan sangat dibutuhkan untuk menyesuaikan kondisi pasar sehingga dampak yang timbul dari fluktuasi ekonomi pasar tidak berpengaruh signifikan terhadap keberlanjutan kinerja operasi Perusahaan.

National economic condition is influenced by global economic conditions that has entered the recovery phase. The Company's sensitivity level is needed to adapt to the market condition, so that the impact of market economic fluctuation will not significantly affect the sustainability of Company's operational performance.

Tinjauan Ekonomi Global

Berdasarkan data *International Monetary Fund* (IMF) dalam *World Economic Outlook* (WEO) edisi April 2017, pertumbuhan global untuk tahun 2016 adalah sebesar 3,1%.

Global Economic Review

Based on the International Monetary Fund (IMF) data in World Economic Outlook (WEO) in April 2017, the global growth for 2016 is 3.1%.

Grafik Perekonomian Global Tahun 2013-2016 (%)
Graph: Global Economic 2013-2016 (%)

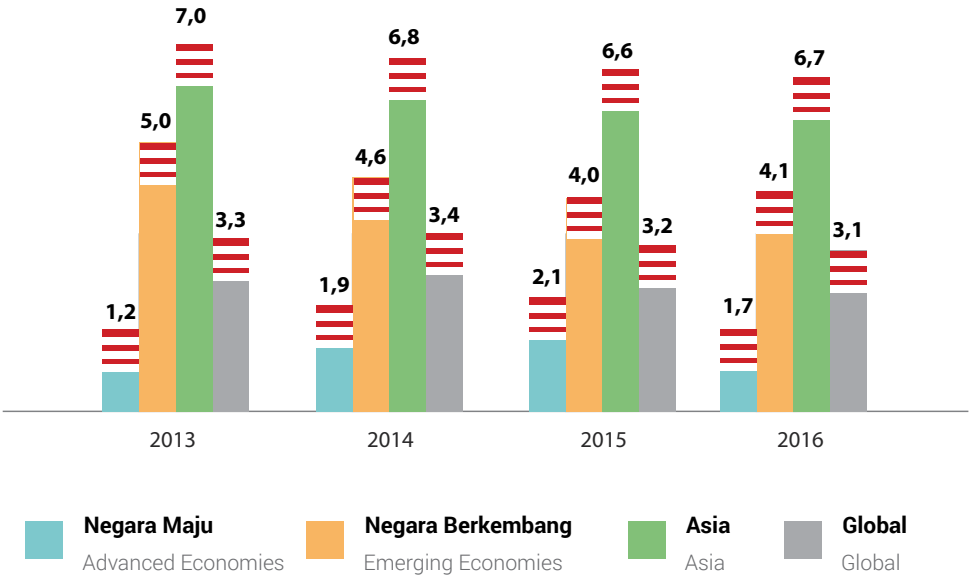

Sumber: *World Economic Outlook* (WEO)

Source: World Economic Outlook (WEO)

Dalam cakupan regional, Asia masih terus memimpin pertumbuhan ekonomi global akan tumbuh sebesar 6,7% yoy pada tahun 2016. Pasar saham tetap optimis, dan arus modal terus mengalir ke Asia, walaupun sempat terjadi penyesuaian pada saat referendum.

Regionally, Asia still continues to lead the global economic growth and is grow 6.7% yoy in 2016. The stock market remains optimistic, and the capital continues to flow to Asia, although there was adjustment made during the referendum.

TINJAUAN INDUSTRI
Industrial Review

Tinjauan Ekonomi Nasional

Kinerja perekonomian nasional mengalami ketidakpastian terkait normalisasi kebijakan moneter yang menyebabkan perlambatan ekonomi di sejumlah negara maju dan negara berkembang utama, serta tren penurunan harga komoditas global.

National Economic Review

The national economic performance is experiencing uncertainty related to the normalization of monetary policy, which causes an economic slowdown in several developed and major developing countries, as well as the trend of decrease in the global commodity prices.

Produk Domestik Bruto

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada triwulan III Tahun 2016, perekonomian Indonesia tahun 2016 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp12.406,8 triliun dan PDB perkapita mencapai Rp47,96 juta atau USD3.605,1.

Perekonomian Indonesia tahun 2016 tumbuh 5,02% yaitu lebih tinggi dibanding pencapaian tahun 2015 sebesar 4,88%. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Lapangan Usaha Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 8,90%. Dari sisi pengeluaran pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non-Profit yang melayani Rumah Tangga sebesar 6,62%.

Gross Domestic Product

Based on the Statistics Indonesia (BPS) in 3rd Quarter of 2016, Indonesian economic in 2016 is measured by the Gross Domestic Product (GDP) at the current price, which reached Rp12,406.8 trillion, and GDP Per Capita which reached Rp47.96 million or USD3,605.1.

Indonesian economic in 2016 grew 5.02%, higher than the achievement in 2015, which was 4.88%. In terms of production, the highest growth was achieved by Financial Services and Insurance Business Field, which was 8.90%. In terms of expenditure, the highest growth was achieved by Non-Profit Institution Consumption Spending Component, that served Households, which was 6.62%.

Grafik Pertumbuhan PDB Berdasarkan Lapangan Usaha Tahun 2016 (% yoy)

Graph: GDP Growth Based on Business Field 2016 (% yoy)

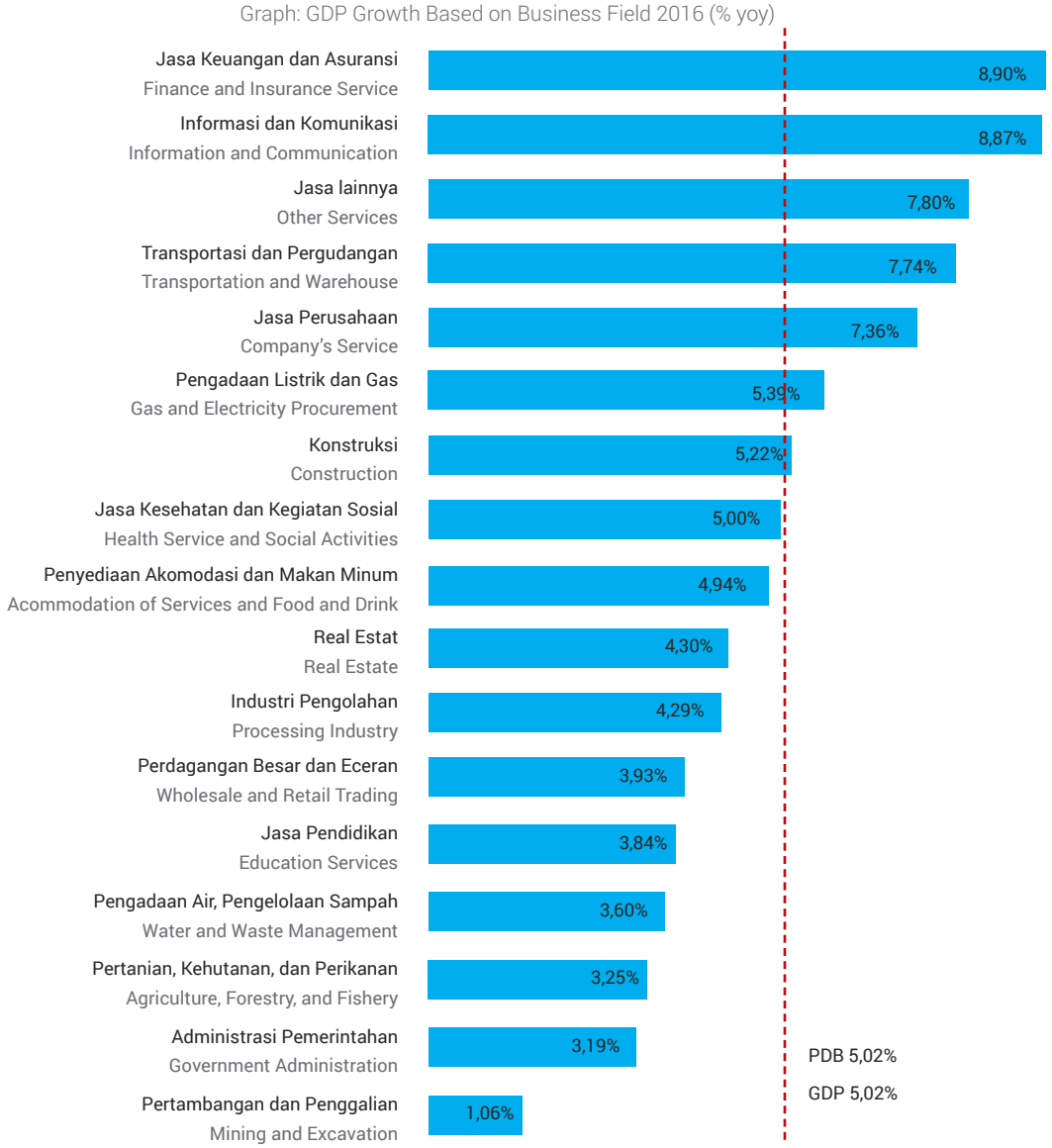

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah Source: Statistics Indonesia (BPS), processed

TINJAUAN INDUSTRI
Industrial Review

Laju pertumbuhan PDB selama lima tahun terakhir disajikan dalam grafik berikut:

GDP growth rate in the last five years is depicted in this Graph:

Grafik Laju Pertumbuhan PDB (%)
Graph: GDP Growth Rate (%)

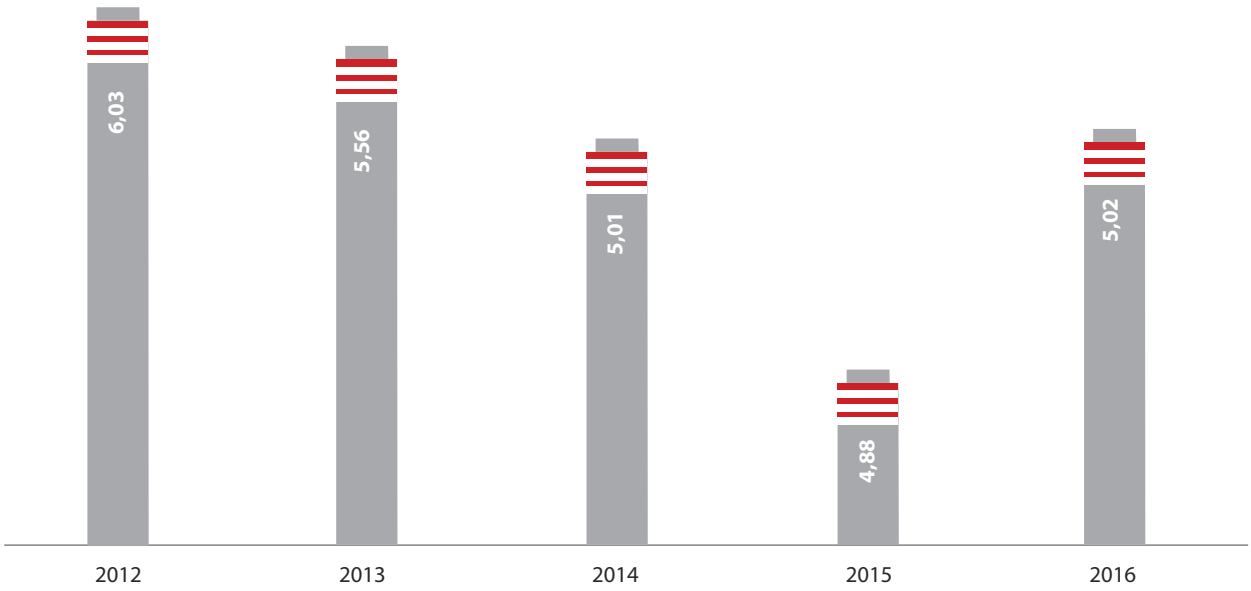

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

Source: Statistics Indonesia (BPS)

Tingkat Inflasi

Inflasi terkendali pada level yang rendah dan berada di batas bawah kisaran sasaran inflasi 2016 (4±1%). Realisasi inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) pada bulan Desember 2016 tercatat sebesar 0,42% (mtm), atau lebih rendah dari bulan lalu yang sebesar 0,47% (mtm), sehingga secara keseluruhan tahun inflasi 2016 menjadi sebesar 3,02% (yoy). Inflasi yang rendah tersebut didukung oleh inflasi inti yang rendah dan *administered prices* yang minimal, di tengah inflasi *volatile food* yang masih meningkat. Pencapaian tersebut didukung oleh kebijakan Bank Indonesia dan koordinasi dengan Pemerintah yang semakin solid, baik di pusat maupun di daerah, dalam mengendalikan inflasi.

Inflation rate

Inflation is under control and at low level, and it is at the lower limit of 2016 inflation target range (4±1%). Realization of inflation in the Consumer Index Price (CIP) on December 2016 is recorded at 0.42% (mtm), or lower than last month which was 0.47% (mtm), resulting in the overall 2016 inflation amounted to 3.02% (yoy). Low inflation was supported by the low core inflation and minimum administered prices, in the midst of increase in volatile food. This achievement is supported by Bank Indonesia's policy and coordination with the Government that are more solid, both at central and regional levels, in controlling the inflation.

Gambar Peta Inflasi Daerah Desember 2016 (%, yoy)
Picture: Regional Inflation Map December 2016 (%, yoy)

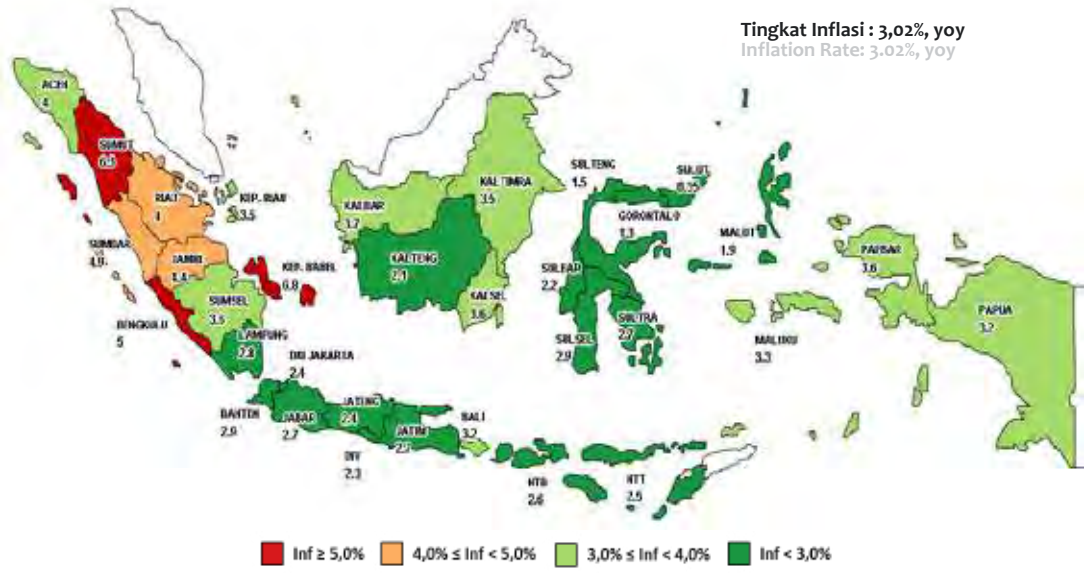

Sumber: Bank Indonesia dan Badan Pusat Statistik, diolah

Source: Bank Indonesia and Statistics Indonesia, processed

Secara keseluruhan tahun 2016, inflasi yang cukup rendah terutama terjadi Jawa, diikuti Kawasan Timur Indonesia (KTI) dan Sumatera yang masing-masing tercatat sebesar 2,59% (yoy), 2,90% (yoy) dan 4,53% (yoy). Tingginya inflasi di wilayah Sumatera disumbang oleh kenaikan inflasi di beberapa daerah di wilayah ini, seperti Kepulauan Bangka Belitung (6,75%,yoy), Sumatera Utara (6,34%,yoy) dan Bengkulu (5,00%).

Overall in 2016, the low inflation happened in Java, and then Indonesia East Region (KTI), and Sumatera, which respectively recorded 2.59% (yoy), 2.90% (yoy), and 4.53% (yoy). Higher inflation in the Sumatera region was contributed by the high inflation rate in some of the areas, such as Bangka Belitung Islands (6.75%, yoy), North Sumatera (6.34%, yoy), and Bengkulu (5.00%).

Nilai Tukar Mata Uang Rupiah terhadap Dollar Amerika

Setelah mengalami tekanan pasca pengumuman Pemilu Presiden AS, nilai tukar Rupiah menguat di bulan Desember seiring dengan aliran modal yang kembali masuk. Secara *point to point*, Rupiah terapresiasi 0,59% (mtm) menjadi Rp13.473/USD. Penguatan tersebut sejalan dengan peningkatan aliran dana masuk terutama di Surat Utang Negara (SUN). Sementara itu, *outflow* yang terjadi di pasar saham berkurang setelah kenaikan *Federal Funds Rate* (FFR) dan bahkan

Exchange Rate of Rupiah against US Dollar

After experiencing the pressure after the announcement of US Presidential Election, the Rupiah Exchange Rate strengthened in December, in line with the capital re-inflows. Point to Point, Rupiah appreciated at 0.59% (mtm) to Rp13,473/USD. The strengthening is in line with the increased inflows of funds, especially in Conventional Government Securities (SUN). Meanwhile, outflow in the stock market were reduced after the increase of Federal Funds Rate (FFR), and pushed the inflow on late

TINJAUAN INDUSTRI
Industrial Review

mendorong *inflow* di akhir Desember 2016. Selama tahun 2016, secara *point to point* Rupiah telah menguat sebesar 2,32% (ytd) terutama didukung oleh persepsi positif investor terhadap perekonomian domestik yang mendorong aliran dana masuk.

December 2016. Throughout 2016, point to point Rupiah has strengthened by 2.32% (ytd), mainly supported by the investor positive perception on the domestic economic that encourages the inflows of funds.

Grafik Nilai Tukar Rupiah terhadap USD Tahun 2016 (Rp/USD)
Graph: Rupiah Exchange Rate against USD in 2016 (Rp/USD)

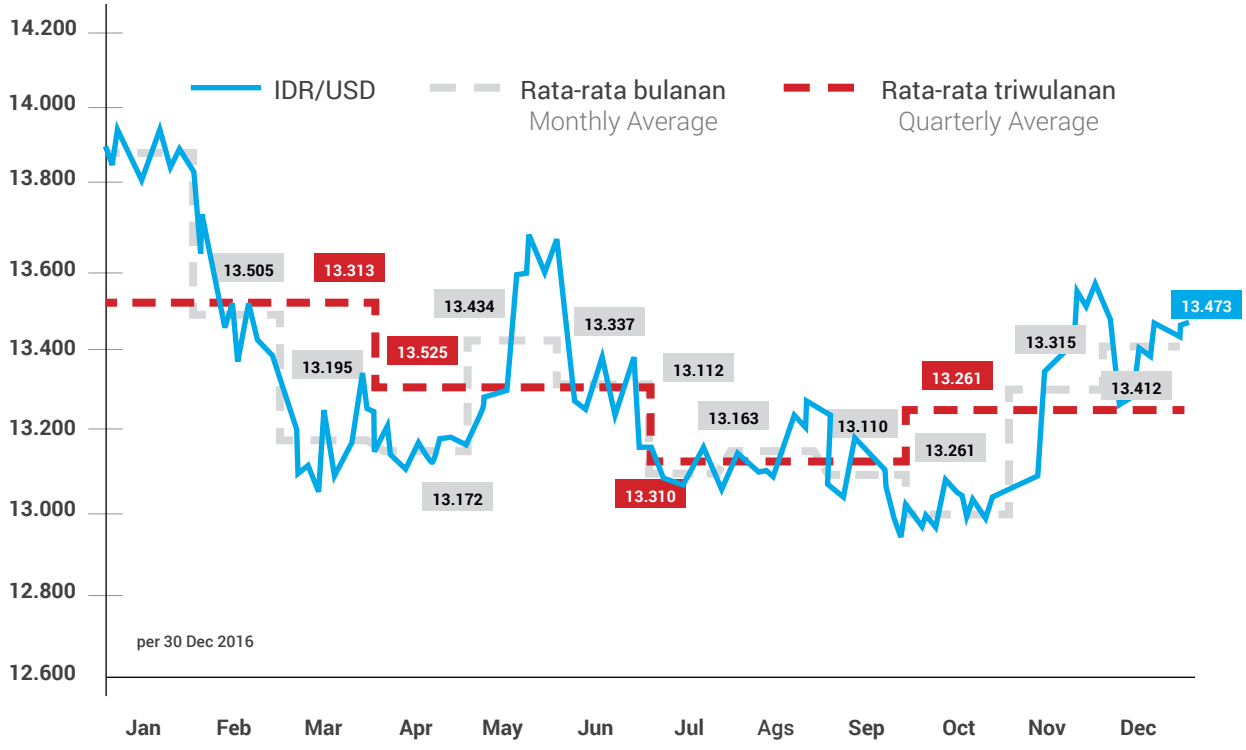

Sumber: Bank Indonesia

Source: Bank Indonesia

Tinjauan Industri Listrik Nasional

Kondisi industri pembangkitan tenaga listrikpun mengalami kondisi fluktuatif seiring dengan pemulihan kondisi ekonomi global. Kondisi eksternal memberikan pengaruh terhadap penjualan dan produksi tenaga listrik. Namun dengan beberapa upaya yang dilakukan, kondisi industri ketenagalistrikan memiliki prospektif yang menjanjikan.

National Electricity Industry Review

The condition of electricity generation industry has fluctuated as well as the recovery of global economic condition. The external condition influences the sales and production of electricity. However, with the efforts made, the electricity industry condition has a promising prospect.

Gambar Kondisi Sistem Kelistrikan Tahun 2016

Picture: Electricity System Condition in 2016

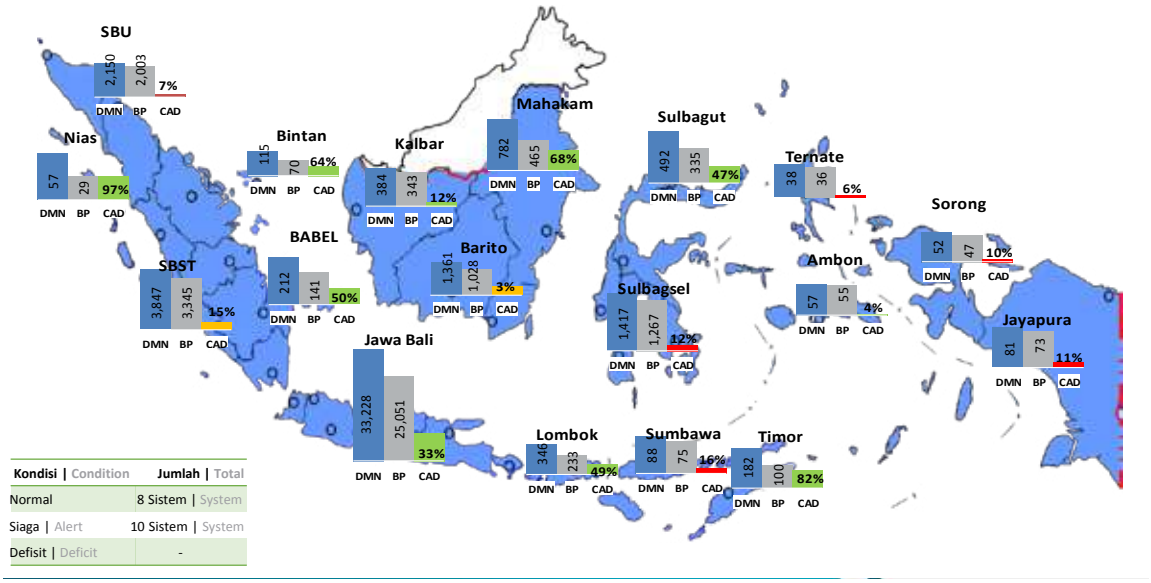

Sumber: Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN Tahun 2017 s.d 2026

Source: Electricity Power Supply Business Plan (RUPTL) PLN for 2017-2026

Kapasitas Terpasang Pembangkit di Indonesia

Sampai dengan Desember 2016, jumlah kapasitas terpasang pembangkit di Indonesia adalah 51.915 MW yang terdiri atas pembangkit PLN sebesar 39.856 MW, swasta sebesar 8.867 MW dan sewa sebesar 3.192 MW. Sebagian besar pembangkit tersebut berupa PLTU batubara sekitar 44,7%, disusul PLTG/PLTGU/PLTMG sekitar 29,3%, PLTD sekitar 11,1%, PLTA/PLTM sekitar 8,9%, PLTU BBM sekitar 3,2%, PLTP sekitar 2,6%, dan EBT lain sekitar 0,2%.

Installed Generator Capacity in Indonesia

Until December 2016, the capacity of installed generator in Indonesia is 51,915 MW, which consists of PLN power plant amounted to 39,856 MW, independent power plant (IPP) amounted to 8,867 MW, and lease amounted to 3,192 MW. Most of the plant is in the form of Coal based Steam Power Plant (SPP), about 44.7%. Then in the form of Gas Turbine Power Plant (GTPP)/Combined Cycle Power Plant (CCPP)/Gas Engine Power Plant (GEPP) amounted to 29.3%, Diesel Power Plant (DPP) amounted to 11.1%, Hydro Power Plant (HPP)/Mini-hydro Power Plant (MPP) amounted to 8.9%, Steam Power Plant (SPP) with Oil Fuel amounted to 3.2%, Geothermal Power Plant (GPP) amounted to 2.6%, and other New and Renewable Forms of Energy (EBT) amounted to 0.2%.

TINJAUAN INDUSTRI
Industrial Review

Grafik Kapasitas Terpasang Pembangkit di Indonesia Tahun 2012-2016 (MW)
Graph: Installed Generator Capacity in Indonesia 2012-2016 (MW)

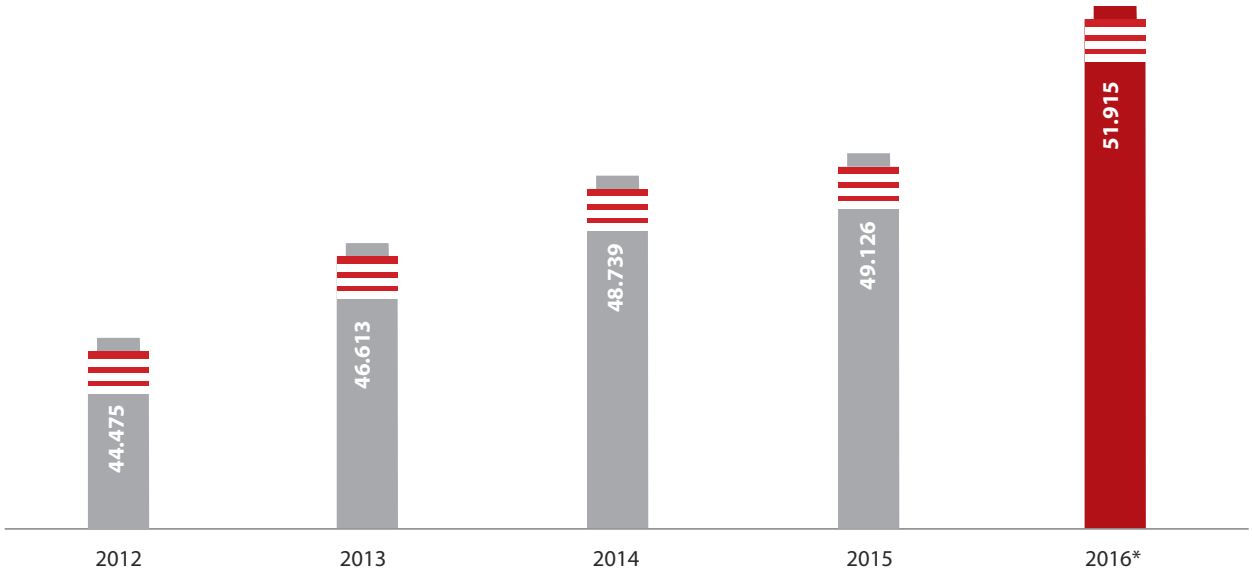

*** angka estimasi** * estimated number

Sumber: RUPTL PLN Tahun 2017 s.d 2026 Source: RUPTL PLN 2017-2026

Kapasitas Terpasang Pembangkit di Indonesia Tahun 2016
Installed Generator Capacity in Indonesia 2016

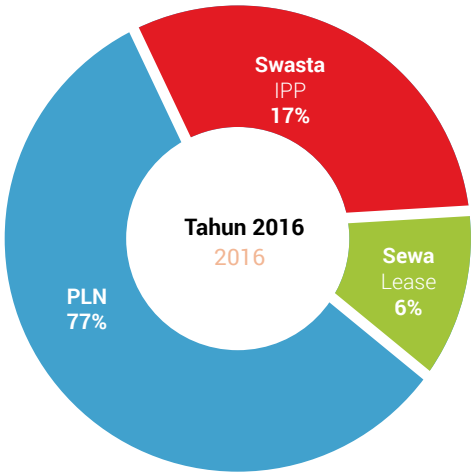

Daya Mampu Netto (DMN) Pembangkit di Indonesia

Jumlah daya mampu netto pembangkit di Indonesia sampai dengan November 2016 adalah sebesar 42.897 MW yang terdiri atas pembangkit PLN sebesar 31.429 MW, swasta sebesar 8.460 MW dan sewa sebesar 3.008 MW.

Net Power Capacity (DMN) of the Generator in Indonesia

Net power capacity of the generator in Indonesia until November 2016 is 42,897 MW, which consists of PLN power plant amounted to 31,429 MW, independent power plant amounted to 8,460 MW, and lease amounted to 3,008 MW.

Grafik Daya Mampu Netto (DMN) Pembangkit di Indonesia Tahun 2012-2016 (MW)
Graph: Net Power Capacity (DMN) of the Generator in Indonesia 2012-2016 (MW)

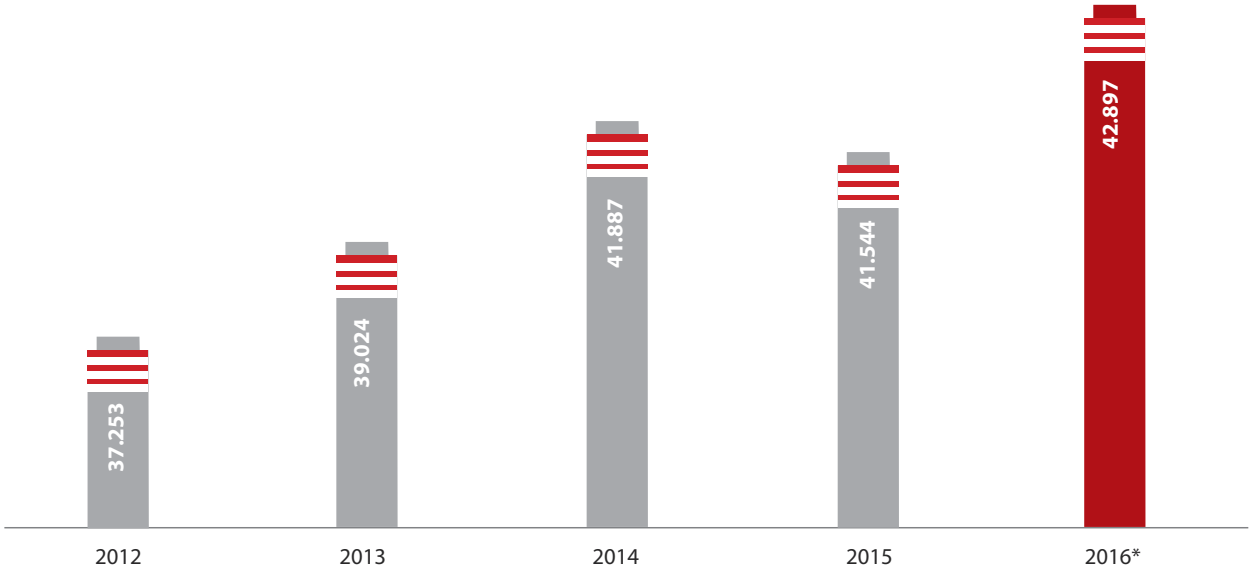

*** angka estimasi**
* estimated number

Sumber: RUPTL PLN Tahun 2017 s.d 2026
Source: RUPTL PLN 2017-2026

TINJAUAN INDUSTRI
Industrial Review

Daya Mampu Netto Pembangkit di Indonesia Tahun 2016
Net Power Capacity of the Generator of Indonesia in 2016

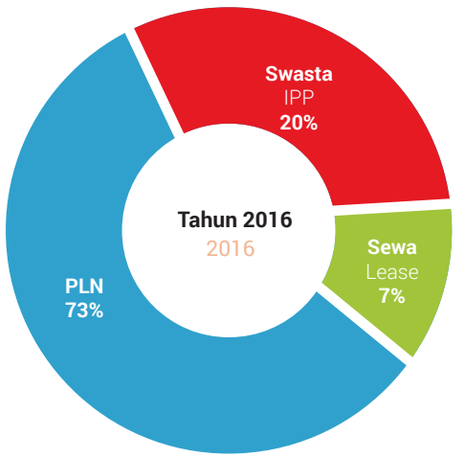

Jumlah Unit Pembangkit di Indonesia

Hingga November 2016, terdapat 6.035 unit pembangkit di Indonesia yang terdiri atas 5.130 unit pembangkit PLN, 230 unit pembangkit swasta, dan 675 unit pembangkit sewa.

Power Plant Unit in Indonesia

Until November 2016, there are 6,035 unit of generators in Indonesia, which consists of 5,130 PLN power plant units, 230 independent power plant units, and 675 lease power plant units.

Grafik Jumlah Unit Pembangkit di Indonesia Tahun 2012-2016 (unit)
Graph: Power Plant Unit in Indonesia 2012-2016 (unit)

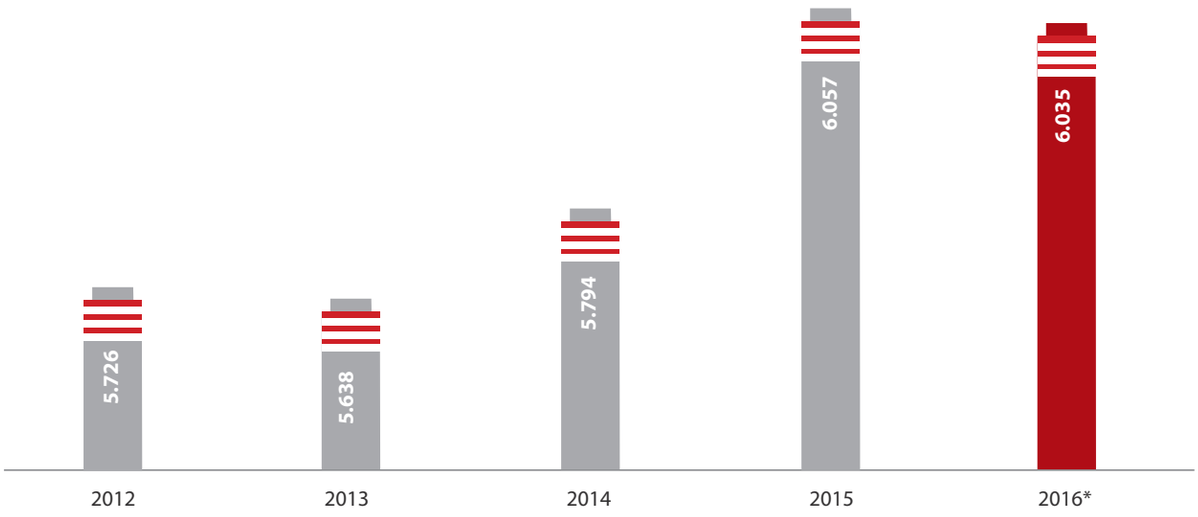

*** angka estimasi**
* estimated number

Sumber: RUPTL PLN Tahun 2017 s.d 2026
Source: RUPTL PLN 2017-2026

Jumlah Unit Pembangkit di Indonesia Tahun 2016
Power Plant Unit in Indonesia 2016

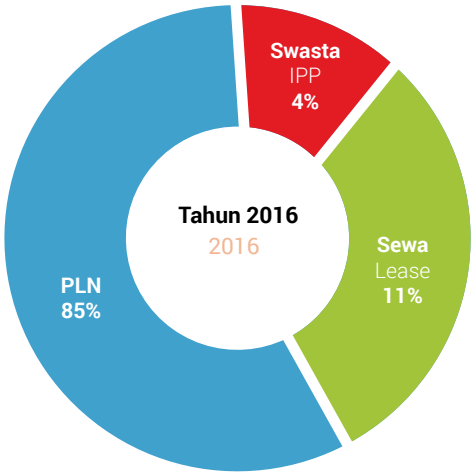

Konsumsi Sumber Energi Primer

Pemakaian BBM berhasil diturunkan selama beberapa tahun terakhir hingga November 2016 menjadi hanya 4,1 juta kiloliter. Menurunnya penggunaan BBM disebabkan oleh beroperasinya beberapa PLTU batubara program percepatan pembangkit tahap 1 (FTP-1) dan beberapa PLTU IPP.

Primary Energy Resources Consumption

The utilization of oil fuel can be decreased during the last couple of years, until November 2016, to 4.1 million kiloliter. The decrease in the oil fuel utilization is caused by numerous operational Coal based Steam Power Plant (SPP) from the power plant program acceleration phase 1 (FTP-1), and numerous IPP SPP.

Grafik Komposisi Sumber Energi Primer Tahun 2016
Graph: Primary Energy Resources Composition 2016

Sumber Energi Primer Primary Energy Resources	Pembangkit Generator		
	PLN PLN	Sewa Lease	IPP IPP
Batubara (ton) Coal (Ton)	57.295.337,4	648.960,1	18.001.942,6
Gas (MBTU)	672.719,5	46.765,2	43.879,5
BBM (kL):			
HSD	1.167.939,4	1.959.927,9	1.613,1
MFO	354.498,7	541.234,4	46.631,2
IDO	902,7	1,9	-
HFO	-	-	-
Biomass (ton)	-	-	-

Sumber: RUPTL PLN Tahun 2017 s.d 2026
Source: RUPTL PLN 2017-2026

TINJAUAN INDUSTRI
Industrial Review

Penjualan Tenaga Listrik PLN

Penjualan tenaga listrik PLN selama lima tahun terakhir rata-rata tumbuh 8,1% per tahun. Sejak tahun 2012, PLN aktif dalam penyambungan pelanggan yaitu sekitar 3,5 juta pelanggan per tahun dengan tujuan menyelesaikan daftar tunggu pelanggan. Namun pada tahun 2015, penjualan menurun drastis yaitu hanya dapat menaikkan penjualan sebesar 2,1%. Berdasarkan realisasi penjualan bulan Agustus 2016, jumlah penjualan di tahun 2016 diestimasikan meningkat hingga 8,6%.

PLN Electricity Sales

PLN electricity sales during the last five years grew 8.1% per year in average. Since 2012, PLN has been active in customer connections, around 3.5 million customers per year, with the goal of completing the waiting list customers. However, in 2015, sales dropped drastically, i.e. the increase is only at 2.1%. Based on the sales realization on August 2016, the total sales in 2016 is estimated to increase by 8.6%.

Grafik Penjualan Tenaga Listrik PLN Tahun 2012-2016 (TWh)
Graph: PLN Electricity Sales 2012-2016 (TWh)

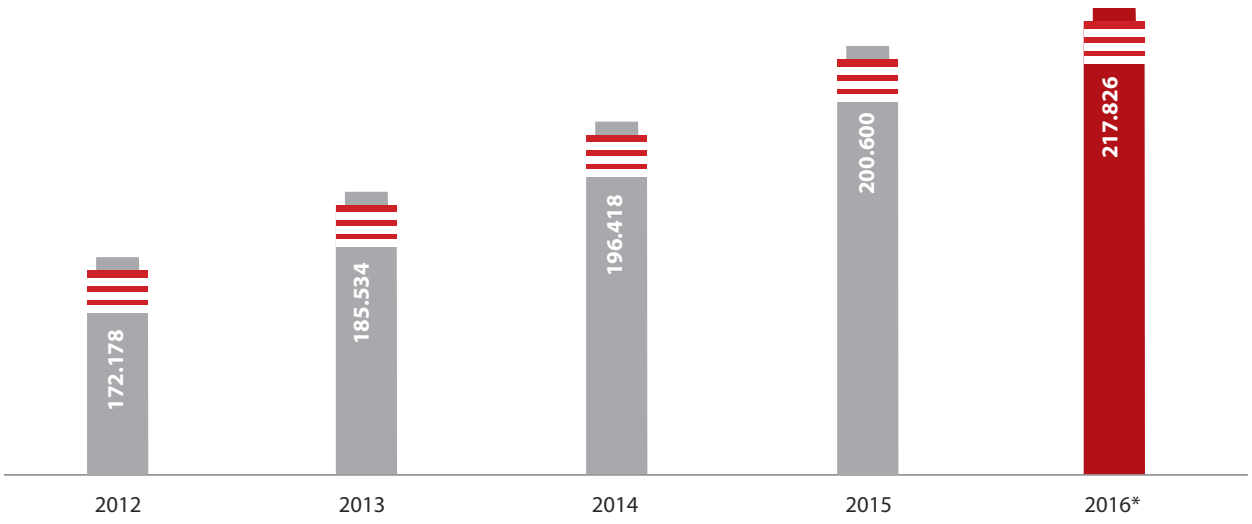

*** angka estimasi**

* estimated number

Sumber: RUPTL PLN Tahun 2017 s.d 2026

Source: RUPTL PLN 2017-2026

Jumlah Pelanggan PLN

Jumlah pelanggan PLN selama lima tahun terakhir mengalami peningkatan rata-rata 3,3 juta pelanggan tiap tahunnya. Penambahan pelanggan terbesar adalah pada sektor rumah tangga yaitu rata-rata 2,9 juta pelanggan per tahun yang diikuti oleh sektor bisnis dengan rata-rata penambahan sebanyak 174 ribu pelanggan per tahun.

PLN Customer

PLN customer during the last five years grew by 3.3 million customers per year in average. The largest customer addition was in the household sector, i.e. 2.9 million customers per year in average, followed by the business sector, with an average of additional 174 thousand customers per year.

Grafik Jumlah Pelanggan PLN Tahun 2012-2016 (Pelanggan)
Graph: PLN Customer 2012-2016 (Customer)

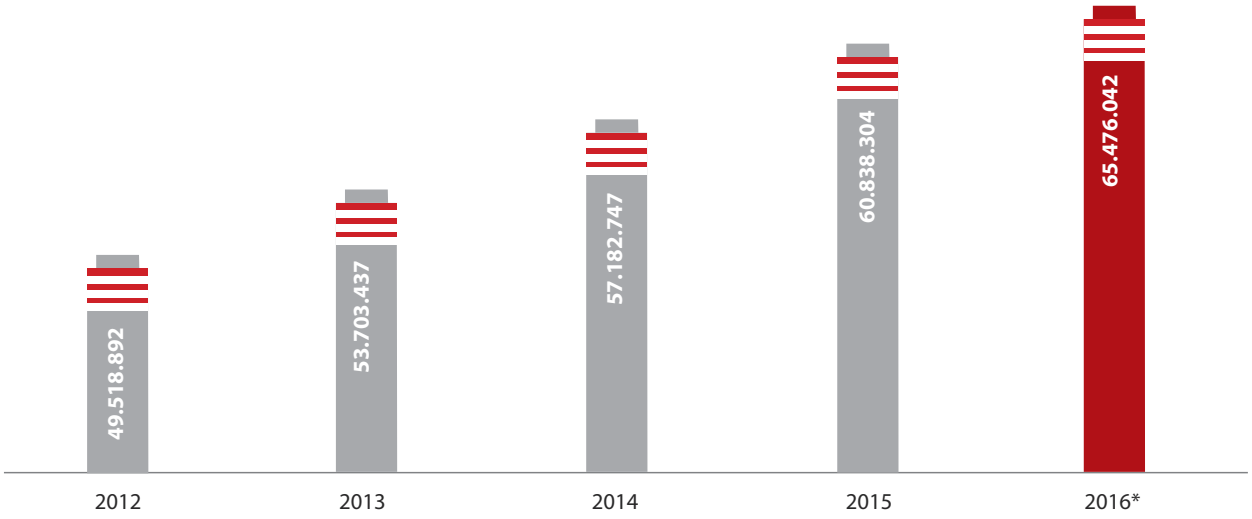

*** angka estimasi** * estimated number

Sumber: RUPTL PLN Tahun 2017 s.d 2026 Source: RUPTL PLN 2017-2026

Rasio Elektrifikasi

Rasio elektrifikasi merupakan perbandingan antara jumlah pelanggan rumah tangga yang sudah dialiri listrik dibandingkan dengan keseluruhan rumah tangga di Indonesia. Semakin tinggi rasio elektrifikasi, maka pelayanan listrik kepada masyarakat semakin merata dan luas.

Electrification Ratio

The ratio of electrification is the number between the household customer with electricity compared to the number of entire household in Indonesia. The higher the electrification ratio, the more widespread the distribution of electricity services to the public.

TINJAUAN INDUSTRI
Industrial Review

Grafik Rasio Elektrifikasi Tahun 2012-2016 (%)
Graph: Electrification Ratio 2012-2016 (%)

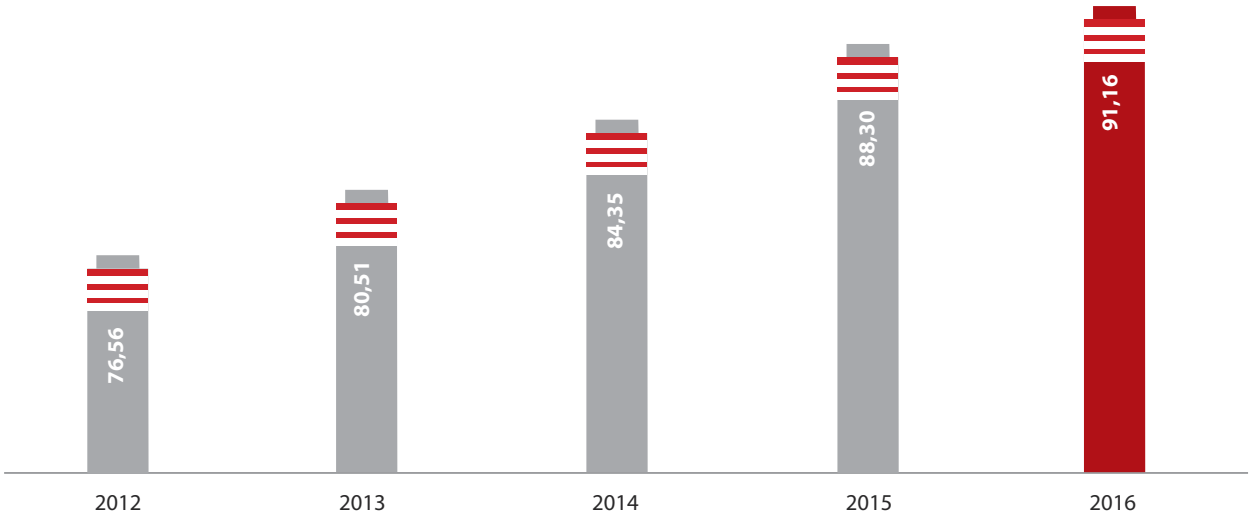

Sumber: Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian ESDM

Source: Performance Report of Directorate General of Electricity, Ministry of Energy and Mineral Resources

Kontribusi Indonesia Power terhadap Industri Listrik Nasional

Secara operasional, Indonesia Power berkontribusi dalam industri listrik nasional bidang penyediaan tenaga listrik dan jasa *operation and maintenance* (O&M). Indonesia Power ikut bersaing dalam meraih peluang yang sangat terbuka di kawasan Asia. Sebagai salah satu Perusahaan pengelola berbagai jenis pembangkit (PLTU, PLTGU, PLTG, PLTA, PLTD dan PLTP) di Indonesia menjadikan pengalaman tersebut sebagai modal dasar dalam meraih peluang. Keunggulan tersebut perlu dikelola dan diciptakan suatu strategi yang sesuai dalam menghadapi tantangan dan persaingan yang makin ketat dengan meninjau internal dan eksternal Perusahaan.

Indonesia Power juga ikut berpartisipasi dalam pengembangan pembangkit 35.000 MW yang dicanangkan oleh pemerintah. Peran tersebut dilakukan melalui dua cara, yaitu:

Contribution of Indonesia Power to the National Electricity Industry

Operationally, Indonesia Power contributes to the national electricity industry in the field of electricity provision and operation and maintenance (O&M) services. Indonesia Power competes in achieving the open opportunities in Asia. As one of the Company that manages various generator (Steam Power Plant/SPP, Combined-Cycle Power Plant /CCPP, Gas Turbine Power Plant/ GTPP, Hydro Power Plant/ HPP, Diesel Power Plant/ DPP, Geothermal Power Plant/ GPP) in Indonesia, the experiences are a basic capital in seizing opportunities. These advantages need to be managed and an appropriate strategy needs to be created in order to face the increasingly stringent challenges and competition, under the internal and external review of the Company.

Indonesia Power also participates in the 35,000 MW generator development planned by the Government. The role is contributed through two ways, i.e.:

1. Pemanfaatan area pembangkit existing untuk pembangunan pembangkit baru yang akan dimiliki oleh perusahaan,
2. Mengikuti *tender Independent Power Producer* (IPP) yang diselenggarakan oleh PLN, bekerjasama dengan *investor/developer* nasional maupun internasional.

1. Utilization of existing generator area to build new generator owned by the company,
2. Taking part in the tender of Independent Power Producer (IPP) held by PLN, cooperating with national and international investor/developer.

Dari pasokan (*supply*) energi listrik di Jawa Bali tahun 2016 (menurut data operasional Jawa Bali) sebesar 175.094 GWh, Indonesia Power memberikan kontribusi sebesar 23,65% atau 41.405 GWh. Kontribusi tersebut meningkat jika dibandingkan tahun 2015 yang hanya sebesar 22,97% atau 38.129 GWh.

From the electricity supply of Java Bali in 2016 (according to operational data of Java Bali) amounted to 175,094 GWh, Indonesia Power contributed to 23.65% of them or 41,405 GWh. The contribution increased compared to 2015, which was 22.97% or 38,129 GWh.

Selain itu, Indonesia Power juga melakukan pengembangan sejumlah pembangkit baru yaitu diantaranya adalah:

In addition, Indonesia Power also develops numerous new power plant, such as:

Tabel Pengembangan Pembangkit Energi Terbarukan
Table: Renewable Energy Power Plant Development

No	Proyek Pembangkit Generator Project	Status Penyelesaian Status	Target Tahun Penyelesaian Finishing Year Target
1	PLTM Jateng I Central Java I MPP PLTM Gunung Wugul Gunung Wugul MPP	Perizinan dan pembebasan lahan Licensing and land acquisition	2019
2	PLTM Jateng II Central Java II MPP PLTM Harjosari Harjosari MPP	Perizinan dan pembebasan lahan, konstruksi Licensing and land acquisition, construction	2018
3	PLTM Lambur Lambur MPP	Perizinan dan pembebasan lahan, konstruksi Licensing and land acquisition, construction	2017
4	Proyek CNG Plant Perak CNG Plant Perak Project	Proses inisiasi dengan mencari sumber dan transportasi Gas Initiation process by finding gas source and transportation	2019
5	PLTMH Brasa 2 x 1150 KW Brasa 2 x 1150 KW MPP	*Feasibility Study, Engineering* dan *Survey* Feasibility Study, Engineering, and Survey	2017
6	PLTA Poigar 30 MW Poigar 30 MW HPP	Persiapan Proses Pengadaan IPP oleh PLN, Penyiapan Lahan dan Perpanjangan Perizinan Preparation of IPP Procurement Process by PLN, Land Preparation, and Licensing Renewal	2021
7	PLTA Simonggo-2 90 MW Simonggo-2 90 MW HPP	Proses Perizinan & AMDAL Permit process & AMDAL	2023
8	PLTA Maung 360 MW Maung 360 MW HPP	*Review* Studi selesai Finished reviewing	2024

TINJAUAN KINERJA OPERASI PER SEGMEN
Operational Performance Review Per Segment

Indonesia Power merupakan badan usaha yang fokus sebagai penyedia listrik bagi PT PLN (Persero), yang merupakan Entitas Induk, untuk disalurkan kepada pelanggan. Segmen usaha Perusahaan, secara umum dibagi menjadi dua, yaitu penyediaan tenaga listrik dan jasa *operation and maintenance* (O&M). Dua segmen usaha inilah yang menjadi lini bisnis Perusahaan.

Indonesia Power is a company that focuses as provider of electricity for PT PLN (Persero), which is the Parent Company, to be distributed to customers. The business segment of the Company in general is divided into two, i.e. electricity provision and operation and maintenance (O&M) services. These two business segments are the Company's line of business.

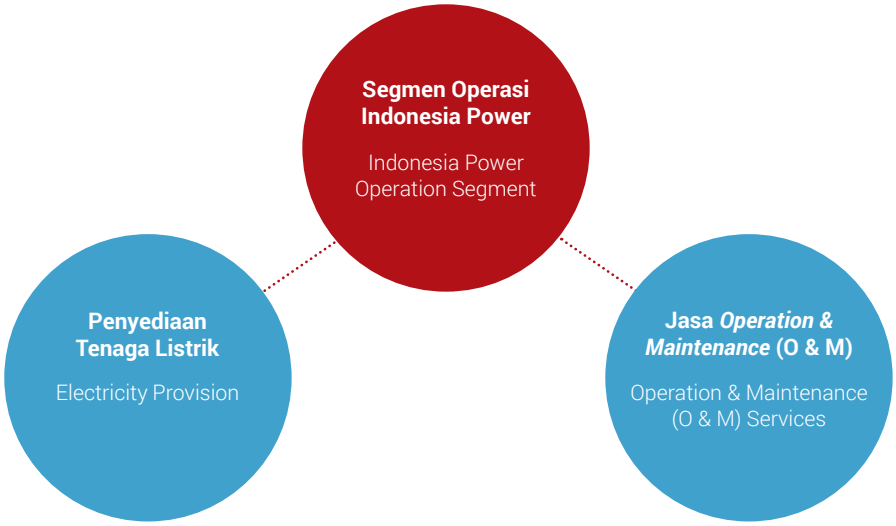

Daya Terpasang Pembangkit (DTP)

Daya Terpasang Pembangkit (DTP) merupakan kapasitas atau daya yang tertera pada *nameplate* di setiap jenis pembangkit. Pada tahun 2016, DTP yang berasal dari pembangkit milik Perusahaan pada sistem Jawa Bali memiliki kapasitas sebesar 8.877,68 MW menurun 1,68% dibandingkan tahun 2015 sebesar 9.029,72 MW. Penurunan tersebut terutama dipengaruhi oleh penurunan DTP di UPJP Priok karena PLTU Priok 3 dan 4 serta PLTG Priok 1 dan 3 dikeluarkan dari sistem di tahun 2016.

Generator Installed Capacity (DTP)

Generator Installed Capacity (DTP) is the capacity or power listed on nameplate to each type of the plant. In 2016, DTP from the Company's power plan in Java Bali system has the capacity of 8,877.68 MW, a decrease by 1.68% compared to 2015, which was 9,029.72 MW. The decrease is influenced by the DTP decrease in Priok GGSU because Priok 3 and 4 SPP, and Priok 1 and 3 GTPP, were removed from the system in 2016.

TINJAUAN KINERJA OPERASI PER SEGMEN
Operational Performance Review Per Segment

Tabel Daya Terpasang Pembangkit Milik Perusahaan (MW)
Table: Company's Generator Installed Capacity (MW)

Unit Pembangkit Generating Unit	2012	2013	2014	2015	Meningkat/ Menurun (%) Increase/ Decrease (%)	2016
UP | GU Suralaya	3.400	3.400	3.400	3.400,00	-	3.400,00
UPJP | GGSU Priok	1.348	1.348	1.348	1.348,08	(11,28)	1.196,08
UP | GU Saguling	797	797	797	797,36	-	797,36
UPJP | GGSU Kamojang	375	375	375	345	-	345
UP | GU Mrica	310	310	310	309,74	-	309,74
UP | GU Semarang	1.409	1.409	1.409	1.408,93	-	1.408,93
UP | GU Perak Grati	864	864	864	864,08	-	864,08
UP | GU Bali	433	433	398	556,49	-	556,49
Jumlah Total	**8.936**	**8.936**	**8.901**	**9.029,72**	**(1,68)**	**8.877,68**

Sedangkan, DTP yang pengelolaan jasa O&M-nya dilakukan oleh Perusahaan pada tahun 2016 sebesar 5.948 MW meningkat 14,20% dibandingkan tahun 2015 sebesar 5.208,6 MW. Peningkatan tersebut terutama dipengaruhi oleh penambahan jasa O&M PLTGU Cilegon ke PT Indonesia Power per 1 Januari 2016.

Meanwhile, DTP that carries out O&M services maintained by the Company in 2016 is 5,948 MW, an increase of 14.20% compared to 2015 which was 5,208.6 MW. The increase is influenced by the additional O&M services from CCPP Cilegon to PT Indonesia Power as of 1 January 2016.

Tabel Daya Terpasang Pembangkit Jasa O&M (MW)
Table: Company's O&M Services Generator Installed Capacity (MW)

Unit Pembangkit Generating Unit	2012	2013	2014	2015	Meningkat/ Menurun (%) Increase/ Decrease (%)	2016
UJP PLTU | GSU SPP Banten 1 Suralaya	625	625	625	625	-	625
UJP PLTU | GSU SPP Banten 2 Labuan	600	600	600	600	-	600
UJP PLTU | GSU SPP Banten 3 Lontar	945	945	945	945	-	945
UJP PLTU | GSU SPP Jawa Barat 2 Palabuhan Ratu	1.050	1.050	1.050	1.050	-	1.050
UJP PLTU | GSU SPP Jawa Tengah 2 Adipala	-	660	660	660	-	660
UJP PLTU | GSU SPP Pangkalan Susu	-	-	440	440	-	440
PLTGU | CCPP Priok Blok 3	-	-	740	740	-	740
UJP PLTU | GSU SPP Barru	-	-	100	100	-	100
UJP PLTU | GSU SPP Jeranjang	-	-	25	25	-	25
UJP PLTU | GSU SPP Sanggau	-	-	14	14	-	14
PLTP | GPP Ulumbu	-	-	9,60	9,60	-	9,60
UJP PLTGU | GSU CCPP Cilegon	-	-	-	-	100	739,40
Jumlah Total	**3.220**	**3.880**	**5.208,6**	**5.208,6**	**14,20**	**5.948**

Dan untuk DTP pembelian listrik di Area Bali pada tahun 2016 adalah sebesar 73,00 MW menurun 66,95% dibandingkan tahun 2015 sebesar 220,90 MW. Penurunan tersebut terutama dipengaruhi oleh terminasi kontrak PLTD A Bali, PLTD C Bali, dan PLTD D Bali.

Electricity purchase DTP in Bali in 2016 is 73.00 MW, a decrease of 66.95% compared to 2015 which was 220.90 MW. The decrease is influenced by the contract termination of Bali A DPP, Bali C DPP, and Bali D DPP.

Tabel Daya Terpasang Pembelian Listrik (MW)
Table: Company's Electricity Purchase Installed Capacity (MW)

Unit Pembangkit Generating Unit	2012	2013	2014	2015	Meningkat/ Menurun (%) Increase/ Decrease (%)	2016
PLTD | DPP Pesanggaran	91,50	205,10	261,69	210,10	(69,92)	65,00
PLTD | DPP Pemaron	132,80	132,80	132,80	-	-	-
PLTD | DPP Nusa Penida	-	-	4,80	4,80	1,67	8,00
Jumlah Total	**224,30**	**337,90**	**399,29**	**220,90**	**(66,95)**	**73,00**

Pembangkit milik Indonesia Power di sebagian wilayah Sumatera meliputi:

Indonesia Power's Generator in Sumatera area covers:

Tabel Daya Terpasang Pembangkit Milik Perusahaan di Area Sumatera (MW)
Table: Company's Generator Installed Capacity in Sumatera Area (MW)

Unit Pembangkit Generating Unit	2012	2013	2014	2015	Meningkat/ Menurun (%) Increase/ Decrease (%)	2016
PLTG | GTPP Keramasan	18	18	18	18	-	18
PLTG | GTPP Jambi	18	18	18	18	-	18
PLTG | GTPP Indralaya 1	45	45	45	45	-	45
Jumlah Total	**81**	**81**	**81**	**81**	**-**	**81**

TINJAUAN KINERJA OPERASI PER SEGMEN
Operational Performance Review Per Segment

Penyediaan Tenaga Listrik

Dalam melakukan operasinya untuk menyediakan tenaga listrik, banyak faktor yang menjadi indikator keberhasilan yaitu tingkat keandalan pembangkit. Hal tersebut dapat mempengaruhi jumlah produksi dan penjualan tenaga listrik, sehingga diperlukan monitoring secara berkesinambungan.

Kinerja Operasi Pembangkitan

Faktor ketersediaan (diukur dengan EAF dan SOF), gangguan (diukur dengan EFOR dan SdOF), pemakaian bahan bakar (diukur dengan Efisiensi Thermal dan Tara Kalor), produksi, penjualan dan pemakaian sendiri pembangkit.

Faktor Ketersediaan

Faktor ketersediaan mesin pembangkit diukur berdasarkan indikator Equivalent Availability Factor (EAF) dan Scheduled Outage Factor (SOF).

Equivalent Availability Factor (EAF)

EAF menunjukkan tingkat kesiapan suatu pembangkit untuk beroperasi menghasilkan tenaga listrik. Nilai EAF korporat berfungsi untuk mengetahui faktor ketersediaan pembangkit secara korporat untuk beroperasi dengan Daya Mampu Netto (DMN) pada periode tertentu. Semakin tinggi nilai EAF menunjukkan kinerja pembangkit yang semakin baik.

Pada tahun 2016, EAF sebesar 90,81% menurun 0,04% dibandingkan tahun 2015 sebesar 90,85%. Penurunan tersebut terutama dipengaruhi oleh adanya gangguan *boiler* bocor di PLTU Suralaya Unit 6, gangguan masalah *exhaust* di PLTGU Tambak Lorok 2.1 dan mundurnya jadwal pemeliharaan pada PLTA Saguling Unit 3 dan 4 karena kebutuhan sistem.

Electricity Provision

In carrying out its operation to provide electricity, there are numerous factors as success indicator or reliability level of the Company's power generator. These factors influence the production and sales of electricity, hence continuous monitoring is needed.

Power Plant Operation Performance

The availability factor of the power plan is measured based on Equivalent Availability (measured by EAF and SOF), disruption (measuredby EFOR ans SdOF), fuel consumption (measured by Thermal Efficiency and Heat Rate), production, sales, and self-consumption of the power plant.

Availability Factor

The availability factor of the power plan is measured based on Equivalent Availability Factor (EAF) and Scheduled Outage Factor (SOF) indicators.

Equivalent Availability Factor (EAF)

EAF shows the readiness level of a power plant to operate and produce electricity. Corporate EAF functions to determine the availability of the power plant corporately to operate with Net Power Capacity (DMN) in certain periods. The higher the EAF, the better the performance of the power plant.

EAF in 2016 amounted to 90.81%, a decline of 0.04% compared to 2015, which was 90.85%. The decrease is influenced by the leaked boiler disruption in Suralaya Unit 6 SPP, exhaust disruption problem in Tambak Lorok 2.1 CCPP, and the delay in maintenance schedule at Saguling Unit 3 and 4 HPP due to system requirements.

Tabel EAF Berdasarkan Unit Pembangkit Tahun 2012-2016 (%)

Table: EAF Based on Generating Unit 2012-2016 (%)

Unit Pembangkit Generating Unit	2012	2013	2014	2015	Meningkat/ Menurun (%) Increase/ Decrease (%)	2016
UP | GU Suralaya	89,59	92,14	84,05	91,41	(1,85)	89,72
UPJP | GGSU Priok	91,62	91,53	87,48	90,81	0,19	90,98
UP | GU Saguling	99,79	93,38	97,30	92,26	(1,30)	91,06
UPJP | GGSU Kamojang	95,66	95,94	91,97	96,61	(2,60)	94,10
UP | GU Mrica	94,20	94,58	96,77	98,09	(0,49)	97,61
UP | GU Semarang	94,65	98,64	97,90	84,09	3,57	87,09
UP | GU Perak Grati	94,16	93,79	95,78	93,44	1,18	94,54
UP | GU Bali	88,14	91,04	91,78	90,51	2,49	92,76
Jumlah Total	**92,33**	**93,04**	**89,88**	**90,85**	**(0,04)**	**90,81**

Tabel EAF Menurut Jenis Pembangkit Tahun 2012-2016 (%)

Table: EAF Based on the Type of Power Plant 2012-2016 (%)

Jenis Pembangkit Type of Power Plant	2012	2013	2014	2015	Meningkat/ Menurun (%) Increase/ Decrease (%)	2016
PLTA HPP	98,36	94,85	97,47	93,89	(1,05)	92,90
PLTU Batubara Coal based SPP	89,59	92,14	84,05	91,41	(1,85)	89,72
PLTU Bahan Bakar Minyak Oil Fuel SPP	100,00	100,00	100,00	100,00	(100,00)	-
PLTGU Gas Gas Based CCPP	91,54	92,37	87,37	90,05	0,78	90,75
PLTGU Bahan Bakar Minyak Oil Fuel Based CCPP	91,79	93,74	95,18	84,92	(0,53)	84,47
PLTP GPP	95,66	95,94	91,97	96,61	(2,60)	94,10
PLTG Bahan Bakar Minyak Oil Fuel Based GTPP	94,31	93,48	95,58	96,12	(0,01)	96,11
PLTG Gas Gas Based GTPP	-	86,17	100,00	100,00	-	100,00
PLTD Bahan Bakar Minyak Oil Fuel Based DPP	100,00	100,00	100,00	100,00	-	100,00
PLTD Gas Gas Based DPP	-	-	-	-	-	92,50
Jumlah Total	**92,33**	**93,04**	**89,88**	**90,85**	**(0,04)**	**90,81**

TINJAUAN KINERJA OPERASI PER SEGMEN
Operational Performance Review Per Segment

Grafik EAF Tahun 2012-2016 (%)
Graph: EAF 2012-2016 (%)

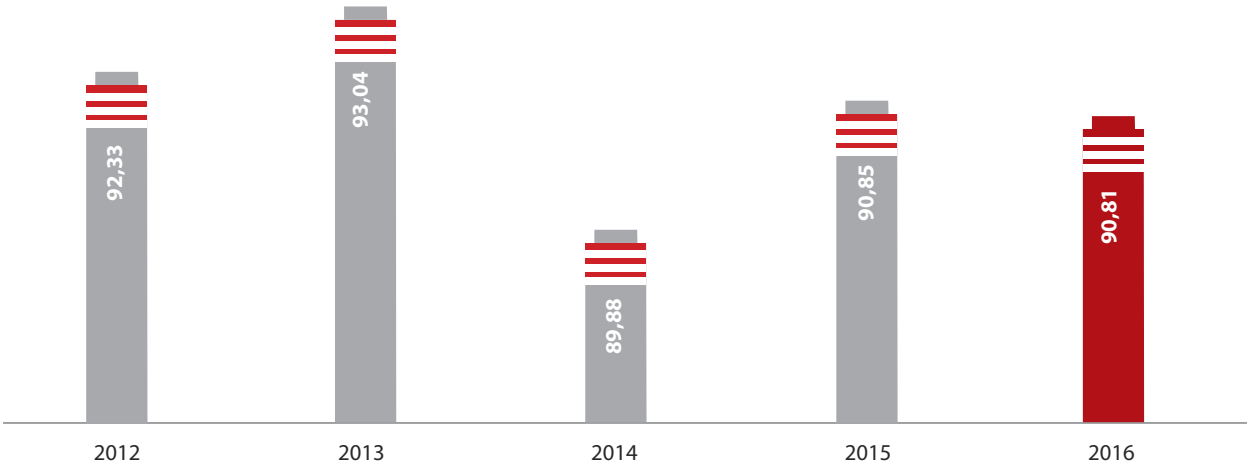

Scheduled Outage Factor (SOF)

SOF digunakan untuk mengukur tingkat pembangkit keluar sistem karena pemeliharaan terencana, yaitu *Planned Outage Hour* dan *Maintenance Outage Hour*. Semakin rendah nilai SOF menunjukkan kinerja pembangkit semakin baik.

Pada tahun 2016, SOF sebesar 6,09% meningkat 1,84% dibandingkan tahun 2015 sebesar 5,98%. Peningkatan tersebut terutama dipengaruhi oleh jumlah realisasi pemeliharaan di tahun 2016 yang lebih banyak dibandingkan tahun 2015 dari 77 pemeliharaan ke 99 pemeliharaan.

Scheduled Outage Factor (SOF)

SOF demonstrates the level of system outage because of planned maintenance, i.e. Planned Outage Hour and Maintenance Outage Hour. The lower the SOF, the better the performance of the power plant.

SOF in 2016 amounted to 6.09%, an increase of 1.84% compared to 2015, which was 5.98%. The increase is influenced by the number of maintenance realization in 2016, which is more than 2015, from 77 maintenances to 99 maintenances.

Tabel SOF Berdasarkan Unit Pembangkit Tahun 2012-2016 (%)
Table: SOF Based on Generating Unit 2012-2016 (%)

Unit Pembangkit Generating Unit	2012	2013	2014	2015	Meningkat/ Menurun (%) Increase/ Decrease (%)	2016
UP | GU Suralaya	5,14	5,45	4,93	5,26	37,26	7,22
UPJP | GGSU Priok	5,09	5,20	8,03	5,74	(18,64)	4,67
UP | GU Saguling	0,17	6,59	2,64	7,50	17,20	8,79
UPJP | GGSU Kamojang	4,02	3,43	1,69	2,76	77,54	4,90
UP | GU Mrica	3,89	4,75	2,04	1,88	(18,62)	1,53
UP | GU Semarang	5,24	1,31	2,08	8,32	(32,93)	5,58
UP | GU Perak Grati	3,98	5,35	2,38	5,29	(24,95)	3,97
UP | GU Bali	11,52	7,82	7,20	9,40	(41,60)	5,49
Jumlah Total	**4,55**	**5,27**	**4,34**	**5,98**	**1,84**	**6,09**

TINJAUAN KINERJA OPERASI PER SEGMEN
Operational Performance Review Per Segment

Tabel SOF Berdasarkan Jenis Pembangkit Tahun 2012-2016 (%)
Table: SOF Based on the Type of Power Plant 2012-2016 (%)

Jenis Pembangkit Type of Power Plant	2012	2013	2014	2015	Meningkat/ Menurun (%) Increase/ Decrease (%)	2016
PLTA HPP	1,59	5,19	2,49	5,93	12,48	6,67
PLTU Batubara Coal based SPP	5,14	5,45	4,93	5,26	37,26	7,22
PLTU Bahan Bakar Minyak Oil Fuel SPP	-	-	-	-	-	-
PLTGU Gas Gas Based CCPP	5,14	5,25	8,10	8,26	(30,51)	5,74
PLTGU Bahan Bakar Minyak Oil Fuel Based CCPP	5,57	5,88	2,84	7,35	(100,00)	-
PLTP GPP	4,02	3,43	1,69	2,76	77,54	4,90
PLTG Bahan Bakar Minyak Oil Fuel Based GTPP	5,46	5,71	3,88	2,49	(100,00)	-
PLTG Gas Gas Based GTPP	-	12,42	-	-	-	3,74
PLTD Bahan Bakar Minyak Oil Fuel Based DPP	-		-	-	-	-
PLTD Gas Gas Based DPP	-	-	-	-	-	3,23
Jumlah Total	**4,55**	**5,27**	**4,34**	**5,98**	**1,84**	**6,09**

Grafik SOF Tahun 2012-2016 (%)
Graph: SOF 2012-2016 (%)

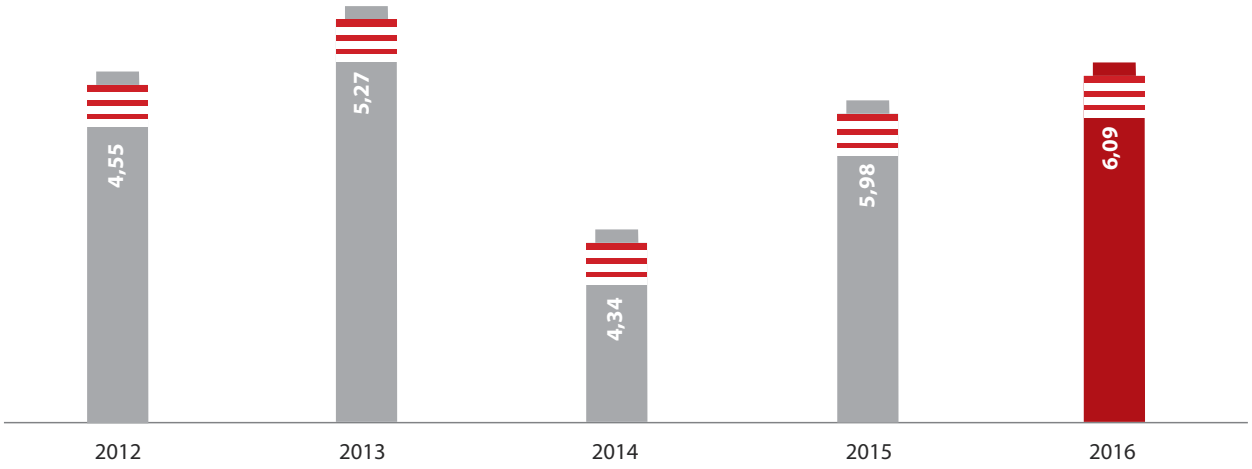

Faktor Gangguan

Untuk mengetahui gangguan mesin pembangkit diukur berdasarkan indikator *Equivalent Forced Outage Rate* (EFOR), dan *Sudden Outage Frequency* (SdOF).

Equivalent Forced Outage Rate (EFOR)

EFOR untuk mengukur jam keluar paksa unit pembangkit atau ketidaksiapan unit untuk beroperasi karena gangguan. Semakin rendah nilai EFOR menunjukkan penanganan gangguan semakin cepat.

Pada tahun 2016, EFOR sebesar 2,94% menurun 6,96% dibandingkan tahun 2015 sebesar 3,16%. Hal tersebut menunjukkan penanganan gangguan semakin cepat.

Disruption Factor

Disruption of the power plant machine is measured based on Equivalent Forced Outage Rate (EFOR) and Sudden Outage Frequency (SdOF) indicators.

Equivalent Forced Outage Rate (EFOR)

EFOR measures the forced outbreak of the engine or the unpreparedness of the unit to operate due to disruption. With lower the EFOR rate, it demonstrates that problems are being handled quickly.

EFOR in 2016 amounted to 2.94%, a decline of 6.96% compared to 2015, which was 3.16%. This shows that problems are being handled faster.

TINJAUAN KINERJA OPERASI PER SEGMEN
Operational Performance Review Per Segment

Tabel EFOR Berdasarkan Unit Pembangkit Tahun 2012-2016 (%)
Table: EFOR Based on Generating Unit 2012-2016 (%)

Unit Pembangkit Generating Unit	2012	2013	2014	2015	Meningkat/ Menurun (%) Increase/ Decrease (%)	2016
UP | GU Suralaya	3,36	2,14	10,86	3,01	(12,29)	2,64
UPJP | GGSU Priok	2,45	2,41	4,52	3,97	(4,03)	3,81
UP | GU Saguling	0,07	0,05	0,1	0,45	(55,56)	0,20
UPJP | GGSU Kamojang	0,33	0,65	6,44	0,62	62,90	1,01
UP | GU Mrica	1,71	1,94	1,77	0,09	1.533,33	1,47
UP | GU Semarang	0,24	0,11	0,05	6,32	5,22	6,65
UP | GU Perak Grati	0,67	0,25	1,33	0,36	(33,33)	0,24
UP | GU Bali	0,49	1,71	2,62	13,22	(48,79)	6,77
Jumlah Total	**2,37**	**1,66**	**7,16**	**3,16**	**(6,96)**	**2,94**

Tabel EFOR Berdasarkan Jenis Pembangkit Tahun 2012-2016 (%)
Table: EFOR Based on Type of Power Plant 2012-2016 (%)

Jenis Pembangkit Type of Power Plant	2012	2013	2014	2015	Meningkat/ Menurun (%) Increase/ Decrease (%)	2016
PLTA HPP	0,12	0,06	0,09	0,35	45,71	0,51
PLTU Batubara Coal based SPP	3,35	2,14	10,86	3,01	(12,29)	2,64
PLTU Bahan Bakar Minyak Oil Fuel SPP	-	-	-	-	-	-
PLTGU Gas Gas Based CCPP	2,75	1,89	4,52	0,24	1.883,33	4,76
PLTGU Bahan Bakar Minyak Oil Fuel Based CCPP	1,13	5,37	2,04	8,28	(100,00)	-
PLTP GPP	0,79	0,65	6,44	0,62	62,90	1,01

Jenis Pembangkit Type of Power Plant	2012	2013	2014	2015	Meningkat/ Menurun (%) Increase/ Decrease (%)	2016
PLTG Bahan Bakar Minyak Oil Fuel Based GTPP	0,67	1,47	1,98	10,21	(100,00)	-
PLTG Gas Gas Based GTPP	-	3,15	-	-	-	2,08
PLTD Bahan Bakar Minyak Oil Fuel Based DPP	-	-	-	-	-	-
PLTD Gas Gas Based DPP	-	-	-	-	-	6,51
Jumlah Total	**2,37**	**1,66**	**7,16**	**3,16**	**(6,96)**	**2,94**

Grafik EFOR Tahun 2012-2016 (%)
Graph: EFOR 2012-2016 (%)

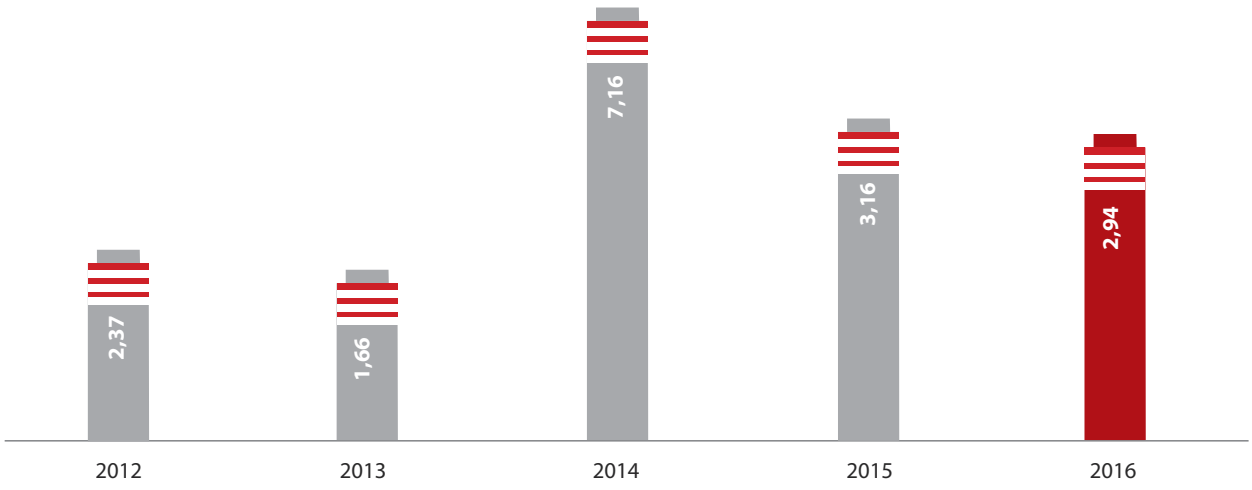

TINJAUAN KINERJA OPERASI PER SEGMEN
Operational Performance Review Per Segment

Sudden Outage Frequency (SdOF)

SdOF menunjukkan jumlah gangguan yang terjadi dalam periode tertentu, terutama frekuensi terjadinya gangguan yang berulang. Semakin rendah nilai SdOF menunjukkan kinerja pembangkit semakin baik.

Pada tahun 2016, SdOF sebesar 2,78 kali meningkat 39,00% dibandingkan tahun 2015 sebesar 2,00 kali. Peningkatan tersebut terutama dipengaruhi oleh gangguan yang terjadi di UP Semarang akibat dari gangguan HRSG dan *exhaust*, di UP Suralaya akibat gangguan *boiler*, di UPJP Kamojang akibat gangguan kondensor dan *electrical*, serta di UP Bali akibat gangguan *engine auxiliary* dan PMT.

Sudden Outage Frequency (SdOF)

SdOF shows the number of disruption that happens during certain period, especially the frequency of repeated disruption. The lower the SdOF, the better the performance of the power plant.

SdOF in 2016 is 2.78 times, an increase of 39.00% compared to 2015, which was 2.00 times. The increase is mainly due to the disruption in Semarang GU because of the HRSG and exhaust disruption, disruption in Suralaya GU due to boiler disturbance, disruption in Kamojang GGSU due to condenser and electrical disturbance, and in Bali GU due to engine auxiliary and PMT disruption.

Tabel SdOF Berdasarkan Unit Pembangkit Tahun 2012-2016 (kali)
Table: SdOF Based on Generating Unit 2012-2016 (times)

Unit Pembangkit Generating Unit	2012	2013	2014	2015	Meningkat/ Menurun (%) Increase/ Decrease (%)	2016
UP | GU Suralaya	3,86	3,00	2,86	2,14	33,64	2,86
UPJP | GGSU Priok	2,21	4,14	3,14	1,36	25,74	1,71
UP | GU Saguling	0,24	0,45	0,41	0,45	-	0,45
UPJP | GGSU Kamojang	2,43	3,57	2,14	2,00	75,00	3,50
UP | GU Mrica	3,22	4,00	5,50	0,29	58,62	0,46
UP | GU Semarang	0,46	0,32	0,46	13,80	15,22	15,90
UP | GU Perak Grati	3,00	1,57	2,57	2,57	(44,36)	1,43
UP | GU Bali	6,17	4,14	3,14	0,89	337,08	3,89
Jumlah Total	**1,70**	**1,89**	**1,83**	**2,00**	**39,00**	**2,78**

Tabel SdOF Berdasarkan Jenis Pembangkit Tahun 2012-2016 (kali)
Table: SdOF Based on Type of Power Plant 2012-2016 (times)

Jenis Pembangkit Type of Power Plant	2012	2013	2014	2015	Meningkat/ Menurun (%) Increase/ Decrease (%)	2016
PLTA HPP	0,35	0,46	0,44	0,37	24,32	0,46
PLTU Batubara Coal based SPP	3,86	3,00	2,86	2,14	33,64	2,86
PLTU Bahan Bakar Minyak Oil Fuel SPP	-	-	-	-	-	-
PLTGU Gas Gas Based CCPP	3,88	7,25	5,50	2,75	200,36	8,26
PLTGU Bahan Bakar Minyak Oil Fuel Based CCPP	3,82	3,50	5,58	18,50	(100,00)	-
PLTP GPP	2,57	3,57	2,14	2,00	75,00	3,50
PLTG Bahan Bakar Minyak Oil Fuel Based GTPP	2,37	3,38	2,55	2,20	(100,00)	-
PLTG Gas Gas Based GTPP	-	6,00	-	-	-	1,70
PLTD Bahan Bakar Minyak Oil Fuel Based DPP	-	-	-	-	-	-
PLTD Gas Gas Based DPP	-	-	-	-	-	5,00
Jumlah Total	**1,70**	**1,89**	**1,83**	**2,00**	**39,00**	**2,78**

TINJAUAN KINERJA OPERASI PER SEGMEN
Operational Performance Review Per Segment

Grafik SdOF Tahun 2012-2016 (kali)
Graph: SdOF 2012-2016 (times)

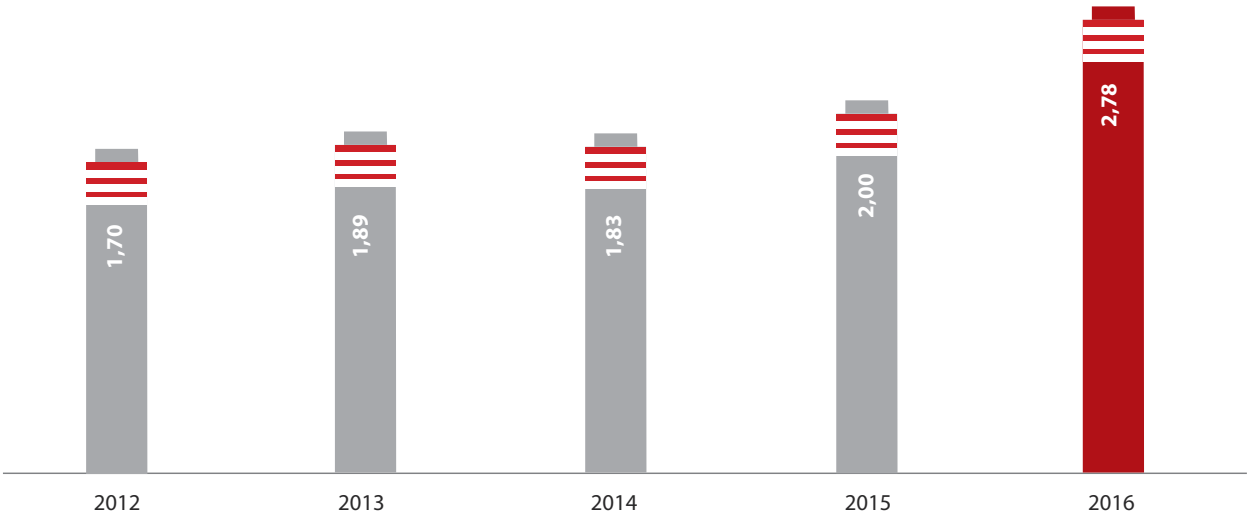

Pemakaian Energi Primer

Dalam mengoperasikan pembangkit, penggunaan bahan bakar yang efektif dan efisien akan mendorong kinerja pembangkitan yang semakin baik.

Primary Energy Utilization

In operating power plants, the effective and efficient fuel utilization will drive a better performance of the power plant.

Efisiensi Thermal

Efisiensi Thermal menunjukkan tingkat energi listrik yang dihasilkan dalam pemakaian bahan bakar pada periode tertentu. Semakin tinggi nilai Efisiensi Thermal menunjukkan bahwa pembangkit tersebut semakin efisien.

Pada tahun 2016, Efisiensi Thermal sebesar 33,90% meningkat 0,41% dibandingkan tahun 2015 sebesar 33,76%. Peningkatan tersebut terutama dipengaruhi oleh peningkatan pasokan gas di Bali dan optimalisasi pola operasi Grati.

Thermal Efficiency

Thermal efficiency shows the electricity level produced during the utilization of fuel in certain period. The higher the Thermal Efficiency rate, the more efficient the power plant.

Thermal Efficiency in 2016 is 33.90%, an increase of 0.41% compared to 2015, which was 33.76%. The increase is influenced by the gas supply increase in Bali and Grati operating pattern optimization.

Tabel Efisiensi Thermal Berdasarkan Unit Pembangkit Tahun 2012-2016 (%)

Table: Thermal Effiency Based on Generating Unit 2012-2016 (%)

Unit Pembangkit Generating Unit	2012	2013	2014	2015	Meningkat/ Menurun (%) Increase/ Decrease (%)	2016
UP | GU Suralaya	33,30	33,56	33,61	33,05	(0,64)	32,84
UPJP | GGSU Priok	37,5	38,23	38,28	38,82	(3,32)	37,53
UP | GU Semarang	24,8	21,69	26,27	35,68	(2,13)	34,92
UP | GU Perak Grati	38,51	36,43	34,70	34,03	5,38	35,86
UP | GU Bali	22,48	25,29	24,30	29,88	24,83	37,30
Jumlah Total	**33,93**	**33,81**	**33,97**	**33,76**	**0,41**	**33,90**

Tabel Efisiensi Thermal Berdasarkan Jenis Pembangkit Tahun 2012-2016 (%)

Table: Thermal Efficiency Based on Type of Power Plant 2012-2016 (%)

Jenis Pembangkit Type of Power Plant	2012	2013	2014	2015	Meningkat/ Menurun (%) Increase/ Decrease (%)	2016
PLTU Batubara Coal based SPP	33,30	33,56	33,61	33,05	(0,64)	32,84
PLTU Bahan Bakar Minyak Oil Fuel based SPP	30,05	-	-	-	-	-
PLTGU Gas Gas Based CCPP	38,38	38,37	37,27	36,93	(1,54)	36,36
PLTGU Bahan Bakar Minyak Oil Fuel Based CCPP	35,80	34,93	31,53	32,35	31,65	42,59
PLTG Bahan Bakar Minyak Oil Fuel Based GTPP	25,40	25,28	24,20	24,28	(18,20)	19,86
PLTG Gas Gas based GTPP	23,49	22,40	20,16	21,97	(3,00)	21,31
PLTD Bahan Bakar Minyak Oil Fuel Based DPP	19,01	20,52	28,90	39,20	(2,50)	36,00
PLTD Gas Gas Based DPP	-	-	-	-	-	38,51
Jumlah Total	**33,93**	**33,81**	**33,97**	**33,76**	**0,41**	**33,90**

TINJAUAN KINERJA OPERASI PER SEGMEN
Operational Performance Review Per Segment

Grafik Efisiensi Thermal Tahun 2012-2016 (%)
Graph: Thermal Efficiency 2012-2016 (%)

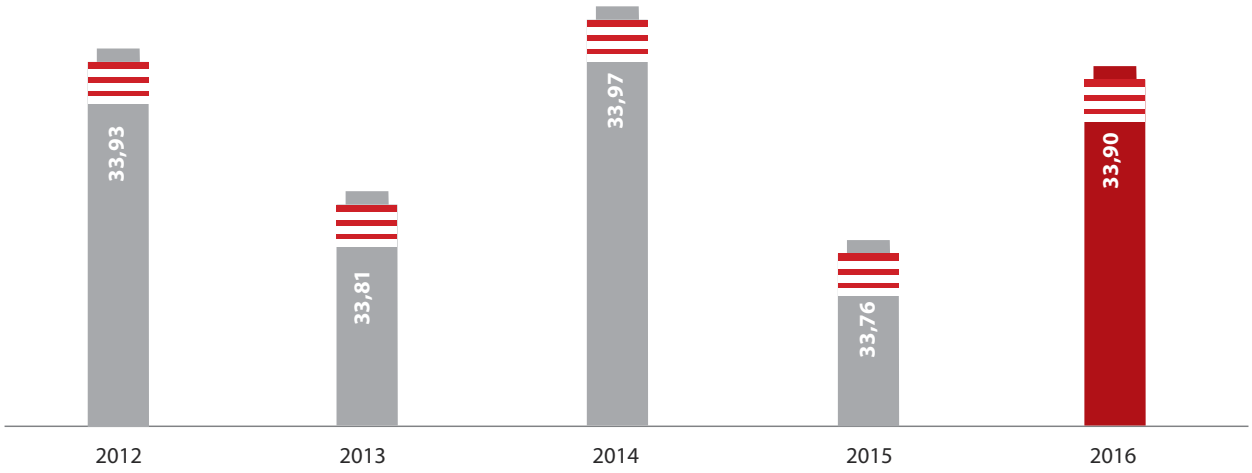

Tara Kalor Netto

Tara Kalor Netto mengukur efisiensi pemakaian bahan bakar yang dikonversikan ke dalam nilai kalori yang dibutuhkan untuk setiap kWh produksi netto yang dibangkitkan oleh unit pembangkit pada suatu periode. Semakin rendah nilai Tara Kalor menunjukkan bahwa pembangkit tersebut semakin efisien.

Pada tahun 2016, Tara Kalor Netto sebesar 2.537,06 kCal/kWh menurun 0,39% dibandingkan tahun 2015 sebesar 2.547,10 kCal/kWh. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi perbaikan di tahun 2016 sebesar 10,04 kCal/kWh. Penurunan tersebut terutama dipengaruhi oleh peningkatan pasokan gas di Bali dan optimalisasi pola operasi Grati.

Net Plant Heat Rate

Net Plant Heat Rate measures the efficiency of fuel consumption in the calorific rate required for each net production kWh generated by the generating unit in a certain period. The lower the value of Net Plant Heat, the more efficient a power plant.

In 2016, Net Plant Heat Rate is 2,537.06 kCal/kWh, a decrease of 0.39% compared to 2015, which was 2,547.10 kCal/kWh. This shows improvement in 2016, in the amount of 10.04 kCal/kWh. The decrease is influenced by the gas supply increase in Bali and Grati operating pattern optimization.

Tabel Tara Kalor Netto Berdasarkan Unit Pembangkit Tahun 2012-2016 (kCal/kWh)

Table: Net Plant Heat Rate Based on the Generating Unit 2012-2016 (kCal/kWh)

Unit Pembangkit Generating Unit	2012	2013	2014	2015	Meningkat/ Menurun (%) Increase/ Decrease (%)	2016
UP | GU Suralaya	2.582,58	2.562,57	2.558,76	2.602,18	0,63	2.618,58
UPJP | GGSU Priok	2.293,33	2.249,54	2.246,60	2.215,46	3,44	2.291,73
UP | GU Semarang	3.467,74	3.964,96	3.273,70	2.409,99	2,18	2.462,49
UP | GU Perak Grati	2.233,19	2.360,69	2.478,39	2.527,54	(5,12)	2.398,03
UP | GU Bali	3.825,62	3.400,55	3.539,09	2.878,66	(19,91)	2.305,41
Jumlah Total	**2.534,63**	**2.543,63**	**2.531,65**	**2.547,10**	**(0,39)**	**2.537,06**

Tabel Tara Kalor Netto Berdasarkan Jenis Pembangkit Tahun 2012-2016 (kCal/kWh)

Table: Net Plant Heat Rate Based on the Type of Power Plant 2012-2016 (kCal/kWh)

Jenis Pembangkit Type of Power Plant	2012	2013	2014	2015	Meningkat/ Menurun (%) Increase/ Decrease (%)	2016
PLTU Batubara Coal based SPP	2.582,58	2.562,57	2.558,76	2.602,18	0,63	2.618,58
PLTU Bahan Bakar Minyak Oil Fuel based SPP	2.861,90	-	-	-	-	-
PLTGU Gas Gas Based CCPP	2.240,75	2.241,33	2.307,49	2.328,94	1,55	2.365,07
PLTGU Bahan Bakar Minyak Oil Fuel Based CCPP	2.402,23	2.462,07	2.727,56	2.685,02	(24,80)	2.019,26
PLTG Bahan Bakar Minyak Oil Fuel Based GTPP	3.385,83	3.401,90	3.553,72	3.541,34	22,26	4.329,61
PLTG Gas Gas based GTPP	3.661,13	3.839,29	4.265,87	3.913,55	3,12	4.035,83
PLTD Bahan Bakar Minyak Oil Fuel Based DPP	4.523,93	4.191,03	2.975,78	2.193,78	2,57	2.388,57
PLTD Gas Gas Based DPP	-	-	-	-	-	2.233,19
Jumlah Total	**2.534,63**	**2.543,63**	**2.531,65**	**2.547,10**	**(0,39)**	**2.537,06**

TINJAUAN KINERJA OPERASI PER SEGMEN
Operational Performance Review Per Segment

Grafik Tara Kalor Netto Tahun 2012-2016 (kCal/kWh)
Graph: Net Plant Heat Rate 2012-2016 (kCal/kWh)

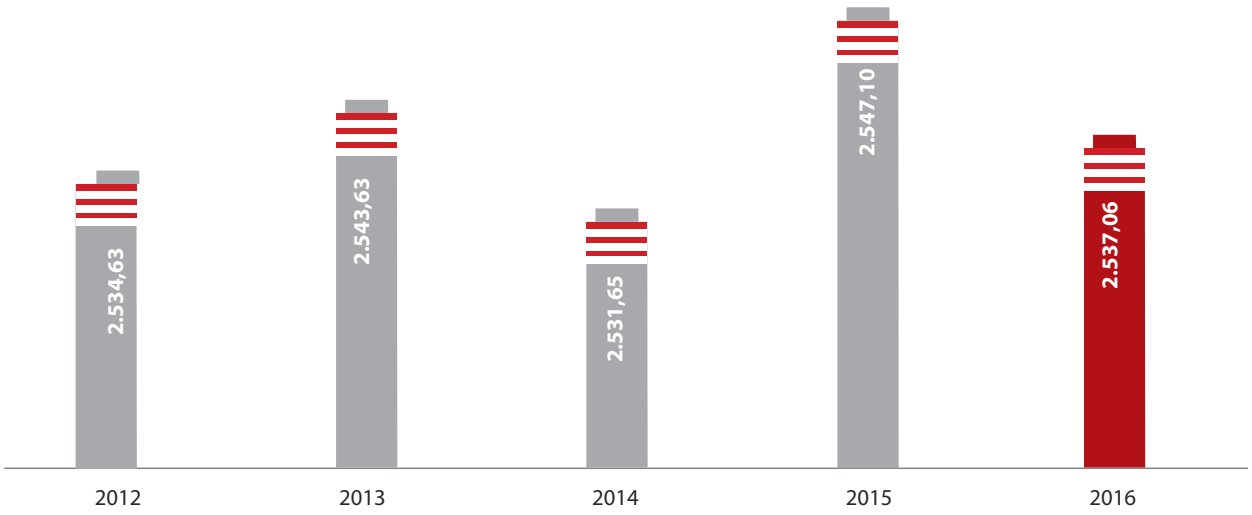

Produksi Tenaga Listrik

Pada tahun 2016, Indonesia Power melakukan beberapa upaya untuk meningkatkan jumlah produksi listrik diantaranya menambah pasokan gas untuk UP Semarang, UP Perak Grati, dan UP Bali. Selain itu upaya yang dilakukan adalah melakukan optimalisasi pengoperasian PLTA di tahun 2016 karena bertepatan dengan musim basah.

Jumlah produksi listrik pada tahun 2016 sebesar 43.180,60 GWh meningkat 8,68% dibandingkan tahun 2015 sebesar 39.730,11 GWh. Peningkatan tersebut terutama dikontribusi oleh peningkatan yang signifikan pada beberapa unit pembangkit yaitu peningkatan produksi UP Semarang (5.158,05 GWh atau meningkat 101,28% dari 2015), UP Perak Grati (2.972,37 GWh atau meningkat 21,21% dari 2015), serta pembangkit berbahan bakar air di UP Saguling (4.069,30 GWh atau meningkat 62,96% dari 2015) dan UP Mrica (1.237,77 GWh atau meningkat 37,86% dari 2015).

Electricity Production

In 2016, Indonesia Power made several efforts to increase the amount of electricity production such as adding gas supply for UP Semarang GU, Perak Grati GU, and Bali GU. In addition, efforts are made to optimize the operation of HPP in 2016 as it coincides with the wet season.

Electricity production in 2016 amounted to 43,180.60 GWh, an increase of 8.68% compared to 2015, which was 39,730.11 GWh. The increase is contributed through the significant increase on few power plants, i.e. production increase of Semarang GU (5,158.05 GWh or increased by 101.28% from 2015), Perak Grati GU (2,972.37 GWh or increased by 21.21% from 2015), as well as hydro-fuel power plant in Saguling GU (4,069.30 GWh or increased by 62.96% from 2015), and Mrica GU (1,237.77 GWh or increased by 37.86% from 2015).

Tabel Produksi Listrik Berdasarkan Unit Pembangkit Tahun 2012-2016 (GWh)
Table: Electricity Production Based on the Generating Unit 2012-2016 (GWh)

Unit Pembangkit Generating Unit	2012	2013	2014	2015	Meningkat/ Menurun (%) Increase/ Decrease (%)	2016
UP | GU Suralaya	22.355,83	23.911,17	22.596,76	23.528,45	(3,16)	22.786,10
UPJP | GGSU Priok	4.525,80	4.181,66	3.819,14	3.434,65	(6,44)	3.213,47
UP | GU Saguling	2.461,45	3.579,04	3.157,96	2.497,13	62,96	4.069,30
UPJP | GGSU Kamojang	2.919,58	2.970,89	2.842,56	2.892,87	(4,00)	2.777,15
UP | GU Mrica	963,04	990,41	882,42	897,87	37,86	1.237,77
UP | GU Semarang	303,15	125,34	346,72	2.562,61	101,28	5.158,05
UP | GU Perak Grati	3.436,73	3.473,18	2.953,00	2.452,32	21,21	2.972,37
UP | GU Bali	1.144,80	1.454,16	862,56	860,85	6,37	915,71
Jawa - Bali Grid & *Embedded* Java - Bali Grid & Embedded	**38.110,37**	**40.685,85**	**37.461,12**	**39.126,74**	**10,23**	**43.129,92**
Pembelian Energi Listrik di Area Bali dan Karimun Jawa Electricity Purchase in Bali Area and Karimun Jawa	1.339,36	1.497,52	1.913,08	603,37	(91,60)	50,68
Jumlah Produksi Listrik Electricity Production	**39.449,73**	**42.183,37**	**39.374,20**	**39.730,11**	**8,68**	**43.180,60**

Tabel Produksi Listrik Berdasarkan Jenis Pembangkit Tahun 2012-2016 (GWh)
Table: Electricity Production Based on the Type of Power Plant 2012-2016 (GWh)

Jenis Pembangkit Type of Power Plant	2012	2013	2014	2015	Meningkat/ Menurun (%) Increase/ Decrease (%)	2016
PLTA HPP	3.424,48	4.569,45	4.040,38	3.395,00	56,32	5.307,08
PLTU Batubara Coal based SPP	22.355,83	23.911,17	22.596,76	23.528,45	(3,16)	22.786,10
PLTU Bahan Bakar Minyak Oil Fuel based SPP	115,33	0,7	-	-	-	-
PLTGU Gas Gas Based CCPP	6.406,66	6.930,70	6.605,99	8.242,04	34,43	11.080,18
PLTGU Bahan Bakar Minyak Oil Fuel Based CCPP	1.594,89	517,88	281,15	29,94	65,73	49,62
PLTP GPP	2.919,58	2.970,89	2.842,56	2.892,87	(4,00)	2.777,15

TINJAUAN KINERJA OPERASI PER SEGMEN
Operational Performance Review Per Segment

Jenis Pembangkit Type of Power Plant	2012	2013	2014	2015	Meningkat/ Menurun (%) Increase/ Decrease (%)	2016
PLTG Bahan Bakar Minyak Oil Fuel Based GTPP	1.041,72	1.394,64	863,06	443,68	(92,30)	34,16
PLTG Gas Gas Based GTPP	130,93	324,18	222,74	172,05	22,20	210,25
PLTD Bahan Bakar Minyak Oil Fuel Based DPP	120,96	66,24	8,48	422,71	(76,55)	99,13
PLTD Gas Gas Based DPP	-	-	-	-	-	786,26
Jawa - Bali Grid & *Embedded* Java - Bali Grid & Embedded	**38.110,37**	**40.685,85**	**37.461,12**	**39.126,74**	**10,23**	**43.129,92**
Pembelian Energi Listrik di Area Bali dan Karimun Jawa Electricity Purchase in Bali Area and Karimun Jawa	1.339,36	1.497,52	1.913,08	603,37	(91,60)	50,68
Jumlah Produksi Listrik Electricity Production	**39.449,73**	**42.183,37**	**39.374,20**	**39.730,11**	**8,68**	**43.180,60**

Grafik Produksi Listrik Tahun 2012-2016 (GWh)
Graph: Electricity Production 2012-2016 (GWh)

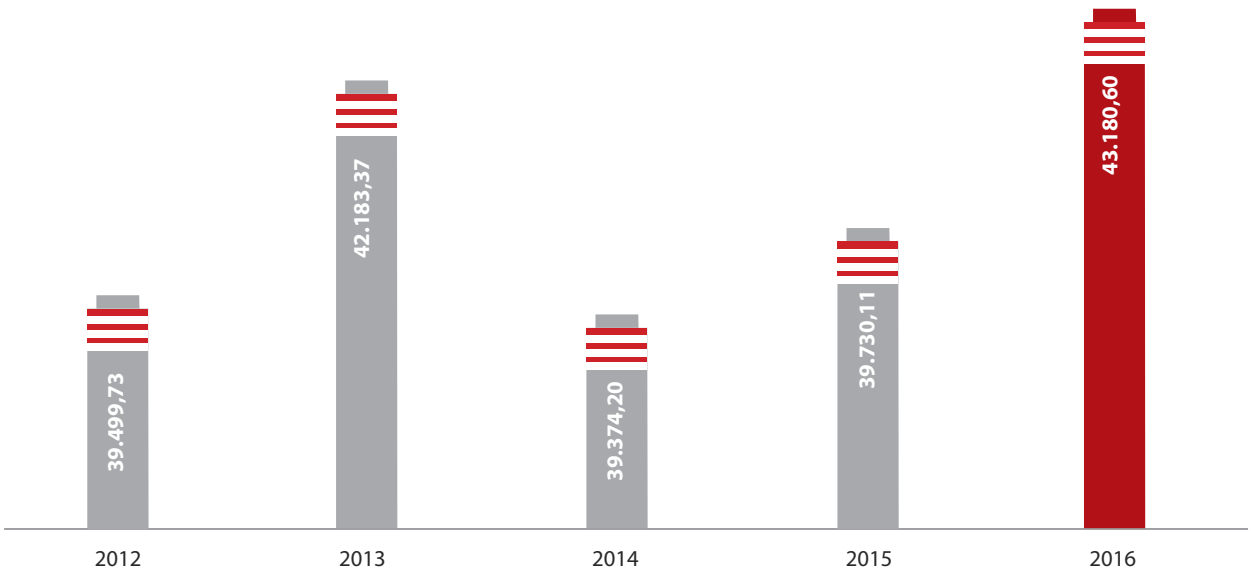

Penjualan Tenaga Listrik

Jumlah penjualan tenaga listrik pada tahun 2016 sebesar 41.299,01 GWh meningkat 8,65% dibandingkan tahun 2015 sebesar 38.011,11 GWh. Peningkatan tersebut terutama dipengaruhi oleh peningkatan produksi listrik pada tahun 2016.

Electricity Sales

Electricity sales in 2016 amounted to 41,299.01 GWh, an increase of 8.65% compared to 2015, which was 38,011.11 GWh. The increase is mainly influenced by the increase in electricity production in 2016.

Tabel Penjualan Listrik Berdasarkan Unit Pembangkit Tahun 2012-2016 (GWh)
Table: Electricity Sales Based on the Generating Unit 2012-2016 (GWh)

Unit Pembangkit Generating Unit	2012	2013	2014	2015	Meningkat/ Menurun (%) Increase/ Decrease (%)	2016
UP | GU Suralaya	21.120,48	22.589,85	21.374,64	22.206,08	(3,46)	21.438,38
UPJP | GGSU Priok	4.429,95	4.081,36	3.743,78	3.366,03	(6,93)	3.132,86
UP | GU Saguling	2.454,89	3.571,19	3.150,71	2.490,67	63,07	4.061,53
UPJP | GGSU Kamojang	2.788,19	2.839,92	2.709,00	2.759,19	(4,17)	2.644,17
UP | GU Mrica	947,21	976,11	868,66	883,11	38,01	1.218,74
UP | GU Semarang	266,33	104,57	323,03	2.477,34	100,61	4.969,83
UP | GU Perak Grati	3.347,02	3.388,74	2.872,48	2.382,01	21,47	2.893,38
UP | GU Bali	1.124,10	1.435,14	850,11	843,94	5,66	891,69
Jawa - Bali Grid & *Embedded* Java - Bali Grid & Embedded	**36.478,16**	**38.986,88**	**35.892,42**	**37.408,37**	**10,27**	**41.250,60**
Pembelian Energi Listrik di Area Bali dan Karimun Jawa Electricity Purchase in Bali Area and Karimun Jawa	1.338,95	1.496,93	1.912,53	602,74	(91,97)	48,42
Jumlah Penjualan Listrik Electricity Sales	**37.817,11**	**40.483,81**	**37.804,95**	**38.011,11**	**8,65**	**41.299,01**

TINJAUAN KINERJA OPERASI PER SEGMEN
Operational Performance Review Per Segment

Tabel Penjualan Listrik Berdasarkan Jenis Pembangkit Tahun 2012-2016 (GWh)

Table: Electricity Sales Based on the Type of Power Plant 2012-2016 (GWh)

Jenis Pembangkit Type of Power Plant	2012	2013	2014	2015	Meningkat/ Menurun (%) Increase/ Decrease (%)	2016
PLTA HPP	3.402,10	4.547,30	4.019,37	3.373,79	56,51	5.280,28
PLTU Batubara Coal based SPP	21.120,48	22.589,85	21.374,64	22.206,08	(3,46)	21.438,38
PLTU Bahan Bakar Minyak Oil Fuel based SPP	92,65	(8,54)	(5,74)	(4,90)	(0,41)	(4,92)
PLTGU Gas Gas Based CCPP	6.270,57	6.780,39	6.452,45	8.028,36	33,78	10.740,20
PLTGU Bahan Bakar Minyak Oil Fuel Based CCPP	1.548,83	495,12	264,42	26,10	85,36	48,38
PLTP GPP	2.788,19	2.839,92	2.709,00	2.759,19	(4,17)	2.644,17
PLTG Bahan Bakar Minyak Oil Fuel Based GTPP	1.013,51	1.360,02	849,18	435,36	(93,91)	26,50
PLTG Gas Gas Based GTPP	130,10	323,00	221,67	171,00	22,35	209,22
PLTD Bahan Bakar Minyak Oil Fuel Based DPP	111,49	59,75	7,31	413,41	(77,03)	94,98
PLTD Gas Gas Based DPP	-	-	-	-	-	773,40
Jawa - Bali Grid & *Embedded* Java - Bali Grid & Embedded	**36.478,16**	**38.986,88**	**35.892,42**	**37.408,37**	**10,27**	**41.250,60**
Pembelian Energi Listrik di Area Bali dan Karimun Jawa Electricity Purchase in Bali Area and Karimun Jawa	1.338,95	1.496,93	1.912,53	602,74	(91,97)	48,42
Jumlah Penjualan Listrik Electricity Sales	**37.817,11**	**40.483,81**	**37.804,95**	**38.011,11**	**8,65**	**41.299,01**

Grafik Penjualan Listrik Tahun 2012-2016 (GWh)

Graph: Electricity Sales 2012-2016 (GWh)

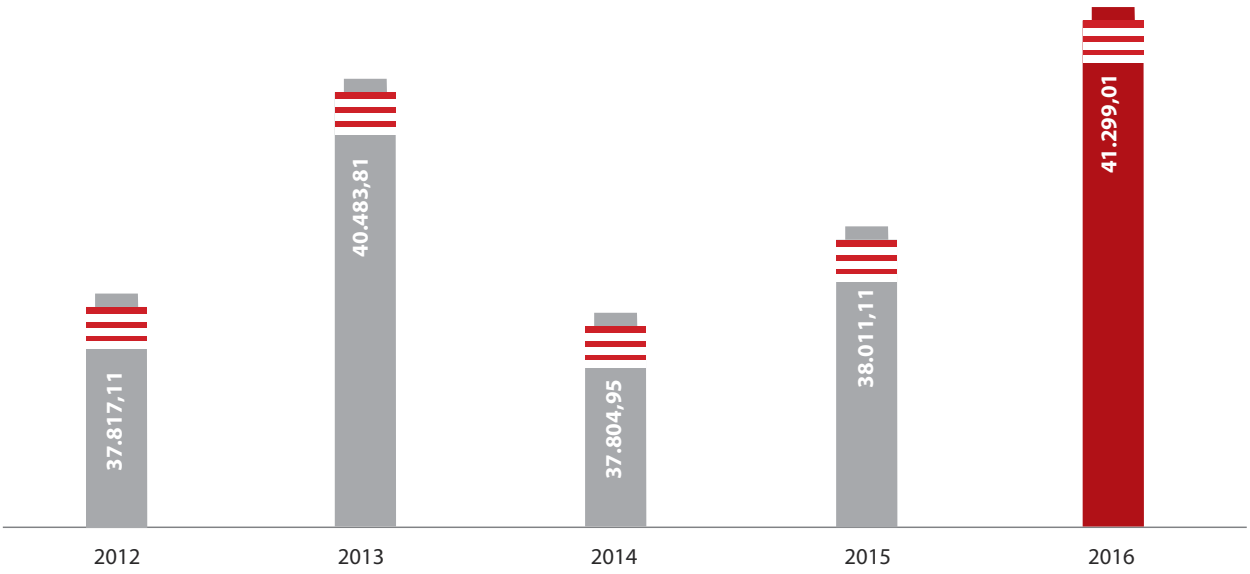

TINJAUAN KINERJA OPERASI PER SEGMEN
Operational Performance Review Per Segment

Pemakaian Sendiri

Pemakaian sendiri pembangkit adalah jumlah kWh yang dipakai untuk berbagai keperluan peralatan pendukung dan peralatan tertentu yang tetap mengkonsumsi kWh pada saat menyalurkan dan pada saat tidak menyalurkan energi pada sistem pembangkit/sentral, antara lain peralatan bantu mesin pembangkit, peralatan kontrol, peralatan *switchyard*, penerangan dan pendingin ruangan pada suatu periode tertentu. Semakin rendah nilai PS menunjukkan kinerja pembangkit semakin baik.

Pada tahun 2016, pemakaian sendiri sebesar 1.879,33 GWh meningkat 9,37% dibandingkan tahun 2015 sebesar 1.718,37 GWh karena produksi meningkat 8,68% di tahun 2016. Namun besarnya persen pemakaian sendiri terhadap jumlah produksi mengalami penurunan 0,68% yang salah satunya dipengaruhi oleh optimalisasi pengoperasian PLTA.

Self-Consumption

Self-consumption of the generator is the amount of kWh used to fulfill the needs of supporting equipment and equipments that consumes kWh at times when distributing power and when on standby (not distributing energy) on central power plant system, such as power plant machine equipment, control equipment, switchyard, lighting, and air cooling at a certain period of time. The lower the value of self-consumption, the better the performance of the power plant

In 2016, self-consumption amounted to 1,879.33 GWh, an increase of 9.37% compared to 2015 which was 1,718.37 GWh due to the increase of 8.68% in production in 2016. But the percentage of self-consumption to the production decreased by 0.68%, which is influenced by the optimization of HPP operations.

Tabel Pemakaian Sendiri Berdasarkan Unit Pembangkit Tahun 2012-2016
Table: Self-Consumption Based on Generating Unit 2012-2016

Unit Pembangkit Generating Unit	2012		2013		2014		2015		Meningkat/ Menurun (%) Increase/Decrease (%)		2016	
	GWh	%PS	GWh	%PS	GWh	%PS	GWh	%PS	GWh	%PS	GWh	%PS
UP | GU Suralaya	1.235,35	5,53	1.321,32	5,53	1.222,12	5,41	1.322,37	5,62	1,92	5,16	1.347,71	5,91
UPJP | GGSU Priok	95,85	2,12	100,30	2,40	75,36	1,97	68,62	2,00	17,47	25,50	80,61	2,51
UP | GU Saguling	6,56	0,27	7,86	0,22	7,24	0,23	6,46	0,26	20,28	(26,92)	7,77	0,19
UPJP | GGSU Kamojang	131,39	4,50	130,98	4,41	133,57	4,70	133,68	4,62	(0,52)	3,68	132,98	4,79
UP | GU Mrica	15,82	1,64	14,30	1,44	13,76	1,56	14,75	1,64	29,02	(6,10)	19,03	1,54
UP | GU Semarang	36,82	12,15	20,77	16,57	23,69	6,83	85,27	3,33	120,73	9,61	188,22	3,65
UP | GU Perak Grati	89,41	2,61	84,43	2,43	80,52	2,73	70,31	2,87	12,35	(7,32)	78,99	2,66
UP | GU Bali	20,71	1,81	19,02	1,31	12,45	1,44	16,91	1,96	42,05	33,67	24,02	2,62
Jumlah Total	**1.632,21**	**4,28**	**1.698,97**	**4,18**	**1.568,70**	**4,19**	**1.718,37**	**4,39**	**9,37**	**(0,68)**	**1.879,33**	**4,36**

Tabel Pemakaian Sendiri Berdasarkan Jenis Pembangkit Tahun 2012-2016

Table: Self-Consumption Based on the Type of Power Plant 2012-2016

Jenis Pembangkit Type of Power Plant	2012		2013		2014		2015		Meningkat/ Menurun (%) Increase/Decrease (%)		2016	
	GWh	%PS	GWh	%PS	GWh	%PS	GWh	%PS	GWh	%PS	GWh	%PS
PLTA HPP	22,39	0,65	22,16	0,48	21,00	0,52	21,21	0,62	23,36	(19,35)	26,80	0,50
PLTU Batubara Coal based SPP	1.235,35	5,53	1.321,32	5,53	1.222,12	5,41	1.322,37	5,62	1,92	5,16	1.347,71	5,91
PLTU Bahan Bakar Minyak Oil Fuel based SPP	22,68	19,66	9,24	13,17	5,74	-	4,90	-	(100,00)	-	4,92	-
PLTGU Gas Gas Based CCPP	136,08	2,12	150,31	2,17	153,55	2,32	213,78	2,59	59,08	18,53	339,98	3,07
PLTGU Bahan Bakar Minyak Oil Fuel Based CCPP	46,06	2,89	22,76	4,39	16,73	5,95	3,85	12,84	(67,79)	(80,45)	1,24	2,51
PLTP GPP	131,39	4,50	130,98	4,41	133,57	4,70	133,68	4,62	(0,52)	3,68	132,98	4,79
PLTG Bahan Bakar Minyak Oil Fuel Based GTPP	28,21	2,71	34,62	2,48	13,88	1,61	8,32	0,01	(8,05)	224.000,00	7,65	22,41
PLTG Gas Gas Based GTPP	0,83	0,63	1,19	0,37	1,06	0,48	1,05	0,61	(0,95)	(19,67)	1,04	0,49
PLTD Bahan Bakar Minyak Oil Fuel Based DPP	9,46	7,82	6,49	9,80	1,17	13,84	9,30	2,20	(55,38)	90,45	4,15	4,19
PLTD Gas Gas Based DPP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,86	1,64
Jumlah Total	**1.632,21**	**4,28**	**1.698,97**	**4,18**	**1.568,70**	**4,19**	**1.718,37**	**4,39**	**9,37**	**(0,68)**	**1.879,33**	**4,36**

TINJAUAN KINERJA OPERASI PER SEGMEN
Operational Performance Review Per Segment

Grafik Pemakaian Sendiri Tahun 2012-2016 (%)
Graph: Self-Consumption 2012-2016 (%)

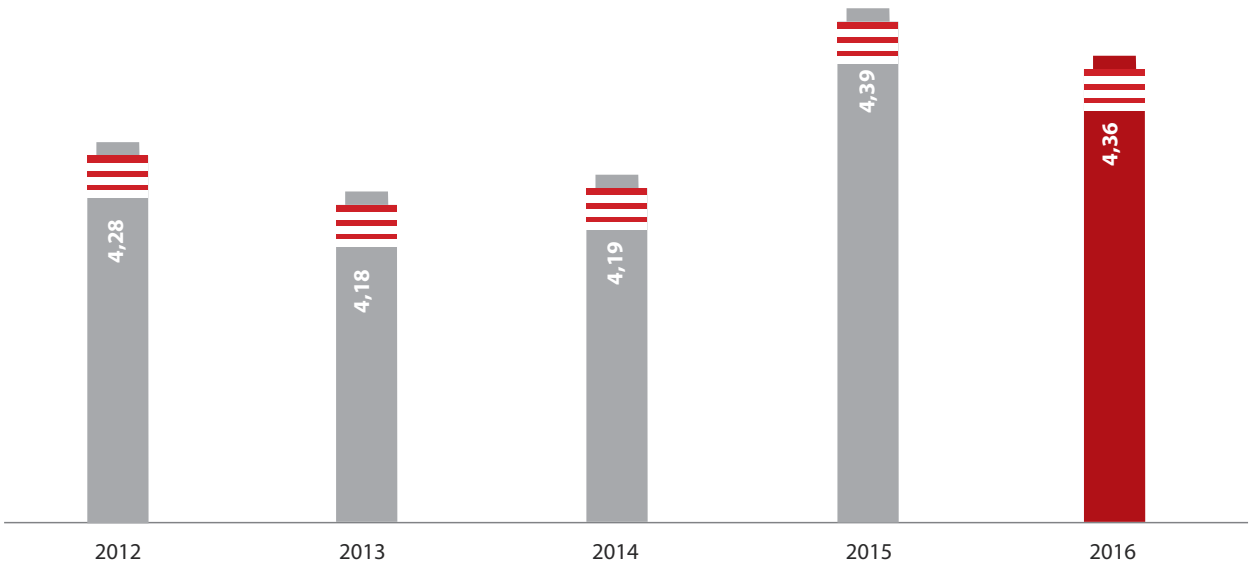

Jasa *Operation and Maintenance* (O&M)

Selain menyediakan tenaga listrik, perusahaan juga memiliki unit usaha *Operation & Maintenance* (O&M). Dalam pengelolaan jasa O&M untuk pembangkit milik PLN (pemilik aset), Perusahaan memiliki peran sebagai pihak yang mengoperasikan aset tersebut. Dalam hubungan tersebut, ada dua macam kontrak jasa, yaitu:

1. *Asset Manager Contract* (AMC), yaitu kontrak pengelolaan jasa O&M antara PT Indonesia Power dengan PT PLN (Persero) untuk PLTU Suralaya 8, PLTU Lontar, PLTU Labuan, PLTU Palabuhan Ratu, PLTU Adipala, PLTGU Cilegon, dan PLTGU Priok Blok 3.
2. Kontrak *supporting*, yaitu sebelum *Commercial Operation Date* (COD) atau sebelum pembangkit beroperasi secara komersial dan COD.

Operation and Maintenance (O&M) Services

In addition to electricity provision, the Company has an Operation & Maintenance (O&M) business unit. In managing the O&M services for PLN (asset owner) owned power plant, the Company has a role as the party to operate the asset. In that relation, there are two types of services contract, i.e:

1. Asset Manager Contract (AMC), i.e. contract to maintain O&M services between PT Indonesia Power with PT PLN (Persero) for Suralaya 8 SPP, Lontar SPP, Labuan SPP, Palabuhan Ratu SPP, Adipala SPP, Cilegon CCPP, and Priok Block 3 CCPP.
2. Supporting contract, i.e. before Commercial Operation Date (COD) or before the power plant operates commercially and COD.

Tabel Pembangkit Jasa O&M Tahun 2016
Table: O&M Service Power Plant 2016

Nama Unit Unit Name	Status kontrak Contract status	Tahun *Performance Based* Performance Based Year	Jasa yang Diberikan Service Provided
UJP PLTU | GSU SPP Banten 1 Suralaya	AMC	2015	*Asset Manager*
UJP PLTU | GSU SPP Banten 2 Labuan	AMC	2015	*Asset Manager*

Nama Unit Unit Name	Status kontrak Contract status	Tahun *Performance Based* Performance Based Year	Jasa yang Diberikan Service Provided
UJP PLTU | GSU SPP Banten 3 Lontar	AMC	2016	*Asset Manager*
UJP PLTU | GSU SPP Jawa Barat 2 Palabuhan Ratu	AMC	2016	*Asset Manager*
UJP PLTU | GSU SPP Jawa Tengah 2 Adipala	AMC	2016	*Asset Manager*
PLTGU | CCPP Priok Blok 3	AMC	2016	*Asset Manager*
UJP PLTGU | GSU CCPP Cilegon	AMC	2016	*Asset Manager*
UJP PLTU | GSU SPP Pangkalan Susu	*Supporting*	-	Jasa O&M O&M Services
UJP PLTU | GSU SPP Barru	*Supporting*	-	Jasa O&M O&M Services
UJP PLTU | GSU SPP Jeranjang	*Supporting*	-	Jasa O&M O&M Services
UJP PLTU | GSU SPP Sanggau	*Supporting*	-	Jasa O&M O&M Services
PLTP | GPP Ulumbu	*Supporting*	-	Jasa O&M O&M Services
UJP PLTU | GSU SPP Holtekamp	*Supporting*	-	Jasa O&M O&M Services
UJP PLTU | GSU SPP Sintang	*Supporting*	-	Jasa O&M O&M Services

Kinerja Operasi Pembangkit Jasa O&M

Sejak tahun 2016, Indonesia Power mendapatkan kontrak pengelolaan jasa O&M secara menyeluruh (*asset manager contract*) untuk pembangkit di Pulau Jawa, dimana Indonesia Power bertanggung jawab terhadap kinerja pembangkit yang dikelola tersebut.

Kinerja pembangkit yang jasa O&M nya dilakukan oleh Indonesia Power dibedakan menjadi dua yaitu antara FTP-1 Jawa dan Luar Jawa.

Kinerja Unit Pembangkit Jasa O&M *Fast Track Program* (FTP) 1 Jawa

Pada tahun 2016, EAF pembangkit jasa O&M FTP-1 Jawa adalah sebesar 76,00%. Pencapaian EAF sebesar 90,80% dari target RKAP 2016 disebabkan karena adanya gangguan generator di PLTU Palabuhan Ratu Unit 1 dan gangguan kondensor di PLTU Suralaya 8.

Performance of O&M Service Power Plant Operation

Since 2016, Indonesia Power has an asset manager contract for O&M service for power plants in Java, in which Indonesia Power is responsible for the performance of the power plants managed.

The performance of power plants in which the O&M services are maintained by Indonesia Power is divided into two, i.e. Java and Outside Java FTP-1.

O&M Service Generating Unit Performance of Fast Track Program (FTP) 1 Java

In 2016, EAF O&M service generating unit FTP-1 Java is 76.00%. The EAF achievement, which is 90.80% from the RKAP 2016 target, is due to the generator disruption in Palabuhan Ratu Unit 1 SPP and condenser disruption in Suralaya 8 SPP.

TINJAUAN KINERJA OPERASI PER SEGMEN
Operational Performance Review Per Segment

Tabel EAF Unit Pembangkit Jasa O&M FTP-1 Jawa Tahun 2016 (%)
Table: EAF of O&M Service Generating Unit FTP-1 Java 2016 (%)

Unit Pembangkit Generating Unit	Realisasi Tahun 2016 Realization 2016	Target Tahun 2016 Target 2016	Pencapaian (%) Achievement (%)
UJP PLTU | GSU SPP Banten 1 Suralaya	61,17	78,28	78,14
UJP PLTU | GSU SPP Banten 2 Labuan	85,96	82,36	104,37
UJP PLTU | GSU SPP Banten 3 Lontar	83,37	81,64	102,12
UJP PLTU | GSU SPP Jawa Barat 2 Palabuhan Ratu	52,29	81,31	64,31
PLTGU | CCPP Priok Blok 3	89,94	90,08	99,84
UJP PLTGU | GSU CCPP Cilegon	91,02	88,86	102,43
Jumlah Total	**76,00**	**83,70**	**90,80**

Pada tahun 2016, EFOR pembangkit jasa O&M FTP-1 Jawa adalah sebesar 14,16%. Pencapaian EFOR sebesar 200,00% dari target RKAP 2016 disebabkan karena adanya gangguan generator di PLTU Palabuhan Ratu Unit 1 dan gangguan kondensor di PLTU Suralaya 8.

In 2016, EFOR O&M service generating unit FTP-1 Java is 14.16%. The EFOR achievement, which is 200.00% from the RKAP 2016 target, is due to the generator disruption in Palabuhan Ratu Unit 1 SPP and condenser disruption in Suralaya 8 SPP.

Tabel EFOR Unit Pembangkit Jasa O&M FTP-1 Jawa Tahun 2016 (%)
Table: EFOR of O&M Service Generating Unit FTP-1 Java 2016 (%)

Unit Pembangkit Generating Unit	Realisasi Tahun 2016 Realization 2016	Target Tahun 2016 Target 2016	Pencapaian (%) Achievement (%)
UJP PLTU | GSU SPP Banten 1 Suralaya	26,09	10,21	(253,53)
UJP PLTU | GSU SPP Banten 2 Labuan	3,15	7,51	(39,94)
UJP PLTU | GSU SPP Banten 3 Lontar	8,49	7,58	(110,01)
UJP PLTU | GSU SPP Jawa Barat 2 Palabuhan Ratu	39,67	9,93	(397,50)
PLTGU | CCPP Priok Blok 3	0,94	1,38	(66,12)
UJP PLTGU | GSU CCPP Cilegon	0,85	5,09	(14,70)
Jumlah Total	**14,16**	**7,01**	**(200,00)**

Pada tahun 2016, SOF pembangkit jasa O&M FTP-1 Jawa adalah sebesar 10,35%. Pencapaian SOF sebesar 119.62% dari target RKAP 2016 disebabkan adanya *planned outage extension* di PLTU Palabuhan Ratu Unit 2 dan 3 karena ada gangguan *joint* LP *by pass*.

In 2016, SOF O&M service generating unit FTP-1 Java is 10.35%. The achievement of SOF, which is 119.62% from RKAP 2016 target, is due to the planned outage extension in Palabuhan Ratu Unit 2 and 3 SPP, because of the joint LP bypass disruption.

Tabel SOF Unit Pembangkit Jasa O&M FTP-1 Jawa Tahun 2016 (%)

Table: SOF of O&M Service Generating Unit FTP-1 Java 2016 (%)

Unit Pembangkit Generating Unit	Realisasi Tahun 2016 Realization 2016	Target Tahun 2016 Target 2016	Pencapaian (%) Achievement (%)
UJP PLTU | GSU SPP Banten 1 Suralaya	17,57	12,36	(140,15)
UJP PLTU | GSU SPP Banten 2 Labuan	8,90	9,03	(96,56)
UJP PLTU | GSU SPP Banten 3 Lontar	8,13	8,83	(90,07)
UJP PLTU | GSU SPP Jawa Barat 2 Palabuhan Ratu	13,25	8,55	(152,97)
PLTGU | CCPP Priok Blok 3	7,36	7,36	(98,00)
UJP PLTGU | GSU CCPP Cilegon	6,95	5,40	(126,70)
Jumlah Total	**10,35**	**8,51**	**(119,62)**

Pada tahun 2016, SdOF pembangkit jasa O&M FTP 1 Jawa adalah sebesar 3,73 kali. Pencapaian SdOF sebesar 86,81% dari target RKAP.

In 2016, SdOF O&M service generating unit FTP 1 Java is 3.73 times. The achievement of SdOF, which is 86.81% from the RKAP 2016 target.

Tabel SdOF Unit Pembangkit Jasa O&M FTP-1 Jawa Tahun 2016 (kali)

Table: SdOF of O&M Service Generating Unit FTP-1 Java 2016 (times)

Unit Pembangkit Generating Unit	Realisasi Tahun 2016 Realization 2016	Target Tahun 2016 Target 2016	Pencapaian (%) Achievement (%)
UJP PLTU | GSU SPP Banten 1 Suralaya	10	5	(198,00)
UJP PLTU | GSU SPP Banten 2 Labuan	1,5	5	(28,00)
UJP PLTU | GSU SPP Banten 3 Lontar	6	5	(118,00)
UJP PLTU | GSU SPP Jawa Barat 2 Palabuhan Ratu	5,67	5	(111,40)
PLTGU | CCPP Priok Blok 3	1,33	3	(42,33)
UJP PLTGU | GSU CCPP Cilegon	1,33	3	(42,33)
Jumlah Total	**3,73**	**4,20**	**(86,81)**

Pada tahun 2016, Tara Kalor Netto FTP-1 Jawa adalah sebesar 2.472,28 kCal/kWh. Pencapaian Tara Kalor Netto sebesar 95,49% dari target RKAP.

In 2016, Net Plant Heat Rate of FTP-1 Java is 2,472.28 kCal/kWh. The achievement of Net Plant Heat Rate, which is 95.49% from the RKAP 2016 target.

TINJAUAN KINERJA OPERASI PER SEGMEN
Operational Performance Review Per Segment

Tabel Tara Kalor Netto Unit Pembangkit Jasa O&M FTP-1 Jawa Tahun 2016 (kCal/kWh)
Table: Net Plant Heat Rate of O&M Service Generating Unit FTP-1 Java 2012-2016 (kCal/kWh)

Unit Pembangkit Generating Unit	Realisasi Tahun 2016 Realization 2016	Target Tahun 2016 Target 2016	Pencapaian (%) Achievement (%)
UJP PLTU | GSU SPP Banten 1 Suralaya	2.999,80	2.935	102,21
UJP PLTU | GSU SPP Banten 2 Labuan	2.913,05	2.833	102,83
UJP PLTU | GSU SPP Banten 3 Lontar	2.769,37	2.876	96,29
UJP PLTU | GSU SPP Jawa Barat 2 Palabuhan Ratu	2.740,62	2.833	96,74
PLTGU | CCPP Priok Blok 3	1.832,97	2.031	90,25
UJP PLTGU | GSU CCPP Cilegon	1.825,63	1.996	91,46
Jumlah Total	**2.472,28**	**2.589**	**95,49**

Kinerja Unit Pembangkit Jasa O&M *Fast Track Program* (FTP) 1 Luar Jawa

Sedangkan, berikut adalah kinerja Unit Pembangkit Jasa O&M FTP-1 Luar Jawa pada tahun 2016:

O&M Service Generating Unit Performance of Fast Track Program (FTP) 1 Outside Java

Meanwhile, the followings are the performance of O&M Service Generating Unit FTP-1 Outside Java in 2016:

Tabel Kinerja Unit Pembangkit Jasa O&M FTP-1 Luar Jawa Tahun 2016
Table: Performance of O&M Service Generating Unit FTP-1 Outside Java 2016

Unit Pembangkit Generating Unit	EAF (%)	EFOR (%)	SdOF (kali) (times)	SOF (%)	Tara Kalor Netto (kCal/kWh) Net Plant Heat Rate (kCal/kWh)
UJP PLTU | GSU SPP Pangkalan Susu	79,47	8,19	2,5	13,44	2.411,10
UJP PLTU | GSU SPP Barru	60,66	25,68	10	12,25	3.571,84
UJP PLTU | GSU SPP Jeranjang	77,96	4,57	-	17,48	3.564,33
UJP PLTU | GSU SPP Sanggau	70,81	7,48	32,50	23,48	5.567,18
PLTP | GPP Ulumbu	68,54	3,31	10	29,18	-

PROFITABILITAS PER SEGMEN
Segmentation Profitability

Pendapatan Operasi Per Segmen

Pendapatan usaha Indonesia Power terdiri dari penjualan tenaga listrik dan pendapatan jasa. Pendapatan usaha tahun 2016 adalah sebesar Rp36.705.954 juta meningkat 14,63% dibandingkan tahun 2015 sebesar Rp32.020.186 juta.

Dari jumlah pendapatan tersebut, pendapatan usaha dari penjualan tenaga listrik masih mendominasi dengan jumlah kontribusi sebesar 94,00%. Sedangkan kontribusi pendapatan jasa adalah sebesar 6,00%.

Segmentation of Operating Revenue

Indonesia Power's revenue consists of electricity sales and services revenues. Revenues for 2016 amounted to Rp36,705,954 million, increased by 14.63% compared to 2015, which was Rp32,020,186 million.

From the total of revenue, the revenue from electricity sales still dominated with the contribution of 94.00%. Meanwhile, the contribution from services revenues is 6.00%.

PROFITABILITAS PER SEGMEN
Segmentation Profitability

Komposisi Pendapatan Usaha Per Segmen Tahun 2016 (Rp juta)
Segmentation of Revenue Composition in 2016 (Rp million)

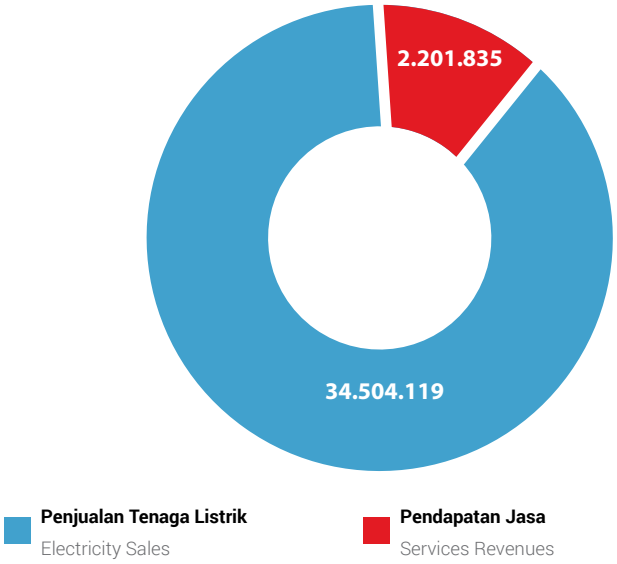

Kontribusi Kinerja dari Anak Perusahaan dan Entitas Asosiasi

Laba tahun berjalan Indonesia Power juga dikontribusi dari kinerja Anak Perusahaan dan Entitas Asosiasi. Berikut merupakan profitabilitas Anak Perusahaan dan Entitas Asosiasi Indonesia Power tahun 2016:

Contribution of Performance from Subsidiaries and Associated Entities

Income for the year of Indonesia Power is contributed through the performance of Subsidiaries and Associated Entities. Here is the profitability of Subsidiaries and Associated Entities of Indonesia Power in 2016:

Tabel Laba Anak Perusahaan dan Entitas Asosiasi Tahun 2016
Table: Profit of Subsidiaries and Associated Entities in 2016

No	Nama Anak Perusahaan dan Entitas Asosiasi Name of Subsidiaries and Associated Entities	Jumlah Laba Profit
1.	PT Artha Daya Coalindo (Rp juta) I (Rp million)	10,65
2.	PT Cogindo DayaBersama (Rp juta) I (Rp million)	38,82
3.	PT Indo Ridlatama Power (Rp juta) I (Rp million)	(5,13)
4.	PT Tangkuban Parahu Geothermal Power (USD)	(304.429)
5.	PT Putra Indo Tenaga (Rp juta) I (Rp million)	(2,02)
6.	PT Perta Daya Gas (USD)	156.508
7.	PT Indo Pusaka Berau (Rp juta) I (Rp million)	13,99

Uarian singkat mengenai kinerja Anak Perusahaan telah dijelaskan pada sub bab sebelumnya pada bagian Profil Perusahaan pada Laporan Tahunan ini.

Brief description on the performance of Subsidiaries has been described in the previous subchapter in the Company Profile in this Annual Report.

TINJAUAN KINERJA KEUANGAN
Financial Performance Review

Laporan Posisi Keuangan

Pada tahun 2016 Perusahaan mencatatkan posisi keuangan yang optimal. Total Aset tahun 2016 sebesar Rp220.888.024 juta, Liabilitas sebesar Rp7.665.482 juta serta Ekuitas sebesar Rp213.222.542 juta.

Financial Position Report

In 2016, the Company reported an optimized financial position. Total Asset in 2016 reached Rp220,888,024 million, with Liability in the amount of Rp7,665,482 million and Equity in the amount of Rp213,222,542 million.

TINJAUAN KINERJA KEUANGAN
Financial Performance Review

Tabel Posisi Keuangan Tahun 2012-2016 (Rp juta)
Table: Financial Position 2012-2016 (Rp million)

Uraian Description	2012	2013	2014	2015	Meningkat/ Menurun (%) Increase/ Decrease (%)	2016
Aset Assets	53.557.380	53.480.492	53.248.058	226.720.248	(2,57)	220.888.024
Liabilitas Liabilities	8.743.489	8.633.813	8.598.429	11.963.977	(35,93)	7.665.482
Ekuitas Equity	44.813.891	44.846.679	44.649.629	214.756.271	(0,71)	213.222.542

Grafik Posisi Keuangan Tahun 2012-2016 (Rp juta)
Graph: Financial Position 2012-2016 (Rp million)

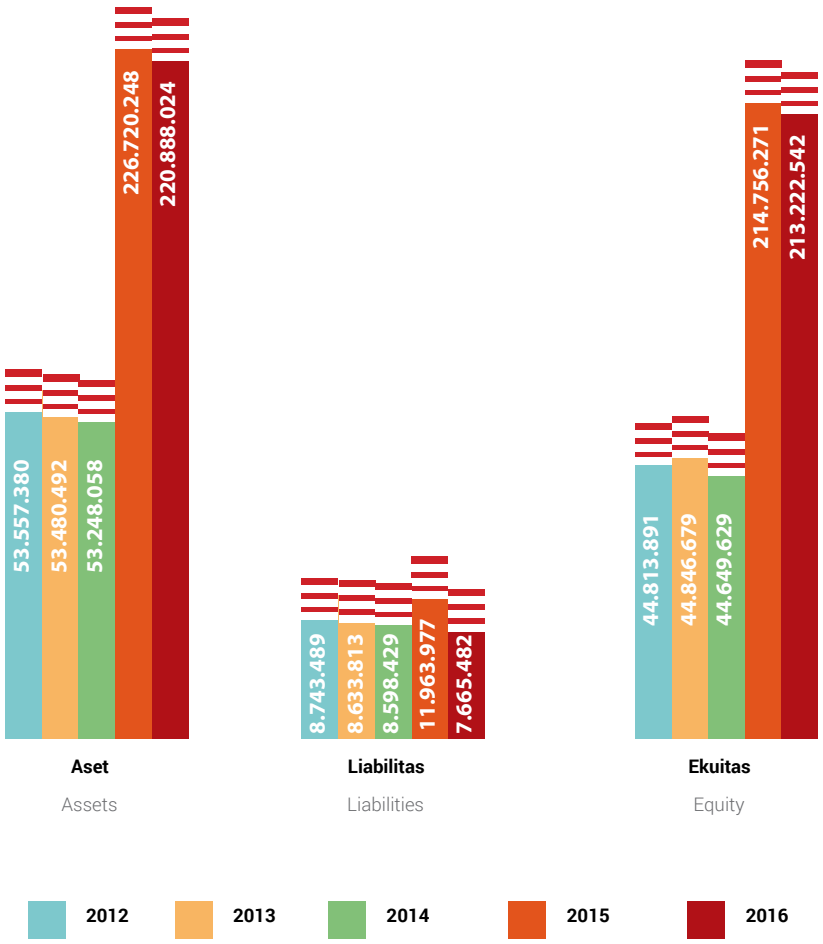

Aset

Aset Perusahaan tahun 2016 sebesar Rp220.888.024 juta menurun 2,57% dibandingkan tahun 2015 sebesar Rp226.720.248 juta. Hal ini dipengaruhi oleh penurunan aset tetap netto sebagai dampak dari proses depresiasi setelah proses revaluasi aset tetap serta menurunnya piutang usaha yang dipengaruhi oleh proses *offset* atas kewajiban pajak revaluasi dengan piutang usaha Indonesia Power atas penjualan tenaga Listrik ke PT PLN (Persero).

Assets

Company's Asset in 2016 amounted to Rp220,888,024 million, a decline of 2.57% compared to 2015, which was Rp226,720,248 million. This is due to the decrease in Net Property, Plant, and Equipment as a result of depreciation after asset revaluation process, and the decrease of Trade Receivables which was influenced by offset process on the revaluation of tax liability with trade accounts receivable of Indonesia Power on the purchase of power to PT PLN (Persero).

Tabel Aset Tahun 2012-2016 (Rp juta)
Table: Assets 2012-2016 (Rp million)

Uraian Description	2012	2013	2014	2015	Meningkat/ Menurun (%) Increase/ Decrease (%)	2016
Aset Lancar Current Assets	23.913.789	25.593.614	25.756.099	28.125.821	(7,44)	26.032.438
Aset Tidak Lancar Non-current Assets	29.643.591	27.886.878	27.491.959	198.594.427	(1,88)	194.855.586
Jumlah Aset **Total Assets**	**53.557.380**	**53.480.492**	**53.248.058**	**226.720.248**	**(2,57)**	**220.888.024**

Grafik Aset Tahun 2012-2016 (Rp juta)
Graph: Assets 2012-2016 (Rp million)

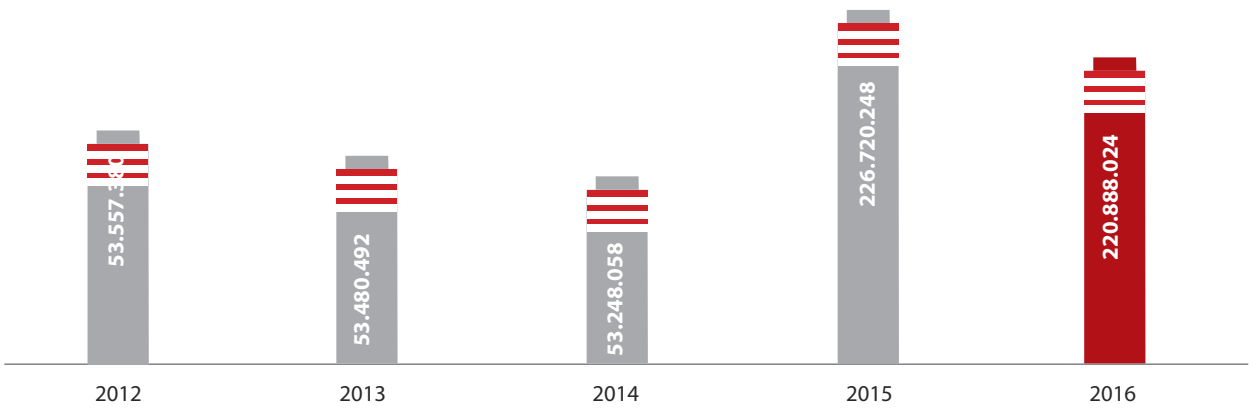

TINJAUAN KINERJA KEUANGAN
Financial Performance Review

Aset Lancar

Aset Lancar Perusahaan terdiri dari Kas dan Setara Kas, Piutang Usaha, Piutang Lain-lain, Persediaan, Piutang Pihak Berelasi, Pajak dibayar di Muka, Biaya Dibayar Di Muka dan Uang Muka. Aset lancar tahun 2016 sebesar Rp26.032.438 juta menurun 2,47% dibandingkan tahun 2015 sebesar Rp28.125.821 juta. Penurunan Aset Lancar ini terkait dengan turunnya nilai piutang usaha Indonesia Power kepada PT PLN (Persero), salah satunya terdapat transaksi *off set* piutang usaha tahun 2016 dengan utang pajak atas revaluasi aset Indonesia Power yang telah dibayarkan oleh PLN.

Current Assets

Company's Current Assets are comprised of Cash and Cash Equivalent, Trade Receivables, Other Receivables, Receivables from Related Parties, Prepaid Taxes, Prepaid Expenses, and Advances. Current assets in 2016 was in the amount of Rp26,032,438 million, suffered a 2,47% decline compared the previous year with the number of Rp28,125,821 million. This decrease was related to the value decrease of Indonesia Power's account receivable to PT PLN, one of which was the off set trade receivables transaction in 2016 with tax payables on Indonesia Power's asset revaluation that had been paid by PLN.

Tabel Aset Lancar Tahun 2012-2016 (Rp juta)
Table: Current Asset 2012-2016 (Rp million)

Uraian Description	2012	2013	2014	2015	Meningkat/ Menurun (%) Increase/ Decrease (%)	2016
Kas dan Setara Kas Cash and Cash Equivalent	820.279	972.149	445.617	896.378	67,43	1.500.820
Piutang Usaha Trade Receivables	19.861.724	22.090.394	22.730.008	24.493.692	(11,54)	21.666.641
Piutang Lain-lain Other Receivables	27.650	353.271	23.547	13.091	(8,14)	12.025
Persediaan Inventories	2.905.542	1.825.219	2.088.197	2.203.016	(10,88)	1.963.398
Piutang Pihak Berelasi Receivables from Related Party	217.461	88.292	114.867	83.371	(49,46)	42.134
Pajak Dibayar Di Muka Prepaid Taxes	26.594	55.188	113.627	166.710	296,22	660.545
Biaya Dibayar Di Muka dan Uang Muka Prepaid Expenses and Advances	54.539	209.101	240.236	269.563	(30,67)	186.875
Jumlah Aset Lancar **Total of Current Assets**	**23.913.789**	**25.593.614**	**25.756.099**	**28.125.821**	**(7,44)**	**26.032.438**

Grafik Aset Lancar Tahun 2012-2016 (Rp juta)
Graph: Current Assets 2012-2016 (Rp million)

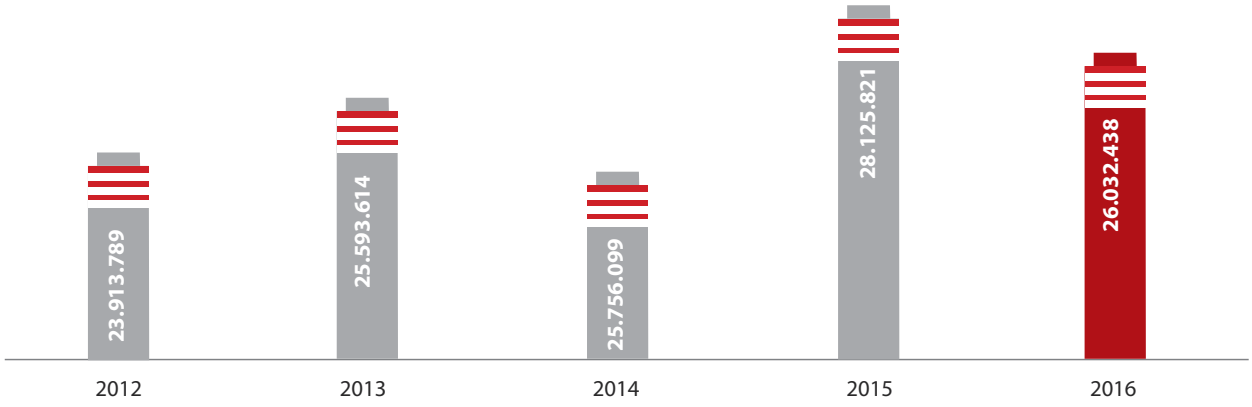

Kas dan Setara Kas

Kas dan Setara Kas Perusahaan tahun 2016 sebesar Rp1.500.820 juta meningkat 67,43% dibandingkan tahun 2015 sebesar Rp896.378 juta. Hal ini terutama dipengaruhi oleh kenaikan pendapatan usaha perusahaan yang lebih tinggi dibandingkan dengan kenaikan biaya operasional perusahaan di tahun 2016 sesuai dengan kenaikan nilai pada simpanan deposito berjangka.

Cash and Cash Equivalents

Company's Cash and Cash Equivalent in 2016 reached the amount of Rp1,500,820 million, a 67.43% increase to 2015, which was Rp896,378 million. This increase is mainly influenced by company's revenues that has been higher than the increase of company's operational costs in 2016 accordingly to the increase of time deposits value.

TINJAUAN KINERJA KEUANGAN
Financial Performance Review

Tabel Kas dan Setara Kas Tahun 2012-2016 (Rp juta)
Table: Cash and Cash Equivalents 2012-2016 (Rp million)

Uraian Description	2012	2013	2014	2015	Meningkat/ Menurun (%) Increase/ Decrease (%)	2016
Kas **Cash on hand**	869	1.212	380	290	16,21	337
Bank **Cash in banks**						
Pihak Berelasi Related Parties	663.684	663.109	350.113	513.203	116,42	1.110.685
Pihak Ketiga Third Parties	102.983	53.978	13.274	50.635	13,06	57.248
Jumlah Kas dan Bank Total Cash and Bank	767.536	718.299	363.387	563.838	107,14	1.167.933
Setara Kas - Deposito Berjangka **Cash Equivalent – Time Deposits**						
Pihak Berelasi Related Parties	50.243	251.350	79.350	329.750	0,09	330.050
Pihak Ketiga Third Parties	2.500	2.500	2.500	2.500	-	2500
Jumlah Setara Kas Total Cash Equivalent	52.743	253.850	81.850	332.250	0,09	332.550
Jumlah Kas dan Setara Kas **Total of Cash and Cash Equivalent**	**820.279**	**972.149**	**445.617**	**896.378**	**67,43**	**1.500.820**

Grafik Kas dan Setara Kas Tahun 2012-2016 (Rp juta)
Graph: Cash and Cash Equivalent 2012-2016 (Rp million)

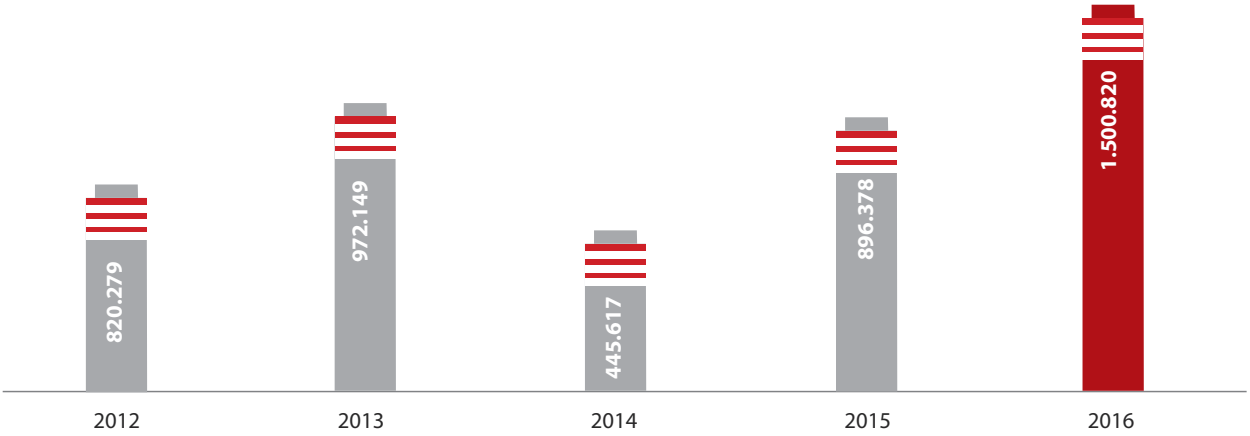

Piutang Usaha

Piutang Usaha Perusahaan tahun 2016 sebesar Rp21.666.641 juta menurun 11,54% dibandingkan tahun 2015 sebesar Rp24.493.692 juta. Penurunan Piutang usaha ini terutama dipengaruhi oleh pelunasan hutang pajak atas revaluasi aset Indonesia Power yang telah dibayarkan oleh PLN pada tahun 2016 dengan skema off set terhadap piutang Indonesia Power kepada PLN atas penjualan listrik.

Trade Receivable

Company's Trade Receivable in 2016 reached the amount of Rp21,666,641 million, a 11.54% decrease to 2015, which was Rp24,493,692 million. The decrease of Trade Receivable is mainly influenced by repayment of taxes payable on Indonesia Power's asset revaluation that has been paid by PLN in 2016 with off set scheme towards Indonesia Power's receivables to PLN over electricity sales.

TINJAUAN KINERJA KEUANGAN
Financial Performance Review

Tabel Piutang Usaha Tahun 2012-2016 (Rp juta)
Table: Trade Receivable 2012-2016 (Rp million)

Uraian Description	2012	2013	2014	2015	Meningkat/ Menurun (%) Increase/ Decrease (%)	2016
Pihak Berelasi- PT PLN Related Parties - PT PLN	19.824.235	22.051.088	22.677.861	24.442.578	(11,56)	21.615.875
Pihak ketiga Third Parties	50.070	46.857	61.927	65.317	(5,14)	61.957
Cadangan kerugian penurunan nilai Allowance for impairment losses	(12.581)	(7.551)	(9.780)	(14.203)	(21,21)	(11.191)
Bersih Net	37.489	39.306	52.147	51.114	(0,68)	50.766
Jumlah Piutang Usaha **Total of Trade Receivable**	**19.861.724**	**22.090.394**	**22.730.008**	**24.493.693**	**(11,54)**	**21.666.641**

Grafik Piutang Usaha Tahun 2012-2016 (Rp juta)
Graph: Trade Receivable 2012-2016 (Rp million)

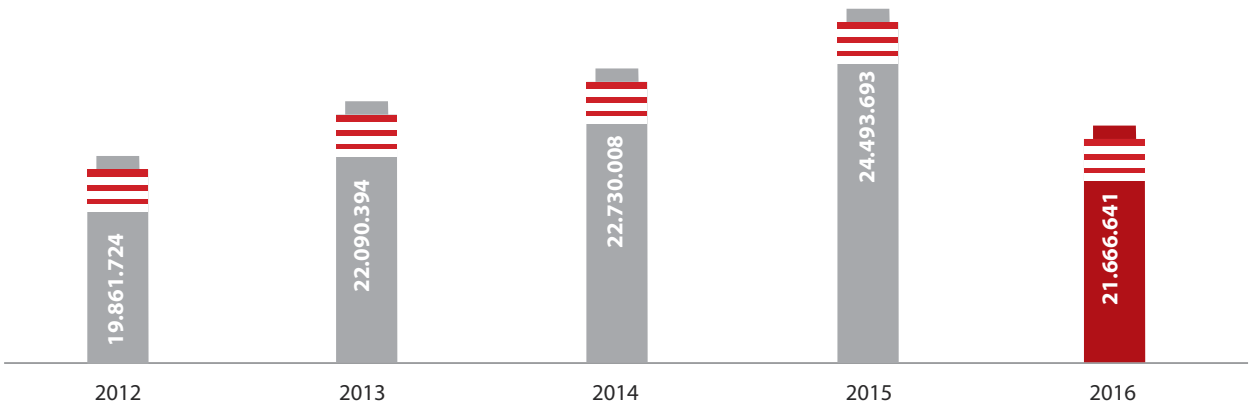

Piutang Lain-lain

Piutang Lain-lain Perusahaan tahun 2016 sebesar Rp12.025 juta menurun 8,14% dibandingkan tahun 2015 sebesar Rp13.091 juta. Penurunan piutang lain-lain ini terutama dipengaruhi oleh turunnya saldo piutang perusahaan atas pinjaman kepada pegawai.

Other Receivables

Company's Other Receivables in 2016 reached the amount of Rp12,025 million, an 8.14% decrease of 2015 which was Rp13,091 million. The decline of other receivables is mainly influenced by the decrease of company's credit account over loans for employees.

Persediaan

Persediaan tahun 2016 sebesar Rp1.963.398 juta menurun 10,88% dibandingkan tahun 2015 sebesar Rp2.203.016 juta. Penurunan Persediaan ini terutama dipengaruhi oleh penurunan pada persediaan bahan bakar dan pelumas, selaras dengan efisiensi pemakaian bahan bakar.

Inventories

Inventories in 2016 reached the amount of Rp1,963,398 million, a 10.88% decrease from 2015 which was Rp2,203,016 million. This decrease is mainly influenced by the decrease of fuel and lubricant supply, in accordance with fuel usage efficiency.

Tabel Persediaan Tahun 2012-2016 (Rp juta)
Table: Inventories 2012-2016 (Rp million)

Uraian Description	2012	2013	2014	2015	Meningkat/ Menurun (%) Increase/ Decrease (%)	2016
Bahan bakar dan pelumas Fuel and Lubricant	2.681.080	1.682.275	1.955.801	2.058.563	(18,93)	1.668.968
Material pemeliharaan Maintenance Materials	252.881	166.837	152.043	165.973	(90,29)	315.833
Penyisihan penurunan nilai Allowance for decline in value	(28.419)	(23.893)	(19.647)	(21.520)	(0,54)	(21.403)
Jumlah **Total**	**2.905.542**	**1.825.219**	**2.088.197**	**2.203.016**	**(10,88)**	**1.963.398**

TINJAUAN KINERJA KEUANGAN
Financial Performance Review

Grafik Persediaan Tahun 2012-2016 (Rp juta)
Graph: Inventories 2012-2016 (Rp million)

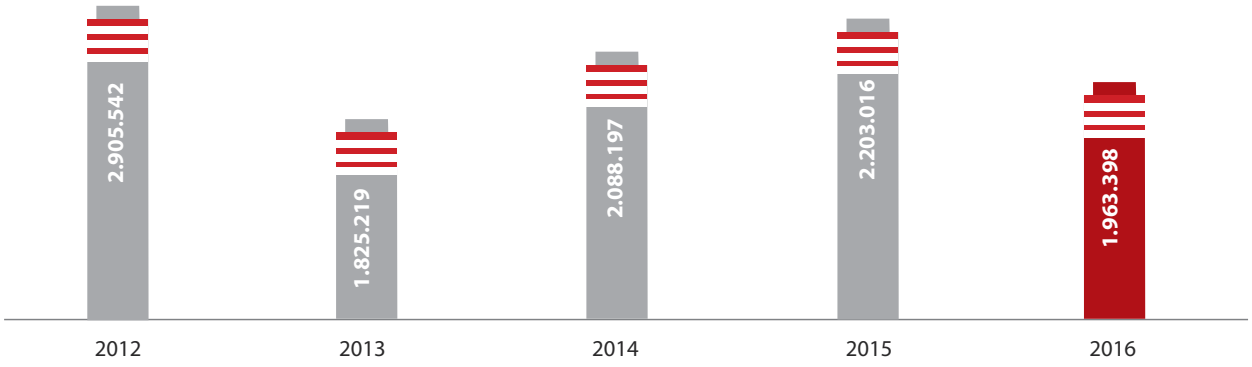

Piutang Pihak Berelasi

Piutan pihak berelasi tahun 2016 sebesar Rp42.134 juta menurun 49,46% dibandingkan tahun 2015 sebesar Rp83.371 juta. Penurunan Piutang Pihak Berelasi ini terutama dipengaruhi oleh penurunan saldo piutang jatuh tempo atas pemberian pinjaman (SHL) kepada Anak Perusahaan, yaitu PT PDG terkait dengan amandemen perpanjangan periode atas pinjaman.

Receivables from Related Party

Receivables from related party in 2016 reached the amount of Rp42,134 million, a 49.46% decrease from 2015 which was Rp83,371 million. The decrease of Receivables from Related Party is mainly influenced by the decrease of matured receivables over shareholder loan (SHL) to Subsidiary, that is PT PDG, in regard to period extension amendment over loans.

Pajak Dibayar di Muka

Pajak Dibayar di Muka tahun 2016 adalah sebesar Rp660.545 juta meningkat 296,22% dibandingkan tahun 2015 sebesar Rp166.710 juta. Peningkatan Pajak Dibayar di Muka ini terutama dipengaruhi pengenaan Pajak penghasilan badan perusahaan dan PPN.

Prepaid Taxes

Prepaid Taxes in 2016 reached the amount of Rp660,545 million, a 296.22% increase from 2015 which was Rp166,710 million. The increase of Prepaid Taxes is mainly influenced by the imposition of company's income tax and Value Added Tax (VAT).

Biaya Dibayar di Muka dan Uang Muka

Biaya Dibayar di Muka dan Uang Muka tahun 2016 adalah sebesar Rp186.875 juta menurun 30,67% dibandingkan tahun 2015 sebesar Rp269.563 juta. Penurunan Biaya Dibayar di Muka dan Uang Muka ini terutama dipengaruhi oleh penurunan uang muka asuransi dan pembangunan pembangkit.

Prepaid Expenses and Advances

Prepaid Expenses and Advances in 2016 reached the amount of Rp186,875 million, a 30.67% decrease to 2015 which was Rp269,563 million. The decrease of Prepaid Expenses and Advances is mainly influenced by the decrease of insurance down payment and generator's construction.

Aset Tidak Lancar

Aset Tidak Lancar Perusahaan terdiri dari Aset Tetap, Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama, Aset Pajak Tangguhan, Piutang Pihak Berelasi, Piutang Lain-lain, Biaya Dibayar di Muka dan Aset Tidak Lancar Lainnya. Aset Tidak Lancar tahun 2016 sebesar Rp194.855.586 juta menurun 1,88% dibandingkan tahun 2015 sebesar Rp198.594.427 juta. Penurunan Aset Tidak Lancar ini terutama dipengaruhi oleh Turunnya aset pajak tangguhan di tahun 2016, terkait pelaksanaan program revaluasi aset yang dilakukan pada tahun 2015.

Non-Current Assets

Company's Non-Current Assets are comprised of Fixed Asset, Investment on Association Entity, and Joint Ventures, Deferred Tax Assets, Receivables from Related Party, Other Receivables, Prepaid Expenses, and Other Non-Current Assets. Non-Current Assets in 2016 reached the amount of Rp194,855,586 million, a 1.88% decrease from 2015 which was Rp198,594,427 million. The decrease of Non-Current Assets is mainly influence by the decrease of Deferred Tax Assets in 2016, in regard to asset revaluation program implementation executed in 2015.

Tabel Aset Tidak Lancar Tahun 2012-2016 (Rp juta)
Table: Non-Current Assets 2012-2016 (Rp million)

Uraian Description	2012	2013	2014	2015	Meningkat/ Menurun (%) Increase/ Decrease (%)	2016
Aset Tetap Fixed Assets	29.448.665	27.430.075	26.804.482	196.745.124	(1,64)	193.520.890
Investasi Pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama Investment on Association Entity and Joint Ventures	54.256	168.850	198.540	203.696	31,11	267.047
Aset Pajak Tangguhan Deferred Tax Assets	2.502	81	27	1.088.283	(99,89)	1.212
Piutang Pihak Berelasi Receivables from Related Party	-	160.401	302.662	395.387	21,74	481.336
Piutang Lain-lain Other Receivables	37.352	26.657	21.765	30.631	11,38	34.116
Biaya Dibayar di Muka Prepaid Expenses	-	-	46.911	20.368	(14,74)	17.366

TINJAUAN KINERJA KEUANGAN
Financial Performance Review

Uraian Description	2012	2013	2014	2015	Meningkat/ Menurun (%) Increase/ Decrease (%)	2016
Aset Tidak Lancar Lain Other Non-Current Assets	100.816	100.814	117.572	110.938	381,01	533.619
Jumlah Tidak Aset Lancar Total of Non-Current Assets	**29.643.591**	**27.886.878**	**27.491.959**	**198.594.427**	**(1,88)**	**194.855.586**

Grafik Aset Tidak Lancar Tahun 2012-2016 (Rp juta)
Graph: Non-Current Asset Year 2012-2016 (in Rp million)

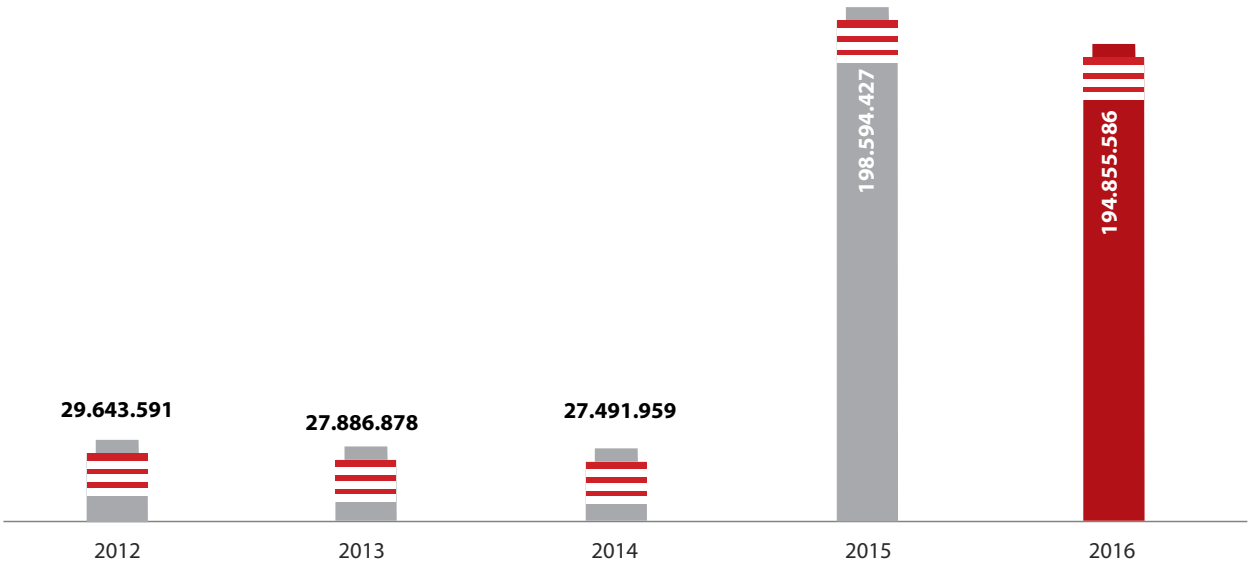

Aset Tetap

Aset Tetap Perusahaan tahun 2016 sebesar Rp193.520.890 juta menurun 1,64% dibandingkan tahun 2015 sebesar Rp196.745.124 juta. Penurunan Aset Tetap ini terutama dipengaruhi penurunan nilai Instalasi dan mesin pembangkit di tahun 2016 sebesar Rp3.513.589 juta.

Fixed Assets

Company's Fixed Assets in 2016 reached the amount of Rp193,520,890 million, a 1.64% decrease compared to 2015 which was Rp196,745,124 million. This decrease is mainly influenced by the decrease of installation and generators value in 2016 in the amount of Rp3,513,589 million.

Tabel Aset Tetap Tahun 2012-2016 (Rp juta)
Table: Fixed Assets 2012-2016 (Rp million)

Uraian Description	2012	2013	2014	2015	Meningkat/ Menurun (%) Increase/ Decrease (%)	2016
Tanah Land	2.505.080	2.520.227	2.524.289	16.313.124	0,01	16.313.495
Bangunan, Waduk, dan Prasarana Buildings, Reservoir and Infrastructure	4.545.565	4.352.764	4.205.647	6.810.717	(2,30)	6.653.919
Instalasi dan mesin pembangkit Installation and Generators	18.562.934	17.045.356	15.340.242	166.829.110	(2,11)	163.315.521
Peralatan Transmisi Transmission Equipment	2.761.989	2.592.576	2.540.106	5.829.775	6,15	6.188.542
Instalasi Telekomunikasi Telecommunication Installation	25.106	31.142	56.262	36.716	6,32	39.035
Peralatan Umum General Equipment	102.074	126.462	64.397	159.234	0,89	160.644
Kendaraan Bermotor Vehicle	8.477	7.952	5.314	3.021	392,22	14.870
Material Cadang Spare parts	162.373	148.302	181.712	164.709	(9,47)	149.117
Lain-lain Others	3.624	3.534	10.627	-	-	-
Instalasi Mesin Pembangkit Generator Installation	378.206	316.875	-	194.215	(31,58)	132.884
Pekerjaan Dalam Pelaksanaan Work in Progress	212.566	279.056	1.851.013	331.041	163,51	872.324
Aset Tidak Digunakan dalam Operasi Unutilized Asset in Operations	180.671	5.829	24.874	73.462	(534,87)	(319.461)
Jumlah Aset Tetap **Total of Fixed Assets**	**29.448.665**	**27.430.075**	**26.804.482**	**196.745.124**	**(1,64)**	**193.520.890**

TINJAUAN KINERJA KEUANGAN
Financial Performance Review

Grafik Aset Tetap Tahun 2012-2016 (Rp juta)
Graph: Fixed Assets 2012-2016 (Rp million)

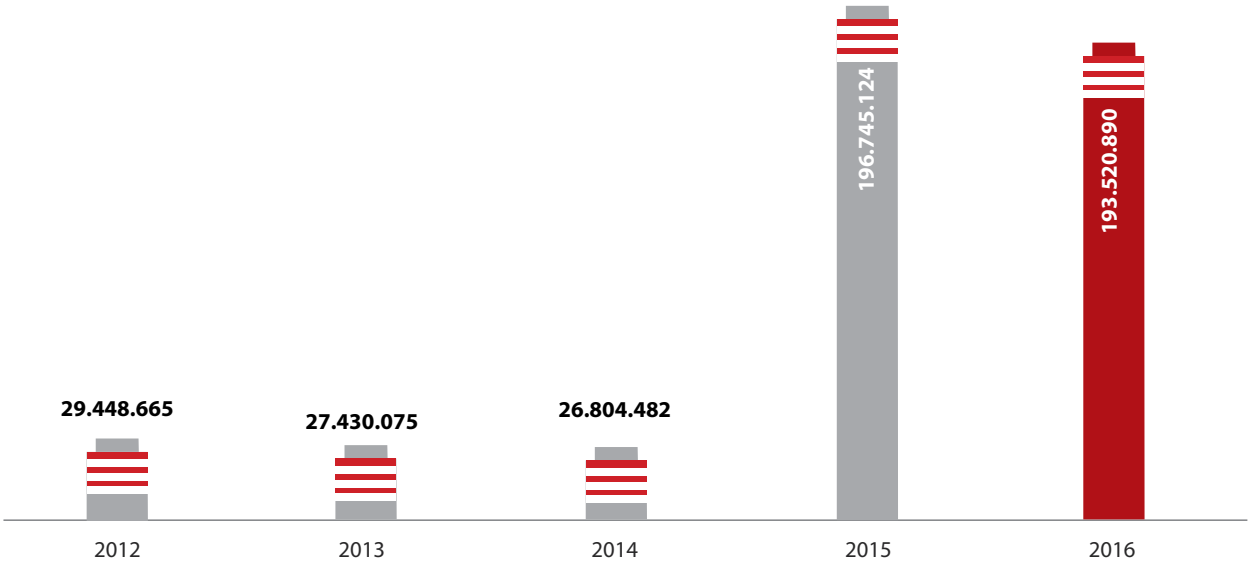

Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama

Investasi Pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama tahun 2016 sebesar Rp267.047 juta meningkat 31,11% dibandingkan tahun 2015 sebesar Rp203.696 juta. Peningkatan Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama ini terutama dipengaruhi oleh penyertaan Indonesia Power pada Perusahaan asosiasi, yaitu PT GCL IT, anak perusahaan PT PIT, pada tahun 2016 dengan kepemilikan saham sebesar 35%.

Investment on Associated Entities and Joint Ventures

Investment on Associated Entities and Joint Ventures in 2016 reached the amount of Rp267,047 million, a 31.11% increase from 2015 which was Rp203,696 million. This increase on Investment on Associated Entities and Joint Ventures is especially influenced by the involvement of Indonesia Power on associated Company, that is PT GCL IT, a subsidiary of PT PIT, in 2016 with 35% of shareholding.

Tabel Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama (Rp juta)
Table: Investment on Associated Entities and Joint Ventures (Rp million)

Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama Associated Entities and Joint Ventures	2016				
	Awal Tahun 2016 Early 2016	Penambahan (Pengurangan) Addition (Reduction)	Deviden Dividend	Bagian atas laba (rugi) Bersih Net Top of Profit (Loss)	Akhir Tahun 2016 The End of 2016
Entitas Asosiasi **Associated Entity**					
PT Indo Pusaka Berau	101.349	-	-	10.249	111.598
Entitas Ventura Bersama **Joint Venture Entity**					
PT Rajamandala Electric Power	102.347	13.447	-	(987)	114.807
PT Perta Daya Gas	-	-	-	-	-
PT GCL Indotenaga	-	42.355	-	(1.713)	40.642
Jumlah **Total**	**203.696**	**56.802**	**-**	**7.549**	**267.047**

Aset Pajak Tangguhan

Aset Pajak Tangguhan tahun 2016 sebesar Rp1.212 juta menurun 99,89% dibandingkan tahun 2015 sebesar Rp1.088.283 juta. Penurunan Aset Pajak Tangguhan ini terutama dipengaruhi oleh revaluasi aset yang telah dijalankan perusahaan pada tahun 2015.

Deferred Tax Assets

Deferred Tax Assets in 2016 reached the amount of Rp1,212 million, a 99.89% decrease from 2015 which was Rp1,088,283 million. The decrease on Deferred Tax Assets is mainly influenced by asset revaluation performed by the Company in 2015.

Piutang Pihak Berelasi

Piutang Pihak Berelasi tahun 2016 sebesar Rp481.336 juta meningkat 21,74% dibandingkan tahun 2015 sebesar Rp395.387 juta. Peningkatan Piutang Pihak Berelasi ini terutama dipengaruhi oleh pemberian pinjaman jangka panjang *shareholder loan* (SHL) kepada anak perusahaan, yaitu PT REP untuk pembiayaan proyek PLTA Sungai Citarum 46,6 MW di Cianjur, Jawa Barat.

Receivables from Related Party

Receivables from Related Party in 2016 reached the amount of Rp481,336 million, a 21.74% increase to 2015 which was Rp395,387 million. The increase on Receivables from Related Party is mainly influenced by granting long term shareholder loan (SHL) to a subsidiary, i.e. PT REP, to fund Citarum River HPP project 46.6 MW in Cianjur, West Java.

TINJAUAN KINERJA KEUANGAN
Financial Performance Review

Biaya Dibayar di Muka

Biaya Dibayar di Muka tahun 2016 sebesar Rp17.366 juta menurun 14,74% dibandingkan tahun 2015 sebesar Rp20.368 juta. Penurunan Biaya Dibayar di Muka ini terutama dipengaruhi oleh penurunan pada premi asuransi dan uang muka pembangunan pembangkit.

Prepaid Expenses

Prepaid Expenses in 2016 reached the amount of Rp17,366 million, a 14.74% decrease from 2015 which was Rp20,368 million. The decrease of Prepaid Expenses is mainly influenced by the decrease of insurance premium and advances on generator's construction.

Aset Tidak Lancar Lain

Aset Tidak Lancar Lain tahun 2016 sebesar Rp553.619 juta meningkat 381,01% dibandingkan tahun 2015 sebesar Rp110.938 juta. Peningkatan Peningkatan Aset Tidak Lancar Lain ini terutama dipengaruhi adanya pelaksanaan beberapa proyek pengembangan usaha, antara lain PLTGU Grati add on dan pembangkit baru PLTU 2x1000 MW di Cilegon, Suralaya.

Other Non-Current Assets

Other Non-Current Assets in 2016 reached the amount of Rp553,619 million, a 381.01% increase to 2015 which was Rp110,938 million. The increase of Other Non-Current Assets is mainly influenced by the implementation of several business development projects, among them Grati add on CCPP and new SPP 2x1000 MW in Cilegon, Suralaya.

Liabilitas

Liabilitas Perusahaan tahun 2016 sebesar Rp7.665.482 juta menurun 35,93% dibandingkan tahun 2015 sebesar Rp11.963.977 juta. Penurunan Liabilitas ini terutama dipengaruhi oleh pembayaran utang pajak revaluasi di tahun 2016.

Liabilities

Company's Liabilities in 2016 reached the amount of Rp7,665,482 million, a 35.93% decrease from 2015 which was Rp11,963,977 million. The decrease of Liability is mainly influenced by payment of revaluation tax payables in 2016.

Tabel Liabilitas Tahun 2012-2016 (Rp juta)
Table: Liabilities 2012-2016 (Rp million)

Uraian Description	2012	2013	2014	2015	Meningkat/ Menurun (%) Increase/ Decrease (%)	2016
Liabilitas Jangka Pendek Short-term Liabilities	4.260.396	3.890.560	3.244.923	9.206.379	(50,53)	4.554.447
Liabilitas Jangka Panjang Long-term Liabilities	4.483.093	4.743.253	5.353.506	2.757.598	12,82	3.111.035
Jumlah Liabilitas Total Liabilities	**8.743.489**	**8.633.813**	**8.598.429**	**11.963.977**	**(35,93)**	**7.665.482**

Grafik Liabilitas Tahun 2012-2016 (Rp juta)
Graph: Liabilities 2012-2016 (Rp million)

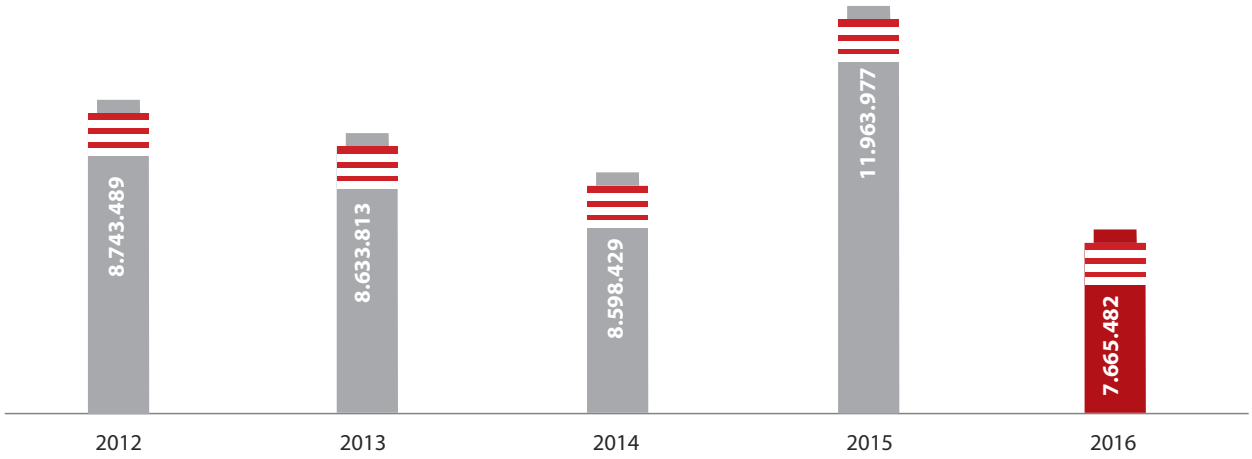

Liabilitas Jangka Pendek

Liabilitas Jangka Pendek Perusahaan terdiri dari Utang Usaha, Utang Sewa Pembiayaan, Utang Lain-lain, Utang Pajak, Biaya yang Masih Harus Dibayar, Utang Pihak Berelasi, dan Liabilitas Imbalan Kerja

Liabilitas Jangka Pendek tahun 2016 sebesar Rp4.554.447 juta menurun 50,53% dibandingkan tahun 2015 sebesar Rp9.206.379 juta. Penurunan liabilitas jangka pendek ini terutama dipengaruhi oleh pembayaran utang pajak revaluasi di tahun 2016.

Short-Term Liabilities

Company's Short-Term Liabilities is comprised of Trade Payable, Lease Liabilities, Other Payables, Tax Payables, Accrued Expenses, Payable to Related Parties, and Employee Benefits Liabilities.

Short-Term Liabilities in 2016 reached the amount of Rp4,554,447 million, a 50.53% decrease from 2015 which was Rp9,206,379 million. The decrease of short-term liabilities is mainly influenced by payment of revaluation tax payables in 2016.

TINJAUAN KINERJA KEUANGAN
Financial Performance Review

Tabel Liabilitas Jangka Pendek Tahun 2012-2016 (Rp juta)
Table: Short-Term Liabilities 2012-2016 (Rp million)

Uraian Description	2012	2013	2014	2015	Meningkat/ Menurun (%) Increase/ Decrease (%)	2016
Utang Usaha Trade Payable	3.612.140	3.295.894	2.798.263	3.098.851	7,66	3.336.147
Utang Sewa Pembiayaan Lease Liabilities	49.030	66.001	-	95.377	12,18	106.991
Utang Lain-lain Other Payables	69.905	6.736	9.026	8.435	(54,69)	3.822
Utang Pajak Tax Payables	286.303	220.760	157.649	5.306.516	(95,26)	251.758
Biaya Masih Harus Dibayar Accrued Expenses	108.443	145.931	134.945	425.995	30,41	555.569
Utang Pihak Berelasi Payable to Related Parties	3.614	9.339	18.435	65.074	(41,92)	37.796
Liabilitas Imbalan Kerja Employee Benefits Liabilities	130.961	145.899	126.605	206.131	27,28	262.364
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek Total of Short-Term Liabilities	**4.260.396**	**3.890.560**	**3.244.923**	**9.206.379**	**(50,53)**	**4.554.447**

Grafik Liabilitas Jangka Pendek Tahun 2012-2016 (Rp juta)
Graph: Short-Term Liabilities 2012-2016 (Rp million)

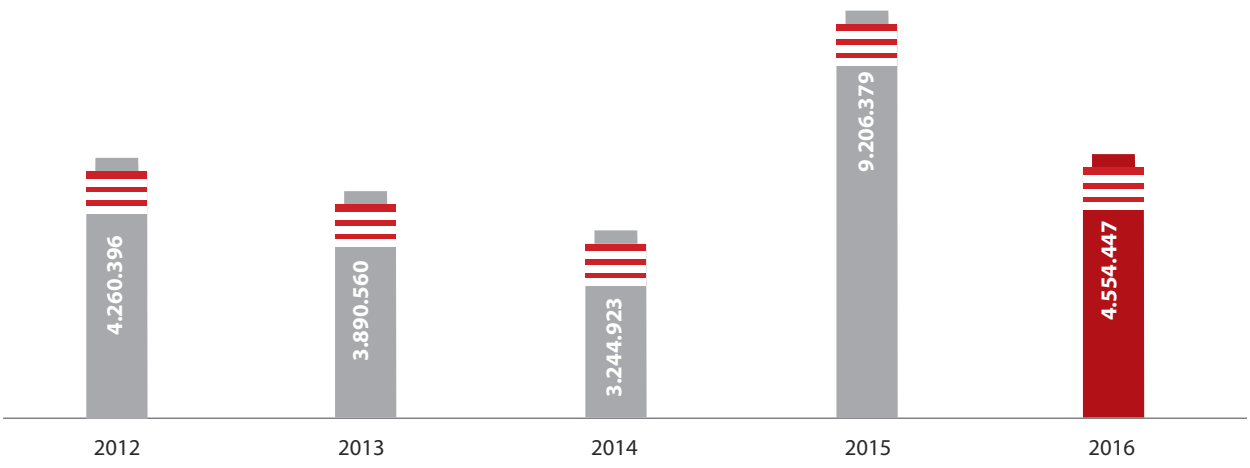

Utang Usaha

Utang Usaha Perusahaan tahun 2016 sebesar Rp3.336.147 juta meningkat 7,66% dibandingkan tahun 2015 sebesar Rp3.098.851 juta. Peningkatan Utang Usaha ini terutama dipengaruhi oleh Kenaikan pada hutang batubara.

Trade Payable

Company's Trade Payable in 2016 reached the amount of Rp3,336,147 million, a 7.66% increase from 2015 which was Rp3,098,851 million. The increase of Trade Payable is mainly influenced by the increase of coal debt.

Utang Sewa Pembiayaan

Utang Sewa Pembiayaan tahun 2016 sebesar Rp106.991 juta meningkat 12,18% dibandingkan tahun 2015 sebesar Rp95.377 juta. Peningkatan Utang Sewa Pembiayaan ini terutama dipengaruhi oleh realisasi pembayaran minimum kepada JO WIKA pada tahun 2016.

Lease Liabilities

Lease Liabilities in 2016 reached the amount of Rp106,991 million, a 12.18% increase from 2015 which was Rp95,377 million. The increase of Lease Liabilities is mainly influenced by minimum payment to JO WIKA in 2016.

Utang Pajak

Utang Pajak tahun tahun 2016 sebesar Rp251.758 juta menurun 95,26% dibandingkan tahun 2015 sebesar Rp5.306.516 juta. Penurunan Utang Pajak di tahun 2016 terutama dipengaruhi oleh realisasi pembayaran pembayaran utang pajak atas revaluasi aset tetap tahun 2015.

Tax Payables

Tax Payables in 2016 reached the amount of Rp251,758 million, a 95.26% decrease from 2015 which was Rp5,306,516 million. The decrease of Tax Payables in 2016 is mainly influenced by tax payables payment of fixed assets revaluation in 2015.

Biaya Masih Harus Dibayar

Biaya yang masih harus dibayar tahun 2016 sebesar Rp555.569 juta meningkat 30,41% dibandingkan tahun 2015 sebesar Rp425.995 juta. Peningkatan Biaya Masih Harus Dibayar ini terutama dipengaruhi oleh kenaikan perhitungan apresiasi kinerja pegawai.

Accrued Expenses

Accrued Expenses in 2016 reached the amount of Rp555,569 million, a 30.41% increase to 2015 which was Rp425,995 million. The increase of Accrued Expenses is mainly influenced by calculation employee's performance appreciation.

Utang Pihak Berelasi

Utang pihak berelasi Jangka Pendek tahun 2016 sebesar Rp37.796 juta menurun 41,92% dibandingkan tahun 2015 sebesar Rp65.074 juta. Penurunan Utang Pihak Berelasi ini terutama dipengaruhi oleh penurunan hutang kepada PLN Wilayah.

Payables to Related Parties

Short-Term Payables to Related Parties in 2016 reached the amount of Rp37,796 million, a 41.92% decrease from 2015 which was Rp65,074 million. The decrease of Short-Term Payables to Related Parties is mainly influenced by the decrease of debt to Regional PLN.

TINJAUAN KINERJA KEUANGAN
Financial Performance Review

Liabilitas Imbalan Kerja

Liabilitas Imbalan Kerja tahun 2016 sebesar Rp262.364 juta meningkat 27,28% dibandingkan tahun 2015 sebesar Rp206.131 juta. Peningkatan liabilitas Imbalan Kerja ini terutama dipengaruhi oleh perubahan asumsi perhitungan aktuaria.

Employee Benefits Liabilities

Employee Benefits Liabilities in 2016 reached the amount of Rp262,364 million, a 27.28% increase to 2015 which was Rp206,131 million. The increase of Employee Benefits Liabilities is mainly influenced by the change on assumption actuarial calculations.

Liabilitas Jangka Panjang

Liabilitas jangka panjang Perusahaan terdiri dari Pinjaman jangka panjang dan penyisihan imbalan kerja pekerja. Libilitas jangka panjang tahun 2016 sebesar Rp3.111.035 juta meningkat 12,82% dibandingkan tahun 2015 sebesar Rp2.757.598 juta. Peningkatan liabilitas jangka panjang ini terutama dipengaruhi oleh kenaikan liabilitas pajak tangguhan yang disebabkan oleh selisih nilai buku aset setelah proses revaluasi aset tetap.

Long-Term Liabilities

Company's long-term liabilities is comprised of long-term loan and allowance for employee benefits. Long-term liabilities in 2016 reached the amount of Rp3,111,035 million, a 12.82% increase to 2015 which was Rp2,757,598 million. The increase of long-term liabilities is mainly influenced by the increase of deferred tax liability that is caused by the difference in asset book value after fixed assets revaluation process.

Tabel Liabilitas Jangka Panjang Tahun 2012-2016 (Rp juta)
Table: Long-Term Liabilities 2012-2016 (Rp million)

Uraian Description	2012	2013	2014	2015	Meningkat/ Menurun (%) Increase/ Decrease (%)	2016
Liabilitas Pajak Tangguhan Deferred Tax Liabilities	2.708.772	2.689.532	2.385.788	30.389	1259,59	413.167
Utang sewa pembaiayaan Lease Liabilities	397.478	398.391	-	256.731	(43,54)	144.949
Utang Pihak Berelasi Payable to Related Parties	8.150	5.433	3.526	2.717	-	-
Liabilitas Imbalan Kerja Allowance for Employee Benefits	1.368.693	1.649.897	2.964.192	2.467.761	3,54	2.555.019
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang Total of Long-Term Liabilities	**4.483.093**	**4.743.253**	**5.353.506**	**2.757.598**	**12,82**	**3.111.035**

Grafik Liabilitas Jangka Panjang Tahun 2012-2016 (Rp juta)
Graph: Long-Term Liabilities 2012-2016 (Rp million)

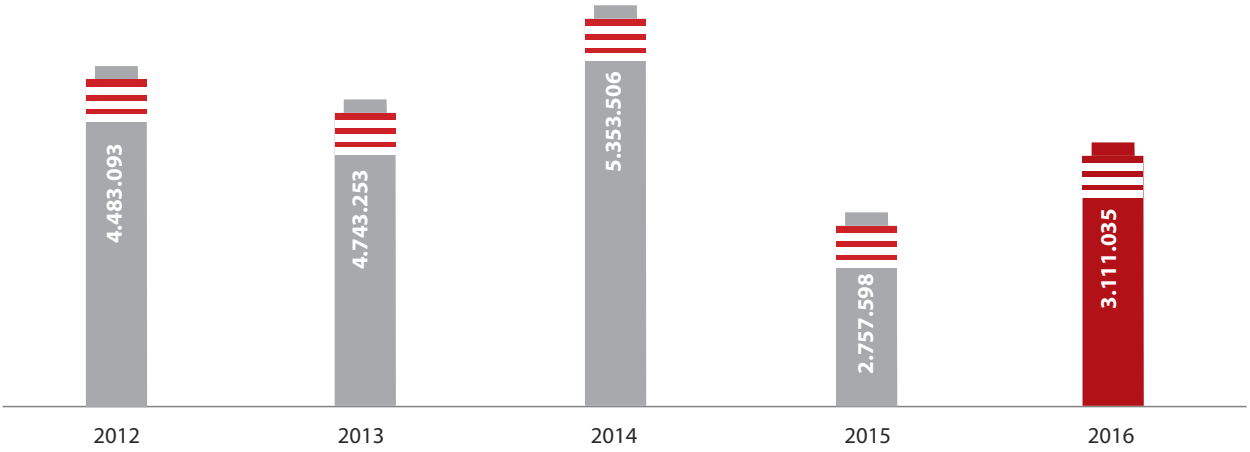

Ekuitas

Total Ekuitas Perusahaan tahun 2016 sebesar Rp213.222.542 juta menurun 0,71% dibandingkan tahun 2015 sebesar Rp214.756.271 juta. Penurunan Ekuitas ini terutama dipengaruhi oleh pembayaran deviden, dimana perolehan laba tahun 2016 lebih rendah dari tahun 2015.

Equity

Company's Total Equity in 2016 reached the amount of Rp213,222,542 million, a 0.71% decrease from 2015 which was Rp214,756,271 million. The decrease of Equity is mainly influenced by dividend payment, which profit in 2016 that was not comparable to income for the year in 2015.

TINJAUAN KINERJA KEUANGAN
Financial Performance Review

Tabel Ekuitas Tahun 2012-2016 (Rp juta)
Table: Equity 2012-2016 (Rp million)

Uraian Description	2012	2013	2014	2015	Meningkat/ Menurun (%) Increase/ Decrease (%)	2016
Modal Capital						
Modal Ditempatkan dan Disetor Issued Capital and Paid-Up Capital	2.607.824	2.607.824	2.607.824	2.607.824	-	2.607.824
Tambahan Modal Disetor Additional Paid-Up Capital	5.503.726	5.503.726	5.503.726	5.503.726	0,18	5.513.843
Saldo Laba Retain Earnings						
Ditentukan Penggunaannya Appropriated	2.122.213	2.122.213	2.122.213	2.122.213	-	2.122.213
Tidak ditentukan penggunaannya Not Appropriated	34.467.503	34.577.245	35.224.144	38.313.162	(3,45)	36.990.310
Penghasilan Komprehensif Lain Other Comprehensive Income	-	-	(848.223)	166.166.282	(0,13)	165.944.572
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk Equity attributable to owners of the parent	-	-	44.609.684	214.731.207	(0,72)	213.178.762
Kepentingan Non Pengendali Non-controlling interests	112.625	35.671	39.945	43.064	1,66	43.780
Jumlah Ekuitas Total Equity	**44.813.891**	**44.846.679**	**44.649.629**	**214.756.271**	**(0,71)**	**213.222.542**

Grafik Ekuitas Tahun 2012-2016 (Rp juta)
Graph: Equity 2012-2016 (Rp million)

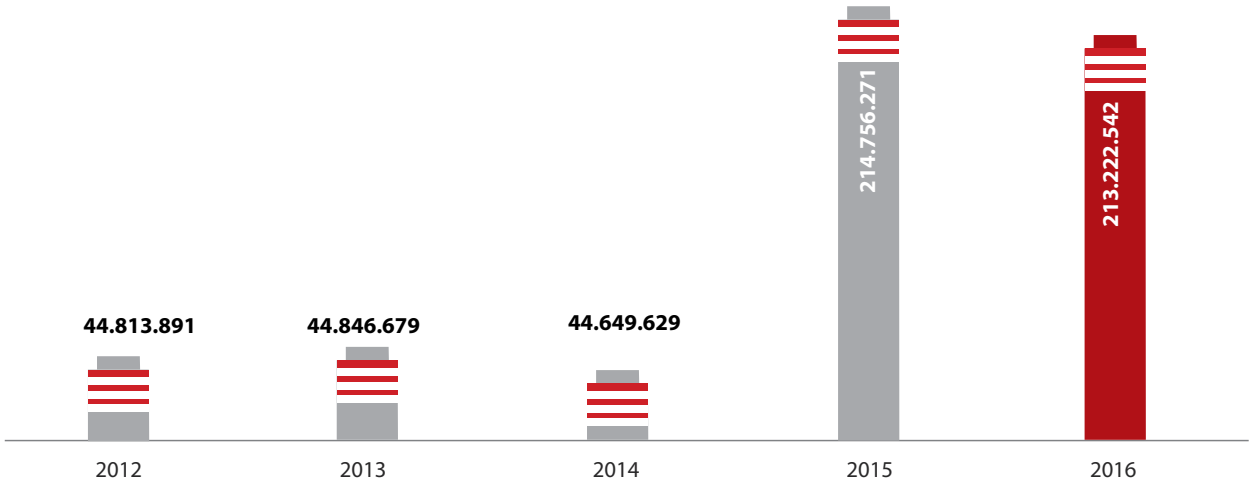

Modal Ditempatkan dan Disetor

Modal Ditempatkan dan Disetor Perusahaan tahun 2016 sebesar Rp2.607.824 juta tidak mengalami perubahan dari tahun-tahun sebelumnya.

Issued and Paid-Up Capital

Company's Issued and Paid-Up Capital in 2016 reached the number of Rp2,607,824 million with no significant changes over the previous years.

Tambahan Modal Disetor

Tambahan Modal Disetor Perusahaan tahun 2016 sebesar Rp5.513.843 juta mengalami kenaikan 0,18% dibandingkan tahun 2015 sebesar Rp5.503.726 juta. Hal ini disebabkan oleh partisipasi Indonesia Power dan Anak Perusahaan dalam pengampunan pajak sebesar Rp10.244 juta.

Additional Paid-Up Capital

Company's Additional Paid-up Capital in 2016 reached the amount of Rp5,513,843 million, an 0.18% increase from 2015 which was Rp5,503,726 million. This increase was due to the participation of Indonesia Power and Subsidiaries in terms of tax amnesty in the amount of Rp10,244 million.

Saldo Laba

Saldo laba Perusahaan tahun 2016 sebesar Rp39.112.523 juta menurun 3,27% dibandingkan tahun 2015 sebesar Rp40.435.375 juta. Penurunan Saldo Laba ini terutama dipengaruhi oleh pembayaran atas deviden tahun 2016 sebesar Rp4.207.868 juta.

Retain Earnings

Company's Retain Earnings in 2016 reached the amount of Rp39,112,523 million, a 3.27% decrease compared to 2015 which was Rp40,435,375 million. This decrease is mainly influenced by dividend payment in 2016 in the amount of Rp4,207,868 million.

TINJAUAN KINERJA KEUANGAN
Financial Performance Review

Ekuitas yang dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk

Ekuitas yang dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk tahun 2016 sebesar Rp213.178.762 juta menurun 0,72% dibandingkan tahun 2015 sebesar Rp214.713.207 juta. Penurunan ini terutama dipengaruhi pembayaran atas deviden tahun 2016 sebesar Rp4.207.868 juta.

Ekuitas yang dapat Diatribusikan Kepentingan Non Pengendali

Ekuitas yang dapat Diatribusikan Kepentingan Non Pengendali tahun 2016 sebesar Rp43.780 juta mengalami peningkatan sebesar 1,66% dibandingkan tahun 2015 sebesar Rp43.064 juta. Kenaikan ini dikarenakan adanya kenaikan dari saldo laba akibat perolehan laba tahun berjalan.

Equity Attributable to Owners of the Parent

Equity Attributable to Owners of the Parent in 2016 reached the amount of Rp213,178,762 million, a 0.72% decrease compared to 2015 which was Rp214,713,207 million. This decrease is mainly influenced by dividend payment in 2016 in the amount of Rp4,207,868 million.

Equity Attributable to Non-Controlling Interests

Equity Attributable to Non-Controlling Interests in 2016 reached the amount of Rp43,780 million, a 1.66% increase compared to 2015 which was Rp43,064 million. This increase is influenced by the increase in retain earnings as an impact from the balance of income for the year.

LABA RUGI KOMPREHENSIF
Comprehensive Profit or Loss

Pada tahun 2016 Perusahaan membukukan Laba Tahun Berjalan sebesar Rp2.886.704 juta menurun 38,22% dibandingkan dengan tahun 2015 sebesar Rp4.672.522 juta. Penurunan ini terutama dipengaruhi oleh kenaikan beban pajak tangguhan sebagai dampak revaluasi aset tahun 2015, sehingga perusahaan di tahun 2016 mengalami rugi fiskal.

In 2016, the Company has accumulated Income for the Year amounted to Rp2,886,704 million, a decrease of 38.22% compared to 2015, which was Rp4,672,522 million. The decrease is mainly affected by increase in deferred tax expense as the result of asset revaluation in 2015, hence the Company suffered a fiscal loss in 2016.

LABA RUGI KOMPREHENSIF
Comprehensive Profit or Loss

Tabel Laba Rugi Tahun 2012-2016 (Rp juta)
Table: Profit or Loss 2012-2016 (Rp million)

Uraian Description	2012	2013	2014	2015	Meningkat/ Menurun (%) Increase/ Decrease (%)	2016
Pendapatan Usaha Revenues	32.472.481	33.531.493	35.723.617	32.020.186	14,63	36.705.954
Beban Usaha Operating Expenses	30.621.358	31.514.317	33.527.047	29.895.661	9,08	32.610.030
Laba Usaha Operating Income	1.851.123	2.017.176	2.196.570	2.124.525	92,79	4.095.924
Penghasilan (Beban) Lain-lain Other income (expenses)	34.763	(129.950)	73.881	(34.982)	(99,51)	(171)
Laba Sebelum Pajak Income Before Tax	1.885.886	1.887.226	2.270.451	2.098.543	95,17	4.095.753
Manfaat/ Beban Pajak Tax benefit/expense	(619.142)	(644.756)	(623.219)	2.582.979	(146.81)	(1.209.049)
Laba Tahun Berjalan Income for the Year	1.266.744	1.242.470	1.647.232	4.672.522	(38,22)	2.886.704
Laba yang Dapat Diatribusikan Kepada: Income for the year Attributable to:						
Pemilik Entitas Induk Owners of the parent	1.255.981	1.240.108	1.642.422	4.668.403	(38,20)	2.885.017
Kepentingan Non Pengendali Non-controlling Interests	10.763	2.362	4.810	4.119	(59,04)	1.687
Laba Tahun Berjalan Income for the Year	1.266.744	1.242.470	1.647.232	4.672.522	(38,22)	2.886.704

Uraian Description	2012	2013	2014	2015	Meningkat/ Menurun (%) Increase/ Decrease (%)	2016
Total Penghasilan Komprehensif Lain yang Dapat Diatribusikan Kepada: Other Comprehensive Income Attributable to:						
Pemilik Entitas Induk Owners of the parent	1.255.981	1.240.108	1.472.715	171.682.908	(98,45)	2.663.307
Kepentingan Non Pengendali Non-controlling Interests	10.763	2.362	4.810	4.119	(59,04)	1.687
Total Penghasilan Lain Other Comprehensive Income	-	-	1.477.525	171.687.027	(98,45)	2.664.994
Laba Per Lembar Saham (Rp nilai Penuh) Earnings per Share (in Rupiah full amount)	241	238	315	895	(38,21)	553

Grafik Laba Tahun Berjalan Tahun 2012-2016 (Rp juta)

Graphic: Income for the Year 2012-2016 (Rp million)

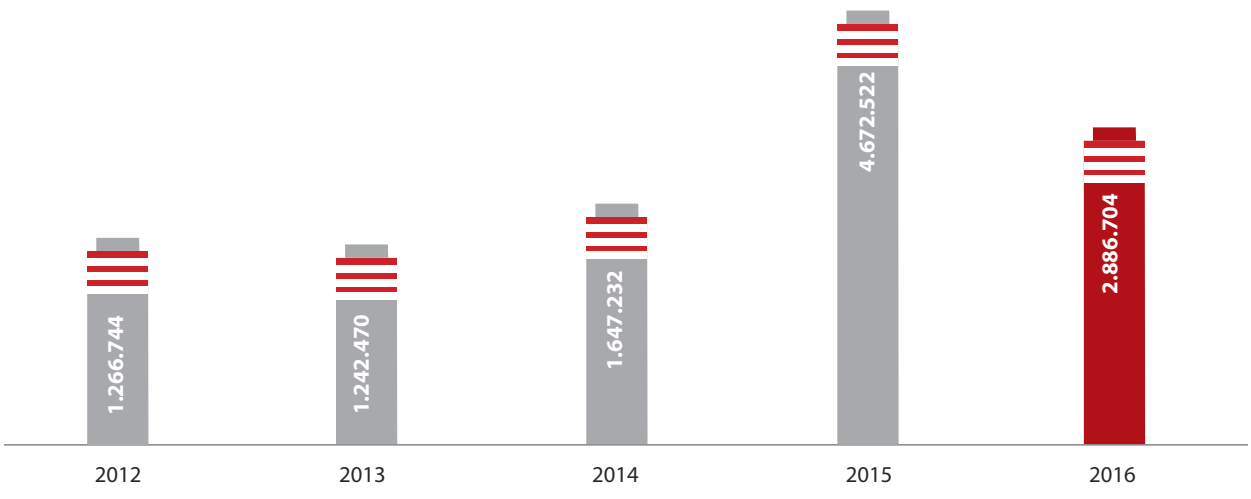

LABA RUGI KOMPREHENSIF
Comprehensive Profit or Loss

Pendapatan Usaha

Pendapatan Usaha pada tahun 2016 sebesar Rp36.705.954 juta, meningkat 14,63% dibandingkan tahun 2015 sebesar Rp32.020.186 juta. Peningkatan Pendapatan Usaha ini terutama dipengaruhi oleh kenaikan tarif pendapatan penjualan listrik dan pendapatan jasa O&M.

Revenues

The revenues in 2016 amounted to Rp36,705,954 million, an increase of 14.63% compared to 2015, which was Rp32,020,186 million. The increase in Revenues is influenced by the increase in tariff of electricity sales and O&M services revenues.

Tabel Pendapatan Usaha Tahun 2012-2016 (Rp juta)
Table: Revenues 2012-2016 (Rp million)

Uraian Description	2012	2013	2014	2015	Meningkat/ Menurun (%) Increase/ Decrease (%)	2016
Penjualan Tenaga Listrik Electricity Sales	31.852.551	32.933.050	34.828.754	30.680.909	12,46	34.504.119
Pendapatan O&M lain-lain O&M Revenues and others	619.930	598.443	894.863	1.339.277	64,40	2.201.835
Jumlah Pendapatan Usaha **Total Revenues**	**34.472.481**	**33.531.493**	**35.723.617**	**32.020.186**	**14,63**	**36.705.954**

Grafik Pendapatan Usaha Tahun 2012-2016 (Rp juta)
Graph: Revenues 2012-2016 (Rp million)

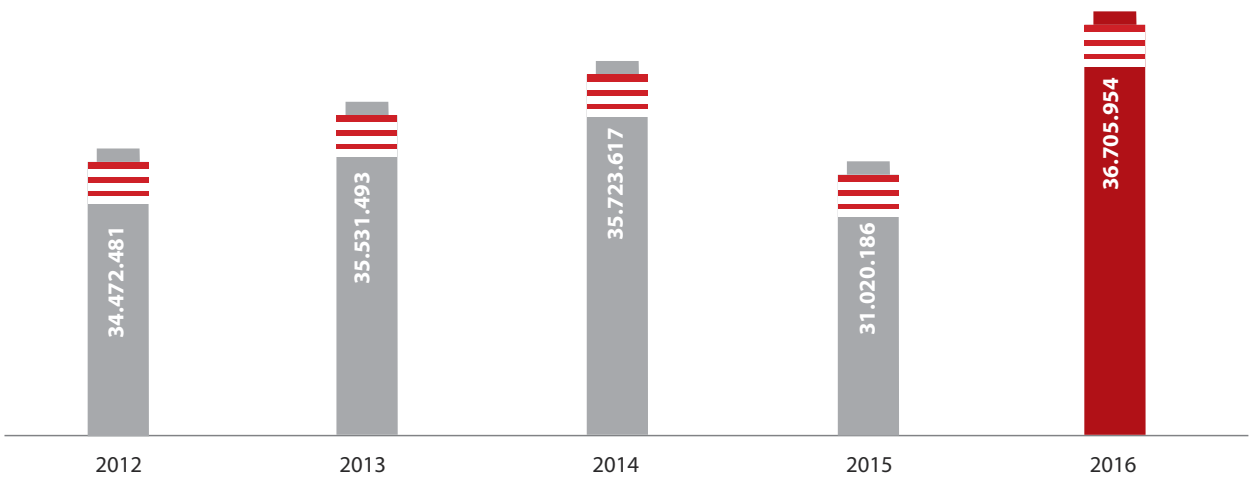

Beban Usaha

Beban Usaha tahun 2016 adalah sebesar Rp32.610.030 juta meningkat 9,08% dibandingkan dengan tahun 2015 sebesar Rp29.895.661 juta. Peningkatan beban usaha ini terutama dipengaruhi oleh kenaikan biaya penyusutan sebagai dampak revaluasi aset tetap pada tahun 2015 serta beban jasa O&M seiring bertambahnya pengelolaan jumlah Unit Jasa Pembangkitan.

Operating Expenses

The Operating Expenses in 2016 amounted to Rp32,610,030 million, an increase of 9.08% compared to 2015, which was Rp29,895,661 million. The increase in operating expenses is influenced by the increase of depreciation expense as an impact of fixed asset revaluation in 2015, as well as O&M service expenses in line with the increase of Generating Service Unit number.

Tabel Beban Usaha Tahun 2012-2016 (Rp juta)
Table: Operating Expenses 2012-2016 (Rp million)

Uraian Description	2012	2013	2014	2015	Meningkat/ Menurun (%) Increase/ Decrease (%)	2016
Bahan Bakar dan Pelumas Fuel and Lubricants	24.265.017	24.688.326	26.543.914	22.431.963	(1,98)	21.987.360
Penyusutan Aset Tetap Depreciation of Fixed Assets	2.704.914	2.726.082	2.674.160	2.789.803	72,31	4.807.373
Pemeliharaan Maintenance	1.862.980	2.112.624	2.080.842	2.441.127	51,05	3.687.470
Kepegawaian Employment	1.233.881	1.380.156	1.337.719	1.760.602	(1,07)	1.741.670
Pembelian istrik dan Sewa Purchase and Lease of Electricity	309.755	321.143	612.366	113.865	(71,20)	32.789
Lain-lain Others	244.811	285.986	278.046	358.301	(1,38)	353.368
Jumlah Beban Usaha Total Operating Expenses	**30.621.358**	**31.514.317**	**33.527.047**	**29.895.661**	**9,08**	**32.610.030**

LABA RUGI KOMPREHENSIF
Comprehensive Profit or Loss

Grafik Beban Usaha Tahun 2012-2016 (Rp juta)
Graph: Operating Expenses 2012-2016 (Rp million)

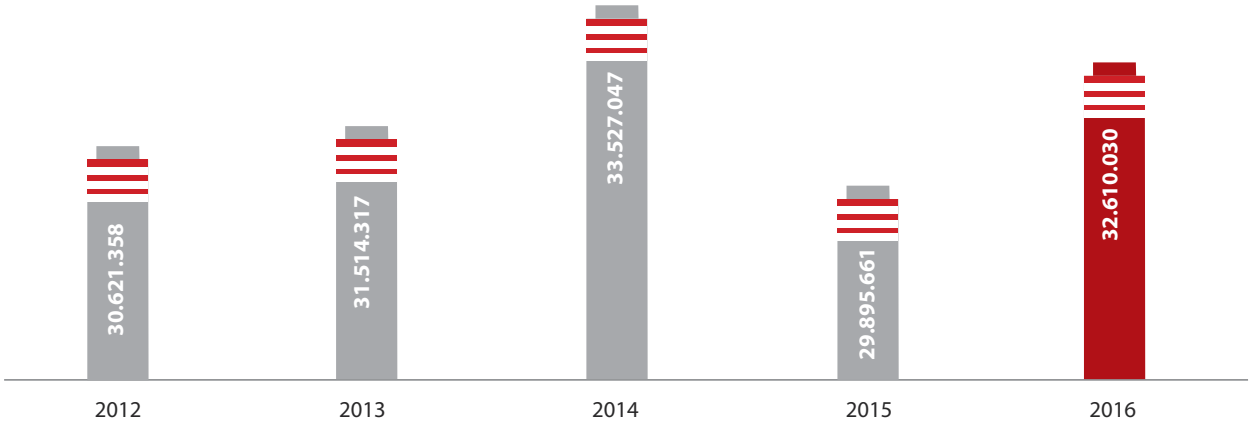

Laba Sebelum Pajak

Laba Sebelum Pajak tahun 2016 sebesar Rp4.095.753 juta meningkat 95,17% dibandingkan tahun 2015 sebesar Rp2.089,543 juta. Peningkatan Laba sebelum pajak ini terutama disebabkan kenaikan pendapatan usaha terutama pendapatan atas penjualan listrik yang lebih tinggi dari kenaikan biaya operasional perusahaan.

Income Before Tax

The income before tax in 2016 amounted to Rp4,095,753 million, an increase of 95.17% compared to 2015, which was Rp2,098,543 million. The increase in income before tax is mainly influenced by the increase of revenues, especially in the electricity sales revenues that is higher than the increase of operating expenses of the company.

Manfaat/Beban Pajak

Manfaat/Beban Pajak tahun 2016 Laba sebesar (Rp1.209.049) juta menurun 146,81% dibandingkan tahun 2015 sebesar Rp2.582.979 juta. Penurunan Manfaat/Beban Pajak ini terutama disebabkan oleh adanya rugi fiskal di tahun 2016 sebagai dampak dari revaluasi aset tetap pada tahun 2015.

Tax Benefit/Expense

Tax Benefit/Expense in 2016 amounted to Rp1,209,049 million, a decline of 146.81% compared to 2015, which was Rp2,582,979 million. The decline in Tax Benefit/Expense is caused by fiscal loss in 2016 as a result of fixed assets revaluation in 2015.

Laba Tahun Berjalan

Laba Tahun berjalan tahun 2016 sebesar Rp2.886.704 juta menurun 38,22% dibandingkan tahun 2015 sebesar Rp4.672.522 juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan adanya manfaat pajak tangguhan atas revaluasi aset tetap di Tahun 2015, dimana pada tahun 2016 tidak dilakukan revaluasi aset tetap.

Income for the Year

Income for the Year in 2016 amounted to Rp2,886,704 million, a decrease of 38.22% compared to 2015, which was Rp4,672,522 million. The decrease was due to the deferred tax benefit on the revaluation of fixed assets in 2015, which was not conducted in 2016.

Laba Per Saham

Laba per saham tahun 2016 sebesar Rp553 menurun 38,21% dibandingkan tahun 2015 sebesar Rp895. Penurunan Laba Per Saham ini merupakan dampak dari revaluasi aset tetap tahun 2015, sehingga perolehan laba bersih naik signifikan pada tahun 2015.

Earnings Per Share

Earnings per share in 2016 amounted to Rp553, a decline of 38.21% compared to 2015, which was Rp895. The decline in earnings per share is influenced by the fixed assets revaluation in 2015, hence the net income increased significantly in 2015.

LAPORAN ARUS KAS
Statement of Cash Flows

Arus Kas terdiri dari aktivitas operasional, aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan. Kas dan setara kas Perusahaan pada tahun 2016 mengalami peningkatan sebesar 67,43% menjadi Rp1.500.820 juta dari tahun 2015 sebesar Rp896.378 juta. Hal ini terutama dipengaruhi oleh adanya pembayaran dari pihak berelasi atas pembelian tenaga listrik pada akhir tahun.

Cash Flows consist of operating, investing, and financing activities. Cash and cash equivalents of the Company in 2016 increased by 67.43% or Rp1,500,820 million from 2015, which was Rp896,378 million. This is mainly influenced by the payments from related parties related to the purchase of electricity at the end of the year.

Tabel Arus Kas Tahun 2012-2016 (Rp juta)
Table: Cash Flows 2012-2016 (Rp million)

Uraian Description	2012	2013	2014	2015	Meningkat/ Menurun (%) Increase/ Decrease (%)	2016
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi Net Cash Flow from Operating Activities	1.176.548	1.301.994	1.930.218	1.851.031	48,46	2.747.954
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Net Cash Flow from Investing Activities	(809.416)	(1.122.531)	(2.456.150)	(1.324.078)	55,42	(2.057.923)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan Net Cash Flow from Financing Activities	(3.445)	(600)	(600)	(77.855)	9,24	(85.048)
Kenaikan/ (Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas Increase/Decrease of Net Cash and Cash Equivalents	**363.687**	**178.863**	**(526.532)**	**449.098**	**34,71**	**604.963**
Saldo Kas dan Setara Kas Awal Tahun Cash and Cash Equivalents Balance in the Beginning of the Year	**456.592**	**820.279**	**972.149**	**445.617**	**101,15**	**896.378**
Saldo Kas dan Setara Kas Akhir Tahun Cash and Cash Equivalents Balance at the End of the Year	**820.279**	**972.149**	**445.617**	**896.378**	**67,43**	**1.500.820**

LAPORAN ARUS KAS
Statement of Cash Flows

Grafik Saldo Kas dan Setara Kas Tahun 2012-2016 (Rp juta)
Graph: Operational Cash and Cash Equivalents Balance 2012-2016 (Rp million)

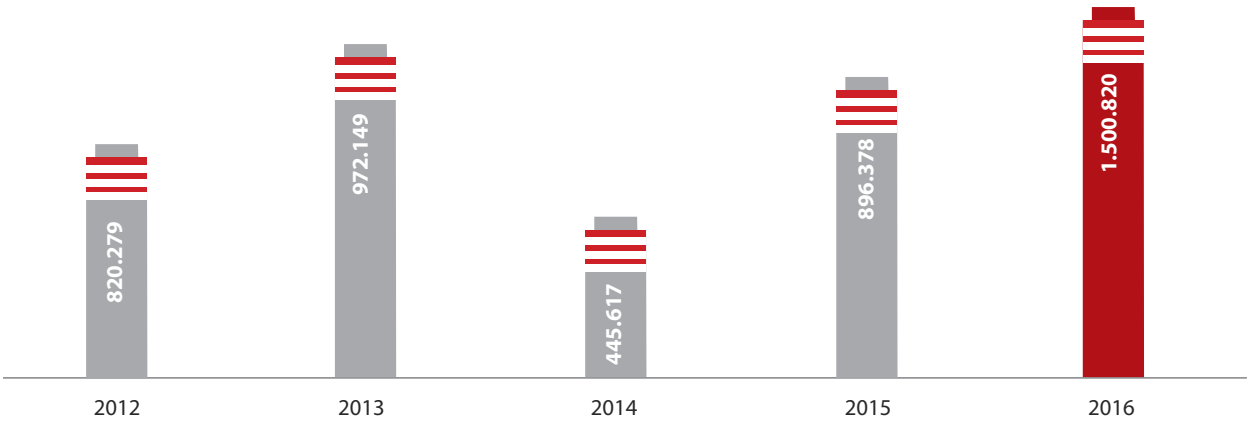

Kas Netto dari Aktivitas Operasi

Kas Neto dari Aktivitas Operasi tahun 2016 sebesar Rp2.747.954 juta meningkat 48,46% dibandingkan tahun 2015 sebesar Rp1.851.031 juta. Peningkatan ini terutama dipengaruhi oleh adanya pembayaran dari pihak berelasi atas pembelian tenaga listrik pada akhir tahun, sementara pembayaran kepada pemasok mengalami kendala dikarenakan perubahan amandemen dan ketidaklengkapan berkas tagihan.

Net Cash from Operating Activities

Net Cash from Operating Activities in 2016 is amounted to Rp2,747,954 million, an increase of 48.46%, compared to 2015 which was Rp1,851,031 million. This increase was influenced by the payments from related parties related to the purchase of electricity at the end of the year. Meanwhile, payments to suppliers are constrained due to the amendment changes and incomplete billing files.

Tabel Kas diperoleh dari Aktivitas Operasi Tahun 2012-2016 (Rp juta)
Table: Cash Provided by Operating Activities 2012-2016 (Rp million)

Uraian Description	2012	2013	2014	2015	Meningkat/ Menurun (%) Increase/ Decrease (%)	2016
Penerimaan dari pelanggan Cash receipts from customer	15.437.935	18.036.733	17.142.998	20.466.429	12,40	23.003.563
Pembayaran kepada pemasok dan karyawan Cash paid to suppliers and employees	(13.661.682)	(16.017.699)	(14.391.514)	(17.956.628)	10,71	(19.879.618)
Kas dihasilkan dari operasi Cash provided by operating activities	1.812.252	2.019.034	2.751.484	2.509.801	24,47	3.123.945
Penerimaan bunga Interest received	-	-	-	-	-	56.329
Penerimaan restitusi pajak penghasilan Recovered from Income Tax	742	-	-	-	-	(211)
Pembayaran pajak penghasilan Income tax paid	(636.447)	(717.040)	(821.266)	(658.770)	34,41	(432.109)
Total Kas diperoleh dari Aktivitas Operasi **Total Cash Provided by Operating Activities**	**1.176.548**	**1.301.994**	**1.930.218**	**1.851.031**	**48,46**	**2.747.954**

LAPORAN ARUS KAS
Statement of Cash Flows

Kas Neto dari Aktivitas Investasi

Kas neto dari aktivitas investasi tahun 2016 sebesar (Rp2.057.923) juta meningkat 55,42% dibandingkan tahun 2015 sebesar (Rp1.324.078) juta. Peningkatan ini terutama dipengaruhi oleh pembelian aset tetap.

Net Cash from Investing Activities

Net Cash from the Investing Activities in 2016 is amounted to Rp2,057,923 million, an increase of 55.42%, compared to 2015 which was Rp1,324,078 million. This increase is influenced by the purchase of fixed assets.

Tabel Kas digunakan untuk Aktivitas Investasi Tahun 2012-2016 (Rp juta)
Table: Cash Used in Investing Activities 2012-2016 (Rp million)

Uraian Description	2012	2013	2014	2015	Meningkat/ Menurun (%) Increase/ Decrease (%)	2016
Perolehan aset tetap Acquisition of property, plant and equipment	(768.461)	(951.913)	(2.411.931)	(1.357.788)	44,78	(1.965.818)
Pemberian pinjaman kepada pihak berelasi Loans to related parties	-	(155.757)	(38.537)	-	-	(90.174)
Penerimaan kembali dari pinjaman kepada pihak berelasi Receipts of payments from loan to related parties	-	-	-	31.383	28,81	40.424
Penempatan investasi kepada entitas asosiasi Placement of investments to associates	(50.907)	(44.586)	(36.460)	-	-	(42.355)
Penerimaan bunga Interest received	17.704	29.725	28.718	-	-	-
Penerimaan dividen dari entitas asosiasi Dividend received from associate	(7.752)	-	2.060	2.327	-	-
Kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi Net cash used in investing activities	**(809.416)**	**(1.122.531)**	**(2.456.150)**	**(1.324.078)**	**55,42**	**(2.057.923)**

Kas Neto dari Aktivitas Pendanaan

Kas neto dari aktivitas pendanaan tahun 2016 sebesar (Rp85.048) juta meningkat 6,25% dibandingkan tahun 2015 sebesar (Rp77.855) juta. Peningkatan ini terutama dipengaruhi oleh peningkatan deviden dari PT Artha Daya Coalindo, dan kenaikan utang sewa pembiayaan dampak ISAK 8 atas Pembelian tenaga listrik PLTD Pesanggaran 50 MW.

Net Cash from Financing Activities

Net Cash from the Financing Activities in 2016 is amounted to Rp85,048 million, an increase of 6.25%, compared to 2015 which was Rp77,855 million. The increase is influenced by the increase in dividends from PT Artha Daya Coalindo, and the increase in debt financing for the impact of ISAK 8 on the Purchase of Electricity of Pesanggaran 50 MW DPP.

Tabel Kas digunakan untuk Aktivitas Pendanaan Tahun 2012-2016 (Rp juta)
Table: Cash Used in Financing Activities 2012-2016 (Rp million)

Uraian Description	2012	2013	2014	2015	Meningkat/ Menurun (%) Increase/ Decrease (%)	2016
Pembayaran deviden kepada kepentingan non-pengendali Dividend payment to non-controlling interests	(3.445)	(600)	(600)	(1.000)	-	(1.098)
Pembayaran utang sewa pembiayaan Payment of lease liabilities	-	-	-	(76.855)	(9,23)	(83.950)
Kas bersih digunakan untuk Aktivitas Pendanaan **Net Cash Used in Financing Activities**	**(3.445)**	**(600)**	**(600)**	**(77.855)**	**(9,24)**	**(85.048)**

KEMAMPUAN MEMBAYAR UTANG, KOLEKTIBILITAS PIUTANG DAN RASIO KEUANGAN LAINNYA

Solvency, Receivables Collectability, and Other Financial Ratios

Kemampuan Membayar Utang

Penilaian atas kemampuan Perusahaan dalam membayar utangnya dapat ditunjukan dengan indikator rasio solvabilitas dan likuiditas sebagaimana dijelaskan sebagai berikut

Solvency

Assessment on the Company's capability to pay its debt is demonstrated through the solvability ratio and liquidity ratio indicators as follow.

Rasio Solvabilitas

Rasio solvabilitas digunakan untuk melihat kemampuan Perusahaan membayar kewajiban jangka panjang maupun seluruh utangnya. Rasio ini terdiri dari *Debt to Total Assets Ratio* (Rasio Utang) dan *Debt to Total Equity Ratio* (Rasio Utang terhadap Modal). Semakin kecil nilai rasionya menunjukkan semakin kecil kewajiban yang harus dipenuhi oleh Perusahaan kepada pihak lain. Rasio solvabilitas Perusahaan ditunjukkan dalam tabel berikut.

Solvability Ratio

Solvability ratio is demonstrating the Company's capability to pay its liabilities (long-term) or its debt. The ratio comprises of Debt to Total Assets Ratio and Debt to Total Equity Ratio. The smaller the ratio, the smaller the liabilities that need to be fulfilled by the Company to other parties. The Company's solvability ratio is shown in the following table.

Tabel Rasio Solvabilitas Tahun 2012-2016 (%)
Table: Solvability Ratio 2012-2016 (%)

Uraian Description	2012	2013	2014	2015	2016
Rasio Utang (DAR) Debt to Total Assets Ratio (DAR)	16,54	16,21	16,15	5,13	3,47
Rasio Utang terhadap Modal (DER) Debt to Total Equity Ratio (DER)	20,13	19,80	19,26	5,40	3,59

Rasio Utang

Rasio ini digunakan untuk mengukur bagian aset yang digunakan dalam menjamin keseluruhan kewajiban atau utang. Nilai rasio utang Perusahaan tahun 2016 sebesar 3,47% lebih rendah dibandingkan tahun 2015 sebesar 5,13%.

Debt to Total Assets Ratio

Debt ratio is demonstrating the part of assets used to guarantee overall liabilities or debt. The Company's debt ratio in 2016 is 3.47%, which is lower than 2015, i.e. 5.13%.

Grafik Rasio Utang Tahun 2012-2016 (%)
Graph: Debt to Total Assets Ratio 2012-2016 (%)

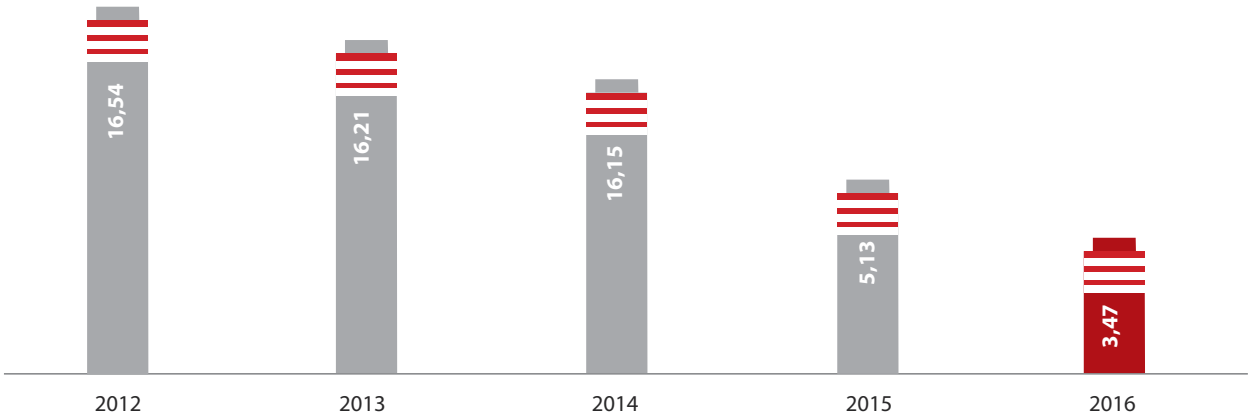

KEMAMPUAN MEMBAYAR UTANG, KOLEKTIBILITAS PIUTANG DAN RASIO KEUANGAN LAINNYA

Solvency, Receivables Collectability, and Other Financial Ratios

Rasio Utang terhadap Modal

Rasio ini digunakan untuk mengukur bagian modal yang dijadikan jaminan untuk keseluruhan kewajiban atau utang. Nilai rasio utang terhadap modal tahun 2016 sebesar 3,59% lebih rendah dibandingkan tahun 2015 sebesar 5,40%.

Debt to Total Equity Ratio

The ratio is measuring the part of equity that is used to guarantee overall liabilities or debt. The debt to total equity ratio in 2016 is 3.59%, which is lower than 2015, i.e. 5.40%.

Grafik Rasio Utang terhadap Modal Tahun 2012-2016 (%)

Graph: Debt to Total Equity Ratio 2012-2016 (%)

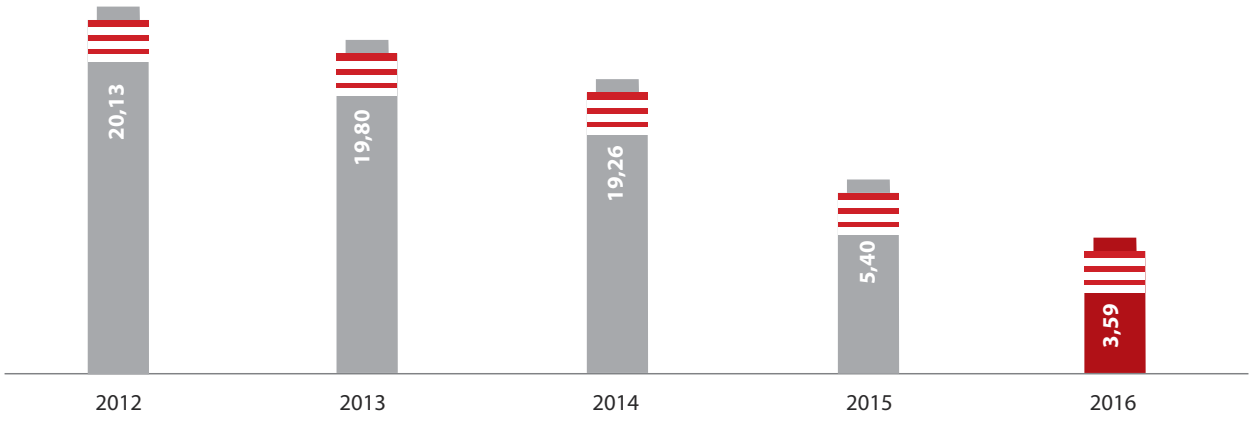

Rasio Likuiditas

Rasio likuiditas merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan menyelesaikan kewajiban jangka pendeknya yang terdiri dari *Cash Ratio* (Rasio Kas), *Quick Ratio* (Rasio Cepat) dan *Current Ratio* (Rasio Lancar). Semakin tinggi nilai dari rasio-rasio tersebut, maka mengindikasikan bahwa Perusahaan mampu memenuhi kewajiban-kewajibannya yang akan jatuh tempo. Rasio likuiditas Perusahaan ditunjukkan dalam tabel berikut.

Liquidity Ratio

Liquidity ratio is a ratio to measure the capability of the Company to pay its short-term liabilities, which consist of Cash Ratio, Quick Ratio, and Current Ratio. The higher value of those ratios indicate that the Company is able to fulfill its liabilities when it's maturing. The Company's liquidity ratio is shown in the table follows.

Tabel Rasio Likuiditas Tahun 2012-2016 (%)
Table: Liquidity Ratio 2012-2016 (%)

Uraian Description	2012	2013	2014	2015	2016
Rasio Kas Cash Ratio	19,25	25,23	13,96	9,85	32,09
Rasio Cepat Quick Ratio	484,57	585,84	696,07	268,31	455,60
Rasio Lancar Current Ratio	561,30	712,66	794,87	308,69	554,16

Rasio Kas

Rasio kas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban yang harus segera dipenuhi dengan kas. Nilai rasio kas tahun 2016 sebesar 32,09% lebih tinggi dibandingkan tahun 2015 sebesar 9,85%.

Cash Ratio

Cash ratio is demonstrating the capability of the Company in paying its liabilities with cash. The cash ratio in 2016 is 32.09%, higher than 2015 which was 9.85%.

Grafik Rasio Kas Tahun 2012-2016 (%)
Graph: Cash Ratio 2012-2016 (%)

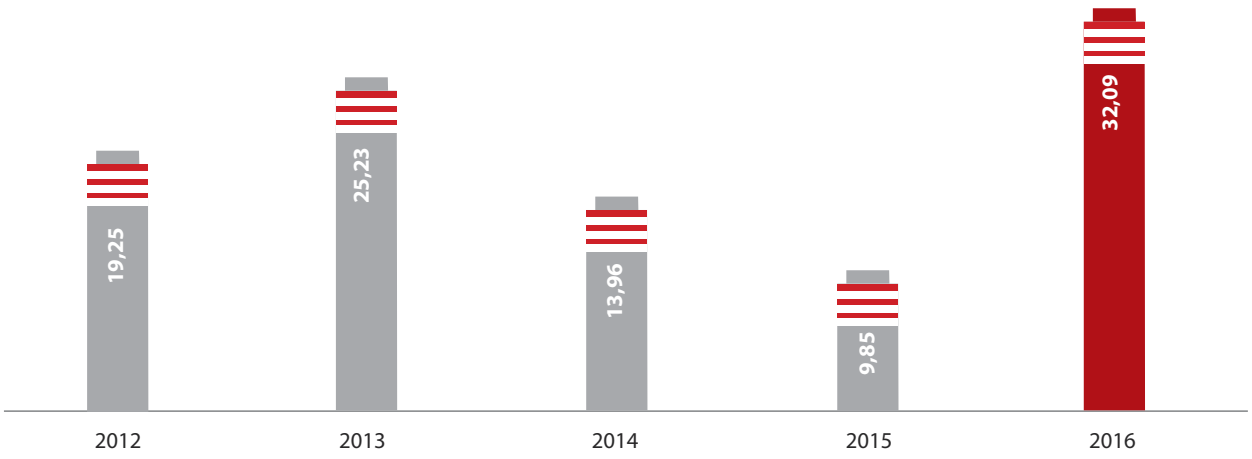

Rasio Cepat

Kemampuan Perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya melalui aset lancar Perusahaan di luar persediaan diukur menggunakan rasio cepat. Nilai rasio cepat tahun 2016 adalah 455,60% lebih tinggi dibandingkan tahun 2015 sebesar 268,31%.

Quick Ratio

The capability of the Company to fulfill its short-term liabilities through current ratio outside the reserve is measured by quick ratio. The quick ratio in 2016 is 455.60%, higher than 2015 which was 268.31%.

KEMAMPUAN MEMBAYAR UTANG, KOLEKTIBILITAS PIUTANG DAN RASIO KEUANGAN LAINNYA

Solvency, Receivables Collectability, and Other Financial Ratios

Grafik Rasio Cepat Tahun 2012-2016 (%)

Graph: Quick Ratio 2012-2016 (%)

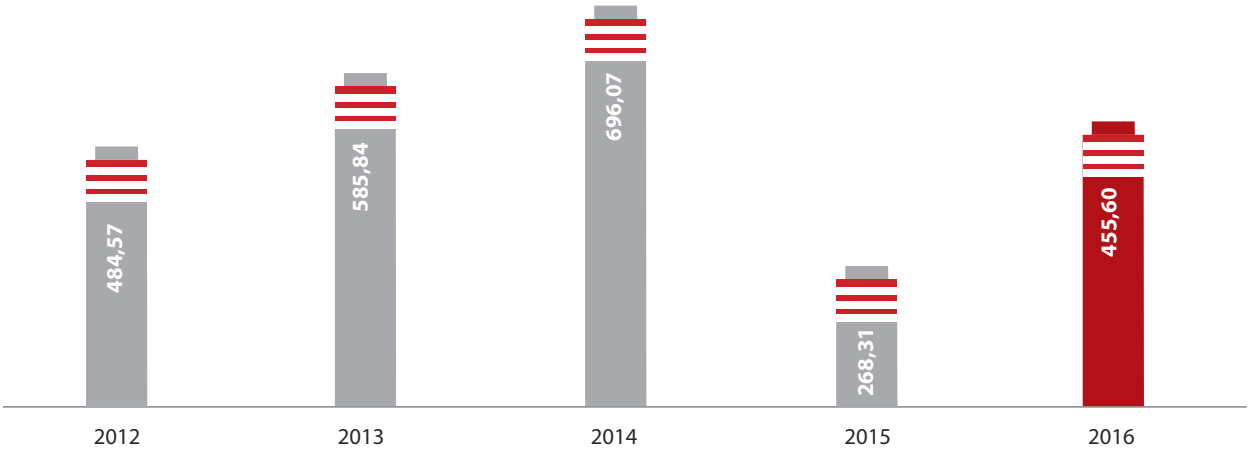

Rasio Lancar

Kemampuan Perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya melalui seluruh aset lancar yang dimilikinya diukur menggunakan rasio lancar. Nilai rasio lancar di tahun 2016 adalah 554,16% lebih tinggi dibandingkan tahun 2015 sebesar 308,69%.

Current Ratio

The capability of the Company to fulfill its short-term liabilities through all its current ratio is measured by current ratio. The current ratio in 2016 is 554.16%, higher than 2015 which was 308.69%.

Grafik Rasio Lancar Tahun 2012-2016 (%)

Graph: Current Ratio 2012-2016 (%)

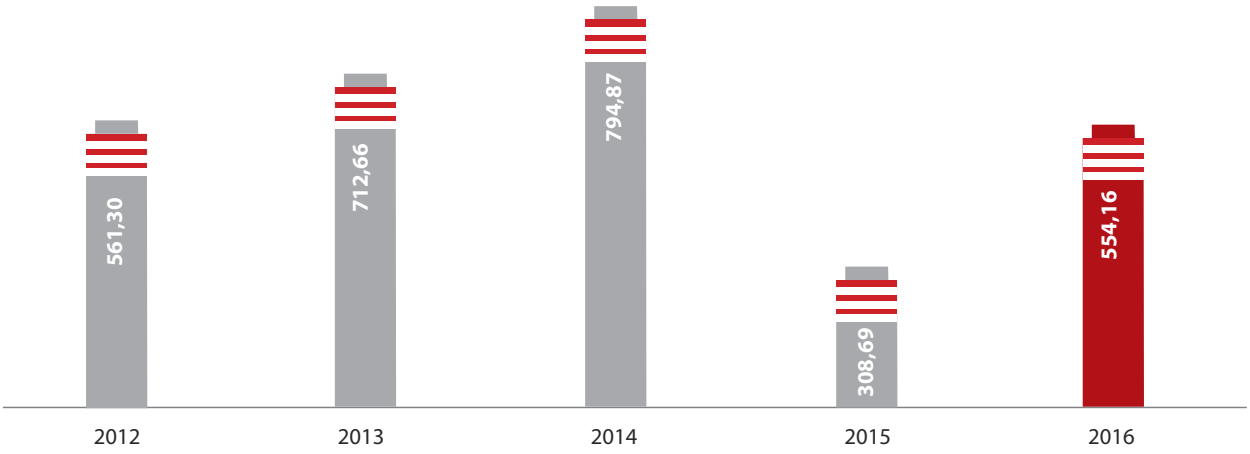

Kolektibilitas Piutang

Tingkat kolektibilitas piutang (periode penagihan) digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mengumpulkan piutang. Nilai periode penagihan di tahun 2016 sebesar 198 hari yaitu lebih cepat dibandingkan tahun 2015 yaitu 269 hari. Hal ini menunjukkan semakin baiknya kinerja perusahaan dalam mengumpulkan piutang.

Receivables Collectability

The receivables collectability (collection period) is demonstrating the capability of the Company in collecting receivables. The collection period in 2016 is 198 days, which is faster than 2015 is 269 days. This shows the improvement in the Company's performance to collect receivables.

Grafik Periode Penagihan Tahun 2012-2016 (hari)
Graph: Collection Period 2012-2016 (days)

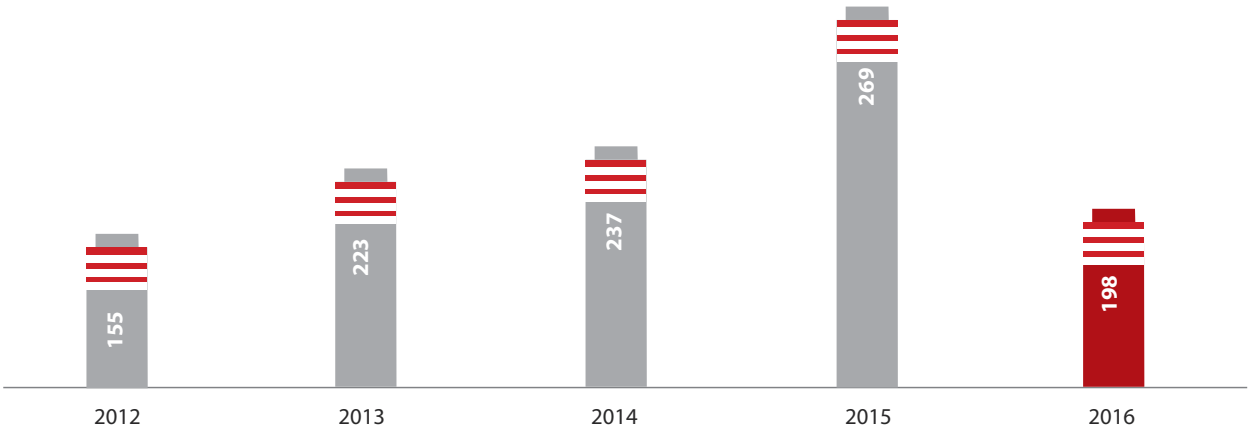

Rasio Keuangan Lainnya

Selain kemampuan perusahaan dalam menyelesaikan kewajiban dan kemampuan dalam periode penagihan piutang, terdapat rasio-rasio keuangan penting lainnya sebagai berikut:

Rasio Profitabilitas

Kemampuan Perusahaan dalam menghasilkan laba diukur menggunakan rasio-rasio profitabilitas yang terdiri dari *Return on Equity* (tingkat pengembalian modal), *Return on Investment* (tingkat pengembalian investasi) *Operating Profit Margin* (margin operasi), dan *Net Profit Margin* (margin laba bersih). Rasio profitabilitas Perusahaan ditunjukkan dalam tabel berikut.

Other Financial Ratios

In addition to the capability of the Company in fulfilling its liabilities and receivables collection period, there are other important financial ratios, such as:

Profitability Ratio

The Company's ability to generate profit is measured by the profitability ratios, which consist of Return on Equity, Return on Investment, Operating Profit Margin, and Net Profit Margin. The Company's profitability ratio is shown in the table follows.

KEMAMPUAN MEMBAYAR UTANG, KOLEKTIBILITAS PIUTANG DAN RASIO KEUANGAN LAINNYA

Solvency, Receivables Collectability, and Other Financial Ratios

Tabel Rasio Profitabilitas Tahun 2012-2016 (%)

Table: Profitability Ratio 2012-2016 (%)

Uraian Description	2012	2013	2014	2015	2016
Margin Operasi Operating Profit Margin	5,70	6,02	6,15	6,53	11,16
Margin Laba Bersih Net Profit Margin	3,90	3,71	4,61	14,60	7,86
Tingkat Pengembalian Modal Return on Equity	2,89	2,84	3,74	2,22	1,37
Tingkat Pengembalian Investasi Return on Investment	8,74	8,77	9,62	2,13	4,05

Margin Operasi

Merupakan ukuran kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba operasi yang dihasilkan dari penjualannya. Margin operasi di tahun 2016 sebesar 11,16% lebih tinggi dibandingkan tahun 2015 yaitu 6,53%.

Operating Profit Margin

Operating Profit Margin is demonstrating the Company's capability in producing operating profit from its sales. Operating Profit Margin in 2016 is 11.16%, higher than 2015, which was 6.53%.

Grafik Margin Operasi Tahun 2012-2016 (%)

Graph: Operating Profit Margin 2012-2016 (%)

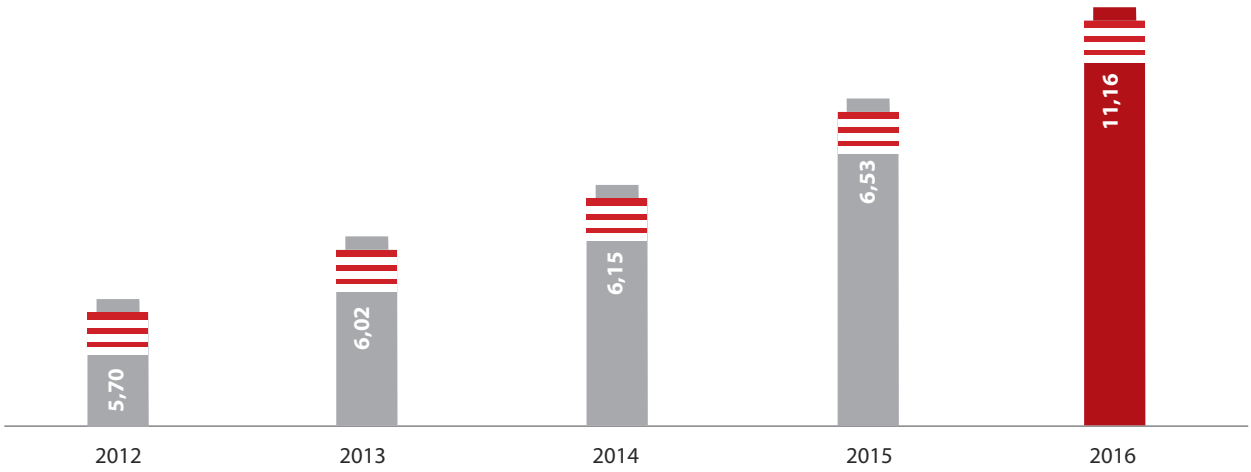

Margin Laba Bersih

Merupakan ukuran kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih yang dihasilkan dari penjualannya. Margin laba bersih di tahun 2016 sebesar 7,86% lebih rendah dibandingkan tahun 2015 yaitu 14,60%.

Net Profit Margin

Net Profit Margin is demonstrating the Company's capability in producing operating net profit from its sales. Net Profit Margin in 2016 is 7.86%, lower than 2015, which was 14.60%.

Grafik Margin Laba Bersih Tahun 2012-2016 (%)
Graph: Net Profit Margin 2012-2016 (%)

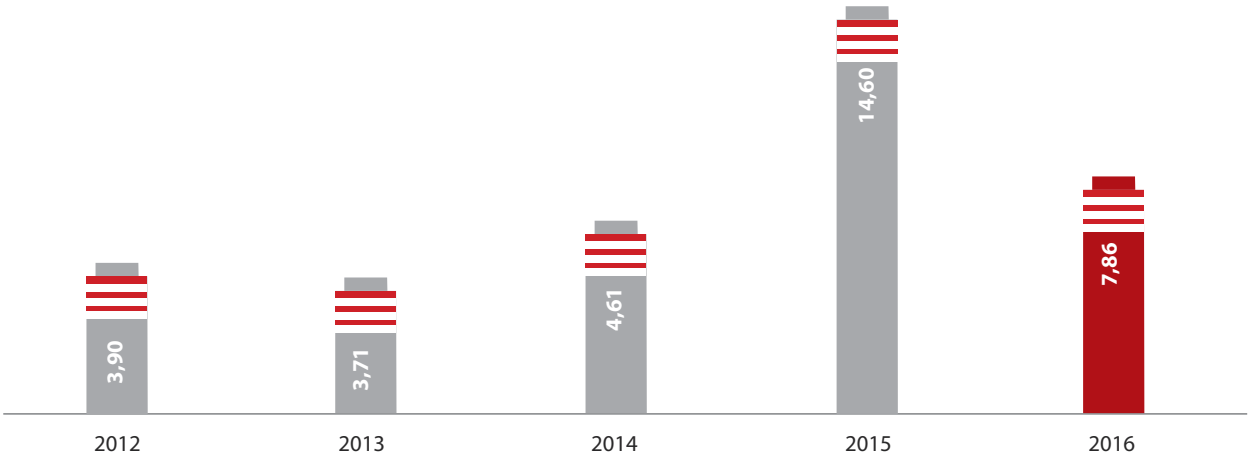

Tingkat Pengembalian Modal

Rasio yang memperlihatkan sejauh manakah Perusahaan mengelola modal sendiri secara efektif, mengukur tingkat keuntungan dari investasi yang telah dilakukan pemilik modal sendiri atau Pemegang Saham. Nilai tingkat pengembalian modal (*Return on Equity*) Perusahaan tahun 2016 sebesar 1,37% lebih rendah dibandingkan tahun 2015 sebesar 2,22%.

Return on Equity

This ratio demonstrates how the Company manages its capital effectively, measures the return of investment rate made by the owner of the capital or the Shareholders. The Company's Return on Equity in 2016 is 1.37%, lower than 2015, which was 2.22%.

Grafik Tingkat Pengembalian Modal Tahun 2012-2016 (%)
Graph: Return on Equity 2012-2016 (%)

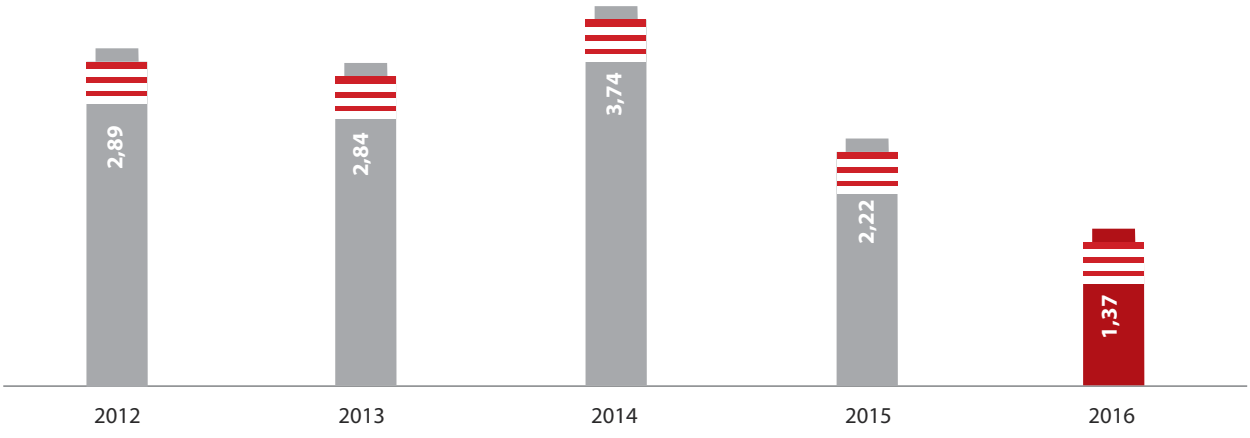

KEMAMPUAN MEMBAYAR UTANG, KOLEKTIBILITAS PIUTANG DAN RASIO KEUANGAN LAINNYA

Solvency, Receivables Collectability, and Other Financial Ratios

Tingkat Pengembalian Investasi

Merupakan kemampuan Perusahaan secara keseluruhan dalam memperoleh Keuntungan dengan jumlah Aset yang tersedia didalam Perusahaan. Nilai tingkat pengembalian investasi Perusahaan tahun 2016 sebesar 4,05% lebih tinggi dibandingkan tahun 2015 sebesar 2,13%.

Return on Investment

This ratio demonstrates the Company's overall capability in obtaining profit with the amount of assets available in the Company. The Company's Return on Investment in 2016 is 4.05%, higher than 2015, which was 2.13%.

Grafik Tingkat Pengembalian Investasi Tahun 2012-2016 (%)

Graph: Return on Investment 2012-2016 (%)

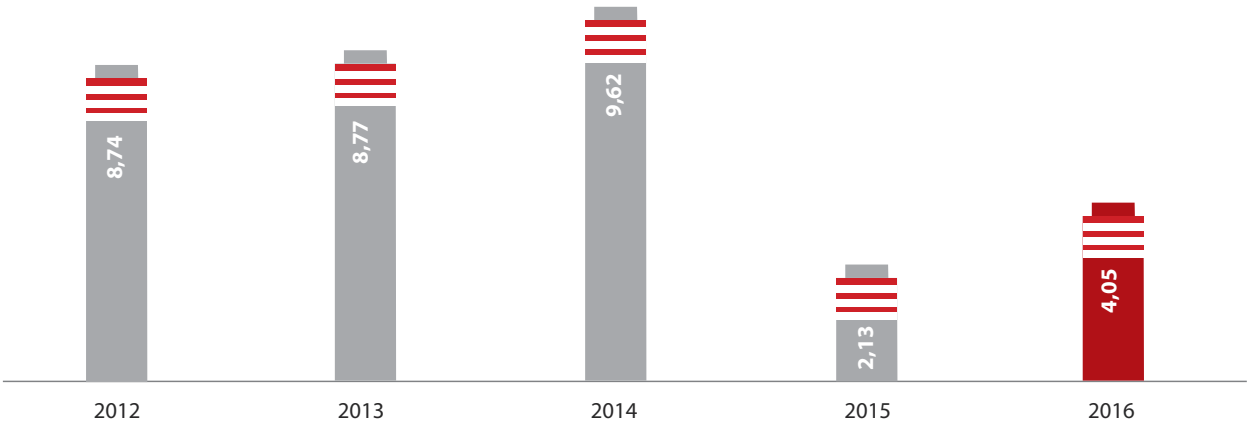

Rasio Aktivitas

Merupakan rasio-rasio yang menunjukkan keefektifan sebuah perusahaan dalam menggunakan aset yang dimilikinya.

Activity Ratio

Activity ratio demonstrates the company's effectivity in utilizing its assets.

Tabel Rasio Aktivitas Tahun 2012-2016 (%)

Table: Activity Ratio 2012-2016 (%)

Uraian Description	2012	2013	2014	2015	2016
Perputaran Persediaan Inventory Turn Over	33,00	20,00	21,00	25,00	19,52
Perputaran Aset Total Assets Turn Over	81,17	60,63	63,80	14,16	16,68

Perputaran Persediaan

Merupakan rasio yang mengukur seberapa sering pemakaian persediaan material di gudang terpakai dalam waktu satu periode. Perputaran persediaan di tahun 2016 sebesar 19,52% lebih rendah dibandingkan tahun 2015 sebesar 25,00%.

Inventory Turn Over

The ratio shows how often the material in the warehouse is utilized during one period. Inventory Turn Over in 2016 is 19.52%, lower than 2015 which was 25.00%.

Grafik Perputaran Persediaan Tahun 2012-2016 (%)
Graph: Inventory Turn Over 2012-2016 (%)

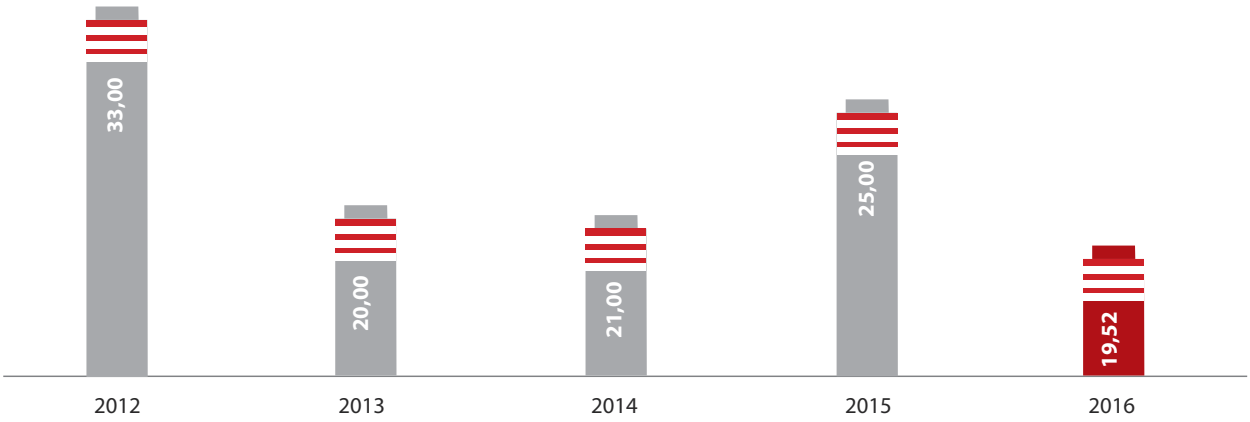

Perputaran Aset

Merupakan rasio untuk mengukur kemampuan aset perusahaan untuk memperoleh pendapatan, semakin cepat aset perusahaan berputar makin besar pendapatan perusahaan tersebut. Perputaran aset di tahun 2016 sebesar 16,68% lebih tinggi dibandingkan tahun 2015 sebesar 14,16%.

Total Assets Turn Over

The ratio shows the company's asset capability to gain profit, the higher the assets turn over, the bigger the income of the company. Total Assets Turn Over in 2016 is 16.68%, higher than 2015 which was 14.16%.

Grafik Perputaran Aset Tahun 2012-2016 (%)
Graph: Total Assets Turn Over 2012-2016 (%)

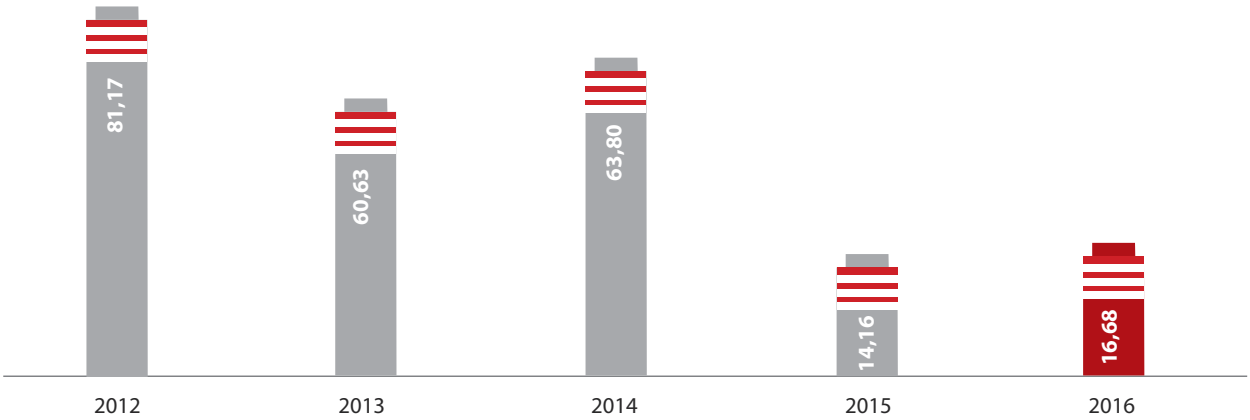

STRUKTUR MODAL
Capital Structure

Kebijakan struktur modal yang tepat dapat membantu kelancaran kinerja keuangan maupun operasional perusahaan. Kelangsungan operasi bergantung pada ketersediaan modal yang digunakan untuk pembiayaan dan pendanaan

Proper capital structure policy helps the smoothness of the Company's financial and operational performance. Operational continuity depends on the availability of capital to be used for financing and funding

Struktur Modal

Struktur modal Perusahaan pada tahun 2016 terdiri atas 3,47% dari Liabilitas sebesar Rp7.665.482 juta lebih rendah dibandingkan tahun 2015 sebesar 5,28% atau Rp 11.963.977 juta. Adapun yang diabiayai oleh Ekuitas sebesar 96,53% atau Rp213.222.542 juta lebih tinggi dibandingkan tahun 2015 sebesar 94,72% atau Rp214.756.271 juta.

Capital Structure

The Company's capital structure in 2016 consists of 3.47% Liabilities, Rp7,665,482 million lower than the 2015, which was 5.28% or Rp11,963,977 million. It was financed by Equity amounted to 96.53% or Rp213,222,542 higher than in 2015, which was 94.72% or Rp214,756,271 million.

Grafik Struktur Modal Tahun 2012-2016 (%)
Graph: Capital Structure 2012-2016 (%)

Uraian Description	2012	2013	2014	2015		2016	
	Rp juta Rp million	Rp juta Rp million	Rp juta Rp million	Rp juta Rp million	%	Rp juta Rp million	%
Liabilitas Liabilities	8.743.489	8.633.813	8.598.429	11.963.977	5,28	7.665.482	3,47
Liabilitas Jangka Pendek Short-Term Liabilities	4.260.396	3.890.560	3.244.923	9.206.379	76,95	4.554.447	59,42
Liabilitas Jangka Panjang Long-Term Liabilities	4.483.093	4.743.253	5.353.506	2.757.598	23,05	3.111.035	40,58
Ekuitas Equity	44.813.891	44.846.679	44.649.629	214.756.271	94,72	213.222.542	96,53
Jumlah Modal **Total Capital Structure**	**53.557.380**	**53.480.492**	**53.248.058**	**226.720.248**	**100,00**	**220.888.024**	**100,00**

Grafik Struktur Modal Tahun 2015 dan 2016 (%)
Graph: Capital Structure in 2015 and 2016 (%)

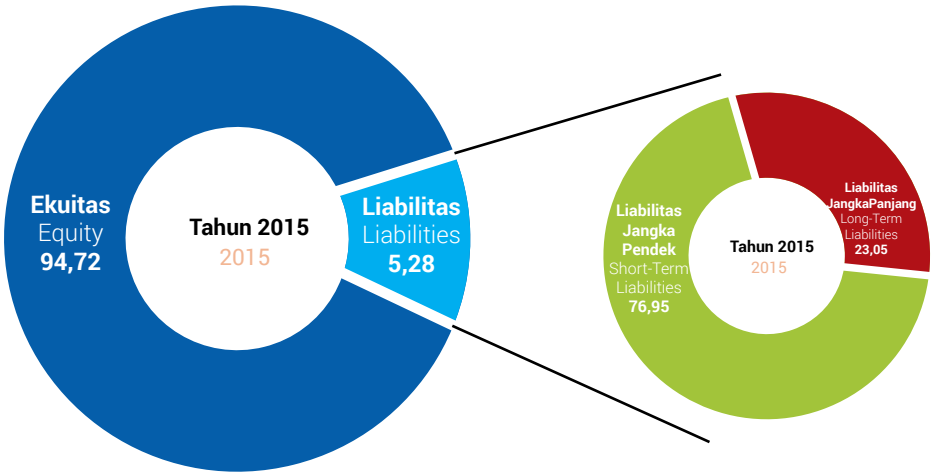

STRUKTUR MODAL
Capital Structure

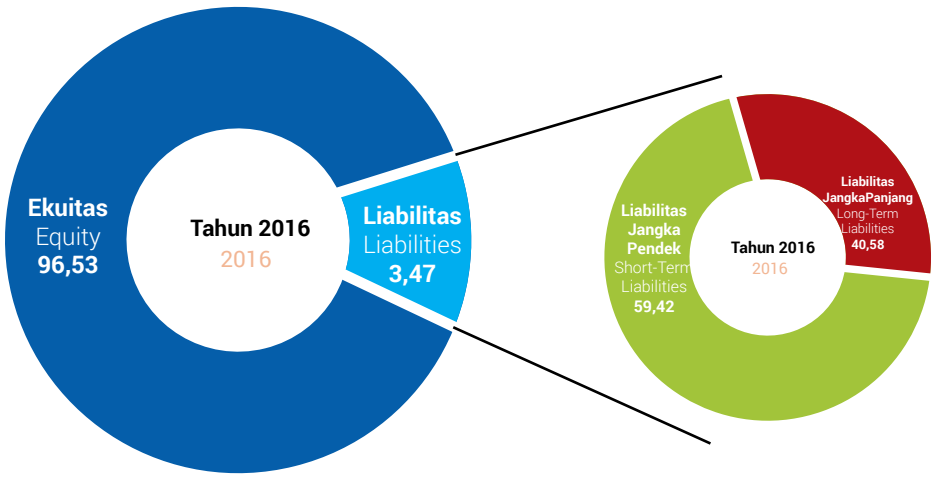

Kebijakan dan Mekanisme *Review* Struktur Modal

Struktur modal Perusahaan pada tahun 2016 terdiri atas 3,47% dari Liabilitas sebesar Rp7.665.482 juta lebih rendah dibandingkan tahun 2015 sebesar 5,28% atau Rp11.963.977 juta. Adapun yang dibiayai oleh Ekuitas sebesar 96,53% atau Rp213.222.542 juta lebih tinggi dibandingkan tahun 2015 sebesar 94,72% atau Rp214.756.271 juta.

Review of the Policy and Mechanism of Capital Structure

The Company's capital structure in 2016 consists of 3.47% Liabilities, Rp7,665,482 million lower than the 2015, which was 5.28% or Rp11,963,977 million. It was financed by Equity amounted to 96.53% or Rp213,222,542 higher than in 2015, which was 94.72% or Rp214,756,271 million.

PENCAPAIAN TARGET 2016, REALISASI 2016 DAN PROYEKSI 2017

2016 Achievements, 2016 Realization, and 2017 Projections

Perbandingan Target, Realisasi, dan Proyeksi Kinerja Operasional

Proses produksi Perusahaan menjadi penggerak awal roda keberlanjutan operasional Perusahaan. Berikut adalah kinerja operasi Perusahaan terhadap target di tahun 2016 serta proyeksi tahun 2017.

Target Comparisons, Realization, and Projections of Operational Performance

Company's production process serves as the initial drive for the sustainability of Company's operational. The following is the performance of the Company's operational based on 2016 target as well as the projections for 2017.

PENCAPAIAN TARGET 2016, REALISASI 2016 DAN PROYEKSI 2017

2016 Achievements, 2016 Realization, and 2017 Projections

Target, Realisasi, dan Proyeksi Kinerja Pembangkit

Target, Realization, and Projections of Power Plant Performance

Tabel Perbandingan Target dengan Realisasi Kinerja Pembangkit Tahun 2016 dan Proyeksi Tahun 2017

Table: Comparisons between 2016 Target and Realization of Power Plant Performance and 2017 Projections

	Realisasi 2016 Realization of 2016	Target RKAP 2016 RKAP Target of 2016	Pencapaian (%) Achievements (%)	Proyeksi 2017 2017 Projections
EAF (%)	85,63	88,00	97,31	88,20
EFOR (%)	7,23	5,00	55,46	4,5
SdOF (kali)	2,89	2,00	69,20	1,81
SOF (%)	7,58	7,36	97,09	7,31
Efisiensi Thermal (%) Thermal Efficiency	34,27	33,63	101,84	34,47
Tara Kalor (Kcal/KWh) Heat Rate (Kcal/KWh)	2.509,84	2.557,00	101,84	2.495,00

Realisasi EAF Perusahaan sebesar 85,63% dengan pencapaian 97,31% dari target RKAP 2016. EAF pada tahun 2016 tidak tercapai karena gangguan *boiler* bocor di PLTU Suralaya Unit 6, gangguan generator PLTU Palabuhan Ratu 1, dan gangguan kebocoran *boiler economizer* di PLTU Suralaya 8. Selanjutnya, pada tahun 2017 EAF diproyeksikan sebesar 88,20% dengan dasar asumsi adanya *planned outage* dengan durasi 143 hari dan *maintenance outage* dengan durasi 14 hari di PLTU Suralaya 1-7, adanya *planned outage* dengan durasi 142 hari di PLTU Labuan Unit 1-2, *planned outage* dengan durasi 55 hari di PLTU Lontar 1 dan 30 hari di PLTU Lontar 3, serta *planned outage* dengan durasi 42 hari PLTU Palabuhan Ratu Unit 1 dan 50 hari di PLTU Pelabuhan Ratu Unit 2.

The Company's EAF realization stood at 85.63% with 97.31% achievement of RKAP 2016 target. EAF of 2016 was not met as there were following problems: leaking boiler at Suralaya Unit 6 SPP, generator disturbance at Palabuhan Ratu 1 SPP, and leaking boiler economizer at Suralaya 8 SPP. In 2017, the EAF is projected to reach 88.20% based on assumptions that there would be: planned and maintenance outage at Suralaya SPP 1 to 7 with duration of 143 and 14 days respectively; planned outage at Labuan Unit 1-2 SPP with duration of 142 days; planned outage at Lontar 1 and 3 SPP with duration of 55 and 30 days respectively; and planned outage at Palabuhan Ratu Unit 1 and 2 SPP with duration of 42 and 50 days respectively.

Realisasi EFOR Perusahaan sebesar 7,23% dengan pencapaian 55,46% dari target RKAP 2016. EFOR tidak tercapai karena gangguan generator PLTU Palabuhan Ratu 1, *planned outage extension* yang terlampaui di PLTU Suralaya 1, dan PLTGU Tambak Lorok 2.1 akibat temuan masalah *exhaust*. Selanjutnya, pada tahun 2017 EFOR diproyeksikan sebesar 4,5% dengan dasar asumsi menekan *derating* di unit jasa pembangkitan dan optimalisasi *reliability management* unit pembangkit.

The Company's EFOR realization was at 7.23% with 55.46% achievement of RKAP 2016 target. EFOR was not met as there were generator disturbance at Palabuhan Ratu 1 SPP, exceeding planned outage at Suralaya 1 SPP and Tambak Lorok 2.1 CCPP due to exhaust problems. While in 2017, EFOR is projected at 4.5% based on the assumption of having the de-rating in Generating Services Units suppressed and the reliability management of Generating Units optimized.

Realisasi SdOF Perusahaan sebesar 2,89 kali dengan pencapaian 69,20% dari target RKAP 2016. SdOF tidak tercapai karena gangguan HRSG bocor dan gangguan *exhaust* di UP Semarang, gangguan kondensor dan gangguan *electrical* di UPJP Kamojang, serta gangguan *boiler economizer* PLTU Suralaya 8. Selanjutnya, pada tahun 2017 SdOF diproyeksikan sebesar 1,81 kali dengan dasar asumsi menekan gangguan yang dapat menyebabkan unit *trip* dengan cara optimalisasi *overhaul* dan penguatan implementasi aset manajemen khususnya pilar *outage management*.

Realisasi SOF Perusahaan sebesar 7,58% dengan pencapaian 97,09% dari target RKAP 2016. SOF tidak tercapai karena pemeliharaan *serious inspection* dan *recovery bearing* di UP Suralaya, pemeliharaan *major overhaul* dan pekerjaan MTR-2 di UP Saguling, serta pemeliharaan *Combustion Inspection* PLTG Gilimanuk UP Bali. Selanjutnya. Pada tahun 2017 SOF diproyeksikan sebesar 7,31% dengan dasar asumsi *planned outage* dengan durasi 143 hari dan *maintenance outage* dengan durasi 14 hari di PLTU Suralaya 1-7, adanya *planned outage* dengan durasi 142 hari di PLTU Labuan Unit 1-2, *planned outage* dengan durasi 55 hari di PLTU Lontar 1 dan 30 hari di PLTU Lontar 3, serta *planned outage* dengan durasi 42 hari PLTU Palabuhan Ratu Unit 1 dan 50 hari di PLTU Palabuhan Ratu Unit 2.

Realisasi Efisiensi Thermal Perusahaan sebesar 34,27% dengan pencapaian 101,84% dari target RKAP 2016. Selanjutnya, pada tahun 2017 Efisiensi Thermal diproyeksikan sebesar 34,47%. Sedangkan Realisasi Tara Kalor Neto Perusahaan sebesar 2.509,84 Kcal/KWh dengan pencapaian 101,84% dari target RKAP 2016. Selanjutnya, pada tahun 2017 Tara Kalor Neto diproyeksikan sebesar 2.495,00 Kcal/KWh. Pencapaian Efisiensi Thermal dan Tara Kalor Neto pada tahun 2016 disebabkan oleh optimalisasi pengoperasian PLTDG dan PLTGU Gas. Dasar asumsi proyeksi Efisiensi Thermal dan Tara Kalor Neto di tahun 2017 adalah peningkatan *Capacity Factor* (CF) PLTU Batubara karena pertumbuhan kebutuhan sistem, pengoptimalan pengoperasian PLTDG dan PLTGU Gas, PLTU Labuan 1 kembali dapat beroperasi beban maksimum pasca *recovery* pemotongan *blade turbine row* 4 di pertengahan 2017.

The realization of Company's SdOF was 2.89 times with 69.20% achievement of RKAP 2016 target. SdOF was not met as there were following problems: leaking HRSG and exhaust disturbance at Semarang GU; condenser and electrical disturbance at Kamojang GGSU; and disturbance of boiler economizer at Suralaya 8 SPP. Furthermore, in 2017, SdOF is projected to be 1.81 times based on the assumption that the disturbances which cause unit trips are suppressed by optimizing overhaul and strengthening the implementation of management assets, especially the outage management pillar.

The realization of Company's SOF was at 7.58% with 97.09% achievement of RKAP 2016 2016. SOF was not met as there were maintenance activities, which were: serious inspection and recovery bearing at Suralaya GU, major overhaul and MTR-2 work at Saguling GU, and Combustion Inspection of Gilimanuk GTPP, Bali GU. Furthermore, in 2017, SOF is projected to reach 7.31% based on the assumption that there would be: planned and maintenance outage at Suralaya 1-7 SPP with duration of 143 and 14 days respectively; planned outage at Labuan Unit 1-2 SPP with duration of 142 days; planned outage at Lontar 1 and 3 SPP with duration of 55 and 30 days respectively; and planned outage at Palabuhan Ratu Unit 1 and 2 SPP with duration of 42 and 50 days respectively.

The realization of Company's Thermal Efficiency stood at 34.27% with 101.84% achievement of RKAP 2016 target. While in 2017, it is projected to reach 34.47%. As for the Realization of Company's Net Plant Heat Rate, it stood at 2,509.84 Kcal/KWh with 101.84% achievement of RKAP 2016 target. In 2017, the Net Plant Heat Rate is projected to reach 2,495.00 Kcal/KWh. Thermal Efficiency and Net Plant Heat Rate in 2016 were achieved by optimizing the operations of DGPP and Gas based CCPP. The base assumption for projection of Thermal Efficiency and Net Heat Rate in 2017 is the increase in Capacity Factor (CF) of Coal Power Plant (coal based SPP) due to the growth of system needs, optimization of DGPP and Gas-based CCPP Operations, and reoperation of Labuan 1 SPP to the maximum capacity post recovery of row 4 turbine blade cutting in the middle of 2017.

PENCAPAIAN TARGET 2016, REALISASI 2016 DAN PROYEKSI 2017

2016 Achievements, 2016 Realization, and 2017 Projections

Perbandingan Target, Realisasi, dan Proyeksi Produksi Listrik

Comparisons of Target, Realization, and Projections of Electricity Production

Tabel Perbandingan Target dengan Realisasi Produksi Listrik Tahun 2016 dan Proyeksi Tahun 2017 (GWh)

Table: Comparisons between 2016 Target and Realization of Electricity Production and 2017 Projections (GWh)

	Realisasi 2016 Realization of 2016	Target RKAP 2016 RKAP Target of 2016	Pencapaian (%) Achievements (%)	Proyeksi 2017 2017 Projections
Jawa Bali *Grid & Embedded* Java Bali Grid & Embedded	43.129,92	42.862,52	100,62	41.542,45
Area Bali dan Karimun Jawa Bali Area and Karimun Jawa	50,68	459,97	11,02	91,50
Jumlah Total	43.180,60	43.322,49	111,64	41.633,95

Realisasi produksi tenaga listrik Perusahaan sebesar 43.180,60 GWh dengan pencapaian 111,64% dari target RKAP 2016. Pencapaian ini terutama disebabkan oleh peningkatan optimalisasi operasi PLTA di musim basah tahun 2016 dan peningkatan CF Suralaya. Selanjutnya, pada tahun 2017 produksi tenaga listrik diproyeksikan sebesar 41.633,95 GWh lebih rendah dibandingkan realisasi 2016 karena bertambahnya pembangkit batubara FTP, penurunan produksi dari PLTA terkait perubahan asumsi dari musim basah menjadi musim normal.

The Company's electricity production realization was at 43,180.60 GWh with 111.64% achievement of RKAP 2016 target. It was mainly achieved due to the optimized HPP operations in wet season in 2016 and the improvement of Suralaya's CF. Furthermore, in 2017, the electricity generated is projected at 41,633.95 GWh, lower than the realization in 2016 due to the addition of Coal Power Plant FTP, decline in the production of HPP related to the assumption change from wet season to the normal season.

Perbandingan Target, Realisasi, dan Proyeksi Penjualan Listrik

Comparisons of Target, Realization, and Projections of Electricity Sales

Tabel Perbandingan Target dengan Realisasi Penjualan Listrik Tahun 2016 dan Proyeksi Tahun 2017 (GWh)

Table: Comparisons between 2016 Target and Realization of Electricity Sales and 2017 Projections

	Realisasi 2016 Realization of 2016	Target RKAP 2016 RKAP Target of 2016	Pencapaian (%) Achievements (%)	Proyeksi 2017 2017 Projections
Jawa Bali *Grid & Embedded* Java Bali Grid & Embedded	41.250,60	40.944,38	100,75	39.671,96
Area Bali dan Karimun Jawa Bali Area and Karimun Jawa	48,42	459,97	10,53	90,39
Jumlah Total	41,299.02	41.404,35	111,28	39,762.35

Realisasi penjualan tenaga listrik Perusahaan sebesar 41.299,02 GWh dengan pencapaian 111,28% dari target RKAP 2016. Pencapaian ini terutama disebabkan oleh peningkatan optimalisasi operasi PLTA di musim basah tahun 2016 dan peningkatan CF Suralaya. Selanjutnya, pada tahun 2017 penjualan tenaga listrik diproyeksikan sebesar 39.762,35 GWh dengan lebih rendah dibandingkan realisasi 2016 karena bertambahnya pembangkit batubara FTP, penurunan produksi dr PLTA terkait perubahan asumsi dari musim basah menjadi musim normal.

The Company's electricity sales realization was at 41,299.02 GWh with 111.28% achievement of RKAP 2016 target. It was mainly achieved due to the improvement of optimized HPP operations in wet season in 2016 and the improvement of Suralaya's CF. Furthermore, in 2017, the sales of electricity is projected at 39,762.35 GWh, lower than the realization in 2016 due to the addition of Coal Power Plant FTP, decline in the production of HPP related to the assumption change from wet season to the normal season.

Perbandingan Target, Realisasi, dan Proyeksi Pemakaian Sendiri (PS)

Comparisons of Target, Realization, and Projections of Self-Consumption (SC)

Tabel Perbandingan Target dengan Realisasi Pemakaian Sendiri Tahun 2016 dan Proyeksi Tahun 2017

Table: Comparisons between 2016 Target and Realization of Self-Consumption and 2017 Projections

	Realisasi 2016 Realization of 2016		Target RKAP 2016 RKAP Target of 2016		Pencapaian (%) Achievements (%)	Proyeksi 2017 2017 Projections	
	GWh	% PS	GWh	% PS	%	GWh	% PS
Pemakaian Sendiri Self-Consumption	1.879,33	4,36	1.918,15	4,53	103,81	1.715,34	4,15

Realisasi PS Perusahaan sebesar 1.879,33 GWh dengan pencapaian 103,81% dari target RKAP 2016. Hal ini terutama disebabkan oleh pencapaian PS Tahun 2016 lebih baik dibandingkan dengan target RKAP 2016, deviasi 38,82 GWh atau 0,12% dikarenakan perbaikan PS di UP Saguling, UP Mrica, UP Perak Grati, UP Bali dan UPJP Kamojang. Selanjutnya, pada tahun 2017 PS diproyeksikan sebesar 1.715,34 GWh dengan dasar asumsi optimalisasi pengoperasian PLTGU Gas dan PLTDG serta perbaikan *derating* PLTU Suralaya.

The Realization of Company's SC was at 1,879.33 GWh with 103.81% achievement of RKAP 2016 target. It was mainly due to the fact that the SC achievement in 2016 was exceeding the RKAP 2016 target with a deviation of 38.82 GWh or 0.12% caused by SC improvement at Saguling GU, Mrica GU, Perak Grati GU, Bali GU, and Kamojang GGSU. For 2017, the SC is projected to reach 1,715.34 GWh based on the assumption that Gas based CCPP and DGPP operations would be optimized and the derating of Suralaya SPP would be improved.

PENCAPAIAN TARGET 2016, REALISASI 2016 DAN PROYEKSI 2017

2016 Achievements, 2016 Realization, and 2017 Projections

Target, Realisasi, dan Proyeksi Kinerja Keuangan

Target, Realization, and Projections of Financial Performance

Target, Realisasi, dan Proyeksi Posisi Keuangan

Target, Realization, and Projections of Financial Position

Tabel Perbandingan Target dengan Realisasi Posisi Keuangan Tahun 2016 dan Proyeksi Tahun 2017 (Rp juta)

Table: Comparisons between 2016 Target and Realization of Financial Position and 2017 Projections (Rp million)

Uraian Description	Realisasi 2016 Realization of 2016	Target RKAP 2016 RKAP Target of 2016	Pencapaian (%) Achievements (%)	Proyeksi 2017 2017 Projections
Aset Lancar Current Assets	26.032.438	25.506.998	102,06	34.142.860
Aset tidak lancar Non-current Assets	194.855.586	29.478.267	661,01	202.664.062
Jumlah Aset Total Assets	220.888.024	54.985.264	401,72	236.806.633
Liabilitas Jangka Pendek Short-term Liabilities	4.554.447	4.487.182	101,50	10.710.123
Liabilitas Jangka Panjang Long-term Liabilities	3.111.035	4.778.424	65,11	4.319.666
Jumlah liabilitas Total Liabilities	7.665.482	9.265.606	82,73	15.029.789
Jumlah Ekuitas Total Equity	213.222.542	45.719.658	466,37	221.777.133

Grafik Perbandingan Target Jumlah Aset Tahun 2016 dan Proyeksi Tahun 2017 (Rp juta)
Graph: 2016 Target and Total Assets Comparisons and 2017 Projections (Rp million)

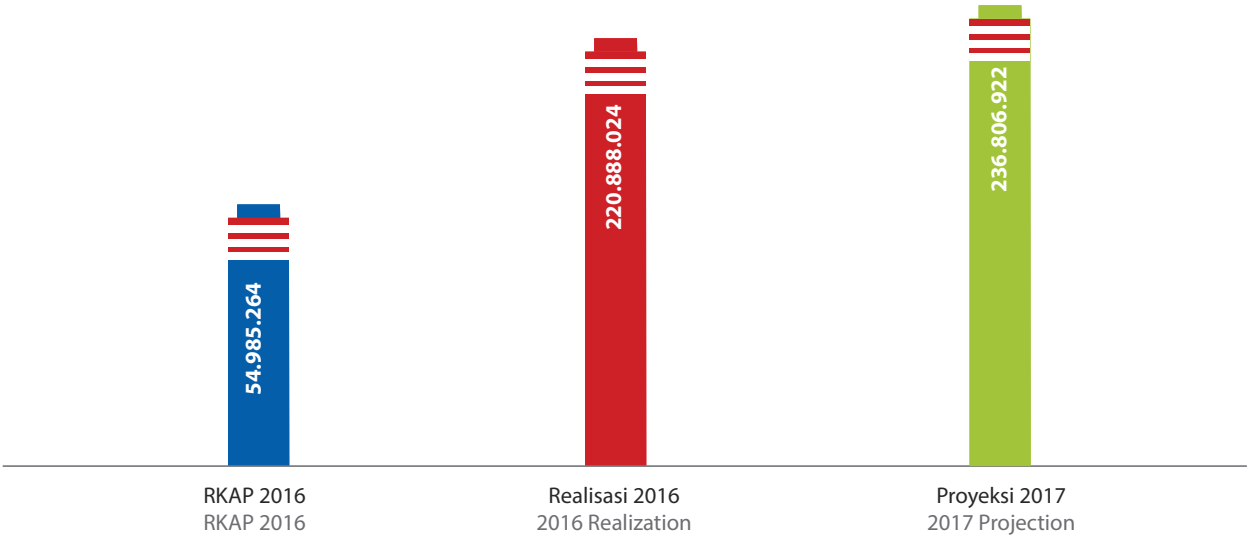

Realisasi Aset Perusahaan tahun 2016 sebesar Rp220.888.024 juta dengan pencapaian 401,72% dari target RKAP 2016 sebesar Rp54.985.264 juta Selanjutnya, pada tahun 2017 Total Aset diproyeksikan sebesar Rp236.806.633 juta lebih tinggi 31,16% dari realiasasi tahun 2016. Proyeksi tersebut didasarkan pada pendirian pembangkit baru di Kalimantan timur yang diestimasikan selesai pada tahun 2017, penyertaan modal untuk pembangkit baru PLTU 2x1000 MW di Cilegon, Suralaya, penyertaan modal untuk pendirian anak perusahaan yang bergerak dibidang *supply chain* (*logistic*).

Company's Assets Realization of 2016 stood at Rp220.888.024 million with 401,72% achievement of RKAP 2016 target totaled Rp54,985,264 million. In 2017, Total Assets is projected to reach Rp236,806,633 million, 31.16% higher than 2016 realization. The projection is based on the construction of new generator in East Kalimantan that is estimated to be completed in 2017, capital participation for new SPP generator 2x1000 MW in Cilegon, Suralaya, and capital participation for the establishment of a subsidiary engaged in supply chain (logistic) activities.

Realisasi Liabilitas Perusahaan tahun 2016 sebesar Rp7.665.482 juta dengan pencapaian 82,73% dari target RKAP 2016 sebesar Rp9.265.606 juta. Selanjutnya, pada tahun 2017 Liabilitas diproyeksikan sebesar Rp15.029.789 juta.

The Realization of Company's Liabilities in 2016 was Rp7,665,482 million with 82.73% achievement of RKAP 2016 target totaled Rp9,265,606 million. Furthermore, in 2017 the Liabilities are projected to reach Rp15,029,789 million.

Realisasi Ekuitas Perusahaan tahun 2016 sebesar Rp213.222.542 juta dengan pencapaian 466,37% dari target RKAP 2016 sebesar Rp45.719.658 juta. Selanjutnya, pada tahun 2017 Ekuitas diproyeksikan sebesar Rp221.777.133 juta.

The Realization of Company's Equity in 2016 was Rp213,222,542 million with 466.37% achievement of RKAP 2016 target totaled Rp45,719,658 million. In 2017 the Equity is projected to reach Rp221,777,133 million.

PENCAPAIAN TARGET 2016, REALISASI 2016 DAN PROYEKSI 2017

2016 Achievements, 2016 Realization, and 2017 Projections

Target, Realisasi, dan Proyeksi Laba Rugi

Target, Realization, and Projections of Profit or Loss

Tabel Perbandingan Target dengan Realisasi Laba Rugi Tahun 2016 dan Proyeksi Tahun 2017 (Rp juta)

Table: Comparisons between 2016 Target and Realization of Profit or Loss and 2017 Projections (Rp million)

Uraian Description	Realisasi 2016 Realization of 2016	Target RKAP 2016 RKAP Target of 2016	Pencapaian (%) Achievements (%)	Proyeksi 2017 2017 Projections
Pendapatan Usaha Revenues	36.705.954	39.465.821	93,01	42.292.279
Beban Usaha Operating Expenses	32.610.030	36.785.429	88,65	39.180.066
Pendapatan (Beban) Lain-lain Other Income (Expenses)	(171)	(75.456)	99,77	(26.042)
Laba Sebelum Pajak Income Before Tax	4.095.753	2.604.936	157,23	3.086.170
Beban Pajak Tax Expense	(1.209.049)	(633.023)	191,00	(794.058)
Laba Tahun Berjalan **Income for The Year**	**2.886.704**	**1.971.913**	**146,39**	**2.292.112**

Grafik Perbandingan Target dengan Realisasi Laba Tahun Berjalan Tahun 2016 dan Proyeksi Tahun 2017 (Rp juta)

Graph: Comparisons between 2016 Target and Realization of Income for The Year and 2017 Projections (Rp million)

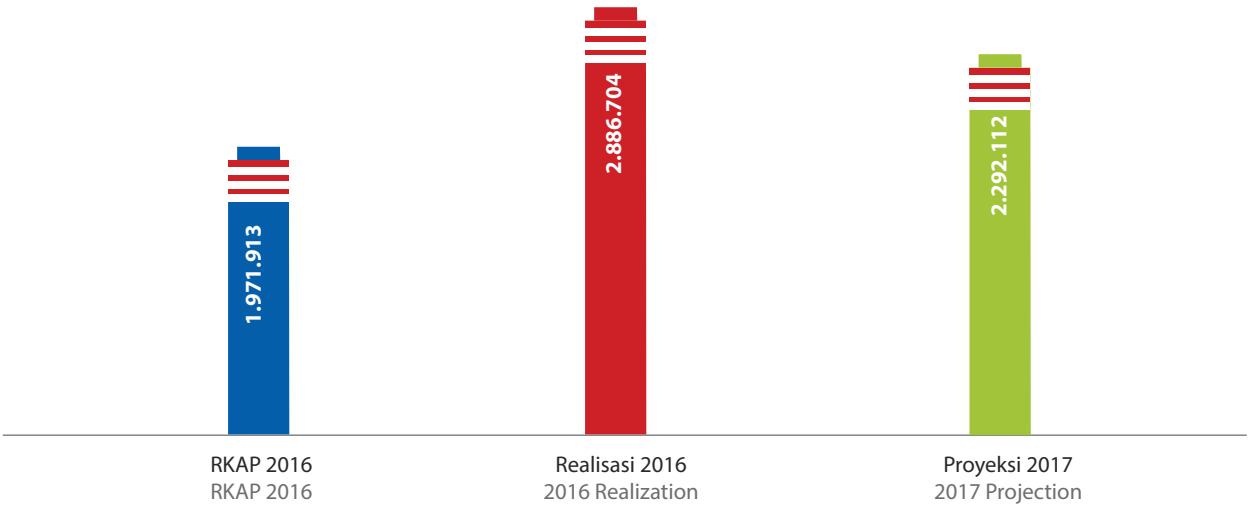

Realisasi Pendapatan Usaha Perusahaan tahun 2016 sebesar Rp36.705.954 juta dengan pencapaian 93,01% dari target RKAP 2016 sebesar sebesar Rp39.465.821 juta. Selanjutnya, pada tahun 2017 Pendapatan Usaha diproyeksikan sebesar Rp42.292.279 juta. Proyeksi tersebut didasarkan pada besarnya pendapatan dari jasa O&M pada tahun 2017 dan penugasan PLN kepada Perusahaan untuk mengelola investasi PLN.

The Realization of Company's Revenues in 2016 was Rp36,705,954 million with 93.01% achievement of RKAP 2016 target totaled Rp39,465,821 million. In 2017 Income from Business is projected to reach Rp42,292,279 million. The projection is based on the amount of income from O&M services in 2017 and the assignment from PLN to manage its investment.

Realisasi Beban Usaha Perusahaan tahun 2016 sebesar Rp32.610.030 juta dengan pencapaian 88,65% dari target RKAP 2016 sebesar sebesar Rp36.785.429 juta. Selanjutnya, pada tahun 2017 Beban Usaha diproyeksikan sebesar Rp39.180.066 juta. Proyeksi tersebut didasarkan pada besarnya biaya produksi O&M seiring dengan peningkatan pendapatan O&M yang meningkat di tahun 2017.

The Realization of Company's Operating Expenses in 2016 was Rp32,610,030 million with 88.65% achievement of RKAP 2016 target totaled Rp36,785,429 million. In 2017, Operating Expenses is projected to reach Rp39,180,066 million. The projection is based on the amount of O&M production costs as well as the increasing O&M income in 2017.

Realisasi Laba tahun berjalan Perusahaan tahun 2016 sebesar Rp2.886.704 juta dengan pencapaian 146,39% dari target RKAP 2016 sebesar Rp1.971.913 juta. Selanjutnya, pada tahun 2017 Laba tahun berjalan diproyeksikan sebesar Rp2.292.112 juta. Proyeksi tersebut lebih rendah dibandingkan realisasi Laba tahun berjalan pada tahun 2016. Hal ini didasarkan pada kenaikan beban pajak tangguhan sebagai dampak revaluasi aset di tahun 2016. Oleh karena itu laba diproyeksikan menurun seiring dengan nilai pajak tangguhan yang kembali normal.

The Realization of Company's income for the year in 2016 was Rp2,886,704 million with 146.39% achievement of RKAP 2016 target totaled Rp1,971,913 million. Furthermore, in 2017, the Income for the year is projected to reach Rp2,292,112 million. The projection is lower than Income for the year realization of 2016, due to the deferred Tax Expense that is still considerably high as a result of asset revaluation in 2016. Thus, income is projected to decrease, as the amount of deferred tax is returning to normal.

PENCAPAIAN TARGET 2016, REALISASI 2016 DAN PROYEKSI 2017

2016 Achievements, 2016 Realization, and 2017 Projections

Target, Realisasi, dan Proyeksi Struktur Modal

Target, Realization, and Projection of Capital Structure.

Tabel Perbandingan Target dengan Realisasi Struktur Modal Tahun 2016 dan Proyeksi Tahun 2017 (Rp juta)

Table: Comparisons between 2016 Target and Realization of Capital Structure and 2017 Projections (Rp million)

Uraian Description	Realisasi 2016 Realization of 2016		Target RKAP 2016 RKAP Target of 2016		Pencapaian (%) Achievements (%)	Proyeksi 2017 2017 Projections	
	Rp Juta Rp Million	%	Rp Juta Rp Million	%		Rp Juta Rp Million	%
Liabilitas Liabilities	7.665.482	3,47	9.265.606	16,85	82,73	15.029.789	6,35
Ekuitas Equity	213.222.542	96,53	45.719.658	83,15	466,37	221.777.133	93,65
Aset Assets	220.888.024	100	54.985.264	100	401,72	236.806.922	100

Pada tahun 2016 Aset yang dibiayai oleh liabilitas sebesar 3,47% lebih rendah target RKAP 2016 sebesar 16,85%. Sementara itu, Aset yang dibiayai oleh ekuitas sebesar 96,53%, hal ini telah melampaui target RKAP 2016 sebesar 83,15%. Selanjutnya, Perusahaan memproyeksikan perbandingan liabilitas dan ekuitas terhadap Aset tahun 2017 masing-masing sebesar 6,35% dan 93,65%. Proyeksi tersebut didasarkan pada manfaat kompensasi pajak tangguhan sesuai dengan proyeksi laba 2017-2022. Hal tersebut mempengaruhi kenaikan laba tahun berjalan serta total ekuitas Perusahaan.

In 2016, assets funded by liabilities was 3.47% lower than RKAP target of 2016 which was 16.85%. Meanwhile, assets funded by equity was 96.53%, which has exceeded RKAP target of 2016 at 83.15%. Afterwards, the Company projects the comparisons between liabilities and equity to assets in 2017 at 6.35% and 93.65% respectively. The projection is based on the benefit of deferred tax compensation based on 2017-2022 income projection. It affects the amount of current income rise as well as Company's equity.

TINGKAT KESEHATAN PERUSAHAAN DAN PENCAPAIAN KPI

KPI Achievement and Company's Soundness Level

Tingkat Kesehatan Perusahaan

Tingkat kesehatan pada perusahaan biasanya ditetapkan bersamaan dengan rencana kerja perusahaan. Kriteria atau indikator yang digunakan Perusahaan dalam menilai tingkat kesehatan perusahaan ditetapkan dalam RKAP tahun buku 2016.

Tingkat Kesehatan Perusahaan tahun 2016 berada pada level 95,53 yang termasuk dalam kategori "AAA SEHAT".

Company's Soundness Level

The soundness level of the company usually is set in conjunction with the company's plan. Criteria or indicator for the Company to assess the health level of the Company is set forth in RKAP 2016.

The Company's soundness level in 2016 is on 95.53 which is in the category of "AAA SOUND"

TINGKAT KESEHATAN PERUSAHAAN DAN PENCAPAIAN KPI

KPI Achievement and Company's Soundness Level

Grafik Pencapaian Tingkat Kesehatan Perusahaan Tahun 2012-2016

Graph: Achievement of Company's Soundness Level 2012-2016

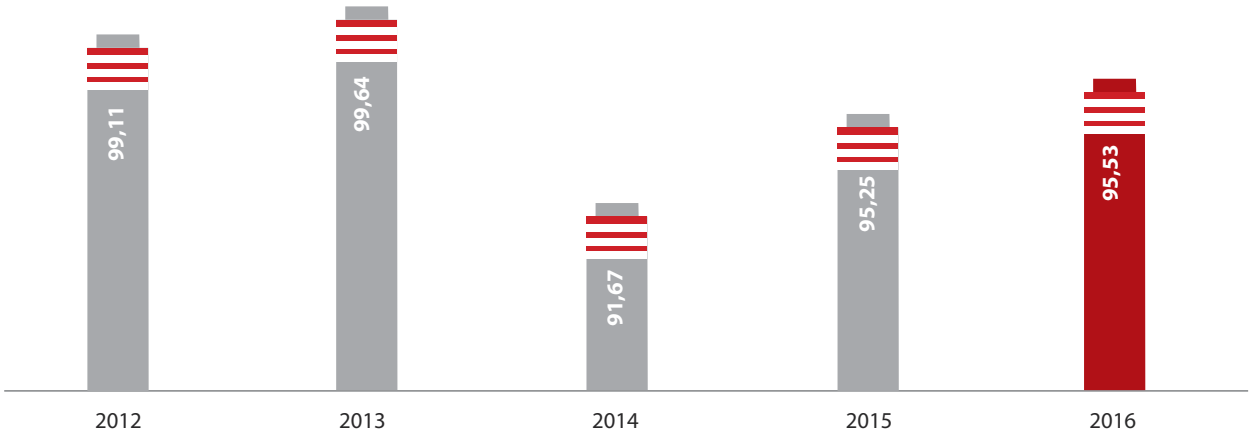

Pencapaian *Key Performance Indicator* (KPI)

Salah satu indikator untuk menilai tingkat pencapaian kinerja Perusahaaan adalah dengan melihat pencapaian *Key Performance Indicator* (KPI) Perusahaan. KPI merupakan suatu ukuran kinerja yang bersifat kuantitatif, yang disetujui sebelumnya oleh Manajemen dan merupakan cerminan faktor-faktor penentu keberhasilan Perusahaan. Perusahaan tentu memiliki tujuan yang ingin diraih. Terkait dengan hal tersebut, Perusahaan menggunakan KPI sebagai cerminan dari target, progress dan pencapaian tujuan.

KPI tahun buku 2016 dilaksanakan sesuai dengan keputusan risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tanggal 19 Januari 2016.

Level Of Company's Soundness

One of the indicators to assess the achievement of Company's performance is by reviewing the achievement of Company's Key Performance Indicator (KPI). KPI is a quantitative measurement for performance, approved by the Management, and is a reflection of Company's success factors. The Company has an objective in mind. In relation to that, the Company uses KPI as a reflection of the target, progress, and achievement.

KPI in 2016 is conducted in line with the Decree of General Meeting of Shareholders (GMS) dated January 19, 2016.

Tabel Pencapaian KPI Tahun 2016
Table: KPI Achievement 2016

No	Indikator Kinerja Performance Indicator		Satuan Unit	Bobot Integrity	s.d Desember 2016 Until December 2016				
					Target	Realisasi Realization	Pencapaian Achievement	Nilai Score	Keterangan Description
I	**Fokus Pelanggan** **Customer Focus**			**6**				**3,33**	
	EFOR Korporat Corporate EFOR	↓	%	6	5,00	7,23	55,46%	3,33	Masalah Problem
II	**Efektivitas Produk dan Proses** **Effectivity of Products and Process**			**38**				**37,30**	
2	EAF Pembangkit Power Plant EAF								
	a. Total Korporat a. Corporate	↑	%	4	88,00	85,63	97,31%	3,89	Hati-hati Caution
	b. PLTU Batubara (SLA 1-7) b. Coal based SPP (SLA 1-7)	↑	%	4	90,00	89,72	99,69%	3,99	Hati-hati Caution
	c. PLTU Batubara (UPJB) c. Coal based SPP (UPJB)	↑	%	4	81,00	69,26	85,50%	3,42	Masalah Problem
3	Tara Kalor Netto Korporat Corporate Net Plant Heat Rate	↓	Kcal/ kWh	10	2.557	2.509,84	101,84%	10,00	Baik Good
4	Umur Persediaan Batubara Coal Reserves Age	↓	Hari Day	6	20,00	16,14	119,31%	6,00	Baik Good
5	Perputaran material non bahan bakar Non-fuel Material Cycle	↑	Kali Time	6	5,00	5,96	119,20%	6,00	Baik Good
6	Pemakaian Sendiri Pembangkit Generator's Self-Consumption	↓	%	4	4,53	4,36	103,81%	4,00	Baik Good
III	**Fokus Tenaga Kerja** **Employment Focus**			**6**				**6,00**	
7	*Human Capital Readiness* (HCR)	↑	Level	3	4,25	4,25	100,00%	3,00	Baik Good
8	*Organizational Capital Readiness* (OCR)	↑	Level	3	4,25	4,28	100,71%	3,00	Baik Good
IV	**Keuangan dan Pasar** **Financial and Market**			**34**				**33,15**	
9	Efisiensi Biaya Pemeliharaan Maintenance cost efficiency	↓	%	8	3,35	1,83	145,41%	8,00	Baik Good
10	Biaya Pokok Penyediaan Pembangkit Cost of Generator Provision	↓	Rp/kWh	7	838,00	708,87	115,41%	7,00	Baik Good
11	Realisasi Program Investasi (CAPEX) Investment Program Realization								

TINGKAT KESEHATAN PERUSAHAAN DAN PENCAPAIAN KPI

KPI Achievement and Company's Soundness Level

No	Indikator Kinerja Performance Indicator	Satuan Unit	Bobot Integrity	s.d Desember 2016 Until December 2016				
				Target	Realisasi Realization	Pencapaian Achievement	Nilai Score	Keterangan Description
	(i) Pelaksanaan Program Investasi Investment Program Realization ↑	%	5	100,00	100,00	100,00%	5,00	Baik Good
	(ii) Realisasi Fisik Program investasi (reff i) Investment Program Physique Realization (reff i) ↑	%	5	80,00	66,42	83,03%	4,15	Masalah Problem
12	Penerimaan deviden dari AP IP/Penyertaan IP Dividends received from AP/IP, subscription of IP ↑	Rp miliar Rp billion	5	3,50	5,79	165,43%	5,00	Baik Good
13	Sinergi dengan Anak Perusahaan Lain Synergizing with other Subsidiaries ↑	Rp miliar Rp billion	4	598,44	826,95	138,19%	4,00	Baik Good
V	**Kepemimpinan, Tata Kelola dan Tanggung jawab Kemasyarakatan** **Leadership, Governance, and Social Responsibility**		16				15,75	
14	Pengelolaan Risiko Risk Management ↑	Level	4	3,50	3,56	101,71%	4,00	Baik Good
15	GCG ↑	Skor Score	4	90,00	91,99	102,21%	4,00	Baik Good
16	Peningkatan PROPER Unit PROPER Unit Enhancement ↑	Jumlah unit Total unit	4	2	3	150,00%	4,00	Baik Good
17	Penyelesaian Temuan Auditor Solving the auditor's findings ↑	%	4	100	93,80	93,80%	3,75	Masalah Problem
18	Kepatuhan pada K3L (Kesehatan, Keselamatan Kerja & Lingkungan Hidup) compliance with K3L (Health, Occupational Health, and Environment) ↓		Max-10					
	TOTAL BOBOT **WEIGHT TOTAL**		100				93,53	

KONTRIBUSI KEPADA NEGARA
Contribution to the State

Bentuk komitmen Perusahaan kepada Negara diwujudkan dalam pemenuhan kewajiban Perusahaan sebagai Wajib Pajak dan sebagai Pemotong Pajak. Sebagai Wajib Pajak, salah satu kontribusi terbesar Perusahaan adalah pemenuhan kewajiban PPh Badan.

Membayar pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Selama tahun 2016 Perusahaan tidak pernah melakukan keterlambatan pembayaran kewajiban pajak. Baik PPh Karyawan, PPh Badan, PPN Masa dan Rampung serta PBB, tidak pernah melakukan keterlambatan penyampaian dokumen kewajiban perpajakan (SPT tahunan maupun bulanan), serta tidak terdapat keterlambatan penyampaian dokumen kewajiban pada lembaga regulator.

Commitment of the Company to the State is manifested in the fulfilment of the Company's obligation as Tax Payer and Tax Cutter. As a Tax Payer, one of the biggest contribution of the Company is to fulfill the obligatory Corporate Income Tax.

Paying tax is the realization of state obligation and role, as well as being a tax payer directly and collectively to carry out the tax obligation for state financing and national development.

Throughout 2016, the Company has never made any late payment of tax liabilities. The submission of taxation document (Annual or Monthly Tax Return) of Employee Income Tax, Corporate Income Tax, Income Tax, as well as Land and Building Tax, are never delayed. There is no delay in submitting the documents to the regulator institution as well.

KONTRIBUSI KEPADA NEGARA

Contribution to the State

Pembayaran pajak pada tahun 2016 adalah sebesar Rp924.503 juta menurun dibandingkan tahun 2015 sebesar Rp1.081.498 juta.

Tax payment in 2016 amounted to Rp924,503 million, a decrease compared to 2015, which was Rp1,081,498 million.

Tabel Pembayaran Pajak Tahun 2012-2016 (Rp juta)

Table: Tax Payment 2012-2016 (Rp Million)

Keterangan Description	2012	2013	2014	2015	2016
PPN Pungut Collected VAT	-	-	-	237.248	427.005
PPN Impor VAT on Import	26.369	94.108	47.529	29.1780	65.387
Bea Masuk Import Duty	12.591	44.967	92.517	15.586	31.204
PPH 21 Income Tax 21	58.366	74.576	64.591	107.666	176.186
Pajak Badan Corporate Income Tax	566.001	649.846	668.544	668.802	199.568
PBB, Materai dan Retribusi Land and Building Tax, Stamp Duty and Retribution	14.959	16.944	18.869	23.016	25.153
Jumlah Pajak **Total Tax**	**678.286**	**880.441**	**892.050**	**1.081.498**	**924.503**

KEBIJAKAN DEVIDEN
Dividend Policy

Kebijakan Pembagian Deviden

Kebijakan Deviden perusahaan telah mempertimbangkan peraturan yang berlaku sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Perusahaan wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk cadangan apabila saldo laba positif sampai cadangan tersebut mencapai paling sedikit 20% dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor. Pembagian deviden dilaksanakan sesuai dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Dividend Sharing Policy

Dividend Policy of the Company has considered the regulation prevailed in accordance with Law No. 40 of 2007 on Limited Liabilities Company, the Company is obliged to set aside certain amount of net profit per fiscal year for reserves if the balance of retained earnings is positive, until the reserves reached at least 20% from the capital issued and paid up. Dividend sharing is conducted based on the decision in General Meeting of Shareholders (GMS).

KEBIJAKAN DEVIDEN
Dividend Policy

Rincian Pembagian Deviden

Sesuai dengan hasil Keputusan RUPS Tahunan Perusahaan Nomor 1673/55/IP/2016 pada tanggal 21 Desember 2016 memutuskan bahwa pembagian deviden tunai Perusahaan sebesar Rp4.207.869 juta atau 90% dari laba periode berjalan tahun buku 2015 sebesar Rp4.668.403 juta.

Dividend Sharing Details

In line with the Company's Annual GMS Decree No. 1673/55/IP/2016 dated December 21, 2016, the Company's cash dividend amounted to Rp4,207,869 million or 90% of the current period profit of 2015 amounted to Rp4,668,403 million.

Tabel Pembayaran Deviden Tahun Buku 2012-2016
Table: Dividend Payment Fiscal Year 2012-2016

	Tahun Buku 2012 Fiscal Year 2012	Tahun Buku 2013 Fiscal Year 2013	Tahun Buku 2014 Fiscal Year 2014	Tahun Buku 2015 Fiscal Year 2015	Tahun Buku 2016* Fiscal Year 2016*
Laba Bersih (Rp juta) Net Profit (Rp million)	1.255.981	1.240.108	1.631.079	4.668.403	2.885.017
Persentase Deviden (%) Dividend Percentage (%)	90	90	90	90	*
Deviden yang Dibagikan (Rp juta) Appropriated Dividend (Rp million)	1.130.383	1.116.097	1.467.971	4.207.869	*
Deviden per Lembar Saham (Rp) Dividend per Share (Rp)	199,74	214	281	807	*
Dividend Pay Out Ratio Dividend Pay Out Ratio	90:10	90:10	90:10	90:10	*
Tanggal Pengumuman Pembayaran Date of Payment Announcement	5 Desember 2013 December 5, 2013	20 November 2014 November 20, 2014	9 Oktober 2015 October 9, 2015	1 Desember 2016 December 1, 2016	*
Tanggal Realisasi Pembayaran Deviden Kas Date of Cash Dividend Payment Completed	16 Desember 2013 December 16, 2013	25 November 2014 November 25, 2014	20 Oktober 2015 October 20, 2015	21 Desember 2016 December 21, 2016	*

*** Pembayaran Deviden untuk Tahun Buku 2016 dilaksanakan sesuai dengan hasil keputusan RUPS yang akan dilaksanakan pada bulan Mei 2017**
* Dividend Payment for Fiscal Year 2016 is conducted in line with the GMS Decree that will be held on May 2017

Tabel Deviden yang Dibagikan Tahun Buku 2012-2015 (Rp juta)

Table: Appropriated Dividend Fiscal Year 2012-2015 (Rp million)

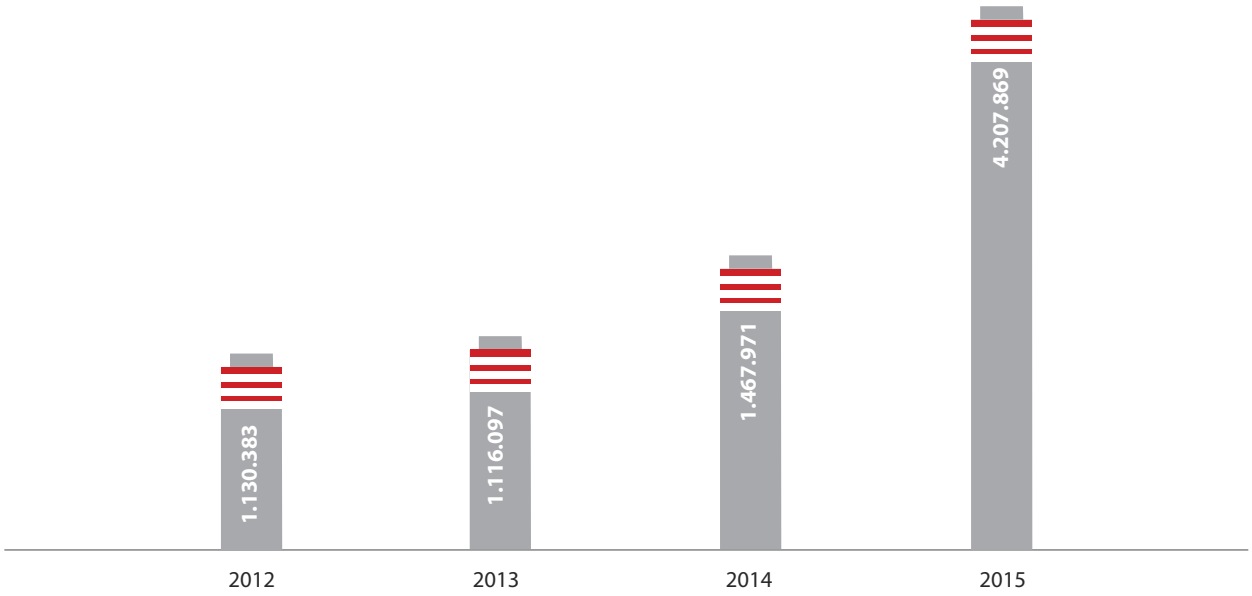

INFORMASI IKATAN MATERIAL UNTUK INVESTASI BARANG MODAL

Material Agreement Information for Capital Goods Investment

Dalam melakukan investasi barang modal, Perusahaan adakan sejumlah perikatan material, baik dengan pihak berelasi maupun pihak ketiga.

In investment of capital goods, the Company enters several material agreements, with the related parties or the third parties.

Tabel Ikatan Material untuk Investasi Barang Modal Tahun 2016

Table: Material Agreement Information for Capital Goods Investment 2016

Jenis Ikatan Type of Agreement	Nama Pihak yang Melakukan Ikatan Name of the Parties in Agreement	Tujuan dari Ikatan Tersebut Objectives of the Agreement	Sumber Dana Fund Source	Mata uang yang Menjadi Denominasi Denominated Currency
Kontrak LTPA UPJP Priok Priok GGSU LTPA Contract	PT. Alstom Power Energy Systems Indonesia	Kebutuhan *sparepart* kapitalisir untuk Major *Overhaul* Spare part needs capitalization for Major Overhaul	Dana Internal Internal Fund	EUR
Kontrak LTPA UP Bali Bali GU LTPA Contract	PT. Alstom Power Energy Systems Indonesia	Kebutuhan sparepart kapitalisir untuk *Major Overhaul* Spare part needs capitalization for Major Overhaul	Dana Internal Internal Fund	EUR
Kontrak LTPA UP Perak Grati Perak Grati GU LTPA Contract	PT. Poeser Indonesia	Kebutuhan sparepart kapitalisir untuk *Major Overhaul* Spare part needs capitalization for Major Overhaul	Dana Internal Internal Fund	JPY
Kontrak EPC (*Engineering, Procurement & Contruction*) EPC (Engineering, Procurement & Contruction) Contract	Konsorsium Ansaldo Energia Spa- PT PP	Rehabilitasi Unit 1 PLTP Kamojang 1x30 MW Rehabilitation of Kamojang 1 GPP 1x30 MW	Dana Internal Internal Fund	EUR
Kontrak EPC (*Engineering, Procurement & Contruction*) EPC (Engineering, Procurement & Contruction) Contract	Konsorsium Doosan Heavy Industries & Construction - PT Pembangunan Perumahan (Persero), Tbk	Pengembangan Grati *Add On* Blok 2 - 150 MW Development of Grati Add On Block 2 - 150 MW	Dana Internal Internal Fund	USD dan EUR USD and EUR
Kontrak EPC (*Engineering, Procurement & Contruction*) EPC (Engineering, Procurement & Contruction) Contract	PT.Grand Kartech Tbk.	Gasifikasi dan Rehabilitasi PLTU 3 Tambak Lorok Gasification and Rehabilitation of Tambak Lorok 3 SPP	Dana Internal Internal Fund	EUR

INFORMASI IKATAN MATERIAL UNTUK INVESTASI BARANG MODAL

Material Agreement Information for Capital Goods Investment

Langkah Perlindungan Risiko terhadap Posisi Mata Uang Asing

Untuk mengurangi risiko fluktuasi kurs mata uang asing Indonesia Power menggunakan penetapan sensitivitas kurs valas pada batas nilai maksimum tertentu, di mana apabila terlewati semua proses pengadaan barang/jasa harus mendapatkan persetujuan tertulis dahulu dari Direksi.

Selain itu, langkah yang ditempuh adalah penggunaan mata uang Rupiah untuk transaksi, sesuai dengan PBI (Peraturan Bank Indonesia) yang diundangkan per tanggal 31 Maret 2015 yang mewajibkan penggunaan mata uang Rupiah di wilayah Republik Indonesia, mengatur bahwa khusus untuk pengadaan *spareparts* impor yang telah di perjualbelikan di Indonesia, ikatan perjanjian/kontrak Perusahaan dan *vendor* wajib menggunakan mata uang Rupiah. Dalam ikatan ini, Indonesia Power menggunakan kebijakan sistem *Floating Rate* yang dihitung dengan menggunakan formula nilai Kurs Tengah Transaksi EUR - Bank Indonesia.

Protection against Foreign Currency Position Risks

To reduce the risk of foreign currency fluctuation, Indonesia Power determines the sensitivity of foreign exchange rates at certain maximum limit, and when it passed the limit, the procurement of goods/services must obtain prior written approval from the Board of Directors.

In addition, the step performed is to use Rupiah currency for transaction, in accordance with PBI (Bank Indonesia Regulation) which is enacted as of 31 March 2015, which requires the use of Rupiah currency in the territory of Republic of Indonesia, and stipulates that specifically for import spare parts procurement to be sold in Indonesia, in the agreement/contract of the Company and vendor, it is mandatory to use Rupiah currency. In this agreement, Indonesia Power uses the Floating Rate system policy, calculated using the formula of Central Exchange Rate of EUR and Bank Indonesia Transaction.

Ikatan Material Tahun 2016

Berikut merupakan uraian mengenai perikatan material berupa ikatan dan kontinjensi yang dilakukan Perusahaan pada tahun 2016.

Material Agreement in 2016

The following is the description of material agreement in the form of agreements and contingencies made by the Company in 2016.

Power Purchasing Agreement (PPA) dengan PT PLN (Persero)

Perusahaan dan entitas anak memiliki sejumlah PPA dengan PT PLN (Persero). Dalam perjanjian tersebut, PT PLN (Persero) membayar pasokan tenaga listrik yang disediakan oleh Perusahaan sebesar jumlah yang ditentukan berdasarkan formula pembayaran. Pembayaran tersebut mencakup komponen biaya kapasitas, energi, operasional dan pemeliharaan yang tergantung pada tingkat pasokan energi serta variabel lain yang ditentukan dalam perjanjian.

Material Agreement in 2016

The Company and subsidiaries have a number of PPA with PT PLN (Persero). In the agreement, PT PLN (Persero) pays the electricity supplied by the Company in the amount set out based on the payment formula. The payment includes component of capacity costs, energy, operational, and maintenance, depending on the level of energy supply and other variables set out in the agreement.

Tabel Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik

Table: Power Purchase Agreement

Pihak Kerjasama Cooperation	Inti Perjanjian Core of Agreement	Tanggal Perjanjian Date	Periode Perjanjian Period of Agreement
PT PLN (Persero)	Perubahan dan Pernyataan Kembali Atas Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik Pusat Listrik Tenaga Uap - 1 (PLTU-1) Changes and Restatement on Sale and Purchase Agreement of Steam Power Plant - 1 (SPP -1)	4 Desember 2013 December 4, 2013	2013-2017
PT PLN (Persero)	Perubahan dan Pernyataan Kembali Atas Pusat Listrik Tenaga Uap - 2 (PLTU-2) Changes and Restatement on Sale and Purchase Agreement of Steam Power Plant - 2 (SPP-2)	4 Desember 2013 December 4, 2013	2013-2017
PT PLN (Persero)	Perubahan dan Pernyataan Kembali Atas Pusat Listrik Tenaga Gas dan Uap - 1 (PLTGU-1) Changes and Restatement on Sale and Purchase Agreement of Combined Cycle Power Plant - 2 (CCPP-1)	4 Desember 2013 December 4, 2013	2013-2017
PT PLN (Persero)	Perubahan dan Pernyataan Kembali Atas Pusat Listrik Tenaga Gas dan Uap - 2 (PLTGU-2) Amendment and Restatement on Combined Cycle Power Plant - 2 (CCPP-2)	4 Desember 2013 December 4, 2013	2013-2017
PT PLN (Persero)	Perubahan dan Pernyataan Kembali Atas Pusat Listrik Tenaga Gas (PLTG) Amendment and Restatement on Gas Turbine Power Plant (GTPP)	4 Desember 2013 December 4, 2013	2013-2017
PT PLN (Persero)	Amandemen Atas Perubahan dan Pernyataan Kembali Atas Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik Pusat Listrik Tenaga Diesel (PLTD) Amendment on Changes and Restatement on Sale and Purchase Agreement of Diesel Power Plant (DPP)	4 Juli 2014 July 4, 2014	2013-2017
PT PLN (Persero)	Perubahan dan Pernyataan Kembali Atas Pusat Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Amendment and Restatement on Geothermal Power Plant (GPP)	4 Desember 2013 December 4, 2013	2013-2017
PT PLN (Persero)	Perubahan dan Pernyataan Kembali Atas Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik Pusat Listrik Tenaga Air (PLTA) Amendment and Restatement on Sale and Purchase Agreement of Hydro Power Plant (HPP)	12 Juni 2015 June 12, 2015	2013-2017
PT PLN Distribusi Jakarta dan Tangerang PT PLN Jakarta and Tangerang Distribution	Amandemen 1 Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik PLTD Senayan Amendment 1 on Sale and Purchase Agreement of Senayan DPP	31 Mei 2016 May 31, 2016	2014-2019
PT PLN Distribusi Jakarta dan Tangerang PT PLN Jakarta and Tangeran Distribution	Perjanjian Jual Beli Energi Listrik Untuk Pemakaian Oleh PHE ONWJ pada ORF Tanjung Priok di UPJP Priok Contract Agreement for Purchase of Electricity for ORF Use by PHE ONWJ on Tanjung Priok ORF in Priok GGSU	30 Juni 2015 June 30, 2015	2015-2017

INFORMASI IKATAN MATERIAL UNTUK INVESTASI BARANG MODAL

Material Agreement Information for Capital Goods Investment

Pihak Kerjasama Cooperation	Inti Perjanjian Core of Agreement	Tanggal Perjanjian Date	Periode Perjanjian Period of Agreement
PT PLN (Persero) Pembangkitan Sumatera Bagian Selatan PT PLN (Persero) South Sumatera Power Generator	Jual Beli Energi Listrik Untuk sistem Sumsel-Lampung pada Titik *Outgoing Main* (*Step UP*) transformer 11/150 kV disisi 150 kV Gardu Induk Simpang Tiga Inderalaya PT PLN (Persero) Pembangkitan Sumatera Bagian Selatan Sektor Pembangkitan Keramasan Power Purchasing Agreement for South Sumatera – Lampung System on Outgoing Main Point (Step UP) with 11/150 kV Transformer, in the side of 150 kV, Simpang Tiga Inderalaya Substation, PT PLN (Persero) South Sumatera Power Generator, Keramasan Generator Sector	31 Desember 2015 December 31, 2015	2002-2016

Selain perjanjian jual-beli tenaga listrik, Perusahaan juga melakukan perikatan untuk pengadaan bahan bakar kepada sejumlah pemasok. Bahan bakar tersebut digunakan untuk pembangkit Perusahaan.

In addition to Power Purchasing Agreement, the Company also bonds numerous suppliers to perform fuel supply agreement. The fuel is utilized for the Company's generator.

Perjanjian Pasokan Bahan Bakar Gas

Gas Fuel Supply Agreement

Tabel Pasokan Bahan Bakar Gas

Table: Gas Fuel Supply Agreement

No	Sektor Sector	Pemasok Supplier	No. Perjanjian No. of Agreement	Periode Period	Satuan Unit	Yang Disepakati* Agreed*
1.	Muara Karang dan Tanjung Priok Muara Karang and Tanjung Priok	***)	652/BP00000/2003-SO	2004-2017	TBtu	679,44
		PT Nusantara Regas	273.PJ/041/DIR/2012	2012-2022	Bbtu	300,00
					Bbtu	200,00
2.	Grati	Santos (Sampang) Pty Ltd., Singapore Petroleum Sampang Ltd dan Cue Sampang Pty Ltd	**	2012-2018	Bbtu	90,10-0,99

No	Sektor Sector	Pemasok Supplier	No. Perjanjian No. of Agreement	Periode Period	Satuan Unit	Yang Disepakati* Agreed*
			115.PJ.061/IP/2010	2011-2017	Bbtu	55
3.	Tambak Lorok	PT Sumbar Petrindi Perkasa	97.PJ/061/IP/2007	2011-2022	BBtu	219
		PC Muriah Ltd	107.PJ.061/2012	2014-2026	Bbtu	354,78
4	Bali	PT Pertamina (Persero), Total E&P Indonesia	01888.PJ/EPI.01.02/ DIR/2016	2016-2017	MMBTU	±7

Catatan:

***) Dalam angka penuh**

****) PT. Perusahaan Gas Negara ("PGN")**

*****) Pertamina Hulu Energy ONJW Ltd.: Itochu Oil Exploration Co. Ltd., Orchard Energy Java BV.; Inpex Jawa Ltd.: CNOOC ONJW Ltd.; dan Talisman Resources (*North West Java*) Ltd.**

Note:

*) In full amount

**) PT. Perusahaan Gas Negara ("PGN")

***) Pertamina Hulu Energy ONJW Ltd.: Itochu Oil Exploration Co. Ltd., Orchard Energy Java BV.; Inpex Jawa Ltd.: CNOOC ONJW Ltd.; and Talisman Resources (North West Java) Ltd.

Perjanjian Pasokan Bahan Bakar Batubara

Coal Supply Agreement

Tabel Pasokan Bahan Bakar Batubara

Table: Coal Supply Agreement

No	Pemasok Supplier	Nomor Kontrak Contract Number	Jumlah dalam Metrik ton* Amount in ton Metric*	Periode Period
1.	PT Bukit Asam (Persero) Tbk	12.PJ/061/IP/2013	5.300.000	2013 - 2022
2.	PT Eksploitasi Energi Indonesia	04/PJ/061/IP/2006	480.000	2006 - 2018
3.	PT Natuna Energi Indonesia	16.PJ/061/IP/2006	480.000	2006 - 2017
4.	PT Oktasan Baruna Persada	13.PJ/061/IP/2006	660.000	2006 - 2017
5.	PT Berau Coal	84.PJ/061/IP/2008	2.500.000	2009 - 2018
6.	PT Kideco Jaya Agung	85.PJ/061/IP/2008	1.500.000	2009 - 2018
7.	PT Adaro Indonesia	117.PJ/061/IP/2014	1.500.000	2014 - 2023

***) Dalam angka penuh**

*) In full amount

Harga pembelian batubara berkisar antara Rp594.207 dan Rp735.781 per ton sebelum yang disesuaikan nilai kalor, kadar abu, sulfur, air, SFT dan HGI.

The purchase coal prices ranges between Rp594,207 and Rp735,781 per ton, before adjusted with calorific value, ash, sulfur, water, SFT, and HGI.

INFORMASI IKATAN MATERIAL UNTUK INVESTASI BARANG MODAL

Material Agreement Information for Capital Goods Investment

Perjanjian Pasokan Bahan Bakar Minyak

Perusahaan melalui PLN dan Pertamina mengadakan Perjanjian Payung Jual Beli Bahan Bakar Minyak Nomor 071.PJ/060/DIR/2001 tanggal 8 Oktober 2001. Perjanjian ini telah diadendum tanggal 16 Mei 2007 dimana Perusahaan dan Pertamina menyepakati antara lain: (i) penggunaan harga bahan bakar bulanan ditetapkan oleh Pertamina untuk periode 1 Januari sampai dengan 30 April 2007 dan harga bahan bakar 109,5% dari Mean Oil Platts Singapore (MOPS) ditambah Pajak Pertambahan Nilai untuk periode 1 Mei 2007 sampai dengan 31 Desember 2007; (ii) harga bahan bakar setelah tanggal 31 Desember 2007 akan ditetapkan oleh kedua belah pihak setiap tahun; (iii) jangka waktu pembayaran berikut pengenaan denda keterlambatan pembayaran sebesar tingkat bunga Sertifikat Bank Indonesia bulanan 2007, saldo utang yang belum dibayar atas pembelian bahan bakar sampai dengan 30 April 2007 dikenakan bunga sebesar tingkat bunga Sertifikat Bank Indonesia per tahun ditambah 1,3%, sampai diselesaikan dengan menerbitkan obligasi PLN selambat-lambatnya tanggal 31 Agustus 2007; (iv) utang kepada Pertamina, termasuk obligasi yang akan diterbitkan maksimum sebesar Rp18 triliun; (v) perjanjian ini berlaku untuk lima tahun sejak 1 Januari 2007 sampai dengan 31 Desember 2011.

Berdasarkan Surat Kesepakatan Bersama tanggal 16 Mei 2007, PT Sucofindo (Persero) ditunjuk sebagai *independent surveyor*.

Berdasarkan Adendum III Perjanjian Jual Beli Bahan Bakar Minyak tanggal 7 November 2011, Perusahaan dan Pertamina menyepakati dalam tahun 2011 sebagai berikut:

1. HSD
   a. Harga pembelian HSD sampai dengan 2.537.161 kl di 18 titik penyerahan Pertamina adalah 105% dari MOPS.
   b. Harga pembelian HSD sampai dengan 480.487 kl di titik penyerahan Pertamina Terminal Transit Manggis adalah 108% dari MOPS.
   c. Harga pembelian HSD sampai dengan 2.978.360 kl di titik penyerahan Instalasi Tanjung Priok dan Instalasi Surabaya Group adalah 108,5% dari MOPS.

Oil Fuel Supply Agreement

The Company through PLN and Pertamina entered an Oil Fuel Sale and Purchase Agreement No. 071.PJ/060/DIR/2001 dated October 8, 2001. The agreement has been amended on May 16, 2007,, whereby the Company and Pertamina agreed among others: (i) the monthly fuel price to be used for the period January 1 until April 30, 2007 is determined by Pertamina and, the fuel price of 109.5% from Mid Oil Platts Singapore (MOPS) plus Value Added Tax for the period May 1, 2007 until December 31, 2007; (ii) the fuel price subsequent to December 31, 2007 will be determined by both parties every year; (iii) the terms of payment and penalty charges on late payment with a rate of monthly Certificate of Bank Indonesia plus 1.3%; (iv) effective on May 1, 2007, the unpaid balance of payable for the purchases of fuel until April 30, 2007 will bear an interest with a rate per annum of Certificate of Bank Indonesia plus 1.3%, until settled by issuance of PLN Bonds, which shall be no later than August 31, 2007; (v) the maximum payable to Pertamina, includes bonds which will be issued amounting to Rp 18 trillion; (vi) this agreement is valid for 5 years from January 1, 2007 until December, 31 2011.

Based on the Collective Agreement dated May 16, 2007, PT Sucofindo (Persero) is assigned as independent surveyor.

Based on Addendum III on Oil Fuel Sale and Purchase Agreement, dated November 7, 2011, in 2011, the Company and Pertamina agreed among others:

1. HSD
   a. HSD purchase price up to 2,537,161 kl in 18 points of Pertamina handover point is 105% of MOPS.
   b. HSD purchase price up to 480,487 kl in Pertamina handover point Manggis Transit Terminal is 108% of MOPS.
   c. HSD purchase price up to 2,978,360 kl in the handover point of Tanjung Priok and Surabaya Group Installation is 108.5% of MOPS.

d. Harga pembelian HSD diatas 5.996.008 kl atau yang diserahkan diluar 21 titik penyerahan yang ditetapkan Pertamina adalah 109,5% dari MOPS.

2. Harga pembelian IDO sampai dengan 3.933 kl di titik penyerahan Kilang Plaju adalah 105% dari MOPS dan pembelian diatas 3.933 kl atau yang diserahkan diluar titik penyerahan Kilang Plaju adalah 109,5% dari MOPS.
3. Harga pembelian MFO sampai dengan 1.193.166 kl di titik penyerahan Kilang Cilacap adalah 105% dari MOPS dan pembelian diatas 1.193.166 kl atau yang diserahkan diluar titik penyerahan Kilang Cilacap adalah 109,5% dari MOPS.

Tahun 2013, Perusahaan dan Pertamina sepakat untuk menggunakan harga tahun 2011, karena amandemen Perjanjian Jual Beli Bahan Bakar Minyak belum diselesaikan.

Dalam rangka penyelesaian harga jual Bahan Bakar Minyak (BBM) (HSD dan MFO) Pertamina kepada PT PLN (Persero), telah dilakukan rapat koordinasi antara Menteri Keuangan, Menteri BUMN, Staf Ahli Menteri Bidang Investasi dan Produksi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Direktur Utama Pertamina dan Direktur Utama PT PLN (Persero) pada tanggal 30 Januari 2015. Berdasarkan rapat koordinasi tersebut pada tanggal 5 Februari 2015, Menteri Keuangan Republik Indonesia mengeluarkan surat Nomor S-74/MK.02/2015 kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral mengenai rekomendasi penetapan harga jual beli HSD dan MFO antara PT PLN (Persero) dan Pertamina tahun 2014. Penyelesaian harga jual beli tersebut berdasarkan audit BPKP atas harga jual BBM (HSD dan MFO) untuk periode tahun 2013 dan semester 1 2014 sebagai referensi harga jual BBM yang akan digunakan pada tahun 2014.

Berdasarkan pertemuan tanggal 30 Januari 2015 tersebut diatas, pokok-pokok kesepakatan antara Pertamina dan PT PLN (Persero) antara lain:

a. Harga jual tahun 2014 menggunakan harga berdasarkan *review* Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan sebesar HSD: MOPS + 9,19% dan MFO: MOPS + 11,94%;

d. HSD purchase price for more than 5,996,008 kl or that is being handed over outside 21 handover points set forth by Pertamina, is 109.5% of MOPS.

2. The IDO purchase price up to 3,933 kl in handover point of Kilang Plaju is 105% of MOPS and purchase price above 3,933 kl or that is being handed over outside handover point of Kilang Plaju is 109.5% of MOPS.
3. The MFO purchase price up to 1,193,166 kl in handover point of Kilang Cilacap is 105% of MOPS and purchase price above 1,193,166 kl or that is being handed over outside handover point of Kilang Cilacap is 109.5% of MOPS.

In 2013, the Company and Pertamina agreed to use the price in 2011, because amendment of the Oil Fuel Sale and Purchase Agreement had not been finalized yet.

In order to complete the selling price of Oil Fuel (BBM) (HSD and MFO) of Pertamina to PT PLN (Persero), a coordination meeting between the Minister of Finance, Minister of State-Owned Enterprises, Minister's Expert Staff of Investment and Production of Ministry of Energy and Mineral Resources (ESDM), President Director of Pertamina, and President Director of PT PLN (Persero) was held on January 30, 2015. Based on the coordination meeting, on February 5, 2015, the Minister of Finance of Republic of Indonesia issued letter No. S-74/MK.02/2015 to Minister of Energy and Mineral Resources on the recommendation of HSD and MFO sale prices between the PT PLN (Persero) and Pertamina in the year 2014. The settlement of sale price was based on BPKP's audit on oil fuel price (HSD and MFO) during the 2013 period and the first semester of 2014 as references of oil fuel price that would be used in 2014.

Based on the said meeting on January 30, 2015, the main agreement between Pertamina and PT PLN (Persero), among others:

a. Sale prices in 2014 used price based on review of Supervisory Board for Finance and Development by HSD: MOPS + 9.19% and MFO: MOPS + 11.94%;

INFORMASI IKATAN MATERIAL UNTUK INVESTASI BARANG MODAL

Material Agreement Information for Capital Goods Investment

b. Dalam rangka efisiensi biaya pembelian di tahun 2015, PT PLN (Persero) diperkenankan untuk mencari sumber BBM selain Pertamina, dengan tetap menjaga keamanan pasokan BBM.

PLN telah mencatat pembelian HSD dan MFO tahun 2014 berdasarkan harga tersebut. Dalam rangka penyelesaian harga jual Bahan Bakar Minyak (HSD dan MFO) Pertamina kepada Perusahaan, telah dilakukan pembahasan harga jual beli bahan bakar minyak (HSD dan MFO) antara Pertamina dan Perusahaan tahun 2015 di Kantor Kementerian Badan Usaha Milik Negara, di fasilitasi oleh Deputi Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan dan Pariwisata Kementerian BUMN, untuk menentukan harga transaksi BBM di tahun 2015.

Berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Harga Jual Beli Bahan Bakar Minyak (HSD dan MFO) antara Pertamina dan Perusahaan tanggal 9 Februari 2016 dengan hasil sebagai berikut:

i. Harga transaksi HSD tahun 2016 adalah 107% dari MOPS
ii. Harga transaksi MFO tahun 2016 adalah 109,5% dari MOPS.

Sampai tanggal pelaporan keuangan konsolidasian, pembaruan kontrak BBM masih dalam proses. Perusahaan telah mencatat pembelian HSD dan MFO tahun 2015 berdasarkan harga tersebut.

Perjanjian Pasokan Uap Panas Bumi

Melalui PT PLN (Persero), Perusahaan mengadakan perjanjian dengan Pertamina untuk pengadaan uap panas bumi untuk daerah Kamojang selama 30 tahun yang berakhir tahun 2012 dan telah melalui Amandemen I Surat Perjanjian antara Pertamina dan PLN PLTP Unit 1,2,3 di Kamojang. Sampai tahun 2015, perjanjian masih menggunakan Amandemen V Perjanjian Interim antara PT Pertamina Geothermal Energy, PT PLN (Persero) dan PT Indonesia Power. Pada tanggal 11 Februari 2016, dilakukan amandemen secara keseluruhan dan pernyataan kembali atas perjanjian induk, yang berlaku mulai 1 Agustus 2012 sampai dengan 31 Desember 2040. Untuk PLTP Gunung Salak dan Darajat perjanjian selama masa 30 tahun yang berakhir tahun 2030.

b. For efficiency of purchase price in 2015, PT PLN (Persero) is allowed to seek BBM source other than Pertamina, whilst maintaining the secure supply of BBM.

PLN has recorded purchase of HSD and MFO in 2014 based on said price. In order to finalize the sale prices of Oil Fuel (HSD and MFO) of Pertamina to the Company, the discussion for oil sale prices (HSD and MFO) between the Pertamina and the Company in 2015 is held in the Office of State-Owned Ministry, facilitated by Deputy of Energy, Logistics, Regionals, and Tourism Business Unit of the State-Owned Ministry, to determine the oil fuel transaction price in 2015.

Based on the Minutes of Oil Fuel Sale and Purchase Agreement (HSD and MFO) between the Pertamina and the Company dated 9 February 2016, the results are:

i. HSD transaction price in 2016 is 107% of MOPS

ii. HSD transaction price in 2016 is 109.5% of MOPS.

As of the date of consolidated financial report, the renewal of oil fuel contract is still in process. PLN has recorded purchase of HSD and MFO in 2015 based on said price.

Geothermal Steam Procurement Agreement

Through PT PLN (Persero), the Company entered an agreement with Pertamina to procure and supply geothermal steam in Kamojang area for 30 years, which ended in 2012, and has been through the Amendment I Letter of Agreement between Pertamina and PLN Unit 1,2,3 GPP in Kamojang. Until 2015, the agreement still uses Amendment V Interim Agreement between PT Pertamina Geothermal Energy, PT PLN (Persero), and PT Indonesia Power. On February 11, 2016,, complete amendments and return statements on the master agreement is done, which is effective since August 1, 2012 until December 31, 2040. For Gunung Salak GPP and Darajat GPP, the agreement has 30 years period, which will end in 2030.

Perjanjian Pasokan Bahan Bakar Lainnya

Perjanjian Transportasi Gas Pembangkit Listrik Tambak Lorok

Pada tanggal 10 Desember 2012, Perusahaan melalui PT PLN (Persero) menandatangani surat perjanjian kerjasama Nomor 278-1.PJ/041/DIR/2012 terkait transportasi gas PC Muriah Ltd. Dengan PT Bakrie & Brothers Tbk untuk pembangkit listrik Tambak Lorok. Perjanjian transportasi gas tersebut kemudian dialihkan melalui novasi dan perubahan perjanjian pengangkutan gas melalui pipa yang ditandatangani tanggal 22 Februari 2016 oleh PT Bakrie & Brothers Tbk, PC Muriah Ltd., PT PLN (Persero), Saka Energi Muriah Ltd., dan PT Kalimantan Jawa Gas sebagai *transporter*. Perjanjian transportasi gas akan tetap berlangsung selama perjanjian penyaluran gas berlangsung.

Perjanjian Jasa Pengurusan Perkapalan, Fasilitas Penyimpanan *Liquid Natural Gas* (LNG) dan terminal LNG di PLTDG Pesanggaran.

Pada tanggal 8 Desember 2015, Perusahaan menandatangani perjanjian jasa pengurusan perkapalan, fasilitas penyimpanan LNG dan terminal LNG di PLTDG Pesanggaran dengan PT Pelindo Energi Logistik. Perjanjian jasa pengurusan perkapalan dan fasilitas LNG berlangsung selama 7 tahun melalui kontrak Nomor 187.PJ/061/IP/2015 dan 188.PJ/061/IP/2015, sedangkan perjanjian jasa terminal LNG berlangsung selama 5 tahun melalui kontrak No. 189.PJ/061/ IP/2015.

Stand By Letter of Credit (SBLC)

Perusahaan memliki fasilitas *Non Cash Loan* sebagai SBLC dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang digunakan untuk jaminan perjanjian jual beli gas dengan Santos Sampang Pty. Ltd. Dengan nominal sebesar USD25.008.353,81 atau setara dengan Rp336.012 juta per 31 Desember 2016, dengan jangka waktu 25 Januari 2016 sampai dengan 24 Januari 2017 dan diperpanjang dengan nominal sebesar USD19.996.848,40 atau setara dengan Rp268.678 juta per 31 Desember 2016, dengan jangka waktu 25 Januari 2017 sampai dengan 24 Januari 2018.

Other Fuel Supply Agreement

Gas Transportation Agreement for Tambak Lorok Gas Turbine Power Plant

On December 10, 2012, the Company, through PT PLN (Persero) signed a letter of agreement No. 278-1.PJ/041/DIR/2012 related to gas transportation of PC Muriah Ltd. with PT Bakrie & Brothers Tbk for Tambak Lorok Gas Turbine Power Plant. The gas transportation agreement is then transferred through novation and amendment of gas transportation through pipe, which was signed on February 22, 2016 by PT Bakrie & Brothers Tbk, PC Muriah Ltd., PT PLN (PLN (Persero), Saka Energi Muriah Ltd., and PT Kalimantan Jawa Gas as transporter. The gas transportation agreement will continue as long as the gas distribution occurs.

Shipping Service Agreement, Liquid Natural Gas (LNG) Storage Facility, and LNG Terminal in DGPP Pesanggaran.

On December 8, 2015, the Company signed an agreement for shipping service, LNG storage facility, and LNG terminal in Pesanggaran, DGPP with PT Pelindo Energi Logistik. The agreement of shipping service and LNG facility lasts for 7 years through contract No. 187.PJ/061/IP/2015 and 188.PJ/061/IP/2015, whilst LNG terminal service lasts 5 years through contract No. 189.PJ/061/IP/2015.

Standby Letter of Credit (SBLC)

The Company has Non Cash Loan facility as SBLC with PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, which is used as guarantee of gas sale and purchase agreement with Santos Sampang Pty. Ltd. with a nominal value of USD25,008,353.81 or equivalent to Rp336,012 million as of 31 December 2016, with period from January 25, 2016 until January 24, 2017, and then extended with a nominal value of USD19,996,848.40 or equivalent to Rp267,678 million as of December 31, 2016, with period from January 25, 2017 until January 24, 2018.

INFORMASI IKATAN MATERIAL UNTUK INVESTASI BARANG MODAL

Material Agreement Information for Capital Goods Investment

Permohonan Pembatalan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Perwakilan Surabaya atas Perkara Arbitrase Nomor 18/ARB/BANI-SBY/VI/2015 antara konsorsium PT Boma Bisma Indra - PT Indosurya Persada dengan PT Indonesia Power Unit Pembangkitan Semarang

Yusuf Subiantoro, selaku penanggung jawab finansial pimpinan kerjasama konsorsium PT Boma Bisma Indra - PT Indosurya Persada (BBIISP), mengajukan permohonan pembatalan putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Perwakilan Surabaya kepada Pengadilan Negeri Semarang atas Perkara Arbitrase Nomor 18/ARB/BANI-SBY/VI/2015 yang telah dibacakan pada Selasa 17 Mei 2016, yang putusannya berisi tidak terbuktinya PT Indonesia Power Unit Pembangkitan Semarang melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Konsorsium BBIISP sebesar Rp7.671 juta ditolak oleh BANI.

Atas tuntutan perkara tersebut, pada tanggal 29 November 2016 Pengadilan Negeri Semarang memutuskan untuk membatalkan Putusan Arbitrase Badan Arbitrase Nasional Indonesia Surabaya Nomor 18/ARB/BANI-SBY/VI/2015, dan menghukum Indonesia Power untuk membayar kepada Konsorsium atas kekurangan pembayaran sesuai Progres Laporan Kemajuan Pekerjaan senilai 26% atau sebesar Rp2.600 juta.

Pada tanggal 20 Desember 2016, Indonesia Power melalui kuasa hukumnya Jaksa Pengacara Negara dari Kejaksaan Agung mengajukan Memori Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Semarang dalam Perkara Perdata Nomor 01/Arbitrase/2016/PN.SMG Tanggal 29 November 2016 kepada Ketua Mahkamah Agung RI.

Request for Cancellation on Decision of Surabaya Representative for Indonesian National Arbitration Board, on Arbitration Case No. 18/ARB/BANI SBY/VI/2015 between consortium of PT Boma Bisma Indra - PT Indosurya Persada with PT Indonesia Power Semarang Generating Unit

Yusuf Subiantoro, as the person financially responsible and lead of cooperation agreement for consortium PT Boma Bisma Indra - PT Indosurya Persada (BBIISP), submitted an application for cancellation on decision of Surabaya Representative Indonesian National Arbitration Board (BANI) to Semarang District Court on Arbitration Case No. 18/ARB/BANI SBY/VI/2015, which was read out on Tuesday May 17, 2016, with the verdict contained the indemnity of PT Indonesia Power Semarang Generating Unit against the law, hence the claim for compensation filed by BBIISP Consortium in the amount of Rp7,671 million was rejected by BANI.

On the said lawsuit, on November 29, 2016, Semarang District Court decided to annul the Arbitration Decision of Surabaya Indonesian National Arbitration Board No. 18/ARB/BANI SBY/VI/2015, and sentenced Indonesia Power to pay Consortium on the lack of payment in accordance with Work Progress Report in the amount of 26% or Rp2,600 million.

On December 20, 2016, Indonesia Power, through its attorney, State Attorney from the Attorney General filed an Appeal on the Semarang District Court decision on Civil Procedure No. 01/Arbitrase/2016/PN.SMG dated November 29, 2016 to Chairman of the Supreme Court of the Republic of Indonesia.

INVESTASI BARANG MODAL

Capital Goods Investment

Investasi merupakan pengeluaran yang dilakukan oleh Perusahaan untuk membeli Aset Tetap atau menambah nilai Aset Tetap yang telah dimiliki dengan tujuan akan memberikan nilai manfaat di masa yang akan datang. Nilai investasi Barang Modal Perusahaan tahun 2016 sebesar Rp1.967.062 juta meningkat 40,88% dibandingkan tahun 2015 sebesar Rp1.396.294 juta. Rincian investasi barang modal tahun 2016 ditunjukkan dalam tabel berikut.

Investment represent expenditures made by the Company to purchase Fixed Assets or to add to the value of Fixed Assets already owned, with the aim to provide more benefit value in the future. Capital Goods Investment rate of the Company in 2016 is amounted to Rp1,967,062 million, an increase of 40.88%, compared to 2015 which was Rp1,396,294 million. The details of capital goods investment in 2016 are shown in the following table.

INVESTASI BARANG MODAL

Capital Goods Investment

Tabel Investasi Barang Modal

Table: Capital Goods Investment

No	Jenis Investasi Investment Type	2012	2013	2014	2015	2016	Kebijakan Belanja Modal Tahun 2016 Capital Expenditure Policy 2016
1	Bangunan, waduk dan prasarana Building, reservoirs, and infrastructures	4.509	2.074	2.704	7.099	94.221	Tujuan Investasi: Keandalan dan efisiensi pembangkit Investment Objective: Reliability and efficiency of the power plant Sumber dana: Anggaran Investasi (internal) Fund source: Investment budget (internal) Mata Uang: Rupiah Currency: Rupiah Langkah Perlindungan Risiko: Asuransi untuk bangunan pembangkit dan pemeliharaan sesuai prosedur untuk waduk dan prasarana non pembangkit Risk Protection Steps: Insurance for power plant building and maintenance in line with procedures for reservoir and non-power plant facilities
2	Instalasi dan mesin pembangkit Generator Machine and Installation	337.458	274.287	518.951	258.923	482.238	Tujuan Investasi: Keandalan dan efisiensi pembangkit Investment Objective: Reliability and efficiency of the power plant Sumber dana: Anggaran Investasi (internal) Fund source: Investment budget (internal) Mata Uang: Rupiah dan Valuta Asing (EUR & JPY) Currency: Rupiah and Foreign Currency (EUR & JPY) Langkah Perlindungan Risiko: Asuransi Pembangkit Risk Protection Steps: Power Plant Insurance

No	Jenis Investasi Investment Type	2012	2013	2014	2015	2016	Kebijakan Belanja Modal Tahun 2016 Capital Expenditure Policy 2016
3	Peralatan transmisi Transmission Equipment	7.377	6.005	31.83	16.133	300.323	Tujuan Investasi: Keandalan dan efisiensi pembangkit Investment Objective: Reliability and efficiency of the power plant Sumber dana: Anggaran Investasi (internal) Fund source: Investment budget (internal) Mata Uang: Rupiah Currency: Rupiah Langkah Perlindungan Risiko: Asuransi Pembangkit Risk Protection Steps: Power Plant Insurance
4	Instalasi telekomunikasi Telecommunication Installation	4.816	11.126	5.202	5.584	6.289	Tujuan Investasi: Mendukung kinerja operasional perusahaan Investment Objective: To support operational performance Sumber dana: Anggaran Investasi (internal) Fund source: Investment budget (internal) Mata Uang: Rupiah Currency: Rupiah Langkah Perlindungan Risiko: Pemeliharaan sesuai prosedur Risk Protection Steps: Maintenance according to procedures

INVESTASI BARANG MODAL
Capital Goods Investment

No	Jenis Investasi Investment Type	2012	2013	2014	2015	2016	Kebijakan Belanja Modal Tahun 2016 Capital Expenditure Policy 2016
5	Peralatan umum General equipment	21.48	29.032	13.419	41.257	50.988	Tujuan Investasi: Mendukung kinerja operasional perusahaan Investment Objective: To support Company's operational performance Sumber dana: Anggaran Investasi (internal) Fund source: Investment budget (internal) Mata Uang: Rupiah Currency: Rupiah Langkah Perlindungan Risiko: Pemeliharaan sesuai prosedur Risk Protection Steps: Maintenance according to process
6	Kendaraan bermotor Vehicles	561	3.609	-	-	13.618	Tujuan Investasi: Mendukung kinerja operasional perusahaan Investment Objective: To support Company's operational performance Sumber dana: Anggaran Investasi (internal) Fund source: Investment budget (internal) Mata Uang: Rupiah Currency: Rupiah Langkah Perlindungan Risiko: Pemeliharaan sesuai prosedur Risk Protection Steps: Maintenance according to procedures

No	Jenis Investasi Investment Type	2012	2013	2014	2015	2016	Kebijakan Belanja Modal Tahun 2016 Capital Expenditure Policy 2016
7	Material Cadang Material Parts	143.832	194.394	461.005	196.051	-	Tujuan Investasi: Menjamin ketersediaan material cadang Investment Objective: To ensure the availability of spare parts Sumber dana: Anggaran Investasi (internal) Fund source: Investment budget (internal) Mata Uang: Rupiah Currency: Rupiah Langkah Perlindungan Risiko: Pemakaian dan penyimpanan sesuai prosedur Risk Protection Steps: Utilization and storage according to procedures
8	Lain lain Others	552	-	-	-	-	Tujuan Investasi: Mendukung kinerja operasional perusahaan Investment Objective: To support Company's operational performance Sumber dana: Anggaran Investasi (internal) Fund source: Investment budget (internal) Mata Uang: Rupiah Currency: Rupiah Langkah Perlindungan Risiko: Pemeliharaan sesuai prosedur Risk Protection Steps: Maintenance according to procedures

INVESTASI BARANG MODAL

Capital Goods Investment

No	Jenis Investasi Investment Type	2012	2013	2014	2015	2016	Kebijakan Belanja Modal Tahun 2016 Capital Expenditure Policy 2016
9	Tanah Land	5.741	8.113	5.222	4.528	371	Tujuan Investasi: Modal utama untuk membangun pembangkit baru Investment Objective: Main capital to install new power plant Sumber dana: Anggaran Investasi (internal) Fund source: Investment budget (internal) Mata Uang: Rupiah Currency: Rupiah Langkah Perlindungan Risiko: Pemeliharaan sesuai prosedur dan kepemilikan sesuai peraturan pemerintah Risk Protection Steps: Maintenance according to procedures and ownership in accordance with government's regulation
10	Pekerjaan Dalam Pelaksanaan Work in Progress	242.585	423.273	1.867.234	866.719	1.027.814	Tujuan Investasi: Keandalan dan efisiensi pembangkit Investment Objective: Reliability and efficiency of the power plant Sumber dana: Anggaran Investasi (internal) Fund source: Investment budget (internal) Mata Uang: Rupiah dan Valuta Asing (USD & EUR) Currency: Rupiah and Foreign Currency (USD & EUR) Langkah Perlindungan Risiko: Asuransi pembangkit & pemeliharaan sesuai prosedur Risk Protection Steps: Power Plant Insurance & maintenance according to procedures
Jumlah Belanja Modal **Total Capital Expenditures**	**768.461**	**951.913**	**2.905.567**	**1.396.294**	**1.967.062**	
Arus Kas Pembayaran Untuk Belanja Modal **Cash Flow Payments for Capital Expenditures**	**768.461**	**951.913**	**2.905.567**	**1.396.294**	**1.967.062**	

INFORMASI TRANSAKSI MATERIAL YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN DAN/ATAU DENGANPIHAK AFILIASI/BERELASI

Information on Material Transaction with Conflict of Interest and/or with Affiliated/Related Parties

Transaksi Material yang Mengandung Benturan Kepentingan

Selama tahun 2016, tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan, sehingga tidak terdapat informasi yang diungkapkan.

Material Transaction with Conflict of Interest

Throughout 2016, there is no transaction with conflict of interest, so there is no information to be disclosed.

INFORMASI TRANSAKSI MATERIAL YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN DAN/ATAU DENGAN PIHAK AFILIASI/BERELASI

Information on Material Transaction with Conflict of Interest and/or with Affiliated/Related Parties

Transaksi Material dengan Pihak Afiliasi/Berelasi

Pihak-pihak Berelasi

Pihak-pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan Perusahaan dan entitas anak (entitas pelapor):

a. Orang atau anggota keluarga dekatnya mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
   i. memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
   ii. memiliki pengaruh signifikan atas pelapor atau entitas pelapor; atau
   iii. merupakan personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk dari entitas pelapor.
b. Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
   i. Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya saling berelasi dengan entitas lain);
   ii. Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya);
   iii. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama;
   iv. Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga;
   v. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca-kerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor;
   vi. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a); atau

Material Transaction with Affiliated/Related Parties

Related Parties

Related parties are people or entities related to the Company and subsidiary company (reporting entity):

a. A person or close member of the family who has relation to the reporting entity, if said person:
   i. has control or joint control over the reporting entity;
   ii. has significant influence on the reporter or reporting entity; or
   iii. is a key management personnel of the reporting entity or holding entity of the reporting entity.
b. An entity is related to the reporting entity if the said entity fulfills one of the followings:
   i. The entity or reporting entity is a member of the same group companies (meaning the holding entity, a subsidiary entity, and the next subsidiary entity is interrelated with other entities);
   ii. One entity is an associated entity or joint ventures of other entities (or other associations or joint venture that is a member of a group companies, in which the other entities are part of its members);
   iii. Two of those entities are a joint venture from a third entity;
   iv. One entity is a joint venture from a third entity, and other entity is an associated entity of a third entity;
   v. Such entity is a pension compensation program for wages of one of the reporting entities or related entity to the reporting entity. If the reporting entity holds such a program, then the sponsor entity is also related to the reporting entity;
   vi. Entity that is controlled or jointly controlled by an entity as identified in (a); or

vii. Orang yang diidentifikasi dalam huruf (a) (i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).

c. Entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama, atau dipengaruhi secara signifikan oleh pemerintah. Pemerintah dalam hal ini adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia yang merupakan pemegang saham dari Perusahaan.

Seluruh transaksi yang dilakukan dengan pihak-pihak berelasi, baik yang dilakukan dengan atau tidak dengan persyaratan dan kondisi yang sama sebagaimana dilakukan dengan pihak ketiga, diungkapkan dalam laporan keuangan konsolidasian.

Sifat Hubungan Pihak Berelasi

Berikut adalah sifat hubungan pihak berelasi:

a. Pemerintah Republik Indonesia merupakan pemegang saham PT PLN (Persero) dan Badan Usaha Milik Negara,
b. PT PLN (Persero) dan Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan PT PLN (Persero) merupakan pemegang saham Perusahaan,
c. Perusahaan dan entitas anak mempunyai pengaruh signifikan atas investasi pada entitas asosiasi atau ventura bersama,
d. PT Indonesia Power, PT Pelayanan Listrik Nasional Batam (PLN Batam), PT Pengembangan Listrik Nasional Geothermal (PLN Geothermal), PT PLN Batubara, dan PT Indonesia Comnets Plus merupakan perusahaaan yang pemegang sahamnnya sama dengan pemegang saham utama Perusahaan dan atau sebagian pengurusnya sama dengan Perusahaan,
e. Dewan Komisaris dan Direksi merupakan personil manajemen kunci Perusahaan.

vii. The person identified in (a) (i) has significant influence over entities or personnel of key management of entities (or holding entities of those entities).

c. Entity that is controlled, jointly controlled, or significantly influenced by the government. Government in this case is the Minister of Finance of the Republic of Indonesia, which is the shareholder of the Company.

Every transaction carried out by the related parties, both within or not within the terms and conditions as those carried out with a third party, shall be disclosed in the consolidated financial statement.

Nature of Related Parties Relationship

The following is the nature of the related parties' relationship:

a. The government of the Republic of Indonesia is the shareholder of PT PLN (Persero), a State-Owned Enterprise,
b. PT PLN (Persero) and Foundation for Education and Welfare PT. PLN (Persero) are the shareholder of the Company,
c. Company and the subsidiaries have significant influence on the investment on associated entity or joint venture,
d. PT Indonesia Power, PT Pelayanan Listrik Nasional Batam (PLN Batam), PT Pengembangan Listrik Nasional Geothermal (PLN Geothermal), PT PLN Batubara, and PT Indonesia Comnets Plus are companies whose shareholders are equal with the major shareholder of the Company, and/or some of its management is the same as the Company,
e. Board of Commissioners and Board of Directors are key management personnel in the Company.

INFORMASI TRANSAKSI MATERIAL YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN DAN/ATAU DENGAN PIHAK AFILIASI/BERELASI

Information on Material Transaction with Conflict of Interest and/or with Affiliated/Related Parties

Nama Pihak yang Bertransaksi

Berikut ini adalah daftar pihak berelasi yang memiliki transaksi dengan Perusahaan:

Name of the Transacting Parties

The following is list of related parties that have transactions with the Company:

Tabel Nama Pihak Berelasi

Table: Name of the Transacting Parties

No	Pihak-pihak berelasi Related Parties	Sifat hubungan Nature of the Relationship
1.	PT PLN (Persero) dan Yayasan Pendidikan Kesejahteraan PT PLN (Persero) and Foundation for Education and Welfare	Pemegang saham Perusahaan Shareholder
2.	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk ("Bank Rakyat Indonesia")	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia Control through the Government of the Republic of Indonesia
3.	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("Bank Mandiri")	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia Control through the Government of the Republic of Indonesia
4.	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("Bank Negara Indonesia")	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia Control through the Government of the Republic of Indonesia
5.	PT Wijaya Karya – Mirlindo Padu Kencana	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia Control through the Government of the Republic of Indonesia
6.	PT Pertamina (Persero)	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia Control through the Government of the Republic of Indonesia
7.	PT Tambang Batubara Bukit Asam Tbk	BUMN yang dimiliki oleh Menteri Keuangan State-Owned Enterprise, owned by the Minister of Finance
8.	PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	BUMN yang dimiliki oleh Menteri Keuangan State-Owned Enterprise, owned by the Minister of Finance
9.	PT Wijaya Karya	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia Control through the Government of the Republic of Indonesia
10.	PT Nusantara Regas	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia Control through the Government of the Republic of Indonesia
11.	PT Surveyor Indonesia	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia Control through the Government of the Republic of Indonesia
12.	PT Sucofindo (Persero)	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia Control through the Government of the Republic of Indonesia
13.	PT Asuransi Jasa Indonesia	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia Control through the Government of the Republic of Indonesia
14.	Perum Jasa Tirta	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia Control through the Government of the Republic of Indonesia
15.	PT Perta Daya Gas	Ventura Bersama Joint Venture
16.	Dana pensiun PLN PLN Pension Fund	Program Imbalan Pasca Kerja Pension Compensation Program
17.	PT Rajamandala Elektric Power	Ventura Bersama Joint Venture

Tujuan Transaksi Pihak Berelasi

Tujuan utama dilakukannya transaksi dengan pihak berelasi secara umum adalah salah satu bentuk dukungan kepada kelancaran dan keberlanjutan bisnis Perusahaan.

Objective of the Related Parties Transaction

The general objective of conducting a transaction with related parties is as a form of support to the sustainability and continuity of the Company's business.

Nilai Transaksi Pihak Berelasi

Berikut adalah nilai transaksi dengan pihak berelasi pada tahun 2015 dan 2016:

Value of the Related Parties Transaction

The following is the value of the related parties' transaction in 2015 and 2016:

Tabel Nilai Transaksi Pihak Berelasi Tahun 2015-2016 (Rp juta)
Table: Value of Related Parties Transaction 2015-2016 (Rp million)

Pihak Berelasi Related Parties	2015	2016
Piutang Pihak Berelasi **Related Parties Receivables**		
PT Perta Daya Gas	293.368	260.085
PT Rajamandala Bectric Power	149.070	236.374
Lain-lain Others	36.320	27.011
Sub jumlah Subtotal	478.758	523.470
Kas dan setara kas **Cash and Cash Equivalents**		
PT Bank Negara Indonesia	515.617	962.769
PT Bank Rakyat Indonesia	123.870	63.964
PT Bank Mandiri	203.466	413.982
Sub jumlah Subtotal	842.953	1.440.735
Piutang usaha **Trade receivable**		
PT PLN (Persero)	24.442.578	21.615.876
Jumlah Total	25.764.289	23.580.080

INFORMASI TRANSAKSI MATERIAL YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN DAN/ATAU DENGAN PIHAK AFILIASI/BERELASI

Information on Material Transaction with Conflict of Interest and/or with Affiliated/Related Parties

	2015	2016
Utang usaha **Account payable**		
PT Pertamina	389.358	87.169
PT Bukit Asam (Persero) Tbk	296.832	430.811
PT Nusantara Regas	143.100	92.815
PT Perusahaan Gas Negara	129.945	117.718
PT Pelayaran Bahtera Adhiguna	63.495	17.034
Lain-lain Others	202.691	209.866
Sub jumlah Subtotal	1.225.421	955.413
Biaya masih harus dibayar **Accrued expenses**		
Bunga pinjaman Interest	34	-
Utang pihak berelasi **Payable to related parties**		
PT PLN (Persero)	59.270	24.670
PT Indonesia Comnets Plus	6.663	9.238
PT Pembangkit Jawa Bali	1.481	-
Dana Pensiun PLN PLN Pension Fund	377	-
PT Haleyora Power	-	3.888
Sub jumlah Subtotal	67.791	37.796
Jumlah **Total**	**1.293.246**	**993.209**
Penjualan tenaga listrik **Electricity Sales**		
PT PLN (Persero)	30.680.909	34.504.119
Pendapatan Jasa **Service Revenues**		
PT PLN (Persero)	1.282.455	2.179.956
Jumlah **Total**	**31.963.364**	**36.684.075**

	2015	2016
Beban bahan bakar dan pelumas **Fuel and lubricants expenses**		
PT Pertamina (Persero)	2.930.645	766.551
PT Bukit Asam (Persero) Tbk	2.900.058	2.364.553
PT Perusahaan Gas Negara	1.721.742	1.525.235
PT Nusantara Regas	1.924.531	4.394.006
Lain-lain Others	945.917	201.430
Sub jumlah Subtotal	10.422.893	9.206.775
Beban usaha lain-lain **Other operating expenses**		
PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero)	122.803	108.302
Sub jumlah Subtotal	122.803	108.302
Jumlah **Total**	**10.546.671**	**9.315.077**
Beban keuangan **Financial cost**		
Penerusan pinjaman Two step loan	54.285	52

Jumlah kompensasi yang dibayarkan kepada Direksi dan Komisaris Perusahaan tahun 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp29.430 juta dan Rp24.290 juta.

Kewajaran Transaksi Pihak Berelasi

Kewajaran seluruh transaksi yang dilakukan dengan pihak-pihak berelasi, baik dilakukan dengan kondisi dan persyaratan dengan pihak ketiga maupun tidak, diungkapkan pada laporan keuangan, telah sesuai dengan standar PSAK 7: Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi.

Total remuneration paid to the Company's Board of Directors and Commissioners in 2016 and 2015 respectively amounted to Rp29,430 million and Rp24,290 million.

Fairness of the Related Parties Transaction

The fairness of all transactions conducted with related parties, within or not within the terms and conditions with third parties, is disclosed in the financial statement, and is in accordance with the standards of SFAS 7: Related Party Disclosures.

INFORMASI TRANSAKSI MATERIAL YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN DAN/ATAU DENGAN PIHAK AFILIASI/BERELASI

Information on Material Transaction with Conflict of Interest and/or with Affiliated/Related Parties

Mekanisme *Review* dan Pemenuhan Peraturan Transaksi Pihak Berelasi

Mekanisme *review* atas transaksi dengan pihak berelasi melalui proses audit baik yang dilakukan oleh auditor internal maupun auditor eksternal. Sebagai upaya untuk memastikan tingkat kewajaran transaksi dan kesesuaian dengan standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, laporan transaksi afiliasi di atas telah diaudit oleh Auditor. Salah satu tujuan pengungkapan transaksi pihak berelasi adalah upaya pemenuhan PSAK 7: Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi.

Review Mechanism and Regulation Fulfillment of Related Parties Transaction

Review mechanism for transaction with related parties is through the audit process, conducted by internal and external auditors. As an effort to ensure the fairness of transaction, and its conformity with the general accounting standards accepted in Indonesia, the above affiliated transaction report has been audited by Auditor. One of the objectives of disclosure of related parties' transaction is to fulfill the SFAS 7: Related Party Disclosures.

INFORMASI MATERIAL TERKAIT INVESTASI, EKSPANSI, DIVESTASI, AKUISISI DAN RESTRUKTURISASI

Material Information Related to Investment, Expansion, Divestment, Acquisition, and Restructuring

Sebagai bentuk langkah strategis, Indonesia Power melakukan beberapa *corporate action* untuk mendukung kelancaran operasi Perusahaan untuk memaksimalkan kinerja operasional dan nilai Perusahaan. Berikut adalah beberapa *corporate action* yang dilakukan pada tahun 2016:

As a strategic step, Indonesia Power conducts numerous corporate actions to support the Company's operation in order to maximize the operational performance and Company's value. These are the corporate actions in 2016:

INFORMASI MATERIAL TERKAIT INVESTASI, EKSPANSI, DIVESTASI, AKUISISI DAN RESTRUKTURISASI

Material Information Related to Investment, Expansion, Divestment, Acquisition, and Restructuring

Informasi Investasi

Terkait dengan kegiatan investasi, Indonesia Power melakukan tiga kegiatan penyertaan yaitu diantaranya adalah Investasi Pembangkit Eksisting, Pengembangan Usaha dan Penyertaan; Investasi Penyertaan Saham pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama; serta Investasi Penyertaan Saham Pada Entitas Anak. Berikut adalah penjelasan singkatnya:

Investment Information

In relation to investment, Indonesia Power performs three investment activities, i.e. Investment of Existing Power Plant, Development, and Inclusion; Share Investment in Associates and Joint Ventures; and Share Investment in Subsidiaries. The brief explanation is as follows:

Investasi Pembangkit Eksisting, Pengembangan Usaha dan Penyertaan

Investasi ini dilakukan Indonesia Power dengan tujuan untuk keandalan dan efisiensi pembangkit eksisting dan pengembangan pembangkit baru serta usaha terkait lainnya, dengan menggunakan dana dari internal

Realisasi investasi pada pembangkit eksisting, pengembangan usaha dan penyertaan disajikan pada tabel berikut:

Existing Power Plant Investment, Development, and Inclusion

The investment is performed by Indonesia Power in order to ensure the reliability and efficiency of existing power plant, and to develop new power plant as well as other related business, by using the fund from internal.

The realization of existing power plant investment, development, and inclusion can be seen on the table below:

Tabel Investasi Pembangkit Eksisting, Pengembangan Usaha dan Penyertaan (Rp miliar)

Table: Existing Power Plant Investment, Development, and Inclusion (Rp billion)

	2012	2013	2014	2015	2016
Program Investasi Pembangkit Eksisting **Existing Power Plants Investment Program**					
Program Keandalan Pembangkit Plants Reliability Program	574,45	811,85	702,35	374,40	836,54
Program Efisiensi Pembangkit Plants Efficiency Program	23,76	12,49	2,71	8,96	111,86
Program Peningkatan Kapasitas Pembangkit Plants Capacity Improvement Program	17,62	-	-	-	-
Program Pelestarian Lingkungan Environmental Conservation Program	7,83	7,22	6,27	2,04	-
Program Sarana Fasilitas Penunjang Supporting Facilities Program	50,13	59,28	36,63	29,89	115,06
Sub Jumlah **Subtotal**	**673,78**	**890,84**	**747,96**	**415,29**	**1.063,46**

	2012	2013	2014	2015	2016
Program Pengembangan Usaha **Business Development Program**					
Pengembangan Pembangkit Baru Business Development Program	192,15	641,04	1,623,30	535,84	830,69
Studi Jasa Konsultan Consultant Service Study	2,52	3,29	0,71	19,96	133,85
Pengembangan Usaha Lainnya Participation	122,21	278,71	62,27	65,00	300,00
Sub Jumlah Subtotal	316,88	923,04	62,98	620,80	1.264,54
Jumlah **Total**	**990,67**	**1.813,88**	**2.434,23**	**1.036,09**	**2.328,00**

Investasi Penyertaan Saham pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama

Investasi ini dilakukan Indonesia Power dengan tujuan untuk pengembangan pembangkit baru dan usaha terkait lainnya dengan menggunakan dana dari internal.

Realisasi investasi penyertaan saham pada entitas asosiasi dan ventura bersama disajikan pada tabel berikut:

Share Investment in Associates and Joint Ventures

The investment is performed by Indonesia Power in order to develop new power plant as well as other related business, by using the fund from internal.

Realization of share Investment in Associates and Joint Ventures can be seen on the table below:

Tabel Penyertaan Saham pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama
Table: Share Investment in Associates and Joint Ventures

Entitas Entity	Nama Perusahaan Company's Name	Jenis Usaha Type of Business	Tahun Operasi Year of Establishment	Penyertaan (%) Shares (%)	
				2015	2016
Asosiasi Associate	PT Indo Pusaka Berau	Penyediaan Tenaga Listrik PLTU Lati 3x7 MW Electricity Supply for Lati SPP 3x7 MW	2005	46,80	46,80
Ventura Bersama Joint Venture	PT Petra Daya Gas	Fasilitas Transportasi Gas CNG/LNG CNG/LNG Gas Transportation Facility	2012	35,00	35,00
Ventura Bersama Joint Venture	PT Rajamandala Electric Power	Pembangkit listrik tenaga air Rajamandala 1x47 MW Rajamandala hydro power plant 1x47 MW	2012	51.00	51.00
Ventura Bersama Joint Venture	PT GCL Indotenaga	Pembangkit listrik tenaga uap Kalbar-1 2x100 MW The Kalbar-1 steam power plant 2x100 MW	2016	-	35,00

INFORMASI MATERIAL TERKAIT INVESTASI, EKSPANSI, DIVESTASI, AKUISISI DAN RESTRUKTURISASI

Material Information Related to Investment, Expansion, Divestment, Acquisition, and Restructuring

Investasi Penyertaan Saham Pada Entitas Anak

Investasi ini dilakukan Indonesia Power dengan tujuan untuk pengembangan pembangkit baru dan usaha terkait lainnya dengan menggunakan dana dari internal.

Realisasi investasi saham pada entitas anak disajikan pada tabel berikut:

Share Investment in Subsidiaries

The investment is performed by Indonesia Power in order to develop new power plant as well as other related business, by using the fund from internal.

Realization of share Investment in Subsidiaries can be seen on the table below:

Tabel Penyertaan Saham pada Entitas Anak

Table: Share Investment in Subsidiaries

Entitas Anak Subsidiary	Jenis Usaha Type of Business	Tahun Operasi Year of Establishment	Penyertaan (%) Shares (%)	
			2015	2016
PT Cogindo DayaBersama	Penyediaan Tenaga Listrik: PLTD Batakan 45 MW, Jasa O&M Pembangkit Tenaga Listrik: PLTU FTP-1 dan Penyediaan/Sewa Co-generation Electricity Supply: Batakan DPP, O&M Service for Power Plant: FTP-1 SPP and Co-generation Provision/Lease	1998	99,99	99,99
PT Artha Daya Coalindo	*Supply* Batu Bara, Perdagangan Batu Bara, Pembongkaran Batu Bara dan *Port Management* Coal trade and supply, coal unloading, and Port Management	1997	60,00	80,00
PT Indo Ridlatama Power	Penyediaan Tenaga Listrik PLTU Kaltim 2x27,5 MW Electricity Supply for Kaltim SPP 2x27,5 MW	2007	90, 03	93,96
PT Tangkuban Parahu Geothermal Power	Penyediaan Tenaga Listrik PLTP Tangkuban Parahu 2x55 MW Electricity Supply for Tangkuban Parahu GPP 2x55 MW	2009	95,21	95,21
PT Putra Indotenaga	Pembiayaan (*Participating Interest*) Proyek Project Participating Interest	2013	99,99	99,99

Informasi Ekspansi

Pada tahun 2016 tidak ada kegiatan ekspansi sehingga tidak ada informasi terkait tujuan, nilai atau jumlah transaksi, sumber dana, dari hasil kegiatan ekspansi.

Expansion Information

In 2016, there is no expansion, hence there is no information related to the objective, value, or transaction total, fund source, from the result of expansion activities.

Informasi Divestasi

Pada tahun 2016 tidak ada kegiatan divestasi sehingga tidak ada informasi terkait tujuan, nilai atau jumlah transaksi, sumber dana, hasil kegiatan divestasi.

Divestment Information

In 2016, there is no divestment, hence there is no information related to the objective, value, or transaction total, fund source, from the result of divestment activities.

Informasi Akuisisi

Pada tahun 2016 tidak ada kegiatan akuisisi sehingga tidak ada informasi terkait tujuan, nilai atau jumlah transaksi, sumber dana, dari hasil kegiatan akuisisi.

Informasi Restrukturisasi Utang atau Modal

Pada tahun 2016 tidak terjadi restrukturisasi hutang/ modal sehingga tidak ada informasi terkait tujuan, nilai atau jumlah transaksi, sumber dana, dari hasil kegiatan restrukturisasi.

Acquisition Information

In 2016, there is no acquisition, hence there is no information related to the objective, value, or transaction total, fund source, from the result of acquisition activities.

Debt or Capital Restructuring Information

In 2016, there is no debt/capital restructuring, hence there is no information related to the objective, value, or transaction total, fund source, from the result of restructuring activities.

REALISASI PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM

Use of Funds from Public Offerings

Sampai dengan tahun 2016, Indonesia Power belum menjadi perusahaan terbuka (*go public*) atau belum melakukan Penawaran Umum di bursa efek, sehingga tidak ada informasi terkait dengan total perolehan dana, rencana penggunaan dana, rincian penggunaan dana, saldo dana dan tanggal persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atas perubahan penggunaan dana.

As of 2016, Indonesia Power has not gone public or has not made any Public Offering in the stock exchange, hence there is no information related to the total of revenue, fund usage plan, fund usage details, balance, and date of the approval from General Meeting of Shareholders (GMS) on the change in the use of funds.

PROGRAM KEPEMILIKAN SAHAM OLEH KARYAWAN DAN/ATAU MANAJEMEN (MSOP/ESOP)

Share Ownership Program by Employee and/or Management (MSOP/ESOP)

Pada tahun 2016, saham Indonesia Power 99,99% dimiliki oleh PT Pelayanan Listrik Negara (PLN) dan 0,01% dimiliki oleh Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan (YPK) PLN. Oleh karena itu, tidak ada kepemilikan saham oleh karyawan atau *Employee Stock Option Program* (ESOP) dan tidak ada kepemilikan saham oleh manajemen atau *Management Stock Option Program* (MSOP). Sehingga tidak ada informasi terkait jumlah saham ESOP/MSOP dan realisasinya, jangka waktu, persyaratan karyawan dan/atau manajemen yang berhak serta harga *exercise*.

In 2016, 99.99% of Indonesia Power shares are owned by PT Pelayanan Listrik Negara (PLN), and 0.01% is owned by Foundation for Education and Welfare PLN (YPK-PLN). Therefore, there is no ownership by employee or Employee Stock Option Program (ESOP), and there is no ownership by management or Management Stock Option Program (MSOP). Hence, there is no information related to the total share of ESOP/MSOP and its realization, timeframe, eligible employee and/or management requirements, and exercise price.

INFORMASI DAN FAKTA MATERIAL SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN

Material Information and Fact after Accountant Report Date

Pada tahun 2016, tidak terdapat informasi dan fakta material atau kejadian penting setelah tanggal laporan akuntan, sehingga tidak terdapat informasi mengenai dampaknya terhadap kinerja dan risiko usaha di masa mendatang.

In 2016, there is no material information and fact or important event after the account report date, hence there is no information on its effect on the performance and business risk in the future.

PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN DAMPAKNYA TERHADAP PERUSAHAAN

Changes in Accounting Policy and their Impact on the Company

Pernyataan Kepatuhan

Laporan keuangan konsolidasian telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK-IAI) Ikatan Akuntan Indonesia.

Statement of Compliance

Consolidated financial statements is prepared in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, which includes Statement of Financial Accounting Standards (SFAS) and Interpretations of Statements of Financial Accounting Standards (ISFAS), issued by the Financial Accounting Standard Board and Association of Accountants in Indonesia (DSAK-IAI).

PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN DAMPAKNYA TERHADAP PERUSAHAAN

Changes in Accounting Policy and their Impact on the Company

Perubahan Kebijakan Akuntansi dan Dampaknya

Standard dan Implementasi standar baru

1. PSAK 70: Akuntansi Aset dan Liabilitas Pengampunan Pajak
2. ISAK 30: Pungutan

Penyesuaian 2015

1. PSAK 5: Segmen Operasi
2. PSAK 7: Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi
3. PSAK 13: Properti Investasi
4. PSAK 16: Aset Tetap
5. PSAK 19: Aset Takberwujud
6. PSAK 22: Kombinasi Bisnis
7. PSAK 25: Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan
8. PSAK 53: Pembayaran Berbasis Saham
9. PSAK 68: Pengukuran Nilai Wajar
10. PSAK 110: Akuntansi Sukuk

Amandemen

1. PSAK 4: Laporan Keuangan Tersendiri tentang Metode Ekuitas dalam Laporan Keuangan Tersendiri
2. PSAK 15: Investasi Pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama tentang Entitas Investasi: Penerapan Pengecualian Konsolidasi
3. PSAK 16: Aset Tetap tentang Klarifikasi Metode yang Diterima untuk Penyusutan dan Amortisasi
4. PSAK 19: Aset Takberwujud tentang Klarifikasi Metode yang Diterima untuk Penyusutan dan Amortisasi
5. PSAK 24: Imbalan Kerja tentang Program Imbalan Pasti: Iuran Pekerja
6. PSAK 65: Laporan Keuangan Konsolidasian tentang Entitas Investasi: Penerapan Pengecualian Konsolidasi
7. PSAK 66: Pengaturan Bersama tentang Akuntansi Akuisisi Kepentingan dalam Operasi Bersama

Changes in Accounting Policy and their Impact

New standards and implementation of standards

1. SFAS 70: Accounting for Tax Amnesty Assets and Liabilities
2. ISFAS 30: Levies

Improvement 2015

1. SFAS 5: Operating Segments
2. SFAS 7: Related Party Disclosures
3. SFAS 13: Investment Property
4. SFAS 16: Property, Plant and Equipment
5. SFAS 19: Intangible Asset
6. SFAS 22: Business Combination
7. SFAS 25: Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors
8. SFAS 53: Share-based Payments
9. SFAS 68: Fair Value Measurement
10. SFAS 110: Accounting for Sukuk

Amendments

1. SFAS 4: Separate Financial Statements regarding Equity Method in Separate Financial Statements
2. SFAS 15: Investment in Associates and Joint Venture regarding Investment Entities: Applying the Consolidation Exception
3. SFAS 16: Property, Plant and Equipment regarding Clarification of Acceptable Methods of Depreciation and Amortization
4. SFAS 19: Intangible Asset regarding Clarification of Acceptable Methods of Depreciation and Amortization
5. SFAS 24: Employee Benefits regarding Defined Benefit Plans: Employee Contributions
6. SFAS 65: Consolidated Financial Statements about Investment Entities: Applying the Consolidation Exception
7. SFAS 66: Joint Arrangements regarding Accounting for Acquisitions of Interests in Joint Operation

8. PSAK 67: Pengungkapan Kepentingan Dalam Entitas Lain tentang Entitas Investasi: Penerapan Pengecualian Konsolidasi

PSAK Baru dan Revisi, serta ISAK yang berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2017 dan 2018

Amandemen standar dan interpretasi berikutini efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2017, dengan penerapan dini diperkenankan, yaitu:

1. PSAK 1 (Amandemen 2015): Penyajian Laporan Keuangan
2. PSAK 3 (Penyesuaian 2016): Laporan Keuangan Interim
3. PSAK 24 (Penyesuaian 2016): Imbalan Kerja
4. PSAK 58 (Penyesuaian 2016): Aset Tidak Lancar yang Dimiliki Untuk Dijual dan Operasi yang Dihentikan
5. PSAK 60 (Penyesuaian 2016): Instrumen Keuangan: Pengungkapan
6. ISAK 31 (2015): Interpretasi atas Ruang Lingkup PSAK 13: Properti Investasi
7. ISAK 32 (2017): Definisi dan Hierarki Standar Akuntansi Keuangan

Amandemen standar dan interpretasi berikut ini efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2018, dengan penerapan dini diperkenankan, yaitu:

1. PSAK 69 (2015): Agrikultur
2. PSAK 16 (Amandemen 2015): Aset Tetap
3. PSAK 2 (Amandemen 2016): Laporan Arus Kas
4. PSAK 46 (Amandemen 2016): Pajak Penghasilan

Pada saat penerbitan laporan keuangan konsolidasian, Perusahaan dan entitas anak masih mempelajari dampak yang mungkin timbul dari penerapan standar baru, amandemen standar, dan interpretasi atas standar serta pengaruhnya pada laporan keuangan konsolidasian Perusahaan dan entitas anak.

8. SFAS 67: Disclosures of Interest in Other Entities regarding Investment Entities: Applying the Consolidation Exception

New and Revised SFAS and ISFAS effective for the year beginning on or after 1 January 2017 and 2018

The following amendments and interpretations of standard will be effective for the year beginning on or after 1 January 2017, for which early adoption is permitted:

1. SFAS 1 (Amendment 2015): Presentations of Financial Statements
2. SFAS 3 (Improvement 2016): Interim Financial Reporting
3. SFAS 24 (Improvement 2016): Employee Benefits
4. SFAS 58 (Improvement 2016): Non-Current Asset Held for Sale and Discontinued Operation
5. SFAS 60 (improvement 2016): Financial Instruments: Disclosure
6. ISFAS 31 (2015): Interpretation on Scope of SFAS 13: Investment Property
7. ISFAS 32 (2017): Definition and Hierarchy of Financial Accounting Standards

The following amendments and interpretations of standard will be effective for the year beginning on or after 1 January 2018, for which early adoption is permitted:

1. SFAS 69 (2015): Agriculture
2. SFAS 16 (Amendment 2015): Property, Plant and Equipment
3. SFAS 2 (Amendment 2016): Statement of Cash Flows
4. SFAS 46 (Amendment 2016): Income Tax

As of the authorization date of these consolidated financial statements, the Company and its subsidiaries are still evaluating the potential impact of these new standards, amendments, and interpretations of standards to the Company and its subsidiaries' consolidated financial statements.

PERUBAHAN PERATURAN YANG SIGNIFIKAN DAN DAMPAKNYA TERHADAP PERUSAHAAN

Significant Regulation Changes and the Impact on the Company

Salah satu bentuk komitmen Indonesia Power terhadap aspek kepatuhan ditunjukkan pada pemenuhannya terhadap seluruh peraturan perundang-undangan yang relevan terhadap operasi Perusahaan. Bentuk implementasi dari upaya pemenuhan tersebut, Indonesia Power senantiasa melakukan kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang baru terbit maupun yang terjadi perubahan. Namun pada tahun 2016, tidak terdapat perubahan peraturan perundang-undangan yang relevan pada operasional Perusahaan, sehingga tidak terdapat informasi terkait peraturan yang diubah regulator dan dampaknya terhadap kinerja Perusahaan.

One of the commitment forms of Indonesia Power on compliance aspect is shown in the fulfilment of compliance with relevant rules and regulations related to the Company's operation. The implementation of the fulfilment effort is that Indonesia Power continues to review the new and/or amended laws and regulations. Throughout 2016, there is no relevant regulation changes related to the Company's operational, hence there is no information related to the regulations changed by regulator, and its impact on the Company's performance.

INFORMASI KELANGSUNGAN USAHA
Business Continuity Information

Kelangsungan Usaha

Dalam menjalankan bisnis dan operasinya, Indonesia Power tidak mengalami hambatan signifikan terkait kelangsungan usaha. Terkait dengan kewajiban, Indonesia Power mampu memenuhi seluruh kewajiban baik kewajiban dalam aspek keuangan maupun non-keuangan. Secara keuangan, penilaian kelangsungan usaha dapat dibuktikan dengan opini auditor independen atas Laporan Keuangan Tahun Buku 2016 yaitu "Wajar Tanpa Pengecualian".

Business Continuity

In carrying out its business and operation, Indonesia Power has no significant barriers related to the business continuity. Related with the liabilities, Indonesia Power fulfills its obligation, both in the financial and non-financial aspects. Financially, the business continuity assessment is proven by the independent auditor opinion on the Financial Statement of Fiscal Year 2016, i.e. "Unqualified Opinion".

INFORMASI KELANGSUNGAN USAHA
Business Continuity Information

Asumsi Kelangsungan Usaha

Kelangsungan usaha Indonesia Power dipertimbangkan atas dasar kemampuan internal dan faktor-faktor eksternal yang signifikan. Dalam perkembangannya, Indonesia Power memiliki posisi dimana Perusahaan sangat prospektif untuk dikembangkan. Hal tersebut dianalisis berdasarkan penilaian analisis *Strength, Weakness, Opportunity, and Threats* (SWOT) yaitu Matrix IE sebagai berikut:

Business Continuity Assumption

Business continuity of Indonesia Power is considered based on the internal capabilities and significant external factors. In its development, Indonesia Power is a Company that is highly prospective. This is analyzed based on the Strength, Weakness, Opportunity, and Threats (SWOT) analysis, i.e. Matrix IE, as follows:

Matriks Evaluasi Faktor Internal dan Eksternal
Matrix: Internal and External Factor Evaluation

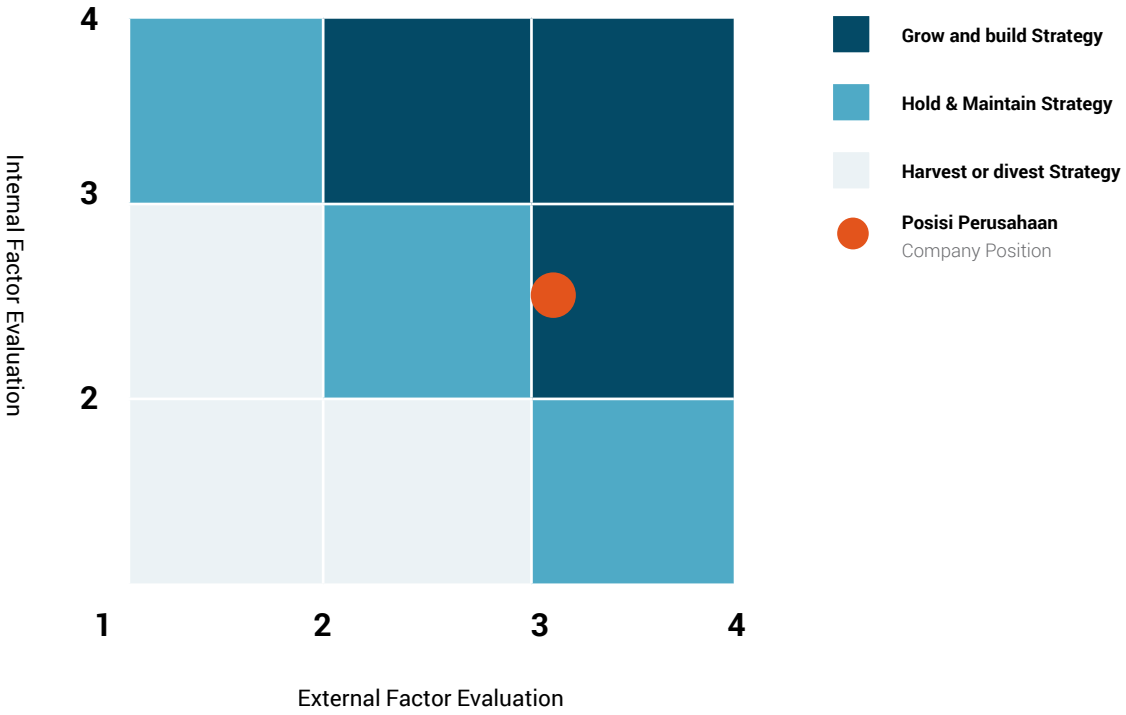

Dari analisis Matriks IE tersebut, Indonesia Power berada pada Posisi Perusahaan yang sesuai untuk penerapan strategi *Grow and Build*. Berdasarkan data tersbeut, maka keberlangsungan usaha Indonesia Power kedepan masih sangat besar peluang pengembangan dan pertumbuhan kinerjanya.

From the IE Matrix analysis, Indonesia Power is in the Company Position that is appropriate for Grow and Build strategy implementation. Based on that data, the business continuity of Indonesia Power in the future is highly prospective in the development and its performance growth.

PROSPEK USAHA
Business Prospect

Kelangsungan usaha Indonesia Power didukung dengan semakin kondusifnya kondisi perekonomian global dan nasional serta industri ketenagalistrikan. Dengan dukungan faktor eksternal, seluruh sumber daya internal Indonesia Power dapat dimaksimalkan dalam rangka optimalisasi kinerja operasional dan kinerja keuangan.

Indonesia Power's business continuity is supported by the more conducive national and global economic condition, as well as the electricity industry. With the support of external factor, all internal resources in Indonesia Power can be maximized in order to optimize the operational and financial performances.

PROSPEK USAHA
Business Prospect

Prospek Perekonomian Global

Pertumbuhan ekonomi dunia 2017 diperkirakan tumbuh membaik yang didukung ekonomi Amerika Serikat dan Tiongkok. Perbaikan ekonomi AS didorong oleh peningkatan konsumsi dan investasi non-residensial dan konsumsi menjadi penopang ekonomi AS. Investasi mencatat kontribusi positif terhadap PDB AS yang didorong oleh meningkatnya investasi non residensial, tingkat pengangguran AS pada Desember 2016 tercatat cukup rendah sebesar 4,7%. Selain itu inflasi AS pada 2016 dalam tren meningkat seiring dengan berlanjutnya tren kenaikan harga minyak WTI. Sejalan dengan perkembangan ekonomi AS, *Fed Fund Rate* (FFR) di 2017 diperkirakan akan naik sebanyak dua kali. Perekonomian Tiongkok diperkirakan juga membaik tercermin pada peningkatan penjualan eceran dan investasi swasta.

Sementara itu, perkembangan harga minyak diperkirakan dalam tren meningkat, hal ini didorong oleh implementasi kesepakatan OPEC serta 10 negara non-OPEC untuk melakukan pemotongan produksi. Harga minyak meningkat sebesar 12% pasca kesepakatan OPEC dan 10 negara non-OPEC untuk memangkas produksi 1,8 Millions Barrels Per Day (mbpd) (2% dari total persediaan) yang berlaku pada Januari hingga Juni 2017. Sementara itu, harga komoditas ekspor juga akan mengalami peningkatan ditopang oleh kenaikan harga batubara dan beberapa jenis logam, meningkatnya harga batubara didorong oleh kenaikan impor batubara Tiongkok seiring dengan adanya kebutuhan inventori untuk mengantisipasi musim dingin mendorong naiknya impor batubara Tiongkok. Sementara itu kenaikan harga logam seperti nikel, timah, dan tembaga diperkirakan berlanjut akibat perbaikan ekonomi Tiongkok dan dampak kebijakan infrastruktur.

Berdasarkan *World Economic Outlook* Januari 2017, pertumbuhan ekonomi dunia tahun 2016, 2017 dan 2018 diperkirakan sebesar 3,1%; 3,4%; dan 3,6% stabil dibandingkan proyeksi Oktober 2016. Perkiraan tersebut mengkonfirmasikan bahwa pertumbuhan ekonomi dunia di tahun 2016 diperkirakan tidak lebih baik dibandingkan dengan pertumbuhan di tahun 2015 sebesar 3,10% dan pertumbuhan ekonomi dunia di tahun 2017 diperkirakan akan lebih baik dibandingkan tahun 2016 sebesar 3,4%.

Global Economy Prospect

World economic growth in 2017 is predicted to be better, supported by the economy of United States and China. The improvement of US economy is driven by the increase of consumption and non-residential investment that support the US economy. Investment records positive contribution on the US' GDP, which is driven by the increase in non-residential investment, and the US unemployment rate in December 2016 was pretty low, 4.7%. In addition, US inflation in 2016 is increasing, along with the trend of continual increase in the WTI oil price. In line with the US economy development, Fed Fund Rate (FFR) in 2017 is expected to rise twice. The Chinese economy also is predicted to improve, reflected in the increased retail sales and private investment.

Meanwhile, the oil price development is expected in an upward trend. This is driven by the implementation of OPEC and 10 non-OPEC countries agreement to cut production. Oil prices increased by 12% after the OPEC and 10 non-OPEC countries agreement to cut production, 1.8 Million Barrels Per Day (mbpd) (2% from the total reserves) effective from January until June 2017. Meanwhile, export commodity prices will improve, supported by the increase in coal and various metal prices. The increase in coal prices is driven by the China's coal import increase, in line with the inventory needs to anticipate winter, which encourage the increase of China's coal import. The increase in metal prices, such as nickel, lead, and copper, is predicted to continue due to China's economic improvement and the impact from infrastructures policies.

Based on the World Economic Outlook January 2017, the global economy growth in 2016, 2017, and 2018, are predicted to increase by 3.1%, 3.4%, and 3.6%, stable if compared to the October 2016 projection. The prediction confirms that the global economic growth in 2016 is not better than the growth in 2015, which was 3.10%, and the global economic growth in 2017 is predicted to be better than in 2016, about 3.4%.

Pertumbuhan ekonomi negara berkembang diproyeksikan sebesar 4,1% pada tahun 2016, direvisi ke bawah sebesar 0,1% dari proyeksi pertumbuhan ekonomi 2016 yang dikeluarkan Oktober 2016. Sejalan dengan itu, pertumbuhan ekonomi tahun 2017 sebesar 4,5% diproyeksikan ke bawah sebesar 0,1% dari proyeksi pertumbuhan ekonomi 2017 yang dikeluarkan Oktober 2016. Peningkatan pertumbuhan ekonomi negara berkembang masih di dukung oleh pertumbuhan ekonomi China dan India yang diperkirakan akan tumbuh lebih tinggi. Membaiknya perekonomian Tiongkok dan Peningkatan harga komoditas akan mendorong kinerja ekspor yang akan berdampak pada peningkatan daya beli masyarakat.

(Sumber : IMF, *World Economic Outlook, Update* Januari 2017)

Economic growth in developing countries is projected at 4.1% in 2016, lower by 0.1% from the projection of 2016 economic growth that was released in October 2016. In line with that, the economic growth in 2017 is projected at 4.5%, lower by 0.1% from the projection of 2017 economic growth that was released in October 2016. The increase in economic growth in developing countries is driven by the economic growth in China and India, which is projected to grow even higher. The improvement in China's economy and the rise in the commodity price will boost the export performance, will impact the people's purchasing power.

(Source: IMF, World Economic Outlook, January 2017 Update)

Perkembangan Proyeksi Pertumbuhan Global (%)

Global Growth Projection Development (%)

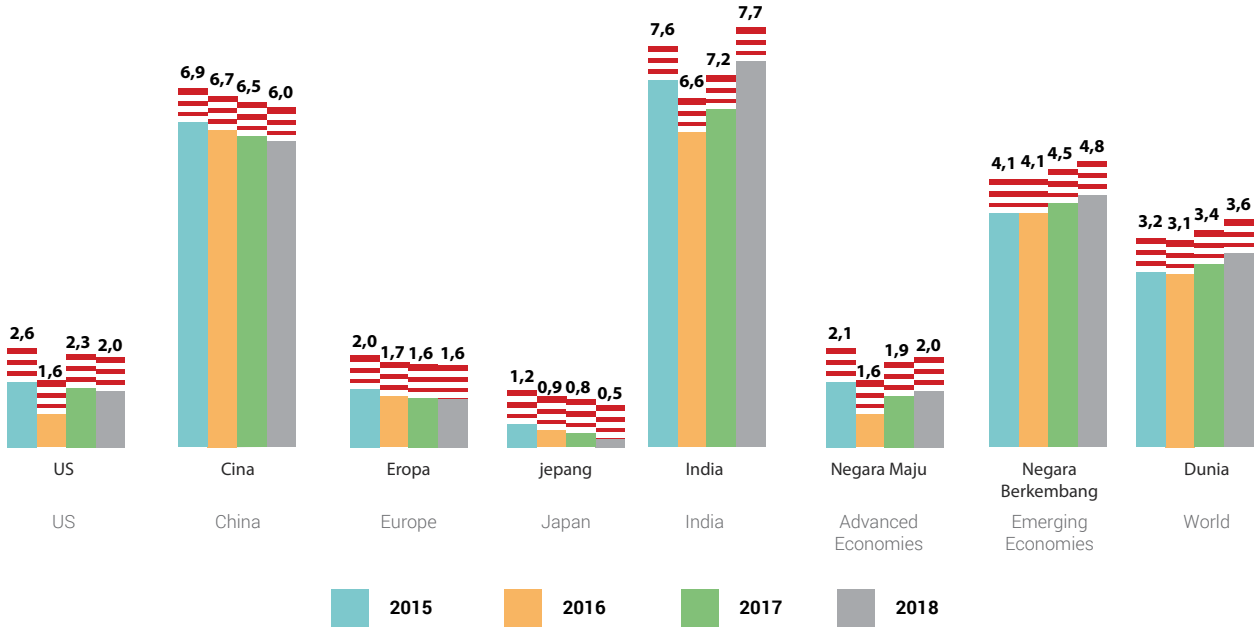

(Sumber: IMF, ***World Economic Outlook, Update*** Januari 2017)

(Source: IMF, World Economic Outlook, January 2017 Update)

PROSPEK USAHA
Business Prospect

Prospek Perekonomian Nasional

Pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2017 diperkirakan lebih baik dibanding tahun sebelumnya. Perkiraan ini mempertimbangkan potensi dan berbagai risiko ekonomi baik yang berasal dari eksternal maupun domestik. Perekonomian global yang diperkirakan membaik di tahun 2017 diharapkan mampu mendukung kinerja perekonomian nasional. Meskipun demikian, perbaikan tersebut menghadapi sejumlah risiko seperti perkiraan penurunan kinerja ekonomi Tiongkok, adanya ketidakpastian ekonomi Eropa yang sedang melakukan penyesuaian terhadap Brexit, dan risiko stabilitas akibat perubahan arah kebijakan ekonomi AS setelah pemilihan umum Presiden.

Dari sisi domestik, perkiraan perbaikan kinerja ekonomi nasional dalam tahun 2017 didukung oleh membaiknya konsumsi rumah tangga sejalan dengan inflasi yang relatif stabil terutama harga barang kebutuhan pokok. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) juga diperkirakan tetap memiliki kinerja cukup baik yang didorong oleh keberlanjutan pembangunan infrastruktur yang diharapkan mampu meningkatkan daya saing dan penguatan konektivitas nasional. Selain itu, kebijakan amnesti pajak diharapkan juga mampu mendorong investasi di sektor riil melalui penguatan likuiditas dari hasil repatriasi dana yang ada di luar negeri. Seiring membaiknya perekonomian global, kinerja perdagangan internasional juga diharapkan mengalami perbaikan.

Dari sisi sektoral, pertumbuhan sektor industri pengolahan sebagai penyumbang terbesar dalam perekonomian juga diperkirakan menunjukkan penguatan yang salah satunya dipengaruhi oleh perbaikan ekonomi dan arah kebijakan ekspor terhadap produk bernilai tambah tinggi. Komitmen Pemerintah dalam pembangunan infrastruktur diperkirakan juga tetap mendorong kinerja pertumbuhan sektor konstruksi, transportasi, dan pergudangan. Selain itu, sektor keuangan juga diperkirakan meningkat sejalan dengan peningkatan arus dana dari kebijakan amnesti pajak.

National Economy Prospect

The Indonesia's economic growth in 2017 is predicted to be better than the previous year. The prediction considers various economic potential and risks, both external and domestic. The global economic that is predicted to improve in 2017 is expected to be able to support the national economic performance. However, the improvement faces some risks, such as the expected downturn of the China's economic performance, the uncertainty from Europe economy that is adjusting to Brexit, and the stability risk due to the changes in the US economic policy after the President election.

Domestically, the prediction of national economic performance improvement in 2017 is supported by the improvement in household consumption, in line with relatively stable inflation especially the price of basic needs. Gross Fixed Capital Formation (PMTB) is predicted to have adequate performance, driven by the sustainability of infrastructure development that is expected to be able to improve the competitiveness and strengthen the national connectivity. In addition, the tax amnesty policy is expected to drive the investment in real sector through the liquidity strengthening from the fund repatriation outside the country. As the global economy improves, the international trade performance is expected to improve as well.

From the sectoral side, the growth of manufacturing industry as the biggest contributor in the economy is also expected to strengthen, which is influenced by an economic improvement and the export policy direction towards high-added value products. Government's commitment in the infrastructures development is expected to drive the growth performance of construction, transportation, and warehouse sectors. In addition, financial sector is expected to improve, in line with the increase in the fund flows from tax amnesty policy.

Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan perkembangan terkini perekonomian global dan domestik, kebijakan yang diambil pemerintah, serta potensi dan risiko ke depan, maka pertumbuhan ekonomi tahun 2017 diperkirakan sebesar 5,3%. Perkiraan ini lebih baik dibanding proyeksi realisasi pertumbuhan ekonomi tahun 2016 sebesar 5,2%.

Therefore, considering the latest development in domestic and global economy, government policies, as well as potential and future risks, the 2017 economic growth is estimated at 5.3%. The prediction is better than the 2016 economic growth realization projection, which was 5.2%.

Tabel *Outlook* Pertumbuhan PDB Pengeluaran dan Lapangan Usaha 2017 (%,yoy)

Table: Outlook of GDP Growth and Business Field 2017 (% yoy)

	2017*
Pertumbuhan Ekonomi Economic Growth	5,3
Sisi Pengeluaran: Expenditures:	
Konsumsi Rumah Tangga** Household Consumption**	5,1
Konsumsi Pemerintah Government Consumption	5,4
PMTB	6,4
Ekspor Barang dan Jasa Export of Goods and Services	1,1
Impor Barang dan Jasa Import of Goods and Services	2,2
Sektor Lapangan Usaha: Business Field Sector:	
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Agriculture, Forestry, and Fisheries	3,9
Pertambangan dan Penggalian Mining and Excavation	0,1
Industri Pengolahan Processing Industry	5,4
Pengadaan Listrik dan Gas Electricity and Gas Provision	3,8
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang Water Supply, Waste Management, Waste, and Recycling	7,3
Konstruksi Construction	8,1
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Large and Retail Trade; Car and Motorcycle Reparation	3,8
Transportasi dan Pergudangan Transportation and Warehouse	7,1
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Accommodation and Food & Beverages Provision	5,5

PROSPEK USAHA

Business Prospect

	2017*
Informasi dan Komunikasi Information and Communication	10,6
Jasa Keuangan dan Asuransi Financial and Insurance Services	8,9
Real Estate Real Estate	5,7
Jasa Perusahaan Company Services	8,5
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib Government Administration, Defense, and Social Security	5,4
Jasa Pendidikan Education Servicest	8,3
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial Health and Social Activities Services	8,4
Jasa Lainnya Other Services	8,4

*** Perkiraan**

* Estimation

**** Termasuk LNPRT**

** Including LNPRT

Sumber: Bappenas dan Kemenkeu

Source: Bappenas and Ministry of Finance

Kondisi perekonomian global menjadi salah satu faktor yang memengaruhi laju inflasi di tahun 2017. Harga komoditas energi, terutama minyak mentah dan dinamika pergerakan nilai tukar dolar AS terhadap mata uang dunia, termasuk Rupiah, yang secara keseluruhan diperkirakan masih memberikan kontribusi pada level moderat terhadap pergerakan laju inflasi 2017. Sementara itu dari sisi internal, beberapa faktor yang diperkirakan memberikan tekanan terhadap laju inflasi, antara lain komponen *administered price*, faktor iklim, dan pengaruh musiman seperti panen, tahun ajaran baru, dan Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN). Tekanan pada komponen *administered price* berasal dari penyesuaian terhadap pergerakan harga komoditas energi, sedangkan faktor iklim berupa fenomena La Nina atau iklim basah akan berpotensi gangguan pada produksi dan pasokan pangan. Namun, dengan perkembangan ekonomi domestik yang baik serta diikuti berlanjutnya peningkatan dukungan infrastruktur akan memberikan dampak positif terhadap pergerakan laju inflasi di tingkat yang relatif terjaga.

Global economy condition is one of the factors that influences inflation rate in 2017. Energy commodity price, especially crude oil, and the dynamic of exchange rate of USD against the world's currency, including Rupiah, which overall is predicted to contribute on the moderate level on the inflation rate movement in 2017. From the internal side, some factors that are predicted to put pressure on the inflation rate are administered price, climate factors, and seasonal influence, such as harvest, new school year, and National Religious Holidays (HBKN) Pressure on the administered price component stemmed from the adjustment on the energy commodity price movement, as the climate factor is in the form of La Nina or wet climate, which potentially disrupt food production and supply. However, with good domestic economy development and the continuous infrastructure support improvement, they will give positive impact on the inflation rate movement in the relatively stable rate.

Salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah dalam menjaga tingkat inflasi berupa kebijakan memitigasi adanya gejolak harga pangan dan energi domestik yang dilaksanakan melalui strategi pengendalian baik dari sisi produksi, distribusi, maupun konsumsi. Selain itu, Pemerintah juga telah mengalokasikan anggaran guna stabilisasi harga pangan serta dana cadangan beras pemerintah yang dapat dimanfaatkan pada saat terjadi kelangkaan barang dan gejolak harga melalui program-program, seperti operasi pasar dan penyediaan bahan pangan pokok dengan harga terjangkau.

One of the efforts from the Government to maintain the inflation rate is in the form of mitigation policy since the fluctuation of food price and domestic energy, that is carried out through controlling strategy, from the production, distribution, and consumption. In addition, Government has allocated budget to stabilize the food price, and there are rice reserves from the government that can be utilized in the event of scarcity of goods and price fluctuations through programs, such as market operation and supply of basic needs with affordable prices.

Grafik Proyeksi Inflasi Tahun 2014-2017 (%)
Graph: Inflation Projection 2014-2017 (%)

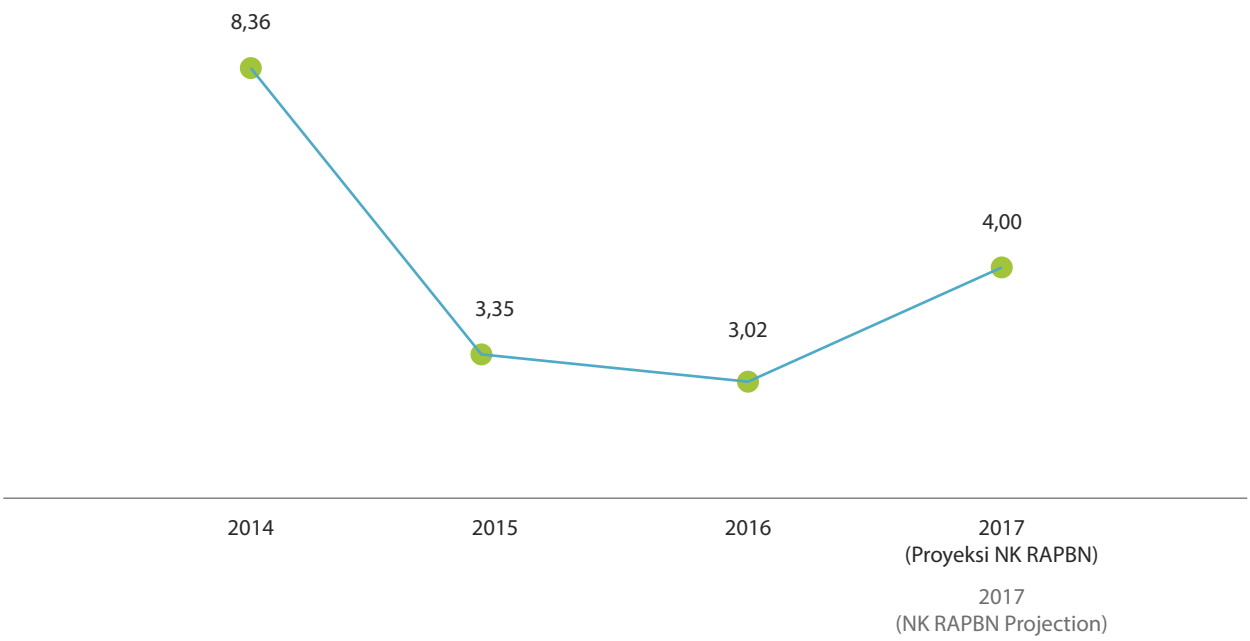

Sumber: Bappenas dan Kemenkeu Source: Bappenas and Ministry of Finance

PROSPEK USAHA

Business Prospect

Dalam merencanakan dan melaksanakan kebijakan, Pemerintah senantiasa melakukan evaluasi serta melakukan koordinasi dengan Bank Indonesia untuk menciptakan bauran kebijakan fiskal, moneter, dan pengembangan sektor riil yang tepat dengan mempertimbangkan dampak inflasi kepada perekonomian secara menyeluruh. Dengan memperhatikan faktor-faktor yang berpengaruh dalam perkembangan inflasi serta kebijakan fiskal, moneter, dan sektor riil, laju inflasi tahun 2017 diperkirakan mencapai 4,0% atau berada pada pada kisaran rentang sasaran inflasi yang telah ditetapkan sebesar 4,0±1,0%.

In planning and implementing the policy, Government strives to evaluate and coordinate with Bank Indonesia to create the right mix of fiscal, monetary, and real sector development, by considering the impact of inflation on the overall economy. Taking into accounts the influencing factors in inflation development, as well as fiscal, monetary, and real sector policy, the 2017 inflation rate is predicted to reach 4.0% or within the set range of inflation target at 4.0±1.0%.

Prospek Industri Kelistrikan Nasional

Propek industri listrik kedepan diproyeksikan mengalami peningkatan baik dari sisi operasional produksi maupun penjualan listrik. Peningkatan tersebut harus diiringi dengan kemampuan penyediaan listrik, sehingga perusahaan pembangkit harus meningkatkan kapasitas pembangkit yang optimal.

National Electricity Industry Prospect

In the future, the electricity industry prospect is projected to improve, both the operational production and the electricity sales. The improvement has to be in line with the capability to provide electricity, hence the power generator company has to enhance the optimal capacity for the generator.

Strategi Pengembangan Kapasitas Pembangkit

Pengembangan kapasitas pembangkit tenaga listrik diarahkan untuk memenuhi pertumbuhan beban, dan pada beberapa wilayah tertentu diutamakan untuk memenuhi kekurangan pasokan tenaga listrik. Pengembangan kapasitas pembangkit tenaga listrik dilaksanakan sesuai dengan kebijakan pemerintah, misalnya dalam pengembangan Energi Baru dan Terbarukan (EBT) serta program 35.000 MW.

Untuk sistem kelistrikan Jawa-Bali, telah direncanakan PLTU Batubara kelas 1.000 MW dengan teknologi *ultra super critical* yaitu merupakan teknologi *high efficient low emission* (HELE) atau lebih dikenal dengan *clean coal technology* (CCT) yang telah matang secara komersial. Hal tersebut ditujukan untuk memperoleh efisiensi yang lebih baik dan emisi CO_2 yang lebih rendah. Kandidat pembangkit yang dipertimbangkan untuk rencana pengembangan adalah PLTU Batubara ultra super critical kelas 1.000 MW dan supercritical 600 MW, PLTGU LNG/gas alam 800 MW, PLTG/GU LNG/CNG

Power Plant Capacity Development Strategy

Power plant capacity development is directed to fulfill the load growth, and on some areas, to meet the shortage of electricity supply. The power plant capacity development is conducted in line with the government's regulation, such as the development of New and Renewable Forms of Energy (EBT), and 35,000 MW Program.

For Java-Bali electrical system, PLTU Batubara has planned 1,000 MW class with ultra super critical technology, i.e. high efficient low emission (HELE) technology, or better known as clean coal technology (CCT) that is now mature commercially. This aims to obtain better efficiency and lower CO_2 emission. Power plant candidates that are being considered for the development plan are coal based SPP ultra super critical 1,000 MW class, and supercritical 600 MW, LNG/natural gas CCPP 800 MW, GTPP/GU LNG/CNG with 400-500 MW peak loads, and 250 MW pumped storage HPP. In

pemikul beban puncak 400-500 MW dan PLTA pumped storage 250 MW. Selain itu terdapat bebeapa PLTP kelas 55 MW dan 110 MW, serta PLTA, PLTN jenis *Pressurised Water Reactor* (PWR) kelas 1.000 MW juga disertakan sebagai kandidat dalam model optimisasi perencanaan pembangkitan.

addition, there are numerous GPP in 55 MW class and 110 MW class, as well as Pressurised Water Reactor (PWR) type of HPP and NPP in 1,000 MW class in the candidates of development plan optimization model.

Proyeksi Penjualan Listrik

Dengan menggunakan asumsi pertumbuhan ekonomi sepuluh tahun mendatang rata-rata 6,2% per tahun dan bergerak dari realisasi kebutuhan tenaga listrik tahun 2015 dan estimasi realisasi penjualan 2016, proyeksi penjualan tenaga listrik pada tahun 2026 diperkirakan akan mencapai 483 TWh, atau mengalami pertumbuhan rata-rata 8,3% selama 10 tahun mendatang.

Electricity Sales Projection

Using the assumption that economic growth in the next ten years is 6.2% per year in average, and taking into account the electricity needs in 2015 and 2016 sales realization estimation, the electricity sales projection in 2026 is expected to reach 483 TWh, or will grow 8.3% per year in average over the next 10 years.

Tabel Proyeksi Penjualan Tenaga Listrik Nasional Berdasarkan Sektor (GWh)
Table: Sector-Based National Electricity Sales Projection (GWh)

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rumah Tangga Households	102.158	109.638	117.861	126.926	136.236	145.797	155.805	166.365	177.500	189.233
Bisnis Business	43.168	47.703	52.217	57.589	63.310	69.104	75.409	82.257	89.818	97.943
Publik Public	15.028	16.094	17.292	18.638	20.087	21.646	23.325	25.137	27.092	29.185
Industri Industry	74.413	80.966	88.146	99.197	109.945	120.266	131.212	143.243	155.425	166.612
Jumlah **Total**	**234.767**	**254.402**	**275.516**	**302.349**	**329.578**	**356.813**	**385.751**	**417.002**	**449.835**	**482.973**

Sumber: RUPTL PLN Tahun 2017 s.d 2026 Source: RUPTL PLN 2017-2026

Jika proyeksi penjualan listrik terbagi pada wilayah penjualan, Wilayah Jawa-Bali memiliki kontribusi penjualan listrik terbesar di Indonesia. Hal ini menjadi peluang bagi Indonesia Power untuk memaksimalkan operasional produksi dan pasokan listrik.

If the electricity projection is divided based on the sales area, the Java-Bali area has the biggest contribution of electricity sales in Indonesia. This is an opportunity for Indonesia Power to maximize the production and supply of electricity.

PROSPEK USAHA
Business Prospect

Grafik Proyeksi Penjualan Tenaga Listrik Nasional Berdasarkan Wilayah Tahun 2017 (GWh)
Graph: Area-Based National Electricity Sales Projection 2017 (GWh)

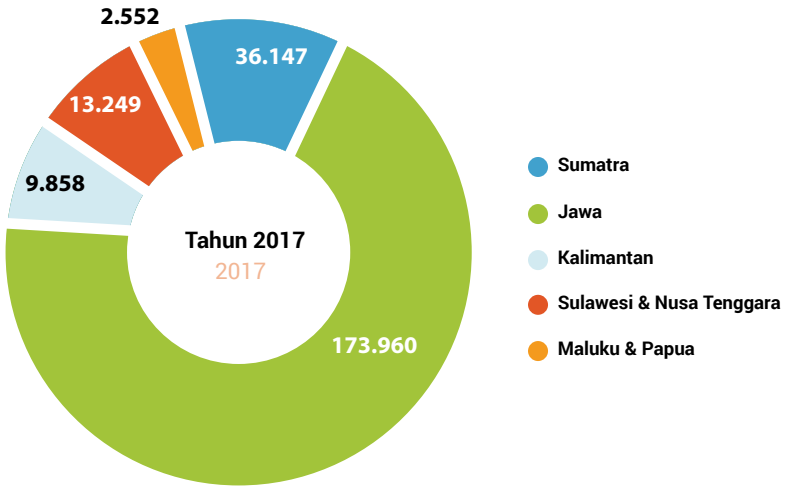

Sumber: RUPTL PLN Tahun 2017 s.d 2026 Source: RUPTL PLN 2017-2026

Proyeksi Jumlah Pelanggan

Jumlah pelanggan diproyeksikan terus meningkat dari tahun ke tahun yaitu di tahun 2017 mencapai 67.379 pelanggan dan 83.312 pelanggan di tahun 2026.

Customer Projection

The customer is projected to rise from year to year, i.e. in 2017, it will reach 67,379 customers, and 83,312 customers in 2026.

Tabel Proyeksi Jumlah Pelanggan Nasional Berdasarkan Sektor (pelanggan)
Table: Sector-Based National Customer Projection (customer)

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rumah Tangga Households	62.251	64.782	66.703	68.572	69.911	70.960	71.893	72.685	73.419	74.118
Bisnis Business	3.252	3.461	3.699	3.967	4.257	4.571	4.911	5.279	5.676	6.105
Publik Public	1.804	1.902	2.009	2.126	2.250	2.382	2.522	2.699	2.826	2.991
Industri Industry	72	74	77	79	82	85	88	91	94	98
Jumlah **Total**	**67.379**	**70.218**	**72.488**	**74.745**	**76.501**	**77.998**	**79.414**	**80.724**	**82.016**	**83.312**

Sumber: RUPTL PLN Tahun 2017 s.d 2026 Source: RUPTL PLN 2017-2026

Jika dikelompokkan berdasarkan sebaran wilayah, di wilayah Jawa-Bali memiliki komposisi jumlah pelanggan yang terbesar di tahun 2017.

If the electricity projection is divided based on the spread of area, the Java-Bali area has the biggest composition of customers in 2017.

Grafik Proyeksi Jumlah Pelanggan Berdasarkan Wilayah Tahun 2017 (pelanggan)
Graph: Area-Based Customer Projection 2017 (people)

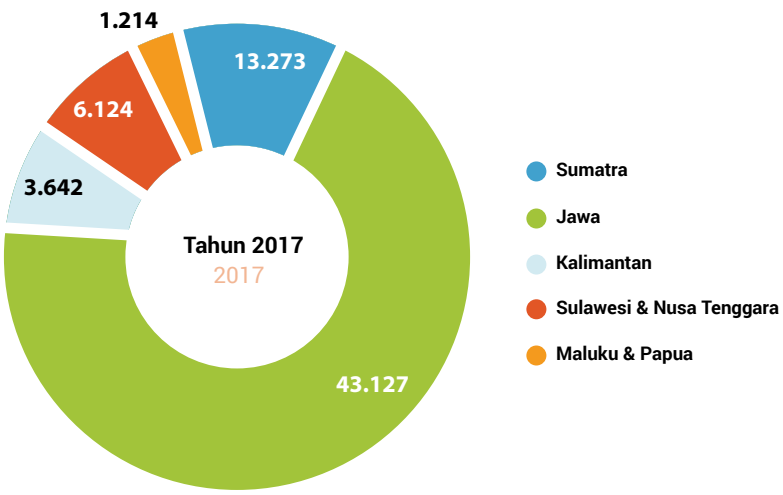

Sumber: RUPTL PLN Tahun 2017 s.d 2026 Source: RUPTL PLN 2017-2026

TINJAUAN PENDUKUNG BISNIS

BUSINESS SUPPORT

Kelancaran kinerja Perusahaan tidak lepas dari dukungan unit-unit pendukung bisnis sebagai enabler utama. Keandalan aspek-aspek pendukung bisnis memberikan kontribusi yang signifikan kepada kinerja operasional Perusahaan sehingga Perusahaan berhasil memenangkan persaingan dengan memberikan kinerja yang optimal.

The smoothness of Company's performance is inseparable from the support of business support units as the main enabler. The reliability of business supporting aspects contributes significantly to the Company's operational performance, hence the Company successfully

PEMASARAN
Marketing Aspect

Dalam rangka menangkap peluang dan memaksimalkan kekuatan Perusahaan, Indonesia Power memberikan fokus pada penerapan strategi pemasaran yang optimal. Strategi pemasaran yang optimal menjadi pendukung utama dalam upaya peningkatan produksi energi listrik dan pemenuhan kepuasan pelanggan.

Sampai saat ini hasil produksi listrik Indonesia Power hanya dijual kepada induk Perusahaan yaitu PT PLN (Persero) sebagai menjadi satu-satunya pembeli (*single buyer*). Mekanisme penjualan energi listrik melalui kontrak (*Power Purchase Agreement*) hingga saat ini diatur dalam periode tahunan.

In order to capture opportunities and maximize the Company's strengths, Indonesia Power focuses on implementing optimal marketing strategies. Optimal marketing strategy is the main pillar in increasing the production of electricity and fulfilling the customer's satisfaction.

Until now, the electricity production of Indonesia Power is sold to the parent company, i.e. PT PLN (Persero) as the single buyer. To this day, the electricity sales mechanism is arranged through yearly contract (Power Purchase Agreement).

Strategi Pemasaran

Strategi pemasaran yang dilaksanakan oleh Perusahaan mengacu pada Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) 2016-2020. Untuk tahun 2016, strategi dan program yang telah dan akan dilaksanakan, di antaranya adalah:

1. **Meningkatkan ketersediaan, keandalan, dan efisiensi thermal pembangkit**
   Guna memenuhi kepuasan pelanggan dan untuk mendukung peningkatan produksi energi listrik, salah satu strategi yang dikembangkan Indonesia Power adalah meningkatkan ketersediaan, keandalan, dan efisiensi pembangkit, baik Unit Pembangkitan (UP), Unit Pembangkitan dan Jasa Pembangkitan (UPJP), maupun Unit Jasa Pembangkitan (UJP). Langkah tersebut ditempuh melalui implementasi tata kelola pembangkit sesuai *best practice*. Selain itu, Perusahaan juga fokus pada peningkatan kinerja operasi dari pembangkit yang dikelola melalui UP, UPJP, dan UJP.

2. **Melakukan pengembangan pembangkit non-BBM termasuk energi terbarukan**
   Permintaan tenaga listrik nasional saat ini masih sangat tinggi dan pada saat bersamaan, potensi energi terbarukan di Indonesia masih berlimpah. Kondisi tersebut mendorong Perusahaan untuk mengurangi penggunaan bahan bakar minyak (BBM) dalam kegiatan operasional bisnisnya dan berupaya memanfaatkan energi terbarukan yang berlimpah tersebut. Karena itu, strategi pemasaran yang dijalankan Perusahaan yakni mengembangkan pembangkit non-BBM, termasuk energi terbarukan. Adapun pengembangan pembangkit yang dilaksanakan Perusahaan adalah PLTP, PLTG, dan PLTMH, sedangkan penambahan kapasitas pembangkit PLTU batu bara dilakukan melalui skenario transfer aset dari PT PLN (Persero).

3. **Mengembangkan Jasa O&M berbagai jenis pembangkit**
   Perusahaan juga akan terus mengembangkan bisnis jasa *Operation & Maintenance* (O&M) dalam

Marketing Strategy

The marketing strategy implemented by the Company refers to Long Term Corporate Plan (RJPP) 2016-2020. For 2016, the strategy and program that have been and will be conducted, among others, are:

1. **Improving the availability, reliability, and thermal efficiency of the power plant**
   In order to meet customer satisfaction and to support the increase of electricity production, one of the strategies developed by Indonesia Power is to improve the availability, reliability, and efficiency of the power plant, for Generating Unit (GU), Generating and Generating Service Unit (GGSU), and Generating Service Unit (GSU). This step is pursued through the governance implementation of plant in line with best practice. In addition, the Company also focuses on the operational performance improvement of the power plant managed through GU, GGSU, and GSU.

2. **Developing non-oil fuel power plant, including renewable energy**
   The demand for national electricity is very high and at the same time, the potential for renewable energy in Indonesia is abundant. The condition encourages the Company to reduce the use of oil fuel (BBM) in the business operational, and to seek to utilize the abundant renewable energy. Therefore, marketing strategy conducted by the Company is to develop non-oil fuel power plant, including renewable energy. The development carried out by the company is for Geothermal Power Plant (GPP), Gas Turbine Power Plant (GTPP), and Micro Hydro Power Plant (MHPP). Meanwhile, the capacity increase for coal based SPP is conducted through the asset transfer scenario from PT PLN (Persero).

3. **Developing O&M Services for various power plant**
   The Company also develops Operation & Maintenance (O&M) services in order to increase the

PEMASARAN
Marketing Aspect

rangka meningkatkan penetrasi Perusahaan di industri energi listrik. Implementasi strategi ini ditempuh melalui dua cara:

a. Pengembangan jasa O&M dalam negeri,
b. Pengembangan jasa O&M luar negeri.

4. **Meningkatkan keamanan dan perbaikan *supply chain* energi primer non-BBM**
Peningkatan keamanan dan perbaikan *supply chain* energi primer non-BBM merupakan strategi Perusahaan untuk mendukung ketersediaan dan efisiensi thermal pembangkit serta mendukung pengembangan pembangkit non-BBM.

5. **Melakukan *engagement* dengan pelanggan**
Bagi Indonesia Power, pelanggan memiliki posisi penting dalam menunjang kesinambungan bisnis Perusahaan. Oleh karena itu, Perusahaan senantiasa menjalin relasi dan komunikasi dengan pelanggan, baik secara formal maupun informal. Langkah tersebut dilakukan melalui berbagai macam cara, misalnya dalam bentuk rapat, *working group discussion*, maupun program mendengarkan suara pelanggan. Dengan strategi tersebut, diharapkan Indonesia Power dapat terus meningkatkan layanannya kepada pelanggan.

6. **Survei Pelanggan**
Sebagai salah satu upaya dalam mempertahankan dan meningkatkan pangsa pasar, Perusahaan melakukan Survei Pelanggan yaitu Survei Kepuasan Pelanggan, Survei Ketidakpuasan Pelanggan, dan Survei Keterikatan Pelanggan. Survei tersebut dilakukan untuk mengukur tingkat kepuasan pelanggan dan menilai persepsi pelanggan secara objektif terhadap kinerja produk dan jasa yang dihasilkan.

Company's penetration in the electricity industry. The strategy for implementation is carried out in two ways:

a. National O&M service development,
b. International O&M service development.

4. **Improving safety and refining supply chain for primary energy that is non-oil fuel**
Improving safety and refining supply chain for primary energy that is non-oil fuel is one of the strategies of the Company to support availability and thermal efficiency of power plant as well as to support the development of non-oil fuel power plant.

5. **Engaging the customer**
For Indonesia Power, customer has important position in supporting the business continuity of the Company. Therefore, the Company always establishes relation and communication with the customer, both formal and informal. The steps are conducted through various ways, such as meeting, working group discussion, and program to listen to the customer's voice. With this strategy, it is expected that Indonesia Power can enhance their services to the customer.

6. **Customer Survey**
As one of the efforts to maintain and increase market share, the Company conducts Customer Survey, i.e. Customer Satisfaction Survey, Customer Dissatisfaction Survey, and Customer Attachment Survey. The survey was conducted to measure the level of customer satisfaction and assess the customer's perception objectively to the performance of the products and services produced

Pangsa Pasar

Energi listrik untuk Jawa-Bali dipasok oleh beberapa perusahaan yaitu Indonesia Power (IP), PT Pembangkitan Jawa Bali (PJB), Unit Pembangkitan Tanjung Jati B (Tanjung Jati B), Unit Jasa O&M yang dikelola Indonesia Power, Unit Jasa O&M yang dikelola Pembangkitan Jawa Bali, dan pembangkit listrik swasta (*Independent Power Producer*/IPP).

Market Share

Electricity in Java-Bali is supplied by several companies, i.e. Indonesia Power (IP), PT Pembangkitan Jawa Bali (PJB), Generating Unit Tanjung Jati B (Tanjung Jati B), O&M services unit managed by Indonesia Power, O&M services unit managed by PJB, and Independent Power Producer (IPP).

Realisasi pasokan energi listrik di Jawa Bali tahun 2016 menurut data operasional Jawa Bali adalah sebesar 175.094 GWh, meningkat 5,48% dibanding realisasi pada periode yang sama tahun lalu sebesar 165.993 GWh.

Dari total pasokan tersebut Indonesia Power memasok sebesar 23,65% (41.405 GWh), PT PJB sebesar 14,74% (25.816 GWh), Tanjung Jati B sebesar 9,68% (16.941 GWh), Unit Jasa O&M yang dikelola Indonesia Power sebesar 14,55% (25.480 GWh), Unit Jasa O&M yang dikelola PJB sebesar 12,51% (21.911 GWh), dan IPP sebesar 24,87% (43.542 GWh). Pasokan energi Indonesia Power pada sistem Jawa Bali tersebut naik 0,68% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 22,97%. Pada tahun 2016, terdapat perubahan peran Indonesia Power dari asset operator menjadi asset manager pada sebagian Unit UPJB.

Supply realization of the electricity in Java Bali in 2016, according to the operational data of Java Bali is amounted to 175,094 GWh, increased by 5.48% compared to the realization in the same period of last year, i.e. 165,993 GWh.

From the total supply, Indonesia Power supplies 23.65% (41,405 GWh), PT PJB supplies 14.74% (25,816 GWh), Tanjung Jati B supplies 9.68% (16,941 GWh), O&M Services Units managed by Indonesia Power supply 14.55% (25,480 GWh), O&M Services Units managed by Pembangkitan Jawa Bali supply 12,51% (21.911 GWh), and Independent Power Producer (IPP) supplies the rest of 24,87% (43.542 GWh). The supply of Indonesia Power in the Java-Bali system increased by 0.68% compared to the same period in the previous year, which was 22.97%. In 2016, Indonesia Power changed the role from an asset operator into asset manager on most of the UPJB Units.

Tabel Pangsa Pasar Energi Listrik Jawa Bali Tahun 2014-2016

Table: Market Share of Electricity in Java Bali 2014-2016

No	Perusahaan Company	2014		2015		2016		Perusahaan Company
		GWh	%	GWh	%	GWh	%	
1	IPP	39.563	24,10	41.275	24,87	43.542	24,87	IPP
2	Indonesia Power*	37.928	23,10	38.129	22,97	41.405	23,65	Indonesia Power*
3	Pembangkitan Jawa Bali	29.742	18,12	25.485	15,34	25.816	14,74	Pembangkitan Jawa Bali
4	Unit Jasa O&M yang dikelola Indonesia Power	-	-	-	-	25.480	14,55	O&M Services Units managed by Indonesia Power
5	Unit Jasa O&M yang dikelola Pembangkitan Jawa Bali	-	-	-	-	21.911	12,51	O&M Services Units managed by Pembangkitan Jawa Bali
6	Tanjung Jati B	18.132	11,04	17.507	10,55	16.941	9,68	Tanjung Jati B
7	UPJB**	38.799	23,64	43.575	26,25	-	-	UPJB**
8	PLN Proyek	-	-	22	0,01	-	-	PLN Proyek

* Hasil produksi Indonesia Power di atas merupakan hasil produksi Jawa-Bali Grid ditambah dengan produksi dari pembelian tenaga listrik di Bali.

** Hasil produksi UPJB pada tahun 2016 masuk kedalam hasil produksi Unit O&M yang dikelola Indonesia Power dan Unit O&M yang dikelola Pembangkitan Jawa Bali

* Indonesia Power's production mentioned above is the total production of Java-Bali Grid and the power purchase in Bali.

** UPJB Production in 2016 is included in the production of O&M Units managed by Indonesia Power and O&M Units managed by Pembangkitan Jawa Bali.

PEMASARAN
Marketing Aspect

Grafik Pangsa Pasar Energi Listrik Jawa Bali (%)
Graphic: Market Share of Electricity in Java Bali (%)

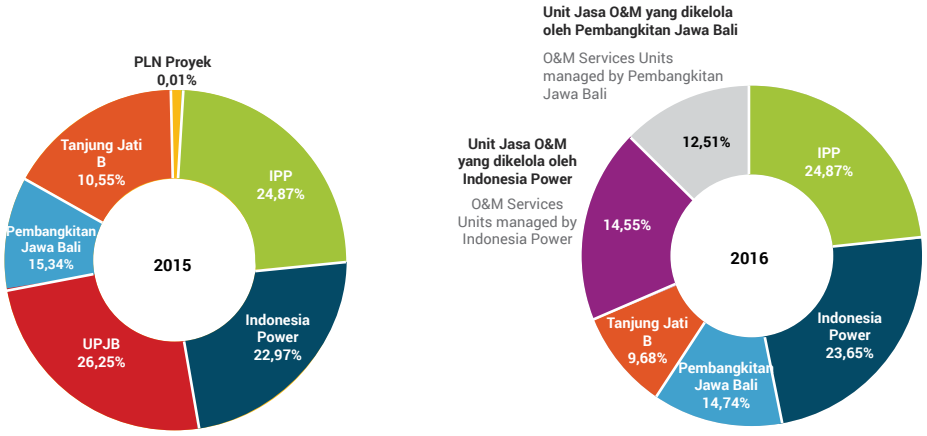

Biaya Pemasaran

Biaya pemasaran dan biaya lain digunakan untuk mempererat relasi dengan pelanggan di tahun 2016 dilakukan hanya untuk lingkup di Kantor Pusat Indonesia Power. Selain itu, dalam hubungan pelanggan yang lebih *customize* dilakukan pula oleh Unit Pembangkit secara mandiri, contoh Unit Pembangkitan Perak Grati melakukan hubungan untuk mendengarkan suara pelanggan lebih fokus pada PT PLN Area Pengatur Beban (APB) Jawa Timur. Realisasi biaya pemasaran pada tahun 2016 adalah sebesar Rp723.514.600.

Marketing Cost

Marketing cost and other cost to strengthen customer relation in 2016 is conducted in the environment of Indonesia Power Head Office. A more customize customer relation is conducted by Generating Unit independently. For example, Perak Grati Generating Unit conducted a communication to listen to the customer voice to focus more on the Area Load Controller (APB) of PT PLN East Java. The cost marketing realization in 2016 is amounted to Rp723,514,600.

Tabel Biaya Pemasaran Tahun 2016 (Rp)
Table: Marketing Cost in 2016 (Rp)

Kegiatan Pemasaran	Biaya 2016 Cost 2016	Marketing Activity
Jasa *Surveyor* independen untuk *survey* kepuasan pelanggan	442.899.600	Independent Surveyor for customer satisfaction survey service
Jasa *Customer Relationship Assessment*	203.665.000	Customer Relationship Assessment service
Biaya lain untuk mempererat relasi dengan pelanggan	76.950.000	Other cost to strengthen the relationship with customer
a) Kegiatan Ramah Tamah dengan PLN P2B dan APB Dalam Rangka *Workshop* DKIKP	10.000.000	Socialization with PLN P2B and APB in DKIKP Workshop
b) Biaya Ramah Tamah Pelanggan dalam Acara Rapat Rencana Alokasi Energi Juli-Agustus dan Evaluasi Operasi Mei 2016	7.000.000	Customer Socialization cost in Meeting of Energy Allocation Plan July-August and Operation Evaluation on May 2016
c) Jasa Konsultasi Dengan Kejaksaan Agung RI Terkait Pembayaran Iuran EP/BJPSDA	5.200.000	Consultation Service with Supreme Attorney of the Republic of Indonesia related to the Payment on EP/BJPSDA
d) Kegiatan Halal Bihalal Idul Fitri 1437 H Bersama Pelanggan	31.250.000	Halal Bihalal Idul Fitri 1437 H with Customer
e) Rapat Revisi Jumlah Tagihan Final Tahun 2016 (19-21 Oktober 2016)	23.500.000	Meeting of Final Bills Revision 2016 (19-21 October 2016)
Jumlah	**723.514.600**	**Total**

SUMBER DAYA MANUSIA
Human Resources

Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkompeten dan memiliki kapasitas yang memadai merupakan kunci bagi keberhasilan Perusahaan untuk mewujudkan visi dan misi, rencana jangka panjang, serta kinerja yang berkelanjutan. Hal tersebut dikarenakan bahwa SDM adalah *enabler* yang terpenting. Indonesia Power memberikan fokus terhadap pengelolaan dan pengembangan kompetensi SDM agar mampu bersaing di tengah kompetisi bisnis yang semakin ketat.

Human Resources (HR) that is competent and has the efficient capability is the key to the success of the Company to realize its vision and mission, long-term plan, and sustainable performance. This comes from the fact that HR is the essential enabler. Indonesia Power focuses on management and development of HR competencies so that they possess competitive values in today's business world.

Kebijakan Pengelolaan SDM di Tahun 2016

Sebagai bentuk keseriusan manajeman pada pengelolaan SDM, pada tahun 2016 disusun dan disahkan beberapa Keputusan Direksi terkait pengelolaan SDM sebagai berikut:

HR Management Policy in 2016

In showing its commitment on managing HR, in 2016 the Company has composed and ratified several Director's Decree regarding to HR management, as follows:

SUMBER DAYA MANUSIA
Human Resources

Tabel Keputusan Direksi terkait Pengelolaan SDM Tahun 2016
Table: Directors' Decree regarding to HR Management 2016

No	Nomor SK Decree Number	Perihal SK	Decree Description	Tanggal Terbit Date of Issuance	Tanggal Berlaku Effective Date
1	38.K/010/IP/2009	Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Berbasis Kompetensi (MSDM-BK)	Competence Based Human Resource Management System (MSDM-BK)	7 Mei 2009 May 7, 2009	1 Januari 2009 January 1, 2009
2	63.K/010/IP/2009	Sistem Penghargaan Pegawai	Employee's Appreciation System	30 Juni 2009 June 30, 2009	30 Juni 2009 June 30, 2009
3	50.K/010/IP/2011	Sistem Pembelajaran Pegawai	Employee's Learning System	20 Mei 2011 May 20, 2011	20 Mei 2011 May 20, 2011
4	80.K/010/IP/2012	Sistem Manajemen Kinerja Pegawai	Employee's Performance Management System	4 Juni 2012 June 4, 2012	4 Juni 2012 June 4, 2012
5	85.K/010/IP/2012	Sistem Rekrutmen Pegawai	Employee Recruitment System	19 Juni 2012 June 19, 2012	19 Juni 2012 June 19, 2012
6	186.K/010/IP/2012	Perubahan Atas Keputusan Direksi No. 38.K/010/IP/2009 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Berbasis Kompetensi (MSDM-BK)	Amendment on the Director's Decree No. 38.K/010/IP/2009 on Competence Based Human Resource Management System (MSDM-BK)	21 November 2012 November 21, 2012	21 November 2012 November 21, 2012
7	84.K/010/IP/2015	Sistem Pembinaan Kompetensi dan Karir Pegawai	Competence Development and Employee's Career System	25 Mei 2015 May 25, 2015	25 Mei 2015 May 25, 2015

Pelaksanaan Rekrutmen

Perusahaan menyelenggarakan rekrutmen pegawai yang dilakukan secara terbuka dengan tujuan menjaring calon atau kandidat dari seluruh latar belakang yang terbaik dan *qualified*. Indonesia Power menetapkan syarat yang disesuaikan dengan fungsi yang dibutuhkan sampai pada proses diklat persiapan atau yang disebut *on the job training* (OJT).

Proses rekrutmen diharapkan dapat menghasilkan pegawai yang kompeten, dapat dikembangkan serta terikat pada Perusahaan. Perusahaan berusaha menempatkan orang yang tepat pada fungsi yang tepat, sehingga tercipta sumber daya manusia berkualitas yang akan terus tumbuh dalam jangka waktu yang panjang.

Untuk metode Rekrutmen dilakukan melalui metode Rekrutmen Umum dan Rekrutmen Khusus (*Direct Shopping*):

1. Rekrutmen Umum/regular, dibuka 3 tahap, diperuntukkan untuk seluruh pelamar luas yang sesuai dengan kualifikasi yang telah di tetapkan oleh Perusahan,

Recruitment

The Company holds an open recruitment that is intended to filter potential employees or candidates from all backgrounds that are the best and most qualified. Indonesia Power determines the conditions accordingly to required functions up until preparation course process or what is usually known as On the Job Training (OJT).

The recruitment process is expected to produce competent employees, ones that can be nurtured and are committed to the Company. The Company strives to put the right people on the right function, creating qualified human resources that will continue to grow in the long term.

As for the methods of recruitment, it is separated into two, they are the General Shopping and Direct Shopping:

1. General/Regular Shopping, is opened in 3 stages, intended for all applicants that have the qualifications determined by the Company,

2. Rekrutmen Khusus, Indonesia Power melaksanakan Rekrutmen khusus melalui *direct shopping* dimana melakukan kerjasama dengan lembaga pendidikan STT PLN dan Sekolah Vokasi UGM untuk Rekrutmen Tingkat D3 (Diploma III) serta rekrutmen tingkat akhir untuk mahasiswa Politeknik Negeri Jakarta, Politeknik Negeri Semarang, Politeknik Negeri Malang dan Politeknik Negeri Pontianak.

2. Direct Shopping, Indonesia Power holds a special recruitment through direct shopping where the Company collaborates with STT PLN educational institution and UGM Vocational School to recruit D3 level (Diploma III) applicants and the last stage of recruitment intended for students from Politeknik Negeri Jakarta, Politeknik Negeri Semarang, Politeknik Negeri Malang, and Politeknik Negeri Pontianak.

Tabel Rekrutmen (pegawai)
Table: Recruitment (employee)

Tahun Year	Tingkat Pendidikan Level of Education		Jumlah Amount
	S1	D3	
2016	361	450	811
2015	10	221	231

Komposisi Pegawai

Pada tahun 2016, pegawai Indonesia Power berjumlah 3.725 pegawai meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2015 sebanyak 3.639 pegawai. Komposisi pegawai secara lebih rinci telah dijelaskan pada bagian Profil Perusahaan Sub Bagian Profil Pegawai Perusahaan.

Employee Composition

In 2016, the number of Indonesia Power employees reached 3,725, which is an increase compared to the previous year, when it had reached 3,639. A more detailed employee's composition has been disclosed on Company Profile, Sub-chapter Employee Profile.

Pelatihan dan Pengembangan

Sebagai langkah pemutakhiran dan peningkatan kemampuan serta *skill* pegawai, Indonesia Power secara berkala melakukan pengembangan kepada seluruh pegawainya sesuai dengan kebutuhan dan skala prioritas. Bentuk pengembangannya adalah berupa pendidikan, pelatihan, *training work station* atau simulasi, dan sertifikasi yang secara lebih rinci telah dijelaskan pada bagian Profil Perusahaan Sub Bagian Profil Pegawai Perusahaan.

Training and Development

As an attempt in updating and enhancing employees' abilities and skills, Indonesia Power periodically carries out development program for all employees accordingly to their needs and priorities. The development program consists of education, training, training workstation or simulation, and certification that have been disclosed in detail on Company Profile, Sub-chapter Employee Profile.

SUMBER DAYA MANUSIA
Human Resources

Internalisasi Budaya Perusahaan

Sejalan dengan perkembangan bisnis, Indonesia Power melakukan sosialisasi dan internalisasi nilai-nilai budaya yang mengedepankan strategi, terutama pada sumber daya manusia dengan harapan lebih mudah dipahami, dimengerti dan diimplementasikan oleh seluruh Insan Indonesia Power dalam Laporan Tahunan.

Internalisasi dilaksanakan dengan pembagian peran dari pejabat level atas sampai bawah sebagai berikut:

1. Direksi memberikan arah kebijakan dan mengawal secara ketat penerapannya yang dipimpin oleh Direktur Utama dibantu oleh *Learning Management* Team atau Tim Budaya Perusahaan yang bersifat *ad hoc*;
2. General Manager dan *Senior Leader* sebagai *Learning Champion* bertugas menanamkan dan menumbuhkan penerapan Indonesia Power Way dan IP AkSi di Unit, Satuan atau Divisinya masing-masing. Para *Senior Leader* dibantu oleh Agen Perubahan yang ditetapkan oleh Perusahaan;
3. Seluruh pegawai dan Pemimpin sebagai *Learning Target* menerapkan Indonesia Power Way dan IP AkSi dalam kegiatannya sehari-hari.

Corporate Culture Internalization

Along with business development, Indonesia Power implements socialization and internalization of cultural values that put forth strategy, especially for human resources with the hope that it would be easier to grasp, understand and implement by all Indonesia Power's employees on Annual Report.

The internalization is executed by role division, starting from higher up employees to managerial level employees, as follows:

1. Director provides the direction of policy and strictly oversees its implementation that is led by President Director assisted by Learning Management Team or Corporate Culture Team that has the quality of ad hoc;
2. General Manager and Senior Leader as Learning Champion are in charge in planting and growing Indonesia Power Way and IP AkSi implementation on their respective Unit, Task Force or Division. These Senior Leaders are assisted by Agent of Change that has been determined by the Company;
3. All employees and Leaders as Learning Target implement Indonesia Power Way and IP AkSi in their daily activities.

Program Internalisasi Budaya Perusahaan

Implementasi internalisasi budaya dilaksanakan melalui beberapa program yang telah dilaksanakan pada tahun 2016 sebagaimana dalam tabel berikut:

Corporate Culture Internalization Program

The implementation of cultural internalization is executed through several programs that have been held in 2016 as described in this following table:

Tabel Program Internalisasi Budaya Tahun 2016
Table: Cultural Internalization Program 2016

Program	Penjelasan	Description
Internalisasi Nilai Perusahaan: Integritas-Profesional-Proaktif-Sinergi (IP AkSi) Corporate Values Internalization: Integrity-Professional-Proactive-Synergy (IP AkSi)	Kegiatan yang dilakukan dengan tujuan nilai-nilai perusahaan dapat terinternalisasi kepada seluruh anggota Perusahaan, antara lain sebagai berikut: 1. *Workshop Leadership Value Induction* (Triwulan I Tahun 2016), 2. Pembuatan Buku *Inspiring Leader* (Triwulan IV Tahun 2016), 3. Sosialisasi melalui berbagai media komunikasi perusahaan.	The activities executed with the intention to internalize corporate values into all members of the Company, are as follows: 1. Workshop Leadership Value Induction (First Quarter of 2016), 2. Book composition of Inspiring Leader (Fourth Quarter of 2016), 3. Socialization through various communication medias within the Company.

Program Program	Penjelasan	Description
Assessment Budaya Cultural Assessment	Sesuai target *Road Map* Indonesia Power Way pada tahun 2016 adalah tahap *awareness, desire and knowledge*, maka untuk itu *assessment* Budaya Perusahaan dengan menggunakan pendekatan kualitatif pada semester 1 tahun 2016 ini difokuskan untuk mengetahui: 1. Implementasi Indonesia Power Way, 2. *Awareness* pegawai, 3. Internalisasi Budaya oleh Pegawai dan Pihak Ketiga. Waktu Pelaksanaan: Triwulan II Tahun 2016	In accordance to the Road Map Indonesia Power Way target in 2016 is the stages of awareness, desire, and knowledge. Therefore, Corporate Culture assessment is carried out using qualitative approach in the first semester of 2016 and focused on finding: 1. Indonesia Power Way Implementation, 2. Awareness of the employees, 3. Cultural Internalization of the employees and third party. Time of execution: Second Quarter of 2016
Agen Perubahan Agent of Change	Dalam rangka memastikan agar proses perubahan di Indonesia Power berjalan secara efektif, maka diperlukan adanya pegawai yang berperan sebagai katalisator perubahan, maka dibentuk Agen Perubahan di seluruh Unit Kerja PT Indonesia Power melalui mekanisme yang telah ditetapkan oleh Perusahaan. Agen Perubahan juga diberikan pembekalan yang diharapkan mampu mendukung Agen tersebut dalam menjalankan perannya, yaitu sebagai *sosialisator, internal ambasador, role model* dan pelaku *quick wins.* Waktu Pelaksanaan: Triwulan II Tahun 2016	To ensure the effectiveness of transformation process within Indonesia Power, a role of change catalysator by the employee is needed, and so Agent of Change throughout all Work Unit of PT Indonesia Power has been formed through the mechanism that has been determined by the Company. Agent of Change has been equipped with knowledge and skill hoped support said Agent in carrying out its role, as a social actor, internal ambassador, role model, and quick wins player. Time of execution: Second Quarter of 2016
Penghargaan Pegawai Pilihan Employee of the Year Award	Perusahaan memandang diperlukan pegawai-pegawai teladan yang menjadi panutan pegawai lainnya dalam proses internalisasi budaya perusahaan sesuai dengan kaidah dan harapan, oleh karena itu penghargaan kepada Pegawai yang telah berkontribusi dan dianggap patut dijadikan teladan dilaksanakan dalam agenda tahunan HUT PT Indonesia Power. Terdapat dua kategori: 1. *Leadership Excellence* (Level Eksekutif ke atas), 2. Pegawai Teladan Budaya IP AkSi (Level Penyelia ke bawah). Waktu Pelaksanaan: Triwulan III Tahun 2016	The Company believes that model employees are required for other employees to look up to in the process of corporate culture internalization in accordance to the rules and expectations. Therefore, an award given to Employee that has contributed and is viewed worthy as a role model is carried out within the annual agenda of PT Indonesia Power Anniversary. There are two categories: 1. Leadership Excellence (Executive Level and up), 2. Model Employee of IP AkSi Culture (Managerial Level and below). Time of execution: Third Quarter of 2016
Survei HRSE HRSE Survey	Dalam mengukur kepuasan dan *engagement* Pegawai yang yang merupakan salah satu faktor dari *Organization Capital Readiness* (OCR), maka dilaksanakan kegiatan pengukuran dan tindak lanjut atas pengukuran tersebut. Untuk mengukur/memetakan aspek-aspek yang perlu ditingkatkan, maka Survei HRSE (*Human Resources Satisfaction & Engagement*) dilakukan setiap tahunnya untuk memastikan program-program yang sudah diimplementasikan berjalan sesuai dengan tujuannya dan juga untuk menggali harapan dan keinginan pegawai. Survei HRSE 2016 didampingi oleh konsultan yang kompeten dibidang Sumber Daya Manusia. Survei HRSE juga dilakukan dengan target Non Pegawai, SDM non organik Indonesia Power yang terlibat dalam aktivitas perusahaan.	In measuring the satisfaction and engagement of the Employee, that is one of the factors of Organization Capital Readiness (OCR), an act of assessment and follow up of said assessment are carried out. To assess/map the aspects that need to be enhanced, HRSE (Human Resources Satisfaction & Engagement) survey is executed every year to ensure that the implemented programs are carried out accordingly and to learn the hope and wishes of the employees. HRSE survey in 2016 was assisted by a consultant that is the competent in the field of Human Resource. HRSE survey is also intended with the target of non-employee, non-organic HR of Indonesia Power that has been involved in company's activities.
Motivasi Budaya Cultural Motivation	Maksud diselenggarakannya ceramah motivasi budaya adalah guna mencapai sasaran HR *Excellence* dan peningkatan program terkait aspek *teamwork*, budaya dan *strategy alignment* melalui pemahaman yang mendasar baik dengan wawasan baru maupun *refreshment* sehingga pegawai mampu menerapkan nilai-nilai perusahaan ke dalam program kerja. Motivasi Budaya dilakukan dengan mengundang para ahli dan praktisi motivasi SDM dan diselenggarakan setiap Triwulan dalam bentuk ceramah motivasi/seminar.	Motivation lecture is held with the intent of achieving the target or HR Excellence and enhancing the programs that are related to teamwork, culture, and strategy alignment aspects through basic understanding with new knowledge and refreshment so that employees are capable in applying corporate values into their work program. Cultural motivation is carried out by inviting motivational experts and practitioners in the field of HR and it is held every trimester in the format of motivational lecture/ seminar.

SUMBER DAYA MANUSIA
Human Resources

Assessment Budaya Perusahaan

Kegiatan ini dilaksanakan untuk mengukur implementasi internalisasi Indonesia *Power Way* dan menyusun *action plan* sebagai upaya peningkatan implementasi tersebut. *Assessment* dilaksankan dengan metode observasi dan kuesioner secara mandiri yang dijalankan oleh Divisi Sistem SDM dan Manajemen Perubahan. Hasil *assessment* budaya yang dilaksanakan pada tanggal 18-22 April 2016 sebagai berikut:

Corporate Culture Assessment

This activity is carried out to assess the implementation of Indonesia Power Way internalization and to formulate an action plan as an effort in enhancing said implementation. Assessment is performed through independent observation and questionnaire methods by HR System Division and Transformation Management. The result of cultural assessment that was performed on April 18-22, 2016 are as follows:

Tabel Hasil Assessment Budaya Perusahaan Tahun 2016
Table: Corporate Culture Assessment Result 2016

No	Indikator	Indicator	Hasil Pengukuran (%) Assessment Result (%)
1	Implementasi Indonesia Power Way	Implementation of Indonesia Power Way	85
2	*Awareness* terhadap Budaya Perusahaan	Awareness towards Corporate Culture	92
3	Penghayatan Indonesia Power Way	Appreciation of Indonesia Power Way	83

Pembinaan Karir

Pembinaan karir dilakukan melalui sistem promosi yang diatur dalam kebijakan Surat Keputusan (SK) Direksi Nomor: 22.K/010/IP/2010 tentang Pejabat Pelaksana Tugas (PLT) dan SK Direksi Nomor: 84.K/010/IP/2015 tentang Sistem Pembinaan Kompetensi dan Karir Pegawai.

Pengembangan kompetensi pegawai dan kesiapan organisasi sesuai dengan sasaran strategi Perusahaan dilakukan melalui lima tahap pembinaan karir, yaitu:

Career Coaching

Career coaching is carried out through promotional system that is regulated in the policy of Director's Decree Number: 22.K/010/IP/2010 on Task Force Officer and Director's Decree Number: 84.K/010/IP/2015 on Competency Coaching System and Worker's Career Path.

The development of employee's competency and organizational readiness in accordance to the target of Company's strategy is carried out through five stages of career coaching, they are:

Tabel Tahap Pembinaan Karir
Table Stage of Career Coaching

Tahap Pembinaan Karir Stages of Career Coaching	Penjelasan	Description
Rekrutmen Recruitment	Proses rekrutmen didasarkan pada standar minimum aspek psikologis (kemampuan intelektual, kepribadian dan sikap kerja) dan kompetensi yang mengacu pada Kebutuhan Kompetensi Jabatan (KKJ) yang berlaku di Perusahaan.	Recruitment process is based on the minimum standard of psychological aspects (intellectual capabilities, personality and work attitude) and the competency that refers to Position Competency Requirement (KKJ) that apply in the Company.

Tahap Pembinaan Karir Stages of Career Coaching	Penjelasan	Description
Penempatan pada Jabatan Placement	Penempatan pegawai pada jabatan didasarkan pada hasil asesmen kompetensi pegawai yang bersangkutan pada proses diklat prajabatan.	Placement of employees based on the result of competency assessment executed during the period of pre-placement course.
Penilaian Kinerja Performance Evaluation	Penilaian Kinerja dilakukan melalui proses *cascading* KPI Manajemen yang diturunkan ke KPI bawahannya, dan pemenuhan *gap* kompetensi pegawai terhadap jabatan saat ini maupun jabatan proyeksi pegawai tersebut. Penilaian Kinerja dilakukan secara berulang pada pegawai di tiap semester.	Performance Evaluation is carried out through a cascading process of the KPI Management that is passed down to the subordinate KPI, and the fulfillment of competency gap between current position and projected position for said employees. Performance Evaluation is carried out repeatedly on every employee each semester.
Pembinaan Karir Career Coaching	Pembinaan Karir Pegawai didasarkan pada seluruh penilaian kinerja pegawai yang dilakukan secara berulang di tiap semester.	Employee Career Coaching is based on overall performance evaluation of every employee that is carried out repeatedly each semester.
Persiapan Pensiun Retirement Preparation	Persiapan pensiun dilakukan melalui pembekalan pegawai pra purna bakti melalui persiapan mental, pengelolaan keuangan dan pemeliharaan kesehatan bagi pegawai Pensiun.	Retirement preparation is carried out through debriefing for pre-retirement employees in the form of mental preparation, financial management and health care for retired employees.

Indikator seorang pegawai untuk promosi didasarkan pada kecakapan, pengalaman, dan kesungguhan serta ketepatan waktu. Prestasi kerja dipengaruhi oleh tiga faktor lain, yaitu kemampuan dan minat seorang pekerja, kemampuan dan penerimaan atas penjelasan delegasi tugas dan peran, serta tingkat motivasi yang dimilikinya.

The indicator of promoting an employee is based on proficiency, experience, and earnestness and also punctuality. Work accomplishment is influenced by three other factors, i.e. ability and interest of an employee, ability and acceptance on task and role delegation, and the level of motivation.

Pada tahun 2016 terjadi promosi jabatan sebanyak 181 pegawai, rotasi sebanyak 413 pegawai, dan demosi sebanyak 5 pegawai.

In 2016, there had been 181 promotions, 413 rotations, and 5 demotions.

Tabel Mutasi Pegawai Tahun 2016 (pegawai)
Table: Employee Mutation 2016 (Employee)

Jenis Mutasi	Mutation	Jumlah Pegawai Number of Employee
Rotasi	Rotation	413
Demosi	Demotion	5
Promosi:	Promotion:	181
A. Definitif	A. Definitive	133
B. PLT	B. PLT	48
Jumlah	**Total**	**599**

Pengukuran Maturity Kinerja SDM

Kinerja SDM diukur berdasarkan KPI yang telah ditetapkan Indonesia Power yaitu melalui *Human Capital Readiness* (HCR) dan *Organizational Capital Readiness* (OCR) merupakan target pencapaian aspek *Learning & Growth*.

HR Performance Maturity Measurement

HR performance is measured accordingly to the KPI that has been determined by Indonesia Power, i.e. through Human Capital Readiness (HCR) and Organizational Capital Readiness (OCR), and is the achievement target of Learning & Growth aspect.

SUMBER DAYA MANUSIA
Human Resources

Human Capital Readiness (HCR)

HCR adalah pengukuran kesiapan SDM berdasarkan dua aspek, yaitu peningkatan kompetensi dan pemenuhan kebutuhan SDM yang optimal agar dapat mengimplementasikan strategi Perusahaan. Formulasi yang digunakan untuk mengukur HCR menggunakan skala 1-5 yang didapatkan dari hasil *assessment*, yaitu *self-assessment* dan *assessment* oleh Kantor Pusat kepada unit setiap triwulan. Selain proses *assessment* tersebut, proses pembinaan dilakukan oleh bidang terkait dalam bentuk sosialisasi kepada pengelola SDM unit, *monitoring* dan *feedback* bulanan.

Pada tahun 2016, HCR adalah sebesar 4,25% meningkat jika dibandingkan tahun 2015 sebesar 4,22%. Terkait dengan kesiapan kompetensi pegawai dalam menjalankan strategi Perusahaan, dilakukan melalui ukuran proses dan hasil:

Human Capital Readiness (HCR)

HCR is an assessment on HR readiness based on two aspects, competency improvement and optimized HR fulfillment, so that Company's strategy can be implemented. The formula that is utilized to assess HCR is 1-5 scale that is acquired from assessment results, they are self-assessment and Head Office assessment toward each unit every three month. Aside from said assessment process, coaching process is carried out in related field in the form of socialization towards unit's HR Manager, monitoring, and monthly feedback

In 2016, the HCR was 4.25%, an increase from 2015 which was 4.22%. Related to employees' competency readiness in carrying out Company's strategy, is executed through process and result measurement:

Tabel Aspek Pengukuran Kesiapan SDM
Table: Aspect of Assessment on HR readiness

Aspek	Aspect	Proses/Maturity Process/Maturity	Hasil/KPI Result/KPI
Peningkatan Kompetensi	Competency Improvement	4,88	4,20
Pemenuhan Kebutuhan SDM	HR Fulfillment	-	3,94

Grafik HCR Tahun 2012-2016 (%)
Graph: HCR 2012-2016 (%)

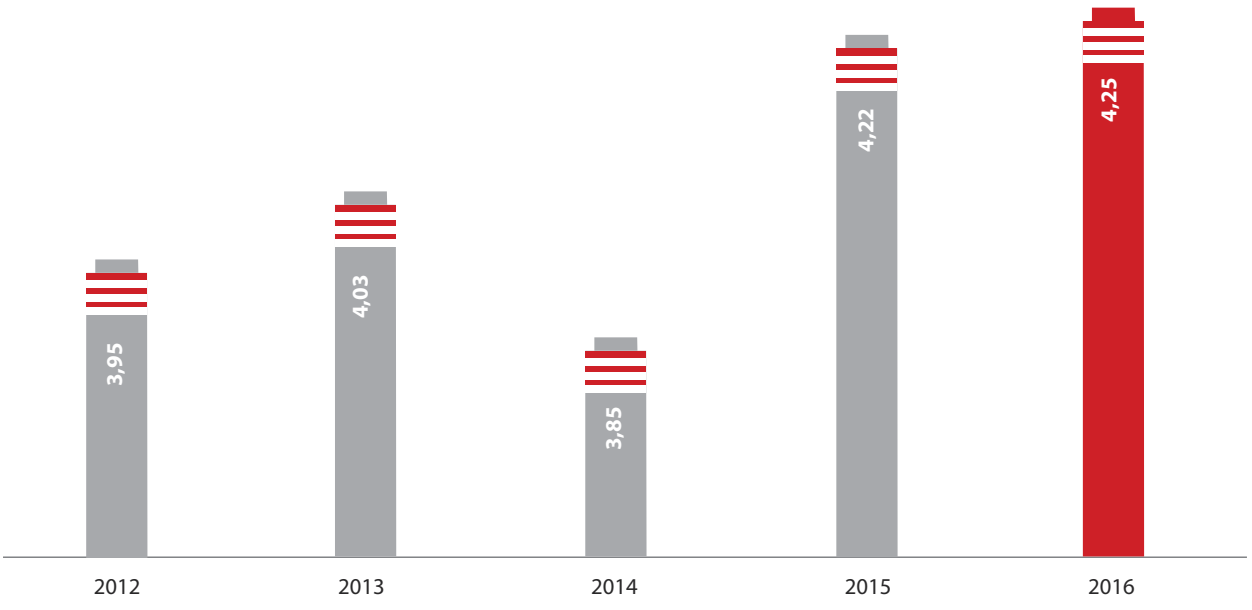

Organizational Capital Readiness (OCR)

OCR merupakan pengukuran kesiapan organisasi berdasarkan empat aspek, yaitu budaya kerja, kepemimpinan, *alignment* dan *teamwork*. Formulasi yang digunakan untuk mengukur OCR adalah dengan menggunakan skala 1-5 yang didapatkan dari hasil *assessment*.

Pada tahun 2016, OCR adalah sebesar 4,28% meningkat jika dibandingkan tahun 2015 sebesar 4,23%. Kesiapan organisasi untuk mencapai sasaran Perusahaan dilakukan melalui:

Organizational Capital Readiness (OCR)

OCR is a form of assessment on organizational readiness based on four aspects, i.e. work culture, leadership, alignment and teamwork. The formula utilized to measure OCR uses scale 1-5 that is acquired from assessment results.

In 2016, the OCR was 4.28%, an increase from 2015, which was 4.23%. Organizational readiness to achieve Company's target is performed through:

Tabel Aspek Pengukuran Kesiapan Organisasi
Table: Aspect of Assessment on organizational readiness

Aspek	Aspect	Proses/Maturity Process/Maturity	Hasil/KPI Result/KPI
Budaya Kerja	Work Culture	4,56	4,38
Kepemimpinan	Leadership	4,63	3,63
Alignment	Alignment	3,56	4,06
Team Work	Team Work	4,56	4,81

Grafik OCR Tahun 2012-2016 (%)
Graph: OCR 2012-2016 (%)

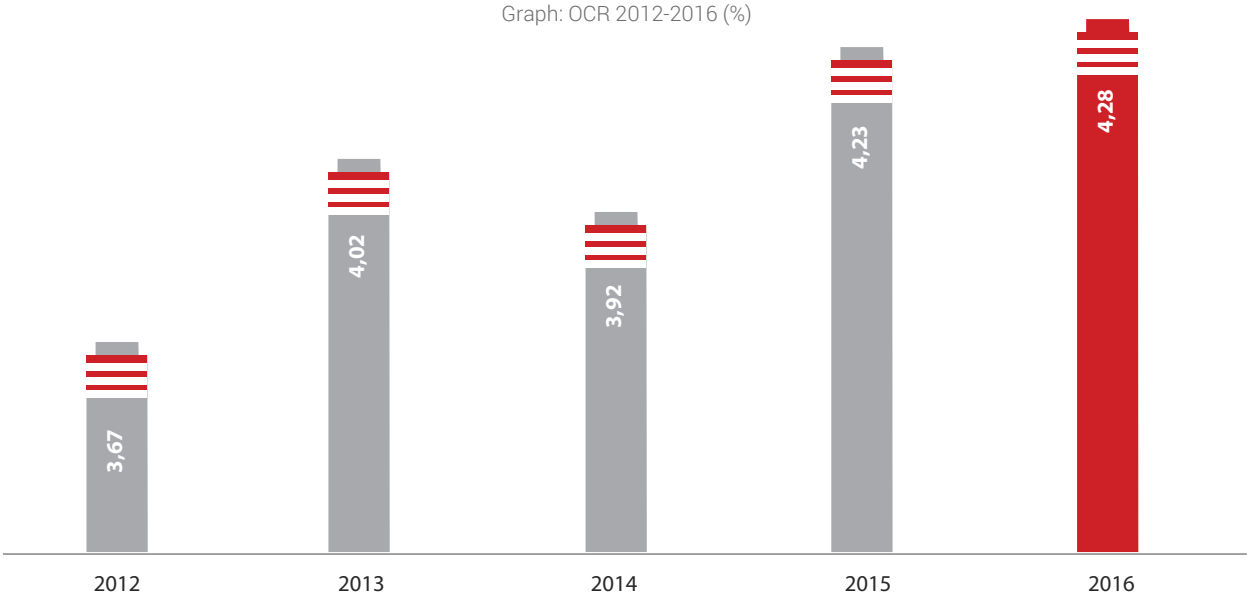

SUMBER DAYA MANUSIA
Human Resources

Penilaian Kinerja

Indonesia Power memberikan penilaian atau kinerja dan pencapaian yang telah diberikan terhadap para pegawainya untuk mengevaluasi produktivitas kinerja mereka. Sebagai dasar pengukuran pencapaian kinerja pegawai dalam mencapai tujuan Perusahaan secara efektif dan efisien, Perusahaan telah menetapkan Sistem Manajemen Kinerja dengan menggunakan aplikasi Sistem manajemen Kinerja Pegawai (SIMKP). Selain itu, juga untuk memotivasi pegawai dalam meningkatkan kompetensi dan kontribusi kepada Perusahaan.

Aturan mengenai Sistem Manajemen Kinerja Pegawai ditetapkan dalam Keputusan Direksi Nomor: 80.K/010/IP/2012 tanggal 4 Juni 2012 tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai. Dalam pelaksanaannya, pengukuran kinerja pegawai dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu:

Performance Assessment

Indonesia Power gives assessment on performance and accomplishment of its employees to evaluate their performance productivity. As the foundation of employee's achievement assessment in realizing Company's objectives effectively and efficiently. The Company has determined Performance Management System using Employee Performance Management System (SIMKP) application. Other than that, it also serves to motivate employees in improving their competency and contribution towards the Company.

The regulation on Employee Performance Management System is set in Director's Decree Number: 80.K/010/IP/2012 dated June 4, 2012 on Employee Performance Management System. In its execution, the assessment of employee's performance is carried out in several stages, they are:

Tabel Tahap Penilaian Kinerja Pegawai
Table: Employee Performance Assessment Stages

Tahap Stages	Kegiatan	Activity
Perencanaan Kinerja Pegawai Employee's Performance Planning	Perencanaan Kinerja Tahun 2016 dilaksanakan pada 8-23 Juni 2016 untuk dua semester. Perencanaan dimulai dari Inisiasi KPI Atasan kepada bawahan melalui aplikasi SIMKPNAS.	2016 Performance Planning was performed on June 8-23, 2016 for two semesters. The planning starts from Superior KPI initiation to its subordinates through SIMKPNAS application.
Pemantauan Kinerja Pegawai Employee's Performance Supervision	Pemantauan Kinerja dilaksanakan secara offline berupa CMC Atasan Bawahan dan secara online melalui Periode Revisi Perencanaan Manajemen Kinerja di Aplikasi SIMKPNAS pada 24 Oktober s.d 6 November 2016 untuk Semester 2 Tahun 2016.	Performance Supervision is carried out offline in the form of CMC between Superior and Subordinate and online through Performance Management Planning Revision Period on the SIMKPNAS application on October 24 s.d November 6, 2016 for the second semester of 2016.
Pengukuran Kinerja Pegawai Employee's Performance Assessment	Pengukuran Kinerja dilaksanakan per semester. Periode ini Setiap Pegawai mengisikan realisasi kinerja selama satu semester yang kemudian disetujui oleh Atasan melalui Aplikasi SIMKPNAS. Periode Semester I pada 1-15 Agustus 2016 dan Periode Semester II pada 16-27 Januari 2017	Performance Assessment is carried out on each semester. During this period, each employee fills in performance realization for one semester that would then be approved by Superiors through SIMKPNAS application. The first semester period fell on August 1-15, 2016, and the second semester period fell on January 16-27, 2017.

Tabel Kompetensi yang Dinilai dalam Penilaian Pegawai
Table: Assessed Competency in Employee's Assessment

Jenis Kompetensi Competency Type	Penjelasan	Description
Hard Compentency	*Hard Competency*/Kompetensi teknis diukur berdasarkan pencapaian Target KPI *Management* dan KPI Rutin/Uraian Jabatan	Hard Competency/Technical Competency is measured based on KPI Management Target and Routine KPI/ Position Description.
Soft Competency	*Soft Competency* diukur melalui Kuesioner Kompetensi yang dinilai oleh Atasan langsung dari pegawai. Kuesioner berkaitan dengan Kompetensi Utama dan Kompetensi Peran dalam Direktori Kompetensi PT Indonesia Power	Soft Competency is assessed through Competency Questionnaire by the Superiors directly from the employees. The questionnaire is related to Main Competency and Role Competency on PT Indonesia Power Competency Directory.

Penilaian kinerja dilakukan secara berkala dalam rentang waktu satu periode penilaian yaitu setiap enam bulan sekali. Penilaian ini dilakukan oleh atasan langsung. Hasil penilaian menjadi dasar pertimbangan untuk pemberian *reward* dan pengembangan karir pegawai seperti promosi, rotasi, peningkatan remunerasi dan sebagainya, juga menjadi dasar pemberian *punishment* seperti surat peringatan, penundaan kenaikan pangkat, demosi, mutasi sampai pemutusan hubungan kerja.

Performance evaluation is carried out periodically in the span of one evaluation period that is every six months. This evaluation is executed directly by the Superiors. The result of evaluation would then serve as the foundation for reward and career development consideration such as promotion, rotation, remunerations increase, etc. In addition, it serves as foundation in giving punishment such as memorandum, promotion delay, demotion, mutation and work relation termination.

Tabel *Assessment Mapping* Kompetensi (pegawai)
Table: Competency Mapping Assessment (Employee)

No	Jenjang	Position	Realisasi 2015 2015 Realization	Realisasi 2016 2016 Realization
1	Eksekutif Utama	Top Executive	-	-
2	Eksekutif Senior	Senior Executive	7	1
3	Eksekutif	Executive	8	10
4	Penyelia Atas	Senior Supervisor	32	17
5	Penyelia Dasar	Supervisor	81	298
6	Pelaksana	Officer	104	111
	Jumlah	**Total**	**232**	**437**

Tabel *Assessment* untuk Pengisian Formasi Jabatan (pegawai)
Tabel: Assessment to filling position formation (Employee)

No	Jenjang	Position	Realisasi 2015 2015 Realization	Realisasi 2016 2016 Realization
1	Eksekutif Utama	Top Executive	1	1
2	Eksekutif Senior	Senior Executive	32	38
3	Eksekutif	Executive	103	26
4	Penyelia Atas	Senior Supervisor	95	238
5	Penyelia Dasar	Supervisor	50	344
6	Pelaksana	Officer	0	399
	Jumlah	**Total**	**281**	**1.046**

Strategi Remunerasi

Dalam implementasi strategi remunerasi, Indonesia Power telah melaksanakan *salary survey*. Remunerasi yang ada dievaluasi untuk mengetahui posisi remunerasi Perusahaan dibanding harga Pasar dengan tujuan meningkatkan daya kompetitif. Perusahaan merencanakan adanya penyesuaian remunerasi untuk menyesuaikan dengan harga pasar secara bertahap termasuk penyesuaian.

Remuneration Strategy

In implementing remuneration strategy, Indonesia Power has performed salary survey. The existing remuneration is evaluated to learn Company's remuneration position compared with the market price with the intent on increasing competitive value. The Company plans to periodically adjust remuneration in accordance with market price including adjustment period.

SUMBER DAYA MANUSIA
Human Resources

Bentuk remunerasi yang diberikan Indonesia Power berupa kompensasi dan manfaat pegawai. Kebijakan terkait sistem remunerasi Indonesia Power telah tercantum di dalam PKB Bab VI tentang Penghargaan.

The form of remuneration given by Indonesia Power is compensation and employee's benefit. The policy in regards to remuneration system is stated on PKB Chapter VI on Appreciation.

Remunerasi berupa Kompensasi
Remuneration (compensation)

- *Pay for Person* (P1).
- *Pay for Position* (P2)
- Tunjangan lainnya yaitu Tunjangan tetap yang terdiri dari Tunjangan Hari Raya Keagamaan, Tunjangan Cuti Tahunan, Tunjangan Cuti Besar, Tunjangan Winduan.
- *Pay for Performance* (P3).

- Pay for Person (P1).
- Pay for Position (P2)
- Other Benefits, i.e. Fixed allowance, consists of Religious Holiday Allowance, Annual Leave allowance, Large Leave allowance, Winduan Allowance.
- Pay for Performance (P3).

Remunerasi berupa Manfaat Pegawai
Remuneration (employee's benefit)

- Fasilitas yang terdiri dari Rumah Jabatan, Kendaraan Dinas, Perjalanan Dinas, Sarana Kerja.
- Benefit yang terdiri dari Tunjangan Hari Tua, Pemeliharaan Kesehatan, Tunjangan Kecelakaan Kerja, Uang Pelepasan bagi Pegawai yang berhenti bekerja atau pensiun, Bantuan Pemakaman dan Duka Cita, Pakaian Kerja, Pakaian Dinas, dan Pakaian Olah Raga, Pendidikan dan Pelatihan, *Family* dan/atau *Employee Gathering.*

- Facilities, consist of: Housing, Office Vehicle, Business Travel, Working Facilities.
- Benefit, consists of Pension Benefit, Health Maintenance, Work Accident Benefit, Compensation Money for resigned/pensioned employee, Funeral and Bereavement Assistance, Working Apparel, Business Apparel, Sportswear, Education and Training, Family and/or Employee Gathering.

Survei Kepuasan dan Keterikatan Pegawai

Kepuasan dan keterikatan pegawai terhadap Perusahaan menjadi salah satu faktor penting dalam pengelolaan SDM yang andal. Indonesia Power secara berkala rutin melaksanakan *Human Resources Satisfaction & Engagement* (HRSE) yaitu *Employee Satisfaction Survey* dan *Employee Engagement Survey*. Hasil dari survei kepuasan dan keterikatan pegawai bermanfaat untuk memberikan arah pengembangan SDM di periode selanjutnya.

Survey of Employee's Satisfaction and Engagement

Satisfaction and engagement level of the employee towards the Company has become one of the essential factors in reliable HR management. Indonesia Power periodically performs Human Resources Satisfaction & Engagement (HRSE), that is Employee Satisfaction Survey and Employee Engagement Survey. The result from employee's satisfaction and engagement survey provides the direction of HR development for next period.

Pelaksanaan survei HRSE pada tahun 2016 meliputi beberapa ruang lingkup survei yaitu kepuasan, Indonesia Power Way, GCG, Komunikasi, Visi Misi Strategi, *Engagement*, dan Efektivitas *Senior Leader*. Sedangan aspek-aspek yang diukur dalam HRSE meliputi pengukuran Kepuasan Bekerja, Penempatan/ Promosi Pegawai, Proses Penilaian Kinerja, Pendidikan dan Pelatihan, Minat dan Kompetensi, serta Bimbingan/ Arahan Atasan Langsung.

Pada tahun 2016, tingkat kepuasan pegawai adalah sebesar 80,29% menurun dibandingkan tahun 2015 sebesar 81,24%, penurunan tersebut salah satunya disebabkan kurang pemahaman terhadap pertanyaan yang diajukan dalam survei Employee Satisfaction Index (ESI).

The implementation of HRSE survey in 2016 comprised of several survey's scope, they are satisfaction, Indonesia Power Way, Good Corporate Governance, Communication, Vision, Mission, and Strategy, Engagement, and the Effectiveness of Senior Leader. As for aspects that are measured in HRSE, it comprises of Work Satisfaction, Placement/Promotion, Performance Evaluation Process, Education and Training, Interest and Competency, and Direct Guidance from Superiors.

In 2016, the level of employee's satisfaction was 80.29%, a decrease from 2015 which was 81.24%. The decline was caused by many factors, one of which is the lack of understanding on questions given in ESI Survey.

Grafik *Employee Satisfaction Index* (ESI) Tahun 2012-2016 (%)
Graph: Employee Satisfaction Index (ESI) 2012-2016 (%)

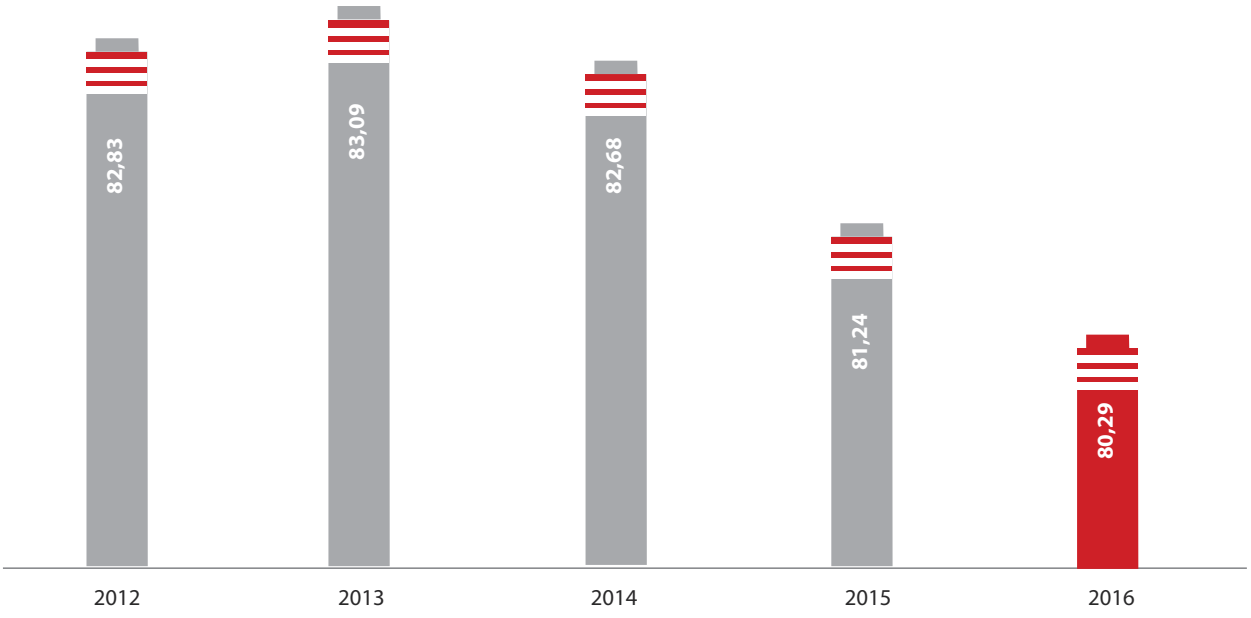

SUMBER DAYA MANUSIA
Human Resources

Tingkat keterikatan pegawai meningkat dari tahun 2015 menjadi 84,55%. Peningkatan nilai Employee Engagement Index (EEI) disebabkan beberapa faktor diantaranya adalah:

1. Lingkungan Indonesia Power yang membuat pegawai merasa nyaman bekerja,
2. Tingkat remunerasi yang sesuai,
3. Hubungan kerja yang baik antara atasan dan bawahan,
4. Target serta *job description* yang diberikan sudah jelas dan memotivasi pegawai.

The level of employee's engagement has increased from 2015 and reached 84.55%. This incline of EEI value is caused by numerous factors, among them are:

1. A conducive work environment in Indonesia Power,
2. A corresponding level of remuneration,
3. Good work relation between superiors and subordinates,
4. A clear target and job description given that motivates the employees.

Grafik *Employee Engagement* Index (EEI) Tahun 2012-2016 (%)
Graph: Employee Engagement Index (EEI) 2012-2016 (%)

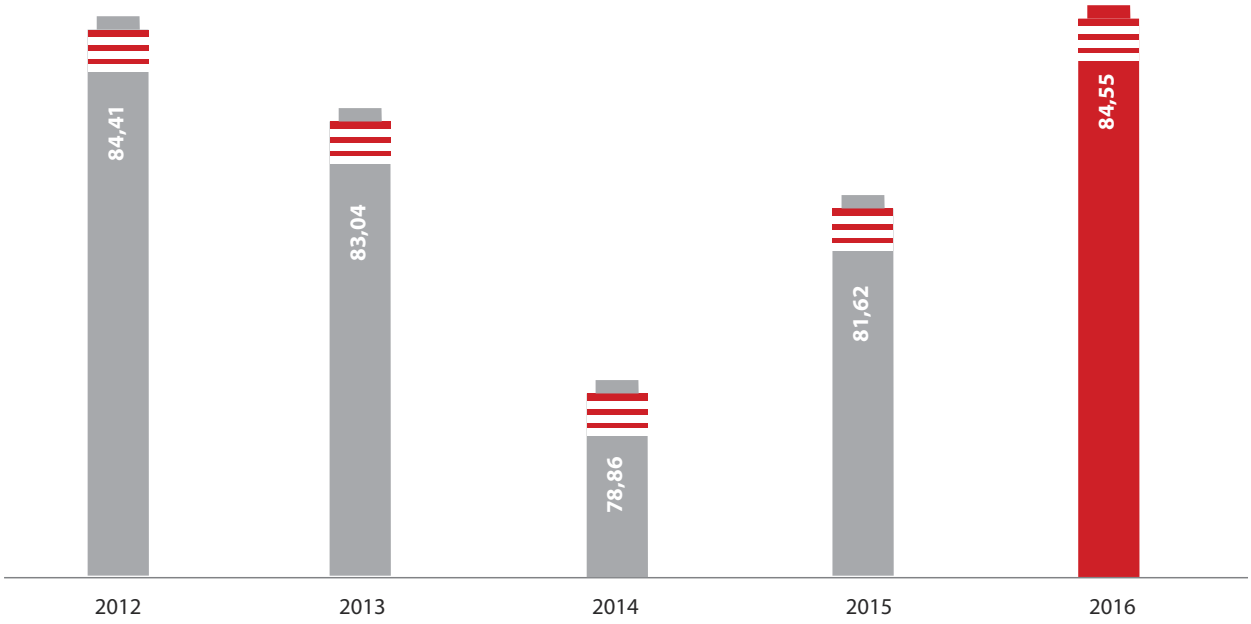

Kebijakan dan Masa Persiapan Pensiun

Indonesia Power memiliki kebijakan memberikan hak kepada pegawai untuk menjalani Masa Persiapan Pensiun (MPP) selama satu tahun sebelum memasuki usia pensiun (56 tahun). Untuk itu Direktorat SDM telah mempersiapkan strategi sebagai berikut:

1. Rekrutmen *Fresh Graduate* melalui *job fair*, beasiswa ikatan dinas, *Cooperative Education*,

Pension Policy and Retirement Preparation Period

Indonesia Power carries out a policy to provide the rights of its employees to go through Retirement Preparation Period (MPP) for a year before they enter retirement age (56-year-old). Hence, HR Directorate has prepared the following strategies:

1. Fresh Graduate Recruitment through job fair, Scholarships with commitment to work for

pengumpulan *database* calon pelamar di dalam *website* Indonesia Power,

2. Rekrutmen profesional,
3. Persiapan kader dan *talent* melalui program pengembangan kompetensi intensif.

Sedangkan bagi yang akan memasuki masa pensiun, Perusahaan telah meyiapkan sejumlah program, yaitu:

1. Sebelum mengikuti pembekalan pra-purna bhakti untuk menyiapkan psikologis, terkait dengan pengelolaan keuangan dan kesehatan yang diberikan minimal tiga tahun sebelum pegawai memasuki masa pensiun,
2. Pembekalan diklat purna bhakti yang diberikan dua tahun sebelum pegawai memasuki masa pensiun, dengan pilihan: kewirausahaan, sertifikasi, serta pembekalan rohani.

the government after graduation, Cooperative Education, database collection of applicants on Indonesia Power website,
2. Professional Recruitment,
3. Cadre and talent preparation through intensive competency development program.

As for employees on their retirement period, the Company has prepared several programs, they are:

1. Before participating in pre-retirement debriefing to prepare their psychological readiness, related with financial management and health care that are given, at least three years prior to the employees before entering retirement period,
2. Training and debriefing on full retirement given two years prior to entering retirement period, with the options of: entrepreneurship, certification, and spiritual guidance.

Hubungan Industrial

Sebagai salah satu bentuk pengelolaan SDM yang baik, Indonesia Power memberikan kebebasan kepada pegawainya untuk berpendapat dan berserikat. Hal tersebut sekaligus dalam rangka mematuhi Undang-undang Tenaga Kerja Nomor 13 Tahun 2003 pasal 1 dan Pasal 102, Perusahaan juga berpartisipasi dalam melaksanakan hubungan industrial dengan Serikat Pekerja yang bertujuan sebagai sarana penyampaian aspirasi pegawai kepada manajemen.

Serikat Pekerja merupakan organisasi yang dibentuk dari, oleh dan untuk pekerja, baik di Perusahaan maupun di luar Perusahaan, guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja, serta meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya. Untuk selanjutnya Serikat Pekerja dan Manajemen bersepakat dan menghasilkan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang merupakan hasil perundingan antara Serikat Pekerja dengan Manajemen yang berisi syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak.

Dalam menjalin hubungan yang baik antara pegawai dan manajemen Indonesia Power, Indonesia Power memiliki serikat pekerja yang bernama **Persatuan Pegawai PT Indonesia Power** (PP-IP), yang telah didaftarkan di Departemen Tenaga Kerja pada tahun

Industrial Relations

As a form of good management, Indonesia Power provides freedom to its employees to be opinionated and united. This is also in accordance to Major Labour Laws of Indonesia, Act No. 13 of 2003, Article 1 and Article 102, the Company also participates in implementing an industrial relation with the Labor Union with the intention of building a platform for employees to deliver their aspirations to the management.

Labor Union is an organization that is formed from, by, and for the workers, both inside and outside of the Company, with the intention to fight, defend and protect all rights and interests of the employees, and to improve the employees' and their family's welfare. Furthermore, the Labor Union and Management have agreed and produced an agreement, Collective Labor Agreement (PKB), that is the result of discussion between the Labor Union and Management, filled with work conditions, rights and obligations of both parties.

In building a good relation between employees and management inside the Company, Indonesia Power has formed a labor union called **Indonesia Power Labor Union** (PP-IP), that has been registered over at Department of Manpower in 2001. Indonesia Power PKB and PP-IP Year

SUMBER DAYA MANUSIA
Human Resources

2001. PKB Indonesia Power dan PP-IP Tahun 2014-2015 dan *Addendum* Perubahannya disahkan berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Nomor KEP.58/PHIJSK-PKKAD/PKB/IV/2014 pada tanggal 03 April 2014. PKB berisi syarat-syarat hubungan kerja, perlindungan kerja, hak dan kewajiban masing-masing pihak. Pada tahun 2016, telah dilaksanakan perundingan PKB untuk Tahun 2017-2018 oleh Manajemen dan PP-IP.

Agenda hubungan industrial pada tahun 2016 adalah sebagi berikut:
1. Pertemuan Periodik yaitu koordinasi antara Manajemen dengan PP-IP,
2. Pertemuan dalam rangka pembahasan terkait Kebijakan Sistem SDM,
3. Perundingan PKB Tahun 2017-2018,
4. Penandatanganan PKB Tahun 2017-2018.

2014-2015 and their addendum are ratified based on the decree of Directorate General of Industrial Relations and Social Security No. KEP.58/PHIJSK-PKKAD/PKB/IV/2014 dated April 3, 2014. PKB contains the conditions of work relation, work protection, rights and obligations of both parties. In 2016, a discussion of PKB for year 2017-2018 had been held by the Management and PP-IP.

The agenda of industrial relation in 2016 are as follows:
1. Periodical Meeting, i.e. coordination between the Management and PP-IP,
2. Meeting to discuss the policies regarding HR System,
3. PKB discussion for Year 2017-2018,
4. PKB signing for Year 2017-2018.

TEKNOLOGI INFORMASI

Information Technology

Indonesia Power menyadari teknologi informasi memiliki pengaruh signifikan terhadap kelancaran proses bisnis yang efektif dan efisien. Hal ini mendorong Indonesia Power untuk memiliki perangkat kebijakan dan prosedur sistem informasi berupa Tata Kelola Teknologi Informasi Perusahaan (PROGEN), *Master Plan* Teknologi Informasi (MPTI), Kebijakan Keamanan Informasi, dan Pengaturan penggunaan hak akses jaringan, *email*, dan *internet* di lingkungan Indonesia Power. Selain itu, inisiatif perbaikan senantiasa dilakukan untuk menjaga kualitas layanan dan sebagai langkah prefentif dalam menghadapi risiko reputasi dan operasional terkait dengan penyusunan dokumen-dokumen kebijakan internal perusahaan yang berhubungan dengan *IT Governance*.

Indonesia Power realizes that information technology has significant influence on the business process that is effective and efficient. This encourages Indonesia Power to have policy and procedures for information system in the form of Corporate Information Technology Governance (PROGEN), Information Technology Masterplan (MPTI), Information Security Policy, and Management on the use of network, email, and internet, in the Indonesia Power environment. In addition, improvement initiatives are continuously conducted to maintain the quality of service and as preventive step in facing the reputation and operational risk associated to the company's internal regulation documents related to the IT Governance.

TEKNOLOGI INFORMASI
Information Technology

Visi Sistem Informasi Indonesia Power

"Mempunyai fasilitas Sistem Informasi proses bisnis yang unggul dan dapat diandalkan dalam pembuatan keputusan, laporan dan pelayanan."

Misi Sistem Informasi Indonesia Power

"Membangun dan mengembangkan Sistem Informasi Perusahaan yang dapat meningkatkan efisiensi proses bisnis dan menunjang daya saing Perusahaan."

Indonesia Power juga menyusun dan mengesahkan kebijakan *Disaster Recovery Plan* (DRP) sebagai standarisasi dalam pelaksanaan jika terjadi kondisi bencana. Dengan kelengkapan perangkat kebijakan dan prosedur sistem informasi yang dimiliki, Indonesia Power mampu menjalankan bisnis dengan proses pengambilan keputusan yang transparan, cepat dan akurat sehingga menunjang pencapaian tujuan jangka panjang Perusahaan.

Vision of Indonesia Power Information System

"To have superior and reliable business process Information System in decision making, reporting, and services."

Mission of Indonesia Power Information System

"To build and develop Corporate Information System that can improve the efficiency of business process and support the competitiveness of the Company."

Indonesia Power also compiles and ratifies the Disaster Recovery Plan (DRP) policy as standardization in the event of disaster. With the complete set of information system policy and procedures, Indonesia Power is able to run the business with transparent, fast, and accurate decision-making process, hence supporting the achievement of the Company's long-term objectives.

Roadmap Pengembangan Teknologi Informasi

Roadmap Pengembangan Teknologi Informasi dituangkan di dalam *Master Plan* Teknologi Informasi 2017-2021:

Roadmap Pengembangan Teknologi Informasi

Roadmap of Information Technology Development is set forth in the Information Technology Master Plan 2017-2021:

Tabel *Roadmap* Teknologi Informasi 2017-2021
Table: Information Technology Roadmap 2017-2021

Roadmap Pengembangan TI		2017	2018	2019	2020	2021	IT Development Roadmap
APLIKASI APPLICATION	1. Perkuatan ProHAR (EAM)						1. ProHAR Strengthening (EAM):
	a. *Asset Management*						a. Asset Management
	b. *Life Cycle Management*						b. Life Cycle Management
	2. Perkuatan ERP.						2. ERP Strengthening:
	a. *Financial*						a. Financial
	b. *Inventory Management*						b. Inventory Management
	c. *Purchasing Management*						c. Purchasing Management
	d. *Human Resources and Attendance*						d. Human Resources and Attendance
	e. *Budgeting*						e. Budgeting
	3. Pengembangan ProREN (ICP)						3. ProREN Development (ICP)

Roadmap Pengembangan TI		2017	2018	2019	2020	2021	IT Development Roadmap
	4. Pengembangan KM & Inovasi						4. KM and Innovation Development
	5. Pengembangan *Office Automation*:						5. Office Automation Development:
	a. Portal/Web						a. Portal/Web
	b. SK						b. Decree
	c. Permintaan Kebutuhan Fasilitas						c. Facility Request Form
	d. *Project Management Office* (PMO)						d. Project Management Office (PMO)
	e. *Business Process Modelling*						e. Business Process Modelling
	f. New ProMET						f. New ProMET
	g. *Upgrade* Prolak						g. Prolak Upgrade
	6. *System Integration*:						6. System Integration:
	a. *Identity Management System*						a. Identity Management System
	b. *Upgrade Data Warehouse*						b. Data Warehouse Upgrade
	7. *Roll Out* ProHAR di Unit-unit Baru						7. ProHAR Roll Out at New Units
	8. *Roll Out* ERP Anak Perusahaan						8. ERP Roll Out at Subsidiaries
	9. Implementasi Aplikasi Energi Primer						9. Implementation of Primary Energy Application
	10. Pengembangan Aplikasi Pengadaan						10. Procurement Application Development
	11. *Commerce and Business*						11. Commerce and Business
	12. *Enterprise Risk Management* (ERM)						12. Enterprise Risk Management (ERM)
INFRASTRUKTUR INFRASTRUCTURE	13. Pengembangan Aplikasi Virtualisasi						13. Virtualization Application Development
	14. *Platform As a Service*						14. Platform As a Service
	15. Pengembangan Data Center Infrastructure Management						15. Data Center Infrastructure Management (DCIM) Development
	16. *Security System: Firewall & Proxy Server*						16. Security System: Firewall & Proxy Server
	17. *Disaster Recovery Plan*						17. Disaster Recovery Plan
	18. *Update* Perangkat WAN IP						18. IP WAN Equipment Upgrade
	19. *Upgrade* Server Data Center						19. Data Center Server Upgrade
	20. Implementasi Infrastruktur di Unit-unit Baru						20. Infrastructures Implementation at New Units
	21. PI *System*						21. PI System
PEOPLE AND PROCESS	22. Rencana Strategis SI						22. SI (Sistem Informasi = Information System) Strategic Plan
	23. *User Awareness Program*						23. User Awareness Program
	24. Kebijakan Keamanan Informasi dengan ISO 27001						24. Information Security Policy based on ISO 27001
	25. Kebijakan Tata Kelola IT						25. IT Governance Policy

TEKNOLOGI INFORMASI
Information Technology

Program Pengembangan TI

Program pengembangan, pengelolaan dan integrasi seluruh aplikasi perusahaan dengan melakukan perkuatan sistem TI untuk mendukung seluruh transaksi secara terintegrasi dan melakukan *maintenance service* aplikasi & Perangkat TI maupun *Annual Technical Services software package* (ATS).

Program TI: Rutin

Program ini merupakan program berkala yang secara rutin dilakukan oleh Indonesia Power.

Adapun programnya adalah sebagai berikut:
1. Program rutin pemeliharaan Infrastruktur
   Meliputi kegiatan diantaranya:
   - Pemeliharaan perangkat *hardware* jaringan ,
   - Pemenuhan Lisensi dan *annual support* untuk perangkat infrastruktur, *operating system*,
   - *Helpdesk support*,
   - Pemeliharaan *data center.*
2. Program rutin pemeliharaan Aplikasi
   Meliputi kegiatan diantaranya:
   - Pemeliharaan *preventive, corrective system* aplikasi-aplikasi perusahaan,
   - Pemenuhan Lisensi dan *annual technical support software.*
3. Program rutin pemeliharaan *Security*
   Meliputi kegiatan diantaranya:
   - Pemeliharaan rutin perangkat *security*,
   - Pemenuhan Lisensi dan *annual support* perangkat *security*,
   - Pemeliharaan anti Virus,
   - Pemeliharaan *Disaster Recovery Center.*

Program TI: Investasi

Selain program yang bersifat rutin, beberapa program lainnya adalah sebagai berikut:
1. Pengadaan *Data Center Infrastructure Management* (DCIM) dan Perangkat *Firewall Data Center*
   DCIM diperlukan untuk memantau, mengelola dan

IT Development Program

The development, management, and integration of every application in the company by strengthening the IT system to support every transaction in an integrated manner and to conduct maintenance service of IT application & hardware, as well as Annual Technical Services software package (ATS).

IT Program: Routine

This program is a routine program conducted by Indonesia Power.

The programs are as follow:
1. Infrastructure maintenance program
   Including activities such as:
   - Network hardware maintenance,
   - License fulfillment and annual support for infrastructure software, operating system,
   - Helpdesk support,
   - Data center maintenance.
2. Application maintenance program
   Including activities such as:
   - Preventive and corrective system maintenance of the company's applications,
   - License fulfillment and annual technical support software.
3. Security maintenance program
   Including activities such as:
   - Security hardware maintenance,
   - License fulfillment and security software annual support,
   - Anti-virus maintenance,
   - Disaster Recovery Center maintenance.

IT Program: Investment

In addition to the routine program, there are several other programs, as follow:
1. Data Center Infrastructure Management (DCIM) and Firewall Data Center Device Procurement
   DCIM is required to monitor, maintain, and manage

mengatur pemanfaatan dan pemakaian energi dari semua perangkat yang terkait IT dan komponen infrastruktur lainnya di *Data Center*. Perangkat Firewall digunakan untuk mencegah beberapa serangan seperti DDOS, *broadcast*, virus dan *malicious packet* yang berasal dari jaringan LAN/ WAN PT Indonesia Power.
Oleh karena itu perlu dilakukan Pengadaan DCIM dan Perangkat *Firewall Data Center* untuk memenuhi kebutuhan *monitoring* dan pengelolaan Data Center yang lebih efektif dan optimal serta mengamankan jalur data dari jaringan LAN/WAN yang menuju ke *data center*.

the energy use and utilization on all IT-related devices and other infrastructure component in Data Center. Firewall Devices are used to prevent several attacks such as DDOS, broadcast, virus, malicious packet from LAN/WAN PT Indonesia Power.
Therefore, the DCIM and Firewall Data Center Device Procurement is to fulfill the monitoring need and maintaining Data Center effectively and optimally, as well as to secure the data network from LAN/ WAN to the data center.

2. Pekerjaan Migrasi *Storage* dan *Upgrade* Perangkat *Backup*
Ketersediaan *storage* menjadi hal yang sangat penting karena dengan adanya sentralisasi aplikasi yang terpusat di Kantor Pusat PT Indonesia Power. Sehubungan dengan perangkat *storage* yang ada sudah tidak dapat memenuhi kebutuhan perusahaan, maka dilakukan penggantian perangkat *storage* dan migrasi datanya.
Backup sistem di Indonesia Power ada dua jenis, yaitu *backup disk to disk* dan *backup disk to tape*. Untuk *backup disk to tape* sering mengalami permasalahan sehingga perlu dilakukan *upgrade* perangkat *backup* yang baru.

2. Storage Migration and Upgrading the Backup Device Storage
Availability becomes very important because of the application centralization in the Head Office of PT Indonesia Power. In relation to the storage devices that cannot meet the demand of the Company, the said storage devices are replaced and the data is migrated.
There are two backup system in Indonesia Power, i.e. disk to disk backup and disk to tape backup. The disk to tape backup often experiences trouble, hence it is needed to upgrade into new backup devices.

3. Pengadaan *Server*
Kondisi *resource* CPU, *Memory* dan *disk space* yang tersedia di perangkat *Server* pada *environment* VMware sudah di bawah 33%, sehingga diperlukan penambahan *resource server* baru untuk mendukung kebutuhan infrastruktur Departemen Sistem Informasi di waktu yang akan datang.

3. Server procurement
The resource condition, CPU, Memory, and disk space available in the Server device in the VMware environment is under 33%, so it needs additional new resource server to support the infrastructure need of the Information System Department in the future.

4. Implementasi *Enterprise Resource Planning* (ERP)
Untuk mendukung keputusan PLN dalam percepatan laporan keuangan, dan meningkatkan Integrasi penuh dan *single entry* aplikasi di Indonesia Power, dan juga sesuai dengan arahan RUPS maka dilakukan implementasi ERP di Indonesia Power.
Implementasi ERP ini diharapkan dapat memberikan manfaat lebih di dalam proses

4. Implementation of Enterprise Resource Planning (ERP)
To support the PLN decision in financial statement acceleration, and to improve the full integration and single entry application in Indonesia Power, and in line with the direction of GMS, ERP implementation in Indonesia Power is performed.
ERP implementation is expected to provide more benefit in the Indonesia Power business process, to improve and refine the business process, accelerate

TEKNOLOGI INFORMASI
Information Technology

bisnis Indonesia Power, membenahi dan menyempurnakan proses bisnis, mempercepat proses laporan keuangan, mengikuti *best practice*, terintegrasi dengan aplikasi-aplikasi lain di luar ERP yang ada di Indonesia Power dan *single entry.*
Modul-modul yang akan di implementasikan adalah: modul *Financial*, *Supply Chain Management* dan *Human Capital Management.*
Ruang Lingkup unit yang akan di implementasikan adalah Kantor Pusat, Unit Pembangkitan, Unit Pembangkitan dan Jasa Pembangkitan, Unit Jasa Pemeliharaan dan anak perusahaan.

financial statement process, follow best practice, integrate with other application outside ERP that is available in Indonesia Power, and single entry.
Modules to be implemented are: Financial, Supply Chain Management, and Human Capital Management modules. The unit scope to be implemented is in the Head Office, Generating Unit, Generating and Generating Service Unit, Maintenance Service Unit, and subsidiaries.

Investasi di Bidang TI

Alokasi dana untuk investasi di bidang TI pada tahun 2016 adalah sebesar Rp27.635.813 juta.

Investment in the field of IT

Fund allocation to invest in the field of IT in 2016 is amounted to Rp27,635,813 million

Tabel Investasi TI Tahun 2016 (Rp juta)
Table: IT Investment in 2016 (Rp million)

Pekerjaan Investasi	Investment	Nilai Investasi Value of Investment
Pengadaan *Data Center Infrastructure Management* (DCIM) dan Perangkat *Firewall Data Center*	Data Center Infrastructure Management (DCIM) and Firewall Data Center Device Procurement	2.788.658
Penambahan *Server* di *Data Center*	Adding Server in Data Center	1.990.761
Pekerjaan Migrasi *Storage* dan *Upgrade* Perangkat *Backup* Tahun 2016	Storage Migration and Upgrading the Backup Device in 2016	7.942.750
Implementasi ERP PT Indonesia Power	ERP Implementation of PT Indonesia Power	14.913.644
Jumlah Investasi	**Total Investment**	**27.635.813**

Pengembangan Kompetensi SDM bagian TI

Melalui integrasi antara teknologi dan operator yang memadai akan menciptakan keandalan TI yang maksimal. oleh karena itu sebagai salah satu *enabler* utama, SDM menjadi fokus pengembangan tersendiri. Melalui koordinasi dengan Divisi Pengembangan SDM dan Talenta, Indonesia Power melakukan sertifikasi terhadap pegawai di bidang TI.

Pada tahun 2016 terdapat pelatihan dan pengembangan SDM di bidang TI dengan rincian sertifikasi sebagai berikut:

Human Resources Competence Development in the IT Field

Through the integration of technology and adequate operator will create maximum IT reliability. Therefore, as one of the main enabler, Human Resources becomes an independent focus on development. Through the coordination with Human Resources Development and Talent Division, Indonesia Power certifies the employees in the IT field.

In 2016, there are training and Human Resources development in the IT field with certification detail as follows:

Tabel Sertifikasi SDM bagian TI Tahun 2016
Table: Human Resources Certification in IT Field 2016

No	Nama Sertifikasi Certification Name	Nama Pegawai Employee's Name	Jabatan Position
1	MCSE: Share point	Bayu Isnanto Putro	Ahli Muda *Office Automation* Office Automation Junior Expert
		Lulu Ardiansyah	Ahli Muda *Office Automation* Office Automation Junior Expert
2	IBM Certified Process Automation Engine Maximo V7.5 Implementation	Tri Wahyu Hariawan	SPS EAM EAM Senior Sepervisor
		Salih Riza Mada Surya	Manajer Pengembangan Development Manager
		Aghil Riyadi	Ahli Muda ERP ERP Junior Expert
		Anggi Anggara	Ahli Muda ERP ERP Junior Expert
		I Gusti Made Indra P.	Ahli Muda ERP ERP Junior Expert
		Anggie Levita	Ahli Muda ERP ERP Junior Expert
		Adi Setio N.	Ahli Muda Oprasional Infrastruktur Infrastructure Operational Junior Expert
		Siti Mujiatun	Ahli Muda SIS UPJP Priok SIS Priok GGGU Junior Expert
		M. Riza Fahruddin	Ahli Muda SIS UP Mrica SIS Mrica GU Junior Expert
		Donny Ureansyah	SPS. SIS Unit UJH SPS. SIS MSU Unit
3.	IBM Maximo Certified Asset Management V7.5 Implementation	Anggie Levita	Ahli Muda ERP ERP Junior Expert
		Adi Setio N.	Ahli Muda Oprasional Infrastruktur Infrastructure Operational Junior Expert
		Siti Mujiatun	Ahli Muda SIS UPJP Priok SIS Priok GGSU Junior Expert
		M. Riza Fahruddin	Ahli Muda SIS UP Mrica SIS Mrica GU Junior Expert
		Donny Ureansyah	SPS. SIS UJH SPS. SIS MSU

Pengukuran *Maturity* Proses TI

Pengelolaan aset sistem informasi ditujukan agar data-data yang ada dapat memberikan informasi yang tepat, akurat dan cepat, sehingga seorang pengguna informasi dapat memahami kondisi yang ada, menganalisisnya, dan selanjutnya dapat mengambil keputusan yang tepat dan berkualitas. Informasi juga akan berharga bila dapat disajikan sesuai dengan kebutuhan.

IT Process Maturity Measurement

The information system asset management is intended to give precise, accurate, and fast information on the available data, so that a user of the information understands the situation, analyzes it, and then he can make precise and qualified decision. Information is very valuable if it can be presented as needed.

TEKNOLOGI INFORMASI
Information Technology

Untuk pemanfaatan sistem informasi yang optimal, IT melakukan pengukuran proses *maturity assessment* dan kinerja *Information Capital Readiness* (ICR) yang terdiri dari:

1. **Pengukuran *Maturity* Bisnis Proses**
   Merupakan mekanisme assessment tata kelola IT untuk mengevaluasi tingkat kematangan penerapan tata kelola IT dalam suatu perusahaan. Hasil pengukuran *maturity* bisnis proses tahun 2016 adalah 3,68 .
2. **Pengukuran *Key Performance Indicator* (KPI)**
   Merupakan pengukuran indikator KPI kinerja hasil pada kriteria Infrastruktur (jaringan, *Server, Security*) dan KPI pemanfaatan aplikasi bisnis. Metode pelaksanaan asesmen dilakukan melalui survei terhadap para pelaku kontrol, pemilik proses, pengelola TI, maupun pengelola kebijakan TI. Hasil pengukuran KPI tahun 2016 adalah 4,45.

Pada tahun 2016 diperoleh pencapaian skor ICR secara keseluruhan sebesar 3,9 di semester 1 dan 4,07 di semester 2.

For optimal utilization of information system, IT also conducts maturity process assessment and Information Capital Readiness (ICR) performance, which consist of:

1. **Business Process Maturity Measurement**
   Assessment mechanism for IT Governance to evaluate the maturity of IT governance implementation in a company. The business process maturity measurement in 2016 is 3.68.

2. **Key Performance Indicator (KPI) measurement**
   It is a KPI indicator measurement for performance on infrastructure criteria (network, server, security) and KPI utilization on business application. The method to conduct assessment is done through survey of controllers, process owners, IT manager, and IT policy managers. The KPI measurement in 2016 is 4.45.

In 2016, the overall ICR score achieved was 3.9 in the first semester and 4.07 in the second semester.

Implementasi ISO 27001

ISO 27001 adalah sebuah metode khusus yang terstruktur tentang pengamanan informasi yang diakui secara internasional. ISO 27001 merupakan dokumen standar sistem manajemen keamanan informasi atau *Information Security Management System*, biasa disebut ISMS, yang memberikan gambaran secara umum mengenai apa saja yang harus dilakukan oleh sebuah perusahaan dalam usaha mereka untuk mengevaluasi, mengimplementasikan dan memelihara keamanan informasi di perusahaan berdasarkan "*best practice*" dalam pengamanan informasi.

Pengamanan informasi adalah suatu proses perlindungan terhadap informasi untuk memastikan beberapa hal berikut ini:

- Kerahasiaan: memastikan bahwa informasi hanya dapat diakses oleh pihak yang memiliki wewenang.

Implementation of ISO 27001

ISO 27001 is a special structured method on information security that is internationally recognized. ISO 27001 is a standard document on Information Security Management System (ISMS), which provides general overview of what a company should do in the effort to evaluate, implement, and maintain the information security in the company, based on best practice in information security.

Information security is a protection process on the information to ensure several things:

- Confidentiality: to ensure the information only can be accessed by the right parties.

- Integritas: memastikan bahwa informasi tetap akurat dan lengkap, serta informasi tersebut tidak dimodifikasi tanpa otorisasi yang jelas.
- Ketersediaan: memastikan bahwa informasi dapat diakses oleh pihak yang memiliki wewenang ketika dibutuhkan.

- Integrity: to ensure the information is accurate and complete, and is not modified without secured authorization.
- Availability: to ensure the information can be accessed by the right parties if needed.

Tahap pencanangan implementasi ISO 27001 melalui empat tahapan yaitu sbegai berikut:

There are four stages of ISO 27001 implementation, i.e.:

Skema Tahap Pencanangan Implementasi ISO 27001
Scheme: Implementation Stages of ISO 27001

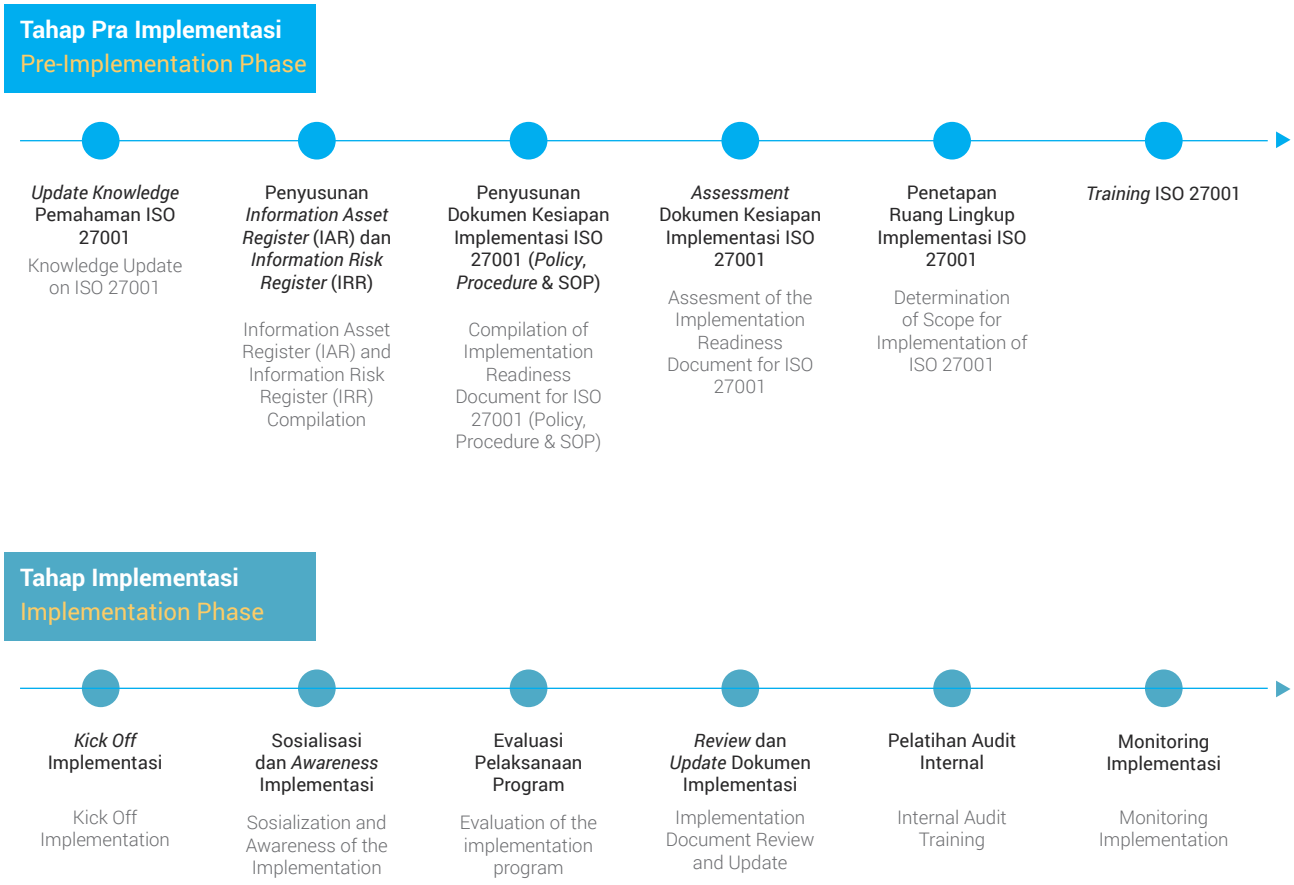

TEKNOLOGI INFORMASI
Information Technology

Tahap Persiapan Sertifikasi
Certification Preparation Phase

- *Assessment* Dokumen Kesiapan Sertifikasi
  Assesment of Certification Readiness Document
- *Review* dan *Update* Dokumen Kesiapan Sertifikasi
  Review and Update Certification Readiness Document
- Evaluasi Perencanaan Program
  Evaluation of the Preparation Program
- Sosialisasi Persiapan Sertifikasi
  Sosialization of Certification Preparation

Tahap Sertifikasi
Certification Phase

- *Kick off* Sertifikasi
  Kick off Certification
- *Refreshment* dan Pendampingan Audit Internal
  Refreshment and Mentoring for Internal Audit
- Pendampingan Audit *Stage* 1
  Mentoring on the Audit Stage 1
- Pendampingan Monitor Hasil Audit *Stage* 1
  Supervision Monitoring of Stage 1 Audit Result
- Pendampingan Audit *Stage* 2 (Sertifikasi)
  Mentoring on the Audit Stage 2 (Certification)

TEKNOLOGI PEMBANGKITAN

Power Generation Technology

Keandalan pembangkit menjadi salah satu tujuan dalam operasional Indonesia Power dalam penyediaan energi listrik. Oleh karena itu, Indonesia Power memberikan perhatian besar pada teknologi yang tepat sasaran dan ramah lingkungan. Pemanfaatan teknologi pembangkitan yang mutakhir dan tepat guna sangat vital, mengingat bidang usaha yang dijalankan Perusahaan terutama memproduksi energi listrik. Bahkan di bidang jasa, Perusahaan juga mengoperasikan dan melakukan perawatan pembangkit.

The reliability of generators has become one of the objectives within Indonesia Power operation in the provision of electricity. Therefore, Indonesia Power emphasize on efficient and environmental friendly technology. The utilization of sophisticated and efficient power generation technology is vital, since the Company specializes in producing electrical energy. In the service field, the Company also operates and applies generators' maintenance.

TEKNOLOGI PEMBANGKITAN
Power Generation Technology

Investasi Teknologi Pembangkitan

Teknologi pembangkitan memiliki tujuan dan manfaat dalam upaya optimalisasi produksi energi listrik melalui efisiensi penggunaan bahan bakar. Oleh karena itu, pemutakhiran teknologi pembangkitan senantiasa dilakukan. Untuk mendukung pemutakhiran tersebut diperlukan investasi dalam teknologi pembangkitan. Investasi pada teknologi pembangkitan pada tahun 2016 berupa pengadaan dan pembiayaan pemeliharaan yaitu sebagai berikut:

Power Generation Technology Investment

Generation technology has its purpose and benefit in optimizing the production of electrical energy through fuel usage efficiency. Therefore, renewal of generation technology is constantly done. To support the renewal, investment in power generation technology is required. The investment in power generation technology in 2016 in the form of procurement and maintenance funding, is as follows:

Non OEM *Rewinding* Stator Generator Priok ST 1.4 dan ST 2.4 (*Benefit*: Penghematan Rp134 miliar)

Non OEM Rewinding Stator Generator Priok ST 1.4 and ST 2.4 (Benefit: Saving Rp134 billion)

Polytransformer Cluster Kamojang-Darajat-Mrica (*Contingency Plan* Gangguan Trafo dengan *Lower Cost*)

Polytransformer Cluster Kamojang-Darajat-Mrica (Contingency Plan on Transformer Interference with Lower Cost)

Rewinding Stator Generator Suralaya #1, #2 dan #3. by OEM dgn harga Non OEM (*Benefit*: Penghematan Rp183 miliar)

Rewinding Stator Generator Suralaya #1, #2 and #3. by OEM with Non OEM price (Benefit: Saving Rp183 billion)

Non OEM *Generator Transformer* Suralaya # 1, #2, #3 & #4 (*Benefit*: Penghematan Rp140 miliar)

Non OEM Generator Transformer Suralaya # 1, #2, #3 & #4 (Benefit: Saving Rp140 billion)

Non OEM *Generator Transformer* Saguling MTR-II (*Benefit*: Penghematan Rp32 miliar)

Non OEM Generator Transformer Saguling MTR-II (Benefit: Saving Rp32 billion)

Dalam mendukung tata kelola pembangkit yang berkelanjutan, Indonesia Power juga memberikan perhatian pada SDM yang terlibat langsung dalam pengelolaan pembangkit melalui beberapa investasi dalam bentuk pelatihan dan sertifikasi. Bentuk sertifikasi pada tahun 2016 adalah sertifikasi teknologi pengujian tidak merusak, auditor energi, dan tenaga pemeliharaan profesional.

In supporting sustainable governance of the generators, Indonesia Power has also put their attention on Human Resource staff that is directly involved in generator's management through several investments in the form of training and certification program. The certification programs implemented in 2016 are nondestructive testing technology, energy auditor, and professional maintenance personnel.

Program Pengembangan Teknologi Pembangkitan

Indonesia Power melakukan pengelolaan teknologi pembangkitan secara berkesinambungan dan berkala. Pada tahun 2016 Indonesia Power menyusun program pengembangan teknologi pembangkitan diantaranya adalah sebagai berikut:

Power Generation Technology Development Program

Indonesia Power performs power generation technology management continuously and periodically. In 2016, Indonesia Power composed a generation technology development program, among them are as follows:

Tabel Program Pengembangan Teknologi Pembangkitan Tahun 2016
Table: Power Generation Technology Development Program 2016

No	Program/Kegiatan Program/Activity	Deskripsi program Program Description	
		Uraian dan Tujuan Program The description and purpose of programs	Jangka Waktu Program Berjalan Programs' Time Frame
1	Implementasi *Reverse Engineering* PLTU/ PLTP/PLTA/ PLTG (*Reverse Engineering* untuk Tambak Lorok, Turbine Pesanggaran dan Gilimanuk)	Untuk mencapai *Self Sufficiency of Engineering Capability For Material Improvement dan Comprehensive LCM Implementation for GT Hot Parts*, Indonesia Power melakukan peningkatan penggunaan Part Non OEM. Kegiatan ini bertujuan untuk mengoptimalkan biaya *Operation & Maintenance* (O&M) di seluruh unit pembangkit dan sebagai upaya penanggulangan masalah-masalah yang muncul di Pembangkit yaitu Tidak tersedia *detail drawing* yang lengkap. Mengingat porsi komponen biaya pemeliharaan pembangkit terbesar adalah biaya *spare part*, dalam hal ini komponen *turbine blade*, maka perlu dimiliki *database turbine blade* yang lengkap berikut *know-how*-nya melalui implementasi program *Reverse Engineering*. Program *Reverse Engineering* dilakukan guna menemukan prinsip-prinsip teknologi perangkat, obyek atau sistem melalui sistem analisis, fungsi struktur dan operasi serta melakukan analisis terhadap cara kerja teknologi tersebut secara rinci, hingga pembuatan peralatan yang baru dengan fungsi yang sama, berkualitas setara dan kompetitif tanpa menggunakan *design* peralatan yang asli.	2013 - 2017

TEKNOLOGI PEMBANGKITAN
Power Generation Technology

No	Program/Kegiatan Program/Activity	Deskripsi program Program Description	
		Uraian dan Tujuan Program The description and purpose of programs	Jangka Waktu Program Berjalan Programs' Time Frame
	Reverse Engineering Implementation SPP/GPP/HPP/ GTPP (Reverse Engineering for Tambak Lorok, Pesanggaran and Gilimanuk Turbine)	To achieve Self Sufficiency of Engineering Capability for Material Improvement and Comprehensive LCM Implementation for GT Hot Parts, Indonesia Power performs an enhancement in utilizing Non-OEM Parts. This activity intends to optimize Operation and Maintenance (O&M) cost on all generator units and serves as countermeasure effort on the issues that surface on the generator, i.e. the unavailability of complete drawing detail. Considering the biggest portion of generator's maintenance cost falls on the spare part cost, in this case on the turbine blade component. Therefore, a complete turbine blade database is required, including the know and how implementation program on Reverse Engineering. Reverse Engineering Program is carried out to discover the principles of device technology, object or system through analysis system, structural and operational function, and also to analyze how the technology works in details, up to the assembling of new tools with similar functions, equal quality, and competitive values without using the original tools design.	
2	Teknologi untuk *High Efficiency Power Plant* (Manajemen Efisiensi Unit melalui program 5E) Technology for High Efficiency Power Plant (Unit Efficiency Management through 5E Program)	Program 5E adalah program McKinsey untuk meningkatkan dan menerapkan energy *efficiency excellence* dan mengintegrasikannya dalam IP *Transformation Strategy*. Saat ini Indonesia Power telah memiliki metodologi yang terstruktur dan telah diaplikasikan ke pembangkitnya sehingga program 5E ini bertujuan untuk mendukung, meningkatkan, memperkuat dan fokus pada penerapan bukan pada penggantian atau *design* ulang. Pada program 5E Wave 1 akan dilakuan proses *proof concept* serta menjaring serta melaksanakan ide *efficiency improvement* dan *heat rate saving*. 5E Program is McKinsey program to enhance and implement energy efficiency excellence and to integrate it into IP Transformation Strategy. Indonesia Power has established a structured methodology and has applied it onto their generators so that 5E program is intended to support, enhance, strengthen and focus on the implementation instead of replacement or redesigning. On the first wave of 5E Program, a proof concept process would be carried out and filtering and implementing efficiency improvement idea and heat rate saving.	2015 - 2016

No	Program/Kegiatan Program/Activity	Deskripsi program Program Description	
		Uraian dan Tujuan Program The description and purpose of programs	Jangka Waktu Program Berjalan Programs' Time Frame
3	Pengembangan dan penerapan *system control* mandiri untuk PLTP/PLTA/PLTU/PLTGU (Modernisasi Sistem Kontrol *Governor* Dengan *Digital Electric Hydraulic Control* dan Sinkronisasi Otomatis Generator PLTP Kamojang Unit 3) Development and implementation of independent control system for GPP/HPP/SPP/CCPP (Governor Control System Modernization with Digital Electric Hydraulic Control and Generator Automatic Synchronization Kamojang Unit 3 GPP)	Sistem DEHC akan mengantisipasi pada perkembangan teknologi serta tuntutan dan mampu operasi juga ketersediaan layanan teknik pasca proyek sampai 25 tahun mendatang dengan tingkat kehandalan 99,9999%. Sasaran *retrofit* yang ditargetkan terdiri atas sasaran utama dan sasaran tambahan yaitu: Sasaran utama ada dua yaitu: a) Terwujudnya sistem *Digital Electro Hydraulic Control* (DEHC) untuk menggantikan sistem kontrol mekanik-hidrolik turbin. Sistem DEHC ini meliputi *controler digital* yang dilengkapi dengan fitur teknologi informasi dan komunikasi terkini, serta peralatan kontrol yang sesuai. Algoritma kontrol harus menyediakan fitur *Load Limit Control turbin* dan *Free Governor control turbin* yang dilengkapi dengan opsi fitur *Load Frequency Control* (LFC) turbin. Fitur sinkronisasi otomatis turbin dan generator juga harus diwujudkan dalam bentuk *Automatic Synchronizing System* (ASS). b) Terwujudnya sistem proteksi turbin yang mengadopsi perkembangan teknologi terkini. Sistem proteksi turbin saat ini memakai peralatan trip hidrolik untuk 4 variabel yaitu: *low lube oil pressure, thrust bearing wear*, dan *low condenser vacuum trip,* serta *over speed* untuk merealisasikan sebuah sistem proteksi turbin yang *redundant*. DEHC system will anticipate technology development along with the demands and operational ability and availability of post project technical services for the next 25 years with reliability rate of 99,9999%. Intended retrofit target comprises of main target and additional target, as follows: There are two main targets, they are: a) The realization of Digital Electro Hydraulic Control (DEHC) system to replace turbine mechanic-hydraulic control system. DEHC system consists of digital controller that is equipped with the latest communication and information technology features and sufficient control tools. Control algorithm must provide a Load Limit Control feature for turbines and Free Governor turbine control that is equipped with Load Frequency Control (LFC) feature for turbines. A feature of automatic synchronization for turbines and generators must also be realized through Automatic Synchronizing System (ASS). b) The realization of turbine protection system that has adopted the latest technology development. The current turbine protection system utilizes hydraulic trip equipment for 4 variables, they are: low lube oil pressure, thrust bearing wear, and low condenser vacuum trip, and over speed to realize a redundant turbine protection system.	2016

TEKNOLOGI PEMBANGKITAN
Power Generation Technology

No	Program/Kegiatan Program/Activity	Deskripsi program Program Description	
		Uraian dan Tujuan Program The description and purpose of programs	Jangka Waktu Program Berjalan Programs' Time Frame
4	*Power Self Diagnostic Plant* (*Expert system*) & *Protection system* Power Self Diagnostic Plant (Expert system) & Protection system	Mengembangkan PI Sistem dengan menyediakan infrastruktur untuk menyatukan informasi *real time* semua unit pembangkit, memvisualisasikan dan menganalisa data, sehingga informasi data yang diterima dapat ditindaklanjuti. Informasi yang benar dan *real time* dapat digunakan untuk membuat keputusan yang tepat dan dengan demikian meningkatkan kinerja teknis dan bisnis perusahaan Developing PI System by providing infrastructure to compile real time information from all generator units, to visualize and analyze data, so that data information received can be followed up. Valid and real time information can be utilized to reach a proper decision and therefore, enhancing technical and business performance of the company.	2016
5	Program perkuatan *Life Cycle Management* aset pembangkit Reinforcement Program on Life Cycle Management of generator asset	a) *Main Transformer Cluster* Kamojang-Drajat-Mrica Terjadinya gangguan katastropik *Main Transformer* di PLTU Suralaya #5, #4 dan #3 maka perlu dilakukan langkah strategis untuk mengantisipasi agar tidak terulang di unit pembangkit lain. Namun karena banyaknya *Main Transformer* berusia diatas 25 tahun di unit-unit pembangkit maka dibutuhkan dana besar untuk mengantisipasi kejadian tersebut dengan mengganti semua *Main Transformer.* Cara murah dan efektif untuk mengantisipasi ini adalah dengan membuat satu *Main Transformer cluster* (*polytransformer/universal transformer*) untuk dapat dioperasikan dibeberapa unit pembangkit. *Main Transformer* 150 kV cukup banyak beroperasi dibeberapa lokasi unit pembangkit yang telah berusia sekitar 20-30 tahun, seperti di Mrica, Kamojang, Gunung Salak dan Darajat. *Main Transformer* 150 kV di keempat unit pembangkit ini memiliki kapasitas yang hampir sama sehingga bisa disatukan menjadi 70 MVA. Kelebihan *Main Transformer cluster* ini adalah karena sifatnya *standby* sehingga siap dipakai langsung untuk menggantikan *Main Transformer* yang mengalami katastropik disalah satu lokasi unit pembangkit. Hal ini dapat menekan durasi *force outage* selama menunggu pengadaan dan *delivery Main Transformer* yang baru.	2016
		b) Rehabilitasi &Gasifikasi PLTU #3 Tambak Lorok Sehubungan dengan terus meningkatnya harga BBM, maka pemakaian gas untuk bahan bakar Pembangkit Listrik menjadi alternatif yang murah dibandingkan dengan memakai BBM. Untuk itu Program Rehabilitasi dan Gasifikasi untuk PLTU Unit 3 yang akan dilaksanakan oleh Indonesia Power sangat penting demi menjaga kelangsungan hidup Pembangkit Listrik Tambak Lorok Semarang Jawa Tengah. Pembangkit Listrik PLTU Unit 3 tersebut adalah *existing unit* yang saat ini dioperasikan dengan BBM.	2015 – 2016

No	Program/Kegiatan Program/Activity	Deskripsi program Program Description	
		Uraian dan Tujuan Program The description and purpose of programs	Jangka Waktu Program Berjalan Programs' Time Frame
		a) Main Transformer Cluster Kamojang-Drajat-Mrica The occurrence of catastrophic inference of the Main Transformer at Suralaya #5, #4 and #3 SPP. Therefore, a strategic move is required to anticipate similar occurrence at other generator units. But, due to the number of old Main Transformer (above 25 years of usage) spread over many generator units, a massive funding is required to anticipate said occurrence by replacing all Main Transformers. The most inexpensive and effective way to anticipate this occurrence is by making one cluster of Main Transformer (polytransformer/ universal transformer) to be operated on several generator units. Main Transformer 150 kV has been operated on several locations of generator unit that has 20-30 years' worth of usage, for example in Mrica, Kamojang, Gunung Salak and Darajat. Main Transformer 150 kV over at these four locations has a similar capacity so it can be put together as 70 MVA. The advantage of this cluster Main Transformer is its capacity to stand by so it can be utilized instantly to replace the Main Transformer that has suffered from catastrophic inference over at one of the unit locations. This would press down the duration of force outage during the period of procurement and delivery of the new Main Transformer. b) Rehabilitation and Gasification at Tambak Lorok #3 SPP Because of the constant increase of oil fuel prices, the utilization of gas as fuel for Power Plant has become an inexpensive alternative compared to utilizing oil based fuel. Therefore, the Rehabilitation and Gasification Program carried out by Indonesia Power for Unit 3 SPP has become essential to maintain the sustainability of Tambak Lorok Power Plant in Semarang, Central Java. Unit 3 SPP is currently operating on oil fuel.	

INDONESIA POWER *INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM* (INPOWER IMS)

Indonesia Power Integrated Management System (InPower IMS)

Indonesia Power merancang Indonesia Power - *Integrated Management System* (InPower IMS) yang merupakan integrasi dari berbagai standar, sistem manajemen, metode yang relevan berdasarkan *best practice* dan standar internasional. InPower IMS telah diterapkan sejak tahun 2013.

InPower IMS yang merupakan sistem terintegrasi berbagai standar/sistem/metode, yaitu:

1. Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015,
2. Sistem Manajemen Lingkungan ISO 14001:2015,
3. Sistem Manajemen K3 OHSAS 18001:2007,
4. Sistem Manajemen Kemanan Rantai Pasok ISO 28000:2009,
5. Sistem Manajemen Pengamanan (Peraturan Kapolri No.24 Tahun 2007),
6. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012),
7. Sistem Manajemen Aset ISO 55001:2014,
8. Sistem Manajemen Energi ISO 50001:2011,
9. *Guideline on Social Responsibility* ISO 26000:2010 (tidak dilakukan sertifikasi),
10. *Risk Management-Principles and Guidelines* ISO 31000:2009 (tidak dilakukan sertifikasi),
11. Kriteria *Baldrige* (tidak dilakukan sertifikasi).

Indonesia Power designed Indonesia Power - Integrated Management System (InPower IMS), which is integration from various standards, management systems, relevant methods, based on best practice and international standard. InPower IMS has been implemented since 2013.

InPower IMS is an integrated system from various standards/systems/methods, i.e.:

1. ISO 9001:2015 Quality Management System,
2. ISO 14001:2015 Environmental Management System,
3. OHSAS 18001:2007 Occupational Health and Safety Management System,
4. ISO 28000:2009 Supply Chain Security Management System,
5. Security Management System (SMP) (Head of Indonesian National Police Regulation No. 24 of 2007),
6. Occupational Health and Safety Management System (SMK3) (Government Regulation No. 50 of 2012),
7. ISO 55001:2014 Asset Management System,
8. ISO 50001:2011 Energy Management System,
9. Guideline on Social Responsibility, ISO 26000:2010 (not certified),
10. Risk Management-Principles and Guidelines, ISO 31000:2009 (not certified),
11. Baldrige Criteria (not certified).

Secara lebih rinci, perjalanan implementasi InPower IMS dapat digambarkan sebagai berikut:

In details, the implementation of InPower IMS can be depicted as follows:

	Horizon 1 **"Set up Pondasi Sistem Manajemen "** Horizon 1 "Set up the foundation for Management System"	**Horizon 2** **"Penyelarasan Standart Sistem Manajemen "** Horizon 2 "Alignment of Standard of Management System"	**Horizon 3** **"Internalisasi keseluruh sistem ke dalam seluruh elemen organisasi"** Horizon 3 "Internalization of the whole system into all organization's elements"
	2013	**2013-2015**	**2015-2016**
Fokus Pengembangan Customer Focus	• Menyiapkan Pedoman Kebijakan dan *Manual* In Power IMS • Mengimplementasikan Standart Sistem Manajemen (sesuai lingkup IMS) • Melakukan audit internal In Power IMS • Melakukan Audit Sertifikasi In Power IMS dengan Badan Sertifikasi • Preparing InPower IMS Manual and Policy Guidelines, • Implementing Standard of Management System (in line with the IMS' scope), • Conducting internal audit for InPower IMS, • Conducting Certification Audit for InPower IMS with Certifying Agency.	• Tahapan penyelarasan sistem Manajemen *existing* dengan kebutuhan pengembangan Sistem Manajemen baru sesuai dengan kebutuhan organisasi • Menyelaraskan Pedoman, *Manual*, Proses Bisnis In Power IMS dengan strategi dan kebijakan Perusahaan • Membangun dokumen *fully Integrated* • Membangun sistem support IT untuk mengendalikan, monitor dan mengevaluasi implementasi IMS • Mendorong peran Sistem Manajemen dalam meraih WCS • Membangun Budaya dalam implementasi SIstem Manajemen • Persiapan implementasi di UJP • Stages of aligning the existing Management System with the needs to develop new Management System, in line with the organization's needs, • Aligning InPower IMS Guidelines, Manual, Business Process with strategies and policies of the Company, • Building fully-integrated documents, • Building IT Support System to control, monitor, and evaluate the IMS implementation, • Encouraging the role of Management System in achieving WCS, • Building a culture in implementing Management System, • Preparing the implementation at GSU	• Mengintegrasikan sistem support Sistem Manajemen dengandash board management lainnya • Melanjutkan perbaikan Sistem Manajemen secara berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja perusahaan • Membangun budaya dalam implementasi Sistem Manajemen • Implementasi seluruh UJP • Penambahan standar baru (ISO 26000, ISO 55001) • Kajian ISO 50001 dan ISO 45000 • Kajian implementasi ISO 27001 • Kajian Implementasi ISO 22301 • Update sistem standar baru • Integrating Management System support with other management dashboard, • Refining Management System continuously to improve the Company's performance, • Building a culture in implementing Management System, • Implementation at all GSU, • Adding new standards (ISO 26000, ISO 55001), • Review of ISO 500001 and ISO 45000, • Review the implementation of ISO 27001, • Review the implementation of 22301, • Updating the new standard system.

INDONESIA POWER *INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM* (INPOWER IMS)

Indonesia Power Integrated Management System (InPower IMS)

Key Enabler			
	• Memperkuat tim Implementor IMS • Membangun sistem BOD-SL Sebagai Key Sponsor • Kepatuhan terhadap persyaratan sistem manajemen • Keberhasilan pengelolaan dokumen dan rekaman mutu yang standart • Strengthening the IMS Implementer Team, • Building Board of Directors-SL system as key sponsor, • Compliance with management system requirements, • Successful management of standardized documents and quality records.	• Update SIstem dengan kebutuhan perusahaan dan tuntutan bisnis • Sistem Monitor dan evaluasi • Standarisasi dokumentasi proses bisnis dan prosedur • Meningkatkan keahlian SDM dalam Implementasi • Input KPI Kinerja IMS kedalam Pejabat structural • Konsolidasi Agen Perubahan untuk In Power IMS dan membangun *sponsorship* • System update in line with the Company's needs and business demands, • System of monitoring and evaluation, • Documentation standards of business process and procedures, • Improving Human Resources skills in implementation, • KPI input for IMS performance into the structural Officer, • Consolidation of Agent of Change for InPower IMS and building sponsorship.	• Sistem yang terintegrasi • Membangun Key sponsor SMT di setiap bagian • Perbaikan proses bisnis, aplikasi, sistem kebijakan dan penyelasaran ke dalam IMS • Integrated System, • Building SMT key sponsor in each section, • Improving business process, application, policy system, and alignment into the IMS.

Perancangan implementasi InPower IMS dimulai pada bulan November 2012 sampai dengan bulan April 2013, fokus kepada 6 (enam) sistem manajemen (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 28000, SMP, SMK3) dan mendapat sertifikat dari PT Sucofindo pada tanggal 22 Desember 2013. Pada tahun 2015 dimulai perencanaan implementasi ISO 55001:2014 Sistem Manajemen Aset, sebagai pengganti PAS 55:2012 yang sudah dinyatakan tidak berlaku lagi dan implementasi ISO 26000 dalam pelaksanaan CSR (*Corporate Social Responsibility*). Pada awal tahun 2016 dirancang implementasi ISO 50001:2011 Sistem Manajemen Energi.

The design for InPower IMS started on November 2012 until April 2013, and was focused on 6 (six) management systems (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 28000, SMP, SMK3), and were certified by PT Sucofindo on 22 December 2013. In 2015, the design for ISO 55001:2014 Asset Management System is started, as a replacement of PAS 55:2012 which has been declared invalid, and the implementation of CSR (Corporate Social Responsibility) for ISO 26000. In the early 2016, implementation of ISO 50001:2011 for Energy Management System is designed.

Sertifikasi Manajemen Energi

Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang meningkat dari tahun ke tahun biasanya diiringi dengan kebutuhan akan pasokan energi listrik yang juga terus bertambah setiap tahunnya. Indonesia Power sebagai perusahaan pembangkit energi listrik, tentu saja dengan meningkatnya kebutuhan energi listrik tersebut akan meningkatkan pendapatan bagi perusahaan, namun disisi lain peningkatan kapasitas produksi juga akan menguras energi yang begitu besar dan juga akan meningkatkan emisi gas rumah kaca.

Energy Management Certification

The Indonesian economic growth has been increasing from year to year, and it's usually accompanied by the demand for electricity which also continues to grow every year. With the increasing demand for electricity, Indonesia Power as a power generator company, will get to increase the revenue for the Company. On the other hand, the production capacity will increase and it will consume big energy and will increase the greenhouse gas emissions as well.

Untuk itulah *The International Organization for Standardization* (ISO) mengeluarkan ISO 50001 Sistem Manajemen Energi. Standar ini adalah standar yang digunakan untuk mengelola kinerja energi termasuk efisiensi dan konsusmsi energi. Konsep ISO 50001 ini menggunakan model Sistem Manajemen dengan pendekatan siklus *Plan, Do, Check, Action* untuk perbaikan berkelanjutan.

Therefore, The International Organization for Standardization (ISO) published Energy Management System ISO 50001. This standard is used to manage the energy performance, including efficiency and energy consumption. ISO 50001 concept uses Management System model with the cycle approach of Plan, Do, Check, Action to refine sustainability.

Indonesia Power sebagai perusahaan yang membutuhkan sumber energi yang besar, sesuai dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 14 Tahun 2012 Pasal 3, maka diwajibkan untuk menerapkan Manajemen Energi. Untuk itulah PT Indonesia Power berkomitmen untuk menerapkan manajemen energi berpedoman pada standar ISO 50001 Sistem Manajemen Energi.

Indonesia Power needs big energy resources, and in accordance with the Regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources No. 14 of 2002, Article 3, it is mandatory to implement Energy Management. Therefore, PT Indonesia Power commits to implement the energy management, in line with the ISO 50001 Energy Management System standard.

Kebutuhan penerapan standar sistem manajemen tersebut didorong oleh dua faktor diantaranya:

1. Harapan dan tuntutan *stakeholders* terhadap kinerja Indonesia Power yang senantiasa meningkat dan efisien,
2. Pengelolaan Manajemen Energi yang bertujuan melakukan efisiensi terhadap penggunaan energi yang komprehensif, sistematis berorientasi pada tujuan dan sasaran yang berkelanjutan.

The needs to implement standard management system is driven by two factors, i.e.:

1. The expectations and demands of stakeholders on Indonesia Power for efficient and ever-increasing performance,
2. Energy Management that aims at efficiency towards comprehensive and systematic energy consumption, oriented towards sustainable goals and objectives.

Seperti halnya untuk sertifikasi implementasi Sistem Manajemen berbasis ISO yang lainnya maka audit yang dilakukan haruslah dilakukan oleh Badan Audit Sertifikasi baik dalam negeri maupun luar negeri independen, kompeten dan terakreditasi baik secara nasional atau internasional.

As with any other ISO-based Management System certification implementation, audit should be conducted by Certification Audit Agency, both domestic and international, which is independent, competent, and well-accredited nationally or internationally.

Pelaksanaan audit sertifikasi ISO 55001 ini yang keseluruhan kegiatan tersebut dilaksanakan oleh PT BSI Group Indonesia dilakukan melalui beberapa tahapan kegiatan antara lain:

1. *Gap Assessment* bertujuan untuk memetakan kebutuhan dan kecukupan dokumen serta implementasi di lapangan guna memenuhi persyaratan-persyaratan sesuai dengan standar. *Gap Assessment* dilaksanakan pada tanggal 11-15 April 2016 dengan *sampling* Kantor Pusat, UP Suralaya, UJP Palabuhan Ratu,

The ISO 55001 certification audit activities were carried out by PT BSI Group Indonesia, and it was conducted through several stages of activities, among others:

1. Gap Assessment, to map the need and adequacy of documents, as well as implementation on the field, in order to fulfill the standard requirements. Gap Assessment was conducted on April 11-15, 2016, with sampling from Head Office, Suralaya GU, Palabuhan Ratu GSU,

INDONESIA POWER *INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM* (INPOWER IMS)

Indonesia Power Integrated Management System (InPower IMS)

2. *Audit Stage* I bertujuan untuk memastikan kesiapan *auditee* dalam menerapkan sistem manajemen yang akan digunakan dilaksanakan pada tanggal 9-11 April 2017 dilakukan di Kantor Pusat dan UP Saguling,
3. *Audit Stage* II bertujuan untuk melihat kesesuaian antara penerapan standar dilingkungan organisasi *auditee* dengan persyaratan standar sistem manajemen yang digunakan dilaksanakan pada tanggal 30 Mei s.d 10 Juni 2017 dilaksanakan di Kantor Pusat, UPJP Kamojang, UJP Palabuhan Ratu, UP Suralaya, dan UP Perak Grati, dengan memeriksa secara bersamaan terhadap performa energi yang dikelola oleh UJH.

Pada saat *Closing Audit* yang dilaksanakan tanggal 10 Juni 2016 di Kantor Pusat, Auditor BSI menyatakan Indonesia Power direkomendasikan untuk memperoleh sertifikat ISO 50001:2011 Sistem Manajemen Energi. Pada Tanggal 25 Agustus 2016 terbitlah Sertifikat ISO 50001 Sistem Manajemen Energi yang berlaku selama tiga tahun, hingga 24 Agustus 2019.

2. Audit Stage I, to ensure the auditee's preparation in implementing management system that will be used, and was conducted on April 9-11, 2017, in Head Office and Saguling GU,
3. Audit Stage II, to observe the suitability between the standard implementation in the organization environment of the auditee, with the standard requirement of the management system used, carried out on May 30 – June 10, 2017, in Head Office, Kamojang GGSU, Palabuhan Ratu GSU, Suralaya GU, and Perak Grati GU, by concurrently examining the energy performance managed by MSU.

During the Closing Audit on June 10, 2016 in Head Office, the BSI Auditor stated that Indonesia Power is recommended to obtain certification of ISO 50001:2011 Energy Management System. On August 25, 2016, the ISO 50001 Energy Management System Certification was issued, and it is valid for three years, until August 24, 2019.

Hirarki Dokumen InPower IMS

Hirarki Dokumen InPower IMS disusun ke dalam empat level yang digambarkan sebagai berikut:

Hirarki Dokumen InPower IMS

The InPower IMS Document Hierarchy is arranged into four levels, as depicted:

Hirarki Dokumen InPower IMS
InPower IMS Document Hierarchy

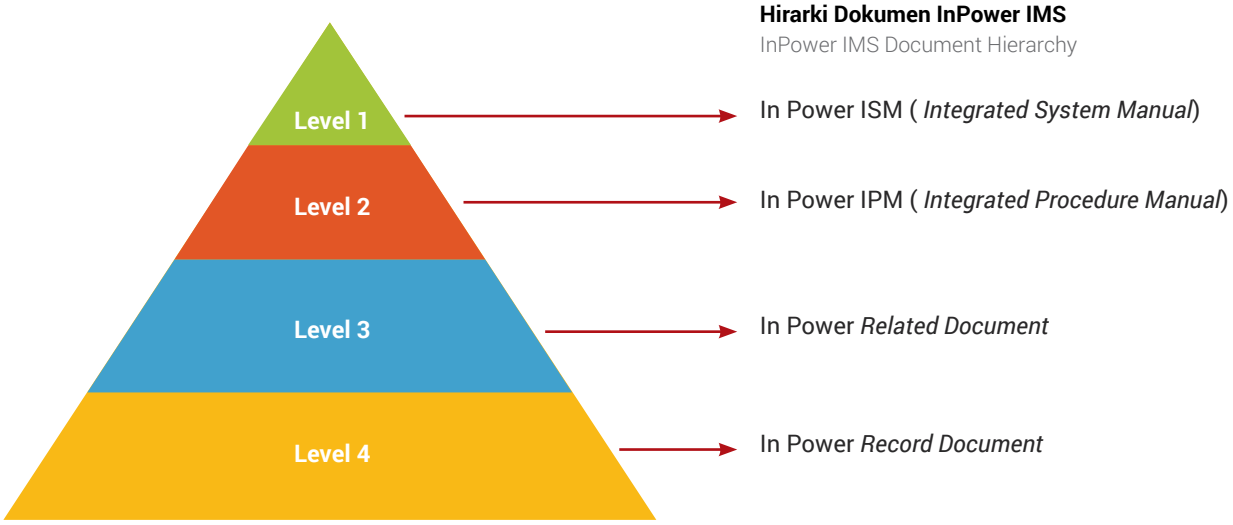

Level 1: Indonesia Power *Integrated System Manual* (InPower ISM)

Merupakan dokumen yang berisi:

a. Lembar kendali/lembar pengesahan dokumen,
b. *Cross Reference*: merupakan tabel keterkaitan antar standar,
c. Bab Pendahuluan: berisi penjelasan awal mengenai InPower IMS,
d. Bab Profil Organisasi: berisi penjelasan mengenai profil Indonesia Power dan kaitannya dengan implementasi InPower IMS,
e. Proses Bisnis: berisi gambaran proses bisnis baik secara korporat, maupun proses bisnis unit,
f. Kewenangan dan Tanggung Jawab.

Level 2: Indonesia Power *Integrated Procedure Manual* (InPower IPM)

Merupakan dokumen yang berisi sekumpulan rincian prosedur beserta lampirannya sebagai bukti dari implementasi kebijakan.

Level 3: *Indonesia Power Related Document*

Dokumen yang digunakan sebagai petunjuk dalam melaksanakan sebuah proses kerja termasuk di dalamnya antara lain surat keputusan, surat edaran, Instruksi Kerja/Petunjuk Teknis, Prosedur Tetap (PROTAP), *manual book,* gambar, dan lain-lain.

Level 4: *Indonesia Power Record Document*

Dokumen yang berisikan formulir dan dokumen sejenis sebagai bukti bahwa suatu aktivitas dilaksanakan. Untuk memastikan kesesuaian proses kerja aktual dengan dokumentasi InPower IMS yang tersedia, Indonesia Power mengkaji ulang isi dokumen InPower IMS ini secara berkala setiap satu tahun sekali. Kaji ulang mencakup kaji ulang dokumen, audit sistem dan tinjauan manajemen dengan lingkup kebijakan, sasaran dan proses-proses di dalamnya untuk menjamin efektivitas dan konsistensi kebijakan dan rencana bisnis perusahaan, dan merespon terhadap perubahan harapan pelanggan, perundangan dan persyaratan lainnya, tata kelola perusahaan serta dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk relevansi dan konsistensi terhadap perencanaan strategi Perusahaan.

Level 1: Indonesia Power Integrated System Manual (InPower ISM)

Documents contained:

a. Control sheet/document endorsement sheet,
b. Cross Reference: table of inter-standard relationships,
c. Introduction Chapter: contains initial description of InPower IMS,
d. Organization Profile Chapter: contains description of Indonesia Power's profile and its relation to the InPower IMS implementation,
e. Business Process: contains an overview of business process, both in the corporate and in the business unit,
f. Rights and Responsibilities.

Level 2: Indonesia Power Integrated Procedure Manual (InPower IPM)

Documents which contain a set of detailed procedures and their attachments, as evidence of the policy implementation.

Level 3: Indonesia Power Related Document

Documents which are used as guidelines in conducting work process, including decision letter, circular letter, Work Instruction/Technical Guidelines, Permanent Procedures (PROTAP), manual book, pictures, etc.

Level 4: Indonesia Power Record Document

Documents which contain form and similar documents, as evidence that an activity was carried out. To ensure the actual work process suitability with the InPower IMS documentation available, Indonesia Power reviews the contents of InPower IMS documents periodically, once a year. Review includes document reviews, system audit, and management study with the scope of policies, targets, and process therein to ensure effectivity and consistency of policy and company's business plan, and responds to changes on customer's expectation, law and regulations and other requirements, corporate governance, as well as the development of science and technology for the relevance and consistency on the Company's strategic planning.

INDONESIA POWER *INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM* (INPOWER IMS)

Indonesia Power Integrated Management System (InPower IMS)

Implementasi InPower IMS Tahun 2016

Pada tahun 2016, implementasi InPower IMS adalah sebagai berikut:

1. Audit Sertifikasi ISO 50001:2011 Sistem Manajemen Energi, *audit stage* I tanggal 9-11 April 2016, *audit stage* II tanggal 30 Mei s.d 10 Juni 2016, auditor dari PT BSI Group Indonesia,
2. Audit Surveillance ISO 55001:2014 Sistem Manajemen Aset dilaksanakan tanggal 4-9 September 2016, auditor dari PT BSI Group Indonesia,
3. Audit Resertifikasi IMS (termasuk *upgrading* ISO 9001:2008 ke ISO 9001:2015 dan ISO 14001:2004 ke ISO 14001:2015).

Implementasi InPower IMS Tahun 2016

In 2016, InPower IMS implementation is as follows:

1. Certification Audit of ISO 50001:2011 Energy Management System, audit stage I on April 9-11, 2016, audit stage II on May 30 – June 10 2016, and PT BSI Group Indonesia as auditor,
2. Surveillance Audit of ISO 55001:2014 Asset Management System, conducted on September 4-9 , 2016, PT BSI Group Indonesia as auditor,
3. Recertification Audit of IMS (including upgrading ISO 9001:2008 to ISO 9001:2015, and ISO 14001:2004 to ISO 14001:2015).

PLTGU CILEGON

RAPAT KOOR
TENGAH TAHU
PT INDONESIA

TATA KELOLA PERUSAHAAN

CORPORATE GOVERNANCE

Indonesia Power terus mendorong peningkatan implementasi Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan berupaya menciptakan budaya yang menjunjung tinggi integritas, profesionalisme dan kepatuhan terhadap peraturan yang dituangkan dalam prinsip-prinsip GCG. Prinsip-prinsip GCG tersebut diinternalisasi secara korporat di setiap tingkatan dan jenjang organisasi melalui penguatan infrastruktur, penyesuaian sistem dan prosedur yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan GCG yang semakin efektif.

Indonesia Power keeps encouraging the improvement of Good Corporate Governance and strives to create a culture that upholds integrity, professionalism, and regulatory compliance with the GCG principles. GCG Principles is internalized in the corporate in every level and structure of the organization through infrastructure strengthening, system adjustment, and necessary procedures to support more effective GCG implementation.

PENDAHULUAN
Introduction

Tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance/GCG*) terus berkembang menjadi sebuah praktik keteladanan internasional sekaligus prasyarat mutlak untuk membentuk perusahaan yang kokoh dan berkelanjutan. Selain kebutuhan internal, para pemangku kepentingan semakin menuntut perusahaan menjadi semakin transparan dengan melakukan GCG secara optimal. Mempertimbangkan pentingnya tata kelola perusahaan tersebut, Perusahaan memandang perlunya membudayakan praktik GCG dengan memperkuat implementasai tata kelola yang mencakup integrasi dari seluruh aspek dalam Perusahaan.

Bagi Indonesia Power, *governance* dan *sustainability* merupakan dua hal yang saling beriringan. Hal ini dikarenakan komitmen dalam penerapan tata kelola perusahaan yang baik tidak hanya ditujukan untuk penciptaan nilai perusahaan secara ekonomi, namun juga menciptakan nilai secara sosial dan lingkungan. Untuk itu, Indonesia Power berkomitmen menerapkan tata kelola perusahaan berkelanjutan yang terintegrasi dengan aspek kepatuhan, pengendalian internal, manajemen risiko, dan tanggung jawab sosial Perusahaan. Bentuk komitmen tersebut diwujudkan melalui penguatan infrastruktur serta penyempurnaan sistem, struktur dan kebijakan pendukung GCG yang dapat mendukung pelaksanaan tata kelola yang efektif.

Indonesia Power senantiasa meningkatkan kualitas implementasi praktik GCG secara konsisten dan berkelanjutan guna memaksimalkan nilai-nilai Perusahaan dan kepercayaan para Pemangku Kepentingan dalam jangka panjang. Seluruh tahapan implementasi GCG telah direncanakan dan disusun dalam *roadmap* yang senantiasa dilakukan pengkajian secara berkala. Konsistensi Indonesia Power dalam menerapkan GCG, diharapkan dapat menjadi meningkatkan kemampuan Perusahaan dalam menghadapi tantangan dan membawa Perusahaan ke arah yang lebih baik guna mencapai tujuan Perusahaan, memberikan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan dan dampak positif yang besar bagi perekonomian nasional Indonesia sekaligus mendorong tercapainya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainability Development Goals*).

Good Corporate Governance (GCG) continues to evolve into an international exemplary practice as well as absolute prerequisite to form a solid and sustainable company. In addition to internal needs, the stakeholders demand that the Company is more transparent by conducting optimal GCG. Taking into account the importance of corporate governance, the Company considers the need to cultivate GCG practices by strengthening the integrated governance implementation in every aspect of the Company.

For Indonesia Power, governance and sustainability go hand in hand. The commitment to implement good corporate governance is intended to create economic corporate value, and also to create social and environmental value. Therefore, Indonesia Power commits to implement sustainable corporate governance that is integrated into the aspects of compliance, internal control, risk management, and corporate social responsibility. This form of commitment is actualized through infrastructures strengthening and refinement of supporting GCG system, structures, and policy that can support effective governance implementation.

Indonesia Power strives to improve the quality of GCG practices consistently and sustainably in order to maximize the Corporate value and the trust of Stakeholders in the long run. Every phase of GCG implementation has been planned and compiled into a roadmap which is periodically reviewed. The consistency of Indonesia Power in implementing GCG is expected to improve the Company's capability in facing challenges, and to bring the Company to a better direction in order to achieve the Company's goals, give added value to all stakeholders and big positive impact for Indonesia national economic, as well as to encourage the achievement of Sustainability Development Goals.

Dasar Kebijakan Penerapan Tata Kelola

Implementasi GCG bagi Perusahaan tidak hanya dipandang sebagai bagian dari pemenuhan atau kepatuhan terhadap regulasi akan tetapi juga sebagai kebutuhan dalam meningkatkan kinerja Perusahaan. Implementasi GCG yang telah dilakukan oleh Perusahaan tidak akan terlaksana dengan baik tanpa acuan yang jelas. Oleh karena itu, dasar penerapan GCG yang menjadi acuan Perusahaan adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara.
3. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara PER-09/MBU/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara.
4. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara PER-10/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN.
5. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor KEP-103/MBU/2002 tentang Pembentukan Komite Audit Bagi Badan Usaha Milik Negara.
6. Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia Tahun 2006.
7. Anggaran Dasar Indonesia Power.

Berbagai ketentuan tesebut dirangkum ke dalam sebuah kebijakan perusahaan yang berupa Pedoman Tata Kelola Perusahaan (*GCG Code*). Pedoman tersebut diharapkan mampu memberikan gambaran yang jelas terkait penerapan tata kelola perusahaan yang baik sejalan dengan jati diri Perusahaan, sehingga implementasi GCG yang dilakukan Perusahaan dapat menunjang terwujudnya visi dan misi Perusahaan.

Basic Policy in Governance Implementation

Company's GCG implementation is not only a part of compliance with regulations but also a need for improving the Company's performance. The Company's GCG implementation will not be successful without clear references. Therefore, the basic references for Company's GCG implementation are as follows:

1. Law of Republic of Indonesia Number 40 of 2007 on Limited Liability Company.
2. Regulation of Minister of State-Owned Enterprises PER-01/MBU/2011 on the Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises.
3. Regulation of Minister of State-Owned Enterprises PER-09/MBU/2012 on the Amendment of Regulation of Minister of State-Owned Enterprises PER-01/MBU/2011 on the Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises.
4. Regulation of Minister of State-Owned Enterprises PER-10/MBU/2012 on Supporting Organs of the Board of Commissioners/Supervisory Agency of the State-Owned Enterprises (BUMN).
5. Decree of Minister of State-Owned Enterprises Number KEP-103/MBU/2002 on Audit Committee Establishment for State-Owned Enterprises.
6. GCG Guidlines 2006 issued by The Indonesian National Committee on Governance (KNKG)
7. Indonesia Power's Articles of Association.

These regulations are summarized into a company policy in the form of Good Corporate Governance Code. The Code is expected to provide clear picture regarding the implementation of good corporate governance, in line with the Company's identity, hence the GCG implementation can support the realization of the Company's vision and mission.

TATA KELOLA PERUSAHAAN
Corporate Governance

Penerapan Prinsip Tata kelola Perusahaan

Indonesia Power berkomitmen pada implementasi GCG yang diwujudkan dengan senantiasa menempatkan prinsip-prinsip GCG sebagai fondasi utama dalam menjalankan bisnis perusahaan serta untuk mempertahankan eksistensi Perusahaan dalam menghadapi tantangan dan persaingan usaha di masa-masa mendatang. Peningkatan praktik GCG Indonesia Power tidak terlepas dari komitmen segenap insan Perusahaan untuk melaksanakan prinsip-prinsip GCG sebagai landasan dalam menjalankan aktivitas bisnis Perusahaan yang meliputi aspek Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi, dan *Fairness* (TARIF).

Corporate Governance Principles Implementation

Indonesia Power commits to implement GCG that is realized by placing the GCG principles as the main foundation in conducting the Company's business, as well as to maintain the Company's existence in facing challenges and business competition in the future. The improvement of GCG practices in Indonesia Power is inseparable from the commitment of the Company's personnel in implementing the GCG principles as the foundation in conducting Company's business activities, which covers these aspects: Transparency, Accountability, Responsibility, Independence, and Fairness (TARIF).

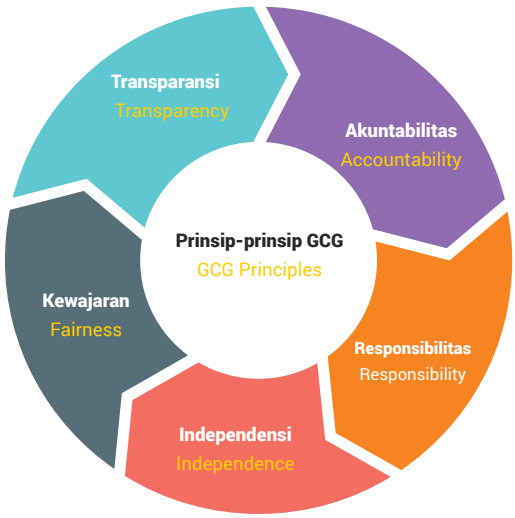

1. Prinsip Transparansi
   Perusahaan menjamin pengungkapan informasi materiil dan relevan mengenai kinerja, kondisi keuangan dan informasi lainnya secara jelas, memadai, akurat, dapat dibandingkan dan tepat waktu serta mudah diakses oleh *Stakeholders* sesuai dengan haknya tanpa mengabaikan prinsip kerahasiaan dan kehati-hatian.

1. Transparency
   The Company guarantees disclosure of material and relevant information about performance, financial condition and other information in a clear, adequate, accurate, comparable, and timely manner, and easily accessible for the Stakeholders, in line with their rights notwithstanding the principles of confidentiality and prudence.

2. Prinsip Akuntabilitas
   Indonesia Power menjamin kejelasan fungsi, hak, kewajiban, wewenang, dan pertanggungjawaban Jajaran Perusahaan yang memungkinkan pengelolaan Perusahaan terlaksana secara efektif. Implementasi prinsip akuntabilitas menitikberatkan pada pelaksanaan mekanisme *check and balance system* dimana keselarasan struktur organisasi, pedoman kerja, dan pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas antar fungsi di Perusahaan.
3. Prinsip Responsibilitas
   Indonesia Power menjamin kesesuaian dalam melaksanakan aktivitas bisnisnya berdasarkan prinsip korporasi yang sehat, pemenuhan kewajiban terhadap Pemerintah sesuai peraturan yang berlaku, bekerja sama secara aktif untuk manfaat bersama dan berusaha untuk dapat memberikan kontribusi yang nyata kepada masyarakat.
4. Prinsip Independensi
   Indonesia Power menjamin pengelolaan Perusahaan secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Prinsip independensi ditekankan pada penghindaran aspek benturan kepentingan baik dari level atas maupun pelaksana.
5. Prinsip Kewajaran (*Fairness*)
   Prinsip kewajaran diimplementasikan pada perlakuan, pelibatan, dan pemenuhan hak seluruh *Stakeholders* yaitu *Shareholders*, pegawai, pemasok, pelanggan, komunitas, dan pemerintah.

2. Accountability
   Indonesia Power guarantees the clarity of Company's functions, rights, obligations, powers, and responsibilities, which enable the management of Company to run effectively. The accountability emphasizes on the check and balance system mechanism, in which there is clear alignment of organization structure, work guidelines, clear division of tasks, and responsibilities in between the functions in the Company.

3. Responsibility
   Indonesia Power guarantees the alignment in conducting the business activity based on sound corporate principles, fulfillment of obligations to the Government, in line with the prevailing rules, active cooperation for mutual benefit, and efforts to give areal contribution to the society.

4. Independence
   Indonesia Power guarantees Company's management that is professional, free of conflict of interest and influence/pressure from any parties that is not in accordance with the prevailing rules and legislations. Independence principle emphasizes on the avoidance of conflict of interest, both from the top level and executor.

5. Fairness
   Fairness is implemented in the treatment, involvement, and fulfillment of rights for every Stakeholder, i.e. Shareholders, employees, suppliers, customers, community, and government.

TATA KELOLA PERUSAHAAN
Corporate Governance

Road Map Tata Kelola Perusahaan

Roadmap GCG Indonesia Power 2014 – 2019 merupakan hasil *roll over Roadmap* GCG periode sebelumnya yang menjadi *grand strategy* dan *milestone* implementasi GCG sampai dengan tahun 2019 yang mengintegrasikan aspek kepatuhan, pengendalian internal, manajemen risiko dan tanggung jawab sosial Perusahaan.

Good Corporate Governance Roadmap

GCG Roadmap of Indonesia Power 2014 – 2019 is a result of rollover of GCG Roadmap from the previous period, which became grand strategy and milestone in the GCG implementation until the year 2019, which integrates aspects of compliance, internal control, risk management, and corporate social responsibility.

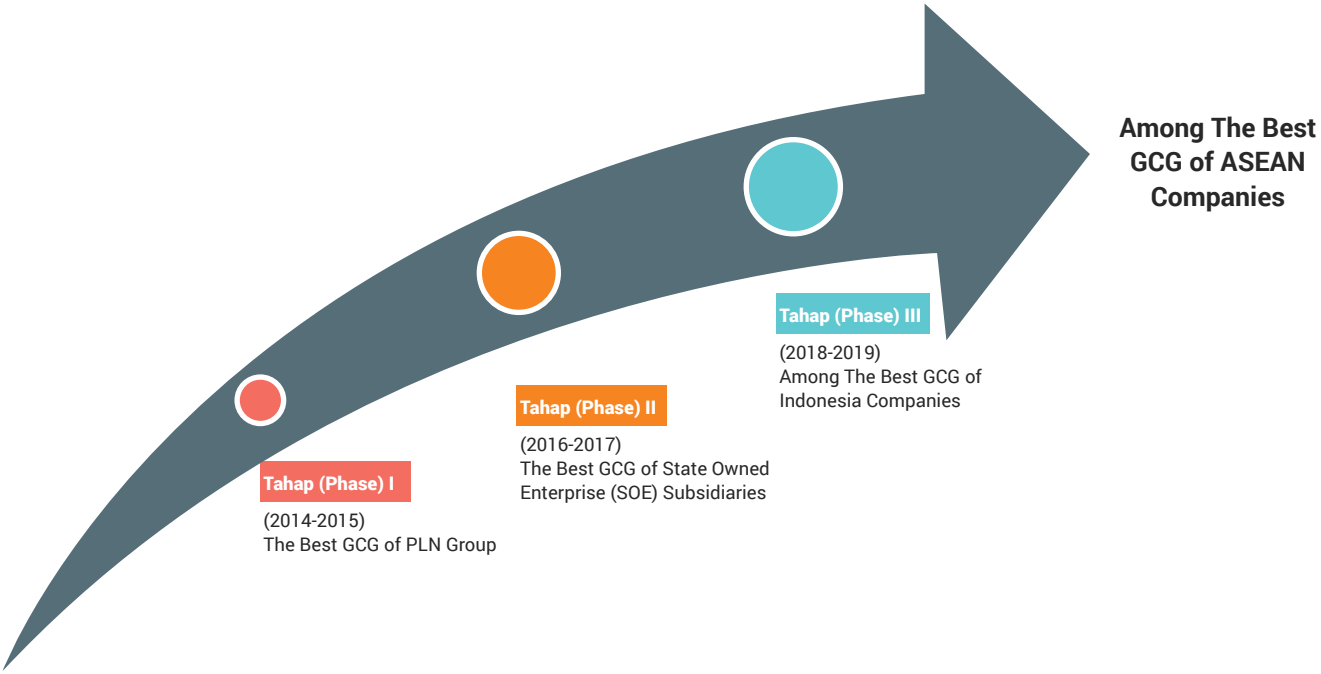

Mengikuti tahapan waktu pada *Roadmap* GCG di atas maka segenap hasil capaian implementasi pada *Roadmap* GCG sebelumnya menjadi landasan dalam melanjutkan proses dan tahapan *Roadmap* GCG Tahun 2014-2019. Selama perjalanan implementasi GCG sesuai *Roadmap* yang ditetapkan, Indonesia Power telah mencatat beberapa manfaat signifikan atas dilaksanakannya inisiatif GCG, salah satunya adalah meningkatnya kepercayaan kepada Perusahaan dari para pemangku kepentingan yang sesuai dengan *tagline* Indonesia Power yakni *"Trust us for Power Excellence".*

Following the time stages of GCG Roadmap above, the achievement of the previous GCG Roadmap became the foundation in continuing the process and phases of GCG Roadmap 2014-2019.During the GCG implementation in line with the established Roadmap, Indonesia Power has recorded some significant benefits on the GCG initiatives, one of which is the increase of trust to the Company from the stakeholders, in accordance with Indonesia Power's tagline, i.e. "Trust us for Power Excellence".

Sesuai *Roadmap* GCG, Indonesia Power telah memasuki Tahap II: *The best GCG of State Owned Enterprise (SOE) Subsidiaries*, yaitu Melaksanakan kegiatan dalam mendukung pencapaian target *financial value, customer value, internal process* dan *learning & growth* sesuai periodisasi tahapan RJPP, Memastikan kegiatan operasional perusahaan telah sesuai dengan prinsip GCG selaras dengan praktik terbaik yang dijalankan anak perusahaan BUMN, Kualitas Laporan Tahunan dan Laporan keberlanjutan terbaik, Menguatkan Budaya Tata Kelola Perusahaan Terintegrasi di Indonesia Power, Penguatan Implementasi GCG terintegrasi Anak Perusahaan dan Perusahaan Patungan Indonesia Power, serta Melayani kegiatan studi banding dari anak perusahaan BUMN. Melanjutkan landasan dan tahapan yang telah dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya, Indonesia Power telah melaksanakan sejumlah program implementasi GCG yang menjadi fokus sepanjang tahun 2016, antara lain melakukan penyempurnaan perangkat GCG, sosialisasi GCG kepada seluruh *stakeholder* Perusahaan, melakukan *assessment* penerapan GCG untuk Korporat, Anak Perusahaan maupun Unit Perusahaan, implementasi Indonesia Power Bersih serta mengikutsertakan Dewan Komisaris dan Direksi dalam kegiatan pelatihan terkait GCG untuk menambah wawasan sehingga dapat meningkatkan peran Dewan Komisaris dan Direksi terhadap implementasi GCG. Selain itu, Indonesia Power juga mengikuti program riset dan pemeringkatan *Corporate Governance Perception Index* (CGPI) *Award* Tahun 2016 yang diselenggarakan oleh *The Institute for Corporate Governance* (IICG) sebagai bentuk komitmen Indonesia Power dalam penerapan GCG di Perusahaan.

Komitmen Terhadap Penerapan Tata Kelola Secara Berkelanjutan

Indonesia Power memiliki komitmen yang tinggi untuk terus menerapkan tata kelola perusahaan secara berkelanjutan dengan standar terbaik agar pengelolaan dan penyelenggaraan Perusahaan dilandasi oleh integritas yang tinggi. Oleh karenanya, segenap aspek pengelolaan bisnis Perusahaan senantiasa disempurnakan dengan melakukan berbagai proses transformasi bisnis secara konsisten dan berkelanjutan yang selaras dengan prinsip-prinsip

In line with GCG Roadmap, Indonesia Power has entered Phase II: The best GCG of State-Owned Enterprise (SOE) Subsidiaries, i.e. conducting activities to support the target achievement of financial value, customer value, internal process, and learning and growth in line with the Long Term Corporate Plan (RJPP) phase; ensuring the company's operational activities is in line with GCG principles and best practices undertaken by State-Owned Enterprises Subsidiaries; the best Quality of Annual Report and Sustainability Report; strengthening integrated governance culture in Indonesia Power; strengthening the integrated GCG implementation for Subsidiaries and Joint Ventures of Indonesia Power; as well as servicing study activity for State-Owned Enterprises (SOE) Subsidiaries. Following the foundation and stages implemented in the previous years, Indonesia Power has conducted numerous GCG implementation program that was the focus throughout 2016, such as refining the GCG tools, disseminating GCG to every Company's stakeholder, performing assessment for GCG implementation in Corporate, Subsidiaries, and Corporate Unit, implementing Indonesia Power Bersih, and involving Board Of Commissioners and Directors in the training activities related to GCG to enhance the knowledge and the role of Board Of Commissioners and Directors on the GCG implementation. In addition, Indonesia Power also participates in the research and ranking program of Corporate Governance Perception Index (CGPI) Award in 2016 which was organized by The Institute for Corporate Governance (IICG) as a form of Indonesia Power's commitment in implementing GCG.

Commitment to Sustainable Governance Implementation

Indonesia Power upholds commitment to continue to implement sustainable governance with best standards in order to manage and administer the Company based on high integrity. Therefore, all aspects of Company's business management are continuously enhanced by conducting numerous business transformation process consistently and sustainably, in line with the GCG principles.In order to guarantee the effectivity of sustainable GCG implementation, throughout 2016, the

TATA KELOLA PERUSAHAAN
Corporate Governance

GCG. Guna menjamin efektivitas penerapan GCG yang berkelanjutan, selama tahun 2016, Perusahaan terus berupaya menyempurnakan kodifikasi dan perangkat-perangkat pendukung GCG.

Tanggung Jawab Pelaksanaan GCG

Indonesia Power telah menunjuk Direktur Keuangan sebagai penanggung jawab dalam penerapan dan pemantauan GCG di Perusahaan. Melalui Keputusan Direksi Nomor 239.K/010/IP/2016 tanggal 6 Desember 2016 tentang Organisasi Perusahaan, telah menunjuk Sekretaris Perusahaan sebagai pelaksana tugas dalam penerapan dan pemantauan GCG. Direksi telah melaksanakan tugas sebagai penanggung jawab dalam penerapan dan pemantauan GCG sebagaimana yang tercantum dalam rapat Direksi tanggal 10 Maret 2015 antara lain: (1) menyusun rencana kerja yang diperlukan untuk memastikan Perusahaan memenuhi *GCG Code* Perusahaan dan peraturan perundang-undangan lainnya dalam rangka melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik; (2) memantau dan menjaga agar kegiatan usaha perusahaan tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku; serta (3) memantau dan menjaga kepatuhan perusahaan terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh perusahaan dengan pihak ketiga.

Penyempurnaan Perangkat GCG

Sejalan dengan komitmen untuk menerapkan GCG secara konsisten dan berkesinambungan, Perusahaan telah memiliki beberapa perangkat pendukung sebagai panduan penerapan GCG diantaranya Pedoman Tata Kelola Perusahaan (*GCG Code*), Pedoman Etika Perusahaan (*Code of Conduct*), Pedoman Kerja Dewan Komisaris dan Direksi (*Board Manual*), Kebijakan *Whistle Blowing System* (WBS), Pedoman Benturan Kepentingan, Pedoman Pengendalian Gratifikasi serta Pedoman Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Guna menjamin efektivitas penerapan GCG yang berkelanjutan, selama tahun 2016 Indonesia Power terus berupaya menyempurnakan kodifikasi dan perangkat-perangkat pendukung GCG diantaranya penyempurnaan *GCG Code* yang tertuang dalam Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris Nomor 242.K/010/IP/2016 dan Nomor 16.K/

Company continues to refine the codification and GCG support tools.

GCG Implementation Responsibility

Indonesia Power has appointed the Financial Director as the person responsible for GCG implementation and monitoring in the Company. Through the Decree of Board of Directors No. 239.K/010/IP/2016 dated 6 December 2016 on Corporate Organization, the Corporate Secretary is appointed as the executor in GCG implementation and monitoring. Directors has performed its duties as the organ responsible for GCG implementation and monitoring, as set forth in the Directors' Meeting dated 10 March 2015, among others: (1) compile work program needed to ensure that the Company fulfill the GCG Code and others laws and regulations, in order to conduct good corporate governance principles; (2) monitor and maintain the Company's business activity is not deviating from the prevailing regulations; and (3) monitor and maintain the Company's compliance with every agreement and commitment that has been made with the third parties.

GCG Tools Refinement

In line with the commitment to implement GCG consistently and continuously, the Company has supporting tools as guidelines to implement GCG, such as GCG Code, Company's Code of Conduct, Board Manual for Board of Commissioners and Directors, Whistle Blowing System (WBS) Policy, Conflict of Interest Guidelines, Gratification Control Guidelines, and State's Official Wealth Report (LHKPN) Guidelines. In order to ensure the effectiveness of sustainable GCG implementation, throughout 2016, Indonesia Power continues to refine codification and GCG supporting tools, ,such as GCG Code refinement that is stipulated in Joint Decree of Board of Directors and Board of Commissioners Number 242.K/010/IP/2016 and Number 16.K/DEKOM IP/2016, and refinement of Company's Code of Conduct that is ratified through Joint Decree of Board of Directors and Board of Commissioners Number 242.K/010/IP/2016

DEKOM-IP/2016 serta penyempurnaan Pedoman Etika Perusahaan yang disahkan berdasarkan Surat Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris Nomor 247.K/010/IP/2016 dan Nomor 17.SK/Dekom-IP/2016 tanggal 20 Desember 2016. Selain itu Penyempurnaan Kebijakan Pengendalian Gratifikasi juga dilakukan Indonesia Power bersama dengan KPK pada bulan November 2016. Penyempurnaan perangkat pendukung GCG tersebut bertujuan agar implementasi GCG dapat sejalan dengan *best practice*.

Sosialisasi GCG

Sosialisasi GCG dilaksanakan melalui saluran tatap muka dan media kepada seluruh *stakeholder* Perusahaan. Untuk pegawai Perusahaan, sosialisasi dilakukan melalui *Coffee Morning*, Majalah, Buletin, Visual Manajemen (*TV Wall*), dan Sosialisasi oleh Agen Perubahan. Untuk mitra kerja dilakukan melalui *email*, penjelasan langsung pada saat penjelasan proses pengadan barang/jasa (*Aanwijzing*) serta *Vendor Meeting*. Sedangkan untuk Publik, sosialisasi GCG dilakukan melalui *website*, majalah serta *social media*. Untuk meningkatkan hubungan sinergis dengan *stakeholder*, secara rutin manajemen Perusahaan melakukan kegiatan *vendor meeting* dan *multistakeholder forum*. Forum-forum ini dilakukan di seluruh unit kerja Indonesia Power sebagai sarana bagi Perusahaan untuk mendengar suara *stakeholder* dan mendapatkan pemahaman bersama mengenai kondisi dan perkembangan Perusahaan. Pada tahun 2016, Perusahaan mengundang mitra kerja dalam acara *Vendor Meeting* pada tanggal 29 November 2016. Pada kesempatan tersebut dilakukan penandatanganan komitmen bersama manajemen dan vendor untuk implementasi proses pengadaan barang dan jasa yang bersih dan berintegritas, selain itu disampaikan perkembangan dan kebijakan Perusahaan yang relevan, perilaku etis, serta budaya Perusahaan.

and Number 17.SK/Dekom-IP/2016 dated 20 December 2016. In addition, the Refinement of Gratification Control Policy is conducted by Indonesia Power with KPK in November 2016. The refinement of GCG supporting tools is aimed to ensure that the GCG implementation is in line with best practice.

GCG Information Dissemination

GCG Information Dissemination is performed through face-to-face and all media channels to the Company's stakeholder. For the Company's employees, the socialization is conducted through Coffee Morning, Magazine, Visual Management (TV Wall), and Socialization by Change Agent. For vendors, it is conducted through email, direct explanation on the Explanation of Procurement Process for Goods/Services (Aanwijzing), and Vendor Meeting. For the public, GCG socialization is conducted through website, magazine, and social media. To improve the synergic relation with the stakeholder, the Company's management routinely carried out vendor meeting and multistakeholder forum. The forums are carried out in every work unit of Indonesia Power as a facility for the Company to hear the voice of stakeholder and gain acommon understanding of the Company's condition and development. In 2016, the Company invited partners in Vendor Meeting on 29 November 2016. On that occasion, the commitment is signed with the management and vendor to implement the procurement process of goods and services that are clean and of high integrity. In addition, the Company delivered the relevant development and Company's policy, ethical behavior, and Corporate culture.

TATA KELOLA PERUSAHAAN
Corporate Governance

Indonesia Power Bersih Menuju Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Indonesia Power Bersih towards Good Corporate Governance

Sebagai bagian dari upaya Perusahaan dalam menciptakan insan Indonesia Power yang tangguh, unggul dan bermartabat, sejak tahun 2014 Indonesia Power berkomitmen untuk menerapkan Indonesia Power bebas korupsi, kolusi dan nepotisme. Komitmen ini diwujudkan melalui pelaksanaan program Indonesia Power Bersih (IP Bersih) yang belandaskan pada Keputusan Direksi Nomor 161.K/020/IP/2014 tentang Pedoman Indonesia Bersih. IP Bersih merupakan program impelementasi GCG yang bertujuan menjadikan Indonesia Power bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme, selaras dengan program "PLN Bersih", dimana penerpannya dilaksanakan di semua organ Perusahaan, pegawai, pejabat dan pemangku kepentingan, termasuk anak perusahaan dan perusahaan afiliasi.

As a part of Company's effort in creating Indonesia Power personnel that is tough, excellence, and dignified, since 2014, Indonesia Power is committed to implement Indonesia Power that is free of corruption, collusion, and nepotism. The commitment is realized through the implementation of Indonesia Power Bersih (IP Bersih) program, which refers to the Director's Decree Number 161.K/020/IP/2014 on Indonesia Bersih Guidelines. IP Bersih is a GCG implementation program with the objective to make Indonesia Power free of corruption, collusion, and nepotism, in line with the "PLN Bersih" Program. This is implemented in every Company's organ, employee, officer, and stakeholder, including subsidiaries and affiliated companies.

Gambar Kebijakan Indonesia Power Bersih
Figure: Indonesia Power Bersih Policy

Selaras dengan prinsip GCG, IP Bersih memiliki 4 Pilar yaitu Partisipasi, Integritas, Transparansi, dan Akuntabilitas (PITA). Prinsip Partisipasi diwujudkan dalam bentuk komitmen integritas internal Perusahaan. Dalam hal ini, partisipasi para pemangku kepentingan eksternal juga dilibatkan sebagai *collective action* yang menjadi komitmen bersama. Prinsip Integritas diwujudkan dalam bentuk kepatuhan terhadap *Code of Conduct* (*Budaya Indonesia Power Way*, ketentuan gratifikasi dan benturan kepentingan). Prinsip Integritas juga diterapkan untuk meningkatkan layanan terhadap pelanggan dan mitra kerja. Prinsip Transparansi menjadi dasar bagi Perusahaan untuk selalu responsif terhadap permintaan layanan informasi publik. Perusahaan memberikan kemudahan terhadap permintaan informasi publik dan senantiasa meningkatkan keterbukaan informasi publik. Prinsip Akuntabilitas diwujudkan dalam bentuk *complaint handling mechanisme* yang responsif, opini audit yang sangat baik, *Whistle Blowing System* dan pengelolaan gratifikasi yang kredibel.

In line with the GCG Principles, IP Bersih has four (4) Pillars, i.e. Participation, Integrity, Transparency, and Accountability (PITA). The Participation principle is manifested in the form of Company's internal integrity commitment. In this case, the external stakeholders are being involved as a collective action that is a form of shared commitment. The Integrity principle is manifested in compliance with Code of Conduct (Culture of Indonesia Power Way, regulation of gratification and conflict of interests). Integrity principle is also implemented to improve the service to customer and partners. Transparency principle is the Company's foundation to always be responsive to the service request of public information. The Company provides convenience to the request of public information and always improves the disclosure of public information. The Accountability principle is manifested in the form of responsive complaint handling mechanism, excellent audit opinion, Whistle Blowing System, and credible gratification management.

TATA KELOLA PERUSAHAAN
Corporate Governance

Pengendalian Gratifikasi

Program Pengendalian Gratifikasi merupakan tindak lanjut dari deklarasi "Indonesia Power Bersih (IP Bersih)" yang dilaksanakan pada tahun 2014. IP Bersih mengacu pada program yang dikeluarkan oleh PT PLN (Persero) sebagai entitas induk, yaitu: "PLN Bersih". Indonesia Power telah menyusun pedoman yang mengatur Gratifikasi serta prosedur pelaporan kemungkinan adanya Gratifikasi yang disahkan melalui Keputusan Direksi Nomor 165.K/1010/IP/2014 tanggal 10 Oktober 2014 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Perusahaan. Ruang lingkup Pedoman Pengendalian Gratifikasi terdiri dari ketentuan landasan hukum pengaturan Gratifikasi, cara mengidentifikasi Gratifikasi, penerimaan, pemberian, penolakan, pelaporan, pemantauan dan sanksi atas penyimpangan ketentuan Gratifikasi. Pedoman Pengendalian Gratifikasi ini mengikat dan mengatur segenap insan Indonesia Power dalam menjalankan kegiatan usaha.

Pada tahun 2016, Indonesia Power terus meningkatkan implementasi Pengendalian Gratifikasi bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagaimana komitmen Program IP Bersih, khususnya dengan melakukan penyempurnaan kebijakan Pengendalian Gratifikasi Indonesia Power yang dilaksanakan melalui *workshop* pengelola GCG Korporat dan Unit dipandu oleh KPK dilaksanakan di Bandung tanggal 9-10 November 2016, serta Pengumpulan Laporan Pengendalian Gratifikasi dari seluruh unit setiap bulan. Tercatat 95 laporan Penerimaan dan penolakan Gratifikasi di tahun 2016.

Gratification Control

Gratification Control Program is a follow-up of declaration "Indonesia Power Bersih (IP Bersih)" carried out in 2014. IP Bersih refers to PLN Bersih Program proposed by PT PLN (Persero) as the parent company. Indonesia Power sets Gratification Control Guidelines and reporting procedures on the possibility of Gratification that is ratified through Directors' Decree Number 165.K/1010/IP/2014 dated 10 October 2014 on Gratification Control Guidelines within the Company. The scope of Gratification Control Guidelines consists of the legal basis of Gratification arrangement, how to identify Gratification, acceptance, granting, rejection, reporting, monitoring, and penalty on violations of Gratification regulations. The Gratification Control Guidelines binds and regulates all personnel of Indonesia Power in carrying out the business activities.

In 2016, Indonesia Power keeps improving the Gratification control implementation by cooperating with Corruption Eradication Commission (KPK), as the IP Bersih Program commitment, especially by refining the Gratification Control Policy of Indonesia Power that is conducted through GCG Management workshop for Corporate and Unit, guided by KPK in Bandung, 9-10 November 2016, and by submitting the Gratification Control Report from every unit once every month. There are 95 reports of Gratification Control in 2016.

Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara dan Perusahaan (LHKPN & LHKPP)

Perusahaan telah memiliki kebijakan tentang kepatuhan terhadap penyampaian LHKPN yang tertuang dalam Keputusan Direksi Nomor 173.K/010/IP/2013 tanggal 22 Oktober 2013 tentang Laporan Harta Kekayaan Pejabat Perusahaan (LHKPP) di lingkungan PT Indonesia Power dan Keputusan Direksi Nomor 161.K/020/IP/2014 tanggal 7 Oktober 2014 tentang Pedoman Indonesia Power Bersih. Perusahaan juga mengacu pada instruksi Pemegang Saham yang

Management Wealth Report (LHKPN & LHKPP) Submission

The Company has a policy on compliance with the LHKPN submission that is stipulated on Directors' Decree Number 173.K/010/IP/2013 dated 22 October 2013 on Official Wealth Report (LHKPP) within PT Indonesia Power, and Directors' Decree Number 161.K/020/IP/2014 dated 7 October 2014 on Indonesia Power Bersih Guidelines. The Company also refers to the shareholders' instruction published by PT PLN (Persero) in Directors' Regulation Number 0060.K/DIR/2014 on PLN Bersih

dikeluarkan oleh PT PLN (Persero) dalam Peraturan Direksi Nomor 0060.K/DIR/2014 tentang Pedoman PLN Bersih. Sepanjang tahun 2016, Indonesia Power melakukan penyempurnaan Kebijakan LHKPN dan LHKPP Perusahaan yang dilaksanakan melalui diskusi bersama antara Pengelola GCG Sekretaris Perusahaan, Departemen Hukum dan Divisi Administrasi Kepegawaian dan Hubungan Industrial. Selain itu, Perusahaan juga melakukan pengumpulan LHKPN dan LHKPP periode tahun 2016 serta mengadakan sosialisasi pengisian LHKPN dan LHKPP.

Pelaksanaan Survei Perilaku Etis

Selain melakukan sosialisasi, Perusahaan juga mengadakan Survei Perilaku Etis untuk mengukur pemahaman mitra kerja terhadap kebijakan Perusahaan. Survei tersebut rutin diselenggarakan Indonesia Power kepada *vendor* untuk mengukur pemahaman, kesadaran dan komitmen pegawai yang melaksanakan tugas pengadaan barang dan jasa agar sesuai dengan peraturan yang berlaku dan prinsip-prinsip GCG serta IP Bersih. Pada survei perilaku etis yang dilakukan oleh Lembaga Psikologi Terapan Universitas Indonesia tahun 2016, Indonesia Power meraih index 82% atau meningkat 4% dari tahun lalu dengan index 78%. Kenaikan ini mengindikasikan bahwa berbagai tindakan perbaikan yang dilakukan sebagai tindak lanjut survei tahun 2015 berhasil mendorong munculnya perilaku etis insan Indonesia Power.

Program Peningkatan Kualitas GCG 2016

Dalam rangka memperbaiki kualitas penerapan praktik GCG terbaik di seluruh lapisan organisasi, Indonesia Power secara konsisten melaksanakan *assesment* penerapan GCG secara berkala yang dilakuakan pada level Korporat, Anak Perusahaan dan Unit Perusahaan. Untuk *assessment* GCG Korporat dan Anak Perusahaan pengukurannya berdasarkan Surat keputusan Sekretaris Menteri BUMN SK-16/S.MBU/2012 tentang Indikator/ Parameter penilaian dan evaluasi atas penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN. Sedangkan *assessment*

Guidelines.Throughout 2016, Indonesia Power has refined the LHKPN and LHKPP Policy of the Company, which was conducted through a discussion between GCG Manager Corporate Secretary, Legal Department, and Employment Administration Division and Industrial Relationship. In addition, the Company also submits LHKPN and LHKPP for the 2016 period, and socializes the filing of LHKPN and LHKPP.

Ethical Behavior Survey

In addition to socialization, the Company also conducts Ethical Behavior Survey to measure the partners' understanding of the Company's policy. The survey is routinely carried out by Indonesia Power to vendor for measure the understanding, awareness, and commitment of procurement officer on the GCG Principals and IP Bersih guidelines implementation. On the ethical behavior survey carried out by Applied Psychology Department of Universitas Indonesia in 2016, Indonesia Power achieved the index 82% or increased by 4% from the previous year which was 78%. The increase indicated that numerous refinement actions as the follow-up from 2015 survey succeeded in encouraging the emergence of ethical behavior of Indonesia Power's personnel.

GCG Quality Improvement Program 2016

In order to improve the quality of best GCG practices in every level of the organization, Indonesia Power consistently conducts the GCG implementation assessment periodically on the level Corporate, Subsidiaries, and Company's Unit. The GCG assessment for Corporate and Subsidiaries refer to Decree of Secretary of Minister of State-Owned Enterprises SK-16/S.MBU/2012 on Assessment Indicator/Parameter and Evaluation on Good Corporate Governance Implementation on State-Owned Enterprises. GCG assessment on units is conducted based on the Directors'

TATA KELOLA PERUSAHAAN
Corporate Governance

GCG Unit dilakukan berdasarkan Keputusan Direksi Nomor 71.K/010/IP/2016 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit. *Assessment* GCG Unit dilaksanakan empat Kali setahun, dengan siklus *self assessment* di triwulan I dan III, dan siklus *assessment* oleh Kantor Pusat di triwulan II dan IV. Hasil *assessment* Unit yang dilakukan pada tanggal 29 Desember 2016 mencatat 13 unit berhasil melampaui target yang telah ditetapkan Perusahaan.

Komitmen Indonesia Power dalam meningkatkan kualitas penerapan GCG dibuktikan dengan meningkatnya skor *assessment* GCG dalam beberapa tahun terakhir, yang menunjukkan adanya kesungguhan Indonesia Power untuk senantiasa memperbaiki implementasi tata kelola Perusahaan.

Decree Number 71.K/010/IP/2016 on Unit Performance Assessment Guidelines. Unit GCG Assessment is conducted four times a year, with self-assessment cycle in the First and Third Quarter, and assessment cycle by the Head Office in the Second and Fourth Quarter. Unit assessment result on 29 December 2016 recorded 13 unit succeeded to exceed the target set by the Company.

Indonesia Power's commitment on improving the quality of GCG implementation is proven by the increase of GCG assessment score in the previous years, that demonstrates the seriousness of Indonesia Power to continuously improve the corporate governance implementation.

Trend Pencapaian Skor *Asessment* GCG Tahun 2012-2016
Trend of GCG Assessment Score Achievement in 2012-2016

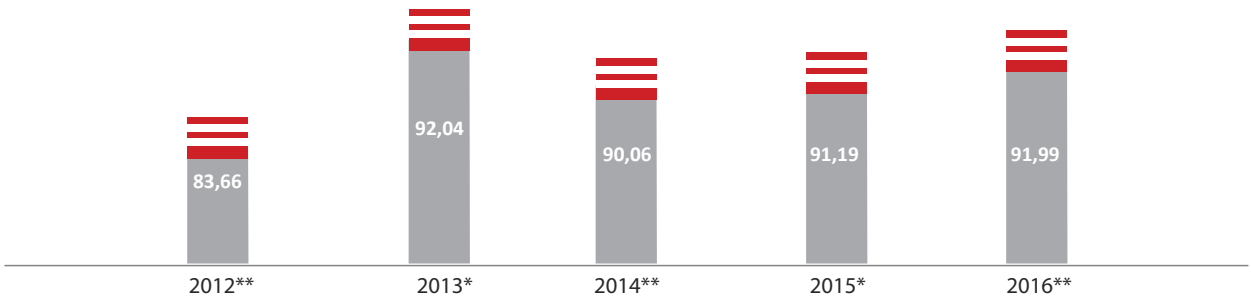

** Assessment GCG
* Self Assessment GCG

Assessment GCG 2016

Kriteria Penilaian GCG

Penilaian penerapan implementasi GCG dilakukan dengan menggunakan parameter penilaian Kementerian BUMN yaitu SK-16/S.MBU/2012 tanggal 06 Juni 2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi Atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara. Kriteria yang digunakan dalam penilaian GCG, meliputi semua aspek yang mendukung pelaksanaan GCG yang terbagi dalam enam hal pokok, yaitu: (1) Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik secara Berkelanjutan; (2) Pemegang Saham/RUPS; (3) Dewan Komisaris; (4) Direksi; (5) Pengungkapan Informasi dan Transparansi; dan (6) Aspek Lainnya.

GCG Assessment 2016

GCG Assessment Criteria

GCG implementation assessment is carried out using the parameterassessment from Ministry of State-Owned Enterprises, i.e. SK-16/S.MBU/2012 dated 6 June 2012 on Assessment Indicator/Parameter and Evaluation on Good Corporate Governance Implementation on State-Owned Enterprises. Criteria for the GCG assessment, includes all aspects that support the GCG implementation, is divided into 6 main points, i.e.: (1) Commitment to Sustainable Good Corporate Governance Implementation; (2) Shareholders/GMS; (3) Board of Commissioners; (4) Board of Directors; (5) Disclosure of Information and Transparency; and (6) Other aspects.

Pihak yang Melakukan Penilaian

Pada tahun 2016, penilaian implementasi GCG di Indonesia Power dilakukan melalui *assessment* oleh pihak independen yaitu Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan DKI Jakarta.

Parties Conducting the Assessment

In 2016, GCG implementation assessment in Indonesia Power is carried out by an independent party, i.e. Finance and Development Supervisory Agency (BPKP) of DKI Jakarta Representative.

Skor Penilaian Masing-Masing Kriteria

Pada tahun buku 2016, dari total nilai maksimal sebesar 100,00 total nilai *Assessment* GCG yang diperoleh Indonesia Power adalah sebesar 91,99 yang setara dengan 91,99% sehingga secara keseluruhan, hasil *assessment* atas *implementasi* GCG Perusahaan tahun 2016 menempatkan Perusahaan pada Kualitas Penerapan GCG "Sangat Baik". Skor yang diperoleh ini telah melebihi target Implementasi yang ditetapkan Pemegang Saham tahun 2016 yaitu sebesar 90. Berikut skor *assessment* GCG untuk masing-masing aspek penilaian pada tahun 2016:

Score of the Assessment Criteria

In the fiscal year 2016, Indonesia Power obtained 91.99 out of the maximum total value of 100.00 for GCG Assessment value, which is equivalent to 91.99%. Overall, the assessment result on the Company's GCG implementation in 2016 placed the Company on "Very Good" GCG Implementation Quality. The score obtained exceeded the target of implementation set by the Shareholders in 2016, i.e. 90. Below is the GCG assessment score for each assessed aspect in 2016:

Tabel Skor Penilaian *Assessment* GCG Tahun 2016
Table: GCG Assessment Score 2016

	Aspek Pengujian/Indikator Parameter Tested Aspect/Parameter Indicator	Bobot Weight	Capaian Tahun 2016 Achievement 2016		Penjelasan Description
			Skor Score	% Capaian % Achieved	
I	Komitmen Terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Secara Berkelanjutan Commitment on Implementing Sustainable Good Corporate Governance	7	6,511	93,021	Sangat Baik Very Good
II	Pemegang Saham dan RUPS/Pemilik Modal Shareholders and GMS/Capital Owners	9	7,767	86,300	Sangat Baik Very Good
III	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Board of Commissioners/Supervisory Agency	35	31,718	90,624	Sangat Baik Very Good
IV	Direksi Board of Directors	35	32,878	93,937	Sangat Baik Very Good
V	Pengungkapan Informasi dan Transparansi Disclosure of Information and Transparency	9	8,120	90,225	Sangat Baik Very Good
VI	Aspek Lainnya Other Aspects	5	5,000	100,000	Sangat Baik Very Good
	Skor Keseluruhan Overall Score	100	91,995	91,995	Sangat Baik Very Good
	Klasifikasi Kualitas Penerapan GCG **Classification of GCG Implementation Quality**			**Sangat Baik** **Very Good**	

TATA KELOLA PERUSAHAAN
Corporate Governance

Rekomendasi Hasil Penilaian

Berdasarkan *assessment* GCG yang telah dilakukan menghasilkan rekomendasi penyempurnaan terhadap kesenjangan yang ditemukan dalam implementasi GCG di Perusahaan. Rekomendasi tersebut mencakup seluruh aspek/parameter penilaian. Hasil rekomendasi tersebut senantiasa ditindaklanjuti oleh Perusahaan agar implementasi GCG sejalan dengan *best practices*.

Recommendation on the Assessment Result

Based on GCG assessment, the recommendation is to improve on the gap found in the GCG implementation in the Company. The recommendation covers all aspects/parameter of the assessment. Recommendation result is continuously followed up by the Company in order to ensure that GCG implementation is in line with best practices.

Penilaian dan Tindak Lanjut Atas *Assessment* GCG Tahun 2015

Penilaian penerapan implementasi GCG tahun 2015 dilakukan melalui *Self Assessment* GCG dengan menggunakan parameter penilaian Kementerian BUMN yaitu SK-16/S.MBU/2012 tanggal 06 Juni 2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi Atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara. Dalam rangka menjamin pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik, Indonesia Power membentuk Tim *Self- Assessment* untuk melakukan penilaian terhadap praktik dan penerapan tata kelola perusahaan yang baik di lingkungan Perusahaan berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Indonesia Power Nomor 166.K/020/IP/2015 Tentang Tim *Self-Assessment* Implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) Tahun 2015.

Dari hasil *assessment* GCG yang telah dilakukan ditahun 2016, terdapat tujuh rekomendasi yang mencakup aspek Direksi dan Dewan Komisaris, dimana dua rekomendasi telah selesai ditindak lanjuti dan lainnya masih dalam proses tindaklanjuti. Berikut aspek rekomendasi aspek Dewan Komisaris dan aspek Direksi dari hasil penilaian penerapan GCG tahun 2015:

Assessment and Follow-Up of GCG Assessment 2015

GCG implementation assessment in 2015 is carried out through GCG Self-Assessment using the parameter assessment of Ministry of State-Owned Enterprises, i.e. SK-16/S.MBU/2012 dated 6 June 2012 on Assessment Indicator/Parameter and Evaluation on Good Corporate Governance Implementation on State-Owned Enterprises. In order to ensure good corporate governance, Indonesia Power established a Self-Assessment Team to assess the practices and implementation of good corporate governance within the Company, based on the Directors' Decree of PT Indonesia Power Number 166.K/020/IP/2015 on Self-Assessment Team as Implementation of Good Corporate Governance (GCG) 2015.

From the GCG assessment result in 2016, there are seven recommendations, covering the aspects of Board of Directors and Board of Commissioners, in which the two recommendations have been followed up and the rest are still in the process of follow-up. The following is the recommendation for Board of Commissioners and Directors from the GCG implementation result 2015:

Tabel Rekomendasi *Self Assessment* GCG Tahun 2015
Table: Recommendation of GCG Self-Assessment 2015

No	Rekomendasi	Recommendation
	Aspek Dewan Komisaris Aspect: Board of Commissioners	
1	Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Dewan Komisaris belum secara eksplisit memasukkan Indikator Kinerja Utama dan Target, Sistem Pengendalian Intern, Manajemen Risiko, Sistem Teknologi Informasi Perusahaan, Pengadaan Barang dan Jasa, Mutu dan Pelayanan, Pengelolaan Anak Perusahaan dan Pengelolaan Pengaduan	Yearly Work Program and Budget of Board of Commissioners has not explicitly stated the Main Performance Indicator and Target of Internal Control System, Risk Management, Information Technology System, Procurement of Goods and Services, Quality and Services, Subsidiaries Management, and Reporting Management
2	Laporan pelaksanaan tugas Dewan Komisaris belum memuat hasil penilaian kinerja Dewan Komisaris.	Report of the Board of Commissioners' duties has not stated the performance assessment result of the Board of Commissioners.
	Aspek Direksi Aspect: Board of Directors	
1	Perusahaan belum melakukan evaluasi atas pengendalian intern pada tingkat entitas dalam rangka melindungi, mengamankan investasi dan aset perusahaan	The Company has not evaluated internal control on the entity level in order to protect and secure the Company's investment and assets.
2	Perusahaan belum menerbitkan *Internal Control Report*	Company has not published Internal Control Report
3	Pedoman/Tata Tertib Rapat Direksi belum mengatur Pembahasan Atas Tindak Lanjut Keputusan Dewan Komisaris	Guidelines of Directors' Meeting has not stipulated about the Follow Up Discussion on Board of Commissioners' Decision
4	Perusahaan belum menetapkan pedoman pemantauan tindak lanjut hasil rekomendasi hasil pengawasan ekstern (BPK, KAP dan Lain-lain).	The Company has not set monitoring guidelines for recommendation follow-up from the external audit (BPK, KAP, etc.).
5	Perusahaan belum mengatur : · Pengangkatan Sekretaris Perusahaan dengan Persetujuan Dewan Komisaris; · Uraian Tugas Sekretaris Perusahaan yang mencakup fungsi sebagai penghubung (*liaison officer*) dan menatausahakan serta menyimpan dokumen perusahaan, termasuk tetapi tidak terbatas pada Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus Dan Risalah Rapat Direksi, Rapat Dewan Komisaris Dan RUPS.	The Company has not managed: • Appointment of Corporate Secretary with approval of Board of Commissioners; • Job Description of Corporate Secretary, which includes the function as liaison officer and administration and maintenance of corporate documents, including but not limited to Shareholders List, Special List, and Minutes of Directors' Meeting, Meetings of the Board of Commissioners, and GMS.

Dalam meningkatkan kualitas penerapan GCG, Indonesia Power berupaya untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi dari hasil *assessment* GCG yang telah dilakukan pada tahun 2016.

In order to improve the quality of GCG implementation, Indonesia Power follows up the recommendation from the GCG assessment conducted in 2016.

TATA KELOLA PERUSAHAAN
Corporate Governance

Corporate Governance Perception Index (CGPI)

Indonesia Power secara aktif mengikuti Program Riset dan Pemeringkatan *Corporate Governance Perception Index* (CGPI) yang diselenggarakan oleh *The Indonesian Institute for Corporate Governance* (IICG) selama 3 (Tiga) kali yaitu tahun 2012, 2013 dan 2016. Pada tahun 2016, dilaksanakan CGPI untuk penilaian tahun 2015, yang mengangkat tema "*Good Corporate Governance* dalam Perspektif Keberlanjutan". Tema tersebut bertujuan untuk mendorong implementasi tata kelola perusahaan yang baik (GCG) ke arah keberlanjutan perusahaan dalam jangka panjang.

Penilaian CGPI meliputi beberapa tahapan antara lain: (1) *Self assessment*; (2) Kelengkapan dokumen; (3) Penyusunan makalah; dan (4) Observasi. Berdasarkan tahapan penilaian CGPI Tahun Penilaian 2015 yang dilaksanakan pada tahun 2016 sebagaimana tersebut di atas, Indonesia Power berhasil memperoleh peringkat PERUSAHAAN TERPERCAYA dengan skor 82,94 .

Corporate Governance Perception Index (CGPI)

Indonesia Power actively follows the Research and Rating Program of Corporate Governance Perception Index (CGPI), held by The Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG) for 3 (three) times, i.e. 2012, 2013, and 2016. In 2016, CGPI is conducted for the 2015 assessment, with the theme of "Good Corporate Governance in Sustainability Perspective". The theme is aimed to encourage the implementation of good corporate governance (GCG) towards long-term company's sustainability.

CGPI Assessment consists of a few stages, among others: (1) Self-assessment; (2) Document completeness; (3) Preparation of report; and (4) Observation. Based on the CGPI assessment in 2015, which was conducted in 2016 as mentioned above, Indonesia Power achieved the rating TRUSTED COMPANY with score of 82.94.

Tabel Hasil CGPI Perusahaan Tahun 2016
Table: Company's CGPI Result 2016

Self Assessment Self-Assessment			**Sistem Dokumentasi** Documentation System			**Skor CGPI** CGPI Score
Nilai Mark	Bobot Weight	Skor Score	Nilai Mark	Bobot Weight	Skor Score	82,94
82,74	30%	24,70	82,77	26%	21,42	
Makalah Report			**Observasi** Observation			Rating CGPI TERPERCAYA CGPI Rating TRUSTED COMPANY
Nilai Mark	Bobot Weight	Skor Score	Nilai Mark	Bobot Weight	Skor Score	
83,53	15%	12,75	83,00	29%	21,42	

Hasil CGPI Indonesia Power di atas menunjukan bahwa seluruh organ Perusahaan telah berkomitmen dan melakukan upaya yang bersungguh-sungguh dan konsisten dalam menegakkan GCG dan keberlanjutan Perusahaan yang menjunjung tinggi martabat kemanusiaan, melestarikan lingkungan alam serta menguntungkan secara ekonomi.

The CGPI result of Indonesia Power demonstrates that every organ in the Company is committed and has made genuine and consistent efforts in upholding GCG and Company's sustainability, which uphold high human dignity, preserve the environment, and produce profit economically.

Indonesia Power memandang, *sustainability* bukan hanya sebagai upaya memastikan tujuan akhir implementasi GCG di Perusahaan namun juga langkah awal pemetaan berbagai inisiatif dalam mendukung tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*).

Sinergi Tata Kelola Perusahaan Dengan Anak Perusahaan

Indonesia Power meyakini bahwa sinergi dan kerjasama yang baik antara Perusahaan dengan Anak Perusahaan mampu menjaga kesinambungan bisnis Perusahaan. Oleh karena itu, Perusahaan terus berupaya menjaga kesinambungan usaha secara jangka panjang yaitu dengan menambah portofolio pengembangan usaha antara lain melalui pendirian anak-anak perusahaan. Arah dan strategi pengembangan usaha Anak Perusahaan tersebut diselaraskan dengan arah dan strategi utama Indonesia Power serta memperhatikan arah dan strategi PT PLN (Persero) sebagai peluang pengembangan usahanya. Indonesia Power berharap sinergi antara Anak Perusahaan dan Afiliasi dari Anak Perusahaan dengan induk perusahaan dapat terjalin dengan baik dan tentu dapat terus bertumbuh dan berkembang sehingga mampu mendukung perkembangan Perusahaan dalam jangka panjang.

Indonesia Power melakukan proses penyelarasan prinsip-prinsip dan struktur pelaksanaan GCG pada Anak Perusahaan agar sejalan dengan pelaksanaan GCG Indonesia Power. Salah satu bentuk implementasinya adalah dengan menjadikan hasil penilaian implementasi GCG sebagai bagian dari *Key Performance Indicator* (KPI) Anak Perusahaan. Pada tahap awal, hal tersebut berlaku bagi tiga Anak Perusahaan, yaitu PT Cogindo DayaBersama (CDB), PT Artha Daya Coalindo (ADC) dan PT Indo Pusaka Berau (IPB). Berikut skor penilaian GCG masing-masing anak Perusahaan pada tahun 2016:

Indonesia Power considers sustainability not only as an effort to ensure the target of Company's GCG implementation but also as the first step of mapping in numerous initiatives in supporting Sustainable Development Goals.

Corporate Governance Synergy with Subsidiaries

Indonesia Power believes the synergy and good cooperation between the Company and Subsidiaries can maintain the Company's business continuity. Therefore, the Company strives to maintain the long-term business continuity, i.e. by adding portfolio of businesses development such as subsidiaries establishment. Direction and development strategy for Subsidiaries is aligned with the main direction and strategy of Indonesia Power, and taking into account the direction and strategy of PT PLN (Persero) as the business development opportunity. Indonesia Power expects the synergy between Subsidiaries and its affiliation with holding company can be well established and grow and develop so as to support the Company's development in the long term.

Indonesia Power undertook the process to align principles and implementation structures of GCG in the Subsidiaries so it shall be in line with the GCG implementation in Indonesia Power. One of the implementation forms is to make the GCG implementation assessment as part of Key Performance Indicator (KPI) for Subsidiaries. In the initial stage, it applies to three Subsidiaries, i.e. PT Cogindo DayaBersama (CDB), PT Artha Daya Coalindo (ADC), and PT Indo Pusaka Berau (IPB). Below is the GCG assessment score of every subsidiary of the Company in 2016:

TATA KELOLA PERUSAHAAN
Corporate Governance

Tabel Skor Penilaian GCG Anak Perusahaan Tahun 2016
Table: GCG Assessment Score for Subsidiaries in 2016

No	Aspek Pengujian Tested Aspect	ADC			CDB			IPB		
		Bobot Weight	Skor Score	Capaian Achieved (%)	Bobot Weight	Skor Score	Capaian Achieved (%)	Bobot Weight	Skor Score	Capaian Achieved (%)
1	Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Secara Berkelanjutan Commitment on Implementing Sustainable Good Corporate Governance	5,63	5,554	98,650	5,63	5,034	89,413	7,00	3,993	57,050
2	Pemegang Saham dan RUPS/Pemilik Modal Shareholders and GMS/Capital Owners	9,00	8,650	96,113	8,65	8,084	93,417	9,00	8,477	94,191
3	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Board of Commissioners/Supervisory Agency	33,50	26,558	79,288	33,50	30,497	91,048	33,50	28,835	86,084
4	Direksi Board of Directors	34,38	29,125	84,719	34,38	32,161	93,551	34,38	27,243	79,247
5	Pengungkapan Informasi dan Transparansi Disclosure of Information and Transparency	9,00	5,397	59,965	9,00	5,634	62,599	9,00	6,901	76,674
6	Aspek Lainnya Other Aspects	5,00	0,000	0,000	5,00	0,000	0,000	5,00	0,000	0,000
Skor Keseluruhan Overall Score		96,50	75,284	78,011	96,158	81,411	84,663	97,87	75,450	77,088
Klasifikasi Kualitas Penerapan GCG **Classification of GCG Implementation Quality**			**Baik** **Good**			**Baik** **Good**			**Baik** **Good**	

Dalam mendukung pengelolaan Perusahaaan dan pencapaian kinerja yang ditetapkan, Indonesia Power terus melakukan pemantauan terhadap peningkatan implementasinya. Hal itu dilakukan di antaranya melalui pengawasan terhadap tindak lanjut rekomendasi hasil *assessment* yang telah dilakukan. Dengan begitu, Indonesia Power berharap implementasi praktik GCG di Perusahaan baik di tingkat Korporat, Anak Perusahaan serta Unit Perusahaan dapat ditingkatkan sesuai dengan *best practice* tata kelola perusahaan.

In supporting the Company's management and targeted performance achievement, Indonesia Power keeps monitoring the implementation improvement. This is conducted through supervision of recommendation follow up on the assessment result. Therefore, Indonesia Power expects that the GCG practices implementation in the Company, be it in the Corporate, Subsidiaries, as well as Company's Unit can be improved in accordance with corporate governance best practice.

STRUKTUR, KEBIJAKAN DAN MEKANISME TATA KELOLA PERUSAHAAN

Structure, Policy, and Mechanism of Corporate Governance

Indonesia Power telah memiliki berbagai perangkat pendukung sebagai panduan penerapan GCG dan secara konsisten melakukan penyesuaian terhadap regulasi baru yang berkaitan dengan GCG agar relevan dan sesuai dengan kondisi organisasi, strategi Perusahaan dan peraturan yang berlaku.

Indonesia Power has many supporting devices as guidelines in GCG implementation, and is consistently adjusting to new regulation related to GCG so the GCG is relevant and in line with the organization's condition, Company's strategies, laws and regulations.

Struktur Tata Kelola Perusahaan

Indonesia Power telah memiliki struktur tata kelola yang diperlukan, meliputi Organ Utama serta Organ Pendukung. Organ Utama Perusahaan meliputi Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris dan Direksi. Adapun Organ Pendukung Perusahaan meliputi Komite Audit, Komite Manajemen Risiko, Sekretaris Perusahaan, Satuan Audit Internal dan Satuan Manajemen Risiko, Mutu dan Kinerja. Organ Pendukung yang berorientasi pada pengelolaan isu keberlanjutan diantaranya adalah Bidang Komunikasi Korporat yang membawahi Manajer *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang bertanggung jawab dalam menyelaraskan program CSR untuk menjamin *sustainability* Perusahaan, melakukan analisa *stakeholders*, melaksanakan program CSR mulai dari perencanaan, pendampingan sampai dengan evaluasi pelaksanaan kegiatan CSR.

Corporate Governance Structure

Indonesia Power has the necessary governance structure, including Main Organ and Supporting Organs.The Company's Main Organ consists of General Meeting of Shareholders (GMS), Board of Commissioners, and Board of Directors. The Company's Supporting Organ consists of Audit Committee, Risk Management Committee, Corporate Secretary, Internal Audit Unit, and Risk Management, Quality, and Performance Unit.Supporting Organs that are oriented to manage sustainability issues, among others, are Corporate Communication Field, that oversees Manager of Corporate Social Responsibility (CSR) who is responsible for aligning CSR Program to ensure Company's sustainability, perform stakeholders' analysis, conduct CSR program from the preparation, mentoring, until evaluation of CSR activity.

STRUKTUR, KEBIJAKAN DAN MEKANISME TATA KELOLA PERUSAHAAN

Structure, Policy, and Mechanism of Corporate Governance

Adapun struktur dan mekanisme tata kelola Indonesia Power digambarkan sebagai berikut:

The structure and mechanism of Indonesia Power's governance are depicted as follow:

Gambar Struktur Tata Kelola Perusahaan
Figure: Corporate Governance Structure

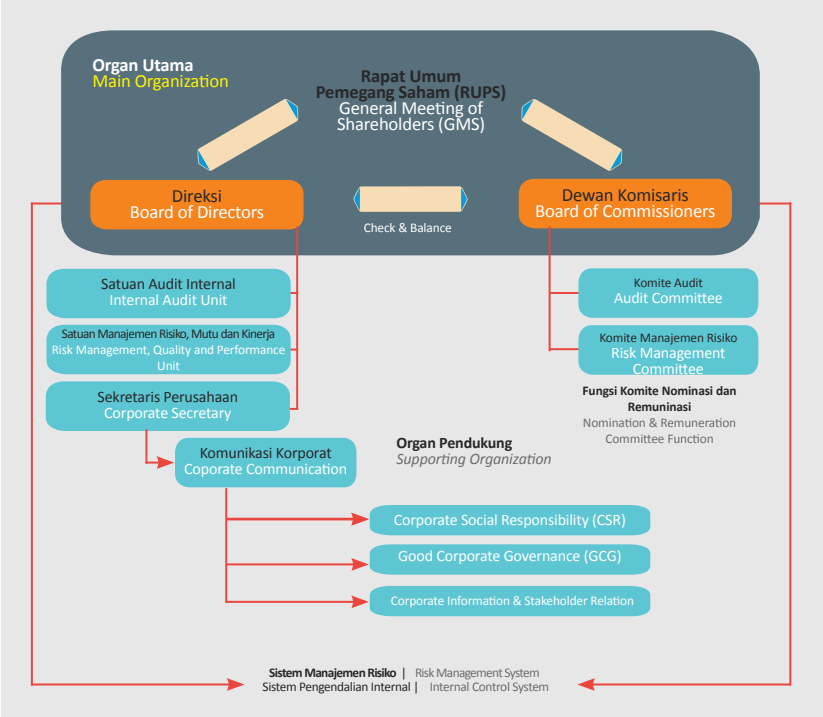

Kebijakan Pendukung Penerapan Tata Kelola Perusahaan

Kebijakan Pendukung Penerapan GCG Perusahaan merupakan perangkat ketentuan dan prosedur yang menjadi pedoman dalam menunjang implementasi GCG di lingkungan Perusahaan. Kebijakan tersebut dirancang sesuai dengan ketentuan dan kondisi Perusahaan serta ditinjau secara berkala untuk dilakukan pemutakhiran seiring dengan perkembangan Perusahaan dan peraturan yang berlaku. Dalam melaksanakan tata kelola perusahaan dan operasional bisnisnya, Indonesia Power mengacu pada tata urutan kebijakan Perusahaan yang terdiri dari 5 (lima) tingkatan sebagai berikut:

Supporting Policy for Corporate Governance Implementation

Supporting Policy for Corporate Governance Implementation is a set of regulation and procedures as the guide for supporting GCG implementation within the Company. The policy is designed in accordance with the terms and conditions of the Company, and it is reviewed periodically to update the policy in line with Company's development and prevailing regulations. In conducting corporate governance and business operations, Indonesia Power refers to Company's policy sequences, which consist of 5 (five) levels as follow:

Gambar Tata Urutan Kebijakan Perusahaan
Figure: Company's Policy Sequences

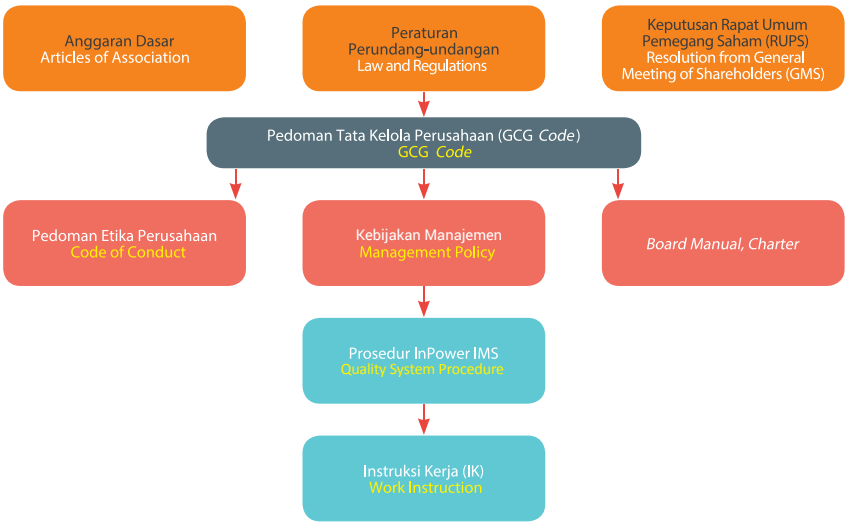

Kebijakan Tata Kelola Perusahaan antara lain diwujudkan melalui serangkaian kebijakan internal antara lain sebagai berikut:

Corporate Governance Policy is realized through sets of internal policies, such as:

Pedoman Tata Kelola Perusahaan (*GCG Code*)

Indonesia Power telah memiliki Pedoman Tata Kelola Perusahaan (*GCG Code*) yang merupakan arahan strategis Direksi dan Dewan Komisaris dalam penerapan prinsip-prinsip GCG, nilai-nilai Perusahaan, Visi dan Misi yang menjadi acuan bagi Dewan Komisaris, Direksi, Manajemen dan Pegawai dalam mengelola Perusahaan. GCG *Code* pertama kali disusun pada tahun 2002, yang kemudian mengalami penyempurnaan pada tahun 2013 dan 2016 untuk selanjutnya ditetapkan dalam Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris Nomor 242.K/010/IP/2016 dan Nomor 16.K/DEKOM-IP/2016 tanggal 16 Desember 2016. Pedoman ini merupakan panduan GCG yang diperluas, yang menjadi aspek pengujian dalam menyusun dan mengeluarkan keputusan dan peraturan yang diperlukan, bersifat *living document* yang perlu terus dikaji secara berkala yang disesuaikan dengan perkembangan dan isu-isu internal serta eksternal Perusahaan.

GCG Code

Indonesia Power has GCG Code, which is a strategic directive of Board of Directors and Board of Commissioners in implementing GCG principles, Company's value, and Vision and Mission as references for Board of Commissioners, Directors, Management, and Employees in managing the Company. GCG Code was first compiled in 2002, which then was refined in 2013 and 2016. Furthermore, it is set forth in the Joint Decree of Board of Directors and Board of Commissioners Number 242.K/010/IP/2016 and Number 16.K/DEKOM IP/2016 dated 16 December 2016. The code is an expanded GCG guidelines, which becomes the testing aspects in compiling and making necessary decision and regulations, is a living document that needs to be reviewed periodically to be adjusted with update and internal and external issues of the Company.

STRUKTUR, KEBIJAKAN DAN MEKANISME TATA KELOLA PERUSAHAAN

Structure, Policy, and Mechanism of Corporate Governance

Pedoman Etika Perusahaan (*Code of Conduct*)

Perusahaan memandang bahwa untuk mencapai keberhasilan dalam jangka panjang, pelaksanaan GCG perlu dilandasi oleh integritas yang tinggi. Pedoman Etika Perusahaan merupakan acuan dalam melakukan interaksi di antara manajemen, pegawai serta para pemangku kepentingan (*stakeholder*) sesuai dengan nilai dan budaya perusahaan yang diharapkan serta prinsip-prinsip GCG. Penerapan *Code of Conduct* merupakan bagian terpenting dalam implementasi tata kelola perusahaan yang sehat serta penguatan nilai dan budaya yang dimiliki Perusahaan.

Uraian lebih lengkap mengenai Pedoman Etika Perusahaan dijelaskan pada bab Tata Kelola Perusahaan bagian Pedoman Etika Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

Code of Conduct

The Company considers that to achieve long-term success, the GCG implementation needs to be based on high integrity. Code of Conduct is a reference in interacting with the management, employees, as well as stakeholders, in line with the corporate value and culture expected, as well as GCG principles. The implementation of Code of Conduct is the most important part in good corporate governance as well as the strengthening of Company's value and culture.

The complete description on Code of Conduct is on the chapter Good Corporate Governance sub-chapter Code of Conduct in this annual report.

Pedoman Kerja Dewan Komisaris dan Direksi (*Board Manual*)

Dewan Komisaris dan Direksi sebagai organ utama Perusahaan memerlukan pedoman kerja yang mengatur tugas dan tanggung jawab masing-masing beserta hubungan kerja keduanya sesuai dengan prinsip-prinsip GCG. Pedoman Kerja Dewan Komisaris dan Direksi (*Board Manual*) disahkan melalui Surat Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris Indonesia Power Nomor 006.SK/DEKOMIP/2013 dan tanggal 21 November 2013. *Board Manual* merupakan dokumen yang menjelaskan secara garis besar hak, kewajiban, tugas dan wewenang Dewan Komisaris dan Direksi sebagai organ utama Perusahaan serta proses hubungan dan fungsi antara kedua organ tersebut. *Board Manual* ini merupakan salah satu *soft structure Good Corporate Governance*, sebagai penjabaran dari Pedoman GCG yang mengacu pada Anggaran Dasar Perusahaan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku

Board Manual for Board of Commissioners and Directors

Board of Commissioners and Directors as the Company's main organs, require work guidelines to regulate their respective duties and responsibilities, and their working relationships in accordance with GCG principles. Board Manual for Board of Commissioners and Directors is ratified through Joint Decree of Board of Directors and Board of Commissioner of Indonesia Power Number 006. SK/DEKOMIP/2013 dated 21 November 2013. Board Manual is a document outlining the rights, responsibilities, Duties, and power of Board of Commissioners and Directors as Company's main organs, as well as the relationship and functions between those two organs. Board Manual is one of the soft structures of Good Corporate Governance, as anelaboration of GCG Guidelines that refer to Company's Articles of Association and prevailing rules and legislations.

Kebijakan *Whistle Blowing System* (WBS)

Dalam rangka memastikan praktik bisnis yang beretika, sehat dan berintegritas, Indonesia Power telah memiliki dan menerapkan Kebijakan Sistem Pelaporan Pelanggaran sejak tahun 2011 berdasarkan Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi Nomor 136.K/020/IP/2011 dan Nomor 011.SK/ DEKOM-IP/2011 tentang Kebijakan Pengelolaan Pengaduan Pelanggaran (*Whistle-Blowing System*/WBS) Indonesia Power. Kebijakan WBS menjadi bagian dari kerangka kebijakan pendukung GCG Perusahaan. Adapun lingkup Kebijakan WBS mengatur mulai dari mekanisme penyampaian laporan (pihak yang bertanggung jawab menerima laporan, kerahasiaan dan perlindungan pelapor, komunikasi dengan pelapor), pelaksanaan verifikasi dan investigasi, sampai dengan laporan status perkembangan laporan yang telah disampaikan serta apresiasi dan sanksi bagi pelakunya.

Whistle Blowing System (WBS) Policy

In order to ensure ethical and healthy business practices, and of high integrity, Indonesia Power has owned and implemented Whistle Blowing System since 2011 based on Joint Decree of Board of Commissioners and Directors Number 136.K/020/IP/2011 and Number 011.SK/DEKOM-IP/2011 on Whistle-Blowing System/ WBS Policy in Indonesia Power. WBS Policy is a part of the Company's GCG supporting policy. The WBS Policy scope includes the mechanism of reporting (the party who is responsible for receiving the report, confidentiality, and protection of the reporter, communication with the reporter), verification and investigation, and status of the report made as well as appreciation and sanctions for the person that is being reported.

Pedoman Benturan Kepentingan

Benturan kepentingan adalah suatu keadaan dimana terdapat konflik antara kepentingan ekonomi Perusahaan dengan kepentingan ekonomi pribadi Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham. Pada dasarnya Perusahaan mengatur ketentuan benturan kepentingan dengan disusunnya Pedoman Benturan Kepentingan (*Conflict of Interest*) yang disahkan melalui Keputusan Direksi Nomor 166.K/10/IP/2014 tanggal 10 Oktober 2014. Pedoman tersebut bertujuan agar potensi benturan kepentingan tersebut ditangani sesuai dengan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik sehingga tetap menjunjung tinggi etika dan praktik bisnis yang sehat dan mencegah kecurangan serta penyimpangan perilaku lainnya.

Conflict of Interest Guidelines

Conflict of interest is a condition where there is aconflict between the economic interest of the Company with theprivate economic interest of the Directors, Board of Commissioners, and Shareholders. In essence, Company regulates the policy on conflict of interest by compiling Conflict of Interest Guidelines that has been ratified through Directors' Decree Number 166.K/10/IP/2014 dated 10 October 2014. The guidelines is aimed to ensure that the potential of conflict of interest is handled in lien with the Good Corporate Governance principles so it upholds sound business ethics and practices and prevents fraud and other behavioral violations.

STRUKTUR, KEBIJAKAN DAN MEKANISME TATA KELOLA PERUSAHAAN

Structure, Policy, and Mechanism of Corporate Governance

Pedoman Pengendalian Gratifikasi

Untuk menghindari terjadinya tindakan dan praktik yang mengarah pada tindak pidana suap, Indonesia Power telah menetapkan Pedoman Pengendalian Gratifikasi serta prosedur pelaporan kemungkinan adanya Gratifikasi yang disahkan melalui Keputusan Direksi Nomor 165.K/1010/IP/2014 tanggal 10 Oktober 2014 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Perusahaan. Program ini merupakan tindak lanjut dari deklarasi "Indonesia Power Bersih" yang dilaksanakan pada tahun 2014. Sedangkan acuan IP Bersih adalah program yang dikeluarkan oleh PT PLN (Persero) sebagai entitas induk, yaitu: "PLN Bersih". Pedoman Pengendalian Gratifikasi terdiri dari landasan hukum pengaturan Gratifikasi, cara mengidentifikasi Gratifikasi, penerimaan, pemberian, penolakan, pelaporan, pemantauan dan sanksi atas penyimpangan ketentuan Gratifikasi. Pedoman Pengendalian Gratifikasi ini mengikat dan mengatur segenap insan Indonesia Power dalam menjalankan kegiatan usaha, sehingga diharapkan dengan adanya pedoman tersebut dapat membentuk lingkungan Perusahaan yang terkendali dalam penanganan Gratifikasi sehingga prinsip-prinsip keterbukaan dan akuntabilitas dapat terlaksana dengan baik.

Gratification Control Guidelines

To prevent any actions and practices leading to a bribery crime, Indonesia Power sets Gratification Control Guidelines and reporting procedures on the possibility of Gratification that is ratified through Directors' Decree Number 165.K/1010/IP/2014 dated 10 October 2014 on Gratification Control Guidelines within the Company. This program is a follow-up of declaration "Indonesia Power Bersih" carried out in 2014. The reference for IP Bersih is a program proposed by PT PLN (Persero) as the parent company, i.e.:"PLN Bersih".Gratification Control Guidelines consists of the legal basis of Gratification arrangement, how to identify Gratification, acceptance, granting, rejection, reporting, monitoring, and sanctions on violations of Gratification regulations. Gratification Control Guidelines binds and regulates every Indonesia Power personnel in carrying out the business activities, hence it is expected that the guidelines may cultivate controlled Company's environment in handling Gratification so the transparency and accountability principles are conducted properly.

Pedoman Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)

Indonesia Power telah memiliki kebijakan tentang kepatuhan terhadap penyampaian LHKPN yang tertuang dalam Keputusan Direksi Nomor 173.K/010/IP/2013 tanggal 22 Oktober 2013 tentang Laporan Harta Kekayaan Pejabat Perusahaan (LHKPP) dl lingkungan PT Indonesia Power dan Keputusan Direksi Nomor 161.K/020/IP/2014 tanggal 7 Oktober 2014 tentang Pedoman Indonesia Power Bersih. Dalam Keputusan Direksi Nomor 161.K/020/IP/2014 tanggal 7 Oktober 2014 pasal 7 ayat 1 disebutkan bahwa Direksi Perusahaan dan seluruh pegawai PT PLN (Persero) yang ditugaskaryakan ke PT Indonesia Power pada jenjang jabatan Eksekutif Utama, Eksekutif Senior dan Eksekutif atau pegawai PT PLN (Persero) yang ditugaskaryakan oleh PT Indonesia Power ke perusahaan terafiliasi PT PLN (Persero) pada jenjang binaan Eksekutif Utama,

Management Wealth Report (LHKPN) Guidelines

Indonesia Power has a policy on compliance with the LHKPN submission that is stipulated on Directors' Decree Number 173.K/010/IP/2013 dated 22 October 2013 on Company's Executives' Official Wealth Report (LHKPP) within PT Indonesia Power, and Directors' Decree Number 161.K/020/IP/2014 dated 7 October 2014 on Indonesia Power Bersih Guidelines. In Directors' Decree Number 161.K/020/IP/2014 dated 7 October 2014, Article 7 paragraph 1 stated the Company's Directors and every employee of PT PLN (Persero) who are assigned to PT Indonesia Power on the level of Main Executives, Senior Executives, and Executives, or employees of PT PLN (Persero) who are assigned by PT Indonesia Power to the affiliated company of PT PLN (Persero) on the level of Main Executives,

Eksekutif Senior dan Eksekutif wajib membuat Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) setiap dua tahun sekali. Penyampaian LHKPN dilakukan oleh pejabat yang bersangkutan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Selanjutnya, laporan tersebut dipublikasikan di Perusahaan sesuai dengan format dari KPK. Penyampaian LHPN juga sebagai bentuk komitmen dan kepatuhan Perusahaan terhadap SK PLN Bersih PT PLN (Persero) Nomor 0060.K/DIR/2014 tanggal 18 Februari 2014 yang dikeluarkan oleh PT PLN (Persero) selaku Pemegang Saham.

Senior Executives, and Executives shall compile Management Wealth Report (LHKPN) once in two years. LHKPN submission is conducted by concerned officials to Corruption Eradication Commission (KPK). Furthermore, the report is published in the Company in line with the format from KPK. LHKPN submission is also in the form of Company's commitment and compliance with Decree of PLN Bersih PT PLN (Persero) Number 0060.K/DIR/2014 dated 18 February 2014 which is published by PT PLN (Persero) as Shareholders.

Mekanisme Tata Kelola Perusahaan

Indonesia Power telah menjalankan tata kelola perusahaan dalam berbagai proses mulai dari rekrutmen, sistem pengendalian internal, pengelolaan risiko, evaluasi kinerja, pengambilan keputusan sampai dengan sistem *reward* dan *punishment*. Indonesia Power selalu meminta masukan dari pihak eksternal dengan melakukan assessment GCG secara independen sehingga dapat meningkatkan kualitas pelaksanaan GCG. Secara keseluruhan, mekanisme penerapan tata kelola di Perusahaan telah berlandaskan pada prinsip-prinsip dasar tata kelola yaitu transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), tanggung jawab (*responsibility*), independensi (*independency*) serta kewajaran dan kesetaraan (*fairness*).

Corporate Governance Mechanism

Indonesia Power has performed corporate governance in numerous process, starting from the recruitment, internal control system, risk management, performance evaluation, decision-making, to the reward and punishment system. Indonesia Power always asks for input from external parties by conducting GCG assessment independently in order to improve the GCG implementation quality. Overall, the corporate governance mechanism in the Company is based on the corporate basic principles, i.e. transparency, accountability, responsibility, independence, and fairness.

INFORMASI MENGENAI PEMEGANG SAHAM UTAMA DAN PENGENDALI

Information on Major Shareholders and Controllers

PT PLN (Persero) merupakan pemegang saham utama dan pengendali Indonesia Power dengan kepemilikan saham yang terdiri dari 1 lembar Saham Seri 1 dan 5.215.647.599 lembar Saham Seri 2. Pemegang saham utama dan pengendali diwakili oleh Direktur Utama PT PLN (Persero), yang secara teknis berada di bawah Sekretaris Perusahaan cq. Fungsi Hubungan Investor. Adapun skema pemegang saham utama dan pengendali Perusahaan adalah sebagai berikut:

PT PLN (Persero) is the major shareholder and controller of Indonesia Power, with shareholder consists of 1 Share Series 1 and 5,215,647,599 Shares Series 2. The major shareholder and controller are represented by President Director of PT PLN (Persero), who technically is reporting directly to the Corporate Secretary cq. Investor Relation Function.The scheme of the Company's major shareholder and controller is as follows:

Skema Pemegang Saham Utama dan Pengendali Perusahaan
Scheme of the Company's Major Shareholder and Controller

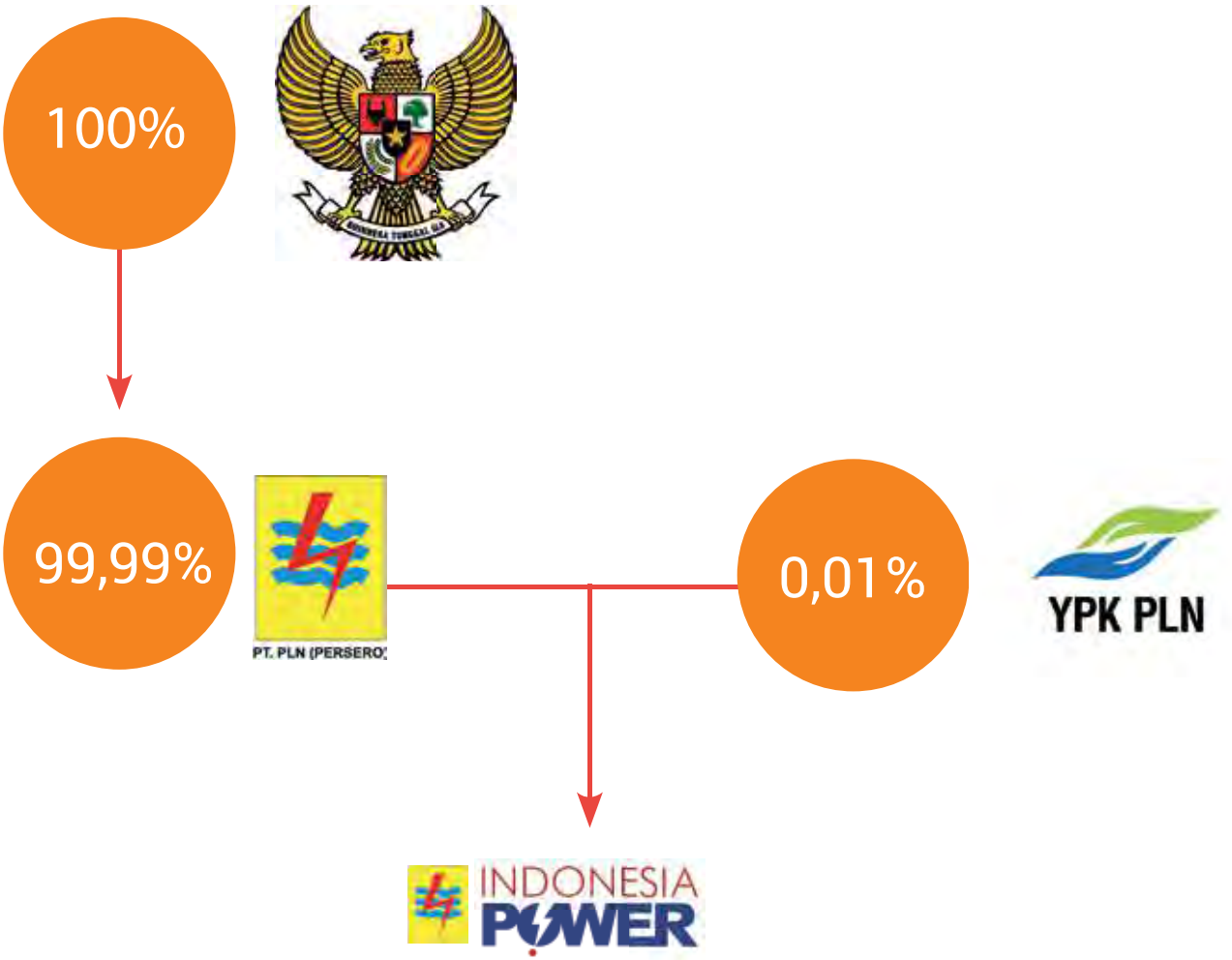

Uraian lengkap terkait Informasi Pemegang Saham Utama dan/atau Pengendali telah dijelaskan pada Bab Profil Perusahaan pada laporan tahunan ini.

The full description related to Information on Major Shareholders and/or Controller has been described in the chapter Company Profile of this annual report.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)

General Meeting of Shareholders (GMS)

RUPS merupakan lembaga yang memiliki wewenang tertinggi dalam organisasi tata kelola Perusahaan sekaligus merupakan forum utama bagi Pemegang Saham untuk menggunakan hak dan wewenangnya terhadap manajemen Perusahaan.

GMS is an organ with the highest authority in the Company's governance organization, as well as the main forum for Shareholders to exercise their rights and authority over the management of the Company.

RUPS adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris, dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang atau anggaran dasar. Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, penyelenggaraan RUPS terdiri dari RUPS Tahunan dan RUPS Sirkuler.

1. RUPS Tahunan adalah Rapat Umum Pemegang Saham yang diadakan setiap tahun untuk pengesahan RKAP, RJPP dan Laporan Tahunan yang telah disusun oleh Direksi;
2. RUPS Sirkuler diadakan apabila: (a) Setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perusahaan sesuai Pasal 22 Anggaran Dasar; (b) Dianggap perlu oleh Direksi dan/atau Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali Anggaran Dasar menentukan suatu jumlah yang lebih kecil; (c) RUPS Sirkuler dapat dilakukan secara *on paper* (Sirkuler) yaitu pengambilan putusan oleh Pemegang Saham tanpa melakukan rapat secara fisik.

GMS is an organ in the Company that has the rights not granted to the Directors or Board of Commissioners, within the scope stipulated in the law or articles of association. Based on the Company's Articles of Association, GMS consists of Annual GMS and Circular GMS.

1. Annual GMS is a General Meeting of Shareholders held annually to ratify Work Program and Budget (WP&B), Long Term Corporate Plan, and Annual Report compiled by the Directors;
2. Circular GMS is held if:(a) At any time, based on the Company's needs or interests in line with Article 22 of Articles Of Association; (b) Considered necessary by Directors and/or Board Of Commissioners and/or Shareholders that together represent 1/10 (one tenth) or more of the total shares with voting rights, with the exception that Articles Of Association set a smaller amount; (c) GMS shall be conducted on paper (Circular) i.e. decision making by Shareholders without meeting physically.

Hak dan Wewenang RUPS

Berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) memiliki wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris, meliputi:

1. Mengangkat dan memberhentikan anggota Dewan Komisaris dan Direksi
2. Mengevaluasi kinerja Dewan Komisaris dan Direksi
3. Menetapkan pengaturan mengenai rangkap jabatan bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris
4. Mengesahkan perubahan Anggaran Dasar
5. Memberikan persetujuan atas laporan tahunan
6. Menetapkan alokasi penggunaan laba
7. Menunjuk akuntan publik
8. Menetapkan jumlah dan jenis kompensasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi perusahaan.

Rights and Authorities of GMS

Based on the Company's Articles of Association, General Meeting of Shareholders (GMS) has rights not granted to the Directors and Board of Commissioners, which cover:

1. Appointing and dismissing member of Board of Commissioners and Directors
2. Evaluating Board of Commissioners' and Board of Directors' performance
3. Establishing regulation related to dual positions of member of Directors and Board of Commissioners
4. RatifyingAmendment of Articles of Association
5. Granting approval on annual report
6. Establishing allocation of profit
7. Appointing public accountant
8. Determining total and type of compensation for Company's Board of Commissioners and Directors.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)
General Meeting of Shareholders (GMS)

Keputusan yang diambil dalam RUPS harus didasarkan pada kepentingan usaha Perusahaan. RUPS dan/atau Pemegang Saham tidak dapat melakukan intervensi terhadap tugas, fungsi dan wewenang Dewan Komisaris dan Direksi dengan tidak mengurangi wewenang RUPS untuk menjalankan haknya sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan. Termasuk dalam wewenang itu, melakukan penggantian atau pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan atau Direksi.

Decisions being made in the GMS are based on the interests of the Company.GMS and/or Shareholders cannot intervene on the duties, functions, and authorities of Board of Commissioners and Directors without prejudice to the authorities of GMS to exercise its right in accordance with Articles of Association and laws and regulations. Appointing or dismissing amember of Board of Commissioners and/or Directors is included in the authorities.

Pelaksanaan RUPS Tahun 2016

Sepanjang tahun 2016, Perusahaan telah menyelenggarakan 2 (dua) kali Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan dan RUPS Sirkuler sebanyak 12 (dua belas) kali. Berikut uraian sepanjang tahun RUPS tahun 2016 yang dilaksanakan Perusahaan.

GMS 2016

Throughout 2016, the Company has held 2 (two) Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) and 12 (twelve) GMS Circular. The following is the details of GMS held in 2016 by the Company.

Tabel Penyelenggaran RUPS Tahunan Tahun 2016
Table: Annual GMS 2016

RUPS Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2016 **Waktu pelaksanaan: 19 Januari 2016** **Tanggal Pemanggilan RUPS: 20 November 2015** **Tanggal Risalah RUPS: 19 Januari 2016** GMS to Ratify Corporate Work Plan and Budget (WP&B) Date: January 19, 2016 Summon Date of GMS: November 20, 2015 Date of Minutes of GMS: January 19, 2016	
Agenda : Agenda :	**Keputusan :** Decisions :
1. Persetujuan dan Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2016	RUPS memutuskan menyetujui dan mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2016 dengan pokok-pokok sasaran sebagai berikut : 1. Laba (Rugi) setelah Pajak Tahun Buku 2016 dianggarkan sebesar Rp1.971,91 Miliar. 2. Neraca per 31 Desember 2016 dianggarkan ditutup dengan jumlah Aktiva/Pasiva masing-masing sebesar Rp54.985,26 Miliar. 3. Investasi Tahun Buku 2016 dianggarkan sebesar Rp20.488,14 Miliar dengan Disburse sebesar Rp3.504,93 Miliar.
Approval and Ratification of Corporate Work Plan and Budget 2016	GMS decided to approve and ratify Corporate Work Plan and Budget (WP&B) 2016, with main targets as follow: 1. Profit (Loss) after Tax of Fiscal Year 2016 is budgeted at Rp1,971.91 Billion. 2. Balance sheet per 31 December 2016 is budgeted to close with total assets/liabilities of Rp54,985.26 Billion respectively. 3. Investment in the Fiscal Year 2016 is budgeted at Rp20,488.14 Billion with thedisbursement of Rp3,504.93 Billion.

Agenda : Agenda :	Keputusan : Decisions :
2. Persetujuan dan Pengesahan Kontrak Manajemen / *Key Performance Indicator* Tahun 2016	1. RUPS menyetujui dan mengesahkan Kontrak Manajemen /*Key Performance Indicator* (KPI) 2016 antara Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham PT Indonesia Power. 2. Kontrak Manajemen/Key Performance Indicator (KPI) 2016 PT Indonesia Power merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Risalah ini.
Approval and Ratification of Management Contract / Key Performance Indicator 2016	1. GMS approved and ratified Management Contract / Key Performance Indicator (KPI) 2016 between the Directors, Board of Commissioners, and Shareholders of PT Indonesia Power. 2. Management Contract/Key Performance Indicator (KPI) 2016 PT Indonesia Power is an integral part of this Minutes.

RUPS Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2015
Waktu Pelaksanaan: 7 Juni 2016
Tanggal Pemanggilan RUPS: 11 Mei 2016
Tanggal Risalah RUPS: 7 Juni 2016
GMS to Approve Annual Report and Ratify Financial Statements Fiscal Year 2015
Date: June 7, 2016
Summon Date of GMS: May 11, 2016
Date of Minutes of GMS: June 7, 2016

Agenda : Agenda :	Keputusan : Decisions :
1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2015 dan Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2015	1. RUPS menyetujui dan menerima Laporan Tahunan mengenai Keadaan dan Jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2015 yang terdiri atas Laporan Keuangan, Laporan Evaluasi Kinerja dan Laporan Kepatuhan. 2. RUPS menyetujui dan menerima Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2015. 3. RUPS mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2015 yang memuat Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian, Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian, Lporan Arus Kas Konsolidasian dan Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian beserta penjelasannya yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan dengan pendapat "Wajar Tanpa Pengecualian" sebagaimana dimaksud dalam laporannya Nomor A160414006/DC2/HSH/2016, Tanggal 14 April 2016. 4. RUPS memberikan pembebasan sepenuhnya (*Volledig Acquit Et De Charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan sesuai dengan tanggung jawab dan tindakan dalam bidang masing-masing yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2015, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta termuat dalam Laporan Keunagna yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan. Pengesahan dan pembebasan tanggung jawab tersebut tidak melepaskan tanggung jawab hukum terhadap Direksi dan/atau Dewan Komisaris apabila Laporan yang diungkapkan tersebut terbukti melanggar ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku dan/atau ternyata dikemudian hari terbukti adanya tindakan yang menyimpang dan/atau merugikan Perseroan.
Approval and Ratification of Company's Financial Statements Fiscal Year 2015 and Supervisory Tasks Report of the Board of Commissioners throughout Fiscal Year 2015	1. GMS approved and accepted Annual Report on the Conditions of Company throughout Fiscal Year 2015, which consists of Financial Statements, Performance Evaluation Report, and Compliance Report. 2. GMS approved and accepted Supervisory Tasks Report of the Board of Commissioners throughout Fiscal Year 2015.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)

General Meeting of Shareholders (GMS)

Agenda : Agenda :	Keputusan : Decisions :
	3. GMS ratified Company's Financial Statements for the Fiscal Year 2015, which consists of Consolidated Statements of Financial Position, Consolidated Statements of Comprehensive Profit or Loss, Consolidated Statements of Cash Flows, and Consolidated Statements of Changes in Equity, and their explanations, which have been audited by Public Accounting Firm Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan, with "Fair with no Exception" as stated in the report No. A160414006/DC2/HSH/2016 dated 14 April 2016. 4. GMS gave full exemption (volledig acquit et de charge) to Company's Directors and Board of Commissioners on their management and supervisory duties in line with their responsibilities and actions in their respective fields carried out throughout the fiscal year 2015, as long as their actions are not conflicting with prevailed regulations, as well as contained in the Financial Statements audited by Public Accounting Firm Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan.Such release and discharge shall not relinquish any legal liability to the Directors and/or Board of Commissioners if the Report discloses any violation of applicable law and/or if in the future it is proven to be unlawful and/or harming the Company.
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Tahun Buku 2015 Determination of Net Income Utilization Fiscal Year 2015	RUPS memberi Kuasa kepada Pemegang Saham mayoritas untuk menetapkan Penggunaan Laba Bersih Tahun Buku 2015. GMS gave powers to the majority Shareholders to determine the utilization of net income fiscal year 2015.
3. Persetujuan Tantiem Tahun Buku 2015 dan Remunerasi Tahun Buku 2016 Bagi Direksi dan Dewan Komisaris, serta Bonus Karyawan Tahun Buku 2015. Approval of Tantiem Fiscal Year 2015 and Remuneration Fiscal Year 2016 for Directors and Board of Commissioners, as well as Employees Bonus Fiscal Year 2015.	RUPS memberi Kuasa kepada Pemegang Saham mayoritas untuk menetapkan Tantiem Tahun Buku 2015 dan Remunerasi Tahun Buku 2016 bagi Direksi dan Dewan Komisaris serta Bonus bagi karyawan untuk Tahun Buku 2015 selambat-lambatnya tanggal 31 Agustus 2016. GMS gave Powers to the majority Shareholders to set Tantiem Fiscal Year 2015 and Remuneration Fiscal Year 2016 for Directors and Board of Commissioners, as well as Employees Bonus for the fiscal year 2015 no later than 31 August 2016.
4. Penunjukan Akuntan Publik untuk Mengaudit Perhitungan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2016 Appointment of Public Account to Audit the Company's Annual Calculation Fiscal Year 2016	RUPS memberi kuasa kepada pemegang saham mayoritas untuk menetapkan penunjukan Kantor Akuntan Publik sebagai auditor yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan, Laporan Evaluasi Kinerja dan Laporan Kepatuhan untuk Tahun Buku 2016. GMS gave powers to majority Shareholders to set the appointment of Public Accounting Firm as auditor to audit the Company's Financial Statements, Performance Evaluation Report, and Compliance Report for the Fiscal Year 2016.
Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Decisions in the GMS are made through deliberation.	

Tabel Penyelenggaran RUPS Sirkuler Tahun 2016

Table: Circular GMS in 2016

Tanggal Date	Agenda Agenda
26 Januari 2016 January 26, 2016	Penyesuaian Struktur Organisasi Perseroan Adjustment of Company's Organizational Structure
21 Maret 2016 March 21, 2016	Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi Perseroan Dissmisal and appointment of Company's Director

Tanggal Date	Agenda Agenda
28 Maret 2016 March 28, 2016	Persetujuan Pembuatan Akta Pernyataan Tentang Kesanggupan Pemenuhan Kewajiban Sesuai Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT) dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Pembangunan PLTGU Tanjung Priok 800 MW oleh PT PLN (Persero) Approval on the Preparation of Deed about the Capability to Fulfill Obligations in line with Land Use Permit (SIPPT) in order to execute Development Project of Tanjung Priok Combine-Cycle Power Plant (CCPP) 800 MW by PT PLN (Persero)
2 Mei 2016 May 2, 2016	Pengangkatan Komisaris Ahmad Yani Appointment of Commissioner Ahmad Yani
14 Juli 2016 July 14, 2016	Pemberhentian dan Pengangkatan Direksi Perseroan Dismissal and Appointment of Company's Directors
15 Agustus 2016 August 15, 2016	Penugasan Pembangunan Pembangkit Barge Maunted Power Plant (BMPP), Pembentukan JVC dan Persiapan Proyek Kerjasama Assignment of Barge Maunted Power Plant (BMPP) Development, JVC Establishment, and Preparation of Cooperation Project
25 Agustus 2016 August 25, 2016	Pergantian dan Penambahan Dewan Komisaris Perseroan Changes and Addition in Company's Board of Commissioners
14 November 2016 November 14, 2016	Persetujuan Penugasan Perseroan untuk dapat Berperan Serta dalam Proses Pengadaan Pembelian Tenaga Listrik Proyek IPP sebagai *Mandatory Partner* Approval of Company's Assignment to Participate in the Procurement Process of Power Purchasing Project of IPP as Mandatory Partner
30 November 2016 November 30, 2016	Persetujuan Penambahan Penyetoran Modal Perseroan Kepada PT IRP Approval of Additional Paid-In Capital of the Company to PT IRP
30 November 2016 November 30, 2016	Persetujuan Penugasan Pengembangan PLTGU Grati Add-On Blok 2 (Kapasitas 150 MW) Approval of Assignment of Combine-Cycle Power Plant (CCPP) Grati Add-On Block 2 (150 MW Capacity) Development
30 Desember 2016 December 30, 2016	Penugasan Pengembangan PLTU Mulut Tambang 2x300 MW di Jambi Assignment of Mine Mouth Steam Power Plant (SPP) 2x300 MW Development in Jambi
30 Desember 2016 December 30, 2016	Penetapan Batas Pagu Pelimpahan Kewenangan Direksi dan Dewan Komisaris Determination of Boundary Limit for Directors' and Board of Commissioners' Authorities

Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
Decisions in the GMS are made through deliberation.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)
General Meeting of Shareholders (GMS)

Realisasi dan Tindak Lanjut Keputusan RUPS Tahun Sebelumnya

Pada laporan tahunan 2016 ini, Indonesia Power telah merealisasikan hasil keputusan RUPS yang diselenggarakan untuk tahun buku 2015, sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut:

Actualization and Follow-up of GMS Resolutions from the Previous Year

In annual report 2016, Indonesia Power has actualized GMS resolutions held for the fiscal year 2015, as explained in the table below:

Tabel Realisasi dan Tindak Lanjut Keputusan RUPS Tahun Sebelumnya
Table: Actualization and Follow-up of GMS Resolutions from the Previous Year

Tanggal GMS Date	Keputusan RUPS GMS Decisions	Status		
		Realisasi Hasil RUPS Actualization of GMS Result	Persentase Progress Progress Percentage	Alasan Keputusan RUPS yang Belum di Realisasikan Reason for Unrealized GMS Decisions
RUPS Tahunan Annual GMS				
8 April 2015 April 8, 2015	RUPS Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2014 GMS to Approve Annual Report and Ratify Financial Statements Fiscal Year 2014	Telah Ditindaklanjuti Followed up	100%	-
26 November 2014 November 26, 2014	RUPS Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2015 GMS to Ratify Corporate Work Plan and Budget (WP&B) 2015	Telah Ditindaklanjuti Followed up	100%	-
RUPS Sirkuler Circular IMS				
2 Januari 2015 January 2, 2015	Pemegang Saham menerima pengunduran diri dan memberhentikan Supangkat Iwan Santoso dari jabatannya sebagai Direktur Utama terhitung sejak tanggal 23 Desember 2014 dan memberikan pelunasan dan pembebasan yang bersangkutan dari segala tugas dan tanggung jawab sebagai Direktur Utama. Shareholders received the resignation and dismissed Supangkat Iwan Santoso as President Director effective since 23 December 2014, and grant redemption and exemption from all duties and responsibilities as President Director.	Telah Ditindaklanjuti Followed up	100%	-

Tanggal GMS Date	Keputusan RUPS GMS Decisions	Status		
		Realisasi Hasil RUPS Actualization of GMS Result	Persentase Progress Progress Percentage	Alasan Keputusan RUPS yang Belum di Realisasikan Reason for Unrealized GMS Decisions
2 Januari 2015 January 2, 2015	Pengisian jabatan lowong Direktur Utama diputuskan melalui Keputusan Dewan Komisaris, yaitu menunjuk Pelaksana Tugas Sementara Direktur Utama PT Indonesia Power hingga ditetapkannya Direktur Utama yang definitif oleh Pemegang Saham. The vacant position of President Director shall be decided by Board of Commissioners, i.e. by appointing Acting President Director PT Indonesia Power until the establishment of definitive President Director by the Shareholders.	Telah Ditindaklanjuti Followed up	100%	-
31 Agustus 2014 August 31, 2014	Rapat Umum Pemegang Saham secara sirkuler tentang Penetapan Pelaksana Tugas Dewan Komisaris Perseroan dalam Jabatan Lowong Dewan Komisaris, 31 Agustus 2014. Circular General Meeting Of Shareholders on the Acting Board of Commissioners to fulfill the vacant position of Board Of Commissioners, 31 August 2014.	Telah Ditindaklanjuti Followed up	100%	-
4 Desember 2014 December 4, 2014	Memberhentikan dengan hormat Sdri. LUIZAH sebagai Pejabat Pelaksana Tugas Komisaris Perseroan dari segala tugas dan tanggung jawabnya serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*). To dismiss Ms. Luizah as Acting Commissioner of the Company from all duties and responsibilities, as well as to grant redemption and exemption (acquit et de charge)	Telah Ditindaklanjuti Followed up	100%	-
	Mengangkat dan menetapkan Sdr. ABDI MUSTAKIM sebagai Komisaris Perseroan untuk masa jabatan 4 (empat) tahun berikutnya sesuai ketentuan Pasal 14 ayat 12 Anggaran Dasar Perseroan To appoint and assign Mr. Abdi Mustakim as the Company's Commissioner for the next 4 (four) years in accordance with Article 14 chapter 12 of the Company's Articles Of Association	Telah Ditindaklanjuti Followed up	100%	-

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)
General Meeting of Shareholders (GMS)

Arahan RUPS dan Tindak Lanjutnya

Indonesia Power senantiasa melakukan tindak lanjut dan *monitoring* berkala atas seluruh arahan dalam RUPS yang terdiri dari Arahan Pemegang Saham dan Arahan Dewan Komisaris. Realisasi arahan RUPS dilaporkan kepada Pemegang Saham dan Dewan Komisaris dalam bentuk penyajian Laporan Manajemen setiap triwulan. Pelaksanaan RUPS tahun 2016 menghasilkan sembilan arahan dari pemegang saham dan 23 arahan dari Dewan Komisaris. Seluruh arahan RUPS telah selesai ditindaklanjuti seluruhnya oleh Perusahaan.

GMS Directives and Follow Up

Indonesia Power performs follow-up and periodic monitoring on the GMS directive, which consists of Shareholders' Directives and Board of Commissioners' Directives. The GMS Directive actualization is reported to the Shareholders and Board of Commissioners in the form of Management Report every quarter. GMS in 2016 resulted in nine directives from shareholders and 23 directives from Board of Commissioners. Every directive of GMS has been followed up by the Company

DEWAN KOMISARIS
Board of Commissioners

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas, Dewan Komisaris merupakan organ perusahaan yang bertugas dan bertanggung jawab melakukan pengawasan terhadap kebijakan Pengurus dan jalannya kepengurusan Perusahaan oleh Direksi serta memastikan operasional perusahaan telah dilaksanakan dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

Based on Law Number 40 of 2007 on Limited Liability Company, Board of Commissioners is an organ of the company that has duties and responsibilities to supervise the Management' policy and the performance of the Company by Board of Directors, and to ensure the Company's operations has been conducted in line with Good Corporate Governance principles on every level of the organization.

Persyaratan Dewan Komisaris

Setiap anggota Dewan Komisaris di lingkungan Indonesia Power harus memenuhi persyaratan kemampuan yang telah ditetapkan sesuai dengan regulasi yang berlaku ataupun ketentuan dari Pemegang Saham. Diantara persyaratan dimaksud, setiap calon Dewan Komisaris harus memiliki pengetahuan yang memadai dan relevan dengan jabatannya serta berpengalaman di bidang usaha yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan dan/atau lainnya.

Board of Commissioners Requirement

Every member of Board of Commissioners within Indonesia Power has to fulfill the capability criteria set forth in the prevailing regulations or provisions from Shareholders. Among the criteria, every candidate of Board of Commissioners has to have adequate and relevant knowledge on his position, and experience in the field related to the Company's activities and/or other.

DEWAN KOMISARIS
Board of Commissioners

Adapun persyaratan Dewan Komisaris sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam *Board Manual* yaitu sebagai berikut:

1. Calon anggota Dewan Komisaris yang dapat diangkat menjadi Anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu lima tahun sebelum pengangkatannya pernah:
   a. Dinyatakan pailit
   b. Menjadi Anggota Direksi atau Anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit
   c. Dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan
2. Anggota Dewan Komisaris harus memenuhi syarat kemampuan dan integritas sehingga pelaksanaan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat untuk kepentingan Perseroan dapat dilaksanakan dengan baik.
3. Memiliki kemampuan untuk mempertimbangkan suatu masalah secara memadai
4. Memiliki kemampuan untuk membahas permasalahan tanpa campur tangan manajemen
5. Mampu bekerja sama sebagai Anggota Dewan Komisaris
6. Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris dilakukan dengan mempertimbangkan integritas, dedikasi, memahami masalah-masalah manajemen Perseroan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen, memiliki pengetahuan yang memadai dibidang usaha Perseroan, dan dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya serta persyaratan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan
7. Anggota Dewan Komisaris harus profesional, yaitu berintegritas dan memiliki kemampuan sehingga dapat menjalankan fungsinya dengan baik termasuk memastikan bahwa Direksi telah memperhatikan kepentingan semua pemangku kepentingan
8. Dewan Komisaris memenuhi persyaratan khusus yaitu kompetensi dan hal-hal lain yang dipersyaratkan bagi Anggota Dewan Komisaris sesuai kompleksitas Perseroan dengan tetap memperhatikan efektivitas dalam pengambilan keputusan

The requirements for Board of Commissioners as stipulated in the Board Manual are as follow:

1. Candidate of Board of Commissioners that shall be appointed as Member of Board of Commissioners is an individual who is qualified and is capable of performing legal acts, with the exception that within five years of the appointment, the candidate has:
   a. been declared bankrupt
   b. been a member of Directors or Board of Commissioners who is found guilty of causing the bankruptcy of a Company
   c. been punished for committing a crime which is detrimental to the State's finances and/or those related to the financial sector.
2. Member of Board of Commissioners has to fulfill requirements of capability and integrity in order to carry out well supervisory and advisory functions for the Company's interest.
3. The Commissioner has to have ability to adequately analyze problems
4. The Commissioner has to have the ability to discuss problem without management interference
5. Able to cooperate as Member of Board of Commissioners
6. Appointment of Member of Board of Commissioners is conducted by considering integrity, dedication, understanding of Company's management problem related to any management function, adequate knowledge in the Company's business field, and sufficient time to carry out his/her integrity, and other requirements as stipulated in laws and regulations
7. Member of Board of Commissioners is professional, that is he/she has integrity and capability in order to carry out the functions properly, including ensuring that the Directors always takes into account the interests of all stakeholders.
8. Board of Commissioners shall meet specific requirements, i.e. competency and other matters required for Member of Board of Commissioners, in line with the Company's complexity, by taking into account the effectivity in decision-making process

9. Dewan Komisaris harus terdiri dari anggota-anggota yang secara keseluruhan mempunyai latar belakang dan/atau pengetahuan sekurang-kurangnya di bidang akuntansi dan keuangan.

Uji Kemampuan dan Kepatutan Dewan Komisaris

Seluruh calon anggota Dewan Komisaris Indonesia Power wajib mengikuti Uji Kelayakan dan Kepatutan (*Fit & Proper Test*) yang dilakukan oleh Pemegang Saham sebelum menjalankan tugas dan fungsi dalam jabatannya. Seluruh anggota Dewan Komisaris Indonesia Power yang menjabat pada periode tahun 2016 telah lulus *fit and proper* yang mengindikasikan bahwa setiap Komisaris memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai.

Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Komisaris

Setelah melalui proses *fit and proper test* sesuai ketentuan yang berlaku, calon anggota Dewan Komisaris yang lulus *fit and proper test* diangkat oleh RUPS. Penetapan anggotan Dewan Komisaris selambat-lambatnya 30 hari sejak masa jabatan tersebut berakhir dan tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi. Pedoman pengangkatan Dewan Komisaris adalah:

1. Pengangkatan Dewan Komisaris dilakukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
2. Penetapan Anggota Dewan Komisaris oleh RUPS/ Pemegang Saham selambat- lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak masa jabatan tersebut berakhir.
3. Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan Anggota Direksi.
4. Dalam hal RUPS tidak menentukan saat mulai berlakunya pengangkatan, pengangkatan Anggota Dewan Komisaris mulai berlaku sejak ditutupnya RUPS.
5. Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana telah diatur, batal karena hukum sejak saat Anggota Dewan Komisaris lainnya atau Direksi mengetahui tidak terpenuhinya persyaratan.

9. Board of Commissioners shall be composed of members who by large have backgrounds and/ or knowledge in the areas of at the very least accounting and finance.

Board of Commissioners' Fit and Proper Test

Every candidate for Board of Commissioners in Indonesia Power shall take Fit and Proper Test that is held by Shareholders before carrying out duties and functions in their position. Every member of Indonesia Power's Board of Commissioners who serves for the 2016 period has passed the fit and proper test, which indicates that every Commissioner has the adequate integrity, competency, and financial reputation.

Appointment and Dismissal of the Board of Commissioners

After going through the fit and proper test process in line with the prevailing provisions, the candidate of Board of Commissioners who has passed the fit and proper test is appointed by GMS. The appointment of a member of Board of Commissioners is no later than 30 days since the term of office expired, and does not coincide with the appointment of Directors' member. Guidelines to appoint the Board of Commissioners are:

1. Appointment of Board of Commissioners is conducted by General Meeting of Shareholders (GMS).
2. Member of Board of Commissioners shall be determined by GMS/Shareholders no later than 30 (thirty) days after the last term of office expired.
3. The appointment of a member of Board of Commissioners shall not coincide with the appointment of Directors' Member.
4. In the event that GMS does not specify the effective date of appointment, the appointment of Members of Board of Commissioners is effective immediately after the closing of GMS.
5. An appointment of Board of Commissioners' Member who fails to meet the requirements, becomes legally annul upon the time when other members of Board of Commissioners or Directors notice the concerned member's failure to meet the requirements.

DEWAN KOMISARIS
Board of Commissioners

6. Perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh Anggota Dewan Komisaris untuk dan atas nama Dewan Komisaris sebelum pengangkatannya batal, tetap mengikat dan menjadi tanggung jawab Perseroan.
7. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada poin 6 tidak mengurangi tanggung jawab Anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan terhadap kerugian Perseroan.
8. Penetapan pengangkatan Dewan Komisaris melalui RUPS/Pelantikan Dewan Komisaris yang didukung dengan Berita Acara RUPS/Pelantikan Dewan Komisaris.

Sedangkan pedoman pemberhentian Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

1. Pemberhentian Dewan Komisaris dilakukan oleh RUPS.
2. Jabatan Anggota Dewan Komisaris berakhir apabila: meninggal dunia, masa jabatannya berakhir, diberhentikan berdasarkan RUPS, dan/atau tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Anggota Dewan Komisaris berdasarkan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan lainnya.
3. Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris diatur sesuai Anggaran Dasar Perseroan.
4. Bagi Anggota Dewan Komisaris yang berhenti sebelum maupun pada masa jabatannya berakhir kecuali berhenti karena meninggal dunia, maka yang bersangkutan tetap bertanggung jawab atas tindakan-tindakannya yang belum diterima pertanggungjawabannya oleh RUPS.
5. Anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya, melalui tahapan: (a) Rencana pemberhentian Anggota Dewan Komisaris diberitahukan kepada yang bersangkutan secara lisan atau tertulis oleh pajabat yang ditunjuknya, dan (b) Keputusan pemberhentian.
6. Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dilakukan apabila berdasarkan kenyataan, Anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan antara lain: (a) Tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik; (b) Tidak dapat melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan Anggaran Dasar; (c) Terlibat dalam

6. All legal actions taken by a Board of Commissioners' Member and on behalf of the Board of Commissioners' name before his or her appointment is cancelled, shall remain binding and be the responsibility of the Company.
7. The provisions as referred to in point 6 does not reduce the responsibility of the referred member of Board of Commissioners for the loss suffered by the Company.
8. Appointment of Board of Commissioners through GMS/Inauguration of Board of Commissioners supported by Minutes of GMS/Inauguration of Board of Commissioners.

Guidelines to dismiss Board of Commissioners is:

1. Board of Commissioners dismissal is conducted by GMS.
2. The term of office of Board of Commissioners' member ends if the incumbent: passed away, his/her term of office ended, is dismissed by GMS, and/or is no longer meeting the requirement as Member of Board of Commissioners based on the Articles of Association and other laws and regulations.
3. The dismissal of a member of Board of Commissioners is specified in the Company's Articles of Association.
4. Member of Board of Commissioners who resigns before or at the time his or her term of office ends except because of death, he/she shall remain liable for his/her actions before the responsibility is accepted by GMS.
5. Board of Commissioners' Member may be dismissed at any time based on the GMS Decision by stating the reasons for dismissal, and shall be done through the following stages: (a) Dismissal plan of the Member of Board of Commissioners shall be notified to the incumbent verbally or in writing by the notifying authority, and (b) Decision of dismissal.
6. Member of Board of Commissioners shall be dismissed if proven that the incumbent: (a) has failed to carry out his/her duties properly; (b) is unable to enforce the provisions of laws and/or

tindakan yang merugikan Perseroan dan/atau Negara; (d) Dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap; (e) Mengundurkan diri.

7. Disamping alasan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada poin 6, Anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan oleh RUPS berdasarkan alasan lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS demi kepentingan dan tujuan Perseroan.
8. Rencana pemberhentian Anggota Dewan Komisaris diberitahukan kepada Anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan secara lisan dan tertulis oleh Pemegang Saham.
9. Keputusan pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud pada poin 6 bagian a, b dan c, diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
10. Dalam hal pemberhentian dilakukan di luar forum RUPS, maka pembelaan diri disampaikan secara tertulis kepada Pemegang Saham dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak Anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan diberitahukan.
11. Selama rencana pemberhentian masih dalam proses, maka anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan wajib melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya.
12. Pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud pada poin 6 bagian c dan d ini merupakan pemberhentian secara tidak hormat.
13. Seorang Anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan dengan tembusan kepada Pemegang Saham, Anggota Dewan Komisaris lainnya dan Direksi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. Apabila dalam surat pengunduran diri disebutkan tanggal efektif kurang dari 30 (tiga puluh) hari dari tanggal surat diterima, maka dianggap tidak menyebutkan tanggal efektif pengunduran diri.
14. Apabila sampai dengan tanggal yang diminta oleh anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan atau dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya surat permohonan pengunduran diri diterima dalam hal tidak disebutkan tanggal efektif pengunduran diri, tidak ada keputusan dari RUPS, maka anggota Dewan Komisaris tersebut berhenti

Articles of Association; (c) is involved in an act that causes harms to the Company and/or State; (d) is found guilty based on a court's decision that has a permanent legal force; (e) resigned.

7. In addition to the reasons of dismissal as referred to in point 6, Commissioner shall be dismissed by GMS based on other reasons deemed appropriate by the GMS, in the interests and objectives of the Company.
8. Plan to dismiss Member of Board of Commissioners shall be notified to the incumbent verbally or in writing by the Shareholders.
9. The decision of dismissal for reasons referred to in point 6 letter a, b, and c, shall be taken after the incumbent is given a chance to defend himself or herself.
10. In the even that dismissal is conducted outside GMS forum, defense in writing shall be submitted to the Shareholders within 14 (fourteen) days from the date he or she is notified of the dismissal.
11. As long as the dismissal plan is still in progress, the member of the Board of Commissioners concerned shall perform his/her duties properly.
12. Dismissal for reasons as referred to in point 6 letter c and d is a dismissal without honor.
13. A member of Board of Commissioners has the right to resign from his/her position by a written notice of its intent to the Company, with a copy to Shareholders, other members of Board of Commissioners, and Directors, no later than 30 (thirty) days prior to the date of his/her resignation. If the letter of resignation mentions an effective date of fewer than 30 days before the date on which the notice is received, then the notice is considered to have no effective date of resignation.
14. If no decision has been made by GMS by the date as requested by the resigning member of Board of Commissioners or after 30 (thirty) days from the date of receipt of the resignation letter, in which an effective date is not mentioned in the resignation letter, then the resigning member of Board of Commissioners shall automatically resign

DEWAN KOMISARIS
Board of Commissioners

dengan sendirinya pada tanggal yang diminta tersebut di atas atau dengan lewatnya waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat permohonan pengunduran diri diterima tanpa memerlukan persetujuan RUPS.

effective on the requested date as mentioned in the resignation letter or effective after 30 (thirty) days since the date of his/her resignation letter.

Jumlah dan Komposisi Dewan Komisaris

Selama tahun 2016, komposisi Dewan Komisaris Indonesia Power mengalami perubahan yaitu dengan adanya pergantian Dewan Komisaris.

Number and Composition of the Board of Commissioners

In 2016, the composition of Indonesia Power's Board of Commissioners has changed, i.e. by the change in the Board of Commissioners.

Tabel Komposisi Dewan Komisaris Sampai Dengan 31 Agustus 2016
Table: Composition of Board of Commissioner Until August 31, 2016

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Appointment Basis
IGA Ngurah Adnyana*	Komisaris Utama President Commissioner	RUPS Sirkuler Penetapan Pelaksana Tugas Dewan Komisaris dalam Jabatan Lowong Dewan Komisaris Tanggal 31 Agustus 2014. Circular GMS on the Appointment of Acting Members of BoC for Vacant Positions, dated on August 31, 2014.
Aries Muftie*	Anggota Dewan Komisaris Members of the Board of Commissioners	RUPS Sirkuler Penetapan Pelaksana Tugas Dewan Komisaris dalam Jabatan Lowong Dewan Komisaris Tanggal 31 Agustus 2014. Circular GMS on the Appointment of Acting Members of BoC for Vacant Positions, dated on August 31, 2014
Ahmad Yani**	Anggota Dewan Komisaris Members of the Board of Commissioners	RUPS Sirkuler Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris Perseroan tanggal 2 Mei 2016. Circular GMS on Appointment of Company's Member of Board of Commissioners dated May 2, 2016
Abdi Mustakim	Anggota Dewan Komisaris Members of the Board of Commissioners	Surat Keputusan Pemegang Saham Secara Sirkuler Tanggal 10 November 2015. GMS Circular Decisions issued on November 10, 2015.

*)Sdr. IGA Ngurah Adnyana dan Sdr. Aries Muftie menjabat sebagai Komisaris sampai dengan tanggal 25 Agustus 2016.
Mr. IGA Ngurah Adnyana and Mr. Aries Muftie will serve as Commissioner until August 25, 2016.
**)Sdr. Ahmad Yani menjabat sebagai Anggota Dewan Komisaris sejak tanggal 2 Mei 2016.
Mr. Ahmad Yani has seved as member of BoC since May 2, 2016.

Susunan dan komposisi anggota Dewan Komisaris Indonesia Power sampai dengan 31 Desember 2016, berjumlah enam orang yang terdiri dari satu orang Komisaris Utama, tiga orang Komisaris Independen, dan dua orang Komisaris. Adapun komposisi dan susunan Dewan Komisaris sebagai berikut:

As of 31 December 2016, Indonesia Power's Board of Commissioners is composed of 6 people, which consist of one President Commissioner, three Independent Commissioners, and two Commissioners. The composition of the Board of Commissioners is as follows:

Tabel Komposisi Dewan Komisaris Sampai Dengan 31 Desember 2016
Table: Composition of Board of Commissioner Until December 31, 2016

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Appointment Basis	Periode Jabatan Term of Office
Bagus Setiawan	Komisaris Utama President Commissioner	RUPS Sirkuler Penggantian dan Penambahan Anggota Dewan Komisaris Perseroan tanggal 25 Agustus 2016 Circular GMS on Replacement and Addition of Company's Members of Board of Commissioners dated 25 August 2016	4 Tahun 4 Years
Ahmad Yani	Komisaris (Independen) Commissioner (Independent)	RUPS Sirkuler Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris Perseroan tanggal 2 Mei 2016 Circular GMS on Appointment of Company's Member of Board of Commissioners dated 2 May 2016	4 Tahun 4 Years
Abdi Mustakim	Komisaris Commissioner	RUPS Sirkuler Pemberhentian dan Pengangkatan Komisaris Perseroan tanggal 10 November 2015 Circular GMS on Dismissal and Appointment of Company's Commissioner dated 10 November 2015	4 Tahun 4 Years
Agus Hernawan	Komisaris (Independen) Commissioner (Independent)	RUPS Sirkuler Penggantian dan Penambahan Anggota Dewan Komisaris Perseroan tanggal 25 Agustus 2016 Circular GMS on Replacement and Addition of Company's Members of Board of Commissioners dated 25 August 2016	4 Tahun 4 Years
Munir Ahmad	Komisaris Commissioner	RUPS Sirkuler Penggantian dan Penambahan Anggota Dewan Komisaris Perseroan tanggal 25 Agustus 2016 Circular GMS on Replacement and Addition of Company's Members of Board of Commissioners dated 25 August 2016	4 Tahun 4 Years
Tri Setyo Nugroho	Komisaris (Independen) Commissioner (Independent)	RUPS Sirkuler Penggantian dan Penambahan Anggota Dewan Komisaris Perseroan tanggal 25 Agustus 2016 Circular GMS on Replacement and Addition of Company's Members of Board of Commissioners dated 25 August 2016	4 Tahun 4 Years

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris

Dalam menjalankan fungsinya, Dewan Komisaris telah memiliki pedoman kerja (*Board Manual*) yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi Indonesia Power Nomor 006.SK/DEWAN KOMISARIS IP/2013 dan Nomor 178.K/010/IP/2013 tanggal 21 November 2013. Acuan dalam penyusunan *Board Manual* adalah prinsip-prinsip hukum korporasi, ketentuan Anggaran Dasar, peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, arahan Pemegang Saham serta praktik-praktik terbaik (*best practices*) *Good Corporate Governance*.

Work Guidelines and Code of Conduct for the Board of Commissioners (Board Manual)

In carrying out its functions, Board of Commissioners has Board Manual set forth in Joint Decree of Board of Commissioners and Directors of Indonesia Power Number 006.SK/DEWAN KOMISARIS IP/2013 and Number 178.K/010/IP/2013 dated 21 November 2013. References in compiling Board Manual are corporate law principles, provision of Articles of Association, prevailing laws and regulations, the directive of Shareholders, and best practices of Good Corporate Governance.

DEWAN KOMISARIS
Board of Commissioners

Pedoman dan tata kerja Dewan Komisaris dalam *Board Manual* mengatur aspek, antara lain:

1. Persyaratan dan komposisi Dewan Komisaris
2. Ketentuan rangkap jabatan
3. Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Komisaris termasuk masa jabatannya
4. Program pengenalan dan pelatihan
5. Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris
6. Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris, termasuk terkait persetujuan atas rancangan RJPP dan RKAP, tugas arahan dan pengawasan Dewan Komisaris, terkait Praktik Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG)
7. Rapat Dewan Komisaris serta pengambilan keputusan di luar Rapat Dewan Komisaris
8. Penetapan Kebijakan Pengawasan Perusahaan
9. Etika Jabatan
10. Pelaporan dan Pertanggungjawaban
11. Evaluasi Kinerja
12. Organ Pendukung Dewan Komisaris
13. Remunerasi Dewan Komisaris

Sejalan dengan komitmen Perusahaan dalam meningkatkan kualitas penerapan GCG, Indonesia Power terus melakukan *review* dan penyempurnaan terhadap sejumlah *soft-structure* GCG yang dimilikinya, termasuk Pedoman Kerja bagi Direksi dan Dewan Komisaris. Pemutakhiran dilakukan sesuai dengan kebutuhan Perusahaan dan didasarkan atas perkembangan regulasi serta praktis bisnis terbaik.

The guidelines and procedures of the Board of Commissioners in the Board Manual regulate the following aspects:

1. Requirements and composition of the Board of Commissioners
2. Concurrent position regulation
3. Appointment and Dismissal of Board of Commissioners, including terms of office
4. Induction and training program
5. Work Program & Budget of the Board of Commissioners
6. Duties and responsibilities of the Board of Commissioners, including approval on Long Term Corporate Plan (RJPP) and Corporate Work Plan & Budget (WP&B) Proposal, supervisory and directive duties of the Board of Commissioners, related to Good Corporate Governance (GCG) practices
7. Board of Commissioners' Meeting and decision making outside the Board of Commissioners' Meeting
8. Company's Supervision Policy
9. Ethics of the position
10. Reporting and accountability
11. Performance evaluation
12. Direct Report to the Board of Commissioners
13. Board of Commissioners' Remuneration

In line with the Company's commitment on improving the GCG implementation quality, Indonesia Power reviews and refines GCG soft structure continuously, including the Board Manual for Directors and Board of Commissioners. Updates are made in accordance with the Company's needs and are based on the best regulatory and best business practice development.

Tanggung Jawab dan Wewenang Dewan Komisaris

Tanggung Jawab Dewan Komisaris, meliputi:

1. Dewan Komisaris bertanggung jawab atas pengawasan Perseroan
2. Setiap Anggota Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik, kehati-hatian, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan

Board of Commissioners' Responsibilities and Authorities

Responsibilities of the Board of Commissioners, cover:

1. Board of Commissioners is responsible for the Company's supervision
2. Every member of Board of Commissioners has conducted supervisory and advisory functions to the Directors in good faith and with prudence and responsibility, for the Company's interests, that are consistent with the Company's goals and objectives.

DEWAN KOMISARIS
Board of Commissioners

3. Setiap Anggota Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya
4. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri atas 2 (dua) Anggota Dewan Komisaris atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada poin 3 berlaku secara tanggung renteng bagi setiap Anggota Dewan Komisaris
5. Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada poin 3 apabila dapat membuktikan: (a) Telah melakukan pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; (b) Tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan Direksi yang mengakibatkan kerugian; dan (c) Telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut
6. Atas nama Perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat menggugat Anggota Dewan Komisaris yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan ke pengadilan negeri
7. Dalam hal terjadi kepailitan karena kesalahan atau kelalaian Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap pengurusan yang dilaksanakan oleh Direksi dan kekayaan Perseroan tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban Perseroan akibat kepailitan tersebut, setiap Anggota Dewan Komisaris secara tanggung renteng ikut bertanggung jawab dengan Anggota Direksi atas kewajiban yang belum dilunasi
8. Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada poin 1 berlaku juga bagi Anggota Dewan Komisaris yang sudah tidak menjabat 5 (lima) tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan
9. Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas kepailitan Perseroan sebagaimana dimaksud pada poin 1 apabila dapat membuktikan: (a) Kepailitan tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya; (b) Telah melakukan

3. Every member of Board of Commissioners is fully responsible individually for Company's loss if proven guilty or negligent in conducting their duties
4. In the event that Board of Commissioners consists of 2 (two) members or more, the responsibility as referred to in point 3 shall be jointly borne by all members of Board of Commissioners
5. Member of Board of Commissioners shall not be held accountable for the loss as referred to in point 3, if proven that: (a) Commissioner has conducted supervision in good faith and with prudence for the Company's interests that are consistent with the Company's goals and objectives; (b) Commissioner has no personal interest, either directly or indirectly on the Directors' management actions that have resulted in such loss; and (c) Commissioner has provided necessary advice to Directors to prevent such loss from arising or continuing
6. On behalf of the Company, Shareholders who represent at least 1/10 (one tenth) of total shares, with voting rights, have the right to sue a member of Board of Commissioners who due to faults or negligence incurred losses for the Company, to the district court
7. In the event of bankruptcy due to errors or negligence on the part of the Board of Commissioners in conducting the supervision over the management performed by the Board of Directors, and when the Company's assets are not sufficient to pay for the financial liabilities incurred as a result of the bankruptcy, then every member of Board of Commissioners shall collectively bear the responsibility with the Directors' member for all the unsettled financial obligations
8. The responsibility as referred to in point 1 shall also apply to all members of Board of Commissioners who have left the office for 5 (five) years before bankruptcy verdict is announced
9. Member of Board of Commissioners shall not be held accountable on the Company's bankruptcy as referred to in point 1, if proven that: (a) Bankruptcy is not the result of his/her faults or negligence; (b) Commissioner has conducted supervision in

DEWAN KOMISARIS
Board of Commissioners

tugas pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; (c) Tidak mempunyai kepentingan pribadi, baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan oleh Direksi yang mengakibatkan kepailitan; dan (d) Telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk mencegah terjadinya kepailitan

10. Ketentuan mengenai tanggung jawab Dewan Komisaris atas kesalahan dan kelalaiannya yang diatur dalam undang-undang ini tidak mengurangi ketentuan yang diatur dalam undang-undang tentang Hukum Pidana.

Wewenang Dewan Komisaris, meliputi:

1. Melihat buku-buku, surat-surat, serta dokumen-dokumen lainnya, memeriksa kas untuk keperluan verifikasi dan lain-lain surat berharga dan memeriksa kekayaan Perseroan
2. Memasuki pekarangan, gedung, dan kantor yang dipergunakan oleh Perseroan
3. Meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat lainnya mengenai segala Persoalan yang menyangkut pengelolaan Perseroan
4. Mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akan dijalankan oleh Direksi
5. Meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya di bawah Direksi dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri rapat Dewan Komisaris
6. Mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Dewan Komisaris, jika dianggap perlu
7. Memberhentikan sementara Anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini
8. Membentuk komite-komite lain selain komite audit, jika dianggap perlu dengan memperhatikan kemampuan Perseroan
9. Menggunakan tenaga ahli untuk hal tertentu dalam jangka waktu tertentu atas beban Perseroan, jika dianggap perlu
10. Melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar

good faith and with prudence for the Company's interests that are consistent with the Company's goals and objectives; (c) Commissioner has no personal interest, either directly or indirectly on the Directors' management actions that have resulted in bankruptcy; and (d) Commissioner has provided necessary advice to Directors to prevent bankruptcy

10. Provisions concerning the responsibilities of Board of Commissioners on their misconducts and negligence as regulated in this Law does not supersede in any way the provisions as stipulated in the Criminal Law.

Authorities of the Board of Commissioners, cover:

1. See the Company's books, papers, and other documents, check cash for verification purpose and other securities, and verify the Company's assets
2. Enter the Company's premises, buildings, and offices
3. Request explanation from the Board of Directors and/or other officials on all issues related to the Company's management
4. Know every policy and action that has been done and will be conducted by the Board of Directors
5. Request Directors and/or other officials reporting to Directors, upon Directors' knowledge, to attend Board of Commissioners' Meeting
6. Appoint and dismiss a Secretary of the Board of Commissioners, if considered necessary
7. Temporarily suspend a Directors' Member in accordance with the provision in Articles Of Association
8. Establish other committees besides Audit Committee, if deemed necessary, taking into account the Company's capability
9. Assign experts to carry out certain task in certain period of time at the expense of the Company, if deemed necessary
10. Manage the action of the Company's management in certain circumstances for a certain period of time in accordance with the provisions of the Articles of Association

11. Menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandangan-pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan
12. Melasanakan kewenangan pengawasan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan, Anggaran Dasar, dan/atau Keputusan RUPS.

Akses Informasi Dewan Komisaris

Dewan Komisaris mendapatkan akses informasi Perusahaan sesuai kewenangannya, meliputi:

1. Terdapat kebijakan/pedoman Dewan Komisaris tentang informasi yang harus disediakan oleh Direksi dan Kebijakan tersebut disampaikan kepada Direksi
2. Substansi kebijakan/pedoman diantaranya memuat bentuk informasi yang disampaikan baik yang berkala maupun insidentil, standar waktu penyampaiannya dan mekanisme penyampaian informasi tersebut oleh Direksi
3. Jika Direksi tidak memenuhi kewajiban penyediaan informasi kepada Dewan Komisaris, terdapat upaya komunikasi dengan Direksi untuk meminta informasi yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tugasnya.

Pembagian Tugas Pengawasan Dewan Komisaris

Dalam menjalankan fungsinya, Dewan Komisaris Indonesia Power telah melakukan pembagian tugas dan tanggung jawab sesuai yang telah ditetapkan dalam Berita Acara Kesepakatan Pembagian Tugas Dewan Komisaris PT Indonesia Power tanggal 20 September 2016 sebagaimana pada tabel berikut:

11. Attend the Board of Directors' Meeting and provide insights on the matters discussed
12. Carry out other supervision authority as long as it is not contradictory to rules and legislations, Articles of Association, and/or the GMS Decisions.

Board of Commissioners' Information Access

Board of Commissioners has access to Company's information, in accordance with its authorities, which covers:

1. There are policies/guidelines of Board of Commissioners for information that must be provided by the Board of Directors, and the policy has been disclosed to the Board of Directors
2. The substance of policy/guidelines shall include form of information submitted either periodically or incidentally, within standard delivery time, and with delivery mechanisms for such information by the Board of Directors
3. If the Board of Directors fails to provide information to the Board of Commissioners, there shall be an effort to have further communication with the Board of Directors, to ask for the information as needed by the Board of Commissioners to perform its duties.

Board of Commissioners' Supervisory Job Descriptions

In carrying out its duties, Board of Commissioners of Indonesia Power has divided the duties and responsibilities as set forth in the Minutes of Agreement of Board of Commissioners' Job Descriptions of PT Indonesia Power dated 20 September 2016, as seen in the following table:

DEWAN KOMISARIS
Board of Commissioners

Tabel Pembagian Tugas Pengawasan Dewan Komisaris
Table: Board of Commissioners' Supervisory Job Descriptions

Nama Name	Jabatan Position	Pembagian Tugas Duties
Bagus Setiawan	Komisaris Utama President Commissioner	Pengawasan Keseluruhan Bidang All Areas Supervision
Ahmad Yani	Komisaris Commissioner	Pengawasan bidang Manajemen Risiko, Nominasi dan Remunerasi dan SDM & Organisasi Supervision of Risk Management, Nomination and Remuneration, Human Resources & Organization
Abdi Mustakim	Komisaris Commissioner	Pengawasan Bidang Audit dan GCG Supervision of Audit and GCG
Agus Hernawan	Komisaris Commissioner	Pengawasan Bidang Audit dan GCG Supervision of Audit and GCG
Munir Ahmad	Komisaris Commissioner	- Pengawasan Bidang Audit dan GCG - Pengawasan bidang Manajemen Risiko, Nominasi dan Remunerasi dan SDM & Organisasi - Supervision of Audit and GCG - Supervision of Risk Management, Nomination and Remuneration, Human Resources & Organization
Tri Setyo Nugroho	Komisaris Commissioner	Pengawasan bidang Manajemen Risiko, Nominasi dan Remunerasi dan SDM & Organisasi Supervision of Risk Management, Nomination and Remuneration, Human Resources & Organization

Komisaris Independen dan Independensi Dewan Komisaris

Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen dan telah memenuhi persyaratan sebagai Komisaris Independen sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berpedoman pada prinsip-prinsip GCG. Sampai dengan 31 Desember 2016, Indonesia Power memiliki tiga orang Komisaris Independen, yaitu Sdr. Ahmad Yani, Sdr. Agus Hernawan dan Sdr. Tri Setyo Nugroho.

Independent Commissioners and Board of Commissioners' Independency

Independent Commissioner is a member of Board of Commissioners who does not have financial, management, shareholding, and/or familial relationship with other member of the Board of Commissioners, Directors, and/or Controlling Shareholder, or relationship that may influence his/her capability to act independently, and has fulfilled the requirement as Independent Commissioner as stipulated in the prevailing laws and regulations, and is guided by the GCG principles. As of 31 December 2016, Indonesia Power has three Independent Commissioners, i.e. Mr. Ahmad Yani, Mr. Agus Hernawan, and Mr. Tri Setyo Nugroho.

Kriteria Penentuan Komisaris Independen

Kriteria penentuan Komisaris Independen mencakup: (1) Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan perusahaan, komisaris, direksi atau pemegang saham Utama perusahaan; (2)Tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan usaha perusahaan; (3) Tidak memiliki saham, baik langsung maupun tidak langsung dengan perusahaan; (4) Tidak bekerja rangkap sebagai Direktur di perusahaan lainnya yang terafiliasi dengan perusahaan yang bersangkutan.

Criteria for Independent Commissioner Appointment

Criteria for Independent Commissioner appointment covers: (1) Commissioner does not have affiliation with the Company, commissioner, directors, or Major Shareholder of the Company; (2) Commissioner does not have direct or indirect business relationship related to Company's business; (3) Commissioner does not have Company's shares, directly or indirectly; (4) Commissioner does not have concurrent position as Director in other companies affiliated with the Company.

Pernyataan Tentang Independensi Komisaris Independen

Untuk menjamin kepastian independensi, setiap anggota Dewan Komisaris di lingkungan Indonesia Power membuat pernyataan independensi dan bebas benturan kepentingan setiap tahun. Dalam pernyataan tersebut disebutkan:

1. Tidak memiliki saham di Perusahaan
2. Tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi maupun Pemegang Saham Pengendali
3. Menghindari situasi yang memiliki potensi benturan kepentingan.

Statement of Independence of Independent Commissioners

To ensure the independence, every member of Board of Commissioners within Indonesia Power has to make Statement of Independence and Declaration of Absence of Conflict of Interest every year. The statement stated:

1. Does not have shares in the Company
2. Does not have familial relationship up to second degree with other members of Board of Commissioners, Directors, or Controlling Shareholder
3. Avoids situation with the potential for conflict of interests.

Surat Pernyataan Independensi
Statement of Independence

DEWAN KOMISARIS
Board of Commissioners

Komisaris Independen Perusahaan telah menandatangani surat pernyataan bebas benturan kepentingan yang menyatakan tidak adanya hubungan afiliasi dengan anggota Direksi maupun anggota Komisaris lainnya. Pada praktiknya, seluruh Komisaris Independen Perusahaan telah memenuhi aspek independensi lainnya mencakup kepemilikan saham dan rangkap jabatan.

Company's Independent Commissioner has signed the Declaration of Absence of Conflict of Interest, stating that they have no affiliation with Directors' Member or other members of Board of Commissioners. In practice, every Company's Independent Commissioner has fulfilled the independence aspects, including shareholdings and concurrent position.

Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris

Sampai dengan 31 Desember 2016, Dewan Komisaris telah mengungkapkan Kepemilikan sahamnya baik Perusahaan maupun perusahaan lain yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri. Kepemilikan saham Dewan Komisaris dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Board of Commissioners' Shareholding

As of 31 December 2016, Board of Commissioners has disclosed their share ownership of the Company or other companies domiciled inside and outside the country. The Board of Commissioners' Shareholding can be seen in the table below.

Tabel Kepemilikan Saham Dewan Komisaris Tahun 2016
Table: Board of Commissioners' Shareholdings in 2016

Nama Name	Kepemilikan Saham di Perusahaan Shareholding	Kepemilikan Saham di Perusahaan Lain Shareholding in Other Companies
Bagus Setiawan	Tidak Ada None	Tidak Ada None
Ahmad Yani	Tidak Ada None	Tidak Ada None
Abdi Mustakim	Tidak Ada None	Tidak Ada None
Agus Hernawan	Tidak Ada None	Tidak Ada None
Munir Ahmad	Tidak Ada None	Tidak Ada None
Tri Setyo Nugroho	Tidak Ada None	Tidak Ada None

Rangkap Jabatan Dewan Komisaris

Mengacu pada Undang-undang Nomor 5 tahun 2009, tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, terkait dengan Pasal 26 yang membahas mengenai Jabatan Rangkap, seluruh anggota Dewan Komisaris Indonesia Power tidak merangkap jabatan pada perusahaan yang termasuk

Board of Commissioners' Concurrent Positions

Pursuant to Law Number 5 of 2009, on Ban on Monopolistic Practices and Unfair Business Competition, related to Article 26, which discussed Concurrent Position, all member of Indonesia Power's Board of Commissioners shall refrain from assuming a position at another company that: (1) is in the same market field as

diantaranya: (1) Berada dalam pasar bersangkutan yang sama dengan Perusahaan; (2) Memiliki keterkaitan yang erat dalam bidang dan atau jenis usaha; dan (3) Secara bersama dapat menguasai pangsa pasar barang dan atau jasa tertentu yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

the Company; (2) has close relation in the business type or field; and (3) jointly may be able to conquer the market shares of specific goods or services, that may result in the monopolistic practices and/or unfair business competition.

Adapun jabatan lain yang dirangkap oleh Dewan Komisaris Indonesia Power, adalah sebagai berikut:

The concurrent positions assumed by members of Indonesia Power's Board of Commissioners, are as follow:

Tabel Rangkap Jabatan Dewan Komisaris Tahun 2016
Table: Board of Commissioners' Concurrent Position 2016

Nama Name	Jabatan di Indonesia Power Position at Indonesia Power	Jabatan di Perusahaan Lain Position at Other Company
Bagus Setiawan	Komisaris Utama President Commissioner	Kepala Divisi Human Capital Management System pada Direktorat Human Capital Management PT PLN (Persero) Head of Human Capital Management System Division at Directorate of Human Capital Management PT PLN (Persero)
Ahmad Yani	Komisaris Commissioner	Tidak Ada None
Abdi Mustakim	Komisaris Commissioner	Kepala Bagian Perencanaan dan Manajemen Kinerja BUMN Division Head of Performance Management and Planning of State-Owned Enterprises
Agus Hernawan	Komisaris Commissioner	Tidak Ada None
Munir Ahmad	Komisaris Commissioner	Direktur Teknik dan Lingkungan Ditjen Ketenagalistrikan Direktorat Pembinaan Program Ketenagalistrikan Technical and Environmental Director at Directorate General of Electricity and Electricity Program Supervision
Tri Setyo Nugroho	Komisaris Commissioner	Pensiunan PT PLN (Persero) Tenaga Ahli Manajemen Proyek PT PLN (Persero) Retired from PT PLN (Persero) as Project Management Expert at PT PLN (Persero)

Laporan Pelaksanaan Tugas Dewan Komisaris

Sepanjang tahun 2016, Dewan Komisaris Perusahaan telah melakukan berbagai kegiatan, diantaranya:

1. Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sekali serta rapat khusus bila diperlukan/sesuai kebutuhan
2. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan
3. Kunjungan lapangan ke seluruh Unit Pembangkitan Indonesia Power

Report of Board of Commissioners Duties Execution

Throughout 2016, Company's Board of Commissioners has conducted numerous activities, among others:

1. Joint Meeting of the Board of Commissioners with Directors periodically, at least once a month, and special meeting if needed/deemed necessary
2. Annual General Meeting of Shareholders (GMS)
3. Site visitation to every Generating Unit of Indonesia Power

DEWAN KOMISARIS
Board of Commissioners

4. Rapat Komite Dewan Komisaris, dengan aktivitas pengawasan sesuai bidang tugas Komite Audit dan Komite Manajemen Risiko
5. Mendorong dan Mendukung Implementasi *Indonesia Power Way* dan Nilai-nilai Integritas, Profesional, Proaktif, dan Sinergi (IP AkSi) untuk terbangunnya budaya baru Indonesia Power.

4. Board of Commissioners' Committees Meeting, with the supervisory activities in line with the tasks of Audit Committee and Risk Management Committee
5. Promote and support the Indonesia Power Way implementation, and values of Integrity, Professionalism, Proactive, and Synergy (IP AkSi) in order to cultivate a new culture of Indonesia Power.

Fokus Pengawasan Tugas Dewan Komisaris

Fokus pengawasan tugas Dewan Komisaris tahun 2016, mencakup:

Focus of the Board of Commissioners' Supervision

The focus of supervisory duties of Board of Commissioners in 2016, covers:

Nama Name	Pelaksanaan Tugas Dewan Komisaris	Board of Commissioners Duties Execution
Bagus Setiawan	Keseluruhan Bidang & SDM	All Areas & Human Resources
Agus Hernawan	Keuangan	Finance
Abdi Mustakim	Perencanaan	Planning
Ahmad Yani	Hukum	Law
Munir Ahmad	Lingkungan	Environment
Tri Setyo Nugroho	Konstruksi	Construction

Rapat Dewan Komisaris

Dewan Komisaris secara rutin mengadakan rapat, baik secara internal maupun rapat gabungan dengan Direksi dalam rangka mengkoordinasikan seluruh kegiatan bisnis Perusahaan. Keputusan rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan musyawarah mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil berdasarkan pemungutan suara setuju terbanyak. Apabila jumlah suara yang setuju dan yang tidak setuju sama banyaknya, maka Pimpinan Rapat yang menentukan dengan tetap memperhatikan ketentuan mengenai pertanggungjawaban. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan bahwa seluruh anggota Dewan Komisaris telah memberikan persetujuan atas usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan melalui rapat formal.

Board of Commissioners' Meeting

Board of Commissioners routinely holds meetings, either internally or jointly with the Board of Directors in order to coordinate all business activity of the Company. Decisions in the meeting are made through deliberation. In the event that deliberation is not achieved, then the decision shall be made based on the majority vote. If there is an equal number of votes on those who agree and those who don't, the Chairman of the Meeting shall determine which decision is made by taking into account the provisions on accountability. Board of Commissioners shall also make a valid and binding decision without holding Board of Commissioners' Meeting, provided that all member of Board of Commissioners have approved the proposal submitted in writing, and signed the agreement. The decision made has the same legal power as those made in formal meetings.

Frekuensi Pertemuan dan Tingkat Kehadiran Dewan Komisaris

Selama tahun 2016, Dewan Komisaris telah menyelenggarakan 19 kali rapat yang terdiri dari 5 kali rapat internal dan 14 kali rapat gabungan dengan Direksi. Tingkat kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat internal dan gabungan dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Meeting Frequency and Attendance of Board of Commissioners

Throughout 2016, Board of Commissioners has held 19 meetings, which consist of 5 internal meetings and 14 joint meetings with the Board of Directors. The attendance of members of Board of Commissioners in internal and joint meetings can be seen in the following table:

Tabel Rapat Internal Dewan Komisaris Tahun 2016
Table: Board of Commissioners Attendance in Internal Meeting 2016

Nama Name	Jumlah Rapat Meetings	Jumlah Kehadiran Attendance	Persentase (%) Percentage (%)
Bagus Setiawan *	4	3	75
Ahmad Yani	5	4	80
Abdi Mustakim	5	2	40
Agus Hernawan*	4	4	100
Munir Ahmad*	4	4	100
Tri Setyo Nugroho*	4	4	100

*) Sdr. Bagus Setiawan, Agus Hernawan, Munir Ahmad dan Tri Setyo Nugroho menjabat sebagai Dewan Komisaris sesuai dengan RUPS sirkuler tanggal 25 Agustus 2016 sehingga jumlah rapat yang harus dihadiri sebanyak 4 kali rapat.
*) Mr. Bagus Setiawan, Agus Hernawan, Munir Ahmad, and Tri Setyo Nugroho serve as Board of Commissioners in accordance with Circular GMS dated 25 August 2016, hence the obligatory number of meetings attended is 4 meetings.

Tabel Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi Tahun 2016
Table: Joint Meeting of Board of Commissioners and Directors in 2016

Nama Name	Jumlah Rapat Meetings	Jumlah Kehadiran Attendance	Persentase (%) Percentage (%)
Bagus Setiawan *	7	6	86
Ahmad Yani **	10	7	70
Abdi Mustakim	14	9	64
Agus Hernawan *	7	6	86
Munir Ahmad *	7	4	57
Tri Setyo Nugroho *	7	6	86
Sripeni Inten Cahyani	14	13	93
Eri Prabowo	14	11	79
Antonius RT Artono	14	10	71

DEWAN KOMISARIS
Board of Commissioners

Nama Name	Jumlah Rapat Meetings	Jumlah Kehadiran Attendance	Persentase (%) Percentage (%)
Hudiono ***	12	10	83
Adi Supriono ***	12	10	83
Roikhan	14	13	93

*) Sdr. Bagus Setiawan, Agus Hernawan, Munir Ahmad dan Tri Setyo Nugroho menjabat sebagai Dewan Komisaris sesuai dengan RUPS sirkuler tanggal 25 Agustus 2016.
**) Sdr. Ahmad Yani menjabat sebagai Dewan Komisaris sesuai dengan RUPS sirkuler tanggal 2 Mei 2016.
**) Sdr. Hudiono dan Adi Supriono menjabat sebagai Direksi sesuai dengan RUPS sirkuler tanggal 21 Maret 2016.

*) Mr. Bagus Setiawan, Agus Hernawan, Munir Ahmad, and Tri Setyo Nugroho serve as Board of Commissioners in accordance with Circular GMS dated 25 August 2016.
**) Mr. Ahmad Yani serves as Board of Commissioners, in accordance with Circular GMS dated 2 May 2016.
**) Mr. Hudiono and Adi Supriono serve as Directors, in accordance with Circular GMS dated 21 March 2016.

Agenda, Tanggal dan Peserta Rapat Internal Dewan Komisaris

Agenda, Date, and Participants of the Board of Commissioners' Internal Meetings

No	Tanggal Pelaksanaan Date	Agenda Rapat Meeting Agenda
1.	17 Mei 2016 May 17, 2016	Tindaklanjut Keputusan RUPS Sirkuler PT IP tanggal 2 Mei 2016 Follow up on Circular GMS Decision of PT IP dated 2 May 2016
2.	20 September 2016 September 20, 2016	Pengaturan Kegiatan Dewan Komisaris. Regulation of Board of Commissioners' activities
3.	26 September 2016 September 26, 2016	Koordinasi Dewan Komisaris Board of Commissioners' Coordination
4.	13 Oktober 2016 October 13, 2016	Issue Strategis Perusahaan Strategic Issues of Corporate
5.	14 Desember 2016 December 14, 2016	Permohonan Usulan Perubahan Batasan Pagu Kewenangan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Indonesia Power. Proposal of Amendment of Authority Limitation of Board of Directors and Board of Commissioners of Indonesia Power

Agenda, Tanggal dan Peserta Rapat Gabungan Dewan Komisaris-Direksi

Agenda, Date, and Participants of Joint Meetings of Board of Commissioners - Directors

No	Tanggal Pelaksanaan Date	Agenda Rapat Meeting Agenda
1.	28 Januari 2016 January 28, 2016	1. Program Pengenalan Dewan Komisaris. 2. Issue Strategis Perusahaan Tahun 2016 1. Board of Commissioners' Induction Program 2. Company's Strategic Issues in 2016
2	25 Februari 2016 February 25, 2016	1. Laporan Manajemen Perusahaan Tahun 2015. 2. Laporan kesiapan dan permasalahannya untuk semua Pembangkit ex FTP-1 yang dikelola oleh Indonesia Power. 3. Usulan perubahan Organisasi Perusahaan dalam menindaklanjuti Keputusan RUPS PT PLN (Persero). 4. Lanjutan Program Internalisasi *Indonesia Power Way.* 1. Corporate's Management Report in 2015. 2. Readiness and problems report for all ex-FTP-1 Power Plant managed by Indonesia Power. 3. Proposal of Corporate Organization Change in order to follow up the GMS Decision of PT PLN (Persero). 4. Program Continuation of Indonesia Power Way Internalization.
3.	30 Maret 2016 March 30, 2016	1. Issue Strategis Perusahaan s.d bulan Maret 2016. 2. Program Utama Direksi Indonesia Power – 2016 (*Lead Program*) masing-masing Direktur dalam rangka pencapaian KPI 2016. 3. Progress Akademi Kompetensi mendukung Akselerasi peningkatan Kompetensi O&M Pembangkitan. 1. Company's Strategic Issues until March 2016. 2. Directors' Lead Program of Indonesia Power - 2016, for the achievement of KPI 2016. 3. Progress of Competency Academy to support Competency Acceleration of Generating O&M.
4.	29 April 2016 April 29, 2016	1. Persiapan RUPS Laporan Pertanggungjawaban Tahunan 2015. 2. Penetapan Tiga Tugas Utama Direksi. 3. Laporan Perkembangan Bisnis Anak Perusahaan. 1. Preparation of GMS Annual Calculation Report 2015. 2. Determination of Directors' Three Main Duties. 3. Subsidiaries Business Development Report.
5.	26 Mei 2016 May 26, 2016	1. Program Pengenalan Dewan Komisaris PT Indonesia Power 2. Issue Strategis Perusahaan s.d bulan Mei 2016. 1. Induction Program for Board of Commissioners PT Indonesia Power 2. Corporate's Strategic Issues until May 2016.
6.	29 Juni 2016 Juni 29, 2016	1. Issue Strategis Perusahaan s.d bulan Juni 2016. 2. Tindak lanjut Tanggapan Dewan Komisaris pada Rapat Dewan Komisaris – Direksi bulan Januari s.d Mei 2016. 1. Corporate's Strategic Issues until June 2016. 2. Follow up on Board of Commissioners' Response on Joint Meeting of Board of Commissioners – Directors in January until May 2016.

DEWAN KOMISARIS
Board of Commissioners

No	Tanggal Pelaksanaan Date	Agenda Rapat Meeting Agenda
7.	3 Agustus 2016 August 3, 2016	1. Laporan Manajemen Semester I Tahun 2016. (termasuk laporan pemanfaatan anggaran investasi, penyebab dan upaya mempercepatnya). 2. Pemaparan S*trategy Growth* Perusahaan meliputi *Business Development Excellence*, O&M *Excellence,* HR *Excellence.* 3. Tindak lanjut bahasan Laporan Hasil Audit Internal Auditor Semester I Tahun 2016 meliputi: a. Pelaksanaan Pengadaan Barang & Jasa di UP/ UJP yang dilakukan oleh Koperasi setempat. b. *Engineering Change Proposal* (ECP) masing- masing pembangkit FTP 1. c. Gangguan sedimen di lokasi water intake tunnel PLTGU Grati. 4. Jadwal & Agenda internalisasi Indonesia Power Way dan IP AkSi s.d institusionalisasinya. 1. Management Report Semester I 2016. (including report on utilization of investment budget, causes, and efforts to accelerate). 2. Corporate's Strategy Growth includes Business Development Excellence, O&M Excellence, HR Excellence. 3. Follow-up on the discussion of Audit Report Findings of Internal Audit Unit Semester I 2016, covers: a. Procurement of Goods & Services in Generating Unit (GU) / Generating Services Unit (GSU) by local Cooperatives. b. Engineering Change Proposal (ECP) for each power plant at FTP 1. c. Sediment disturbance at water intake tunnel location in Combined Cycle Power Plant (CCPP) Grati. 4. Schedule and Agenda of Internalization Indonesia Power Way and IP AkSi until its institutionalization.
8.	1 September 2016 September 1, 2016	1. RJPP dan RKAP 2017. 2. *Strategy* HR, O&M *and Business Development Excellence.* 3. Strategi optimasi pemanfaatan anggaran Capex & Opex 2016, termasuk antisipasi penugasan baru dari PT PLN (Persero). 4. Pemaparan *Lead Program* masing-masing Direktur dan progress s.d bulan Agustus 2016. 1. Corporate Long Term Plan and Corporate Plan & Budget in 2017. 2. Human Resources Strategy, O&M, and Business Development Excellence. 3. An optimization strategy for utilization of Capex & Opex budget 2016, including the forecast for a new assignment from PT PLN (Persero). 4. Explanation of Lead Program from each Director and progress until August 2016.
9.	13 September 2016 September 13, 2016	Program Pengenalan mengenai Perseroan. Induction Program on the Company.
10.	20 September 2016 September 20, 2016	1. Permohonan Tanggapan Tertulis atas Pendirian Anak Perusahaan *Supply Chain.* 2. Permohonan Rekomendasi Tambahan Modal Disetor Indonesia Power di PT TPGP untuk pengembangan WKP Gunung Tangkuban Parahu. 1. Request for Written Response on Establishment of Supply Chain Subsidiaries. 2. Request for Recommendation for Additional Paid-Up Capital PT IP at PT TPGP for the development of Mining Working Area (WKP) at Gunung Tangkuban Parahu.

No	Tanggal Pelaksanaan Date	Agenda Rapat Meeting Agenda
11.	24 Oktober 2016 October 24, 2016	1. Issue Strategis Perusahaan s.d bulan Oktober 2016. 2. *Review* Organisasi Indonesia Power. 3. *Lead Program* Direksi (disesuaikan dengan Perkembangan Bisnis Perubahan). 1. Corporate's Strategic Issues until October 2016. 2. Indonesia Power Organization Review. 3. Directors' Lead Program (in accordance with the Business Development Changes).
12.	8 November 2016 November 8, 2016	1. Issue Strategis Perusahaan s.d bulan Oktober 2016 (lanjutan) 2. *Lead Program* Direksi (disesuaikan dengan Perkembangan Bisnis Perubahan). 1. Corporate's Strategic Issues until October 2016 (continuation). 2. Directors' Lead Program (in accordance with the Business Development Changes).
13.	21 November 2016 November 21, 2016	Pembahasan Persiapan RUPS RKAP Tahun 2017 Discussion on Preparation of GMS Work Plant & Budget in 2017
14.	28 Desember 2016 December 28, 2016	Issue Strategis Perusahaan s.d bulan Desember 2016 Corporate's Strategic Issues until December 2016.

Program Pengembangan Kompetensi Dewan Komisaris

Sebagai wujud pelaksanaan pembelajaran secara berkelanjutan, Dewan Komisaris setiap tahunnya melakukan program pengembangan kompetensi yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan/ kompetensi Dewan Komisaris. Selama tahun 2016 peningkatan kapabilitas yang pernah diikuti Dewan Komisaris Indonesia Power adalah sebagai berikut:

Board of Commissioners' Competency Development Program

As a realization of continuous learning, Board of Commissioners conducts competency development program every year in order to improve the knowledge/ competence of Board of Commissioners. Throughout 2016, capability enhancement attended by Board of Commissioners of Indonesia Power is as follow:

Bentuk Peningkatan Kapabilitas Capability Enhancement Form	Tanggal Pelaksanaan Date
Pelatihan *Enterprise Value Mapping*, UU Nomor 40, *Commercial Dispute & Arbitration*, GCG, *Stakeholder Management, Board Duties, Responsibilities & Liabilities* dan *Building Trust into Sustainable Business* bekerja sama dengan Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG). Enterprise Value Mapping Training, Law Number 40, Commercial Dispute & Arbitration, GCG, Stakeholder Management, Board Duties, Responsibilities & Liabilities, and Building Trust into Sustainable Business, cooperation with National Committee on Governance Policy (KNKG).	2 – 3 Mei 2016 dan 26 Mei 2016 di Bogor May 2-3, 2016 and Mei 26, 2016 in Bogor
Pelatihan *Project Management* Project Management Training	7-8 November 2016 di Hotel Westin. November 7-8, 2016 at Hotel Westin.

DEWAN KOMISARIS
Board of Commissioners

Bentuk Peningkatan Kapabilitas Capability Enhancement Form	Tanggal Pelaksanaan Date
Kunjungan Kerja Dewan Komisaris	1. UPJP Bali pada tanggal 29 Januari 2016. 2. UJP Pelabuhan Ratu pada tanggal 29 Februari 2016. 3. UP Perak Grati pada tanggal 31 Maret 2016. 4. PLTA Rajamandala pada tanggal 21 April 201.6 5. PLTP Kamojang - UPJP Kamojang pada tanggal 24 - 25 Juni 2016. 6. UPJP Kamojang pada tanggal 25 Juli 2016. 7. UJP Adipala dan UP Mrica pada tanggal 28 Juli 2016. 8. UPJP Priok pada tanggal 3 Agustus 2016. 9. UP Mrica dan UJP Adipala pada tanggal 10 Agustus 2016. 10. UJP Pangkalan Susu pada tanggal 13 September 2016. 11. UP Suralaya pada tanggal 22 September 2016. 12. UP Saguling pada tanggal 6 Oktober 2016. 13. UJP Jeranjang pada tanggal 19 Oktober 2016. 14. UP Perak Grati pada tanggal 24 November 2016. 15. UJP Sanggau pada tanggal 30 November 2016. 16. PLTU Tambak Lorok – UP Semarang pada tanggal 15 Desember 2016. 17. UP Mrica pada tanggal 16 Desember 2016.
Work Visitation of Board of Commissioners	1. Generating & Generating Services Unit (GGSU) Bali on 29 January 2016. 2. Generating Services Unit (GSU) Pelabuhan Ratu on 29 February 2016. 3. Generating Unit (GU) Perak Grati on 31 March 2016. 4. Hydro Power Plant (HPP) Rajamandala on 21 April 201.6 5. Geothermal Power Plant Kamojang - UPJP Kamojang on 24 - 25 June 2016. 6. Generating & Generating Services Unit (GGSU) Kamojang on 25 Juli 2016. 7. Generating Services Unit (GSU) Adipala and UP Mrica on 28 Juli 2016. 8. Generating & Generating Services Unit (GGSU) Priok on 3 August 2016. 9. Generating Unit (GU) Mrica and Generating Services Unit (GSU) Adipala on 10 August 2016. 10. Generating Services Unit (GSU) Pangkalan Susu on 13 September 2016. 11. Generating Unit (GU) Suralaya on 22 September 2016. 12. Generating Unit (GU) Saguling on 6 October 2016. 13. Generating Services Unit (GSU) Jeranjang on 19 October 2016. 14. Generating Unit (GU) Perak Grati on 24 November 2016. 15. Generating Services Unit (GSU) Sanggau on 30 November 2016. 16. Steam Power Plant (SPP) Tambak Lorok – Generating Unit (GU) Semarang on 15 December 2016. 17. Generating Unit (GU) Mrica on 16 December 2016.

Program Orientasi Bagi Komisaris Baru

Anggota Dewan Komisaris yang diangkat untuk pertama kalinya diberikan program orientasi/pengenalan mengenai Perusahaan. Program ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang visi, misi dan nilai-nilai Perusahaan, kode etik dan pedoman tingkah laku, struktur organisasi, serta pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris. Indonesia Power telah memiliki panduan atau *manual* terkait dengan program pengenalan bagi anggota Dewan Komisaris yang baru yang tercantum dalam *Board Manual*, yaitu mencakup:

1. Kepada Anggota Dewan Komisaris yang diangkat untuk pertama kalinya wajib diberikan Program Pengenalan mengenai Perusahaan
2. Tanggung jawab untuk mengadakan Program Pengenalan tersebut berada pada Sekretaris Perusahaan atau siapapun yang menjalankan fungsi sebagai Sekretaris Perusahaan
3. Materi Program Pengenalan meliputi:
   (a) Pelaksanaan prinsip-prinsip GCG oleh Perusahaan; (b) Gambaran mengenai Perusahaan berkaitan dengan tujuan, sifat, dan lingkup kegiatan, kinerja keuangan dan operasi, strategi, rencana usaha jangka pendek dan jangka panjang, posisi kompetitif, risiko dan masalah-masalah strategis lainnya; (c) Keterangan berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan, audit internal dan eksternal, sistem dan kebijakan pengendalian internal, termasuk Komite Audit; (d) Keterangan mengenai tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi serta hal-hal yang tidak diperbolehkan
4. Program Pengenalan Perseroan dapat berupa presentasi, pertemuan, kunjungan ke Perseroan dan pengkajian dokumen atau program lainnya yang dianggap sesuai dengan Perseroan dimana program tersebut dilaksanakan
5. Mekanisme penerapan pogram pengenalan dan pendalaman bagi Dewan Komisaris yaitu:
   (a) Dewan Komisaris menyampaikan kepada Direksi untuk diadakan program pengenalan bagi Anggota Dewan Komisaris yang baru diangkat; (b) Laporan terkait tingkat kehadiran/keaktifan Anggota Dewan Komisaris dalam mengikuti program pengenalan Perseroan.

Induction Program for New Commissioners

Member of Board of Commissioners who is appointed for the first time shall be given orientation/Induction program about the Company. The program's objective is to provide understanding on vision, mission, Company's values, code of conduct, organization structure, and Board Manual for Board of Commissioners. Indonesia Power has a manual related to Induction program for new members of Board of Commissioners, which is listed in the Board Manual, and covers:

1. Member of Board of Commissioners who is appointed for the first time shall be given Induction Program about the Company
2. The Corporate Secretary or any other official tasked to do the function of Corporate Secretary is responsible for the Induction Program
3. The Induction Program covers: (a) GCG principles implementation by the Company; (b) Company's overview on objectives, nature, and scope of activities, financial and operational performance, strategies, short-term and long-term business plan, competitive position, risk, and other strategic issues; (c) Information relating to delegated authorities, internal and external audit, internal control systems and policies, including the Audit Committee; (d) Information on the duties and responsibilities of the Board of Commissioners and the Board of Directors as well as things prohibited
4. Company's Induction Program can be in the form of presentations, meetings, visitation to Company, and documents review, or other programs deemed in line with the Company where the program is conducted
5. Mechanism of Induction and induction program for Board of Commissioners, i.e.: (a) Board of Commissioners sends a request to the Board of Directors for orientation program for the newly appointed member of Board of Commissioners; (b) Reports of the attendance/engagement level of the new member of Board of Commissioners during the Company's Induction program.

DEWAN KOMISARIS
Board of Commissioners

Selama tahun 2016, Indonesia Power telah menyelenggarakan program pengenalan kepada Dewan Komisaris yang baru diangkat, yaitu sebagai berikut:

Throughout 2016, Indonesia Power has held introduction program for new Commissioners, i.e.:

Tabel Program Pengenalan Dewan Komisaris Baru Tahun 2016
Table: Induction Program for New Board of Commissioners in 2016

Nama Dewan Komisaris Name of Commissioner	Materi Material	Tanggal Pelaksanaan Date
Abdi Mustakim	- Program Pengenalan mengenai Perseroan - Pengenalan Unit Pembangkitan (UP Bali) - Induction Program on the Company - Generating Unit (GU Bali) Induction	28 Januari 2016 January 28, 2016
Bagus Setiawan Agus Hernawan Munir Ahmad Tri Setyo Nugroho	- Program Pengenalan mengenai Perseroan - Induction Program on the Company	13 September 2016 September 13, 2016
Ahmad Yani	- Program Pengenalan mengenai Perseroan - Induction Program on the Company	9 September 2016 September 9, 2016

Penilaian atas Kinerja Masing-Masing Komite Di bawah Dewan Komisaris

Penilaian Kinerja terhadap Komite Dewan Komisaris ditentukan berdasarkan tugas dan tanggung jawab yang tercantum dalam Piagam Komite dan Program Kerja Komite. Kinerja Komite Audit dievaluasi oleh Dewan Komisaris setiap akhir tahun berdasarkan realisasi dan penyelesaian program kerja yang tercantum dalam Rencana Kerja dan Anggaran Komite Audit. Parameter penilaian meliputi:

1. Kontribusi terhadap pencapaian target Tim
2. Jumlah Kajian, Analisis, Rekomendasi
3. Tingkat keaktifan dalam kegiatan Tim
4. Kerjasama dalam Tim
5. Mutu dan Kualitas Konsep

Uraian lengkap mengenai Komite di Bawah Dewan Komisaris dijelaskan tersendiri dalam Bab Komite Di Bawah Dewan Komisaris pada bagian Laporan Tahunan ini.

Performance Assessment on Each Committee Reporting Directly to Board of Commissioners

Performance Assessment on the Board of Commissioners' Committee is determined based on the duty of the Charter Committee and Work Program of the Committee. Audit Committee's Performance is evaluated by the Board of Commissioners at the end of each year, based on the realization and completion of work program set in Work Program and Budget of Audit Committee. Assessment parameter covers:

1. Contribution to Team target achievement
2. Review, Analysis, and Recommendation
3. Activity Level in Team
4. Cooperation in Team
5. Concept Quality

Full description on Committee Reporting Directly to the Board of Commissioners is described in the Chapter Committees Reporting Directly to the Board of Commissioners in this Annual Report.

Organ Pendukung Dewan Komisaris

Dewan Komisaris selalu mengawasi kebijakan yang diambil Direksi berdasarkan laporan yang diterima atau temuan langsung di lapangan. Untuk membantu tugas-tugas Dewan Komisaris dalam melaksanakan penerapan kebijakan tata kelola tersebut, Dewan Komisaris telah membentuk Komite Audit, dan Komite Manajemen Risiko yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris dengan tugasnya adalah melakukan pemantauan, evaluasi, dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.

Direct Report to the Board of Commissioners

Board of Commissioners always supervises the policies taken by the Directors based on the report or direct field findings. To assist the duties of Board of Commissioners in implementing the governance policy, Board of Commissioners has established Audit Committee and Risk Management Committee, which are set forth in the Decree of Board of Commissioners, and their duties are to conduct monitoring, evaluations, and to provide recommendations to the Board of Commissioners.

KOMITE-KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS

Committees Reporting Directly to the Board of Commissioners

Untuk membantu tugas-tugas Dewan Komisaris dalam melaksanakan penerapan kebijakan tata kelola tersebut, Dewan Komisaris telah membentuk Komite Audit dan Komite Manajemen Risiko, yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris dengan tugasnya adalah melakukan pemantauan, evaluasi, dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.

To assist the duties of Board of Commissioners in implementing the governance policy, Board of Commissioners has established Audit Committee and Risk Management Committee, which are set forth in the Decree of Board of Commissioners, and their duties are to conduct monitoring, evaluations, and to provide recommendations to the Board of Commissioners.

Komite Audit

Komite Audit merupakan komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris untuk bekerja secara kolektif dalam menjaga efektivitas tugas dan tanggung jawabnya, khususnya dari segi pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit internal maupun eksternal serta pengawasan penerapan GCG di Perusahaan.

Audit Committee

Audit Committee is a Committee established by the Board of Commissioners to work collectively in maintaining the effectivity of its duties and responsibilities, specifically in monitoring and evaluation of planning and implementation of the internal and external audit, and supervising the GCG implementation in the Company.

Pengangkatan dan Pemberhentian Komite Audit

Komite Audit dibentuk oleh Dewan Komisaris dan oleh karenanya Komite Audit bertanggung jawab secara langsung kepada Dewan Komisaris. Pengangkatan dan pemberhentian anggota Komite Audit terakhir yang dilakukan oleh Dewan Komisaris berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor 007.SK/DEWAN KOMISARIS-IP/2016 tanggal 20 September 2016. Pemberhentian anggota Komite Audit dapat dilakukan apabila yang bersangkutan berakhir masa jabatan keanggotaannya dan berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris, diberhentikan karena tidak memenuhi kinerja yang telah ditetapkan dan/ atau tidak kompeten dalam menjalankan tugasnya.

Appointment and Dismissal of Audit Committee

Audit Committee is established by the Board of Commissioners, and therefore, Audit Committee is directly responsible to the Board of Commissioners. The last appointment and dismissal of members of Audit Committee were conducted by Board of Commissioners based on the Decree of Board of Commissioners Number 007.SK/DEWAN KOMISARIS-IP/2016 dated 20 September 2016. The dismissal of a member of Audit Committee shall be conducted if the incumbent finished their term of office, and if, based on the Decree of Board of Commissioners, is dismissed because the incumbent failed to meet the performance set forth and/or is not competent in carrying out his/her duties.

Susunan dan Komposisi Anggota Komite Audit

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2016, komposisi anggota Komite Audit Indonesia Power berjumlah enam orang, termasuk anggota dari unsur Dewan Komisaris yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor 007.SK/DEWAN KOMISARIS-IP/2016 tanggal 20 September 2016. Berikut komposisi anggota Komite Audit Indonesia Power tahun 2016:

Composition of the Audit Committee

As of 31 December 2016, the Audit Committee of Indonesia Power consists of six persons, including members of Board of Commissioners who was set forth based on the Decree of Board of Commissioners Number 007.SK/DEWAN KOMISARIS-IP/2016 dated 20 September 2016. The following is the composition of Audit Committee of Indonesia Power in 2016:

Tabel Komposisi Komite Audit Tahun 2016
Table: Composition of Audit Committee in 2016

Nama Name	Jabatan	Position
Agus Hernawan	Ketua Komite Audit	Chairman of Audit Committee
Abdi Mustakim	Wakil Komite Audit I	Vice Chairman of Audit Committee I
Munir Ahmad	Wakil Komite Audit II	Vice Chairman of Audit Committee II
Sudirmanto	Sekretaris Komite Audit	Secretary of Audit Committee
Dewa Gede Ngurah Ambara	Anggota Komite Audit	Audit Committee Member
Jefri Rosiadi	Anggota Komite Audit	Audit Committee Member

Profil Anggota Komite Audit

Audit Committee Member Profile

Nama Name	Profil Singkat	Brief Profile
 Agus Hernawan Ketua Komite Audit Head of Audit Committee	Profil ketua Komite Audit terkait jabatan, periode jabatan, riwayat pendidikan (Bidang Studi dan Lembaga Pendidikan) dan pengalaman kerja (Jabatan, Instansi, dan Periode Menjabat) telah diuraikan pada bagian profil Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini.	Profile of Chairman of Audit Committee, related to the position, term of office, education background (Field of Study and Institution), and work experience (Position, Institution, and Served Period) has been described in the Board of Commissioners' profile in this Annual Report.

KOMITE-KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS

Committees Reporting Directly to the Board of Commissioners

Nama Name	Profil Singkat	Brief Profile
 Abdi Mustakim Wakil Komite Audit I Vice Chairman of Audit Committee I	Profil wakil Komite Audit I terkait jabatan, periode jabatan, riwayat pendidikan (Bidang Studi dan Lembaga Pendidikan) dan pengalaman kerja (Jabatan, Instansi, dan Periode Menjabat) telah diuraikan pada bagian profil Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini.	Profile of Vice Chairman of Audit Committee I, related to the position, term of office, education background (Field of Study and Institution), and work experience (Position, Institution, and Served Period) has been described in the Board of Commissioners' profile in this Annual Report.
 Munir Ahmad Wakil Komite Audit II Vice Chairman of Audit Committee II	Profil wakil Komite Audit II terkait jabatan, periode jabatan, riwayat pendidikan (Bidang Studi dan Lembaga Pendidikan) dan pengalaman kerja (Jabatan, Instansi, dan Periode Menjabat) telah diuraikan pada bagian profil Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini.	Profile of Vice Chairman of Audit Committee II, related to the position, term of office, education background (Field of Study and Institution), and work experience (Position, Institution, and Served Period) has been described in the Board of Commissioners' profile in this Annual Report.
 Sudirmanto Sekretaris Komite Audit Secretary of Audit Committee	Lahir di Jakarta tanggal 9 Oktober 1958. Domisili : Tangerang Riwayat Pendidikan: Lulusan Sarjana Teknik Mesin dari Sekolah Tinggi Teknik Mesin (STTN) pada tahun 1986 dan Master Manajemen dari Sekolah Tinggi Manajemen PPM School of Management tahun 1999 Riwayat Kerja: General Manager UP Semarang tahun 2004-2006; Vice President Pengusahaan Pembangkit Kelompok II tahun 2006-2008; General Manager UP Suralaya tahun 2008-2010; Kepala Satuan Audit PT Indonesia Power Tahun 2010-2014; dan Sekretaris Komite Audit PT Indonesia Power Tahun 2016. Pelatihan: - Bisnis dan Kontrak Batubara Indonesia Power - Risk Assesment dan *Risk Assesment International Control Review* - Standar Profesi Audit Internal & *Quality Assurance* - *Risk Based Audit* Dasar Pengangkatan: Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor 007. SK/DEWAN KOMISARIS-IP/2016 tanggal 20 September 2016	Born in Jakarta, on 9 October 1958. Domicile: Tangerang Education Background: Bachelor of Mechanical Engineering from Sekolah Tinggi Teknik Mesin (STTN) in 1986, and Master of Management from Sekolah Tinggi Manajemen PPM School of Management in 1999 Work Experience: General Manager Semarang GU in 2004-2006; Vice President of Power Plant Operations Group II in 2006-2008; General Manager Suralaya GU in 2008-2010; Head of Internal Auditor PT Indonesia Power in 2010-2014; and Secretary of Audit Committee PT Indonesia Power in 2016. Training: - Coal Business and Contract Indonesia Power - Risk Assessment and Risk Assessment International Control Review - Internal Audit & Quality Assurance Professional Standards - Risk Based Audit Appointment Basis: Decree of Board of Commissioners Number 007.SK/DEWAN KOMISARIS-IP/2016 dated 20 September 2016

Nama Name	Profil Singkat	Brief Profile
 Dewa Gede Ngurah Ambara Anggota Komite Audit Member of Audit Committee	Lahir di Amlapura Bali, 24 Oktober 1960. Domisili : Ambon Riwayat Pendidikan: Lulusan Sarjana Teknik Mesin dari Institut Teknologi Bandung pada tahun 1985. Pelatihan: - Sistem Manajemen PMT - *Advanced Professional Training*. Riwayat Kerja: Manajer Senior Aset Pembangkit PT PLN (PERSERO) Kantor Pusat Tahun 2010; General Manager PT PLN (PERSERO) Pembangkitan Tanjung Jati B Tahun 2010-2013; Kepala Divisi Pembangkitan Jawa Bali Pada Direktorat (Operasi Jawa-Bali-Sumatera) PT PLN (PERSERO) Kantor Pusat Tahun 2014; dan Anggota Komite Audit PT Indonesia Power Tahun 2016. Dasar Pengangkatan: Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor 007.SK/DEWAN KOMISARIS-IP/2016 tanggal 20 September 2016	Born in Amlapura Bali, 24 October 1960. Domicile: Ambon Education Background: Bachelor of Mechanical Engineering from Institut Teknologi Bandung in 1985. Training: - PMT Management System - Advanced Professional Training Work Experience: Senior Manager of Power Plant Assets PT PLN (PERSERO) in Head Office, 2010; General Manager PT PLN (PERSERO) in Power Plant Tanjung Jati B, 2010-2013; Division Head of Java Bali Generator in Directorate (Java-Bali-Sumatera Operation) PT PLN (PERSERO), Head Office, 2014; and Audit Committee Member of PT Indonesia Power 2016. Appointment Basis: Decree of Board of Commissioners Number 007.SK/DEWAN KOMISARIS-IP/2016 dated 20 September 2016
 Jefri Rosiadi Anggota Komite Audit Member of Audit Committee	Lahir di Medan, 31 Mei 1966 Domisili : Tangerang Riwayat Pendidikan: Lulusan Sarjana Teknik Mesin Universitas Syiah Kuala Banda Aceh pada tahun 1990; Master Bidang Mesin dari Institut Teknologi Bandung pada tahun 2009. Pelatihan: - Sertifikasi QIA (dasar) - Pelatihan ATKI Bidang Pembangkit tenaga Listrik Riwayat Kerja: Senior Specialist II Kemitraan Bisnis PT PLN (PERSERO) Kantor Pusat Tahun 2010-2012; Kepala Bidang Kinerja Organisasi PT PLN (PERSERO) Kantor Pusat Tahun 2011; Manajer Senior Perencanaan Pengadaan IPP Tahun 2012-2014; dan Anggota Komite Audit PT Indonesia Power Tahun 2016. Dasar Pengangkatan: Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor 007.SK/DEWAN KOMISARIS-IP/2016 tanggal 20 September 2016	Born in Medan, 31 May 1966 Domicile: Tangerang Education Background: Bachelor Mechanical Engineering from University of Syiah Kuala Banda Aceh in 1990; Master of Mechanical Engineering from Institut Teknologi Bandung in 2009. Training: - QIA Certification (basic) - ATKI Training on Power Plant Work Experience: Senior Specialist II of Business Partner PT PLN (PERSERO) in Head Office, 2010-2012; Head of Organization Performance PT PLN (PERSERO) in Head Office, 2011; Senior Manager of IPP Procurement Planning in 2012-2014; and Audit Committee Member of PT Indonesia Power 2016. Appointment Basis: Decree of Board of Commissioners Number 007.SK/DEWAN KOMISARIS-IP/2016 dated 20 September 2016

KOMITE-KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS
Committees Reporting Directly to the Board of Commissioners

Independensi Anggota Komite Audit

Dewan Komisaris dapat mengangkat anggota Komite Audit dari luar Perusahaan atau independen. Anggota Komite Audit dari pihak independen terdiri dari profesional dalam bidang hukum, akuntan publik, ahli keuangan, dan ahli di bidang industri Perusahaan. Anggota Komite Audit harus bebas dari segala potensi benturan kepentingan sehingga tidak menggangu obyektivitas pendapatnya terhadap masalah yang dihadapi. Untuk itu, anggota Komite Audit diminta membuat surat pernyataan bebas dari *conflict of interest* apabila diperlukan.

Sesuai dengan peraturan tentang pelaksanaan GCG, seluruh anggota Komite Audit Indonesia Power bersifat independen dan tidak memiliki rangkap jabatan di dalam dan di luar Perusahaan yang dapat mempengaruhi kemampuan mereka untuk bertindak independen. Independensi anggota Komite Audit tercermin dalam hubungan keluarga, hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham serta pengurus dalam partai politik sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut:

Independence of Audit Committee Members

Board of Commissioners can appoint a member of Audit Committee from outside the Company or independently. The Audit Committee Member from independent parties consists of professionals in the field of law, public accountant, financial expert, and expert in the Company's industry. Audit Committee Member shall be free from any potential conflict of interest, so as not to interfere the objectivity of their views on the problems faced. Therefore, Audit Committee Member is requested to make Declaration of Absence of Conflict of Interest if needed.

In line with the regulations on GCG implementation, all member of Audit Committee of Indonesia Power is independent and does not hold concurrent positions inside and outside the Company that may influence their ability to act independently. Independence of Audit Committee Member is reflected on the familial relationship, financial relationship, management relationship, share ownership, as well as management in political parties, as explained in the following table:

Tabel Komposisi Komite Audit Tahun 2016
Table: Audit Committee Independence

No	Aspek Independensi Independency Aspect	Agus Hernawan	Abdi Mustakim	Munir Ahmad	Sudirmanto	Dewa Gede Ngurah Ambara	Jefri Rosiadi
1	Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi Does not have a financial relationship with the Board of Commissioners and Board of Directors	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	Tidak memiliki Hubungan kepengurusan di Indonesia Power, anak Perusahaan maupun Perusahaan afiliasi Does not have a management relationship in Indonesia Power, subsidiaries or affiliated companies	✓	✓	✓	✓	✓	✓

No	Aspek Independensi Independency Aspect	Agus Hernawan	Abdi Mustakim	Munir Ahmad	Sudirmanto	Dewa Gede Ngurah Ambara	Jefri Rosiadi
3	Tidak memiliki Hubungan kepemilikan saham di Indonesia Power Does not have a share ownership relationship in Indonesia Power	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	Tidak memiliki Hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau sesama anggota Komite Audit Does not have any familial relationship with the Board of Commissioners, Board of Directors, and/or fellow members of the Audit Committee	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat pemerintah daerah Does not serve on the board of political parties, local government official	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Pedoman Kerja Komite Audit (Piagam Komite Audit)

Dalam melaksanakan fungsi dan perannya, Komite Audit Indonesia Power telah dilengkapi Pedoman Kerja dalam Piagam Komite Audit yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris Nomor 240.K/010/IP/2016 dan Nomor 014. SK/DEKOM-IP/2016 tentang Piagam Komite Audit PT Indonesia Power. Piagam Komite Audit mengatur hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewajiban anggota Komite Audit, antara lain fungsi dan tugas pokok Komite Audit, kewajiban, tanggung jawab dan wewenang Komite Audit, Kode Etik, Rapat Komite Audit, Penilaian kinerja Komite Audit serta honorarium dan pembebanan biaya Komite Audit.

Work Guidelines of Audit Committee (Audit Committee Charter)

In carrying out its functions and roles, Audit Committee of Indonesia Power is equipped with Work Guidelines in the Audit Committee Charter that is set forth based on the Joint Decree of the Directors and Board of Commissioners Number 240.K/010/IP/2016 and Number 014.SK/DEKOM IP/2016 on Audit Committee Charter of PT Indonesia Power. Audit Committee Charter regulates matters related to the duties and responsibilities of Audit Committee Member, such as function and main duty of Audit Committee, obligations, responsibilities, and authorities of Audit Committee, Code of Conduct, Audit Committee's Meeting, Audit Committee's Performance Assessment, honorarium, and expenditures of Audit Committee.

KOMITE-KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS
Committees Reporting Directly to the Board of Commissioners

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Komite Audit bertugas membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas pengawasan dengan melakukan penilaian terhadap *internal control* atas kegiatan kegiatan yang dilakukan oleh Manajemen Perusahaan dengan tugas pokoknya antara lain:

1. Menelaah program audit tahunan yang disusun Auditor Internal dan Auditor Eksternal
2. Melakukan penelaahan atas kecukupan pemeriksaan yang dilakukan oleh Auditor Internal dan Auditor Eksternal
3. Memberikan masukan kepada Dewan Komisaris mengenai tindak lanjut temuan audit, termasuk temuan signifikan yang belum ditindak lanjuti secara tuntas
4. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan seperti Laporan Keuangan, Proyeksi dan Informasi Keuangan lainnya
5. Memberikan saran kepada Manajemen melalui Dewan Komisaris mengenai berbagai hal yang dapat meningkatkan kelancaran dan efektivitas proses audit
6. Memberikan masukan kepada Dewan Komisaris mengenai perubahan dan penyempurnaan Piagam Komite Audit
7. Mengevaluasi hasil pemantauan Auditor Internal atas tindak lanjut hasil audit dan menelaah kecukupan sumber daya serta kualifikasi tenaga Auditor Internal
8. Bersama tim seleksi memilih Auditor Eksternal yang akan melakukan audit dan mengusulkan agar dilakukan penggantian Auditor Eksternal apabila yang sedang bertugas dinilai tidak kompeten
9. Memantau pelaksanaan GCG dan melakukan evaluasi hasil assesment berkala atas penerapan GCG guna memastikan prinsip-prinsip GCG diterapkan dalam pengelolaan Perusahaan oleh organ Perusahaan termasuk organ pendukungnya

Audit Committee's Duties and Responsibilities

Audit Committee is responsible for assisting Board of Commissioners in carrying out supervisory duties, by conducting an assessment of internal control over the activities of Company's Management, and its main duties, among others, are:

1. Reviewing annual audit program compiled by Internal Auditor and External Auditor
2. Reviewing the adequacy of audit conducted by Internal Auditor and External Auditor
3. Providing input to Board of Commissioners on follow-up of audit findings, including significant findings that have not been followed up thoroughly
4. Reviewing financial information that will be published by Company, such as Financial Statements, Projections, and Other Financial Information
5. Providing suggestion to Management through Board of Commissioners on matters that may be able to improve continuity and effectivity of audit process
6. Providing input to Board of Commissioners on amendment and refinement of Audit Committee Charter
7. Evaluating monitoring result of Internal Auditor on the follow up of audit result, and reviewing the adequacy of resources and qualification of Internal Auditor
8. With selection team, appointing External Auditor that will perform audit, and suggesting that External Auditor is replaced in the event that the External Auditor in duty is considered incompetent
9. Monitoring the GCG implementation and conducting evaluation on assessment result periodically on the GCG implementation, in order to ensure that the GCG principles are implemented in the Company's management by the Company's organ and supporting organs

10. Melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi tentang penyempurnaan sistim dan kelengkapan GCG Perusahaan terutama berkenaan dengan Pedoman Tata Kelola Perusahaan (*GCG Code*); Pedoman Etika Perusahaan (*Code of Conduct*); *Statement of Corporate Intent* (SCI); Pedoman kerja Direksi dan Dewan Komisaris (*Board Manual*); *Road Map* dan laporan tentang pelaksanaan GCG sebagai bagian dari Laporan Tahunan di Perusahaan
11. Membuat laporan tertulis dan melakukan paparan kepada Dewan Komisaris
12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris sepanjang masih dalam lingkup tugas dan kewajiban Dewan Komisaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

10. Conducting evaluation and providing recommendation on the refinement of Company's GCG system and completeness, especially related to GCG Code, Code of Conduct, Statement of Corporate Intent (SCI), Board Manual, Road Map, and report on the GCG implementation, as part of Company's Annual Report
11. Compiling written report and presenting the report to Board of Commissioners
12. Carrying out other duties given by Board of Commissioners as long as it is within the scope of duties and responsibilities of Board of Commissioners based on the prevailing laws and regulations.

Pengembangan Kompetensi Komite Audit

Seluruh anggota Komite Audit telah diikutsertakan dalam berbagai program pendidikan, pelatihan, maupun *workshop* sesuai dengan bidang keahliannya guna meningkatkan kompetensi untuk mendukung pelaksanaan tugas Komite Audit. Berikut tabel pengembangan kompetensi Komite Audit Indonesia Power tahun 2016:

Audit Committee Competency Development

All Member of Audit Committee participated in numerous education program, training, and workshop, within their area of expertise, in order to improve competence to support the implementation of Audit Committee's duties. The following is a table of Audit Committee Competency Development of Indonesia Power in 2016:

Tabel Pelatihan Komite Audit Tahun 2016
Table: Audit Committee Training in 2016

Nama Peserta Name	Nama Diklat Training	Nama Lembaga Institution	Tanggal Date	Lokasi Location
Sudirmanto	*Trust, Governance, and Sustainability"*	*The Indonesian Institut for Corporate Governance*	26 Mei 2016 May 26, 2016	Bogor

Program Kerja Komite Audit Tahun 2016

Program kerja Komite Audit Perusahaan tahun buku 2016 adalah sebagai berikut :

Audit Committee Work Program in 2016

Audit Committee work program of the Company in the fiscal year 2016 is as follows:

KOMITE-KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS

Committees Reporting Directly to the Board of Commissioners

Tabel Program Kerja Komite Audit Tahun 2016

Table: Audit Committee Work Program in 2016

Program Kerja	Work Program
1. Penelaahan program audit tahunan	1. Review of annual audit program
2. Penelaahan atas kecukupan pemeriksaan yang dilakukan auditor	2. Review of the adequacy of audit by the auditor
3. Memberi masukan kepada Dewan Komisaris mengenai tindak lanjut temuan audit	3. Provide input to Board of Commissioners on the follow-up of audit findings
4. Penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan	4. Review of the financial information that will be published by the Company
5. Memberi saran kepada Manajemen melalui Dewan Komisaris mengenai peningkatan kelancaran dan efektivitas proses audit	5. Provide suggestion to Management through Board of Commissioners on matters that may be able to improve continuity and effectivity of audit process
6. Memberi masukan kepada Dewan Komisaris mengenai perubahan dan penyempurnaan Piagam Komite Audit	6. Provide input to Board of Commissioners on amendment and refinement of Audit Committee Charter
7. Evaluasi hasil pemantauan auditor internal dan penelaahan kecukupan sumber daya serta kualifikasi tenaga auditor internal	7. Evaluate monitoring result of Internal Auditor on the follow up of audit result, and reviewing the adequacy of resources and qualification of Internal Auditor
8. Memantau pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) dan melakukan evaluasi hasil *assessment* GCG	8. Conduct monitoring of Good Corporate Governance (GCG) and evaluate the GCG assessment result
9. Melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi atas penyempurnaan sistim dan kelengkapan GCG Perusahaan	9. Evaluate and provide recommendation on the refinement of Company's GCG system and completeness
Rapat Berkala	**Regular Meeting**
1. Rapat rutin internal Komite Audit sekurang kurangnya 1 (satu) kali dalam satu bulan.	1. Routine internal meeting of Audit Committee at least once a month.
2. Rapat koordinasi Komite Audit dengan Satuan Audit Internal PT Indonesia Power, dilaksanakan sekurang kurangnya 1 (satu) kali dalam satu bulan dan Rapat dilaksanakan di Kantor pusat PT Indonesia Power atau di UP/ UPJP/ UJH/ UJP jika diperlukan.	2. Audit Committee coordination meeting with Internal Audit Unit of PT Indonesia Power, holds at least once a month, and the Meeting shall be conducted at Head Office of PT Indonesia Power or at GU/ GGSU/MSU/GSU if needed.
3. Apabila diperlukan, Komite Audit dapat mengundang Manajemen Perseroan dan atau Satuan Audit Internal PT Indonesia Power untuk memberikan informasi yang diperlukan.	3. If deemed necessary, Audit Committee may invite Company's Management and/or Internal Audit Unit of PT Indonesia Power to provide the necessary information.
4. Rapat Rutin Koordinasi Komite Audit Dewan Komisaris PT Indonesia Power dengan Sekretaris Perusahaan PT Indonesia Power, dilaksanakan sekurang kurangnya 1 (satu) kali dalam satu bulan.	4. Regular Coordination Meeting of Audit Committee with Board of Commissioners and Corporate Secretary of PT Indonesia Power, at least once a month.
5. Rapat dengan KAP dan Kepala Satuan Internal Audit mengenai rencana pemeriksaan tahunan dan hasil Audit rutin/ khusus KAP dilingkungan PT Indonesia Power.	5. Meeting with Public Accounting Firm (KAP) and Head of Internal Auditor on annual audit plan and regular/special Audit result of the KAP within PT Indonesia Power
6. Rapat internal Komite Audit dengan Komite Manajemen Risiko membahas usulan Program Strategis Manajemen PT Indonesia Power & Laporan Kinerja Perusahaan.	6. Internal Meeting of Audit Committee with Risk Management Committee to discuss the proposal of Strategic Management Program of PT Indonesia Power & Corporate Performance Report.

Rapat Komite Audit

Komite Audit melaksanakan rapat guna membahas berbagai aspek terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit dalam mendukung fungsi pengawasan dan konsultasi Dewan Komisaris serta memberikan rekomendasi atas telaah yang telah dilakukan oleh Komite Audit. Berdasarkan Piagam Komite Audit, rapat diselenggarakan secara berkala terdiri dari rapat koordinasi Komite Audit dengan Satuan Audit Internal yang dilaksanakan minimal sebulan sekali serta pertemuan dengan auditor eksternal minimal sebulan sekali pada saat ada jadwal pemeriksaan audit. Dalam pelaksanaan rapat, Komite Audit dapat mengundang Manajemen melalui Satuan Audit Internal untuk memberikan informasi yang diperlukan.

Audit Committee's Meeting

Audit Committee holds meetings in order to discuss aspects related to duties and responsibilities of Audit Committee in supporting the supervisory and advisory function of the Board of Commissioners, and to provide recommendations on the review carried out by the Audit Committee. Based on the Audit Committee Charter, the regular meeting consists of a coordination meeting of Audit Committee with Internal Audit Unit, which is held at least once a month, and meeting with external auditor at least once a month at the time of audit schedule. In the meeting, Audit Committee may invite Management through Internal Audit Unit to provide necessary information.

Frekuensi Pertemuan dan Tingkat Kehadiran Komite Audit

Selama tahun 2016, Komite Audit telah menyelenggarakan rapat sebanyak 15 kali. Keputusan yang diambil dalam rapat Komite Audit telah dicatat dan didokumentasikan dengan baik dalam risalah rapat Komite Audit yang di tandangani oleh ketua rapat dan didistribusikan kepada semua anggota Komite Audit yang menghadiri rapat maupun tidak. Perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) yang terjadi dalam rapat akan dicantumkan dalam risalah rapat disertai alasan mengenai perbedaan pendapat. Berikut frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran Komite Audit dalam rapat Komite tahun 2016:

Meeting Frequency and Attendance of Audit Committee

Throughout 2016, Audit Committee has held 15 meetings. Decision made in the Audit Committee Meeting is recorded and documented properly in Minutes of Audit Committee Meeting, and is signed by the Chairman of the Meeting, and distributed to all Member of Audit Committee who attended the meeting and who did not. The dissenting opinion that happened at the meeting shall be noted in the minutes of the meeting as well as the reasons as to why. The following is the meeting frequency and attendance of Audit Committee in the Committee's meeting in 2016:

Tabel Frekuensi Kehadiran Rapat Komite Audit Tahun 2016
Table: Meeting Frequency and Attendance of Audit Committee in 2016

Nama Name	Jumlah Rapat Meetings	Jumlah Kehadiran Attendance	%
Bagus Setiawan *	5	0	0
Abdi Mustakim	11	0	0
Agus Hernawan *	5	4	80
Munir Ahmad *	5	1	20
Sudirmanto	15	14	93
Dewa Gede Ngurah Ambara	15	1	7
Jefri Rosiadi	15	1	7

*) Sdr. Bagus Setiawan, Agus Hernawan dan Munir Ahmad menjabat sebagai Dewan Komisaris sesuai dengan RUPS sirkuler tanggal 25 Agustus 2016, sehingga jumlah rapat yang harus dihadiri sebanyak 5 kali rapat.
*) Mr. Bagus Setiawan, Agus Hernawan, and Munir Ahmad serve as Board of Commissioners in accordance with Circular GMS dated 25 August 2016, hence the obligatory number of meetings attended is 5 meetings.

KOMITE-KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS

Committees Reporting Directly to the Board of Commissioners

Selain rapat internal, Komite Audit juga telah melaksanakan rapat gabungan dengan Komite di bawah Dewan Komisaris yang dihadiri oleh Dewan Komisaris. Berikut frekuensi kehadiran Komite di bawah Dewan Komisaris dalam rapat gabungan yang dihadiri oleh Dewan Komisaris, Komite Audit dan Komite Manajemen risiko.

In addition to internal meeting, Audit Committee also holds joint meeting with Committee reporting directly to the Board of Commissioners, which is attended by Board of Commissioners. The following is the meeting frequency of Committee reporting directly to Board of Commissioners in joint meeting attended by Board of Commissioners, Audit Committee, and Risk Management Committee.

Tabel Frekuensi Kehadiran Rapat Gabungan Komite Dewan Komisaris Tahun 2016

Table: Meeting Frequency of Joint Meeting of Committee and Board of Commissioners in 2016

Nama Name	Jabatan Position	Jumlah Rapat Meetings	Jumlah Kehadiran Attendance	%
Bagus Setiawan	Komisaris Utama President Commissioner	6	1	17
Agus Hernawan	Komisaris Independen Independent Commissioner	6	3	50
Munir Ahmad	Komisaris Independent Commissioner	6	2	12
Abdi Mustakim	Komisaris Independent Commissioner	36	1	3
Ahmad Yani	Komisaris Independen Independent Commissioner	36	1	3
Tri Setyo Nugroho	Komisaris Independen Independent Commissioner	6	3	50
Agustinus Lilik	Sekretaris Komite Manajemen Risiko Secretary of Risk Management Committee	36	23	64
Alfath Cordealmalutha	Anggota Komite Manajemen Risiko Risk Management Committee Member	36	13	36
Supriyanto	Anggota Komite Manajemen Risiko Risk Management Committee Member	36	22	61
Sudirmanto	Sekretaris Komite Audit Secretary of Audit Committee	36	33	92
Dewa Gede Ngurah Ambara	Anggota Komite Audit Audit Committee Member	36	6	17
Jefri Rosiadi	Anggota Komite Audit Audit Committee Member	36	6	17

Tanggal Pelaksanaan dan Agenda Rapat Komite Audit Tahun 2016

Date and Agenda of Audit Committee Meeting in 2016

No	Tanggal Pelaksanaan Date	Agenda Rapat	Meeting Agenda
1.	8 Januari 2016 January 8, 2016	Program kerja Komite Audit Tahun 2015.	Audit Committee Work Program in 2015.
2.	14 Januari 2016 January 14, 2016	Laporan Hasil Audit Operasional Semester II Tahun 2015.	Operational Audit Result Report in Semester II 2015.
3.	25 Januari 2016 January 25, 2016	Laporan Hasil Audit Operasional Semester II Tahun 2015.	Operational Audit Result Report in Semester II 2015.
4.	18 April 2016 April 18, 2016	1. Rapat Koordinasi Komite Audit- Kepala Satuan Audit Internal PT Indonesia Power s.d. bulan April 2016. 2. Laporan *Whistle Blowing System* (WBS).	1. Coordination Meeting of Audit Committee – Head of Internal Auditor PT Indonesia Power until April 2016. 2. Whistle Blowing System (WBS) Report.
5.	27 Mei 2016 May 27, 2016	1. Laporan Sistem Pengendalian Internal PT Indonesia Power 2. Rapat Koordinasi Komite Audit- Kepala Satuan Audit Internal PT Indonesia Power s.d. bulan Mei 2016.	1. Internal Control System Report of PT Indonesia Power 2. Coordination Meeting of Audit Committee – Head of Internal Auditor PT Indonesia Power until May 2016.
6.	23 Juni 2016 June 23, 2016	Rapat Koordinasi Komite Audit- Kepala Satuan Audit Internal PT Indonesia Power s.d. bulan Juni 2016.	Coordination Meeting of Audit Committee – Head of Internal Auditor PT Indonesia Power until June 2016.
7.	20 Juli 2016 July 20, 2016	Laporan Hasil Audit Operasional Semester I Tahun 2016.	Operational Audit Result Report in Semester I 2016.
8.	25 Juli 2016 July 25, 2016	Rapat Koordinasi Komite Audit- Kepala Satuan Audit Internal PT Indonesia Power dalam pembahasan kegiatan Satuan Audit Internal s.d. bulan Juni 2016.	Coordination Meeting of Audit Committee – KSAT ADI PT Indonesia Power on activity discussion of Internal Auditor until June 2016.
9.	15 Agustus 2016 August 15, 2016	Rapat Koordinasi Komite Audit- Kepala Satuan Audit Internal PT Indonesia Power s.d. bulan Juli 2016.	Coordination Meeting of Audit Committee – Head of Internal Auditor PT Indonesia Power until July 2016.
10.	16 Agustus 2016 August 16, 2016	Audit PwC untuk Laporan Keuangan Semester I Tahun 2016.	PwC Audit for Financial Statements Semester I 2016.
11.	5 Oktober 2016 October 5, 2016	Pemutakhiran Proses Audit KAP PwC.	Update on Audit Process of Public Accounting Firm (KAP) PwC.
12.	17 Oktober 2016 October 17, 2016	Pembahasan kegiatan Satuan Audit Internal s.d. bulan Agustus 2016.	Activity discussion of Internal Auditor until August 2016.
13.	1 November 2016 November 1, 2016	Proses Pelaksanaan GCG s.d. bulan Oktober 2016.	GCG Implementation Process until October 2016.

KOMITE-KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS
Committees Reporting Directly to the Board of Commissioners

No	Tanggal Pelaksanaan Date	Agenda Rapat	Meeting Agenda
14.	28 November 2016 November 28, 2016	1. Rencana Kerja Komite Audit Dewan Komisaris Tahun 2017. 2. Piagam Komite Audit Dewan Komisaris PT Indonesia Power. 3. Piagam Komite Audit Dewan Komisaris – Satuan Audit Internal PT Indonesia Power.	1. Audit Committee and Board of Commissioners Work Program for 2017. 2. Audit Committee Charter of Board of Commissioners PT Indonesia Power. 3. Audit Committee Charter of Board of Commissioners – Internal Audit Unit PT Indonesia Power.
15.	13 Desember 2016 December 13, 2016	*Kick Off Meeting* dengan KAP RSM untuk Rencana Generasi Audit Tahun 2016 PT Indonesia Power.	Kick Off Meeting with Public Accounting Firm RSM for Audit Generation Plan 2016 PT Indonesia Power.

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Komite Audit Tahun 2016

Komite Audit melaksanakan tugasnya sebagai organ pendukung Dewan Komisaris dalam memberikan rekomendasi serta memastikan efektivitas sistem pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas eksternal auditor dan internal auditor melalui pembahasan bersama fungsi-fungsi terkait dan dalam rapat Komite Audit. Berikut rekomendasi Komite Audit Indonesia Power sepanjang tahun 2016:

1. Melaksanakan pengelolaan K3L di lingkungan PLTU Pangkalan Susu dan unit lain yang O & M nya dikelola Perusahaan sesuai ketentuan.
2. Meminta *Internal Audit* melakukan *monitoring* lebih lanjut terhadap *action plan* dan implementasinya untuk hal-hal yang menjadi bahasan pada Laporan Hasil Audit (LHA) semester I tahun 2016.
3. Membentuk tim yang melakukan penelitian terhadap keseluruhan kontrak-kontrak sesuai dengan kaidah-kaidah GCG (untuk transaksi dengan Koperasi).
4. Direksi Indonesia Power menerbitkan kebijakan yang mengatur tentang peranan Koperasi Karyawan dalam mengikuti pelaksanaan pengadaan barang/ jasa di lingkungan Indonesia Power.
5. Membuat kebijakan pelaksanaan kontrak payung dan *multiyears* untuk pekerjaan yang dapat dibuat kontrak payung maupun *multiyears*.

Penilaian Kinerja Komite Audit Tahun 2016

Berdasarkan Piagam Komite, kinerja Komite Audit dievaluasi oleh Dewan Komisaris setiap akhir tahun

Audit Committee Activity Report in 2016

Audit Committee performs its duties as a support organ of Board of Commissioners in providing recommendation and ensuring effectivity of internal control system and the effectivity of internal and external auditor through discussion about related function and in the Audit Committee Meeting. The following is recommendations of Audit Committee Indonesia Power throughout 2016:

1. Implementation of HSE management in the CCPP Pangkalan Susu and other units with O&M, managed by Indonesia Power in accordance with provisions.
2. Ask Internal Audit Unit to conduct further monitoring on an action plan and its implementation for matters discussed in Audit Result Report (LHA) Semester I 2016.
3. Establish a team to research the overall of contracts in line with the GCG principles (for the transaction with Cooperatives).
4. Directors of Indonesia Power published policy that regulates roles of Employee Cooperatives in participating in the procurement of goods/services within Indonesia Power.
5. Compile policy of contract implementation and multiyear contract.

Performance Assessment of Audit Committee in 2016

Based on the Committee's Charter, Audit Committee's Performance is evaluated by the Board of Commissioners

berdasarkan realisasi dan penyelesaian program kerja yang tercantum dalam Rencana Kerja dan Anggaran Komite Audit. Penilaian kinerja Komite Audit tersebut dilaporkan kepada Dewan Komisaris dalam laporan Komite Audit termasuk pencantuman risalah rapat yang memuat saran, rekomendasi, dan masukan terkait dengan penyempurnaan *soft-structure* pendukung pelaksanaan tugas komite, pengelolaan operasi, pemeliharaan, dan logistik, peningkatan efektivitas audit dan sistem pengendalian internal, pengendalian kontrak dan kepatuhan terhadap peraturan internal maupun perundang-undangan yang berlaku. Hasil penilaian tersebut menjadi bahan pertimbangan bagi Dewan Komisaris untuk mengangkat kembali dan/atau memberhentikan anggota Komite Audit untuk periode jabatan berikutnya. Berikut hasil penilaian dan penetapan koefisien kinerja triwulanan bagi anggota Komite Audit Indonesia Power tahun 2016:

at the end of each year, based on the realization and completion of work program set in Work Program and Budget of Audit Committee. Audit Committee performance assessment is reported to the Board of Commissioners in Audit Committee Report, including the minutes of meeting that consists of suggestion, recommendation, and input related to the refinement of supporting soft structure in the Committee's duties, management of operations, maintenance, and logistics, audit effectivity improvement, and internal control system, contract management, and compliance with internal regulations or prevailing rules and legislations. The result of assessment became considerations for Board of Commissioners to reappoint and/or dismiss Audit Committee Member for the next term of office. The following is the assessment result and coefficient determination for quarterly performance for Audit Committee Member of Indonesia Power in 2016:

Tabel Penilaian Kinerja Komite Audit TW IV Tahun 2016
Table: Audit Committee Performance Assessment Fourth Quarter 2016

Parameter Parameter	Penilaian Assessment		
	Sudirmanto	Dewa Gede Ngurah Ambara	Jefri Rosiadi
Kontribusi terhadap pencapaian target Tim Contribution to Team target achievement	4	2	2
Jumlah Kajian, Analisis, Rekomendasi Review, Analysis, and Recommendation	4	2	2
Tingkat keaktifan dalam kegiatan Tim Activity Level in Team	4	2	2
Kerjasama dalam Tim Cooperation in Team	3	3	3
Mutu dan Kualitas Konsep Concept Quality	4	3	3
Jumlah Nilai Kinerja Total Performance Rate	19	12	12
Koefisien Coefficient	1,2	0,8	0,8

Keterangan:
1 = Tidak Sesuai Harapan; 2= Kurang Sesuai Harapan; 3= Sesuai Harapan; 4= Melampaui Harapan

Remark:
1 = Did not meet Expectation; 2 = Almost meet Expectation; 3 = Meet Expectation; 4 = Exceed Expectation

Jumlah Nilai Rate	Kinerja Koefisien Coefficient Performance
5-7	0,4
8-11	0,6
12-13	0,8
14-17	1,0
18-20	1,2

KOMITE MANAJEMEN RISIKO
Risk Management Committee

Pembentukan Komite Manajemen Risiko dimaksudkan untuk membantu Dewan Komisaris dalam melakukan pemantauan secara berkala dan memberikan rekomendasi atas kebijakan dan pelaksanaan Manajemen Risiko di Indonesia Power termasuk melakukan penelaahan terhadap kebijakan di bidang Nominasi & Remunerasi.

Establishment of Risk Management Committee is intended to assist Board of Commissioners in conducting periodic monitoring and provide recommendations on policy and Risk Management implementation in Indonesia Power, including reviewing the policy in Nomination and Remuneration.

Pengangkatan dan Pemberhentian Komite Manajemen Risiko

Pengangkatan dan pemberhentian para anggota Komite Manajemen Risiko dilakukan oleh Dewan Komisaris berdasarkan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Dewan Komisaris Indonesia Power. Pemberhentian Komite Manajemen Risiko dapat dilakukan apabila yang bersangkutan berakhir masa jabatan keanggotaannya dan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris, diberhentikan karena tidak memenuhi kinerja yang telah ditetapkan dan/atau tidak kompeten dalam menjalankan tugasnya.

Appointment and Dismissal of Risk Management Committee

Appointment and dismissal of Risk Management Committee Member are conducted by Board of Commissioners based on the Decree issued by Board of Commissioners of Indonesia Power. The dismissal of a member of Risk Management Committee shall be conducted if the incumbent finished their term of office, and if, based on the Decree of Board of Commissioners, is dismissed because the incumbent failed to meet the performance set forth and/or is not competent in carrying out his/her duties.

Susunan dan Komposisi Anggota Komite Manajemen Risiko

Pada tahun 2016, susunan Komite Manajemen Risiko Indonesia Power mengalami perubahan komposisi anggota. Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor 007.SK/DEWAN KOMISARIS-IP/2016 tanggal 20 September 2016, komposisi anggota Komite Manajemen Risiko per 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

Composition of the Risk Management Committee

In 2016, the composition of Risk Management Committee Indonesia Power has experienced changes in the member composition. Based on the Decree of Board of Commissioners Number 007.SK/DEWAN KOMISARIS-IP/2016 dated 20 September 2016, the composition of Risk Management Committee per 31 December 2016 is as follows:

Tabel Susunan dan Komposisi Komite Manajemen Risiko Tahun 2016
Table: Composition of Risk Management Committee 2016

Nama Name	Jabatan	Position
Tri Setyo Nugroho	Ketua Komite Manajemen Risiko	Chairman of Risk Management Committee
Ahmad Yani	Wakil Komite Manajemen Risiko I	Vice Chairman of Risk Management Committee I
Munir Ahmad	Wakil Komite Manajemen Risiko II	Vice Chairman of Risk Management Committee II
Agustinus Lilik Ismanto	Sekretaris Komite Manajemen Risiko	Secretary of Risk Management Committee
Supriyanto	Anggota Komite Manajemen Risiko	Risk Management Committee Member
Alfath Cordea Imalutha	Anggota Komite Manajemen Risiko	Risk Management Committee Member

Profil Anggota Komite Manajemen Risiko

Risk Management Committee Member Profile

Nama Name	Profil Singkat	Brief Profile
 Tri Setyo Nugroho Ketua Komite Manajemen Risiko Chairman of Risk Management Committee	Profil Ketua Komite Manajemen Risiko terkait jabatan, periode jabatan, riwayat pendidikan (Bidang Studi dan Lembaga Pendidikan) dan pengalaman kerja (Jabatan, Instansi, dan Periode Menjabat) telah diuraikan pada bagian profil Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini.	Profile of Chairman of Risk Management Committee, related to the position, term of office, education background (Field of Study and Institution), and work experience (Position, Institution, and Served Period) has been described in the Board of Commissioners' profile in this Annual Report.
 Ahmad Yani Wakil Komite Manajemen Risiko I Vice Chairman of Risk Management Committee I	Profil Wakil Komite Manajemen Risiko I terkait jabatan, periode jabatan, riwayat pendidikan (Bidang Studi dan Lembaga Pendidikan) dan pengalaman kerja (Jabatan, Instansi, dan Periode Menjabat) telah diuraikan pada bagian profil Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini.	Profile of Vice Chairman of Risk Management Committee I, related to the position, term of office, education background (Field of Study and Institution), and work experience (Position, Institution, and Served Period) has been described in the Board of Commissioners' profile in this Annual Report.
 Munir Ahmad Wakil Komite Manajemen Risiko II Vice Chairman of Risk Management Committee II	Profil Wakil Komite Manajemen Risiko II terkait jabatan, periode jabatan, riwayat pendidikan (Bidang Studi dan Lembaga Pendidikan) dan pengalaman kerja (Jabatan, Instansi, dan Periode Menjabat) telah diuraikan pada bagian profil Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini.	Profile of Vice Chairman of Risk Management Committee II, related to the position, term of office, education background (Field of Study and Institution), and work experience (Position, Institution, and Served Period) has been described in the Board of Commissioners' profile in this Annual Report.

KOMITE MANAJEMEN RISIKO
Risk Management Committee

Nama Name	Profil Singkat	Brief Profile
 Agustinus Lilik Ismanto Sekretaris Komite Manajemen Risiko Secretary of Risk Management Committee	Lahir di Magelang, 11 Agustus 1960. Domisili : Jakarta Riwayat Pendidikan: Lulusan Sarjana Teknik Sipil bidang Bangunan dari Institut Teknologi Sepuluh November pada tahun 1984 dan Master di bidang Manajemen dari STIE IPWI pada tahun 1996. Riwayat Kerja: Manajer Senior Proses Bisnis PT PLN (Persero) Kantor Pusat Tahun 2010-2012; Manajer Senior Risk Monitoring dan Reporting PT PLN (Persero) Kantor Pusat Tahun 2012-2014; Expert Manajemen Risiko PT PLN (Persero) Tahun 2014-2016; dan Sekretaris Komite Manajemen Risiko PT Indonesia Power Tahun 2016. Pelatihan: – Standarisasi dan Sertifikasi Kompetensi – *Human Resources Delevopment* – Implementasi Manajemen SDM berbasis Kompetensi – Analisis Finansial Dasar Pengangkatan: Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 007 SK/DEWAN KOMISARIS-IP/2016 tanggal 20 September 2016	Born in Magelang, 11 August 1960. Domicile: Jakarta Education Background: Bachelor of Civil Engineering in Building Sector from Institut Teknologi Sepuluh November in 1984, and Master of Management from STIE IPWI in 1996. Work Experience: Senior Manager of Business Process PT PLN (Persero) Head Office in 2010-2012; Senior Manager of Risk Monitoring and Reporting PT PLN (Persero) Head Office in 2012-2014; Risk Management Expert PT PLN (Persero) in 2014-2016; and Secretary of Risk Management Committee PT Indonesia Power 2016. Training: – Standardization and Competence Certification – Human Resources Development – Implementation of Competence Based Human Resources Management – Financial Analysis Appointment Basis: Decree of Board of Commissioners Number 007.SK/DEWAN KOMISARIS-IP/2016 dated 20 September 2016
 Supriyanto Anggota Komite Manajemen Risiko Member of Risk Management Committee	Lahir di Kebumen, 20 September 1959. Domisili : Tangerang Riwayat Pendidikan: Lulusan Sarjana Bidang Mesin, IKIP tahun 1985; dan Master Manajemen, University of Westminster tahun 1995. Riwayat Kerja: Manajer Bidang SDM, Administrasi Dan Keuangan pada PT PLN (Persero) Penelitian dan Pengembangan Ketenagalistrikan Tahun 2010-2012; Manajer Bidang Sumberdaya Manusia dan Organisasi pada PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten Tahun 2012-2014; Manajer Executif Direktorat SDM PT PLN (Persero) Tahun 2014-2015; dan Anggota Komite Manajemen Risiko PT Indonesia Power Tahun 2016.	Born in Kebumen, 20 September 1959. Domicile: Tangerang Education Background: Bachelor of Mechanical Engineering from IKIP in 1985; and Master Management from the University of Westminster in 1995. Work Experience: Manager of Human Resources, Administration, and Finance in PT PLN (Persero), Electricity Research and Development, in 2010-2012; Manager of Human Resources and Organization in PT PLN (Persero) of West Java and Banten Distribution in 2012-2014; Executive Manager of Directorat of Human Resources PT PLN (Persero) in 2014-2015; and Risk Management Committee Member of PT Indonesia Power in 2016.

Nama Name	Profil Singkat	Brief Profile
	Pelatihan: – Pedoman Pengadaan PT PLN (Persero) – Workshop Internalisasi Ketentuan SDM dan Organisasi – *Integrated Reward Management* – *Job Evaluation* *Advanced Human Resources Management* Dasar Pengangkatan: Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor 007.SK/DEWAN KOMISARIS-IP/2016 tanggal 20 September 2016	Training: – Procurement Guidelines PT PLN (Persero) – Workshop of Human Resources and Organization Policy Internalization – Integrated Reward Management – Job Evaluation Advanced Human Resources Management Appointment Basis: Decree of Board of Commissioners Number 007.SK/DEWAN KOMISARIS-IP/2016 dated 20 September 2016
 Alfath Cordea Imalutha Anggota Komite Manajemen Risiko Member of Risk Management Committee	Lahir di Surabaya, 11 Juni 1966. Domisili : Depok Riwayat Pendidikan: Lulusan Sarjana bidang Manajemen Stratejik, Prasetya Mulya Business School; dan Master Manajemen Stratejik di Prasetya Mulya Business School tahun 2006. Riwayat Kerja: Manajer Treasury PT Indonesia Comnets Plus Tahun 2003-2007; Manajer Budget & Analysis PT Indonesia Comnets Plus Tahun 2007-2011; Manajer Senior Perencanaan Keuangan Divisi Keuangan PT PLN (Persero) Kantor Pusat Tahun 2012-Sekarang; Anggota Komite Manajemen Risiko PT Indonesia Power Tahun 2016. Pelatihan: Keuangan Korporat, Akuntansi, Perpajakan, dan Manajemen Strategik. Dasar Pengangkatan: Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor 007.SK/DEWAN KOMISARIS-IP/2016 tanggal 20 September 2016	Born in Surabaya, 11 June 1966. Domicile: Depok Education Background: Bachelor of Strategic Management from Prasetya Mulya Business School; and Master of Strategic Management from Prasetya Mulya Business School in 2006. Work Experience: Treasury Manager of PT Indonesia Comnets Plus in 2003-2007; Budget & Analysis Manager of PT Indonesia Comnets Plus in 2007-2011; Senior Manager of Financial Planning in Finance Division PT PLN (Persero) Head Office, 2012-now; Risk Management Committee Member of PT Indonesia Power in 2016. Training: Corporate Finance, Accountancy, Taxes, and Strategic Management. Appointment Basis: Decree of Board of Commissioners Number 007.SK/DEWAN KOMISARIS-IP/2016 dated 20 September 2016

Independensi Anggota Komite Manajemen Risiko

Sesuai dengan peraturan pelaksanaan GCG, seluruh anggota Komite Manajemen Risiko bersifat independen dan tidak rangkap jabatan di dalam dan di luar

Independence of Risk Management Committee Members

In line with the regulations on GCG implementation, all Member of Risk Management Committee is independent and do not hold concurrent positions

KOMITE MANAJEMEN RISIKO
Risk Management Committee

Perusahaan yang mempengaruhi kemampuan mereka untuk bertindak independen. Independensi anggota Komite Manajemen Risiko tercermin dalam hubungan keluarga, keuangan, kepengurusan, serta kepemilikan saham di Indonesia Power dan perusahaan lainnya sebagaimana berikut:

inside and outside the Company that may influence their ability to act independently. Independence of Risk Management Committee Member is reflected on the familial relationship, financial relationship, management relationship, share ownership in Indonesia Power and other companies, as follows:

Tabel Independensi Komite Manajemen Risiko
Table: Risk Management Committee Independence

No	Aspek Independensi Independency Aspect	Tri Setyo Nugroho	Ahmad Yani	Munir Ahmad	Agustinus Lilik Ismanto	Supriyanto	Alfath Cordea Imalutha
1	Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi Does not have a financial relationship with the Board of Commissioners and Board of Directors	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	Tidak memiliki Hubungan kepengurusan di Indonesia Power, anak Perusahaan maupun Perusahaan afiliasi Does not have a management relationship in Indonesia Power, subsidiaries or affiliated companies	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	Tidak memiliki Hubungan kepemilikan saham di Indonesia Power Does not have a share ownership relationship in Indonesia Power	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	Tidak memiliki Hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau sesame anggota Komite Audit Does not have any familial relationship with the Board of Commissioners, Board of Directors, and/or fellow members of the Risk Management Committee	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat pemerintah daerah Does not serve on the board of political parties, local government official	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Pedoman Kerja Komite Manajemen Risiko (Piagam Komite Manajemen Risiko)

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Manajemen Risiko mengacu pada Surat Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Nomor 241/010/IP/2016 dan Nomor 016.SK/DEKOM-IP/2016 Tentang Piagam Komite Manajemen Risiko PT Indonesia Power. Piagam ini dijadikan pedoman kerja bagi Komite Manajemen Risiko untuk mendukung pelaksanaan efektifitas pelaksanaan fungsi, tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dalam rangka pelaksanaan penerapan GCG. Piagam tersebut mengatur hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewajiban anggota Komite Manajemen Risiko antara lain fungsi dan tugas pokok Komite Manajemen Risiko, kewajiban, tanggung jawab dan wewenang, Kode etik, rapat Komite Manajemen Risiko, Penilaian kinerja dan honorarium dan pembebanan biaya Komite Manajemen Risiko

Work Guidelines of Risk Management Committee (Risk Management Committee Charter)

In carrying out its duties and responsibilities, Risk Management Committee refers to Joint Decree of the Directors and Board of Commissioners Number 241/010/IP/2016 and Number 016.SK/DEKOM-IP/2016 on Risk Management Committee Charter of PT Indonesia Power. The charter becomes work guidelines for Risk Management Committee to support the effectivity in functions, duties, and responsibilities of Board of Commissioners in implementing GCG. The Charter regulates matters related to the duties and responsibilities of Risk Management Committee Member, such as function and main duty of Risk Management Committee, obligations, responsibilities, and authorities, Code of Conduct, Risk Management Committee's Meeting, Performance Assessment, honorarium, and expenditures of Risk Management Committee.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Manajemen Risiko

Komite Manajemen Risiko bertugas membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas pengawasan dengan melakukan penelaahan terhadap Kajian Risiko atas kelayakan kegiatan yang direncanakan oleh Manajemen Perseroan dan termasuk melakukan penelaahan terhadap kebijakan di bidang Nominasi & Remunerasi. Adapun tugas pokok Komite Manajemen Risiko yaitu sebagai berikut:

1. Memberikan masukan kepada Dewan Komisaris berupa penelaahan terhadap pelaksanaan Manajemen Risiko serta Kajian Risiko yang dilakukan oleh Manajemen Perseroan
2. Memantau dan memastikan bahwa semua kegiatan Perseroan yang ada di dalam RJPP dan RKAP telah memperhatikan prinsip-prinsip Manajemen Risiko
3. Memberikan masukan kepada Dewan Komisaris mengenai tindak lanjut hasil evaluasi, terutama terhadap kebijakan yang mempunyai dampak keuangan yang signifikan

Risk Management Committee's Duties and Responsibilities

Risk Management Committee is responsible for assisting Board of Commissioners in carrying out supervisory duties, by reviewing Risk Assessment on the feasibility of activity planned by the Company's Management, including reviewing the policy in Nomination and Remuneration. Main duties of Risk Management Committee are as follow:

1. Providing input to Board of Commissioners in the form of review on the Risk Management implementation and Risk Assessment conducted by the Company's Management
2. Monitoring and ensuring that every Company's activity in Long Term Corporate Plan and Work Plan & Budget (WP&B) have considered the Risk Management principles
3. Providing input to Board of Commissioners on the follow-up of evaluation result, especially on the policy with significant financial impact

KOMITE MANAJEMEN RISIKO
Risk Management Committee

4. Memberikan rekomendasi kepada Manajemen Perseroan melalui Dewan Komisaris untuk merancang dan melaksanakan kebijakan Manajemen Risiko, termasuk berbagai hal yang dapat meningkatkan kelancaran dan efektivitas proses kajian risiko
5. Memberikan masukan kepada Dewan Komisaris mengenai perubahan dan penyempurnaan Piagam Komite Manajemen Risiko
6. Memberi rekomendasi tentang sistem penggajian dan pemberian tunjangan bagi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi
7. Memberikan rekomendasi kepada Direksi/ Manajemen Eksekutif untuk merancang dan melaksanakan kebijakan Nominasi dan Remunerasi yang efektif, termasuk berbagai hal yang dapat meningkatkan kelancaran dan efektivitas Perseroan yang terkait dengan sistem Nominasi dan Remunerasi
8. Membuat laporan kepada Dewan Komisaris
9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris sepanjang masih dalam lingkup tugas dan kewajiban Dewan Komisaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sedangkan tanggung jawab Komite Manajemen Risiko antara lain melaporkan segera hasil evaluasi yang telah dilakukan kepada Dewan Komisaris, yaitu meliputi: (1) Laporan Berkala, berisi pokok-pokok hasil kerjanya berdasarkan penugasan Dewan Komisaris; (2) Laporan Khusus, berisi Kajian Risiko yang diperkirakan dapat mengganggu kegiatan usaha Perusahaan; (3) Rekomendasi sesuai hasil telaahan dan evaluasi terhadap Kajian Risiko yang telah dilakukan; serta (4) Rekomendasi sesuai hasil penelaahan terhadap kebijakan dibidang Nominasi & Remunerasi.

4. Providing recommendation to Company's Management through Board of Commissioners to plan and perform Risk Management policy, including matters that may be able to improve continuity and effectivity of risk assessment process
5. Providing input to Board of Commissioners on amendment and refinement of Risk Management Committee Charter
6. Suggesting recommendation on salary and allowances system for Member of Board of Commissioners and Directors
7. Giving recommendation to Directors/Executive Management to design and perform effective Nomination and Remuneration policy, including matters that may be able to improve continuity and effectivity of Company related to the Nomination and Remuneration system
8. Compiling report to the Board of Commissioners
9. Carrying out other duties given by Board of Commissioners as long as it is within the scope of duties and responsibilities of Board of Commissioners based on the prevailing laws and regulations.

The responsibilities of Risk Management Committee, among others, is to report evaluation result performed to the Board of Commissioners, which covers: (1) Regular Report, contains main results based on the assignment of Board of Commissioners; (2) Special Report, contains Risk Assessment that is predicted to be able to disrupt Company's business activity; (3) Recommendation as per review and evaluation on Risk Assessment performed; and (4) Recommendation as per assessment result on the policy in the field of Nomination & Remuneration.

Pengembangan Kompetensi Komite Manajemen Risiko

Seluruh anggota Komite Manajemen Risiko telah diikutsertakan dalam berbagai program pendidikan, pelatihan, maupun *workshop* sesuai dengan bidang keahliannya guna meningkatkan kompetensi untuk mendukung pelaksanaan tugasnya. Berikut tabel pengembangan kompetensi Komite Manajemen Risiko Indonesia Power tahun 2016:

Risk Management Committee Competency Development

All member of Risk Management Committee participated in numerous education program, training, and workshop, within their area of expertise, in order to improve competence to support the implementation of its duties. The following is a table of Risk Management Committee Competency Development of Indonesia Power in 2016:

Tabel Pelatihan Komite Manajemen Risiko Tahun 2016
Table: Risk Management Committee Training in 2016

Nama Peserta Name	Nama Diklat Training	Nama Lembaga Institution	Tanggal Date	Lokasi Location
Agustinus Lilik Ismanto	*Trust, Governance, and Sustainability"*	*The Indonesian Institut for Corporate Governance*	26 Mei 2016 May 26, 2016	Bogor

Program Kerja Komite Manajemen Risiko Tahun 2016

Program Kerja Komite Manajemen Risiko tahun 2016 diantaranya melakukan penelahan terhadap Kajian Risiko atas kelayakan kegiatan yang direncanakan oleh Manajemen Perusahaan, serta mengevaluasi dan melakukan pengawasan fungsi Nominasi dan Remunerasi di Perusahaan, yang meliputi:

Risk Management Committee Work Program in 2016

Risk Management Committee Work Program in 2016 among others is to review the Risk Assessment on the feasibility of activities planned by the Company's Management, and to evaluate and carry out the supervisory function of Nomination and Remuneration in the Company, which covers:

Tabel Program Kerja Komite Manajemen Risiko Tahun 2016
Table: Risk Management Committee Work Program in 2016

Program Kerja	Work Program
1. Memberikan masukan kepada Dewan Komisaris atas penelaahan pelaksanaan Manajemen risiko serta Kajian Risiko	1. Providing input to Board of Commissioners in the form of review on the Risk Management implementation and Risk Assessment
2. Memantau dan meastikan semua kegiatan Perseroan yang ada dalam RJPP dan RKAP telah memperhatikan prinsip Manajemen Risiko	2. Monitoring and ensuring that every Company's activity in Long Term Corporate Plan (RJPP) and Work Plan & Budget (WP&B) have considered the Risk Management principles
3. Memberikan masukan kepada Dewan Komisaris mengenai tindak lanjut hasil evaluasi	3. Provide input to Board of Commissioners on the follow-up of evaluation result
4. Memberikan rekomendasi kepada Manajemen melalui Dewan Komisaris untuk merancang dan melaksanakan kebijakan Manajemen Risiko	4. Providing recommendation to Company's Management through Board of Commissioners to plan and perform Risk Management policy,
5. Memberikan masukan kepada Dewan Komisaris mengenai perubahan dan penyempurnaan Piagam Komite Manajemen Risiko	5. Providing input to Board of Commissioners on amendment and refinement of Risk Management Committee Charter
6. Memberikan rekomendasi tentang sistem pengajian dan pemberian tunjangan bagi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi	6. Suggesting recommendation on salary and allowances system for Member of Board of Commissioners and Directors
7. Memberikan rekomendasi kepada Direksi untuk merancang dan melaksanakan kebijakan Nominasi dan Remunerasi yang efektif	7. Give recommendation to Directors to design and perform policy of Nomination and Remuneration that is effective
Rapat Berkala	Regular Meeting
1. Rapat rutin internal Komite Manajemen Risiko sekurang kurangnya 1 (satu) kali dalam satu bulan.	1. Routine internal meeting of Risk Management Committee at least once a month.
2. Rapat koordinasi Komite Manajemen Risiko dengan Satuan Manajemen Risiko Indonesia Power, dilaksanakan sekurang kurangnya 1 (satu) kali dalam satu bulan.	2. Coordination meeting of Risk Management Committee with Risk Management Unit of Indonesia Power, holds at least once a month

KOMITE MANAJEMEN RISIKO
Risk Management Committee

Rapat Berkala		Regular Meeting	
3.	Rapat koordinasi Komite Manajemen Risiko dengan Manajemen SDM PT Indonesia Power,dilaksanakan sekurang kurangnya 1 (satu) kali dalam satu bulan.	3.	Coordination meeting of Risk Management Committee with Human Resources Management of PT Indonesia Power, holds at least once a month
4.	Rapat berkala dengan Dewan Komisaris sekurang kurangnya 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan.	4.	Regular meeting with Board of Commissioners at least once in two months.
5.	Apabila diperlukan, Komite Manajemen Risiko dapat mengundang Manajemen Eksekutif melalui Satuan Manajemen Risiko untuk memberikan informasi yang diperlukan.	5.	If needed, Risk Management Committee may invite Executive Management through Risk Management Unit to provide the necessary information

Rapat Komite Manajemen Risiko

Rapat koordinasi Komite Manajemen Risiko dengan Satuan Manajemen Risiko, Mutu dan Kinerja dilaksanakan minimal sebulan sekali. Dalam pelaksanaan rapat Komite Manajemen Risiko dapat mengundang Manajemen Perusahaan melalui Satuan Manajemen Risiko, Mutu dan Kinerja untuk memberikan informasi yang diperlukan. Keputusan Rapat Komite Manajemen Risiko diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan musyawarah mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil berdasarkan pemungutan suara setuju terbanyak. Apabila suara setuju dan tidak setuju berimbang maka usulan dianggap ditolak.

Risk Management Committee's Meeting

Coordination meeting of Risk Management Committee with Risk Management, Quality, and Performance Unit is held at least once a month. In the meeting, Risk Management Committee may invite Company's Management through Risk Management, Quality, and Performance Unit to provide necessary information. Risk Monitoring Committee Meeting Decision is done by deliberation. In the event that deliberation is not achieved, then the decision shall be made based on the majority vote. If there is an equal number of votes on those who agree and those who don't, the proposal is considered rejected.

Frekuensi Pertemuan dan Tingkat Kehadiran Komite Manajemen Risiko

Selama tahun 2016, Komite Manajemen Risiko telah menyelenggarakan rapat internal sebanyak 11 kali dan rapat gabungan Komite Dewan Komisaris sebanyak 36 kali rapat. Berikut frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran Komite Manajemen Risiko dalam rapat Komite tahun 2016:

Meeting Frequency and Attendance of Risk Management Committee

Throughout 2016, Risk Management Committee has held 11 internal meetings and 36 joint Committee meetings with the Board of Commissioners. The following is the meeting frequency and attendance of Risk Management Committee in the Committee's meeting in 2016:

Tabel Frekuensi Rapat Komite Manajemen Risiko Tahun 2016
Table: Meeting Frequency and Attendance of Risk Management Committee in 2016

Nama Name	Jumlah Rapat Meetings	Jumlah Kehadiran Attendance	%
Bagus Setiawan *	3	0	0
Ahmad Yani **	6	1	17
Abdi Mustakim	11	0	0
Munir Ahmad *	3	0	0
Tri Setyo Nugroho *	3	1	33
Agustinus Lilik Ismanto	11	10	91
Supriyanto	11	10	91
Alfath Cordea Imalutha	11	6	55

*) Sdr. Bagus Setiawan, Munir Ahmad dan Tri Setyo Nugroho menjabat sebagai Dewan Komisaris sesuai dengan RUPS sirkuler tanggal 25 Agustus 2016, sehingga jumlah rapat yang harus dihadiri sebanyak 3 kali.
**) Sdr. Ahmad Yani menjabat sebagai Dewan Komisaris sesuai dengan RUPS sirkuler tanggal 2 Mei 2016, sehingga jumlah rapat yang harus dihadiri sebanyak 6 kali.
*) Mr. Bagus Setiawan, Munir Ahmad, and Tri Setyo Nugroho serve as Board of Commissioners in accordance with Circular GMS dated 25 August 2016, hence the obligatory number of meetings attended is 3 meetings.
**) Mr. Ahmad Yani serves as Board of Commissioners in accordance with Circular GMS dated 2 May 2016, hence the obligatory number of meetings attended is 6 meetings.

Adapun frekuensi kehadiran Komite Manajemen Risiko dalam rapat gabungan Komite Dewan Komisaris dapat dilihat pada Bab Komite Audit bagian Rapat Komite. Berikut agenda rapat Komite Manajemen Risiko selama tahun 2016:

Meeting frequency of Risk Management Committee in the Joint Committee Meeting with Board of Commissioners can be seen in the Chapter Audit Committee section Committee Meeting. The following is the meeting agenda of Risk Management Committee throughout 2016:

No	Tanggal Pelaksanaan Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	
1.	13 Januari 2016 January 13, 2016	Program Kerja Manajemen Risiko Tahun 2016.	Risk Management Committee Work Program in 2016
2.	15 Januari 2016 January 15, 2016	Progress Kegaiatan Satuan manajemen Risiko, Mutu dan Kinerja PT Indonesia Power s.d. bulan Desember 2015.	Progress of Risk Management, Quality, and Performance Unit Activities of PT Indonesia Power until December 2015.
3.	18 Maret 2016 March 18, 2016	Progress Kegiatan Manajemen Risiko PT Indonesia Power bulan Februari 2016.	Progress of Risk Management Activity PT Indonesia Power February 2016.
4.	14 April 2016 April 14, 2016	1. Progress Kegiatan Manajemen Risiko PT Indonesia Power bulan Maret 2016. 2. Pengawasan Kebijakan Mutu dan Pelayanan.	1. Progress of Risk Management Activity PT Indonesia Power March 2016. 2. Supervision of Quality and Services Policy.
5.	25 April 2016 April 25, 2016	1. Progress Pelaksanaan Pengembangan Organisasi PT Indonesia Power. 2. KPI Manajemen di bidang SDM: HCR, OCR, ICR.	1. Progress of Organization Development of PT Indonesia Power. 2. KPI Management in the Human Resources field: HCR, OCR, ICR.
6.	24 Mei 2016 May 24, 2016	Progress Kegiatan Manajemen Risiko PT Indonesia Power bulan Mei 2016.	Progress of Risk Management Activity PT Indonesia Power May 2016.
7.	14 Juni 2016 June 14, 2016	1. Progress Kegiatan Manajemen Risiko PT Indonesia Power bulan Juni 2016.	1. Progress of Risk Management Activity PT Indonesia Power June 2016.

KOMITE MANAJEMEN RISIKO
Risk Management Committee

No	Tanggal Pelaksanaan Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	
8	27 Juni 2016 June 27, 2016	Pelaksanaan kebijakan nominasi dan remunerasi	Implementation of nomination and remuneration policy
9.	29 Agustus 2016 August 29, 2016	Progres Kegiatan Manajemen Risiko PT Indonesia Power bulan Agustus 2016.	Progress of Risk Management Activity PT Indonesia Power August 2016.
10.	27 Oktober 2016 October 27, 2016	Progres Kegiatan Manajemen Risiko PT Indonesia Power bulan September 2016.	Progress of Risk Management Activity PT Indonesia Power September 2016.
11.	29 November 2016 November 29, 2016	1. Rencana Kerja Komite Manajemen Risiko Dewan Komisaris Tahun 2017. 2. Piagam Komite Manajemen Risiko Dewan Komisaris.	1. Risk Management Committee and Board of Commissioners Work Program for 2017. 2. Risk Management Committee Charter of Board of Commissioners.

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Komite Manajemen Risiko Tahun 2016

Selama tahun 2016, Komite Manajemen Risiko telah secara aktif memberikan masukan penyempurnaan terkait dengan pengawasan dan pengendalian risiko serta pelaksanaan fungsi nominasi dan remunerasi antara lain meliputi:

1. Evaluasi atas Profil Risiko tahun 2016, dan proses *continous improvement* ke depan, agar dapat dipetakan mana saja Risiko yang tidak terjadi, risiko yang terjadi dan risiko yang nyaris terjadi (*near miss*) dengan dukungan catatan *data loss event*. Evaluasi terhadap Profil Risiko 2016 agar dipastikan evaluasinya atas efektivitas kontrol eksisting nya.
2. Untuk penyusunan laporan dalam mendefinisikan strategi "*Operational and Maintenance Excellence*" agar dilengkapi dengan pengertian bahwa termasuk didalamnya adalah memperhatikan keekonomiannya yaitu unit pembangkit mendapatkan merit untuk dioperasikan memenuhi kebutuhan sistem.
3. Dalam melakukan Tindak lanjut Rencana Mitigasi Risiko, manajemen agar menjelaskan status tindaklanjut dan level dari risiko residual.
4. Terkait dengan Konsep Keputusan Direksi tentang Kebijakan Sistem Pengelolaan Keberlangsungan Usaha Perusahaan (*Business Continuity Management System*) BCMS agar dipastikan keselarasannya dengan program PLN Korporat. Untuk pendefinisian BCMS agar dibedakan

Risk Management Committee Activity Report in 2016

Throughout 2016, Risk Management Committee has actively given input of refinement related to supervision and risk control, as well as nomination and remuneration function, which covers:

1. Evaluation of Risk Profile 2016, and continuous improvement process in the future, so as to map Risk that did not happen, the risk that happened, and the risk that is a near miss, with recorded data and loss event. Evaluation of Risk Profile 2016 so the evaluation is in line with the effectivity of existing control.
2. Report preparation shall define strategy 'Operational and Maintenance Excellence', so as to understand that it includes the economy, i.e. generating unit has merit to be operated as to fulfill system needs.
3. In following up the Risk Mitigation Plan, management shall explain the follow-up status and risk residual level.
4. Related to the Directors' Decree Concept on Business Continuity Management System Policy, it has to be aligned with the Corporate PLN Program. Definition of BCMS shall distinguish between operational and business interruption. Related to the compilation of Business Continuity

antara operasional dengan interupsi bisnisnya. Sehubungan dengan Penyusunan *Business Continuity Management* (BCM) UP Suralaya sebagai pilot project, agar dipastikan bahwa aspek-aspek utama yang disepakati sebagai aspek utama adalah aspek yang benar-benar menentukan sebagai unsur BCM.

Management (BCM) GU Suralaya as a pilot project, ensure that key aspects agreed are the aspects that determine BCM elements.

Penilaian Kinerja Komite Manajemen Risiko Tahun 2016

Manajemen Risiko dievaluasi oleh Dewan Komisaris setiap akhir tahun, yaitu berdasarkan realisasi atas penyelesaian program kerja dan anggaran komite manajemen risiko dan dilaporkan kepada Dewan Komisaris dalam Laporan Komite Manajemen Risiko termasuk pencantuman risalah rapat yang memuat saran, rekomendasi dan masukan terkait dengan pelaksanaan tugas komite. Hasil penilaian tersebut menjadi bahan pertimbangan bagi Dewan Komisaris untuk mengangkat kembali dan/atau memberhentikan anggota Komite Manajemen Risiko untuk periode jabatan berikutnya. Berikut hasil penilaian dan penetapan koefisien kinerja triwulanan bagi anggota Komite Manajemen Risiko Indonesia Power tahun 2016:

Performance Assessment of Risk Management Committee in 2016

Risk Management is evaluated by Board of Commissioners at the end of each year, based on the realization and completion of Work Program and Budget of Risk Management Committee, and it is reported to the Board of Commissioners in risk management committee Report, including the Minutes of Meeting that contains suggestion, recommendation, and inputs related to the Committee's duties. The result of assessment became considerations for Board of Commissioners to reappoint and/or dismiss Risk Management Committee Member for the next term of office. The following is the assessment result and coefficient determination for quarterly performance for Risk Management Committee Member of Indonesia Power in 2016:

Tabel Penilaian Kinerja Komite Manajemen Risiko TW IV Tahun 2016
Table: Risk Management Committee Performance Assessment Fourth Quarter 2016

Parameter Parameter	Penilaian Assessment		
	Agustinus Lilik Ismanto	Supriyanto	Alfath Cordea Imalutha
Kontribusi terhadap pencapaian target Tim Contribution to Team target achievement	3	3	2
Jumlah Kajian, Analisis, Rekomendasi Review, Analysis, and Recommendation	3	3	2
Tingkat keaktifan dalam kegiatan Tim Activity Level in Team	3	3	2
Kerjasama dalam Tim Cooperation in Team	3	3	3
Mutu dan Kualitas Konsep Concept Quality	3	3	3
Jumlah Nilai Kinerja /Total Performance Rate		15	15
Koefisien / Coefficient		1	1

Keterangan: 1 = Tidak Sesuai Harapan; 2= Kurang Sesuai Harapan; 3= Sesuai Harapan; 4= Melampaui Harapan

Remark : 1 = Did not meet Expectation; 2 = Almost meet Expectation; 3 = Meet Expectation; 4 = Exceed Expectation

FUNGSI NOMINASI DAN REMUNERASI

Nomination and Remuneration Function

Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara, bahwa jumlah komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris terdiri dari 2 (dua) Komite, yaitu Komite Audit dan Komite lainnya jika diperlukan. Komite Indonesia Power saat ini berjumlah dua Komite yaitu Komite Audit dan Komite Manajemen Risiko. Namun demikian pelaksana fungsi komite nominasi dan remunerasi dijalankan oleh Komite Manajemen Risiko. Fungsi ini dijalankan untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Komisaris dalam memastikan bahwa sistem pengendalian internal Perusahaan telah berfungsi secara efsien dan efektif.

In line with the Regulation of State Minister of State-Owned Enterprises No. PER-12/MBU/2012 on Supporting Organs of Board of Commissioners/Supervisory Board of the State-Owned Enterprises, the number of committees established by Board of Commissioners comprised of 2 (two) Committees, i.e. Audit Committee and other Committee, if required. Currently, there are two committees in Indonesia Power, i.e. Audit Committee and Risk Management Committee. However, the function of nomination and remuneration committee is performed by Risk Management Committee. The function is carried out in order to assist the execution of duties and functions of Board of Commissioners to ensure that the Company's internal control system is functioning efficiently and effectively.

Susunan dan Komposisi Fungsi Nominasi dan Remunerasi

Fungsi Komite Nominasi dan Remunerasi dijalankan oleh Komite Manajemen Risiko sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor 007.SK/DEWAN KOMISARIS-IP/2016 tanggal 20 September 2016. Berikut susunan dan komposisi keanggotaan Komite Manajemen Risiko yang juga menjalankan Fungsi Nominasi dan Remunerasi tahun 2016:

Composition of Nomination and Remuneration Function

Risk Management Committee performs the function of Nomination and Remuneration Committee, in line with Decree of Board of Commissioners No. 007.SK/DEWAN KOMISARIS-IP/2016 dated 20 September 2016. Below is the composition of Risk Management Committee that also performs the Nomination and Remuneration Function in 2016:

Tabel Komposisi Fungsi Nominasi dan Remunerasi Tahun 2016
Table: Composition of Nomination and Remuneration Function 2016

Nama	Jabatan	Position
Tri Setyo Nugroho	Ketua Komite Manajemen Risiko	Chairman of Risk Management Committee
Ahmad Yani	Wakil Komite Manajemen Risiko I	Deputy of Risk Management Committee I
Munir Ahmad	Wakil Komite Manajemen Risiko II	Deputy of Risk Management Committee II
Agustinus Lilik Ismanto	Sekretaris Komite Manajemen Risiko	Secretary of Risk Management Committee
Supriyanto	Anggota Komite Manajemen Risiko	Member of Risk Management Committee
Alfath Cordea Imalutha	Anggota Komite Manajemen Risiko	Member of Risk Management Committee

Independensi Fungsi Nominasi dan Remunerasi

Komite Manajemen Risiko dalam menjalankan Fungsi Nominasi dan Remunerasi bersifat mandiri baik dalam pelaksanaan tugasnya maupun dalam pelaporan dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris. Secara keseluruhan, Komite Manajemen Risiko juga menjalankan fungsi sebagai Penilai independen dalam melakukan penelaahan terhadap kegiatan Manajemen Perusahaan melalui usulan yang disampaikan kepada Dewan Komisaris dan telah dilengkapi dengan hasil kajian Manajemen Risiko untuk kegiatan Perusahaan yang memiliki potensi risiko yang dapat mempengaruhi Kinerja Perusahaan. Selain itu, Fungsi Nominasi dan Remunerasi Indonesia Power juga melakukan penelaahan terhadap kebijakan dibidang Nominasi dan Remunerasi serta kegiatan lain yang masuk kedalam lingkup tugas pengawasan Dewan Komisaris terhadap kinerja Manajemen Perusahaan.

Independence of Nomination and Remuneration Function

In performing the Nomination and Remuneration Function, Risk Management Committee is independent, in the performance of its duties and in reporting, and it is reporting directly to the Board of Commissioners. Overall, the Risk Management Committee is performing the function as independent Appraisal in reviewing the Company's Management activities through the proposal submitted to the Board of Commissioners, and completed with the Risk Management study for the Company that has the potential risk that may influence Company's Performance. In addition, Nomination and Remuneration Function of Indonesia Power also reviews the policy in the field of Nomination and Remuneration, as well as other activities in the scope of Board of Commissioners' supervision on the Company's Management performance.

FUNGSI NOMINASI DAN REMUNERASI
Nomination and Remuneration Function

Tugas dan Tanggung Jawab Fungsi Nominasi dan Remunerasi

Tugas dan tanggung jawab Fungsi Nominasi dan Remunerasi Indonesia Power diantaranya yaitu: (1) Memberikan pertimbangan kepada Dewan Komisaris terkait dengan nominasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris, untuk selanjutnya diserahkan kepada pemegang saham untuk diputuskan; dan (2) Memberikan pertimbangan kepada Dewan Komisaris terkait dengan usulan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris, untuk selanjutnya diputuskan oleh Pemegang Saham.

Duties and Responsibilities of the Nomination and Remuneration Function

Duties and responsibilities of the Nomination and Remuneration Function of Indonesia Power, among others: (1) Provide consideration to the Board of Commissioners related to nomination of member of Directors and Board of Commissioners, to be subsequently submitted to the shareholders who will make the decision; and (2) Provide consideration to the Board of Commissioners related to the proposed remuneration for Directors and Board of Commissioners, to be subsequently decided by Shareholders.

Program Kerja Fungsi Nominasi dan Remunerasi Tahun 2016

Program kerja Fungsi Nominasi dan Remunerasi tahun 2016, yaitu:
1. Memberikan rekomendasi tentang sistem penggajian dan pemberian tunjangan bagi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi
2. Memberikan rekomendasi kepada Direksi untuk merancang dan melaksanakan kebijakan Nominasi dan Remunerasi yang efektif.

Work Program of Nomination and Remuneration Function 2016

Work program of Nomination and Remuneration Function in 2016, i.e.:
1. Provide recommendations on the salary and allowances system for member of Board of Commissioners and Board of Directors
2. Provide recommendations to Directors to compile and conduct effective Nomination and Remuneration policy.

Rapat Fungsi Nominasi dan Remunerasi

Di lingkungan Perusahaan, Fungsi Nominasi dan Remunerasi dijalankan oleh Komite Manajemen Risiko. Sejalan dengan ketentuan yang tercantum pada *Board Manual* maupun *GCG Code*, keberadaan Fungsi Nominasi dan Remunerasi tersebut untuk memberikan pertimbangan kepada Dewan Komisaris terkait dengan nominasi calon Direksi serta penentuan remunerasi bagi Direksi. Dengan demikian, rapat-rapat Fungsi Nominasi dan Remunerasi melekat pada kegiatan yang dijalankan oleh Komite Manajemen Risiko.

Nomination and Remuneration Function Meeting

In the Company's environment, Nomination and Remuneration Function is performed by Risk Management Committee. In line with the provisions contained in the Board Manual and GCG Code, the Nomination and Remuneration Function is to provide consideration to the Board of Commissioners related to the nomination of Board of Directors' candidates and remuneration stipulation for Directors. Therefore, the Nomination and Remuneration Function Meetings are attached to the activities performed by Risk Management Committee.

Frekuensi Pertemuan dan Tingkat Kehadiran Fungsi Nominasi dan Remunerasi

Selama tahun 2016, Fungsi Nominasi dan Remunerasi telah menyelenggarakan rapat sebanyak dua kali. Berikut frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran Fungsi Nominasi dan Remunerasi dalam rapat tahun 2016:

Meeting Frequency and Attendance of Nomination and Remuneration Function

Throughout 2016, Nomination and Remuneration Function has held two meetings. Below is the meeting frequency and attendance of Nomination and Remuneration Function in 2016:

Tabel Rapat Fungsi Nominasi dan Remunerasi
Table: Nomination and Remuneration Function Meetings

Nama Name	Jumlah Rapat Number of Meetings	Jumlah Kehadiran Attendance	%
Bagus Setiawan *	0	0	0
Ahmad Yani **	1	0	0
Abdi Mustakim	2	0	0
Munir Ahmad *	0	0	0
Tri Setyo Nugroho *	0	0	0
Agustinus Lilik Ismanto	2	2	100
Supriyanto	2	2	100
Alfath Cordea Imalutha	2	0	0

*) Sdr. Bagus Setiawan, Munir Ahmad dan Tri Setyo Nugroho menjabat sebagai Dewan Komisaris sesuai dengan RUPS sirkuler tanggal 25 Agustus 2016, sehingga jumlah rapat yang harus dihadiri sebanyak dua kali rapat.
**) Sdr. Ahmad Yani menjabat sebagai Dewan Komisaris sesuai dengan RUPS sirkuler tanggal 2 Mei 2016, sehingga jumlah rapat yang harus dihadiri sebanyak satu kali rapat
*) Mr. Bagus Setiawan, Munir Ahmad, and Tri Setyo Nugroho serve as Board of Commissioners, in accordance with Circular GMS dated 25 August 2016, hence they have to attend two meetings.
**) Mr. Ahmad Yani serves as Board of Commissioners, in accordance with Circular GMS dated 2 May 2016, hence he has to attend one meeting.

No	Tanggal Pelaksanaa Date	Agenda Rapat	Meeting Agenda
1.	25 April 2016 April 25, 2016	1. Progress Pelaksanaan Pengembangan Organisasi Indonesia Power. 2. KPI Manajemen di bidang SDM: HCR, OCR, ICR.	1. Progress of Indonesia Power Organizational Development. 2. KPI Management in the Human Resources : HCR, OCR, ICR.
2.	27 Juni 2016 June 27, 2016	Pelaksanaan kebijakan nominasi dan remunerasi	Implementation of nomination and remuneration policy

FUNGSI NOMINASI DAN REMUNERASI
Nomination and Remuneration Function

Kebijakan Suksesi Direksi

Indonesia Power memiliki mekanisme suksesi Direksi yang dijalankan secara transparan dan terstruktur. Langkah tersebut dilakukan demi menjamin keberlanjutan jalannya Perusahaan. Kebijakan suksesi Direksi dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pemegang saham, yaitu PT PLN (Persero) dengan mempertimbangkan usulan dan masukan dari Fungsi Nominasi dan Remunerasi, yang dijalankan oleh Komite Manajemen Risiko Perusahaan. Ketentuan mengenai kebijakan suksesi direksi juga mengacu pada Anggaran Dasar dan *Board Manual* Perusahaan. Penentuan KPI Direksi berasal dari kontrak manajemen yang diturunkan menjadi KPI masing-masing anggota Direksi. *Cascading* KPI atau penurunan KPI dilakukan melalui pendekatan *balance scorecard*. KPI Direksi kemudian diturunkan ke level eksekutif utama, eksekutif senior, dan seterusnya.

Succession Policy of the Board of Directors

Indonesia Power has succession mechanism of Directors that is performed transparently and structurally. Such measure is taken to ensure the Company's sustainability. Succession policy of the Board of Directors is conducted in line with the regulations set by shareholders, i.e. PT PLN (Persero), taken into considerations the inputs from Nomination and Remuneration Function, which is performed by the Company's Risk Management Committee. The regulation regarding the succession policy refers to the Company's Articles of Association and Board Manual. KPI determination for Directors is derived from management contract into KPI for each member of Board of Directors. Cascading KPI is performed using balanced scorecard approach. KPI Directors is then cascaded to the main executive level, senior executives, and so on.

DIREKSI
Board of Directors

Direksi bertanggung jawab terhadap pengelolaan perusahaan agar dapat menghasilkan nilai tambah dan memastikan kesinambungan usaha. Masing-masing anggota Direksi melaksanakan tugas dan mengambil keputusan sesuai dengan pembagian tugas dan wewenang berdasarkan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Board of Directors is responsible for Company's management in order to generate added value and ensure business sustainability. Each member of Board of Directors perform their duties and make decisions in line with the duties and authorities delegation based on the Articles of Association and prevailing laws and regulations.

Persyaratan Direksi

Mengacu pada Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-03/MBU/2012 tentang Pedoman Pengangkatan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara, Anggota Direksi Perusahaan wajib memenuhi persyaratan kemampuan dan kepatutan. Seluruh calon anggota Direksi Perusahaan wajib memenuhi persyaratan integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang terdiri dari Persyaratan formal, Persyaratan materiil dan Persyaratan lainnya. Persyaratan untuk dapat dicalonkan menjadi anggota Direksi Anak Perusahaan adalah:

1. Syarat Formal, yaitu orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah:
   a. dinyatakan pailit
   b. menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu BUMN, Anak Perusahaan dan/atau Perusahaan dinyatakan pailit
   c. dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara, BUMN, Anak Perusahaan, Perusahaan, dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.
2. Syarat Materiil terhadap Calon Anggota Direksi, yaitu meliputi:
   a. Pengalaman, dalam arti yang bersangkutan memiliki rekam jejak (*track record*) yang menunjukan keberhasilan dalam pengurusan BUMN/Anak Perusahaan/ Perusahaan/ Lembaga tempat yang bersangkutan bekerja sebelum pencalonan

Board of Directors Requirement

Referring to the Regulation of Minister of State-Owned Enterprises Number PER-03/MBU/2012 on Guidelines for the Appointment of Members of Board of Directors and Board of Commissioners of Subsidiaries of State-Owned Enterprises, the member of Company's Directors shall meet the requirement of capability and propriety. Every candidate of Company's Directors shall meet the requirement of integrity, competence, and financial reputation, which covers the formal criteria, material criteria, and other criteria. The requirements to be a candidate for Directors of the Subsidiaries are:

1. Formal Criteria, i.e. an individual who is capable of performing legal acts, with the exception that within 5 (five) years before the appointment, has:
   a. been declared bankrupt
   b. been a member of Directors or Board of Commissioners/Supervisory Agency who is found guilty of causing the bankruptcy of a State-Owned Enterprise, Subsidiary, and/or Company.
   c. been punished for committing a crime which is detrimental to the State's finances, State-Owned Enterprise, Subsidiary, Company, and/or financial sectors related.
2. Material Criteria for Candidates of Directors, covers:
   a. Experience, the candidate has a track record that shows success in the management of State-Owned Enterprise/Subsidiary/Company/ Institution where the candidate worked before the candidacy.

DIREKSI
Board of Directors

b. Keahlian, dalam arti yang bersangkutan memiliki pengetahuan yang memadai dibidang usaha perusahaan yang bersangkutan
c. Integritas, dalam arti yang bersangkutan tidak pernah terlibat perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap ketentuan yang berkaitan dengan prinsip-prinsip pengurusan perusahaan yang sehat (berperilaku tidak baik)
d. Kepemimpinan
e. Memiliki kemauan yang kuat (antusias) dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan yang bersangkutan

3. Syarat Lain, yang meliputi:
a. bukan pengurus partai politik, dan/atau anggota legislatif, dan/atau tidak sedang mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif
b. bukan kepala/wakil kepala daerah dan/atau tidak sedang mencalonkan diri sebagai calon kepala/wakil kepala daerah
c. tidak menjabat sebagai Anggota Direksi pada perusahaan yang bersangkutan selama 2 (dua) periode berturut-turut.
d. sehat jasmani dan rohani

b. Expertise, the candidate has adequate knowledge in the said company's business field
c. Integrity, the candidate has never been involved in acts that could be categorized as violations of provisions related to the principles of sound company's management (misconducts)
d. Leadership
e. Has a strong will (enthusiastic) and high dedication to promote and develop the said company

3. Other Criteria, which covers:
a. shall not be a party official, and/or member of legislative, and/or shall not be on a process of nomination for a legislative candidate
b. shall not be a head/deputy head of a region and/or shall not be running for the candidate of head/deputy head of a region
c. shall not serve as a member of Directors on said company for 2 (two) periods consecutively.
d. physically and mentally healthy

Uji Kemampuan dan Kepatutan Direksi

Semua anggota Direksi Perusahaan telah melakukan uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) yang diselenggarakan dalam rangka pengangkatan anggota Direksi Perusahaan. Kegaiatan tersebut dilakukan secara transparan dan akuntabel, serta memperhatikan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Seluruh anggota Direksi Indonesia Power yang menjabat pada periode tahun 2016 telah lulus *fit and proper* yang mengindikasikan bahwa setiap anggota Direksi memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai. Berikut hasil *fit and proper test* Direksi Indonesia Power yang menjabat pada periode tahun 2016:

Director's Fit and Proper Test

Every member of Company's Directors has passed the fit and proper test, held in order to appoint the member of Company's Directors. The test was conducted transparently and accountably, and taking into account the prevailing laws and regulations. Every member of Indonesia Power's Directors who serves for the 2016 period has passed the fit and proper test, which indicates that every member of Directors has the adequate integrity, competency, and financial reputation. The following is the result of fit and proper test of Indonesia Power's Directors who serves on 2016 period:

Tabel Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan Direksi Periode Tahun 2016
Table: Fit and Proper Test Result of Directors Period 2016

Nama Name	Domisili Domicile	Hasil *Fit and Proper Test*	Fit and Proper Test Result
Sripeni Inten Cahyani	Jakarta	Lulus	Passed
Eri Prabowo	Jakarta	Lulus	Passed
Antonius RT Artono	Bogor	Lulus	Passed
Hudiono	Bandung	Lulus	Passed
Adi Supriono	Surabaya	Lulus	Passed
Roikhan	Bogor	Lulus	Passed

Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi

Pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi Perusahaan dilakukan melalui Keputusan RUPS/ Pemegang Saham. Pengangkatan Direksi telah melalui proses *fit and proper test* sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan yang tercantum dalam *Board Manual.*

Pengangkatan Anggota Direksi

Mekanisme pengangkatan Direksi diawali dengan penilaian oleh pemegang saham/RUPS terhadap calon anggota Direksi. Setelah itu, dilakukan mekanisme uji kelayakan dan kepatutan. Adapun ketentuan dalam pengangkatan anggota Direksi adalah sebagai berikut:

1. Pengangkatan dan pemberhentian Anggota Direksi dilaksanakan berdasarkan pada prinsip-prinsip profesionalisme dan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*)
2. Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham
3. Untuk pertama kali pengangkatan anggota Direksi dilakukan oleh pendiri dalam akta pendirian
4. Anggota Direksi diangkat untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali
5. Anggaran Dasar mengatur tata cara pengangkatan Anggota Direksi dan dapat juga mengatur tentang tata cara pencalonan Anggota Direksi
6. Keputusan RUPS mengenai pengangkatan Anggota Direksi juga menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan tersebut

Appointment and Dismissal of the Board of Directors

Appointment and dismissal of a member of Company's Directors are conducted through the GMS Decision/ Shareholders. Directors' appointment has been through the fit and proper test, in line with the prevailing laws and regulations stipulated in Board Manual.

Appointment of Board of Directors' Member

The mechanism of Directors' appointment is initiated by the assessment of shareholders/GMS on the candidates. Afterward, the candidates went through fit and proper test. The provisions in the appointment of Directors' member are as follow:

1. Appointment and dismissal of Directors' Member shall be based on the professionalism and good corporate governance principles.
2. Directors' Member is appointed and dismissed by the General Meeting of Shareholders
3. The first Directors' member is appointed by the Company's founder in deed of establishment
4. Directors' member is appointed for a certain period of time, and may be reappointed
5. Articles of Association stipulates the appointment of Directors' Member and the mechanism of candidacy of Directors' Member
6. GMS Decision regarding the appointment of Directors' Member shall determine the effective date of such appointment

DIREKSI
Board of Directors

7. Dalam hal RUPS tidak menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan Anggota Direksi, pengangkatan Anggota Direksi tersebut mulai berlaku sejak ditutupnya RUPS
8. Pengangkatan Anggota Direksi yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud batal karena hukum sejak saat anggota Direksi lainnya atau Dewan Komisaris mengetahui tidak terpenuhinya persyaratan tersebut
9. Perbuatan hukum yang telah dilakukan untuk dan atas nama Perusahaan oleh anggota Direksi sebelum pengangkatannya batal, tetap mengikat dan menjadi tanggung jawab Perusahaan
10. Calon Anggota Direksi terpilih menandatangani surat pernyataan/pakta integritas yang berisi kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik dan bersedia diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan alasan apapun yang dinilai tepat oleh RUPS, dan tidak menggugat atau mengajukan proses hukum sehubungan dengan pemberhentian tersebut
11. Pengangkatan Anggota Direksi mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal pelantikan atau tanggal yang ditetapkan dalam Keputusan RUPS

7. In the event that GMS does not specify the effective date of Directors' Member, the appointment of said Directors' member is effective immediately after the closing of GMS
8. An appointment of Directors' Member who fails to meet the requirements, becomes legally annul upon the time when other members of Directors or Board of Commissioners notice the concerned member's failure to meet the requirements
9. All legal actions taken by a Directors' Member and on behalf of the Company's name before his or her appointment is cancelled, shall remain binding and be the responsibility of the Company
10. An elected candidate of Directors shall sign a statement/Integrity Pact under which he or she pledges to perform his or her duties appropriately and is willing to be dismissed at any time for any reason considered appropriate by the GMS, and shall not sue or file a legal process with respect to the dismissal
11. The appointment of Directors' Member starts effective immediately since the date of inauguration or the date stipulated in GMS Decision

Pemberhentian anggota Direksi

Ketentuan dalam pemberhentian Direksi Perusahaan adalah sebagai berikut:

1. Anggota Direksi dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan RUPS dengan menyebutkan alasannya
2. Pemberhentian sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud pada poin 1 dilakukan apabila Anggota Direksi yang bersangkutan, antara lain:
    a. Tidak/kurang dapat memenuhi kewajibannya yang telah disepakati dalam kontrak manajemen.
    b. Tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik.
    c. Melanggar ketentuan Anggaran Dasar dan/atau peraturan perundang-undangan.
    d. Terlibat dalam tindakan yang merugikan Perseroan dan/atau Negara.

Dismissal of Board of Directors' Member

The provisions in the dismissal of Company's Directors are as follow:

1. Directors' Member may be dismissed at any time based on the GMS by stating the reasons for dismissal
2. The dismissal as referred to in point 1 shall be conducted if the concerned Directors' Member:
    a. has failed to meet his or her obligations as agreed upon in the management contract.
    b. has failed to carry out his or her task properly.
    c. violated the Articles of Association and/or rules and legislations.
    d. is involved in an act detrimental to the Company and/or State.

e. Melakukan tindakan yang melanggar etika dan/ atau kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai anggota Direksi

f. Dinyatakan bersalah dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap

g. Mengundurkan diri.

3. Disamping alasan pemberhentian Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada poin 2, Direksi dapat diberhentikan oleh RUPS berdasarkan alasan lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS demi kepentingan dan tujuan Perseroan, antara lain karena terjadinya ketidak harmonisan antar Anggota Direksi
4. Apabila terjadi perbedaan antara ketentuan Peraturan Menteri ini dengan Anggaran Dasar mengenai alasan pemberhentian, maka yang berlaku adalah ketentuan Anggaran Dasar, dan selanjutnya ketentuan Anggaran Dasar segera disesuaikan dengan Peraturan Menteri
5. Keputusan pemberhentian karena alasan sebagaimana poin 2 diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri
6. Pembelaan diri disampaikan secara tertulis kepada RUPS dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak Anggota Direksi yang bersangkutan diberitahu
7. Pembelaan diri dapat diberikan langsung pada saat pemberitahuan kepada pejabat yang memberitahukan
8. Dalam hal Anggota Direksi yang bersangkutan telah melakukan pembelaan diri atau menyatakan keberatan atau tidak berkeberatan atas rencana pemberhentiannya pada saat diberitahukan, maka ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada poin 6 dianggap telah terpenuhi
9. Dalam hal pemberitahuan dan pembelaan diri secara lisan, maka dilakukan secara tatap muka dan dibuktikan dengan notulen atau berita acara yang ditandatangani oleh Anggota Direksi yang bersangkutan dan pejabat yang memberitahukan
10. Apabila Anggota Direksi yang bersangkutan tidak bersedia menandatangani notulen atau berita acara, maka disebutkan alasannya dalam notulen atau berita acara tersebut

e. committed acts that are in violation of ethics and/or appropriateness that should be upheld by Directors' member

f. is found guilty based on the court's decision that has a permanent legal force

g. resigned.

3. In addition to the reasons for dismissal for the Directors' Member as referred to in point 2, Directors shall be dismissed by GMS based on other reasons deemed appropriate by the GMS, in the interests and objectives of the Company, including the presence of disharmony between two or more members of Directors
4. In the event of discrepancies between a stipulation of Minister Regulation and that of the Company's Articles of Association regarding the reasons for dismissal, then the provision of Articles of Association is applied, and furthermore, the stipulation of Articles of Association shall be adjusted to the Minister Regulation.
5. The decision of dismissal for reasons referred to in point 2 shall be taken after the incumbent is given a chance to defend himself or herself
6. Defense shall be submitted in writing to the GMS within 14 (fourteen) days from the date the concerned Directors' member is notified of the dismissal
7. The defense may be given directly upon notification to the notifying authorities
8. In the event that said a member of Directors has defended himself or herself, or expressed objection or no objection on the dismissal plan upon notice, then the provision of time referred to in point 6 shall be considered to have been met.
9. In the event that the self-defense is conducted verbally, then it shall be done face to face and evidenced by the minutes signed by the incumbent member and the notifying authorities.
10. If the said Directors' Member refuses to sign the minutes, then the reasons for such refusal shall be mentioned in the minutes.

DIREKSI
Board of Directors

11. Penetapan pemberhentian Anggota Direksi Perseroan dapat dilakukan dengan keputusan RUPS secara sirkuler dan keputusan seluruh Pemegang Saham di luar RUPS
12. Pemberhentian Anggota Direksi dapat diproses bersamaan dengan proses pengangkatan Anggota Direksi pada Perseroan yang bersangkutan
13. Jabatan Anggota Direksi berakhir apabila:
    a. Meninggal Dunia
    b. Masa Jabatannya Berakhir
    c. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Anggota Direksi berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan
    d. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS secara sirkuler atau keputusan seluruh Pemegang Saham di luar RUPS.
14. Ketentuan sebagaimana poin 13 termasuk tetapi tidak terbatas pada rangkap jabatan yang dilarang dan pengunduran diri
15. Anggaran Dasar mengatur tata cara pengangkatan, penggantian dan pemberhentian Anggota Direksi dan dapat juga mengatur tentang tata cara pencalonan anggota Direksi
16. Keputusan RUPS mengenai pengangkatan, penggantian dan pemberhentian anggota Direksi juga menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian tersebut
17. Dalam hal RUPS tidak menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan, penggantian dan pemberhentian Anggota Direksi, penggantian dan pemberhentian anggota Direksi tersebut mulai berlaku sejak ditutupnya RUPS
18. Pengangkatan Anggota Direksi yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam bagian III.1.2 poin 1 batal karena hukum sejak saat anggota Direksi lainnya atau Dewan Komisaris mengetahui tidak terpenuhinya persyaratan tersebut.

11. Determination of Directors' member dismissal of the Company shall be conducted through resolute circular (on paper) GMS Decision, and decision of all Shareholders outside GMS
12. Dismissal of Directors' member may be processed simultaneously with the appointment of a new member of Company's Directors.
13. The term of office for Directors' member ended if:
    a. the said member passed away
    b. the serving period has ended
    c. the said member is no longer meeting the requirement as Directors based on the stipulation of Articles of Association and laws and regulations
    d. the member is dismissed based on resolute circular (on paper) GMS Decision or decision of all Shareholders outside GMS.
14. Provisions, as referred to in point 13, includes but is not limited to prohibited concurrent positions and resignation
15. Articles of Association stipulates the mechanism appointment, replacement, and dismissal of Directors' Member, and shall stipulate the mechanism of candidacy of Directors' Member
16. GMS Decision regarding the appointment, replacement, and dismissal of Directors' Member shall determine the effective date of such appointment, replacement, and dismissal
17. In the event that GMS does not specify the effective date of appointment, replacement, and dismissal of Directors' Member, the appointment, and dismissal of said Directors' member is effective immediately after the closing of GMS
18. An appointment of Directors' Member who fails to meet the requirements, as referred to in part III.1.2 point 1 becomes legally annul upon the time when other members of Directors or Board of Commissioners notice the concerned member's failure to meet the requirements.

Jumlah dan Komposisi Direksi

Di tahun 2016 terdapat beberapa kali perubahan susunan komposisi Direksi Perusahaan. Pengukuhan pemberhentian dan pengangkatan Direksi dilakukan berdasarkan RUPS. Komposisi dan jumlah anggota

Number and Composition of the Board of Directors

In 2016, there were a few changes in the composition of the Company's Directors. Inauguration of dismissal and appointment of Directors shall be based on GMS. Composition and number of Directors' Member are set

Direksi ditetapkan oleh RUPS dengan memperhatikan visi, misi, dan rencana strategis Perusahaan untuk memungkinkan pengambilan keputusan yang efektif, tepat dan cepat, serta dapat bertindak secara independen. Susunan dan komposisi anggota Direksi Perusahaan tahun 2016 adalah sebagai berikut:

forth by GMS, taking into account the vision, mission, and strategic plan of the Company to enable decision making that is effective, precise, fast, and able to act independently. The composition of the Directors' Member of the Company in 2016 is as follows:

Tabel Komposisi dan Susunan Direksi Per 31 Desember 2016
Table: Composition of Board of Directors Per December 31, 2016

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Hukum Penunjukan Legal Basis	Periode Jabatan Term of Office
Sripeni Inten Cahyani	Direktur Utama President Director	RUPS Sirkuler Pemegang Saham tanggal 21 Maret 2016 Circular GMS dated 21 March 2016	2016-2020
Eri Prabowo	Direktur Operasi I Operation Director I	RUPS Sirkuler Pemegang Saham tanggal 21 Maret 2016 Circular GMS dated 21 March 2016	2016-2020
Antonius RT Artono	Direktur Operasi II Operation Director II	RUPS Sirkuler Pemegang Saham tanggal 21 Maret 2016 Circular GMS dated 21 March 2016	2016-2020
Hudiono	Direktur Keuangan Financial Director	RUPS Sirkuler Pemegang Saham tanggal 21 Maret 2016 Circular GMS dated 21 March 2016	2016-2020
Adi Supriono	Direktur Pengembangan dan Niaga Director of Development and Commerce	RUPS Sirkuler Pemegang Saham tanggal 21 Maret 2016 Circular GMS dated 21 March 2016	2016-2020
Roikhan	Direktur Sumber Daya Manusia Director of Human Resources	RUPS Sirkuler Pemegang Saham tanggal 21 Maret 2016 Circular GMS dated 21 March 2016	2016-2020

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi (*Board Charter*)

Direksi Indonesia Power dilengkapi Pedoman Kerja (*Board Manual*) dalam melaksanakan fungsi pengelolaan Perusahaan. Pedoman Kerja ini yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi Nomor 178.K/010/IP/2013 dan Nomor 006.SK/DEKOM-IP/2013. Pedoman dan tata kerja Direksi dalam *Board Manual* tersebut mengatur aspek, antara lain:

1. Pengertian, persyaratan dan komposisi Direksi
2. Pengaturan rangkap jabatan
3. Program pengenalan dan pelatihan
4. Tugas Direksi, termasuk terkait kebijakan operasional dan standar operasional baku (SOP), manajemen risiko, pengendalian internal, informasi kepada *stakeholder*, pemenuhan target

Work Guidelines and Code of Conduct for the Board of Directors (Board Charter)

Directors of Indonesia Power is equipped with Board Manual in carrying out the Company's management functions. The Work Guidelines is set forth in Joint Decree of Board of Commissioners and Directors Number 178.K/010/IP/2013 and Number 006.SK/DEKOM-IP/2013. The guidelines and procedures of the Board of Directors in the Board Manual regulate the following aspects:

1. Definition, requirements, and composition of Board of Directors
2. Concurrent position regulation
3. Introduction and training program
4. Directors' duties, including those related to operational policy and Standard Operating Procedure (SOP), risk management, internal control, information to the stakeholder, performance target

DIREKSI
Board of Directors

kinerja, mutu produk dan pelayanan, SDM maupun terkait praktik GCG.
5. Rapat Direksi
6. Etika Jabatan
7. Pelaporan dan Pertanggungjawaban
8. Evaluasi Kinerja
9. Organ Pendukung Direksi
10. Hubungan kerja dengan Anak Perusahaan. Selain itu, *Board Manual* juga mengatur aspek terkait dengan kewajiban mengkaji ulang ketentuan tersebut sesuai dengan kebutuhan perusahaan dan perkembangan regulasi yang berlaku.

fulfillment, product and services quality, Human Resources, and GCG practices.
5. Board of Directors' meeting
6. Ethics of the position
7. Reporting and accountability
8. Performance evaluation
9. Direct Report to the Directors
10. Work relationship with Subsidiaries. Board Manual also regulates aspects related to the necessity to review provisions contained in the Manual based on the Company's need and in response to changes in regulations.

Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Berdasarkan *Board Manual* tanggung jawab Direksi meliputi:
1. Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun diluar pengadilan
2. Direksi bertanggung jawab terhadap pengelolaan Perusahaan agar dapat menghasilkan keuntungan dan memastikan kesinambungan Perusahaan
3. Pengurusan sebagaimana dimaksud pada poin 1, wajib dilaksanakan setiap Anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab
4. Setiap Anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada poin 3
5. Dalam hal Direksi terdiri atas dua anggota Direksi atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada poin 4 berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Direksi
6. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada poin 4 apabila dapat membuktikan:
   a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya

Board of Directors' Duties and Responsibilities

Based on the Board Manual, responsibilities of Directors cover:
1. In carrying out their duties, Directors is fully responsible for Company's management for the purposes and objectives, and to represent the Company, inside and outside court
2. Board of Directors is responsible for Company's management in order to generate added value and ensure business sustainability
3. The management as referred to in point 1, shall be performed by every member of the Directors in good faith and with full responsibility
4. Every member of Directors is fully responsible individually for Company's loss if proven guilty or negligent in conducting their duties in accordance with the provisions as referred to in point 3
5. In the event that Directors consists of two members or more, the responsibility as referred to in point 4 shall be jointly borne by all members of Directors
6. Directors' member shall not be held accountable for the loss as referred to in point 4, if proven that:
   a. the loss is not caused by his/her fault or negligent

b. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan

c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian

d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut

7. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada poin 6 tidak mengurangi hak Anggota Direksi lain dan/ atau anggota Dewan Komisaris untuk mengajukan gugatan atas nama Perusahaan
8. Ketentuan mengenai tanggung jawab Direksi atas kesalahan dan kelalaiannya yang diatur dalam undangundang ini tidak mengurangi ketentuan yang diatur dalam undang-undang tentang Hukum Pidana
9. Dalam hal kepailitan sebagaimana dimaksud pada ayat terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan harta pailit tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban Perseroan dalam kepailitan tersebut, setiap Anggota Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas seluruh kewajiban yang tidak terlunasi dari harta pailit tersebut
10. Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada poin 9 berlaku juga bagi Anggota Direksi yang salah atau lalai yang pernah menjabat sebagai Anggota Direksi dalam jangka waktu lima tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan
11. Anggota Direksi tidak bertanggungjawab atas kepailitan Perusahaan sebagaimana dimaksud pada poin 9 apabila dapat membuktikan:
    a. Kepailitan tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya
    b. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, kehati-hatian, dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan Perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan
    c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang dilakukan
    d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah terjadinya kepailitan

b. the Director has conducted management activities in good faith and with the prudence that are consistent with the Company's goals and objectives

c. the member has no conflict of interest, be it directly or indirectly on the management action that resulted in such loss

d. the member has taken necessary actions to prevent such loss from arising or continuing

7. The provision as referred to in point 6 does not depreciate the rights of other members of Directors and/or Board of Commissioners to file a lawsuit on behalf of the Company
8. Provisions concerning the responsibilities of Directors on their misconducts and negligence as regulated in this Law does not supersede in any way the provisions as stipulated in Criminal Law
9. In the event that the bankruptcy as referred to in paragraph occurs due to Directors' misconducts or negligence, and the Company's assets are insufficient to pay for all of the Company's financial obligations due to the bankruptcy, each member of Directors shall be jointly liable for all the unsettled financial obligations
10. Responsibility, as referred to in point 9, shall also apply to Directors' Member who is found guilty or negligence and has served as Directors' Member within the period of five years prior to the announcement of bankruptcy verdict
11. Directors' Member cannot be held accountable for the Company's bankruptcy as referred to in point 9 if proven that:
    a. the bankruptcy is not caused by his/her fault or negligent
    b. the Director has conducted management activities in good faith, with prudence, and full responsibility for the interest of the Company and consistent with the Company's goals and objectives
    c. the Director has no conflict of interest, be it directly or indirectly on the management action conducted
    d. the Director has taken the necessary actions to prevent the bankruptcy

DIREKSI
Board of Directors

12. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada poin 9, poin 10, dan poin 11 berlaku juga bagi Direksi dari Perseroan yang dinyatakan pailit berdasarkan gugatan pihak ketiga.

Sedangkan wewenang yang dimiliki Direksi, meliputi:
1. Menetapkan kebijakan kepengurusan Perusahaan
2. Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi untuk mewakili Perusahaan di dalam dan di luar pengadilan kepada seorang atau beberapa orang anggota Direksi yang khusus ditunjuk untuk itu
3. Mengatur kebijakan kepegawaian termasuk penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi pegawai berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku
4. Mengangkat dan memberhentikan pegawai Perusahaan berdasarkan peraturan kepegawaian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
5. Mengangkat seorang Sekretaris Perusahaan
6. Melakukan segala tindakan dan perbuatan lainnya mengenai pengurusan Perusahaan, mengikat Perusahaan dengan pihak lain dan/atau pihak lain dengan Perusahaan, serta mewakili Perusahaan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan RUPS
7. Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perusahaan apabila terjadi perkara di pengadilan antara Perusahaan dengan Anggota Direksi yang bersangkutan, atau anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan dengan Perusahaan.
8. Yang berhak mewakili Perusahaan adalah Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perusahaan; Dewan Komisaris dalam hal seluruh Anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perusahaan; Pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh Anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perusahaan
9. Direksi tidak berwenang mengajukan permohonan pailit atas Perusahaan sendiri kepada Pengadilan Niaga sebelum memperoleh persetujuan RUPS, dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana diatur dalam undangundang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

12. The provisions as referred to in point 9, point 10, and point 11 shall also apply to the Company's Director who is declared bankrupt due to a legal claim from a third party.

The authorities of Directors, include:
1. Establish the Company's management policy
2. Set the Directors' delegation of authority to represent the Company inside and outside court to one or more than one member of Directors, specifically designated
3. Regulate employment policy including salary determination, pension or retirement benefits, and other employee income based on prevailing laws and regulations
4. Appoint and dismiss Company's employees based on the employment regulation and prevailing laws and regulations
5. Appoint a Corporate Secretary
6. Take all actions necessary with regards to the Company's management, bind the Company with other parties and/or other parties with the Company, and represent the Company inside and outside the Court on all matters and in all situations as stipulated in laws and regulations, the Company's Articles of Association, and/or GMS Decisions
7. Directors' member is not authorized to represent the Company in the event that the court case is between the Company and the relevant Director, or the said Director has a conflict of interest with the Company.
8. One who is authorized to represent the Company is: other Directors who does not have conflict of interest with the Company; Board of Commissioners in the event that all members of Directors have conflict of interest with the Company; other party appointed by GMS in the event that all member of Directors or Board of Commissioners have conflict of interest with the Company
9. Board of Directors is not authorized to file bankruptcy on its Company to the Commercial Court before obtaining the approval from GMS, without prejudice to the provisions stipulated in laws on Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations

10. Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan harta pailit tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban Perusahaan dalam kepailitan tersebut, setiap Anggota Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas seluruh kewajiban yang tidak terlunasi dari harta pailit tersebut.

10. In the event that the bankruptcy is due to Directors' misconducts or negligence, and the Company's assets are insufficient to pay for all of the Company's financial obligations due to the bankruptcy, each member of Directors shall be jointly liable for all the unsettled financial obligations.

Pembidangan Tugas Direksi

Tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi ditetapkan berdasarkan Keputusan Direksi Nomor 239.K/010/IP/2016 tanggal 6 Desember 2016 tentang tentang organisasi di Indonesia Power. Berikut pembidangan tugas Direksi Indonesia Power periode tahun 2016:

Job Descriptions of Board of Directors

Duties and responsibilities of each Directors' Member are set forth based on the Directors' Decree Number 239.K/010/IP/2016 dated 6 December 2016 on Indonesia Power Organization. The following is the job descriptions of Indonesia Power's Board of Directors in 2016:

Jabatan Position	Pembagian Tugas	Duties
Direktur Utama President Director	Menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan Perusahaan untuk kepentingan Perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan serta mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan, Anggaran Dasar dan/atau keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. Direktur Utama membawahi Satuan Audit Internal, Sekretariat Perusahaan, Unit Pembangkitan, Unit Jasa Pemeliharaan, Unit Jasa Pembangkitan, Unit Pembangkitan dan Jasa Pembangkitan.	Carry out actions related to Company's management for the Company's interest, and in line with Company's purposes and objectives, and represent the Company inside and outside court as stipulated in laws and regulations, Articles of Association, and/or Decision of General Meeting of Shareholders. President Director supervises Internal Audit Unit, Corporate Secretariat, Generating Unit, Maintenance Services Unit, Generating Service Unit, and Generating and Generating Service Unit.
Direktur Operasi I Operation Director I	Memiliki tugas, tanggung jawab dan wewenang dalam memimpin dan menerjemahkan kebijakan strategi perusahaan di bidang operasi ke dalam proses bisnis, prosedur dan aturan, melaksanakan pembinaan dan pengawasan kegiatan pengoperasian dan pemeliharaan pembangkit, kegiatan enjiniring, perencanaan energi primer, manajemen energi, manajemen K3 dan lingkungan serta melakukan koordinasi sesuai dengan fungsi utama dengan pihak internal dan eksternal dalam pengelolaan kegiatan pengoperasian dan pemeliharaan pembangkit di Unit Pembangkitan dan Unit Jasa Pembangkitan.	Have duties, responsibilities, and authorities to lead and transfer the Company's strategic policy to operations into the business process, procedures and regulations. Carry out mentoring and supervising of operations and generator maintenance, engineering activities, primary energy planning, energy management, HSE management. Perform coordination in line with the main function with internal and external parties in managing the operations and generator maintenance in Generating Unit and Generating Service Unit.

DIREKSI
Board of Directors

Jabatan Position	Pembagian Tugas	Duties
Direktur Operasi II Operation Director II	Memiliki tugas, tanggung jawab dan wewenang dalam memimpin dan menerjemahkan kebijakan strategi Perusahaan di bidang operasi ke dalam proses bisnis, prosedur dan aturan, melaksanakan pembinaan dan pengawasan kegiatan pengoperasian dan pemeliharaan pembangkit, kegiatan enjiniring, perencanaan energi primer, manajemen energi, manajemen K3 dan lingkungan serta melakukan koordinasi sesuai dengan fungsi utama dengan pihak internal dan eksternal dalam pengelolaan kegiatan pengoperasian dan pemeliharaan pembangkit di Unit Jasa Pembangkitan.	Have duties, responsibilities, and authorities to lead and transfer the Company's strategic policy to operations into the business process, procedures and regulations. Carry out mentoring and supervising of operations and generator maintenance, engineering activities, primary energy planning, energy management, HSE management. Perform coordination in line with the main function with internal and external parties in managing the operations and generator maintenance in Generating Service Unit.
Direktur Keuangan Financial Director	Memiliki tugas, tanggung jawab dan wewenang dalam memimpin dan menerjemahkan kebijakan dan strategi Perusahaan di bidang keuangan ke dalam proses bisnis, prosedur dan aturan; melaksanakan pembinaan dan pengawasan kegiatan pendanaan, pembinaan anak perusahaan, anggaran, tresuri, perpajakan, asuransi dan akuntansi serta melakukan koordinasi sesuai fungsi utama dengan pihak internal maupun eksternal perusahaan.	Have duties, responsibilities, and authorities to lead and transfer the Company's strategy and policy in financial sector into the business process, procedures, and regulations. Carry out mentoring and supervising of financing activities, mentoring subsidiaries, budget, treasury, taxes, insurances, and accountancy. Perform coordination in line with the main function with internal and external parties of the Company.
Direktur Pengembangan dan Niaga Director of Development and Commerce	Memiliki tugas, tanggung jawab dan wewenang dalam memimpin dan menerjemahkan kebljakan dan strategi Perusahaan di bidang Pengembangan dan Niaga ke dalam proses bisnis, prosedur dan aturan; melaksanakan pembinaan dan pengawasan kegiatan niaga, pengembangan usaha dan proyek pembangkit, serta melakukan koordinasi sesuai fungsi utama dengan pihak internal maupun eksternal Perusahaan	Have duties, responsibilities, and authorities to lead and transfer the Company's strategy and policy in Development and Commerce sector into the business process, procedures, and regulations. Carry out mentoring and supervising of commercial activities, business development, and power plant project. Perform coordination in line with the main function with internal and external parties of the Company.
Direktur Sumber Daya Manusia dan Administrasi Director of Human Resources & Administration	Memiliki tugas, tanggung jawab dan wewenang dalam memimpin dan menerjemahkan kebijakan dan strategi Perusahaan di bidang sumber daya manusia ke dalam proses bisnis, prosedur dan aturan; melaksanakan pembinaan dan pengawasan kegiatan pengembangan sistem SDM, pengembangan SDM, administrasi SDM, pengelolaan hubungan industrial, pengelolaan budaya perusahaan serta melakukan koordinasi sesuai fungsi utama dengan pihak internal maupun eksternal perusahaan.	Have duties, responsibilities, and authorities to lead and transfer the Company's strategy and policy in human resources sector into the business process, procedures, and regulations. Carry out mentoring and supervising of human resources system development, human resources development, human resources administration, industrial relationship management, and corporate culture management. Perform coordination in line with main function with internal and external parties of the Company.

Independensi Direksi

Setiap anggota Direksi dapat bertindak independen dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya baik secara individual maupun kolegial. Seluruh anggota Direksi tidak merangkap jabatan yang dilarang oleh

Board of Directors' Independency

Every member of Directors may act independently in carrying out duties and responsibilities, be it individually or collegially. All member of Board of Directors shall not hold a concurrent position which is prohibited in the

peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang pelaksanaan GCG. Pernyataan tidak memiliki benturan kepentingan ditandatangani pada awal pengangkatan sebagai Direktur dan diperbaharui setiap awal tahun. Pada tahun 2016, bersama dengan seluruh anggota Dewan Komisaris, Direksi Indonesia Power telah menandatangani Surat Pernyataan Benturan Kepentingan sebagai pernyataan bahwa anggota Dewan Komisaris dan Direksi maupun keluarganya tidak mempunyai kepemilikan saham maupun menjadi pengurus pada perusahaan maupun kegiatan usaha yang berkaitan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan bidang usaha Perusahaan.

prevailing rules on the GCG implementation. Declaration of Absence of Conflict of Interest is signed in the appointment of Director, and renewed at the beginning of the year. In 2016, with all the member of Board of Commissioners, Indonesia Power's Board of Directors has signed the Declaration of Absence of Conflict of Interest, as a statement that the member of Board of Commissioners and Directors and their family do not have share ownership or become the Company's management, or business activities that are related directly or indirectly to the Company's field of business.

Kepemilikan Saham Anggota Direksi

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2016, tidak terdapat anggota Direksi Indonesia Power yang memiliki saham Indonesia Power mencapai 5% maupun pada perusahaan lainnya yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri. Direksi telah mengungkapkan kepemilikan sahamnya, baik pada Indonesia Power maupun pada perusahaan lain dan diperbaharui setiap tahunnya, sebagaimana tabel berikut:

Board of Directors' Shareholding

As of 31 December 2016, there is no Directors' member of Indonesia Power who has Indonesia Power's shares to 5% or those at other companies domiciled inside or outside the country. Directors has disclosed their shareholdings, to Indonesia Power and other companies, and renewed every year, as per the following table:

Tabel Kepemilikan Saham Anggota Direksi Tahun 2016
Table: Directors' Member Shareholdings in 2016

Nama Name	Kepemilikan Saham di Perusahaan Lain	Shareholding
Sripeni Inten Cahyani	Tidak ada kepemilikan saham di perusahaan lain	None
Eri Prabowo	Tidak ada kepemilikan saham di perusahaan lain	None
Antonius RT Artono	Tidak ada kepemilikan saham di perusahaan lain	None
Hudiono	Bank Niaga (Istri)	Bank Niaga (Spouse)
Adi Supriono	PT Vale Indonesia	PT Vale Indonesia
Roikhan	Tidak ada kepemilikan saham di perusahaan lain	None

Rangkap Jabatan Direksi

Seluruh anggota Direksi tidak boleh merangkap jabatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait pelaksanaan GCG. Selain menjabat sebagai Direksi Indonesia Power, ada juga anggota Direksi yang merangkap jabatan terkait dengan

Board of Directors' Concurrent Positions

All member of Board of Directors shall not hold a concurrent position which is prohibited in the prevailing rules related to GCG implementation. In addition, to serving as Indonesia Power's Director, there are members of Directors who holds a concurrent position

DIREKSI
Board of Directors

tanggung jawab pengawasan atas penyertaan pada anak perusahaan, menjalankan tugas fungsional, dan/atau menjadi Dewan Komisaris pada anak perusahaan sebagaimana tabel di bawah ini:

related to supervisory responsibilities on participation in subsidiaries, functional duties, and/or as a member of Board of Commissioners at subsidiaries, as described in the following table:

Tabel Rangkap Jabatan Direksi Tahun 2016
Table: Board of Directors' Concurrent Position 2016

Nama Name	Jabatan di Perusahaan Lain	Position at Other Company
Sripeni Inten Cahyani	1. Komisaris PT Tangkuban Parahu Geothermal Power 2. Komisaris PT Putra Indotenaga	1. Commissioner of PT Tangkuban Parahu Geothermal Power 2. Commissioner of PT Putra Indotenaga
Eri Prabowo	1. Komisaris Utama PT Indo Pusaka Berau 2. Komisaris PT Rajamandala Electric Power	1. President Commissioner of PT Indo Pusaka Berau 2. Commissioner of PT Rajamandala Electric Power
Antonius RT Artono	3. Komisaris Utama PT Indo Ridlatama Power 4. Komisaris Utama PT Tangkuban Parahu Geothermal Power 5. Komisaris Utama PT Perta Daya Gas 6. President Commissioner PT GCL Indo Tenaga	3. President Commissioner of PT Indo Ridlatama Power 4. President Commissioner of PT Tangkuban Parahu Geothermal Power 5. President Commissioner of PT Perta Daya Gas 6. President Commissioner of PT GCL Indo Tenaga
Hudiono	Tidak ada	None
Adi Supriono	Tidak ada	None
Roikhan	1. Komisaris Utama PT Cogindo DayaBersama 2. Komisaris Utama PT Artha Daya Coalindo	1. President Commissioner of PT Cogindo DayaBersama 2. President Commissioner of PT Artha Daya Coalindo

Rapat Direksi

Direksi secara rutin mengadakan rapat, baik secara internal maupun rapat gabungan dengan Direksi dalam rangka mengkoordinasikan seluruh kegiatan bisnis Perusahaan. Keputusan rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan musyawarah mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil berdasarkan pemungutan suara setuju terbanyak. Apabila jumlah suara yang setuju dan yang tidak setuju sama banyaknya, maka Pimpinan Rapat yang menentukan dengan tetap memperhatikan ketentuan mengenai pertanggungjawaban. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan bahwa seluruh anggota Direksi telah memberikan persetujuan atas usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan melalui rapat formal.

Board of Directors' Meeting

Board of Directors routinely holds meeting, either internally or jointly with the Board of Commissioners in order to coordinate all business activity of the Company. Decisions in the meeting are made through deliberation. In the event that deliberation is not achieved, then the decision shall be made based on the majority vote. If there is an equal number of votes on those who agree and those who don't, the Chairman of the Meeting shall determine which decision is made by taking into account the provisions on accountability. Directors shall also make a valid and binding decision without holding Directors' Meeting, provided that all Member of Directors have approved the proposal submitted in writing, and signed the agreement. The decision made has the same legal power as those made in formal meetings.

Frekuensi Pertemuan dan Tingkat Kehadiran Direksi

Selama tahun 2016, Direksi Indonesia Power telah menyelenggarakan 40 kali rapat internal dan 14 kali rapat gabungan dengan Dewan Komisaris. Tingkat kehadiran anggota Direksi dalam rapat internal dan gabungan dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Meeting Frequency and Attendance of Board of Directors.

Throughout 2016, Indonesia Power's Board of Directors has held 40 internal meetings and 14 joint meetings with the Board of Commissioners. The attendance of Directors' Member in internal and joint meetings can be seen in the following table:

Tabel Kehadiran Direksi Dalam Rapat Internal Tahun 2016
Table: Meeting Frequency and Attendance of Board of Directors in Internal Meetings 2016

Nama Name	Jumlah Rapat Meetings	Jumlah Kehadiran Attendance	Persentase (%) Percentage (%)
Sripeni Inten Cahyani	39	35	90%
Eri Prabowo	39	32	82%
Antonius RT Artono	39	33	85%
Hudiono*	28	25	89%
Adi Supriono*	28	25	89%
Roikhan	39	32	82%

*) Sdr. Hudiono dan Sdr. Adi Supriono menjabat sebagai Direksi sesuai dengan RUPS sirkuler tanggal 21 Maret 2016.
*) Mr. Hudiono and Adi Supriono serve as Directors, in accordance with Circular GMS dated 21 March 2016.

Agenda, Tanggal dan Peserta Rapat Internal Direksi

Agenda, Date, and Participants of the Board of Directors' Internal Meetings

No	Tanggal Pelaksanaan Date	Agenda Rapat	Meeting Agenda
1	5 Januari 2016, January 5, 2016	1. Review Tindak Lanjut Keputusan Rapat Direksi sebelumnya dan Info lain lain 2. Sosialisasi SK *Governance Risk & Compliance*	1. Review of Decision Follow up from the previous Directors' Meeting and other information 2. Socialization of Governance Risk & Compliance Decree
2	7 Januari 2016, January 7, 2016	Progress Pengalihan Asset Manager	Asset Manager Transfer Progress
3	12 Januari 2016, January 12, 2016	1. *Review* Rapat Direksi sebelumnya dan info lain-lain 2. Laporan: - Laporan pelaksanaan *Whistle Blowing System* (WBS) 2015 - Rencana temuan Th 2014 yang belum ditindaklanjuti auditee - Fokus program kerja audit tahunan (PKAT) 2016 3. Akademi Peningkatan, Percepatan Kompetensi 4. IP *Project 5E - Report* 5. Pembahasan Addendum PKB 6. *Update* Info Materi RUPS RKAP 2016	1. Review of previous Directors' Meeting and other information 2. Report: - Report on 2015 Whistle Blowing System (WBS) implementation - Findings in 2014 that have not been followed up by auditee - Focus of Annual Audit Plan (PKAT) 2016 3. Improvement Academy, Competency Acceleration 4. IP Project 5E - Report 5. CLA Addendum Discussion 6. Update of Material Information on GMS WP&B 2016

DIREKSI
Board of Directors

No	Tanggal Pelaksanaan Date	Agenda Rapat	Meeting Agenda
4	18 Januari 2016, January 18, 2016	1. *Review* Tindak Lanjut Keputusan Rapat Direksi sebelumnya dan Info lain lain 2. Update Info Kesiapan RUPS RKAP 2016 3. Usulan Nilai Koefisien Kinerja Unit Unit Tahun 2016	1. Review of Decision Follow up from the previous Directors' Meeting and other information 2. Update on Preparation of GMS WP&B 2016 3. Proposed Value of Unit KKU in 2016
5	26 Januari 2016, January 26, 2016	1. *Review* Tindak Lanjut Keputusan Rapat Direksi dan info lain-lain 2. *Basic Communication* untuk IP sebagai O&M Manager 3. *Road Map* Rencana Jangka Panjang Sistem / Teknologi Informasi Perusahaan 4. Hasil *Assesment Fire Fighting* PLTU Lontar & Investigasi Teknik Penurunan Tanah dan Desain Perbaikan Area CWP PLTU Lontar 5. Kajian/Analisa Revaluasi Aset	1. Review of previous Directors' Meeting and other information 2. Basic Communication for IP as O&M Manager 3. System Long Term Plan Road Map / Company's Information Technology 4. Assessment result on Fire Fighting Lontar Steam Power Plant (SPP), Investigation on Soil Degradation Technique, and Design Improvement for CWP Area in Lontar Steam Power Plant (SPP) 5. Study/Analysis of Asset Revaluation
6	2 Februari 2016 Februari 2, 2016	1. *Review* Tindak Lanjut Keputusan Rapat Direksi dan info lain-lain 2. Pengembangan IPP PLTU Kalbar 2 x 100 MW dan lain-lain 3. Akademi Akselerasi (lanjutan) 4. Pengalihan Proses Pengadaan dari Unit Pembangkitan Jawa Bali (UPJB) ke Indonesia Power	1. Review of previous Directors' Meeting and other information 2. Development of IPP Kalbar Steam Power Plant (SPP) 2x100 MW and others 3. Acceleration Academy (continuation) 4. Procurement Process Transfer from Jawa Bali Generating Unit (UPJB) to Indonesia Power
7	23 Februari 2016 Februari 23, 2016	1. *Review* Tindak Lanjut Keputusan Rapat Direksi 2. *Business Process Change Management* atas perubahan Direktorat Produksi menjadi Direktorat Operasi 3. Persiapan penugasan PLN kepada IP sebagai koordinator konsolidasi dan penyusunan laporan keuangan ex UPJB 4. Pemilihan Partner Strategis PT TPGP dalam rangka kegiatan pengeboran sumur eksplorasi 5. JVC KalBar dan Usulan Tambahan tentang Rencana Pembelian Saham Pusaka Jaya Baru di IPB 6. *Business Development Excellence* 7. Pembahasan mengenai Persetujuan Penugasan pengelolaan pelabuhan terbatas UP Suralaya tahun 2016 (*Port Management*) kepada PT ADC	1. Review of previous Directors' Meeting 2. Business Process Change Management on the change of Production Directorate into Operation Directorate 3. Preparation of PLN assignment to IP as consolidation coordinator and preparation of financial statement to ex-UPJB 4. Selection of Strategic Partner PT TPGP for exploration well drilling activities 5. JVC KalBar and Additional Suggestion on Purchase Plan for Pusaka Jaya Baru Share in IPB 6. Business Development Excellence 7. Discussion on Approval of limited port management assignment for Suralaya Generating Unit (GU) in 2016 to PT ADC

No	Tanggal Pelaksanaan Date	Agenda Rapat	Meeting Agenda
8	15 Maret 2016 March 15, 2016	1. *Review* Rapat Direksi sebelumnya dan info lain-lain 2. Tren Pencapaian Kinerja Unit 3. *Change Management* Proses Bisnis: Penyempurnaan Proses Bisnis Fungsi Direktur Operasi 1 & Direktur Operasi 2 serta Asset Operator menjadi Asset Manager & Asset Operator 4. *Change Management* : Kompetensi & *Talent* 5. Ratifikasi Surat Keputusa Pengadaan Barang dan Jasa Nomor 620 6. Addendum Kontrak Payung Studi Pembangkit Thermal dan Penambahan Konsultan 7. Proses Pengadaan Diklat 2016	1. Review of previous Directors' Meeting and other information 2. Unit Performance Achievement Trend 3. Business Process Change Management: Business Process Refinement of Operation Director I and Operation Director II Function, and change in Asset Operator to Asset Manager and Asset Operator 4. Management Change: Competence & Talent 5. Ratification of Decree of Procurement of Goods and Services Number 620 6. Addendum of Contract on Thermal Power Plant Study and Adding Consultant 7. Training Procurement Process 2016
9	21 Maret 2016 March 21, 2016	1. *Review* Rapat Direksi sebelumnya dan info lain-lain 2. COP (*Car Ownership Program*) 3. Pengelolaan Limbah Abu Batubara di PLTU FTP-1	1. Review of previous Directors' Meeting and other information 2. COP (Car Ownership Program) 3. Coal Ash Waste Management in FTP-1 Steam Power Plant (SPP)
10	22 Maret 2016 March 22, 2016	*Quantitative Data Analysis*	Quantitative Data Analysis
11	29 Maret 2016 March 29, 2016	1. Review Rapat Direksi sebelumnya dan info lain - lain 2. Finalisasi Materi Rapat Dewan Komisaris 3. Permohonan Persetujuan Addenum dan Penunjukan Langsung atas Pekerjaan Pengalihan FTP-1	1. Review of previous Directors' Meeting and other information 2. Finalization of Board of Commissioners' Meeting Material 3. Application Approval for Addendum and Direct Appointment on Work Transfer FTP-1
12	7 April 2016 April 7, 2016	Progres & Tindak Lanjut Penyiapan Lahan PLTGU Jawa - 2	Progress and Follow-Up of Land Preparation for CCPP Java - 2
13	12 April 2016 April 12, 2016	1. Review Rapat Direksi sebelumnya dan info lain-lain 2. Progres & Tindak Lanjut Penyiapan Lahan PLTGU Jawa-2 (Lanjutan) 3. Keputusan Pengadaan Piping Gas Tambak Lorok 4. Rencana Pengadaan Asuransi Aset Operasional 2016 - 2018 5. Persiapan Materi RUPS Laporan Pertanggungjawaban Tahunan 2015	1. Review of previous Directors' Meeting and other information 2. Progress and Follow-Up of Land Preparation for Java-2 Combine Cycle Power Plant (CCPP) (continuation) 3. Decision on Procurement of Piping Gas Tambak Lorok 4. Procurement Plan for Operational Assets Insurance 2016 - 2018 5. Preparation of Material for GMS Annual Calculation Report 2015
14	18 April 2016 Apr 18, 2016	1. *Review* Rapat Direksi sebelumnya dan info lain-lain 2. Pembahasan Tanah *Overlap* Saguling 3. Program *Quick Win Lontar* 4. Materi Rapat Pembahasan Teknis RUPS Laporan Pertanggungjawaban Tahunan 2015 5. Agenda Rapat Terbatas: Paparan PPM	1. Review of previous Directors' Meeting and other information 2. Discussion of overlapping land at Saguling 3. Quick Win Program at Lontar 4. Meeting Material: Technical Discussion of GMS Annual Calculation Report 2015 5. Limited Meeting Agenda: PPM Explanation

DIREKSI
Board of Directors

No	Tanggal Pelaksanaan Date	Agenda Rapat	Meeting Agenda
15	25 April 2016 April 25, 2016	1. *Review* Rapat Direksi sebelumnya dan info lain-lain 2. Rencana MOU IP – Perhutani dan O&M collaboration IP – PJB - MHI 3. Project PLTU Peaker Jambi 100 MW 4. Pelelangan PLTM Gunung Wugul 5. *Roadmap Dreging* Indonesia Power	1. Review of previous Directors' Meeting and other information 2. IP MoU Plan – Perhutani and O&M collaboration: IP—PJB – MHI 3. Project Steam Power Plant (SPP) Peaker Jambi 100 MW 4. Auction of Mmi-Hydro Power Plant (MPP) Gunung Wugul 5. Indonesia Power Dredging Roadmap
16	9 Mei 2016 May 9, 2016	1. *Review* Rapat Direksi sebelumnya dan info lain-lain 2. Rencana Kebutuhan Biaya Investasi Drilling TPGP 3. Finalisasi Penyediaan Pipa Gasifikasi PLTU 3 Tambak Lorok 4. Progres Penyelesaian Sengketa Lahan Saguling	1. Review of previous Directors' Meeting and other information 2. TPGP Drilling Cost Requirement Plan 3. Procurement Finalization of Gasification Pipe 3 Tambak Lorok Steam Power Plant (SPP) 4. Progress of Dispute Resolution for Saguling Land
17	18 Mei 2016 May 18, 2016	1. *Review* Rapat Direksi sebelumnya dan info lain-lain 2. Presentasi *Masterplan* IT 3. Presentasi *Lead Program* Korporat untuk Aman, Bersih, Hijau, Andal & Efisien	1. Review of previous Directors' Meeting and other information 2. IT Masterplan presentation 3. Presentation of Lead Corporate Program for Safe, Clean, Environmental Friendly, Reliable, and Efficient
18	24 Mei 2016 May 24, 2016	1. Review Radir sebelumnya dan info lain-lain 2. Paparan RJPP 2016 - 2021 3. *Business Continuity Management System* (BCMS) 4. Pemaparan Pagu Kewenangan dan Ratifikasi Prosedur Pengadaan dengan PLN 5. Stockist dan PLTD Batakan 6. Pembahasan Draft Sirkuler Rapat Direksi Peningkatan Saham IP di PT TPGP 7. Pembahasan Draft Sirkuler Demolish PLTG #3 dan #4 Priok 8. Pembahasan Draft Sirkuler Persetujuan Addendum Surat Perjanjian No. 90.PJ/061/IP/2013 tanggal 14 Juni 2013 tentang Pengadaan dan Pemasangan 1 (Satu) Unit Fasilitas *Stacker Reclaimer* Kapasitas 3500/1200 Ton/Jam di Coal Yard No.2 PLTU 1 Banten Suralaya	1. Review of previous Directors' Meeting and other information 2. Explanation of Long Term Corporate Plan 2016 - 2021 3. Business Continuity Management System (BCMS) 4. Exposure on the Authority Limit and Ratification of Procurement Procedure with PLN 5. Stockist and Batakan Diesel Power Plant (DPP) 6. Discussion of Circular Draft for Directors' Meeting on Increasing IP's Shares in PT TPGP 7. Discussion of Circular Draft to Demolish GTPP #3 and #4 Priok 8. Discussion of Circular Draft on Approval of Addendum Agreement Letter No. 90.PJ/061/IP/2013 dated 14 June 2013 on Procurement and Installment of 1 (one) Unit with Stacker Reclaimer Facility Capacity of 3500/1200 Ton/hour in Coal Yard No.2 1 Banten Suralaya Steam Power Plant (SPP)

No	Tanggal Pelaksanaan Date	Agenda Rapat	Meeting Agenda
19	31 Mei 2016 May 31, 2016	1. Review Rapat Direksi sebelumnya dan info lain-lain 2. Laporan Status Penyusunan AR (*Annual Report*) dan SR (*Sustainability Report*) 2015 3. Laporan Progres Pengadaan RKAP 2016 Capex Opex 4. Progres Dormitory Pelabuhan Ratu 5. Draft Kebijakan Umum K3 6. Laporan pelaksanaan hasil keputusan radir untuk proyek TPGP	1. Review of previous Directors' Meeting and other information 2. Status Report on AR (Annual Report) and SR (Sustainability Report) Preparation 2015 3. Progress Report on WP&B Procurement 2015 for Capex Opex 4. Dormitory Progress at Pelabuhan Ratu 5. Draft on HSE General Policy 6. Report on implementation result of Directors' Meeting Decision for TPGP project
20	14 Juni 2016 June 14, 2016	1. Review Rapat Direksi sebelumnya dan info lain-lain 2. Paparan Rencana Pengembangan SDM, STO, Rekrutmen, Jenjang Karir 3. Anggaran dana talangan untuk tambahan ABOP. pelaksanaan variation order PLTU FTP Jawa dan Luar Jawa (belum terakomodasi dalam AMC) 4. Pencapaian NPHR Korporasi dan NPHR Unit Batubara s.d Mei 2016 5. Pencapaian CAPEX KP dan Unit 6. Proyeksi RKAP 2016 dan Paparan RKAP 2017	1. Review of previous Directors' Meeting and other information 2. Explanation on Human Resources Development Plan, STO, Recruitment, Career Path 3. Bailout budget for additional ABOP. variation order on FTP Java and Outside Java Steam Power Plant (SPP) (unaccommodated by AMC) 4. Achievement of Corporate NPHR and Unit Batubara NPHR until May 2016 5. CAPEX KP and Unit achievement 6. WP&B Projection 2016 and WP&B Explanation 2017
21	21 Juni 2016 June 21, 2016	1. Review Rapat Direksi sebelumnya dan info lain-lain 2. Laporan Implementasi RBA (*Risk Based Audit*) 3. Kinerja Perusahaan s.d Mei 2016 4. Paparan Penetapan SK Tim Pengembangan Proyek Fasilitas Regasifikasi & Storage LNG Terminal 5. Paparan SK Tim A*ssessment* Malcolm Baldridge Tahun 2016 6. Paparan Penetapan SK Percepatan Program Membumikan IP AkSi 7. Paparan Kebijakan Umum Pengelolaan K3 di lingkungan IP	1. Review of previous Directors' Meeting and other information 2. Risk Based Audit (RBA) Implementation Report 3. Company's Performance until May 2016 4. Explanation on Decree of Development Team for Regasification & Storage LNG Terminal Facility Project 5. Explanation on Decree of Assessment Team Malcolm Baldridge 2016 6. Explanation on Decree of Acceleration for grounding IP AkSi Program 7. Explanation on HSE Management Policy within IP
22	24 Juni 2016 June 24, 2016	1. Review Strategi dan Program RKAP 2016 2. Presentasi Penetapan PPA Tahun 2016 3. Usulan Program Utama RKAP 2017 4. Pembahasan Rencana Bantuan Masyarakat Sekitar Dalam Rangka Hari Raya Idul Fitri Di Lingkungan Sekitar PT Indonesia Power	1. 2016 WP&B Strategy and Program Review 2. Presentation of PPA in 2016 3. Proposal of WP&B Main Program 2017 4. Discussion of Community Aid Plan on Eid Mubarak Day in the Environment of PT Indonesia Power

DIREKSI
Board of Directors

No	Tanggal Pelaksanaan Date	Agenda Rapat	Meeting Agenda
23	28 Juni 2016 June 28, 2016	1. Review Rapat Direksi sebelumnya dan info lain-lain 2. Usulan Keputusan Radir Juknis Pengadaan Barang dan Jasa (Ratifikasi dengan PLN) 3. Rencana MoU IP dana Marubeni dan Proyek DPP MFO 50 MW (BOT): usulan JO Wika Mirlindo untuk percepatan kontrak BOT 4. Rencana dan Implementasi *Green Power Plant* UP Suralaya 5. Rencana dan Implementasi Pengelolaan K3 di UJP Lontar 6. Pengelolaan Limbah Abu Fly Ash Bottom Ash (FABA) PLTU FTP-1 Pulau Jawa	1. Review of previous Directors' Meeting and other information 2. Proposal on Directors' Decree for Procurement of Goods and Services Technical Guidelines (Ratification with PLN) 3. MoU Plan of IP with Marubeni funding and Project of PLTD MFO 50 MW (BOT): Proposal JO Wika Mirlindo for BOT contract acceleration 4. Plan and Implementation of Green Power Plant Suralaya Generating Unit (GU) 5. Plan and Implementation of K3 Management in Lontar Generating Services Unit (GSU) 6. Fly Ash Bottom (FABA) Waste Management at FTP-1 Java SPP Steam Power Plant (SPP)
24	19 Juli 2016 Juli 19, 2016	1. Review Rapat Direksi sebelumnya dan info lain-lain 2. Presentasi Kompetensi Utama dan Kompetensi Peran 3. Presentasi Penghargaan Pegawai – Seleksi *Leadership Excellence* & Pegawai Teladan 4. Presentasi Penyelesaian Kasus Jeranjang 5. Presentasi Kinerja Korporat s.d Juli 2016	1. Review of previous Directors' Meeting and other information 2. Presentation of Main and Roles' Competence 3. Presentation: Employee Appreciation - Leadership Excellence & Exemplary Employee Selection 4. Presentation of Jeranjang Case Settlement 5. Presentation of Corporate Performance until July 2016 6.
25	21 Juli 2016 Juli 21, 2016	Paparan Kinerja yang tidak tercapai EAF, NPHR: Evaluasi (OEE) dan rencana program kerja untuk pencapaian kinerja 2016 per unit, 1, 2, 3 dan seterusnya	Explanation on performance unachieved EAF, NPHR: Evaluation (OEE) and work program plan for performance achievement 2016 per unit, 1, 2, 3, etc.
26	24 Agustus 2016 August 24, 2016	1. Review Rapat Direksi sebelumnya dan info lain-lain 2. Paparan Kinerja 2016 3. Paparan Realisasi OPEX dan CAPEX 2016 4. Paparan RJPP 2017 - 2022 5. Paparan Progres Claim Asuransi Kamojang 6. Paparan RKAP 2017	1. Review of previous Directors' Meeting and other information 2. 2016 Performance explanation 3. Explanation on Realization of OPEX and CAPEX 2016 4. Explanation of Long Term Corporate Plan 2017 - 2022 5. Explanation on Progress of Kamojang Insurance Claim 6. Explanation on 2017 Corporate Work Plan & Budget
27	30 Agustus 2016 August 30, 2016	1. Review Rapat Direksi sebelumnya dan info lain-lain 2. *Pleno Steering Committee* Persiapan PLTU Suralaya 3. Pembahasan Draft Sirkuler Direksi Revisi Anggaran Investasi 2016 4. Paparan Rencana Bisnis Proses ADC	1. Review of previous Directors' Meeting and other information 2. Preparation of Pleno Steering Committee at Suralaya SPP 3. Discussion of Directors' Circular Draft for Investment Budget Revision in 2016 4. Explanation on ADC Process Business

No	Tanggal Pelaksanaan Date	Agenda Rapat	Meeting Agenda
28	6 September 2016 September 6, 2016	1. Review Rapat Direksi sebelumnya dan info lain-lain 2. Paparan Rencana Lingkup Rehabilitasi Suralaya # 3-4 (KFW) 3. Progres Malcom Baldridge 4. Rencana Kegiatan HUT IP	1. Review of previous Directors' Meeting and other information 2. Discussion on Rehabilitation Scope for Suralaya # 3-4 (KFW) 3. Malcom Baldridge Progress 4. Plan on IP Birthday Activity
29	13 September 2016 September 13, 2016	1. Paparan Penerbitan SK Manajemen Pengelolaan Batubara 2. Paparan Pembayaran PT PEL bulan April	1. Explanation on Published Decree of Coal Management 2. Explanation on Payment of PT PEL in April
30	20 September 2016 September 20, 2016	1. Review Rapat Direksi sebelumnya dan info lain-lain 2. Laporan Kinerja s.d Agustus 2016 3. Rencana Pengembangan Pembangkit *Waste to Energy*	1. Review of previous Directors' Meeting and other information 2. Performance Report until August 2016 3. Plan on Waste to Energy Power Plant Development
31	27 September 2016 September 27, 2016	1. Review Rapat Direksi sebelumnya dan info lain-lain 2. Arahan *Steering Committee* Project PLTU Suralaya 3. Presentasi Evaluasi Kinerja Keandalan 4. Usulan Keputusan Radir Terkait Formulasi Valas atas Pembayaran *Parts Repair*	1. Review of previous Directors' Meeting and other information 2. Direction of Steering Committee for Suralaya SPP 3. Presentation on Reliability Performance Evaluation 4. Proposal of Directors' Meeting Decision related to Foreign Exchange Formulation for Parts Repair Payment
32	29 September 2016 September 29, 2016	Rencana Kerja dan Pencapaian Kinerja PLTGU Tambak Lorok	Work Program and performance achievement of Tambak Lorok Combine Cycle Power Plant (CCPP)
33	4 Oktober 2016 October 4, 2016	1. Review Rapat Direksi sebelumnya dan info lain-lain 2. Arahan *Steering Committee Project* PLTU Suralaya 3. Ratifikasi SK Pengadaan PLN	1. Review of previous Directors' Meeting and other information 2. Direction of Steering Committee for SPP Project 3. Ratification of Decree for PLN Procurement
34	12 Oktober 2016 October 12, 2016	1. Review Rapat Direksi sebelumnya dan info lain-lain 2. Progres CAPEX RKAP 2016 3. *Strategic Partner* O&M DIROP 2 4. *Coal Supply Chain Optimization* 5. Paparan Aset UP Suralaya	1. Review RADIR sebelumnya dan info lain-lain 2. Progres CAPEX Corporate Work Plan & Budget 2016 3. Strategic Partner O&M DIROP 2 4. Coal Supply Chain Optimization 5. Paparan Aset Generating Unit (GU) Suralaya
35	20 Oktober 2016 October 20, 2016	1. Laporan dan Tindak Lanjut MOU GM dengan KAJATI Jabar dan Kegiatan Pemilihan Mitra Strategis Suralaya #9, #10 2. Status *Progres Lead Program* Direksi 3. Usulan Biaya Penggantian Sekolah YPK di Suralaya 4. Status Progres CAPEX 2016 5. Status Progres Isu Strategis	1. Report and Follow-up of MOU GM with KAJATI West Java and Selection of Strategic Partner for Suralaya #9, #10 2. Progress Status on Directors Lead Program 3. Proposal of Funding School Fund for YPK in Suralaya 4. Progress Status of CAPEX 2016 5. Progress Status of Strategic Issues
36	28 Oktober 2016 October 28, 2016	Arahan Steering Committee Project PLTU Suralaya	Direction of Steering Committee for Suralaya CCP Project

DIREKSI
Board of Directors

No	Tanggal Pelaksanaan Date	Agenda Rapat	Meeting Agenda
37	15 November 2016 November 15, 2016	1. Review Rapat Direksi sebelumnya dan info lain-lain 2. Paparan Laporan Rencana Kemitraan Strategis Suralaya #9 dan #10 3. Rencana Suralaya #9, #10 dengan TP4D Prov Banten 4. Paparan Gangguan Main Transformer GT 2.1 Priok 5. Paparan Direksi Indo Pusaka Berau (IPB)	1. Review of previous Directors' Meeting and other information 2. Explanation on Plan for Strategic Partner at Suralaya #9, #10 3. Plan of Suralaya #9, #10 with TP4D Banten Province 4. Explanation on Disruption of Main Transformer GT 2.1 Priok 5. Explanation from Directors of Indo Pusaka Berau (IPB)
38	22 November 2016 November 22, 2016	1. Kesiapan STO dibawah Kepala Divisi 2. Laporan Kepala Satuan Audit Internal – Tindak Lanjut Temuan SPI PLN & Audit BPK (Laporan Awal) 3. Real Kinerja s.d Oktober 2016 dan Paparan Rancangan Kinerja/Kontrak Manajemen 2017 4. Paparan Tentang Rencana Kerja, Skema Bisnis Penugasan PLN tentang MPP 430 MW	1. STO readiness under head division 2. Head of internal auditor report—Follow Up on PLN Internal Supervisory Unit Findings & BPK Audit (Initial Report) 3. Real Performance until October 2016 and Explanation on Performance/Management Contract Plan for 2017 4. Explanation on Work Program, Business Scheme of PLN Assignment about MPP 430 MW
39	29 November 2016 November 29, 2016	1. Review Rapat Direksi sebelumnya dan info lain-lain 2. Progres Persiapan Lahan PLTU Suralaya #9-#10 3. aparan Materi RUPS RKAP 2017 4. Persiapan RUPS Anak Perusahaan Indonesia Power 5. Laporan Evaluasi Pengadaan Jasa O&M UJP PNS 6. Paparan Perihal Presentasi NPHR pada Pembangkit Direktur Operasi 2 7. Paparan Rencana Pengembangan Proyek *Mobile Power Plant* 8. Paparan Rencana Pembayaran Iuran BJPSDA	1. Review of previous Directors' Meeting and other information 2. Preparation progress for Land at Suralaya SPP #9-#10 3. Explanation on GMS Material 2017 WP&B 4. GMS Preparation for Subsidiaries of Indonesia Power 5. Evaluation Report on Procurement Services O&M PNS Generating Services Unit (GSU) 6. Explanation on NPHR Presentation at Power Plant under Operation Director 2 7. Explanation on Development Plan of Mobile Power Plant Project 8. Explanation on Payment Plan of BJPSDA
40	23 Desember 2016 December 23, 2016	1. Review Rapat Direksi sebelumnya dan info lain-lain 2. Pengadaan Jasa Surveyor Analisa Kualitas Dan Kuantitas Batubara 3. Alokasi Kebutuhan Batubara 4. Penetapan Harga Batubara	1. Review of previous Directors' Meeting and other information 2. Procurement of Services: Coal Quality and Quantity Analysis Surveyor 3. Allocation of Coal Needs 4. Coal Pricing

Adapun terkait frekuensi kehadiran, Agenda, Tanggal dan Peserta Rapat Gabungan Dewan Komisaris-Direksi telah diuraikan dalam Bab Dewan Komisaris Perihal Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi. Risalah rapat Direksi dibuat untuk setiap rapat dan

The frequency of attendance, Agenda, Date, and Attendance List of Joint Meeting between Board of Commissioners and Directors has been described in Chapter Board of Commissioners concerning Joint Meeting of Board of Commissioners and Board of

ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir dan didokumentasikan dengan baik.

Directors. Every meeting has minutes of Directors' meeting which is signed by every member of Directors who attended and it is documented properly.

Program Pengembangan Kompetensi Direksi

Selama tahun 2016 anggota Direksi Indonesia Power telah mengikuti berbagai pelatihan dan seminar guna meningkatkan kapabilitas Direksi. Selama tahun 2016 anggota Direksi telah mengikuti kegiatan pelatihan dan seminar sebagai berikut:

Directors' Competency Development Program

Throughout 2016, the Directors' Member of Indonesia Power has attended numerous training and seminar in order to improve the Directors' capability. Throughout 2016, Directors' Member has attended training and seminar as follow:

Tabel Pengembangan Kompetensi Direksi Tahun 2016
Table: Directors' Competency Development in 2016

Nama Direksi Director's Name	Nama Diklat Training	Nama Lembaga Institution	Tanggal Date	Lokasi Location
Sripeni Inten Cahyani	BOD & BOC Executive Program I	KNKG	2-3 Mei 2016 May 2-3, 2016	Bogor
	BOD & BOC Executive Program II	IICG	26-May-16 May 26, 2016	Bogor
	Pelatihan dan Kontemplasi Direksi-Komisaris Training and Contemplation of Directors - Commissioners	ACCENTURE	7-8 November 2016 November 7-8, 2016	Jakarta
Eri Prabowo	BOD & BOC Executive Program I	KNKG	2-3 Mei 2016 May 2-3, 2016	Bogor
	BOD & BOC Executive Program II	IICG	26-May-16 May 26, 2016	Bogor
	Pelatihan dan Kontemplasi Direksi-Komisaris Training and Contemplation of Directors - Commissioners	ACCENTURE	7-8 November 2016 November 7-8, 2016	Jakarta
Antonius RTA	BOD & BOC Executive Program I	KNKG	2-3 Mei 2016 May 2-3, 2016	Bogor
	BOD & BOC Executive Program II	IICG	26-May-16 May 26, 2016	Bogor
	Pelatihan dan Kontemplasi Direksi-Komisaris Training and Contemplation of Directors - Commissioners	ACCENTURE	7-8 November 2016 November 7-8, 2016	Jakarta
Hudiono	BOD & BOC Executive Program I	KNKG	2-3 Mei 2016 May 2-3, 2016	Bogor
	BOD & BOC Executive Program II	IICG	26-May-16 May 26, 2016	Bogor
	Pelatihan dan Kontemplasi Direksi-Komisaris Training and Contemplation of Directors - Commissioners	ACCENTURE	7-8 November 2016 November 7-8, 2016	Jakarta

DIREKSI
Board of Directors

Nama Direksi Director's Name	Nama Diklat Training	Nama Lembaga Institution	Tanggal Date	Lokasi Location
Roikhan	BOD & BOC Executive Program I	KNKG	2-3 Mei 2016 May 2-3, 2016	Bogor
	BOD & BOC Executive Program II	IICG	26-May-16 May 26, 2016	Bogor
	Pelatihan dan Kontemplasi Direksi-Komisaris Training and Contemplation of Directors - Commissioners	ACCENTURE	7-8 November 2016 November 7-8, 2016	Jakarta
Adi Supriono	BOD & BOC Executive Program I	KNKG	2-3 Mei 2016 May 2-3, 2016	Bogor
	BOD & BOC Executive Program II	IICG	26-May-16 May 26, 2016	Bogor
	Pelatihan dan Kontemplasi Direksi-Komisaris Training and Contemplation of Directors - Commissioners	ACCENTURE	7-8 November 2016 November 7-8, 2016	Jakarta

Program Orientasi Bagi Direksi Baru

Bagi anggota Direksi yang diangkat untuk pertama kalinya diberikan program orientasi/pengenalan mengenai Perusahaan. Program ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang visi, misi dan nilai-nilai Perusahaan, kode etik dan pedoman tingkah laku, struktur organisasi, serta pedoman dan tata tertib kerja Direksi. Indonesia Power telah memiliki panduan atau *manual* terkait dengan program pengenalan bagi anggota Direksi yang baru yang tercantum dalam *Board Manual*. Adapun materi program pengenalan, meliputi:

1. Pelaksanaan prinsip-prinsip GCG oleh Perseroan
2. Gambaran mengenai Perseroan berkaitan dengan tujuan, sifat, dan lingkup kegiatan, kinerja keuangan dan operasi, strategi, rencana usaha jangka pendek dan jangka panjang, posisi kompetitif, risiko dan masalah-masalah strategis lainnya
3. Keterangan berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan, audit internal dan eksternal, sistem dan kebijakan pengendalian internal, termasuk Komite Audit
4. Keterangan mengenai tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi serta hal-hal yang tidak diperbolehkan.

Selama tahun 2016, Indonesia Power telah menyelenggarakan program pengenalan kepada Direksi yang baru diangkat, yaitu sebagai berikut:

Induction Program for New Directors

Directors' Member who is appointed for the first time shall be given orientation/induction program about the Company. The program's objective is to provide understanding on vision, mission, Company's values, code of conduct, organization structure, and Board Manual for Board of Directors. Indonesia Power has a manual related to induction program for new members of Directors, which is listed in the Board Manual.

The induction program covers:

1. GCG Principles implementation by the Company
2. Company's overview on objectives, nature, and scope of activities, financial and operational performance, strategies, short-term and long-term business plan, competitive position, risk, and other strategic issues.
3. Information relating to delegated authorities, internal and external audit, internal control systems and policies, including the Audit Committee
4. Information on the duties and responsibilities of the Board of Commissioners and the Board of Directors as well as things prohibited.

Throughout 2016, Indonesia Power has held induction program for new Directors, i.e.:

Tabel Pelaksanaan Program Pengenalan Anggota Direksi Baru Tahun 2016
Table: Induction Program for New Directors in 2016

Nama Direksi Director's Name	Materi Material	Tanggal Pelaksanaan Date
Hudiono	Overview Perusahaan, RKAP, RJPP, Manajemen Risiko, Pengendalian Internal, GCG Corporate overview, WP&B, L ong Term Corporate Plan, Risk Management, Internal Control, GCG	Bogor, 5-6 April 2016 Bogor , April 5-6, 2016
Adi Supriono	Overview Perusahaan, RKAP, RJPP, Manajemen Risiko, Pengendalian Internal, GCG Corporate overview, WP&B, Long Term Corporate Plan, Risk Management, Internal Control, GCG	Bogor, 5-6 April 2016 Bogor , April 5-6, 2016

Komite-Komite Di Bawah Direksi

Sampai dengan tahun 2016, Direksi Indonesia Power belum membentuk Komite di bawah Direksi. Namun dalam rangka kelancaran tugasnya, Direksi Indonesia Power telah membentuk organ pendukung Direksi yang terdiri dari Sekretaris Perusahaan, Unit Audit Internal, dan Unit Manajemen Risiko. Sampai dengan 31 Desember 2016, Direksi belum memerlukan komite-komite khusus untuk membantu kelancaran tugas Direksi, dengan pertimbangan:

1. Organ-organ pendukung Direksi masih dapat dimaksimalkan
2. Jenis usaha Perusahaan tidak memiliki variasi yang sangat beragam, sehingga masih dapat dijalankan dengan organisasi yang ada
3. Sistem yang sudah berjalan sekarang sangat efektif dan efisien.

Committees Reporting Directly to the Board of Directors

As of 2016, Board of Directors of Indonesia Power has not established Committee under the Directors. However, in the continuity of its duties, Directors of Indonesia Power has established supporting organs which consist of Corporate Secretary, Internal Audit Unit, and Risk Management Unit. As of 31 December 2016, Directors does not need special committees to help the continuity of Directors' duties, taking into account:

1. Supporting organs of the Directors can be maximized
2. The Company's business does not have diverse variations, hence the existed organization can carry out their duties properly
3. The current system is very effective and efficient.

Penilaian atas Kinerja Masing-Masing Komite Di bawah Direksi

Sampai dengan tahun 2016, Direksi Indonesia Power belum membentuk Komite di bawah Direksi untuk membantu melaksanakan tugasnya sehingga tidak terdapat informasi mengenai Penilaian atas kinerja masing-masing komite yang berada di bawah Direksi berikut dasar penilaiannya.

Performance Assessment on Each Committee Reporting Directly to Board of Directors

As of 2016, Board of Directors of Indonesia Power has not established Committee under the Directors to assist its duties, hence there is no information related to the performance assessment or the basis of assessment of each Committee reporting directly to the Board of Directors.

KEBIJAKAN REMUNERASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Remuneration Policy for the Board of Commissioners and Board of Directors

Perusahaan memberikan penghargaan terhadap capaian kinerja Dewan Komisaris dan Direksi sebagai pemegang tanggung jawab terbesar terhadap Perusahaan. Kebijakan pemberian remunerasi dan fasilitas lainnya bagi Dewan Komisaris mengacu kepada keputusan dari Pemegang Saham sebagaimana ditetapkan dalam RUPS.

The Company gives its appreciation on the achievement of Board of Commissioners and Board of Directors' performance as the most accountable organs in the Company. The policy of remuneration and other facilities for Board of Commissioners refers to the decision of Shareholders as set forth in the GMS.

Prosedur Pengusulan dan Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Penetapan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan ditetapkan oleh RUPS dengan memperhatikan usulan dari Dewan Komisaris dengan sebelumnya mendapatkan rekomendasi dari Fungsi Nominasi dan Remunerasi. Rekomendasi Fungsi Nominasi dan Remunerasi tersebut diserahkan kepada Dewan Komisaris dan disampaikan kepada RUPS untuk

Procedure of the Proposal and Determination of Remuneration of Board of Commissioners and Board of Directors

Determination of remuneration of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors is set forth in GMS by taking into account the input from Board of Commissioners, with prior recommendation from the Nomination and Remuneration Function. The recommendation from Nomination and Remuneration Function is submitted to the Board of Commissioners and

mendapatkan persetujuan. Prosedur dan mekanisme penetapan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan digambarkan dalam skema berikut ini.

is delivered to the GMS in order to get approval. Procedures and mechanism of the remuneration determination for the Company's Board of Commissioners and Board of Directors is pictured in the scheme as follows.

Skema Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi
Scheme: Remuneration Determination for the Board of Commissioners and Board of Directors

Penetapan penghasilan berupa honorarium/gaji, tunjangan, dan fasilitas yang bersifat tetap dilakukan dengan mempertimbangkan faktor pendapatan, aktiva, kondisi dan kemampuan keuangan Perusahaan, tingkat inflasi dan faktor-faktor lain yang relevan, serta tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan penetapan penghasilan yang berupa tunjangan dan tantiem bersifat variabel, dilakukan dengan mempertimbangkan faktor pencapaian target, tingkat kesehatan, dan kemampuan keuangan, serta faktor-faktor lain yang relevan (*merit system*) yang berlaku umum dalam industri yang sejenis. Dalam hal perhitungan honorarium/gaji dengan memperhatikan faktor-faktor yang menyebabkan honorarium lebih rendah dari pada tahun sebelumnya, maka honorarium yang dipakai adalah sama dengan honorarium/gaji tahun sebelumnya.

Income determination is in the form of fixed honorarium/salary, allowances, and facilities, taking into account in the factors of income, assets, Company's condition and financial capability, inflation rate, and other relevant factors, and it must not be contradictory with laws and regulations. The income in the form of allowances and tantiem that varies in manner, is conducted by taking into account the factors of target achievement, soundness level, and financial capability, and other relevant factors (merit system) generally accepted in similar industries. In calculating the honorarium/salary, if the factors are considered and it causes the honorarium to be lower than the previous year, then the honorarium used is the same with honorarium/salary of the previous year.

Pengungkapan Indikator Penetapan Remunerasi Direksi

Penetapan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi ditetapkan melalui RUPS dengan mempertimbangkan indikator pencapaian *Key Performance Indicator* (KPI) dan tingkat kesehatan Perusahaan sesuai dengan kontrak manajemen. Selain itu, kemampuan keuangan perusahaan juga dijadikan pertimbangan, serta faktor-faktor lain yang dianggap relevan.

Disclosure of Indicator for Directors' Remuneration Determination

Remuneration determination for members of Board of Commissioners and Board of Directors is set forth in GMS by taking into account the achievement indicator Key Performance Indicator (KPI) and the Company's soundness level in line with management contract. In addition, the Company's financial capability is being considered, as well as other relevant factors.

KEBIJAKAN REMUNERASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI
Remuneration Policy for the Board of Commissioners and Board of Directors

Struktur Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan tahun 2016 ditetapkan berdasarkan Keputusan Pemegang Saham secara Sirkuler tanggal 7 Juni 2016 perihal Persetujuan Tantiem Tahun Buku 2015 dan Remunerasi Tahun Buku 2016 bagi Direksi dan Dewan Komisaris, serta Bonus Karyawan Tahun Buku 2015. Keputusan Pemegang Saham menetapkan dasar remunerasi bagi Direktur Utama dan Dewan Komisaris yaitu sebagai berikut:

1. Gaji/honorarium.
   a. Gaji Direktur Utama ditetapkan sebesar Rp90 juta.
   b. Gaji anggota Direksi (selain Direktur Utama) dan honorarium anggota Dewan Komisaris ditetapkan sebagai berikut:
      - Direktur : 90% dari Direktur Utama
      - Komisaris Utama : 45% dari Direktur Utama
      - Komisaris : 90% dari Komisaris Utama
2. Tunjangan/Fasilitas
   Tunjangan/fasilitas bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris diberikan dengan merujuk pada ketentuan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara RI Nomor PER- 04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara tanggal 10 Maret 2014 dan perubahannya Nomor PER-02/MBU/06/2016 tanggal 20 Juni 2016.

Remuneration Structure of the Board of Commissioners and Board of Directors

Remuneration of Company's Board of Commissioners and Board of Commissioners in 2016 is set forth based on the Circular Resolution of Shareholders on 7 June 2016, on Tantiem Approval Fiscal Year 2015 and Remuneration Fiscal Year 2016 for Board of Directors and Board of Commissioners, as well as Employee Bonus Fiscal Year 2015. Shareholders' Resolution determined the basis for remuneration for President Director and Board of Commissioners i.e. as follows:

1. Salary/honorarium.
   a. Salary of President Director is set in the amount of Rp90 million.
   b. Salary of Directors (not including President Director) and honorarium of members of Board of Commissioners is stipulated as follows:
      - Director: 90% of President Director
      - President Commissioner: 45% of President Director
      - Commissioner: 90% of President Commissioner
2. Allowances/Facilities
   Allowances/Facilities for members of Board of Directors and Board of Commissioners are given by referring to the Regulation of Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia No. PER-04/MBU/2014 on Income Allocation Guidance for Board of Directors, Board of Commissioners, and Supervisory Agency of the State-Owned Enterprises dated 10 March 2014, and its amendment No. PER-02/MBU/06/2016 dated 20 June 2016.

Pengungkapan Remunerasi, Bonus Kinerja, dan Bonus Non Kinerja Dewan Komisaris dan Direksi

Perusahaan memberikan remunerasi kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi berupa gaji/honorarium, bonus kinerja (tantiem) dan bonus non kinerja

Disclosure of Remuneration, Performance Bonus, and Non-Performance Bonus of Board of Commissioners and Board of Directors

The Company gives remuneration to the member of Board of Commissioners and Directors in the form of salary/honorarium, performance bonus (tantiem) and

(tunjangan). Berikut rincian besarnya remunerasi masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan Tahun 2016:

non-performance bonus (allowances). The following is the details of remuneration for every member of the Company's Board of Commissioners and Directors in 2016:

Remunerasi, Bonus Kinerja, dan Bonus Non Kinerja Dewan Komisaris

Remuneration, Performance Bonus, and Non-Performance Bonus of Board of Commissioners

Tabel Remunerasi Dewan Komisaris Tahun 2016
Table: Board of Commissioners' Remuneration 2016

Jenis Remunerasi	Type of Remuneration	Jumlah Anggota Dewan Komisaris Member of Board of Commissioners	Jumlah (Rp) Total (Rp)
Honorarium	Honorarium	9	386.415.000
Tantiem	Tantiem	4	1.871.100.000
Tunjangan	Tunjangan	6	77.283.000
Jumlah	**Total**	**6**	**2.334.798.000**

Tabel Remunerasi Masing-Masing Anggota Dewan Komisaris Tahun 2016
Table: Remuneration of Board of Commissioners' Member 2016

Dewan Komisaris Board of Commissioners	Honorarium per Bulan Monthly Honorarium	Tunjangan Transport Transportation Allowances	Total per Bulan Monthly Total	Tantiem Tantiem	THR Holiday Allowances	Penghasilan per Tahun Annual Income	Masa Jabatan (Tahun) Tenure (Year)
Bagus Setiawan	46.800.000	9.360.000	56.160.000			224.640.000	4
Ahmad Yani	42.120.000	8.424.000	50.544.000		6.682.500	360.490.500	7
Abdi Mustakim	42.120.000	8.424.000	50.544.000	50.118.750	23.388.750	680.035.500	12
Agus Hernawan	42.120.000	8.424.000	50.544.000			202.176.000	4
Munir Ahmad	42.120.000	8.424.000	50.544.000			202.176.000	4
Tri Setyo Nugroho	42.120.000	8.424.000	50.544.000			202.176.000	4

*)Sdr. Ahmad Yani menjabat sebagai Dewan Komisaris sesuai dengan RUPS sirkuler tanggal 2 Mei 2016.
*)Sdr. Abdi Mustakim menjabat sebagai Dewan Komisaris sesuai dengan RUPS sirkuler tanggal 10 November 2016

*)Mr. Ahmad Yani serves as Board of Commissioners, in accordance with Circular GMS dated May 2, 2016.
*)Mr. Abdi Mustakim serves as Board of Commissioners, in accordance with Circular GMS dated November 10, 2016.

Remunerasi Dewan Komisaris Indonesia Power dalam satu tahun dikelompokkan dalam kisaran tingkat penghasilan yaitu sebagai berikut.

Remuneration of Board of Commissioners of Indonesia Power in one year is classified into range of income, i.e. as follows.

Tabel Kelompok Jumlah Remunerasi Dewan Komisaris Tahun 2016
Table: Total of Board of Commissioners' Remuneration 2016

Jumlah Remunerasi per Orang dalam 1 tahun	Remuneration per Person in 1 year	2016
Di Atas 1 miliar	Above 1 billion	-
Di antara 500 juta s/d 1 miliar	Around 500 million to 1 billion	1
Di Bawah 500 juta	Below 500 million	5

KEBIJAKAN REMUNERASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI
Remuneration Policy for the Board of Commissioners and Board of Directors

Remunerasi, Bonus Kinerja, dan Bonus Non Kinerja Direksi

Remuneration, Performance Bonus, and Non-Performance Bonus of Board of Directors

Tabel Remunerasi Direksi Tahun 2016
Table: Board of Directors' Remuneration 201

Jenis Remunerasi	Type of Remuneration	Jumlah Anggota Direksi Member of Board of Commissioners	Jumlah (Rp) Total (Rp)
Honorarium	Honorarium	6	3.432.000.000
Tantiem	Tantiem	6	3.648.645.000
Tunjangan	Tunjangan	6	0
Jumlah	**Total**	**6**	**7.080.645.000**

Tabel Remunerasi Masing-Masing Anggota Direksi Tahun 2016
Table: Remuneration of Board of Directors' Member 2016

Direksi Board of Directors	Gaji per Bulan Monthly Salary	Total per Bulan Total per Bulan	Tunjangan Cuti Monthly Salary	Tantiem Tantiem	THR Holiday Allowances	Penghasilan per Tahun Annual Income	Masa Jabatan Tenure
Direktur Utama President Director	104.000.000	104.000.000	0	912.161.250	104.000.000	2.264.161.250	12
Direktur Produksi I President Director I	93.600.000	93.600.000	0	912.161.250	93.600.000	2.128.961.250	12
Direktur Produksi II President Director II	93.600.000	93.600.000	0	912.161.250	93.600.000	2.128.961.250	12
Direktur Keuangan Financial Director	93.600.000	93.600.000	0	0	23.400.000	865.800.000	9
Direktur Pengembangan dan Niaga Director of Development and Commerce	93.600.000	93.600.000	0	0	23.400.000	865.800.000	9
Direktur SDM dan Adminitrasi Director of Human Resources & Administration	93.600.000	93.600.000	0	912.161.250	93.600.000	2.128.961.250	12

Remunerasi Direksi Indonesia Power dalam satu tahun dikelompokkan dalam kisaran tingkat penghasilan yaitu sebagai berikut.

Remuneration of Board of Directors of Indonesia Power in one year is classified into range of income, i.e. as follows.

Tabel Kelompok Jumlah Remunerasi Direksi Tahun 2016
Table: Total of Board of Directors' Remuneration 2016

Jumlah Remunerasi per Orang dalam 1 tahun	Remuneration per Person in 1 year	2016
Di Atas 1 miliar	Above 1 billion	4
Di antara 500 juta s/d 1 miliar	Around 500 million to 1 billion	2
Di Bawah 500 juta	Below 500 million	0

Opsi Saham

Sampai dengan periode laporan, tidak terdapat share option atau penawaran opsi saham yang ditawarkan kepada anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif Indonesia Power.

Stock Option

As of the reporting period, there is no share option or offer of stock options offered to the member of Board of Commissioners, Board of Directors, and Executives Officers of Indonesia Power.

KEBERAGAMAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Diversity of the Board of Commissioners and Board of Directors Composition

Kebijakan Keberagaman komposisi anggota Dewan Komisaris dan Direksi dilakukan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris untuk melakukan fungsi pengawasan. Sedangkan kebijakan keberagaman komposisi Direksi dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dalam mengelola dan mengembangkan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik.

Diversity on the member of Board of Commissioners and Directors policy is conducted in order to support the duties and responsibilities of Board of Commissioners in conducting supervisory function. The diversity policy for Board of Directors composition is to support the duties and responsibilities of managing and developing good corporate governance implementation.

Indonesia Power tidak memiliki ketentuan spesifik terkait keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi di dalam struktur keanggotaan Perusahaan. Indonesia Power meyakini bahwa dengan adanya keberagaman dalam aspek keahlian, pengalaman dan latar belakang pendidikan akan sangat berkontribusi terhadap efektivitas pelaksanaan tugas baik Dewan Komisaris maupun Direksi. Namun pada praktiknya, Indonesia Power telah mengacu pada Peraturan BUMN dalam prosedur pengangkatan dan penetapan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan.

Indonesia Power does not have specific regulation related to the diversity of composition of Board of Commissioners and Directors in the Company's membership structures. Indonesia Power believes that the diversity in the expertise, experience, and education background will contribute greatly to the effectivity of duties execution both for Board of Commissioners and Board of Directors. However, in practices, Indonesia Power refers to the Regulation of State-Owned Enterprises (BUMN) in the procedure of appointment and dismissal of members of Company's Board of Commissioners and Board of Directors.

Keberagaman komposisi Dewan komisaris dan Direksi Perusahaan terdiri dari beragam latar belakang kualifikasi pendidikan (bidang studi), pengalaman kerja, usia, dan jenis kelamin. Keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi Indonesia Power dapat dilihat pada tabel berikut:

The diversity of Company's Board of Commissioners and Directors Composition consists of diversity in the education background (field of study), work experience, age, and gender. The diversity of Board of Commissioners and Directors composition of Indonesia Power is as follows:

Tabel Keberagaman Dewan Komisaris Indonesia Power Tahun 2016
Table: Diversity of Indonesia Power's Board of Commissioners in 2016

Nama Name	Jabatan Position	Usia Age	Jenis Kelamin Gender	Pendidikan Education	Pengalaman Kerja Work Experience
Bagus Setiawan	Komisaris Utama	49	Laki-laki	– Magister Bidang Manajemen Bisnis dari University of Missouri pada tahun 2006 – Sarjana Mesin dari ITB pada tahun 1993	– Kepala Divisi Human Capital Management System PT PLN (Persero) tahun 2015-sekarang – Kepala Divisi Pengembangan Sistem Sdm PT PLN (Persero) tahun 2013-2015 – General Manager PT PLN (Persero) Wilayah Bangka Belitung tahun 2010-2011 – General Manager PT PLN (Persero) Wilayah Maluku Dan Maluku Utara tahun 2009-2010

Nama Name	Jabatan Position	Usia Age	Jenis Kelamin Gender	Pendidikan Education	Pengalaman Kerja Work Experience
Bagus Setiawan	President Commissioner	49	Male	– Magister in Business Management, from University of Missouri, 2006 – Bachelor of Mechanical Engineering from ITB, 1993	– Head of Human Capital Management System Division of PT PLN (Persero), 2015-now – Head of Human Resources System Development Division of PT PLN (Persero), 2013-2015 – General Manager PT PLN (Persero), Bangka Belitung Area, 2010-2011 – General Manager PT PLN (Persero), Maluku and North Maluku Area, 2009-2010
Ahmad Yani	Komisaris	54	Laki-laki	– Mahasiswa Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung tahun 2013 – Magister Hukum dari Universitas Indonesia Tahun 2003 – Sarjana Hukum dari Universitas Islam Jakarta Tahun 1988 – Sarjana Muda Hukum dari Universitas Islam Jakarta Tahun 1986	– Anggota DPR/MPR RI Periode 2009 -. 2014 – Law Office Ahmad Yani & Associates sebagai Founder Tahun 2003 -. 2009 – Dosen Hukum Universitas. Islam Atthariyah Jabatan Lektor Kepala Tahun 2000 - 2008 – Dosen Hukum Universitas Nasional Jabatan Lektor Kepala Tahun 2000 - 2008 – Law Firm DYT & Partner sebagai Managing Director Tahun 2003 – Law Firm H.D.Y sebagai Senior Patner Tahun 1994 - 1996.
Ahmad Yani	Commissioner	54	Male	– Doctorate Student of Law Faculty, Padjajaran University Bandung, 2013 – Magister of Law from Universitas Indonesia, 2003 – Bachelor of Law from Universitas Islam Jakarta, 1988 – Diploma III of Law from Universitas Islam Jakarta, 1986	– Member of DPR/MPR RI 2009 - 2014 – Law Office Ahmad Yani & Associates, Founder, 2003 - 2009 – Law Professor in Universitas Islam Atthariyah, Head Lecturer, 2000 - 2008 – Law Professor in Universitas Nasional, Head Lecturer, 2000 - 2008 – Law Firm DYT & Partner, Managing Director, 2003 – Law Firm H.D.Y, Senior Partner, 1994 - 1996.
Abdi Mustakim	Komisaris	40	Laki-laki	– Magister of Business Administration dari Maastricht School Of Management tahun 2006 – Sarjana Ekonomi dari Universitas Mercu Buana tahun 2004	– Kepala Bagian Perencanaan dan Manajemen Kinerja tahun 2015 – sekarang – Plt. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan tahun 2014 – 2015 – Kepala Sub Bagian Pelaporan tahun 2013 – 2014

KEBERAGAMAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI
Diversity of the Board of Commissioners and Board of Directors Composition

Nama Name	Jabatan Position	Usia Age	Jenis Kelamin Gender	Pendidikan Education	Pengalaman Kerja Work Experience
				– Sarjana Muda Akuntansi dari STAN Tahun 1997	– Kepala Sub Bagian Perencanaan tahun 2010 – 2013 – Plt. Kepala Sub Bidang Tata Kelola dan Manajemen Risiko Usaha Perdagangan, Pergudangan, Distribusi dan Jasa Sertifikasi II tahun 2006 – 2010
Abdi Mustakim	Commissioner	40	Male	– Magister of Business Administration from Maastricht School of Management, 2006 – Bachelor of Economy from Universitas Mercu Buana, 2004 – Diploma in Accountancy from STAN, 1997	– Head of Planning and Performance Management, 2015 - now – Acting Head of Planning and Finance, 2014 - 2015 – Head of Reporting Subdivision, 2013 - 2014 – Head of Planning Subdivision, 2010 - 2013 – Acting Head of Governance and Risk Management of Trading Business, Warehouse, Distribution, and Services, Certification II, 2006 - 2010
Agus Hernawan	Komisaris	57	Laki-laki	– Magister Management dari University Padjadjaran	– Direktur Retail Business Banking Bank Bukopin tahun 2013-2015 – Direktur Pelayanan & Distribusi Bank Bukopin tahun 2006-2013 – Direktur Consumer Banking Bank Bukopin tahun 2000-2006 – Group Head Bisnis Bank Bukopin tahun 1997-2000 – Pemimpin Cabang Bank Bukopin tahun 1988-1997
Agus Hernawan	Commissioner	57	Male	– Magister of Management from Padjadjaran University	– Director of Retail Business Banking in Bank Bukopin, 2013 - 2015 – Director of Services & Distribution in Bank Bukopin, 2006 - 2013 – Director of Consumer Banking in Bank Bukopin, 2000 - 2006 – Group Head Business in Bank Bukopin, 1997-2000 – Head of Branch Office Bank Bukopin, 1988 - 1997
Munir Ahmad	Komisaris	55	Laki-laki	– Sarjana Teknik Elektro dari Universitas Hasanudin tahun 1987	– Kepala Divisi Human Capital Management System PT PLN (Persero) Tahun 2015-Sekarang – Kepala Divisi Pengembangan Sistem SDM PT PLN (Persero) tahun 2013-2015

Nama Name	Jabatan Position	Usia Age	Jenis Kelamin Gender	Pendidikan Education	Pengalaman Kerja Work Experience
		55			– General Manager PT PLN (Persero) wilayah Bangka Belitung tahun 2010-2011 – General Manager PT PLN (Persero) wilayah Maluku dan Maluku Utara tahun 2009-2010 – Manager Perencanaan Strategis Korporat PT PLN (Persero) tahun 2009
Munir Ahmad	Commissioner	55	Male	– Bachelor of Electrical Engineering from Hasanudin University, 1987	– Head of Human Capital Management System Division of PT PLN (Persero), 2015-now – Head of Human Resources System Development Division of PT PLN (Persero), 2013-2015 – General Manager of PT PLN (Persero), Bangka Belitung Area, 2010-2011 – General Manager of PT PLN (Persero), Maluku and North Maluku Area, 2009-2010 – Corporate Strategic Planning Manager of PT PLN (Persero), 2009
Tri Setyo Nugroho	Komisaris	55	Laki-laki	– Magister Terapan Project Management Dari PM Box Institute Tahun 2004 – Sarjana Teknik Sipil Dari ISTA Tahun 1996 – Sarjana Muda Teknik Sipil Dari Undip Tahun 1981	– Tenaga Ahli Manajemen Proyek PT PLN (Persero) tahun 2014- sekarang – Kepala Divisi Pengadaan Strategis PT PLN (Persero) Tahun 2013-2014 – Kepala Divisi Administrasi Konstruksi PT PLN (Persero) Tahun 2012-2013 – Project Director Administrasi Investasi Pembangunan PT PLN (Persero) tahun 2010-2012 – Deputi Direktur Administrasi Konstruksi Pada Direktorat Konstruksi Strategis Tahun 2008-2010
Tri Setyo Nugroho	Commissioner	55	Male	– Magister of Applied Project Management, from PM Box Institute, 2004 – Bachelor of Civil Engineering from ISTA, 1996 – Diploma in Civil Engineering from Diponegoro University, 1981	– Project Management Specialist of PT PLN (Persero), 2014 - now – Head of Strategic Procurement Division, PT PLN (Persero), 2013 - 2014 – Head of Construction Administration Division, PT PLN (Persero), 2012 - 2013 – Project Director of Development Investment Administration, PT PLN (Persero), 2010 - 2012 – Deputy Director of Construction Administration, on Strategic Construction Directorate, 2008 - 2010

KEBERAGAMAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI
Diversity of the Board of Commissioners and Board of Directors Composition

Tabel Keberagaman Direksi Indonesia Power Tahun 2016
Table: Diversity of Indonesia Power's Board of Directors in 2016

Nama Name	Jabatan Position	Usia Age	Jenis Kelamin Gender	Pendidikan Education	Pengalaman Kerja Work Experience
Sripeni Inten Cahyani	Direktur Utama	48	Perempuan	· Sarjana Teknik Kimia dari Universitas Diponegoro (1992) · Magister Manajemen Keuangan dari STM PPM Jakarta (2001), · Gelar Profesi Ajun Ahli Asuransi Indonesia Kerugian (AAAIK).	Kepala Divisi Human Capital Management System PT PLN (Persero) (2015- sekarang). Beberapa jabatan lain yang pernah dipegangnya adalah PLT Direktur Utama menjabat sebagai Direktur Keuangan Indonesia Power, Eksekutif Utama Bidang Keuangan Indonesia Power yang ditugaskaryakan sebagai Senior Spesialis Keuangan Divisi Keuangan Korporat PLN, Kepala Divisi Pendanaan dan Asuransi Indonesia Power, mendapat penugasan sebagai Sekretaris Dewan Komisaris PT Cogindo DayaBersama, aktif di Sekretariat Working Group 1 Generation & Renewable Energi HAPUA (Head of ASEAN Power Utilities, Authorities).
Sripeni Inten Cahyani	President Director	48	Female	• Bachelor of Chemical Engineering from Diponegoro University (1992) • Magister of Financial Management from STM PPM Jakarta (2001) • Profession: Ajun Ahli Asuransi Indonesia Kerugian (AAAIK).	Head of Human Capital Management System Divison of PT PLN (Persero), 2015-now. Several other positions she held were, Acting President Director as Finance Director of Indonesia Power, Finance Executive Indonesia Power who was assigned as Financial Specialist Senior of Corporate Finance Division of PLN, Head of Funding and Insurance Division of Indonesia Power, was assigned as Secretary of Board of Commissioner PT Cogindo Daya Bersama, active in the Secretariat of Working Group 1 Generation & Renewable Energy HAPUA (Head of ASEAN Power Utilities, Authorities).
Eri Prabowo	Direktur Operasi I	50	Laki-laki	· Meraih gelar Teknik Mesin dari Universitas Indonesia (1990) · Magister Information Technology dari Universitas Indonesia (1998) · Doctor of Philosophy (PhD) in Economics dari Universitas Airlangga (2010)	Sebelum menjabat sebagai sebagai Direktur Operasi I, pernah menjabat sebagai Direktur Produksi, Sekretaris Perusahaan dan General Manager UBP Saguling Indonesia Power serta Direktur Utama PT Indo Pusaka Berau. Memiliki pengalaman kerja internasional sebagai Maintenance Team Leader untuk proyek Annual Inspection dan Steam Turbine and Generator Remaining Life Assessment di Rabegh Steam Power Plant, Saudi Arabia.

Nama Name	Jabatan Position	Usia Age	Jenis Kelamin Gender	Pendidikan Education	Pengalaman Kerja Work Experience
Eri Prabowo	Operation Director I	50	Male	• Bachelor of Mechanical Engineering, Universitas Indonesia (1990) • Magister of Information Technology from Universitas Indonesia (1998) • Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Economics from Universitas Airlangga (2010)	Before serving as Operation Director I, he served as Production Director, Corporate Secretary, and General Manager of UBP Saguling Indonesia Power, and President Director of PT Indo Pusaka Berau. Have international work experience as Maintenance Team Leader for Annual Inspection and Steam Turbine and Generator Remaining Life Assessment Project in Rabegh Steam Power Plant, Saudi Arabia.
Antonius R.T Artono	Direktur Operasi II	53	Laki-laki	• Meraih gelar Sarjana Teknik Kimia dari Institut Teknologi Sepuluh November (1986) dan Sarjana Teknik Geothermal dari Institute University of Auckland (1995) serta Magister of Business Administration dari University of Missouri St. Louis.	Sebelum menjabat sebagai PLT Direktur Operasi II, pernah menjabat sebagai PLT Direktur Utama, Direktur Pengembangan dan Niaga Indonesia Power, pernah menjabat sebagai Ahli Utama Pengembangan Bisnis dan General Manager UBP Bali Indonesia Power.
Antonius R.T Artono	Operation Director II	53	Male	• Have a a Bachelors Degree in Chemical Engineering from the Technological Institute of Sepuluh November (1986) and a Bachelors Degree in Geothermal Engineering from the Institute University of Auckland (1995) as well as a Masters Degree in Business Administration from the University of Missouri St. Louis.	Before serving as Acting Operation Director II, he served as Acting President Director, Director of Commerce and Development in Indonesia Power, Business Development Expert, and General Manager UBP Bali Indonesia Power.
Hudiono	Direktur Keuangan	60	Laki-laki	· Meraih gelar Sarjana Teknik Elektro dari ITB (1981) · Sarjana Ekonomi Perusahaan dari Universitas Terbuka (1991) · Master Teknik dari ITB (1999).	Sebelum menjabat sebagai PLT Direktur Keuangan, pernah menjabat sebagai Direktur Keuangan PT Pembangkitan Jawa-Bali (2012-2016), Kepala Divisi Perencanaan dan Pengendalian Anggaran PLN (2009-2012), Deputi Direktur Perencanaan Pengendalian Anggaran dan Kinerja PLN (2009) dan General Manager PLN Wilayah Sumatera Barat (2008-2009).
Hudiono	Financial Director	60	Male	• Bachelor of Electrical Engineering from ITB (1981) • Bachelor of Corporate Economy from Terbuka University (1991) • Master of Engineering from ITB (1999).	Before serving as Acting Financial Director, he served as Financial Director PT Pembangkitan Jawa-Bali (2012-2016), Head of Planning and Budget Control Division in PLN (2009-2012), Deputy Director of Budget Control Planning and Performance in PLN (2009), and General Manager PLN in West Sumatera Area (2008-2009).

KEBERAGAMAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI
Diversity of the Board of Commissioners and Board of Directors Composition

Nama Name	Jabatan Position	Usia Age	Jenis Kelamin Gender	Pendidikan Education	Pengalaman Kerja Work Experience
Adi Supriono	Direktur	57	Laki-laki	· Sarjana Teknik dari Institut Teknologi Bandung (1984) · Master Master of Business Administration (MBA) di bidang Finance dari University of Missouri-Saint Louis (2006).	Sebelum menjabat sebagai PLT Direktur Pengembangan dan Niaga, pernah menjabat sebagai Sekretaris Perusahaan PT PLN (Persero) (2012 – 2016), Direktur Pengembangan dan Niaga PT Pembangkitan Jawa Bali (2010 – 2012), Direktur Sumber Daya Manusia dan Administrasi PT Pembangkitan Jawa Bali (2009 – 2010) dan Direktur Keuangan di PT Bajradaya Sentranusa (2003 – 2004).
Adi Supriono		57	Male	• Bachelor of Engineering, Bandung Institute of Technology (1984) • Master of Business Administration (MBA) in Finance, from University of Missouri-Saint Louis (2006).	Before serving as Acting Director of Development and Commerce, he served as Corporate Secretary PT PLN (Persero) (2012 – 2016), Director of Development and Commerce PT Pembangkitan Jawa Bali (2010 – 2012), Director of Human Resources and Administration PT Pembangkitan Jawa Bali (2009 – 2010), and Financial Director in PT Bajradaya Sentranusa (2003 – 2004).
Roikhan	Direktur SDM	57	Laki-laki	· Meraih gelar Sarjana Listrik dari Institut Teknologi Bandung (1986) dan Magister di Bidang Industri di Institut Teknologi Bandung (1998).	Sebelum menjabat sebagai Direktur Sumber Daya Manusia (SDM) dan Administrasi, pernah menjabat sebagai Expert Manajemen SDM pada Direktorat SDM dan Umum PLN, Kepala Divisi Pengembangan SDM dan Talenta pada Direktorat SDM & Umum PLN, Asisten Deputi Direktur Pengelolaan Karir & Taleta pada Direktorat SDM & Umum PLN, Manager Regional Jawa Timur & Bali PT PLN Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban.
Roikhan	Director of Human Resources	57	Male	• Have a Bachelors degree in Electricity from the Bandung Institute of Technology (1986) and a Masters degree in Industry from the Bandung Institute of Technology (1998).	Before serving as Director of Human Resources (SDM) and Administration, he served as SDM Management Expert on Directorate of Human Resources and General in PLN, Head of Human Resources and Talent Development in Directorate of Human Resources and General in PLN, Deputy Assistant of Director of Career Management and Talents in Directorate of Human Resources and General in PLN, Regional Manager of East Java & Bali PT PLN in distribution and load control center.

PENILAIAN KINERJA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Performance Assessment of Board of Commissioners and Board of Directors

Pada dasarnya kinerja Direksi dan Dewan Komisaris akan dievaluasi oleh Pemegang Saham dalam RUPS. Secara umum, evaluasi Kinerja Dewan Komisaris dan Direksi diatur dalam Pedoman Kerja bagi Direksi dan Dewan Komisaris (*Board Manual*) ditetapkan melalui Surat Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris Indonesia Power Nomor 178.K/010/IP/2013 tanggal 21 November 2013 dan 006.SK/ DEKOM-IP/2013.

Kinerja Dewan Komisaris dan Direksi dievaluasi melalui:

1. Pemegang Saham secara kolektif dalam RUPS. Indikator penilaian kinerja Direksi tahun 2016 adalah pencapaian kontrak kerja manajemen dalam *Key Performance Indicators* (KPI) Korporat tahun 2016 dan tingkat kesehatan Perusahaan.
2. Pencapaian hasil *asessment* GCG. Penilaian kinerja diukur dari hasil pencapaian score *assessment* GCG khususnya pada penilaian aspek Dewan Komisaris serta aspek Direksi dan organ penunjangnya. Pelaksanaan *assessment* GCG merujuk pada Keputusan Sekretaris Kementrian BUMN Nomor SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) pada Badan Usaha MIlik Negara.

Pelaksanaan penilaian dilakukan pada saat RUPS Laporan Perhitungan Tahunan (LPT), untuk kinerja tahun buku 2015 telah dilaksanakan pada tanggal 7 Juni 2016 dan penilaian *assessment* GCG tahun 2016 dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan DKI Jakarta di bulan Januari - Februari 2017.

The performance of Board of Directors and Board of Commissioners shall be evaluated by the Shareholders in GMS. Generally, performance evaluation of Board of Commissioners and Board of Directors is stipulated in Board Manual of Board of Directors and Board of Commissioners, which is set forth in the Joint Decree of Board of Directors and Board of Commissioners Indonesia Power No. 178.K/010/IP/2013 dated 21 November 2013, and No. 006.SK/ DEKOM-IP/2013.

The performance of Board of Commissioners and Board of Directors is evaluated through:

1. Shareholders, collectively, in GMS. Performance assessment indicator of the Directors in 2016 is the achievement of management work contract in Corporate Key Performance Indicators (KPI) 2016 and Company's soundness level.
2. GCG Assessment achievement. The performance is assessed through the GCG score assessment, especially on the aspect of Board of Commissioners and Board of Directors and supporting organ assessment. The GCG assessment implementation refers to the Decree of Secretary of State Ministry of State-Owned Enterprises No. SK-16/S.MBU/2012 dated 6 June 2012 on Evaluation and Assessment Indicator/Parameter on the Good Corporate Governance (GCG) implementation on State-Owned Enterprises.

The assessment is performed during GMS Annual Calculation Report (LTP). The performance for the fiscal year 2015 is conducted on 7 June 2016, and the GCG assessment for 2016 is conducted by Finance and Development Supervisory Agency (BPKP), Representative of DKI Jakarta in January—February 2017.

Tabel Penilaian berdasarkan Assessment GCG
Table: GCG Assessment

	Jumlah Indikator Penilaian Total of Assessment Indicator	Jumlah Parameter Penilaian Total of Assessment Parameter	Skor Pencapaian Achievement Score	Skor Maksimum Maximum Score	Presentase (%) Percentage (%)
Dewan Komisaris Board of Commissioners	12	44	31,718	35	90,624
Direksi Directors	13	52	32,878	35	93,937

PENILAIAN KINERJA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Performance Assessment of Board of Commissioners and Board of Directors

Dari tabel di atas, penilaian berdasarkan *assessment* GCG dilakukan terhadap penilaian penerapan atas 12 indikator dengan 43 parameter dalam aspek Dewan Komisaris memperlihatkan skor capaian 31,718 dari skor maksimum 35 atau 90,6%. Sedangkan penilaian Direksi berdasarkan *assessment* GCG yang dilakukan terhadap penilaian penerapan atas 13 indikator dengan 52 parameter dalam aspek Direksi memperlihatkan skor capaian 32,878 dari skor maksimum 35 atau 93,9%. Dengan adanya hasil pencapaian tersebut menunjukan bahwa kinerja Dewan Komisaris dan Direksi Indonesia Power telah mencapai klasifikasi kualitas penerapan GCG "Sangat Baik".

From the table, the GCG assessment was performed through the implementation of 12 indicators and 43 parameters, and in the Board of Commissioners aspect, it achieved the score of 31.718 of maximum 35, or 90.6%. The GCG assessment was performed through the implementation of 13 indicators and 52 parameters, and in the Board of Directors aspect, it achieved the score of 32.878 of maximum 35, or 93.9%. With the achievement, it demonstrates that the Board of Commissioners and Board of Directors of Indonesia Power performance has achieved the GCG implementation quality classification "Very Good".

HUBUNGAN AFILIASI ANTARA ANGGOTA DIREKSI, DEWAN KOMISARIS, DAN PEMEGANG SAHAM UTAMA DAN/ATAU PENGENDALI

Affiliation Between Fellow Member of Board of Directors, Board of Commissioners, and Major Shareholders and/or Controller

Hubungan afiliasi antara anggota Direksi Dewan Komisaris serta Pemegang Saham meliputi hubungan kekeluargaan dan hubungan keuangan. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Pengendali, mencakup:

1. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan anggota Direksi lainnya.
2. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
3. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama dan/atau pengendali.
4. Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dengan anggota Komisaris lainnya; dan
5. Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham Utama dan/atau pengendali.

The affiliation between fellow members of Board of Directors, Board of Commissioners, and Shareholders comprises of familial relationship and financial relationship. The affiliation between members of Board of Directors, Board of Commissioners, and Controlling Shareholder, includes:

1. Affiliation between fellow members of Board of Directors.
2. Affiliation between members of Board of Directors and Board of Commissioners.
3. Affiliation between members of Board of Directors and Major Shareholders and/or Controller.
4. Affiliation between fellow members of Board of Commissioners; and
5. Affiliation between members of Board of Commissioners and Major Shareholders and/or Controller.

Hubungan Afiliasi Dewan Komisaris dengan Anggota Direksi dan Pemegang Saham Utama dan/atau Pengendali

Hubungan afiliasi Dewan Komisaris meliputi hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dengan Direksi dan Pemegang Saham Utama dan/atau pengendali. Dewan Komisaris Indonesia Power melaksanakan tugasnya secara independen sesuai dengan peraturan perundang-undangan termasuk menghindari benturan kepentingan dengan pihak manapun.

Affiliation Between Member of Board of Commissioners with Board of Directors, and Major Shareholders and/or Controller

Affiliation between members of Board of Commissioners involves affiliation with fellow Board of Commissioners, Board of Directors, and Major Shareholders and/or Controller. Board of Commissioners of Indonesia Power carries out its duties independently, in line with the prevailed regulations, to prevent any conflict of interest.

HUBUNGAN AFILIASI ANTARA ANGGOTA DIREKSI, DEWAN KOMISARIS, DAN PEMEGANG SAHAM UTAMA DAN/ATAU PENGENDALI

Affiliation Between Fellow Member of Board of Directors, Board of Commissioners, and Major Shareholders and/or Controller

Tabel Hubungan Keluarga dan Keuangan Dewan Komisaris dengan Anggota Direksi dan Pemegang Saham Utama/ Pengendali

Table: Familial and Financial Relationship of Board of Commissioners with Board of Directors and Major Shareholders/Controller

Nama Nama	Hubungan Keluarga Dengan Familial Relationship with						Hubungan Keuangan Sebagai Financial Relationship as					
	Dewan Komisaris Board of Commissioners		Direksi Board of Directors		Pemegang Saham Shareholders		Dewan Komisaris Board of Commissioners		Direksi Board of Directors		Pemegang Saham Shareholders	
	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No
Bagus Setiawan	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Ahmad Yani	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Abdi Mustakim	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Agus Hernawan	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Munir Ahmad	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Tri Setyo Nugroho	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√

Hubungan Afiliasi Direksi dengan Anggota Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Utama dan/atau Pengendali

Berikut tabel Hubungan Keluarga dan Keuangan anggota Direksi dengan Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Utama/Pengendali Indonesia Power:

Affiliation Between Member of Board of Directors with Board of Commissioners, and Major Shareholders and/or Controller

Below is the table of Familial and Financial relationship of members of Board of Directors with Board of Commissioners and Major Shareholders/Controller of Indonesia Power:

Tabel Hubungan Keluarga dan Keuangan Direksi dengan Anggota Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Utama/ Pengendali

Table: Familial and Financial Relationship of Board of Directors with Board of Commissioners and Major Shareholders/Controller

Nama Name	Hubungan Keluarga Dengan Familial Relationship with						Hubungan Keuangan Sebagai Financial Relationship as					
	Dewan Komisaris Board of Commissioners		Direksi Board of Directors		Pemegang Saham Shareholders		Dewan Komisaris Board of Commissioners		Direksi Board of Directors		Pemegang Saham Shareholders	
	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No
Sripeni Inten Cahyani*	-	√	-	√	-	√	√	-	-	√	-	√
Eri Prabowo*	-	√	-	√	-	√	√	-	-	√	-	√
Antonius RT Artono*	-	√	-	√	-	√	√	-	-	√	-	√
Hudiono	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Adi Supriono	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Roikhan*	-	√	-	√	-	√	√	-	-	√	-	√

Keterangan: *menjabat sebagai Dewan Komisaris di Anak Perusahaan.

Remark: * serves as Board of Commissioners in Subsidiaries.

SEKRETARIS DEWAN KOMISARIS

Secretary of Board of Commissioners

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris mengangkat Sekretaris Dewan Komisaris untuk membantu kelancaran tugas dan wewenang Dewan Komisaris untuk kepentingan dan usaha Perusahaan.

In implementing their tasks and responsibilities, the Board of Commissioners appoints a Board of Commissioners' Secretary to assist their tasks and authority for the interest and business of the Company.

Struktur Organisasi Sekretaris Dewan Komisaris

Sekretaris Dewan Komisaris diangkat dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris yang dibantu oleh seorang staf pegawai Sekretariat Dewan Komisaris dari Indonesia Power dan seorang pegawai *outsourcing*. Sekretaris Dewan Komisaris memiliki peran membantu Dewan Komisaris dalam mendukung fungsi pengawasan dan pemberian arahan mengenai praktik tata kelola perusahaan yang baik.

Organizational Structure of Secretary of Board of Commissioners

The Board of Commissioners' Secretary is appointed and directly responsible to Board of Commissioners assisted by an employee staff of Board of Commissioners Secretariat from Indonesia Power and an outsourcing employee. The role of Board of Commissioners' Secretary is to assist the Board of Commissioners in supporting supervision function and giving directions on good company governance practices.

Profil Sekretaris Dewan Komisaris

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor 009.SK/DEKOM-IP/2016, Sekretaris Dewan Komisaris saat ini dijabat oleh Sdr. Didy Poeriadi. Berikut profil ringkas Sekretaris Dewan Komisaris Indonesia Power tahun 2016:

Profile of Secretary of Board of Commissioners

Based on Decree of the Board of Commissioners Number 009.SK/DEKOM-IP/2016, the position of Board of Commissioners' Secretary is currently held by Mr. Didy Poeriadi. The brief profile of Board of Commissioners' Secretary of Indonesia Power in 2016 is as follows:

Didy Poeriadi
Sekretaris Dewan Komisaris
Secretary of Board of Commissioner

Lahir Kediri, 9 Februari 1954
Domisili: Tangerang

Pendidikan: Sarjana Teknik Elektro dari Institut Teknologi Sepuluh November pada Tahun 1980

Riwayat Jabatan:
Mengawali karir sebagai Management Consulting Group PT PLN (Persero) tahun 2008, Kepala Satuan Manajemen Risiko PT PLN (Persero) tahun 2009, Komisaris PT Indonesia Power tahun 2010, Komisaris PT Cogindo DayaBersama tahun 2011, dan Sekretaris Dewan Komisaris PT Indonesia Power tahun 2011 – sekarang.

Born Kediri, 9 February 1954
Domicile: Tangerang

Education: Bachelor of Electric Engineering from Sepuluh November Institute of Technology obtained in 1980

Career History:
Starting his career in the Management Consulting Group of PT PLN (Persero) in 2008, Head of Risk Management Unit of PT PLN (Persero) in 2009, Commissioner of PT Indonesia Power in 2010, Commissioner of PT Cogindo DayaBersama in 2011, and Secretary of Board of Commissioner PT Indonesia Power in 2011 – now.

SEKRETARIS DEWAN KOMISARIS
Secretary of Board of Commissioners

Pendidikan dan Pelatihan yang pernah diikuti: Risk Management and Internal Control System, UU Perseroan Terbatas & UU Penanaman Modal, Operational Risk Excellence in Organizations, Aspek prosedural dan aspek pidana korupsi Keppres No. 80 thn 2003, Professional Risk Managers Tutorial Modul I, II, III, IV, Integrating ERM and Balance Scorecard, Building World Class Board, dan Project Training for Thermal Power Plant.	Education and Training: Risk Management and Internal Control System, Law of Limited Company & Law on Capital Investment, Operational Risk Excellence in Organizations, procedural aspects and corruption criminal aspects of Presidential Decree No. 80 of 2003, Professional Risk Managers Tutorial Module I, II, III, IV, Integrating ERM and Balance Scorecard, Building World Class Board, and Project Training for Thermal Power Plant.
Dasar Pengangkatan: Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 009.SK/DEKOM-IP/2016 tanggal 20 September 2016.	Appointment Basis: Decree of the Board of Commissioners No. 009.SK/DEKOM IP/2016 dated 20 September 2016.

Pedoman Kerja Sekretaris Dewan Komisaris

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris Dewan Komisaris mengacu pada Pedoman Kerja yang tercantum dalam *Board Manual*, dengan tugas dan tanggung jawab untuk:

1. Menyelenggarakan kegiatan administrasi dan kesekretariatan di lingkungan Dewan Komisaris.
2. Mengkoordinasikan penyediaan informasi yang dibutuhkan Dewan Komisaris, terdiri dari Laporan Kinerja, Laporan Manajemen, Laporan Tahunan, Laporan Hasil Pemeriksaan Audit Internal dan laporan/informasi lainnya mengenai Perusahaan.
3. Menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris, penyampaian materi rapat serta penyusunan risalah rapat serta mengirimkan hasil keputusan rapat kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Working Guidelines of Board of Commissioners' Secretary

In accomplishing his tasks, the Board of Commissioners' Secretary refers to Working Guidelines in Board Manual, with the tasks and responsibilities to:

1. Conduct administrative and secretarial activities within the Board of Commissioners.
2. Coordinate the provision of information required by the Board of Commissioners, which consists of Performance Report, Management Report, Annual Report, Report of Internal Audit Finding Results, and other reports/information on the Company.
3. Conduct the meetings of Board of Commissioners, present meeting material as well as drafting minutes of meetings and send the decision results of the meetings to the interested parties.

Tugas dan Tanggung Jawab Sekretaris Dewan Komisaris

Berdasarkan surat pengangkatan Dewan Komisaris, tugas dan tanggung jawab utama Sekretaris Dewan Komisaris adalah membantu kelancaran pekerjaan dan memberikan dukungan kepada Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas dan fungsinya, yang mencakup:

1. Menyelenggarakan kegiatan administrasi kesekretariatan di lingkungan Dewan Komisaris.

Duties and Responsibilities of the Board of Commissioners' Secretary

Based on the Board of Commissioners appointment letter, the main duties and responsibilities the Board of Commissioners' Secretary are to assist the work of and to provide support for Board of Commissioners in accomplishing its tasks and functions, which consist of:

1. Conducting administrative and secretarial activities within the Board of Commissioners.

2. Menyelenggrakan rapat Dewan Komisaris dan rapat/ pertemuan antara Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham, Direksi maupun pihak-pihak terkait lainnya.
3. Menyediakan data/informasi yang diperlukan oleh Dewan Komisaris dan komite-komite di lingkungan Dewan Komisaris yang berkaitan dengan:
   a. *Monitoring* tindak lanjut hasil keputusan, rekomendasi dan arahan Dewan Komisaris.
   b. Bahan/materi yang bersifat administrasi mengenai laporan/kegiatan Direksi dalam mengelola Perusahaan.
   c. Dukungan administrasi serta monitoring berkaitan dengan hal-hal yang harus mendapatkan persetujuan atau rekomendasi dari Dewan Komisaris sehubungan dengan kegiatan pengelolaan Perusahaan yang dilakukan oleh Direksi.
4. Mengumpulkan data-data teknis yang berasal dari komite-komite di lingkungan Dewan Komisaris dan tenaga ahli Dewan Komisaris untuk keperluan Dewan Komisaris.

2. Conducting meetings of the Board of Commissioners and meetings between the Board of Commissioners with Stockholders, Board of Directors, or other related parties.
3. Providing data/information required by the Board of Commissioners and committees within the Board of Commissioners related to:
   a. Monitoring of decision results follow-up, recommendation, and directions of the Board of Commissioners.
   b. Administrative material regarding the report/ activities of the Board of Directors in managing the Company.
   c. Administrative support and monitoring related to matters that need approval or recommendation of the Board of Commissioners in relation to management activities of the Company.
4. Collecting technical data from committees within the Board of Commissioners and the experts of the Board of Commissioners for the interests of the Board of Commissioners.

Laporan Pelaksanaan Tugas Sekretaris Dewan Komisaris

Sekretaris Dewan Komisaris telah melakukan berbagai kegiatan dalam mendukung pelaksanaan tugas pengawasan Dewan Komisaris dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya sepanjang tahun 2016, yaitu sebagai berikut:

Task Implementation Report on the Board of Commissioners' Secretary

The Board of Commissioners' Secretary has conducted various activities in supporting the implementation of the tasks of the Board of Commissioners and has submitted the implementation report of his tasks in 2016, as follows:

Kegiatan Sekretaris Dewan Komisaris Tahun 2016	Activities of the Board of Commissioners Secretary in 2016
1. Menyelenggarakan kegiatan di bidang kesekretariatan dalam lingkungan Dewan Komisaris.	1. Conducting secretarial activities within the Board of Commissioners.
2. Mengkoordinir penyediaan informasi yang dibutuhkan Dewan Komisaris, seperti laporan berkala dari Direksi (Laporan Bulanan, Laporan Triwulanan, Laporan Tahunan, Laporan Hasil Pemeriksaan SPI) serta laporan/informasi lainnya mengenai Perseroan.	2. Coordinating the provision of information required by the Board of Commissioners, such as regular report from the Board of Directors (Monthly Report, Quarterly Report, Annual Report, Internal Auditor Results Report) and other reports/information regarding the Company.

SEKRETARIS DEWAN KOMISARIS
Secretary of Board of Commissioners

Kegiatan Sekretaris Dewan Komisaris Tahun 2016	Activities of the Board of Commissioners Secretary in 2016
3. Menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris, termasuk tetapi tidak terbatas pada penyiapan dan pengiriman undangan, penyampaian materi rapat serta pembuatan risalah rapat.	3. Conducting meetings Of the Board of Commissioners, including but not excluding the preparation and distribution of invitation, material presentation, and drafting minutes of meetings.
4. Mengadministrasikan risalah rapat dan dokumen Dewan Komisaris lainnya serta mengirimkan hasil-hasil keputusan rapat kepada pihak-pihak yang berkepentingan.	4. Administrating minutes of meetings and other documents of the Board of Commissioners as well as sending meeting decision results to the interested parties.

Remunerasi Sekretaris Dewan Komisaris

Berdasarkan *Board Manual* Perusahaan, ketentuan mengenai remunerasi Dewan Komisaris yaitu sebagai berikut:

1. Penghasilan Sekretaris dan Staf Dewan Komisaris ditetapkan oleh Dewan Komisaris dengan memperhatikan kemampuan Perusahaan.
2. Besaran dan jenis penghasilan Sekretaris Dewan Komisaris terdiri dari Honorarium maksimal sebesar 15% dari gaji Direktur Perusahaan serta Fasilitas dan Tunjangan.
3. Besaran dan jenis penghasilan staf Sekretariat Dewan Komisaris ditetapkan oleh Dewan Komisaris dengan ketentuan total penghasilan setahun tidak lebih besar dari penghasilan Organ Pendukung Dewan Komisaris lainnya.

Remuneration of Board of Commissioners' Secretary

Based on the Board Manual of the Company, the provisions on the remuneration of the Board of Commissioners are as follows:

1. Income of the Secretary and Staff of the Board of Commissioners is determined by the Board of Commissioners by taking into consideration the ability of the Company.
2. Amount and type of income of the Board of Commissioners' Secretary consist of Honorarium of maximum 15% of the salary of the Company's Director, with Facilities and Allowance.
3. Amount and type of the income of the Board of Commissioners Secretariat Staff are determined by the Board of Commissioners under a provision that the annual income is not bigger than the income of other supporting Organs of the Board of Commissioners.

SEKRETARIS PERUSAHAAN

Corporate Secretary

Peran Sekretaris Perusahaan semakin penting dan dibutuhkan tidak hanya berkaitan dengan fungsi administrasi dan komunikasi, namun juga untuk meningkatkan pelaksanaan tata kelola dan memastikan kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan. Oleh karenanya, sejalan dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-01/MBU/2011, Indonesia Power telah mengangkat fungsi Sekretaris Perusahaan untuk membantu pelaksanaan tugas Direksi Perusahaan.

The role of Corporate Secretary is getting more important and is required not only in relation to administrative and communication functions, but also in order to improve governance implementation and to ensure the Company's compliance with the laws and regulations. Therefore, aligned with Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number PER-01/MBU/2011, Indonesia Power has appointed a Corporate Secretary function to assist in the implementation of the tasks of the Company's Board of Directors.

Struktur Organisasi Sekretaris Perusahaan

Dalam struktur organisasi Perusahaan, Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama. Dalam menjalankan fungsi dan perannya, Sekretaris Perusahaan mencakup Bidang Komunikasi Korporat, dan Informasi Korporat dan Bidang Umum. Sekretaris Perusahaan memiliki peranan penting dalam memfasilitasi komunikasi antara organ Perusahaan, hubungan antara Perusahaan dengan *stakeholders*, dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Untuk mendukung peran tersebut, Sekretaris Perusahaan memiliki 5 fungsi utama, yaitu sebagai Pejabat Penghubung, Komunikator Perusahaan, Pelaksana GCG, Penatausahaan Dokumen Perusahaan, Pusat Informasi dan Publikasi Resmi Perusahaan.

Corporate Secretary Organizational Structure

In the organizational structure of the Company, the Corporate Secretary is directly responsible to the President Director. In implementing his tasks and role, the Corporate Secretary covers Corporate Communication Section, and Corporate Information, as well as General Affair. Corporate Secretary plays an important role in facilitating the communication among the organs of the Company, relations between the Company and stakeholders, and compliance with the prevailing regulations. In order to support his role, the Corporate Secretary has 5 main functions, i.e. as a Liaison Officer, Company's Communicator, GCG Executor, Company Document Administrator, Information Center, and Official Publication of the Company.

SEKRETARIS PERUSAHAAN
Corporate Secretary

Struktur Organisasi Sekretaris Perusahaan
Corporate Secretary Organizational Structure

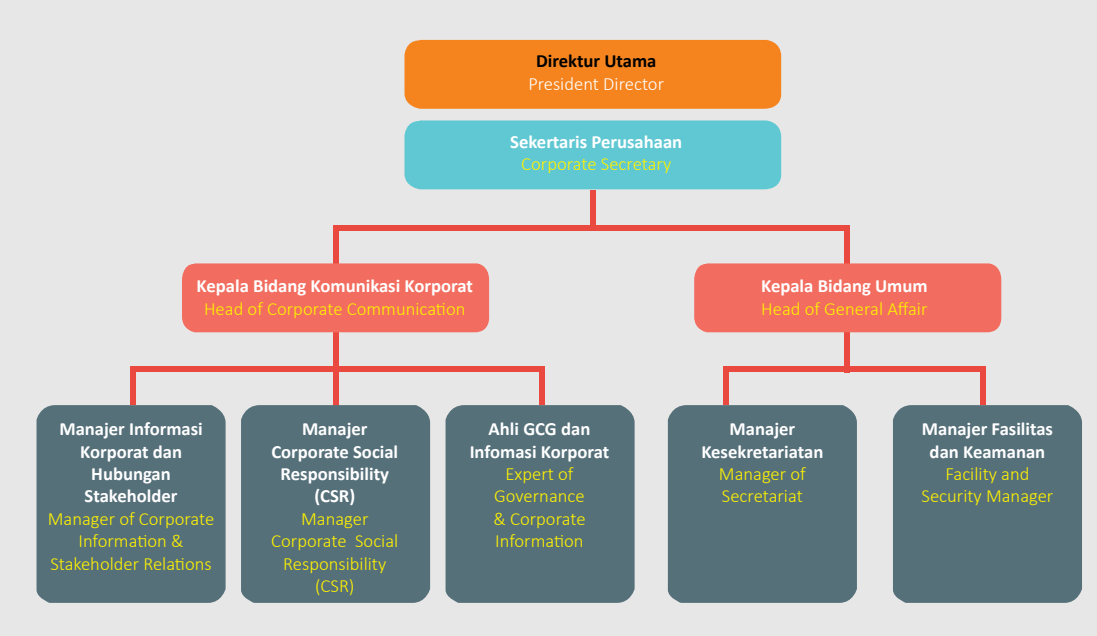

Profil Sekretaris Perusahaan

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Indonesia Power Nomor 176.K/020/IP/2016, Sekretaris Perusahaan saat ini dijabat oleh Sdr. Del Eviondra. Berikut profil ringkas Sekretaris Perusahaan tahun 2016:

Profile of the Corporate Secretary

Based on Decree of the Board of Directors of PT Indonesia Power Number 176.K/020/IP/2016, the position of Corporate Secretary is currently held by Mr. Del Eviondra. The brief profile of Corporate Secretary in 2016 is as follows:

Del Eviondra
Sekretaris Perusahaan
Corporate of Secretary

Lahir Padang, 10 Maret 1968
Domisili: Jakarta

Pendidikan: Lulusan Sarjana Teknik Mesin Universitas Indonesia tahun 1992

Riwayat Jabatan:
Mengawali karir sebagai General Manajer UBP Mrica tahun 2011- 2012, General Manager UBP Saguling tahun 2012- 2015, Kepala Divisi Niaga tahun 2014 – 2015, Kepala Divisi Niaga dan Settlement tahun 2015, Sekertaris Perusahaan tahun 2016 s.d Sekarang.

Born in Padang, 10 March 1968
Domicile: Jakarta

Education: Bachelor Degree in Electric Engineering from University of Indonesia obtained in 1992

Work Experience:
Starting his career as the General Manager of UBP Mrica in 2011-2012, General Manager of UBP Saguling in 2012-2015, Head of Commerce Division in 2014-2015, Head of Commerce and Settlement Division in 2015, Corporate Secretary in 2016 until now.

Pendidikan dan Pelatihan yang pernah diikuti: – Strategy Formulation with Balanced Scorecard, Workshop Senior Leader Capacity Building Manajemen Risiko – Peran KPK,PPATK dan Korporasi Dalam Pencegahan dan Pemberantasan TPPU – ECITB Health and Safety Passport Dasar Pengangkatan: Surat Keputusan Direksi PT Indonesia Power Nomor 176.K/020/IP/2016	Education and Training: – Strategy Formulation with Balanced Scorecard, Workshop Risk Management Senior Leader Capacity Building – Role of KPK (Corruption Eradication Committee), PPATK (Center of Financial Transactions Reporting and Analysis), and Corporation in Preventing and Eradicating TPPU – ECITB Health and Safety Passport Appointment Basis: Decree of the Board of Directors of PT Indonesia Power Number 176.K/020/IP/2016

Pedoman Kerja Sekretaris Perusahaan

Dalam menjalankan fungsinya, Sekretaris Perusahaan telah memiliki pedoman kerja yang dituangkan dalam *Board Manual* dan Surat Pengangkatan Sekretaris Perusahaan. Pedoman tersebut mencakup tugas pokok organisasi Sekretariat Perusahaan, uraian tugas Sekretaris Perusahaan, dan Pedoman Komunikasi Perusahaan serta hal lain yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas fungsi Sekretaris Perusahaan. Dengan adanya Pedoman Kerja ini, diharapkan pelaksanaan tugas Sekretaris Perusahaan akan lebih terarah dan efektif serta dapat digunakan sebagai salah satu alat penilaian kinerja Sekretaris Perusahaan.

Working Guidelines of the Corporate Secretary

In accomplishing his tasks, the Corporate Secretary has already Working Guidelines in Board Manual and a Letter of Appointment as the Corporate Secretary. The guidelines cover the main tasks of the organization of the Corporate Secretariat, the job description of the Corporate Secretary, and Guidelines of Company Communication and other matters related to the tasks implementation of the Corporate Secretary function. With these Working Guidelines, it is expected that the implementation of the tasks of the Corporate Secretary will be more oriented and effective and may be used as one of the tools in evaluating the performance of the Corporate Secretary.

Tugas dan Tanggung Jawab Sekretaris Perusahaan

Tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 176.K/020/IP/2016 adalah memastikan terkelolanya tata hubungan dengan pengurus Perusahaan, lembaga terkait dan seluruh *stakeholder* Perusahaan dalam rangka terpenuhinya kewajiban dan tanggung jawab Perusahaan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan ketentuan/peraturan lainnya. Tugas pokok Sekretaris Perusahaan, diantaranya:

1. Menyusun dan mengendalikan program kerja dan anggaran untuk RJPP dan RKAP
2. Menyusun dan mengkaji kebijakan, strategi, proses bisnis dan prosedur

Tasks and Responsibilities of the Corporate Secretary

The tasks and responsibilities of the Corporate Secretary based on the Decree of the Board of Directors Number 36.K/020/IP/2015 dated 30 January 2015 are to ensure that the relations with the staff of the Company, related institutions, and all stakeholders of the Company are well managed in order to fulfil the obligations and responsibilities of the Company in accordance with the provisions of articles of association and other provisions/ regulations. The main tasks of the Corporate Secretary include:

1. Drafting and controlling work program and budget for the Long Term Corporate Plan (RJPP) and Work Plan and Budget (RKAP)
2. Drafting and reviewing business policies, strategies, processes, and procedures

SEKRETARIS PERUSAHAAN
Corporate Secretary

3. Menyusun usulan dan perencanaan pengadaan Sekretariat Perusahaan
4. Menyusun kajian risiko dan mengelola mitigasinya atas kegiatan di lingkungan Sekretariat Perusahaan
5. Menyusun dan mengendalikan kebijakan, sasaran dan strategi komunikasi
6. Mengendalikan Roadmap dan kebijakan tata kelola/GCG
7. Mengendalikan sasaran dan strategi *corporate social responsibility*
8. Mengendalikan kegiatan *corporate social responsibility* Perusahaan
9. Mengelola kegiatan kesekretariatan
10. Mengelola kegiatan penyediaan fasilitas
11. Mengelola kegiatan pengamanan korporat
12. Mengelola dan mengendalikan keterbukaan informasi publik
13. Mengelola informasi korporat, termasuk membuat Laporan Tahunan dan Laporan Manajemen
14. Menyusun dan mengendalikan agenda dan pelaksanaan rapat Perusahaan
15. Menyusun laporan rutin dan non rutin.

3. Drafting procurement proposals and planning of the Corporate Secretariat
4. Drafting risk assessment and managing its mitigation for the activities within the Corporate Secretariat
5. Drafting and controlling communication policies, targets, and strategies
6. Controlling Roadmap and governance /GCG policies
7. Controlling targets and strategies of corporate social responsibility
8. Controlling corporate social responsibility activities of the Company
9. Managing secretarial activities
10. Managing the provision of facilities
11. Managing corporate security activities
12. Managing and controlling public information transparency
13. Managing corporate information, including drafting Annual Report and Management Report
14. Drafting and controlling the agenda and meetings of the Company
15. Drafting periodic and non-periodic reports.

Pelaksanaan Tugas Sekretaris Perusahaan Tahun 2016

Sebagai wujud kepatuhan Indonesia Power terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, dilakukan dengan penyusunan dan penyerahan laporan berkala kepada regulator, PT PLN (Persero) selaku pemegang saham dan pihak berkepentingan lainnya. Laporan berkala yang telah disampaikan Sekretaris Perusahaan selama tahun 2016 yaitu Laporan Manajemen, Laporan Kinerja Bulanan, dan Laporan Kinerja Triwulanan. Selama tahun 2016, Sekretaris Perusahaan telah melakukan kegiatan dan menyampaikan laporan dalam bentuk Laporan Sekretaris Perusahaan. Laporan tersebut memuat realiasi program kerja Sekretariat Perusahaan pada tahun 2016 mencakup implementasi GCG, program CSR, *Stakeholder Relations*, Pelaksanaan RUPS serta mendokumentasikan rapat internal Direksi dan Dewan Komisaris.

Implementation of the Tasks of the Corporate Secretary in 2016

As a form of compliance of Indonesia Power with the prevailing laws and regulations, periodic reports are drafted and submitted to the regulator, PT PLN (Persero), as a stockholder, and other interested parties. Periodic reports submitted to the Corporate Secretary in 2016 are Management report, Monthly Performance Report, and Quarterly Performance Report. Within 2016, the Corporate Secretary has conducted various activities and reported them in form of Report of the Corporate Secretary. Those reports contain the realization of the work programs of the Corporate Secretariat in 2016, including the implementation of GCG, CSR program, Stakeholder Relations, Implementation of General Meeting of Shareholders, and documenting internal meetings between Board of Directors and Board of Commissioners.

Program Pengembangan Kompetensi Sekretaris Perusahaan Tahun 2016

Sepanjang tahun 2016, Sekretaris Perusahaan telah mengikuti kegiatan pelatihan, di antaranya sebagai berikut:

Competence Development Program of the Corporate Secretary in 2016

Within 2016, the Corporate Secretary has participated in training activities, including as follows:

Tabel Pengembangan Kompetensi Sekretaris Perusahaan Tahun 2016
Table: Competence Development Program of the Corporate Secretary in 2016

Tanggal Date	Nama Pelatihan	Training	Tempat/Penyelenggara Venue
2-3 Mei 2016 May 2-3, 2016	BOD & BOC Executive Program I	BOD & BOC Executive Program I	KNKG
26-May-16 May 26, 2016	BOD & BOC Executive Program II	BOD & BOC Executive Program II	IICG

INTERNAL AUDIT

Internal Audit

Internal Audit Perusahaan memiliki peran yang sangat besar dalam menunjang sistem pengendalian Perusahaan. Internal Audit melaksanakan fungsi *assurance* dan konsultasi dalam pengelolaan Perusahaan yang dapat mendukung kinerja setiap unit yang ada pada perusahaan. Selain itu, Internal Audit didukung dengan komposisi SDM yang memadai, memiliki kompetensi dan sertifikasi terkait audit, *fraud, governance* dan manajemen risiko.

Company's Internal Audit has an important role in supporting the control system of the Company. Internal Audit carries out assurance and consultation functions in managing the Company, that may support the unit's performance in the company. In addition, Internal Audit is supported by adequate Human Resources composition, with competency and certification related to audit, fraud, governance, and risk management.

Pedoman Audit Internal (*Internal Audit Charter*)

Guna mendukung pelaksanaan tugasnya, Satuan Audit Internal (SAI) Indonesia Power telah dilengkapi dengan Piagam Audit Internal (*Internal Audit Charter*) sebagai acuan dalam menjalankan fungsi audit internal dan pengawasan. Piagam Audit Internal ditetapkan berdasarkan Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris dan terakhir diubah berdasarkan Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris Nomor 134.K/010/IP/2014 tanggal 20 Agustus 2014 tentang Piagam Audit Internal. Piagam Audit Internal merupakan pedoman standar yang memuat ukuran minimal tentang fungsi Audit Internal serta aspek-aspek yang berkaitan dengan pelaksanaan Audit Internal. Piagam Audit Internal ini ditujukan pula untuk terciptanya kesamaan pemahaman dan landasan mengenai tingkat pemeliharaan kepentingan dan komitmen dari semua pihak yang terkait dengan Indonesia Power.

Di samping mengacu pada Piagam Audit Internal, SAI berpedoman pada Program Kerja Audit Tahunan (PKAT) dan penyempurnaan perangkat operasional melalui aplikasi *Risk Based Audit* (ProRBA) yang akan diintegrasikan dengan penerapan manajemen risiko. Piagam Audit Internal telah dikaji dan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku dengan mempertimbangkan *Standar Profesional Audit Intern* (SPAI), yang antara lain mengatur kewenangan Fungsi Audit Internal untuk mendapatkan akses terhadap semua catatan, personil dan aset perusahaan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugasnya sebagai berikut:

Internal Audit Charter

In order to support the duties, Internal Audit Unit (SAI) of Indonesia Power is equipped with Internal Audit Charter as reference in carrying out the function of internal audit and supervision. Internal Audit Charter is set forth based on the Joint Decree of Directors and Board of Commissioners, and amended based on the Joint Decree of Directors and Board of Commissioners Number 134.K/010/IP/2014 dated 20 August 2014 on Internal Audit Charter. Internal Audit Charter is a standard guideline that contains at least the functions of Internal Audit and aspects related to the Internal Audit implementation. Internal Audit Charter is aimed to create mutual understanding and foundation to maintain the level of interests and commitments from every party related to Indonesia Power.

In addition to the Internal Audit Charter, Internal Audit is guided by Annual Audit Plan (PKAT) and refinement of operational tools through the application of Risk Based Audit (ProRBA) that will be integrated with risk management implementation. Internal Audit Charter has been reviewed and adjusted in accordance with prevailing provisions, taking into account the Standard for Professional Practice (SPAI), which among others regulate the authority of Internal Audit Function to gain access to all Company's notes, personnel, and assets needed in performing its duties, as follows:

1. Ruang lingkup Fungsi Audit Internal
2. Fungsi dan tujuan
3. Tanggung jawab
4. Etika dan norma pemeriksaan serta independensi
5. Ruang lingkup audit internal
6. Hubungan dengan komite audit dan auditor eksternal
7. Pelaporan hasil pemeriksaan.

Struktur Organisasi Audit Internal

Struktur Organisasi Satuan Audit Internal (SAI) ditetapkan dalam Keputusan Direksi Nomor 239.K/010/IP/2016 tentang organisasi PT Indonesia Power. Fungsi Audit Internal Indonesia Power dilakukan oleh Satuan Audit Internal (SAI) yang diketuai oleh kepala SAI, dengan struktur organisasi sebagai berikut:

1. Scope of Internal Audit Function
2. Functions and objectives
3. Responsibility
4. Ethics and norms of audit as well as independence
5. Scope of internal audit
6. Audit committee's relationship with external auditor
7. Audit report.

Internal Audit Organizational Structure

Organization Structure of Internal Auditor is set forth in the Directors' Decree Number 239.K/010/IP/2016. Internal Audit Function of Indonesia Power is carried out by the Internal Audit Unit (SAI) that is led by the Head of SAI, with the following organization structure:

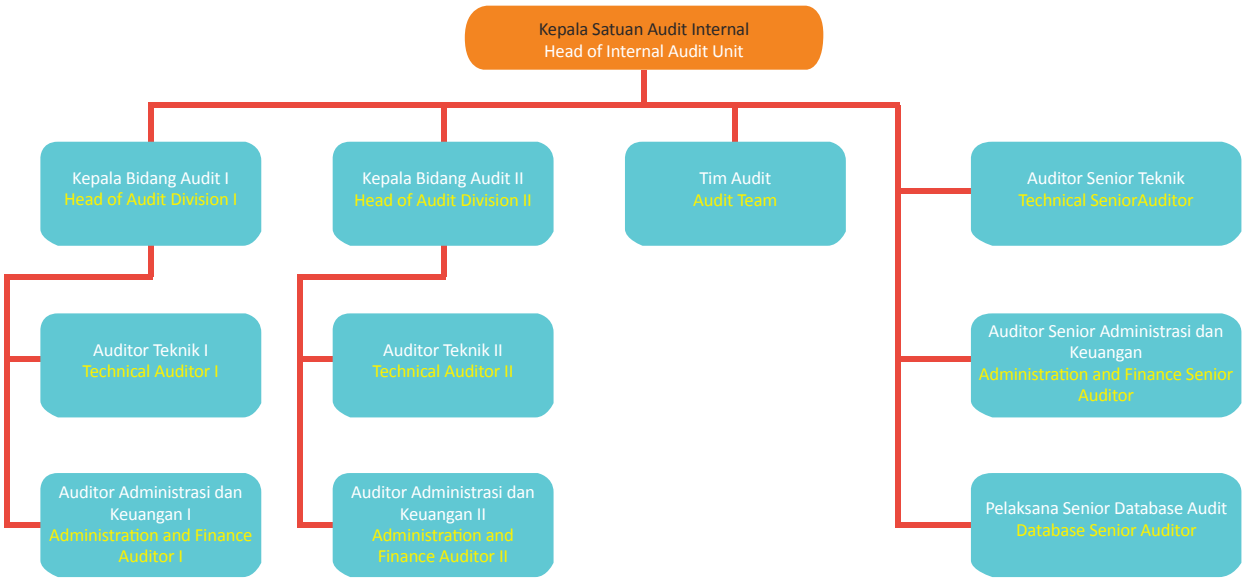

INTERNAL AUDIT
Internal Audit

Kedudukan Audit Internal Dalam Struktur Organisasi Perusahaan

Berdasarkan Struktur Organisasi yang berlaku dan telah disahkan oleh Direksi melalui Surat Keputusan Direksi Nomor 239.K/010/IP/2016 tanggal 22 Desember 2016 perihal Struktur Organisasi Indonesia Power, Satuan Audit Internal berada langsung di bawah Direktur Utama.

Internal Audit Position in Company's Organization Chart

Based on the Organization Structure applied and ratified by the Directors through Directors' Decree Number 219.K/010/IP/2014 dated 22 December 2016 on Indonesia Power Organizational Structure, Internal Audit Unit reports directly to the President Director.

Pihak yang Mengangkat dan Memberhentikan Ketua Audit Internal

Satuan Audit Internal merupakan organisasi audit internal yang bersifat independen dan obyektif, yang dipimpin oleh Kepala Satuan Audit Internal yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama dengan persetujuan Dewan Komisaris. Pengangkatan Ketua Audit Internal berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 36.K/020/IP/2015 tanggal 30 Januari 2015. Ketua Audit Internal bertanggung jawab kepada Direktur Utama dan dapat berkomunikasi langsung dengan Dewan Komisaris untuk menginformasikan berbagai hal yang berkaitan dengan hasil audit.

Parties Appointing and Dismissing Head of Internal Audit

Internal Audit Unit is an independent and objective organization for internal audit, led by Head of Internal Audit Unit who is appointed and dismissed by President Director with approval from Board of Commissioners. Appointment of Head of Internal Audit based on the Directors' Decree Number 36.K/020/IP/2015 dated 30 January 2015. Head of Internal Audit reports directly to the President Director, and may communicate directly with Board of Commissioners to inform relevant matters on the audit result.

Profil Kepala Satuan Audit Internal

Head of Internal Audit Unit Profile

Rachmad Handoko
Kepala Satuan Audit Internal
Head of Internal Audit Unit

Lahir di Surabaya, 19 Juni 1969
Domisili: Bekasi

Riwayat Pendidikan: Lulusan Sarjana Elektro/ Listrik, Institut Teknologi Sepuluh November tahun 1993.

Riwayat Pekerjaan: Memulai karir sebagai Enjinir Listrik tahun 2004 – 2006; Ahli Senior Manajemen Perubahan tahun 2006-2009; Ahli Senior Manajemen Proyek Tugas Karya Ke PT CDB tahun 2009-2015; Kepala Satuan Audit Internal PT Indonesia Power tahun 2015 – sekarang

Pelatihan:
- Audit Intern Tingkat II
- IHT Governance, Risk and Compliance
- Audit Internal Sistem Manajemen

Dasar Pengangkatan:
Surat Keputusan Direksi PT Indonesia Power No 36.K/020/IP/2015 tanggal 30 Januari 2015

Born in Surabaya, 19 June 1969
Domicile: Bekasi

Education Background: Bachelor of Electrical Engineering, Institut Teknologi Sepuluh November in 1993.

Work Experience: Electricity Engineer in 2004-2006; Senior Expert in Change Management in 2006-2009; Senior Expert in Project Management, Assigned to PT CDB in 2009-2015; Head of Internal Audit Unit PT Indonesia Power, 2015-now

Training:
- Internal Audit Level II
- IHT Governance, Risk and Compliance
- Management System of Internal Audit

Appointment Basis:
Decree of the Board of Directors of PT Indonesia Power Number 36.K/020/IP/2015 dated 30 January 2015

Komposisi Personil Unit Audit Internal

Jumlah personel SAI Indonesia Power tahun 2016 adalah sebanyak 23 orang, yang terdiri dari 1 orang Kepala Satuan, 2 orang Kepala Bidang, 3 orang Auditor Senior, 16 orang Auditor, dan 1 orang Pelaksana Senior. Dari formasi tersebut, saat ini telah terisi 20 orang pegawai atau setara dengan 87%. Sebanyak 8 auditor telah bersertifikasi QIA (*Qualified Internal Auditor*) dan sebanyak 5 auditor bersertifikasi CFE (*Certified Fraud Examiner*).

Composition of Internal Audit Unit

The SAI of Indonesia Power in 2016 has 23 personnel, which consists of 1 Head Unit, 2 Head Division, 3 Senior Auditor, 16 Auditor, and 1 Senior Manager. In this formation, there is 20 employees, or equivalent to 87%. There are 8 auditors with QIA (Qualified Internal Auditor) certification, and 5 auditors with CFE (Certified Fraud Examiner) certification.

Sertifikasi Profesi Audit Internal

Internal Audit Professional Certification

No.	Nama Name	Sertifikasi	Certification
1.	Rachmad Handoko	Audit Intern Tingkat Dasar 2	Basic Internal Audit Level 2
2.	Roedi Rachmanto	Audit Intern Tingkat Manajerial (QIA) Certified Fraud Examiners (CFE)	Qualified Internal Auditor (QIA) Certified Fraud Examiner (CFE)
3.	Windi Winarso	Audit Intern Tingkat Manajerial (QIA)	Qualified Internal Auditor (QIA)
4.	Mangihut Samosir	Audit Intern Tingkat Manajerial (QIA) Certified Fraud Examiners (CFE)	Qualified Internal Auditor (QIA) Certified Fraud Examiner (CFE)
5.	Prihanto Budi Wismoyo	Audit Intern Tingkat Dasar 1	Basic Internal Audit Level 1
6.	Abdillah	Audit Intern Tingkat Manajerial (QIA) Certified Fraud Examiners (CFE)	Qualified Internal Auditor (QIA) Certified Fraud Examiner (CFE)
7.	Syarif	Audit Intern Tingkat Lanjutan 2 Certified Fraud Examiners (CFE)	Advanced Internal Audit Level 2 Certified Fraud Examiner (CFE)
8.	Kuswara	Audit Intern Tingkat Manajerial (QIA)	Qualified Internal Auditor (QIA)
9.	Ary Rachmat Slamet	Audit Intern Tingkat Dasar 1	Basic Internal Audit Level 1
10.	Rusdiansyah	Audit Intern Tingkat Lanjutan 1	Advanced Internal Audit Level 1
11.	Bismo Siswandanu	Audit Intern Tingkat Dasar 1	Basic Internal Audit Level 1
12.	Suwarna	Audit Intern Tingkat Lanjutan 1	Advanced Internal Audit Level 1
13.	M. Reza Pahlevi	Audit Intern Tingkat Lanjutan 1	Advanced Internal Audit Level 1
14.	I Gusti Gede Putra Winata	Audit Intern Tingkat Dasar 1	Basic Internal Audit Level 1
15.	Agus Yuwono	Audit Intern Tingkat Dasar 2	Basic Internal Audit Level 2
16.	Gunawan Setyo Budi	Audit Intern Tingkat Manajerial (QIA) Certified Fraud Examiners (CFE)	Qualified Internal Auditor (QIA) Certified Fraud Examiner (CFE)
17.	Riyadi	Audit Intern Tingkat Manajerial (QIA)	Qualified Internal Auditor (QIA)
18.	Adek Hendriana	Audit Intern Tingkat Lanjutan 2	Advanced Internal Audit Level 2
19	Muarief Edhi Pambudi	Audit Intern Tingkat Lanjutan 1	Advanced Internal Audit Level 1
20.	Yudi Mulyadi	Audit Intern Tingkat Manajerial (QIA)	Qualified Internal Auditor (QIA)

INTERNAL AUDIT
Internal Audit

Tugas dan Tanggung Jawab Audit Internal

Sesuai dengan Piagam Audit Internal, uraian tugas Audit Internal adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan fungsi pengawasan dan audit internal Perusahaan untuk memastikan terlaksananya kepatuhan pada pelaksanaan *Standard Operation Procedure* (SOP).
2. Meningkatkan kecermatan kualitas kerja operasi dan pemelihaaraan serta terlaksananya tertib administrasi, tertib anggaran, dan kepatuhan untuk mewujudkan tercapainya cost *efficiency* dan *cost effectiveness*.
3. Memberikan jasa konsultasi kepada pemilik proses bisnis atas permintaan pemilik proses bisnis atau atas inisiatif Satuan Audit Internal dalam rangka mengidentifikasi kecukupan pengendalian yang akan diterapkan untuk menjamin tercapainya sasaran Perusahaan. Dalam melaksanakan peran "*consulting*" tersebut Auditor Internal melaporkan kepada Kepala Satuan Audit Internal sebelum dan sesudah pelaksanaan pekerjaan. Terkait hal ini, tugas Auditor Internal hanya memberikan jasa konsultasi sesuai dengan standar profesi, sedangkan tanggung jawab atas pelaksanaan hasil konsultasi tetap berada pada pemilik proses bisnis dan tidak mengurangi wewenang Satuan Audit Internal untuk melaksanakan fungsi tugas *assurance*-nya. Untuk menjamin obyektivitas atas hasil audit, maka Auditor tidak diperbolehkan melaksanakan audit terhadap kegiatan yang merupakan hasil konsultasinya.

Adapun dalam pelaksanaannya auditor internal bertanggung jawab untuk:

1. Melakukan penilaian atas kecukupan dan efektivitas pengendalian internal pada masing-masing proses bisnis dalam Perusahaan.
2. Mengembangkan rencana audit tahunan yang dituangkan dalam Program Kerja Audit Tahunan (PKAT) yang fleksibel dengan menggunakan metodologi pendekatan risiko.
3. Melaksanakan Program Kerja Audit Tahunan (PKAT), termasuk segala tugas-tugas lain yang diminta oleh Direktur Utama dan Komite Audit Dewan Komisaris melalui Direktur Utama.

Internal Audit's Duties and Responsibilities

In accordance with Internal Audit Charter, the duties of Internal Audit are described as follows:

1. Carry out supervisory function and internal audit of the Company to ensure the compliance with Standard Operation Procedure (SOP).

2. Improve the quality details of operations and maintenance, and the implementation of administration, budget, and compliance to realize cost efficiency and cost effectiveness.

3. Give consulting service to business process owner on request by the business process owner, or by initiatives from Internal Audit Unit in order to identify the adequacy of control that will be implemented to ensure the achievement of Company's target. In performing the 'consulting' role, Internal Auditor reports to Head of Internal Audit Unit before and after the audit. Related to this, Internal Auditor gives consultation services in line with the professional standards, and the responsibility for the consultation result is on the business process owner, without prejudice to the Internal Audit Unit's right to carry out its assurance function. To ensure the objectivity of audit result, the Auditor cannot perform an audit on the activity that was the result of his/her consultation.

In the audit, the internal auditor is responsible for:

1. Assessing the adequacy and effectivity of internal control one each business process in the Company.

2. Developing annual audit plan which is set in the Annual Audit Plan (PKAT) that is flexible and using a risk approach methodology.

3. Performing Annual Audit Plan (PKAT), including other duties requested by the President Director and Board of Commissioners' Audit Committee through President Director.

4. Secara berkesinambungan mengembangkan kompetensi auditor dengan pengetahuan, keahlian, dan pengalaman yang cukup serta sertifikasi profesional.
5. Berperan aktif dalam pengawasan mekanisme pelaksanaan *Code of Conduct* serta pencegahan tindakan kecurangan.
6. Melakukan audit investigasi terhadap indikasi kecurangan di dalam organisasi dan melaporkan hasilnya kepada Direktur Utama.
7. Menyampaikan laporan kegiatan kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Komite Audit Dewan Komisaris mengenai rangkuman kegiatan audit.
8. Melaksanakan fungsi jasa konsultasi sedemikian rupa sehingga tidak mengurangi independensi dan obyektivitas Satuan Audit Internal dalam melakukan kegiatan memberikan keyakinan yang memadai (*reasonable assurance*) terhadap kegiatan-kegiatan yang menjadi obyek konsultasi.
9. Melaporkan isu-isu penting yang berhubungan dengan proses pengendalian kegiatan Perusahaan, unit usaha dan afiliasinya.

Pengembangan Kompetensi Audit Internal

Indonesia Power senantiasa melakukan program peningkatan kompetensi unit Internal Audit dengan melakukan program pengembangan kompetensi auditor secara sistematis dan berjenjang. Secara umum kebijakan pengembangan kompetensi pada tahun 2016 ditempuh dengan 2 (dua) cara, yaitu: (1) Pengembangan kompetensi pada lembaga eksternal; dan (2) Pengembangan kompetensi secara internal. Pengembangan kompetensi pada lembaga eksternal dilakukan secara formal dalam bentuk kursus atau seminar/ lokakarya yang berkaitan dengan masalah audit baik yang dilaksanakan oleh Perseroan maupun lembaga pendidikan eksternal lainnya. Berikut pengembangan kompetensi Audit Internal tahun 2016:

4. Simultaneously developing auditor's competence with adequate knowledge, skills, and experience, with professional certification.
5. Actively supervising the implementation mechanism of Code of Conduct, and preventing fraud.
6. Performing investigation audit on the alleged fraud in the organization, and reporting the result to President Director.
7. Reporting the activity to President Director, with a copy to the Board of Commissioners' Audit Committee on the summary of the audit.
8. Performing consulting services in a way that does not lessen the independence and objectivity of Internal Audit Unit by conducting an activity that gives reasonable assurance on activities that become the consultation objects.
9. Reporting important issues related to activity control process of the Company, business unit, and affiliations.

Internal Audit Competency Development

Indonesia Power continuously conducts competence development for Internal Audit Unit by conducting auditor competency development systematically and gradually. In general, the competency development policy in 2016 is performed through 2 (two) ways, i.e.: (1) Competence development on the external institution; and (2) Competence development internally. Competence development on the external institution is conducted in the form of courses or seminar/workshop, related to the audit problems, both by the Company or other external education institution. The following is Internal Audit competence development in 2016:

INTERNAL AUDIT
Internal Audit

Tabel Pelatihan Satuan Audit Internal Tahun 2016
Table: Internal Audit Unit Training in 2016

Nama Peserta Name	Nama Diklat Training	Nama Lembaga Institution	Tanggal Date	Lokasi Location
Rahcmad Handoko	*Workshop* "Penguatan Internal Control dan Manajemen Risiko untuk Mencapai Sasaran Perusahaan" Workshop of "Internal Control Strengthening and Risk Management to Achieve Company's Target"	Indonesia Power	30 Maret - 1 April 2016 March 30 - April 1, 2016	Perak Learning Center, Surabaya
Abdillah				
Syarif				
Kuswara				
Suwarna				
Rusdiansyah				
Romy Nurawan				
M. Reza Pahlevi				
M. Huri Amri				
Harnawi				
Gunawan Setyo Budi				
Riyadi				
Adek Hendriana				
Agus Yuwono				
Salman N. B.				
Yudi Mulyadi				
Adji Sulastya				
Ervina H.				

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Audit Internal Tahun 2016

Selama tahun 2016, Satuan Internal Audit Indonesia Power telah melaksanakan berbagai kegiatan sesuai dengan Program Kerja Audit Tahunan Perusahaan yang disusun berdasarkan analisa risiko yang mempengaruhi kelangsungan operasional Perusahaan dan menitikberatkan pada sistem keandalan unit dan sarana pendukung lainnya yang memiliki risiko signifikan. Program kerja audit tersebut disampaikan kepada Direktur Utama dan dikaji oleh Komite Audit. Berikut laporan hasil pelaksanaan Audit Internal tahun 2016:

Internal Audit Activity Report in 2016

Throughout 2016, Internal Audit Unit of Indonesia Power has organized numerous activities, in line with the Company's Annual Audit Work Program, which was compiled based on the risk analysis that influences the Company's operation sustainability, and emphasizes on the unit reliability system and other facilities with significant risks. Audit work program is submitted to the President Director and reviewed by the Audit Committee. The following is the report for Internal Audit Activity in 2016:

Audit Operasional Unit
Unit Operations Audit

No	Unit	Laporan Hasil Audit Audit Result Report	
		Nomor Number	Tanggal Date
Semester I Tahun 2016 First Half Year in 2016			
1	UP | GU Perak Grati	019/LHA/UPPGT/SMT-I/2016	5/20/2016
2	UP | GU Bali	016/LHA/UPJPBLI/SMT-I/2016	5/4/2016
3	UP | GU Semarang	017/LHA/UPSMG/SMT-I/2016	5/4/2016
4	UJP | GSU Banten 3 Lontar	012/LHA/UJPBLT/2016	4/8/2016
5	UJP | GSU Banten 1 Suralaya	003/LHA/UJPBSR/SMT-I/2016	2/26/2016
6	UJP | GSU Banten 2 Labuan	013/LHA/UJPBLB/2016	4/8/2016
7	UJP | GSU Jabar 2 Pelabuhan Ratu	002/LHA/UJP-JPR/SMT-I/2016	2/19/2016
8	UJP | GSU Pangkalan Susu	01/LHA/UJPPNS/SMT-I/2016	2/18/2016
9	UP | GU Suralaya	020/LHA/UPSLA/SMT-I/2016	6/3/2016
10	UJH | MSU	010/LHA/UJH/SMT-I/2016	3/23/2016
11	UPJP | GGSU Priok	009/LHA/UPJPTGP/SMT-I/2016	3/22/2016
12	UJP | GSU Adipala	004/LHA/UJPADP/SMT-I/2016	2/26/2016
13	UP | GU Mrica	015/LHA/UPMRC/SM-I/2016	4/22/2016
14	UP | GU Saguling	014/LHA/UPSGL/SMT-II&I/2016	4/23/2016
15	UJP | GSU Jeranjang	031/LHA/UJPJRJ/2016	10/21/2016
16	UJP | GSU Cilegon	023/LHA/UJP-CLG/SMT-I/2016	8/31/2016
Semester II Tahun 2016 Second Half Year in 2016			
1	UPJP | GGSU Kamojang	025/LHA/UPJPKMJ/SMT-II/2016	9/2/2016
2	UP | GU Bali	033/LHA/UPBLI/SMT-2/2016	10/21/2016
3	UP | GU Semarang	035/LHA/UPSMG/SMT-II/2016	11/11/2016
4	UP | GU Perak Grati	036/LHA/UPPGT/SMT-II/2016	11/25/2016
5	UP | GU Suralaya	039/LHA/UPSLA/SMT-II/2016	12/9/2016
6	UJH | MSU	029/LHA/UJH/SMT-II/2016	9/29/2016
7	UPJP | GGSU Priok	030/LHA/UPJPTGP/SMT-II/2016	9/30/2016
8	PLTP | GPP Ulumbu	034/LHA/ULB/SMT-II/2016	10/11/2016
9	UJP | GSU Barru	038/LHA/UJPBRU/2016	12/2/2016

INTERNAL AUDIT
Internal Audit

Audit Operasional KP
KP Operations Audit

No	Departemen/Satuan/Divisi/Bidang Department/Unit/Division/Sector	Laporan Hasil Audit Audit Result Report	
		Nomor Number	Tanggal Date
Semester I Tahun 2016 First Half Year in 2016			
1	Direktorat Produksi Directorate of Production	005/LHA/IP-DITPRO/2016	3/11/2016
2	Direktorat Pengembangan dan Niaga Directorate of Development and Commerce	001/LHA/IP-AGA/2016	3/11/2016
3	Satuan Supply Chain Management Supply Chain Management Unit	006/LHA/IP-SCM/2016	3/8/2016
4	Departmen Sistem Informasi Information System Department	008/LHA/IP-DEPSIS/2016	3/10/2016
Semester II Tahun 2016 Second Half Year in 2016			
1	INVESTASI Investment	027/LHA/IP-BIDMKK/2016	9/16/2016
2	*Long Term Corporate Plan*	028/LHP/IP-PKR/2016	9/16/2016
3	IP-IMS	027/LHA/IP-BIDMKK/2016	9/16/2016

Hasil Temuan Audit dan Tindaklanjutnya

Audit dilaksanakan untuk mengevaluasi efektivitas pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Perusahaan, Manajemen Risiko, dan proses Tata Kelola Perusahaan serta melakukan penilaian efisiensi dan efektivitas atas seluruh aktivitas Perusahaan. Laporan hasil audit yang dilaksanakan oleh Internal Audit disampaikan kepada Direktur Utama yang selanjutnya rekomendasi dari hasil audit tersebut diperhatikan dan menjadi referensi dalam pelaksanaan tindak lanjutnya. Laporan hasil audit pada saat yang bersamaan juga disampaikan kepada Komite Audit.

Jumlah temuan audit keseluruhan tahun 2016 sebanyak 153 temuan, dengan status selesai ditindaklanjuti sebanyak 109 temuan dan belum selesai ditindaklanjuti sebanyak 44 temuan baik di Unit dan Kantor Pusat. Berikut tindak lanjut temuan hasil audit tahun 2016:

Audit's Findings and the Follow-Up

The audit is performed to evaluate the effectivity of Company's Internal Control System, Risk Management, and Corporate Governance process, and to assess the efficiency and effectivity of all Company's activities. Internal Audit submits audit result report to the President Director, and the recommendation of the audit result is considered and became references on the follow-up. Audit result report is also submitted to the Audit Committee.

Audit findings in 2016 amounted to 153 findings, with the finished status of follow-up at 109 findings, follow-up has not finished yet at 44 findings, both in Unit and Head Office. The following is the follow up for audit findings in 2016:

Tabel Tindak Lanjut Temuan atas Hasil Audit Tahun 2016
Table: Follow-Up on Findings of Audit Result 2016

Kantor Pusat/Unit Head Office/Unit	Tahun 2016 2016					
	Semester I Semester I			Semester II Semester II		
	Jumlah Total	Selesai Finished	Belum Selesai Not Finished	Jumlah Total	Selesai Finished	Belum Selesai Not Finished
Kantor Pusat Head Office	**19**	**12**	**7**	**14**	**5**	**9**
Direktorat Pengembangan dan Niaga Directorate of Development and Commerce	3	3	0			
Direktorat Operasi 1 dan 2 Directorate of Operations 1 and 2	5	3	2			
Direktorat Keuangan Financial Directorate	-	-	-	4	0	4
Direktorat Sumber Daya Manusia Directorate of Human Resources	-	-	-			
Sekretariat Perusahaan Corporate Secretariat	-	-	-			
Satuan Supply Chain Management Supply Chain Management Unit	5	0	5			
Satuan Manajemen Risiko, Mutu, dan Kinerja Risk Management, Quality, and Performance Unit	-	-	-	10	5	5
Departemen Hukum Korporat Corporate Law Department	-	-	-			
Departemen Sistem Informasi Information System Department	6	6	0			
Unit	**31**	**31**	**0**	**40**	**18**	**22**
UP | GU Suralaya	4	4	0	4	0	4
UPJP | GGSU Priok	4	4	0	5	4	1
UP | GU Semarang	4	4	0	5	0	5
UP | GU Perak Grati	5	5	0	4	0	4
UPJP | GGSU Kamojang	-	-	-	5	5	0
UP | GU Saguling	4	4	0			
UP | GU Mrica	5	5	0			
UP | GU Bali	2	2	0	4	4	0
UJH | MSU	3	3	0	5	5	0
PLTP | GPP Ulumbu				8	0	8
UJP	**44**	**43**	**1**	**5**	**0**	**5**
UJP | GU Banten 1 Suralaya	3	3	0			
UJP | GSU Banten 2 Labuan	3	3	0			

INTERNAL AUDIT
Internal Audit

Kantor Pusat/Unit Head Office/Unit	Tahun 2016 2016					
	Semester I Semester I			Semester II Semester II		
	Jumlah Total	Selesai Finished	Belum Selesai Not Finished	Jumlah Total	Selesai Finished	Belum Selesai Not Finished
UJP	**44**	**43**	**1**	**5**	**0**	**5**
UJP | GSU Banten 3 Lontar	5	5	0			
UJP | GSU Jawa Barat 2 Pelabuhan Ratu	4	4	0			
UJP | GSU Jawa Tengah 2 Adipala	6	6	0			
UJP | GSU Pangkalan Susu	6	6	0			
UJP | GSU Cilegon	11	10	1			
UJP | GSU Jeranjang	6	6	0			
UJP | GSU Barru				5	0	5
Jumlah Total	**94**	**86**	**8**	**59**	**23**	**36**

Penyimpangan Internal

Pada tahun 2016 tidak terdapat penyimpangan yang bersifat kecurangan (*fraud*) yang dilakukan oleh Pegawai Indonesia Power.

Internal Fraud

In 2016, there is no fraud conducted by Employee of Indonesia Power.

Penyerahan Laporan Berkala

Setiap Laporan Hasil Audit disampaikan langsung kepada manajemen dan pihak yang diaudit (*auditee*) dilengkapi dengan saran tindakan perbaikan, termasuk sanksi apabila diperlukan. Kemajuan tindakan harus dilaporkan oleh pihak yang diaudit kepada SAI setiap bulan untuk memastikan agar setiap pihak yang diaudit selalu berupaya melakukan perbaikan dan penyempurnaan. Laporan Manajemen SAI dibuat setiap triwulan, semesteran, dan tahunan yang disampaikan kepada pihak-pihak yang terkait sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan aktivitas audit internal di Perusahaan. Penyampaian Laporan SAI kepada Komite Audit dilakukan setiap selesai Laporan Hasil Audit, semesteran, dan tahunan sesuai dengan kebutuhan.

Submission of Regular Report

Every Audit Report is submitted directly to the management and the auditee, completed by the suggestion for refinement, and sanctions if deemed necessary. The progress of action has to be reported by the auditee to the SAI monthly to ensure that the auditee always strives for improvement and refinement. SAI Management Report is compiled quarterly, twice in a year, and annually, which shall be submitted to related parties as a form of responsibility for the internal audit activity in the Company. SAI Report to the Audit Committee is submitted every time the Audit Report is finished, twice in a year, and annually, as required.

SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Internal Control

Sistem pengendalian internal merupakan salah satu upaya untuk memastikan pelaksanaan mekanisme *check and balances* yang ada di Perusahaan. Oleh karena itu, penerapan sistem pengendalian internal di Perusahaan turut melibatkan Dewan Komisaris, Direksi, dan seluruh pegawai dalam Perusahaan mengacu pada prinsip-prinsip *Internal Control-Integrated Framework* yang diterbitkan oleh The *Committee of Sponsoring Organization* (COSO) *of the Treadway Commission*.

Internal control is one of the efforts to ensure the check and balances mechanism implementation in the Company. Therefore, the internal control implementation in the Company involves Board of Commissioners, Directors, and every employee in the Company, and refers to the Internal Control-Integrated Framework principles published by the Committee of Sponsoring Organization (COSO) of the Treadway Commission.

Pengendalian Intern atas Kegiatan Operasional dan Pelaporan Keuangan

Indonesia Power melakukan evaluasi atau penilaian atas efektivitas pengendalian internal pada tingkat korporat maupun tingkat operasional/aktivitas dengan menerapkan dan memelihara sistem pengendalian internal dan prosedur pelaporan keuangan yang memadai sesuai ketentuan yang berlaku. Kebijakan Sistem Pengendalian Internal yang digunakan adalah *Internal Control over Financial Reporting* (ICoFR). Secara garis besar, pengendalian internal yang dilakukan Indonesia Power meliputi:

1. Menciptakan lingkungan pengendalian yang dapat mendukung efektivitas pengendalian internal antara lain: (a) Memastikan bahwa semua anggota manajemen Perusahaan memiliki integritas dan nilai etika yang tinggi; (b) Menetapkan filosofi Perusahaan yang disosialisasikan dan diterapkan kepada seluruh komponen didalam Perusahaan; (c) Membuat struktur organisasi yang memungkinkan dilakukannya pengendalian secara efektif; (d) Mendorong peranan aktif dari Komite Dewan Komisaris untuk melakukan pengawasan dan memberikan masukan agar pengendalian internal dapat berjalan dengan efektif; (e) Menetapkan tugas dan tanggung jawab yang jelas di antara unit organisasi; (f) Menetapkan kebijakan pengembangan sumber daya manusia yang kompetitif.

Internal Control on Operations and Financial Reports

Indonesia Power evaluates or assesses the effectivity of internal control at the corporate level and operations/activities level by implementing and maintaining internal control system and procedures of adequate financial reports in accordance with the prevailing rules and legislations. Internal Control System in use is Internal Control over Financial Reporting (ICoFR). Overall, Indonesia Power performs internal control of the followings:

1. Creating controlled environment that supports the effectivity of internal control, such as: (a) Ensuring every member of Company's management has integrity and high ethical values; (b) Establishing the Company's philosophy, which is then socialized and implemented in every component in the Company; (c) Establishing organizational structures that enables effective controls; (d) Encouraging active roles from the Board of Commissioners' Committee to supervise and provide input so that the internal control can run effectively; (e) Establishing clear duties and responsibilities among the organizational units; (f) Establishing competitive human resource development policy.

SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL
Internal Control

2. Menerapkan kesadaran manajemen risiko kepada semua level manajemen Perusahaan.
3. Mempersiapkan sistem informasi yang memungkinkan pengendalian internal dilakukan secara efektif, efisien dan akurat.
4. Melakukan pemantauan dan evaluasi yang dilakukan antara lain dengan: (a) Supervisi dari tiap tingkatan level manajemen di dalam Perusahaan; (b) Sistem pertanggungjawaban dan penilaian yang memungkinkan untuk melakukan penilaian terhadap setiap anggota manajemen dan unit-unit dalam organisasi Perusahaan; (c) Pelaksanaan pengawasan melalui audit internal yang dilakukan oleh SAI; (d) Pelaksanaan pengawasan melalui pemeriksaan oleh pihak independen seperti Kantor Akuntan Publik; (e) Pengawasan oleh Dewan Komisaris atas seluruh pelaksanaan aktivitas manajemen Perusahaan yang dilakukan Direksi, termasuk pengawasan oleh Komite Audit dan Komite Manajemen Risiko.

2. Implementing risk management awareness to every level of Company's management.
3. Preparing information system that enables effective, efficient, and accurate internal control.
4. Monitoring and evaluating, which is performed by, among others: (a) Supervision on every management level within the Company; (b) Accountability and system assessment that enable the evaluation of every member of management and units in the Company's organization; (c) Implementation of supervision through internal audit by the Internal Audit Unit; (d) Supervision through audit by independent party, such as Public Accounting Firm; (e) Supervision by Board of Commissioners on all management activities conducted by the Directors, including supervision by Audit Committee and Risk Management Committee.

Dewan Komisaris melakukan pengawasan dan penasihatan terkait dengan proses kecukupan dan kewajaran dalam penyusunan laporan keuangan, pengelolaan risiko dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian yang dibantu oleh Komite Audit dan Komite Manajemen Risiko. Sedangkan Direksi menerapkan sistem pengendalian internal melalui penerapan kebijakan dan prosedur perusahaan secara konsisten dan memenuhi kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku, baik terkait dengan kegiatan usaha Indonesia Power, penerapan manajemen risiko, perencanaan strategis, pembagian tugas dan pendelegasian wewenang yang jelas serta kebijakan akuntansi yang memadai. Satuan Manajemen Risiko bekerja sama dan/atau berkoordinasi dengan Satuan Audit Internal melakukan berbagai upaya dalam meningkatkan pengendalian internal (*internal control*) dalam berbagai kegiatan operasional perusahaan. Pengendalian internal di lingkungan Indonesia Power terus dievaluasi agar mampu mengikuti perkembangan usaha Perusahaan maupun regulasi yang berlaku.

Board of Commissioners supervises and provides input related to the adequacy and fairness process in compiling financial statements, risk management by taking into account the prudence principles, which is assisted by Audit Committee and Risk Management Committee. Directors applied internal control system through the Company's policy and procedures implementation consistently and in compliance with prevailing regulations, that is related to the business activity in Indonesia Power, risk management implementation, strategic planning, tasks division and clear authority delegation as well as adequate accountancy policy. Risk Management Unit cooperates and/or coordinates with Internal Audit Unit to conduct efforts in improving the internal control in various Company's operations. Internal control within Indonesia Power is continuously evaluated in order to follow the development of Company's business and the prevailing regulations.

Internal Control over Financial Reporting (ICoFR)

ICoFR (*Internal Control over Financial Reporting*) merupakan proses yang didesain oleh, atau di bawah pengawasan pimpinan Perusahaan untuk memberikan keyakinan yang memadai terkait dengan:

1. Keandalan pelaporan keuangan
2. Penyusunan laporan keuangan untuk pihak luar sesuai dengan pedoman yang berlaku

ICoFR berhubungan dengan pengelolaan risiko pelaporan keuangan, akan tetapi inisasi transaksi dan penyebab risiko terletak di banyak fungsi non keuangan. Dengan demikian, kekuatan pengendalian laporan keuangan dangat tergantung pada pengelolaan pengendalian pada proses-proses tersebut di fungsi non keuangan, antara lain pada proses pengelolaan pembangkit dan jasa O & M, proses pengadaan barang dan jasa serta proses pendukung lainnya. Indonesia Power telah mengeluarkan Keputusan Direksi Nomor 124.K/020/IP/2014 tanggal 24 Juli 2014 tentang kebijakan Implementasi Pengendalian Internal atas Pelaporan Keuangan/ICoFR yang meliputi pengendalian tingkat transaksional dan berlaku di seluruh Unit dan Kantor Pusat Indonesia Power.

Adapun tahapan implementasi ICoFR Indonesia Power ditetapkan sebagai berikut:

Internal Control over Financial Reporting (ICoFR)

ICoFR (Internal Control over Financial Reporting) is a process designed by, or under the supervision of Company's leader to provide assurance related to:

1. Reliability of financial statements
2. Compilation of financial reports for the external parties in line with the prevailing guidelines

ICoFR is related to risk management in financial reporting, but the initial transaction and the cause of risk lie in numerous nonfinancial functions. Therefore, the control of financial report is very dependent on the control management on the process in nonfinancial functions, such as management process of generator and O&M services, procurement process of goods and services, as well as other supporting processes. Indonesia Power has issued Directors' Decree Number 124.K/020/IP/2014 dated 24 July 2014 on Internal Control Implementation Policy on Financial Reporting (ICoFR), which includes the transactional level control and is applicable in every Unit and Head Office of Indonesia Power.

The implementation stages of ICoFR Indonesia Power are set as follows:

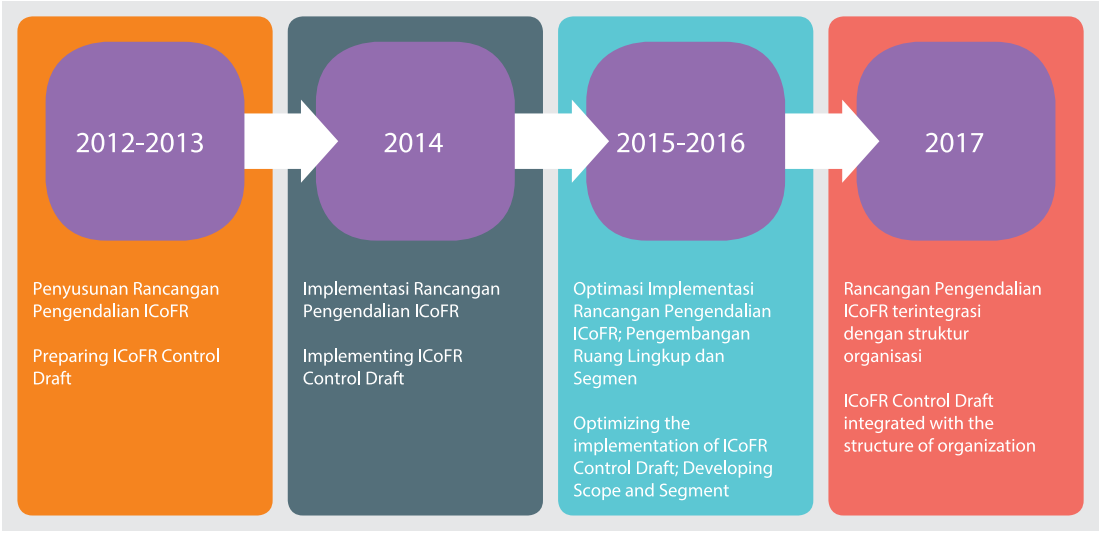

SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL
Internal Control

Pada kegiatan audit tahun 2016, obyek audit di unit telah meliputi laporan implementasi ICoFR termasuk CSA. Indonesia Power telah menetapkan implementasi ICoFR meliputi pengendalian tingkat transaksional yang terdiri dari segmen biaya operasi, segmen aktiva tetap, segmen persediaan dan segmen pelaporan keuangan. Melalui penerapan ICoFR, diharapkan Indonesia Power dapat mencapai sasaran sebagai berikut:

In the 2016 audit, audit object in the unit has covered implementation report of ICoFR, including CSA. Indonesia Power has implemented ICoFR, which covers control at the transactional level, which consists of operational cost segment, fixed assets segment, inventory segment, and financial reporting segment. Through the ICoFR implementation, Indonesia Power is expected to achieve target as follows:

Kesesuaian Sistem Pengendalian Intern Dengan Kerangka (COSO – *Internal Control Framework*)

Salah satu implementasi tata kelola perusahaan yang baik adalah memastikan bahwa sistem pengendalian internal berjalan secara efektif. Penerapan sistem pengendalian internal diarahkan untuk memastikan bahwa Perusahaan telah memiliki kehandalan laporan dan informasi keuangan, kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku serta efisiensi dan efektivitas kegiatan operasional. Untuk itulah Indonesia Power terus berupaya menerapkan sistem pengendalian internal yang efektif dengan melibatkan Dewan Komisaris, Direksi, dan seluruh pegawai dalam Perusahaan mengacu pada prinsip-prinsip *Internal Control-Integrated Framework* yang diterbitkan oleh *The Committee of Sponsoring Organization* (COSO) *of the Treadway Commission*. Indonesia Power mengembangkan sistem pengendalian internal yang efektif untuk seluruh fungsi operasi dengan mekanisme pengawasan berjenjang (*three lines of defense*). Adapun skema sistem pengendalian internal Indonesia Power dapat dilihat pada gambar berikut:

Conformity of Internal Control System with COSO (Internal Control Framework)

One of the implementations of good corporate governance is to ensure that the internal control system runs effectively. Internal control system implementation is directed to ensure that the Company has reliability in the financial reporting and information, compliance with the prevailing rules, as well as efficiency and effectivity in operational activities. Therefore, Indonesia Power keeps striving to implement internal control system effectively by involving the Board of Commissioners, Directors, and every employee in the Company, and referring to the Internal Control-Integrated Framework principles published by the Committee of Sponsoring Organization (COSO) of the Treadway Commission. Indonesia Power develops an effective internal control system for every operation functions with three lines of defense. The scheme for an internal control system in Indonesia Power can be seen in the figure below:

Gambar Skema Sistem Pengendalian Intern Pengawasan Berjenjang
Figure: Scheme of Internal Control System with Three Lines of Defense

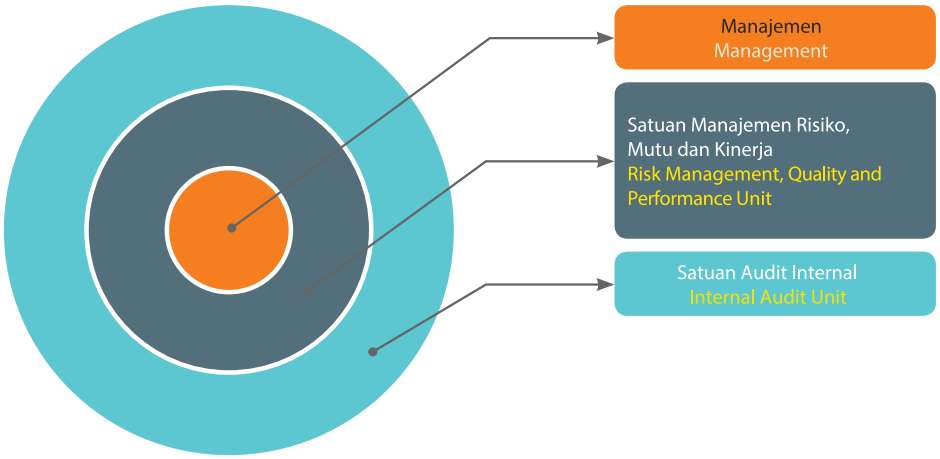

Keterangan:
1. Pengendalian Internal Lapis Pertama, dilaksanakan oleh pemilik proses bisnis (Owners)/Manajemen.
2. Pengendalian Internal Lapis Kedua, dilaksanakan oleh Satuan Manajemen Risiko, Mutu, dan Kinerja.
3. Pengendalian Internal Lapis Ketiga, dilaksanakan oleh Satuan Audit Internal.

Remark:
1. First Layer of Internal Control, conducted by the owners of business process / Management.
2. Second Layer of Internal Control, conducted by the Risk, Quality, and Performance Management Unit.
3. Third Layer of Internal Control, conducted by Internal Audit Unit.

Sesuai dengan prinsip-prinsip COSO *framework*, unsur pengendalian internal Indonesia Power terdiri dari:
1. Lingkungan Pengendalian
2. Penilaian Risiko
3. Aktivitas Pengendalian
4. Informasi dan Komunikasi, serta
5. Pemantauan.

In line with the COSO framework principles, the internal control elements of Indonesia Power consist of:
1. Controlled Environment
2. Risk Assessment
3. Controlled Activities
4. Information and Communication, and
5. Monitoring.

Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian merupakan segala sesuatu yang dimiliki dan mempengaruhi pencapaian perusahaan untuk mencapai budaya sadar pengendalian, yang meliputi:
1. Nilai Integritas dan Etika sebagaimana diatur dalam Pedoman Etika Perusahaan (*Code of Conduct*) dan Indonesia *Power-Way*.
2. Komitmen terhadap kompetensi, yang ditetapkan dalam kebijakan SDM berbasis kompetensi (Sertifikasi).
3. Pengawasan terhadap manajemen dan Komite Audit, sebagaimana diatur dalam *Board Manual*, *Internal Audit Charter* dan *Audit Committee Charter*.

Controlled Environment

A controlled environment is everything that is owned and shall influence the Company's achievement to cultivate control awareness culture, which includes:

1. Integrity and Ethics, as set forth in the Code of Conduct and Indonesia Power-Way.
2. Commitment to competence, which is set forth in the Competence Based Human Resources policy (Certification).
3. Supervision on the management and Audit Committee, as stipulated in Board Manual, Internal Audit Charter, and Audit Committee Charter.

SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL
Internal Control

4. Filosofi manajemen dan gaya operasi, yang diatur lebih lanjut dalam kebijakan dan penerapan manajemen risiko.
5. Struktur organisasi, pendelegasian wewenang dan tanggung jawab.

4. Management and operational style philosophy, which is further stipulated in policies and implementation of risk management.
5. Organizational structure, authorities and responsibilities delegation.

Penilaian Risiko

Dalam menjalankan operasional bisnisnya, Indonesia Power memiliki potensi risiko yang perlu terus diidentifikasi dan diukur yang dipengaruhi oleh berbagai faktor internal maupun eksternal. Penilaian risiko dilakukan melalui pelaksanaan *Maturity Level Assessment* manajemen risiko di Kantor Pusat dan Unit untuk memastikan bahwa risiko yang ada telah dikelola dengan baik dengan tindakan mitigasi yang diperlukan.

Risk Assessment

In carrying out its business operations, Indonesia Power has risk potentials that are continuously identified and measured, which are influenced by internal and external factors. Risk assessment is conducted through Maturity Level Assessment of risk management in Head Office and Unit, to ensure that the risk existed is managed properly with mitigation actions needed.

Aktivitas Pengendalian

Aktifitas sistem pengendalian merupakan kebijakan dan prosedur yang dibuat oleh manajemen untuk memenuhi tujuan yang ditetapkan, melalui:

1. Pembagian tugas, tanggung jawab dan kewenangan sesuai dengan fungsi dari masing-masing unit organisasi
2. Mempersiapkan sistem pencatatan data dan penyimpanan dokumen Perusahaan yang baik
3. Mempersiapkan sistem pengamanan data dan dokumen Perusahaan dengan baik
4. Manajemen SDM berbasis kompetensi
5. Komitmen penerapan manajemen risiko yang mengarah pada budaya sadar risiko
6. Melakukan penilaian atau pemeriksaan atas kinerja Perusahaan oleh pihak independen seperti oleh Kantor Akuntan Publik
7. Implementasi *Internal Control over Financial Reporting* (ICoFR) secara konsisten dan efektif.

Controlled Activities

Controlled activities is a set of policy and procedures that is compiled by the management in order to fulfill the objectives set, through:

1. Delegation of tasks, responsibilities, and authorities in line with functions of every organization unit
2. Preparation of a proper data recording and document storage system
3. Preparation of data security and Company's document system properly
4. Competence-based Human Resources Management
5. Commitment to implement risk management to cultivate risk awareness culture
6. Assessment or Audit on the Company's performance by independent party such as Public Accounting Firm
7. Internal Control over Financial Reporting (ICoFR) implementation consistently and effectively.

Informasi dan Komunikasi

Salah satu unsur penting dalam mendukung tercapainya sistem pengendalian internal yang efektif adalah pelaksanaan informasi dan komunikasi melalui berbagai forum komunikasi internal yaitu: (1) Sistem pelaporan formal; (2) Aplikasi sistem teknologi informasi, dan (3) Program komunikasi manajemen antara lain melalui Rapat Dewan Komisaris, Rapat Direksi, Rapat Komite Audit dan Komite Manajemen Risiko, *coffee morning*.

Pemantauan

Indonesia Power terus meningkatkan pemantauan implementasi sistem pengendalian internal, yang mencakup pengendalian keuangan maupun pengendalian operasional secara berkala. Tujuan pemantauan tersebut adalah untuk melihat, memastikan efektivitas pelaksanaan pengendalian internal antara rencana dan realisasi. Pemantauan dilakukan dengan pelaksanaan assessment oleh Satuan Manajemen Risiko dan Satuan Manajemen Mutu dan Kinerja serta dilakukan *assurance* secara berkala yang dilaksanakan oleh Satuan Audit Internal.

Evaluasi Sistem Pengendalian Internal

Efektivitas pengendalian intern Perusahaan pada seluruh fungsi manajemen sudah berjalan baik, serta seluruh hasil pemeriksaan, rekomendasi/temuan dari auditor internal (Satuan Audit Internal) maupun auditor eksternal (Kantor Akuntan Publik dan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia) segera ditindaklanjuti pada tahun buku berikutnya. Sejak tahun 2012, Indonesia Power telah melakukan *Quality Assurance Review* terhadap fungsi SAI dibantu oleh pihak independen. Pada tahun 2016, SAI telah melakukan *Quality Assurance Review* yang mencakup 3 (tiga) kriteria pokok, yaitu *Position, People, dan Process*. Dalam pelaksanaan *review* atas *Quality Assurance* Satuan Audit Internal (SAI) Perusahaan, Indonesia Power juga melakukan perbandingan atas kinerja SAI Perusahaan untuk diperbandingkan dengan kinerja rata-rata industri manufaktur dan rata-rata perusahaan secara global. Perbandingan kinerja diklasifikasikan dalam empat

Information and Communication

One important element to achieve effective internal control system is the implementation of information and communication through various internal communication forum, i.e.: (1) Formal reporting system; (2) Information technology system application, and (3) Management communication program, such as through Board of Commissioners' Meetings, Directors' Meeting, Meeting of Audit Committee and Risk Management Committee, Coffee Morning.

Monitoring

Indonesia Power continues to improve the monitoring of internal control system, which covers the financial control and operation control periodically. The objective is to see, and ensure the effectiveness of internal control, and the comparison between the plan and the realization. Monitoring is conducted through assessment by Risk Management Unit and Quality and Performance Management Unit, and assurance periodically by Internal Audit Unit.

Internal Control Evaluation

The effectivity of Company's internal control on every management function is performed well. All audit results, recommendation/findings from internal auditor (Internal Audit Unit) and external auditor (Public Accounting Firm and the Audit Board of the Republic of Indonesia) shall be followed up immediately on the next fiscal year. Since 2012, Indonesia Power has conducted Quality Assurance Review on the Internal Audit Unit function, assisted by an independent party. In 2016, Internal Audit Unit has performed Quality Assurance Review that covers 3 (three) main criteria, i.e. Position, People, and Process. In the review on Quality Assurance of the Company's Internal Audit Unit (SAI), Indonesia Power compares the Company's SAI performance with the average of manufacturing industry performance and the average of company's performance globally. The performance comparison is classified into four parts, and each part is broken down into specific performance group. The four

SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL
Internal Control

bagian yang kemudian setiap bagian dirinci lagi dalam beberapa kelompok kinerja spesifik. Empat klasifikasi kinerja tersebut terdiri dari Kondisi perusahaan dan satuan audit internal, *risk assessment and planning, implementation and reporting* serta *performance management*.

Dari hasil *Quality Assurance Review* yang telah dilakukan menghasilkan beberapa rekomendasi terkait sistem pengendalian internal diantaranya melakukan revisi atau mengganti soft structure terkait SAI, meningkatkan proses bisnis SAI, membentuk fungsi support SAI, serta melakukan sosialisasi *soft structure* SAI yang terdiri dari piagam audit internal, *roadmap* SAI, serta pedoman penilsan Laporan Hasil Audit kepada semua auditor. Selain itu, dalam melakukan *review* atas efektivitas sistem pengendalian internal, Perusahaan juga melakukan *assessment* Pengendalian Intern yang dilakukan untuk 5 (lima) komponen pengendalian (lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan monitoring) beserta 17 (tujuh belas) prinsip yang membangun setiap komponen pengendalian. *Assessment* dilakukan pada Kantor Pusat dan sebagian Unit Indonesia Power yaitu UJP Labuan, UP Suralaya, UPJP Priok, dan UJP Lontar.

performance classifications are Company's condition and internal audit unit, risk assessment and planning, implementation and reporting, and performance management.

The Quality Assurance Review resulted in some recommendations related to internal control system, such as revising soft structure related to SAI, improving SAI business process, forming SAI support function, as well as socializing soft structure SAI, which consists of internal audit charter, SAI roadmap, as well as Audit Result Report rating guidelines for all auditor. In addition to conduct review on the effectivity of internal control system, the Company also assessed Internal Control with 5 (five) controlled components (controlled environment, risk assessment, controlled activities, information and communication, and monitoring) with 17 (seventeen) principles that are the foundations of each controlled components. Assessment is conducted at Head Office and most of Indonesia Power's Unit, i.e. GSU Labuan, GU Suralaya, GGSU Priok, and GSU Lontar.

MANAJEMEN RISIKO

Risk Management

Dalam menjalankan kegiatan usaha, Indonesia Power menyadari bahwa risiko merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam setiap kegiatan operasionalnya. Melalui kesadaran dan konsistensi seluruh jajaran Perusahaan dalam melaksanakan manajemen risiko serta dukungan infrastruktur dan sistem pengelolaan risiko yang baik, diharapkan dapat memberi manfaat bagi keberlangsungan penyediaan energi listrik dalam jangka panjang (*long run sustainable company*).

In executing its business activities, Indonesia Power realizes that risks cannot be separated from operational activities. Through the awareness and consistency of all ranks within the Company in implementing risk management and through proper infrastructure support and risk management system, it is hoped to give benefits for a long run sustainable electrical energy supply company.

Penerapan Sistem Manajemen Risiko

Risiko menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses bisnis yang dijalankan sebuah perusahaan. Besarnya risiko berbanding lurus dengan bidang kerja dan seberapa tinggi target yang hendak dicapai. Indonesia Power sebagai perusahaan yang bergerak dalam penyediaan energi listrik melalui pengoperasian instalasi pembangkit, dimana kegagalan operasi akan menimbulkan *multiplier effect* berupa tidak tersedianya energi listrik dan dampak lain berupa penurunan laba Perusahaan yang akan dirasakan oleh pemangku kepentingan. Oleh karenanya, pengelolaan risiko senantiasa diterapkan secara berkesinambungan dan menyatu dengan proses pengambilan keputusan. *Enterprise Risk Management* (ERM) diterapkan untuk membuat pengelolaan risiko menjadi bagian dari budaya kerja korporasi. Melalui kesadaran dan konsistensi seluruh jajaran Perusahaan dalam melaksanakan manajemen risiko serta dukungan infrastruktur dan sistem pengelolaan risiko yang baik maka diharapkan dapat memberi manfaat bagi keberlangsungan penyediaan energi listrik dalam jangka panjang (*long run sustainable company*).

Sebagai perusahaan yang bergerak dalam penyediaan energi listrik melalui pengoperasian instalasi pembangkit tenaga listrik yang bersifat vital, kegagalan operasi akan berdampak pada tidak tersedianya energi listrik dan mungkin akan menyebabkan berbagai

Implementation of Risk Management System

Risks have become an inseparable part of a company in running a business process. The magnitude of risk is directly proportional to the work field and the level of the intended target. Indonesia Power is a company that runs in electrical energy supply through generator installation operation, where operational failure would cause multiplier effect, in the form of unavailability of electrical energy and other impacts, such as the decrease of Company's profit that would be experienced by the stakeholders. Therefore, risk management is carried out continuously and in unison with the decision-making process. Enterprise Risk Management (ERM) is implemented to establish risk management as a part of corporate's work culture. Through the awareness and consistency of all ranks within the Company in implementing risk management and infrastructure support and proper risk management system, it is hoped that long run sustainable company in electrical energy supply can be achieved.

As a company that runs in electrical energy supply through vital power plant installation operation, operational failure would result in the unavailability of electrical energy and subsequently would affect the stakeholders in other ways. Therefore, risk management has become an essential

MANAJEMEN RISIKO
Risk Management

dampak lainnya yang akan dirasakan oleh pemangku kepentingan. Oleh sebab itu, pengelolaan risiko menjadi persyaratan yang sangat penting bagi Indonesia Power. Dalam memastikan mekanisme pengelolaan risiko yang efektif, selain menetapkan fungsi-fungsi yang jelas, Indonesia Power senantiasa meningkatkan kualitas prosedur, pedoman dan manual manajemen risiko yang disesuaikan dengan konteks usaha bidang pembangkitan. Perangkat infrastruktur kesisteman tersebut meliputi (a) aspek perencanaan sistem manajemen risiko, (b) proses manajemen risiko, (c) prosedur monitoring risiko, (d) Prosedur pemantauan dan peninjauan atas penerapan manajemen risiko dan (e) prosedur pengembangan sistem manajemen risiko. Kelima prosedur tersebut merupakan inti dari sistem tata kelola manajemen risiko Indonesia Power sebagaimana skema berikut:

requirement for Indonesia Power. In ensuring an effective risk management mechanism, other than determining apparent functions, Indonesia Power constantly improves the quality of the procedure, guideline, and risk management manual that is adjusted to the context of generation technology business. The systemized infrastructure consists of (a) planning aspect of risk management system, (b) risk management process, (c) risk monitoring procedure, (d) monitoring and reviewing procedure over risk management implementation, and (e) development procedure of risk management system. Those five procedures are the core of Indonesia Power's risk management governance system, as illustrated in the following scheme:

Komitmen Penerapan Manajemen Risiko

Wujud mandat dan komitmen Penerapan Manajemen Risiko Korporat dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip, penjabaran tugas pokok dan tanggung jawab utama pengelolaan risiko di seluruh lingkungan perusahaan. Adapun pembagian tugas pengawasan dan pengelolaan manajemen risiko di Indonesia Power dilakukan sebagai berikut:

The Commitment to Implement Risk Management

The realization of mandate and commitment of Corporate Risk Management is implemented accordingly to the principles, job descriptions, and main responsibility of risk management within the Company. The distribution of supervision task and risk management implementation in Indonesia Power is carried out as follows:

Pihak/Pengelola Party/Manager	Pokok dan Tanggung Jawab Utama Main Responsibilities
Dewan Komisaris Board of Commissioners	• Mengawasi pelaksanaan pengelolaan risiko di tingkat korporat. • Memastikan adanya upaya pengawasan yang efektif, proaktif dan berkesinambungan atas berlangsungnya pelaksanaan pengelolaan risiko di tingkat korporat. • Supervising the risk management implementation on corporate level • Ensuring effective, proactive, and sustainable supervision on the implementation of risk management on a corporate level.
Komite Manajemen Risiko Risk Management Committee	Mengawasi penerapan manajemen risiko korporat secara efektif, sesuai dengan Kebijakan Penerapan Manajemen Risiko Korporat yang berlaku. Supervising corporate risk management implementation in an effective manner, in line with applicable Company's risk management implementation policy.
Komite Audit Audit Committee	Mengawasi pelaksanaan fungsi audit internal perusahaan dapat terlaksana secara efektif, proaktif dan berkesinambungan, termasuk di pengawasan atas keberlangsungan pengelolaan risiko yang dilakukan oleh perusahaan. Supervising the Company's internal audit function so that it can be implemented effectively, proactively, and sustainably, including supervision of the sustainable risk management conducted by the Company.
Direksi Board of Directors	• Memastikan terbangunnya sistem pengelolaan manajemen risiko korporat. • Memastikan tersedianya profil risiko korporat. • Penanggung jawab utama pelaksanaan pengelolaan risiko di tingkat korporat. • Memastikan keberlangsungan pelaksanaan pengelolaan risiko perusahaan secara efektif, proaktif dan berkesinambungan sesuai dengan Peraturan dan Kebijakan yang berlaku serta elemen tata kelola Manajemen Risiko Korporat (kriteria dampak dan kemungkinan, format peta risiko, standar respon risiko, kebijakan Manajemen Risiko). • Memastikan ketersediaan sumber daya yang dibutuhkan dalam penerapan manajemen risiko (SDM, finansial serta infrastruktur pendukung lainnya) • Sebagai pengambil keputusan dalam pengelolaan risiko di tingkat korporat. • Ensuring the establishment of corporate risk management system. • Ensuring the availability of corporate risk profile. • The main organ in charge in conducting corporate risk management • Ensuring the sustainability of risk management implementation effectively, proactively, and continuously, in line with the prevailing Rules and Regulations, and the element of Corporate Risk Management Governance (impact criteria and possibility, risk map format, risk response standards, Risk Management policy). • Ensuring the availability of resources needed in risk management (Human Resources, financial, and supporting infrastructures) • As the decision maker in corporate risk management
Satuan Perencanaan, Kinerja dan Manajemen Risiko	• Membangun sistem pengelolaan risiko, memastikan keberlangsungan pelaksanaan pengelolaan risiko secara efektif, proaktif dan berkesinambungan di seluruh tingkatan perusahaan. • Memastikan keberlangsungan pelaksanaan pengelolaan risiko secara efektif, proaktif dan berkesinambungan di berbagai tingkatan perusahaan melalui fasilitasi dan konsultasi (serta rekomendasi) terhadap para pemilik risiko dalam melakukan pengelolaan risiko di area tanggung jawab masing-masing. • Memastikan pelaksanaan mitigasi risiko atas kegiatan yang diverifikasi telah sesuai dengan rencana dan berhasil menurunkan level risiko ke level yang dapat diterima Perusahaan. • Melaporkan pelaksanaan manajemen risiko korporat kepada Direksi.

MANAJEMEN RISIKO
Risk Management

Pihak/Pengelola Party/Manager	Pokok dan Tanggung Jawab Utama Main Responsibilities
Planning, Performance, and Risk Management Unit	• Building risk management system, ensuring sustainability of effective, proactive, and continuous risk management at every level of the Company. • Ensuring the sustainability of effective, proactive, and continuous risk management at every level of the company by facilitating and consulting (and recommending) risk owner in managing the risk that is their areas of responsibilities. • Ensuring the risk mitigation on the verification activity is in line with plan and is succeeded in lowering the risk level to the acceptable level for the Company. • Reporting the corporate risk management implementation to Directors.
Pemilik Risiko Risk Owner	• Bertanggung jawab atas pelaksanaan pengelolaan risiko (berikut pelaporannya) secara efektif, proaktif dan berkesinambungan pada area tugas dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka melakukan suatu upaya pemastian atas pencapaian sasaran perusahaan di tingkatnya masing-masing. • Melakukan pengelolaan risiko (berikut pelaporannya) yang dihadapi secara efektif, proaktif dan berkesinambungan. • Is responsible for risk management implementation (and reporting) in an effective, proactive, and continuous manner on areas of respective duties and responsibilities, in order to assure that the company achieves targets at their respective levels. • Conducting risk management (and reporting) faced effectively, proactively, and continuously.
Satuan Audit Internal Internal Audit Unit	• Membantu Direksi dalam mengidentifikasi ketidaksesuaian dalam pelaksanaan penerapan pengelolaan risiko terhadap kebijakan dan prosedur perusahaan yang berlaku berikut dengan pengajuan rekomendasi tindakan korektif/ perbaikan yang diperlukan. • Melaksanakan pemeriksaan/audit atas dokumentasi/ pelaporan manajemen risiko melalui audit internal maupun koordinasi dengan auditor eksternal. • Melaksanakan pemeriksaan/audit bahwa risiko-risiko yang berpotensi mempengaruhi pencapaian sasaran Perusahaan telah dikelola dengan baik dan efektif. • Assisting Directors in identifying incompliance in the implementation of risk management on the Company's prevailing policies and procedures, with the recommendation of corrective actions required. • Conducting audit on documentation/report of risk management through internal audit or coordination with the external auditor. • Conducting audit on the potential risks that may influence the achievement of Company's objectives that have been well managed and effective.

Kerangka Kerja Manajemen Risiko

Indonesia Power - *Enterprise Risk Management* (ERM) merupakan sebuah pendekatan yang komprehensif untuk mengelola risiko-risiko perusahaan secara menyeluruh, meningkatkan kemampuan perusahaan untuk mengelola ketidakpastian, meminimalkan ancaman, dan memaksimalkan peluang. Dalam rangka penerapan manajemen risiko secara terintegrasi, Indonesia Power telah menyusun dan menetapkan Kebijakan Manajemen Risiko Korporat dan menerapkan ERM untuk seluruh fungsi Organisasi, dengan mengadaptasi standar sistem manajemen dan *best practice*.

Risk Management Framework

Indonesia Power - Enterprise Risk Management (ERM) is a comprehensive approach to thoroughly manage corporate risks, improve company's ability in managing uncertainties, minimize threats, and optimize opportunities. In implementing an integrated risk management, Indonesia Power has composed and set Corporate Risk Management Policy, and implemented ERM for all organizational functions, by adapting management system standard and best practice.

Sesuai prinsip-prinsip manajemen risiko, Perusahaan menetapkan bahwa pengelolaan risiko harus menjadi bagian yang menyatu dalam proses bisnis dan harus diinternalisasikan menjadi bagian dari budaya Perusahaan. Dan guna memastikan bahwa pengelolaan risiko terinternalisasi dalam proses bisnis perusahaan, maka mekanismenya diatur dalam sebuah kerangka kerja (*framework*) yang mengacu pada ISO 31000 tentang *Enterprise Risk Management*.

In accordance with risk management principles, Company has established that risk management shall be an inseparable part of business process, and must be internalized as a part of corporate culture. To ensure the internalization of risk management into company's business process, the mechanism has been regulated in a framework that refers to ISO 31000 on Enterprise Risk Management.

Struktur Organisasi Perencanaan, Kinerja dan Manajemen Risiko

Pelaksanaan fungsi manajemen risiko korporat berada pada Satuan Perencanaan, Kinerja dan Manajemen Risiko Korporat berdasarkan Keputusan Direksi Nomor 239.K/010/IP/2016 tentang Organisasi PT Indonesia Power. Fungsi pengelolaan risiko secara khusus tersebut merupakan bagian dari langkah preventif yang dilaksanakan Indonesia Power sehingga setiap risiko yang mungkin terjadi dalam perjalanan bisnis dapat diidentifikasi sejak dini. Selain itu, berfungsi untuk memastikan mekanisme pengelolaan risiko berjalan efektif sebagaimana diatur dalam prosedur, pedoman dan manual manajemen risiko yang disesuaikan dengan konteks usaha bidang pembangkitan sehingga mewujudkan sistem tata kelola Indonesia Power yang kuat untuk selanjutnya mampu memberikan kepastian yang wajar atas pencapaian sasaran Perusahaan ke depan. Berikut struktur organisasi Manajemen Risiko Indonesia Power tahun 2016:

Organizational Structure of Planning, Performance, and Corporate Risk Management Unit

The implementation of corporate risk management falls on Planning, Performance, and Corporate Risk Management Unit in accordance with the Board of Directors' Decree Number 239.K/010/IP/2016 on PT Indonesia Power Organization. Risk management function is specifically a part of the preventive measure by Indonesia Power so that each potential risk in the business' journey can be identified early. In addition, the function is to ensure an effective risk management mechanism as regulated in the procedure, guideline, and risk management manual that is adjusted to the context of generation technology business, as to cultivate strong governance system within Indonesia Power that serves as assurance in achieving Company's targets in the future. Indonesia Power's Organizational Structure of Risk Management in 2016 is as follows:

MANAJEMEN RISIKO
Risk Management

Profil Kepala Satuan Perencanaan, Kinerja dan Manajemen Risiko

Head of Planning, Performance, and Risk Management Unit Profile

Herdiyanto Soekono
Kepala Satuan Perencanaan, Kinerja Dan Manajemen Risiko
Head of Planning, Performance, and Risk Management Unit

Lahir di Jakarta, 10 Juli 1965
Domisili: Jakarta

Riwayat Pendidikan: Lulusan Sarjana Teknik Mesin dari Universitas Indonesia pada tahun 1991.

Riwayat Pekerjaan:
- Kepala Satuan Perencanaan, Kinerja dan Manajemen Risiko tahun 2015-2017
- Kepala Satuan Manajemen Risiko tahun 2014
- Kepala Divisi Enjiniring tahun 2010-2014
- Vice President Enjiniring tahun 2009-2010

Born in Jakarta, 10 July 1965
Domicile: Jakarta

Education Background: Bachelor Degree in Mechanical Engineering from the University of Indonesia in 1991.

Work Experience:
- Head of Planning, Performance, and Risk Management Unit 2015-2017
- Head of Risk Management Unit 2014
- Head of Engineering Division 2010-2014
- Vice President of Engineering 2009-2010

Pelatihan:
- *In House Training* (IHT) *Governance, Risk And Compliance*
- ISO 31000 Series 1 : *ERM Fundamentals*
- *Workshop Business Risk Management*
- *IHT Capacity Building* ISO 55001
- Sosialisasi Polis Asuransi Aset Tahun 2015

Dasar Pengangkatan:
Surat Keputusan Direksi PT Indonesia Power No 36.K/020/IP/2015 tanggal 30 Januari 2015

Training:
- In House Training (IHT) Governance, Risk, And Compliance
- ISO 31000 Series 1: ERM Fundamentals
- Business Risk Management Workshop
- IHT Capacity Building ISO 55001
- Socialization of Asset Insurance Policy in 2015

Appointment Base:
Directors' Decree of PT Indonesia Power No. 36.K/020/IP/2015 dated 30 January 2015

Roadmap Enterprise Risk Management (ERM)

Roadmap ERM merupakan acuan pelaksanaan tugas Satuan Perencanaan, Kinerja dan Manajemen Risiko Korporat. *Roadmap* ini disusun berdasarkan penerapan manajemen risiko berbasis *governance,* yang mengklasifikasikan tiga aspek dalam proses implementasi manajemen risiko, yaitu:

1. Aspek struktural, yaitu aspek yang memastikan arah penerapan, struktur organisasi, penerapan dan akuntabilitas pelaksanaan manajemen risiko dalam organisasi, penyediaan sumber daya dan sebagainya;
2. Aspek operasional, yaitu aspek yang menunjukkan tahapan proses implementasi yang sistematis dan terarah, mulai dari penyusunan Pedoman Manajemen Risiko Perusahaan, *briefing* untuk Komisaris, Direktur dan *Senior Leader*, serta pelatihan para pemangku risiko hingga penerapannya;
3. Aspek perawatan, yaitu aspek yang memastikan adanya upaya menjaga efektivitas penerapan dan perbaikan yang berkesinambungan melalui *monitoring* dan *review* serta *maturity level assessment* manajemen risiko.

Roadmap ini menitikberatkan pada penataan infrastruktur dan dilanjutkan dengan pengembangan budaya risiko yang tertuang sesuai skema berikut.

Roadmap of Enterprise Risk Management (ERM)

*Ro*admap of ERM is the reference to the task implementation of Corporate's Planning, Performance and Risk Management Unit. This roadmap is formulated accordingly to governance based risk management implementation, that classifies three aspects within risk management implementation process, i.e.:

1. Structural aspect, i.e. the aspect that ensures the direction of implementation, organizational structure, implementation and accountability of risk management implementation within the organization, provision of resources, etc.;
2. Operational aspect, i.e. the aspect that demonstrates systematic and directed stages of implementation process, starting from the formulation of Corporate Risk Management Guideline, briefing for the Board of Commissioners, Directors, and Senior Leader, and training for stakeholders until the implementation stage;
3. Maintenance aspect, i.e. the aspect that ensures the effectiveness of implementation and continuous improvement through monitoring and reviewing and risk manageme*nt maturity level assessment.*

This roadmap emphasizes on infrastructure regulation, followed by risk culture development that is illustrated in the following scheme.

MANAJEMEN RISIKO
Risk Management

Road Map Pengelolaan Risiko 1995 - 2021
Risk Management Roadmap 1995 - 2021

Saat ini Indonesia Power berada pada fase *Breakthrough* ERM sampai dengan tahun 2017 dengan beberapa realisasi kegiatan diantaranya implementasi *Business Continuity Management* (BCM), implementasi *Key Risk Indicator* (KRI) sebagai *Early Warning System*, implementasi *Risk based Performance, Risk Management Integration of New Business Process, Consolidated Report of Risk and Control* di-*review* oleh Internal Audit, dan implementasi *Quantitative Residual Risk Application*. Melalui proses dan pelaksanaan kegiatan yang direncanakan dalam *roadmap* tersebut, diharapkan Indonesia Power dapat menerapkan ERM secara menyeluruh pada tahun 2021 sehingga memberi manfaat tidak hanya untuk keberlangsungan operasional tetapi juga dapat memenuhi harapan para pemangku kepentingan karena dampak ataupun kerugian yang mungkin terjadi akibat risiko mampu dikendalikan.

Indonesia Power is currently on Breakthrough ERM phase up until 2017 with realization of several activities, among them are the implementation of Business Continuity Management (BCM), Key Risk Indicator (KRI) as Early Warning System, Risk-based Performance, Risk Management Integration of New Business Process, Consolidated Report of Risk and Control reviewed by Internal Audit, and implementation of Quantitative Residual Risk Application. Through the process and activities that have been planned in the roadmap, it is hoped for Indonesia Power to implement ERM elaborately in 2021 so that the benefits of operational sustainability and aspirations of the stakeholders can be fulfilled for the potential impact of failure or loss of risks is manageable.

Business Continuity Management System

Penerapan manajemen risiko di Indonesia Power telah mengidentifikasi risiko-risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan Perusahaan. Beberapa aktivitas

Business Continuity Management System

The implementation of risk management within Indonesia Power has identified risks that might obstruct Company's objectives achievement. Several core activities of

utama Indonesia Power telah dipetakan, yang jika terpapar krisis dapat mengakibatkan tidak tersedianya energi listrik. Oleh karena itu, Indonesia Power berupaya membentuk *Business Continuity Management System* (BCMS) yang terintegrasi dengan proses manajemen risiko sebagai bentuk penanganan risiko. BCMS berperan dalam upaya meminimalisir dampak dari krisis terhadap aktivitas utama Indonesia Power sebagai penyedia energi listrik. Penerapan BCMS akan dimulai dari *awareness* terhadap krisis sampai ke langkah-langkah yang dilakukan saat krisis terjadi.

Indonesia Power have been mapped out, ones that would cause the unavailability of electrical energy had they been exposed to crisis. Therefore, Indonesia Power established Business Continuity Management System (BCMS) that is integrated with risk management process as a form of risk management. BCMS serves to minimize the impact of crisis towards core activities of Indonesia Power as an electrical energy supplier. The implementation of BCMS starts from the awareness towards crisis stage up until the steps required to be carried out when crisis arises.

Indonesia Power telah menyusun *Blue Print Business Continuity Management System* (BCMS) dengan mengacu pada ISO 22301 tentang B*usiness Continuity Management*. Saat ini, dokumen tersebut masih dalam proses penyempurnaan untuk menggabungkan BCMS dari masing-masing unit bisnis menjadi BCMS Indonesia Power secara komprehensif. Unit Pembangkitan Suralaya sebagai pembangkit dengan kapasitas terbesar yang dikelola Indonesia Power telah memiliki *blue print* BCMS tersebut. *Blue print* ini mencakup kebijakan dan lingkup BCMS, *Business Impact Analysis*, strategi dan *Business Continuity Plan*, pengujian dan evaluasi, dan *blue print* implementasi BCMS. Dalam *blue print* ini telah dirumuskan beberapa strategi untuk menjaga keberlangsungan bisnis Indonesia Power diantaranya penyelamatan dokumen, infrastruktur teknologi informasi, pengadaan darurat, telekomunikasi, dan perjanjian/MoU dengan pihak eksternal.

Indonesia Power has composed the Blue Print of Business Continuity Management System (BCMS) that is in accordance with ISO 22301 on Business Continuity Management. Thus far, the document is still on improvement process to combine BCMS from each business unit to become a comprehensive Indonesia Power's BCSM. Generating Unit Suralaya as the generator with the biggest capacity that is managed by Indonesia Power, has already composed aforementioned blueprint of BCMS. This blueprint comprises of policy and the scope of BCMS, Business Impact Analysis, Strategy, and Business Continuity Plan, examination and evaluation, and blueprint of BCMS implementation. Several strategies have been formulated on the blueprint to ensure Indonesia Power's business sustainability, among them, are documents recovery, information technology infrastructure, emergency procurement, telecommunication, and agreement/MoU with external parties.

MANAJEMEN RISIKO
Risk Management

Program Kerja dan Realisasi Implementasi Manajemen Risiko Tahun 2016

Work Program and the Realization of Risk Management Implementation in 2016

	Program Kerja Work Program	Realisasi Realization	Pencapaian Achievement
Process	Sosialisasi & *Workshop* Kebijakan (SK), manual/Prosedur dan Aplikasi Pro RBA serta aplikasinya Socialization and Workshop of Decree (SK), Manual/Procedures and Application ProRBA	Sosialisasi Manajemen Risiko ke Unit baru PT Indonesia Power (UJP Cilegon) telah dilakukan pada tanggal 05 Februari 2016 oleh Tim Kantor Pusat dalam rangka perkenalan dan sosialisasi Manajemen Risiko PT Indonesia Power. Socialization of Risk Management to new Unit of PT Indonesia Power (GSU Cilegon) has been conducted on 5 February 2016, by Head Office Team in the event of introduction and socialization Risk Management PT Indonesia Power.	100%
	Workshop Penyusunan Profil Risiko 2017 Workshop of Risk Profile Compilation 2017	*Workshop* penyusunan *risk profile* 2017 telah dilakukan dalam dua *batch*, yaitu: *Batch* 1 (18 – 20 Juli 2016) *Batch* 2 (25-27 Juli 2016) Workshop of Risk Profile Compilation 2017 has been conducted in two batches, i.e.: Batch 1 (18 – 20 July 2016) Batch 2 (25-27 July 2016)	100%
	Workshop Program Penyelarasan Pro RBA Satuan Audit Internal (SAI) dengan Bidang Manajemen Risiko Workshop of Pro RBA Completion Program for Internal Audit Unit (SAI) in Risk Management	Untuk implementasi *Risk Based Audit* PT Indonesia Power, Satuan Audit Internal bersama dengan Satuan Manajemen Risiko melakukan penyelarasan dengan dilakukannya *workshop* untuk menyatukan visi bersama, dari kegiatan tersebut telah didapatkan beberapa masukan untuk perbaikan ProRBa sebagai *tools Risk Based Audit.* To implement Risk Based Audit PT Indonesia Power, Internal Audit Unit cooperates with Risk Management Unit to conduct alignment, by holding a workshop to unify shared vision. From this activity, there were some inputs for Pro RBA refinement as Risk Based Audit tools.	100%
	Monitoring Mitigasi Risiko PT Indonesia Power Monitoring of Risk Mitigation PT Indonesia Power	*Monitoring* Mitigasi Risiko TW I dilakukan melalui Forum Rekonsiliasi Manajemen Risiko TW I yang dilaksanakan pada tanggal 13-14 April 2016 untuk seluruh UP dan UJP serta tanggal 15 April 2016 khusus untuk UJP Cilegon. Selanjutnya monitoring mitigasi risiko dilakukan melalui laporan rutin unit ke KP serta melalui aplikasi Pro-RBA. Monitoring of Risk Mitigation in Quarter I is conducted through Reconciliation of Risk Management Forum Quarter I, on 13-14 April 2016, for all GU and GSU, and on 15 April 2016 specifically for GSU Cilegon. Furthermore, the risk mitigation monitoring is conducted through regular report from the unit to Head Office, as well as through Pro RBA application.	100%

	Program Kerja Work Program	Realisasi Realization	Pencapaian Achievement
	Audit operasional Berbasis Risiko (eRBAS) PT Indonesia Power	Audit operasional berbasis risiko (eRBAS) PT Indonesia Power oleh Satuan Pengawasan Intern PT PLN (Persero) dilaksanakan pada tanggal 11 April 2016 s.d 27 Mei 2016 dengan ruang lingkup sebagai berikut : 1. Peningkatan keandalan, realibility, dan efisiensi pembangkit a. Penjadwalan dan pelaksanaan pemeliharaan b. Pengelolaan ketersediaan energi primer 2. Pengelolaan penugasan dari PT PLN (Persero) a. JOM FTP-1 b. Penugasan Lainnya 3. Pengembangan Usaha a. Pola peningkatan kerjasama dengan anak perusahaan b. Pengembangan usaha lainnya 4. Pengelolaan Keselamatan,KecelakaanKerja dan Lingkungan	100%
	Risk Based Operation Audit (eRBAS) of PT Indonesia Power	Risk Based Operation Audit (eRBAS) of PT Indonesia Power by Internal Monitoring Unit PT PLN (Persero) is conducted on 11 April - 27 May 2016, with scopes as follow: 1. Improvement of reliability and power plant efficiency a. Scheduling and performing maintenance b. Management of primary energy availability 2. Management of assignment from PT PLN (Persero) a. JOM FTP-1 b. Other assignments 3. Business Developmenta. a. Increased cooperation with subsidiaries b. Other business development 4. Occupational Safety, Accident, and Environmental Management	
	Evaluasi *monitoring* ProRBA	*Monitoring* profil risiko melalui ProRBA sudah dapat dilakukan, terdapat menu *report* sehingga laporan progress perkembangan profil risiko dan mitigasinya dapat dilihat langsung dan di *download* dari aplikasi. Tahap Pengembangan lebih lanjut dengan versi terbaru akan di launching tahun 2017.	100%
	Evaluation of Pro RBA monitoring	Monitoring of risk profile through Pro RBA is conducted. There is 'report' menu so the progress report of risk profile development and its mitigation can be seen directly and downloaded through the application. Further development with updated version will be launched in 2017.	
	Assesment Maturity Level dan *Utility* ProRBA Semester I & II 2016	*Assessment Maturity level* ERM dan *utility* ProRBA Semester I telah dilaksanakan pada tanggal 16 Mei 2016 - 14 Juni 2016 dan Semester II pada tanggal 21 November 2016 – 23 Desember 2016. ERM level Assessment Maturity and utility of Pro RBA Semester I has been conducted on 16 May – 14 June 2016, and in Semester II on 21 November – 23 December 2016.	100%

MANAJEMEN RISIKO
Risk Management

	Program Kerja Work Program	Realisasi Realization	Pencapaian Achievement
Performance	Pengesahan *draft* kebijakan dan prosedur /instruksi kerja Ratification of policy and procedures draft/work instructions	*Draft* Kebijakan dan Prosedur Bidang Manajemen Risiko telah disahkan oleh Direksi. Directors have ratified draft of Risk Management Policy and Procedures.	100%
	Tersedianya *Key Risk Indicator* (KRI) dan *Early Warning System* di Pro RBA Availability of Key Risk Indicator (KRI) and Early Warning System in Pro RBA	KRI sudah tersedia di ProRBA. KRI is available in Pro RBA.	100%
	Tersedianya *risk profile* (*inherent risk, actual risk,* dan *residual risk*) tiap bulan Availability of risk profile (inherent risk, actual risk, and residual risk) every month	*Risk Profile* (*inherent risk, actual risk*, dan *residual risk*) tiap bulan sudah tersedia di aplikasi ProRBA, sehingga *monitoring progress* mitigasi Risiko dapat lebih mudah dilakukan. Every month, Risk Profile (inherent risk, actual risk, and residual risk) is available in Pro RBA application, hence the monitoring of risk mitigation progress can be easily conducted.	100%
	Tersedianya laporan evaluasi RCM atas 8 segmen Availability of RCM Evaluation Report on 8 segments	Laporan Evaluasi RCM atas 8 Segmen telah dilaporkan. RCM Evaluation Report on 8 segments is submitted.	100%
	Pengembangan *Business Continuity Management* (BCM) Business Continuity Management (BCM) Development	Pengembangan BCM sedang dilaksanakan. *Briefing* dan pengenalan dasar BCM sudah dilaksanakan, *Workshop* BIA dan *workshop Risk Assesment* telah dilakukan untuk UPJP Priok dan UP Grati. Target proyek selesai pada April 2017. BCM Development is in progress. Briefing and introduction of BCM are conducted, Workshop BIA and Risk Assessment is held for GGSU Priok and GU Grati. The target is the project will be finished in April 2017.	In Progress
	Pengesahan Profil Risiko Korporat 2017 Ratification of Corporate Risk Profile 2017	Profil Risiko Korporat tahun 2017 sudah ditetapkan. Determined the Corporate Risk Profile 2017.	100%

Profil Risiko

Indonesia Power terus berupaya mengimplementasikan manajemen risiko secara efektif pada setiap jenjang organisasi perusahaan yaitu korporat dan unit dengan mempertimbangkan prioritas dan manfaat tiap program kerja/proyek bagi kelangsungan perusahaan. Dalam rangka menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) dalam perusahaan, maka sebagai bentuk komitmen manajemen dalam implementasi GCG tersebut, Indonesia Power telah menyusun Profil Risiko Perusahaan tahun 2016 sebagai bagian dari RKAP 2016, yang menunjukkan menunjukkan identifikasi atas risiko-risiko utama (*key risk*) yang akan mempengaruhi pencapaian sasaran perusahaan tahun 2016, beserta

Risk Profiles

Indonesia Power constantly implements an effective risk management on every rank of company's organization, that is on the corporate and unit level, taking into accounts the priority and benefit of each work/project program within the Company's sustainability. In implementing good corporate governance within the Company, as a form of managerial commitment in GCG implementation, Indonesia Power has composed Corporate Risk Profiles in 2016 as a part of 2016 WP&B, that shows the identification of key risks that would affect company's targets achievement in 2016, along with the management plan to provide trust in achieving company's targets and for company's resources to be utilized optimally. Through

rencana pengelolaannya guna memberikan keyakinan akan tercapainya sasaran, dan sumber daya perusahaan dapat dimanfaatkan dengan lebih optimal. Dengan pendekatan yang komprehensif dalam mengelola risiko-risiko perusahaan secara menyeluruh diharapkan akan mampu meningkatkan kinerja perusahaan sehingga menghasilkan *value added* bagi segenap pemangku kepentingan.

a comprehensive approach in managing corporate's risks thoroughly, it is hoped that company's performance can be improved to result in value added for all stakeholders.

Peta Risiko 2016

Pelaksanaan program kerja strategis dan operasional merupakan tindakan mitigasi risiko Perusahaan. Indonesia Power telah mengelola risiko usahanya secara efektif dengan peta risiko. Penyusunan Profil Risiko tahun 2016 dilakukan dengan mengacu pada sasaran, dan fokus Perusahaan tahun 2016, yang telah diselaraskan dengan rencana jangka panjang perusahaan sebagaimana tergambar pada peta risiko di bawah ini.

2016 Risk Mapping

The implementation of strategic and operational work program is Company's risk mitigation action. Indonesia Power has managed its business risks effectively by mapping possible risks. The formulation of Risk Profile in 2016 was carried out accordingly to company's target and focus in 2016, that had been synchronized with Long Term Corporate Plan as illustrated in the following risk map.

Tabel Peta Risiko Tahun 2016
Table: Risk Mapping 2016

Kemungkinan / Potential							
	Sangat Besar Very High	V	Moderat	Moderat	Tinggi High	Ekstrem Extreme	Ekstrem Extreme
	Besar High	IV	Rendah Low	Moderat	Tinggi High R1,2,8,12	Ekstrem Extreme R4,13,14,17	Ekstrem Extreme R5,6,7,15
	Sedang Medium	III	Rendah Low	Moderat	Tinggi High R3,11,16,18	Tinggi High R10	Ekstrem Extreme R9,19
	Kecil Low	II	Rendah Low	Rendah Low	Moderat	Tinggi High	Ekstrem Extreme
	Sangat Kecil Very Low	I	Rendah Low	Rendah Low	Moderat	Tinggi High	Tinggi High
			1	2	3	4	5
			Tidak Signifikan Insignificant	Minor	Medium	Major	Malapetaka Disaster
			Dampak / Impacts				

MANAJEMEN RISIKO
Risk Management

Keterangan/ Remark:

R1 : Risiko Laporan Keuangan/ Financial Statements Risk
R2 : Risiko Penyerapan CAPEX/OPEX/ CAPEX/OPEX Absorption risk
R3 : Risiko Ekspektasi Pelanggan/ Customers' Expectation Risk
R4 : Risiko Sarana/ Prasarana/ Facilities/Infrastructures Risk
R5 : Risiko Ketersediaan/ Keandalan/ Availability/Reliability Risk
R6 : Risiko K3/ HSE Risk
R7 : Risiko NHPR/ NHPR Risk
R8 : Risiko Kelangsungan Usaha/ Business Sustainability Risk
R9 : Risiko Obsolete Teknologi/ Obsolete Technology Risk
R10 : Risiko Security Teknologi/ Technology Security Risk
R11 : Risiko Tata Kelola/ Governance Risk
R12 : Risiko Anak Perusahaan/ Subsidiaries Risk
R13 : Risiko Security Supply EP/ Security Supply EP Risk
R14 : Risiko Lingkungan/ Environmental Risk
R15 : Risiko Tuntutan Hukum/ Lawsuit Risk Competence Risk
R16 : Risiko Kompetensi SDM/ Human Resources
R17 : Risiko Jumlah SDM/ Number of Human Resources Risk
R18 : Risiko Kesejahteraan Pekerja/ Employee's Welfare Risk
R19 : Risiko Reputasi/ Reputation Risk

Upaya Mitigasi Risiko

Sejalan dengan pengelompokan risiko perusahaan secara korporat di atas, Indonesia Power telah melakukan langkah mitigasi untuk mengurangi dampak ataupun kerugian yang dapat terjadi akibat risiko tersebut, sebagaimana tabel berikut:

Risk Mitigation Efforts

In line with corporate risks grouping elaborated on the previous passage, Indonesia Power has carried out mitigation effort to reduce the negative impact or loss that might occur as consequence of risks, it is explained in the following table:

No. Risiko Risk Number	SO SO	Risiko Risk	Kejadian/Penyebab Cause	Peringkat Dampak (PD) Impact Rate (PD)	Peringkat Kemungkinan (PK) Possibility Rate (PK)	Level Risiko Risk Level	Langkah Mitigasi Mitigation Measures
R1	SO.1 Kinerja Finansial Optimal	Laporan Keuangan	Pelaporan keuangan tidak sesuai standar (PSAK), (terlambat atau data tidak valid) / 1. Sistem pembuatan laporan / pengumpulan data yang masih manual	Medium (3)	Besar (D)	Tinggi (3,D=3D)	Pengembangan sistem pelaporan berbasis ERP
	SO.1 Optimum Financial Performance	Financial Statements	Financial reporting is not in line with standards (PSAK), (late, or invalid data) / 1. Reporting system / data collection is still manual	Medium (3)	Big (D)	High (3, D = 3D)	Development of ERP based reporting system
R2		Penyerapan OPEX & CAPEX	Penyerapan OPEX dan CAPEX yang rendah / 1.Penerbitan SKI dan Kutipannya terlambat 2.Pengendalian anggaran kurang tajam dan kurang akurat	Medium (3)	Besar (D)		1.Pengiriman *Feed Back monitoring* penyerapan anaggarn. 2.Penajaman evaluasi pengendalaian Anggaran.

No. Risiko Risk Number	SO SO	Risiko Risk	Kejadian/Penyebab Cause	Peringkat Dampak (PD) Impact Rate (PD)	Peringkat Kemungkinan (PK) Possibility Rate (PK)	Level Risiko Risk Level	Langkah Mitigasi Mitigation Measures
		Penyerapan OPEX & CAPEX	Low absorption of OPEX and CAPEX / 1. SKI Issuance and quotation are late 2. Budget control is inaccurate and imprecise	Medium (3)	Big (D)		1.Feedback on budget absorption monitoring 2. Better evaluation of budget control
R3	SO.4 Kepuasan Pelanggan	Ekspektasi Pelanggan	Pelayanan tidak sesuai dengan harapan pelanggan/standar pelayanan / 1.Nilai kepuasan pelanggan belum terukur	Medium (3)	Sedang ©	Tinggi (3,C=3C)	Melaksanakan survey kepuasan pelanggan tahun 2016, sebanyak UP dan UPJP : 8 Unit UJH : 6 Unit UJP dan UPJP disurvey UJP :10 Unit
	SO. 4 Customer Satisfaction	Customer Expectation	Service does not meet customer expectation/services' standards 1. Satisfaction level of the customer has not been measured yet	Medium (3)	Moderate	High (3, C = 3C)	Conducting customer satisfaction survey in 2016, at GU and GGSU: 8 MSU Units: 6 GSU Units and GGSU GSU: 10 Units
R4		Sarana dan Prasarana	Kehilangan/kekurangan sarana danprasarana / 1.*Switch* saat ini masih menggunakan *Unmanage Switch* sehingga kurang mendukung program AT2LT PLN, Aplikasi AMR eksisting tidak dapat mengakomodasi kebutuhan Belum terdapat Aplikasi *Power Quality Monitoring* perkembangan settlement	Signifikan (4)	Besar (D)	Ekstrim (4,D=4D)	1.a. Pengadaan *Managable switch* 1.b. Pembuatan aplikasi ETMC dan redesign pengembangan web 1.c. Pengadaan *power quality monitoring* 2. Pembangunan Gedung Baru di Senayan 3.a. Investasi Pembangunan dan perlengkapan *Dormitory* & Rumah Jabatan 3.b. 4.a. Pengadaan Pekerjaan Jasa Pembangunan Gedung Administrasi PT Indonesia Power UJP Banten 1 Suralaya 4.b. Pengadaan Pekerjaan Jasa Interior Gedung Administrasi PT. Indonesia Power UJP Banten 1 Suralaya
R4		Facilities and infrastructure	Loss/lack of facilities and infrastructures / 1. Currently, Switch is still unmanaged, and does not support AT2LT Program of PLN, existing AMR application cannot accommodate the needs. There is not yet an application to monitor Power Quality, settlement development,	Significant (4)	High (D)	Extreme (4, D = 4D)	1.a. Manageable switch procurement 1.b. ETMC application and web development redesign 1.c. Procurement of power quality monitoring 2. Construction of New Building at Senayan 3.a. Construction investment and dormitory and Office house equipment

MANAJEMEN RISIKO
Risk Management

No. Risiko Risk Number	SO SO	Risiko Risk	Kejadian/Penyebab Cause	Peringkat Dampak (PD) Impact Rate (PD)	Peringkat Kemungkinan (PK) Possibility Rate (PK)	Level Risiko Risk Level	Langkah Mitigasi Mitigation Measures
							4.a. Procurement of Construction Service of Administration Building PT Indonesia Power Banten 1 Suralaya GSU 4.b. Procurement of Interior Service of Administration Building PT. Indonesia Power Banten 1 Suralaya GSU
R5	SO.7 Mencapai operasional exelence	Ketersediaan Pembangkit	Outage, derating akibat ketidaksiapan peralatan / 1. PLTP Kamojang Unit 1 *catastrofic, governor control* dan *stop valve aging*, DCS PLTP Gunung salak Aging. 2. PLTU Suralaya 1-4 Trafo SST Aging, Motor 6 KV Aging, *Stator generator* Aging. PLTU Suralaya Unit 5-7 Sistem control obsolete, motor 10,5 kV PAF Aging, Struktur steel Ash handling korosif, Oil Analyser tidak akurat. 3.BFP PLTGU Priok Blok 1 Aging, *Control device aging*, Gedung Gudang dan Bengkel lokasinya dipakai untuk pembangunan Blok 4, penurunan tanah di area PLTGU Priok Blok 1 & 2. 4.Peralatan AVR dan MCC PLTA Saguling PLTA Sub Unit abolete sehingga kurang mendukung Komunikasi data POPST, Trafo PLTA PLengan IV Aging, Trushbearing PLTA Saguling overclearn, Trafo utama PLTA Saguling aging. 5.HP economizer, LP Superheater, HP Evaporator HRSG PLTGU Tambak Lorok aging, Exhaust plenum dan Exhaust defuser GT PLTGU Tambak Lorok bocor, Gedung dan gudang PLTGU tergusur penyediaan lokasi ORF Kalija.2	Malapetaka -5	Besar (D)	Ekstrim (5,D=5D)	1.a. Rehabilitasi PLTP Kamojang unit 1 1.b. Pengadaan dan pemasangan governor control dan stop valve PLTP Kamojang Unit 2. 1.c. Retrofit DCS PLTP Gunung Salak. 2.a. Pengadaan Trafo SST PLTU Suralaya 1. 2.b. Pengadaan motor 6 kV mill PLTU Suarlaya 1-2. 2.c. Rewinding Stator generator PLTU Suralaya 1,2,3 2.d. Upgrade analog master modul dan analog slave module PLTU Suralaya 6 2.e. Pengadaan motor 10,5 kV PAF PLTU SLA5-7 3.a. Penggantian BFP PLTGU Priok Blok2, 3.b. Retrofit Control device GT 1.1 PLTGU Priok Blok 1. 3.c. Pemabngunan gedung bengkel dan Gudang3.d. Pengadaan dan pemasangan ship pile. 4.a. Pengdaan dan pemasangan AVR dan MCC PLTA Saguling Unit 1, 3 dan 4 serta Seluruh PLTA Sub Unit untuk mendukung program POPST. 4.b. Penggantian Trafo PLTA PLengan4 4.c. Penggantian Trush Bearing PLTA saguling. 4.d. Pengadaan Trafo Utama PLTA Saguling. 5.a. Retubing HP economizer, LP Superheater, HP Evaporator HRSG PLTGU Tambak Lorok.

No. Risiko Risk Number	SO SO	Risiko Risk	Kejadian/Penyebab Cause	Peringkat Dampak (PD) Impact Rate (PD)	Peringkat Kemungkinan (PK) Possibility Rate (PK)	Level Risiko Risk Level	Langkah Mitigasi Mitigation Measures
			6.Bateri ST PLTGU Grati Blok 1 rusak, Blade row dan vane segmen row untuk roll in rool out belum tersedia. 7. Generator PLTU Suralaya #1 & #2 mengalami aging, Main Transformer PLTP KMJ #2 & #3 - PLTA PBS #1,#2,#3 - PLTP Drajat mengalami aging.				5.b. Rehabilitasi exaust plenum dan exaust defuser. 5.c. Pembangunan gedung gudang dan Bengkel PLTGU Tambaklorok. 6.a. Penggantian battery charger PLTGU Grati. 6.b. Pengadaan dan pemsasangan blade dan vane segmen row untuk mendukung roll in roll out rotor turbin GT PLTGU Grati. 7.a. Rewinding stator generator PLTU Suaralaya 1, 2. 7.b.Pengadaan Main Transformer (Clastering) PLTP Kamojang, Unit 2-3, PLTP Darajat dan PLTA PB.Soedirman.
R5	SO.7 Achieving operational excellence	Generator Availability	1. DCS Gunung Salak Aging GPP. 2. Suralaya SPP 1-4 Trafo SST Aging, Motor 6 KV Aging, Stator generator Aging. Suralaya SPP Unit 5-7 obsolete control system, motor 10,5 kV PAF Aging, corrosive steel ash handling structure, inaccurate Oil Analyser. 3.BFP Priok Blok 1 Aging CCPP , Control device aging, Warehouse and Workshop is used for Block 4 construction, land subsidence in CPriok Block 1 & 2 area CCPP . 4. AVR and MCC equipment of Saguling HPP and Sub-Unit abolete HPP, hence does not support data communication with POPST, Aging Transformer of Plengan IV HPP, Overclear of Trust bearing Saguling HPP, Aging of main transformer at Saguling HPP.	Catastrophe (5)	High (D)	Extreme (5,D=5D)	Rehabilitation of Geothermal Kamojang GPP Unit 1 1.b. Procurement and installation of governor control and stop valve at Kamojang Unit 2 GPP. 1.c. Retrofit DCS Gunung Salak GPP. SST Transformer Procurement for SPP Suralaya 1. 2.b. Procurement of 5 kV motor mill for Suralaya 1-2 SPP. 2.c. Rewinding Stator generator Suralaya 1,2,3 SPP 2.d. Upgrade of analog master module and analog slave module Suralaya 6 SPP 2.e. Procurement of 10.5 kV motor for PAF SLA5-7 SPP 3.a. BFP Replacement at Priok Block 2 CCPP 3.b. Retrofit Control device GT 1.1 Priok Block 1 CCPP 3.c. Construction of workshop and warehouse Procurement and installation of ship pile.

MANAJEMEN RISIKO
Risk Management

No. Risiko Risk Number	SO SO	Risiko Risk	Kejadian/Penyebab Cause	Peringkat Dampak (PD) Impact Rate (PD)	Peringkat Kemungkinan (PK) Possibility Rate (PK)	Level Risiko Risk Level	Langkah Mitigasi Mitigation Measures
			5. Aging of HP economizer, LP Superheater, HP Evaporator HRSG Tambak Lorok CCPP, Leaking Exhaust plenum and Exhaust defuser GT Tambak Lorok CCPP, Building and warehouse of CCPP were evicted for ORF Kalija 2 location. 6. Broken battery of Grati Block 1 ST CCPP, Blade row and vane segment row for roll in roll out are not available. 7. Aging Generator Suralaya #1 & #2 SPP, Aging of Main Transformer KMJ #2 & #3 GPP - PBS #1,#2,#3 HPP - Drajat GPP..				4.a. Procurement and installation of AVR and MCC at Saguling Unit 1, 3, and 4 HPP, and all HPP Sub Unit to support POPST Program. 4.b. Transformer replacement of PLengan4 HPP 4.c. Replacement of Trush Bearing Saguling HPP. 4.d. Main transformer procurement for Saguling HPP. 5.a. Retubing HP economizer, LP Superheater, HP Evaporator HRSG Tambak Lorok CCPP. 5.b. Rehabilitation of exhaust plenum and defuser. 5.c. Construction of workshop and warehouse Tambaklorok CCPP. 6.a. Replacement of battery charger Grati CCPP. 6.b. Procurement and installation of blade and vane segment row to support roll in roll out rotor turbine of GT Grati CCPP. 7.a. Rewinding stator generator Suralaya 1, 2 SPP. 7.b. Main transformer procurement (clustering) Kamojang GPP, Unit 2-3, Darajat GPP and PB.Soedirman HPP.
R6		K3	Terjadi kecelakan kerja / 1.Peralatan *monitoring Dam* sudah *obsolete* 2. Belum terbentuk budaya *Safety* 3. Terjadi perubahan rona lingkungan	Malapetaka (5)	Besar (D)	Ekstrim (5,D=5D)	1.a. Pengadaan Peralatan Ukur *Seismic* dan Kelengkapannya 1.b. Pengadaan Digital *Inclinometer System* 1.c. Pengadaan *Digital Level* (Akurasi 0,3 mm / km) 1.d. Pekerjaan Pengamanan Batas Lahan PLTA Garung dan PLTA Rehabilitasi PLTU Suralaya #3 & #4 melalui program KfW. Ketenger dengan 2 Program SIMATA (Sistem Manajemen Aset Tanah)

No. Risiko Risk Number	SO SO	Risiko Risk	Kejadian/Penyebab Cause	Peringkat Dampak (PD) Impact Rate (PD)	Peringkat Kemungkinan (PK) Possibility Rate (PK)	Level Risiko Risk Level	Langkah Mitigasi Mitigation Measures
							2.a. Membangun budaya K3 2.b. Penguatan SMK3 untuk mencapai *Zero Accident* 3. Melakukan Penghijauan disekitar pembangkit dan *Green Belt* PLTA
R6		K3	HSE occurrence / 1. Monitoring equipment is obsolete 2. Unformed safety culture 3. Environmental changes	Catastrophe (5)	High (D)	Extreme (5,D=5D)	1.a Procurement of seismic measuring equipment 1.b. Procurement of Digital Inclinometer System 1.c. Procurement of Digital Level (accuracy 0.3 mm/km) 1.d. Securing Land Limits at Garung HPP and HPP Rehabilitation Suralaya SPP #3 & #4 through KfW Program KfW Ketenger with 2 SIMATA (Land Assets Management System) Program 2.a. Creating HSE culture 2.b. SMK3 strengthening to achieve Zero Accident 3. Reforestation around power plant and Green Belt HPP
R7	SO.7 Meningkatkan operasional exelence	NHPR	Efisensi turun pada mesin pembangkit berdampak pada kehilangan potensi pendapatan atau penambahan biaya / 1.*Chlorine plant* PLTU Suralaya rusak, Batubara lembab menyebabkan *derating*, 2.*Tube HP Economizer*, LP *Superheater*, HP *Evaporator HRSG* PLTGU banyak yang bocor, PLTU unit tambaklorok 3 RSH 3.Canal air pendingin kondensor ST PLTGU Grati mengalami pendangkalan 4. *Performance* peralatan PLTU Suralaya #3 & #4 menurun.	Malapetaka -5	Besar (D)	Ekstrim (5,D=5D)	1.a.Penggantian *chlorine* A & C *plant* PLTU Suralaya unit 5-7 1.b.Pembuatan *cover* yard *coalhandling area hopper* D. 2.a.*Retubing HP Economizer*, LP *Superheater*, HP *Evaporator* HRSG PLTGU banyak yang bocor 2.b.Gasifikasi PLTU unit 3 Tambaklorok 3.a.Pengadaan dredger untuk penunjang *dredging canal* PLTGU Grati. 4. Rehabilitasi PLTU Suralaya #3 & #4

MANAJEMEN RISIKO
Risk Management

No. Risiko Risk Number	SO SO	Risiko Risk	Kejadian/Penyebab Cause	Peringkat Dampak (PD) Impact Rate (PD)	Peringkat Kemungkinan (PK) Possibility Rate (PK)	Level Risiko Risk Level	Langkah Mitigasi Mitigation Measures
R7	SO.7 Improving operational excellence	NHPR	Lower efficiency on the machine that impacts on potential loss or additional cost / 1. Broken chlorine plant Suralaya SPP, moist coal causing derating, 2. Many leaked Tube HP Economizer, LP Superheater, HP Evaporator HRSG CCPP, unit tambak lorok 3 RSH SPP 3. Cooling water condenser ST CCPP Grati experienced stilting 4. The decrease of equipment performance at Suralaya #3 & #4 SPP.	Catastrophe (5)	High (D	Extreme (5,D=5D)	1.a. Choline A&C replacement at plant Suralaya unit 5-7 SPP 1.b. Cover yard coal handling area hopper D. 2.a. Retubing HP Economizer, LP Superheater, HP Evaporator HRSG due to leak CCPP 2.b. Gasification of unit 3 Tambaklorok SPP 3.a. Dredger procurement to support canal dredging at Grati CCPP. 4. Rehabilitation of Suralaya #3 & #4 SPP through KfW program.
R8	SO.8 Mencapai bisnis development exelence	Kelangsungan usaha	Kehilangan potensi pertumbuhan pendapatan dan bisnis / 1. *Market share* turun 2. Belum teridentifikasi area sumur injeksi di PLTP Ulumbu 3. Kebijakan BCM, BCP dan *Crisis Management* belum ada, *Awarness* tingkat Eksekutif dan *Senior Leader* terhadap implementasi Manrisk kurang, *Risk Owner* kurang memahami Kebijakan dan implementasi Manrisk, Awarness Mitra Kerja terhadap implementasi Manrisk kurang 4. Penggambaran nilai budaya perusahaan yang saat ini masih komplek dan sulit dipahami oleh pegawai, Belum optimalnya peran Agen Perubahan	Medium -3	Besar (D)	Tinggi (3,D=3D)	1.a. Pembangunan PLTM Cileunca. 1.b. Pembangunan PLTM Gunung Wugul. 1.c. Pembangunan PLTA Lambur 1.d. Pembangunan PLTA Harjosari. 1.e. Perijinan Pengmbangan PLTA Jawa Tengah III. 1.f. Perijinan Pengembangan PLTA Jawa Barat 1. 1.g. Studi Kelayakan Pengembangan PLTGU Grati ad28d on. Blok 2 : 150 MW. 1.h. JVC Pengembangan PLTU Perak. 1.i. Pengembangan PLTGU Tambaklorok Blok 3 : 700 MW. 1.j. Jasa konsultan AMDAL PLTA Simonggo 2 : 90 MW. 1.k. JVC O&M Collaboration 1.l. Relokasi PLTG Pontianak untuk penyediaan listrik di kepulauan Karimum Jawa. 1.m. Pengembangan PLTU Lombok 2 : 2 x 50 MW. 1.n. Pengembangan PLTA Maung 360 MW. 1.o. Penyediaan lahan dan perijinan PLTU 9 & 10 Suralaya 1.p. Pembangunan PLTM Kalibeber 3,8 MW

No. Risiko Risk Number	SO SO	Risiko Risk	Kejadian/Penyebab Cause	Peringkat Dampak (PD) Impact Rate (PD)	Peringkat Kemungkinan (PK) Possibility Rate (PK)	Level Risiko Risk Level	Langkah Mitigasi Mitigation Measures
							1.q.Joint Venture pembangunan PLTU Jambi 2 x 600 MW. 1.r.JVC pembangunan PLTA Poigar. 2.Pengadaan dan pemasangan MEQ PLTP Ulumbu 3.a.Konsultan Penyusunan Kebijakan BCM, BCP dan Crisis Management (KonsultanEndurra yang dibayarkan melalui Asuransi Aset) 3.b. Review Kebijakan dan Prosedur Manajemen Risiko 3.c.Penunjukan konsultan untuk Pengembangan ProRBA 42.a. Review IP Way 4.b. Penyusunan Roadmap dan Modul Sosialisasi IP Way 4.c. Training Pembekalan Agen Perubahan
R8	SO.8 Achieving business development excellence	Business sustainability	Loss of potential revenue and business growth / 1. Decrease Market share 2. Unidentified injection well at Ulumbu GPP 3. No policy on BCM, BCP, and Crisis Management, Low awareness on Executive and Senior Leader level on Risk Management implementation, Risk Owner does not understand the policy and implementation of Risk Management, Partners' Awareness on Risk Management is not enough 4. Depiction of corporate culture is still complex and hard to understand by the employee, the role of Agent of Change is not optimal	Medium (3)	High (D)	High (3,D=3D)	1.a. Construction of Cileunca MPP. 1.b. Construction of Gunung Wugul MPP. 1.c. Construction of Lambur HPP 1.d. Construction of Harjosari HPP. 1.e. License to Develop Central Java III HPP. 1.f. License to Develop West Java 1 HPP. 1.g. Feasibility Study of Development of Grati CCPP ad28d on. Block 2: 150 MW. 1.h. JVC Development of Perak SPP. 1.i. Development of Tambaklorok CCPP Block 3: 700 MW. 1.j. AMDAL consultant service at HPP Simonggo CCPP 2: 90 MW. 1.k. JVC O&M Collaboration 1.l. Relocation of Pontianak GTPP for electricity provision in Karimun Jawa Island. 1.m. Development of Lombok SPP 2: 2 x 50 MW. 1.n. Development of Maung HPP 360 MW. 1.o. Land procurement and permits for Suralaya SPP 9 & 10

MANAJEMEN RISIKO
Risk Management

No. Risiko Risk Number	SO SO	Risiko Risk	Kejadian/Penyebab Cause	Peringkat Dampak (PD) Impact Rate (PD)	Peringkat Kemungkinan (PK) Possibility Rate (PK)	Level Risiko Risk Level	Langkah Mitigasi Mitigation Measures
							1.p. Construction of Kalibeber MPP 3,8 MW 1.q. Joint Venture Development of Jambi SPP 2 x 600 MW. 1.r. JVC Development of Poigar HPP. 2. Procurement and installation of MEQ GPP Ulumbu 3.a. Consultant of Policy Compilation for BCM, BCP, and Crisis Management (Endurra Consultant, paid through Asset Insurance) 3.b. Review of Risk Management Policy and Procedures 3.c. Consultant appointment for ProRBA Development 4.a. Review of IP Way 4.b. Roadmap compilation and IP Way Socialization Module 4.c. Debriefing training for Agent of Change
R9		*Obsolete* Teknologi	Peralatan-peralatan pembangkit telah mengalami *obsolete*	Malapetaka (5)	Sedang ©	Extrim (5,C=5C)	1.a.Pekerjaan Migrasi *Storage* dan *Upgrade* Perangkat *Backup* Tahun 2016 1.b.Pengadaan *Data Center Infrastructure Management* (DCIM) dan Perangkat *Firewall Data Center* Tahun 2016
R9		Obsolete Technology	Obsolete equipment on power plants	Catastrophe (5)	Moderate	Extreme (5,C=5C)	1.a. Migration of Storage and Upgrade of Backup Hardware in 2016 1.b. Procurement of Data Center Infrastructure Management (DCIM) and Data Center Firewall Hardware in 2016
R10		*Security* Teknologi	*Security* teknologi tidak mampu menahan *hack*	Signifikan (4)	Sedang ©	Tinggi (4,C=4C)	Penambahan *Server* di *Data Center* Tahun 2016
R10		Technology Security	Technology security is not able to defend against hacking	Significant (4)	Moderate	High (4,C=4C)	Adding Server in Data Center in 2016

No. Risiko Risk Number	SO SO	Risiko Risk	Kejadian/Penyebab Cause	Peringkat Dampak (PD) Impact Rate (PD)	Peringkat Kemungkinan (PK) Possibility Rate (PK)	Level Risiko Risk Level	Langkah Mitigasi Mitigation Measures
R11		Tata Kelola	Implementasi tata kelola pem, bangkit secara *best praktice* belum optimal / 1. Pencapaian belum sesuai *best practice* 2. Pegawai belum *aware* integrasi ISO 26000 ke dalam IP IMS	Medium (3)	Sedang ©	Tinggi (3,C=3C)	1.a.*Workshop review* pedoman MLMA. 1.b.Melaksanakan sertifikasi mutu dan *audit survailance.* 2.a.Pengelolaan *assurance* untuk *sustainable* report. 2.b.Digitalisasi perpustakaan. 2.c.*Workshop* dan jasa konsultan AR & SR. 2.d.Melakukan *survey perception index*
R11		Governance	Best practice of power plant governance is not optimum / 1. Achievement is not in line with best practice 2. Employee is unaware of ISO 26000 integration to IP IMS	Medium (3)	Moderate	High (3,C=3C)	1.a. Review of MLMA guidelines workshop. 1.b. Conducting quality certification and surveillance audit. 2.a. Assurance management for sustainable report. 2.b. Library digitalization. 2.c. Workshop and consultant service of AR & SR. 2.d. Survey perception index
R12		Anak Perusahaan	Kinerja Anak perusahaan buruk / 1. Lemahnya kontrol terhadap anak Perusahaan, *Overlaping* peran anak Perusahaan, Tidak *complience* terhadap peraturan yang berlaku	Medium (3)	Besar (D)	Tinggi (3,D=3D)	1. Penyusunan Pedoman Pengelolaan AP / PP yang didalamnya memuat mekanisme komunikasi dan *monitoring* kinerja AP/PP
R12		Subsidiaries	Bad performance of subsidiaries/ 1. Weak control over subsidiaries, overlapping roles of subsidiaries, incompliance with prevailing rules	Medium (3)	High (D)	Extreme (4,D=4D)	1. Compilation of AP/PP Management Guidelines, which consists of communication and monitoring methods for AP/PP performance
R13	SO.9 Mencapai *supply chain Exelen*	*Security supply* EP	Pasokan batubara darim pemasok ke PLTU Suralaya tidak lancar. / 1.*Monitoring* pasokan batubara belum *online.* 2. Penurunan sumber gas lebih cepat dari prediksi yang ditetapkan 3. Pola operasi pembangkit tidak optimal	Signifikan (4)	Besar (D)	Ekstrim (4,D=4D)	1.Pengadaan Aplikasi *Integrated Coal Management System* PT IP 2. Jasa Konsultansi Kajian dan Evaluasi atas pemanfaatan CNG Plant Grati dan Tambak Lorok 3. Jasa Konsultansi LCM energi primer untuk pembangkit PT.IP s.d tahun 2048

MANAJEMEN RISIKO
Risk Management

No. Risiko Risk Number	SO SO	Risiko Risk	Kejadian/Penyebab Cause	Peringkat Dampak (PD) Impact Rate (PD)	Peringkat Kemungkinan (PK) Possibility Rate (PK)	Level Risiko Risk Level	Langkah Mitigasi Mitigation Measures
	SO.9 Achieving supply chain excellence	Security supply EP	Coal supply from vendor to Sukaraya SPP is uncertain / 1. The coal supply monitoring is still not online. 2. Gas source decrease is faster than the prediction 3. Plant operations plan is not optimal	Significant (4)	High (D)	Extreme (4,D=4D)	1. Procurement of Integrated Coal Management System application for PT IP 2. Consultancy Service for Study and Evaluation on utilization of CNG Plant Grati and Tambak Lorok 3. Consultancy Service for primary energy LCM for plant PT IP until 2048
R14	SO12 : Mengembangkan *green power plant*	Lingkungan	Terjadi pencemaran lingkungan (air, udara dan suara)/ 1.*Electrostatic Precipitator* (ESP) PLTU Suralaya 6 tidak kerja optimal 2.*Pipa hydrant* PLTA Saguling korosi. 3. Program Unggulan CSR belum sesuai dengan kriteria penilaian PROPER 4. belum tersedianya *roadmap* PROPER IP	Signifikan -4	Besar (D)	Ekstrim (4,D=4D)	1.Rehabilitasi *Electrostatic Precipitator* (ESP) PLTU Suralaya 6 2.Penggantian pipa hydran PLTA Saguling 3.Pembinaan dan *monitoring* program unggulan unit untuk mendukung Proper. 4. Menyusun *Roadmap* PROPER yang terintegrasi dengan rencana pengembangan pembangkit dan CSR
	SO12 : Developing green power plant	Environment	Environmental pollution (water, air, sound) / 1. Electrostatic Precipitator (ESP) of Suralaya SPP 6 is not working optimally 2. Hydrant pipe corrosion of Saguling HPP 3. CSR Lead Program is not in line with PROPER assessment criteria 4. IP PROPER roadmap is not yet available	Significant (4)	High (D)	Extreme (4,D=4D)	1. Rehabilitation of Electrostatic Precipitator (ESP) Suralaya HPP 6 2. Replacement of hydrant pipe of Saguling HPP 3. Guidance and monitoring for lead program to support PROPER. 4. Compiling PROPER Roadmap that is integrated with the plant development and CSR
R15		Tuntutan Hukum	Terjadi tuntutan hukum dari *stakeholder* /	Malapetaka (5)	Besar (D)	Ekstrim (5,D=5D)	Revisi AMDAM Unit Pembangkit
		Lawsuit	Lawsuit from stakeholder /	Catastrophe (5)	High (D)	Extreme (5,D=5D)	AMDAM Revision for Generating Unit

No. Risiko Risk Number	SO SO	Risiko Risk	Kejadian/Penyebab Cause	Peringkat Dampak (PD) Impact Rate (PD)	Peringkat Kemungkinan (PK) Possibility Rate (PK)	Level Risiko Risk Level	Langkah Mitigasi Mitigation Measures
R16	SO.13 Mencapai Bisnis Proses ekselen	Kompetensi SDM	Pegawai kurang kompeten, mengakibatkan *human error* pada kegiatan O & M dan berdampak kecelakaan, kegagalan pada peralatan atau gangguan proses produksi atau pemeliharaan atau efisiensi yang turun / 1.Kebutuhan Kompetensi Jabatan belum sesuai dengan jabatan 2.Direktori kompetensi pegawai kurang akurat	Medium (3)	Sedang ©	Tinggi (3,C=3C)	1.*Review* penyusunan KKJ 2.*Review* Direktori kompetensi pegawai
	SO.13 Achieving business process excellence	Human Resources Competence	Employees are incompetent, causing human error on O&M activities and may cause accident, equipment failure, production process disruption, or decrease in maintenance or efficiency / 1. Position Competence Requirement is not in line with the position 2. Inaccurate employee competence directory	Medium (3)	Moderate	High (3,C=3C)	1. Compiling internalization program for integrated Corporate Culture 2. Seminar on corporate culture motivation 3. Mentoring and data processing of HRSE survey result
R17		Jumlah SDM	Ketidakcukupan jumlah dan kompetensi SDM mengakibatkan *human error* berdampak pada gangguan / 1.Gagal rekrutmen/penerimaan pegawai baru	Signifikan (4)	Besar (D)	Ekstrim (4,D=4D)	1.Variasi Program Pemenuhan Pegawai
		Human Resources	Inadequacy in human resources number and competence which cause human error and may cause disruption / 1. Recruitment failure	Significant (4)	High (D)	Extreme (4,D=4D)	1. Variation program on employee's fulfillment

MANAJEMEN RISIKO
Risk Management

No. Risiko Risk Number	SO SO	Risiko Risk	Kejadian/Penyebab Cause	Peringkat Dampak (PD) Impact Rate (PD)	Peringkat Kemungkinan (PK) Possibility Rate (PK)	Level Risiko Risk Level	Langkah Mitigasi Mitigation Measures
R18		Kesejahtera-an pekerja	Demotivasi pekerja di lingkungan perusahaan berdampak pada gangguan operasi dan reputasi perusahaan buruk / 1.Pemahaman nilai budaya perusahaan yang baru belum seluruhnya dapat diterima pegawai 2. Kurangnya motivasi pegawai 3. Akurasi validasi kuesioner kurang	Medium (3)	Sedang ©	Tinggi (3,C=3C)	1.Menyusun program internalisasi budaya Perusahaan terpadu 2. seminar motivasi budaya Perusahaan 3. pendampingan dan olah data hasil survey HRSE
		Employee's Welfare	Demotivation of employee in the company has an impact on operation disruption and bad corporate reputation / 1. Understanding of New corporate culture is not entirely acceptable for all the employees 2. Lack of employee's motivation 3. Inaccurate questioner validation	Medium (3)	Moderate	High (3,C=3C)	1. Compiling internalization program for integrated Corporate Culture 2. Seminar on corporate culture motivation 3. Mentoring and data processing of HRSE survey result
R19		Reputasi	Perusahaan tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik / 1.Tingkat Maturitas Manajemen Risiko masih rendah (dibandingkan dari *Asessor* PLN) 2. belum tersedianya *roadmap* PROPER IP	Malapetaka (5)	Sedang ©	Ekstrim (5,C=5C)	1. *Review* tata cara dan penyesuaian Kebijakan *Maturity Level Assessment* dengan PT PLN (Persero) 2. *Benchmark* Internasional dan nansional
		Reputation	Company could not carry out its duties properly / 1. Low maturity level of Risk Management (compared to the Assessor, PLN) 2. IP PROPER roadmap is not yet available	Catastrophe (5)	Moderate	Extreme (5,C=5C)	Review the procedures and adjustment on Maturity Level Assessment with PT PLN (Persero) 2. International and national benchmark

Hasil Evaluasi Efektivitas Sistem Manajemen Risiko Tahun 2016

Pengelolaan Risiko atas Pelaksanaan Proyek/Kegiatan

Pengelolaan risiko dilaksanakan di seluruh lini proses dan kegiatan Perusahaan oleh pemilik program atau pemilik proses sebagai pemilik risiko (*risk owner*). Satuan Manajemen Risiko, Mutu dan Kinerja bertanggungjawab dalam memastikan pengelolaan risiko telah dilakukan sesuai kebijakan dan ketentuan, serta selalu mengikuti acuan *best practice*. Salah satu tahapan terpenting dalam penerapan manajemen risiko untuk mendukung pencapaian target kinerja jangka pendek dan panjang, adalah penyusunan Dokumen Manajemen Risiko (DMR) oleh Satuan kerja, Divisi maupun UP, UPJP, UJP dan UJH Indonesia Power sebagai *risk owner*. DMR meliputi Kajian Kelayakan Operasi (KKO), Kajian Kelayakan Lingkungan (KKL), Kajian Hukum (KH), Kajian Kelayakan Finansial (KKF) dan Kajian Risiko (KR). Satuan Manajemen Risiko, Mutu dan Kinerja memberikan *coaching* dan *mentoring* terhadap penyusunan DMR yang dilakukan oleh Satuan kerja, Divisi maupun Unit yang memerlukan, serta melakukan verifikasi atas DMR tersebut, sesuai dengan kewenangan yang diatur melalui Keputusan Direksi. Selain melaksanakan pendampingan dan verifikasi untuk penyusunan DMR program/proyek kegiatan di tingkat *risk owner*, Satuan Manajemen Risiko juga melaksanakan berbagai kajian risiko strategis dalam mendukung pengambilan keputusan Direksi dan proses permohonan persetujuan Dewan Komisaris atau RUPS. Dengan pendekatan ini, maka seluruh Keputusan yang diambil telah berbasis risiko.

Pemantauan dan Peninjauan Penerapan Manajemen Risiko

Untuk memastikan keefektifan pengelolaan risiko sebagai enabler dalam pencapaian sasaran perusahaan, maka perlu dilakukan pemantauan dan peninjauan penerapan manajemen risiko. Sasaran dilakukannya pemantauan dan peninjauan tersebut adalah untuk: (1) Mengevaluasi pemenuhan kaidah, kebijakan dan

Evaluation Result of Risk Management System Effectiveness in 2016

Risk Management over Project/ Activity Implementation

Risk management is carried out on all lines of Company's process and activity by program's owner or process owner as risk owner. Risk Management, Quality, and Performance Unit is responsible for ensuring that risk management implementation has been carried out accordingly to the policy and guideline, and in reference to best practice. One of the important stages in risk management implementation to support the achievement of both short and long-term performance targets is to compose Risk Management Document (DMR) by Work Unit, Division, , including GGSU, GSU, and MSU of Indonesia Power as risk owner. DMR comprises of Operational Feasibility Study (KKO), Environmental Feasibility Study (KKL), Legal Study (KH), Financial Feasibility Study (KKF) and Risk Assessment (KR). Risk Management, Quality and Performance Unit provides coaching and mentoring towards the formulation of DMR that is carried out by Work Unit, Division and other Unit that requires the document, and to verify the DMR in accordance with the authority regulated under the Board of Directors' Decree. Other than providing accompaniment and verification for DMR program/project formulation on risk owner level, Risk Management Unit also carries out several strategical risk studies in supporting decision-making process by the Board of Directors and application for approval process by the Board of Commissioners or GMS. Through this approach, all decisions taken are based on risks.

Monitoring and Reviewing of Risk Management

To ensure the effectiveness of risk management as an enabler to achieve Company's targets, the Company conducts monitoring and reviewing of risk management implementation. The purposes of monitoring and reviewing are as follows: (1) evaluating the fulfillment of rules, policies and regulations of risk management;

MANAJEMEN RISIKO
Risk Management

ketentuan pengelolaan risiko; (2) Mengukur keefektifan sistem pengelolaan risiko; (3) Alat manajemen untuk mensinkronisasikan ERM sebagai *enabler* dari kegiatan-kegiatan perusahaan; (4) Identifikasi langkah-langkah perbaikan secara bertahap Pemantauan dan peninjauan tersebut dilakukan melalui optimalisasi penggunaaan aplikasi ProRBA.

Assessment Maturity Level Manajemen Risiko

Indonesia Power senantiasa melakukan *assessment* terhadap pelaksanaan manajemen risiko. *Maturity level assessment* dilakukan untuk mengetahui tingkat kematangan penerapan manajemen risiko. *Assessment* tersebut dilaksanakan oleh Indonesia Power secara mandiri untuk mengukur *maturity level* unit bisnis dan PT PLN (Persero) untuk *maturity level* korporat. Indonesia Power melaksanakan *asessment* berdasarkan tujuh kategori penilaian, yaitu:

1. Aspek Kepemimpinan;
2. Aspek Strategi dan Kebijakan Risiko;
3. Aspek Sumber Daya Manusia;
4. Aspek Pelibatan Mitra Kerja;
5. Aspek Proses Manajemen Risiko;
6. Aspek Penanganan (*treatment*) Risiko; serta
7. Aspek Hasil.

Berdasarkan *assessment* terhadap tujuh kategori tersebut, tren skor *maturity level* semakin meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa internalisasi budaya pengelolaan risiko di Indonesia Power telah mulai menunjukkan hasil dan keefektifannya. Pada tahun 2016 *assessment* dilakukan oleh Tim PT PLN (Persero) dan konsultan independen dengan lima kriteria yaitu *Bisnis Policy, Bisnis Proses, People and Organization, Methodologies*, serta Sistem dan data penilaian tersebut memperoleh skor 3,56 dari skor maksimum 5. Hal ini mengindikasikan bahwa beberapa aspek telah menunjukkan kematangan implementasi manajemen risiko terutama bisnis *policy*, namun untuk aspek *People* and *Organization* serta *Methodologies* masih membutuhkan perbaikan. Dengan adanya pelaksanaan *assessment* penerapan manajemen risiko, Indonesia Power memperoleh gambaran tentang implementasi manajemen risiko secara komprehensif sehingga perbaikan dan penyempurnaan berkelanjutan dapat dilaksanakan dengan konsisten untuk membangun tata kelola perusahaan yang efektif dan efisien.

(2) measuring the effectiveness of risk management system; (3) management tool for synchronizing ERM as an enabler of company's activities; (4) identifying stages of improvement gradually. Monitoring and reviewing are carried out through the optimization of ProRBA application utilization.

Maturity Level Assessment for Risk Management

Indonesia Power constantly performs assessment toward the implementation of risk management. Maturity level assessment is carried out to find out the level of maturity of risk management implementation. This assessment is carried out independently by Indonesia Power to measure the maturity level of business unit and PT PLN (Persero) for its corporate maturity level. Indonesia Power conducts this assessment based on seven categories of evaluation, i.e.:

1. Leadership Aspect;
2. Strategy and Risk Policies Aspect;
3. Human Resource Aspect;
4. Partner Involvement Aspect;
5. Risk Management Process Aspect;
6. Risk Treatment Aspect; and
7. Result Aspect.

Based on the assessment of those seven categories, the score of maturity level has increased year after year. This indicates that the internalization of risk management culture within Indonesia Power has shown positive result and effectiveness. In 2016, the assessment was carried out by PT PLN (Persero) Team and independent consultant with five criteria, i.e. Business Policy, Business Process, People and Organization, Methodologies, and System. The assessment data achieved 3.56 out of 5, the maximum score. This indicates that several aspects have shown a maturity in risk management implementation specifically in business policy, but improvement is required for People and Organization and Methodologies aspects. Through the assessment of risk management implementation, Indonesia Power has managed to gain a comprehensive description of risk management implementation so that sustainable improvement and refinement can be consistently carried out to build an effective and efficient corporate governance.

Pengembangan Infrastruktur Manajemen Risiko

Infrastruktur manajemen risiko juga aktif dikembangkan oleh Indonesia Power. Salah satu pengembangan tersebut adalah membangun aplikasi pro-RBA (*Risk Based Audit*) berbasis web pada tahun 2014 dan mulai dioperasikan sejak awal tahun 2015. Aplikasi ini bertujuan agar pengelolaan risiko berjalan efektif dengan cara otomatisasi proses penyusunan kajian manajemen risiko. Aplikasi ini memberikan beberapa kemudahan diantaranya:

1. Taksonomi risiko
   Taksonomi risiko memungkinkan keseragaman dalam pengungkapan deskripsi risiko. Taksonomi risiko bersifat fleksibel karena memberikan ruang untuk menuangkan penyebab dari risiko yang mungkin berbeda-beda;
2. Agregasi profil risiko
   Agregasi profil risiko dari tingkat unit sampai ke korporat dapat dengan mudah diperoleh karena disusun dengan otomatisasi yang apabila pengelolaan risiko dilakukan secara manual akan sulit diperoleh karena antara unit dan korporat tidak saling terhubung dan jumlah yang banyak;
3. Monitor langkah-langkah mitigasi risiko efektif
   Hal ini dapat terjadi karena aplikasi telah terhubung dengan fungsi Audit Internal. Auditor akan memastikan bahwa langkah-langkah mitigasi yang telah disusun, dapat dilaksanakan dengan baik dan tepat oleh pemilik risiko (*risk owner*) dan sekaligus pemilik bisnis proses. Audit dilakukan sejak dini di tahap perencanaan sehingga pengelolaan risiko menjadi efektif, termasuk *monitoring* mitigasi risiko.

Keseluruhan pengembangan tersebut dilaksanakan Indonesia Power dalam rangka menyempurnakan penerapan manajemen risiko di lingkungan Perusahaan. Penerapan manajemen risiko yang berjalan efektif dan efisien selanjutnya diintegrasikan sepenuhnya ke dalam tata kelola Indonesia Power untuk memberikan kepastian pencapaian sasaran Perusahaan sehingga meningkatkan kepercayaan dan membentuk citra positif Indonesia Power di kalangan para pemangku kepentingan.

The Development of Risk Management Infrastructure

Indonesia Power actively develops Risk management infrastructure. One of the developments is pro-RBA (Risk Based Audit) web-based application, which was constructed in 2014 and had started its operation in early 2015. This application is intended to ensure that risk management can be carried out effectively through an automation process of risk management assessment. This application provides several conveniences, among them, are:

1. Risk Taxonomy
   Risk Taxonomy allows homogeneity in risk description disclosure. Risk Taxonomy is flexible in terms of providing the space to share causes of risk that may differ;
2. Risk profile aggregation
   Risk profile aggregation from the Unit to Corporate level can be easily acquired because it is compiled through automation. Hence, if the risk management is still carried out manually, the information may be hard to obtain since Unit and corporate were not connected, especially taking into accounts the big number of it.
3. Monitoring effective risk mitigation stages
   This is possible since the application has been connected to internal audit function. The auditor will ensure that the mitigation measures that have been prepared would be carried out properly by risk owner and business process owner. Audit is carried out early during the stage of planning so that risk management can be effective, including the monitoring process of risk mitigation.

The entirety of development is carried out by Indonesia Power to improve the implementation of risk management within the Company. An effective and efficient risk management implementation would then be integrated fully into the governance of Indonesia Power to ensure the achievement of Company's targets, improving trust, and shaping a positive image of Indonesia Power amongst the stakeholders.

MANAJEMEN RISIKO
Risk Management

Pengembangan Manajemen Risiko Berkelanjutan

Peran penting manajemen risiko terhadap keberlanjutan operasional mendorong Indonesia Power untuk melakukan upaya pengembangan secara berkelanjutan. Indonesia Power mengembangkan tidak hanya infrastruktur pendukung pelaksanaan manajemen risiko tetapi juga SDM yang berperan sebagai eksekutornya. Kompetensi SDM senantiasa ditingkatkan dengan mengirimkan pegawai kepada Lembaga Penyelenggara Pelatihan baik diselenggarakan oleh PT PLN (Persero) maupun internal Indonesia Power. Program pelatihan dan seminar Manajemen Risiko dilaksanakan bagi para pegawai Perusahaan yang terlibat langsung dalam pengelolaan risiko. Pengembangan kompetensi tersebut dilakukan melalui program sertifikasi tingkat lokal maupun internasional, serta program-program pelatihan bidang manajemen risiko lainnya.

The Development of Sustainable Risk Management

The important role of risk management in operational sustainability encourages Indonesia Power to perform a sustainable development. Indonesia Power develops both supporting infrastructure and human resource as the executor in implementing risk management. HR competency is constantly improved by sending the employees to Training Institution, held both by PT PLN (Persero) and internally in Indonesia Power. Training program and seminar on Risk Management are held for Company's employees that are directly involved in risk management. The development of this competency is carried out through certification program, both on national and international levels, and other training programs on risk management.

Tabel Pengembangan Kompetensi SDM Manajemen Risiko Tahun 2016
Table: Risk Management of Human Resources Competency Development in 2016

Peserta Participant	Nama Diklat Training	Tanggal Date	Lokasi Location
Pengelola Risiko Kantor Pusat Risk Manager of Head Office	*Roadshow, Pre Bid, & Open Bid* Broker Asuransi dengan PT Jasindo, Singapore Roadshow, Pre-Bid, & Open Bid Insurance Broker with PT Jasindo, Singapore	30 Oktober 2016 – 02 November 2016 October 30 - November 2, 2016	
Semua perwakilan pengelola risiko Unit Kerja Every representative of Risk Management Unit	Forum Manajemen Risiko 2016 Risk Management Forum 2016	24-26 Februari 2016 February 24-26, 2016	UP Bali Bali GU
Semua perwakilan pengelola risiko Unit Kerja Risk Manager of Head Office	*Capacity Building Business Continuity Management* (BCM) ISO 22301 Capacity Building Business Continuity Management (BCM) ISO 22301	12-13 Mei 2016 May 12-13, 2016	PLTGU Grati – UP Perak Grati Grati SSP– Perak Grati GU
Perwakilan pengelola risiko PT PLN dan anak perusahaannya Risk Management Representative of PT PLN and its subsidiaries	Forum Manajemen Risiko PT PLN (Persero) Risk Management Forum of PT PLN (Persero)	21-22 Desember 2016 December 21-22, 2016	Surabaya

Sampai dengan akhir tahun 2016, jumlah personel yang memiliki sertifikasi di bidang Risiko adalah sebagai berikut:

As of the end of 2016, the number of personnel that has certification in risk sector is as follows:

Tabel Sertifikasi Bidang Manajemen Risiko Pegawai Perusahaan Tahun 2016
Table: Certification of Company's Risk Management Employee in 2016

No	Nama Name	Unit Kerja Work Unit	Sertifikasi Certification
1	Ali Muhtar	Kantor Pusat | Head Office	QRMP
2	Bambang Saptohadi	UJP | GSU JPR	QRMP
3	Dewi Sucianingsih	UJP | GSU Cilegon	QRMP
4	Dwi Hantoro	UP | GU Mrica	QRMP
5	Imam Putra Prasetya	UJP | GSU Labuan	QRMP
6	M Arief Rahman	UJP | GSU Adipala	QRMP
7	M Juanhar	Kantor Pusat | Head Office	QRMP
8	Rizqi Priatna	UJP | GSU Suralaya	QRMP
9	Rolly	UJP | GSU Lontar	QRMP
10	Sinung DA	Kantor Pusat | Head Office	QRMP
11	Suprapto	UP | GU Perak Grati	QRMP
12	Surya DP	Kantor Pusat | Head Office	QRMP
13	Suwarna	Kantor Pusat | Head Office	QRMP
14	Tarsis Tinggi	UJH | MSU	QRMP
15	Toto Wardoyo	UP | GU Saguling	QRMP
16	Tri Mulyono	Kantor Pusat | Head Office	QRMP
17	Tri Susilo	Kantor Pusat | Head Office	QRMP
18	Unggul Satriatama	UP | GU Bali	QRMP
19	Wisnu Kurniawan	UP | GU Suralaya	QRMP
20	Yudi hidayat	UP | GU Priok	QRMP
21	Akhmad Royani	UJP | GSU Labuan	QRMA
22	Asqe Wendri Valantova	UJP | GSU Sanggau	QRMA
23	Awaluddin YB Harahap	UJP | GSU Cilegon	QRMA
24	Cipto Buntoro	UP | GU Mrica	QRMA
25	Dedeh Zubaidah	UP | GU Kamojang	QRMA
26	Dedik Nur Widyanto	UP | GU Suralaya	QRMA
27	Dian Maturidi	UP | GU Perak Grati	QRMA
28	Erika Prestaningrum	UJH | MSU	QRMA
29	Hendra Purnama	UP | GU Saguling	QRMA
30	Herowiko Thama Nurahman	UJP | GUS Pelabuhan Ratu	QRMA
31	Heru Dwinanto	UJP | GSU Lontar	QRMA
32	I Made Sabda Antara	UP | GU Bali	QRMA
33	Ibnu Agus Santosa	UJP | GSU Jeranjang	QRMA
34	Imam Mustofa	UJP | GSU Adipala	QRMA
35	Imam Subakti	UJP | GSU Holtekamp	QRMA
36	Lac Hirna Wipogso	UJP | GSU Suralaya	QRMA
37	Muhammad Imaduddin	Unit Barru	QRMA

MANAJEMEN RISIKO
Risk Management

No	Nama Name	Unit Kerja Work Unit	Sertifikasi Certification
38	Priyo Windaru	UP | GU Semarang	QRMA
39	Randy Ramos	UJP | GSU Pangkalan Susu	QRMA
40	Roosdiana Sibarani	UPJP | GGSU Priok	QRMA
41	Herdiyanto Soekono	Kantor Pusat | Head Office	QRCO

Selain itu, Indonesia Power menyelenggarakan *Capacity Building Risk Management Corporate* bagi seluruh Senior Leader sebagai *Risk Owner* (RO)/pemilik risiko tertinggi di masing-masing Unit/Satuan/Divisi/Departemen/Bidangnya. Kompetensi, keterlibatan, dan peran Senior Leader perlu untuk terus ditingkatkan dan disegarkan kembali dalam rangka mencapai *Enterprise Risk Management* (ERM) yang matang di lingkungan Perusahaan. Dengan terselenggaranya program ini diharapkan *Senior Leader* dapat meningkatkan *awareness* dalam implementasi ERM, pemahaman penggunaan "*tools*" dalam Analisa *Governance*, *Risk* dan *Compliance Management*, pemahaman tentang isu-isu kritikal dalam *Governance, Risk* and *Compliance Management*, serta pemahaman konsep-konsep *Best Practices* dari *Governance, Risk and Compliance Management*.

In addition, Indonesia Power has held Capacity Building Risk Management Corporate for all Senior Leader as Risk Owner (RO)/the highest level of risk owner in each Unit/Division/Department/Field. Competency, involvement, and role of Senior Leader need to be improved and refreshed to achieve proper Enterprise Risk Management (ERM) within the environment of the Company. Through the implementation of this program, Senior Leader can improve awareness in ERM implementation, understanding on the utilization of tools in Governance, Risk, and Compliance Management Analysis, understanding on critical issues in Governance, Risk, and Compliance Management, and understanding on Best Practice concepts of Governance, Risk, and Compliance Management.

AKUNTAN PUBLIK

Public Accountant

Audit eksternal dilakukan oleh pihak independen yang telah memenuhi persyaratan untuk memastikan bahwa pencatatan akuntansi Perusahaan yang disusun sesuai dengan ketentuan Pernyataan Standar Akuntansi dan Keuagan (PSAK) dan laporan yang disiapkan menyajikan posisi keuangan dan hasil usaha secara wajar serta operasional usaha yang dijalankan Perseroan tidak menyalahi ketentuan Regulasi yang berlaku.

External Audit is performed by an independent party who has fulfilled the requirements to ensure that the Company's accounting report is compiled in accordance with the Statements of Financial Accounting Standard (SFAS). The Company's report consists of the Company's financial position and business results in a fair manner, and the business operations conducted by the Company shall not be in violation of the prevailed regulations.

Penunjukan Auditor Eksternal

Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) telah mendapat persetujuan RUPS tanggal 7 Juni 2016. Auditor Eksternal yang ditunjuk tidak diperkenankan memiliki benturan kepentingan dengan Perusahaan guna menjamin independensi dan kualitas hasil audit. Auditor Eksternal bertanggung jawab untuk menyampaikan opini atas ketaatan Laporan Keuangan Perusahaan yang di audit terhadap Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku umum. Untuk menjaga profesionalitas dan independensi, Pemilihan Auditor Eksternal telah memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008 tentang Jasa Akuntan Publik, dimana Kantor Akuntan Publik (KAP) hanya boleh melakukan audit paling lama untuk 6 (enam) tahun buku berturut-turut dan oleh seorang Akuntan Publik maksimal 3 (tiga) tahun buku berturut-turut.

External Auditor Appointment

GMS dated 7 June 2016 has approved the appointment of Public Accountant and Public Accounting Firm (KAP). The appointed External Auditor shall not have a conflict of interest with the Company in order to ensure independence and the quality of the audit. External Auditor is responsible for conveying the opinion on the Compliance of the audited Company's Financial Statements with the generally accepted Financial Accounting Standards. To ensure professionalism and independent, the Appointment of External Audit has fulfilled the Regulation of the Minister of Finance No. 17/PMK.01/2008 on Public Accountants Services, in which the Public Accounting Firm (KAP) shall perform an audit at the longest for 6 (six) consecutive fiscal years, and by a Public Accountant at the maximum of 3 (three) consecutive fiscal years.

Nama Akuntan Publik, Kantor Akuntan Publik dan *Fee Audit*

Sesuai arahan PT PLN (Persero) selaku pemegang saham mayoritas, terdapat 2 (dua) auditor eksternal yang melakukan audit di Indonesia Power, yaitu Kantor Akuntan Publik (KAP) dan Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Ketentuan *fee audit* sepenuhnya menjadi tanggungan PT PLN (Persero) selaku Induk Perusahaan sekaligus pemegang saham Perusahaan. Pada tahun 2016, Akuntan Perusahaan yang ditunjuk dan dibiayai oleh

Name of Public Accountant, Public Accounting Firm, and Audit Fee

As per direction of PT PLN (Persero) as the majority shareholder, there are 2 (two) external auditors who perform an audit in Indonesia Power, i.e. Public Accounting Firm (KAP) and The Audit Board of the Republic of Indonesia (BPK RI). The audit fee is solely the liability of PT PLN (Persero) as the Parent Company as well as the Company's shareholder. In 2016, the Public Accounting Firm that is appointed and financed by PT PLN (Persero), is KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto,

AKUNTAN PUBLIK
Public Accountant

PT PLN (Persero) adalah KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan sebagai auditor yang akan mengaudit Laporan Keuangan Indonesia Power Tahun Buku 2016. Audit Laporan Keuangan Indonesia Power selama 5 tahun terakhir dilakukan oleh Akuntan dan KAP sebagai berikut:

Mawar & Rekan, as the auditor that will audit Indonesia Power's Financial Statements for the Fiscal Year 2015. Financial Statements Audit of Indonesia Power throughout the last 5 years were performed by Accountants and KAP as follows:

Tabel Kantor Akuntan Publik, Nama Akuntan, dan Opini Audit Tahun 2012-2016
Table: Public Accountings Firm, Accountants' Name, and Audit Opinion 2012-2016

Tahun Buku Fiscal Year	Kantor Akuntan Publik Public Accounting Firm	Akuntan Publik Public Accountant	Ruang Lingkup Scope	Opini Audit Audit Opinion
2012	Osman Bing Satrio & Eny (Deloitte)	Sahat Maruli Purba Izin No.AP.0953	Laporan Keuangan Perusahaan, Laporan Evaluasi Kinerja Perusahaan, dan Laporan Audit Kepatuhan Company's Financial Statements, Company's Performance Evaluation Statement, and Compliance Audit Report	Wajar Tanpa Pengecualian Fair with no exception
	Osman Bing Satrio & Eny (Deloitte)	Sahat Maruli Purba Izin No.AP.0953		
2013	Osman Bing Satrio & Eny (Deloitte)	Sahat Maruli Purba Izin No.AP.0953	Laporan Keuangan Perusahaan, Laporan Evaluasi Kinerja Perusahaan, dan Laporan Audit Kepatuhan Company's Financial Statements, Company's Performance Evaluation Statement, and Compliance Audit Report	Wajar Tanpa Pengecualian Fair with no exception
	Osman Bing Satrio & Eny (Deloitte)	Sahat Maruli Purba Izin No.AP.0953		
2014	Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PWC)	Harianto Sahari	Laporan Keuangan Perusahaan, Laporan Evaluasi Kinerja Perusahaan, dan Laporan Audit Kepatuhan Company's Financial Statements, Company's Performance Evaluation Statement, and Compliance Audit Report	Wajar Tanpa Pengecualian Fair with no exception
	Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PWC)	Harianto Sahari		
2015	Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PWC)	Haryanto Sahari, CPA Izin No.AP.0223	Laporan Keuangan Perusahaan, Laporan Evaluasi Kinerja Perusahaan, dan Laporan Audit Kepatuhan Company's Financial Statements, Company's Performance Evaluation Statement, and Compliance Audit Report	Wajar Tanpa Pengecualian Fair with no exception
	Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PWC)	Haryanto Sahari, CPA Izin No.AP.0223		
2016	Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan	Saptoto Agustomo, Izin No.AP.0499	Laporan Keuangan Perusahaan, Laporan Evaluasi Kinerja Perusahaan, dan Laporan Audit Kepatuhan Company's Financial Statements, Company's Performance Evaluation Statement, and Compliance Audit Report	Wajar Tanpa Pengecualian Fair with no exception
	Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan	Saptoto Agustomo, Izin No.AP.0499		

Fee Audit

Ketentuan *fee audit* sepenuhnya menjadi tanggungan PT PLN (Persero) selaku Induk Perusahaan sekaligus pemegang saham Perusahaan. Sesuai arahan PT PLN (Persero), terdapat 2 (dua) auditor eksternal yang melakukan audit di Indonesia Power, yaitu Kantor Akuntan Publik (KAP) dan Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).

Audit Fee

The audit fee is solely the liability of PT PLN (Persero) as the Parent Company as well as the Company's shareholder. As per direction of PT PLN (Persero), there are 2 (two) external auditors who perform an audit in Indonesia Power, i.e. Public Accounting Firm (KAP) and The Audit Board of the Republic of Indonesia (BPK RI).

Jasa Lain yang Diberikan

Selain melakukan audit umum, KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan tidak memberikan jasa konsultasi maupun jasa lainnya kepada Perusahaan.

Other Services Provided

In addition to general audit, KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan does not give any consultation services or other services to the Company.

Pemeriksaan Auditor Eksternal Lainnya

Selain pemeriksaan audit yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga turut melakukan kegiatan audit Perusahaan. Adapun jumlah temuan audit oleh KAP untuk tahun 2016 berjumlah empat temuan, dan jumlah temuan audit oleh BPK RI berjumlah 16 temuan.

Other External Auditor's Audit

In addition to the audit performed by Public Accounting Firm, the Audit Board of the Republic Indonesia (BPK) also conducts audit activities in the Company. The KAP findings in 2016 is amounted to four findings, and the audit findings by BPK RI is 16 findings.

Tabel Jumlah Temuan Audit Tahun 2009-2016
Table: Audit Findings in 2009-2016

	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Temuan Audit KAP KAP Audit Findings	4	2	2	2	3	3	7	9
Temuan Audit BPK RI BPK RI Audit Findings	15	0	4	6	1	2	1	4
% Temuan Audit Eksternal yang Ditindaklanjuti % External Audit Findings that are followed-up	55	100	100	100	100	100	100	100

AKUNTAN PUBLIK
Public Accountant

Efektivitas Pelaksanaan Audit Eksternal

Komite Audit melakukan kajian atas efektivitas pelaksanaan audit eksternal untuk memastikan pelaksanaan audit tidak menemui hambatan dan seluruh temuan dapat ditindaklanjuti sesuai kewenangan yang ditetapkan. Direksi secara aktif melakukan koordinasi dan komunikasi dengan auditor eksternal agar pelaksanaan audit berjalan efektif dan apabila terjadi kendala dalam obyek pemeriksaan dapat segera dicari solusi dalam mengatasi setiap permasalahan yang ada. Direksi juga secara aktif melakukan pemantauan tindak lanjut temuan-temuan pemeriksaan audit eksternal dalam setiap rapat koordinasi antara Direksi dengan satuan-satuan kerja terkait sehingga diharapkan dimasa mendatang temuan serupa tidak akan terulang kembali.

Effectivity of the External Audit Implementation

Audit Committee reviews the effectivity of external audit implementation to ensure that the audit implementation does not encounter obstacles and all findings can be followed up in line with the stipulated authority. Directors actively coordinates and communicates with the external auditor, so the audit implementation functions effectively, and in the event of obstacles in the examination objects, the solution can be found quickly in order to overcome any existing problems. Directors also actively monitors the follow-up of external audit findings in every coordination meeting between the Directors and the related work units, therefore in the future, the same audit findings shall not recur.

KODE ETIK PERUSAHAAN

Code of Conduct

Melalui penerapan kode etik Perusahaan yang dijalankan secara konsisten oleh Indonesia Power, diharapkan dapat mendorong terwujudnya perilaku yang profesional, bertanggung jawab, wajar, patut dan dipercaya dalam melakukan hubungan bisnis dengan rekan sekerja maupun para mitra kerja sehingga menghasilkan reputasi yang baik di kalangan para pemangku kepentingan dan mewujudkan keberhasilan usaha dalam jangka panjang.

Through the implementation of Company's Code of Conduct consistently by Indonesia Power, it shall encourage professional, responsible, reasonable, proper, and trustworthy conduct, in performing business relation with colleagues or business partners, as to generate good reputation among stakeholders and to achieve long-term business success.

Pokok-Pokok Kode Etik Perusahaan

Indonesia Power telah memiliki Pedoman Etika Perusahaan yang dikaji secara berkala sebagai standar acuan perilaku korporat bagi seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) baik internal maupun eksternal yang berhubungan dengan Indonesia Power. Pedoman Etika Perusahaan disahkan berdasarkan berdasarkan Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi Nomor 247.K/010/IP/2016 dan Nomor 17.SK/Dekom-IP/2016 tanggal 20 Desember 2016. Untuk mengantisipasi perkembangan dan kebutuhan Perusahaan, Indonesia Power telah menyempurnakan Pedoman Etika Perusahaan dengan menambahkan aspek antara lain terkait dengan hubungan dengan kreditur, pembayaran tidak wajar (imbalan) dan sebagainya.

Muatan Pedoman Etika Perusahaan terbagi menjadi 5 (lima) bagian utama, yaitu: (1) Pernyataan visi dan misi; (2) Nilai dan budaya; (3) Pentingnya Pedoman Etika Perusahaan; (4) Kebijakan etika perusahaan; dan (5) Petunjuk pelaksanaan Pedoman Etika Perusahaan. Pada bagian Kebijakan Etika Perusahaan, diatur tentang Standar Etika Bisnis dan Etika Perilaku setiap insan Indonesia Power dalam hubungannya dengan berbagai *stakeholders* mulai dari pegawai, pelanggan, pemasok, masyarakat, pemerintah, pesaing, dan mitra kerja.

Principles of Code of Conduct

Indonesia Power has Company's Code of Conduct that is reviewed periodically as a standard referral of corporate behavior for all stakeholder, both internal or external, related to Indonesia Power. The Code of Conduct is ratified based on Joint Decree of Board of Commissioners and Directors No. 247.K/010/IP/2016, and No. 17.SK/Dekom IP/2016 dated 20 December 2016. To anticipate the Company's development and needs, Indonesia Power has refined Company's Code of Ethic by adding aspects related to the relationship with the creditor, unfair treatment (rewards), etc.

The Content of Company's Code of Ethics is divided into 5 (five) main sectors, i.e.: (1) Statement of vision and mission; (2) Values and culture; (3) Importance of Code of Ethics Guidelines; (4) Company's ethics policy; and (5) Guidelines of Company's Code of Ethics. The Company's Ethics Policy stipulates Standards Business Ethics and Code of Conduct for every personnel of Indonesia Power in their relation with various stakeholders, ranging from the employee, customer, supplier, communities, government, competitors, and partners.

KODE ETIK PERUSAHAAN
Code of Conduct

Pemberlakuan Kode Etik Perusahaan

Pedoman Etika Perusahaan disusun untuk menjadi acuan perilaku bagi seluruh Insan Indonesia Power sebagai bagian dari usaha pencapaian Visi dan Misi Perusahaan. Seluruh insan Indonesia Power mencakup pegawai, Direksi, Dewan Komisaris dan Komite di bawah Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk bertingkah laku sesuai dengan budaya Perusahaan. Pegawai dapat melaporkan dugaan pelanggaran atas Pedoman Etika Perusahaan kepada atasan, Pejabat Yang Berwenang Menindak (PYBM), serta melalui mekanisme WBS. Seluruh laporan tersebut harus disertai data dan/atau bukti-bukti akurat sehingga pelanggaran dapat diproses lebih lanjut. Setiap pelanggaran atas Pedoman Etika Perusahaan akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku dan pengenaan sanksi tersebut tidak bersifat diskriminatif.

Pelapor dapat melaporkan indikasi *fraud*, kriminal, pelanggaran kebijakan perusahaan dan pelanggaran kode etik yang melibatkan segenap jajaran Indonesia Power dengan menyampaikan pengaduan melalui media pelaporan yaitu *e-mail* pengaduan@indonesiapower.co.id, PO BOX 9000 Jakarta 10000, *drop box* di *lobby* lantai 1 Kantor Pusat Indonesia Power, dan surat resmi

Enactment of Company's Code of Conduct

Company's Code of Conduct is compiled to be a benchmark of conduct for every personnel of Indonesia Power as part of the effort to achieve Company's Vision and Mission. Every Indonesia Power personnel, including employee, Directors, Board of Commissioners, and Committee reporting directly to Board of Commissioners, is responsible for behaving in accordance with Company's culture. An employee may report alleged violations of Company's Code of Conduct to a supervisor, authorized officials, and through WBS mechanism. Every report must be accompanied by data and/or accurate proof so that the violation may be processed further. Every violation of Company's Code of Conduct shall be subject to sanctions in accordance with the prevailing regulations, and the imposition of such sanctions is not discriminatory.

The reporter may report indication of fraud, criminality, violations of the Company's policy and Code of Conduct that involves every level of Indonesia Power, by submitting complaints through reporting media, i.e. e-mail pengaduan@indonesiapower.co.id, PO BOX 9000 Jakarta 10000, drop box at Lobby Floor 1, Head Office of Indonesia Power, and official letter to the Company

ke alamat Perusahaan. Indonesia Power berkomitmen dalam menjaga kerahasiaan informasi pelapor dan pihak yang diduga melakukan pelanggaran sebagai penerapan prinsip kerahasiaan (*confidentiality*). Identitas pelapor hanya diketahui oleh admin pengaduan pelanggaran kecuali pelapor mengizinkan untuk dibuka identitasnya.

address. Indonesia Power commits to maintain the confidentiality of the reporter and the alleged offenders as to implement the confidentiality principle. The identity of the reporter is known by the admin of violations complaint, unless the reporter allows his/her identity to be known.

Pernyataan Kepatuhan Terhadap Pedoman Etika Perusahaan

Indonesia Power berupaya menegakan Pedoman Etika dalam bentuk sikap, perbuatan, dan komitmen yang dilakukan dengan penuh kesadaran melalui beberapa kegiatan yaitu:

1. Pernyataan Kepatuhan terhadap Pedoman Etika
   Setiap jajaran Indonesia Power wajib membaca, memahami dengan baik, dan menandatangani Pernyataan Kepatuhan terhadap Pedoman Etika termasuk aspek budaya perusahaan.

2. Pernyataan Bebas Benturan Kepentingan
   Setiap jajaran Indonesia Power harus membuat pernyataan bebas benturan kepentingan setiap tahun. Dalam pernyataan tersebut disebutkan situasi yang memiliki potensi benturan kepentingan harus dihindari.
3. Pakta Integritas
   Penandatanganan Pakta Integritas dilakukan oleh pejabat pemegang kewenangan dan seluruh rekanan/mitra Indonesia Power yang terlibat dalam proses pengadaan barang dan jasa. Selain itu, Pakta Integritas ditandatangani oleh Dewan Komisaris dan Direksi Indonesia Power serta seluruh pegawai dalam rangka implementasi pengendalian Gratifikasi.

Statement of Compliance with Company's Code of Conduct

Indonesia Power strives to uphold the Code of Ethics in the form of attitudes, actions, and commitments, conducted with full awareness through numerous activities, i.e.:

1. Statement of Compliance with Company's Code of Conduct
   Every level of Indonesia Power personnel shall read, understand, and sign the Statement of Compliance with Company's Code of Conduct, including corporate culture aspects.
2. Declaration of Absence of Conflict of Interest
   Every Indonesia Power personnel shall make Declaration of Absence of Conflict of Interest every year. In the statement, it is mandatory to state the situation with a potential conflict of interest that shall be avoided.
3. Integrity Pact
   Integrity Pact is signed by every authorized official and every partner of Indonesia Power who is involved in the process of procurement of goods and services. In addition, Integrity Pact is signed by Board of Commissioners and Directors of Indonesia Power as well as every employee in order to implement the Gratification control.

Penyebarluasan Kode Etik Perusahaan

Pedoman Etika Perusahaan telah dikomunikasikan dan disosialisasikan kepada Dewan Komisaris dan organ pendukungnya, Direksi dan pejabat satu tingkat di bawah Direksi serta seluruh pegawai melalui berbagai media komunikasi antara lain *e-mail, website, intranet,*

Dissemination of Company's Code of Conduct

Company's Code of Conduct is communicated and disseminated to Board of Commissioners and its supporting organ, Directors, and officers who report directly to Directors, as well as every employee, through various communication media such as e-mail, website,

KODE ETIK PERUSAHAAN
Code of Conduct

visual manajemen, dan forum lainnya. Pedoman Etika Perusahaan menjadi materi yang wajib disosialisasikan oleh seluruh unit dan merupakan salah satu target kinerja Unit di dalam aspek OCR (*Organization Capital Readiness*). Untuk memastikan sosialisasi terlaksana secara efektif, maka dilakukan pengukuran pemahaman pegawai terkait Pedoman Etika Perusahaan.

Indonesia Power telah melaksanakan beberapa kegiatan yang mencerminkan sosialisasi Pedoman Etika Perusahaan diantaranya dengan melakukan program orientasi bagi pegawai baru atau penyegaran secara berkala bagi seluruh pegawai Indonesia Power. Selain itu, Perusahaan membentuk Pelopor Indonesia Power Bersih sebagai agen perubahan yang menularkan arti perilaku "bersih" kepada seluruh insan Indonesia Power. Pelopor akan diberi tugas mengajar sebagai bentuk sosialisasi kepada masyarakat luas (eksternal), bahwa Indonesia Power telah secara aktif menggalakkan Program Indonesia Power Bersih demi terwujudnya Indonesia Bersih. Kegiatan ini juga menjadi bentuk lain dari kampanye anti korupsi yang mengajarkan kepada generasi muda Indonesia sejak dini tentang bahaya buruk dari tindakan korupsi, kolusi, nepotisme, suap, maupun gratifikasi. Dengan pelaksanaan kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Indonesia Power.

intranet, management visual, and other forums. Company's Code of Conduct is a mandatory material to be disseminated to every unit, and is one of the Unit's target performance in the OCR (Organization Capital Readiness) aspect. To ensure the effectivity of information dissemination, the measurement of employee's understanding related to Company's Code of Conduct is performed.

Indonesia Power has conducted numerous activities to reflect the socialization of Company's Code of Conduct, such as orientation program for new employee, or periodical refreshment for every employee of Indonesia Power. In addition, the Company established Pelopor Indonesia Power Bersih as an agent of change to pass on the 'clean' behavior to every personnel of Indonesia Power. The Pioneer (Pelopor) has a responsibility to teach as a form of socialization to the community (external), that Indonesia Power has actively promoted Indonesia Power Bersih Program for the realization of Indonesia Bersih. This activity is also another form of an anti-corruption campaign that teaches the young generation in Indonesia since early age about the perils of corruption, collusion, nepotism, bribery, and gratification. This activity is expected to increase the public's trust towards Indonesia Power.

Upaya Penegakan Kode Etik Perusahaan

Indonesia Power melakukan penegakan terhadap Pedoman Etika Perusahaan yang dilakukan dengan melakukan pemantauan secara berkala terhadap penegakan dan menyediakan fasilitas bagi pengaduan terhadap pelanggaran Pedoman Etika tersebut. Pegawai dapat melaporkan dugaan pelanggaran atas Pedoman Etika Perusahaan tersebut kepada atasan, Pejabat Yang Berwenang Menindak (PYBM) serta melalui mekanisme *Whistle Blowing System* (WBS). Seluruh laporan tersebut harus disertai data dan/atau bukti-bukti akurat sehingga pelanggaran dapat diproses lebih lanjut. Setiap pelanggaran atas Pedoman Etika Perusahaan akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku dan pengenaan sanksi tersebut tidak bersifat diskriminatif.

Enforcement Effort of Company's Code of Conduct

Indonesia Power enforces the Company's Code of Conduct, which is performed by periodical monitoring of the enforcement, and providing a facility for reporting on the violation of said Code of Conduct. An employee may report alleged violations of Company's Code of Conduct to a supervisor, authorized officials, and through Whistle Blowing System (WBS) mechanism. Every report must be accompanied by data and/or accurate proof so that the violation may be processed further. Every violation of Company's Code of Conduct shall be subject to sanctions in accordance with the prevailing regulations, and the imposition of such sanctions is not discriminatory.

Jenis Sanksi dan Jumlah Pelanggaran Kode Etik Perusahaan

Segala pelanggaran atas Kode Etik akan dikenakan sanksi sebagaimana diuraikan dalam ketentuan internal terkait pemberian sanksi yang ditetapkan oleh Indonesia Power. Untuk memberikan efek jera kepada pegawai, maka hak-hak pegawai yang hilang selama masa sanksi disiplin adalah tidak diberikan tunjangan posisi, tidak dapat dipromosikan, tidak dapat memperoleh penyesuaian atau kenaikan *grade,* tidak dapat mengikuti program pendidikan, pelatihan, atau pengembangan individu dan melakukan perjalanan dinas ke luar negeri serta diberikan nilai kinerja dua selama menjalani tindakan disiplin.

Sepanjang tahun 2016 terdapat 7 (tujuh) pengaduan melalui jalur WBS. Setelah melalui proses investigasi dan terbukti melakukan dugaan pelanggaran maka akan diperiksa lebih lanjut oleh Komite Pemeriksa Pelanggaran Disiplin Pegawai (KP2DP) yang ditunjuk oleh Pejabat Yang Berwenang Menindak (PYBM). Dengan tetap memperhatikan hak pegawai untuk diperlakukan secara adil dalam penjatuhan sanksi disiplin, maka unsur Persatuan Pegawai menjadi salah satu anggota tim KP2DP dan jika pegawai dijatuhi sanksi disiplin sedang dan berat, pegawai memiliki hak untuk mengajukan keberatan.

Sanctions Type and Number of Violations of Company's Code of Conduct

Any violation of Code of Conduct shall be liable to sanctions, as described in the internal provisions related to sanctions imposed by Indonesia Power. To give a deterrent effect to employees, during disciplinary sanction, his/her rights is not granted, such as loss of position allowance, loss of promotion, unable to obtain adjustment or grade increase, unable to attend training or education program or individual development, and unable to do business travel abroad, and his/her performance rate is 'two'.

Throughout 2016, there were 7 (seven) reports through WBS network. After going through investigation process and proven to have conducted the alleged violations, the report will be examined further by Committee of Employee's Disciplinary Investigator (KP2DP), appointed by the authorized officials (PYBM). With regards to the employee's right to be treated fairly in disciplinary sanctions, Persatuan Pegawai (Workers' Union) became one of the members of KP2DP team. If an employee is imposed a medium or heavy disciplinary sanction, the said employee has the right to file an objection.

WHISTLE BLOWING SYSTEM (WBS)

Whistle Blowing System (WBS)

Whistle Blowing System merupakan jalur komunikasi pegawai, pelanggan, mitra kerja, dan pihak-pihak lainnya dalam melaporkan kejadian yang diduga berhubungan dengan tindakan *fraud*, kriminal, pelanggaran kebijakan Perusahaan dan pelanggaran kode etik yang melibatkan segenap jajaran Indonesia Power.

Whistle Blowing System is a communication network for employee, customers, vendors, and other parties to report event that is allegedly related to fraud, criminal act, Company's policy violations, and violation of code of conduct that involves all levels of Indonesia Power.

Kebijakan WBS

Dalam rangka memastikan praktik bisnis yang beretika, sehat dan berintegritas, Indonesia Power telah memiliki dan menerapkan Kebijakan Sistem Pelaporan Pelanggaran sejak tahun 2011 berdasarkan Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi Nomor 136.K/020/IP/2011 dan Nomor 011.SK/DEKOM-IP/2011 tentang Kebijakan Pengelolaan Pengaduan Pelanggaran (*Whistle Blowing System/WBS*) Indonesia Power. Kebijakan WBS merupakan jalur komunikasi pegawai, pelanggan, mitra kerja, dan *stakeholder* lainnya dalam melaporkan kejadian yang diduga berhubungan dengan tindakan *fraud*, kriminal, pelanggaran kebijakan perusahaan dan pelanggaran kode etik yang melibatkan segenap jajaran Indonesia Power.

WBS Policy

In order to ensure ethical, healthy, and of high integrity business practice, Indonesia Power has owned and implemented Whistle Blowing System Policy since 2011 based on the Joint Decree of Board of Commissioners and Directors Number 136.K/020/IP/2011 and Number 011.SK/DEKOM IP/2011 on Whistle Blowing System/ WBS Policy in Indonesia Power. WBS Policy is a communication network for employee, customers, vendors, and other parties to report event that is allegedly related to fraud, criminal act, Company's policy violations, and violation of code of conduct that involves all levels of Indonesia Power.

Tujuan WBS

Kebijakan WBS diharapkan dapat mendorong semua pihak untuk melaporkan pelanggaran tanpa disertai rasa takut akan menjadi korban, diskriminasi, atau mengalami kerugian. Disamping itu, adanya kebijakan WBS dimaksudkan untuk (a) mengungkapkan berbagai permasalahan yang tidak sesuai dengan etika dalam *Code of Conduct* maupun kebijakan perusahaan lainnya, (b) menjadi dasar dalam menangani pengaduan pelanggaran dari *stakeholders* untuk menjamin adanya mekanisme penyelesaian yang efektif dan (c) mendorong terciptanya reputasi Indonesia Power sebagai entitas bisnis yang bertanggung jawab.

WBS Objectives

WBS Policy is expected to encourage all parties to report violations without fear of victimization, discrimination, or loss. In addition, the WBS policy existence is aimed to (a) disclose issues that are inconsistent with Code of Conduct or other Company's regulations, (b) become the foundation to handle violation reports from stakeholders to ensure the existence of effective finishing solution and (c) encourage the establishment of Indonesia Power's reputation as responsible business entity.

Lingkup Kebijakan WBS

Lingkup Kebijakan WBS mencakup pelanggaran terhadap *Code of Conduct*, baik yang dapat merugikan keuangan Perusahaan maupun yang dapat menimbulkan reputasi negatif bagi Indonesia Power. Setiap pihak internal maupun pihak eksternal yaitu Dewan Komisaris, Komite Dewan Komisaris, Direksi, dan seluruh Pegawai serta para pemangku kepentingan lainnya yang memiliki hubungan kerja dengan Indonesia Power dapat melaporkan adanya pelanggaran. Sedangkan pihak yang dapat dilaporkan sebagai oknum pelaku pelanggaran meliputi Dewan Komisaris, Komite Dewan Komisaris, Direksi, dan seluruh Pegawai Indonesia Power. Adapun lingkup Kebijakan WBS mengatur mulai dari mekanisme penyampaian laporan (pihak yang bertanggung jawab menerima laporan, kerahasiaan dan perlindungan pelapor, komunikasi dengan pelapor), pelaksanaan verifikasi dan investigasi, sampai dengan laporan status perkembangan laporan yang telah disampaikan serta apresiasi dan sanksi bagi pelakunya.

WBS Scope

WBS scope consists of violations against Code of Conduct, both that could cause financial loss to the Company or that could create negative reputation to Indonesia Power. Every internal and external parties, i.e. Board of Commissioners, Board of Commissioners' Committees, Directors, and every Employee as well as other stakeholders who have work relation with Indonesia Power, can report any violations. The parties being reported as the perpetrators of violations may consist of Board of Commissioners, Board of Commissioners' Committees, Directors, and every Employee of Indonesia Power. The WBS scope manages reporting submission mechanism (the party responsible to receive such report, confidentiality and protection of the reporter, communication with the reporter), verification and investigation, and the progress status of the report submitted, and the appreciation and sanctions for the perpetrator.

Penyampaian Laporan Pelanggaran

Laporan yang dapat disampaikan melalui WBS adalah laporan tindak pelanggaran yang meliputi perbuatan tidak etis/tidak bermoral atau perbuatan lain yang dapat merugikan Perusahaan maupun para pemangku kepentingan, yang dilakukan oleh Pegawai, Direksi, Dewan Komisaris, Komite Dewan Komisaris mengacu pada Pedoman Etika Perusahaan. Pengaduan pelanggaran dapat disampaikan melalui *website* atau *email* maupun surat resmi. Indonesia Power memberi kesempatan seluas-luasnya bagi pelapor pengaduan pelanggaran, baik dari pihak internal Indonesia Power maupun *stakeholders* eksternal dengan mencantumkan identitas yang jelas maupun tanpa identitas, dan bukti pendukung adanya indikasi pelanggaran

WBS Reporting Submission

Report that can be submitted through WBS is a report of violation act that covers unethical/immoral behavior, or other actions that may cause loss for the Company or stakeholders, conducted by Employee, Directors, Board of Commissioners, Board of Commissioners' Committees, and referring to Company's Code of Conduct. Violation report can be submitted through website or email or official letter. Indonesia Power provides wide opportunity for the reporter to report violation, both from the internal party of Indonesia Power or external stakeholders, by putting clear identity or unknown, and proof of the violation indication.

WHISTLE BLOWING SYSTEM (WBS)

Whistle Blowing System (WBS)

Perlindungan Bagi *Whistleblower*

Indonesia Power berkomitmen dalam menjaga kerahasiaan informasi pelapor dan pihak yang diduga melakukan pelanggaran sebagai penerapan prinsip kerahasiaan (*confidentiality*). Identitas pelapor hanya diketahui oleh admin pengaduan pelanggaran kecuali pelapor mengizinkan untuk dibuka identitasnya. Prinsip kerahasiaan identitas pelapor diharapkan dapat mendorong setiap pegawai melaporkan adanya dugaan pelanggaran, melindungi pelapor termasuk terhadap pemecatan yang tidak adil, penurunan jabatan atau pangkat, pelecehan atau diskriminasi dalam segala bentuknya serta catatan yang merugikan dalam *file* data pribadinya. Apabila hasil investigasi menyimpulkan bahwa pengaduan yang disampaikan ternyata tidak benar atau mengandung unsur itikad tidak baik, menyampaikan bukti palsu, ada unsur kedengkian, tanpa dasar yang jelas, maka pelapor tersebut dapat digugat balik atau dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Whistleblower Protection

Indonesia Power commits to maintain the confidentiality of the reporter and the alleged offenders as to implement the confidentiality principle. The identity of the reporter is known by the admin of violations complaint, unless the reporter allows his/her identity to be known. Confidentiality of the whistleblower shall encourage every employee to report violation allegation, protect the whistleblower against unfair dismissal, demotion, harassment, or discrimination in any form, as well as adverse records on his personal file. If the investigation concluded that the report is untrue or contained element of bad faith or false proof, or there is an element of malice without clear foundation, the whistleblower may be sued or subject to sanctions in accordance with the prevailing regulations.

Pihak Pengelola Pengaduan

Pengelola pengaduan pelanggaran sesuai kebijakan WBS yang ditetapkan dilakukan melalui 2 (dua) saluran. Pengaduan Pelanggaran jalur Dewan Komisaris, diketuai oleh Ketua Komite Audit, bertanggung jawab untuk menerima dan menangani pengaduan pelanggaran yang diduga dilakukan oleh oknum anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Komite. Pengaduan pelanggaran jalur Direksi, terbagi berdasarkan jenjang jabatan oknum terduga pelaku pelanggaran, yaitu: (1) Pengaduan pelanggaran diduga dilakukan oleh pegawai jenjang Eksekutif Utama maka tim diketuai oleh Direktur Utama dan (2) Pengaduan pelanggaran diduga dilakukan oleh pegawai lainnya maka tim diketuai oleh Kepala Satuan Audit Internal.

Kedua jalur pengaduan pelanggaran tersebut melakukan proses verifikasi pengaduan yang masuk, untuk menunjukkan apakah pengaduan yang disampaikan benar dan ditemukan adanya bukti untuk ditindaklanjuti dengan proses investigasi. Pelaku pelanggaran yang terbukti berdasarkan hasil investigasi, akan diproses sesuai dengan peraturan yang berlaku tergantung jenis pelanggaran yang dilakukannya.

Reporting Management

Violation reporting management in line with the WBS policy is set through 2 (two) channels. Violation report of Board of Commissioners, is chaired by Head of Audit Committee, and is responsible to receive and handle violation report that allegedly is committed by member of Directors, Board of Commissioners, and Committee. Violation report of the Board of Directors, is divided based on the level of the alleged perpetrators of violation, i.e.: (1) Violation report is allegedly conducted by Main Executives level, then the team will be led by President Director, and (2) Violation report is allegedly conducted by other employees, then the team will be led by Head of Internal Audit Unit.

Both channel of violation report may conduct verification process of the reports, to show whether the report is true and if there is any proof to be followed up by the investigation process. The perpetrators of violations proven on the basis of the results of the investigation shall be processed in accordance with the prevailing regulations, based on the type of offense committed.

Mekanisme Pelaporan dan Penanganan Pengaduan

Mekanisme pelaporan dan penanganan pengaduan dapat dilihat pada bagan sebagai berikut:

Report Mechanism and Complaint Handling

Report mechanism and complaint handling can be seen on the scheme as follows:

Skema WBS yang Melibatkan Oknum Pegawai
Scheme: WBS Involving Employee

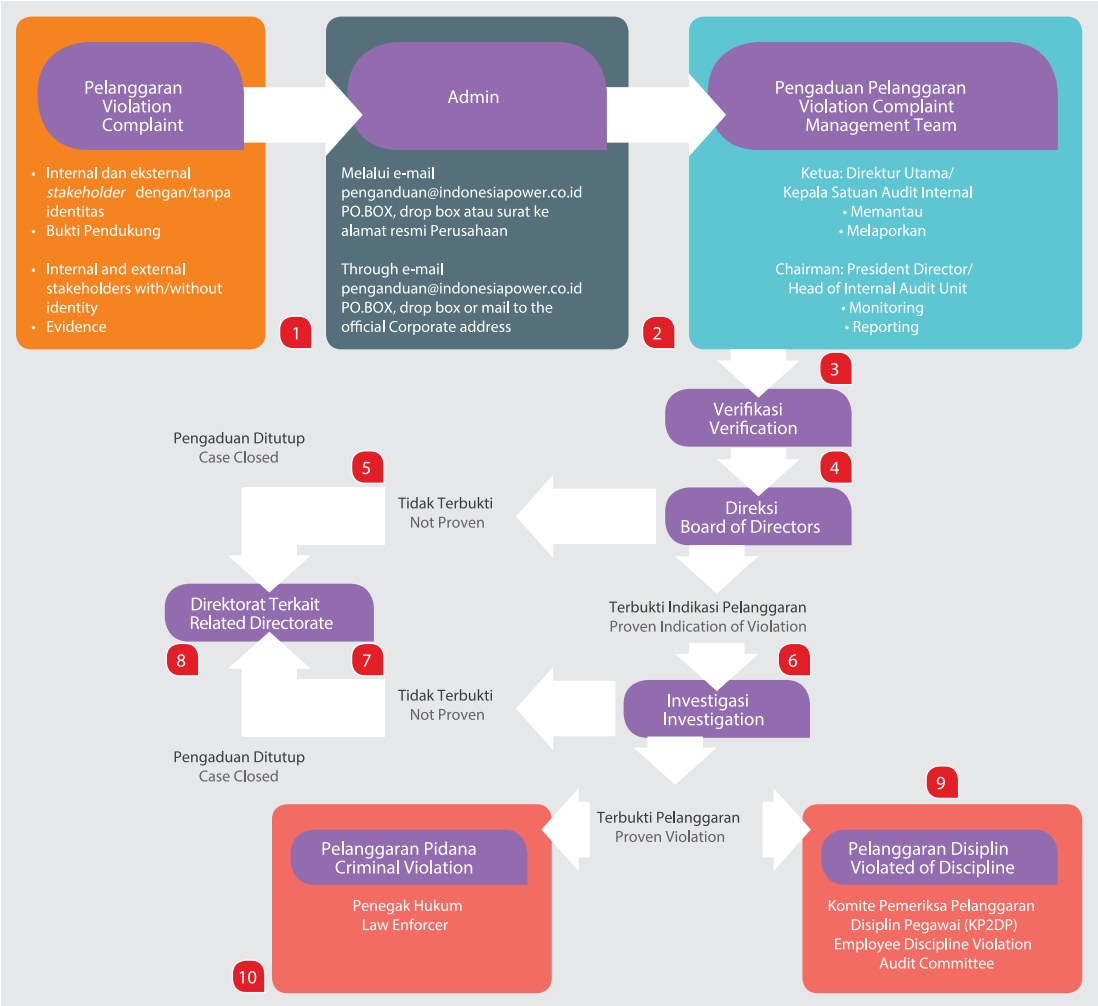

WHISTLE BLOWING SYSTEM (WBS)

Whistle Blowing System (WBS)

Skema WBS yang Melibatkan Oknum Direksi dan Dewan Komisaris Beserta Organ Penunjangnya

Scheme: WBS Involving Directors and Board of Commissioners and Supporting Organs

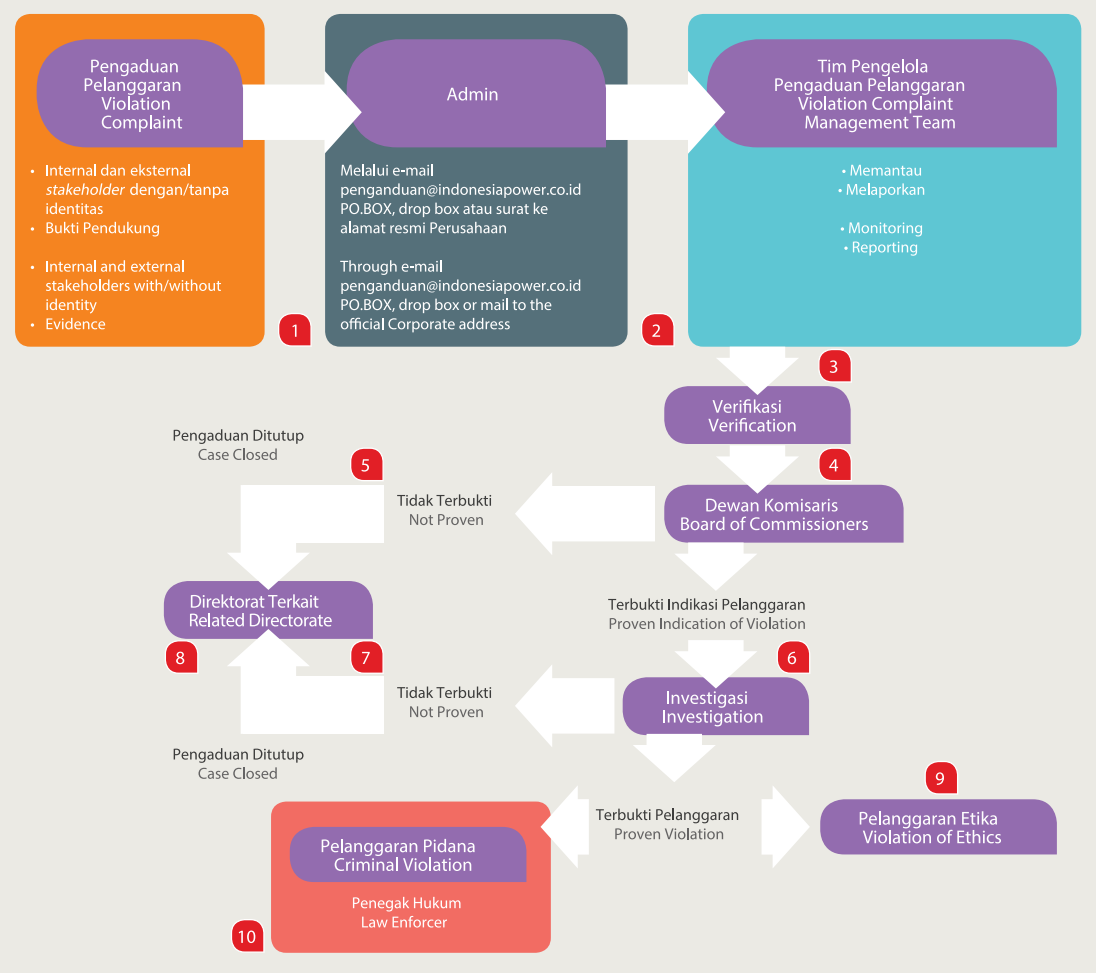

Sosialisasi WBS

Sosialisasi kepada pihak internal dilakukan melalui berbagai media antara lain dengan *workshop*, intranet, mading, brosur, buletin, *banner*, majalah Indonesia Power, maupun Laporan Tahunan. Sedangkan sosialisasi kepada para pemangku kepentingan eksternal untuk tahun 2016 dilakukan melalui *website*, Laporan Tahunan, dan *Vendor Meeting* di Kantor Pusat maupun masing-masing Unit. Melalui sosialisasi Indonesia Power berupaya memberikan pemahaman dan kesadaran seluruh karyawan maupun pihak terkait lainnya untuk melaporkan segala bentuk pelanggaran guna meminimalisir terjadinya pelanggaran-pelanggaran lain yang mungkin muncul.

WBS Information Dissemination

Socialization to the internal parties is performed through numerous media such as workshop, intranet, wall magazine, brochure, bulletin, banner, Indonesia Power's magazine, and Annual Report. Socialization to the external stakeholders in 2016 is conducted through website, Annual Report, and Vendor Meeting in Head Office or each Unit. Through the socialization, Indonesia Power provides understanding and awareness to every employee or other related parties to report any form of violations in order to minimize the occurrence of other violations that may arise.

Jumlah Pengaduan dan Tindak Lanjutnya Tahun 2016

Selama tahun 2016, pelaporan pelanggaran yang masuk adalah sebanyak tujuh laporan. Dari tujuh laporan pelanggaran yang masuk, enam telah selesai ditindaklanjuti dan satu masih dalam proses tindak lanjut.

Number of Reports and Follow-Up in 2016

Throughout 2016, the reports received were seven reports. From those seven reports, each and six of them has been followed up and one of them in progress.

Tabel Jumlah Pengaduan Pelanggaran Tahun 2012-2016
Table: Number of Whistleblowing Report 2012-2016

Tahun Year	Pengaduan Report	Dalam Proses In Progress	Selesai Ditindaklanjuti Finished
2012	9	0	9
2013	4	0	4
2014	6	0	6
2015	9	0	9
2016	**7**	**1**	**6**

Sanksi dan Tindak Lanjut atas Pengaduan Tahun 2016

Dalam mendukung penerapan sistem pelaporan di Perusahaan, Indonesia Power memberikan apresiasi bagi pelapor dan sanksi bagi pelaku pelanggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan disiplin pegawai yang telah ditetapkan. Perusahaan terus berupaya meningkatkan kualitas pengelolaan pelaporan dengan secara aktif merespon dan menindaklanjuti setiap pelaporan yang masuk. Pengaduan yang masuk telah ditindaklanjuti seluruhnya sampai dengan proses akhir.

Penalty and Follow-Up on Reports in 2016

In order to support the whistleblowing system in the Company, Indonesia Power gives appreciation to the whistleblower and sanctions to the perpetrators in line with the laws and regulations and employee's disciplinary regulation that has been set forth. Company strives to improve the quality of whistleblowing system by actively responding and following up every report received. The reports received have been followed up until the process is finished.

Peran Dewan Komisaris Terhadap Implementasi WBS

Dewan Komisaris bertanggung jawab dalam melakukan pengawasan atas kecukupan dan efektivitas pelaksanaan WBS di Perusahaan. Pemantauan pelaksanaan WBS diserahkan kepada Komite Dewan Komisaris, yaitu Komite Audit. Secara khusus, laporan WBS dibahas dalam rapat Komite Audit dengan Kepala Satuan Audit Internal pada tanggal 18 April 2016.

Board of Commissioners' Roles on WBS Implementation

Board of Commissioners is responsible to supervise the adequacy and effectivity of WBS implementation in the Company. The monitoring of WBS implementation is handed over to the Board of Commissioners' Committee, i.e. Audit Committee. Specifically, WBS report is discussed in the Audit Committee's Meeting with Head of Internal Audit Unit on 18 April 2016. In that meeting, Board of

WHISTLE BLOWING SYSTEM (WBS)

Whistle Blowing System (WBS)

Dalam rapat tersebut, Dewan Komisaris memberikan rekomendasi terkait laporan WBS yaitu menyarankan kepada SAI agar meminta unit yang bersangkutan mengupayakan penyelesaiannya secara tuntas. Dengan adanya pengawasan tersebut diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pengelolaan WBS serta mampu menekan tingkat pelanggaran yang ada di lingkungan Perusahaan.

Commissioners gave recommendation related to WBS report, i.e. suggesting that the Internal Audit Unit to ask the related unit to try to finish the report. The supervision is expected to improve the WBS management effectivity as well as reduce the whistleblowing rating within the Company.

PERKARA PENTING YANG SEDANG DIHADAPI OLEH PERUSAHAAN, ENTITAS ANAK, ANGGOTA DIREKSI ATAU ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

Legal Issues Faced by the Company, Subsidiaries, Member of Board of Directors or Board of Commissioners

Dalam melaksanakan kegiatan Perusahaan, manajemen dan struktural Indonesia Power senantiasa mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengantisipasi setiap tindakan yang berpotensi menimbulkan permasalahan hukum.

In carrying out the Company's activity, management and structural of Indonesia Power always comply with the prevailing laws and anticipate actions that are potentially causing legal problems.

Selama tahun 2016, anggota Dewan Komisaris maupun anggota Direksi Indonesia Power yang sedang menjabat tidak memiliki permasalahan hukum, baik perdata maupun pidana.

Throughout 2016, there are no Directors nor Board of Commissioners who is serving in the Company, who is involved in lawsuits, be it civil or criminal.

Permasalahan Hukum Perusahaan

Sampai dengan 31 Desember 2016, Permasalahan hukum yang dihadapi Indonesia Power dapat dilihat dalam tabel berikut:

Company's Legal Issues

As of 31 December 2016, the Legal Issues faced by Indonesia Power can be seen on the following table:

Tabel Permasalahan Hukum Indonesia Power Tahun 2016
Table: Legal Issues of Indonesia Power 2016

Permasalahan Hukum	Legal Issues	Jumlah Total	
		Perdata Civil	Pidana Criminal
Selesai dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap	Finished (has permanent legal power)	0	0
Dalam proses penyelesaian	In progress	2	1
Total	**Total**	**2**	**1**

PERKARA PENTING YANG SEDANG DIHADAPI OLEH PERUSAHAAN, ENTITAS ANAK, ANGGOTA DIREKSI ATAU ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

Legal Issues Faced by the Company, Subsidiaries, Member of Board of Directors or Board of Commissioners

Tabel Uraian Permasalahan hukum Tahun 2016

Table: Description of Legal Issues in 2016

No	Pihak yang Berperkara Parties Filing the Lawsuit	Pokok Permasalahan Main Dispute	Status Penyelesaian Status of Settlement	Nilai nominal tuntutan/gugatan Nominal Value of Claim/Lawsuit	Sanksi Sanction	Risiko yang dihadapi perusahaan Risk faced by the Company
Permasalahan Hukum Perdata Civil Case						
1	**Pemohon :** Yusuf Subiantoro **Termohon I :** Badan Arbitrase Nasional Indonesia Perwakilan Surabaya **Termohon II :** PT Indonesia Power Unit Pembangkitan Semarang, diwakili oleh Nah'R Murdono Law Office selaku Kuasa Hukum	Sdr. Yusuf Subiantoro selaku penanggungjawab finansial pimpinan kerjasama konsorsium PT BBI-ISP mengajukan permohonan pembatalan putusan BANI Sby kepada PN Semarang, atas putusan arbitrase yang telah dibacakan di BANI Perwakilan Surabaya pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2016, yang berisi sbb: 1. Pada pokoknya Majelis Arbiter berpendapat bahwa Termohon (UP Semarang) tidak terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, sehingga tuntutan ganti kerugian materiil dan immateriil yang diajukan oleh Pemohon (Konsorsium) sebesar Rp. 7.670.937.380,- telah ditolak BANI 2. PT IP UP Semarang berhak atas pencairan jaminan pelaksanaan kepada Bank Jatim sebesar Rp509.303.950	1. Telah dibacakan putusan pada tanggal 29 Nov 2016 di PN Semarang dengan amar putusan antara lain : - Membatalkan Putusan Arbitrase Badan Arbitrase Nasional Indonesia Surabaya, tanggal 17 Mei 2016 register perkara Nomor : 18/ARB/BANI-SBY/VI/2015. - Menghukum Termohon II untuk membayar kepada Pemohon (Konsorsium) atas kekurangan pembayaran sesuai Progres Laporan Kemajuan Pekerjaan senilai 26 % atau sebesar Rp. 2.600.000.000,- (dua milyar enam ratus juta rupiah). - Menghukum Termohon I dan Termohon II untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 674.160,- (enam ratus tujuh puluh empat ribu seratus enam puluh rupiah). 2. Tanggal 20 Desember 2016 Perusahaan melalui kuasa hukumnya Jaksa Pengacara Negara dari Kejaksaan Agung mengajukan Memori Banding Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Semarang dalam Perkara Perdata No. 01/Arbitrase/ 2016/ PN.SMG Tanggal 29 November 2016 kepada Ketua Mahkamah Agung	Rp2,600,000,000	-	Membayar kepada Pemohon (Konsorsium) atas kekurangan pembayaran sesuai Progres Laporan Kemajuan Pekerjaan senilai 26 % atau sebesar Rp 2.600.000.000,-

No	Pihak yang Berperkara Parties Filing the Lawsuit	Pokok Permasalahan Main Dispute	Status Penyelesaian Status of Settlement	Nilai nominal tuntutan/gugatan Nominal Value of Claim/Lawsuit	Sanksi Sanction	Risiko yang dihadapi perusahaan Risk faced by the Company
	Applicant: Yusuf Subiantoro **Defendant I:** Indonesia National Board of Arbitration (BANI), Surabaya Representative **Defendant II:** PT Indonesia Power, Generating Unit Semarang, represented by Nah'R Murdono Law Office as the Legal Counsel	Mr. Yusuf Subiantoro, as a person responsible for finance on consortium cooperation of PT BBI-ISP, submitted claim for cancellation of BANI Surabaya Decision on Semarang District Court, on the arbitration decision read in BANI Suraya Representative on Tuesday, 17 May 2016, which contains: 1. Arbitrary Panel has the opinion that Applicant (UP Semarang) is not proven to have committed Unlawful Act, hence the claim for material and immaterial damages submitted by the Applicant (Consortium) in the Amount of Rp7,670,937,380 has been rejected by BANI 2. PT IP UP Semarang is entitled to the disbursement of guarantee Bank Jatim in the amount of Rp509,303,950	1. The decision was read on 29 Nov 2016 at Semarang District Court, with the verdict of: - Annulment of Arbitration of Indonesia National Board of Arbitration, Surabaya, on 17 May 2016, Civil Case Number: 18/ ARB/BANI-SBY/VI/2015. - Punishment of Defendant II to pay for the Applicant (Consortium) on the lack of payment, in line with Work Progress Report, valued at 26% or equivalent to Rp2,600,000,000 (two billion six hundred million rupiahs). - Punishment of Defendant I and II to pay the case cost in the amount of Rp674,170 (six hundred seventy-four thousand one hundred sixty rupiah). 2. On 20 December 2016, Indonesia Power, through its attorney, State Attorney from the Attorney General filed an Appeal on the Semarang District Court decision on Civil Procedure No. 01/ Arbitrase/2016/PN.SMG dated 29 November 2016 to Chairman Of The Supreme Court Of The Republic Of Indonesia.	Rp2,600,000,000	-	Payment to the Applicant (Consortium) on the lack of payment, in line with Work Progress Report, valued at 26% or equivalent to Rp2,600,000,000.
	a. Pegawai b. PT Indonesia Power	- Sdr. Pegawai pada tanggal 17 Desember 2015 telah dijatuhi Tindakan Disiplin berupa Pemberhentian sebagai pegawai karena melanggar ketentuan Pasal 4 angka 3 dan Pasal 5 angka 1,18,33,37,38 dan 50 Keputusan Direksi No.147.K/010/ IP/2008 tentang Peraturan Disiplin Pegawai.	1. Proses mediasi ke III di Disnakertrans Kab Lombok telah dilaksanakan pada tanggal 28 Nov 2016 dengan hasil tidak tercapai kesepakatan.	Rp1.087.850.430		Sdr. Pegawai akan melanjutkan perkara ke PHI dan menuntut IP sebesar Rp 1.087.850.430.

PERKARA PENTING YANG SEDANG DIHADAPI OLEH PERUSAHAAN, ENTITAS ANAK, ANGGOTA DIREKSI ATAU ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

Legal Issues Faced by the Company, Subsidiaries, Member of Board of Directors or Board of Commissioners

No	Pihak yang Berperkara Parties Filing the Lawsuit	Pokok Permasalahan Main Dispute	Status Penyelesaian Status of Settlement	Nilai nominal tuntutan/gugatan Nominal Value of Claim/Lawsuit	Sanksi Sanction	Risiko yang dihadapi perusahaan Risk faced by the Company
2		- Atas pemberhentian sebagai pegawai tersebut, Sdr. Pegawai mengajukan permohonan penyelesaian hubungan industrial melalui mediasi di Disnakertrans NTB Lombok.	2. PT IP telah menyampaikan Surat kepada JAMDATUN No. 2399/05/IP/ 2016-R Perihal Permohonan bantuan hukum penyelesaian perselisihan hubungan industrial antara PT Indonesia Power dengan pegawai UJP Jeranjang yang diberhentikan tidak dengan hormat karena melakukan tindakan disiplin pegawai.			
	a. Employee b. PT Indonesia Power	- Mr. Employee on 17 December 2015 have to follow Disciplinary Action in the form of dismissal because the employee is violating provision of Article 4 point 3, and Article 5 point 1, 18, 33, 37, 38, and 50 of the Directors' Decree No.147.K/010/ IP/2008 on Employee Disciplinary Regulation. - On the dismissal, Mr. Employee submit a settlement through industrial relation by mediation from Regional Office of Manpower and Transmigration (Disnakertrans) NTB Lombok.	1. Third mediation process in Disnakertrans Lombok Regency has been conducted on 28 Nov 2016 with no agreement reached. 2. PT IP submit a Letter to JAMDATUN No. 2399/05/ IP/2016-R on Application for legal settlement of industrial relation dispute between PT Indonesia Power and Employee of UJP Jeranjang that is dismissed without honor because of violation of employee's discipline	Rp1.087.850.430		Mr. Employee will follow-up the case to PHI and file a lawsuit to IP in the amount of Rp1,087,850,430.
Permasalahan Hukum Pidana / Criminal Case						
1	a. PT Belaputera Intiland b. PT Indonesia Power	1. PT BI memulai pelaksanaan pembangunan jembatan di atas sungai Cireundeu dan telah berjalan sejak Januari 2013	- PT IP telah berulang kali memberikan surat peringatan untuk menghentikan kegiatan pembangunan tanpa izin tersebut kepada PT BI.			- Penggunaan Tanah IP tanpa Izin - Kerusakan Lingkungan sekitar waduk

No	Pihak yang Berperkara Parties Filing the Lawsuit	Pokok Permasalahan Main Dispute	Status Penyelesaian Status of Settlement	Nilai nominal tuntutan/gugatan Nominal Value of Claim/Lawsuit	Sanksi Sanction	Risiko yang dihadapi perusahaan Risk faced by the Company
		2. PT IP menyampaikan keberatan dan tidak memberikan izin kepada PT BI untuk melaksanakan pembangunan jembatan di atas Sungai Cireundeu, melalui Surat PT IP No. 717/090/IP/2013 tanggal 13 Juni 2013 Perihal Tanggapan PT IP Atas Rencana Pembangunan Jembatan Cireundeu	- PT IP melalui kuasa hukum Iwan Agustian, SH telah membuat laporan polisi Nomor : LPB/18/I/2016/JABAR tanggal 9 Januari 2016 dengan terlapor Sdr. Sanusi Tanawi (PT Belaputera Intiland) Progres pelaporan polisi sebagai berikut : 1. Berdasarkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) No. B/196/III/2016 /DIT.RESKRIM. UM tertanggal 21 maret 2016, penyidik berkesimpulan telah memiliki bukti permulaan yang cukup sehingga menaikan status dari penyelidikan ke penyidikan. 2. Selain melakukan upaya hukum Pelaporan Polisi, PT IP juga mengirimkan Surat Permohonan Audiensi ke instansi-instansi pemerintah terkait , sbb : - Surat Permohonan Audiensi kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI No. 1158/04//IP/2016 Tanggal 03 Juni 2016 - Surat Permohonan Audiensi kepada KAPOLDA JABAR terkait Laporan Polisi No. LPB/18/I/2016/JABAR tanggal 23 Mei 2016 - Surat Permohonan Bantuan Koordinasi kepada Deputi Bidang Pencegahan KPK No. 1488/050/IP/2016-R tanggal 27 Juli 2016			

PERKARA PENTING YANG SEDANG DIHADAPI OLEH PERUSAHAAN, ENTITAS ANAK, ANGGOTA DIREKSI ATAU ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

Legal Issues Faced by the Company, Subsidiaries, Member of Board of Directors or Board of Commissioners

No	Pihak yang Berperkara Parties Filing the Lawsuit	Pokok Permasalahan Main Dispute	Status Penyelesaian Status of Settlement	Nilai nominal tuntutan/gugatan Nominal Value of Claim/Lawsuit	Sanksi Sanction	Risiko yang dihadapi perusahaan Risk faced by the Company
1	a. PT Belaputera Intiland b. PT Indonesia Power	1. PT BI started the bridge construction on Cireundeu river since January 2013 2. PT IP files an objection and did not grant permission to PT BI to build the bridge on Cireundeu river, through Letter of PT IP No. 717/090/IP/2013 dated 13 June 2013 on Response of PT IP on Cireundeu Bridge Construction Plan	- PT IP has repeatedly send warning letters to stop the activity of construction without permit to PT BI - PT IP, through Iwan Agustian, SH, as legal counsel, made a police report Number. LPB/18/I/2016/JABAR dated 9 January 2016, with the reporter, Mr. Sanusi Tanawi (PT Belaputera Intiland) Progress of the police report is as follows: 1. Based on Notice on Progress of Investigations (SP2HP) No. B/196/III/2016 /DIT.RESKRIM. UM dated 21 March 2016, the investigator concluded that there is sufficient initial proof to change the status from inquiry to investigation 2. In addition to the legal Police Report, PT IP also sent Audience Hearing Letter to related government institutions, such as: - Audience Hearing Letter to The Audit Board of the Republic of Indonesia (BPK RI) No. 1158/04//IP/2016 dated 3 June 2016 - Audience Hearing Letter to KAPOLDA JABAR related to Police Report No. LPB/18/I/2016/JABAR dated 23 May 2016 - Coordination Assistance Application Letter to Deputy of KPK Prevention No. 1488/050/IP/2016-R dated 27 July 2016			- IP Land Utilization without Permit - Environmental damage around the reservoir

Permasalahan Administratif Tahun 2016

Administrative Issues in 2016

Pihak Berperkara Parties Filing the Lawsuit	Pokok Permasalahan Main Dispute	Status Penyelesaian Status of Settlement	Nilai nominal tuntutan/gugatan Nominal Value of Claim/ Lawsuit	Sanksi Sanction	Risiko yang dihadapi perusahaan Risk faced by the Company
-	-	-	-	-	-

Perkara Hukum Anak Perusahaan

Selama tahun 2016, Anak Perusahaan Indonesia Power tidak memiliki permasalahan hukum, baik perdata maupun pidana.

Subsidiaries Legal Issues

Throughout 2016, Subsidiaries of Indonesia Power does not have any legal issues, both civil and criminal.

AKSES INFORMASI DAN DATA PERUSAHAAN
Access to the Company's Information and Data

Untuk menjamin pemenuhan dan ketersediaan informasi bagi para pemangku kepentingan, Indonesia Power membuka akses seluas-luasnya kepada publik terhadap perolehan informasi mengenai Perusahaan. Hal ini sekaligus merupakan salah satu implementasi Indonesia Power dalam perwujudan aspek transparansi.

To ensure the fulfillment and availability of information for the stakeholders, Indonesia Power opens the widest access to public on the acquisition of information about the Company. This is also one of the implementation of Indonesia Power in transparency aspects realization.

Kebijakan Keterbukaan Akses Informasi

Indonesia Power telah memiliki kebijakan mengenai keterbukaan informasi yang diatur dalam Keputusan Direksi Nomor 37.K/010/IP/2012 tanggal 21 Maret 2012 tentang Pedoman Komunikasi Perusahaan. Aspek yang diatur dalam kebijakan tersebut, antara lain adalah Maksud dan Tujuan, Komunikasi Perusahaan, *Stakeholders* Perusahaan, Strategi Komunikasi, Penanggung Jawab Kegiatan Komunikasi Perusahaan, Klasifikasi Informasi dan Pengungkapan Informasi ke Publik, Juru Bicara dan Substansi Materi Informasi, Koordinasi Pengumpulan Data dan Penyebarannya, Manajemen Krisis, Desentralisasi Pengelolaan Komunikasi, Program dan Anggaran dan Pelaporan dan Evaluasi.

Disclosure of Information Access Policy

Indonesia Power has policies related to information disclosure that is set forth in the Decree of the Board of Directors No. 37.K/010/IP/2012 dated 21 March 2012 on Corporate Communication Guidelines. Aspects governed under the policy are, among others: Intentions and Objectives, Corporate Communication, the Company's Stakeholders, Communication Strategy, PIC for Corporate Communications, Classification of information and Disclosure of Information to the Public, Spoke Person and Substance of Information Materials, Coordination of Data Collecting and Dissemination, Crisis Management, Decentralization of Communication Management, Programs and Budget, and Reporting and Evaluation.

Pengelola Akses Informasi

Indonesia Power telah menunjuk juru bicara sekaligus pejabat pengelola informasi dan dokumen (PPID) Perusahaan, yaitu Sekretaris Perusahaan sebagai PPID Kantor Pusat dan Manajer Pengelola Kehumasan sebagai PPID Unit Kerja.

Information Access Manager

Indonesia Power has appointed spoke person and information and document officer executives (PPID) of the Company, i.e. Corporate Secretary as PPID of Head Office, and Public Relations Manager as PPID in the Work Unit.

Pelayanan Informasi Publik PT Indonesia Power
Kantor Pusat
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 18, Lantai 3
Jakarta 12950
Tel 021 (526 7666) /Fax 021 (5252623)
Website www.indonesiapower.co.id

Melalui pelayanan informasi publik ini, masyarakat dapat mengakses dan mengetahui informasi mengenai Perusahaan, Proses Bisnis, tanggung jawab sosial Perusahaan, dan informasi terkait lainnya yang diatur oleh Undang-undang.

Through the public information services, the public can access and gain information about the Company, Business Process, Corporate Social Responsibility, and other relevant information regulated by Law.

Media Informasi dan Komunikasi

Indonesia Power senantiasa memberikan kemudahan informasi kepada *stakeholders* untuk mengakses informasi mengenai Perusahaan melalui media/sarana komunikasi yang telah disediakan antara lain sebagai berikut:

Communication and Information Media

Indonesia Power provides convenience to the stakeholders in accessing information about the Company through communication media/facilities provided, such as:

Website

Stakeholders dapat mengakses informasi komprehensif mengenai kegiatan operasional dan kinerja Perusahaan serta berbagai informasi lain yang diperlukan oleh pemegang saham dan pihak-pihak yang berkepentingan dengan mengakses situs www.indonesiapower.co.id. Informasi dalam *website* disajikan dalam bahasa Indonesia yang mencakup informasi antara lain terkait dengan Profil Perusahaan secara lengkap; Program Korporat yang dilakukan meliputi Manajemen Mutu, Manajemen Aset, serta Budaya Perusahaan; Tata Kelola Perusahaan, Laporan Publikasi; Pedoman Etika Perusahaan; Kebijakan Sistem pelaporan Pelanggaran dan Laporan Statistik. Untuk komunikasi interaktif dengan *stakeholder*, Indonesia Power menyediakan email: kontak-ip@indonesiapower.co.id

Stakeholders can access comprehensive information related to the Company's operational activities and performance, as well as other information required by shareholders and other interested parties by accessing www.indonesiapower.co.id. Information in the website is presented in Bahasa Indonesia and English, and covers the Company Profile completely, Corporate Program conducted, including Quality Management, Assets Management, as well as Corporate Culture; Governance, Publication Report; Corporate Code of Ethics; Whistleblowing Policy, and Statistics Report. For more interactive communication with the stakeholder, Indonesia Power provide email: kontak-ip@indonesiapower.co.id

AKSES INFORMASI DAN DATA PERUSAHAAN
Access to the Company's Information and Data

Internet

Intranet merupakan media *online* bagi internal Indonesia Power yang menyampaikan informasi aktivitas Perusahaan dan pegawai yang diperbaharui setiap saat. Intranet tersebut dapat diakses oleh setiap pegawai yang terhubung dengan jaringan internal Perusahaan (*Wide Area Network*/WAN). Intranet Perusahaan di *update* rata-rata 4-8 berita per hari.

Internet

Intranet is an online media for the Indonesia Power's internal personnel to disseminate Company's activities and employees that are updated at any time. The intranet can be accessed by every employee connected to the Company's internal network (Wide Area Network/WAN). Company's Intranet has an average 4-8 new updates every day.

Media Elektronik Lainnya

Media elektronik yang digunakan oleh Indonesia Power sebagai sarana penyebaran data dan informasi Perusahaan, antara lain yaitu *E-mail*, TV *Wall* sebagai Manajemen Visual dan *Video Conference*. TV *Wall* diupdate setiap 2-3 kali/hari kerja.

Other Electronic Devices

Indonesia Power uses electronic devices as means of dissemination of Company's data and information, such as e-mail, TV Wall as Visual Management, and Video Conference. TV Wall is updated every 2-3 times per work day.

Media Cetak

Berkaitan dengan media cetak, Indonesia Power memberikan informasi kepada pemegang saham dan *stakeholders* dalam bentuk Majalah InPower, majalah dinding dan poster. Majalah mencakup segala kegiatan Indonesia Power yang perlu diketahui oleh pemegang saham dan *stakeholder* maupun publik. Majalah tersebut terbit setiap dua bulan sebanyak enam edisi.

Printed Media

Related to printed media, Indonesia Power disseminates information to the shareholders and stakeholders in the form of In.Power Magazine, wall magazines, and posters. Magazine covers every Indonesia Power's activities that the shareholders and stakeholders, and public need to know. Magazine is published every two months in the amount of 6 editions.

Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan

Indonesia Power menyediakan sarana informasi melalui Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan yang disusun setiap tahun. Laporan ini disampaikan kepada Pemegang Saham, regulator, media massa dan masyarakat.

Annual Report and Sustainability Report

Indonesia Power provides information through Annual Report and Sustainability Report that are compiled yearly. The Reports are delivered to Shareholders, regulators, mass media, and the public.

Forum Komunikasi Internal

Indonesia Power menyediakan saluran komunikasi sebagai sarana diskusi antara pegawai dengan manajemen yaitu melalui *Coffee Morning*, *Team Briefing* dan *e-buletin* mingguan Indonesia Power *Weekly News* (IPWN). Hasil *Coffee Morning* secara elektronik disebarluaskan melalui *e-mail,* IPWN, dan Manajemen Visual (TV Wall). *Coffee morning* adalah saluran tatap muka langsung antara Manajemen dan pegawai yang dilaksanakan 1 bulan sekali. Komunikasi ini berlangsung dua arah karena Manajemen dapat menyampaikan arahan dan mensosialisasikan program kerja Perusahaan kepada seluruh pegawai dan pegawai dapat memberikan masukan dan kritikan langsung maupun tidak langsung kepada manajemen. Selain itu, beberapa Divisi di Indonesia Power juga telah melakukan komunikasi dua arah secara konsisten dengan melibatkan karyawan melalui Team *Briefing* yang dilakukan satu bulan sekali. Selama tahun 2016 *e-buletin* Inpower *Weekly News* (IPWN) terbit setiap minggu sebanyak 50 edisi.

Internal Communication Forum

Indonesia Power provides communication channel as discussion tool between the employee and management, i.e. through Coffee Morning, Team Briefing, and weekly e-bulletin Indonesia Power Weekly News (IPWN). Coffee Morning results is electronically disseminated through e-mail, IPWN, and Visual Management (TV Wall). Coffee morning is a direct face-to-face between the Management and employee conducted once a month. The communication is two ways because Management can direct and socialize the Company's work program to every employee, and employee can give input and review directly or indirectly to the management. In addition, some Divisions in Indonesia Power have also conducted two-ways communication consistently by involving employee through Team Briefing once a month. Throughout 2016, e-bulletin Inpower Weekly News (IPWN) is published weekly amounted to 50 editions.

AKSES INFORMASI DAN DATA PERUSAHAAN
Access to the Company's Information and Data

Media Sosial

Untuk menyebarkan informasi tentang Perusahaan serta berkomunikasi dengan masyarakat, Indonesia Power telah memanfaatkan media sosial dengan dibukanya akun Instagram. Media sosial senantiasa mutakhirkan setiap 5-7 kali per minggu.

Social Media

To disseminate information on the Company and communicate with the public, Indonesia Power has utilized social media by opening Instagram accounts. Social media is constantly updated every 5-7 times per week.

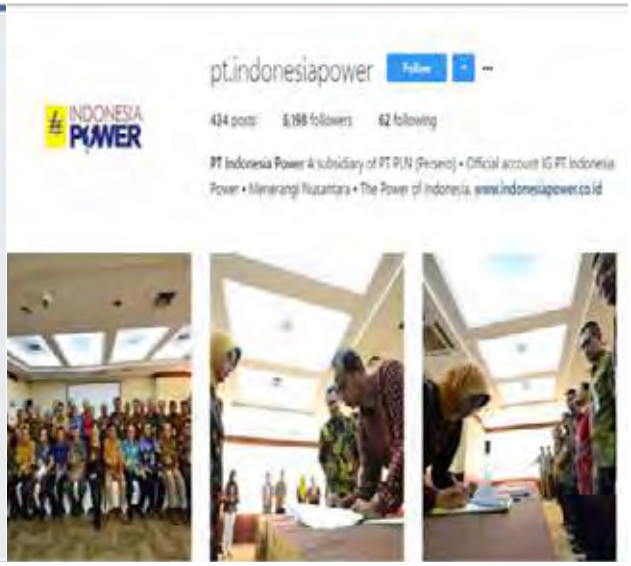

PENGADAAN BARANG DAN JASA
Procurement of Goods and Services

Sebagai bentuk komitmen penerapan GCG dalam pengadaan barang dan jasa, Indonesia Power mewajibkan vendor dan mitra kerja untuk menandatangani Pakta Integritas dalam kaitannya dengan pengadaan barang dan jasa. Hal ini ditujukan agar seluruh proses bisnis dan operasional dapat berjalan secara obyektif dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Proses pengambilan keputusan dilakukan dengan obyektif, menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh *stakeholder* manapun, dan tidak terpengaruh oleh kepentingan sepihak.

As a form of commitment on GCG implementation in procurement of goods and services, Indonesia Power requires vendors and partners to sign Integrity Pact in relation to the procurement of goods and services. This is intended to ensure that business and operations process run objectively, and in line with the prevailing regulations. Decision-making process is conducted objectively, to prevent unfair domination from any stakeholder, and is unaffected by unilateral interest.

Kebijakan dan Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa

Indonesia Power telah memiliki kebijakan pengadaan barang dan jasa yang tertuang dalam Keputusan Direksi Nomor 218.K/010/IP/2016 tanggal 1 November 2016 tentang Pedoman Pengadaan Barang / Jasa PT Indonesia Power. Kebijakan ini mengatur ketentuan mengenai pengguna barang dan jasa, pengelolaan perencanaan pengadaan, pengelolaan pengadaan barang dan jasa, manajemen penyedia barang/jasa, pelaksana pengadaan, pejabat yang ditunjuk sebagai pejabat yang berwenang serta penyedia barang/jasa sesuai dengan tugas, fungsi, hak dan kewajiban masing-masing termasuk optimalisasi proses pengadaan barang/jasa sebagai upaya peningkatan *value* Perusahaan melalui efisiensi biaya pengadaan dengan tetap menunjang kegiatan operasi Perusahaan. Kebijakan tersebut dijadikan sebagai pedoman prosedur pengadaan barang dan jasa yang disusun agar dapat menciptakan proses pengadaan barang dan jasa yang berkualitas dan beretika.

Dalam proses pengadaan barang dan jasa, seluruh kegiatan proses pemilihan pemasok, pemberian informasi tentang pemesanan, sistem pembayaran, dan akses terhadap penanganan keluhan diberikan perlakuan yang sama bagi semua calon pemasok, serta melakukan evaluasi dan survei atas perlakuan terhadap pemasok. Seluruh informasi mengenai pengadaan yang dilakukan Perusahaan beserta perkembangannya diinfokan secara publik dalam *website* Indonesia Power http://eproc.indonesiapower.co.id/ver1.1/main.

Policy and Guidelines for Procurement of Goods and Services

Indonesia Power has policy for procurement of goods and services that is compiled in the Directors' Decree Number 218.K/010/IP/2016 dated 1 November 2016 on Guidelines of Procurement of Goods/Services PT Indonesia Power. The policy regulates the user of goods and services, procurement planning management, procurement management, management of the vendors of goods/services, procurement manager, officer assigned as the authorized official, vendors of goods and services, in line with the duties, functions, rights, and responsibilities, including the process optimization for procurement of goods/services in order to improve the Company's value through procurement cost efficiency by supporting the Company's operations. The policy is the procedure guidelines in procurement of goods and services, and is compiled to create quality and ethical procurement process.

In the process of procurement of goods and services, the entire process such as vendor selection, information on order, payment system, and access on complaint handling are equal for every vendor candidate, and vendor candidate is evaluated and surveyed. All information related to Company's procurement and its development is informed to the public through website Indonesia Power http://eproc.indonesiapower.co.id/ver1.1/main.

PENGADAAN BARANG DAN JASA
Procurement of Goods and Services

Prinsip Pengadaan Barang dan Jasa

Value for Money merupakan prinsip utama dalam pengadaan barang/jasa di Indonesia Power. Artinya, untuk jumlah anggaran yang dibelanjakan dapat diperoleh barang/jasa yang bernilai atau bermanfaat bagi pembeli, mencakup aspek kualitas, kuantitas, waktu penerimaan, tempat penerimaan, tepat sumber dan harga yang wajar. Indikator keberhasilan proses pengadaan di Perusahaan terdiri dari enam *rights*, yaitu:

1. *Right Quality*, yaitu kualitas barang/jasa harus sesuai atau lebih baik dari yang dipersyaratkan;
2. *Right Quantity*, yaitu jumlah/lingkup barang/jasa yang diadakan harus benar sesuai yang diperlukan;
3. *Right Time*, yaitu barang/jasa yang diadakan harus diserahterimakan sesuai dengan waktu yang diperlukan;
4. *Right Place*, yaitu barang/jasa yang diadakan harus diserahterimakan ditempat yang benar sesuai keperluan;
5. *Right Source*, yaitu barang/jasa yang diadakan harus disediakan oleh sumber yang terpercaya seperti terbebas dari tuntutan pihak ketiga terhadap hak kepemilikan intelektual dan/atau hak kepemilikan barang dan sebagainya;
6. *Right Price*, yaitu harga/biaya yang paling menguntungkan bagi Perusahaan, tetapi tidak berarti harus harga yang terendah.

Principles of Procurement of Goods and Services

The main principle for procurement of goods/services in Indonesia Power is value for money. It means that the budget expensed shall obtain goods/services that is valuable or beneficial for buyer, and covers aspects of quality, quantity, timely delivery, place of delivery, proper sources, and reasonable price. The indicator for procurement success in the Company consists of six rights, i.e.:

1. Right Quality, i.e quality of goods/services must be in line or better than the requirement;
2. Right Quantity, i.e quantity/scope of goods/services procured must be as required;
3. Right Time, i.e. goods/services procured must be delivered on time;
4. Right Place, i.e. the goods/services procured must be delivered to the right place of delivery;
5. Right Source, i.e. goods/services must be procured by trusted sources that is free from claims from third party claims in terms of intellectual property rights, or similar claims;
6. Right Price, i.e. acquired at a price most economical to the Company, but not necessarily means the cheapest.

Pendekatan Strategis Pengadaan Barang dan Jasa

Dalam mencapai sasaran utama pengadaan barang dan jasa yaitu menjamin terlaksananya kegiatan usaha serta penciptaan nilai tambah (*value creation*) dan peningkatan daya saing Perusahaan, Indonesia Power telah melakukan pendekatan strategis berdasarkan *tools* yang biasa digunakan dalam *best practice* Pengadaan yaitu *supply positioning model*. Adapun *Kraljic supply positioning model* sebagai berikut:

Strategic Approach for Procurement of Goods and Services

The main target for procurement of goods and services is to ensure the business activity continuity, value creation, and competitiveness enhancement. Indonesia Power has made a strategic approach based on the tools generally used in procurement best practice, i.e. supply positioning model. Kraljic supply positioning model is as follows:

Supply Positioning Model
Supply Positioning Model

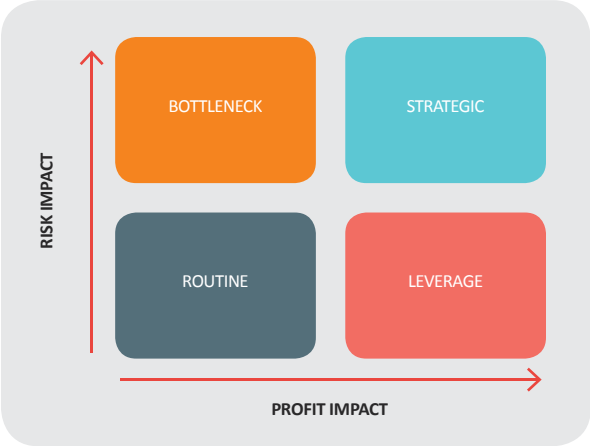

Dalam *supply positioning model* tersebut terdapat Profit Impact yaitu hal-hal yang bisa menambah *profit* atau menghindari kehilangan *profit* atau menghindari penambahan biaya Perusahaan, serta *Supply Risk* yaitu semua bentuk risiko yang berpengaruh pada Perusahaan terkait dengan pengadaan yang dapat dipengaruhi oleh faktor internal ataupun faktor eksternal. Berdasarkan konsep manajemen risiko, terdapat risiko yang dapat dihilangkan, dihindari, dipindahkan atau dimitigasi/kelola.

Adapun definisi dari masing-masing kuadran pada *supply positioning* model adalah sebagai berikut:

1. *Routine*, merupakan barang/jasa yang memiliki risiko rendah dan nilai yang relatif rendah. Contoh dari kategori ini adalah *consumable* material, *office appliances*, peralatan IT dan lain sebagainya. Biasanya mewakili sekitar 80%dari jumlah transaksi, tetapi hanya sekitar 5% dari total pengadaan, sehingga dalam beberapa kasus beban administrasi pengadaan sebenarnya mungkin lebih dari nilai barang/jasa. Oleh karena itu, strategi pengadaan untuk kategori ini antara lain dengan cara meminimalkan pekerjaan administratif melalui penyederhanaan proses pengadaan.
2. *Leverage*, merupakan barang/jasa yang memiliki risiko rendah namun memiliki nilai yang relatif tinggi. Contoh kategori ini antara lain adalah bahan kimia, pelumas, *belt conveyor* dan lain sebagainya. Biasanya mewakili 10-15% dari total pengadaan.

In supply positioning model, there is Profit Impact, i.e. matters that may increase profit or avoid loss of profit or additional costs for the Company, and Supply Risk, i.e. all forms of risk that may influence the Company related to the procurement, which can be influenced by internal or external factors. Based on the risk management concept, there are risks that can be eliminated, avoided, transferred, or mitigated/managed.

The definition of each quadrant on supply positioning model is as follows:

1. Routine, refers to goods/services with low risk and relatively low value. The example of this category is consumable material, office appliances, IT devices, etc. Usually it represents 80% of transaction amount, but only 5% of the total procurement, hence in some cases, the procurement administration cost may be more than the value of goods/services. Therefore, the strategy for this category's procurement is to minimize administrative work through simplification of procurement process.
2. Leverage, refers to goods/services with low risk but relatively high value. The example of this category is chemical, lubricants, belt conveyor, etc. Usually represents 10-15% of total procurement. The strategy for this category is to enhance leverage,

PENGADAAN BARANG DAN JASA
Procurement of Goods and Services

Strategi keseluruhan untuk kategori ini antara lain dengan meningkatkan *leverage*, misalnya dengan mengkonsolidasikan kebutuhan untuk mendapatkan skala ekonomi dan harga yang lebih kompetitif, sementara itu pada saat yang sama memaksimalkan persaingan dan meminimalkan biaya transaksi.

3. *Bottleneck*, merupakan barang/jasa yang memiliki risiko tinggi namun nilai relatif rendah contohnya antara lain *card control*, parts khusus yang penyedianya spesifik atau terbatas. Strategi untuk kuadran ini adalah mengurangi risiko dengan mengamankan pasokan, karena kegagalan pasokan dapat menyebabkan operasional terhenti. Strategi yang dapat ditempuh antara lain menjaga tingkat stok yang lebih tinggi atau mencari alternatif Penyedia lain.
4. *Strategic*, merupakan barang/jasa yang memiliki risiko tinggi serta nilai yang relatif tinggi. Biasanya sebuah organisasi hanya memiliki jumlah perjanjian/kontrak yang sedikit dalam kategori ini, tetapi dapat mewakili 60-70% dari total pengadaan. Contoh kategori ini adalah energi primer, *spare part* untuk keperluan *outage* dan lain sebagainya.

such as by consolidating the needs to obtain economic scale and more competitive price, and at the same time maximizing the competition and minimizing the transaction cost.

3. Bottleneck, refers to goods/services with high-risk but relatively low value. The example is card control, special parts with specific or limited vendor. The strategy for this quadrant is to lessen the risk by securing supply, because supply failures may cause the operations to stop. Strategy for this problem is to keep high supply or to look for alternative Vendor.
4. Strategic, refers to goods/services with high risk and relatively high value. Usually, an organization only have few agreements/contracts in this category, but it represents 60-70% of total procurement. The example is primary energy, spare part for outage need, etc.

Metode Pengadaan Barang dan Jasa

Pengadaan barang dan jasa diselenggarakan secara kompetitif dan terbuka dengan mengikutsertakan calon penyedia barang dan jasa yang memenuhi syarat berdasarkan kemampuan dan kinerja yang sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan. Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dilakukan dengan beberapa metode dengan ketentuan sebagai berikut:

Method of Procurement of Goods and Services

Procurement of goods and services is competitive and open, by including qualified vendors of goods and services that fulfill requirements, based on the capability and performance that is in line with the competence needed. Procurement of goods and services is carried out through various method with regulation as follows:

No	Metode Method	Definisi	Definition
1	Pelelangan Umum Public Auction	metode pengadaan yang dilakukan secara terbuuka dengan pengumuman secara luas melalui media elektronik (*website*), papan pengumuman resmi atau jika diperlukan dapat jugamelalui media massa, yang dapat diikuti oleh semua penyedia barang/jasa yang memenuhi syarat.	Procurement method, in which it is announced openly through electronic media (website), official announcement board, and if necessary in mass media, and is open to all goods/services vendors that meet the requirements.

No	Metode Method	Definisi	Definition
2	Pelelangan Terbatas Simple Auction	Metode Pengadaan melalui pelelangan dengan cara mengundang sekurang-kurangnya 3 (tiga) calon Penyedia yang terdaftar dalam DPKT (Daftar Penyedia Kompeten Terseleksi).	Procurement method through auction by inviting at least 3 (three) Vendor candidates that is registered at DPKT (Selected Competent Vendor List).
3	Penunjukan Langsung Direct Appointment	Metode Pengadaan barang/jasa dengan cara menunjuk satu atau lebih penyedia yang dinilai mampu melaksanakan pekerjaan.	Method of procurement goods/services by appointing one or more vendors that is considered capable to carry out the work.
4	Pengadaan Langsung Direct Procurement	Pengadaan barang/jasa secara langsung kepada satu penyedia jasa setinggi-tingginya dengan nilai Rp250 juta.	Procurement goods/services directly to one vendor with maximum value of Rp250 million.
5	*Beauty Contest* Beauty Contest	Metode pemilihan penyedia barang/jasa yang memperlombakan gagasan/ide orisinal, kretifitas, inovasi atau barang/benda tertentu yang harga/biayanya tidak dapat ditetapkan berdasarkan harga satuan.	Selection method for vendor of goods/services, in which the candidates compete for the best original ideas, creativity, innovation, or particular types of goods/items with values that cannot be determined by quantity.

Mekanisme Pengadaan Barang dan Jasa

Mekanisme pengadaan barang dan jasa Perusahaan mengacu pada Pedoman Pengadaan Barang/Jasa serta kebijakan pendukung yang telah ditetapkan Perusahaan. Secara umum mekanisme pengadaan barang dan jasa Perusahaan digambarkan sebagai berikut:

Mechanism of Procurement of Goods and Services

The mechanism for Company's procurement of goods and services refers to the Guidelines of Procurement Goods/Services and supporting regulations set by the Company. Generally, Company's mechanism for procurement of goods and services is pictured as follows:

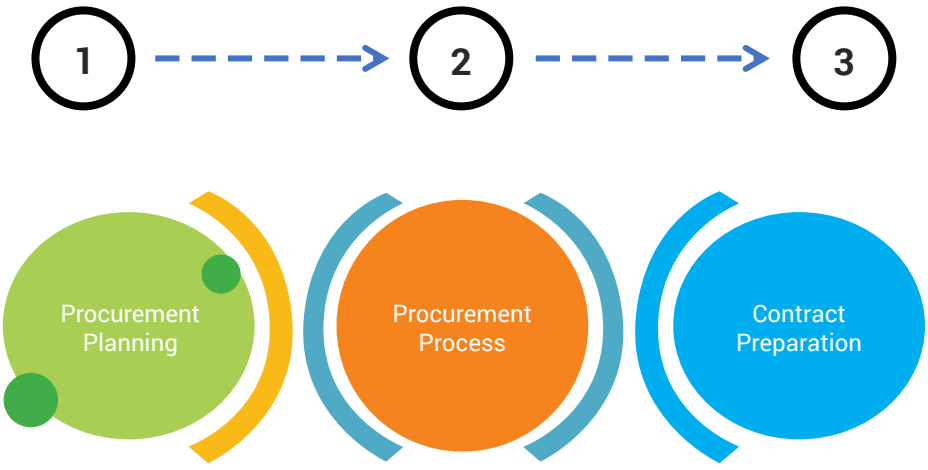

PENGADAAN BARANG DAN JASA
Procurement of Goods and Services

Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2016

Sepanjang tahun 2016, Fungsi pengadaan barang dan jasa telah melakukan berbagai kegiatan diantaranya:
Departemen Pengadaan Energi Primer dan Pengembangan Usaha

1. Mengurangi BPP Komponen C Batubara terkait biaya transportasi darat batubara pada Kontrak Jangka Menengah.
2. Mengurangi BPP dan meningkatkan efektifitas serta efisiensi proses Pengadaan Energi Primer dengan membuat *Blanket Purchase Agreement* dengan beberapa Vendor yaitu PT Pertamina Patra Niaga, PT Surveyor Indonesia, PT Sucofindo, PT Geoservices dan lain-lain.
3. *Improvement* dan standarisasi perhitungan *freight cost* batubara.
4. Meningkatkan kualitas kinerja Pelaksana Pekerjaan Jasa Pengelolaan Pelabuhan Terbatas UP dengan menetapkan target *Key Performance Indicator*.
5. *International Competitive Bidding* EPC *Add-on* Blok 2 dalam rangka meningkatkan efisiensi unit Blok 2 Grati.

Departemen Pengadaan *Sparepart* dan Jasa:

1. Kegiatan *Forum Supply Chain Management* telah dilaksanakan pada tanggal 18 - 19 Februari 2016 di PLTA Dago Bengkok.
2. *In House Training* mengenai *International Trading,* Kontrak, *Supply Positioning Model* dan HPS tanggal 11 – 12 April 2016.
3. *In House Training* mengenai *International Trading,* Kontrak dan HPS tanggal 26 Mei 2016.
4. Penerbitan Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Indonesia Power yaitu Keputusan Direksi Nomor 218.K/010/IP/2016 tanggal 1 November 2016 tentang Pedoman Pengadaan Barang / Jasa Indonesia Power.
5. Sertifikasi Pengadaan Barang / Jasa *Batch* 1 tanggal 13-16 Desember 2016.
6. Sertifikasi Pengadaan Barang / Jasa *Batch* 2 tanggal 19-22 Desember 2016
7. Mengurangi BPP dan meningkatkan efektifitas serta efisiensi proses Pengadaan dengan membuat *Blanket Purchase Agreement* dengan beberapa prinsipal yaitu Bando Indonesia, SKF, Pertamina Lubricant dan lain lain.

Procurement of Goods and Services in 2016

Throughout 2016, procurement of goods and services functions has conducted numerous activities, such as:
Department of Primary Energy Procurement and Business Development

1. Lessen BPP Component C of Coal, related to land transportation cost, on Medium Term Contract.
2. Lessen BPP and improve effectivity and efficiency of Primary Energy Procurement process, by making Blanket Purchase Agreement with some Vendors, i.e. PT Pertamina Patra Niaga, PT Surveyor Indonesia, PT Sucofindo, PT Geoservices, etc.
3. Improvement and standardization of coal freight cost calculation.
4. Improvement of performance quality of GU Limited Port Management Services by setting target of Key Performance Indicator.
5. International Competitive Bidding EPC Add-on Block 2 in order to improve efficiency of Unit Grati Block 2.

Department of Spare Part and Services:

1. Supply Chain Management Forum on 18 - 19 February 2016 at PLTA Dago Bengkok.
2. In-House Training on International Trading, Contract, Supply Positioning Model, and HPS on 11 - 12 April 2016.
3. In-House Training on International Trading, Contract, and HPS on 26 May 2016.
4. Guidelines for Procurement of Goods/Services is the Directors' Decree Number 218.K/010/IP/2016 dated 1 November 2016 on Guidelines of Procurement of Goods/Services PT Indonesia Power.
5. Certification of Procurement of Goods/Services Batch 1 on 13-16 December 2016.
6. Certification of Procurement of Goods/Services Batch 2 on 19-22 December 2016.
7. Lessen BPP and improve effectivity and efficiency of Procurement process, by making Blanket Purchase Agreement with some principles, i.e. Bando Indonesia, SKF, Pertamina Lubricant, etc.

Selain kegiatan di atas, Indonesia Power juga telah mengadakan *vendor meeting* yang merupakan sarana meningkatkan komunikasi antara Perusahaan dengan para mitra kerja. Dalam *vendor meeting* disampaikan program-program dan kebijakan pengadaan barang/jasa di lingkungan Perusahaan serta mendengar masukan dari mitra kerja untuk meningkatkan kinerja dalam hubungan kemitraan dalam proses pengadaan barang/jasa. Dalam *vendor meeting* dilakukan juga Survei Perilaku Etis yakni Survei kepada Pemasok mengenai praktek GCG Perusahaan yang dinilai oleh pemasok. Pelaksanaan survei perilaku etis menjadi salah satu aspek penilaian GCG di setiap Unit Indonesia Power. Evaluasi kinerja penyedia barang / jasa dilaksanakan dengan menggunakan aplikasi ProPBJVer 1.1. Berikut hasil evaluasi kinerja *vendor* tahun 2016 :

In addition, Indonesia Power has conducted vendor meeting as a facility to improve communication between the Company and the partners. During vendor meeting, program and regulations on procurement of goods/services in the Company's environment is disseminated. In that event, the Company can hear the inputs from partners to improve the performance in partnership of procurement of goods/services process. During the vendor meeting, Ethical Behavior Survey, i.e. Survey to the vendors on Company's GCG practices is also conducted and rated, by the vendors. Survey of ethical behavior is one of the GCG assessment aspect in every Unit of Indonesia Power. Performance evaluation for procurement of goods/services is conducted using the application ProPBJVer 1.1. The following is the performance evaluation of vendor in 2016:

Tabel *Vendor Meeting* Tahun 2016
Table: Vendor Meeting in 2016

Vendor	Jenis Pekerjaan Type of Work	Penilaian Assessment
PT Berau Coal Tbk	Kategori Batubara Coal	Vendor Terbaik Best Vendor
PT Control System Arena Paranusa	Kategori Supplier Barang Goods Supplier	Vendor Terbaik Best Vendor
PT Mitra Integrasi Informatika	Kategori Teknologi Informasi Information Technology	Vendor Terbaik Best Vendor

UNIT USAHA
PERTANIAN DAN PETERNAKAN
ANGGOTA

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

Pelaksanaan CSR Indonesia Power bertujuan untuk memberikan dukungan nyata terhadap pencapaian program NAWACITA Pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia, meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional serta mewujudkan kemandirian ekonomi. Dengan menggerakan sektor-sektor strategis ekonomi domestik, memberikan dukungan terhadap pencapaian keberhasilan bisnis secara jangka panjang, memenuhi harapan para stakeholders terhadap Perusahaan serta mendukung penerapan 17 tujuan Sustainable Development Goals (SDGs).

The implementation of Indonesia Power CSR is intended to provide actual support to the achievement of the Government's NAWACITA Program In improving the quality of life of Indonesian people, improving the communities' productivities, and competitiveness in the international market, as well as realizing economic independence. This is to improve the life quality of Indonesian people in realizing economic independence by operating the strategic sectors of domestic economic, providing support in achieving long-term business success, fulfilling aspirations of stakeholders to the Company, and supporting the implementation of 17 Sustainable Development Goals (SDGs).

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Corporate Social Responsibility

Program CSR Indonesia Power berfokus pada pemberdayakan masyarakat di sekitar wilayah operasi Perusahaan dengan menitik beratkan pada 3 (tiga) pilar keberlanjutan Perusahaan, yakni "Pelayanan Masyarakat, Pembinaan Hubungan, dan Pemberdayaan Masyarakat", sebagaimana tercantum dalam tagline *InPower-Care* (Indonesia Power- *Community Assistance, Relation, and Empowerment*).

Indonesia Power CSR Program is focusing on the society empowerment around the Company's operational area by emphasizing on 3 (three) pillars of Company's, sustainability that are "Community Assistance, Community Relations, and Community Empowerment", as stated on the tagline of InPower-Care (Indonesia Power- Community Assistance, Relation, and Empowerment).

Pendahuluan

Indonesia Power berkomitmen untuk melaksanakan program pelibatan dan pengembangan masyarakat dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL).

Pelaksanaan CSR terutama ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat di sekitar lokasi operasi Unit Pembangkitan, Unit Pembangkitan & Jasa Pembangkitan serta Unit Jasa Pembangkitan. Hal tersebut guna mendukung pengembangan Perusahaan yang pada akhirnya berpengaruh terhadap keberlangsungan usaha Perusahaan. Dalam jangka pendek, tantangan Indonesia Power adalah pemanfaatan pembangkit dengan teknologi yang bersih dan efisien sehingga keandalan pembangkit dapat ditingkatkan tanpa mengabaikan aspek lingkungan dan sosial.

Untuk melaksanakan program pelibatan dan pengembangan masyarakat dalam konteks pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan, Indonesia Power menggunakan pendekatan *tripple bottom lines* (*people, planet & profit*), dimana upaya untuk menjaga lingkungan sekitar (*planet*) dan menjaga keseimbangan kehidupan sosial (*people*) sejalan dengan pertumbuhan laba Perusahaan (*profit*).

Introduction

Indonesia Power is committed in carrying out the program of involvement and improvement for society in implementing Corporate Environmental and Social Responsibility (CESR).

The implementation of CSR is mainly intended to improve the quality of life for local communities surrounding the operational location of Generating Unit, Generating and Generating Service Unit, and Generating Service Unit. This supports Company's development that would eventually influence Company's business sustainability. In short term, the challenge for Indonesia Power is to utilize generators using an efficient and clean technology so that the reliability of generators can be improved without overlooking environmental and social aspects.

To implement society engagement and development program in the context of environmental and social responsibility, Indonesia Power utilizes the triple bottom lines approach (people, planet & profit), where the efforts in conserving the environment (planet) and maintaining social life balance (people) go along with Company's profit growth (profit).

Indonesia Power Care
Community Assistance Relation Empowerment

People
Komitmen pada masyarakat sekitar Pembangkit atau Unit kerja untuk mendorong kemandirian ekonomi melalui In-Power Care.

People
the commitment to local communities around the generator or work unit area to support economic independence through In-Power Care program.

Planet
Komitmen menjaga ekosistem lingkungan melalui program: Pemenuhan ketaatan aturan lingkungan (PROPER), GO90, Hijaunesia Power dan Kawan Hijaunesia Power.

Planet
the commitment to conserve environmental ecosystem through PROPER program (compliance with environmental rules), GO90, Hijaunesia Power and Kawan Hijaunesia Power.

Profit
Komitmen untuk meningkatkan produktivitas dan pendapatan Perusahaan melalui pertumbuhan pendapatan dan efisiensi biaya.

Profit
the commitment to improve productivity and Company's revenue through revenue growth and cost efficiency.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
Corporate Social Responsibility

Dengan pendekatan *tripple bottom lines* yang meliputi kinerja lingkungan, sosial dan ekonomi, diharapkan keberadaan Indonesia Power tidak hanya bermanfaat bagi para pemegang saham, tetapi juga bagi pemangku kepentingan yang lebih luas yaitu pekerja, pelanggan, vendor, masyarakat sekitar dan Negara.

Tahun 2016, Indonesia Power kembali menyusun Laporan Keberlanjutan yang merupakan laporan pertanggungjawaban sosial dan lingkungan. Penyusunan Laporan Keberlanjutan Perusahaan mengacu kepada Pedoman Pelaporan Keberlanjutan (*Sustainability Reporting Guidelines*) yang disusun oleh *Global Reporting Initiative* (GRI) versi 4.0 dengan tingkat kesesuaian "*Core*" termasuk G4 *Financial Services Sector Disclosures*. Laporan Keberlanjutan 2016 ini merupakan laporan berkala yang mengungkapkan kinerja keberlanjutan Perusahaan dalam melaporkan kinerja lingkungan, sosial dan ekonomi perusahaan.

Dalam rangka mencapai keberlanjutan bisnis, Indonesia Power telah merumuskan strategi-strategi Perusahaan, strategi tersebut salah satunya dengan menyusun *Roadmap* CSR 2015-2019 sebagai acuan pelaksanaan tanggung jawab sosial Perusahaan.

With the triple bottom lines approach that comprises of environmental, social and economic performances, Indonesia Power is expected to provide benefits not only to the shareholders, but also to all stakeholders that consist of employees, customers, vendors, local communities, and the State.

In 2016, Indonesia Power once again prepared Sustainability Report that is an environmental and social responsibility report. The formulation of Company's Sustainability Report refers to Sustainability Reporting Guidelines that was composed by Global Reporting Initiative (GRI) version 4.0 with the level of conformity "Core" including G4 Financial Services Sector Disclosures. 2016 Sustainability Report is a periodical report that discloses Company's sustainable performance in reporting environmaental, social and economic performances.

In achieving business sustainability, Indonesia Power has formulated Company's strategies, one of the strategies is to prepare CSR Roadmap for 2015-2019 as a reference for Corporate social responsibility implementation.

Roadmap CSR

Roadmap CSR Indonesia Power 2015-2019 merupakan *grand strategy* dan *milestone* implementasi GCG sampai dengan tahun 2019 yang mengintegrasikan strategi CSR ke dalam strategi Perusahaan.

CSR Roadmap

Indonesia Power CSR Roadmap for 2015-2019 is the grand strategy and milestone of GCG implementation up until 2019 that integrates CSR strategy into the Company's strategy.

Roadmap CSR Tahun 2015-2019

CSR Roadmap Years 2015-2019

Pelaksanaan kegiatan dan program dalam *roadmap* CSR selain untuk mendukung keberlanjutan bisnis dan masyarakat sekitar juga mendukung program NAWACITA Pemerintah dan mendukung pencapaian 17 tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang merupakan komitmen internasional dan nasional yang mulai berlaku tahun 2015-2030 dalam upaya untuk mensejahterakan masyarakat.

The implementation of activity and program on CSR roadmap is not only intended to support business sustainability and surrounding society, but also to support the Government's NAWACITA program and the achievement of 17 Sustainable Development Goals (SDGs) that has become a global and national commitment throughout 2015-2030 as an effort to prosper the society.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
Corporate Social Responsibility

Peran Indonesia Power dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs)

Komitmen ini diwujudkan dengan menjalankan kegiatan operasional yang pro lingkungan (*Green Power Plant*) dan pro masyarakat (In-Power Care & Hijaunesia Power). *Green Power Plant* dilakukan melalui pengembangan & pemanfaatan energi baru terbarukan, efisiensi energi, efisiensi air dan pengelolaan limbah yang tepat, sedangkan untuk kegiatan pelestarian lingkungan dan keanekaragaman hayati dijalankan melalui program Hijaunesia Power.

Program tersebut telah sejalan dengan tujuan SDG's yaitu menjamin ketersediaan air bersih, energi terjangkau dan terbarukan, mendorong industri, inovasi, dan infrastruktur, membangun kota dan komunitas berkelanjutan, pola konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, mengatasi dampak perubahan iklim, menjamin kehidupan bawah laut dan darat.

Selain itu, penguatan peran Indonesia Power dalam menunjang pencapaian SDG's yaitu melalui penerapan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSL) yang diperkuat dengan Surat Keputusan Direksi No. 25.K/010/IP/2014 tentang Pedoman Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dan serangkaian kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

The Role of Indonesia Power in Sustainable Development Goals (SDGs)

This commitment is realized through the implementation of operational activity that is pro-environment (Green Power Plant) and pro-society (In-Power Care and Hijaunesia Power). Green Power Plant is carried out through the development and utilization of new and renewable energy, energy efficiency, water efficiency, and proper waste management, whereas environmental conservation activity and biodiversity are carried out through Hijaunesia Power program.

The program is in line with the purposes of SDGs, i.e. ensuring the availability of clean water, affordable and renewable energy, encouraging the growth of industry, innovation, and infrastructure; building sustainable cities and communities, encouraging a responsible pattern of consumption and production, overcoming the impacts of climate change, ensuring lives underwater and on land.

In addition, the strengthening of Indonesia Power's role in supporting the achievement of SDGs that is through the implementation of Corporate Environmental and Social Responsibility (CESR) is reinforced by the Board of Directors' Decree Number 25.K/010/IP/2014 on the Guideline of Corporate Environmental and Social Responsibility and a set of policies intended to improve public welfare.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
Sustainable Development Goals

Visi dan Misi CSR

Berdasarkan Keputusan Direksi No.08.K/010/IP/2004 tentang Pedoman Pelaksanaan *Community Development* Indonesia Power, Visi dan Misi CSR Indonesia Power adalah:

The Vision and Mission of CSR

In accordance with The Board of Directors' Decree Number 08.K/010/IP/2004 on the Guidelines of Indonesia Power Community Development Implementation, the vision and mission of Indonesia Power CSR are as follows:

CSR

"Bersahabat dengan lingkungan dan menjadikan tanggung jawab sosial Perusahaan sebagai bagian dari tata kelola Perusahaan yang baik".

"Building a friendly relation with the environment and enacting corporate social responsibility as a part of proper corporate governance".

Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan pelaksanaan penyelenggaraan program CSR Indonesia Power dimaksudkan untuk mewujudkan visi dan misi Perusahaan, dan secara khusus agar dapat bersahabat dengan lingkungan serta mewujudkan tata kelola Perusahaan yang baik.

Purpose and Objective

The purpose and objective of indonesia power csr program implementation are to actualize the vision and mission of the Company, specifically in building a friendly relation with the environment and actualizing proper corporate governance.

METODE DAN PROGRAM PELAKSANAAN CSR INDONESIA POWER

Indonesia Power CSR Implementation Methods and Program

Metode Pelaksanaan CSR

Metode pelaksanaan program CSR juga disesuaikan dengan kondisi masing-masing wilayah, dan dikoordinasikan dengan pihak-pihak terkait, terutama pemerintah setempat, serta para pihak yang terlibat langsung. Metode yang dipilih dalam menentukan sasaran yaitu dengan melakukan pemetaan sosial kegiatan yang dilakukan dalam rangka menghasilkan suatu gambaran kondisi sosial masyarakat sehingga dapat memahami kondisi sosial masyarakat mulai dari kebiasaan, adat istiadat, nilai-nilai, norma dan lain sebagainya dalam masyarakat yang dapat digunakan sebagai dasar penentuan program dapat tepat sasaran.

Dalam melakukan pemetaan sosial untuk menentukan Program CSR, maka lingkup komunitas yang menjadi prioritas utama Indonesia Power adalah sebagai berikut:

Method of CSR Implementation

The method of CSR implementation is adjusted to each region's conditions and coordinated with related parties, specifically local government, and other parties that are directly involved. The method chosen in determining targets is by conducting Social Mapping, an activity carried out to produce a description of society's social condition so that an understanding of society's social condition, including its custom, culture, values and norms, etc. can be utilized in determining a proper program.

In conducting Social Mapping to determine CSR Program, the scope of community that becomes the main priority for Indonesia Power is as follows:

Berikut jumlah desa dari hasil pemetaan sosial Indonesia Power

The following is the result of Indonesia Power social mapping

No	Unit Kerja Work Unit	Jumlah Desa Number of Villages
1	UP | GU Suralaya dan UJP | GGSU Banten 1 Suralaya	3
2	UPJP | GGSU Priok	3
3	UP | GU Saguling	15
4	UP | GU Mrica	15
5	UP | GU Semarang	4
6	UP | GU Perak Grati	5
7	UP | GU Bali	5
8	UJH | MSU	2
9	Kantor Pusat | Head Office	2
10	UPJP | GGSU Kamojang	8
11	UJP PLTU | GSU SPP Cilegon	3
12	UJP PLTU | GSU SPP Jeranjang	1
13	UJP PLTU | GSU SPP Barru	1
14	UJP PLTU | GSU SPP Holtekamp	2
15	UJP PLTU | GSU SPP Pangkalan Susu	3

METODE DAN PROGRAM PELAKSANAAN CSR INDONESIA POWER

Indonesia Power CSR Implementation Methods and Program

Program CSR Indonesia Power

Sejalan dengan kebijakan CSR Internal Perusahaan, Program CSR Indonesia Power berfokus pada pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah operasi Perusahaan dengan menitik beratkan pada 3 (tiga) pilar keberlanjutan Perusahaan yaitu "Pelayanan Masyarakat, Pembinaan Hubungan, dan Pemberdayaan Masyarakat", sebagaimana tercantum dalam tagline *InPower-Care* (Indonesia Power- C*ommunity Assistance, Relation, and Empowerment*).

Indonesia Power CSR Program

In line with the Company's Internal CSR, Indonesia Power CSR Program is focusing on the society empowerment around the Company's operational area by emphasizing on 3 (three) pillars of Company's sustainability that are "Community Assistance, Community Relations, and Community Empowerment", as stated on the tagline of InPower-Care (Indonesia Power- Community Assistance, Relation, and Empowerment).

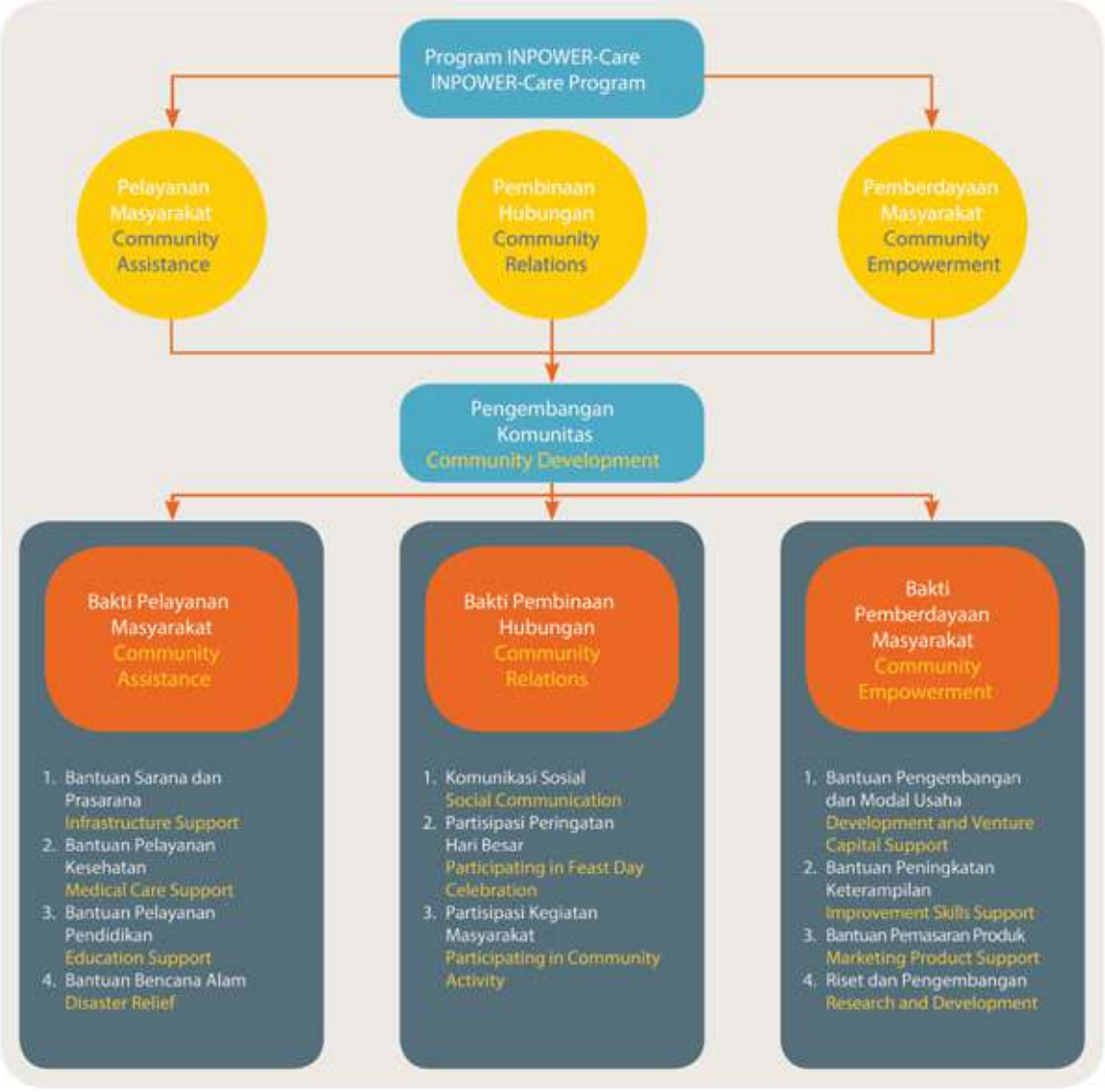

Berdasarkan hal tersebut, maka secara garis besar program Tanggung Jawab Sosial Indonesia Power dibagi menjadi 4 bidang utama yaitu:

Based on that, the outline of Indonesia Power Social Responsibility Program is divided into 4 main sectors, they are:

Program Tanggung Jawab Sosial Indonesia Power
Indonesia Power Social Responsibility Program

PELAKSANA PENGELOLAAN CSR
CSR Manager

Indonesia Power telah membentuk fungsi yang secara khusus menangani kegiatan CSR, yaitu Bidang Komunikasi Korporat yang berada di bawah Sekretaris Perusahaan.

Berikut adalah struktur pengelola CSR Indonesia Power.

Indonesia Power has established a function that specifically handles CSR activities, i.e. Corporate Communication Field reporting directly to the Corporate Secretary.

The following is the structure of CSR manager of Indonesia Power.

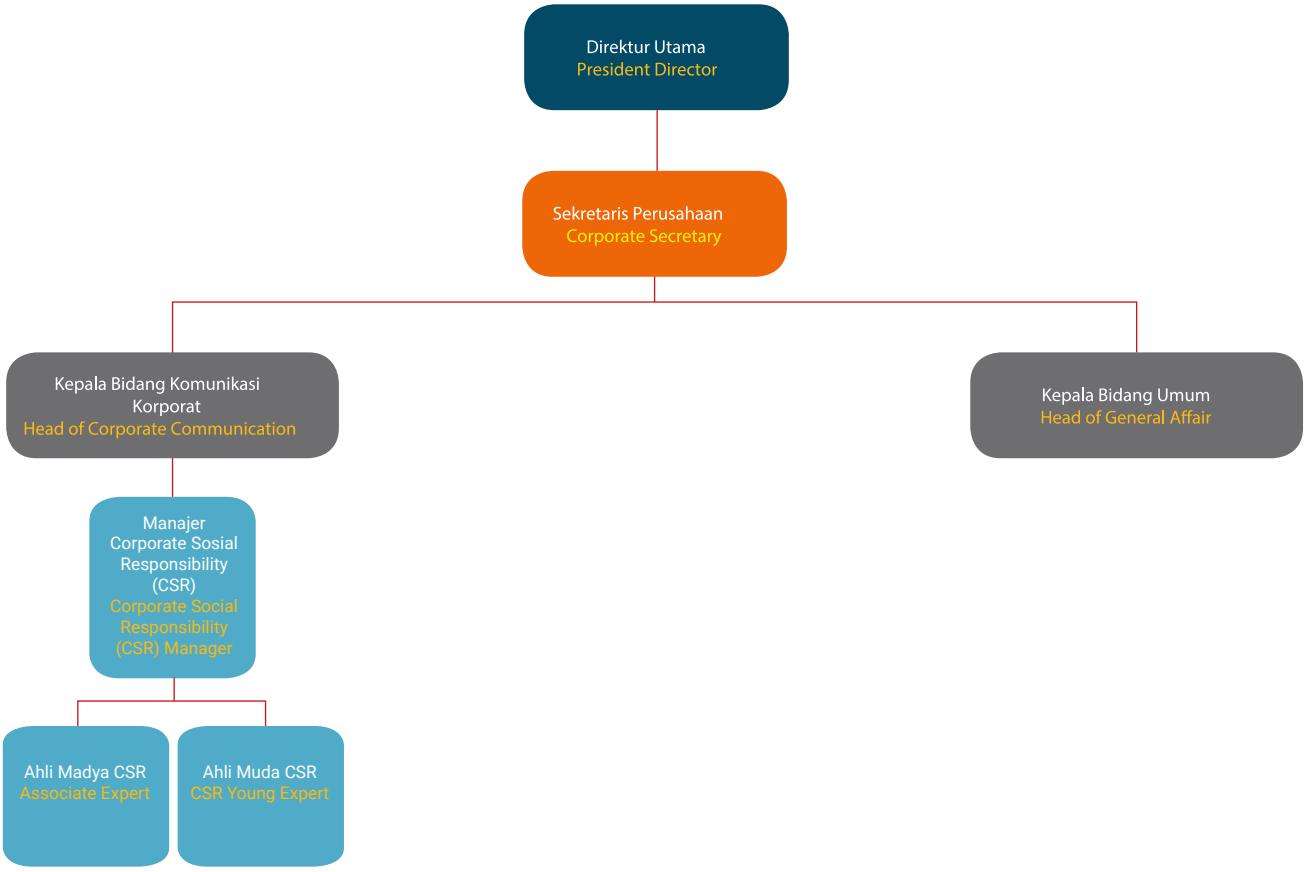

CSR Indonesia Power dikelola Bidang Komunikasi Korporat yang membawahi Manajer *Corporate Social Responsibility* (CSR). Tugas dan tanggung jawab Manajer CSR adalah menyelaraskan program CSR untuk menjamin *sustainability* Perusahaan, melakukan analisa *stakeholders*, melaksanakan program CSR mulai dari perencanaan, pendampingan sampai dengan evaluasi pelaksanaan kegiatan.

Indonesia Power CSR is managed by the Corporate Communication that oversees Corporate Social Responsibility (CSR) Manager. Duties and responsibilities of CSR Manager are to align the CSR Program in order to ensure the sustainability of the Company, analyze stakeholders, conduct CSR Program from the planning, mentoring, until evaluating the activities performed.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERHADAP LINGKUNGAN HIDUP

Corporate Social Responsibility to the Environment

Indonesia Power menempatkan tanggung jawab terhadap lingkungan hidup maupun lingkungan sosial sebagai hal yang utama dan tidak terpisahkan dari kegiatan operasi Perusahaan. Untuk itu Indonesia Power telah melengkapi kegiatan operasi dengan standar nasional maupun internasional.

Pada tingkat nasional, Indonesia Power melakukan pemantauan dan pengelolaan lingkungan sesuai dengan peraturan terkait dan ketentuan Rencana Pengelolaan/ Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL/RPL) yang diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) maupun Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) Provinsi dan Daerah yang harus dipenuhi oleh masing-masing Unit.

Pada tingkat internasional, Indonesia Power menerapkan Sistem Manajemen Lingkungan yang mengacu kepada ISO 14001 yang selanjutnya pada tahun 2014 di integrasikan ke dalam *Integrated Manajemen System* (IMS) secara berkelanjutan.

Indonesia Power puts the responsibility to the environment or social environment as the main focus, and inseparable from the Company's operations. Therefore, Indonesia Power has conducted operations with national and international standards.

On national level, Indonesia Power performs environment monitoring and maintenance, in line with related provisions and regulations on Environmental Management/Monitoring Plan (RKL/RPL), which is issued by Ministry of Environment and Forestry (KLH) and Environmental Agency (BPLHD) in the Provincial and Regional level, which has to be fulfilled by each unit.

On international level, Indonesia Power applies Environmental Management System, which refers to ISO 14001, which in 2014 is integrated into sustainable Integrated Management System (IMS).

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERHADAP LINGKUNGAN HIDUP

Corporate Social Responsibility to the Environment

Kebijakan

Pengelolaan Lingkungan hidup Indonesia Power mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, selain itu Indonesia power juga telah memiliki kebijakan khusus yang diatur dalam:

1. Keputusan Direksi Nomor 41.K/010/ IP/2012 tentang Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Lingkungan di PT Indonesia Power
2. Keputusan Direksi Nomor 73.K/010/IP/2016 tentang Pengelolaan Limbah Unit Jasa Pembangkitan PLTU Batubara FTP-1 Jawa
3. Keputusan Direksi Nomor 249.K/010/IP/2015 tentang Pedoman Penerapan *Green Power Plant* di Lingkungan PT Indonesia Power.
4. Keputusan Direksi Nomor 211.K/010/IP/2016 tentang Komitmen Menjaga Ekosistem dan Pelestarian dalam Menjaga Keberlanjutan Planet di PT Indonesia Power.

Policy

Environmental Management in Indonesia Power refers to Law of Republic of Indonesia Number 32 of 2009 on Protection and Management of Environment. In addition, Indonesia Power has specific regulations that are set forth in:

1. Directors' Decree Number 41.K/010/IP/2012 on Policy on Occupational Health and Safety within PT Indonesia Power
2. Directors' Decree Number 73.K/010/IP/2016 on Waste Management in Generating Service Unit of SPP Batubara FTP-1 Java
3. Directors' Decree Number 249.K/010/IP/2015 on Guidelines on Green Power Plant Implementation within the environment of PT Indonesia Power.
4. Directors' Decree Number 211.K/010/IP/2016 on Commitment to Protect and Conserve Ecosystem in Ensuring the Planet's Sustainability in PT Indonesia Power.

Rencana Kegiatan terkait Pengelolaan Lingkungan Hidup

Dalam rangka menciptakan Perusahaan yang ramah lingkugan, Indonesia Power telah menetapkan rencana kegiatan pengelolaan lingkungan tahun 2016 dengan uraian sebagai berikut:

1. Implementasi Pengelolaan Emisi Udara;
2. Implementasi Pengelolaan Limbah;
3. Implementasi Penghijauan dan Keanekaragaman Hayati;
4. Implementasi Pengembangan Pembangkit Ramah Lingkungan (*Green Power Plant*);
5. Implementasi Konservasi Air;
6. Implementasi Efisiensi Energi;
7. Implementasi Sistem Manajemen Lingkungan (SML).

Activity related to Environmental Management

In order to cultivate environmental friendly Company, Indonesia Power has set activities to manage the environment in 2016, with details as follows:

1. Implementation of Air Emission Management;
2. Implementation of Waste Management;
3. Implementation of Reforestation and Biodiversity;
4. Implementation of Green Power Plant Development;
5. Implementation of Water Conservation;
6. Implementation of Energy Efficiency;
7. Implementation of Environmental Management System (SML).

Kegiatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Dampak Kuantitatif

Pada tahun 2016, kegiatan-kegitan pengelolaan lingkungan yang dilaksanakan oleh Indonesia Power telah sejalan dengan rencana kegiatan lingkungan hidup yang ditetapkan Perusahaan.

Implementasi Pengelolaan Emisi Udara

Pengelolaan emisi udara dilakukan melalui pemantauan dan pengukuran rutin serta pengendalian proses agar seluruh emisi gas buang yang dikeluarkan oleh Unit Pembangkitan yang dikelola memenuhi baku mutu Lingkungan.

Kegiatan yang dilakukan dalam pengelolaan emisi udara oleh indonesi Power selama tahun 2016 adalah sebagai berikut:

1. Inventarisasi Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)

Sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 61 tanggal 20 September 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca, Indonesia Power telah melakukan perhitungan inventarisasi gas rumah kaca meliputi seluruh emisi CO_2, CH_4, dan N_2O dari sumber konsumsi bahan bakar operasional pembangkit, bahan bakar kendaraan operasional, dan konsumsi listrik eksternal.

Environmental Management Activity and Quantitative Impact

In 2016, the environmental management activity performed by Indonesia Power has been in line with the plan of environmental activity set by the Company.

Implementation of Air Emission Management

Air emission management is conducted through routine monitoring and measurement, as well as process control so that exhaust emission resulted from the Generating Unit shall meet the Environmental quality standards.

Activities performed in managing the air emission by Indonesia Power throughout 2016 are as follows:

1. Greenhouse Gas Emissions (GRK) Inventory

In line with Presidential Regulation Number 61 dated 20 September 2011 on National Action Plan to Reduce Greenhouse Gas Emissions, Indonesia Power has calculated the greenhouse gas inventory which includes all emission of CO_2, CH_4, and N_2O from fuel consumption of power plant operations, operational vehicles fuel, and external electricity consumption.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERHADAP LINGKUNGAN HIDUP

Corporate Social Responsibility to the Environment

Inventaris Gas Rumah Kaca (Ton CO_2e) Tahun 2014-2016

Greenhouse Gas Emissions Inventory (Ton CO_2e) in 2014-2016

Sumber Emisi Gas Rumah Kaca Source of Greenhouse Gas Emissions		Emisi Gas Rumah Kaca (ton CO_2e) Greenhouse Gas Emissions (ton CO_2e)		
		2014*	2015*	2016**
Konsumsi Bahan bakar yang digunakan untuk pengoperasian Unit Pembangkit dan Kendaraan Operasional. Fuel consumption to operate Generating Unit and Operational Vehicles	CO_2	40.371.130,53	41.865.601.55	42.705.121,54
	CH_4	10.435,56	10.399,30	9.752,86
	N_2O	167.850,06	171.719,91	170.808,53
Penggunaan Refrigerant untuk kebutuhan AC dan peralatan pendingin lainnya. Refrigerant utilization for AC and other cooling equipment.	HCFCs	-	-	-
Total ton CO_2e Scope 1		40.549.416,15	42.047.720,76	42.885.682,93
Konsumsi Listrik oleh semua bangunan dan kantor yang dimiliki dan dioperasikan oleh Perusahaan yang berasal dari luar pembangkit. Electricity consumption by all buildings and offices owned and operated by the Company, which are located outside of the power plant.	CO_2	252.596,69	282.679,47	428.382,54
Total ton CO_2e Scope 2		252.596,69	282.679,47	428.382,54
Total ton CO_2e		40.802.012,84	42.330.400,23	43.314.065,48

*) Angka 2014 dan 2015 merupakan angka setelah diverifikasi oleh verifikator eksternal (TUV SUD)

**) Angka 2016 merupakan angka sebelum diverifikasi oleh verifikator eksternal (TUV SUD) dan rencana verifikasi di tahun 2017

*) The number in 2014 and 2015 is number after being verified by external verificator (TUV SUD)

**) The number in 2016 has not been verified by external verificator (TUV SUD), and is planned to be verified in 2017

2. Program Verifikasi dan Sertifikasi Data Base Line Emisi GRK

Pada tahun 2016, Indonesia Power telah melakukan inventarisasi GRK dari seluruh kegiatan perusahaan di Indonesia dengan menggunakan tahun 2012 sebagai tahun dasar perhitungannya. Rasio intensitas emisi Perusahaan menggunakan denominator jumlah produksi listrik bruto sebagai faktor yang paling relevan. Pada tahun 2016, rasio intensitas emisi Indonesia Power adalah sebesar 0,79 gigajoule/GWh.

2. Verification and Certification Program of GRK Emissions Baseline Data

In 2016, Indonesia Power has inventoried GRK from all activities of company in Indonesia, using data from 2012 as the basis of calculation. Company's emission intensity ratio utilizes the amount of gross electricity production as the most relevant factor. In 2016, Indonesia Power's emission intensity ratio reached the amount of 0.79 gigajoule/GWh.

Intensitas Emisi Indonesia Power Tahun 2014-2016
Indonesia Power Emission Intensity in 2014-2016

		2014	2015	2016
Total emisi gas rumah kaca (ton CO_2e)	Greenhouse gas emissions (ton CO_2e)	40.802.012,84	42.330.400,23	43.314.065,41
Total Produksi Bruto pembangkit thermal (kWh)	Thermal Power Plant Gross Production (kWh)	50.560.972.707,47	53.420.032.394,28	54.793.742.654,95
Intensitas Emisi (gigajoule /GWh)	Emission Intensity (gigajoule /GWh)	0,81	0,79	0,79

3. Emisi Gas Buang

Sebagai bentuk kepatuhan terhadap penerapan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 21 tahun 2008 tentang Baku Mutu Emisi Tidak Bergerak Bagi Usaha dan atau Kegiatan Pembangkit Tenaga Listrik Thermal, Indonesia Power telah melakukan kewajiban menghitung beban emisi gas buang yang dihasilkan oleh cerobong pembangkit.

3. Exhaust Gas Emission

As a form of compliance with the implementation of Regulation of Minister of Environment Number 21 of 2008 on Quality Standard of Fixed Emissions for Enterprises and/or Thermal Power Plant Activities, Indonesia Power has also calculated the obligatory exhaust gas emission load that is produced by generators' funnel.

Emisi Gas Buang Tahun 2014-2016
Exhaust Gas Emission in 2014-2016

Parameter	Beban Emisi (kg/tahun) Emission Expense (kg/year)		
	2014	2015	2016
CO	3.311.002,93	43.484.534,67	13.762.736,30
SO_2	9.699.312,21	10.384,39	26.515.245,01
NO	62.583,17	171.685,06	45.794.729,28
NO_x	9.373.185,41	7.502,23	22.563.864,77
NO_2	5.866.816,52	43.674.106,34	12.052.864,45
Jumlah / Total	**28.312.900,24**	**87.348.212,69**	**120.689.439,80**

4. Mekanisme Pembangunan Bersih

Mekanisme Pembangunan Bersih (*Clean Development Mechanism*-CDM) merupakan suatu proyek yang bertujuan untuk mereduksi emisi gas rumah kaca (GRK). Dalam melakukan CDM, Indonesia Power melibatkan Unit PLTP Gunung Salak yang berlokasi di desa Purwabakti Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor.

4. Clean Development Mechanism

Clean Development Mechanism (CDM) is a project to reduce the greenhouse gas emission (GRK). In performing CDM, Indonesia Power is involving Gunung Salak GPP Unit, located in Purwabakti village, District of Pamijahan, Bogor Regency.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERHADAP LINGKUNGAN HIDUP

Corporate Social Responsibility to the Environment

Pada tahun 1994, dua unit pembangkit listrik mulai beroperasi dengan kapasitas 2 x 55 MW. Tiga tahun kemudian satu unit tambahan lagi dapat dioperasikan dengan kapasitas yang sama. Pada tahun 2004 kapasitas pembangkit dinaikkan menjadi 3 x 60 MW melalui program *Capacity Upgrade*, sehingga produk yang dihasilkan berupa energi listrik disalurkan ke sistem ketenagalistrikan Jawa Bali Madura dengan kapasitas total kapasitas 180 MW.

In 1994, two units of power plant started to operate with the capacity of 2x55 MW. Three years later, an additional unit could be operated with the same capacity. In 2004, the capacity of generators was upgraded to 3x60 MW through Capacity Upgrade Program, hence the product generated is in the form of electricity that is channeled into the electrification system in Java Bali Madura with a total capacity of 180 MW.

Proyek *capacity upgrade* Unit PLTP Gunung Salak ini diikutsertakan dalam proyek CDM melalui metode VCS (*Voluntary Carbon Standard*). Verifikasi dan validasi Proyek ini selesai pada tahun 2009 dan hingga sekarang Unit PLTP Gunung Salak telah menghasilkan reduksi emisi karbon sebesar 866.010 VCUs.

Capacity upgrade project for Gunung Salak GPP Unit was included in CDM project through VCS (Voluntary Carbon Standard) method. The verification and validation of this project were completed in 2009 and until now Gunung Salak GPP Unit has produced carbon emission reduction in the amount of 866,010 VCUs.

Implementasi Pengelolaan Limbah

Indonesia Power telah mengkategorikan limbah yang ditimbulkan dari kegiatan pembangkit menjadi dua, yaitu limbah B3 (limbah bahan dan berbahaya) dan limbah non-B3 (non-bahan beracun berbahaya). Indonesia Power memastikan bahwa pengelolaan limbah yang dilakukan Perusahaan telah mengikuti peraturan perundangan yang berlaku.

Dalam pengelolaan limbah, Indonesia Power menerapkan sistem 3R (*Reuse, Reduce*, dan *Recycle*) dengan cara:

a. Pemanfaatan aplikasi *online* untuk menggantikan keperluan pencetakan (*reduce* limbah kertas).
b. Penggunaan kembali minyak pelumas trafo dan pelumas mesin pembangkit dengan penyaringan dan pemurnian ulang (*reduce* limbah pelumas).

Sistem 3R limbah non-B3 juga telah diintegrasikan ke dalam program tanggung jawab Perusahaan terhadap masyarakat, dantaranya yaitu:

a. Pemanfaatan limbah serasah mangrove untuk memproduksi batik.
b. Pemanfaatan limbah koran untuk dijadikan berbagai produk-produk *handycraft*.

Implementation of Waste Management

Indonesia Power has categorized waste produced from generators' activities into two categories, i.e. B3 waste (toxic and hazardous waste) and non-B3 waste (non-toxic hazardous waste). Indonesia Power ensures that waste management that has been carried out by the Company is in accordance with applied regulations.

Indonesia Power applies 3R system (Reuse, Reduce and Recycle) in managing produced waste, among them are:

a. Utilizing online application to replace printing necessities (reducing paper waste).
b. Reusing transformer and generators' lubricants through filtering and re-purification (reducing lubricant waste).

3R system on non-B3 waste has also been integrated into corporate social responsibility to the society, among them are:

a. Utilization of mangrove litter waste for batik production.
b. Utilization of newspaper waste to be made into handy craft products.

c. Pengembangan kompos organik dan daur ulang sampah plastik melalui program Hijaunesia Power.

c. Development of organic compost and plastic waste recycling through Hijaunesia Power Program.

1. Pengelolaan limbah B3

Indonesia Power berupaya melakukan pengelolaan limbah yang terencana terhadap limbah B3 sehingga tidak mencemari lingkungan serta memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku. Pengelolaan limbah B3 di Indonesia Power mengacu kepada Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2014 dan peraturan lain yang berkaitan. Dalam mengelola limbah B3, semua unit telah memiliki Izin untuk melakukan penyimpanan sementara, untuk selanjutya akan diserahkan kepada pihak ketiga dalam proses pengangkutan dan pengolahannya.

1. B3 Waste Management

Indonesia Power tries to conduct a planned management to B3 waste to avoid environment contamination and fulfill applied terms and conditions. B3 waste management in Indonesia Power refers to Government Regulation Number 101 of 2014 and other relevant regulations. In managing B3 waste, all units have been licensed for temporary storage that would then distributed to a third party for transportation and processing.

Volume dan Metode Pengelolaan Limbah B3 (Ton) Tahun 2014-2016

Volume and Methods of Toxic and Hazardous (B3) Waste Management (Ton) in 2014-2016

	Jumlah Limbah yang Dikelola Waste Managed			Metode Pengelolaan	Management Method
	2014	2015	2016		
Total Limbah B3	457.485,01	513.889,79	907.663,04	Seluruh Limbah B3 yang dihasilkan unit dikelola oleh YPK dan dikirim ke pengolah/pemanfaat yang memiliki izin	All Toxic and Hazardous Waste produced by the unit is managed by YPK and will be sent to licensed processor/ beneficiaries

2. Pengelolaan Limbah Non B3

Perusahaan melakukan pengelolaan limbah non B3 atau sampah dengan melakukan pemisahan jenis sampah di awal antara sampah organik dan non organik. Sampah organik akan dilanjutkan ke proses pengomposan dan sampah non organik akan dikelola bersama dengan pihak ketiga atau mitra perusahaan menjadi cinderamata atau kerajinan tangan.

Pada tahun 2016, persentase sampah yang diolah kembali untuk pembuatan kompos adalah 15,78% dari total limbah. Nilai ini mengalami peningkatan 204,63% dari tahun 2015 yaitu sebesar 5,18%.

2. Non-B3 Waste Management

The Company manages non-B3 waste or trash by dividing organic and non-organic trash. Organic trash would be processed into compost, and non-organic trash would be managed by a third party or company's partner to be processed into a souvenir or handy craft.

In 2016, the percentage of reprocessed waste for compost production is 15.78% from the total amount of waste. This value experienced a 204.63% increase from the number in 2015, i.e. 5.18%.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERHADAP LINGKUNGAN HIDUP
Corporate Social Responsibility to the Environment

Volume dan Metode Pengelolaan Limbah non-B3 (Ton)
Volume and Methods of Non-Hazardous (Non-B3) Waste Management (Ton)

Jenis Limbah Non B3 Type of Non- Hazardous Waste	Jumlah Limbah yang Dikelola Waste Managed			Keterangan Description
	2014	2015	2016	
Jumlah Sampah yang dihasilkan Waste Generated	1.776,33	4.582,41	7.200,60	Dikirim ke pihak ketiga/TPA Sent to third party/landfill
Sampah organic yang dimanfaatkan untuk composting Organic trash processed for composting	109,11	237,53	455,91	Dimanfaatkan untuk pembuatan kompos Used in composting
% Limbah di Daur Ulang (Composting) % Waste Recycled (Composting)	6,14	5,18	15,78	

Implementasi Pelestarian Keanekaragaman Hayati dan Program Penghijauan

Dalam melaksanakan program pelestarian keanekaragaman hayati dan lingkungan, Departemen Kepatuhan K3 dan Lingkungan bekerjasama dengan Bidang Komunikasi Korporat melakukan program *Eco Office*, program Hijaunesia Power dan program Kawan Hijaunesia Power. Dengan adanya program tersebut, diharapkan akan berdampak pada penambahan keanekaragaman hayati dan kembalinya fauna langka di lingkungan sekitar pembangkit.

1. Eco *Office*

Program *Eco Office* atau kantor peduli lingkungan merupakan refleksi kebijakan Perusahaan dalam menerapkan Sistem Manajemen Lingkungan (SML) sebagai upaya menciptakan lingkungan kerja yang bersih dan nyaman.

Beberapa kegiatan *Eco Office* antara lain pengelolaan sampah, pemasangan *eco sign* pada saklar lampu, keran air, lokasi strategis dan ruang publik lainnya di sekitar lingkungan Perusahaan dan Unit Pembangkitan. Kegiatan tersebut diselenggarakan sebagai bentuk dan ajakan kepedulian terhadap lingkungan, serta edukasi tentang pentingnya mengenal jejak karbon melalui sosialisasi yang intensif dan penghitungan masal jejak karbon dengan *carbon calculator*. Hal ini sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan yaitu mencegah dampak perubahan iklim dan menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan.

Implementation of Biodiversity Conservation and Reforestation Program

In carrying out the biodiversity and environmental conservation program, Department of Compliance with Occupational Health and Safety (OHS) and Environmental cooperates with Corporate Communication to perform Eco Office program, Hijaunesia Power program, and Kawan Hijaunesia Power Program. With the programs, it is expected that there is a positive influence on the biodiversity and the return of rare fauna in the environment around the power plant.

1. Eco Office

Eco-office program or environmental friendly office is a reflection of Company's policy in implementing Environmental Management System (SML) as an effort to create a clean and comfortable work environment.

Several activities of eco-office are waste management, eco sign installation on light switch, faucet, water faucet, and other strategic locations and public spaces around the Company's environment and Generating Unit. The activities are conducted as a form of encouragement to raise environmental awareness, and as educational approach on carbon prints through intensive socialization and mass calculation of carbon print using carbon calculator. This goes along with the purpose of sustainable development, i.e. to prevent the impact of climate change and guarantee a sustainable production and consumption patterns.

2. *Hijaunesia Power*

Program Hijaunesia Power merupakan kegiatan kampanye Indonesia Power yang diselenggarakan dalam mendukung konservasi keanekaragaman hayati di Indonesia, dengan demikian untuk mewujudkan hal tersebut, Indonesia Power bersinergi dengan lingkungan alam sekitar yaitu melalui budidaya flora dan fauna yang dilindungi, berikut keanekaragaman hayati (flora serta fauna yang dilindungi) Indonesia Power.

2. Hijaunesia Power

Hijaunesia Power Program is a campaign of Indonesia Power conducted to support biodiversity conservation in Indonesia. Therefore, to realize that, Indonesia Power synergizes with the surrounding environment, i.e. by cultivating protected flora and fauna. The following is an explanation on biodiversity and (flora and fauna cultivated) by Indonesia Power.

Unit	Lokasi Perlindungan Location of the Shelter	Flora dan Fauna yang dilindungi Protected Flora and Fauna	Upaya Pelestarian	Conservation Effort
PLTP | GPP Gunung Salak – UPJP | GGSU Kamojang	Taman Nasional Gunung Halimun Salak Mount Halimun Salak National Park	Elang Jawa Javan hawk-eagle	**2011:** Adopsi 4 elang	2011: Adoption of 4 eagles
			2012: Pelepasliaran dan program perlindungan bersama masyarakat	2012: Release and protection program with the community
			2013: program perlindungan sarang (nest protector)	2013: nest protector program
			2014: Pemantauan spesies kunci	2014: Monitoring key species
			2015: Monitoring untuk mengetahui data, informasi Elang Jawa	2015: Monitoring to get the information on Javan hawk-eagle
			2016: Monitoring 5 ekor Elang Jawa	2016: Monitoring of 5 Java hawk-eagles
		Owa Jawa Silvery Gibbon	**2015 - 2016 :** Monitoring 5 ekor Owa Jawa	2015 - 2016: Monitoring 5 Silvery Gibbons
		Macan Tutul Leopard	**2015 - 2016:** Monitoring Macan Tutul	2015 - 2016: Leopard Monitoring
PLTG | GTPP Gilimanuk – UP | GU Bali	Kawasan Taman Nasional Bali Barat West Bali National Park	Jalak Bali Bali Myna	**2012:** Perbaikan sarang penangkaran yang dibangun sejak 2006	2012: Reparation of breeding nest built since 2006
			2013: Konservasi spesies 32 ekor	2013: Conservation of 32 animals
			2014: Penambahan konservasi menjadi 38 ekor	2014: Adding conservation into 38 animals
			2015: Pelepasliaran dan penambahan konservasi menjadi 48 ekor	2015: Release and adding the conservation into 48 animals
			2016: Penambahan konservasi menjadi 56 ekor	2016: Adding conservation into 56 animals
PLTG | GTPP Pesanggaran dan PLTG | GTPP Pemaron –UP | GU Bali	Lingkungan Unit Unit Environment	Mangrove dan terumbu karang Mangrove and coral reefs	**2014 - 2016:** Konservasi Mangrove dan terumbu karang	2014-2016: Conservation of Mangrove and coral reefs
PLTG | GTPP Pesanggaran – UP | GU Bali	Lingkungan Unit Unit Environment	Kuda laut dan penyu Seahorses and turtles	**2015 - 2016:** Budidaya Kuda laut dan penyu	2015-2016: Cultivation of sea horses and turtles

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERHADAP LINGKUNGAN HIDUP

Corporate Social Responsibility to the Environment

Unit	Lokasi Perlindungan Location of the Shelter	Flora dan Fauna yang dilindungi Protected Flora and Fauna	Upaya Pelestarian	Conservation Effort
UP | GU Perak Grati	Lingkungan Unit Unit Environment	Rusa timor Javan Rusa	**2012:** melakukan Penangkaran	2012: Conserving
			2013 – 2014 : melakukan pengembangbiakan	2013-2014: Breeding
			2015: Berhasil pengembangbiakan	2015: Breeding succeed
			2016: Penambahan 1 ekor bayi rusa timor. Total konservasi menjadi 7 ekor.	2016: Adding 1 javan fawn. Total conserved is 7 animals.
UPJP | GGSU Priok	Lingkungan Unit Unit Environment	Jalak Bali Bali Myna	**2015 - 2016**: Budidaya dan pelepasliaran Jalak Bali	2015-2016: The cultivation and release of Bali Myna
UP | GU Semarang	Lingkungan Unit Unit Environment	Mangrove	**2015 - 2016:** Konservasi Mangrove	2015-2016: Mangrove Conservation
UJP | GGSU Labuan	Taman Nasional Ujung Kulon Ujung Kulon National Park	Owa Jawa Silvery Gibbon	**2015 - 2016**: Konservasi Owa Jawa	2015-2016: Conservation of Silvery Gibbons
UJP | GGSU Pelabuhan Ratu	Lingkungan Unit Unit Environment	Kopi robusta dan arabika Robusta and Arabica Coffee	**2015 - 2016:** Penanaman Kopi robusta dan arabika	2015-2016: Implantation of Robusta and Arabica coffee

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERHADAP LINGKUNGAN HIDUP

Corporate Social Responsibility to the Environment

PETA KEANEKARAGAMAN HAYATI
BIODIVERSITY MAP

No	Unit	Program
1	UP JP Priok Priok GGSU	Budidaya dan pelepasan liar burung Jalak Bali The cultivation and release of Bali Myna
2	UP JP Kamojang Kamojang GGSU	• Budidaya dan pelepasan liar burung Elang jawa • Penanaman kopi Java Pranger • The cultivation and release of Javan hawk eagle • Implantation of Java Pranger coffee
3	UP Saguling Saguling GU	Penanaman pohon endemik Planting of endemic tree
4	UP Semarang Semarang GU	Konservasi Mangrove Mangrove Conservation
5	UP Bali Bali GU	• Budidaya pelepasan Burung Jalak Bali • Konservasi Mangrove dan terumbu karang • Budidaya kuda laut dan penyu • The cultivation and release of Bali Myna • Conservation of Mangrove and coral reefs • Cultivation of seahorses and turtles

No	Unit	Program
6	UJP Banten 3 Lontar Banten 3 Lontar GSU	Penanaman pohon endemik Planting of endemic tree
7	UP Mrica Mrica GU	Penanaman kopi Robusta dan Arabika Implantation of Robusta and Arabica coffee
8	UP Perak Grati Perak Grati GU	Pembiakan Rusa Breeding of Javan Rusa
9	Unit Jasa Pemeliharaan Maintenance Services Unit	Penanaman pohon endemik Planting of endemic tree
10	UJP Banten 2 Labuan Banten 2 Labuan GSU	Konservasi Owa Jawa Conservation of Silvery Gibbon
11	UJP Banten 3 Lontar Banten 3 Lontar GSU	Penanaman pohon endemik Planting of endemic tree
12	UJP Banten 1 Suralaya Banten 1 Suralaya GSU	Penanaman pohon endemik Planting of endemic tree

No	Unit	Program
13	UJP Jabar 2 Pelabuhan Ratu Jabar 2 Pelabuhan Ratu GSU	Penanaman kopi Robusta dan Arabika Implantation of Robusta and Arabica coffee
14	UJP Adipala Adipala GSU	Penanaman pohon endemik Planting of endemic tree
15	UJP Pangkalan Susu Pangkalan Susu GSU	Penanaman pohon endemik Planting of endemic tree
16	Kantor Pusat Head Office	Penanaman pohon endemik Planting of endemic tree
17	PLTU Jeranjang Jeranjang SPP	Penanaman pohon endemik Planting of endemic tree
18	PLTU Barru Barru SPP	Penanaman pohon endemik Planting of endemic tree

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERHADAP LINGKUNGAN HIDUP

Corporate Social Responsibility to the Environment

3. *KaWan Hijaunesia Power*

Program KaWan Hijaunesia Power merupakan sinergi Indonesia Power dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Gerakan Pramuka dalam menjaga dan melestarikan ekosistem dan lingkungan hidup. Program ini merupakan penggabungan program KaWan GAUL (Saka Kalpataru Wanabakti Gerakan Aksi untuk Lingkungan) dan program Hijaunesia Power.

Tanggal 9 Agustus 2016, Direktur Utama Indonesia Power dilantik sebagai Anggota Majelis Pembimbing pada Satuan Kerja Pramuka (Mabi Saka) Kalpataru dan Wanabakti Nasional masa bakti 2016-2019 melalui Keputusan Ketua Gerakan Pramuka Kwartir Nasional No. 112 Tahun 2016.

3. KaWan Hijaunesia Power

KaWan Hijaunesia Power Program is a form of synergy among Indonesia Power and The Ministry of Environment and forestry and Scout Movement in preserving and conserving the ecosystem and environment. This program is a collaboration between KaWan GAUL (Saka Kalpataru Wanabakti Gerakan Aksi untuk Lingkungan) Program and Hijaunesia Power Program.

On August 9th, 2016, the President Director of Indonesia Power is inaugurated as Supervising Council Member on *Satuan Kerja Pramuka* or Scout Task Force (Mabi Saka) Kalpataru and National Wanabakti, period 2016-2019 through the Decree of Head of Indonesian Scout Movement No. 112 of 2016.

Messengers of Peace

Salam "Messenger of Peace" Kawan Hijaunesia Power

"Messenger of Peace" Greeting of KaWan Hijaunesia Power.

Pelantikan Mabi Saka Kalpataru dan Wanabakti Tingkat Nasional, 9 Agustus 2016

Inauguration of Mabi Saka Kalpataru and Wanabakti In National Level, August 9, 2016

Sinergi Indonesia Power–Pramuka, Pelihara Objek Vital Nasional

Indonesia Power Synergy – Indonesian Scout Maintaining National Vital Object

Inisiasi program ini dilakukan sehubungan dengan diterapkannya kebijakan *influence policy*, yaitu kebijakan memengaruhi kaum muda dan masyarakat umum sehingga Gerakan Pramuka menjadi magnet bagi semua orang dan semua anak bangsa. Anak muda yang aktif dalam gerakan pramuka mulai berpartisipasi secara progresif dan kreatif dalam kegiatan kepramukaan khususnya di bidang lingkungan melalui penanaman pohon di sekitar Unit Pembangkit Perusahaan.

The initiation of this program is carried out alongside with the implementation of influence policy, that is a policy that influences young people and the society to make Scout Movement becoming a magnet for all people. Young people that are active in Scout Movement start to progressively and creatively participate in scout activities specifically in the environmental area through tree implantation around the Company's Generating Unit.

Dalam 3 tahun terakhir (2014-2016), Indonesia Power telah menyelenggarakan program konservasi lingkungan dengan melakukan penghijauan melalui penanaman pohon sebanyak 305.410 pohon dengan rincian jumlah penanaman pohon pada masing-masing Unit sebagai berikut:

In the last 3 years (2014-2016), Indonesia Power has organized environmental conservation programs by conducting reforestation through 105,247 trees implantation, with details of tree planting in each Unit as follow:

Jumlah Penanaman Pohon Indonesia Power
Indonesia Power Tree Planting

Unit	2014	2015	2016
UP | GU Suralaya	1.716	671	2.779
UPJP | GGSU Priok	625	305	752
UP | GU Saguling	21.774	7.122	14.288
UPJP | GGSU Kamojang	25.230	11.200	7.000
UP | GU Mrica	29.465	63.560	52.030
UP | GU Semarang Unit Tambak Lorok	488	2.005	2.372
UP | GU Semarang Unit Sunyaragi	107	301	406
UP | GU Perak Grati Unit PLTGU | CCPP Grati	1.186	2.097	5.360
UP | GU Bali Unit Pesanggaran	2.330	1.175	4.650
UP | GU Bali Unit Gilimanuk	126	88	17
UP | GU Bali Unit Pemaron	40	-	-
UJP PLTU | GSU SPP Banten 1 Suralaya	2.871	32	516
UJP PLTU | GSU SPP Banten 2 Labuan	265	1.200	850
UJP PLTU | GSU SPP Banten 3 Lontar	12.509	7.737	5.939
UJP PLTU | GSU SPP Jawa Barat 2 Pelabuhan Ratu	2.180	750	1.035
UJP PLTU | GSU SPP Jawa Tengah 2 Adipala	-	1.008	3.909
UJP PLTGU | GSU CCPP Cilegon	-	-	709
UJP PLTU | GSU SPP Pangkalan Susu	-	-	1.089
UJP PLTU | GSU SPP Barru	-	-	674
UJP PLTU | GSU SPP Jeranjang	-	-	500
UJP PLTU | GSU SPP Sanggau	-	-	72
UJP PLTU | GSU SPP Holtecamp	-	-	300
Jumlah Penanaman Pohon/ Tree Planting Total	**100.912**	**99.251**	**105.247**

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERHADAP LINGKUNGAN HIDUP

Corporate Social Responsibility to the Environment

Implementasi Pengembangan Pembangkit Ramah Lingkungan (*Green Power Plant*)

Green Power Plant salah satu program strategis Indonesia Power untuk mendukung misi sebagai Perusahaan yang berwawasan lingkungan. *Green Power Plant* diterapkan dengan program 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) yang menjadi dasar dari langkah-langkah *Green Power Plant*, yaitu kurangi, pakai kembali dan daur ulang. Pelaksanaan 'Kurangi' diterapkan pada penggunaan bahan baku termasuk energi primer dan mengoptimalkan gas, sehingga limbah atau emisi yang terbentuk akan berkurang. 'Pakai Kembali' diterapkan pada limbah cair untuk diolah dan dimanfaatkan kembali sebagai bahan input ke dalam proses, serta melakukan 'Daur Ulang' jika pada limbah untuk bisa dimanfaatkan lagi.

Dalam lima tahun ke depan Indonesia Power menargetkan 85% unit pembangkit telah memenuhi persyaratan sebagai *Green Power Plant*. Salah satu syarat pembangkit *thermal* menjadi *Green Power Plant* yaitu memenuhi persyaratan PROPER Hijau. Tahapan proses untuk memperoleh PROPER Hijau dilakukan dengan langkah berikut:

Implementation of Green Power Plant Development

Green Power Plant is one of the strategic programs of Indonesia Power to support the Company's mission as an environmentally sound company. Green Power Plant applies 3R (Reduce, Reuse, Recycle) program that becomes the foundation. 'Reduce' is applied on reducing the utilization of raw materials, including primary energy and gas optimization, as to reduce the waste or emissions produced. 'Reuse' is applied on processing and reusing liquid waste as input material to the process, and then use 'Recycle' if the waste can be reused.

In the next five years, Indonesia Power targets that 85% of generating unit has met the requirement as Green Power Plant. One of the requirements for the thermal power plant to become Green Power Plant is to fulfill the requirement of Green PROPER. The process to obtain Green PROPER is as follows:

Melalui rangkaian proses berkelanjutan tersebut serta pengelolaan dampak operasional pembangkit yang terus diperbaiki maka diharapkan unit pembangkit lainnya dapat memperoleh PROPER Hijau untuk mewujudkan *green power plant* sebagai cerminan komitmen Indonesia Power dalam menjaga keseimbangan lingkungan hidup.

Through the sustainable process and management of operations impact on the power plant that continuously improved, it is expected that the other generating units may obtain Green PROPER in order to realize green power plant as the reflection of Indonesia Power's commitment in maintaining environmental balance.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERHADAP LINGKUNGAN HIDUP
Corporate Social Responsibility to the Environment

Penilaian Kinerja Bidang Lingkungan Hidup

Informasi peringkat PROPER oleh Kementerian Lingkungan Hidup yang diterima Indonesia Power dalam lima tahun terakhir dapat dilihat secara detail pada tabel berikut ini:

Performance Evaluation on Environmental Sector

PROPER rating by the Ministry of Environment that is received by Indonesia Power in the last five years can be seen in details on the following table:

Unit	Peringkat Rating				
	2012	2013	2014	2015	2016
PLTU | SPP Suralaya	Biru Blue	Biru Blue	Hijau Green	Hijau Green	Hijau Green
PLTGU | CCPP Priok	Biru Blue	Biru Blue	Biru Blue	Hijau Green	Hijau Green
PLTGU/PLTU | CCPP/SPP Tambak Lorok	Biru Blue	Biru Blue	Biru Blue	Hijau Green	Hijau Green
PLTG | GTPP Sunyaragi	Biru Blue	Biru Blue	Biru Blue	Biru Blue	Biru Blue
PLTG/PLTGU | GTPP/CCPP Grati	Hijau Green	Hijau Green	Hijau Green	Hijau Green	Hijau Green
PLTG | GTPP Pesanggaran	Biru Blue	Hijau Green	Biru Blue	Biru Blue	Hijau Green
PLTG | GTPP Gilimanuk	Biru Blue	Biru Blue	Biru Blue	Biru Blue	Hijau Green
PLTG | GTPP Pemaron	Belum Not Yet	Biru Blue	Biru Blue	Biru Blue	Biru Blue
PLTP | GTPP Kamojang-Darajat	Hijau Green	Hijau Green	Hijau Green	Hijau Green	Hijau Green
PLTP | GTPP Gunung Salak	Hijau Green	Hijau Green	Hijau Green	Biru Blue	Biru Blue
UJP | GSU Labuan *	Biru Blue	Biru Blue	Biru Blue	Biru Blue	Hijau Green
UJP | GSU Lontar *	Belum Not Yet	Belum Not Yet	Belum Not Yet	Belum Not Yet	Biru Blue
UJP | GSU Suralaya 8 *	Belum Not Yet	Biru Blue	Biru Blue	Biru Blue	Biru Blue
UJP | GSU Pelabuhan Ratu *	Belum Not Yet	Belum Not Yet	Belum Not Yet	Belum Not Yet	Biru Blue
UJP | GSU Cilegon *	Belum Not Yet	Belum Not Yet	Hijau Green	Hijau Green	Hijau Green

*) Pengelolaan UJP diatas sebagai *asset manager* dimulai pada tahun 2016 sebelumnya dilakukan oleh UPJB PT PLN (Persero)

*) UJP Management as the asset manager started in 2016, previously managed by UPJB PT PLN (Persero).

Selama tahun 2016, Indonesia Power telah meraih kinerja positif dalam pengelolaan lingkungan dengan diraihnya 9 PROPER Hijau dan 6 PROPER Biru. Penghargaan diberikan pada acara Anugerah Lingkungan PROPER dan Adipura 2016 tanggal 12 Desember 2016. Selain itu sejumlah penghargaan standar mutu juga telah diperoleh diantaranya ISO 14001 dan ISO 26000. Upaya yang dilakukan oleh Unit untuk meningkatkan Kinerja pencapaian PROPER antara lain dengan membuat SK General Manager tentang Tim Khusus PROPER serta penguatan kompetensi Tim PROPER, melakukan *Self Assesment*, menindaklanjuti seluruh saran serta rekomendasi hasil evaluasi oleh Tim Konsultan dalam *workshop* PROPER dan melakukan *benchmarking* ke perusahaan lain.

Throughout 2016, Indonesia Power has achieved positive performance in managing the environment, by obtaining 9 Green PROPER and 6 Blue PROPER. The awards were given during the PROPER Environmental Award and 2016 Adipura ceremony on 12 December 2016. In addition, numerous awards on quality standards have also been acquired, among them are ISO 14001 and ISO 26000 The efforts carried out by company's Unit that experienced an increase in their PROPER level were through formulation General Manager Decree on PROPER Specialized Team, strengthening the competence of PROPER Team, conducting Self-Assessment, conducting follow-up on suggestions and recommendations from the Consultant Team evaluation in PROPER workshop, and conducting benchmarking on other companies.

Implementasi Konservasi Air

Secara umum, konsumsi air oleh Indonesia Power digunakan untuk keperluan domestik/perkantoran dan air baku untuk proses steam turbin. Selama tahun 2016, Indonesia Power menggunakan air sebanyak 10.160.908,02 m3 mengalami peningkatan 27,25% dari tahun 2015 sebanyak 7.984.808,05 m^3.

Implementation of Water Conservation

Generally, Indonesia Power consumes water to be used for domestic/office needs and raw water for steam turbine process. Throughout 2016, Indonesia Power used 10,160,908.02 m3 water, an increase of 27.25% from 2015, which was 7,984,808.05 m^3.

Tabel Konsumsi Air Indonesia Power tahun 2014-2016
Table: Indonesia Power Water Consumption in 2014-2016

Sumber Air	Water Sources	Volume (m^3)		
		2014	2015	2016
Air Tanah	Groundwater	79.027,70	49.328	38.986
Air Permukaan (termasuk lahan basah/ rawa, sungai, danau, dan laut)	Surface Water (including wetlands/swamps, rivers, lakes, and sea)	4.415.550,06	7.846.230,05	10.111.840,02
Air PAM/PDAM	PAM/PDAM	179.000	89.250	10.082
Total	Total	**4.673.577,76**	**7.984.808,05**	**10.160.908,02**

Dalam menjalankan aktivitas produksinya, Indonesia Power sangat bergantung pada kesediaan air sebagai salah satu energi utama untuk memproduksi listrik pada pembangkitnya. Oleh karena itu Indonesia Power senantiasa melakukan pembaruan dalam pengelolaan air dan limbah buangan melalui sistem prosedur dan teknologi yang andal.

In conducting its production activities, Indonesia Power relies heavily on water availability as one of the main energy resources to produce electricity in the power plant. Therefore, Indonesia Power always renews the management of water and water waste through a system of reliable procedures and technologies.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERHADAP LINGKUNGAN HIDUP

Corporate Social Responsibility to the Environment

Untuk mengelola air yang diambil untuk keperluan proses pembangkit, setiap unit melakukan upaya untuk konservasi air dengan mendaur ulang air yang telah dipakai untuk keperluan lain serta mendaur ulang air limbah dengan instalasi pengolah air agar hasilnya dapat dipakai kembali ke dalam proses.

Adapun inisiatif yang dilakukan untuk meningkatkan efisiensi penggunaan air yang dilakukan Indonesia Power yaitu melalui Pemanfaatan limbah cair dengan sistem RO (*Reverse Osmosis*) dan Reusing limbah cair PLTU batubara untuk penyiraman *stock pile*.

To manage water that is retrieved for generators' process, each Unit conducts a water conservation method by recycling used water for other purposes, and recycling wastewater through the installation of water treatment so that the outcome can be utilized once more into the process.

Several initiatives that have been done to increase the efficiency of water utilization by Indonesia Power are, through the utilization of liquid waste with Reserve Osmosis (RO) system, and reusing liquid waste of Coal based SPP for stockpile watering.

Volume Air Unit Eksisting dan UJP yang Didaur Ulang

Recycled Water Volume of Existing Unit and GSU

Kegiatan	Activity	Volume Air Terpakai (m^3) Volume of Water Used (m^3)	Volume Air Daur Ulang (m^3) Volume of Recycled Water (m^3)	Persentase (%) Percentage (%)
Proses Produksi	Production Process	7.096.731,1	93.645	1,32%
Kebutuhan Domestik	Domestic Use	1.561.968,1	60.159,3	3,85%
Penyiraman *Stock File* & Penyiraman Abu	Stock File and Ash Watering	469.277,7	49.029,2	10,45%
Jumlah	**Total**	**9.127.976,9**	**202.833**	**2,22%**

Pengelolaan air Indonesia Power telah diuji sesuai dengan standar baku mutu yang berlaku untuk kegiatan produksi dan domestik. Pengujian dilakukan secara rutin setiap tiga bulan sekali melalui laboratorium yang terakreditasi Komite Akreditasi Nasional (KAN).

Indonesia Power water management has been tested accordingly to applied quality standard for production and domestic activities. Testing is carried out routinely once every three months through KAN accredited laboratory.

Implementasi Efisiensi Energi

Indonesia Power menyadari bahwa pemanfaatan energi yang berkelanjutan dapat dicapai melalui upaya peningkatan efisiensi energi dari proses produksi dan utilitas pendukung, proses yang lebih ramah lingkungan, efisiensi dari mesin-mesin pembangkit, dan efisiensi dari bangunan. Selain itu, penggunaan energi secara efisien juga dapat berkontribusi pada pengurangan emisi dan menciptakan lingkungan yang lebih bersih.

Dalam proses produksi listrik, Indonesia Power menggunakan energi primer sebagai bahan baku (material) yang berasal dari energi fosil dan energi baru terbarukan.

Implementation of Energy Efficiency

Indonesia Power recognizes that the sustainable energy utilization can be achieved through improvement of energy efficiency, from productions and supporting utility process, more environmentally friendly process, generator machines efficiency, and building utilization efficiency. In addition, efficient energy utilization can contribute to reduce emission and create cleaner environment.

In the process of electricity production, Indonesia Power uses primary energy as raw material, which is derived from fossil energy and new and renewable energy.

Kegiatan efesien energi yang dilakukan oleh Indonesia power adalah dengan mengurangi pemakaian listrik agar tercapainya penghematan listrik untuk pemakaian sendiri melalui kegiatan sebagai berikut:

1. Efisiensi Energi pada Pembangkit

Selama periode tahun 2014-2016, Indonesia Power menggunakan berbagai jenis energi primer dalam melakukan operasinya sebagai berikut:

Energy efficient activities undertaken by Indonesia Power is to reduce electricity consumption in order to achieve electricity savings for own use through the following activities:

1. Energy Efficiency on Power Plant

Throughout the period of 2014-2016, Indonesia Power used various primary energy in operations, as follows:

Konsumsi Energi Berdasarkan Jenis Energi
Energy Consumption Based on Type of Energy

Jenis Energi	Type of Energy	Volume				Gigajoule		
		Satuan / Unit	2014	2015	2016	2014	2015	2016
Energi Fosil / Fossil energy								
Batubara	coal	Ton	11.562.704	12.168.482	11.589.039	338.875.104	356.629.003	339.646.919
High Speed Diesel (HSD)	High Speed Diesel (HSD)	Kliter	775.710	326.942	46.349	31.181.702	13.142.293	1.863.120
Marine Fuel Oil (MFO)	Marine Fuel Oil (MFO)	Kliter	121.422	100.804	12.013	4.880.876	4.052.082	482.894
Gas Alam	Natural Gas	Gmbtu	62.839	76.851	111.003	66.350	81.145	117.205
Jumlah Konsumsi Energi Fosil / Total of Fossil energy consumption						375.004.032	373.904.522	342.110.138
Energi Terbarukan / Renewable Energy								
Panas Bumi	Geothermal	MWh	2.708.998	2.759.191	2.644.172	9.752.393	9.933.088	9.519.019
Air	Water	MWh	4.019.374	3.373.785	5.280.275	14.469.746	12.145.626	19.008.990
Jumlah Konsumsi Energi Terbarukan / Total of Renewable energy consumption						24.222.139	22.078.714	28.528.009
Total						**399.226.171**	**395.983.236**	**370.638.147**

Selama tahun 2016, konsumsi energi Indonesia Power sebesar 370.638.147 gigajoule yang mengalami penurunan 6,40% dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 395.983.276 gigajoule. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2016 Indonesia Power berhasil melakukan efisiensi pada pembangkit.

Selain itu, Indonesia Power juga menghitung intensitas energi yang bertujuan untuk melihat tingkat efisiensi penggunaan energi Perusahaan. Rasio intensitas energi Perusahaan menggunakan denominator jumlah produksi listrik sebagai faktor yang paling relevan. Pada tahun 2016, rasio intensitas energi Indonesia Power adalah sebesar 8.593,53 gigajoule/GWh. Hal ini menunjukkan keberhasilan Perusahaan dalam menerapkan efisensi penggunaan energi.

Throughout 2016, Indonesia Power consumed 370,638,147 gigajoule energy, which was a decrease of 6.40% from the previous year, i.e. 395,983,276 gigajoules. It demonstrates that in 2016, Indonesia Power is succeeded in performing efficiency on the power plant.

In addition, Indonesia Power also calculates the energy intensity to observe the efficiency level of Company's energy utilization. Company's energy intensity ratio utilizes the amount of electricity production as the most relevant factor. In 2016, Indonesia Power's energy intensity ratio reached the amount of 8,593.53 gigajoule/GWh. This shows how the Company has managed to implement energy utilization efficiency.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERHADAP LINGKUNGAN HIDUP

Corporate Social Responsibility to the Environment

Intensitas Energi Indonesia Power

Indonesia Power Energy Intensity

		2014	2015	2016
Total Konsumsi Energi (Gigajoule)	Energy Consumption (Gigajoule)	399.226.171	395.983.236	370.638.147
Total Produksi Jawa Bali Grid & Embedded (GWh)	Total Production in Java Bali, Grid & Embedded (GWh)	37.461,12	39.126,74	43.129,92
Intensitas Energi (Gigajoule /GWh)	**Energy Intensity (Gigajoule/GWh)**	**10.657,08**	**10.120,53**	**8.593,53**

2. Pengembangan Pembangkit Energi Baru Terbarukan

Sejak berdiri pada tahun 1995, Indonesia Power telah memiliki pembangkit-pembangkit bertenaga EBT. Sampai dengan tahun 2016, terdapat dua jenis pembangkit yang menggunakan EBT sebagai sumber energi, yaitu Pembangkit Listrik Tenaga Air berupa Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) dan Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTM) serta Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP).

Dalam rangka menjaga mutu lingkungan, Indonesia Power terus berupaya menyeimbangkan penggunaan EBT sebagai energi dalam melaksanakan kegiatan produksi. Energi Baru Terbarukan (EBT) merupakan *green energy* yang bersumber dari air, panas bumi, tenaga surya, gelombang air laut, biomassa, biofuel, hingga yang berasal dari sampah, memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi energi listrik.

Berikut ini program pengembangan pembangkit dengan energi terbarukan Indonesia Power:

1. **Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)**
   Indonesia Power memiliki 2 (dua) pembangkit sumber energi terbarukan yaitu PLTA Panglima Besar Soedirman (UP Mrica) dan PLTA Saguling (UP Saguling) termasuk 18 sub-unit PLTA yang berada dalam pengelolaan kedua UP tersebut. Pada tahun 2016 Indonesia Power melalui anak perusahaannya, PT Rajamandala Electric Power, sedang membangun PLTA Rajamandala berkapasitas 1x47 MW. Selain Pengembangan PLTA melalui PT Rajamandala Electric Power, Perusahaan juga mulai mengembangkan PLTA

2. Renewable Energy Power Plant Development

Indonesia Power already owned NRE powered plants since its establishment in 1995. As of the end of 2016, Indonesia Power has managed two types of power plants utilizing NRE as a source of energy, i.e. Hydropower Plants in the form of Hydropower Plants (HPP) and Micro Hydropower Plants (MPP), and Geothermal Power Plants (GPP).

In order to maintain the environmental quality, Indonesia Power continues to balance the utilization of NRE as energy in conducting the production. New and Renewable Form of Energy (NRE) refers to green energy deriving from water, geothermal, solar power, waves, biomass, biofuel, and waste, can potentially be developed to produce power.

The following is renewable energy power plant development program in Indonesia Power:

1. Hydro Power Plant (HPP) Development
   Indonesia Power has 2 (two) renewable energy power plant, i.e. Panglima Besar Soedirman HPP (Mrica GU) and Saguling HPP (Saguling GU), including 18 HPP sub-units under the management of both UP. In 2016, Indonesia Power, through its subsidiary, PT Rajamandala Electric Power, has been constructing Rajamandala HPP with the capacity of 1x47 MW. In addition to HPP Development through PT Rajamandala Electric Power, the Company starts to develop HPP in Sumatera and Sulawesi area, i.e.

di daerah Sumatera dan Sulawesi yaitu PLTA Poigar 30 MW dan PLTA Simonggo 90 MW serta pengembangan pembangkit di Jawa Tengah yaitu PLTA Maung 360 MW.

2. **Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTM)**
Indonesia Power memiliki 3 (tiga) PLTM yang berlokasi di Banjarnegara yaitu PLTM Tapen 0,75 MW, PLTM Siteki 1,20 MW dan PLTM Plumbungan 1,60 MW dibawah pengelolaan UP Mrica. Pada tahun 2016, Indonesia Power telah mulai mengembangkan beberapa PLTM, antara lain PLTM Lambur 8 MW dan PLTM Harjosari 9,9 MW di Pekalongan serta PLTM Gunungwugul 3 MW di Banjarnegara.

3. **Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)**
Indonesia Power melalui UPJP Kamojang telah memiliki 3 (tiga) PLTP dengan kapasitas total 375 MW yaitu PLTP Kamojang (Kabupaten Bandung), PLTP Darajat (Garut), dan PLTP Gunung Salak (Sukabumi) serta mengelola pembangkit milik PLN yaitu PLTP Ulumbu 9,60 MW. Saat ini Perusahaan juga mengembangkan PLTP melalui Anak Perusahaan, PT Tangkuban Parahu Geothermal yaitu WKP Panas Bumi Tangkuban Parahu dengan rencana kapasitas 110 MW, WKP Tangkuban Parahu ditargetkan selesai pada tahun 2020 mendatang.

4. **Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)**
Pembangkit ini masih dalam proses tahap pengembangan. Dalam melaksanakan proyek ini, Indonesia Power menggandeng Tim Desa Emas di mana pembangunan pembangkit tersebut akan dilakukan di Karimun Jawa (Jawa Tengah) dan Jambi.

5. **Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa (PLTBM)**
Pada bulan November 2016, Indoneisia Power menandatangani MoU (*Memorandum of Understanding*) untuk pengembangan PLT Biomassa dari palet kayu yang akan dikembangkan di Merauke (Papua). Sampai akhir tahun 2016, proyek PLTBM masih dalam proses tahap pengembangan.

Poigar HPP 30 MW and Simonggo HPP 90 MW, as well as power plant development in Central Java, i.e. Maung HPP 360 MW.

2. Micro-hydro Power Plant (MPP)
Indonesia Power has 3 (three) MPP located in Banjarnegara, i.e. Tapen MPP 0.75 MW, Siteki MPP 1.20 MW, and Plumbungan MPP 1.60 MW, under the management of Mrica GU. In 2016, Indonesia Power has started to develop numerous MPP, such as Lambur MPP 8 MW and Harjosari MPP 9.9 MW in Pekalongan, as well as Gunungwugul MPP 3 MW in Banjarnegara.

3. Geothermal Power Plant (GPP)
Indonesia Power, through Kamojang GGSU, has 3 (three) GPP with a total capacity of 375 MW, i.e. Kamojang GPP (Bandung Regency), Darajat GPP (Garut), and Gunung Salak GPP (Sukabumi). The Company also manages a power plant which is owned by PLN, i.e. Ulumbu GPP 9.60 MW. Currently, the Company also develops GPP through a subsidiary, PT Tangkuban Parahu Geothermal, i.e. Working Area Panas Bumi Tangkuban Parahu, with the capacity plan of 110 MW. Working Area Tangkuban Parahu is targeted to finish in 2020.

4. Solar Power Plant (SPP)
This power plant is in the development stage. In conducting this project, Indonesia Power teamed up with Desa Emas Team, in which the power plant will be built, i.e. Karimun Jawa (Central Java) and Jambi.

5. Biomass Power Plant (BPP)
In November 2016, Indonesia Power signed a MoU (Memorandum of Understanding) to develop Biomass Power Plant from wood pallets in Merauke (Papua). As of the end of 2016, BPP project is still in development stage.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERHADAP LINGKUNGAN HIDUP

Corporate Social Responsibility to the Environment

6. **Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa)**
   Sejalan dengan penandatanganan MoU (*Memorandum of Understanding*) pada tanggal 5 September 2016, Indonesia Power terus menggali potensi dan mengembangkan energi hijau lainnya. Pengembangan energi sampah yang digunakan dalam pembangkitan listrik memilik keunggulan karena dapat menciptakan kota menjadi bebas dari polusi, bau, dan tumpukan sampah. Selain itu, pengolahan sampah menjadi energi listrik ini juga dapat mengurangi emisi karbon. Sampai dengan tahun 2016, proyek PLTSa masih dalam proses tahap pengembangan.

6. Waste to Energy Power Plant (WEPP)
   In line with the signing of MoU (Memorandum of Understanding) on 5 September 2016, Indonesia Power continues to explore and develop other green energy. Waste energy is used in power generation due to its advantage, as it enables a city to be free of pollution, odor, and waste piles. In addition, waste processing into electrical energy can reduce carbon emissions. As of the end of 2016, WEPP project is still in development stage.

3. Program 5E (*Enhancing, Embedding, Energy, Efficiency, Excellent*)

Indonesia Power telah mengembangkan pilot project efisiensi energi primer melalui Program Peningkatan Budaya Efisiensi Energi yang Ekselen atau yang lebih dikenal dengan istilah 5E (*Enhancing and Embedding Energy Efficiency Excellence*). Program ini merupakan upaya Indonesia Power untuk membudayakan efisiensi energi di seluruh unit pembangkit Perusahaan serta sebagai langkah proaktif dalam menghadapi Program *Performance Based Regulatory* (PBR) oleh Pemerintah yang akan diberlakukan mulai tahun 2017.

Program 5E tahun 2016 diimplementasikan di seluruh unit, sedangkan program penghematan energi yang telah tervalidasi terdapat di UJP Lontar, UJP Pelabuhan Ratu, dan UP Suralaya. Dengan diimplementasikan program tersebut, pada tahun 2016 Indonesia Power berhasil melakukan efisiensi energi sebesar 660,28 kCal/kWh.

3. 5E Program (Enhancing, Embedding, Energy, Efficiency, Excellent)

Indonesia Power develops a pilot project for efficiency of primary energy through the 5E Program (Enhancing and Embedding Energy Efficiency Excellence). This program is an effort of Indonesia Power to cultivate energy efficiency in every Company's generating unit, as well as a proactive step to tackle Performance-Based Regulatory (PBR) Program by the Government, which will be enforced in 2017.

In 2016, 5E program has been applied on all Units, and validated energy saving program applies in GSU Lontar, Pelabuhan Ratu GSU and Suralaya GU. By implementing the program, Indonesia Power has managed energy efficiency in the amount of 660.28 kCal/kWh in 2016.

Implementasi Sistem Manajemen Lingkungan (SML)

Dalam rangka memberikan panduan dasar agar kegiatan bisnis yang dijalankan senantiasa ramah lingkungan, Indonesia Power membentuk program SML.

Sepanjang tahun 2016, Indonesia Power telah melaksanakan program pelestarian lingkungan dengan melakukan kegitan sebagai berikut:

Implementation of Environmental Management System (SML)

In order to provide baseline so that the business activity is always environmentally friendly, Indonesia Power established SML Program.

Throughout 2016, Indonesia Power has organized environmental conservation program by conducting activities as follow:

1. Penyusunan *Roadmap* pencapaian PROPER dengan menyelenggarakan kegiatan *Workshop* & Forum
2. Pemantauan, pemeriksaan dan pembinaan pengelolaan lingkungan dengan pemenuhan baku mutu limbah cair, emisi udara dan pengelolaan limbah B3 untuk UP, UPJP dan Kantor Pusat yang dilakukan secara rutin tiap bulan
3. Mengarahkan revisi AMDAL, RKL-RPL atau UKL-UPL unit pembangkit yang mengalami perubahan signifikan (kapasitas/proses produksi)
4. Penghijauan di area dan sekitar pembangkit listrik sebagai upaya perimbangan emisi dari PLTU, meningkatkan keanekaragaman hayati dan meningkatkan nilai tambah dalam penilaian PROPER
5. Peningkatan efisiensi pada kegiatan operasional unit Pembangkit dan Kantor Pusat melalui program 3R (*reduce, reuse dan recycle*).

Mekanisme Pengaduan Masalah Lingkungan

Sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan, Indoneisa Power selalu terbuka jika ada laporan pengaduan dari masyarakat terhadap dampak lingkungan yang mungkin timbul berkaitan dengan operasional Perusahaan. Pengaduan masalah lingkungan tersebut disampaikan kepada Unit Pembangkit terkait yang di tujukan kepada General Manager masing-masing unit.

Selama tahun 2016, Indonesia Power tidak mendapat denda atau sanksi berkaitan dengan ketidakpatuhan terhadap undang-undang yang berkaitan dengan masalah lingkungan.

1. Roadmap compilation of PROPER achievement by conducting Workshop & Forum
2. Monitoring, auditing, and mentoring of environmental management by fulfilling the standards of waste liquid, air emissions, and B3 waste management for GU, GGSU, and Head Office regularly every month.
3. Directing the revision of AMDAL, RKL-RPL, or UKL-UPL for generating unit who has significant changes (capacity/production process)
4. Reforestation in the area and around the power plant as an effort to balance emissions from SPP, increase biodiversity, and increase added value in PROPER assessment
5. Increased efficiency in Power Plant and Head Office unit operations through 3R (reduce, reuse and recycle) program.

Environmental Problem Complaint Mechanism

As a form of concern for the environment, Indonesia Power is open to any complaints from the public for any environmental impacts that might arise because of the Company's operational activities. Complaints on environmental issues are delivered to the Generating Unit in question that is specified to the Unit's respective General Manager.

In 2016, Indonesia Power did not have any fines or penalties related to incompliance with rules and legislations related to the environmental problem.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERHADAP LINGKUNGAN HIDUP
Corporate Social Responsibility to the Environment

Sertifikasi di Bidang Lingkungan yang Dimiliki Indonesia Power

Pada tahun 2016, Indonesia Power meraih kinerja positif dalam pengelolaan lingkungan (Proper). Kinerja positif ini dibuktikan dengan diraihnya 9 Proper Hijau oleh PLTU Suralaya, PLTGU Priok, PLTGU/PLTU Tambak Lorok, PLTG/PLTGU Grati, PLTG Pesanggaran, PLTG Gilimanuk, PLTP Kamojang - Darajat, UJP Cilegon dan UJP Labuan.

Selain itu Indonesia Power juga telah mendapatkan sertifikasi bidang lingkungan yaitu ISO 14001.

Certification in Environmental Sector

In 2016, Indonesia Power achieved positive performance in environmental management (PROPER). The positive performance is proven by 9 Green PROPER achieved by Suralaya SPP, Priok CCPP, Tambak Lorok CCPP/SPP, Grati GTPP/CCPP, Pesanggaran GTPP, Gilimanuk GTPP, Kamojang-Darajat GPP, Cilegon GSU and Labuan GSU.

In addition, Indonesia Power also obtained the certification in the environmental sector, i.e. ISO 14001.

Biaya Pengelolaan Lingkungan

Informasi terkait biaya pengelolaan lingkungan Indonesia Power dalam tiga tahun terakhir dapat dilihat secara detail pada tabel berikut ini:

Environmental Management Cost

Information related to the cost of environmental management of Indonesia Power in the last three years can be seen in details in the following table:

No	Program	Program	Tahun (Rp) Year (Rp)		
			2014	2015	2016
1	Pemeliharaan Lingkungan	Environmental Maintenance	1.365.530.825	1.631.567.730	1.735.460.500
2	Dokumentasi Lingkungan	Environmental Documentation	587.854.900	2.567.481.120	2.381.693.793
3	Pemantauan Lingkungan	Environmental Monitoring	2.950.536.262	6.138.894.249	3.706.687.800
4	Pengelolaan Lingkungan	Environmental Management	1.322.140.911	4.136.126.563	3.562.060.707
5	Pemeliharaan Instalasi/Alat Pengelolaan Lingkungan	Installation/Maintenance of Environmental Management Equipment	53.683.100	453.203.000	3.262.818.445
Jumlah/ Total			**6.279.745.998**	**14.927.272.662**	**14.648.721.424**

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERHADAP KETENAGAKERJAAN, KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3)

Corporate Social Responsibility to Employment, Occupational Health and Safety (OHS)

Dalam menjalankan Praktik Ketenagakerjaan Indonesia Power selalu berpegang pada Undang-Undang Ketenagakerjaan dan peraturan pelaksanaannya. Hak dan kewajiban karyawan Indonesia Power diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara Indonesia Power dengan Serikat Pekerjanya. Hubungan yang harmonis antara Indonesia Power dan Serikat Pekerja juga selalu ditingkatkan dengan menanamkan hubungan asas kemitraan, kedewasaan dan saling percaya.

In conducting Employment Practices, Indonesia Power continuously abides to Employment Laws and rules of its implementation. Indonesia Power's employees' rights and obligations are regulated on Collective Labor Agreement (CLA) between Indonesia Power and its Labor Union. A harmonious relationship between Indonesia Power and Labor Union is constantly improved by implementing principles of partnership, maturity, and trust.

Bentuk kegiatan tanggung jawab Perusahaan terhadap ketenagakerjaan, kesehatan dan keselamatan kerja terdiri dari 2 (dua) bidang kegiatan yaitu Kegiatan Tanggung Jawab Sosial terkait Ketenagakerjaan dan Kegiatan Tanggung Jawab Sosial terkait dengan Kesehatan Dan Keselamatan Kerja.

Form of activities for corporate responsibility toward employment, health, and occupational safety consists of 2 (two) areas of activity, namely Social Responsibility Activity regarding Employment and Social Responsibility regarding Occupational Health and Safety.

TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN TERHADAP KETENAGAKERJAAN, KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3)

Corporate Social Responsibility to Employment, Occupational Health and Safety (OHS)

A. Kegiatan Tanggung Jawab Perusahaan Terhadap Ketenagakerjaan

Kebijakan

Dalam pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM), Indonesia Power mengacu pada kebijakan pada Undang-undang RI Nomor 13 tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan. Selain itu, Indonesia Power juga telah memiliki kebijakan khusus terkait pengelolaan SDM yaitu yang ditetapkan melalui Keputusan Direksi Nomor: 121.K/010/IP/2014 tentang Sistem Pembinaan Kompetensi dan Karir Pegawai.

Rencana kegiatan

Indonesia Power telah menetapkan rencana kegiatan Tanggung Jawab Perusahaan terhadap ketenagakerjaan tahun 2016, dalam rangka untuk meningkatkan hubungan industrial antara Perusahaan dengan pegawai. Adapun rinician kegiatan tersebut sebagai berikut:

A. Corporate Responsibility Program to Employment

Policy

In Human Resources (HR) management, the Company refers to Law of the Republic of Indonesia No. 13 of 2013 on Employment. In addition, Indonesia Power has a custom policy related to HR management that was stipulated in the Board of Directors' Decree Number 121.K/010/IP/2014 on Competency Coaching System and Employees Career Path.

Program

Indonesia Power has determined corporate responsibility program regarding employment in 2016, to improve industrial relationship between the Company and employees. The description of the program is as follows:

Rencana Kegiatan Program	Realisasi Kegiatan	Activities
Perundingan Perjanjian Kerja Bersama Tahun 2017-2018 Discussion on Collective Labor Agreement in 2017-2018	Adanya pedoman yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban Pengusaha dan Pegawai	Guidelines that contain occupational conditions, rights, and obligations of Company and Employees
Review SK Peraturan Disiplin Pegawai Review on the Decree of Disciplinary Regulation of Employees	Adanya pedoman yang mengatur tentang kewajiban, larangan, dan sanksi apabila kewajiban tidak ditaati atau larangan dilanggar oleh Pegawai	Guidelines regulating obligations, restrictions, and sanctions in the case of incompliance toward obligation or violation toward regulation conducted by employees
*Go Live Pro*HCM	Pemutakhiran sistem aplikasi *Human Capital Management*.	Updating Human Capital Management application system.

Pelaksanaan kegiatan Tanggung Jawab Perusahaan Terhadap Ketenagakerjaan dan Dampak Kuantitatif

Sepanjang tahun 2016 bentuk kegiatan terkait Tanggung Jawab Perusahaan terhadap pegawai dilakukan dengan menciptakan lingkungan kerja yang aman, nyaman dan kondusif melalui kegiatan sebagai berikut:

Kesetaraan *Gender* dan Kesempatan Kerja

Dalam hal praktik ketenagakerjaan, Indonesia Power senantiasa memberikan kesempatan yang sama dalam penerimaan pegawai, berkarir dan melaksanakan tugasnya secara profesional tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, *gender*, dan kondisi fisik.

Selama tahun 2016, tidak terdapat laporan mengenai insiden diskriminasi yang berlandaskan pada ras, warna kulit, gender, agama, opini politik, asal usul sosial dan segala bentuk diskriminasi lainnya yang melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal di seluruh operasional Perusahaan.

Pengembangan Kompetensi

Indonesia Power memberi perhatian tinggi terhadap pengembangan kompetensi pegawai untuk memastikan kesiapan SDM dan organisasi yang selaras dengan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) guna mewujudkan Indonesia Power sebagai *Long Run Sustainable Company.*

Oleh karena itu, Indonesia Power terus berupaya mengembangkan dan meningkatkan kualitas serta produktivitas sumber daya manusia melalui berbagai program pengembangan dengan berbagai program pendidikan dan pelatihan, training maupun studi banding yang disesuaikan dengan kebutuhan Perusahaan.

Selama tahun 2016, Indonesia Power telah menyelenggarakan program pengembangan bagi pegawai dalam bentuk:

The Implementation of Corporate Responsibility Programs regarding Employment and Quantitative Impacts

Throughout 2016, form of activities related to corporate Responsibility toward employees were conducted to create a safe, comfortable, and conducive work environment by the means of these following activities:

Gender Equality and Employment Opportunity

In employment practices, Indonesia Power constantly provides equal opportunities in the recruitment process, career path, and tasks implementation in a professional manner without discriminating on ethnic identities, religions, races, gender, and physical conditions.

Throughout 2016, there had not been any report regarding discrimination incident based on race, the color of one's skin, gender, religion, political belief, social background, and another form of discrimination that might have involved any of the internal and external stakeholders in all operational level of the Company.

Competence Development

Indonesia Power puts emphasis on employees' competency development to ensure HR and organizational readiness that is aligned with Long Term Corporate Plan (RJPP) to realize Indonesia Power as a Long Run Sustainable Company.

Therefore, Indonesia Power constantly attempts to develop and improve the quality and productivity of human resources through various development programs, consisting of education and training programs, and field comparative study that is adjusted to Company's needs.

Throughout 2016, Indonesia Power had held these following development programs for its employees:

TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN TERHADAP KETENAGAKERJAAN, KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3)

Corporate Social Responsibility to Employment, Occupational Health and Safety (OHS)

1) Program Pelatihan dan Pendidikan yang ditunjukan untuk pegawai baru, program pendidikan dan Diklat Penjenjangan
2) *Training Work Station* (Simulator) dilakukan oleh *Learning Center* Indonesia Power yang terletak PLTU Perak, Surabaya
3) Melaksanakan Sertifikasi Kompetensi baik untuk Sertifikasi Baru maupun Perpanjangan.

Uraian lebih rinci terkait pengembangan kompetensi pegawai dijelaskan dalam Bab Profil Perusahaaan Sub Bagian Profil Pegawai Perusahaan pada Laporan Tahunan ini.

1) Training and Education Programs directed for new employees, education program and job grading training
2) Work Station Training (Simulator) conducted by Learning Center Indonesia Power located in Perak SPP, Surabaya
3) Conducting Competency Certification for both New certification and Renewal certification.

A more detailed description related to employees' competency development is disclosed on the chapter of Company Profile, Sub Chapter of Company's Employees Profile on this Annual Report.

Perlindungan Terhadap Pegawai (Hubungan Industrial)

Indonesia Power berkomitmen untuk patuh terhadap perundang-undangan dan juga menjaga hubungan baik kepada seluruh pegawai yang berada dilingkungan Perusahaan, untuk itu Indonesia Power memberikan kebebasan bagi pegawai untuk membentuk Persatuan Pegawai Indonesia Power (PP-IP) sebagai sarana bagi pegawai untuk berorganisasi dan menyalurkan aspirasinya, PPIP telah resmi terdaftar di Kantor Kemenakertrans RI dengan Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia No.KEP 413/M/BW/1999 tanggal 5 November 1999 dan telah dicatatkan ulang berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.KEP 16/MEN/2001 tanggal 15 Februari 2001.

Disamping itu Indonesia Power juga senantiasa berpartisipasi dalam melaksanakan hubungan industrial, sepanjang tahun 2016 dengan Kegiatan sebagai berikut:

1. Perundingan PKB Tahun 2017-2018 yang dilaksanakan pada bulan September-Desember 2016;
2. Penandatangaan PKB Tahun 2017-2018 tanggal 29 Desember 2016 dengan masa berlaku dari 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2018;
3. Pembahasan *Review* SK Peraturan Disiplin Pegawai;
4. Pertemuan Periodik antara Manajemen dan Persatuan Pegawai Indonesia Power.

Industrial Relations

Indonesia Power is committed to abide by regulation and maintain proper relation with all employees within the Company's environment. Therefore, Indonesia Power provides autonomy for employees to form Indonesia Power Labor Union (PP-IP) as a means for employees to form an organization and deliver their aspirations. PPIP has officially been registered with the Office of Ministry of Manpower and Transmigration of the Republic of Indonesia in accordance with Regulation of Minister of Manpower of the Republic of Indonesia No. KEP 413/M/BW/1999 dated 5 November 1999. PPIP has been once again registered based on the Decree of Minister of Manpower and Transmigration No. KEP 16/MEN/2001 dated February 15, 2001.

In addition, Indonesia Power constantly participates in conducting industrial relations, as realized in through these following activities throughout 2016:

1. Discussion of CLA of the year 2017-2018 conducted in September-December 2016;
2. Signing of CLA Year 2017-2018 on 29 December 2016, with validity period from 1 January 2017 until 31 December 2018;
3. Review on the Decree of Disciplinary Regulation of Employees;
4. Regular Meeting between Management and Indonesia Power Labor Union.

Remunerasi Pegawai

Indonesia Power menyadari bahwa kompensasi dan benefit yang diberikan Perusahaan akan berdampak pada peningkatan produktivitas kerja, oleh karena itu Indonesia Power memberikan paket remunerasi yang kompetitif bagi karyawannya yang sesuai nilai pekerjaannya secara internal dan eksternal. Bentuk remunerasi yang diberikan Indonesia Power berupa kompensasi dan manfaat pegawai. Kebijakan terkait sistem remunerasi Indonesia Power telah tercantum di dalam PKB Bab VI tentang Penghargaan.

Employee's Remuneration

Indonesia Power realizes that compensation and benefit granted by the Company would influence the improvement of work productivity. Therefore, Indonesia Power provides a competitive remuneration package for its employees adjusted to the work performance, both internally and externally. Indonesia Power provides remuneration in the form of employee compensation and benefits. Policies related to Indonesia Power's remuneration system is included in CLA Chapter VI on Rewards.

Remunerasi berupa Kompensasi
Remuneration in the form of Compensation

- *Pay for Person* (P1).
- *Pay for Position* (P2)
- Tunjangan lainnya yaitu Tunjangan tetap yang terdiri dari Tunjangan Hari Raya Keagamaan, Tunjangan Cuti Tahunan, Tunjangan Cuti Besar, Tunjangan Winduan.
- *Pay for Performance* (P3).

- Pay for Person (P1).
- Pay for Position (P2)
- Other allowances, i.e. Fixed Allowance consisting of Religious Holiday Allowance, Annual Leave Allowance, Long Leave Allowance, Eight Year Allowance.
- Pay for Performance (P3).

Remunerasi berupa Manfaat Pegawai
Remuneration in the form of Employee Benefits

- Fasilitas yang terdiri dari Rumah Jabatan, Kendaraan Dinas, Perjalanan Dinas, Sarana Kerja.
- Benefit yang terdiri dari Tunjangan Hari Tua, Pemeliharaan Kesehatan, Tunjangan Kecelakaan Kerja, Uang Pelepasan bagi Pegawai yang berhenti bekerja atau pensiun, Bantuan Pemakaman dan Duka Cita, Pakaian Kerja, Pakaian Dinas, dan Pakaian Olah Raga, Pendidikan dan Pelatihan, *Family* dan/atau *Employee Gathering*.

- Facilities consisting of Business House, Business Car, Business Trip, Work Facilities.
- Benefits consisting of Pension, Healthcare, Work Accident Allowance, Severance Payment for Employees who resign or retire, Assistance for Burial Costs, Work Uniform, Business Uniform, and Sports Attire, Education and Training, Family and/or Employee Gathering.

Berdasarkan status kepegawaian, Indonesia Power memberikan komponen remunerasi yang lebih baik kepada pegawai tetap dibandingkan dengan pegawai tidak tetap, namun Indonesia Power memastikan bahwa hak-hak pegawai tidak tetap telah sesuai dengan standar ketentuan yang berlaku.

Indonesia Power provides a more superior remuneration component for permanent employees compared to non-permanent employees based on their employment status. However, Indonesia Power ensures that the rights of non-permanent employees are not in line with the prevailing provision standards.

TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN TERHADAP KETENAGAKERJAAN, KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3)

Corporate Social Responsibility to Employment, Occupational Health and Safety (OHS)

Perbedaan Komponen Remunerasi Berdasarkan Status Kepegawaian

Different Remuneration Components Based on Employment Status

Kebijakan Policy	Benefit		Status Kepegawaian Employment Status		
			Pegawai Tetap Permanent Employee	TKWT Fixed Term Employee	Outsourcing
Remunerasi	Gaji/Imbalan	Salary / Rewards	v	v	v
	Kompensasi Lembur	Overtime Compensation	v	-	v
	Uang Pelepasan	Severance Payment	v	-	-
	Tunjangan Hari Tua	Pension	v	-	-
	Asuransi	Insurance	v	-	v
Pemeliharaan Kesehatan Healthcare	Jaminan Kesehatan	Health Coverage	v	v	v
	Tunjangan Kecelakaan Kerja	Work Accident Allowance	v	v	v
Pendidikan/ Pelatihan Education/ Training	Pendidikan Formal	Formal Education	v	-	-
	Pelatihan	Training	v	-	v
Kebijakan Lainnya Other Policies	Pinjaman Lunak	Soft Loan	v	-	-
	Bantuan Pemakaman dan Dukacita	Assistance for Burial Costs	v	-	-
	Bantuan Bencana Alam	Natural Disaster Assistance	v	-	-
	Family Gathering	Family Gathering	v	-	-
	Bantuan Fasilitas Sewa Rumah (BFSR)	House Rental Allowance (BFSR)	v (tertentu) (specific)	-	-
Fasilitas Kerja Work Facilities	Pakaian Kerja/OR	Work/Sports Uniform	v	-	v
	Rumah Jabatan	Business House	v (tertentu) (specific)	-	-
	Kendaraan Dinas	Business Car	v (tertentu) (specific)	-	-
	Kendaraan Operasional	Operational Vehicle	v	v	v
	Perjalanan Dinas	Business Trip	v	v	v
	Alat Komunikasi	Communication Equipment	v (tertentu) (specific)	-	-
	Alat Penunjang	Supporting Equipment	v	v	v

Tingkat *Turnover* Pegawai

Berbagai kegiatan kepegawaian dilakukan untuk mendorong terciptanya lingkungan kerja yang kondusif yang memberikan rasa nyaman para pegawai. Pada tahun 2016, jumlah *turnover* pegawai sebesar 4,59% lebih tinggi dibandingkan tahun 2015, terutama disebabkan oleh banyaknya pegawai yang pensiun.

Berikut adalah tabel *turnover* pegawai Indonesia Power dalam 3 (tiga) tahun terakhir:

Employee Turnover Rate

Various staffing activities conducted to encourage a conducive work environment that would ensure employees' comfort. In 2016, the number of employees' turnover reached 4.59%, an increase compared to the number in 2015; specifically caused by the number of retired employees.

The following table illustrates Indonesia Power's Employees Turnover in the last 3 (three) years:

Penyebab	Cause	2014	2015	2016
Pensiun	Pension	160	135	157
Meninggal Dunia	Death	11	7	8
Diberhentikan	Termination	2	1	2
Mengundurkan Diri	Resignation	10	4	4
Jumlah *Turnover*	**Turnover**	**183**	**147**	**171**
Total Pegawai	**Total Employee**	**3.553**	**3.639**	**3.725**
Persentasi Turnover	**Turnover Percentage**	**5%**	**4%**	**4,59%**

Mekanisme Pengaduan Masalah Ketenagakerjaan

Dalam rangka memberikan perlindungan bagi pegawai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif. Indonesia Power menyediakan saluran pengaduan bagi pegawai dalam berhubungan dengan Indonesia Power.

Mekanisme penyampaian keluhan pegawai dapat dilihat pada *Flow chart* Penyampaian Keluh Kesah Pegawai sebagai berikut:

Employment Problem Complaint Mechanism

In order to provide protections for employee in carrying out their duties and responsibilities effectively, the Company provides complaint channel for the employee related to the Company.

The Complaint Mechanism for employees can be seen on the following Flow Chart:

TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN TERHADAP KETENAGAKERJAAN, KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3)

Corporate Social Responsibility to Employment, Occupational Health and Safety (OHS)

Mekanisme Pengaduan Pegawai

Employee Reporting Mechanism

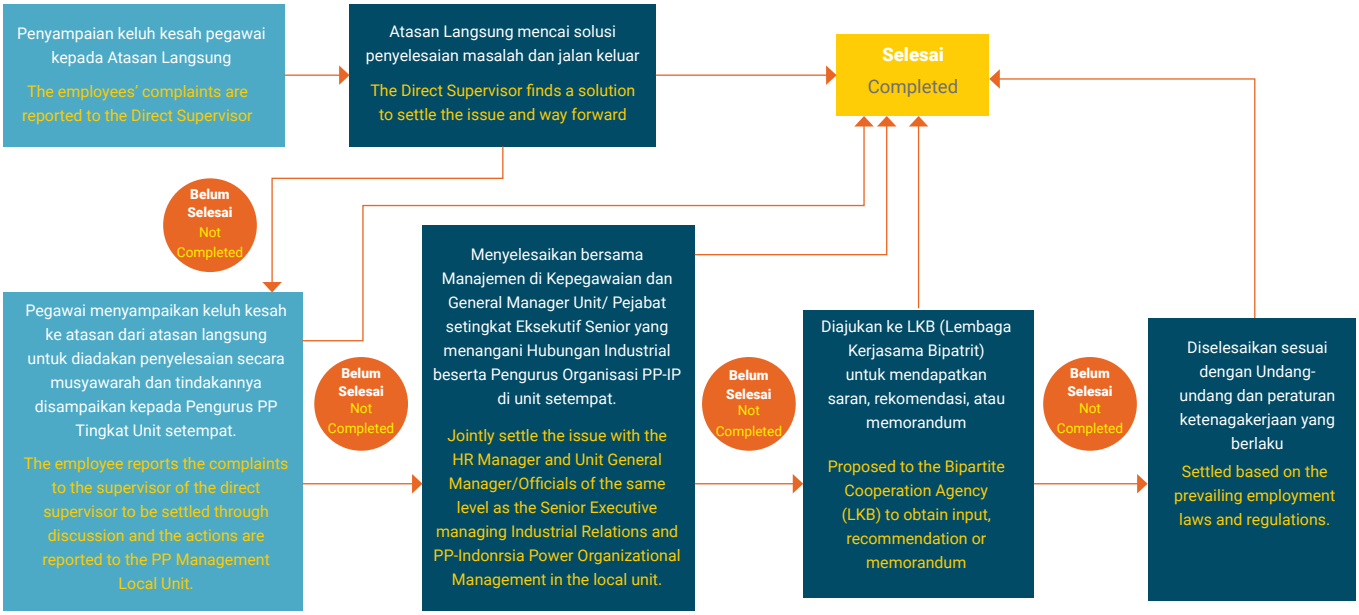

selama tahun 2016, tidak terdapat pengaduan terkait praktik ketenagakerjaan dan pelanggaran hak asasi manusia termasuk insiden diskriminasi yang diajukan pegawai kepada Perusahaan.

Throughout 2016, there had not been any complaint regarding employment practices and human rights violation, including discriminative incident reported by the employees to the Company.

Biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan Ketenagakerjaan

Expenses for Employment Activities

Berikut adalah Biaya pengelolaan ketenagakerjaan yang dikeluarkan Perusahaan selama tahun 2016:

The following is Employment Management Cost expended by the Company throughout 2016:

		2015	2016
Gaji	Salary	395.000.708.453	507.396.595.160
Pay For Performance (P3)	Pay For Performance (P3)	141.119.850.433	238.800.122.938
Bonus/Insentif	Bonus/Incentive	456.530.300.502	326.691.157.872
Dalam Bentuk Kompensasi Pegawai (A)	**In the Form of Employees Compensation (A)**	**992.650.859.388**	**1.072.887.875.970**
Tunjangan Hari Raya Keagamaan (THR)	Religious Holiday Allowance	52.236.799.201	62.859.383.721
Tunjangan Cuti Tahunan	Annual Leave Allowance	21.893.114.320	25.463.334.562
Pemeliharaan Kesehatan	Health Care	34.965.842.649	46.393.267.277
Asuransi Pegawai	Employees' Insurance	4.410.044.283	5.987.575.755

		2015	2016
Uang Lembur	Overtime Pay	14.515.115.118	15.553.628.648
Uang Makan Lembur	Overtime Meal Allowance	46.118.209	20.010.050
Pakaian Dinas	Work Uniform	4.124.747.960	7.003.516.897
Bantuan Fasilitas Perumahan	Assistance for Housing Facility	3.774.358.122	4.998.780.293
Perjalanan Dinas mutasi Jabatan	Official Trip Services	4.831.963.398	5.003.190.005
Beban Pajak Penghasilan	Income Tax Expenses	109.927.343.681	148.427.899.867
Beban Manfaat Pekerja Perusahaan (PSAK 24)	Expenses for Corporate Employee's Benefits (FSAS 24)	422.402.162.680	365.598.619.059
Dalam Bentuk Manfaat Pegawai (B)	**In the form of Employee's Benefits (B)**	**673.127.609.621**	**687.309.206.134**
Biaya Peserta Latihan (dikelola unit-unit)	Cost of Training Participants (managed by units)	68.406.135.528	122.128.425.546
Biaya Diklat (dikelola Kantor Pusat & Jasdik)	Training Costs (managed by Head Office and PLN Pusdiklat)	6.221.449.772	7.703.526.392
Pembinaan Spritual. Budaya & Olah Raga (SBO)	Spiritual. Cultural and Physical Coaching	20.196.204.463	24.160.694.094
Dalam Bentuk Diklat dan Lainnya (C)	**In the form of Training and other benefits (C)**	**94.823.789.763**	**153.992.646.032**
Jumlah Biaya Kepegawaian (A+ B + C)	**Total of Employment Activities Expenses (A+ B + C)**	**1.760.602.258.772**	**1.914.189.728.136**

B. Kegiatan Tanggung Jawab Perusahaan terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) merupakan suatu kewajiban dan kebutuhan Perusahaan untuk mencapai operasi yang berkelanjutan, Indonesia Power menjamin keselamatan dan kesehatan seluruh pegawai melalui penyediaan lingkungan kerja yang aman, nyaman, produktif serta bebas dari kecelakaan, kebakaran, pencemaran lingkungan dan penyakit akibat kerja.

Indonesia Power bergerak pada bidang pembangkit tenaga listrik memiliki peran pokok Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Peran K3 diwujudkan dalam 4 (empat) pilar keselamatan ketenagalistrikan, yaitu keselamatan tenaga kerja, keselamatan masyarakat umum di sekitar pembangkit, keselamatan aset pembangkitan, serta keselamatan lingkungan di dalam dan sekitar pembangkit.

B. Responsibility Program regarding Occupational Health and Safety (OHS)

Occupational Health and Safety (OHS) is an obligation and necessity for the Company to achieve a sustainable operation. Indonesia Power guarantees all employee's safety and health by providing a safe, comfortable, and productive work environment, free from accidents, fire, environmental contamination and work-inflicted diseases.

Indonesia Power conducts business activities in the field of power plant, holding an essential role in Occupational Health and Safety (OHS). The role of OHS is realized through 4 (four) pillars of electrical safety, they are labor safety, local community safety around the generator's area, generation asset safety, and environmental safety within and around the generator.

TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN TERHADAP KETENAGAKERJAAN, KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3)

Corporate Social Responsibility to Employment, Occupational Health and Safety (OHS)

Pilar Keselamatan Ketenagalistrikan
Pillars of Electrical Safety

Kebijakan

Indonesia Power mempunyai komitmen dan kesadaran untuk selalu meningkatkan budaya Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Hal ini dikarenakan, produktivitas pegawai akan meningkat seiring dengan meningkatnya rasa kenyamanan dan keamanan di lingkungan Perusahaan dengan mengacu pada:

1. Undang - undang Nomor 13 tahun 2003 pasal 86 ayat 2 " Untuk melindungi keselamatan pekerja/ buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja";
2. Keputusan Direksi Nomor:41.K/010/IP/2012 tentang Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Lingkungan di PT Indonesia Power;
3. Keputusan Direksi Nomor:165.K/010/IP/2016 tentang Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja PLTU Batubara di PT Indonesia Power.

Policy

Indonesia Power commits and has the awareness to improve the Occupational Health and Safety Culture (OHS) continuously. This is because, the employee's productivity will increase along with the improvement of comfort and safety in the Company's environment, by referring to:

1. Law No. 13 of 2003 article 86 paragraph 2, "in order to protect the employee's safety to achieve optimal productivity, the effort to provide occupational health and safety is organized";
2. Directors' Decree Number 41.K/010/IP/2012 on Policy on Occupational Health and Safety within PT Indonesia Power;
3. Directors' Decree Number 165.K/010/IP/2016 on Policy on Occupational Health and Safety within Coal Based SPP PT Indonesia Power.

Rencana kegiatan

Dalam pelaksanaan K3, Indonesia Power setiap tahunnya menyusun rencana kegiatan K3. Rencana Kegiatan K3 tahun 2016 sebagai berikut:

1. Pembangunan pusat pelatihan K3 (*Fire and Safety Academy*) di Pandean Lamper Semarang;
2. *Set up* dan Audit Resertifikasi SMK3 di Suralaya, Perak Grati dan Bali;
3. Pelatihan dan Workshop K3;
4. Bulan K3 Nasional;
5. Simulasi Tanggap Darurat;
6. Pemantauan dan Pengukuran lingkungan kerja;
7. Pemberian *Zero Accident Award*;
8. Penyediaan Wearpack bagi operator *coal handling*.
9. *Assessment* K3.

Program

In implementing OHS, Indonesia Power annually formulates regarding OHS. OHS program in 2016 is as follows:

1. Construction of OHS Training Center (Fire and Safety Academy) in Pandean Lamper, Semarang;
2. Set up and SMK3 Recertification Audit in Suralaya, Perak Grati and Bali;
3. OHS Training and Workshop;
4. National OHS Month;
5. Emergency Response Simulation;
6. Monitoring and Assessment of work environment;
7. Zero Accident Award;
8. Wear Pack provision for coal handling operator.
9. OHS Assessment.

Pelaksanaan kegiatan K3 dan Dampak Kuantitatif

Sepanjang tahun 2016 bentuk kegiatan K3 dilakukan berdasarkan rencana kegiatan yang telah ditetapkan oleh Indonesia Power dengan realisasi sebagai berikut:

Implementation of CSR programs regarding OHS and Quantitative Impacts

Throughout 2016, activities related to CSR toward OHS were conducted accordingly to the action plan set by Indonesia Power with the following realization:

Pembangunan pusat pelatihan K3 (*Fire and Safety Academy*) di Pandean Lamper Semarang

Construction of OHS Training Center (Fire and Safety Academy) in Pandean Lamper Semarang

Dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai khususnya pegawai dari unit pembangkit *Low Rank Coal*, Indonesia Power telah membangun tempat pelatihan K3 serta pelatihan pencegahan dan penanggulangan bahaya *Low Rank Coal* di PLTU.

In order to improve the employee competence, specifically those from Low-Rank Coal Generating Unit, Indonesia Power has constructed OHS Training Facility, as well as training for danger prevention and mitigation at Low-Rank Coal SPP.

TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN TERHADAP KETENAGAKERJAAN, KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3)

Corporate Social Responsibility to Employment, Occupational Health and Safety (OHS)

Set Up dan Audit Resertifikasi SMK3

Pada tahun 2016, Indonesia Power telah melakukan resertifikasi SMK3 guna mendukung penerapan SMK3. Resertifikasi SMK3 dilakukan Unit Pembangkit Suralaya, Perak Grati dan Bali dengan tingkat penerapan "memuaskan" (Bendera emas) serta set up implementasi SMK3 di Unit Jasa Pembangkitan Luar Jawa (UJP Pangkalan Susu, UJP Barru, UJP Jeranjang dan UJP Sanggau).

Set U and Recertification Audit

In 2016, Indonesia Power has conducted renewal for SMK3 certification in order to support the SMK3 implementation. The SMK3 renewal is conducted at Suralaya Generating Unit, Perak Grati Generating Unit, and Bali Generating Unit, with the implementation rate of 'satisfactory' (gold flag). Generating Service Units outside Java (Pangkalan Susu GSU, Barru GSU, Jeranjang GSU and Sanggau GSU) set up the SMK3 implementation as well.

Pelatihan dan *Workshop* K3

Guna meningkatkan kompetensi personil K3, Indonesia Power telah melaksanakan pelatihan dan dan *workshop* sebagai berikut:

1. *Workshop* Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) semester 1 dan 2.
2. Forum ahli K3.
3. IHT *Fire Prevention & Protection System Design & Engineering.*
4. Pelatihan dan simulasi tanggap darurat
5. *Workshop Process Safety Management System.*
6. Pelatihan P3K Kerjasama dengan PMI.
7. *Workshop* Indonesia Power *Integrated Manajemen Sistem* (IMS) K3.
8. Sertifikasi NFPA (*National Fire Protection Assosiation*).
9. IHT Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran *Low rank coal.*

OHS Training and Workshop

To improve OHS personnel competence, Indonesia Power had conducted the following training and workshop:

1. Workshop for Organizing Committee of Occupational Health and Safety (P2K3) for the first and second semester.
2. OHS Expert Forum.
3. IHT Fire Prevention & Protection System Design & Engineering.
4. Emergency Drill Training and Simulation.
5. Process Safety Management System Workshop.
6. OHS Training in collaboration with PMI (Indonesian Red Cross).
7. Indonesia Power IMS OHS Workshop.
8. Certification of NFPA (National Fire Protection Association).
9. IHT Fire Prevention and Control on Low-rank coal units.

Bulan K3 Nasional
National OHS Month

Lomba pemadam kebakaran / Fire Fighting Competition

Dalam rangka memperingati Bulan K3 Nasional, Indonesia Power melakukan rangkaian kegiatan seperti Upacara bulan K3, Lomba Pemadam Kebakaran, Lomba cerdas cermat K3, Lomba *First Aider*, Lomba 5S, Lomba Poster, Lomba Fotografi, Donor darah, Lomba Karya Tulis K3 dan ide perbaikan budaya K3, Seminar K3 dan Penyuluhan kesehatan, Pameran K3, Penghargaan pegawai sehat, *Role Model* K3 Award. Adapun kegiatan tersebut dilakukan berbeda-beda di Unit Pembangkit sesuai kreatifitas unit masing-masing.

In commemorating National OHS Month, Indonesia Power conducts various activities such as OHS Month Ceremony, Fire Fighting Competition, OHS Pop Quiz Competition, First Aider Competition, 5S Competition, Poster Contest, Photography Contest, Blood Drive, OHS Writing Competition and OHS Culture Innovation, OHS Seminar and Health Counseling, OHS Exhibition, Healthy Employee Award, OHS Role Model Award. The activities carried out differently in each Generating Unit accordingly to each unit's creativity.

Simulasi Tanggap Darurat
Emergency Response Simulation

Guna meningkatkan kesadaran pegawai terhadap kondisi darurat, Indonesia power setiap tahunnya melakukan pelatihan dan simulasi tanggap darurat kebakaran dan pencemaran lingkungan yang bekerjasama dengan pihak eksternal seperti Dinas Pemadam Kebakaran, PMI, dan lain-lain.

To improve employee's awareness toward emergency, Indonesia Power annually conducts training and emergency preparedness simulation for fire and environmental contamination in collaboration with external parties such as Fire Department, Indonesian Red Cross, etc.

TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN TERHADAP KETENAGAKERJAAN, KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3)

Corporate Social Responsibility to Employment, Occupational Health and Safety (OHS)

Pemantauan dan Pengukuran lingkungan kerja

Monitoring and Assessment of work environment

Dalam rangka memastikan aspek dan dampak lingkungan serta Kinerja K2LH, Indonesia Power setiap tahunnya melakukan pemantauan dan pengukuran lingkungan kerja pada faktor Fisika (kebisingan, pencahayaan, iklim kerja dan radiasi), Kimia (kadar gas organik/anorganik dan debu) dan Biologi (koloni mikroba dan mikroba patogen).

To ensure the environmental aspect and impact and K2LH performance, Indonesia Power annually conducts monitoring and assessment of work environment for its physical factors (noise, lighting, and work climate and radiation), chemical factors (organic/inorganic gas and dust), and biological factors (microba colony and patogen microba).

Tingkat Kecelakaan Kerja

Selama tahun 2016, terdapat 1 (satu) kecelakaan kerja yaitu *Traumatic Finger injury* di UJP Jeranjang.

Berdasarkan Keputusan Direksi No.41.K/010/IP/2012 tentang Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Lingkungan di PT Indonesia Power pasal 24. kecelakaan kerja didefinisikan yaitu kecelakaan yang terjadi berkaitan langsung dengan waktu jam kerja sesuai bidang tugas pekerjaan. Kewajiban dan tanggung jawab sehari-hari yang pelaksanaan pekerjaannya sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Work Accident Rate

Throughout 2016, there had been one work accident, Traumatic Finger Injury in Jeranjang GSU.

Directors' Decree Number 41.K/010/IP/2012 on Policy on Occupational Health and Safety within PT Indonesia Power, Article 24, work accident is defined as any accident occurs during work hours in respective work field in conducting daily obligations and responsibilities that are carried out accordingly to applied procedure.

Guna meningkatkan tingkat kesadaran pegawai dalam penerapan SMK3, setiap tahunnya, Indonesia Power memberikan penghargaan internal bagi pegawai yang unitnya mencapai *zero accident* berupa cinderamata.

Indonesia Power telah mendapatkan penghargaan *Zero Accident* secara nasional untuk kinerja K3 tahun 2015 kepada 11 Unit Pembangkit dan bertambah di tahun 2016 sebanyak 16 unit penghargaan K3 dari Disnaker setempat yang akan diundang di tingkat nasional oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI.

Pemberian *Zero Accident Award*
Zero Accident Award

To improve the awareness level of the employee in SMK3 implementation, every year, Indonesia Power grants internal awards for employee whose unit achieves zero accident, in the form of souvenir.

Indonesia Power obtained national Zero Accident Award for its OHS performance in 2015 within 11 Generating Units and the number had increased in 2016 to 16 Generating Units. Regional Representative of the Ministry of Manpower administered the awards that would then receive a national invitation by the Ministry of Manpower and Transmigration of the Republic of Indonesia.

Penyediaan Wearpack
Wear Pack Provision

Wearpack fire resistant bertujuan agar pekerja tidak terbakar selama beberapa waktu ketika terpapar api maupun percikan sengatan listrik (*Arch Flash*), memberikan tingkat perlindungan kepada pemakainya, dan mengurangi keparahan luka bakar yang dihasilkan dari durasi pendek eksposur termal atau kecelakaan paparan kebakaran *flash*.

Upaya Indonesia Power dalam melindungi pegawai dari potensi bahaya terkena percikan api/kebakaran, Indonesia Power menyediakan *wearpack* tahan Api bagi operator *coal handling* untuk seluruh pegawai di PLTU Batubara.

Indonesia Power attempts to protect all employees from the potential fire exposure. Indonesia Power provides fire resistant wear pack for coal handling operators and all employees within the Coal Based SPP.

Fire Resistant wear pack is intended to protect employees from getting burnt in the case fire exposure or arch flash, providing protection to its wearer, and reducing the degree of burnt injury as the consequence of a short period of thermal exposure and/or arch flash incidents.

TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN TERHADAP KETENAGAKERJAAN, KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3)

Corporate Social Responsibility to Employment, Occupational Health and Safety (OHS)

Program Kesehatan

Health Care Program

1. Edukasi kesehatan diikuti pegawai Indonesia Power
2. Antusiasme pegawai untuk cek kesehatan
3. Sesi pengukuran lemak
4. *Fun exercise*, berolahraga dengan cara menyanangkan

1. Health education for Indonesia Power's employee
2. Employee's enthusiasm to do a medical check-up
3. Body fat calculation session
4. Fun exercise, exercising in a fun way.

Indonesia Power sangat memperhatikan aspek kesehatan dan perlindungan terhadap kesehatan pegawai maupun keluarganya (istri dan anak). Fasilitas kesehatan yang diberikan oleh Indonesia Power terhadap pegawai terdiri dari medical C*heck up* secara berkala yaitu 1 tahun sekali, sosialisasi kesehatan, olah raga jum'at.

Pada tahun 2016, Indonesia Power telah menggelar Kampanye Sehat yang bekerjasama dengan Nutrifood. Kampanye ini dilakukan 4 kali yaitu tanggal 7 dan 21 September, 5 dan 19 Oktober dengan Rangkaian rangkaian kegiatan, seperti edukasi dan konsultasi kesehatan seputar gula dan diabetes, cek kesehatan (cek gula darah dan kolesterol), edukasi kesehatan seputar diet, pengukuran komposisi lemak tubuh, serta *fun exercise*.

Indonesia Power pays great attention to health aspect and protection toward employees' and their family's health (spouse and children). Health facilities provided by Indonesia Power for its employees consist of annual medical checkup, health socialization, Friday's exercise.

In 2016, Indonesia Power held Health Campaign in collaboration with Nutrifood. The campaign occurred 4 times, on September 7 and 21, October 5 and 19, with series of events, such as education and consultation on glucose and diabetes issue, checkup (cholesterol and blood sugar), education on healthy diet, body fat composition measurement, and fun exercise.

Sarana dan Keselamatan Kerja

Occupational Facilities and Safety

Untuk menjamin efektivitas penerapan keselamatan kerja. Indonesia Power telah melengkapi seluruh kantor operasionalnya dengan berbagai perangkat keselamatan kerja. Sarana keselamatan kerja yang di miliki oleh Indonesia Power adalah sebagai berikut:

To ensure effectivity in occupational safety implementation, the Company has completed every operational office with various work safety equipment. Work safety facilities owned by Indonesia Power are as follows:

Sarana dan keselamatan kerja Occupational Facilities and Safety	Kegunaan sarana dan keselamatan kerja	Utilization of Occupational Facilities and Safety	Tempat penggunaan Place
Alat Pelindung Diri (APD) Personal Protection Equipment (APD)	Melindungi sebagian atau seluruh badan personil dari potensi bahaya yang jenisnya disesuaikan dengan potensi bahaya yang ada di area kerjanya.	Protecting some parts or all parts of personnel's body from potential hazard of which the type is adjusted to the kind of hazard that may arise in different work fields.	Sebagian atau seluruh bagian tubuh personil Some parts or all parts of personnel's body
Rambu-Rambu K3 (*Safety Sign*) Safety Signs	Menunjukkan adanya potensi bahaya di area kerja. mengingatkan personil untuk berperilaku aman. menunjukkan lokasi peralatan pemadam dan tanggap darurat. dan memberikan arahan/petunjuk saat keadaan darurat	Reminder of potential hazard in the work area, encouraging personnel to work carefully. Showing the location of fire extinguisher and other emergency tools and giving directions during an emergency.	Ditempatkan di area yang strategis/mudah terlihat dan sesuai risiko yang ditimbulkan Placed in strategic and visible areas accordingly to potential risks in certain areas
Sistem Proteksi Kebakaran (Manual & Automatis): 1) APAR 2) Hydrant 3) APAT 4) Mobil Damkar 5) Pompa *Fire Fighting* 6) *Deluge Sprinkler System* 7) *Fire Alarm System* 8) *Low Pressure CO_2 System* 9) *Foam System* 10) *Wet sprinkler system* Fire Protection System (Manual & Automatic): 1) Fire Extinguisher 2) Hydrant 3) Traditional Fire Extinguisher 4) Fire Truck 5) Fire Fighting Pumps 6) Deluge Sprinkler System 7) Fire Alarm System 8) Low-Pressure CO2 System 9) Foam System 10) Wet sprinkler system	Untuk mengendalikan potensi bahaya kebakaran yang dapat terjadi di area pembangkit listrik	To control the potential of fire that might occur around the area of Generating Unit	Seluruh area pembangkit All area of Generating Unit
Fasilitas tanggap darurat: 1) Tim Tanggap darurat 2) Ambulance 3) Kotak P3K 4) Perlengkapan tanggap darurat lainnya (Tandu. Breathing Apparatus. dll) Emergency Preparedness Facilities: 1) Emergency Team 2) Ambulance 3) First Aid Kit 4) Other emergency equipment (Stretcher, Breathing Apparatus, etc.)	Tersedianya perlengkapan tanggap darurat pada kondisi emergency	The availability of emergency preparedness facilities during emergency condition	Area evakuasi Evacuation Area
Vacuum truck Vacuum truck	Kendaraan penghisap debu melalui pipa saluran dengan koneksi dari pipa Vacuum ke dalam truck menggunakan mesin.	Vacuum vehicle that operates through pipeline connected from the vacuum pipe into the truck by utilizing machines.	Area transfer tower dan bunker Transfer tower and bunker area

TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN TERHADAP KETENAGAKERJAAN, KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3)

Corporate Social Responsibility to Employment, Occupational Health and Safety (OHS)

Penghargaan dan Sertifikasi terkait K3

Penghargaan dan sertifikasi yang telah diraih oleh Indonesia Power selama tahun 2016 adalah:

1. Penghargaan kecelakaan Nihil (*Zero Accident Award*) dari Kementerian Ketenagakerjaan kepada UP Suralaya, UPJP Priok, UPJP Kamojang, UP Semarang, UP Saguling, UP Perak Grati, UP Bali, UP Mrica, UJH, UJP Suralaya 8, UJP Labuan,
2. Resertifikasi SMK3 dari Kementerian Ketenagakerjaan UPJP Kamojang, UP Saguling, UP Semarang, UJP Banten 1 Suralaya, UJP Banten 3 Lontar, dan UJP Jateng 2 Adipala dengan kategori memuaskan dan mendapatkan bendera emas sedangkan UJP Banten 2 Labuan dan UJP Jabar 2 Palabuhan Ratu mendapatkan kategori perak.
3. Penghargaan P2HIV (Program Penanggulangan HIV) dari Kementerian Ketenagakerjaan untuk UP Bali.

Awards and Certification in OHS

Awards and Certification acquired by Indonesia Power throughout 2016 are as follows:

1. Zero Accident Award for Suralaya GU, Priok GGSU, Kamojang GGSU, Semarang GU, Saguling GU, Perak Grati GU, Bali GU, Mrica GU, Suralaya 8 MSU,GSU dan Labuan GSU.
2. Recertification of SMK3 from Ministry of Manpower at Kamojang GGSU, Saguling GU, Semarang GU, Banten 1 Suralaya GSU , Banten 3 Lontar GSU, and Jateng 2 Adipala GSU achieved the satisfactory rate and received gold flags. Meanwhile, Banten 2 Labuan GSU and West Java 2 GSU, Palabuhan Ratuachieved the silver category.
3. P2HIV (HIV Prevention Program) Award from Ministry of Manpower for GU Bali.

Biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan K3

Program dan biaya yang telah dikeluarkan oleh Indonesi Power terkait K3 selama tahun 2016 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Expenses for Occupational Health and Safety (OHS) Activities

Indonesia Power has conducted programs and incurred cost related to OHS throughout 2016. The details can be seen in the following table:

Nama Program	Program	Biaya Cost
Bulan K3 Nasional	National OHS Month	948.313.500
Sosialisasi / *Awareness* K3	Socialization of OHS Awareness	162.557.445
Latihan Pemadam Kebakaran dan Simulasi Tanggap Darurat	Fire Drill and Emergency Exit Simulation	222.438.107
Lomba *First Aider* antar unit IP	First Aider Competition between Indonesia Power Units	38.631.579
Program 5S	5S Program	1.189.862.814
Workshop dan *Training* K3	OHS Workshop and Training	1.886.420.008
Zero Accident Award	Zero Accident Award	750.000.000
Rapat P2K3 Korporat	P2K3 Corporate Meeting	-
Pemantauan dan Pengukuran Lingkungan Kerja	Monitoring and Assessment of Work Environment	516.544.250
Jasa dan Material Rutin *Preventive Maintenance* Peralatan K3 dan Penunjangnya	Services and Routine Preventive Maintenance Materials for OHS Equipment and Supporting Tools	20.829.527.662
Jasa Perbaikan Peralatan K3	Repair Services of OHS Equipment	4.664.482.469
Pengadaan Alat Pelindung Diri. Pakaian Kerja	Procurement of Protective Equipment and Safety Suit	5.756.811.923

Nama Program	Nama Program	Biaya Biaya
Pemeriksaan kesehatan berkala	Regular Medical Check-up	1.689.296.675
Sertifikasi Peralatan	Equipment Certification	5.343.889.473
Jasa Konsultan / *Assessment*	Consultant Services / Assessment	1.196.929.700
Jasa OM *Fire Fighting System*	OM Services for Fire Fighting System	2.348.976.000
Perlengkapan P3K	First Aid Kit	337.218.205
Pest Control	Pest Control	174.720.009
Diklat	Training	180.000.000
Kegiatan *Safety* Paspor	Safety Passport Activity	110.756.500

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERHADAP PENGEMBANGAN SOSIAL DAN KEMASYARAKATAN

Corporate Social Responsibility to Social and Community Development

Masyarakat merupakan mitra utama Indonesia Power yang memiliki peran sebagai pemangku kepentingan yang ikut memberikan pengawasan terhadap jalannya aktivitas usaha Indonesia Power. Oleh karena itu, sudah selayaknya Indonesia Power juga ikut memberikan kontribusi positif kepada lingkungan sosial di sekitarnya.

Bentuk nyata dari kontribusi tersebut, Indonesia Power telah melaksanakan berbagai kegiatan terkait kemasyarakatan. Dimana pelaksanaan kegiatan tersebut dijalankan berdasarkan pada rencana yang telah disusun oleh Indonesia Power. Rencana kegiatan, pelaksanaan kegiatan dan dampak dari kegiatan-kegiatan tersebut sebagaimana yang tercermin pada tabel sebagai berikut:

The community is Indonesia Power's main partner who has a role as stakeholder that participates in providing supervision on the business activity of Indonesia Power. Therefore, it is appropriate that Indonesia Power also contributes positively to the surrounding social environment.

The form of contribution is by organizing numerous activities related to the community. The implementation of these activities is based on the plan compiled by Indonesia Power. Plan, realization, and impact of such activities are reflected in the following table:

Rencana, Realisai dan Dampak Kegiatan terkait Kemasyarakatan Tahun 2016

Plan, Realization, and Impact of Activities related to the Community in 2016

Rencana Kegiatan Plan	Realisasi Kegiatan Realization of Activity	Dampak Kegiatan Impact
Integrasi ISO 26000:2010 CSR kedalam InPower-IMS. Integration of ISO 26000:2010 CSR into InPower-IMS.	Mendapatkan pengakuan ISO 26000:2010 CSR pada tanggal 03 Oktober 2015 terhadap pengelolaan CSR Korporat. Obtained ISO 26000:2010 CSR on 3 October 2015 on Corporate CSR Management.	Mempengaruhi kebijakan manajamen dalam menentukan program-program yang lebih sesuai ISO 26000:2010 CSR, sehingga program tersebut tepat sasaran penerima bantuan perusahaan. Influenced the management policy in determining programs that are more in line with ISO 26000, hence the program is right on the target of Company's beneficiaries.
Optimaliasi program InPower Care berdasarkan *social mapping* dan *roadmap*. Optimization of InPower Care Program based on social mapping and roadmap.	• Adanya CAP (*Community Action Plan*) tiap unit dalam pelaksanaan InPower Care • Telah dilakukan *social mapping* di seluruh unit kerja Indonesia Power. • CAP (Community Action Plan) in every unit in conducting InPower Care • Social mapping in every work unit of Indonesia Power.	Memudahkan pengelola CSR perusahaan dalam mengimplementasikan program-program perusahaan kepada masyarakat Facilitates the Company's CSR manager in implementing the corporate programs to the community
Alignment InPower-Care dengan program CSR PLN Group. Alignment of InPower-Care with CSR program from PLN Group	• Bantuan Yatim Piatu • Bantuan Mudik Asik Bersama PLN • Bantuan Kemanusiaan Gempa Bumi Melalui PLN • Helping Orphans • *Mudik Asik* (Fun Travel) with PLN • Earthquake Relief Assistance through PLN	• Penerima merasakan langsung bantuan tersebut untuk pendidikan • Mengurangi beban masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari • The receivers directly use the help for education • Lessen the community's burden in fulfilling every day's needs
Pembinaan dan monitoring program unggulan unit untuk mendukung PROPER. Mentoring and monitoring of unit's program to support PROPER.	Pencapaian 9 unit meraih PROPER Hijau. Achievement of 9 unit in obtaining Green PROPER.	Mendukung Kinerja Pembangkitan dan program CSR ke masyarakat Supporting the Generating Unit Performance and CSR Program to the community
Optimalisasi program Hijaunesia Power melalui kerjasama strategis dengan Balai Taman Nasional, Taman Kehati dan lembaga lain yang terkait. Optimization Hijaunesia Power Program through strategic cooperation with National Park Hall, Kehati Park, and other related institutions.	• Bekerjasama dengan KLHK terhadap Kawan-Hijaunesia Power, penghijauan di Ekowisata Srenseng Sawah, dan penghijauan lainnya • Bekerjasama dengan BPLHD Jawa Timur dan Jawa Barat berkaitan dengan Taman Kehati • Bekerjasama dengan BLH setempat berkaitan penghijauan • Cooperates with KLHK on Kawan-Hijaunesia Power, reforestation in Srenseng Sawah Ecotourism, and other reforestation • Cooperates with BPLHD of Central Java and West Java related to Kehati Park • Cooperates with regional BLH related to reforestation	Tercapainya dan meningkatnya keanekragaman hayati di lokasi program tersebut. The achievement and the increase of biodiversity in the program location.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERHADAP PENGEMBANGAN SOSIAL DAN KEMASYARAKATAN

Corporate Social Responsibility to Social and Community Development

Selain itu, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar dan kawasan hutan wilayah operasi (Lingkungan), Indonesia Power juga melakukan program pemberdayaan masyarakat melalui Program InPower-Care.

In addition, to improve the welfare of the community and the forest operation area (Environment), Indonesia Power also organized community empowerment through InPower-Care Program.

Program InPower-Care (Indonesia Power-*Community Assistance, Relation, and Empowerment*) merupakan wujud komitmen Indonesia Power dalam memberdayakan masyarakat di sekitar wilayah operasi Perusahaan. Pelaksanaan program tersebut ditopang oleh tiga pilar keberlanjutan Perusahaan yakni Pelayanan Masyarakat, Pembinaan Hubungan, dan Pemberdayaan Masyarakat.

InPower-Care (Indonesia Power-Community Assistance, Relation, and Empowerment) Program is a form of commitment of Indonesia Power in empowering the community in the Company's operating area. The program is supported by three sustainability pillars of the Company, i.e. Community Services, Relationship Building, and Community Empowerment.

Kebijakan

Dalam menjalankan pelaksanaan tanggung jawab sosial Perusahaan terhadap kemasyarakatan, Indonesia Power mengacu pada ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Direksi Indonesia Power, ketentuan tersebut terdiri dari:

1. Keputusan Direksi No.25.K/010/IP/2014 tentang Pedoman Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan tanggal 11 Februari 2014
2. Keputusan Direksi No. 26.K/010/IP/2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Inpower Care di Lingkungan PT Indonesia Power tanggal 11 Februari 2014
3. Keputusan Direksi No.51.K/010/IP/2014 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Bisnis (*update* untuk kriteria penilaian pelaksanaan *Community Development*
4. Edaran Direksi No No. 07.E/012/IP/2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial Perusahaan.tanggal 10 Maret 2014.

Policy

In implementing corporate social responsibility to the society, Indonesia Power refers to regulations set forth by Indonesia Power's Board of Directors, which consist of:

1. Directors' Decree No.25.K/010/IP/2014 on Guidelines on Corporate Social and Environmental Responsibilities, dated February 11, 2014
2. Directors' Decree No.26.K/010/IP/2014 on Guidelines on Implementation of Inpower Care within PT Indonesia Power dated February 11, 2014
3. Directors' Decree No.51.K/010/IP/2014 on Guidelines on Business Unit Performance Assessment (updated for criteria of Community Development assessment)
4. Directors' Circular No.07.E/012/IP/2014 on Guidelines for Corporate Social Assistance Implementation. dated March 10, 2014.

Pelaksanaan Kegiatan Tanggung Jawab Sosial terkait Kemasyarakatan

Sepanjang tahun 2016, Indonesia Power telah melaksanakan program InPower-Care sebagai berikut:

Corporate Social Responsibility related to Community

Throughout 2016, Indonesia Power has organized the InPower-Care program as follows:

Pengembangan Ekonomi Masyarakat Pedesaan

Sebagai bentuk implementasi SDGs, Indonesia Power mengadakan Program Pengembangan Ekonomi Masyarakat Pedesaan. Tujuan program ini ditujukan untuk masyarakat pedesaan sekitar Unit Pembangkitan dalam mendorong pertumbuhan sektor industri melalui penyediaan bahan pangan yang cukup, tenaga kerja, serta pemanfaatan sumber daya lahan dan modal usaha. Serangkaian program yang terselenggarakan antara lain Pengembangan Bank Sampah/Komposting, Peningkatan produksi pertanian, pengembangan masyarakat PLTP Gunung Salak dan Pengembangan Alih Profesi Penambang Pasir Liar ke Ternak Itik Tahap 2.

Melalui program tersebut, Indonesia Power berharap dapat mendorong peningkatan kualitas hidup masyarakat sekitar sehingga dapat mewujudkan tujuan yang ingin dicapai dalam SDGs.

Economic Development for Rural Communities

As a form of SDGs implementation, Indonesia Power organized the Economic Development for Rural Communities Program. This program is aimed at rural communities around the Generating Unit, to encourage the growth of industrial sector through the provision of adequate food, labor, and the land resources utilization and capital asset. Programs organized, among others, are Waste Bank/Composting Development, agricultural production increase, community empowerment of Gunung Salak GPP, and Transfer of Profession from Sand Miner into Ducks Breeder Phase 2.

Through those programs, Indonesia Power expects it can increase the quality of life of the community, to realize the goals targeted in SDGs.

Pengembangan Alih Profesi Penambang Pasir Liar Ke Ternak Itik Tahap 2

Program ini merupakan bagian dari CSR UP Saguling di Desa Jati, Saguling, Kabupaten Bandung Barat dimana dilakukan pemberdayaan masyarakat dengan pengembangan alih profesi penambang pasir liar ke peternak itik. Hal ini didasarkan oleh aktivitas penambangan pasir secara di sekitar waduk UP Saguling yang berdampak negatif karena mempercepat sedimentasi di waduk dari laju endapan yang diizinkan yaitu 4 juta m_3/tahun menjadi endapan rata-rata yang terjadi di Waduk Saguling mencapai 4,26 m_3/tahun. Endapan ini berdampak pada pendangkalan waduk yang berpengaruh terhadap daya tampungnya waduk. Selain itu, penambangan pasir secara liar juga meningkatkan potensi erosi lingkungan akibat rusaknya daerah penyerapan air. Atas inisiatif UP Saguling, masyarakat penambang pasir liar tersebut, kini telah beralih profesi

Transfer of Profession from Sand Miner into Ducks Breeder Phase 2

This program is a CSR program at Saguling GU in Jati Village, Saguling, Regency of West Bandung, where the company empowers the community through the development of transfer of profession from sand miner into duck breeder. The program is based on the fact that sand mining activities around the reservoir of Saguling GUhave a negative impact because it accelerates the sedimentation in the reservoir, faster than the permitted sedimentation rate, i.e. 4 million m_3/year, making the rate in average 4.26 m_3/year. This sediment has an impact on the retention of reservoirs that affect the reservoir's capacity. In addition, the illegal sand mining also increases the environmental erosion potential due to the destruction of water absorption area. On the initiative of Saguling GU, the people who mine the sand illegally

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERHADAP PENGEMBANGAN SOSIAL DAN KEMASYARAKATAN

Corporate Social Responsibility to Social and Community Development

menjadi peternak itik. Pemilihan kegiatan ternak itik sebagai profesi baru masyarakat ini didasarkan pada karakteristik masyarakat Desa Jati yang memang awalnya berprofesi sebagai petani dan peternak.

has been transferred into duck breeders. The selection as duck breeder as the new profession for the community is based on the community's characteristic of Jati Village that initially was farmers and ranchers.

Petani dan Peternak Itik Sawargi
Sawargi Duck Farmers and Breeders

Ternak Itik Sawargi telah berdiri sejak tahun 2011, tercatat November 2016, jumlah itik yang berkembang sabanyak 8000 ekor itik dari 400 ekor itik. Sedangkan, produksi telurnya mencapai 181.799 butir setiap bulan.

Sawargi Duck Breeding has been established since 2011. Recorded in November 2016, there were 8,000 ducks that started from 400 ducks. The egg production reaches 181,799 eggs every month.

Peresmian Kelompok Ternak Itik" Putra Sawargi Power"
Establishment of Duck Breeders "Putra Sawargi Power"

Pada tahun 2016, Indonesia Power kembali meresmikan ternaik itik " Putra Sawargi Power" dengan jumlah angota sebanyak 25 Peternak.

In 2016, Indonesia Power reaugurated the Duck Breeding 'Putra Sawargi Power' with 25 Breeders.

Pengembangan Komunitas terkait Energi Alternatif

Program pengembangan energi alternatif diselenggarakan Indonesia Power dalam rangka mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap energi berbahan bakar fosil. Indonesia Power berharap dengan adanya program ini dapat mendukung Pemerintah dalam memastikan akses ke energi yang terjangkau dan berkelanjutan.

Community Development related to Alternatives Energy

Alternatives energy development program is held by Indonesia Power in order to reduce the community's dependence on fossil-based fuel energy. Indonesia Power hopes that this program can support the Government in ensuring access to affordable and sustainable energy.

Kampung Biogas Desa Mandiri Energi

Program ini merupakan bagian dari CSR UP Perak Grati di Desa Balunganyar, Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan – Jawa Timur dimana dilakukan pemberdayaan masyarakat dengan pengembangan biogas dari kotoran sapi sebagai sebagai bahan bakar alternatif pengganti LPG. Hal ini didasarkan oleh limbah kotoran sapi yang dihasilkan cukup banyak dan dibuang begitu saja ke sungai sehingga mencemari sanitasi lingkungan sekitar. Indonesia Power bersama Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWCNU) dan Para Ulama, memanfaatkan limbah kotoran sapi tersebut untuk sumber energi biogas sebagai bahan bakar alternatif pengganti LPG. Jika selama ini masyarakat memasak menggunakan gas LPG atau kayu bakar, maka dengan adanya dapat menggurangi pengeluaran rumah tangga. Selain manfaat di atas, limbah kotoran sapi hasil output biogas dapat dimanfaatkan untuk pupuk dan laku untuk dijual dan sanitasi lingkungan sekitar jauh lebih bersih.

Self-Sustaining Biogas Energy Village

This program is a CSR program of Perak Grati GU in Balunganyar Village, Lekok Subdistrict, Pasuruan Regency – Central Java, where there is a community empowerment by using biogas development from cow manure is being developed as an alternative fuel for LPG. This is due to the high cow manure production that is being thrown away to the river and pollutes the surrounding sanitation. Indonesia Power, along with MWCNU and Ulama, utilizes the cow manure for biogas energy sources, as an alternative fuel for LPG. If the community cooks their food using LPG gas or firewood, the biogas energy sources can reduce the household expenditure. In addition to that benefit, the cow manure waste from the biogas output can be utilized as fertilizer, and it can be sold, and the sanitation of the surrounding environment became cleaner.

Sampai dengan tahun 2016, pengembangan biogas di desa Balunganyar telah menghasilkan 8 Biogas aktif yang terdiri dari 6 yang berbahan beton dan 2 berbahan fiber. Dalam satu unit biogas (1.100 L) bisa dimanfaatkan oleh 3 kepala keluarga (KK) untuk kebutuhan memasak dan setiap unit biogas dapat menyumbang penghematan biaya Rp 68.000/bulan atau Rp 816.000/tahun

As of 2016, biogas development in Balunganyar village has produced 8 active Biogas, which consists of 6 Biogas made of concrete and 2 Biogas made of fibre. In one biogas unit (1,100 L), 3 Head of Household (KK) can utilize the energy for cooking, and each biogas unit can save Rp68,000/month or Rp816,000/year.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERHADAP PENGEMBANGAN SOSIAL DAN KEMASYARAKATAN

Corporate Social Responsibility to Social and Community Development

Self-Powering Community

Self-Powering Community (SPC) merupakan sebuah program berbasis *community development* yang berkelanjutan dan diinisiasi oleh Indonesia Power bersama Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan masyarakat di wilayah operasi pembangkit. Melalui program ini, masyarakat turut berperan aktif dalam pembangunan serta menjadikan masyarakat itu sendiri sebagai agen perubahan bagi masyarakat lainnya.

Serangkaian program yang terselenggarakan antara lain Program Pelatihan Kemandirian Masyarakat melalui Model Urban Farming Kampung Hijau Tambak Rejo Kelurahan Tanjung Mas Semarang

Urban Farming Kampung Hijau

Program ini merupakan program CSR UP Semarang berupa pelatihan kemandirian masyarakat melalui model *urban farming* kampung hijau Tambakrejo Kelurahan Tanjung Mas Kota Semarang ini dengan sasaran RW XVI dan kelompok peduli lingkungan. Kegiatan meliputi studi banding di 2 (dua) tempat yaitu di Crispi Farm yang beralamat di Jl. Tejosari, Gedawang Semarang dan di Hortimart yang beralamat di Jl. Gatot Subroto No. 55 Bawen Kabupaten Semarang. Dengan adanya program ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan kepada masyarakat terkait pertanian *urban farming* dalam memanfaatkan lahan pekarangan untuk budidaya sayuran organik, tersedianya modul model pertanian urban farming di Tambakrejo, terbentuknya 3 (tiga) demplot pertanian *urban farming* di Tambakrejo dan Tersedianya instalasi pengolahan sampah organik untuk fasilitas pupuk cair sayuran.

Self-Powering Community

Self-Powering Community (SPC) is a program based on sustainable community development, and initiated by Indonesia Power with Non-Governmental Organization (NGO) and the community in the power plant area. Through this program, the community actively plays a role in development and becomes an agent of change for other communities.

A series of programs that were organized include Self-Reliance Training Program through Urban Farming Model in Kampung Hijau Tambak Rejo Kelurahan, Tanjung Mas Village, Semarang.

Kampung Hijau Urban Farming

This program is a CSR Program at UP Semarang, in the form of self-reliance training through the *kampong hijau* urban farming model in Tambakrejo, Tanjung Mas Village, Semarang, the target was RW XVI and environmental groups. The activity covers comparative studies in 2 (two) places, i.e. Crispi Farm in Jl. Tejosari, Gedawang Semarang, and in Hortimart which is located at Jl. Gatot Subroto No. 55 Bawen, Semarang Regency. The program is expected to improve the knowledge of the community related to urban farming in utilizing their land for organic vegetable farming, provide an urban farming model module in Tambakrejo, establish 3 (three) plot for urban farming in Tambakrejo, and provide the installation of organic waste management for vegetable liquid fertilizer facility.

Sentra Wisata Lingkungan Kamojang Hijau

Program ini merupakan program CSR UPJP Kamojang yang memberikan manfaat kepada masyarakat berupa peningkatan kepedulian lingkungan, pemanfaatan limbah menjadi barang kreatif, membuka lapangan pekerjaan, dan menambah tempat wisata baru di Kamojang.

Usaha Sentra Wisata Lingkungan Kamojang Hijau meliputi 1). Usaha Olahan Pangan yang terdiri dari Peuyeum Crispy, Pisang Crispy dan Jamur Crispy, 2) Usaha Jamur Kuping, 3) Usaha Pembibitan Tanaman Endemik, 4) Usaha Kerajinan Limbah Koran dan 5) Usaha budidaya stroberi.

Kamojang Hijau Tourism Center

This program is a CSR program at Kamojang GGSU that benefit the community in the form of improvement to the environmental awareness, utilization of waste into creative goods, job opportunities, and new tourist attraction in Kamojang.

Kamojang Hijau Tourism Center includes 1) Food Processing Business, such as Peuyeum Crispy, Crispy Banana, and Crispy Mushroom, 2) Black Mushroom Business, 3) Endemic Plant Plantation, 4) Newspaper Waste Craft Business, and 5) Strawberry Cultivation Business.

Sehat Bersama Indonesia Power

Indonesia Power meyakini kesehatan masyarakat merupakan modal utama dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Selaras dengan hal tersebut, Indonesia Power terus berupaya untuk dapat berkontribusi bagi pembangunan kesehatan masyarakat di sekitar wilayah operasi Perusahaan sekaligus mendukung terciptanya tujuan SDGs yaitu menjamin kehidupan yang sehat dan mendorong kesejahteraan hidup masyarakat.

Serangkaian program yang terselenggarakan antara lain kegiatan Kampung Sehat Hijaunesia Power, donor darah, Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS), pengobatan gratis, dan lain-lain.

Healthy with Indonesia Power

Indonesia Power believes that the community's health is a core asset in improving the human resources quality in Indonesia. In line with that, Indonesia Power keeps contributing to the community's health development in within the operation area of the Company, as well as supporting the cultivation of Sustainable Development Goal, i.e. ensuring a healthy life and encouraging the community's welfare.

The programs organized include Healthy Village (Kampung Sehat) Hijaunesia Power, blood donation, Handwashing with Soap (CTPS), free medical treatment, etc.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERHADAP PENGEMBANGAN SOSIAL DAN KEMASYARAKATAN

Corporate Social Responsibility to Social and Community Development

Kampung Sehat Hijaunesia Power (KHSP)

Program ini merupakan program CSR UPJP Priok dengan harapan mampu menciptakan kondisi lingkungan yang nantinya mampu hidup produktif secara sosial ekonomi. Sejalan dengan hasil dari Pemetaan Sosial, sasaran Program Kampung Sehat Hijaunesia berada di 3 kelurahan yang terdiri dari wilayah Kelurahan Ancol, Tanjung Priok dan Warakas dengan melibatkan 20 Rukun Warga (RW).

Hijaunesia Power Healthy Village (KHSP)

This program is a CSR program at GGSU Priok, which is expected to create an environment that will be living productively in a social and economic manner. In lien with Social Mapping, the target of Hijaunesia Power Healthy Village Program is 3 villages, comprise of Ancol, Tanjung Priok, and Warakas, with the involvement of 20 Neighborhood (RW).

Tahapan Membangun Komitmen
Building Commitment Phase

Aspek Kebersihan Cleanliness	Aspek Kesehatan Health	Aspek Pendidikan Education	Aspek Lingkungan Hidup Environment	Aspek Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Community Economic Empowerment
• Penyuluhan dinas kebersihan • Pencanangan Bersih Sampah • Program Jimpitan Sampah • Program Pemanfaatan Sampah • Program Sanitasi • Program Jumantik	• Penyuluhan dinas Kesehatan • Pemetaan dan Pembuatan Action Plan kesehatan masyarakat • Program Pembuatan Obat Keluarga • Program Kesehatan Jasmani, Spiritual, dan Psikologis	• Pemetaan dan Pembuatan Action Plan Pendidikan Masyarakat • Program Bantuan Kejar Paket • Program PAUD • Progam Indonesia Power Mengajar	• Penyuluhan Dinas Lingkungan Hidup • Program Pembuatan Hidroponik dan Tanaman Air Gantung • Program Ketahanan Pangan dari Masyarakat untuk Masyarakat	• Sosialisasi dan Diskusi Pelaku Usaha Ekonomi Masyarakat • Pelatihan Menjahit • Pemberian Bantuan Stimulan Usaha Ekonomi Terpilih
• Sanitation counseling service • Waste Free Declaration • Waste Wrapping Program • Waste Utilization Program • Sanitation Program • Jumantik Program	• Heatlh counseling service • Mapping and Forming Action Plan for Public's Health • Drug Making Program for Family • Physical, Spiritual, and Pyschological Health Program	• Mapping and Forming Action Plan for Community's Education • Paket Assistance Program • PAUD Program • Indonesia Power Teaches Program	• Environmental counseling service • Hydroponics and Hanging Water Plant Program • Food Security from the Community to the Community	• Socialization and Discussion of Economic Business Actors • Sewing Training • Provision of Stimulus Support for Selected Economic Enterprises

Pasca pembangunan wilayah secara menyeluruh melalui penerapan Tahapan Membangun Komitmen KHSP diharapkan keterikatan wilayah terhadap masyarakat itu sendiri menjadi kuat melalui penerapan komitmen yang mereka sepakati dan laksanakan. Sehingga harapan diawal bahwa KSHP ini mampu menjadi media percepatan perbaikan lingkungan pun dapat terwujud. Disamping itu, sejalan dengan arahan Perusahaan untuk bertanggung jawab terhadap lingkungan masyarakat serta menerapkan misi untuk bersahabat dengan lingkungan pun dapat terwujud.

Post development of the area thoroughly through the implementation of *Building Commitment* Phase KHSP is expected to bond the community in the area, especially through the implementation of their agreed commitment. Therefore, the initial hope that KHSP shall be able to be an acceleration media for environmental improvement can be realized. In addition, Company's direction to be responsible for the community's environment and mission to be environmental friendly can be realized as well.

Indonesia Power kembali bersinergi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dalam Gerakan Bersih Bersih Ciliwung (BBC). Kegiatan ini sejalan dengan program prioritas nasional dalam peningkatan ketersediaan bahan baku untuk air bersih.

Indonesia Power resynergized with Ministry of Environment and Forestry (KLHK) in Gerakan Bersihbersih Ciliwung (BBC). This activity is in line with national priority program in improving the availability of raw ingredients for clean water.

Pendidikan Anak Usia Dini merupakan pendidikan pada tahap paling dasar. Melalui program PAUD KSHP ini, Perusahaan akan memberikan bantuan peningkatan kualitas pendidikan, antara lain : Bantuan Sarana Bermain Edukatif, Bantuan Buku Bacaan dan Bantuan Perbaikan Ruang Kelas.

Early Childhood Education (PAUD) is the most basic education. Through PAUD KSHP Program, the Company provides assistance to improve the education quality, such as: Educational Facilities Support, Reading Books, and Classroom Improvements.

Pelaksanaan pemberian bantuan Fasilitas kesehatan dan peningkatan gizi untuk posyadu, pelaksanaan tausiyah, dan seminar Psikologi Keluarga.

Implementation of provision of health facilities n nutrition improvement for center for prenatal and postnatal health care and information for women and for children under five, tausiyah, and Family Psychology seminar.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERHADAP PENGEMBANGAN SOSIAL DAN KEMASYARAKATAN

Corporate Social Responsibility to Social and Community Development

Pengembangan Ekonomi Masyarakat Pesisir

Keberadaan sebagian besar pembangkit Indonesia Power yang berlokasi di kawasan pesisir, menjadi alasan bagi Perusahaan untuk turut mengembangkan ekonomi masyarakat pesisir.

Program ini bertujuan untuk menciptakan peluang bagi masyarakat pesisir dalam menentukan kebutuhan, serta merencanakan dan melaksanakan kegiatan ekonomi mereka. Melalui cara tersebut, diharapkan dapat tercipta kemandirian permanen dalam kehidupan masyarakat itu sendiri yang pada akhirnya akan mendorong perbaikan taraf hidup masyarakat. Hal ini sejalan dengan upaya Pemerintah dalam mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan antara lain menghapus kemiskinan, mengakhiri kelaparan, mendorong pertumbuhan ekonomi dan kerja layak, mengurangi kesenjangan, serta mengembangkan keberlanjutan kota dan komunitas.

Serangkai kegiatan yang telah dilakukan selama tahun 2016 adalah Pelatihan pemberdayaan kelompok usaha *paving block*, Pemberdayaan Kelompok kerupuk kerang, budidaya bandeng, budidaya udang vaname, pemberdayaan kelompok peternak kambing, pelatihan pemberdayaan perempuan, pengembangbiakan kambing costa , pengembangan Lembaga Mikro (LKM) Pengembangan Lembaga Mikro (LKM), pengembangan sentra dagang, pengembangan usaha budidaya tanaman holtikultura Cipala, Desa Konservasi Energi, Rumah Pupuk Kandang Organik dan UKM Harmoni.

Economic Development for Coastal Communities

Most of Indonesia Power's power plant is located in the coastal area, and it is the reason why the Company participates in developing the economy of coastal communities.

This program aims to create opportunities for coastal communities in determining their needs and planning and implementing their economic activities. The method is expected to cultivate permanent self-reliance in the community, which will encourage the improvement of the people's lives. This is in line with the Government's efforts to realize sustainable development goals such as eradicating poverty, ending hunger, promoting economic growth and decent work, reducing inequalities, and developing sustainability of cities and communities.

A series of activities conducted throughout 2016 is Paving Block Business Group Empowerment Training, business, milkfish cultivation, shrimp farming cultivation, goat farmer group empowerment, women empowerment training, development Micro Enterprise (LKM), Trading center development, Development of horticulture cultivation in Cipala, Energy Conservation Village, Organic Fertilizer House, and UKM Harmoni.

Budidaya Bandeng

Milkfish Cultivation

Program ini merupakan program CSR UP Semarang di dua wilayah Kelurahan Kemijen Kecamatan Semarang Timur dan Kelurahan Tambakrejo Kecamatan Gayamsari dimana diberikan bantuan peralatan serta pelatihan pengolahan bandeng presto dengan alat LTHPC (*Low Temperature High Pressure Cooker*) dengan kapasitas sekali masak minimal 40 Kg/proses. Selain itu, membentuk Kelompok Usaha Bersama (KUB) pengolahan bandeng presto, khususnya di Kelurahan Kemijen Kecamatan Semarang Timur.

The program is a CSR Program at Semarang GU in two areas, Kemijem Villages in East Semarang Subdistrict, and Tambakrejo Villages in Gayamsari Subdistrict, where the Company provides equipment and training in milkfish presto processing with LTHPC (Low-Temperature High-Pressure Cooker) equipment, with capacity of at least 40 kg/process. In addition, the program established Joint Business Group (KUB) of milkfish pesto processing, especially in Kemijen Village, East Semarang Subdistrict.

CSR Pendidikan

Pembentukan karakter bangsa dan keandalan sumber daya manusia ditentukan oleh pendidikan. Oleh karena itu, setiap warga negara berhak dan wajib mendapatkan pendidikan agar memiliki karakter kuat serta mampu berdaya. Indonesia Power turut mendukung program pemerintah dan juga masyarakat dunia untuk mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.

Program CSR Pendidikan dari Indonesia Power diantaranya dengan memberikan bantuan sarana dan prasarana, perbaikan infrastruktur, dan pemberian beasiswa berprestasi.

CSR Pendidikan

The formation of national character and reliability of human resources are determined by education. Therefore, every citizen has the right and is responsible for getting education in order to have strong character and capability. Indonesia Power supports the government's program and also world's community to eradicate poverty and improve the education quality in Indonesia.

CSR Program for Education from Indonesia Power, among others, is by providing facilities and infrastructures, infrastructures improvement, and awarding scholarship.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERHADAP PENGEMBANGAN SOSIAL DAN KEMASYARAKATAN

Corporate Social Responsibility to Social and Community Development

Pada tahun 2016 Sejalan dengan program CSR Terintegrasi PLN Berintegritas, dilaksanakan program Pelopor Mengajar, yaitu pemberian informasi kepada pelajar setingkat SD, SLTP, dan SLTA tentang lingkungan, kesehatan, dan energi terbarukan. Program tersebut mencakup Anak Sehat Peduli Lingkungan, dan Pelopor Mengajar di setiap unit kerja Indonesia Power.

In 2016, in line with the Integrated CSR Program of PLN Integrity, the Company organized Teaching Pioneer (Pelopor Mengajar), i.e. providing information to teacher in the Elementary School, Junior High School, and High School on environment, health, and renewable energy. The program covers Healthy Children Care for the Environment, and Teaching Pioneer in every work unit in Indonesia Power.

Kegiatan Pelopor Mengajar
Teaching Pioneer Activities

Program ini merupakan program CSR di setiap unit Indonesia Power dimana dilakukan pelopor mengajar di sekolah di sekitar unit.

The program is a CSR Program in every unit of Indonesia Power, where the teaching pioneer is conducted in the school in the areas.

Memberdayakan warisan Indonesia

Pesatnya pertumbuhan ekonomi dan industri di Indonesia telah mendorong terjadinya modernisasi di masyarakat, tetapi pada saat yang bersamaan mengancam eksistensi budaya tradisional. Guna mendukung dan melestarikan budaya tradisional, Indonesia Power menyelenggarakan program CSR berupa pelestarian budaya lokal sebagai upaya mewujudkan salah satu komitmen Perusahaan untuk berkembang dan maju bersama masyarakat di wilayah binaannya serta mendukung keberlanjutan kota dan komunitas sekitar melalui pemberdayaan perempuan, sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Di antaranya adalah pembinaan Batik Zie.

Powering Indonesia's Heritage

The rapid economic and industry growth in Indonesia have led to modernization in the community, but at the same time, it threatens the existence of traditional culture. In order to support and preserve the traditional culture, Indonesia Power holds CSR program in the form of local culture preservation as an effort to realize one of the Company's commitments to develop and advance with surrounding community and to support the sustainability of city and surrounding community through female empowerment, in line with the sustainable development goals. For example, Batik Zie coaching.

Pembinaan Batik Zie
Batik Zie Coaching

Dari program ini, perajin dapat menghasilkan Batik Cetak sebanyak 450 Potong/bulan, Batik Tulis sebanyak 165 Potong/ bulan dan Batik Print sebanyak 65 Potong/ bulan

From this program, the crafters produce Batik Print as much as 450 pieces/month, Written Batik 165 pieces/month, and Batik Print in the amount of 65 pieces/month.

Zie Batik adalah program CSR UP Semarang dimana dilakukan pemberdayaan masyarakat dengan membantu pengembangan batik zie yang saat ini pengrajin memproduksi batik dengan pewarna alam yaitu serasah atau limbah pohon mangrove yang berlokasi di daerah Gunung Pati, Semarang. Inovasi tersebut dikenalkan oleh Maherno dari Zie Batik sebagai salah satu pengrajin batik yang konsisten dengan penggunaan bahan dari alam. Ide awal menjalankan bisnis ini berawal dari pemilik usaha yang tertarik untuk memanfaatkan limbah serasah mangrove sehingga memiliki nilai yang ekonomis.

Zie Batik is a CSR program at Semarang GU where the Company empowers the community through development of batik zie, where the artist produces batik with natural coloring, i.e. mangrove litter/waste located in the area of Mount Pati, Semarang. The innovation is introduced by Maherno from Zie Batik as one of the batik craftsmen who consistently uses materials from nature. The initial idea to run this business started from a business owner who is interested in using mangrove waste/litter so it has economic value.

Indonesia Power Life Skills

Model pemberdayaan masyarakat lainnya yang dilaksanakan Indonesia Power adalah pelatihan *Life Skills*. Program ini dilakukan sebagai wujud implmementasi Perusahaan dalam mendorong tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan terutama dalam menjamin kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Dari sisi ekonomi, pelatihan *Life Skills* dinilai dapat meningkatkan kesejahteraan perekonomian masyarakat miskin dan melatih dalam kemandirian. Keterampilan ini menjadi pendorong perekonomian masyarakat secara berkelanjutan.

Indonesia Power Life Skills

Another community empowerment model that is conducted by Indonesia Power is Life Skills training. This program is implemented to promote the achievement of sustainable development goals, especially in gender equality and women empowerment. Economically, the Life Skills training is considered to be able to improve the economic welfare of the poor and train self-reliance. These skills shall promote the community's economic in a sustainable way.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERHADAP PENGEMBANGAN SOSIAL DAN KEMASYARAKATAN

Corporate Social Responsibility to Social and Community Development

Program Peningkatan Promosi melalui Pembuatan Papan Nama, Sertifikat Halal dan P-IRT pada UKM Pengelolaan Ikan Di Kelurahan Tanjung Mas Kota Semarang

1. UKM RW. XII (RT. 07 dan RT. 08) dan RW I adalah kelompok masyarakat (Binaan PT. Indonesia Power) yang mempunyai usaha (home industri / UKM yang membuat bandeng presto dan produk makanan lain di Kelurahan Tanjung Mas.
2. Membentuk KUB (Kelompok Usaha Bersama) dibidang usaha bandeng presto dan produk ikan lain yang potensial, beserta susunan pengurus KUB.
3. Palaksanaan penguatan produksi dan pemasaran UKM bandeng presto, pembuatan alat produksi KUB, pelatihan peningkatan keterampilan membuat bandeng presto agar lebih enak dan higienis, pelatihan manajemen usaha, pemasaran dan pengelolaan dana bergulir, pendampingan produksi, manajemen, pemasaran, monitoring dan evaluasi kegiatan.

Manfaat Bantuan

1. Dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan Mitra Binaan Indonesia Power.
2. Menumbuhkan semangat kemandirian dan kewirausahaan dikalangan masyarakat.
3. Meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui program mitra binaan Indonesia Power.
4. Membantu para penerima manfaat menjadi manfaat bagi orang lain.
5. Wujud tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat.
6. Bagi perusahaan membangun pencitraan positif perusahaan di mata masyarakat yang akan menambah kepercayaan masyarakat.

Promotion Enhancement through Signboards Program, Halal Certification, and P-IRT in UKM Fish Managery in Tanjung Mas Village in Semarang.

1. UKM RW. XII (RT. 07 an RT. 08) and RW I are community groups (Guided by PT. Indonesia Power) that have business (home industry / UKM, producing presto milkfish and other food product in Tanjung Mas Village.
2. Form Joint Business Group (KUB) in the field of milkfish presto and other potential fish products, and composition of the Board of KUB.
3. Strengthening production and marketing of UKM milkfish presto, making KUB production equipment, training to enhance the skills in presto milkfish production to be more delicious and hygienic, business management training, marketing and fund management, production mentoring, management, marketing, activity monitoring and evaluation.

Benefit of the Aid

1. Improving income and welfare of Guided Partners Indonesia Power.
2. Growing the spirit of independence and entrepreneurship among the community.
3. Improving family welfare through program of guided partners Indonesia Power.
4. Helping the beneficiaries become the benefit for others.
5. Realization of corporate social responsibilities to the community.
6. Building positive image from community's perspective to gain more trust from the community.

Pengembangan Ekonomi Masyarakat Miskin Kota

Indonesia Power menyadari bahwa penanggulangan kemiskinan harus dilaksanakan secara lintas sektoral dan regional dengan melibatkan forum lintas pelaku. Indonesia Power tidak hanya fokus pada pengentasan kemiskinan di pedesaan namun juga di perkotaan. Hal ini sebagai bentuk implementasi Indonesia Power dalam mendukung upaya pemerintah untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan 2030 yaitu menghapus kemiskinan, mengakhiri kelaparan, mendorong pertumbuhan ekonomi dan kerja layak, mendorong inovasi berkelanjutan, mengurangi kesenjangan, serta membangun kota dan komunitas berkelanjutan.

Sampai dengan tahun 2016, Implementasi program pengembangan masyarakat miskin kota yang dilakukan Indonesia Power mencakup: Usaha Makanan Olahan dan Bantuan Pelatihan Ketrampilan Pengolahan Produk Perikanan (Usaha makanan olahan berbahan dasar ikan).

Economic Development for the Poor in the City

Indonesia Power is aware that poverty reduction has to be conducted across sector and region by involving cross-agency forums. Indonesia Power is not only focusing on poverty eradication in the rural areas, but also in the cities. This is a form of Indonesia Power's implementation to support the government's effort in achieving the sustainable development goals 2030, i.e. eradicating poverty, ending hunger, promoting economic growth and decent work, reducing inequalities, and developing sustainability of cities and communities.

Until 2016, Indonesia Power has organized economic development program for the poor in the city, which includes: Processed Food Business and Skill Training for Fishery Product Processing (fish-based processed food business).

Fasilitas Aquaponik (Upaya Peningkatan Ketahanan Pangan Wilayah)

Program ini merupakan program CSR UPJP Priok dimana dilakukan pemberdayaan masyarakat dengan peningkatan keterampilan dalam pembuatan fasilitas aquaponik di wilayah UPJP Priok dengan tujuan untuk memberikan stimulan bagi masyarakat untuk meningkatkan ketahanan pangan masyarakat melalui makanan sehat atau organik.

Aquaponics Facility (Effort to Improve Regional Food Security)

This program is a CSR Program at Priok GGSU where the Company empowers the community by improving their skills by making aquaponics facility in the Priok GGSU area, with the intention that it will provide stimulant for the community to improve their food security through healthy or organic food.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERHADAP PENGEMBANGAN SOSIAL DAN KEMASYARAKATAN

Corporate Social Responsibility to Social and Community Development

Program Donasi

Selain program-program unggulan di atas, Indonesia Power juga melaksanakan berbagai program CSR yang bersifat donasi. Program ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian Indonesia Power dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melalui program ini, Indonesia Power berharap dapat berperan signifikan dalam pencapaian target SDGs antara lain, menghapus kemiskinan, mengakhiri kelaparan, menjamin kehidupan yang sehat dan sejahtera, menjamin pendidikan berkulitas, menjamin kesetaraan gender, mengurangi kesenjangan, serta menjamin keberlanjutan kota dan komunitas.

Program donasi yang telah dilakukan Indonesia Power diantaranya adalah:

Donation Program

In addition to leading programs described, Indonesia Power also organized numerous donations as CSR program. This program is organized as a form of Indonesia Power's concern in improving the community's welfare. Through this program, Indonesia Power expects it can play a significant role in achieving Sustainable Development Goals (SDG), such as eradicating poverty, ending hunger, promoting healthy and wealthy life, ensuring quality education, ensuring gender equality, reducing inequalities, and developing sustainability of cities and communities.

The donation program that has been organized by Indonesia Power, among others, is:

Aksi Donor Darah Demi Kemanusiaan

Blood Donation for Humanity

Aksi Donor Darah merupakan kegiatan rutin Indonesia Power dalam rangka untuk memupuk rasa solidaritas dan sosial insan Indonesia Power. Pada tahun 2016, aksi donor darah dilaksanakan di seluruh unit Indonesia Power. Kegiatan donor darah terkumpul 1,176 kantong darah yang setara menyelamatkan 3,528 nyawa manusia.

Blood Donation is a regular activity of Indonesia Power in order to foster solidarity and social of Indonesia Power personnel. In 2016, the blood donationi is conducted in every unit of Indonesia Power. This activities collected 1,176 blood bags, equivalent to saving 3,528 human lives.

Peduli Kesehatan Ibu & Bayi

Health Care of Mother & Baby

Kantor Pusat Indonesia Power menyediakan ruang khusus bagi para ibu untuk memompa ASI bagi buah hatinya. Ruang yang disebut dengan istilah "Ruang Laktasi" atau *nursery room* merupakan wujud empati Indonesia Power kepada pegawai dan keluarganya. Dengan tersedianya ruang laktasi ini, ibu menyusui pegawai Indonesia Power dapat memberikan ASI eksklusif kepada bayinya dan memberikan kenyamanan dan ketenangan bagi ibu menyusui sehingga pegawai yang bersangkutan menjadi tetap produktif.

Indonesia Power Head Office provides special room for mothers to pump breastmlik for their children. The room is called "Ruang Laktasi" or nursery room and is a form of Indonesia Power's empathy to its employee and their family. With the availability of nursery room, breastfeeding mothers can give exclusive breastmilk for their children, hence giving them comfort and calmness so taht the said employees remain productive

Berbagi Ilmu dan Kebahagiaan
Sharing Knowledge and Happiness

Salah satu kegiatan CSR Indonesia Power Kantor Pusat dilakukan oleh Tim Pelopor dengan mengunjungi Panti Asuhan Yayasan Kuntum Teratai di Kampung Melayu Kecil, Jakarta Selatan. Kegiatan tersebut merupakan implementasi CSR terintegrasi yang dicanangkan PLN melalui program Duta Muda Mengajar. Pelopor Indonesia Power menyampaikan materi Bijak Listrik dan Peduli Lingkungan, serta memberikan bantuan komputer dan bingkisan untuk anak-anak Yayasan Kuntum Teratai. Keceriaan anak-anak pun terpancar saat menyaksikan Video Interaksi si BILI (Bijak Listrik). Mereka semakin mengerti akan manfaat listrik serta berbagai penggunaannya. Selain belajar bagaimana hidup sehat dan bersikap bersih, mereka juga diajarkan tujuh langkah cara mencuci tangan dengan baik dan benar.

One of the CSR activities in Indonesia Power Head Office is conducted by Pioneer Team, by visiting Yayasan Kuntum Teratai Orphanage in Kampung Melayu Kecil, Jakarta Selatan. The activity is an integrate CSR implementation proclaimed by PLN through Young Ambassadors Teach (Duta Muda Mengajar). Indonesia Power Pioneer delivers the material of Electricity Wisdom and Care for the Environment, and provide computer and gifts for children at Yayasan Kuntum Teratai. The children's joy were emanated during watching Interaction Video of BILI (Electricity Wisdom). They gain more understanding on the electricity uses and its utilization. In addition, they learn how to live healthily and cleanly, and they were taught on seven steps to wash their hands properly and correctly.

IP Bersih - Membangun Kesadaran Anti Korupsi

Indonesia Power sebagai anak perusahaan PLN yang bergerak dibidang ketenagalistrikan berkomitmen menciptakan insan Indonesia Power yang tangguh, unggul dan bermartabat serta menjadikan Indonesia Power bebas korupsi, kolusi dan nepotisme. Dimana pelaksanaan anti korupsi telah diatur melalui Kebijakan Direksi No. 161.K/020/ IP/2014 tentang Pedoman Indonesia Power Bersih.

Pedoman IP Bersih diterbitkan untuk dipergunakan oleh seluruh elemen Indonesia Power, mulai dari Direksi, Pejabat, Pegawai hingga para Pemangku Kepentingan di lingkungan Indonesia Power. Pedoman tersebut telah dikomunikasikan kepada seluruh stakeholder melalui pemasangan *banner* tentang anti korupsi/gratifikasi baik di Kantor Pusat maupun di unit pembangkit.

IP Bersih – Building Anti-Corruption Awareness

Indonesia Power, as a subsidiary of PLN, who is engaged in the electricity sector, commits to create Indonesia Power personnel that is strong, superior, and dignified, and they can make Indonesia Power that is free of corruption, collusion, and nepotism. Anti-corruption has been regulated in Directors' Decree No. 161.K/020/IP/2014 on Guidelines on Healthy Indonesia Power (Indonesia Power Bersih).

The IP Bersih Guidelines is issued to be utilized in every element of Indonesia Power, from the Directors, Executives, Employees, and the Stakeholders within Indonesia Power. The guidelines has been disseminated to every stakeholder through banner installment on anti-corruption/gratification in Head Office and generating unit.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERHADAP PENGEMBANGAN SOSIAL DAN KEMASYARAKATAN

Corporate Social Responsibility to Social and Community Development

Program yang telah dilakukan dalam rangka mewujudkan Indonesia Power Bersih, dilakukan melalui diantaranya dengan pelaksanaan survey prilaku etis, pelaksanaan *vendor meeting*, pelaporan LHKPN setiap tahun, pelaporan gratifikasi dan pelatihan-pelatihan mengenai anti korupsi.

Program that has been organized in order to realize Indonesia Power Bersih, among others, are ethical behavior survey, vendor meeting, annual LHKPN report, gratification reporting, and anti-corruption related trainings.

Dalam rangka memberikan wawasan dan bimbingan kepada seluruh pekerja dalam hal Pemberantasan Korupsi, Indonesia Power telah melakukan *Workshop* Gratifikasi bersama KPK tangal 10-11 November 2016 dengan peserta Pengelola Budaya GCG dan Agen Perubahan.

In order to provide insight and guidance to all workers in Corruption Eradication, Indonesia Power has conducted a Gratification Workshop with KPK on November 10-11, 2016, with participants of Cultural Managers and Agents of Change.

Komitmen Indonesia Power Bersih Dalam Mendukung PLN bersih dan PLN Berintegritas

The Commitment of Indonesia Power Bersih to Support PLN *Bersih* (Clean PLN) and PLN *Berintegritas* (Integrity PLN)

29 November 2016, Indonesia Power kembali mewujudkan komitmentnya dalam mendukung suksesnya Indonesia Power dan PLN Bersih demi tegaknya *Good Corporate Governance*.

November 29, 2016, Indonesia Power realized its commitment in supporting the success of Indonesia Power and PLN Bersih for upholding Good Corporate Governance.

Bahasan IP Bersih telah di uraikan pada Bab Tata Kelola Perusahaan Sub Bagian Komitmen Tata Kelola Berkelanjutan dalam Laporan Tahunan ini.

IP Bersih has been explained further on the Chapter Corporate Governance Subchapter Sustainable Governance Commitment in this Annual Report.

Biaya Program

Pada tahun 2016, Indonesia Power telah merealisasikan anggaran kegiatan InPower-Care sebesar Rp20.591.965.360 dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

Program Cost

In 2016, Indonesia Power has realized the budget for InPower-Care activities in the amount of Rp20,591,965,360 with details as follow:

No			2014	2015	2016
1	Bakti Pelayanan Masyarakat	Community Assistance	7.057.459.800	4.380.290.000	6.379.650.180
2	Bakti Pembinaan Hubungan	Community Relation	4.110.015.285	4.695.499.000	6.325.538.274
3	Bakti Pemberdayaan Masyarakat	Community Empowerment	7.182.314.050	9.078.012.000	7.886.776.906
Jumlah/ Total			18.349.789.135	18.153.801.000	20.591.965.360

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERHADAP KONSUMEN

Corporate Social Responsibility to Customer

Konsumen Indonesia Power yang selanjutnya disebut pelanggan merupakan salah satu pemangku kepentingan eksternal yang menjadi ujung tombak keberlanjutan operasi Perusahaan, untuk itu Indonesia Power selalu berupaya memberikan produk dan pelayanan terbaik yang bertujuan untuk memberikan kepuasan, menjaga kepercayaan serta menjaga loyalitas pelanggan.

Pelanggan Indonesia Power adalah PT Perusahaan Listrik Negara (persero) atau PLN yang merupakan pembeli tunggal daya listrik yang diproduksi oleh Indonesia Power.

Indonesia Power's consumer, hereinafter referred to as customer, is one of the external stakeholders that is essential in maintaining Company's operational sustainability. Therefore, Indonesia Power constantly attempts to provide the best quality of product and service, intended to satisfy and protect customers' trust and loyalty.

Indonesia Power's customer is PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) or PLN that is the sole buyer of electrical power that is generated by Indonesia Power.

Kebijakan

Dalam melakukan pengelolaan hubungan dengan Pelanggan, Indonesia Power mempunyai kebijakan khusus yang tertuang dalam:

1. Keputusan Direksi Nomor 103.K/010/IP/2013 tentang Kebijakan Fokus Pelanggan PT Indonesia Power;
2. *Code of Conduct* tentang Pelanggan;
3. Prosedur Manajemen Komplain .

Policies

In conducting relations with Customer, Indonesia Power holds specific policies that are stated on:

1. The Board of Directors' Decree Number 103.K/010/IP/2013 on Customer Focus Policy of PT Indonesia Power;
2. Code of Conduct on Customer;
3. Complaint Management Procedure.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERHADAP KONSUMEN

Corporate Social Responsibility to Customer

Rencana kegiatan Perusahaan terkait Pelanggan

Dalam rangka meningkatkan kepuasan pelanggan serta memenuhi harapan pelanggan, Indonesia Power telah menyusun Program Kerja Kepuasan pelanggan. Program tersebut disusun sebagai tindak lanjut perbaikan atas hasil survei yang dilakukan pada tahun sebelumnya dengan harapan adanya perbaikan proses di Unit Pembangkit.

Rencana program kerja kepuasan Pelanggan yang telah ditetapkan oleh Indonesia Power untuk tahun 2016, adalah sebagai berikut:

1. Evaluasi Hasil Survey Kepuasan Pelanggan Tahun 2015 dan Menyusun *Action Plan* OFI Kepuasan Pelanggan 2016;
2. *Workshop* Pendalaman Protap DKIKP;
3. Penentuan *Surveyor Independent Survey* Kepuasan Pelanggan 2016;
4. *Training Communication Skill*;
5. *Workhsop* Pelanggan UJP Wilayah Luar Jawa;
6. *Workhsop* Pelanggan UJP Wilayah Jawa;
7. Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelanggan Tahun 2016;
8. *Workshop* Manajemen Komplain.

Company's Work Plan regarding Customer

To improve customer's satisfaction and fulfill their aspirations, Indonesia Power has formulated Customer Satisfaction Work Program. The program was formulated as a follow-up action over survey result that had been carried out the previous year with hope of improvement in the work process of Generating Unit.

Customer satisfaction work plan that had been determined by Indonesia Power in 2016 is as follows:

1. Result evaluation of Customer Satisfaction survey in 2015 and composing OFI Action Plan for Customer Satisfaction in 2016;
2. DKIKP Standard Operating Procedure Workshop;
3. Determining Independent Surveyor for Customer Satisfaction Survey in 2016;
4. Communication Skill Training;
5. Customer Workshop for GSU in regions outside of Java;
6. Customer Workshop for GSU in Java regions;
7. Implementation of Customer Satisfaction Survey in 2016;
8. Complaint Management Workshop.

Pelaksanaan Kegiatan Perusahaan Terhadap Pelanggan

Sejalan dengan rencana kegiatan Program kerja kepuasan Pelanggan yang telah ditetapkan oleh Indonesia Power, pelaksanaan kegiatan Perusahaan terkait pelanggan selama tahun 2016 adalah sebagai berikut:

1. **Evaluasi Hasil Survey Kepuasan Pelanggan Tahun 2015 dan Menyusun Action Plan OFI Kepuasan Pelanggan 2016**

   Bentuk kepedulian Indonesia Power dalam menjaga hubungan yang baik dengan pelanggan, Indonesia Power setiap tahunnya selalu melakukan evaluasi/tindaklanjut hasil *survey* pelanggan tahun

Implementation of Corporate Activities to Customer

In line with Customer Satisfaction Work Program activity plan that has been determined by Indonesia Power, Corporate activities related to Customer in 2016 are as follows:

1. Result evaluation of Customer Satisfaction survey in 2015 and composing OFI Action Plan for Customer Satisfaction in 2016

   In showing its concern in maintaining good relationship with customer, Indonesia Power annually conducts an evaluation/follow-up on the result of customer satisfaction survey from the

sebelumnya. Tindak lanjut tersebut berdasarkan pada hasil survei kepuasan, ketidakpuasan, dan keterikatan pelanggan.

Dalam mendukung hal tesebut, Pada tahun 2016, Indonesia Power telah melakukan berbagai kegiatan guna terjalinnya hubungan yang baik antara pelanggan dan Indonesia Power. Dimana kegiatannya terdiri dari:

a. Menyusun *Action Plan* OFI Kepuasan pelanggan

   Merupakan Program kerja dalam menjalin hubungan dengan pelanggan dalam menindaklanjuti OFI Kepuasan Pelanggan yang setiap unit pembangkit memiliki program kerja action plan masing-masing. Secara general program kerja yang dimaksud adalah program mendengarkan suara pelanggan dalam kegiatan baik formal – semi formal – informal maupun program kerja untuk meningkatkan keandalan pembangkit Indonesia Power.

   Secara korporasi, *action plan* OFI Kepuasan Pelanggan Tahun 2016 atas hasil *survey* pelanggan tahun 2015 adalah sebagai berikut:

previous year. This follow-up is based on the result of customer's satisfaction, dissatisfaction, and engagement surveys.

In supporting the action, in 2016 Indonesia Power had performed several activities to build a good relation between the Customer and Indonesia Power. The activities consisted of:

a. Composing OFI Action Plan for Customer Satisfaction

   A work program that focuses on building relation with customer In following up on OFI Customer Satisfaction, each generating unit holds their own action plan work program. In general, the intended work program is a program where the Company is open to customer's feedback in all form of activities, formal-semi formal-informal and includes the work program that improves Indonesia Power's generators reliability.

   On a corporate level, OFI action plan for Customer Satisfaction in 2016 over the result of customer satisfaction survey in 2015 is as follows:

OFI		Target Waktu Pelaksanaan Target of Implementation Time
Daya Reaktif	Reactive Power	TW 1 – TW 4
Pemulihan Terhadap Gangguan	Recovery Over Interference	TW 1 – TW 4
Waktu Penyelesaian Pemeliharaan	Maintenance Time Frame	TW 1 – TW 4
Ketepatan Laporan (Akurasi dan Waktu) pada bagian real time	Reporting Accuracy (accuracy and time) in real time	TW 1 – TW 4

Kegiatan ini dilakukan pada tanggal 25-28 Januari 2016 di PLTU Perak-Surabaya dengan mengundang Perwakilan Pelanggan PT PLN (Persero), PT PLN (Persero) P2B, PT PLN (Persero) APB Jawa Timur dan PT PLN (Persero) UPJB).

The activity was carried out on January 25-28, 2016 in Perak SPP, Surabaya with Customer Representatives from PT PLN (Persero), PT PLN (Persero) P2B, PT PLN (Persero) APB East Java, and PT PLN (Persero) UPJB in attendance.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERHADAP KONSUMEN

Corporate Social Responsibility to Customer

b. Tindaklanjut hasil survey kepuasan pelanggan tahun 2016

Kegiatan ini dilakukan melalui *Action Plan* OFI Kepuasan Pelanggan dengan penyampaian tindak lanjut action plan OFI per triwulan oleh unit pembangkit ke Pembina di Indonesia Power Kantor Pusat, Divisi Niaga & Settlement.

2. Workshop Pendalaman Prosedur Tetap Deklarasi Kondisi Dan Indeks Kinerja Pembangkit (DKIKP)

Dalam rangka mendapatkan informasi ter-*update* terkait atas pelaksanaan *dispatching* pembangkit, pada tanggal 11-12 April 2016 Indonesia Power telah melakukan *workshop* Prosedur Tetap atas DKIKP di Unit Pembangkitan Semarang yang melibatkan pelanggan sebagai narasumber.

Dengan adanya *workshop* ini, diharapkan Indonesia Power dapat *concern* terhadap prosedur tetap sebagai referensi perbaikan atas pelaksanaan *dispatching* pembangkit.

3. Penentuan *Surveyor Independent* dan Survei Kepuasan Pelanggan 2016

Dalam melakukan survei kepusan pelanggan, Indonesia Power bekerjasama dengan *surveyor independent* guna dapat memberikan hasil penilaian yang mandiri dan tanpa campur tangan pihak manapun.

Survei Kepuasan pelanggan tahun 2016 dilaksanakan oleh *surveyor independent* PT SUCOFINDO.

4. Pelaksanaan Survei Kepuasan Pelanggan Tahun 2016

Untuk mengukur tingkat kepuasan pelanggan terhadap layanan yang diberikan Perusahaan, Indonesia Power telah melakukan survei kepuasan pelanggan yang dilaksanakan 1 (satu) kali dalam setahun.

Survei kepuasan pelanggan untuk tahun buku 2016 telah dilakukan pada tanggal 19-30 September 2016 dengan responden di seluruh lokasi pelangga baik di wilayah Jawa maupun luar Jawa dalam menilai performansi Indonesia Power khususnya pembangkit eksisting dan jasa O&M.

b. Follow-up on the result of customer satisfaction survey in 2016

The activity was carried out through OFI Action Plan for Customer Satisfaction by delivering OFI follow-up action plan every three months to the Supervisor of Indonesia Power's Head Office, Commerce and Settlement Division.

2. Declaration of Conditions and Generator Performance Index (DKIKP) Standard Operating Procedure Workshop

To retrieve the latest information related to the implementation of generator's dispatching, on April 11-12, 2016, Indonesia Power had conducted a workshop of DCGPI Standard Operating Procedure in Semarang Generating Unit that involved customer as sources.

Through this workshop, Indonesia Power hoped to improve its concern on standard operating procedure as reference for improvement of generator's dispatching implementation.

3. Determining Independent Surveyor and Customer Satisfaction Survey in 2016

In conducting customer satisfaction survey, Indonesia Power collaborated with an independent surveyor to produce an independent and impartial evaluation result without interference from any other party.

2016 Customer Satisfaction Survey was conducted by an independent surveyor PT SUCOFINDO.

4. Implementation of Customer Satisfaction Survey in 2016

To assess the level of customer's satisfaction to the service provided by the Company, Indonesia Power conducts annual customer satisfaction survey.

Customer Satisfaction Survey for 2016 was conducted on 19-30 September 2016, with respondents from all customers' regions, both from within and outside of Java area, evaluating on Indonesia Power's performance specifically on existing generators and O&M services.

Pengukuran survei tersebut menggunakan 2 metode yaitu:

a. Metode Kuantitatif, melalui kuesioner yang sifatnya *close/open question*.
b. Metode Kualitatif, melalui *Focus Group Discussion* (FGD) dan *Indepth Interview.*

Hasil survei tersebut menunjukan peningkatan dibanding tahun 2015 sebesar 86,27 menjadi 86,86.

The assessment utilized 2 methods, they are:

a. Quantitative Method, through close and open-ended question questionnaires.
b. Qualitative Method, through Focus Group Discussion and In-depth Interview.

The result showed an increase compared to 2015, from 86.27 to 86.86.

Hasil Survei Kepuasan Pelanggan Tahun 2012-2016
The Result of Customer Satisfaction Survey in 2012-2016

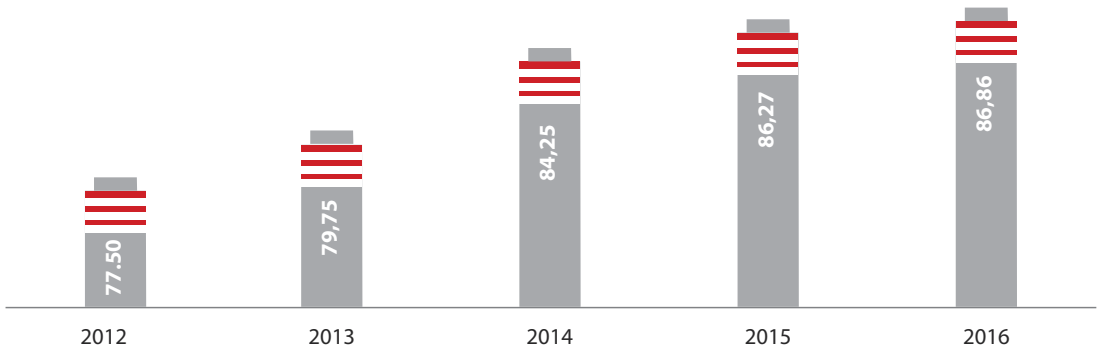

5. *Workshop* Manajemen Komplain

Guna memberikan pemahaman terkait hasil survei kepuasan pelanggan dan untuk mendapatkan referensi sebagai *supplement* agenda perbaikan di tahun mendatang, Indonesia Power telah melakukan *workshop* manajemem komplain. Inti dari *Workshop* ini adalah penyampaian langsung dari atas *Surveyor Independent* hasil survey pelanggan ke seluruh unit pembangkit pada tanggal 14-16 Desember 2016 di PLTA Bengkok-Bandung.

6. *Training Communication Skill*

Untuk mendapatkan informasi terkait suara pelanggan secara langsung, Indonesia Power telah melakukan *Training Communication Skill*, dimana tujuan *training* tersebut adalah salah satu sarana dalam perbaikan hubungan dengan pelanggan.

5. Complaint Management Workshop

To provide further understanding regarding the result of customer satisfaction survey and gain reference as supplement for improvement agenda in the upcoming years, Indonesia Power had conducted complaint management workshop. The point of this workshop was for Independent Surveyor to deliver the result of customer satisfaction survey to all generation units on December 14-16, 2016, in Bengkok HPP-Bandung.

6. Communication Skill Training

To retrieve information regarding customer's direct feedback, Indonesia Power had conducted Communication Skill Training, with one of the purposes was to improve the quality of relations with customer.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERHADAP KONSUMEN

Corporate Social Responsibility to Customer

Selama tahun 2016, *Training Communication Skill* dilakukan sebanyak dua kali yaitu pada tanggal 16-18 Mei 2016 dan tanggal 24-26 Mei 2016 dengan peserta yang berasal dari Unit Pembangkit yang secara langsung berkomunikasi aktif dengan pelanggan.

Throughout 2016, Communication Skill Training had been conducted twice, on 16-18 May 2016, and 24-26 May 2016, with participants coming from Generating Unit that had been in direct active communication with customers.

Training ini difasilitatori oleh pihak eksternal yang sudah memiliki pengalaman dalam materi *Communication Skill* dan dalam kegiatan ini juga mengundang pelanggan sebagai narasumber untuk mendapatkan suara pelanggan atas performansi Indonesia Power di mata pelanggan.

The training was facilitated by external party with experience in the field of Communication Skill and the event was also attended by customer as sources, giving Indonesia Power an insight of their performance to the public's eye.

7. Kegiatan Lainnya

7. Other Activities

a. Kesehatan dan Keselamatan pelanggan

a. Customer's Health and Safety

Sebagai Perusahaan yang bergerak dibidang ketenagalistrikan yang berisiko tinggi terhadap keselamatan dan kesehatan pelanggan, Indonesia Power selalalu berupaya memberikan pelayanan yang terbaik dengan memastikan segala sesuatunya sesuai dengan rangkaian prosedur operasi standar keselamatan dan kesehatan pelanggan.

As a Company that runs in the field of electricity with high risk toward customer's health and safety, Indonesia Power constantly attempts to provide the best service by ensuring all procedures conducted accordingly to customer's safety and health operational standard.

Selama tahun 2016 tidak terdapat insiden ketidakpatuhan tentang dampak keselamatan dan kesehatan dalam pendistribusian energi listrik kepada pelanggan dan pengaduan mengenai ketidaknyamanan pelanggan.

Throughout 2016, there had been no incident regarding incompliance toward safety and health in electricity distribution for customer nor any complaint on customer's inconvenience.

b. Informasi Produk

b. Product Information

Untuk mempermudah pelayanan dan akses terkait informasi produk, Indonesia Power telah menyediakan sarana akses data dan informasi laporan Tahunan Indonesia Power dan *website* Indonesia Power dengan alamat www.indonesiapower.co.id

To facilitate service and access related to product information, Indonesia Power has provided means of data access and Indonesia Power's annual report information and Indonesia Power's website www.indonesiapower.co.id

c. Sarana, Jumlah dan Penanggulangan Atas Pengaduan Pelanggan

c. Facilities, Quantities, and Countermeasures for Customer Complaint

Dalam rangka menangani keluhan dan pertanyaan dari pelanggan mengenai produk, Indonesia Power telah menyediakan sarana media komunikasi hubungan dengan pelanggan, sehingga pelanggan dapat berinteraksi secara

In dealing with complaints and questions from customer regarding products, Indonesia Power has provided means of communication media to maintain a relation with customers, so that customers can directly interact to deliver

langsung untuk menyampaikan keluhan, pertanyaan, saran/masukan dan tingkat kepuasan terhadap produk dan layanan yang diberikan oleh Indonesia Power.

Berikut media komunikasi hubungan dengan pelanggan yang digunakan oleh Indonesia Power:

complaints, questions, suggestions, and level of satisfaction toward products and services offered by Indonesia Power.

The following is communication media utilized by Indonesia Power in maintaining relation with customers:

Media Komunikasi Utama Main Communication Media	A	B	C	D	**Proses Menetapkan Persyaratan Dukungan Pelanggan** Establishing Requirement for Customer Support		**Proses Menyebarluaskan Persyaratan ke Internal Tenaga Kerja** Disseminating the Requirement to Internal Workforce
PLN melalui PLN P2B (energi listrik 500kV dan 150 kV) | PLN through PLN P2B (electricity energy 500kV and 150 kV)							
Telepon - 021-526 7666 - Ext.2222/3333: Operasional real time (ETMC) dan rencana operasi harian (ROH) - Ext.3106: Realisasi kinerja pembangkit (HDKP) - Ext.3107/3105: Informasi ROM serta ROB dan ROT - Telepon Direct ETMC 021-522 9813: Kondisi pembangkit - Mobile Phone ETMC 0811 937 740: Kondisi pembangkit dan operasional - Hotline Unit Bisnis Pembangkit: Naik turun beban, Start-stop pembangkit, kondisi pembangkit Phone - 021-526 7666 - Ext.2222/3333: Real-time operations (ETMC) and daily operation plan (ROH) - Ext.3106: Power plant performance realization (HDKP) - Ext.3107/3105: ROM, ROB, and ROT information - Direct call to ETMC 021-522 9813: plant condition - Mobile phone ETMC 0811 937 740: plant and operation condition - Power Plant Business Unit Hotline: Weight rise and down, power plant star—stop, plant condition	√	√	√	√	- Menetapkan PIC untuk telepon - Menetapkan respon time - Menetapkan tata cara menerima dan menjawab telepon - Evaluasi informasi dan efektifitas media untuk perbaikan	- Determining PIC for phone - Setting response time - Establishing etiquette to receive and answer calls - Evaluating information and media effectiveness for improvement	- Menetapkan instruksi kerja (IPM,IK) - Melakukan sosialisasi kepada pegawai terkait - Establishing work instruction (IPM, IK) - Conducting socialization to the related employees
Website - Aplikasi Dispatch : naik turun beban dan start-stop pembangkit - Aplikasi HDKP IKP: ketidaksiapan pembangkit - Aplikasi GAIS: kinerja pembangkit - Aplikasi JBOS Plan: perencanaan pembangkit - Aplikasi Rapsodi: kondisi sistem - Aplikasi Neraca Energi: kWh energy Website - Dispatch: Weight rise and down, power plant star—stop - HDKP IKP: power plant unreadiness - GAIS: power plant performance - JBOS Plan: power plant planning - Rapsodi: system condition - Energy Balance: kWh	√	√	√	√	- Menetapkan PIC untuk setiap aplikasi sesuai dengan Tupoksi - Menetapkan respon time mengacu pada Protap - Evaluasi informasi dan efektifitas media untuk perbaikan	- Determining PIC for every application in accordance with job descriptions - Determining response time referring to procedures - Evaluating information and media effectiveness for improvement	- Menetapkan instruksi kerja (IPM,IK) - Melakukan sosialisasi kepada pegawai terkait - Establishing work instruction (IPM, IK) - Conducting socialization to the related employees

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERHADAP KONSUMEN

Corporate Social Responsibility to Customer

Media Komunikasi Utama Main Communication Media	A	B	C	D	Proses Menetapkan Persyaratan Dukungan Pelanggan Establishing Requirement for Customer Support		Proses Menyebarluaskan Persyaratan ke Internal Tenaga Kerja Disseminating the Requirement to Internal Workforce
Faximili ETMC 021-525 3275: operasional real time Facsimile ETMC 021-525 3275: operasional real time	√	√	√	√	- Menetapkan kesiapan pembangkit (ROB, ROM dan ROH) - Evaluasi informasi dan efektifitas media untuk perbaikan	- Determining plant readiness (ROB, ROM, and ROH) - Evaluating information and media effectiveness for improvement	- Menetapkan instruksi kerja (IPM,IK) - Melakukan sosialisasi kepada pegawai terkait - Establishing work instruction (IPM, IK) - Conducting socialization to the related employees
E-mail etmc@indonesiapower.co.id: perencanaan operasi, operasional real time E-mail etmc@indonesiapower.co.id: operation plan, real-time operations	√	√	√	√	- Menetapkan kesiapan pembangkit (ROB, ROM, dan ROH) - Evaluasi informasi dan efektifitas media untuk perbaikan	- Determining plant readiness (ROB, ROM, and ROH) - Evaluating information and media effectiveness for improvement	- Menetapkan instruksi kerja - Melakukan sosialisasi kepada pegawai terkai - Establishing work instruction - Conducting socialization to the related employees
Surat PT Indonesia Power Jl. Gatot Subroto Kav.18: PPA, settlement, perencanaan operasi, kondisi pembangkit Letter PT Indonesia Power Jl. Gatot Subroto Kav.18: PPA, settlement, operation plan, power plant condition	√	√	√	√	- Menetapkan PJBTL dan tarif komponen ABCD - Menetapkan JTF - Menetapkan perencanaan penjualan - Menetapkan kondisi status pembangkit - Evaluasi informasi dan efektifitas media untuk perbaikan	- Establishing PJBTL and tariff of ABCD component - Establishing JTF - Determining sales plan - Determining the status of power plant condition - Evaluating information and media effectiveness for improvement	- Menetapkan instruksi kerja - Melakukan sosialisasi kepada pegawai terkait - Establishing work instruction - Conducting socialization to the related employees
Rapat Rapat alokasi energi Meeting Energy Allocation Meeting	√	√	√	√	- Menetapkan hasil evaluasi energi bulan yang lalu dan perencanaan bulan depan - Evaluasi informasi dan efektifitas media untuk perbaikan	- Establishing last months' energy evaluation and next month's planning - Evaluating information and media effectiveness for improvement	- Menetapkan Instruksi kerja - Melakukan sosialisasi kepada pegawai terkait - Establishing work instruction - Conducting socialization to the related employees
PLN melalui PLN Distribusi (energi listrik ≤20kV | PLN through PLN Distribution (electricity ≤ 20kV)							
Telepon - 021-526 7666 - Mobile Phone ETMC: 0811 937 740 - Telepon direct ETMC: 021-522 9813	√	√	√	√	- Menetapkan PIC untuk telepon - Menetapkan respon time - Menetapkan tata cara menerima dan menjawab telepon	- Determining PIC for phone - Setting response time - Establishing etiquette to receive and answer calls	- Menetapkan Instruksi kerja - Melakukan sosialisasi kepada pegawai terkait - Establishing work instruction - Conducting socialization to the related employees
Faksimili ETMC 021-525 3275: Operasional real time	√	√	√	√	Menetapkan kesiapan pembangkit (ROB dan ROM	Determining plant readiness (ROB and ROM)	- Menetapkan Instruksi kerja - Melakukan sosialisasi kepada pegawai terkait - Establishing work instruction - Conducting socialization to the related employees

Media Komunikasi Utama Main Communication Media	A	B	C	D	Proses Menetapkan Persyaratan Dukungan Pelanggan Establishing Requirement for Customer Support		Proses Menyebarluaskan Persyaratan ke Internal Tenaga Kerja Disseminating the Requirement to Internal Workforce
E-mail E-mail kepada Divisi Niaga/personal E-mail: Settlement/ kontrak E-mail E-mail to Divisi Niaga/personal e-mail: Settlement/contract	√	√	√	√	Menetapkan kesiapan pembangkit (ROB dan ROM	Determining plant readiness (ROB and ROM)	- Menetapkan Instruksi kerja - Melakukan sosialisasi kepada pegawai terkait - Establishing work instruction - Conducting socialization to the related employees
Surat PT Indonesia Power Jl. Gatot Subroto Kav.18: Settlement/ kontrak Letter PT Indonesia Power Jl. Gatot Subroto Kav.18: Settlement/ contract	√	√	√	√	- Menetapkan kontrak single price - Menetapkan JTF - Menetapkan perencanaan penjualan - Menetapkan kondisi status pembangkit	- Setting single price contract - Establishing JTF - Determining sales plan - Determining the status of power plant condition	- Menetapkan Instruksi kerja - Melakukan sosialisasi kepada pegawai terkait - Establishing work instruction - Conducting socialization to the related employees
Rapat Rapat pembahasan kontrak dan settlement Meeting Discussion of Contract and Settlement	√	√	√	√	- Menetapkan hasil evaluasi energi bulan yang lalu dan perencanaan bulan depan	- Establishing last months' energy evaluation and next month's planning	- Menetapkan Instruksi kerja - Melakukan sosialisasi kepada pegawai terkait - Establishing work instruction - Conducting socialization to the related employees
PLN melalui PLN UPJB (jasa O&M) | PLN through PLN UPJB (O&M service)							
Telepon - 021-526 7666: koordinasi, progres, kajian - Telepon personal: koordinasi, progres, kajian Phone - 021-526 7666: coordination, progress, review - Personal phone: coordination, progress, review	√	√	√	√	- Menetapkan PIC untuk telepon - Menetapkan respon time - Menetapkan tata cara menerima dan menjawab telepon	- Determining PIC for phone - Setting response time - Establishing etiquette to receive and answer calls	- Menetapkan instruksi kerja - Melakukan rapat internal Jasa O&M - Establishing work instruction - Conducting meeting internal fo O&M services
Faksimili 021-525 3467	√	√	√	√	Menetapkan kesiapan pembangkit	Determining plant readiness	- Menetapkan instruksi kerja - Melakukan rapat internal Jasa O&M - Establishing work instruction - Conducting meeting internal fo O&M services
E-mail E-mail ke DIV PNB/personal e-mail	√	√	√	√	Menetapkan kesiapan pembangkit (ROB, ROM, dab ROH)	Determining plant readiness (ROB, ROM, and ROH)	- Menetapkan instruksi kerja - Melakukan rapat internal Jasa O&M - Menetapkan instruksi kerja - Melakukan rapat internal Jasa O&M
Rapat Rapat Jasa O&M Meeting O&M Services Meeting	√	√	√	√	Menetapkan hasil evaluasi kontrak yang masih berjalan	Determining the ongoing contract evaluation results	- Menetapkan instruksi kerja - Melakukan rapat internal Jasa O&M - Establishing work instruction - Conducting meeting internal fo O&M services

Keterangan:
A : Mendapatkan Informasi
B : Memberikan Dukungan
C : Menjalin Hubungan Bisnis
D : Umpan Balik Produk dan Dukungan

Remark:
A: Obtaining Information
B: Providing Support
C: Establishing Business Relations
D: Product Feedback and Support

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERHADAP KONSUMEN

Corporate Social Responsibility to Customer

Sepanjang tahun 2016, Indonesia Power tidak menerima berbagai keluhan dari pelanggan baik itu yang berupa aspek kesehatan dan keselamatan maupun ketidakpatuhan terhadap peraturan terkait dengan penyediaan informasi produk dan komunikasi pemasaran.

Throughout 2016, Indonesia Power hadn't received any customer's complaint, either related to health and safety aspect or incompliance toward regulations on product information provision and marketing communication

Jumlah Pengaduan Pelanggan Tahun 2016

The Number Of Customer's Complaint In 2016

Aspek	Aspect	Jumlah pengaduan Number of Complaints
aspek kesehatan dan keselamatan terkait dengan pendistribusian listrik kepada pelanggan dan pengaduan mengenai privasi pelanggan	Health and safety aspect related to electricity distribution for customer and complaint about customer's privacy	0
ketidakpatuhan terhadap peraturan terkait dengan penyediaan informasi produk dan komunikasi pemasaran	Incompliance toward regulations related to information provision and marketing communication	0

Dalam hal terjadi keluhan pelanggan, Indonesia Power senantiasa akan menindaklanjuti keluhan pelanggan. Penanganan pengaduan pelanggan dilaksanakan oleh Divisi Niaga & Settlement (dalam Struktur Organisasi terbaru dikelola oleh Divisi Pembangkitan I dan Divisi Pembangkitan II) dan dimonitor secara otomatis dalam Aplikasi Harian Deklarasi Ketidaksiapan Pembangkit (HDKP). Hasilnya dikompilasi dan dievaluasi oleh Kepala Divisi Niaga & Settlement (dalam Struktur Organisasi terbaru dikelola oleh Kepala Divisi Pembangkitan I dan Kepala Divisi Pembangkitan II) dan Unit/Divisi terkait untuk mendapatkan solusi dari masalah yang dihadapi dan kemudian ditindaklanjuti (sesuai dengan IPM.06.07).

In the case of customer's complaint, Indonesia Power commits to take follow-up actions toward the complaint. Customer's complaint is managed by Commerce and Settlement Division (in the most updated Organization Structure, is managed by the of Power Generation I Division and of Power Generation Division) and automatically monitored on Daily Declaration of Generator's Unpreparedness (HDKP) Application. The result would be compiled and evaluated by the Head of Commerce and Settlement (Division in the most updated Organization Structure, is managed by the Head of Power Generation I Division) and Head of Power Generation Division and related Unit/Division to retrieve solutions for current problems and then conduct follow-up actions (in accordance with IPM.06.07).

Berikut Skema Pengelolaan Keluhan Pelanggan Indonesia Power:

Indonesia Power's Customer Complaint Management Scheme, as follows:

Mekanisme Pengelolaan Keluhan Pelanggan
Customer Complaint Management Mechanism

Aliran Aktivitas Activity Streamline	Penanggung Jawab dan Catatan Responsible Institution and Note
Pelanggan Customer	
Cat.1 **Menerima Komplain** Receiving Complaint	• MKHP (Manajer Komersial Hubungan Pelanggan) Manager of Commercial Customer Relation • MPKJ (Manajer Pengembangan dan Komersial Jasa O&M) Manager of Development and Commercial O&M Services Aplikasi HDKP Page kesiapanpembangkit, notulen rapat, email, surat, Faksimili HDKP Page Application, readiness of generating, minutes of meeting, e-mail, letter **Laporan Evaluasi Niaga (B.05.01)** Trade Evaluation Report (B.05.01)
Mengelompokkan Jenis Komplain Pelanggan Categorizing type of Customer	
Meneruskan Komplain Ke Pihak Terkait Forwarding Complaint to Related Party	
Komplain aspek Komersial? Complaint on commercial aspect? **Ya** Yes **Tidak** No	
Cat.2 **Meneruskan Komplain ke Pihak Terkait** Forwarding the Complain to Related Party	
Melakukan evaluasi penyelesaian komplain Conducting Evaluation of Complaint Resolution **Tidak** No	• Kepala Divisi Niaga & Settlement (dalam Struktur Organisasi terbaru dikelola oleh Kepala Divisi Pembangkitan I dan Kepala Divisi Pembangkitan II) Head of Commerce and Settlement Division (in the most updated Organization Structure, is managed by the Head of Power Generation I Division and Head of Power Generation Division) • KDIVPMP I, KDIVPMP2, KDIVPMP III
Komplain terselesaikan Complaint is finished **Ya** Yes	**Aplikasi HDKP, Pronia, Prohar** HDKP Application, Pronia, Prohar **Evaluasi Komplain (B.06.01)** Complaint Evaluation (B.06.01)
Memberikan informasi kepada pelanggan Providing information to customer	

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERHADAP KONSUMEN

Corporate Social Responsibility to Customer

d. Upaya Perusahaan dalam memenuhi hak dan harapan pelanggan

Berikut adalah langkah Indonesia Power dalam memenuhi hak dan harapan pelanggan

d. Company's efforts in fulfilling customer's rights and aspirations

The following are steps taken by Indonesia Power in fulfilling customer's rights and aspirations

	Uraian Description	Proses memenuhi dukungan pelanggan Process of fulfilling customer's support	Proses Menyebarluaskan Persyaratan Dukungan Pelanggan ke Pihak Terkait Process of disseminating terms of customer's support to related parties
Energi Listrik / Electrical Energy – Grid (500 kV dan 150 kV)	Kesiapan 24 jam *Operator Control Room* dan ETMC 24 Hours Readiness of Control Room Operator and ETMC	• Menetapkan PIC • Menetapkan durasi kesiapan • Menetapkan tata cara menerima dan menjawab telepon • Evaluasi informasi dan efektifitas media untuk perbaikan • Determining PIC • Determining duration of readiness • Determining etiquette of receiving and answering phone calls • Evaluating information and media effectiveness for improvement	Membuat dan menetapkan prosedur terkait Pengendalian Niaga Formulating and determining procedure regarding Commerce Control
	Optimalisasi penggunaan aplikasi *realtime* kesiapan pembangkit Optimization of application utilization on generator's real-time readiness	• Menetapkan PIC untuk setiap aplikasi sesuai dengan Tupoksi • Menetapkan *respontime* mengacu pada Protap • Evaluasi informasi dan efektifitas media untuk perbaikan • Determining PIC for each application in accordance with their job description • Determining Response Time accordingly to Standard Operating Procedure • Evaluating information and media effectiveness for improvement	Melakukan sosialisasi kepada pegawai terkait Protap Conducting socialization toward employees regarding Standard Operating Procedure
Energi Listrik / Electrical Energy – Embedded (20kV)	Kesiapan *Operator Control Room* Readiness of Control Room Operator	• Menetapkan PIC • Menetapkan durasi kesiapan • Menetapkan tata cara menerima dan menjawab telepon • Evaluasi informasi dan efektifitas media untuk perbaikan • Determining PIC • Determining duration of readiness • Determining etiquette of receiving and answering phone calls • Evaluating information and media effectiveness for improvement	Membuat dan menetapkan prosedur terkait Pengendalian Niaga Formulating and determining procedure regarding Commerce Control
Jasa O&M / O&M Services	Kesiapan *Operator Control Room* dan ETMC Readiness of Control Room Operator and ETMC	• Menetapkan PIC • Menetapkan durasi kesiapan • Menetapkan tata cara menerima dan menjawab telepon • Evaluasi informasi dan efektifitas media untuk perbaikan • Determining PIC • Determining duration of readiness • Determining etiquette of receiving and answering phone calls • Evaluating information and media effectiveness for improvement	Membuat dan menetapkan prosedur terkait Pengendalian Niaga Formulating and determining procedure regarding Commerce Control
	Optimalisasi penggunaan aplikasi ***realtime*** kesiapan pembangkit Optimization of application utilization on generator's real-time readiness	• Menetapkan PIC untuk setiap aplikasi sesuai dengan Tupoksi • Menetapkan *respontime* mengacu pada Protap • Evaluasi informasi dan efektifitas media untuk perbaikan • Determining PIC for each application in accordance with their job description • Determining Response Time accordingly to Standard Operating Procedure • Evaluating information and media effectiveness for improvement	Melakukan sosialisasi kepada pegawai terkait Protap Conducting socialization toward employees regarding Standard Operating Procedure

Dampak atas Kegiatan Perusahaan terhadap Pelanggan

Secara garis besar kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh Indonesia Power terkait pelanggan selama tahun 2016, menyebabkan timbulnya dampak positif bagi Perusahaan diantaranya sebagai berikut:

1. Pelanggan dapat melihat komitmen Indonesia Power dalam menindaklanjuti suara pelanggan yang didapat dalam hasil survei pelanggan tahun 2015.
2. Indonesia Power, khususnya setiap unit pembangkit, memiliki rencana tahunan dalam hubungannya dengan pelanggan, sehingga akan lebih mudah memetakan perbaikan yang akan dicapai di tahun 2016.
3. Mendekatkan komunikasi antara Indonesia Power dengan pelanggan.
4. Indonesia Power mendapatkan informasi terupdate terkait Protap dan informasi *case* yang selama ini pernah terjadi dalam *dispatching* pembangkit sehingga dapat menjadi referensi perbaikan unit pembangkit di lapangan.
5. *Surveyor Independent* dapat memberikan hasil penilaian yang mandiri dan tanpa campur tangan pihak manapun.
6. Indonesia Power mendapatkan hasil survei untuk dapat ditindaklanjuti di tahun mendatang.
7. Indonesia Power mendapatkan informasi terkait suara pelanggan secara langsung, yang dapat digunakan untuk perbaikan dalam hubungan dengan pelanggan.
8. Indonesia Power mendapatkan hasil survei baik secara kuantitatif dan kualitatif atas penilaian pelanggan.
9. Hasil Survei digunakan sebagai gambaran atas performansi unit pembangkit di mata pelanggan dan dipakai untuk perbaikan ditahun mendatang.
10. Indonesia Power mendapatkan referensi sebagai *supplement* agenda perbaikan di tahun mendatang.

Impact on the Company's Activities toward Customers

In general, activities conducted by Indonesia Power regarding Customers throughout 2016 have provided positive impacts for the Company, among them are:

1. Customer could view Indonesia Power's commitment in following up on customer's feedback received through the result of customer survey in 2015.
2. Indonesia Power, specifically each generating unit, holds an annual plan in relation with customer, so that improvement to be achieved in 2016 could easily be mapped out.
3. Improving communication between Indonesia Power and customer.
4. Indonesia Power obtained the latest information regarding Standard Operating Procedure and information on cases that have occurred over generators' dispatching so that it can be utilized as reference for generating unit's improvement on the field.
5. Independent surveyor could provide an independent and impartial evaluation without interference from any parties.
6. Indonesia Power obtained survey's result to be followed up in the upcoming years.
7. Indonesia Power obtained information regarding direct customer's feedback, that can be utilized for improvement in maintaining good relationship with customer.
8. Indonesia Power obtained survey's result over customer's evaluation, both quantitatively and qualitatively.
9. The result of survey illustrates generation unit's performance in the customer's eye and used as reference for improvement in the upcoming years.
10. Indonesia Power has gained reference as agenda supplement for improvement in the upcoming years.

Daya Terpasang per Jenis Pembangkit Tahun 2005-2009
Installed Capacity per Power Plant Type of Year 2005-2009
Indonesia Power

LAPORAN KEUANGAN

FINANCIAL REPORT

PT INDONESIA POWER
DAN ENTITAS ANAK*/AND SUBSIDIARIES*

Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2016 dan 2015

Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2016 and 2015

RSM

Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan

Nomor/*Number* : R/231.AGA/sat.1/2017

Laporan Auditor Independen/
Independent Auditor's Report

Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi/
The Shareholders, Board of Commissioners, and Directors

PT Indonesia Power

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT Indonesia Power ("Perusahaan") dan entitas anaknya terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2016, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

We have audited the accompanying consolidated financial statements of PT Indonesia Power ("the Company") and its subsidiaries, which comprise the consolidated statement of financial position as of December 31, 2016, and the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income, statement of changes in equity, and statement of cash flows for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan konsolidasian

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian ini sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Management's responsibility for the consolidated financial statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of these consolidated financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of consolidated financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan konsolidasian ini berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian bebas dari kesalahan penyajian material.

Auditors' responsibility

Our responsibility is to express an opinion on the consolidated financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements are free from material misstatement.

THE POWER OF BEING UNDERSTOOD
AUDIT | TAX | CONSULTING

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan konsolidasian. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan konsolidasian, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the consolidated financial statements. The procedures selected depend on the auditors' judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the consolidated financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the consolidated financial statements.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Indonesia Power dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2016, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Opinion

In our opinion, the accompanying consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of PT Indonesia Power and its subsidiaries as of December 31, 2016, and their consolidated financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Hal lain

Laporan konsolidasian Perusahaan dan entitas anaknya pada tanggal 31 Desember 2015 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut diaudit oleh auditor independen lain yang menyatakan opini tanpa modifikasian atas laporan keuangan konsolidasian tersebut pada tanggal 14 April 2016.

Other matter

The consolidated financial statements of the Company and its subsidiaries as of December 31, 2015 and for the year then ended were audited by other independent auditors who expressed an unmodified opinion on those consolidated financial statements on April 14, 2016.

Sebagai bagian dari audit kami atas laporan keuangan konsolidasian Perusahaan tanggal 31 Desember 2016 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, kami juga mengaudit penyesuaian yang dijelaskan pada Catatan 36 atas laporan keuangan konsolidasian terlampir yang diterapkan untuk menyajikan kembali laporan keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2015 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. Menurut opini kami, penyesuaian tersebut sudah tepat dan telah diterapkan dengan tepat. Kami tidak ditugasi untuk mengaudit, mereviu, atau

As part of our audit of the Company's consolidated financial statements as of December 31, 2016 and for the year then ended, we also audited the adjustments as described in Note 36 to the accompanying consolidated financial statements that were applied to amend the consolidated financial statements as of December 31, 2015 and for the year then ended. In our opinion, such adjustments are appropriate and have been properly applied. We were not engaged to audit, review, or apply any procedures to the consolidated financial statements as of December 31, 2015 and for the

menerapkan prosedur apapun atas laporan Keuangan tanggal 31 Desember 2015 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut selain yang berkaitan dengan penyesuaian tersebut dan, oleh karena itu, kami tidak menyatakan suatu opini maupun bentuk asurans lainnya atas laporan keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2015 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut secara keseluruhan.

year then ended of the Company other than with respect to the adjustments and, accordingly, we do not express an opinion or any other form of assurance on the consolidated financial statements as of December 31, 2015 and for the year then ended taken as a whole.

Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan

Saptoto Agustomo
Nomor Izin Akuntan Publik: AP. 0499/
Public Accountant License Number: AP. 0499

Jakarta, 24 Maret / *March 24*, 2017

PT INDONESIA POWER
DAN ENTITAS ANAK/*AND SUBSIDIARIES*

Daftar Isi	**Halaman/*Page***	***Table of Contents***
Surat Pernyataan Direksi		***Directors' Statement Letter***
Laporan Auditor Independen		***Independent Auditor's Report***
Laporan Keuangan Konsolidasian Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016 dan 2015		***Consolidated Financial Statements For the Years Ended December 31, 2016 and 2015***
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian	1	*Consolidated Statements of Financial Position*
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian	3	*Consolidated Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income*
Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian	5	*Consolidated Statements of Changes in Equity*
Laporan Arus Kas Konsolidasian	6	*Consolidated Statements of Cash Flows*
Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian	7	*Notes to the Consolidated Financial Statements*

SURAT PERNYATAAN DIREKSI TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2016 DAN 2015 DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2016 DAN 2015

DIRECTOR'S STATEMENT LETTER RELATING TO THE RESPOSIBILITY ON THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS AS OF DECEMBER 31, 2016 AND 2015 AND FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2016 AND 2015

Kami yang bertandatangan dibawah ini/ *We, the undersigned:*

1.	Nama/ *Name*	Sripeni Inten Cahyani
	Alamat kantor/ *Office address*	Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 18 Jakarta Selatan
	Alamat Domisili sesuai KTP atau kartu identitas lain/ *Domicile as stated in ID Card*	Jl. Pertengahan RT.013/ RW.007 Jakarta Timur
	Nomor telepon/*Phone number*	08118677567
	Jabatan/ *Position*	Direktur Utama/ *President Director*
2.	Nama/ *Name*	Hudiono
	Alamat kantor/ *Office address*	Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 18 Jakarta Selatan
	Alamat Domisili sesuai KTP atau kartu identitas lain/ *Domicile as stated in ID Card*	Jl. Tubagus Ismail V No 16/157D, Kec.Coblong, Bandung
	Nomor telepon/*Phone number*	0811245899
	Jabatan/ *Position*	Direktur Keuangan/ *Finance Director*

menyatakan bahwa:

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Konsolidasian;
2. Laporan Keuangan Konsolidasian telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
3. a. Semua informasi dalam Laporan Keuangan Konsolidasian telah dimuat secara lengkap dan benar;
   b. Laporan Keuangan Konsolidasian tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern Perusahaan dan entitas anak

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

state that:

1. *We are responsible for the preparation and presentation of the Consolidated Financial Statements;*
2. *The Consolidated Financial Statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards;*
3. a. *All information contained in the Consolidated Financial statements is complete and correct*
   b. *The Consolidated Financial Statements do not contain misleading material information or facts, and do not omit material information or facts.*
4. *We are responsible for the internal control system of the Company and its subsidiaries*

The statement letter is made truthfully.

Jakarta, 24 Maret 2017/ *March 24, 2017*

Sripeni Inten Cahyani
Direktur Utama/
President Director

Hudiono
Direktur Keuangan/
Finance Director

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Desember 2016 dan 2015
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
December 31, 2016 and 2015
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	2016 Rp	2015 Rp	
ASET				***ASSETS***
ASET TIDAK LANCAR				***NON-CURRENT ASSETS***
Aset tetap	6	193.520.890	196.745.124	*Property, plant and equipment*
Investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama	7	267.047	203.696	*Investments in associate and joint ventures*
Aset pajak tangguhan	27	1.212	1.088.283	*Deferred tax assets*
Piutang pihak berelasi	8	481.336	395.387	*Receivable from related parties*
Piutang lain-lain	12	34.116	30.631	*Other receivables*
Biaya dibayar dimuka dan uang muka	15	17.366	20.368	*Prepaid expenses and advances*
Aset tidak lancar lain	9	533.619	110.938	*Other non-current assets*
Jumlah Aset Tidak Lancar		**194.855.586**	**198.594.427**	***Total Non-current Assets***
ASET LANCAR				***CURRENT ASSETS***
Kas dan setara kas	10	1.500.820	896.378	*Cash and cash equivalents*
Piutang usaha	11			*Trade receivables*
Pihak berelasi		21.615.875	24.442.578	*Related parties*
Pihak ketiga		50.766	51.114	*Third parties*
Piutang lain-lain	12	12.025	13.091	*Other receivables*
Persediaan	13	1.963.398	2.203.016	*Inventories*
Pajak dibayar dimuka	14	660.545	166.710	*Prepaid taxes*
Biaya dibayar dimuka dan uang muka	15	186.875	269.563	*Prepaid expenses and advances*
Piutang pihak berelasi	8	42.134	83.371	*Receivables from related parties*
Jumlah Aset Lancar		**26.032.438**	**28.125.821**	***Total Current Assets***
JUMLAH ASET		**220.888.024**	**226.720.248**	***TOTAL ASSETS***

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
31 Desember 2016 dan 2015
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

CONSOLIDATE STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION (Continued)
December 31, 2016 and 2015
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	2016 Rp	2015 Rp	
EKUITAS DAN LIABILITAS				***EQUITY AND LIABILITIES***
EKUITAS				***EQUITY***
Modal saham - nilai nominal Rp500 (nilai penuh) per saham Modal dasar - 20.000.000.000 saham Modal ditempatkan dan disetor penuh 5.215.647.600 saham	16	2.607.824	2.607.824	*Capital stock - par value of Rp500 (full amount) per share Authorized - 20,000,000,000 shares Subscribed and fully paid - up 5,215,647,600 shares*
Tambahan modal disetor	17	5.513.843	5.503.726	*Additional paid-in capital*
Saldo laba				*Retained earnings*
Ditentukan penggunaannya		2.122.213	2.122.213	*Appropriated*
Tidak ditentukan penggunaaannya		36.990.310	38.313.162	*Unappropriated*
Penghasilan komprehensif lain		165.944.572	166.166.282	*Other comprehensive income*
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik Entitas induk		213.178.762	214.713.207	*Equity attributable to owners of the Parent*
Kepentingan non pengendali		43.780	43.064	*Non-controlling interests*
JUMLAH EKUITAS		**213.222.542**	**214.756.271**	***TOTAL EQUITY***
LIABILITAS JANGKA PANJANG				***NON-CURRENT LIABILITIES***
Liabilitas pajak tangguhan	27	413.167	30.389	*Deferred tax liabilities*
Utang jangka panjang - setelah dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun				*Long-term liabilities net of current portion*
Utang sewa pembiayaan	19	144.949	256.731	*Lease liabilities*
Utang pihak berelasi		--	2.717	*Payable to related parties*
Liabilitas imbalan kerja	30	2.552.919	2.467.761	*Employee benefits liabilities*
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang		**3.111.035**	**2.757.598**	***Total Non-current Liabilities***
LIABILITAS JANGKA PENDEK				***CURRENT LIABILITIES***
Utang usaha	18			*Trade payables*
Pihak berelasi		955.413	1.225.421	*Related parties*
Pihak ketiga		2.380.734	1.873.430	*Third parties*
Utang pajak	20	251.758	5.306.516	*Taxes payable*
Biaya masih harus dibayar		555.569	425.995	*Accrued expenses*
Utang jangka panjang jatuh tempo dalam satu tahun				*Current maturities of long-term liabilities*
Utang sewa pembiayaan	19	106.991	95.377	*Lease liabilities*
Utang pihak berelasi		37.796	65.074	*Payable to related parties*
Liabilitas imbalan kerja	30	262.364	206.131	*Employee benefits liabilities*
Utang lain-lain		3.822	8.435	*Other payables*
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek		**4.554.447**	**9.206.379**	***Total Current Liabilities***
JUMLAH LIABILITAS		**7.665.482**	**11.963.977**	***TOTAL LIABILITIES***
JUMLAH EKUITAS DAN LIABILITAS		**220.888.024**	**226.720.248**	***TOTAL EQUITY AND LIABILITIES***

PT INDONESIA POWER
DAN ENTITAS ANAK/*AND SUBSIDIARIES*

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
31 Desember 2016 dan 2015
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

CONSOLIDATED STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
For the Years Ended
December 31, 2016 and 2015
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	2016 Rp	2015 Rp	
PENDAPATAN USAHA				***REVENUES***
Penjualan tenaga listrik	21	34.504.119	30.680.909	*Sale of electricity*
Pendapatan jasa	22	2.201.835	1.339.277	*Services*
Jumlah Pendapatan Usaha		**36.705.954**	**32.020.186**	*Total Revenues*
BEBAN USAHA				***OPERATING EXPENSES***
Bahan bakar dan pelumas	23	21.987.360	22.431.963	*Fuel and lubricants*
Penyusutan	6	4.807.373	2.789.803	*Depreciation*
Pemeliharaan	24	3.687.470	2.441.127	*Maintenance*
Kepegawaian	25	1.741.670	1.760.602	*Personnel*
Sewa	26	32.789	113.865	*Lease*
Lain-lain		353.368	358.301	*Others*
Jumlah Beban Usaha		32.610.030	29.895.661	*Total Operating Expenses*
LABA USAHA		**4.095.924**	**2.124.525**	***OPERATING INCOME***
Penghasilan keuangan		56.329	31.383	*Financial income*
Keuntungan kurs mata uang asing - bersih		77.071	5.509	*Gain on foreign exchange - net*
Beban keuangan		(42.063)	(54.285)	*Financial cost*
Lain-lain - bersih		(91.508)	(17.589)	*Others - net*
LABA SEBELUM PAJAK		**4.095.753**	**2.089.543**	***INCOME BEFORE TAX***
MANFAAT (BEBAN) PAJAK	27	**(1.209.049)**	**2.582.979**	***TAX BENEFIT (EXPENSE)***
LABA TAHUN BERJALAN		**2.886.704**	**4.672.522**	***INCOME FOR THE YEAR***

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2016 dan 2015
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

CONSOLIDATED STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME (Continued)
For the Years Ended December 31, 2016 and 2015
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	2016 Rp	2015 Rp	
LABA TAHUN BERJALAN		**2.886.704**	**4.672.522**	***INCOME FOR THE YEAR***
Penghasilan komprehensif lain tahun berjalan				***Other comprehensive income for the year***
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi				*Items that will not be reclassified to profit or loss*
Surplus revaluasi aset tetap		--	171.390.469	*Property, plant and equipment revaluation surplus*
Pengukuran kembali atas program imbalan pasti		28.887	620.397	*Remeasurement on defined benefit plans*
Beban pajak terkait		(250.597)	(4.996.361)	*Related income tax expense*
Penghasilan (beban) komprehensif lain tahun berjalan setelah pajak		**(221.710)**	**167.014.505**	*Other comprehensive income (expenses) for the year after tax*
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		**2.664.994**	**171.687.027**	***TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR***
Laba tahun berjalan diatribusikan kepada :				*Income for the year attributable to :*
Pemilik entitas induk		2.885.017	4.668.403	*Owners of the parent*
Kepentingan non - pengendali		1.687	4.119	*Non-controlling interests*
Jumlah		**2.886.704**	**4.672.522**	***Total***
Total penghasilan komprehensif tahun berjalan diatribusikan kepada:				*Total comprehensive income for the year attributable to:*
Pemilik entitas induk		2.663.307	171.682.908	*Owners of the parent*
Kepentingan non-pengendali		1.687	4.119	*Non-controlling interests*
Jumlah		**2.664.994**	**171.687.027**	***Total***
LABA PER SAHAM DASAR (Dalam Rupiah penuh)	28	**553**	**895**	*BASIC EARNINGS PER SHARE (In Rupiah full amount)*

PT INDONESIA POWER DAN ENTITAS ANAK/*AND SUBSIDIARIES*

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
31 Desember 2016 dan 2015
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY
For the Years Ended
December 31, 2016 and 2015
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	Modal ditempatkan dan disetor penuh/ *Subscribed and paid-up capital stock* Rp	Tambahan modal disetor/ *Additional paid-in capital* Rp	Saldo laba/ *Retained earnings*		Penghasilan komprehensif lain/ *Other comprehensive income*		Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik Perusahaan/ *Equity attributable to owners of the Company* Rp	Kepentingan non-pengendali/ *Non-controlling interests* Rp	Jumlah ekuitas/ *Total equity* Rp	
				Ditentukan penggunaannya/ *Appropriated* Rp	Tidak ditentukan penggunaannya/ *Unappropriated* Rp	Surplus revaluasi aset tetap/ *Property, plant and equipment revaluation surplus* Rp	Pengukuran kembali atas program imbalan pasti/ *Remeasurement on defined benefit plans* Rp				
Saldo per 1 Januari 2015		**2.607.824**	**5.503.726**	**2.122.213**	**35.112.730**	**--**	**(848.223)**	**44.498.270**	**39.945**	**44.538.215**	***Balance as of January 1, 2015***
Dividen	29	--	--	--	(1.467.971)	--	--	(1.467.971)	(1.000)	(1.468.971)	*Dividends*
Jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan		--	--	--	4.668.403	166.549.207	465.298	171.682.908	4.119	171.687.027	*Total comprehensive income for the year*
Saldo per 31 Desember 2015		**2.607.824**	**5.503.726**	**2.122.213**	**38.313.162**	**166.549.207**	**(382.925)**	**214.713.207**	**43.064**	**214.756.271**	***Balance as of December 31, 2015***
Dividen	29	--	--	--	(4.207.869)	--	--	(4.207.869)	(1.098)	(4.208.967)	*Dividends*
Aset pengampunan pajak	17	--	10.117	--	--	--	--	10.117	127	10.244	*Tax amnesty assets*
Jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan		--	--	--	2.885.017	(243.375)	21.665	2.663.307	1.687	2.664.994	*Total comprehensive income for the year*
Saldo per 31 Desember 2016		**2.607.824**	**5.513.843**	**2.122.213**	**36.990.310**	**166.305.832**	**(361.260)**	**213.178.762**	**43.780**	**213.222.542**	***Balance as of December 31, 2016***

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements as a whole

LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
31 Desember 2016 dan 2015
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS
For the Years Ended
December 31, 2016 and 2015
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	2016 Rp	2015 Rp	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			***CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES***
Penerimaan kas dari pelanggan	23.003.563	20.466.429	*Cash receipts from customers*
Pembayaran kas kepada pemasok dan karyawan	(19.879.618)	(17.956.628)	*Cash paid to suppliers and employees*
Kas diperoleh dari aktivitas operasi	3.123.945	2.509.801	*Cash provided by operations*
Penerimaan bunga	56.329	--	*Interest received*
Pembayaran pengampunan pajak	(211)	--	*Payment of tax amnesty*
Pembayaran pajak penghasilan	(432.109)	(658.770)	*Income tax paid*
Kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi	**2.747.954**	**1.851.031**	***Net cash provided by operating activities***
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			***CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES***
Perolehan aset tetap	(1.965.818)	(1.357.788)	*Acquisition of property, plant and equipment*
Perolehan investasi pada entitas asosiasi	(42.355)	--	*Acquisition of investments in associates*
Penerimaan kembali dari pinjaman kepada pihak berelasi	40.424	31.383	*Receipts of payments from loan to related parties*
Pembayaran kembali atas pinjaman kepada pihak berelasi	(90.174)	--	*Repayments of loans from related parties*
Perolehan dividen dari entitas asosiasi	--	2.327	*Dividend received from associate*
Kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi	**(2.057.923)**	**(1.324.078)**	***Net cash used in investing activities***
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			***CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES***
Pembayaran utang sewa pembiayaan	(83.950)	(76.855)	*Payment of lease liabilities*
Pembayaran dividen oleh entitas anak kepada kepentingan non pengendali	(1.098)	(1.000)	*Payment of dividend by subsidiaries to non controlling interest*
Kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan	**(85.048)**	**(77.855)**	***Net cash used in financing activities***
KENAIKAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS	604.983	449.098	***NET INCREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS***
Pengaruh perubahan kurs mata uang asing	(541)	1.663	*Effect of changes in foreign currency*
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	896.378	445.617	***CASH AND CASH EQUIVALENTS AT BEGINNING OF YEAR***
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	**1.500.820**	**896.378**	***CASH AND CASH EQUIVALENTS AT END OF YEAR***

Tambahan informasi aktivitas yang tidak mempengaruhi arus kas disajikan dalam Catatan 35

Additional information on activities that does not effect the activity of cash flows are presented in Note 35

1. Umum

a. Pendirian dan Informasi Umum

PT Indonesia Power ("Perusahaan") didirikan di Jakarta berdasarkan akta notaris No. 15 tanggal 3 Oktober 1995 dari Notaris Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H. Akta pendirian ini disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusannya No. C2-12496-HT.01.01.Th.95 tanggal 3 Oktober 1995 serta diumumkan dalam Berita Negara No. 9249 tanggal 7 November 1995, Tambahan No. 89.

Anggaran Dasar Perusahaan mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan akta No. 88 tanggal 12 Agustus 2008 dari Imas Fatimah S.H., notaris di Jakarta, dalam rangka penyesuaian dengan Undang-undang No. 40 tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas. Akta perubahan ini telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No. AHU-55306.AH.01.02 Th 2008 tanggal 25 Agustus 2008 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 32 tanggal 21 April 2009, Tambahan No. 11089.

Perusahaan berdomisili di Jakarta dengan kantor atau satuan-satuan usaha yang berlokasi di Jawa dan Bali. Kantor pusat Perusahaan beralamat di Gedung PLN Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 18, Jakarta.

Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan Perusahaan adalah untuk menyelenggarakan usaha ketenagalistrikan berdasarkan prinsip industri dan niaga yang sehat yang mencakup aktivitas-aktivitas sebagai berikut:

a) Penyediaan tenaga listrik yang ekonomis, bermutu tinggi dan dengan keandalan yang baik.
b) Usaha yang berkaitan dengan penyediaan tenaga listrik yang meliputi:
   - Jasa survey, investigasi, desain, konstruksi/ pemasangan instalasi, operasi dan pemeliharaan, persewaan peralatan pembangkitan, serta pendidikan dan pelatihan.

1. General

a. Establishment and General Information

PT Indonesia Power (the "Company") was established in Jakarta based on the notarial deed No. 15 dated October 3, 1995 of Mrs. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., The deed of establisment was approved by the Minister of Justice of the Republic of Indonesia in his decision letter No. C2-12496-HT.01.01.Th.95 dated October 3, 1995, and was published in State Gazette of the Republic of Indonesia No. 9249 dated November 7, 1995, Supplement No.89.

The Company's articles of association have been amended several times, most recently by the notarial deed No. 88 dated August 12, 2008 of Imas Fatimah S.H., notary in Jakarta to conform with Law No. 40 year 2007 on Limited Liability Companies. This change was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in his decision letter No. AHU-55306.AH.01.02 Th 2008 dated August 25, 2008, and was published in State Gazette of the Republic of Indonesia No. 32 dated April 21, 2009, Supplement No. 11089.

The Company is domiciled in Jakarta, with offices or business units located in Java and Bali. The Company's head office is located in PLN building Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 18, Jakarta.

In accordance with article 3 of the Company's articles of association, the scope of its activities is to run electricity business based on sound industrial and trade principles which include the following activities:

a) Supply electricity which are economical, high quality and reliable.

b) Business related to supply of electricity includes:
   - *Survey services, investigation, design, construction/ installation, operation and maintenance, rental of generation equipment, and training and education.*

- Produksi, perbaikan dan perdagangan peralatan tenaga listrik.
- Produksi, pengolahan, pengangkutan dan perdagangan batu bara, gambut, biomas dan gas alam.
- Produksi dan pengusahaan energi panas bumi.
- Kogenerasi.

- *Production, repairs, and trading of electricity equipment.*
- *Production, preparation, transportation, including trading of coal, peat, biomass and natural gas.*
- *Production and generation of geothermal energy.*
- *Cogeneration.*

b. Dewan Komisaris dan Dewan Direksi

Susunan Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

b. Board of Commissioners and Board of Directors

The composition of the Company's Board of Commissioners was as follows:

	2016*)	
Komisaris Utama	Bagus Setiawan	*President Commissioner*
Komisaris	Ahmad Yani	*Commissioner*
Komisaris	Munir Ahmad	*Commissioner*
Komisaris	Tri Setyo Nugroho	*Commissioner*
Komisaris	Agus Hernawan	*Commissioner*
	2015	
Komisaris Utama	I.G.A Ngurah Adnyana	*President Commissioner*
Komisaris	Aries Muftie	*Commissioner*
Komisaris	Luizah	*Commissioner*

Susunan Dewan Direksi Perusahaan adalah sebagai berikut:

The composition of the Company's Board of Directors was as follows:

	2016)**	
Direktur Utama	Sripeni Inten Cahyani	*President Director*
Direktur Operasional I	Eri Prabowo	*Operational Director I*
Direktur Operasional II	Antonius Resep Tyas Artono	*Operational Director II*
Direktur Sumber Daya Manusia dan Administrasi	Roikhan	*Human Resource and Administration Director*
Direktur Pengembangan dan Niaga	Adi Suprijono	*Development and Commercial Director*
Direktur Keuangan	Hudiono	*Financial Director*
	2015	
Pejabat Pelaksana Tugas (''PLT'') Direktur Utama Perseroan	Antonius Resep Tyas Artono	*Acting of the Company President Director*
Direktur Operasional	Eri Prabowo	*Operational Director*
Direktur Sumber Daya Manusia dan Administrasi	Roikhan	*Human Resource and Administration Director*
Direktur Keuangan	Sripeni Inten Cahyani	*Financial Director*

*) Pada tanggal 25 Agustus 2016, Perusahaan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") Sirkuler, yang menyetujui perubahan susunan Dewan Komisaris.

**) Berdasarkan akta pernyataan keputusan Rapat Pemegang Saham No.53 Pada tanggal 28 Juli 2016, yang telah diverifikasi oleh notaris Lenny Janis Ishak, S.H., yang mana pemegang saham menyetujui perubahan Dewan Direksi.

*) *On August 25, 2016, the Company held Shareholders Meeting Circuler, which agreed to change the composition of Board of Commisionnaire.*

**) *Based on Notarial Deed No.53 dated July 28, 2016 , which has been verified by notary Lenny Janis Ishak, S.H., in which shareholders have agreed to change the composition of Board of Directors.*

Pada tanggal 31 Desember 2016 and 2015, Perusahaan dan entitas anak memiliki masing-masing 5.240 dan 4.437 karyawan tetap (tidak diaudit).

The Company and its subsidiaries has a total of 5,240 and 4,437 permanent employees as of December 31, 2016 and 2015, respectively (unaudited).

2. Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") Baru dan Revisi, serta Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK")

a. PSAK Baru dan Revisi, serta ISAK yang berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2016

Pengesahan amandemen dan penyesuaian atas PSAK dan ISAK yang telah diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia ("DSAK-IAI") di tahun 2015 dan 2016, berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2016, adalah sebagai berikut:

Standar dan implementasi standar baru

- PSAK 70: Akuntansi Aset dan Liabilitas Pengampunan Pajak
- ISAK 30: Pungutan

Penyesuaian 2015

- PSAK 5: Segmen Operasi
- PSAK 7: Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi
- PSAK 13: Properti Investasi
- PSAK 16: Aset Tetap
- PSAK 19: Aset Takberwujud
- PSAK 22: Kombinasi Bisnis
- PSAK 25:Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan
- PSAK 53: Pembayaran Berbasis Saham
- PSAK 68: Pengukuran Nilai Wajar
- PSAK 110: Akuntansi Sukuk

Amandemen

- PSAK 4: Laporan Keuangan Tersendiri tentang Metode Ekuitas dalam Laporan Keuangan Tersendiri
- PSAK 15: Investasi Pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama tentang Entitas Investasi: Penerapan Pengecualian Konsolidasi
- PSAK 16: Aset Tetap tentang Klarifikasi Metode yang Diterima untuk Penyusutan dan Amortisasi

2. New and Revised Statements of Financial Accounting Standard ("SFAS") and Interpretation of Financial Accounting Standards ("ISFAS")

a. New and Revised SFAS and ISFAS effective for the year beginning on or after January 1, 2016

Ratification of amandements and improvements of SFAS and ISFAS issued by the Financial Accounting Standard Board ("DSAK-IAI") in 2015 and 2016, effective for the year beginning on or after January 1, 2016, are as follows:

New standards and implementation of standards

- *SFAS 70: Accounting for Tax Amnesty Assets and Liabilities*
- *ISFAS 30: Levies*

Improvement 2015

- *SFAS 5: Operating Segments*
- *SFAS 7: Related Party Disclosures*
- *SFAS 13: Investment Property*
- *SFAS 16: Property, Plant and Equipment*
- *SFAS 19: Intangible Asset*
- *SFAS 22: Business Combination*
- *SFAS 25: Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors*
- *SFAS 53: Share-based Payments*
- *SFAS 68: Fair Value Measurement*
- *SFAS 110: Accounting for Sukuk*

Amendments

- *SFAS 4: Separate Financial Statements regarding Equity Method in Separate Financial Statements*
- *SFAS 15: Investment in Associates and Joint Venture regarding Investment Entities: Applying the Consolidation Exception*
- *SFAS 16: Property, Plant and Equipment regarding Clarification of Acceptable Methods of Depreciation and Amortization*

- PSAK 19: Aset Takberwujud tentang Klarifikasi Metode yang Diterima untuk Penyusutan dan Amortisasi
- PSAK 24: Imbalan Kerja tentang Program Imbalan Pasti: Iuran Pekerja

- PSAK 65: Laporan Keuangan Konsolidasian tentang Entitas Investasi: Penerapan Pengecualian Konsolidasi
- PSAK 66: Pengaturan Bersama tentang Akuntansi Akuisisi Kepentingan dalam Operasi Bersama
- PSAK 67: Pengungkapan Kepentingan Dalam Entitas Lain tentang Entitas Investasi: Penerapan Pengecualian Konsolidasi

- *SFAS 19: Intangible Asset regarding Clarification of Acceptable Methods of Depreciation and Amortization*
- *SFAS 24: Employee Benefits regarding Defined Benefit Plans: Employee Contributions*
- *SFAS 65: Consolidated Financial Statements about Investment Entities: Applying the Consolidation Exception*
- *SFAS 66: Joint Arrangements regarding Accounting for Acquisitions of Interests in Joint Operation*
- *SFAS 67: Disclosures of Interest in Other Entities regarding Investment Entities: Applying the Consolidation Exception*

b. PSAK Baru dan Revisi, serta ISAK yang berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2017 dan 2018

Amandemen standar dan interpretasi berikut ini efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2017, dengan penerapan dini diperkenankan, yaitu:

- PSAK 1 (Amandemen 2015): Penyajian Laporan Keuangan
- PSAK 3 (Penyesuaian 2016): Laporan Keuangan Interim
- PSAK 24 (Penyesuaian 2016): Imbalan Kerja.
- PSAK 58 (Penyesuaian 2016): Aset Tidak Lancar yang Dimiliki Untuk Dijual dan Operasi yang Dihentikan
- PSAK 60 (Penyesuaian 2016): Instrumen Keuangan: Pengungkapan
- ISAK 31 (2015): Interpretasi atas Ruang Lingkup PSAK 13: Properti Investasi
- ISAK 32 (2017): Definisi dan Hierarki Standar Akuntansi Keuangan

Amandemen standar dan interpretasi berikut ini efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2018, dengan penerapan dini diperkenankan, yaitu:

- PSAK 69 (2015): Agrikultur
- PSAK 16 (Amandemen 2015): Aset Tetap

- PSAK 2 (Amandemen 2016): Laporan Arus Kas
- PSAK 46 (Amandemen 2016): Pajak Penghasilan

b. New and Revised SFAS and ISFAS effective for the year beginning on or after January 1, 2017 and 2018

The following amendments and interpretations of standard will be effective for the year beginning on or after January 1, 2017, for which early adoption is permitted:

- *SFAS 1 (Amendment 2015) : Presentations of Financial Statements*
- *SFAS 3 (Improvement 2016) : Interim Financial Reporting*
- *SFAS 24 (Improvement 2016): Employee Benefits*
- *SFAS 58 (Improvement 2016): Non-Current Asset Held for Sale and Discontinued Operation*
- *SFAS 60 (improvement 2016): Financial Instruments: Disclosure*
- *ISFAS 31 (2015): Interpretation on Scope of SFAS 13: Investment Property*
- *ISFAS 32 (2017): Definition and Hierarchy of Financial Accounting Standards*

The following amendments and interpretations of standard will be effective for the year beginning on or after January 1, 2018, for which early adoption is permitted:

- *SFAS 69 (2015): Agriculture*
- *SFAS 16 (Amendment 2015): Property, Plant and Equipment*
- *SFAS 2 (Amendment 2016): Statement of Cash Flows*
- *SFAS 46 (Amendment 2016): Income Tax*

Pada saat penerbitan laporan keuangan konsolidasian, Perusahaan dan entitas anak masih mempelajari dampak yang mungkin timbul dari penerapan standar baru, amandemen standar, dan interpretasi atas standar serta pengaruhnya pada laporan keuangan konsolidasian Perusahaan dan entitas anak.

As of the authorization date of these consolidated financial statements, the Company and its subsidiaries are still evaluating the potential impact of these new standards, amendments, and interpretations of standards to the Company and its subsidiaries' consolidated financial statements.

3. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Penting / *3. Summary of Significant Accounting Policies*

a. Kepatuhan Terhadap Standar Akuntansi Keuangan ("SAK")
Laporan keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, yang meliputi PSAK dan ISAK yang diterbitkan oleh DSAK-IAI.

a. Compliance with the Financial Accounting Standards ("FAS")
The financial statements were prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards which include SFAS and ISFAS issued by the DSAK – IAI.

b. Dasar Penyusunan
Laporan keuangan konsolidasian telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasian, kecuali untuk laporan arus kas konsolidasian adalah dasar akrual. Mata uang penyajian yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan konsolidasian adalah mata uang Rupiah ("Rp"), yang juga merupakan mata uang fungsional Perusahaan dan entitas anak. Laporan keuangan konsolidasian disusun berdasarkan nilai historis, kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut.

Laporan arus kas konsolidasian disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

b. Basis of Preparation
The consolidated financial statements have been prepared in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

The consolidated financial statements, except for the consolidated statements of cash flows, are prepared on the accrual basis of accounting. The presentation currency used in the preparation of the consolidated financial statements is the Indonesian Rupiah ("Rp"), which is also the functional currency of the Company and its subsidiaries. The measurement basis is the historical cost, except for certain accounts which are measured on the basis described in the related accounting policies.

The consolidated statements of cash flows are prepared using the direct method with classifications of cash flows into operating, investing and financing activities.

c. Dasar Konsolidasian
Laporan keuangan konsolidasian menggabungkan laporan keuangan Perusahaan dan entitas (termasuk entitas bertujuan khusus) yang dikendalikan oleh Perusahaan atau entitas anak. Pengendalian dianggap ada ketika Perusahaan memiliki hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan suatu entitas dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi imbal hasil tersebut melalui kekuasaannya atas entitas tersebut.

c. Basis of Consolidation
The consolidated financial statements incorporate the financial statements of the Company and entities (including special purpose entities) controlled by the Company or its subsidiaries. Control is achieved when the Company is exposed to, or has rights to, variable returns from its involvement with the entity and has the ability to affect those returns through its power over the entity.

Hasil entitas anak yang diakuisisi atau dijual selama periode berjalan termasuk dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian sejak tanggal efektif akuisisi dan sampai dengan tanggal efektif penjualan.

The results of subsidiaries acquired or disposed of during the period are included in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income from the effective date of acquisition or up to the effective date of disposal, as appropriate.

Jika diperlukan, penyesuaian dapat dilakukan terhadap laporan keuangan entitas anak agar kebijakan akuntansi yang digunakan sesuai dengan kebijakan akuntansi yang digunakan oleh Perusahaan.

When necessary, adjustments are made to the financial statements of the subsidiaries to bring the accounting policies used in line with those used by the Company.

Seluruh transaksi antar perusahaan, saldo, penghasilan dan beban dieliminasi pada saat konsolidasi.

All intra-group transactions, balances, income and expenses are eliminated on consolidation.

Perubahan dalam bagian kepemilikan Perusahaan dan entitas anak pada entitas anak yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian dicatat sebagai transaksi ekuitas. Nilai tercatat kepentingan Perusahaan dan entitas anak dan kepentingan non pengendali disesuaikan untuk mencerminkan perubahan bagian kepemilikannya atas entitas anak. Setiap perbedaan antara jumlah kepentingan non pengendali disesuaikan dan nilai wajar imbalan yang diberikan atau diterima diakui secara langsung dalam ekuitas dan diatribusikan pada pemilik Perusahaan.

Changes in the Company and its subsidiaries interests in subsidiaries that do not result in a loss of control are accounted for as equity transactions. The carrying amount of the Company and its subsidiaries' interest and the non-controlling interests are adjusted to reflect the changes in their relative interests in the subsidiaries. Any difference between the amount by which the non-controlling interests are adjusted and the fair value of the consideration paid or received is recognized directly in equity and attributed to the owners of the Company.

Jika Perusahaan kehilangan pengendalian atas entitas anak, maka Perusahaan:

(a) Menghentikan pengakuan aset (termasuk *goodwill*) dan liabilitas entitas anak pada jumlah tercatatnya ketika pengendalian hilang;
(b) Menghentikan pengakuan jumlah tercatat setiap kepentingan non pengendali pada entitas anak terdahulu ketika pengendalian hilang (termasuk setiap komponen penghasilan komprehensif lain yang diatribusikan pada kepentingan non pengendali);
(c) Mengakui nilai wajar pembayaran yang diterima, jika ada, dari transaksi, peristiwa, atau keadaan yang mengakibatkan hilangnya pengendalian;
(d) Mengakui sisa investasi pada entitas anak terdahulu pada nilai wajarnya pada tanggal hilangnya pengendalian;

If the Company loses control over the subsidiary, the Company:

(a) Derecognizes the assets (including goodwill) and liabilities of the subsidiary at their carrying amounts at the date when control ceases;
(b) Derecognizes the carrying amounts of any non-controlling interests in the former subsidiary at the date when control ceases (including any components of other comprehensive income attributable to them);
(c) Recognizes the fair value of the consideration received, if any, from the transaction, event or circumstance that resulted in the cessation of control;
(d) Recognizes any investment retained in the former subsidiary at its fair value at the date when control ceases;

(e) Mereklasifikasi ke laba rugi, atau mengalihkan secara langsung ke saldo laba jika disyaratkan oleh Standar Akuntansi Keuangan lain, jumlah yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain dalam kaitan dengan entitas anak;
(f) Mengakui perbedaan apapun yang dihasilkan sebagai keuntungan atau kerugian dalam laba rugi yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk.

(e) Reclassifies to profit or loss, or directly transfer to retained earnings if required by other Financial Accounting Standards, the amounts recognized in other comprehensive income in relation to the former subsidiary;
(f) Recognizes any resulting difference as a gain or loss attributable to the owners of the parent.

d. Kombinasi Bisnis

Kombinasi bisnis adalah suatu transaksi atau peristiwa lain dimana pihak pengakuisisi memperoleh pengendalian atas satu atau lebih bisnis. Kombinasi bisnis dicatat dengan menggunakan metode akuisisi. Imbalan yang dialihkan dalam suatu kombinasi bisnis diukur pada nilai wajar, yang dihitung sebagai hasil penjumlahan dari nilai wajar tanggal akuisisi atas seluruh aset yang dialihkan oleh Perusahaan dan entitas anak, liabilitas yang diakui oleh Perusahaan dan entitas anak kepada pemilik sebelumnya dari pihak yang diakuisisi dan kepentingan ekuitas yang diterbitkan oleh Perusahaan dan entitas anak dalam pertukaran pengendalian dari pihak yang diakuisisi. Biaya-biaya terkait akuisisi diakui di dalam laba rugi pada saat terjadinya.

Pada tanggal akuisisi, aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih diakui pada nilai wajar kecuali untuk aset dan liabilitas tertentu yang diukur sesuai dengan standar yang relevan.

Kepentingan non pengendali pada entitas anak diidentifikasi secara terpisah dan disajikan dalam ekuitas. Kepentingan non pengendali pemegang saham pada awalnya boleh diukur pada nilai wajar atau pada proporsi kepemilikan kepentingan non pengendali pada aset neto teridentifikasi dari pihak yang diakuisisi. Pilihan pengukuran dibuat pada saat akuisisi dengan dasar akuisisi. Setelah akuisisi, nilai tercatat kepentingan non pengendali adalah jumlah kepentingan non pengendali pada pengakuan awal ditambah dengan proporsi kepentingan non pengendali atas perubahan selanjutnya dalam ekuitas.

d. Business Combination

Business combination is a transaction or other events in which an acquirer obtains control of one or more businesses. Business combination are accounted for using the acquisition method. The consideration transferred in a business combination is measured at fair value, which is calculated as the sum of the acquisition-date fair values of the assets transferred by the Company and its subsidiaries, liabilities incurred by the Company and its subsidiaries to the former owners of the acquiree and the equity interests issued by the Company and its subsidiaries in exchange for control of the acquiree. Acquisition-related costs are recognized in profit or loss as incurred.

At the acquisition date, the identifiable assets acquired and the liabilities assumed are recognized at their fair value except for certain assets and liabilities that are measured in accordance with the relevant standards.

Non-controlling interests in subsidiaries are identified separately and presented within equity. The interest of non-controlling shareholders is initially measured either at fair value or at the non-controlling interests' proportionate share of fair value of the acquiree's identifiable net asset. The choice of measurement is made on an acquisition by acquisition basis. Subsequent to acquisition, the carrying amount of non-controlling interest is the amount of those interests at initial recognition plus non-controlling interests' share of subsequent changes in equity. Total comprehensive income is attributed to non-controlling

Seluruh laba rugi komprehensif diatribusikan pada kepentingan non pengendali bahkan jika hal ini mengakibatkan kepentingan non pengendali mempunyai saldo defisit.

interest even if this results in the non-controlling interests having a deficit balance.

Bila imbalan yang dialihkan oleh Perusahaan dan entitas anak dalam suatu kombinasi bisnis termasuk aset atau liabilitas yang berasal dari pengaturan imbalan kontinjen (*contingent consideration arrangement*), imbalan kontinjen tersebut diukur pada nilai wajar pada tanggal akuisisi dan termasuk sebagai bagian dari imbalan yang dialihkan dalam suatu kombinasi bisnis. Perubahan dalam nilai wajar atas imbalan kontinjen yang memenuhi syarat sebagai penyesuaian periode pengukuran disesuaikan secara retrospektif, dengan penyesuaian terkait terhadap *goodwill*. Penyesuaian periode pengukuran adalah penyesuaian yang berasal dari informasi tambahan yang diperoleh selama periode pengukuran (yang tidak melebihi satu tahun sejak tanggal akuisisi) tentang fakta-fakta dan kondisi yang ada pada tanggal akuisisi.

When the consideration transferred by the Company and its subsidiaries in a business combination includes assets or liabilities resulting from a contingent consideration arrangement, the contingent consideration is measured at its acquisition-date fair value and included as part of the consideration transferred in a business combination. Changes in the fair value of the contingent consideration that qualify as measurement period adjustments are adjusted retrospectively, with corresponding adjustments against goodwill. Measurement period adjustments are adjustments that arise from additional information obtained during the measurement period (which cannot exceed one year from the acquisition date) about facts and circumstances that existed at the acquisition date.

Perubahan selanjutnya dalam nilai wajar atas imbalan kontinjen yang tidak memenuhi syarat sebagai penyesuaian periode pengukuran tergantung pada bagaimana imbalan kontinjen tersebut diklasifikasikan. Imbalan kontinjen yang diklasifikasikan sebagai ekuitas tidak diukur kembali pada tanggal sesudah tanggal pelaporan dan penyelesaian selanjutnya dicatat dalam ekuitas. Imbalan kontinjen yang diklasifikasikan sebagai aset atau liabilitas diukur kembali setelah tanggal pelaporan sesuai dengan standar akuntansi yang relevan, dengan diakui keuntungan atau kerugian terkait dalam laba rugi atau dalam pendapatan komprehensif lain.

The subsequent accounting for changes in the fair value of the contingent consideration that do not qualify as measurement period adjustments depends on how the contingent consideration is classified. A contingent consideration that is classified as equity is not remeasured at subsequent reporting dates and its subsequent settlement is accounted for within equity. A contingent consideration that is classified as an asset or liability is remeasured subsequent to the reporting dates in accordance with the relevant accounting standards, as appropriate, with the corresponding gain or loss being recognized in profit or loss or in other comprehensive income.

Bila suatu kombinasi bisnis dilakukan secara bertahap, kepemilikan terdahulu Perusahaan dan entitas anak atas pihak terakuisisi diukur kembali ke nilai wajar pada tanggal akuisisi dan keuntungan atau kerugiannya, jika ada, diakui di dalam laba rugi. Jumlah yang berasal dari kepemilikan sebelum tanggal akuisisi yang sebelumnya telah diakui dalam pendapatan komprehensif lain direklasifikasi ke laba rugi

When a business combination is achieved in stages, the Company and its subsidiaries' previously held equity interest in the acquiree is remeasured to fair value at the acquisition date and the resulting gain or loss, if any, is recognized in profit or loss. Amounts arising from interests in the acquiree prior to the acquisition date that have previously been recognized in other comprehensive income are reclassified to

dimana perlakuan tersebut akan sesuai ketika kepemilikannya dilepas/ dijual.

Jika akuntansi awal untuk kombinasi bisnis belum selesai pada akhir periode pelaporan saat kombinasi terjadi, Perusahaan dan entitas anak melaporkan jumlah sementara untuk pos-pos yang proses akuntansinya belum selesai dalam laporan keuangannya. Selama periode pengukuran, pihak pengakuisisi menyesuaikan, aset atau liabilitas tambahan yang diakui, untuk mencerminkan informasi baru yang diperoleh tentang fakta dan keadaan yang ada pada tanggal akuisisi dan, jika diketahui, akan berdampak pada jumlah yang diakui pada tanggal tersebut.

profit or loss where such treatment would be appropriate when those interests were disposed of.

If the initial accounting for a business combination is incompleted by the end of the reporting period in which the combination occurs, the Company and its subsidiaries report provisional amounts for the items for which the accounting is incompleted. Those provisional amounts are adjusted during the measurement period, or additional assets or liabilities are recognized, to reflect new information obtained about facts and circumstances that existed as of the acquisition date that, if known, would have affected the amount recognized as of that date.

e. Penjabaran Mata Uang Asing

Pembukuan Perusahaan dan entitas anak, diselenggarakan dalam mata uang Rupiah, mata uang dari lingkungan ekonomi utama dimana entitas beroperasi (mata uang fungsionalnya). Transaksi-transaksi selama periode berjalan dalam mata uang asing dicatat dengan kurs yang berlaku pada saat terjadinya transaksi. Pada tanggal pelaporan, aset dan kewajiban moneter dalam mata uang asing disesuaikan untuk mencerminkan kurs yang berlaku pada tanggal tersebut. Keuntungan atau kerugian kurs yang timbul dikreditkan atau dibebankan dalam laporan laba rugi komprehensif, kecuali selisih kurs mata uang asing yang dikapitalisasi sebagai biaya pinjaman.

Pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, kurs konversi yang digunakan Perusahaan dan entitas anak sebagai berikut:

e. Foreign Currency Transactions

The accounts of the Company and its subsidiaries, are maintained in Indonesian Rupiah, the currency of the primary economic environment in which the entity operates (its functional currency). Transactions during the period involving foreign currencies are recorded at the rates of exchange prevailing at the time the transactions are made. At the reporting date, monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are adjusted to reflect the rates of exchange prevailing at that date. The resulting gains or losses are credited or charged to profit or loss, except those foreign exchange differences which are capitalized as borrowing costs.

The conversion rates used by the Company and its subsidiaries on December 31, 2016 and 2015 are as follows:

Mata uang/ *Currency*	2016 Kurs tengah/ *Middle rate* Rp *)	2015 Kurs tengah/ *Middle rate* Rp *)
JPY	115	115
US$	13.436	13.795
EUR	14.162	15.070
CHF	13.178	13.951

*) dalam jumlah penuh/ *in full amount*

f. Transaksi dengan Pihak-Pihak Berelasi

Pihak-pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan Perusahaan dan entitas anak (entitas pelapor):

a. Orang atau anggota keluarga dekatnya mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
   i. memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
   ii. memiliki pengaruh signifikan atas pelapor atau entitas pelapor; atau
   iii. merupakan personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk dari entitas pelapor.

b. Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
   i. Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak dan entitas anak berikutnya saling berelasi dengan entitas lain).
   ii. Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya).
   iii. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama.
   iv. Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga.
   v. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pascakerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor.
   vi. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a), atau

f. Transactions with Related Parties

A related party is a person or entity that is related to the Company and its subsidiaries (the reporting entity):

a. A person or a close member of that person's family is related to a reporting entity if that person:
   i. has control or joint control over the reporting entity;
   ii. has significant influence over the reporting entity; or
   iii. is a member of the key management personnel of the reporting entity or of a parent of the reporting entity.

b. An entity is related to a reporting entity if any of the following conditions apply:
   i. The entity and the reporting entity are members of the same group (which means that each parent, subsidiary and fellow subsidiary is related to the others).
   ii. One entity is an associate or joint venture of the other entity (or an associate or joint venture of a member of a group of which the other entity is a member).
   iii. Both entities are joint ventures of the same third party.
   iv. One entity is a joint venture of a third entity and the other entity is an associate of the third entity.
   v. The entity is a post-employment benefit plan for the benefit of employees of either the reporting entity or an entity related to the reporting entity. If the reporting entity is itself such a plan, the sponsoring employers are also related to the reporting entity.
   vi. The entity is controlled or jointly controlled by a person identified in (a), or

vii. Orang yang diidentifikasi dalam huruf (a) (i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).
viii. Entitas, atau anggota dari kelompok yang mana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa personil manajemen kunci kepada entitas palapor atau kepada entitas induk dari entitas pelapor.

Entitas yang berelasi dengan pemerintah adalah entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama, atau dipengaruhi oleh pemerintah. Pemerintah mengacu kepada pemerintah, instansi pemerintah dan badan yang serupa baik lokal, nasional maupun internasional.

Entitas yang berelasi dengan Pemerintah dapat berupa entitas yang dikendalikan atau dipengaruhi secara signifikan oleh Kementerian Keuangan atau Pemerintah Daerah yang merupakan Pemegang Saham entitas, atau entitas yang dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Badan Usaha Milik Negara sebagai kuasa pemegang saham.

Seluruh transaksi dan saldo yang signifikan dengan pihak berelasi diungkapkan dalam Catatan yang relevan.

vii. A person identified in (a) (i) has significant influence over the entity or is a member of the key management personnel of the entity (or of a parent of the entity).
viii. Entities, or members of the Company to which the entity is part of the Company, providing services to the entity's key management personnel or to the parent entity of the reporting entity.

A government-related entity is an entity that is controlled, jointly controlled or significantly influenced by a government. Government refers to government, government agencies and similar bodies whether local, national or international.

Government related entity can be an entity which is controlled or significantly influenced by the Ministry of Finance or Local Government being the shareholders of the entity or an entity controlled by the Government of Republic of Indonesia, represented by the Ministry of State Owned Enterprise as shareholder's representative.

All significant transactions and balances with related parties are disclosed in the relevant Notes.

g. Aset Keuangan

Pengakuan dan Pengukuran Awal
Seluruh aset keuangan diakui dan dihentikan pengakuannya pada tanggal diperdagangkan dimana pembelian dan penjualan aset keuangan berdasarkan kontrak yang mensyaratkan penyerahan aset keuangan dalam kurun waktu yang ditetapkan oleh kebiasaan pasar yang berlaku dan awalnya diukur sebesar nilai wajar ditambah biaya transaksi, kecuali untuk aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, yang awalnya diukur sebesar nilai wajar.

g. Financial Assets

Initial Recognition and Measurement
All financial assets are recognized and derecognized on the trade date where the purchase or sale of a financial asset is under a contract whose terms require delivery of the financial asset within the time frame established by the market concerned and are initially measured at fair value plus transaction costs, except for those financial assets classified as a fair value through profit or loss, which are initially measured at fair value.

Pengukuran Selanjutnya Aset Keuangan

Aset keuangan Perusahaan dan entitas anak diklasifikasikan sebagai berikut: aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, pinjaman yang diberikan dan piutang, dan yang tersedia untuk dijual.

i. Aset Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar Melalui Laba Rugi (FVTPL)
Aset keuangan yang diukur pada FVTPL adalah aset keuangan yang dimiliki untuk diperdagangkan atau yang pada saat pengakuan awal telah ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Aset keuangan diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan jika diperoleh atau dimiliki terutama untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat, atau bagian dari portfolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola bersama dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek aktual saat ini, atau merupakan derivatif, kecuali derivatif yang ditetapkan dan efektif sebagai instrumen lindung nilai.

Setelah pengakuan awal, aset keuangan yang diukur pada FVTPL diukur pada nilai wajarnya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar aset keuangan diakui dalam laba rugi.

ii. Pinjaman yang Diberikan dan Piutang
Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan nonderivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif, kecuali:
(a) pinjaman yang diberikan dan piutang yang dimaksudkan untuk dijual dalam waktu dekat dan yang pada saat pengakuan awal ditetapkan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi;
(b) pinjaman yang diberikan dan piutang yang pada saat pengakuan awal ditetapkan sebagai tersedia untuk dijual; atau

Subsequent Measurement of Financial Assets
The Company and its subsidiaries' financial assets are classified into the following specified categories: financial assets at fair value through profit or loss, loans and receivables, and available-for-sale.

i. Financial Assets at Fair Value Through Profit or Loss (FVTPL)
Financial assets at FVTPL are financial assets held for trading or upon initial recognition it is designated as at fair value through profit or loss. Financial asset classified as held for trading if it is acquired or incurred principally for the purpose of selling and repurchasing it in the near term, or it is a part of a portfolio of identified financial instruments that are managed together and for which there is evidence of a recent actual pattern of short-term profit taking, or it is a derivative, except for a derivative that is a designated and effective hedging instrument.

After initial recognition, financial assets at FVTPL are measured at its fair value. Gains or losses arising from a change in the fair value of financial assets are recognized in profit or loss.

ii. Loans and Receivables
Loans and receivables are non-derivative financial assets with fixed or determinable payments that are not quoted in an active market, other than:

(a) those that intends to sell immediately or in the near term and upon initial recognition designated as at fair value through profit or loss;

(b) those that upon initial recognition designated as available for sale; or

(c) pinjaman yang diberikan dan piutang dalam hal pemilik mungkin tidak akan memperoleh kembali investasi awal secara substansial kecuali yang disebabkan oleh penurunan kualitas pinjaman.

Setelah pengakuan awal, pinjaman yang diberikan dan piutang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

iii. Aset Keuangan Tersedia untuk Dijual ("AFS")
AFS pada awalnya diakui sebesar nilai wajar, ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung. Setelah pengakuan awal, aset keuangan tersebut diukur sebesar nilai wajar, dimana keuntungan atau kerugian diakui dalam pendapatan komprehensif lainnya, kecuali untuk kerugian akibat penurunan nilai dan keuntungan, sampai aset keuangan tersebut dihentikan pengakuannya.

Perusahaan mengukur nilai wajar instrumen ekuitas yang tidak tercatat di pasar aktif dengan menggunakan teknik penilaian berdasarkan asumsi yang wajar. Dalam keadaan tertentu dimana kisaran estimasi nilai wajar yang realistis cukup signifikan dan probabilitas berbagai estimasi tidak dapat dinilai secara wajar, maka Perusahaan mengukur nilai wajar instrumen AFS tersebut pada biaya perolehan dikurangi penurunan nilai.

Dividen atas instrumen ekuitas AFS, jika ada, diakui pada laba rugi pada saat hak Perusahaan dan entitas anak untuk memperoleh pembayaran dividen ditetapkan.

Metode Suku Bunga Efektif
Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari instrumen keuangan dan metode untuk mengalokasikan pendapatan bunga selama periode yang relevan. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi penerimaan kas

(c) those for which the holder may not recover substantially all of its initial investment, other than because of credit deterioration.

After initial recognition, loans and receivables are measured at amortized cost using the effective interest method.

iii. Available-for-Sale Financial Assets ("AFS")
AFS are initially recognized at fair value, including directly attributable transaction costs. Subsequently, they are carried at fair value, with gains or losses recognized in other comprehensive income, except for impairment losses, until they are derecognized.

The Company measures the fair value of non-listed equity instruments by applying valuation techniques based on reasonable assumptions. In the limited case where the range of reasonable fair value measurements is significantly wide and the probabilities of the various estimates cannot be reasonably assessed, the Company records such AFS instruments at cost less impairment.

Dividends on AFS equity instruments, if any, are recognized in profit or loss when the Company and its subsidiaries' rights to receive the dividends are established.

Effective Interest Method
The effective interest method is a method of calculating the amortized cost of a financial instrument and of allocating interest income over the relevant period. The effective interest rate is the rate that exactly discounts estimated future cash receipts (including all fees and other forms paid or received that form an integral part of the

di masa datang (mencakup seluruh komisi dan bentuk lain yang dibayarkan dan diterima yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suku bunga efektif, biaya transaksi dan premium dan diskonto lainnya) selama perkiraan umur instrumen keuangan, atau, jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh nilai tercatat bersih dari aset keuangan pada saat pengakuan awal.

effective interest rate, transaction costs and other premiums or discounts) through the expected life of the financial instrument, or, where appropriate, a shorter period to the net carrying amount on initial recognition.

Pendapatan diakui berdasarkan suku bunga efektif untuk instrumen keuangan.

Income is recognized on an effective interest basis for financial instruments.

Penurunan Nilai Aset Keuangan
Aset keuangan dievaluasi terhadap indikator penurunan nilai pada setiap akhir tanggal pelaporan. Aset keuangan diturunkan nilainya bila terdapat bukti objektif, sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset keuangan dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan atas aset keuangan yang dapat diestimasi secara handal.

Impairment of Financial Assets
Financial assets are assessed for indicators of impairment at the end of each reporting date. Financial assets are impaired where there is objective evidence that, as a result of one or more events that occurred after the initial recognition of the financial asset and the estimated future cash flows of the investment have been affected.

Untuk investasi ekuitas AFS yang tercatat dan tidak tercatat di bursa, penurunan yang signifikan atau jangka panjang pada nilai wajar dari investasi ekuitas di bawah biaya perolehannya dianggap sebagai bukti objektif penurunan nilai.

For listed and unlisted equity investments classified as AFS, a significant or prolonged decline in the fair value of the security below its cost is considered to be objective evidence of impairment.

Untuk aset keuangan lainnya, bukti objektif penurunan nilai termasuk sebagai berikut:

i. kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam; atau
ii. pelanggaran kontrak, seperti terjadinya wanprestasi atau tunggakan pembayaran pokok atau bunga; atau
iii. terdapat kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan.
iv. terdapat data yang dapat diobservasi yang mengindikasikan adanya penurunan yang dapat diukur atas estimasi arus kas masa depan dari kelompok aset keuangan sejak pengakuan awal aset, seperti memburuknya status pembayaran pihak peminjam atau kondisi ekonomi yang berkorelasi dengan gagal bayar.

For all other financial assets, objective evidence of impairment could include:

i. significant financial difficulty of the issuer or counterparty; or
ii. default or delinquency in interest or principal payments; or
iii. it becoming probable that the borrower will enter bankruptcy or financial re-organisation.
iv. observable data indicating that there is a measurable decrease in the estimated future cash flows from a group of financial assets since the initial recognition, such as adverse changes in the payment status of borrowers or economic condition that correlate with defaults.

Untuk kelompok aset keuangan tertentu, seperti piutang, aset yang dinilai tidak akan diturunkan secara individual tetapi penurunan secara kolektif. Bukti objektif dari penurunan nilai portofolio piutang dapat termasuk pengalaman Perusahaan dan entitas anak atas tertagihnya piutang di masa lalu, peningkatan keterlambatan penerimaan pembayaran piutang dari rata-rata periode kredit, dan juga pengamatan atas perubahan kondisi ekonomi nasional atau lokal yang berkorelasi dengan *default* atas piutang.

For certain categories of financial asset, such as receivables, assets that are assessed not to be impaired individually are, in addition, assessed for impairment on a collective basis. Objective evidence of impairment for a portfolio of receivables could include the Company's and its subsidiaries' past experiences of collecting payments, an increase in the number of delayed payments in the portfolio past the average credit period, as well as observable changes in national or local economic conditions that correlate with default on receivables.

Untuk aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, jumlah kerugian penurunan nilai merupakan selisih antara nilai tercatat aset keuangan dengan nilai kini dari estimasi arus kas masa datang yang didiskontokan menggunakan tingkat suku bunga efektif awal dari aset keuangan.

For financial assets carried at amortized cost, the amount of the impairment is the difference between the asset's carrying amount and the present value of estimated future cash flows, discounted at the financial asset's original effective interest rate.

Nilai tercatat aset keuangan tersebut dikurangi dengan kerugian penurunan nilai secara langsung atas aset keuangan, kecuali piutang yang nilai tercatatnya dikurangi melalui penggunaan akun cadangan kerugian penurunan nilai piutang. Jika piutang tidak tertagih, piutang tersebut dihapuskan melalui akun cadangan kerugian penurunan nilai piutang. Pemulihan kemudian dari jumlah yang sebelumnya telah dihapuskan dikreditkan terhadap akun cadangan kerugian penurunan nilai piutang. Perubahan nilai tercatat akun cadangan kerugian penurunan nilai piutang diakui dalam laba rugi.

The carrying amount of the financial asset is reduced by the impairment loss directly for all financial assets with the exception of receivables, where the carrying amount is reduced through the use of an allowance account. When a receivable is considered uncollectible, it is written off against the allowance account. Subsequent recoveries of amounts previously written off are credited against the allowance account. Changes in the carrying amount of the allowance account are recognized in profit or loss.

Jika aset keuangan AFS dianggap menurun nilainya, keuntungan kumulatif yang sebelumnya telah diakui dalam ekuitas dicatat ke laba rugi.

When an AFS financial asset is considered to be impaired, cumulative gains previously recognized in equity are recognized in profit or loss.

Pengecualian dari instrumen ekuitas AFS, jika, pada periode berikutnya, jumlah penurunan nilai berkurang dan penurunan dapat dikaitkan secara objektif dengan sebuah peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai tersebut diakui, kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui dipulihkan melalui laba rugi hingga nilai tercatat investasi pada tanggal pemulihan penurunan nilai tidak melebihi biaya perolehan diamortisasi sebelum pengakuan kerugian penurunan nilai dilakukan.

With the exception of AFS equity instruments, if, in a subsequent period, the amount of the impairment loss decreases and the decrease can be related objectively to an event occurring after the impairment was recognized, the previously recognized impairment loss is reversed through profit or loss to the extent that the carrying amount of the investment at the date the impairment is reversed does not exceed what the amortized cost would have been had the impairment not been recognized.

Dalam hal efek ekuitas AFS, kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui dalam laba rugi tidak boleh dipulihkan melalui laba rugi. Setiap kenaikan nilai wajar setelah penurunan nilai diakui secara langsung ke pendapatan komprehensif lainnya.

In respect of AFS equity investments, impairment losses previously recognized in profit or loss are not reversed through profit or loss. Any increase in fair value subsequent to an impairment loss is recognized directly in other comprehensive income.

Penghentian Pengakuan Aset Keuangan
Perusahaan dan entitas anak menghentikan pengakuan aset keuangan jika dan hanya jika hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset berakhir, atau Perusahaan dan entitas anak mentransfer aset keuangan dan secara substansial mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset kepada entitas lain. Jika Perusahaan dan entitas anak tidak mentransfer serta tidak memiliki secara substansial atas seluruh risiko dan manfaat kepemilikan serta masih mengendalikan aset yang ditransfer, maka Perusahaan dan entitas anak mengakui keterlibatan berkelanjutan atas aset yang ditransfer dan liabilitas terkait sebesar jumlah yang mungkin harus dibayar. Jika Perusahaan dan entitas anak memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat kepemilikan aset keuangan yang ditransfer, Perusahaan dan entitas anak masih mengakui aset keuangan dan juga mengakui pinjaman yang dijamin sebesar pinjaman yang diterima.

Derecognition of Financial Assets
The Company and its subsidiaries derecognize a financial asset only when the contractual rights to the cash flows from the asset expire, or when they transfer the financial asset and substantially all the risks and rewards of ownership of the asset to another entity. If the Company and its subsidiaries neither transfer nor retain substantially all the risks and rewards of ownership and continue to control the transferred asset, the Company and its subsidiaries recognize their retained interest in the asset and an associated liability for amounts they may have to pay. If the Company and its subsidiaries retain substantially all the risks and rewards of ownership of a transferred financial asset, the Company and its subsidiaries continue to recognize the financial asset and also recognize a collateralized borrowing for the proceeds received.

Saat penghentian pengakuan aset keuangan secara keseluruhan, selisih antara jumlah tercatat aset dan jumlah pembayaran dan piutang yang diterima dan keuntungan atau kerugian kumulatif yang telah diakui dalam pendapatan komprehensif lain dan terakumulasi dalam ekuitas diakui dalam laba rugi.

On derecognition of a financial asset in its entirety, the difference between the asset's carrying amount and the sum of the consideration received and receivable and the cumulative gain or loss that had been recognized in other comprehensive income and accumulated in equity is recognized in profit or loss.

Saat penghentian pengakuan aset keuangan terhadap satu bagian saja (misalnya ketika Perusahaan dan entitas anak masih memiliki hak untuk membeli kembali bagian aset yang ditransfer), Perusahaan dan entitas anak mengalokasikan jumlah tercatat sebelumnya dari aset keuangan tersebut pada bagian yang tetap diakui berdasarkan keterlibatan berkelanjutan dan bagian yang tidak lagi diakui berdasarkan nilai wajar relatif dari kedua bagian tersebut pada

On derecognition of a financial asset other than in its entirety (e.g., when the Company and its subsidiaries retain an option to repurchase part of a transferred asset), the Company and its subsidiaries allocate the previous carrying amount of the financial asset between the part they continue to recognize under continuing involvement and the part they no longer recognize on the basis of the relative fair values of those parts on the date of the transfer. The difference between the carrying amount

tanggal transfer. Selisih antara jumlah tercatat yang dialokasikan pada bagian yang tidak lagi diakui dan jumlah dari pembayaran yang diterima untuk bagian yang yang tidak lagi diakui dan setiap keuntungan atau kerugian kumulatif yang dialokasikan pada bagian yang tidak lagi diakui tersebut yang sebelumnya telah diakui dalam pendapatan komprehensif lain diakui pada laba rugi. Keuntungan dan kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam pendapatan komprehensif lain dialokasikan pada bagian yang tetap diakui dan bagian yang dihentikan pengakuannya, berdasarkan nilai wajar relatif kedua bagian tersebut.

allocated to the part that is no longer recognized and the sum of the consideration received for the part no longer recognized and any cumulative gain or loss allocated to it that had been recognized in other comprehensive income is recognized in profit or loss. A cumulative gain or loss that had been recognized in other comprehensive income is allocated between the part that continues to be recognized and the part that is no longer recognized on the basis of the relative fair values of those parts.

Reklasifikasi

Perusahaan dan entitas anak tidak mereklasifikasi instrumen derivatif dari diukur pada nilai wajar melalui laba rugi selama derivatif tersebut dimiliki atau diterbitkan dan tidak mereklasifikasi setiap instrumen keuangan dari diukur melalui laba rugi jika pada pengakuan awal instrumen keuangan tersebut ditetapkan oleh Perusahaan dan entitas anak sebagai diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Perusahaan dan entitas anak dapat mereklasifikasi aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, jika aset keuangan tidak lagi dimiliki untuk tujuan penjualan atau pembelian kembali aset keuangan tersebut dalam waktu dekat. Perusahaan dan entitas anak tidak mereklasifikasi setiap instrumen keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi setelah pengakuan awal.

Reclassification

The Company and its subsidiaries shall not reclassify a derivative instrument out of the fair value through profit or loss category while it is held or issued and not reclassify any financial instrument out of the fair value through profit or loss category if upon initial recognition it was designated by the Company and its subsidiaries as at fair value through profit or loss. The Company and its subsidiaries may reclassify the financial asset out of the fair value through profit or loss category if it is no longer held for the purpose of selling or repurchasing it in the near term. The Company and its subsidiaries shall not reclassify any financial instrument into the fair value through profit or loss category after initial recognition.

Jika, karena perubahan intensi atau kemampuan Perusahaan dan entitas anak, instrumen tersebut tidak tepat lagi diklasifikasikan sebagai investasi dimiliki hingga jatuh tempo, maka investasi tersebut direklasifikasi menjadi tersedia untuk dijual dan diukur kembali pada nilai wajar. Jika terjadi penjualan atau reklasifikasi atas investasi dimiliki hingga jatuh tempo dalam jumlah yang lebih dari jumlah yang tidak signifikan, maka sisa investasi dimiliki hingga jatuh tempo direklasifikasi menjadi tersedia untuk dijual, kecuali penjualan atau reklasifikasi tersebut dilakukan ketika aset keuangan sudah mendekati jatuh tempo atau tanggal pembelian kembali, terjadi

If, as a result of a change in the Company and its subsidiaries' intention or ability, it is no longer appropriate to classify an investment as held-to-maturity investments, it shall be reclassified to available-for–sale investments and remeasured at fair value. Whenever sales or reclassification of more than insignificant amount of held-to-maturity investments, any remaining held-to-maturity investments shall be reclassified as available for sale, other than sale or reclassification that are so close to maturity or the financial asset's call date, occur after all the financial asset's original principal has been collected substantially through scheduled payments

setelah seluruh jumlah pokok telah diperoleh secara substansial sesuai jadwal pembayaran atau telah diperoleh pelunasan dipercepat; atau terkait dengan kejadian tertentu yang berada di luar kendali, tidak berulang, dan tidak dapat diantisipasi secara wajar.

or prepayments, or are attributable to an isolated event that is beyond control, non-recurring, and could not have been reasonably anticipated.

Pengukuran Nilai Wajar
Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran.

Fair Value Measurement
Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date.

Nilai wajar aset dan liabillitas keuangan diestimasi untuk keperluan pengakuan dan pengukuran atau untuk keperluan pengungkapan.

The fair value of financial assets and financial liabilities is estimated for recognition and measurement or for disclosure purposes.

Nilai wajar dikategorikan dalam level yang berbeda dalam suatu hirarki nilai wajar berdasarkan pada apakah input suatu pengukuran dapat diobservasi dan signifikansi input terhadap keseluruhan pengukuran nilai wajar:
(i) Harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik yang dapat diakses pada tanggal pengukuran (Level 1)
(ii) Input selain harga kuotasian yang termasuk dalam Level 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung maupun tidak langsung (Level 2)
(iii) Input yang tidak dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas (Level 3)

Fair values are categorized into different levels in a fair value hierarchy based on the degree to which the inputs to the measurement are observable and the significance of the inputs to the fair value measurement in its entirety:
(i) Quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities that can be accessed at the measurement date (Level 1)
(ii) Inputs other than quoted prices included in Level 1 that are observable for the assets or liabilities, either directly or indirectly (Level 2)
(iii) Unobservable inputs for the assets or liabilities (Level 3)

Dalam mengukur nilai wajar aset atau liabilitas, Perusahaan dan entitas anak sebisa mungkin menggunakan data pasar yang dapat diobservasi. Apabila nilai wajar aset atau liabilitas tidak dapat diobservasi secara langsung, Perusahaan dan entitas anak menggunakan teknik penilaian yang sesuai dengan keadaannya dan memaksimalkan penggunaan input yang dapat diobservasi yang relevan dan meminimalkan penggunaan input yang tidak dapat diobservasi.

When measuring the fair value of an asset or a liability, the Company and its subsidiaries use market observable data to the extent possible. If the fair value of an asset or a liability is not directly observable, the Company and its subsidiaries use valuation techniques that are appropriate in the circumstances and maximizes the use of relevant observable inputs and minimizes the use of unobservable inputs.

Perpindahan antara level hirarki nilai wajar diakui oleh Perusahaan dan entitas anak pada akhir periode pelaporan dimana perpindahan terjadi.

Transfers between levels of the fair value hierarchy are recognized by the Company and its subsidiaries at the end of the reporting period during which the change occurred.

h. Liabilitas Keuangan dan Instrumen Ekuitas

Klasifikasi Sebagai Liabilitas atau Ekuitas
Liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas yang diterbitkan oleh Perusahaan dan entitas anak diklasifikasi sesuai dengan substansi perjanjian kontraktual dan definisi liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas.

Instrumen Ekuitas
Instrumen ekuitas adalah setiap kontrak yang memberikan hak residual atas aset Perusahaan dan entitas anak setelah dikurangi dengan seluruh liabilitasnya. Instrumen ekuitas dicatat sebesar hasil penerimaan bersih setelah dikurangi biaya penerbitan langsung.

Liabilitas Keuangan
Utang usaha, utang lain-lain dan biaya yang masih harus dibayar. Pinjaman lainnya pada awalnya diukur pada nilai wajar, setelah dikurangi biaya transaksi, dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif, dengan beban bunga diakui berdasarkan metode suku bunga efektif.

Penghentian Pengakuan Liabilitas Keuangan
Perusahaan dan entitas anak menghentikan pengakuan liabilitas keuangan, jika dan hanya jika, liabilitas Perusahaan dan entitas anak telah dilepaskan, dibatalkan atau kadaluarsa. Selisih antara jumlah tercatat liabilitas keuangan yang dihentikan pengakuannya dan imbalan yang dibayarkan dan utang diakui dalam laba rugi.

h. Financial Liabilities and Equity Instruments

Classification as Debt or Equity
Financial liabilities and equity instruments issued by the Company and its subsidiaries are classified according to the substance of the contractual arrangements entered into and the definitions of a financial liability and an equity instrument.

Equity Instruments
An equity instrument is any contract that evidences a residual interest in the assets of the Company after deducting all of its liabilities. Equity instruments are recorded at the proceeds received, net of direct issue costs.

Financial Liabilities
Accounts payable, other payables and accrued expenses. Other borrowings are initially measured at fair value, net of transaction costs, and are subsequently measured at amortized cost, using the effective interest rate method, with interest expense recognized on an effective yield basis.

Derecognition of Financial Liabilities

The Company and its subsidiaries derecognize financial liabilities when, and only when the Company's and its subsidiaries' obligations are discharged, cancelled or expires. The difference between the carrying amount of the financial liability derecognized and the consideration paid and payable is recognized in profit or loss.

i. Saling Hapus Antar Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan

Aset dan liabilitas keuangan Perusahaan dan entitas anak saling hapus dan nilai bersihnya disajikan dalam laporan posisi keuangan jika dan hanya jika:

- saat ini memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut; dan
- berniat untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

i. Netting of Financial Assets and Financial Liabilities

The Company and its subsidiaries only offset financial assets and liabilities and present the net amount in the statement of financial position where they:

- *currently have a legal enforceable right to set off the recognized amount; and*
- *intend either to settle on a net basis, or to realize the asset and settle the liability simultaneously.*

j. Aset tetap – Pemilikan Langsung

Sebelum 31 Desember 2015, aset tetap yang dimiliki untuk digunakan, kecuali tanah, dicatat berdasarkan biaya perolehan setelah dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi kerugian penurunan nilai. Tanah dicatat berdasarkan biaya perolehan. Aset tetap termasuk material cadangan utama dan peralatan siap pakai dengan manfaat ekonomis lebih dari satu tahun yang diperuntukkan untuk menjaga kelangsungan dan kestabilan operasi instalasi dan mesin pembangkit listrik dalam rangka memproduksi serta mendistribusikan tenaga listrik.

Pada tanggal 31 Desember 2015, Perusahaan dan entitas anak melakukan perubahan kebijakan akuntansi atas kelas-kelas aset berikut ini dari model biaya menjadi model revaluasi:

- Tanah
- Bangunan umum, waduk dan prasarana
- Instalasi dan mesin pembangkit
- Perlengkapan transmisi
- Perlengkapan pengolahan data dan telekomunikasi

Perubahan kebijakan akuntansi tersebut dicatat secara prospektif sesuai dengan PSAK No. 25 (Revisi 2015).

Kelas aset di atas, kecuali tanah, menggunakan model revaluasi dan disajikan sebesar nilai wajar, dikurangi penyusutan dan penurunan nilai. Tanah disajikan sebesar nilai wajar. Penilaian terhadap aset-aset tersebut dilakukan oleh penilai independen eksternal yang terdaftar

j. Property, Plant and Equipment – Direct Acquisitions

Before December 31, 2015, property, plant and equipment held for use, except land, are stated at cost, less accumulated depreciation and any accumulated impairment losses. Land are stated at cost. Property, plant and equipment include major spare parts and stand-by equipment, with economic benefits of more than one year, which are used to ensure the continuity and stability of the power plant operations and electricity installations necessary to produce and distribute electricity.

On December 31, 2015, the Company and its subsidiaries changed their accounting policy for the following classes of assets from the cost model to the revaluation model:

- *Land*
- *Buildings, reservoir and infrastructure*
- *Installations and power plant*
- *Transmission equipment*
- *Telecommunication and data processing equipment*

That change in accounting policy is treated prospectively in accordance with SFAS No. 25 (Revised 2015).

The class of assets above, except for land, use the revaluation model, are shown at fair value, less subsequent depreciation and impairment losses. Land are shown at fair value. Valuation of those assets is performed by external independent valuers which are registered with the Financial

di Otoritas Jasa Keuangan ("OJK"). Penilaian atas aset tersebut dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa nilai wajar aset yang direvaluasi tidak berbeda secara material dengan nilai tercatatnya. Akumulasi penyusutan pada tanggal revaluasi dieliminasi terhadap nilai tercatat bruto aset, dan nilai netonya disajikan kembali sebesar nilai revaluasian aset tetap.

Services Authority ("OJK"). Valuations are performed with sufficient regularity to ensure that the fair value of a revalued asset does not differ materially from its carrying amount. Any accumulated depreciation at the date of revaluation is eliminated against the gross carrying amount of the asset, and the net amount is restated to the revalued amount of the property, plant and equipment.

Aset tetap lainnya, dicatat berdasarkan biaya perolehan setelah dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi kerugian penurunan nilai. Aset tetap termasuk material cadangan utama dan peralatan siap pakai dengan manfaat ekonomis lebih dari satu tahun yang diperuntukkan untuk menjaga kelangsungan dan kestabilan operasi instalasi dan mesin pembangkit listrik dalam rangka memproduksi tenaga listrik.

All other property, plant and equipment are stated at cost, less accumulated depreciation and any accumulated impairment losses. Property, plant and equipment includes major spare parts and stand-by equipment, with economic benefits of more than one year, which are used to ensure the continuity and stability of the power plant operations and the electricity installations necessary to produce electricity.

Kenaikan nilai tercatat yang timbul dari revaluasi aset tetap yang menggunakan model revaluasi dikreditkan pada "cadangan revaluasi aset" sebagai bagian dari pendapatan komprehensif lainnya. Penurunan yang menghapus nilai kenaikan yang sebelumnya atas aset yang sama dibebankan terhadap "cadangan revaluasi aset" sebagai bagian dari laba komprehensif; penurunan lainnya dibebankan pada laporan laba rugi.

Increases in the carrying amount arising on revaluation of properly, plant, and equipment that use the revaluation model are credited to "asset revaluation reserve" as part of other comprehensive income. Decreases that offset previous increases of the same asset are debited against "asset revaluation reserve" as part of other comprehensive income; all other decreases are charged to the profit or loss.

Biaya awal untuk mendapatkan hak atas tanah diakui sebagai bagian biaya akuisisi tanah, biaya-biaya tersebut tidak disusutkan. Aset, kecuali tanah, disusutkan hingga mencapai estimasi nilai sisa dengan menggunakan metode garis lurus hingga mencapai estimasi nilai sisa selama masa manfaatnya sebagai berikut:

Initial costs incurred to obtain land are recognized as part of the acquisition cost of the land and these costs are not depreciated. Assets, except land, are depreciated to their residual value using the straight-line method to their residual values over their expected useful lives as follows:

	2016 (Tahun/ *Years*)	2015 (Tahun/ *Years*)	
Bangunan umum, waduk dan prasarana	10 - 50	10 - 47	*Buildings, reservoir and infrastructure*
Instalasi dan mesin pembangkit	12 - 40	13 - 30	*Installations and power plant*
Perlengkapan transmisi	40	25 - 37	*Transmission equipment*
Perlengkapan pengolahan data dan telekomunikasi	10	10	*Telecomunication and data processing equipment*
Perlengkapan umum	5	5	*General equipment*
Kendaraan bermotor	5	5	*Motor vehicles*
Material cadangan utama	10 - 50	10 - 25	*Major spare parts*

Aset sewa pembiayaan disusutkan berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis yang sama dengan aset yang dimiliki sendiri atau jika lebih pendek, disusutkan selama periode masa sewa ketika tidak ada kepastian yang memadai bahwa Perusahaan dan entitas anak akan mendapatkan hak kepemilikan pada akhir masa sewa.

Assets held under finance leases are depreciated over their expected useful lives on the same basis as owned assets or where shorter, the term of the relevant leases where there is no reasonable certainty that the Company and its subsidiaries will obtain ownership at the end of the lease term.

Masa manfaat ekonomis, nilai sisa dan metode penyusutan dievaluasi setiap akhir tahun dan pengaruh dari setiap perubahan estimasi tersebut berlaku prospektif.

The estimated useful lives, residual values and depreciation method are reviewed at each year end, with the effect of any changes in estimate accounted for on a prospective basis.

Beban pemeliharaan dan perbaikan dibebankan pada laporan laba rugi komprehensif konsolidasian pada saat terjadinya. Biaya-biaya lain yang terjadi selanjutnya yang timbul untuk menambah, mengganti atau memperbaiki aset tetap dicatat sebagai biaya perolehan aset jika dan hanya jika besar kemungkinan manfaat ekonomis di masa depan berkenaan dengan aset tersebut akan mengalir ke entitas dan biaya perolehan aset dapat diukur secara andal.

The cost of maintenance and repairs are charged to consolidated statement of comprehensive income as incurred. Other costs incurred subsequently to add to, replace part of, or service an item of property, plant and equipment, are recognized as asset if, and only if it is probable that future economic benefits associated with the item will flow to the entity and the cost of the item can be measured reliably.

Aset tetap yang sudah tidak digunakan lagi atau yang dijual dikeluarkan dari kelompok aset tetap berikut akumulasi penyusutannya. Keuntungan atau kerugian dari penjualan aset tetap tersebut dibukukan dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian.

When assets are retired or otherwise disposed of, their carrying values are removed from the accounts. Any resulting gain or loss is reflected in the consolidated statement of comprehensive income.

Aset yang untuk sementara waktu tidak digunakan dalam operasi dicatat sebagai bagian dari aset tetap. Aset yang sementara waktu tidak digunakan dalam operasi disusutkan dengan metode dan berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis yang sama dengan aset tetap.

Assets that are temporarity not used in operations are recorded as part of property, plant and equipment. Assets not used in operations are depreciated using the same method and based on the economic useful lives of the property, plant and equipment.

k. Pekerjaan Dalam Pelaksanaan

Pekerjaan dalam pelaksanaan merupakan biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan pembangunan aset tetap. Pekerjaan dalam pelaksanaan dinyatakan sebesar biaya perolehan, termasuk biaya pinjaman selama masa pembangunan dari pinjaman yang digunakan untuk pembangunan dan beban penyusutan aset tetap yang digunakan dalam pekerjaan

k. Construction in Progress

Construction in progress represents costs directly related to the construction of property, plant and equipment. Construction in progress is stated at cost, which includes borrowing costs during construction on debts incurred to finance the construction and depreciation of property and equipment that were used in the construction. Construction in progress is transferred to

pembangunan. Akumulasi biaya perolehan akan dipindahkan ke masing-masing aset tetap yang bersangkutan pada saat selesai dan siap digunakan.

the respective property, plant and equipment account when completed and ready for use.

l. Penurunan Nilai Aset Non-Keuangan

Aset yang diamortisasi atau disusutkan dikaji untuk penurunan nilai jika terdapat kejadian atau perubahan keadaan yang mengindikasikan bahwa jumlah tercatat kemungkinan tidak dapat dipulihkan. Kerugian penurunan nilai diakui sebesar kelebihan jumlah tercatat aset atas jumlah terpulihkannya. Jumlah terpulihkan merupakan jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar aset dikurangi biaya untuk menjual dan nilai pakainya. Dalam rangka menguji penurunan nilai, aset dikelompokkan hingga unit terkecil yang menghasilkan arus kas terpisah (unit penghasil kas). Aset non-keuangan yang mengalami penurunan nilai, ditelaah untuk menentukan apakah terdapat kemungkinan pembalikan penurunan nilai, pada setiap tanggal pelaporan.

Pembalikan rugi penurunan nilai, diakui jika, dan hanya jika, terdapat perubahan estimasi yang digunakan dalam menentukan jumlah terpulihkan aset sejak pengujian penurunan nilai terakhir kali. Pembalikan rugi penurunan nilai tersebut diakui segera dalam laba rugi. Pembalikan tersebut tidak boleh mengakibatkan nilai tercatat aset melebihi biaya perolehan didepresiasi sebelum adanya pengakuan penurunan nilai pada tanggal pembalikan dilakukan.

l. Impairment of Non-Financial Assets

Assets that are subject to amortization or depreciation are reviewed for impairment whenever events or changes in circumstances indicate that the carrying amount may not be recoverable. An impairment loss is recognized for the amount by which the asset's carrying amount exceeds its recoverable amount. The recoverable amount is the higher of an asset's fair value less costs to sell and its value-in-use. For the purposes of assessing impairment, assets are grouped at the lowest level for which there are separately identifiable cash flows (cash generating units). Non-financial assets that have suffered an impairment are reviewed for possible reversal of the impairment at each reporting date.

Reversal on impairment loss for assets would be recognized if, and only if, there has been a change in the estimates used to determine the asset's recoverable amount since the last impairment test was carried out. Reversal on impairment losses will be immediately recognized in profit or loss. The reversal will not result in the carrying amount of an asset that exceeds what the depreciated cost would have been had the impairment not been recognized at the date at which the impairment was reversed.

m. Sewa

Klasifikasi Sewa

Sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan jika sewa tersebut mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset kepada *lessee*. Sewa lainnya, yang tidak memenuhi kriteria tersebut diklasifikasikan sebagai sewa operasi.

m. Leases

Lease Classification

Leases are classified as finance leases whenever the terms of the lease transfer substantially all the risks and rewards of ownership to the lessee. All other leases are classified as operating leases.

Sebagai *lessor*
Sewa di mana Perusahaan dan entitas anak tidak mengalihkan secara substantial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset diklasifikasikan sebagai sewa operasi.

As lessor
Lessee where the Company and its subsidiaries does not transfer substantially all the risks and rewards of the asset ownership are classified as operating leases.

Sebagai *lessee*
Pembayaran sewa harus dipisahkan antara bagian yang merupakan beban keuangan dan bagian yang merupakan pengurangan dari liabilitas sewa sehingga mencapai suatu tingkat bunga konstan atas saldo liabilitas. Rental kontinjen dibebankan pada periode terjadinya.

As lessee
Lease payments are apportioned between finance charges and reduction of the lease liability so as to achieve a constant rate of interest on the remaining balance of the liability. Contingent rents are recognized as expenses in the periods in which they are incurred.

Pembayaran sewa operasi (dikurangi dengan insentif yang diterima dari *lessor*) diakui sebagai beban dengan dasar garis lurus (*straight-line basis*) selama masa sewa, kecuali terdapat dasar sistematis lain yang lebih mencerminkan pola waktu dari manfaat aset yang dinikmati pengguna. Rental kontinjen diakui dalam sewa operasi sebagai beban di dalam periode terjadinya.

Operating lease payments (net of any incentives received from the lessor) are recognized as expenses on a straight-line basis over the lease term, except where another systematic basis is more representative of the time pattern in which economic benefits from the leased asset are consumed. Contingent rentals arising under operating leases are recognized as expenses in the period in which they are incurred.

Dalam hal insentif diperoleh dalam sewa operasi, insentif tersebut diakui sebagai liabilitas. Keseluruhan manfaat dari insentif diakui sebagai pengurangan dari beban sewa dengan dasar garis lurus, kecuali terdapat dasar sistematis lain yang lebih mencerminkan pola waktu dari manfaat yang dinikmati pengguna.

In the event that lease incentives are received when entering into operating leases, such incentives are recognized as a liability. The aggregate benefit of incentives is recognized as a reduction of rental expense on a straight-line basis, except where another systematic basis is more representative of the time pattern in which economic benefits from the leased asset are consumed.

Perjanjian Pembelian Tenaga Listrik
Perusahaan menetapkan bahwa beberapa perjanjian pembelian tenaga listrik dengan Penghasil Listrik Independen (IPP) memenuhi persyaratan sebagai sewa dengan dasar bahwa Perusahaan dan IPP memiliki perjanjian take or pay, dimana Perusahaan mengambil lebih dari jumlah yang tidak signifikan dari seluruh listrik dan energi yang dihasilkan oleh pembangkit listrik. Jenis perjanjian ini ditetapkan sebagai sewa pembiayaan dimana porsi signifikan dari risiko dan manfaat atas sejumlah pembangkit listrik telah dialihkan ke Perusahaan dengan dasar bahwa masa sewa adalah untuk sebagian besar umur ekonomis aset dan terdapat opsi beli pada akhir masa sewa

Power Purchase Agreements
The Company determined that certain power purchase agreements with Independent Power Producer (IPP) qualify as leases on the basis that the Company and the IPP have take or pay arrangements where the Company is taking more than an insignificant amount of electricity and energy output from the power plants. This type of arrangement is determined to be a finance lease where a significant portion of the risks and rewards of ownership of certain power plants have been transferred to the Company on the basis that the lease term is for the major part of the economic life of the assets and there is bargain purchase option at the end of the lease term.

ISAK 8, "Penentuan Apakah Suatu Perjanjian Mengandung Suatu Sewa" memberikan panduan untuk menentukan apakah suatu perjanjian merupakan sewa atau mengandung sewa sehingga harus diperlakukan sesuai dengan PSAK 30 (Revisi 2011), "Sewa".

Perusahaan mengadakan perjanjian jual beli tenaga listrik ("PPA") dengan PT PLN (Persero) menggunakan formula tarif yang telah ditetapkan, namun dengan tingkat ketersediaan pembangkit yang ditentukan setiap tahun.

ISFAS 8, "Determining Whether an Arrangement Contains a Lease" provides guidance in determining whether an arrangement is in substance a lease that should be accounted for in accordance with SFAS 30 (Revised 2011), "Leases".

The Company entered into power purchase agreement ("PPA") with PT PLN (Persero) using stipulated tariff formula, but with the power plant availability factors are determined yearly.

n. Biaya Dibayar Dimuka
Biaya dibayar dimuka diamortisasi selama manfaat masing-masing biaya dengan menggunakan metode garis lurus.

n. Prepaid Expenses
Prepaid expenses are amortized over their beneficial periods using the straight-line method.

o. Kas dan Setara Kas
Untuk tujuan penyajian arus kas, kas dan setara kas terdiri dari kas, bank dan semua investasi yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang dari tanggal perolehannya dan tidak dijaminkan serta tidak dibatasi penggunaannya.

Rekening bank dan deposito berjangka dibatasi penggunaannya diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang.

o. Cash and Cash Equivalents
For cash flow presentation purposes, cash and cash equivalents consist of cash on hand and in banks and all unrestricted investments with maturities of three months or less from the date of placement.

Restricted cash in banks and time deposits are classified as loans and receivable.

p. Persediaan
Persediaan dinyatakan berdasarkan biaya perolehan atau nilai realisasi bersih, mana yang lebih rendah. Biaya perolehan ditentukan dengan metode rata-rata bergerak.

Di dalam penentuan nilai realisasi bersih, Perusahaan dan entitas anak tidak menurunkan nilai persediaan yang digunakan untuk penjualan tenaga listrik apabila Perusahaan dan entitas anak mampu memperoleh pendapatan penjualan tenaga listrik di atas biaya perolehan persediaan tersebut.

p. Inventories
Inventories are stated at cost or net realizable value, whichever is lower. Cost is determined using the moving average method.

In determining the net realizable values, the Company and its subsidiaries do not write down inventories held in use for production of electricity below their costs when the Company and its subsidiaries are able to sell electricity above the costs of inventories.

q. Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama

Investasi pada Entitas Asosiasi
Entitas asosiasi adalah seluruh entitas dimana Perusahaan dan entitas anak memiliki pengaruh signifikan namun bukan pengendalian, biasanya melalui kepemilikan hak suara antara 20% dan 50%. Investasi entitas asosiasi dicatat dengan metode ekuitas. Sesuai metode ekuitas, investasi pada awalnya dicatat pada biaya, dan nilai tercatat akan meningkat atau menurun untuk mengakui bagian investor atas laba rugi. Di dalam investasi Perusahaan dan entitas anak atas entitas asosiasi termasuk *goodwill* yang diidentifikasi ketika akuisisi.

Penghasilan dan aset dan liabilitas dari entitas asosiasi digabungkan dalam laporan keuangan konsolidasian dicatat dengan mengunakan metode ekuitas, kecuali ketika investasi diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual, sesuai PSAK 58 (Revisi 2009), "Aset Tidak Lancar yang Dimiliki untuk Dijual dan Operasi yang Dihentikan". Dalam menerapkan metode ekuitas, bagian perusahaan dan entitas anak atas laba rugi atas entitas asosiasi setelah perolehan diakui dalam laba rugi, dan bagian perusahaan atas pendapatan komprehensif lainnya setelah tanggal perolehan diakui dalam pendapatan komprehensif lainnya. Perubahan dan penerimaan distribusi dari entitas asosiasi setelah tanggal perolehan disesuaikan terhadap nilai tercatat investasi. Bagian Perusahaan dan entitas anak atas kerugian entitas asosiasi yang melebihi nilai tercatat dari investasi (yang mencakup semua kepentingan jangka panjang, secara substansi, merupakan bagian dari Perusahaan dan nilai investasi bersih entitas anak dalam entitas asosiasi) diakui hanya sebatas bahwa Perusahaan dan entitas anak telah mempunyai kewajiban hukum atau kewajiban konstruktif atau melakukan pembayaran atas kewajiban entitas asosiasi.

q. Investment in Associates and Joint Ventures

Investments in Associates
Associates are all entities over which the Company and its subsidiaries have significant influence but not control, generally accompanying a shareholding of between 20% and 50% of the voting rights. Investments in associates are accounted for using the equity method of accounting. Under the equity method, the investment is initially recognized at cost and the carrying amount is increased or decreased to recognize the investor's share of the profit or the loss of the investee after the date of acquisition. The Company and its subsidiaries investment in associates includes goodwill identified on acquisition.

The results of operations and assets and liabilities of associates are incorporated in these consolidated financial statements using the equity method of accounting, except when investment is classified as held for sale, in which case, it is accounted for in accordance with SFAS 58 (Revised 2009), "Non-Current Assets Held for Sale and Discontinued Operations". In applying the equity method of accounting, the company and its subsidiaries' share of its associate's post-acquisition profits or losses is recognized in profit or loss and its share of post-acquisition other comprehensive income is recognized in other comprehensive income. These post-acquisition movements and distributions received from a associate are adjusted against the carrying amounts of the investment. Losses of the associates in excess of the Company and its subsidiaries' interest in those associates (which includes any long-term interests that, in substance, form part of the Company and its subsidiaries' net investment in the associate) are recognized only to the extent that the Company and its subsidiaries have incurred legal or constructive obligations or made payments on behalf of the associate.

Keuntungan yang belum direalisasi atas transaksi antara Perusahaan dan entitas anak dengan entitas asosiasi dieliminasi sebesar bagian Perusahaan dan entitas anak dalam entitas asosiasi. Kerugian yang belum direalisasi juga dieliminasi kecuali transaksi tersebut memberikan bukti penurunan nilai atas aset yang ditransfer. Kebijakan akuntansi entitas asosiasi akan disesuaikan, apabila diperlukan, agar konsisten dengan kebijakan akuntansi Perusahaan dan entitas anak.

Unrealized gains on transactions between the Company and its subsidiaries and associates are eliminated to the extent of the Company and its subsidiaries' interests in the associate. Unrealized losses are also eliminated unless the transaction provides evidence of impairment of the assets transferred. The accounting policies of the associates have been changed when necessary to ensure consistency with the accounting policy adopted by the Company and its subsidiaries.

Pada setiap tanggal pelaporan Perusahaan menentukan apakah ada bukti objektif bahwa terdapat indikasi penurunan nilai untuk menentukan apakah perlu untuk mengakui penurunan nilai sehubungan dengan investasi pada entitas asosiasi Perusahaan dan entitas anak. Jika terdapat indikasi penurunan nilai, jumlah tercatat investasi yang tersisa (termasuk *goodwill*) diuji penurunan nilai sesuai dengan PSAK 48 (Revisi 2014), "Penurunan Nilai Aset", sebagai suatu aset tunggal dengan membandingkan antara jumlah terpulihkan (mana yang lebih tinggi antara nilai pakai dan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual) dengan jumlah tercatatnya. Rugi penurunan nilai yang diakui pada keadaan tersebut tidak dialokasikan pada setiap aset yang membentuk bagian dari nilai tercatat investasi pada entitas asosiasi. Setiap pembalikan dari penurunan nilai diakui sesuai dengan PSAK 48 sepanjang jumlah terpulihkan dari invsetasi tersebut kemudian meningkat.

The Company determines at each reporting date whether there is any objective evidence that impairment indicators exist to determine whether it is necessary to recognize any impairment loss with respect to the Company and its subsidiaries' investment in an associate. If impairment indicators exist, the entire carrying amount of the investment (including goodwill) is tested for impairment in accordance with SFAS 48 (Revised 2014), "Impairment of Assets", as a single asset by comparing its recoverable amount (higher of value in use and fair value less costs to sell) with its carrying amount. Any impairment loss recognized forms part of the carrying amount of the investment. Any reversal of that impairment loss is recognized in accordance with SFAS 48 to the extent that the recoverable amount of the investment subsequently increases.

Perusahaan dan entitas anak menghentikan penggunaan metode ekuitas sejak tanggal ketika investasinya berhenti menjadi investasi pada entitas asosiasi sebagai berikut:

The Company and its subsidaries discontinue the use of the equity method from the date when its investment ceases to be an associate as follows:

(a) jika investasi menjadi entitas anak.

(a) if the investment becomes a subsidiary.

(b) jika sisa kepentingan dalam entitas asosiasi merupakan aset keuangan, maka Perusahaan dan entitas anak mengukur sisa kepentingan tersebut pada nilai wajar.

(b) If the retained interest in the former associate is a financial asset, the Company and its subsidaries measure the retained interest at fair value

(c) ketika Perusahaan dan entitas anak menghentikan penggunaan metode ekuitas, Perusahaan dan entitas anak mencatat seluruh jumlah yang sebelumnya telah diakui dalam

(c) When the Company and its subsidaries discontinue the use of the equity method, the Company and its subsidaries account for all amounts previously recognized in other

penghasilan komprehensif lain yang terkait dengan investasi tersebut menggunakan dasar perlakuan yang sama dengan yang disyaratkan jika *investee* telah melepaskan secara langsung aset dan liabilitas terkait.

comprehensive income in relation to that investment on the same basis as would have been required if the investee had directly disposed of the related assets or liabilities

Ketika Perusahaan dan entitas anak melakukan transaksi dengan entitas asosiasi, keuntungan dan kerugian dieliminasi sebesar kepentingan mereka dalam entitas asosiasi.

When the Company and its subsidiaries transact with an associate, profits and losses are eliminated to the extent of their interest in the relevant associate.

Bagian partisipasi dalam ventura bersama

Menurut PSAK 66 (Revisi 2015), pengaturan bersama diklasifikasikan sebagai operasi bersama atau ventura bersama bergantung pada hak dan kewajiban kontraktual para investor. Perusahaan telah menilai sifat dari pengaturan bersama dan menentukan pengaturan tersebut sebagai ventura bersama.

Interest in joint ventures

Under SFAS 66 (Revised 2015), investments in joint arrangements are classified as either joint operations or joint ventures depending on the contractual rights and obligations of each investor. The Company has assessed the nature of its joint arrangements and determined them to be joint ventures.

Hasil operasi, aset dan liabilitas dari ventura bersama disajikan dalam laporan keuangan menggunakan metode ekuitas. Dalam menerapkan metode ekuitas, bagian perusahaan dan entitas anak atas laba rugi atas ventura bersama setelah perolehan diakui dalam laba rugi, dan bagian perusahaan atas pendapatan komprehensif lainnya setelah tanggal perolehan diakui dalam pendapatan komprehensif lainnya. Perubahan dan penerimaan distribusi dari ventura bersama setelah tanggal perolehan disesuaikan terhadap nilai tercatat investasi.

The result of operations and assets and liabilities of a joint venture are incorporated in these financial statements using the equity method. In applying the equity method of accounting, the company and its subsidiaries' share of its joint venture's post-acquisition profits or losses is recognized in profit or loss and its share of post-acquisition other comprehensive income is recognized in other comprehensive income. These post-acquisition movements and distributions received from a joint venture are adjusted against the carrying amounts of the investment.

Jika bagian Perusahaan dan entitas anak atas rugi ventura bersama sama dengan atau melebihi kepentingannya pada ventura bersama, termasuk piutang tidak lancar tanpa jaminan, maka perusahaan menghentikan pengakuan bagiannya atas rugi lebih lanjut, kecuali perusahan dan entitas anak memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran atau telah melakukan pembayaran atas nama ventura bersama.

When the Company and its subsidiaries' share of the losses of a joint venture equals or exceeds its interest in the joint venture, including any other unsecured non-current receivables, the company does not recognize further losses, unless it has obligations to make or has made payments on behalf of the joint venture.

Penyesuaian dibentuk terhadap laporan keuangan konsolidasian untuk mengeliminasi bagian Perusahaan dan entitas anak atas keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi atas transaksi antara Perusahaan dan entitas anak dan entitas yang dikendalikan bersama. Ventura bersama dicatat dengan menggunakan metode ekuitas sampai dengan tanggal dimana Perusahaan dan entitas anak kehilangan pengendalian bersama atas entitas yang dikendalikan bersama.

Adjustments are made in the consolidated financial statements to eliminate the Company and its subsidiaries' share of unrealized gains and losses on transactions between the Company and its subsidiaries and the jointly controlled entity. The joint venture is carried at equity method until the date on which the Company and its subsidiaries cease to have joint control over the jointly controlled entity.

Kebijakan akuntansi ventura bersama telah diubah dimana diperlukan untuk memastikan konsistensi dari kebijakan yang diterapkan oleh Perusahaan dan entitas anak.

Accounting policies of the joint ventures have been changed where necessary to ensure consistency with the policies adopted by the Company and its subsidiaries.

Perusahaan dan entitas anak mengukur dan mengakui sisa investasi pada nilai wajar setelah hilangnya pengendalian dan ventura bersama tidak menjadi entitas anak atau entitas asosiasi. Selisih antara nilai tercatat atas hilangnya pengendalian bersama dengan agregat nilai wajar sisa investasi dan hasil pelepasan diakui pada laba rugi. Ketika sisa investasi mempunyai pengaruh yang signifikan, investasi tersebut dicatat sebagai investasi pada entitas asosiasi.

The Company and its subsidiaries measure and recognize the remaining investment at fair value upon loss of control, provided the joint ventures do not become subsidiaries or associates. Any difference between the carrying amount of the jointly controlled entity upon loss of joint control, and the aggregate of the fair value of the remaining investment and proceeds from disposal is recognized in profit or loss. When the remaining investment constitutes significant influence, it is accounted for as investment in an associate.

r. Aset Tak Berwujud

i. Biaya Pengembangan Piranti Lunak
Biaya yang terkait dengan pemeliharaan program piranti lunak komputer diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Biaya pengembangan yang dapat secara langsung diatribusikan kepada desain dan pengujian produk piranti lunak yang dapat diidentifikasi dan unik yang dikendalikan oleh Perusahaan dan entitas anak diakui sebagai aset tak berwujud. Biaya pengembangan piranti lunak komputer diakui sebagai asset yang diamortisasi dengan metode garis lurus berdasarkan estimasi masa manfaatnya.

r. Intangible Assets

i. Software Development Cost
Costs associated with maintaining computer software programs are recognized as an expense as incurred. Development costs that are directly attributable to the design and testing of identifiable and unique software products controlled by the Company. and its subsidiaries are recognized as intangible assets. Computer software development costs recognized as assets are amortized using the straight line method over their estimated useful lives.

ii. Biaya Legal Terkait Pembaruan Hak Atas Tanah

Biaya legal terkait dengan pembaruan hak atas tanah diakui sebagai aset tak berwujud dan diamortisasi sepanjang umur hukum hak.

Setelah pengakuan awal, asset takberwujud dicatat pada biaya perolehan dikurangi akumulasi amortisasi dan akumulasi rugi penurunan nilai. Umur manfaat asset takberwujud dinilai apakah terbatas atau tidak terbatas.

Aset tak berwujud dengan umur manfaat terbatas

Aset tak berwujud dengan umur manfaat terbatas diamortisasi selama umur manfaat ekonomi dengan metode garis lurus (atau metode lainya sepanjang mencerminkan pola manfaat ekonomik masa depan yang diperkirakan dikonsumsi oleh entitas).

Biaya Pengembangan Piranti Lunak diamortisasi dengan tingkat amortisasi sebesar 20% dengan metode garis lurus.

Biaya legal terkait pembaruan hak atas tanah diamortisasi sepanjang mana yang lebih pendek antara masa berlaku hokum hak atau umur ekonomi tanah.

Periode amortisasi dan metode amortisasi untuk aset tak berwujud dengan umur manfaat terbatas ditelaah setidaknya setiap akhir tahun buku.

Aset tak berwujud dengan umur manfaat tidak terbatas

Aset tak berwujud dengan umur manfaat tidak terbatas tidak diamortisasi. Umur manfaat aset tak berwujud yang tidak diamortisasi ditelaah setiap tahun untuk menentukan apakah peristiwa dan keadaan dapat terus mendukung penilaian bahwa umur manfaat tetap tidak terbatas. Jika tidak, perubahan umur manfaat dari tidak terbatas menjadi terbatas diterapkan secara prospektif.

ii. Legal Costs to Renew Land Rights

Legal costs related to renewal of land rights are recognized as intangible assets and amortized over the period of the land rights.

After initial recognition, intangible asset is carried at cost less any accumulated amortization and any accumulated impairment loss. The useful life of intangible asset is assessed to be either finite or indefinite.

Intangible asset with finite useful life

Intangible asset with finite life is amortized over the economic useful life by using a straight-line method (or other method as it reflects the pattern in which the asset's future economic benefits are expected to be consumed by the entity).

Software Development Cost is amortized with amortization rate of 20% using straight line method.

Legal costs to renew land rights are amortized over the validity period of the legal rights or the economic life of the land, whichever the shorter.

The amortization period and the amortization method for an intangible asset with a finite useful life are reviewed at least at each financial year-end.

Intangible asset with indefinite useful life

Intangible asset with indefinite useful life is not amotized. The useful life of an intangible asset that is not being amortized is reviewed annually to determine whether events and circumstances continue to support an indefinite useful life assessment for that asset. If they do not, the change in the useful life assessment from indefinite to finite is accounted for on a prospective basis.

Aset tak berwujud dengan umur manfaat tidak terbatas diuji untuk penurunan nilai setiap tahun dan kapanpun terdapat suatu indikasi bahwa aset tak berwujud mungkin mengalami penurunan nilai.

Intangible asset with indefinite useful life is tested for impairment annually and whenever there is an indication that the intangible asset may be impaired.

s. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Penjualan Tenaga Listrik
Pendapatan penjualan tenaga listrik diakui berdasarkan energi listrik (kWh) yang dipasok kepada PT PLN (Persero) dengan menggunakan formula tarif yang ditetapkan dalam perjanjian jual beli tenaga listrik. Formula tarif mencakup perhitungan komponen harga kapasitas, harga tetap operasi dan pemeliharaan, harga bahan bakar, tingkat pasokan energi serta variabel lainnya.

Pendapatan Bunga
Pendapatan bunga diakru berdasarkan waktu terjadinya dengan acuan jumlah pokok terutang dan tingkat bunga yang berlaku.

Pendapatan Dividen
Pendapatan dividen dari investasi diakui ketika hak pemegang saham untuk menerima pembayaran ditetapkan.

Beban
Beban diakui pada saat terjadinya dengan dasar akrual.

s. Revenue and Expense Recognition

Sale of Electricity
Sale of electricity is recognized based on the supply of electricity energy (kWh) to PT PLN (Persero) using tariff formula stipulated in the power purchase agreements. The tariff formula includes calculation of capacity component, fixed cost for operations and maintenance components, fuel costs, power supply levels and other variables.

Interest Income
Interest revenue is accrued on time basis, by reference to the principal outstanding and at the applicable interest rate.

Dividend Revenue
Dividend revenue from investments is recognized when the shareholders' rights to receive payment has been established.

Expenses
Expenses are recognized as incurred on an accrual basis.

t. Imbalan Kerja

Imbalan Pascakerja
Perusahaan dan entitas anak menyelenggarakan program pensiun imbalan pasti bagi semua karyawan tetap. Perusahaan dan entitas anak juga memberikan imbalan paska kerja lain tanpa pendanaan kepada karyawan yang memenuhi persyaratan kebijakan Perusahaan dan entitas anak.

Sehubungan dengan program imbalan pasti, liabilitas diakui pada laporan posisi keuangan sebesar nilai kini kewajiban imbalan pasti pada akhir periode pelaporan dikurangi nilai wajar aset program. Kewajiban imbalan pasti dihitung setiap tahun oleh aktuaris yang independen dengan menggunakan metode *Projected*

t. Employee Benefits

Post-employment Benefits
The Company and its subsidiaries have established a defined benefit pension plan covering all of their permanent employees. The Company and its subsidiaries also provide other unfunded defined post-employment benefit plans for their qualifying employees based on the Company and its subsidiaries' policies.

The liability recognized in the statement of financial position in respect of defined benefit pension plans is the present value of the defined benefit obligation at the end of the reporting period less the fair value of plan assets. The defined benefit obligation is calculated annually by independent actuaries using the Projected Unit Credit

Unit Credit. Nilai kini kewajiban imbalan pasti ditentukan dengan mendiskontokan arus kas keluar yang diestimasi dengan menggunakan tingkat bunga Obligasi Pemerintah (dikarenakan saat ini tidak ada pasar aktif untuk obligasi perusahaan yang berkualitas tinggi) yang didenominasikan dalam mata uang dimana imbalan akan dibayarkan dan memiliki jangka waktu jatuh tempo mendekati jangka waktu kewajiban pensiun.

Method. The present value of the defined benefit obligation is determined by discounting the estimated future cash outflows using interest rates of Government Bonds (considering currently there is no deep market for high-quality corporate bonds) that are denominated in the currency in which the benefits will be paid, and that have terms to maturity approximating to the terms of the related pension obligation.

Keuntungan dan kerugian aktuarial yang timbul dari penyesuaian dan perubahan dalam asumsi-asumsi aktuarial langsung diakui seluruhnya melalui pendapatan komprehensif lainnya pada saat terjadinya.

Actuarial gains and losses arising from experience adjustments and changes in actuarial assumptions charged or credited to equity in other comprehensive income in the period in which they arise.

Biaya jasa lalu diakui segera dalam laporan laba rugi.

Past-service costs are recognized immediately in profit or loss.

Imbalan Kerja Jangka Panjang
Perhitungan imbalan kerja jangka panjang ditentukan dengan menggunakan *Projected Unit Credit*. Biaya jasa lalu diakui segera dalam laba rugi. Perusahaan dan entitas anak mengakui keuntungan dan kerugian atas kurtailmen atau penyelesaian suatu program imbalan pasti ketika kurtailmen atau penyelesaian tersebut terjadi. Keuntungan atau kerugian atas kurtailmen atau penyelesaian program manfaat pasti diakui di laba rugi ketika kurtailmen atau penyelesaian tersebut terjadi.

Long-term Benefits
Long-term benefits are determined using the Projected Unit Credit Method. Past service costs are recognized immediately in profit or loss. The Company and its subsidiaries recognized gains or losses on the curtailment or settlement of a defined benefit plan when the curtailment or settlement occurs. The gain or loss on a curtailment or settlement of a defined benefit plan is recognized in profit or loss when the curtailment or settlement occurs.

Keuntungan dan kerugian aktuarial yang timbul dari penyesuaian dan perubahan dalam asumsi-asumsi aktuarial langsung diakui seluruhnya melalui laba rugi.

Actuarial gains and losses arising from experience adjustments and changes in actuarial assumptions charged to profit or loss.

Jumlah yang diakui sebagai liabilitas imbalan kerja jangka panjang di laporan posisi keuangan konsolidasian merupakan nilai kini liabilitas imbalan kerja pasti.

The long-term employee benefits obligation recognized in the consolidated statement of financial position represents the present value of the defined benefit obligation.

u. Provisi

Provisi diakui ketika Perusahaan dan entitas anak memiliki kewajiban kini (baik bersifat hukum maupun konstruktif) sebagai akibat peristiwa masa lalu, kemungkinan besar Perusahaan dan entitas anak diharuskan menyelesaikan kewajiban dan estimasi andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat.

u. Provisions

Provisions are recognized when the Company and its subsidiaries have a present obligation (legal or constructive) as a result of a past event and it is probable that the Company and its subsidiaries will be required to settle the obligation, and a reliable estimate can be made on the amount of the obligation.

Jumlah yang diakui sebagai provisi merupakan estimasi terbaik dari pertimbangan yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban kini pada akhir periode pelaporan, dengan mempertimbangkan risiko dan ketidakpastian yang meliputi kewajibannya. Apabila suatu provisi diukur menggunakan arus kas yang diperkirakan untuk menyelesaikan kewajiban kini, maka nilai tercatatnya adalah nilai kini dari arus kas.

The amount recognized as a provision is the best estimate of the consideration required to settle the present obligation at the end of the reporting period, taking into account the risks and uncertainties surrounding the obligation. Where a provision is measured using the cash flows estimated to settle the present obligation, its carrying amount is the present value of those cash flows.

Ketika beberapa atau seluruh manfaat ekonomi untuk penyelesaian provisi yang diharapkan dapat dipulihkan dari pihak ketiga, piutang diakui sebagai aset apabila terdapat kepastian bahwa penggantian akan diterima dan jumlah piutang dapat diukur secara andal.

When some or all of the economic benefits required to settle a provision are expected to be recovered from a third party, a receivable is recognized as an asset if it is virtually certain that reimbursement will be received and the amount of the receivable can be measured reliably.

v. Pajak Penghasilan

Beban pajak kini ditentukan berdasarkan laba kena pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

v. Income Tax

Current tax expense is determined based on the taxable income for the year computed using prevailing tax rates.

Pajak kini dan pajak tangguhan diakui sebagai beban atau penghasilan dalam laporan laba rugi, kecuali sepanjang pajak penghasilan yang berasal dari transaksi atau kejadian yang diakui, diluar laporan laba rugi (baik dalam pendapatan komprehensif lain maupun secara langsung di ekuitas), dalam hal tersebut pajak juga diakui di luar laporan laba rugi atau yang timbul dari akuntansi awal atau kombinasi bisnis. Dalam kasus kombinasi bisnis, pengaruh pajak termasuk dalam akuntansi kombinasi bisnis.

Current and deferred taxes are recognized as an expense or income in profit or loss, except when they relate to items that are recognized outside profit or loss (whether in other comprehensive income or directly in equity), in which case the tax is also recognized outside profit or loss, or where they arise from the initial accounting for a business combination. In the case of a business combination, the tax effect is included in the accounting for the business combination.

Untuk pendapatan yang menjadi subjek pajak penghasilan final, beban pajak diakui secara proporsional dengan jumlah pendapatan akuntansi yang diakui dan disajikan dalam sebagai bagian dari akun beban operasional pada tahun berjalan dikarenakan pajak tersebut tidak memenuhi kriteria sebagai pajak penghasilan.

For income which is subject to final tax, tax expenses are recognized proportionally with the accounting revenue recognized and presented as part of the operating expenses account in the current year as such tax does not satisfy the criteria of income tax.

Jumlah pajak kini untuk periode berjalan dan periode sebelumnya yang belum dibayar diakui sebagai liabilitas. Jika jumlah pajak yang telah dibayar untuk periode berjalan dan periode-periode sebelumnya melebihi jumlah pajak yang terutang untuk periode tersebut, maka kelebihannya diakui sebagai aset. Liabilitas (aset) pajak kini

Current tax for current and prior periods shall, to the extent unpaid, be recognized as a liability. If the amounts already paid in respect of current and prior periods exceed the amounts due for those periods, the excess shall be recognized as an asset. Current tax liabilities (assets) for the current and prior periods shall be measured at the

untuk periode berjalan dan periode sebelumnya diukur sebesar jumlah yang diperkirakan akan dibayar kepada (direstitusi dari) otoritas perpajakan, yang dihitung menggunakan tarif pajak (dan undang-undang pajak) yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan.

amount expected to be paid to (recovered from) the taxation authorities, using the tax rates (and tax laws) that have been enacted or substantively enacted by the end of the reporting period.

Manfaat terkait dengan rugi pajak yang dapat ditarik untuk memulihkan pajak kini dari periode sebelumnya diakui sebagai aset. Aset pajak tangguhan diakui untuk akumulasi rugi pajak belum dikompensasi dan kredit pajak belum dimanfaatkan sepanjang kemungkinan besar laba kena pajak masa depan akan tersedia untuk dimanfaatkan dengan rugi pajak belum dikompensasi dan kredit pajak belum dimanfaatkan.

Tax benefits relating to tax loss that can be carried back to recover current tax of a previous periods is recognized as an asset. Deferred tax asset is recognized for the carryforward of unused tax losses and unused tax credit to the extent that it is probable that future taxable profit will be available against which the unused tax losses and unused tax credits can be utilized.

Seluruh perbedaan temporer kena pajak diakui sebagai liabilitas pajak tangguhan, kecuali perbedaan temporer kena pajak yang berasal dari:
a) pengakuan awal *goodwill*; atau
b) pengakuan awal aset atau liabilitas dari transaksi yang bukan kombinasi bisnis dan pada saat transaksi tidak mempengaruhi laba akuntansi atau laba kena pajak (rugi pajak).

A deferred tax liability shall be recognized for all taxable temporary differences, except to the extent that the deferred tax liability arises from:
a) the initial recognition of goodwill; or
b) the initial recognition of an asset or liability in a transaction which is not a business combination and at the time of the transaction, affects neither accounting profit nor taxable profit (tax loss).

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas konsekuensi pajak periode mendatang yang timbul dari perbedaan jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan konsolidasi dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas. Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dan aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan rugi fiskal, sepanjang besar kemungkinan dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba kena pajak pada masa datang.

Deferred tax assets and liabilities are recognized for the future tax consequences attributable to differences between the financial statement carrying amounts of assets and liabilities and their respective tax bases. Deferred tax liabilities are recognized for all taxable temporary differences and deferred tax assets are recognized for deductible temporary differences and tax losses to the extent that it is probable that taxable income will be available in future periods against which the deductible temporary differences and tax losses can be utilized.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diekspektasikan berlaku dalam periode ketika liabilitas diselesaikan atau aset dipulihkan dengan tarif pajak (dan peraturan pajak) yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan.

Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that are expected to apply in the period in which the liability is settled or the asset realized, based on the tax rates (and tax laws) that have been enacted, or substantively enacted, by the end of the reporting period.

Pengukuran aset dan liabilitas pajak tangguhan mencerminkan konsekuensi pajak yang sesuai dengan cara Perusahaan dan entitas anak ekspektasikan, pada akhir periode pelaporan, untuk memulihkan atau menyelesaikan jumlah tercatat aset dan liabilitasnya.

The measurement of deferred tax assets and deferred tax liabilities reflects the consequences that would follow from the manner in which the Company and its subsidiaries expect, at the end of the reporting period, to recover or settle the carrying amount of their assets and liabilities.

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan dikaji ulang pada akhir periode pelaporan dan dikurangi jumlah tercatatnya jika kemungkinan besar laba kena pajak tidak lagi tersedia dalam jumlah yang memadai untuk mengkompensasikan sebagian atau seluruh aset pajak tangguhan tersebut.

The carrying amount of deferred tax asset is reviewed at the end of each reporting period and reduced to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable profits will be available to allow all or part of the asset to be recovered.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan saling hapus, jika dan hanya jika, ketika entitas memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus aset pajak kini terhadap liabilitas pajak kini dan ketika aset pajak tangguhan dan ketika liabilitas pajak tangguhan terkait dengan pajak penghasilan yang dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama serta Perusahaan dan entitas anak yang berbeda yang bermaksud untuk memulihkan aset dan liabilitas pajak kini dengan dasar neto, atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan, pada setiap periode masa depan dimana jumlah signifikan atas aset atau liabilitas pajak tangguhan diperkirakan untuk diselesaikan atau dipulihkan.

Deferred tax assets and liabilities are offset, if and only if, when there is legally enforceable right to set off current tax assets against current tax liabilities and when they relate to income taxes levied by the same taxation authority and the Company and its subsidiaries intend to settle their current tax assets and current tax liabilities on a net basis, or to reliaze the assets and settle the liabilities simultaneously, in each future period in which significant amounts of deferred tax liabilities or assets are expected to be settled or recovered.

w. Aset dan Liabilitas Pengampunan Pajak

Aset Pengampunan Pajak dan Liabilitas Pengampunan Pajak diakui pada saat Surat Keterangan Pengampunan Pajak (SKPP) diterbitkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia, dan tidak diakui secara neto (saling hapus). Selisih antara Aset Pengampunan Pajak dan Liabilitas Pengampunan Pajak diakui sebagai Tambahan Modal Disetor.

w. Tax Amnesty Assets and Liabilities

Tax Amnesty Assets and Liabilities are recognized upon the issuance of Surat Keterangan Pengampunan Pajak (SKPP) by the Minister of Finance of Republic of Indonesia, and they are not recognized as net amount (offset). The difference between Tax Amnesty Assets and Tax Amnesty Liabilities are recognized as Additional Paid in Capital.

Aset Pengampunan Pajak pada awalnya diakui sebesar nilai yang disetujui dalam SKPP.

Tax Amnesty Assets are initially recognized at the value stated in SKPP.

Liabilitas Pengampunan Pajak pada awalnya diakui sebesar nilai kas dan setara kas yang masih harus dibayarkan oleh Perusahaan sesuai kewajiban kontraktual atas perolehan Aset Pengampunan Pajak.

Tax Amnesty Liabilities are initially measured at the amount of cash or cash equivalents to be settled by the Company according to the contractual obligation with respect to the acquisition of respective Tax Amnesty Assets.

Uang tebusan yang dibayarkan oleh Perusahaan untuk memperoleh pengampunan pajak diakui sebagai beban pada periode dimana SKPP diterima oleh Perusahaan.

Setelah pengakuan awal, Aset dan Liabilitas Pengampunan Pajak diukur sesuai dengan SAK yang relevan sesuai dengan klasifikasi masing-masing Aset dan Liabilitas Pengampunan Pajak.

Sehubungan dengan Aset dan Liabilitas Pengampunan Pajak yang diakui, Perusahaan telah mengungkapkan dalam laporan keuangannya:
a. Tanggal SKPP
b. Jumlah yang diakui sebagai Aset Pengampunan Pajak sesuai SKPP
c. Jumlah yang diakui sebagai Liabilitas Pengampunan Pajak.

The redemption money paid by the Company to obtain the tax amnesty is recognized as expense in the period in which the Company receives SKPP.

After initial recognition, Tax Amnesty Assets and Liabilities are measured in accordance with respective relevant SAKs according to the classification of each Tax Amnesty Assets and Liabilities.

With respect to Tax Amnesty Assets and Liabilities recognized, the Company has disclosed the following in its financial statements:
a. The date of SKPP
b. Amount recognized as Tax Amnesty Assets in accordance with SKPP
c. Amount recognized as Tax Amnesty Liabilities.

x. Laba per Saham

Laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba yang diatribusikan kepada pemilik induk dengan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar pada tahun yang bersangkutan.

Laba per saham dilusian dihitung dengan menyesuaikan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar dengan dampak dari semua efek berpotensi saham biasa yang dilutif yang dimiliki perusahaan. Perusahaan tidak memiliki efek berpotensi saham biasa yang dilutif.

x. Earnings per Share

Basic earnings per share is computed by dividing income for the year of attributable to the owners of the Company by the weighted average number of shares outstanding during the year.

Diluted earnings per share are calculated by adjusting the weighted average number of ordinary shares outstanding to assume conversion of all dilutive potential ordinary shares owned by company. The Company does not have any dilutive potential ordinary shares.

4. Pertimbangan Kritis Akuntansi dan Estimasi Akuntansi yang Signifikan

Dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi Perusahaan dan entitas anak, sebagaimana dijelaskan dalam Catatan 3, manajemen diharuskan untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi tentang nilai aset dan liabilitas yang tidak tersedia dari sumber lain. Estimasi dan asumsi berdasarkan pengalaman historis dan faktor lain yang dianggap relevan. Hasil aktual dapat berbeda dari estimasi tersebut.

4. Critical Accounting Judgments and Estimates

In the application of the Company and its subsidiaries' accounting policies, which are described in Note 3, the management is required to make judgments, estimates and assumptions about the carrying amounts of assets and liabilities that are not readily apparent from other sources. The estimates and associated assumptions are based on historical experience and other factors that are considered to be relevant. Actual results may differ from these estimates.

Estimasi dan asumsi yang mendasari direviu secara berkelanjutan. Revisi terhadap estimasi akuntansi akan diakui pada periode dimana estimasi tersebut direvisi, jika revisi tersebut hanya berpengaruh terhadap periode tersebut, atau pada periode revisi dan periode berikutnya jika revisi tersebut mempengaruhi periode tersebut.

The estimates and underlying assumptions are reviewed on an ongoing basis. Revisions to accounting estimates are recognized in the period which the estimate is revised if the revision affects only that period, or in the period of the revision and future periods if the revision affects both current and future periods.

Pertimbangan Kritis dalam Penerapan Kebijakan Akuntansi

Dalam proses penerapan kebijakan akuntansi yang dijelaskan dalam Catatan 3, Perusahaan telah menentukan hal-hal berikut yang memerlukan pertimbangan signifikan:

Critical Judgments in Applying Accounting Policies

In the process of applying the accounting policies described in Note 3, the Company has identified the following matters under which significant judgements are made:

Nilai Wajar Pembangkit Listrik di Dalam Sewa Pembiayaan

Perusahaan dan entitas anak menentukan nilai wajar untuk beberapa pembangkit listrik berdasarkan sewa pembiayaan, sebagai hasil dari implementasi ISAK 8, dengan cara menerapkan teknik penilaian yang tepat dengan menggunakan asumsi utama dari manajemen yang mencakup estimasi atas tingkat diskonto yang digunakan dan alokasi atas komponen pembayaran.

Fair Value of Power Plants Held Under Finance Lease

The Company and its subsidiaries determined the fair value of certain power plants held under finance lease, as a result of adoption of ISAK 8, by applying appropriate valuation techniques using key assumptions from management which include estimations on discount rates used and allocation of payment components.

Meskipun diyakini bahwa asumsi tersebut didasarkan pada dasar memadai, perubahan signifikan dalam asumsi tersebut berdampak material jumlah tercatat aset dan utang sewa pembiayaan yang berdampak pada operasi Perusahaan dan entitas anak.

While it is believed that the assumptions are based on reasonable basis, significant changes in these assumptions may affect materially the recorded leased assets and leased liabilities, which may impact the result of the Company and its subsidiaries operation.

Kepentingan dalam pengaturan bersama

Pertimbangan diperlukan untuk menentukan ketika Perusahaan dan entitas anak memiliki pengendalian bersama, yang membutuhkan penilaian mengenai aktivitas yang relevan dan ketika keputusan yang berkaitan dengan aktivitas tersebut membutuhkan persetujuan dengan suara bulat. Perusahaan dan entitas anak menentukan bahwa aktivitas yang relevan untuk pengaturan bersama adalah aktivitas yang berkaitan dengan operasi dan pengambilan keputusan dalam pengaturan tersebut.

Joint Arrangements

Judgement is required to determine when the Company and its subsidiaries has joint control, which requires an assessment of the relevant activities and when the decisions in relation to those activities require unanimous consent. The Company and its subsidiaries has determined that the relevant activities for its joint arrangements are those relating to the operating and capital decisions of the arrangement.

Pertimbangan juga diperlukan untuk mengklasifikasikan pengaturan bersama sebagai pengendalian bersama atau ventura bersama. Pengklasifikasian pengaturan tersebut mengharuskan Perusahaan dan entitas anak untuk menilai hak dan kewajiban yang timbul dari pengaturan tersebut. Secara khusus, Perusahaan dan entitas anak mempertimbangkan:

- Struktur dari pengaturan bersama - apakah dibentuk melalui kendaraan terpisah

- Ketika pengaturan tersebut terstruktur melalui kendaraan terpisah, Perusahaan dan entitas anak juga mempertimbangkan hak dan kewajiban yang timbul dari:
  - Bentuk legal dari kendaraan terpisah
  - Persyaratan dari perjanjian kontraktual
  - Fakta dan kondisi lain (ketika relevan)

Penilaian ini sering membutuhkan pertimbangan yang signifikan, dan kesimpulan yang berbeda mengenai pengendalian bersama dan apakah pengaturan tersebut merupakan operasi bersama atau ventura bersama, dapat memiliki dampak material terhadap akuntansi.

Perusahaan dan entitas anak memiliki pengaturan bersama yang terstruktur melalui ventura bersama, PT Rajamandala Electric Power dan PT Perta Daya Gas. Struktur dan persyaratan dari perjanjian kontraktual mengindikasikan bahwa Perusahaan dan entitas anak memiliki hak atas aset bersih dari pengaturan bersama tersebut. Perusahaan dan entitas anak menilai fakta dan kondisi lain yang berkaitan dengan pengaturan ini dan kesimpulan final dari penilaian yang dilakukan adalah pengaturan tersebut merupakan ventura bersama. Lihat Catatan 7 untuk informasi lebih lanjut.

Sumber Estimasi Ketidakpastian
Asumsi utama mengenai masa depan dan sumber estimasi lainnya pada akhir periode pelaporan, yang memiliki risiko signifikan yang mengakibatkan penyesuaian material terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya dijelaskan dibawah ini:

Judgement is also required to classify a joint arrangement as either a joint operation or joint venture. Classifying the arrangement requires the Company and its subsidiaries to assess its rights and obligations arising from the arrangement. Specifically, it considers:

- *The structure of the joint arrangement - whether it is structured through a separate vehicle*
- *When the arrangement is structured through a separate vehicle, the Company and its subsidiaries also considers the rights and obligations arising from:*
  - *The legal form of the separate vehicle*
  - *The terms of the contractual arrangement*
  - *Other facts and circumstances (when relevant)*

This assessment often requires significant judgement, and a different conclusion on joint control and also whether the arrangement is a joint operation or a joint venture, may materially impact the accounting.

The Company and its subsidiaries has a joint arrangement which is structured through joint ventures, PT Rajamandala Electric Power and PT Perta Daya Gas. This structure and the terms of the contractual arrangement indicate that the Company and its subsidiaries has rights to the net assets of the arrangement. The Company and its subsidiaries also assessed the other facts and circumstances relating to this arrangement and the final conclusion was that the arrangement was a joint venture. The final conclusion was that the arrangement was a joint venture. Refer to Note 7 for more information.

Key Sources of Estimation Uncertainty
The key assumptions concerning future and other key sources of estimation at the end of the reporting period, that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial year are discussed below:

Rugi Penurunan Nilai Pinjaman Diberikan dan Piutang
Perusahaan dan entitas anak menilai penurunan nilai pinjaman diberikan dan piutang pada setiap tanggal pelaporan. Dalam menentukan apakah rugi penurunan nilai harus dicatat dalam laba rugi, manajemen membuat penilaian, apakah terdapat bukti objektif bahwa kerugian telah terjadi. Manajemen juga membuat penilaian atas metodologi dan asumsi untuk memperkirakan jumlah dan waktu arus kas masa depan yang direviu secara berkala untuk mengurangi perbedaan antara estimasi kerugian dan kerugian aktualnya. Nilai tercatat pinjaman diberikan dan piutang diungkapkan dalam Catatan 11.

Impairment Loss on Loans and Receivables

The Company and its subsidiaries assess their loans and receivables for impairment at each reporting date. In determining whether an impairment loss should be recorded in profit or loss, management makes a judgement as to whether there is an objective evidence that the loss event has occurred. Management also makes judgement as to the methodology and assumptions for estimating the amount and timing of future cash flows which are reviewed regularly to reduce any difference between loss estimate and actual loss. The carrying amount of loans and receivables are disclosed in Notes 11.

Nilai Wajar Aset Tetap yang Menggunakan Model Revaluasi
Pada tanggal 31 Desember 2015, Perusahaan dan entitas anak melakukan perubahan kebijakan akuntansi dari model biaya menjadi model revaluasi untuk kelas aset tertentu. Pelaksanaan revaluasi aset tetap tersebut dilakukan oleh penilai publik independen.

Fair Value of Property, plant and equipment that Use Revaluation Model
As of December 31, 2015, the Company and its subsidiaries changed their accounting policy from cost model to revaluation model for certain class of assets. The assets revaluation was performed by an independent public valuer.

Dalam proses penilaian, manajemen, dengan bantuan penilai publik independen, menentukan data dan asumsi, menelaah metode penilaian serta berdiskusi dengan penilai. Pendekatan dan metode yang digunakan dalam melakukan revaluasi tergantung pada kelas aset. Walaupun data dan asumsi Perusahaan dan entitas anak dianggap tepat dan wajar, namun perubahan signifikan pada data input atau asumsi yang digunakan dapat berpengaruh secara signifikan terhadap nilai aset yang menggunakan model revaluasi.

Management, with the assistance of independent public valuer, determines the data inputs and assumption, assesses valuation method and hold discussions with the valuers as part of the valuation process. The approaches and methods used in the revaluation depend on the group of assets. While it is believed that the Company and its subsidiaries data and assumptions are reasonable and appropriate, significant changes in data inputs or significant changes in assumptions may materially affect the value of assets that use revaluation model.

Rincian dari pendekatan dan data input signifikan yang digunakan dalam melakukan revaluasi aset tetap diungkapkan dalam Catatan 6.

Detail of valuation approach and significant data input used in the revaluation of property, plant and equipment and investment properties are disclosed in Note 6.

Imbalan Pascakerja
Penentuan liabilitas pensiun dan imbalan kerja tergantung pada pemilihan asumsi tertentu yang digunakan oleh aktuaris dalam menghitung jumlah liabilitas tersebut. Asumsi tersebut termasuk antara lain tingkat diskonto dan tingkat kenaikan gaji. Realisasi yang berbeda dari asumsi Perusahaan dan entitas anak diakumulasi dan diamortisasi selama periode mendatang dan akibatnya akan berpengaruh

Post-Employment Benefits
The determination of pension and employee benefits obligations is dependent on selection of certain assumptions used by actuaries in calculating such amounts. Those assumptions include among others, discount rate and rate of salary increase. Actual results that differ from the Company and its subsidiaries' assumptions are accumulated and amortized over future periods and therefore, generally affect the

terhadap jumlah biaya serta liabilitas yang diakui di masa mendatang. Walaupun asumsi Perusahaan dan entitas anak dianggap tepat dan wajar, namun perubahan signifikan pada kenyataannya atau perubahan signifikan dalam asumsi yang digunakan dapat berpengaruh secara signifikan terhadap liabilitas imbalan pascakerja Perusahaan dan entitas anak.

Asumsi yang digunakan untuk perhitungan liabilitas imbalan pascakerja diungkapkan dalam Catatan 30.

Pajak Penghasilan

Perhitungan beban pajak penghasilan Perusahaan memerlukan pertimbangan dan asumsi dalam menentukan pengurangan beban tertentu selama proses pengestimasian. Semua pertimbangan dan estimasi yang dibuat manajemen dapat dipertanyakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Sebagai akibatnya, terjadi ketidakpastian dalam penentuan pajak. Resolusi posisi pajak yang diambil oleh Perusahaan, melalui negosiasi dengan otoritas pajak yang relevan dapat berlangsung bertahun-tahun dan sangat sulit untuk memprediksi hasil akhirnya. Apabila terdapat perbedaan perhitungan pajak dengan jumlah yang telah dicatat, perbedaan tersebut akan berdampak pada pajak penghasilan dan pajak tangguhan dalam tahun dimana penentuan pajak tersebut dibuat.

Aset pajak tangguhan, termasuk yang timbul dari rugi fiskal dan perbedaan temporer, diakui apabila dianggap lebih mungkin daripada tidak bahwa mereka dapat diterima kembali, dimana hal ini tergantung pada kecukupan pembentukan laba kena pajak di masa depan. Asumsi atas pembentukan laba kena pajak sangat dipengaruhi oleh estimasi dan asumsi manajemen atas tingkat penjualan dan biaya-biaya terkait yang terdapat risiko ketidakpastian, sehingga ada kemungkinan perubahan estimasi dan asumsi tersebut akan mengubah proyeksi laba kena pajak di masa mendatang.

recognized expense and recorded obligation in such future periods. While it is believed that the Company and it subsidiaries' assumptions are reasonable and appropriate, significant differences in actual experience or significant changes in assumptions may materially affect the Company and its subsidiaries' post-employment benefit obligations.

Assumptions used in the calculation of post-employment benefit obligations are disclosed in Note 30.

Income Taxes

The calculations of income tax expense for the Company require judgements and assumptions in determining the deductibility of certain expenses during the estimation process. All judgement and estimates made by management may be challenged by the Directorate General of Taxation. As a result, the ultimate tax determination becomes uncertain. The resolution of tax positions taken by the Company, through negotiations with the relevant tax authorities can take several years to complete and in some cases it is difficult to predict the ultimate outcome. Where the final outcome of these matters is different from the amounts initially recorded, such differences will have an impact on the income tax and deferred income tax provision in the year in which this determination is made.

Deferred tax assets, including those arising from tax losses carried forward and temporary differences, are recognized only where it is considered more likely than not that they will be recovered, which is dependent on the generation of sufficient future taxable profits. The assumptions about the generation of future taxable profits are heavily affected by management's estimates of the expected sales level and the associated costs which are subject to risk and uncertainty and hence there is a possibility that changes in circumstances will alter the projected future taxable profits.

5. Entitas Anak / *Subsidiaries*

Perusahaan memiliki saham entitas anak baik langsung maupun tidak langsung sebagai berikut:

The Company has ownership interests, directly or indirectly, in the following subsidiaries:

Entitas anak/ *Subsidiaries*	Domisili/ *Domicile*	Jenis usaha/ *Nature of business*	Persentase pemilikan/ *Percentage of Ownership* 2016 %	Persentase pemilikan/ *Percentage of Ownership* 2015 %	Tahun operasi komersial/ *Year of commercial operations*	Jumlah aset sebelum eliminasi/ *Total assets before elimination *)* 2016 Rp	Jumlah aset sebelum eliminasi/ *Total assets before elimination *)* 2015 Rp
PT Cogindo DayaBersama ("CDB")	Jakarta	Menghasilkan listrik, pemasok energi, jasa pelayanan serta manajemen energi/ *Produce electricity, energy distribution, energy service, and management*	99,99	99,99	1999	914.789	796.546
PT Artha Daya Coalindo ("ADC")	Jakarta	Perdagangan dan jasa pengangkutan batu bara/ *Trade and coal transportation services*	80,00	60,00	1998	182.293	115.897
PT Indo Ridlatama Power ("IRP")	Kutai	Pembangkitan listrik tenaga uap/ *Steam power plant*	93,96	90,03	**)	607.127	221.224
PT Tangkuban Parahu Geothermal Power ("TPGP")	Jakarta	Pengembangan energi panas bumi dan pembangkit tenaga listrik/ *Development geothermal energy and power generation*	95,21	95,21	**)	83.708	80.207
PT Putra Indotenaga ("PIT")	Jakarta	Ketenagalistrikan dan energi/ *Electricity and energy*	99,99	99,99	2016	417.310	261.163

*) Dalam jutaan Rupiah / *Stated in millions of Rupiah*
**) Dalam tahap pengembangan/ *Under development stage*

Pada tahun 2015, CDB membayarkan dividen tunai sejumlah Rp1.500. Sesuai dengan komposisi pemegang saham CDB, 99,99% dari dividen tersebut sejumlah Rp1.499 dibayarkan kepada Perusahaan dan 0,01% dari dividen tersebut sejumlah Rp1 dibayarkan kepada kepentingan nonpengendali.

In 2015, CDB paid cash dividend amounted to Rp1,500. According to shareholder composition of CDB, 99.99% of the dividends amounted Rp1,499 is paid to the Company and 0.01% of the dividends amounting to Rp1 is paid to non-controlling interest.

Pada tahun 2016, CDB membayarkan dividen tunai sejumlah Rp3.353. Sesuai dengan komposisi pemegang saham CDB, 99,99% dari dividen tersebut sejumlah Rp3.352 dibayarkan kepada Perusahaan dan 0,01% dari dividen tersebut sejumlah Rp1 dibayarkan kepada kepentingan non-pengendali.

In 2016, CDB paid cash dividend amounted Rp3,353. According to shareholder composition of CDB, 99.99% of the dividends amounted Rp3,352 is paid to the Company and 0.01% of the dividends amounting to Rp1 is paid to non-controlling interest.

Pada tahun 2015, ADC membayarkan dividen tunai sejumlah Rp2.500. Sesuai dengan komposisi pemegang saham ADC, 60% dari dividen tersebut sejumlah Rp1.500 dibayarkan kepada Perusahaan dan 40% dari dividen tersebut sejumlah Rp1.000 dibayarkan kepada kepentingan non-pengendali.

In 2015, ADC paid cash dividend amounted Rp2,500. According to shareholder composition of ADC, 60% of the dividends amounted Rp1,500 is paid to the Company and 40% of the dividends amounting to Rp1,000 is paid to non-controlling interest.

Pada tahun 2016, ADC membayarkan dividen tunai sejumlah Rp2.743. Sesuai dengan komposisi pemegang saham ADC, 60% dari dividen tersebut sejumlah Rp1.646 dibayarkan kepada Perusahaan dan 40% dari dividen tersebut sejumlah Rp1.097 dibayarkan kepada kepentingan non-pengendali. Perusahaan kemudian melakukan penambahan penyertaan saham di ADC sebesar Rp15.000 yang meningkatkan modal disetor Perusahaan di ADC menjadi Rp24.000 atau setara 80% saham ADC.

In 2016, ADC paid cash dividend of Rp2,743. In line with shareholder composition of ADC, 60% of the dividends amounting to Rp1,646 is paid to the Company and 40% of the dividends amounting to Rp1,097 is paid to non-controlling interest. The Company then increased their additional shares to ADC amounted Rp15,000 which increases the Company paid up capital in ADC to become Rp24,000 equivalent of 80% shares in ADC.

Pada tahun 2015, Perusahaan melakukan penambahan penyertaan saham di IRP sebesar Rp65.000 yang meningkatkan modal disetor Perusahaan di IRP menjadi Rp202.035 atau setara 90,30% saham IRP.

In 2015, the Company increased their additional shares to IRP amounted Rp65,000 which increases the Company paid up capital in IRP to become Rp202,035 equivalen of 90.30% shares in IRP.

Pada tahun 2016, Perusahaan melakukan penambahan penyertaan saham di IRP sebesar Rp135.000 yang meningkatkan modal disetor Perusahaan di IRP menjadi Rp337.035 atau setara 93,96% saham IRP.

In 2016, the Company increased their additional shares to IRP amounted Rp135,000 which increases the Company paid up capital in IRP to become Rp337,035 equivalent of 93.96% shares in IRP.

Pada tahun 2012, Perusahaan bersama Cyrq Energy, Inc. mendirikan TPGP untuk membangun dan mengoperasikan pembangkit listrik di Purwakarta, Jawa Barat. Modal ditempatkan dan disetor penuh TPGP sebesar US$7.300.000, setara dengan Rp83.074. Perusahaan melakukan penyertaan saham sebesar US$6.950.000 setara dengan Rp66.909 atau setara 95,21% saham TPGP. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2016, TPGP masih dalam tahap eksplorasi.

In 2012, the Company and Cyrq Energy, Inc. established TPGP to build and operate a power plant in Purwakarta, West Java. Subscribed and paid-up capital stock of TPGP amounts US$7,300,000, equivalent to Rp83,074. The Company made initial investment in TPGP amounting to US$6,950,000, equivalent to Rp66,909 or 95.21% of issued of shares of TPGP. As of December 31, 2016, TPGP is still in exploration process.

Pada tanggal 24 Februari 2016, PIT bersama Taicang Harbour Golden Concord Electric Power Generation Co.Ltd mendirikan PT Golden Concord Electric Indotenaga ("PT GCL Indotenaga") untuk mengembangkan, mengoperasikan dan memelihara Pembangkit Listrik Swasta Tenaga Batubara Kalbar-1, 2x100 MW di provinsi Kalimantan Barat, Republik Indonesia.

On February 24, 2016, PIT and Taicang Harbour Golden Concord Electric-Power Generation Co.Ltd established PT Golden Concord Electric Indotenaga ("PT GCL Indotenaga") to develop, operate and maintain Kalbar-1 2x100 MW Coal Fired Power Plant in West Kalimantan province, Republic of Indonesia.

Pada tahun 2016, Perusahaan menambah penyertaan saham di PIT sebesar Rp64.153 untuk mendirikan perusahaan ventura bersama GCL. Penambahan setoran modal ini meningkatkan modal disetor Perusahaan di PIT menjadi Rp289.343 atau setara 99,99% saham PIT.

In 2016, the Company increased additional shares to PIT amounted Rp64,153 to establish a Joint Venture Company GCL. The addition increase the Company paid up capital in PIT to become Rp289,343 equivalent of 99.99% shares in PIT.

PIT melakukan penyertaan saham pada GCL sebesar US$3.150.000 setara dengan Rp42.355 atau 35% saham GCL.

PIT made initial subscription in GCL amounted US$3,150,000, equivalent to Rp42,355, or 35% shares in GCL.

6. Aset Tetap / *6. Property, Plant and Equipment*

	2016						
	Saldo awal/ *Beginning balance* Rp	Penambahan/ *Additions* Rp	Pengurangan/ *Deductions* Rp	Surplus revaluasi/ *Revaluation surplus* Rp	Pemindahan/ *Transfers* Rp	Saldo akhir/ *Ending balance* Rp	
Biaya perolehan/ Revaluasi							***Acquisition cost/ Revaluation***
Pemilikan langsung							*Direct acquisitions*
Tanah	16.313.124	371	--	--	--	16.313.495	*Land*
Bangunan umum, waduk dan prasarana	6.810.717	94.221	--	--	62.940	6.967.878	*Buildings, reservoir and infrastructure*
Instalasi dan mesin pembangkit	166.829.110	482.438	--	--	152.632	167.464.180	*Installation and power plant*
Perlengkapan transmisi	5.829.775	300.323	--	--	201.690	6.331.788	*Transmission equipment*
Perlengkapan pengolahan data dan telekomunikasi	36.716	6.289	--	--	7.137	50.142	*Telecomunication and data procesing equipment*
Perlengkapan umum	771.933	50.988	--	--	2.287	825.208	*General equipment*
Kendaraan bermotor	49.543	13.618	--	--	--	63.161	*Motor vehicles*
Material cadangan utama	232.895	--	--	--	(8.668)	224.227	*Major spare parts*
Sub jumlah	196.873.813	948.248	--	--	418.018	198.240.079	*Sub total*
Aset sewaan							*Leased assets*
Instalasi dan mesin pembangkit	490.646	--	--	--	--	490.646	*Installation and power plant*
Pekerjaan dalam pelaksanaan	331.041	1.027.814	--	--	(486.531)	872.324	*Construction in progress*
Aset tidak digunakan dalam operasi	894.538	--	573.966	--	68.513	389.085	*Assets not used in operation*
Sub jumlah	1.716.225	1.027.814	573.966	--	(418.018)	1.752.055	*Sub total*
Jumlah	198.590.038	1.976.062	573.966	--	--	199.992.134	*Total*
Akumulasi penyusutan							***Accumulated depreciation***
Pemilikan langsung							*Direct acquisitions*
Bangunan umum, waduk dan prasarana	--	313.959	--	--	--	313.959	*Buildings, reservoir and infrastructure*
Instalasi dan mesin pembangkit	--	4.208.504	--	--	(59.845)	4.148.659	*Installation and power plant*
Perlengkapan transmisi	--	143.246	--	--	--	143.246	*Transmission equipment*
Perlengkapan pengolahan data dan telekomunikasi	--	11.107	--	--	--	11.107	*Telecomunication and data procesing equipment*
Perlengkapan umum	612.699	51.865	--	--	--	664.564	*General equipment*
Kendaraan bermotor	46.522	1.769	--	--	--	48.291	*Motor vehicles*
Material cadangan utama	68.186	15.592	--	--	(8.668)	75.110	*Major spare parts*
Sub jumlah	727.407	4.746.042	--	--	(68.513)	5.404.936	*Sub total*
Aset sewaan							*Leased assets*
Instalasi dan mesin pembangkit	296.431	61.331	--	--	--	357.762	*Installation and power plant*
Aset tidak digunakan dalam operasi	821.076	198.931	379.974	--	68.513	708.546	*Assets not used in operation*
Sub jumlah	1.117.507	260.262	379.974	--	68.513	1.066.308	*Sub total*
Akumulasi penyusutan	1.844.914	5.006.304	379.974	--	--	6.471.244	*Accumulated depreciation*
Jumlah tercatat	**196.745.124**					**193.520.890**	***Net carrying value***

	2015						
	Saldo awal/ *Beginning balance* Rp	Penambahan/ *Additions* Rp	Pengurangan/ *Deductions* Rp	Surplus revaluasi/ *Revaluation surplus* Rp	Pemindahan/ *Transfers* Rp	Saldo akhir/ *Ending balance* Rp	
Biaya perolehan/ Revaluasi							***Acquisition cost/ Revaluation***
Pemilikan langsung							*Direct acquisitions*
Tanah	2.524.289	4.528	--	13.784.307	--	16.313.124	*Land*
Bangunan umum, waduk dan prasarana	6.649.899	7.099	--	133.757	19.962	6.810.717	*Buildings, reservoir and infrastructure*
Instalasi dan mesin pembangkit	38.242.645	258.923	266.469	127.728.863	865.148	166.829.110	*Installation and power plant*
Perlengkapan transmisi	4.424.769	16.133	--	332.004	1.056.869	5.829.775	*Transmission equipment*
Perlengkapan pengolahan data dan telekomunikasi	72.574	5.584	16	(41.260)	(166)	36.716	*Telecomunication and data processing equipment*
Perlengkapan umum	661.055	41.257	--	--	69.621	771.933	*General equipment*
Kendaraan bermotor	49.596	--	--	--	(53)	49.543	*Motor vehicles*
Material cadang utama	243.894	196.051	203.414	--	(3.636)	232.895	*Major spare parts*
Sub jumlah	52.868.721	529.575	469.899	141.937.671	2.007.745	196.873.813	*Sub total*
Aset sewaan							*Leased assets*
Instalasi dan mesin pembangkit	490.646	--	--	--	--	490.646	*installation and power plant*
Pekerjaan dalam pelaksanaan	1.851.013	866.719	--	--	(2.386.691)	331.041	*Construction in progress*
Aset tidak digunakan dalam operasi	529.058	--	13.466	--	378.946	894.538	*Assets not used in operation*
Sub jumlah	2.870.717	866.719	13.466	--	(2.007.745)	1.716.225	*Sub total*
Jumlah	55.739.438	1.396.294	483.365	141.937.671	--	198.590.038	*Total*
Akumulasi penyusutan							***Accumulated depreciation***
Pemilikan langsung							*Direct acquisitions*
Bangunan umum, waduk dan prasarana	2.433.625	172.696	--	(2.594.027)	(12.294)	--	*Buildings, reservoir and infrastructure*
Instalasi dan mesin pembangkit	22.902.403	2.284.121	270.846	(24.751.160)	(164.518)	--	*Installation and power plant*
Perlengkapan transmisi	1.884.663	192.716	17	(2.059.908)	(17.454)	--	*Transmission equipment*
Perlengkapan pengolahan data dan telekomunikasi	16.313	31.638	82	(47.703)	(166)	--	*Telecomunication and data procesing equipment*
Perlengkapan umum	596.658	22.502	--	--	(6.461)	612.699	*General equipment*
Kendaraan bermotor	44.282	2.300	--	--	(60)	46.522	*Motor vehicles*
Material cadang utama	62.184	22.499	16.497	--	--	68.186	*Major spare parts*
Sub jumlah	27.940.128	2.728.472	287.442	(29.452.798)	(200.953)	727.407	*Sub total*
Aset sewaan							*Leased assets*
Instalasi dan mesin pembangkit	235.100	61.331	--	--	--	296.431	*Installation and power plant*
Aset tidak digunakan dalam operasi	504.184	129.405	13.466	--	200.953	821.076	*Assets not used in operation*
Sub jumlah	739.284	190.736	13.466	--	200.953	1.117.507	*Sub total*
Akumulasi penyusutan	28.679.412	2.919.208	300.908	(29.452.798)	--	1.844.914	*Accumulated depreciation*
Jumlah tercatat	**27.060.026**					**196.745.124**	***Net carrying value***

Beban penyusutan dialokasikan sebagai berikut:

Depreciation expense was allocated to the following:

	2016 Rp	2015 Rp	
Beban Usaha	4.807.373	2.789.803	*Operating Expenses*
Beban Lain-lain	198.931	129.405	*Others*
Jumlah	**5.006.304**	**2.919.208**	***Total***

Perusahaan memiliki beberapa bidang tanah dengan hak legal berupa Hak Pakai dan Hak

The Company own several pieces of land with Rights to Use and Building Use Rights ("HGB").

Guna Bangunan ("HGB"). Hak Pakai tidak mempunyai jangka waktu. HGB Perusahaan jatuh tempo antara tahun 2017 sampai dengan 2034, tetapi dapat diperpanjang. Perusahaan mempunyai beberapa bidang tanah yang sedang dalam proses perpanjangan HGB dan pengurusan balik nama menjadi atas nama Perusahaan.	*Rights to Use have no expiration date while HGB will expire from 2017 to 2034, but they are renewable by the Company. The Company also have several pieces of land, which are still in an extension process and in the process of transfer of certificate to the name of the Company.*
Instalasi mesin pembangkit serta perlengkapan transmisi diasuransikan kepada PT Tugu Kresna Pratama dan PT Asuransi Jasa Indonesia, pihak berelasi, terhadap risiko kebakaran dan risiko lainnya dengan jumlah pertanggungan sebesar Rp8.100.926 dan US$4.455.742.928 (setara dengan Rp59.867.361) pada tanggal 31 Desember 2016 dan, Rp8.100.926 dan US$4.328.794.659 (setara dengan Rp59.715.722) pada tanggal 31 Desember 2015. Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutup kemungkinan kerugian atas aset yang dipertanggungkan.	*Power plant installations and transmission equipments were insured against fire and other possible risks with PT Asuransi Tugu Kresna and PT Asuransi Jasa Indonesia, a related party, with insurance coverage of Rp8,100,926 and US$4,455,742,928 (equivalent to Rp59,867,361) as of December 31, 2016 and, Rp8,100,926 and US$4,328,794,659 (equivalent Rp59,715,722) as of December 31, 2015. Management believes that the insurance coverage is adequate to cover possible losses on the assets insured.*
Aset sewaan merupakan pembangkit tenaga listrik berdasarkan perjanjian dengan kerja sama operasi PT Wijaya Karya (Persero) Tbk – PT Mirlindo Padu Kencana dalam bentuk sewa pembiayaan.	*Leased assets represent certain power plants under agreement with joint operation PT Wijaya Karya (Persero) Tbk - PT Mirlindo Padu Kencana which were accounted for as finance lease.*
Jumlah tercatat bruto dari aset tetap yang telah disusutkan penuh dan masih digunakan tahun 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp650.655 dan Rp536.317.	*Gross carrying amount of property, plant and equipment that have been fully depreciated and still in used in 2016 and 2015 amounted to Rp650,655 and Rp536,317, respectively.*
Manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat kejadian atau perubahan keadaan yang mengindikasikan penurunan nilai aset tetap pada tanggal pelaporan.	*Management believes that there are no events or changes in circumstances which may indicate impairment of property, plant and equipment as of the reporting date.*
Pada tanggal 31 Desember 2015, Perusahaan melakukan perubahan kebijakan akuntansi atas kelas aset tertentu dari model biaya menjadi model revaluasi, mengikuti PT PLN (Persero), entitas induk.	*On December 31, 2015, the Company changed their accounting policy for certain class of assets from the cost model to the revaluation model, following PT PLN (Persero), parent entity.*
Revaluasi aset tetap untuk PT PLN (Persero) dan entitas anak dilaksanakan oleh Kantor Jasa Penilai Publik Rengganis, Hamid & Rekan ("KJPP RHR"), Penilai Publik Independen yang telah terdaftar di Kementerian Keuangan dengan No. 2.09.0012 dan OJK.	*The revaluation of property, plant and equipment of PT PLN (Persero) and its subsidiaries is conducted by Kantor Jasa Penilai Publik Rengganis, Hamid & Rekan ("KJPP RHR"), an Independent Public Valuer registered in the Ministry of Finance No. 2.09.0012 and OJK.*

Standar Penilaian yang digunakan adalah Standar Penilaian Indonesia edisi VI - 2015, dengan menggunakan pendekatan penilaian berikut ini:

1. Pendekatan Pasar
   Pendekatan ini mempertimbangkan penjualan dari aset sejenis atau pengganti dan data pasar yang terkait, serta menghasilkan estimasi nilai melalui proses perbandingan. Pada dasarnya, properti yang dinilai (obyek penilaian) dibandingkan dengan properti yang sebanding, baik dari transaksi yang telah terjadi maupun properti yang masih dalam tahap penawaran penjualan dari suatu proses jual beli.

   Pendekatan pasar digunakan untuk kelas aset tanah.

2. Pendekatan Pendapatan
   Pendekatan ini mempertimbangkan pendapatan dan biaya yang berhubungan dengan aset yang dinilai dan mengestimasikan nilai melalui proses kapitalisasi. Kapitalisasi menghubungkan pendapatan (umumnya pendapatan bersih) dengan suatu definisi jenis nilai melalui konversi pendapatan menjadi estimasi nilai. Proses ini dapat menggunakan metode kapitalisasi langsung atau metode Arus Kas Terdiskonto, atau keduanya.

   Pendekatan pendapatan digunakan untuk kelas aset tanah dengan peruntukan komersial atau tanah dengan skala pengembangan.

3. Pendekatan Biaya
   Pendekatan ini berdasarkan prinsip bahwa harga dimana pembeli di pasar akan membayar atas aset yang sedang dinilai tidak akan lebih dari biaya untuk membeli atau mengkonstruksi sebuat aset modern yang ekuivalen, tanpa mempertimbangkan biaya akibat penundaan waktu dan biaya keterlambatan. Untuk aset yang tidak baru, pendekatan biaya memperhitungkan estimasi depresiasi termasuk penyusutan fisik dan keusangan lainnya (fungsional dan eksternal). Biaya konstruksi dan depresiasi ditentukan oleh hasil analisis dari perkiraan biaya konstruksi dan depresiasi sesuai dengan kelaziman yang ada di pasar atau dalam praktek penilaian.

The valuation,standard used is Indonesian Valuation Standards edition VI – 2015,with following valuation approaches:

1. *Market approach*
   This approach considers the sales of similar assets or replacement assets and related market information, which provides value estimation by a comparison process. Basically, the properties being valued (object being appraised) are compared to other similar properties that either have been transacted or offered for sale in a sale and purchase transaction.

   The market approach is applied to the asset class of land.

2. *Income approach*
   This approach considers the income and costs related to the assets being valued and estimates value through a capitalization process. Capitalization connects income (generally net income) with certain definition of value through convertion of income into the estimated value. This process uses the direct capitalization method or Discounted Cash Flow method or both.

   The income approach is applied to the asset class of commercial land or land with development scale.

3. *Cost approach*
   This approach is based on the principle that the price that a buyer in the market would pay for the asset being valued would not be more than the cost to purchase or construct a modern equivalent asset, without taking into consideration undue time, and overtime charges. For assets which are not new, the cost approach includes depreciation estimation including physical depreciation and other obsolescence (functional and external). Construction cost and depreciation should be determined from analysis of the construction cost and estimation of depreciation according to the prevalence in the market or in valuation practice.

Pendekatan biaya digunakan untuk kelas aset bangunan umum, waduk dan prasarana, instalasi dan mesin pembangkit, perlengkapan transmisi, perlengkapan distribusi, perlengkapan pengolahan data dan telekomunikasi yang digunakan dalam penyediaan listrik.

The cost approach is applied to asset classes of buildings, reservoir and infrastructure, installation and power plants, transmission equipments, distribution equipments, data processing and telecommunications equipments used in the power supply.

Informasi mengenai penilaian kembali aset tetap pada tanggal 31 Desember 2015 untuk Kelompok Aset yang Direvaluasi adalah sebagai berikut:

Information on the revaluation of assets as of December 31, 2015 for Classes of Revalued Assets are as follows:

	Jumlah tercatat sebelum revaluasi/ *Net carrying value before revaluation* 31 Desember/ *December 31,* 2015 Rp	**Surplus (rugi) revaluasi/ *Revaluation surplus (loss)*** Rp	**Nilai wajar/ *Fair value* 31 Desember/ *December 31,* 2015** Rp	
Nilai Revaluasi				***Revalued amount***
Pemilikan langsung				*Direct Acquisitions*
Tanah	2.528.817	13.784.307	16.313.124	*Land*
Bangunan umum, waduk dan prasarana	6.676.960	133.757	6.810.717	*Buildings, reservoir and infrastructure*
Instalasi dan mesin pembangkit	39.100.247	127.728.863	166.829.110	*Installation and power plan*
Perlengkapan transmisi	5.497.771	332.004	5.829.775	*Transmission equipment*
Perlengkapan pengolahan data dan telekomunikasi	77.976	(41.260)	36.716	*Telecomunication and data procesing equipment*
Sub jumlah	53.881.771	141.937.671	195.819.442	*Sub total*
Akumulasi penyusutan				***Accumulated depreciation***
Pemilikan langsung				*Direct Acquisitions*
Bangunan umum, waduk dan prasarana	(2.594.027)	2.594.027	--	*Buildings, reservoir and infrastructure*
Instalasi dan mesin pembangkit	(24.751.160)	24.751.160	--	*Installation and power plan*
Perlengkapan transmisi	(2.059.908)	2.059.908	--	*Transmission equipment*
Perlengkapan pengolahan data dan telekomunikasi	(47.703)	47.703	--	*Telecomunication and data procesing equipment*
Sub jumlah	(29.452.798)	29.452.798	--	*Sub total*
Jumlah tercatat	**24.428.973**	**171.390.469**	**195.819.442**	***Net carrying value***

Per 31 Desember 2015, jumlah kenaikan nilai tercatat yang timbul dari revaluasi kelas aset yang direvaluasi dicatat sebagai surplus revaluasi aset tetap adalah sebesar Rp171.390.469.

As of December 31,2015, total increase in the carrying amounts of the classes of revaluated assets is recorded as property, plant and equipment revaluation surplus amounting to Rp171,390,469.

Surplus revaluasi, saling hapus dengan penghasilan pajak tangguhan terkait dan pajak final atas revaluasi aset tetap dikreditkan pada penghasilan komprehensif lain dan disajikan

The revaluation surplus, net of applicable deferred income taxes and final tax on property, plant and equipment revaluation, is credited to other comprehensive income and presented in

sebagai Surplus Revaluasi Aset Tetap pada penghasilan komprehensif lain.

Property, plant and equipment Revaluation Surplus in other comprehensive income section.

Tabel di bawah ini menganalisis aset non-keuangan yang dicatat pada Nilai Wajar berdasarkan Hirarki Nilai Wajar sesuai dengan PSAK 68: Pengukuran Nilai Wajar. Perbedaan tingkatan Nilai Wajar dijelaskan sebagai berikut:

- Harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik (Level 1);
- *Input* selain dari harga kuotasian yang termasuk dalam Level 1 yang dapat diobservasi untuk aset dan liabilitas, baik secara langsung atau secara tidak langsung (Level 2);
- *Input* untuk aset atau liabilitas yang tidak didasarkan pada data pasar yang dapat diobservasi baik secara langsung maupun tidak langsung (Level 3).

The table below analyses non-financial assets recorded at fair value, based on Fair Value Hierarchy in SFAS 68: Fair Value Measurement. The different levels of Fair Value are defined as follows:

- *Quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities (Level 1);*
- *Inputs other than quoted prices included in Level 1 that are observable for the asset or liability, either directly or indirectly (Level 2);*
- *Inputs for the asset or liability that are not based on observable market data, neither directly or indirectly (Level 3).*

	Pengukuran nilai wajar 31 Desember 2015 menggunakan/ *Fair value measurement at December 31, 2015 using*				
	Tingkat 1/ *Level 1*	**Tingkat 2/ *Level 2***	**Tingkat 3/ *Level 3***	**Jumlah/ *Total***	
	Rp	**Rp**	**Rp**	**Rp**	
Pengukuran nilai wajar berulang					*Recurring fair value measurement*
Tanah	--	2.392.947	13.920.177	16.313.124	*Land*
Bangunan umum, waduk dan prasarana	--	343.481	6.467.236	6.810.717	*Buildings, reservoir and infrastructure*
Instalasi dan mesin pembangkit	--	--	166.829.110	166.829.110	*Installation and power plant*
Perlengkapan transmisi	--	--	5.829.755	5.829.755	*Transmission equipment*
Perlengkapan pengolahan data dan telekomunikasi	--	--	36.716	36.716	*Telecomunication and data processing equipment*
Jumlah	**--**	**2.736.428**	**193.082.994**	**195.819.422**	***Total***

Tidak terdapat aset tetap yang bisa digolongkan ke dalam nilai wajar level 1.

There were no property, plant and equipment which could be classified as the level 1 Fair Value.

Nilai wajar level 2 dari tanah dihitung dengan menggunakan pendekatan pasar dan pendekatan pendapatan, sedangkan untuk bangunan menggunakan pendekatan biaya. *Input* yang diperoleh dari pasar yaitu antara lain:

a. Harga jual atau harga sewa per meter persegi
b. Tingkat hunian
c. Tingkat pertumbuhan
d. Tingkat diskonto dan tingkat kapitalisasi

The level 2 Fair Value of land is calculated using the market approach and income approach, while building value is calculated using the cost approach. Data inputs were obtained from the market that consists of among others:

a. Sale or rental price per square meter
b. Occupancy rate
c. Growth rate
d. Discount rate and capitalization rate

e. Biaya pembuatan baru per meter persegi
f. Depresiasi, keusangan fungsional dan eksternal

Penyesuaian dilakukan berdasarkan ukuran, lokasi, bentuk dan spesifikasi, hak atas tanah dan elemen perbandingan lainnya.

Nilai wajar level 3 dihitung dengan menerapkan pendekatan pasar, pendekatan pendapatan dan pendekatan biaya dengan menggunakan *input* yang tidak dapat diobservasi.

Selain menggunakan *input* yang berasal dari pasar, KJPP RHR juga menggunakan *input* yang tidak dapat diobservasi dari pasar dan menggunakan asumsi khusus terkait dengan jenis aset yang tergolong sebagai properti khusus, seperti pembangkit listrik, jaringan transmisi dan distribusi, gardu listrik dan lainnya.

Penyesuaian dilakukan berdasarkan ukuran, kapasitas, usia, lokasi, bentuk dan spesifikasi, hak atas tanah dan elemen perbandingan lainnya.

Informasi mengenai pengukuran nilai wajar yang menggunakan informasi signifikan yang tidak dapat diobservasi (Level 3) adalah sebagai berikut:

e. Replacement cost new per square meter
f. Depreciation, functional and external obsolescence

Adjustments were made based on size, location, shapes and specifications, land and other comparison elements.

The level 3 Fair Value is calculated through the market approach, income approach and cost approach by using unobservable inputs.

Other than the data inputs observed from the market, KJPP RHR also used unobservable market data inputs and used special assumptions related to the assets classified as specialized property, such as power plants, transmission and distribution networks, substations and others.

Adjustments were made based on size, capacity, age, location, shapes and specifications, land and other comparison elements.

Information about fair value measurements using significant unobservable inputs (Level 3) are as follows:

	Nilai wajar pada 31 Desember 2015/ *Fair value at December 31, 2015* Rp	Teknik penilaian/ *Valuation technique*	Informasi yang tidak dapat diobservasi/ *Unobservable Input*	Kisaran input yang tidak dapat diobservasi/ *Range of unobservable inputs* %	Hubungan informasi yang tidak dapat diobservasi terhadap nilai wajar/ *Relationship of unobservable inputs to fair value*	
Tanah	**13.920.177**					***Land***
Tanah Kantor	191.012	Pendekatan pendapatan dengan metode pendekatan lahan/*Income approach with the land approach method*	- Perubahan peruntukan/ *Zoning changes* - Penyesuaian parameter pengembangan/ *Adjustment of parameter development*	1.35 - 3.4	Semakin tinggil Koefisien Luas Bangunan (KLB) maka semakin tinggi nilai wajar/ *The higher the KLB, the higher fair value*	*Land for office*
Tanah Pembangkit	13.729.165	Pendekatan pendapatan dengan metode pendekatan lahan/*Income approach with the land approach method*	- Perubahan peruntukan/ *Zoning changes* - Penyesuaian parameter pengembangan/ *Adjustment of parameter development*	1.35 - 3.4	Semakin tinggil KLB maka semakin tinggi nilai wajar/ *The higher the KLB, the higher fair value*	*Land for power plant*
Bangunan	**6.467.236**					***Buliding***
Bangunan umum	1.351.779	Pendekatan biaya/ *Cost approach*	Penyusutan fungsional/ *Functional depreciation*	0% - 83%	Semakin besar penyusutan fungsional maka semakin rendah nilai wajar/ *The higher depreciation, the lower fair value*	*General building*

	Nilai wajar pada 31 Desember 2015/ *Fair value at December 31, 2015* Rp	Teknik penilaian/ *Valuation technique*	Informasi yang tidak dapat diobservasi/ *Unobservable Input*	Kisaran input yang tidak dapat diobservasi/ *Range of unobservable inputs* %	Hubungan informasi yang tidak dapat diobservasi terhadap nilai wajar/ *Relationship of unobservable inputs to fair value*	
Bangunan saluran air dan perlengkapannya	5.053.604	Trending/ *Trending*	Penyusutan fungsional/ *Functional depreciation*	1.00 - 2.44	Semakin besar penyusutan fungsional maka semakin rendah nilai wajar/ *The higher depreciation, the lower fair value*	*Hydro building and the supplies*
Jalan dan sepur samping	61.853	Pendekatan biaya/ *Cost approach*	Index/ *Index*	0% - 83%	Semakin besar tingkat Index maka semakin tinggi nilai wajar/ *The higher index, the higher fair value*	*Road and rail side*
Instalasi dan mesin pembangkit	166.829.110	Pendekatan biaya/ *Cost approach*	Penyusutan fungsional/ *Functional depreciation*	1% - 23%	Semakin besar penyusutan fungsional maka semakin rendah nialia wajar/ *The higher depreciation, the lower fair value*	***Installation and power plant***
Peralatan transmisi	5.829.775	Pendekatan biaya/ *Cost approach*	Index/ *Index*	1.00 - 1.54	Semakin besar tingkat Index maka semakin tinggi nilai wajar/ *The higher index, the higher fair value*	***Transmission equipment***
Perlengkapan pengolahan data dan telekomunikasi	36.716	Pendekatan biaya/ Cost approach	Index/ *Index*	1.00 - 1.023	Semakin besar tingkat Index maka semakin tinggi nilai wajar/ *The higher index, the higher fair value*	***Telecomunication and data processing equipment***

Perusahaan juga melakukan penilaian kembali atas aset tetap untuk tujuan perpajakan.

The Company also performed revaluation of Property, plant and equipment for tax purposes.

Pada tahun 2016, manajemen Perusahaan berpendapat bahwa nilai wajar aset tetap tidak berbeda secara material dengan jumlah tercatatnya sehingga tidak melakukan revaluasi aset tetap.

In 2016, the Company's management believe that the fair value of property, plant and equipment is not materially different with its carrying amount, hence did not revalue its property, plant and equipment.

Pekerjaan Dalam Pelaksanaan
Akun ini merupakan biaya-biaya yang terjadi sehubungan dengan pembangunan dan renovasi/ perbaikan sarana kelistrikan, sebagai berikut:

Construction In Progress
This account represents costs incurred in relation to the construction and renovation/ betterment of power supply facilities, as follows:

	2016 Rp	2015 Rp	
Pembangkit			***Power Plant***
Tenaga uap	102.430	48.965	*Steam power plants*
Tenaga panas bumi	58.337	10.871	*Geothermal power plants*
Tenaga gas	49.350	48.292	*Gas power plants*
Tenaga air	6.380	--	*Hydro power plants*
Tenaga gas/ uap	5.704	37.798	*Gas/ steam power plants*
Lain-lain	650.123	185.115	*Others*
Jumlah	**872.324**	**331.041**	***Total***

Aset Tidak Digunakan Dalam Operasi
Aset tidak digunakan dalam operasi meliputi aset tetap akan direlokasi, sementara belum digunakan dalam operasi serta aset tetap akan diperbaiki.

Assets Not Used In Operations
Assets not used in operations comprised of those to be relocated, those temporarily not in use in operations, and those to be repaired.

Penyusutan atas aset yang tidak digunakan dalam operasi sebesar Rp198.931 tahun 2016 dan Rp129.405 tahun 2015 dicatat sebagai bagian dari lain-lain bersih.

Depreciation on assets not used in operations amounting to Rp198,931 in 2016 and Rp129,405 in 2015 are recorded as part of others – net.

Manajemen berpendapat bahwa penyusutan atas aset yang tidak digunakan dalam operasi memadai untuk menutup risiko kerugian penurunan nilai yang mungkin timbul dari aset tersebut.

Management believes that depreciation on assets not used in operations is adequate to cover possible loss on impairment on the value of such assets.

7. Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama / *7. Investments in Associate and Joint Ventures*

Rincian investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama adalah sebagai berikut:

Details of investment in associate and joint venturers are as follows:

Nama entitas asosiasi/ ventura bersama/ *Name of associate/ joint ventures*	Domisili/ *Domicile*	Jenis Usaha/ *Nature of business*	Tahun operasi komersial/ *Year commercial operations*	Persentase penyertaan/ *Percertage of ownership* 2016 %	2015 %
PT Indo Pusaka Berau ("IPB")	Berau	Pembangkit listrik/ *Electricity supplier*	2005	46,80	46,80
PT Rajamandala Electric Power ("REP")	Jakarta	Pembangkit listrik/ *Electricity supplier*	*)	51,00	51,00
PT Perta Daya Gas ("PDG")	Jakarta	Jasa pengangkutan, penyimpanan dan regasifikasi LNG/ *Transportation, storage and regasification of LNG*	2015	35,00	35,00
PT GCL Indotenaga ("GCL")	Jakarta	Pembangkit listrik/ *Electricity supplier*	*)	35,00	--

*) tahap pengembangan/ *development stage*

Mutasi investasi pada entitas asosiasi/ ventura bersama adalah sebagai berikut:

The changes in investments in associate/ joint ventures are as follows:

	Jumlah tercatat 1 Januari 2016/ *Carrying amount January 1, 2016* Rp	Penambahan (pengurangan)/ *Addition (deduction)* Rp	Dividen/ *Dividend* Rp	Bagian atas laba (rugi) bersih/ *Share of profit (loss)* Rp	Jumlah tercatat 31 Desember 2016/ *Carrying amount December 31, 2016* Rp	
Asosiasi						*Associate*
PT Indo Pusaka Berau	101.349	--	--	10.249	111.598	*PT Indo Pusaka Berau*
Ventura Bersama						*Joint Ventures*
PT Rajamandala Electric Power	102.347	13.447	--	(987)	114.807	*PT Rajamandala Electric Power*
PT Perta Daya Gas	--	--	--	--	--	*PT Perta Daya Gas*
PT GCL Indotenaga	--	42.355	--	(1.713)	40.642	*PT GCL Indotenaga*
Jumlah	**203.696**	**55.802**	**--**	**7.549**	**267.047**	***Total***

	Jumlah tercatat 1 Januari 2015/ *Carrying amount January 1, 2015* Rp	Penambahan (pengurangan)/ *Addition (deduction)* Rp	Dividen/ *Dividend* Rp	Bagian atas laba (rugi) bersih / *Share of profit (loss)* Rp	Jumlah tercatat 31 Desember 2015/ *Carrying amount December 31, 2015* Rp	
Asosiasi						*Associate*
PT Indo Pusaka Berau	98.020	--	(2.327)	5.656	101.349	*PT Indo Pusaka Berau*
Ventura Bersama						*Joint Ventures*
PT Rajamandala Electric Power	100.520	--	--	1.827	102.347	*PT Rajamandala Electric Power*
PT Perta Daya Gas	--	--	--	--	--	*PT Perta Daya Gas*
Jumlah	**198.540**	**--**	**(2.327)**	**7.483**	**203.696**	***Total***

Seluruh entitas asosiasi dan ventura bersama dicatat oleh Perusahaan dan entitas anak dengan menggunakan metode ekuitas. Seluruh entitas adalah entitas tertutup dan tidak terdapat harga pasar yang dikutip yang tersedia untuk sahamnya.

All the associate and joint ventures are recorded by the Company and its subsidiaries using the equity method. They are private entities and their no quoted market price available for shares.

Per 31 Desember 2016 dan 2015, manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat pembatasan dan risiko signifikan yang terkait dengan investasi pada asosiasi dan ventura bersama.

As of December 31, 2016 and 2015, management believes that there is no significant restriction and risk regarding the investment in associate and joint ventures.

Berikut ini adalah ringkasan informasi keuangan entitas asosiasi dan ventura bersama pada 31 Desember 2016 dan 2015 yang dicatat dengan menggunakan metode ekuitas.

The following table contains the summarized financial information for associate and joint ventures as of December 31, 2016 and 2015, which are accounted for using the equity method.

Entitas asosiasi/ *Associate*

	IPB		
	2016 Rp	2015 RP	
Lancar			*Current*
Kas dan setara kas	1.670	7.973	*Cash and cash equivalents*
Aset lancar lainnya	59.956	28.428	*Other current assets*
Jumlah aset lancar	61.626	36.401	*Total current assets*
Liabilitas keuangan			*Financial liabilities*
Utang usaha	22.005	34.772	*Trade payables*
Liabilitas lancar lainnya	60.804	639	*Other current liabilities*
Jumlah liabilitas lancar	82.809	35.411	*Total current liabilities*
Tidak lancar			*Non-current*
Aset	247.249	274.661	*Assets*
Liabilitas			*Liabilities*
Liabilitas keuangan	21.474	43.283	*Financial liabilities*
Liabilitas lainnya	16.035	13.875	*Other liabilities*
Jumlah liabilitas tidak lancar	37.509	57.158	*Total non-current liabilities*
Aset bersih	188.557	218.493	*Net assets*

	IPB		
	2016 Rp	2015 RP	
% kepemilikan efektif	**46,80%**	**46,80%**	***% of effective ownership***
Bagian atas aset bersih asosiasi	88.245	102.255	*Share of the net assets of associates*
Penyesuaian metode ekuitas	23.353	(906)	*Adjustment of equity method*
Jumlah tercatat	111.598	101.349	*Total carrying value*
Pendapatan	105.410	102.587	*Revenue*
Beban pokok penjualan	(53.062)	(22.296)	*Cost of good sold*
Depresiasi dan amortisasi	755	(13.729)	*Depreciation and amortization*
Pendapatan keuangan	56	152	*Interest income*
Beban keuangan	(3.597)	--	*Interest expense*
Beban operasi	(24.359)	(43.261)	*Operating expense*
Pendapatan (beban) lain-lain bersih	(619)	(4.384)	*Other income (expense) - net*
Beban pajak penghasilan	(2.684)	(6.984)	*Income tax expense*
Laba (rugi) tahun berjalan	21.900	12.085	*Post (loss) for the year*
% kepemilikan efektif	**46,80%**	**46,80%**	***% of effective ownership***
Bagian atas laba (rugi) asosiasi tahun berjalan	10.249	5.656	*Share of the profit (loss) for the year of associates*
Laba (rugi) komprehensif lain	--	--	*Other comprehensive income (loss)*
Bagian atas laba (rugi) komprehensif asosiasi	--	--	*Share of other comprehensive income (loss) of associates*
Dividen yang diterima dari perusahaan asosiasi	--	2.327	*Dividend received from associates*

PT Indo Pusaka Berau ("IPB")
Pemegang saham pada PT Indo Pusaka Berau terdiri dari Pemerintah Kabupaten Berau (49%), PT Indonesia Power (47%) dan PT Pusaka Jaya Baru (4%). IPB bergerak dalam kegiatan penyediaan tenaga listrik tenaga uap ("PLTU") yang beroperasi sejak tahun 2005.

Pada tahun 2015, IPB melakukan pembagian dividen atas kinerja tahun 2014 sebesar Rp2.327, berdasarkan surat Direksi No. 007.K/010/RUPS-IPB/2015 tanggal 30 Juni 2015.

Pada tahun 2013 IPB tidak terkonsolidasi oleh Perusahaan, sejak adanya pergantian kepengurusan di IPB, yaitu untuk posisi Direktur Utama yang sebelumnya dijabat oleh wakil dari Perusahaan, diganti dengan wakil dari pihak Pemerintah Kabupaten Berau. Posisi Direktur Utama di IPB sebagai ketua memiliki suara mayoritas dalam dewan direksi sesuai anggaran dasar IPB.

PT Indo Pusaka Berau ("IPB")
Shareholders in PT Indo Pusaka Berau consist of District Government of Berau (49%), PT Indonesia Power (47%) and PT Pusaka Jaya Baru (4%). IPB engaged in the activities of provision of steam power power plant ("PLTU") which is in operation since 2005.

In 2015, IPB declared dividend for 2014 performance amounting to Rp2,327, based on Director letter No. 007.K/010/RUPS-IPB/2015 dated June 30, 2015.

In 2013 IPB is not consolidated by the Company, since the change of management at IPB, which is the position of President Director who formerly held by representative of the Company, changed by the representative from District Government of Berau. The position of President Director of IPB have majority vote at board of directors in accordance with IPB's article of association.

Ventura bersama/ *Joint ventures*

	31 Desember/ *December 31,* 2016				
	REP	PDG	GCL	Jumlah/ *Total*	
Lancar					*Current*
Kas dan setara kas	102.775	139.866	71.665	314.306	*Cash and cash equivalents*
Aset lancar lainnya	205	92.428	32.973	125.606	*Other current assets*
Jumlah aset lancar	102.980	232.294	104.638	439.912	*Total current assets*
Liabilitas keuangan					*Financial liabilities*
Utang usaha	(1)	34.672	4.005	38.676	*Trade payables*
Liabilitas lancar lainnya	93.755	7.212	3.452	104.419	*Other current liabilities*
Jumlah liabilitas lancar	93.754	41.884	7.457	143.095	*Total current liabilities*
Tidak lancar					*Non-current*
Aset	846.536	566.610	20.783	1.433.929	*Assets*
Liabilitas					*Liabilities*
Liabilitas keuangan	643.326	730.317	--	1.373.643	*Financial liabilities*
Liabilitas lainnya	--	--	--	--	*Other liabilities*
Jumlah liabilitas tidak lancar	643.326	730.317	--	1.373.643	*Total non-current liabilities*
Aset bersih	212.436	26.703	117.964	357.103	*Net assets*
% kepemilikan efektif	**51%**	**35%**	**35%**		***% of effective ownership***
Bagian atas aset bersih ventura	108.342	9.346	41.287	158.975	*Share of the net assets of joint venture*
Penyesuaian metode ekuitas	6.465	(9.346)	(645)	(3.526)	*Adjustment of equity method*
Jumlah tercatat	114.807	--	40.642	155.449	*Total carrying value*
Pendapatan	--	172.551	--	172.551	*Revenue*
Beban pokok penjualan	--	(9.877)	--	(9.877)	*Cost of good sold*
Depresiasi dan amortisasi	--	(53.869)	--	(53.869)	*Depreciation and amortization*
Pendapatan keuangan	364	1.683	5.694	7.741	*Interest income*
Beban keuangan	--	(44.218)	--	(44.218)	*Interest expense*
Beban operasi	(2.016)	(50.800)	(2.551)	(55.367)	*Operating expense*
Pendapatan (beban) lain-lain bersih	(283)	(11.392)	(8.036)	(19.711)	*Other income (expense) - net*
Beban pajak penghasilan	--	(4.078)	--	(4.078)	*Income tax expense*
Laba (rugi) tahun berjalan	(1.935)	--	(4.893)	(6.828)	*Profit (loss) for the year*
% kepemilikan efektif	**51%**	**35%**	**35%**	**35% - 51%**	***% of effective ownership***
Bagian atas laba (rugi) ventura bersama tahun berjalan	(987)	--	(1.713)	(2.700)	*Share of the profit (loss) for the year of joint ventures*
Laba (rugi) komprehensif lain	--	--	--	--	*Other comprehensive income (loss)*
Bagian atas laba (rugi) komprehensif ventura bersama	--	--	--	--	*Share of other comprehensive income (loss) of joint ventures*
Dividen yang diterima dari ventura bersama	--	--	--	--	*Dividend received from joint ventures*

	31 Desember/ *December 31,* 2015			
	REP	PDG	Jumlah/ *Total*	
Lancar				*Current*
Kas dan setara kas	20.304	131.029	151.333	*Cash and cash equivalents*
Aset lancar lainnya	204	103.145	103.349	*Other current assets*
Jumlah aset lancar	20.508	234.174	254.682	*Total current assets*
Liabilitas keuangan				*Financial liabilities*
Utang usaha	2.089	36.078	38.167	*Trade payables*
Liabilitas lancar lainnya	47.706	2.105	49.811	*Other current liabilities*
Jumlah liabilitas lancar	49.795	38.183	87.978	*Total current liabilities*
Tidak lancar				*Non-current*
Aset	704.450	662.293	1.366.743	*Assets*
Liabilitas keuangan	454.148	832.584	1.286.732	*Financial liabilities*
Liabilitas lainnya	--	--	--	*Other liabilities*
Jumlah liabilitas tidak lancar	454.148	832.584	1.286.732	*Total non-current liabilities*
Aset bersih	221.015	25.700	246.715	*Net assets*
% kepemilikan efektif	**51%**	**35%**		***% of effective ownership***
Bagian atas aset bersih ventura	112.718	8.995	121.713	*Share of the net assets of joint venture*
Goodwill	--	--	--	*Goodwill*
Penyesuaian metode ekuitas	(10.371)	(8.995)	(19.366)	*Adjustment of equity method*
Jumlah tercatat	102.347	--	102.347	*Total carrying value*
Pendapatan	--	106.490	106.490	*Revenue*
Beban pokok penjualan	--	(527)	(527)	*Cost of good sold*
Depresiasi dan amortisasi	(172)	(55.990)	(56.162)	*Depreciation and amortization*
Pendapatan keuangan	7	1.018	1.025	*Interest income*
Beban keuangan	(1)	(45.872)	(45.873)	*Interest expense*
Beban operasi	(1.253)	(19.755)	(21.008)	*Operating expense*
Pendapatan (beban) lain-lain bersih	(867)	(9.718)	(10.585)	*Other income (expense) - net*
Beban pajak penghasilan	--	2.775	2.775	*Income tax expense*
Laba (rugi) tahun berjalan	(2.286)	(21.579)	(23.865)	*Profit (loss) for the year*
% kepemilikan efektif	**51%**	**35%**	**35% - 51%**	***% of effective ownership***
Bagian atas laba (rugi) ventura bersama tahun berjalan	(1.166)	(7.553)	(8.719)	*Share of the profit (loss) for the year of joint ventures*
Laba (rugi) komprehensif lain	--	--	--	*Other comprehensive income (loss)*
Bagian atas laba (rugi) komprehensif ventura bersama	--	--	--	*Share of other comprehensive income (loss) of joint ventures*
Dividen yang diterima dari ventura bersama	--	--	--	*Dividend received from joint ventures*

Investasi pada entitas diatas diperoleh terutama untuk tujuan potensi pertumbuhan jangka panjang, karena seluruh entitas tersebut bergerak dalam industri ketenagalistrikan yang sama dengan industri Perusahaan dan entitas anak.

The investments in the above entities are held primarily for long-term growth potential, since these entities are engaged in the same electricity industry as the Company and its subsidiaries.

PT Rajamandala Electric Power ("REP")
Pada tahun 2012, Perusahaan bersama KPIC Netherlands B.V. mendirikan REP sebagai ventura bersama, untuk membangun dan mengoperasikan pembangkit listrik di Cianjur, Jawa Barat. Perusahaan melakukan penyertaan saham pada REP sebesar US$5.100.000 setara dengan Rp45.839 atau 51% saham REP. Pada tahun 2013, Perusahaan melakukan penambahan investasi sebesar Rp18.336 tanpa mengubah persentase kepemilikan.

Perusahaan menganggap keberadaan hak keikutsertaan yang substantif dari pemegang saham non-pengendali REP yang menyebabkan pemegang saham non-pengendali tersebut memiliki hak veto atas kebijakan keuangan dan operasional yang penting. Dengan pertimbangan hak yang dimiliki pemegang saham non-pengendali, Perusahaan tidak memiliki pengendalian atas kebijakan keuangan dan operasional yang penting di REP meskipun Perusahaan memiliki kepemilikan saham lebih dari 50%.

Berdasarkan SK Menkumham No. AHU-08793.40.22.2014 tanggal 19 Mei 2014, Perusahaan mengalihkan kepemilikan sahamnya di REP melalui inbreng saham ke PIT yang ditetapkan sebagai *unrestricted subsidiary* dan tidak tunduk pada *indenture covenant global bond* PT PLN (Persero).

Pada tahun 2014, PIT melakukan penambahan investasi sebesar US$3.060.000 setara dengan Rp36.460 tanpa mengubah persentase kepemilikan berdasarkan akta No. 18 tanggal 11 Juli 2014, notaris Lenny Janis Ishak, SH notaris di Jakarta.

PT Perta Daya Gas ("PDG")
Perusahaan bersama dengan PT Pertamina Gas mendirikan PDG sesuai dengan akta pendirian No. 60 dibuat oleh Marianne Vincentia Hamdani, SH pada tanggal 26 April 2012.

Modal dasar PDG berjumlah Rp100.000 setara dengan 100.000 lembar saham yang masing-masing benilai Rp1. Modal ditempatkan dan disetor penuh Perusahaan adalah sebesar 25.000 lembar saham dengan komposisi modal saham dari Perusahaan sebesar 8.750 lembar saham dengan jumlah penyertaan saham sebesar Rp8.750.

PT Rajamandala Electric Power ("REP")
In 2012, the Company and KPIC Netherlands B.V. established REP, as a joint venture, to build and operate a power plant in Cianjur, West Java. The Company made initial investment in REP amounting to US$5,100,000, equivalent to Rp45,839, or 51% shares of REP. In 2013, the Company has increased the investment amounting to Rp18,336 without changing its percentage of ownership.

The Company considered the existence of substantive participating rights held by the non-controlling shareholders of REP which provide such shareholders with a veto right over the significant financial and operating policies. With respect to non-controlling rights, the Company do not have control over the financial and operating policies of REP even though the Company has over 50% of share ownership.

Under decree of Menkumham No. AHU-08793.40.22.2014 dated May 19, 2014 the Company transferred its shares in REP through inbreng shares to PIT which is defined as unrestricted subsidiaries and not subject to the indenture covenants global bond PT PLN (Persero).

In 2014, PIT has increased it investment amounted US$3,060,000 or equivalent to Rp36,460 without changing its percentage of ownership based on noctarial deed No. 18 dated July 11, 2014, notary Lenny Janis Ishak, SH notary on Jakarta.

PT Perta Daya Gas ("PDG")
The Company together with PT Pertamina Gas established PDG based on deed of incorporation No. 60 made by Marianne Vincentia Hamdani, SH dated April 26, 2012.

The Company paid up capital of PDG was Rp100,000 equivalent to 100,000 number of shares with nominal of each shares Rp1. The Company subscribed and fully paid capital was 25,000 number of shares with the Company composition of capital stock was 8,750 number of shares with total shares invested was Rp8,750.

PT GCL Indotenaga ("GCL")
Berdasarkan surat PT PLN (Persero) No. 1555/DAM.02.04/DITDAN/2015 tanggal 15 Desember 2015, Perusahaan ditugaskan untuk melakukan pengembangan PLTU Kalbar-1 2X100 MW. Perusahaan kemudian menunjuk PIT untuk melakukan pengembangan PLTU Kalbar-1 2X100 MW dengan Taicang Harbour Golden Concord Electric - Power Generation Co, Ltd yang ditunjuk oleh PT PLN (Persero) sebagai pemenang tender *Independent Power Producer*, untuk selanjutnya membentuk perusahaan patungan GCL.

Berdasarkan akta No. 11 tanggal 25 Februari 2016, notaris Mina Ng, SH notaris di Jakarta, modal dasar GCL berjumlah US$36.000.000 atau equivalen dengan Rp484.056 terbagi atas 36.000 lembar saham, masing-masing bernilai nominal sebesar Rp13. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor 25% atau sejumlah 9.000 lembar saham dengan nilai nominal sebesar US$9.000.000 atau setara dengan Rp121.014 dengan kepemilikan PIT sebesar 35%.

Berdasarkan akta No. 30 tanggal 23 Maret 2016, notaris Lenny Janis Ishak, SH notaris di Jakarta, perusahaan melakukan penambahan penyertaan pada PIT sebesar Rp43.785 sebagai tambahan setoran modal untuk pendirian GCL. PIT melakukan penyertaan saham pada GCL sebesar US$3.150.000 setara dengan RP42.355 atau 35% saham GCL.

PT GCL Indotenaga ("GCL")
Based on letter of PT PLN (Persero) No. 1555/DAM.02.04/DITDAN/2015 dated December 15, 2015, the Company were assigned to develop PLTU Kalbar-1 2X100 MW. Company then selected PIT as representative to develop PLTU Kalbar-1 2X100 MW along with Taicang Harbour Golden Concord Electric-Power Generation Co, Ltd, a company whose appointed by PT PLN (Persero) as Independent Power Producer project winner, to form joint venture company, GCL.

Based on notarial deed No. 11 dated February 25, 2016, notary Mina Ng, SH notary on Jakarta, The Company paid up capital of GCL was US$36,000,000 or equivalent to Rp484,056 which comprise of 36,000 number of shares and nominal of each shares in Rp13. The initial subscription was 25% or in amount of 9,000 number of shares with nominal value of US$9,000,000 or equivalent to Rp121,014 PIT ownership is 35%.

Based on notarial deed No. 30 dated March 23, 2016, notary Lenny Janis Ishak, SH notary on Jakarta, the Company increased its investment on PIT amounting Rp43,785 as capital injection to form GCL. PIT added US$3,150,000 as capital addition equivalent to 35% of total ownership. PIT made initial subscription in GCL amounting US$3,150,000, equivalent to Rp42,355, or 35% shares of GCL.

8. Piutang Pihak Berelasi / *8. Receivables from Related Parties*

	2016 Rp	2015 Rp	
PT Perta Daya Gas	260.085	293.368	*PT Perta Daya Gas*
PT Rajamandala Electric Power	236.374	149.070	*PT Rajamandala Electric Power*
Lain - lain	27.011	36.320	*Others*
Jumlah	**523.470**	**478.758**	***Total***
Dikurangi bagian jangka pendek	(42.134)	(83.371)	*Less current portion*
Bagian jangka panjang	481.336	395.387	*Long term portion*
Persentase dari jumlah aset	**0,22%**	**0,17%**	***Percentage of total assets***

PT Perta Daya Gas ("PDG")
Pada tanggal 12 Juni 2013, Perusahaan memberikan pinjaman jangka panjang sebesar US$18.837.112 kepada PDG untuk membiayai proyek *Compressed Natural Gas* ("CNG") di

PT Perta Daya Gas ("PDG")
On June 12, 2013, the Company provide a long-term loan of US$18,837,112 to PDG for financing Compressed Natural Gas ("CNG") project in PLTU Tambak Lorok, Semarang. On

PLTU Tambak Lorok, Semarang. Pada tanggal 30 November 2015, Perusahaan melakukan amandemen atas pinjaman jangka panjang yang diberikan kepada PDG sehingga jumlah pinjaman berubah mejadi US$18.191.529 sesuai dengan jumlah seluruh pencairan hingga tanggal terakhir yakni 9 Januari 2014 dan jangka waktu pinjaman berubah menjadi 8 tahun yang akan jatuh tempo pada 1 Desember 2023. Pinjaman ini dikenakan bunga 6,5% per tahun. Jumlah bunga pokok pinjaman terutang selama masa pembangunan proyek (*Interest During Construction*) terhitung sejak tanggal *dropping* dana sampai tanggal 30 Mei 2014 dan dibayarkan secara penuh pada tanggal 1 Juni 2016. Pinjaman pokok akan ditagihkan setiap 6 bulan dari tanggal 1 Juni 2016 sampai dengan 1 Desember 2023. Pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, saldo terutang atas pokok dan bunga pinjaman ini sebesar US$18.897.451 atau setara Rp253.906 dan US$20.999.293 atau setara Rp289.685. Pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 piutang lainnya sebesar Rp6.179 dan Rp3.683 merupakan piutang yang diantara lain, piutang bunga dan biaya relokasi pegawai.

November 30, 2015, the Company made an amendment to the loan given to PDG which resulted in the revision of the total loan becoming US$18,191,529 in accordance with total drawdown up to January 9, 2014 and tenor of the loan was revised to become 8 years and will be matured on December 1, 2023. This loan bears an interest 6.5% per annum. The total interest on the principal during the construction of the project (Interest During Construction) effectively has been from the cash dropping until May 30, 2014 and fully paid on June 1, 2016. The principal shall be collected every 6 months from June 1, 2016 until December 1, 2023. On December 31, 2016 and 2015, the outstanding principal and accrued interest of the loan amounted to US$18,897,451 or equivalent to Rp253,906 and US$20,999,293 or equivalent to Rp289,685. On December 31, 2106 and 2015 other receivables from PDG amounted Rp6,179 and Rp3,638 represent among others, interest receivables and costs of employees relocation.

PT Rajamandala Electric Power ("REP")
Pada tanggal 4 Juli 2014 dan 23 Nopember 2016, Perusahaan memberikan pinjaman jangka panjang sebesar US$9.400.000 dan Rp77.281 kepada REP untuk membiayai proyek 46,6 Megawatt di PLTA Sungai Citarum di Cianjur, Jawa Barat. Pinjaman ini dikenakan bunga 10% per tahun. Jumlah bunga pokok pinjaman terutang selama masa pembangunan proyek (*Interest During Construction*) terhitung sejak tanggal *dropping* dana sampai tanggal 5 Desember 2017 akan dibayarkan secara bertahap setelah PLTA milik REP mencapai *Commercial Operation Date* ("COD") sampai dengan 5 Desember 2034. Pinjaman pokok akan ditagihkan setiap 6 bulan sekali melalui angsuran sebanyak 35 kali dari tanggal 5 Desember 2017 sampai dengan 5 Desember 2034. Pada tanggal 31 Desember 2016, saldo pokok pinjaman ini sebesar US$9.400.000 atau setara dengan Rp126.298 dan Rp77.281. Piutang lainnya sebesar Rp31.795 merupakan piutang bunga.

PT Rajamandala Electric Power ("REP")
On July 4, 2014 and November 23, 2016, the Company provided a long-term loan of US$9,400,000 and Rp77,281 to REP for the financing of the 46.6 Megawatt project in PLTA Citarum river at Cianjur, West Java. This loan bears an interest of 10% per annum. The total interest on the principal of the project (Interest During Construction) effective from the cash dropping until December 5, 2017 will be paid from the date REP's PLTA reached the Commercial Operation Date ("COD") until December 5, 2034. The principal shall be collected every 6 months through 35 installments from December 5, 2017 until December 5, 2034. On December 31, 2016, the outstanding principal of the loan amounted to US$9,400,000 or equivalent to Rp126,298 and Rp77,281. Other receivables from REP Rp31,795 represent interest receivables.

Perusahaan tidak mengakui cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang pihak berelasi karena manajemen berpendapat seluruh piutang tersebut dapat ditagih.

The Company did not recognize any allowance for impairment losses of receivable from related parties as management believes that all such receivables are collectible.

9. Aset Tidak Lancar Lain / *9. Other Non-Current Assets*

	2016 Rp	2015 Rp	
Uang muka pengembangan proyek	458.603	62.963	*Project development advances*
Aset tak berwujud			*Intangible assets*
Hak atas tanah	1.872	1.977	*Land rights*
Perangkat lunak	7.139	532	*Software*
Lain - lain	66.005	45.466	*Others*
Jumlah	**533.619**	**110.938**	***Total***

10. Kas dan Setara Kas / *10. Cash and Cash Equivalents*

	2016 Rp	2015 Rp	
Kas	337	290	*Cash on hand*
Bank			*Cash in banks*
Pihak berelasi (Catatan 31)			*Related parties (Note 31)*
PT Bank Negara Indonesia (Persero)			*PT Bank Negara Indonesia(Persero)*
Rupiah	634,230	252,995	*Rupiah*
US$	27,984	14,176	*US$*
CHF	6,150	6,511	*CHF*
EUR	4,105	1,935	*EUR*
PT Bank Mandiri (Persero)			*PT Bank Mandiri (Persero)*
Rupiah	383,283	122,787	*Rupiah*
US$	300	17	*US$*
EUR	628	912	*EUR*
JPY	21	--	*JPY*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero)			*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero)*
Rupiah	53,984	113,870	*Rupiah*
Jumlah pihak berelasi	1,110,685	513,203	*Total related parties*
Pihak ketiga			*Third Parties*
PT Bank Bukopin			*PT Bank Bukopin*
Rupiah	56,307	50,518	*Rupiah*
PT Bank Danamon Indonesia			*PT Bank Danamon Indonesia*
Rupiah	--	1	*Rupiah*
US$	--	6	*US$*
Bank Muamalat			*Bank Muamalat*
Rupiah	941	110	*Rupiah*
Jumlah pihak ketiga	57,248	50,635	*Total third parties*
Sub jumlah	1,167,933	563,838	*Sub total*
Setara kas - deposito berjangka			*Cash equivalents - time deposits*
Pihak berelasi - Rupiah (Catatan 31)			*Related parties-Rupiah (Note 31)*
PT Bank Negara Indonesia (Persero)	290,300	240,000	*PT Bank Negara Indonesia (Pesero)*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero)	10,000	10,000	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero)*
PT Bank Mandiri (Persero)	29,750	79,750	*PT Bank Mandiri (Persero)*
Jumlah pihak berelasi	330,050	329,750	*Total related parties*
Pihak ketiga			*Third parties*
PT Bank Bukopin			*PT Bank Bukopin*
Rupiah	2,500	2,500	*Rupiah*
Sub jumlah	332,550	332,250	*Sub total*
Jumlah kas dan setara kas	**1,500,820**	**896,378**	***Total cash and cash equivalents***
Tingkat bunga deposito berjangka per tahun	**5,75% - 7,75%**	**4,5% - 8,88%**	*Interest rates per annum on time deposits*

11. Piutang Usaha / *11. Trade Receivable*

a. Berdasarkan Langganan / *a. By Debtor*

	2016 Rp	2015 Rp	
Pihak berelasi (Catatan 31)			*Related parties (Note 31)*
PT PLN (Persero)	21.615.875	24.442.578	*PT PLN (Persero)*
Pihak ketiga	61.957	65.317	*Third parties*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(11.191)	(14.203)	*Allowance for impairment losses*
Jumlah pihak ketiga - bersih	50.766	51.114	*Total third parties - net*
Bersih	**21.666.641**	**24.493.692**	***Net***

b. Berdasarkan umur piutang usaha yang belum diturunkan nilainya / *b. By age category of trade receivables that are not impaired*

	2016 Rp	2015 Rp	
Belum jatuh tempo	4.749.998	2.573.043	*Not yet due*
Sudah jatuh tempo			*Past Due*
1 s/d 30 hari	2.076.741	2.663.277	*1 to 30 days*
31 s/d 60 hari	1.482.725	2.934.935	*31 to 60 days*
61 s/d 90 hari	2.498.620	2.695.676	*61 to 90 days*
91 s/d 120 hari	4.289.753	2.452.538	*91 to 120 days*
Lebih dari 120 hari	6.579.995	11.188.426	*More than 120 days*
Jumlah	21.677.832	24.507.895	***Total***
Cadangan kerugian penurunan nilai	(11.191)	(14.203)	*Allowance for impairment losses*
Bersih	**21.666.641**	**24.493.692**	*Net*

c. Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai / *c. Changes in the allowance for impairment losses*

	2016 Rp	2015 Rp	
Saldo awal tahun	(14.203)	(9.780)	*Balance at beginning of year*
(Penambahan)	--	(4.423)	*(Additions)*
Pemulihan	3.012	--	*Recovery*
Saldo akhir tahun	**(11.191)**	**(14.203)**	***Balance at end of year***

Berdasarkan kesepakatan antara Perusahaan dan PT PLN (Persero), piutang usaha Perusahaan diperhitungkan sebagai saling hapus terhadap utang usaha dan dividen (Catatan 35).

Based on the agreement between the Company and PT PLN (Persero), the trade receivables of the Company was offset with account payable and dividend (Note 35).

Manajemen berpendapat bahwa cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang usaha adalah cukup. Pada tanggal 31 Desember 2016, jumlah piutang Perusahaan yang telah jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai adalah sebesar Rp16.916.643. Perusahaan berkeyakinan bahwa piutang usaha tersebut dapat tertagih.

Management believes that the allowance for impairment losses are adequate. As of December 31, 2016, the Company's outstanding receivables that are past due nor impaired amounting to Rp16,916,643. The Company believes that all such receivables are collectible.

12. Piutang Lain-lain / *12. Other Receivables*

	2016 Rp	2015 Rp	
Karyawan	35.008	37.968	*Employees*
Lain-lain	11.133	5.754	*Others*
Jumlah	46.141	43.722	*Total*
Dikurangi bagian jangka pendek	(12.025)	(13.091)	*Less current portion*
Bagian jangka panjang	**34.116**	**30.631**	***Long-term portion***

Tidak ada kerugian penurunan nilai yang dicatat sehubungan dengan piutang di atas. Tidak ada jumlah yang diklasifikasikan sebagai lewat jatuh tempo sehubungan dengan piutang tersebut. Manajemen Perusahaan berpendapat bahwa piutang tersebut dapat tertagih.

No impairment loss has been recorded in relation to the receivables mentioned above.No amounts in relation to these receivables are classified as past due. The Company's management considers these receivables to be collectible.

13. Persediaan / *13. Inventories*

	2016 Rp	2015 Rp	
Bahan bakar dan pelumas	1.668.968	2.058.563	*Fuel and lubricants*
Material pemeliharaan	315.833	165.973	*Maintenance materials*
Jumlah	1.984.801	2.224.536	*Total*
Penyisihan penurunan nilai	(21.403)	(21.520)	*Allowance for decline in value*
Bersih	1.963.398	2.203.016	***Net***
Mutasi penyisihan penurunan nilai			*Changes in allowance for decline in value*
Saldo awal tahun	(21.520)	(19.647)	*Balance at beginning of year*
(Penambahan)	--	(1.873)	*(Additions)*
Pemulihan	117	--	*Recovery*
Saldo akhir tahun	**(21.403)**	**(21.520)**	***Balance at end of year***

Manajemen berpendapat bahwa penyisihan yang ditetapkan memadai untuk menutup risiko penurunan nilai persediaan.

Management believes that the allowance is adequate to cover possible losses on decline in value of inventories.

Perusahaan dan entitas anak tidak mengasuransikan persediaan untuk menutup risiko atas kemungkinan kerugian yang timbul pada persediaan.

The Company and its subsidiaries do not have any insurance coverage to cover the possible losses in inventories.

14. Pajak Dibayar Dimuka / *14. Prepaid Taxes*

	2016 Rp	2015 Rp	
Pajak Penghasilan Badan			*Corporate Income Tax*
Perusahaan	294.934	--	*The Company*
Entitas Anak	2.611	24.808	*Subsidiaries*
Pajak Pertambahan Nilai	363.000	141.902	*Value Added Tax*
Jumlah	**660.545**	**166.710**	***Total***

15. Biaya Dibayar Dimuka dan Uang Muka / *15. Prepaid Expenses and Advances*

	2016 Rp	2015 Rp	
Biaya dibayar dimuka:			*Prepaid expenses:*
Premi asuransi	3.453	91.416	*Insurance*
Gaji	477	1.135	*Salaries*
Lain-lain	26.918	53.194	*Others*
Uang muka:			*Advances:*
Uang muka pembangunan pembangkit	101.565	143.401	*Advances for power plant construction*
Uang muka impor	71.828	785	*Import advances*
Jumlah	204.241	289.931	*Total*
Dikurangi bagian jangka pendek	(186.875)	(269.563)	*Less current portion*
Bagian jangka panjang	**17.366**	**20.368**	***Long-term portion***

16. Modal Saham / *16. Capital Stock*

Pemegang Saham / *Stockholder*	2016 dan / *and* 2015 Jumlah Saham/ *Number of Shares*	Presentase pemilikan/ *Percentage of ownership*	Jumlah modal disetor/ *Totalpaid-capital*
PT PLN (Persero)	5.215.647.599	100%	2.607.824
Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan PT PLN (Persero)	1	--	--
Jumlah/*Total*	**5.215.647.600**	**100%**	**2.607.824**

17. Tambahan Modal Disetor / *17. Additional Paid-in Capital*

Tambahan modal disetor berasal dari nilai pengalihan aset tetap, aset tidak lancar lainnya dan material cadang sejak tahun 1996 sampai dengan tahun 2000 yang diterima dari PT PLN (Persero), pemegang saham.

Di tahun 2016, Tambahan modal disetor berasal dari partisipasi Perusahaan dan Entitas Anak dalam Pengampunan Pajak adalah sebesar Rp10.244 (Catatan 27).

Additional paid-in capital represents transferred of property, plant and equipment, non-current assets and spare parts from 1996 to 2000 that were received from PT PLN (Persero), the shareholder.

In year 2016, Additional paid-in capital arising from the Company and its subsidiaries participation in Tax Amnesty is amounted to Rp10,244 (Note 27).

18. Utang Usaha / *18. Trade Payable*

Akun ini merupakan utang sehubungan dengan pembelian tenaga listrik, bahan bakar, barang dan jasa.

This account represents payable arising from purchase of electricity, fuel, goods and services.

Rincian utang usaha adalah sebagai berikut:

Details of trade payables are as follows:

	2016 Rp	2015 Rp	
Pihak berelasi (Catatan 31)			*Related parties (Note 31)*
PT Bukit Asam (Persero) Tbk	430.811	296.832	*PT Bukit Asam (Persero) Tbk*
PT Perusahaan Gas Negara	117.718	129.945	*PT Perusahaan Gas Negara*
PT Nusantara Regas	92.815	143.100	*PT Nusantara Regas*
PT Pertamina (Persero)	87.169	389.358	*PT Pertamina (Persero)*
PT Pelayaran Bahtera Adhiguna	17.034	63.495	*PT Pelayaran Bahtera Adhiguna*
Lain-lain	209.866	202.691	*Others*
Jumlah utang usaha pihak berelasi	955.413	1.225.421	*Total of trade payables to related parties*
pihak ketiga	2.380.734	1.873.430	*third parties*
Jumlah utang usaha	**3.336.147**	**3.098.851**	***Total trade payables***

19. Utang Sewa Pembiayaan / *19. Lease Liabilities*

Akun ini merupakan utang kepada kerjasama operasi PT Wijaya Karya (Persero) Tbk - PT Mirlindo Padu Kencana terkait perjanjian jual beli tenaga listrik dalam rangka perjanjian sewa pembiayaan atas pengadaan pembangkitan tenaga listrik PLTD MFO kapasitas 50 MW Pesanggaran yang telah diklasifikasikan ke dalam sewa pembiayaan sebagai akibat penerapan ISAK 8 (Catatan 2).

This account represents payable to joint operation PT Wijaya Karya (Persero) Tbk - PT Mirlindo Padu Kencana in relation to financial lease agreement on the acquisition of PLTD MFO 50 MW power plants, Pesanggaran that have been classified as financial lease as a result of adoption of ISAK 8 (Note 2).

Nilai tunai pembayaran minimum atas utang sewa pembiayaan tersebut pada tahun 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:

The present value of minimum lease payments for such lease liabilities 2016 and 2015 are as follows:

Berdasarkan jatuh tempo / ***By due date***

	2016 Rp	2015 Rp	
Pembayaran jatuh tempo dalam waktu:			*Minimum lease payments due:*
Tidak lebih dari satu tahun	135.273	138.204	*Not later than one year*
Antara satu tahun sampai lima tahun	157.818	298.625	*Between one year to five years*
Lebih dari lima tahun	--	--	*More than five years*
Jumlah pembayaran sewa minimum	293.091	436.829	*Total minimum lease payments*
Dikurangi porsi beban bunga	(41.151)	(84.721)	*Less interest expense portion*
Nilai tunai pembayaran minimum sewa pembiayaan masa datang	251.940	352.108	*Present value of future minimum lease payments*
Dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun	106.991	95.377	*Less current maturities*
Bagian Jangka Panjang	144.949	256.731	*Long term portion*
Tingkat bunga:			*Interest rate:*
USD	**13.19%**	**13.19%**	*USD*
IDR	**15.50%**	**15.50%**	*IDR*

Beban bunga dan keuangan terkait sewa pembiayaan pada tahun 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp41.874 dan Rp54.047.

Interest expense and financial charges related to finance lease in 2016 and 2015 amounted to Rp41,874 and Rp54,047.

20. Utang Pajak / *20. Taxes Payable*

	2016 Rp	2015 Rp	
Pajak kini (Catatan 27)			*Current tax (Note 27)*
Perusahaan	--	43.904	*The Company*
Entitas anak	1.362	21.145	*Subsidiaries*
Pajak penghasilan:			*Income taxes:*
Pasal 15	1.066	1.114	*Article 15*
Pasal 21	46.731	32.338	*Article 21*
Pasal 22	14.096	20.459	*Article 22*
Pasal 23	12.131	7.545	*Article 23*
Pasal 25	--	48.898	*Article 25*
Pasal 4 ayat 2	6.656	838	*Article 4 (2)*
Pasal 26	238	484	*Article 26*
Pajak selisih penilaian kembali aset tetap	--	5.079.091	*Tax on revalution increment of property, plant and equipment*
Pajak pertambahan nilai	169.460	50.682	*Value added tax*
Pajak lainnya	18	18	*Other taxes*
Jumlah	**251.758**	**5.306.516**	***Total***

21. Penjualan Tenaga Listrik / *21. Sale Of Electricity*

Akun ini merupakan penjualan tenaga listrik kepada PT PLN (Persero) (Catatan 31).

This account represents sale of electricity to PT PLN (Persero) (Note 31).

22. Pendapatan Jasa / *22. Service Revenues*

Akun ini terutama merupakan pendapatan sewa pembangkit listrik serta pendapatan jasa operasi dan pemeliharaan yang diperoleh dari PT PLN (Persero), pemegang saham (Catatan 31).

This account mainly consists of rental of generators and revenue from operation and maintenance services obtained from units of PT PLN (Persero), shareholder (Note 31).

23. Beban Bahan Bakar dan Pelumas / *23. Fuel and Lubricants Expenses*

	2016 Rp	2015 Rp	
Bahan bakar minyak			*Fuel*
Solar High Speed Diesel	316.196	2.426.674	*Solar High Speed Diesel*
Residu	36.951	503.971	*Residue*
Sub jumlah	353.147	2.930.645	*Sub total*

	2016 Rp	2015 Rp	
Bahan bakar non-minyak			*Nonfuel*
Batu bara	7.997.954	9.091.842	*Coals*
Gas alam	11.473.742	8.158.014	*Natural gas*
Air	59.646	34.263	*Water*
Uap panas bumi	2.055.561	2.174.023	*Geothermal*
Sub jumlah	21.586.903	19.458.142	*Sub total*
Minyak pelumas dan lain-lain	47.310	43.176	*Lubricants and others*
Jumlah	**21.987.360**	**22.431.963**	***Total***

24. Beban Pemeliharaan / *24. Maintenance Expenses*

	2016 Rp	2015 Rp	
Jasa Borongan	2.975.171	1.675.261	*Contractor services*
Pemakaian material pemeliharaan	712.299	765.866	*Maintenance materials used*
Jumlah	**3.687.470**	**2.441.127**	***Total***

25. Beban Kepegawaian / *25. Personnel Expenses*

	2016 Rp	2015 Rp	
Tunjangan karyawan	966.048	974.475	*Employee allowances*
Imbalan kerja (Catatan 30)	410.108	422.394	*Employee benefits (Note 30)*
Gaji	327.469	328.759	*Salaries*
Tunjangan kesehatan	38.045	34.974	*Medical allowances*
Jumlah	**1.741.670**	**1.760.602**	***Total***

26. Beban Sewa / *26. Lease Expense*

Akun ini merupakan biaya penyewaan mesin diesel dan genset yang ditentukan sebagai sewa operasi sehubungan perjanjian antara Perusahaan dengan PT Indo Matra Power dan PT Sumberdaya Sewatama yang ditentukan sebagai sewa operasi.

This account pertains to the rental of diesel engines and gensets determined as operating leases between the Company with PT Indo Matra Power and PT Sumberdaya Sewatama as operating lease.

Jumlah pembayaran sewa minimum dalam sewa operasi yang tidak dapat dibatalkan adalah sebagai berikut:

The future aggregate minimum lease payments under non-cancellable operating leases are as follows:

	2016 Rp	2015 Rp	
Pembayaran jatuh tempo:			*Minimum lease payments due:*
Tidak lebih dari 1 tahun	32.789	113.865	*Not later than 1 year*

	2016 Rp	2015 Rp	
Rincian pembayaran sewa minimum berdasarkan lessor			*Details of the minimum lease payment by lessor*
PT Sumberdaya Sewatama	32.789	81.466	*PT Sumberdaya Sewatama*
PT Indo Matra Power	--	28.958	*PT Indo Matra Power*
Lainnya	--	3.441	*Others*
Jumlah	**32.789**	**113.865**	***Total***

27. Pajak penghasilan / *27. Income Tax*

Manfaat (beban) pajak Perusahaan dan entitas anak terdiri dari:

Tax benefit (expense) of the Company and its subsidiaries consist of the following:

	2016 Rp	2015 Rp	
Pajak kini	(21.979)	(689.947)	*Current tax*
Manfaat (beban) pajak tangguhan	(1.187.070)	3.272.926	*Deferred tax benefits (expense)*
Jumlah manfaat (beban) pajak	**(1.209.049)**	**2.582.979**	***Total tax benefit (expense)***

a. Pajak Kini / *a. Current Tax*

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan laba kena pajak Perusahaan adalah sebagai berikut:

A reconciliation between profit before tax per statements of profit and loss taxable income of the Company is as follows:

	2016 Rp	2015 Rp	
Laba sebelum pajak konsolidasian	4.095.753	2.089.543	*Income before tax per consolidated*
Laba sebelum pajak entitas anak	(23.103)	(29.407)	*Income before tax attributable to subsidiaries*
Laba sebelum pajak Perusahaan	4.072.650	2.060.136	*The Company's income before tax*
Perbedaan temporer:			*Temporary differences:*
Sewa Pembiayaan	(58.255)	9.343	*Lease expenses*
Penyusutan aset tetap	(17.473.670)	(11.352)	*Depreciation*
Imbalan kerja	165.941	199.296	*Employee benefits*
Bonus	39.315	303.964	*Bonus*
Biaya (pendapatan) yang tidak dapat diperhitungkan menurut fiskal:			*Non-deductible expense/ (non-taxable income)*
Kesejahteraan karyawan	227.270	147.541	*Employee welfare*
Bagian laba bersih entitas anak, asosiasi dan ventura bersama	(72.191)	(52.379)	*Share in net income of subsidiaries, associates and joint ventures*
Pembangunan komunitas	20.592	21.018	*Community development*
Penghasilan yang telah dikenakan pajak final	(33.203)	(20.484)	*Other income subjected to final tax*
Beban yang tidak dapat dikurangkan menurut pajak	630.104	18.126	*Interest expense which is not deductible*
Laba kena pajak Perusahaan tahun berjalan	**(12.481.447)**	**2.675.209**	***The Company's taxable income for the year***

Pajak penghasilan kini dihitung berdasarkan taksiran penghasilan kena pajak. Nilai tersebut mungkin disesuaikan pada saat Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak.

Current income tax computations are based on estimated taxable income. The amounts may be adjusted when the Annual Tax Returns are filed with the tax office.

Perhitungan beban dan utang pajak kini (pajak penghasilan lebih bayar) adalah sebagai berikut:

Current tax expense and payable (income tax overpayment) are as follows:

	2016 Rp	2015 Rp	
Beban pajak kini:			*Current tax expense:*
Perusahaan	--	668.802	*The Company*
Entitas anak	21.979	21.145	*Subsidiaries*
Jumlah	21.979	689.947	*Total*
Dikurangi pajak penghasilan dibayar dimuka			*Less prepaid taxes*
Perusahaan	294.934	624.898	*The Company*
Entitas anak	23.228	--	*Subsidiaries*
Jumlah	318.162	624.898	*Total*
Taksiran kurang (lebih dibayar) pajak penghasilan badan:			*Estimated under (over) payment of corporate income tax:*
Perusahaan	(294.934)	43.904	*The Company*
Entitas anak	(2.611)	21.145	*Subsidiaries*
Jumlah	**(297.545)**	**65.049**	***Total***

	2016 Rp	2015 Rp	
Utang pajak kini			*Current tax payable*
Perusahaan	--	43.904	*The Company*
Entitas anak	1.362	21.145	*Subsidiaries*
Jumlah utang pajak kini	**1.362**	**65.049**	***Total current tax payable***

b. Pajak Tangguhan

Rincian aset dan liabilitas pajak tangguhan Perusahaan dan entitas anak adalah sebagai berikut:

b. Deferred Tax

The details of the Company and its subsidiaries deferred tax assets and liabilities are as follows:

	1 Januari/ *January 1,* 2016	Dikreditkan (dibebankan) ke laporan Laba rugi/ *credited (charged) to income for the year*	Dikreditkan (dibebankan) ke pendapatan komprehensif lainnya/ *Credited (charged to other comprehensive income*	Reklasifikasi liabilitas pajak tangguhan menjadi aset pajak tangguhan/ *Reclassification deffered tax liabilities to deffered tax asset*	31 Desember/ *December 31,* 2016	
Aset Pajak Tangguhan						***Deferred Tax Assets***
Liabilitas imbalan kerja	666.637	41.485	(7.433)	(700.689)	--	*Employee benefits liabilities*
Bonus	75.991	5.682	--	(81.673)	--	*Bonus*
Persediaan	1.471	3.849	--	(5.320)	--	*Inventory*
Sewa pembiayaan	39.474	(9.711)		(29.763)		*Finance lease*
Aset tetap	304.405	(4.361.176)	(275.557)	4.332.328	--	*Property, plant & equipment*
Rugi fiskal	--	3.120.362	--	(3.120.362)	--	*Fiscal loss*
Entitas anak – bersih	305	907	--	--	1.212	*Subsidiaries - net*
Aset pajak tangguhan akhir tahun	**1.088.283**	**(1.198.602)**	**(282.990)**	**394.521**	**1.212**	***Deferred tax assets at the end of the year***

	1 Januari/ *January 1, 2016*	Dikreditkan (dibebankan) ke laporan Laba rugi/ *credited (charged) to income for the year*	Dikreditkan (dibebankan) ke pendapatan komprehensif lainnya/ *Credited (charged to other comprehensive income*	Reklasifikasi liabilitas pajak tangguhan menjadi aset pajak tangguhan/ *Reclassification deffered tax liabilities to deffered tax asset*	31 Desember/ *December 31, 2016*	
Liabilitas Pajak Tangguhan						***Deferred Tax Liabilities***
Liabilitas imbalan kerja	--	--	--	700.689	700.689	*Employee benefits liabilities*
Bonus	--	--	--	81.673	81.673	*Bonus*
Persediaan	--	--	--	5.320	5.320	*Inventory*
Sewa Pembiayaan	--	--	--	29.763	29.763	*Finance Lease*
Aset tetap	--	--	--	(4.332.328)	(4.332.328)	*Property, plant & equipment*
Penyisihan rugi fiskal	--	--	--	3.120.362	3.120.362	*Subsidiaries - net*
Entitas anak - bersih	(30.389)	11.532	211	--	(18.646)	*Subsidiaries - net*
Liabilitas pajak tangguhan - akhir tahun	**(30.389)**	**11.532**	**211**	**(394.521)**	**(413.167)**	***Deferred tax liabilities at the end of the year***
Manfaat (beban) pajak tangguhan		**(1.187.070)**	**(282.779)**			***Deferred tax benefit (expense)***

	1 Januari/ *January 1, 2015*)*	Dikreditkan (dibebankan) ke laporan Laba rugi/ *credited (charged) to income for the year*	Dikreditkan (dibebankan) ke pendapatan komprehensif lainnya/ *Credited (charged to other comprehensive income*	Reklasifikasi liabilitas pajak tangguhan menjadi aset pajak tangguhan/ *Reclassification deffered tax liabilities to deffered tax asset*	31 Desember/ *December 31, 2015*	
Aset Pajak Tangguhan						***Deferred Tax Assets***
Liabilitas imbalan kerja	--	--	--	666.637	666.637	*Employee benefits liabilities*
Bonus	--	75.991	--	--	75.991	*Bonus*
Persediaan	--	--	--	1.471	1.471	*Inventory*
Sewa Pembiayaan				39.474	39.474	*Finance Lease*
Aset tetap	--	--	--	304.405	304.405	*Property, plant & equipment*
Entitas anak – bersih	27	278	--	--	305	*Subsidiaries - net*
Aset pajak tangguhan akhir tahun	**27**	**76.269**	**--**	**1.011.987**	**1.088.283**	***Deferred tax assets at the end of the year***
Liabilitas Pajak Tangguhan						***Deferred Tax Liabilities***
Liabilitas imbalan kerja	771.912	49.824	(155.099)	(666.637)	--	*Employee benefits liabilities*
Persediaan	1.471	--	--	(1.471)	--	*Inventory*
Sewa Pembiayaan	37.138	2.336		(39.474)	--	*Finance Lease*
Aset tetap	(3.133.149)	3.148.864	288.690	(304.405)	--	*Property, plant & equipment*
Entitas anak - bersih	(26.022)	(4.367)	--	--	(30.389)	*Subsidiaries - net*
Liabilitas pajak tangguhan - akhir tahun	**(2.348.650)**	**3.196.657**	**133.591**	**(1.011.987)**	**(30.389)**	***Deferred tax liabilities at the end of the year***
Manfaat pajak tangguhan		**3.272.926**	**133.591**			***Deferred tax benefit***

Rekonsiliasi antara jumlah beban (manfaat) pajak dan hasil perkalian laba akuntansi sebelum pajak dengan tarif pajak yang berlaku adalah sebagai berikut:

Reconciliation between the total tax expense (benefit) and the amounts computed by applying the effective tax rates to income before tax is as follows:

	2016 Rp	2015 Rp	
Laba sebelum pajak menurut konsolidasian	4.095.753	2.089.543	*Income before tax per consolidated*
Pajak dihitung dengan tarif pajak yang berlaku	1.023.938	522.386	*Tax calculated at applicable tax rate*
Pengaruh pajak atas:			*Tax effect on:*
Pengakuan aset pajak tangguhan tahun sebelumnya	--	(50.885)	*Recognition of prior year's deferred tax assets*
Aset (liabilitas) pajak tangguhan yang tidak diakui	75.683	(3.087.847)	*Unrecognized deferred tax asset (liabilities)*
Biaya (pendapatan) yang tidak dapat diperhitungkan menurut fiskal			*Non-deductible expenses (non-taxable) income*
Penghasilan yang telah dikenakan pajak final	(14.082)	(24.325)	*Other income subjected to final tax*
Beban yang tidak dapat dikurangkan menurut pajak	123.510	57.692	*Interest expense which is not deductible*
Beban (manfaat) pajak penghasilan konsolidasian	**1.209.049**	**(2.582.979)**	***Consolidated income tax expense (benefit)***

c. Lain-lain

1. Pada tanggal 27 Desember 2016, Perusahaan menerima surat keputusan Direktorat Jenderal Pajak No.KEP-72/WPJ/19/KP.03/2016 mengenai diterimanya permohonan Perusahaan atas perubahan metode depresiasi fiskal dari metode saldo menurun menjadi metode garis lurus. Keputusan ini berlaku efektif semenjak tanggal 1 Januari 2017.

2. Perusahaan dan entitas anak berpartisipasi dalam pengampunan pajak sehubungan dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.03/2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2016 dan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-18/PJ/2016 tentang Pengembalian Kelebihan Pembayaran Uang Tebusan Dalam Rangka Pengampunan Pajak.

c. Others

1. *On Desember 27, 2016, the Company received decision letter from Directorate General of Taxation No.KEP-72/WPJ/19/KP.03/2016 on the acceptance of the Company requisition on changing its depreciation method per fiscal from declining method into straight line method. This decision applied effectively since January 1, 2017.*

2. *The Company and its subsidiaries were participated in Tax Amnesty in connection with the implementation of Regulation of the Minister of Finance No. 118/PMK.03/2016 on the Implementation of Law No. 11 of 2016 on Tax Amnesty, as amended by Regulation of the Minister of Finance No. 141/PMK.03/2016 and Directorate General of Tax Regulation No. PER-18/PJ/2016 on Redemption Payment of Excess Refund in the framework of Tax Amnesty. The Company participated this tax amnesty.*

Rincian Surat Ketetapan Pengampunan Pajak ("SKPP") yang diterbitkan oleh Kementrian Keuangan Republik Indonesia adalah:

Details of Tax Amnesty Approval Letter ("SKPP") issued by the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia are as follows:

Entitas / *Entity*	No. SKPP	Tanggal/ *Date*	Jumlah Aset pengampunan pajak/ *Total tax amnesty assets *)* Rp
Indonesia Power (IP)	No. KEP-778/PP/WJP/19/2016	4 Oktober/ *October 4,* 2016	9.609
Artha Daya Coalindo (ADC)	No. KET-1327/PP/WJP.19/2016	8 Desember/ *December 8,* 2016	635
			10.244

*) Tidak terdapat liabilitas pengampunan pajak yang dilaporkan/ *There is no tax amnesty liabilities declared*

28. Laba per Saham Dasar / *28. Basic Earnings per Share*

Laba bersih
Laba bersih untuk tujuan perhitungan laba per saham dasar tahun 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp2.885.017 dan Rp4.668.403.

Jumlah saham
Rata-rata tertimbang saham untuk tujuan perhitungan laba per saham dasar adalah 5.215.647.600 saham tahun 2016 dan 2015.
Perusahaan tidak mempunyai efek berpotensi dilusi saham, sehingga Perusahaan tidak menghitung laba per saham dasar dilusian.

Net income
Net income for computation of basic earnings per share in 2016 and 2015 amounted to Rp2,885,017 and Rp4,668,403, respectively.

Number of shares
The weighted average number of shares for computation of basic earnings per share was 5,215,647,600 shares in 2016 and 2015.
The Company did not calculate dilutive earnings per share because it has no potensial dilutive ordinary shares.

29. Dividen Tunai Dan Cadangan Umum / *29. Cash Dividends and General Reserve*

- Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 7 Juni 2016, pemegang saham menyetujui penggunaaan laba bersih tahun 2015 untuk dividen tunai sebesar Rp4.207.869.
- Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 8 April 2015, pemegang saham menyetujui penggunaaan laba bersih tahun 2014 untuk dividen tunai sebesar Rp1.467.971.
- Pada tanggal 31 Desember 2016, pembayaran dividen kepada PT PLN (Persero) saling hapus dengan piutang usaha pihak berelasi (Catatan 35).

- *Based on Annual General Stockholders' Meeting dated June 7, 2016, the stockholders agreed to distribute the 2015 net income amounting to Rp4,207,869 as dividend.*
- *Based on Annual General Stockholders' Meeting dated April 8, 2015, the stockholders agreed to distribute the 2014 net income amounting to Rp1,467,971 as cash dividend.*
- *In December 31, 2016 the dividend payment to PT PLN (Persero) was offsetted against the trade account receivables from related parties (Note 35).*

30. Liabilitas Imbalan Kerja / *30. Employee Benefits Liabilities*

	2016 Rp	2015 Rp	
Liabilitas diakui di laporan posisi keuangan:			*Liabilities recognize on statements of financial position:*
Imbalan pascakerja			*Post - employment benefits*
Program pensiun	9.900	--	*Pension plan*
Imbalan pascakerja lain	1.224.897	1.284.593	*Other post - employment benefits*
Imbalan pemeliharaan kesehatan	1.488.014	1.305.460	*Health care benefits*
Imbalan jangka panjang lainnya	92.472	83.839	*Other long term benefits*
Jumlah	2.815.283	2.673.892	*Total*
Beban diakui di laba rugi: (Catatan 25)			*Expenses recognize in profit or loss: (Note 25)*
Imbalan pascakerja			*Post - employment benefits*
Program pensiun	31.412	11.274	*Pension plan*
Imbalan pascakerja lain	186.235	136.316	*Other post - employment benefits*
Imbalan Pemeliharaan kesehatan	143.517	253.875	*Health care benefits*
Imbalan jangka panjang lainnya	48.944	20.929	*Other long term benefits*
Jumlah	410.108	422.394	*Total*
Pengukuran kembali program imbalan pasti diakui di penghasilan komprehesif lain:			*Remeasurement on defined benefit plan recognized in other comprehensive income:*
Imbalan pascakerja			*Post - employment benefits*
Program pensiun	(4.738)	6.144	*Pension plan*
Imbalan pascakerja lain	(98.828)	335.149	*Other post - employment benefits*
Imbalan pemeliharaan kesehatan	74.679	(961.690)	*Health care benefits*
Jumlah	(28.887)	(620.397)	*Total*

Liabilitas Imbalan Pascakerja / *Post-employment Benefits Liabilities*

Program Pensiun Imbalan Pasti

Perusahaan menyelenggarakan program pensiun imbalan pasti untuk semua karyawan tetap yang memenuhi syarat. Program pensiun ini memberikan imbalan berdasarkan penghasilan dasar pensiun dan masa kerja karyawan.

Dana pensiun ini dikelola oleh Dana Pensiun PLN ("DP-PLN"), pihak berelasi, yang akta pendiriannya telah disahkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No. KEP-284/KM.17/1997 tanggal 15 Mei 1997.

DP-PLN telah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia dalam surat keputusan No. KEP-8/NB.1/2016 tanggal 11 Februari 2016 atas peningkatan imbalan pasti pensiun yang disediakan Perusahaan dan entitas anak dalam program dana pensiun.

Defined Benefit Pension Plan

The Company established a defined benefit pension plan covering all of its eligible permanent employees. This pension plan provides benefits based on basic pension income and the period of employement.

This pension plan is managed by Dana Pensiun PLN ("DP-PLN"), a related party, whose deed of establishment was approved by the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia in its Decision Letter No. KEP-284/KM.17/1997 dated May 15, 1997.

DP-PLN has obtained an approval from the Minister of Finance of the Republic of Indonesia in its Decision Letter No. KEP-8/NB.1/2016 dated on February 11, 2016 in relation to the increase in pension benefits provided by the Company and its subsidiaries' pension plan.

Pendanaan DP-PLN terutama berasal dari iuran karyawan dan pemberi kerja masing-masing sebesar 6,00% dan 13,41% dari penghasilan dasar pensiun.

DP-PLN is mainly funded by contributions from both the employees and the employer, which are 6.00% and 13.41% from basic pension income, respectively.

Imbalan Pemeliharaan Kesehatan
Selain program pensiun yang dikelola oleh DP-PLN, Perusahaan menyediakan imbalan program pemeliharaan kesehatan tanpa pendanaan bagi pensiunan dan tanggungannya yang memenuhi persyaratan.

Health Care Benefits
In addition to pension plan managed by DP-PLN, the Company also provide unfunded health care benefit plans for their pensioners and their eligible dependents.

Imbalan Pascakerja Lain
Selain dari program dana pensiun dan imbalan pemeliharaan kesehatan, Perusahaan dan entitas anak menyediakan imbalan pesangon dan penghargaan purna jabatan tanpa pendanaan bagi pegawai yang memenuhi syarat.

Other Post - employment Benefits
In addition to the pension plan and health care benefits, the Company and its subsidiaries also provide unfunded severance benefits and completion of employment award for eligible employees.

Imbalan Jangka Panjang lainnya
Perusahaan dan entitas anak juga memberikan imbalan kerja jangka panjang tanpa pendanaan berupa uang cuti besar, tunjangan kecelakaan dinas, bantuan kematian dan pemakaman dan penghargaan winduan bagi karyawan yang memenuhi persyaratan.

Other Long Term Benefit
The Company and its subsidiaries also provide unfunded defined long-term benefit plans such as long service leave, work accident, death and funeral allowances, and eight years service award for their qualifying employees.

Asumsi yang Digunakan dalam Perhitungan Liabilitas Imbalan Kerja

Assumption Used in the Calculations of Post Employment Benefits Obligation

	2016 dan/ *and* 2015	
Tabel mortalita	CSO-58	*Mortality table*
Tingkat pengunduran diri		*Resignation rate*
Usia 18 s.d. 49 tahun	0,27%	*Age 18 up to 49 years old*
Usia 50 s.d. 55 tahun	0,01%	*Age 50 up to 55 years old*
Usia Pensiun Normal	56 tahun/ *Years old*	*Normal Retirement Age*

Asumsi yang berhubungan dengan pengalaman mortalitas masa depan ditentukan berdasarkan saran aktuaris menurut statistik yang telah diterbitkan dan pengalaman setiap Perusahaan dan entitas anak. Asumsi mortalitas yang digunakan adalah table mortalita CSO-58 yang diterapkan dalam penghitungan liabilitas kerja jangka panjang yang diakui dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

Assumptions regarding future mortality experience are set based on actuarial advice in accordance with published statistics and experience by the Company and its subsidiaries. The mortality assumptions used are based on the CSO-58 mortality table which applied in calculating the long term benefits liability recognized within the consolidated statement of financial position.

Penilaian aktuaria atas program pensiun, imbalan pascakerja lain, imbalan pemeliharaan kesehatan dan imbalan kerja jangka panjang lainnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, dilakukan oleh perusahaan konsultan aktuaria terdaftar, PT Binaputera Jaga Hikmah.

The actuarial calculation of pension plan, other post-employment benefits, health care benefits and other long-term benefits for the years ended December 31, 2016 and 2015 were prepared by a registered actuarial consulting firm, PT Binaputera Jaga Hikmah.

Pada tahun 2015, Perusahaan dan entitas anak melakukan studi untuk melihat tabel mortalitas mana yang paling sesuai dengan profil mortalitas pegawai dan pensiunan Perusahaan dan entitas anak. Dalam melakukan studi, Perusahaan dan entitas anak telah mempertimbangkan CSO-58, CSO-58 modifikasian, TMI 1 1993, TMI 2 1999, TMI 3 2011, dan Tabel Mortalita Taspen 2012. Dari studi tersebut, Perusahaan dan entitas anak menemukan bahwa tabel mortalitas yang paling sesuai dengan profil mortalitas pegawai dan pensiunan Perusahaan dan entitas anak adalah CSO-58. Perusahaan dan entitas anak menerapkan CSO-58 secara retrospektif.

In 2015, the Company and its subsidiaries conducted a study to determine which mortality tables that suits most with the Company and its subsidiaries' employee and pensioners' mortality profile. In the study, the Company and its subsidiaries have considered CSO-58, CSO-58 modified, TMI 1 1993, TMI 2 1999, TMI 3 2011, and Taspen mortality table 2012. Based on the study, the Company and its subsidiaries found that mortality table that suits most with mortality profile of the Company and its subsidiaries' employees and pensioners is CSO-58. The Company and its subsidiaries apply CSO-58 retrospectively.

(i) Program Pensiun

Jumlah yang diakui pada laporan posisi keuangan konsolidasian ditentukan sebagai berikut:

(i) Pension Plan

The amounts recognized in the consolidated statement of financial position are determined as follows:

	DANA PENSIUN PT INDONESIA POWER (IP)		
	2016 Rp	2015 Rp	
Nilai kini kewajiban yang didanai	(657.763)	(576.144)	*Present value of funded obligations*
Aset program yang tidak diakui	--	(62.071)	*Plan asset not recognized*
Nilai wajar aset program	647.863	638.215	*Fair value of plan assets*
Defisit (surplus) program yang didanai	(9.900)	--	*Deficit (surplus) of funded plans*
Nilai kini kewajiban yang tidak didanai	--	--	*Present value of unfunded obligations*
Liabilitas pada laporan posisi keuangan	(9.900)	--	*Liability in the statement of financial position*

Mutasi nilai kini kewajiban imbalan pasti selama tahun berjalan adalah sebagai berikut:

Movement its of present value of defined benefit obligation during the year is as follows:

	2016 Rp	2015 Rp	
Pada awal tahun	576.144	535.016	*At beginning of the year*
Dibebankan ke laba rugi			*Charged to profit or loss:*
Biaya jasa kini	16.799	16.171	*Current service cost*
Biaya bunga	51.055	47.028	*Interest expense*
	67.854	63.199	
Dibebankan ke penghasilan komprehensif lain:			*Charge to other comprehensive income:*
(Keuntungan) kerugian aktuarial dari:			*Actuarial (gain) loss from change in:*
Perubahan asumsi demografik	21.298	--	*Demographic assumptions*
Perubahan asumsi keuangan	(56.094)	28.768	*Financial assumptions*
Kombinasi perubahan asumsi	(10.302)	(2.871)	*Combination of change in assumptions*
Penyesuaian atas pengalaman	100.047	(15.601)	*Experience adjustment*
	698.947	608.511	
Pembayaran manfaat	(41.184)	(32.367)	*Benefit payment*
Pada akhir tahun	657.763	576.144	*At the end of the year*

Mutasi nilai wajar aset program selama tahun berjalan adalah sebagai berikut:

Movement of fair value of plan assets during the year is as follows:

	2016 Rp	2015 Rp	
Pada awal tahun	638.215	620.135	*At beginning of the year*
Imbal hasil atas aset program	28.938	44.132	*Return on plan assets*
Iuran pemberi kerja	16.774	17.416	*Employer's contributions*
Iuran pekerja	7.505	7.793	*Employee's contributions*
Pembayaran manfaat	(41.185)	(32.366)	*Benefit payment*
Kerugian (keuntungan) aktuarial pada aset program	(2.384)	(18.895)	*Actuarial loss (gain) on plan asets*
Pada akhir tahun	**647.863**	**638.215**	*At the end of the year*

Aset program terdiri dari:

Plan assets comprise the following:

	2016				2015				
	Memiliki kuotasi harga/ *Quoted Price* Rp	Tidak memiliki kuotasi harga/ *Unquoted Price* Rp	Jumlah/ *Total* Rp	%	Memiliki kuotasi harga/ *Quoted Price* Rp	Tidak memiliki kuotasi harga/ *Unquoted Price* Rp	Jumlah/ *Total* Rp	%	
Instrumen ekuitas	--	92.026	92.026	14,21%	--	78.427	78.427	12,29%	*Equity instruments*
Instrumen utang	--	348.236	348.236	53,75%	--	335.073	335.073	52,50%	*Debt instruments*
Properti	--	71.969	71.969	11,11%	--	70.842	70.842	11,10%	*Property*
Kas dan setara kas	--	43.434	43.434	6,70%	--	55.105	55.105	8,63%	*Cash and cash equivalent*
Lain - lain	--	92.198	92.198	14,23%	--	98.768	98.768	15,48%	*Others*
Jumlah	**--**	**647.863**	**647.863**	**100%**	**--**	**638.215**	**638.215**	**100%**	***Total***

Asumsi aktuarial utama yang digunakan adalah sebagai berikut:

The principal actuarial assumptions used were as follows:

	2016	2015	
Tingkat diskonto	8,50%	9,19%	*Discount rate*
Tingkat kenaikan gaji per tahun	5,00%	8,70%	*Salary increase rate per annum*

Kontribusi yang diharapkan untuk program imbalan pascakerja untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017 adalah Rp14.399.

Expected contributions to post-employment benefit plans for the year ending December 31, 2017 are Rp14,399.

Sensitivitas dari kewajiban imbalan pasti terhadap perubahan asumsi aktuarial utama adalah sebagai berikut:

The sensitivity of the defined benefit obligation to changes in the weighted principal assumptions is as follows:

	Dampak atas kewajiban imbalan pasti/ *Impact on defined benefit obligation*			
	Perubahan asumsi/ *Change in Assumption*	Kenaikan asumsi/ *Increse in assumption*	Penurunan asumsi/ *Decrease in assumption*	
Tingkat diskonto	1%	Penurunan sebesar/ *Decrease by 2,64%*	Kenaikan sebesar/ *Increase by 2,98%*	*Discount rate*
Tingkat kenaikan gaji	1%	Kenaikan sebesar/ *Increase by 2,99%*	Penurunan sebesar/ *Decrease by 2,69%*	*Salary increase rate*
Tingkat mortalitas	1%	Penurunan sebesar/ *Decrease by 0.05%*	Kenaikan sebesar/ *Increase by 0.03%*	*Mortality rate*

Analisa sensitivitas didasarkan pada perubahan atas satu asumsi aktuarial dimana asumsi lainnya dianggap konstan. Dalam prakteknya, hal ini jarang terjadi dan perubahan beberapa asumsi mungkin saling berkorelasi. Imbalan perhitungan sensitivitas liabilitas kerja jangka panjang atas asumsi aktuarial utama, metode yang sama (perhitungan nilai kini liabilitas imbalan kerja jangka panjang dengan menggunakan metode *projected unit credit* di akhir periode) telah diterapkan seperti dalam perhitungan liabilitas imbalan kerja jangka panjang yang diakui dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

The sensitivity analysis are based on a change in a single assumption while holding all other assumptions constant. In practice, this is unlikely to occur, and changes in some of the assumptions may be correlated. When calculating the sensitivity of the long term benefits liabilities to significant actuarial assumptions, the same method (present value of the long term benefits liabilities calculated with the projected unit credit method at the end of the reporting period) has been applied as when calculating the long term benefits liabilities recognized in the consolidated statement of financial position.

(ii) Imbalan Pascakerja Lain

Mutasi kewajiban imbalan pascakerja lainnya selama tahun berjalan adalah sebagai berikut:

(ii) Other Post-Employment Benefits

Movement of post-employment benefits obligation during the year is as follows:

	2016 Rp	2015 Rp	
Pada awal tahun	1.284.593	951.262	*At beginning of the year*
Dibebankan ke laba rugi			*Charged to profit or loss*
Biaya jasa kini	75.744	56.879	*Current service cost*
Biaya bunga	110.491	79.437	*Interest expense*
	186.235	136.316	
Dibebankan ke penghasilan komprehensif lain:			*Charge to other comprehensive income:*
(Keuntungan) kerugian aktuarial dari:			*Actuarial (gain) loss from change in:*
Perubahan asumsi demografik	1.984	355	*Demographic assumptions*
Perubahan asumsi keuangan	61.384	109.516	*Financial assumptions*
Kombinasi perubahan asumsi	225	(15.782)	*Combination of change in assumptions*
Penyesuaian atas pengalaman	(162.421)	242.353	*Experience adjustment*
	1.372.000	1.424.020	
Pembayaran manfaat	(147.103)	(139.427)	*Benefit payment*
Pada akhir tahun	1.224.897	1.284.593	*At the end of the year*

Asumsi aktuarial utama yang digunakan adalah sebagai berikut:

The principal actuarial assumptions used were as follows:

	2016	2015	
Tingkat diskonto	8,42%	9,11%	*Discount rate*
Tingkat kenaikan gaji per tahun	8,70%	8,70%	*Salary increase rate per annum*

Sensitivitas dari kewajiban imbalan pasti terhadap perubahan asumsi aktuarial utama adalah sebagai berikut:

The sensitivity of the defined benefit obligation to changes in the weighted principal assumptions is as follows:

	Dampak atas kewajiban imbalan pasti/ *Impact on defined benefit obligation*			
	Perubahan asumsi/ *Change in Assumption*	Kenaikan asumsi/ *Increse in assumption*	Penurunan asumsi/ *Decrease in assumption*	
Tingkat diskonto	1%	Penurunan sebesar/ *Decrease by 12,61%*	Kenaikan sebesar/ *Increase by 15,45%*	*Discount rate*
Tingkat kenaikan gaji	1%	Kenaikan sebesar/ *Increase by 15,55%*	Penurunan sebesar/ *Decrease by 12,90%*	*Salary increase rate*
Tingkat mortalitas	1%	Penurunan sebesar/ *Decrease by 0,004%*	Kenaikan sebesar/ *Increase by 0,004%*	*Mortality rate*

(iii) Imbalan Pemeliharaan Kesehatan

Perusahaan dan entitas anak memiliki beberapa skema imbalan pemeliharaan kesehatan pascakerja. Metode akuntansi, asumsi dan frekuensi penilaian adalah sama dengan yang digunakan dalam skema pensiun imbalan pasti.

(iii) Health Care Benefits

The Company and its subsidiaries operate a number of post-employment health care benefit schemes. The accounting method, assumptions and the frequency of valuations are similar to those used for defined benefit pension schemes.

Mutasi kewajiban imbalan pasti selama tahun berjalan adalah sebagai berikut:

Movement of defined benefit obligation over the year is as follows:

	2016 Rp	2015 Rp	
Pada awal tahun	1.305.460	2.043.218	*At beginning of the year*
Dibebankan ke laba rugi			*Charged to profit or loss:*
Biaya jasa kini	25.183	74.276	*Current service cost*
Biaya bunga	118.334	179.599	*Interest expense*
	143.517	253.875	
Dibebankan ke penghasilan komprehensif lain:			*Charge to other comprehensive income:*
(Keuntungan) kerugian aktuarial dari:			*Actuarial (gain) loss from change in:*
Perubahan asumsi demografik	33.449	--	*Demographic assumptions*
Perubahan asumsi keuangan	126.545	(817.652)	*Financial assumptions*
Kombinasi perubahan asumsi	4.539	82.511	*Combination of change in assumptions*
Penyesuaian atas pengalaman	(89.854)	(226.549)	*Experience adjustment*
	1.523.656	1.335.403	
Pembayaran manfaat	(35.642)	(29.943)	*Benefit payment*
Pada akhir tahun	1.488.014	1.305.460	*At the end of the year*

Asumsi aktuarial utama yang digunakan adalah sebagai berikut:

The principal actuarial assumptions used were as follows:

	2016	2015	
Tingkat diskonto	8,5%	9,19%	*Discount rate*
Tingkat kenaikan biaya kesehatan jangka panjang	6,0%	6,0%	*Long-term increase rate in health cost*

Sensitivitas dari kewajiban imbalan pasti terhadap perubahan asumsi aktuarial utama adalah sebagai berikut:

The sensitivity of the defined benefit obligation to changes in the weighted principal assumptions is as follows:

	Dampak atas kewajiban imbalan pasti/ *Impact on defined benefit obligation*			
	Perubahan asumsi/ *Change in Assumption*	Kenaikan asumsi/ *Increse in assumption*	Penurunan asumsi/ *Decrease in assumption*	
Tingkat diskonto	1%	Penurunan sebesar/ *Decrease by 12,37%*	Kenaikan sebesar/ *Increase by 15,35%*	*Discount rate*
Tingkat kenaikan biaya kesehatan	1%	Kenaikan sebesar/ *Increase by 12,38%*	Penurunan sebesar/ *Decrease by 10,23%*	*Health Care increase rate*
Tingkat mortalitas	1%	Penurunan sebesar/ *Decrease by 0,57%*	Kenaikan sebesar/ *Increase by 0,58%*	*Mortality rate*

(iv) Imbalan Kerja Jangka Panjang Lainnya
Mutasi kewajiban imbalan pasti selama tahun berjalan adalah sebagai berikut:

(iv) Other Long-term Employee Benefits
Movement of defined benefit obligation during the year is as follows:

	2016 Rp	2015 Rp	
Pada awal tahun	83.839	95.885	*At beginning of the year*
Dibebankan ke laba rugi			*Charged to profit or loss*
Biaya jasa kini	28.000	23.762	*Current service cost*
Biaya bunga	5.802	8.428	*Interest expense*
	33.802	32.190	
Dibebankan ke penghasilan komprehensif lain:			*Charge to other comprehensive income:*
(Keuntungan) kerugian aktuarial dari:			*Actuarial (gain) loss from change in:*
Perubahan asumsi demografik	(30)	--	*Demographic assumptions*
Perubahan asumsi keuangan	1.200	(3.970)	*Financial assumptions*
Kombinasi perubahan asumsi	--	6.554	*Combination of change in assumptions*
Penyesuaian atas pengalaman	13.972	(13.845)	*Experience Adjustment*
	132.783	116.814	
Pembayaran manfaat	(40.311)	(32.975)	*Benefit payment*
Pada akhir tahun	92.472	83.839	*At the end of the year*

Asumsi aktuarial utama yang digunakan adalah sebagai berikut:

The principal actuarial assumptions used were as follows:

	2016	2015	
Tingkat diskonto	8,42%	9,11%	*Discount rate*
Tingkat kenaikan gaji per tahun	8,70%	8,70%	*Salary increase rate per annum*

Sensitivitas dari kewajiban imbalan pasti terhadap perubahan asumsi aktuarial utama adalah sebagai berikut:

The sensitivity of the defined benefit obligation to changes in the weighted principal assumptions is as follows:

	Perubahan asumsi/ *Change in Assumption*	Dampak atas kewajiban imbalan pasti/ *Impact on defined benefit obligation* Kenaikan asumsi/ *Increse in assumption*	Penurunan asumsi/ *Decrease in assumption*	
Tingkat diskonto	1%	Penurunan sebesar/ *Decrease by 2,09%*	Kenaikan sebesar/ *Increase by 2,19%*	*Discount rate*
Tingkat kenaikan biaya kesehatan	1%	Kenaikan sebesar/ *Increase by 1,98%*	Penurunan sebesar/ *Decrease by 1,92%*	*Health Care increase rate*
Tingkat mortalitas	1%	Penurunan sebesar/ *Decrease by 0,01%*	Kenaikan sebesar/ *Increase by 0,01%*	*Mortality rate*

Perusahaan dan entitas anak terekspos dengan beberapa risiko melalui program imbalan pasti dan program kesehatan pasca-kerja. Risiko yang paling signifikan adalah sebagai berikut:

The Company and its subsidiaries are exposed to a number of risks through its defined benefit pension plans and post-employment medical plans. The most significant risks are as follow:

Volatilitas aset
Pengaruh satu persen perubahan pada biaya imbalan manfaat yang diasumsikan akan menyebabkan perubahan agregat biaya jasa dan bunga dan akumulasi liabilitas imbalan pasca-kerja untuk biaya imbalan pasca-kerja lain pada periode-periode berikut:

Asset volatility
The effect of a one percentage point change in assumed benefits rate would result in the following changes to the aggregate service and interest costs and the accumulated post-employment obligation for other post-employment benefits as of these periods:

Perubahan imbal hasil obligasi
Kewajiban program dihitung menggunakan tingkat diskonto yang merujuk kepada tingkat imbal hasil surat utang negara. Jika imbal hasil aset program lebih rendah, maka akan menghasilkan defisit program.

Changes in bond yields
The plan liabilities are calculated using a discount rate set with reference to government bond yields. If plan assets underperform this yield, this will create a deficit.

Harapan umur hidup
Sebagian besar dari liabilitas program menyediakan manfaat seumur hidup, sehingga kenaikan harapan umur hidup akan mengakibatkan kenaikan liabilitas program.

Life expectancy
The majority of the plans' obligations are to provide lifetime benefits, so that the increase in life expectancy will result in an increase in the plans' liabilities.

Investasi didiversifikasi dengan baik, sehingga kinerja buruk satu investasi tidak akan memberikan dampak material bagi seluruh kelompok aset. Proporsi terbesar aset investasi ditempatkan pada instrumen ekuitas, meskipun Perusahan dan entitas anak juga berinvestasi pada properti, obligasi, instrumen lindung nilai dan kas. Perusahaan dan entitas anak meyakini bahwa instrumen ekuitas memberikan imbal hasil yang paling baik dalam jangka panjang pada tingkatan risiko yang dapat diterima.

Investments are well-diversified, such that the failure of any single investment would not have a material impact for the entire class of assets. The largest proportion of assets is invested in equities, although the Company and its subsidiaries also invests in property, bonds, hedge funds and cash. The Company and its subsidiaries believes that equities offer the best returns over the long term with an acceptable level of risk.

Rata-rata durasi kewajiban imbalan pasti adalah 25 tahun.

The weighted average duration of the defined benefit obligation is 25 years.

Analisis jatuh tempo yang diharapkan dari imbalan pascakerja dan imbalan jangka panjang lainnya yang tidak terdiskonto adalah sebagai berikut:

Expected maturity analysis of undiscounted post-employment benefit and other long-term benefit is as follows:

	Kurang dari 1 tahun/ *Less than a year*	1 sampai 2 tahun/ *Between 1 -2 years*	2 sampai 5 tahun/ *Between 2 - 5 years*	Lebih dari 5 tahun/ *More that 5 years*	Jumlah/ *Total*	
Imbalan pascakerja program pensiun	41.783	42.704	54.153	1.069.065	1.207.705	*Post-employment benefit Pension plan*
Imbalan pascakerja lainnya	135.839	162.963	351.702	11.024.154	11.674.658	*Other post-employment benefit*
Imbalan pemeliharaan kesehatan	40.925	47.404	65.930	4.330.511	4.484.770	*Health care benefits*
Imbalan kerja jangka panjang	43.817	23.586	78.585	99.509	245.497	*Long term benefits*
Total	**262.364**	**276.657**	**550.370**	**16.523.239**	**17.612.630**	***Total***

Jumlah liabilitas dan beban imbalan kerja pada dan untuk tahun 2016 dan 2015 diestimasi berdasarkan perhitungan aktuaris PT Binaputera Jaga Hikmah.

Total liabilities and expenses of employee benefits as of and for years 2016 and 2015 were estimated based on calculation of actuary PT Binaputera Jaga Hikmah.

31. Sifat dan Transaksi dengan Pihak Berelasi

31. Nature of Relationship and Transactions with Related Parties

Sifat Pihak berelasi:
a. Pemerintah Republik Indonesia merupakan pemegang saham PT PLN (Persero) dan Badan Usaha Milik Negara.
b. PT PLN (Persero) dan Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan PT PLN (Persero) merupakan pemegang saham Perusahaan.
c. Perusahaan dan entitas anak mempunyai pengaruh signifikan atas investasi pada entitas asosiasi atau ventura bersama (Catatan 7).
d. PT Indonesia Power, PT Pelayanan Listrik Nasional Batam (PLN Batam), PT Pengembang Listrik Nasional Geothermal (PLN Geothermal), PT PLN Batubara, dan PT Indonesia Comnets Plus merupakan perusahaan yang pemegang sahamnya sama dengan pemegang saham utama Perusahaan dan atau sebagian pengurusnya sama dengan Perusahaan.
e. Dewan Komisaris dan Direksi merupakan personil manajemen kunci Perusahaan.

Nature of Relationship:
a. *Government of the Republic of Indonesia is the stockholder of the PT PLN (Persero) and State-Owned Enterprises (SOE).*
b. *PT PLN (Persero) and Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan PT PLN (Persero) are the stockholder of the Company.*
c. *The Company and its subsidiaries have significant influence on investments in associates or joint ventures (Note 7).*
d. *PT Indonesia Power, PT Pelayanan Listrik Nasional Batam (PLN Batam), PT Pengembang Listrik Nasional Geothermal (PLN Geothermal), PT PLN Batubara, and PT Indonesia Comnets Plus are companies which have the same principal stockholder and or management as the Company.*
e. *Board of Commissioners and Directors are member of the key management of the Company.*

Transaksi Pihak Berelasi
Berikut ini adalah daftar pihak berelasi yang memiliki transaksi dengan Perusahaan:

Transactions with Related Parties
Below is the list of related parties with which the Company has transactions:

Pihak-pihak berelasi/ *Related parties*	Sifat hubungan/ *Nature of relationship*	Sifat transaksi/ *Nature of transaction*
PT PLN (Persero) dan Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan	Pemegang saham Perusahaan/ *stockholders of the Company*	Transaksi pembelian tenaga listrik/ *Purchase of electricity*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk ("Bank Rakyat Indonesia")	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia/ *Control through the Government of the Republic of Indonesia*	Penempatan kas dan setara kas, dan investasi jangka pendek/ *Placement of cash and cash equivalents, and short-term investment*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("Bank Mandiri")	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia/ *Control through the Government of the Republic of Indonesia*	Penempatan kas dan setara kas, dan investasi jangka pendek/ *Placement of cash and cash equivalents, and short-term investment*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("Bank Negara Indonesia")	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia/ *Control through the Government of the Republic of Indonesia*	Penempatan kas dan setara kas, dan investasi jangka pendek/ *Placement of cash and cash equivalents, and short-term investment*
PT Pertamina Geothermal Energy	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia/ *Control through the Government of the Republic of Indonesia*	Transaksi pembelian tenaga listrik/ *Purchase of electricity*
PT Wijaya Karya - Mirlindo Padu Kencana	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia/ *Control through the Government of the Republic of Indonesia*	Transaksi pembelian tenaga listrik/ *Purchase of electricity*
PT Pertamina (Persero)	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia/ *Control through the Government of the Republic of Indonesia*	Transaksi pembelian bahan bakar dan minyak pelumas/ *Purchase of fuels and lubricants*

Pihak-pihak berelasi/ *Related parties*	Sifat hubungan/ *Nature of relationship*	Sifat transaksi/ *Nature of transaction*
PT Tambang Batubara Bukit Asam Tbk	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia/ *Control through the Government of the Republic of Indonesia*	Transaksi pembelian bahan bakar/ *Purchase of fuels*
PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia/ *Control through the Government of the Republic of Indonesia*	Transaksi pembelian bahan bakar/ *Purchase of fuels*
PT Wijaya Karya	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia/ *Control through the Government of the Republic of Indonesia*	Transaksi jasa konstruksi/ *Construction services transaction*
PT Nusantara Regas	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia/ *Control through the Government of the Republic of Indonesia*	Transaksi pembelian bahan bakar/ *Purchase of fuels*
PT Surveyor Indonesia	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia/ *Control through the Government of the Republic of Indonesia*	Transaksi pelayanan teknik, survei dan pengukuran batubara/ *Engineering services, survey and coal measurement*
PT Sucofindo (Persero)	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia/ *Control through the Government of the Republic of Indonesia*	Transaksi pelayanan teknik, survei dan pengukuran batubara/ *Engineering services, survey and coal measurement*
PT Asuransi Jasa Indonesia	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia/ *Control through the Government of the Republic of Indonesia*	Asuransi bangunan, instalasi dan mesin pembangkit, perlengkapan transmisi serta kapal milik Perusahaan/ *Insurance services for Company's buildings, installation and power plant, transmission equipment and vessels*
Perum Jasa Tirta	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia/ *Control through the Government of the Republic of Indonesia*	Transaksi pembelian tenaga listrik/ *Purchase of electricity*
PT Perta Daya Gas	Ventura bersama/ *Joint venture*	Pemberian pinjaman jangka panjang/ *Issuance of long-term loan*
Dana pensiun PLN	Program imbalan pascakerja/ *Post-employment benefit plan*	Pembayaran kontribusi program manfaat pasti/ *Payment of contribution for defined benefit plan*
PT Rajamandala Elektric Power	Ventura bersama/ *Joint venture*	Pemberian pinjaman jangka panjang/ *Issuance of long-term loan*

Saldo dan Transaksi dengan Pihak berelasi / *Balances and Transactions with Related Parties*

	Catatan/ *Notes*	2016 Rp	2016 %	2015 Rp	2015 %	
Piutang pihak berelasi	8					*Receivable from related parties*
PT Perta Daya Gas		260.085	0,12%	293.368	0,13%	*PT Perta Daya Gas*
PT Rajamandala Electric Power		236.374	0,11%	149.070	0,07%	*PT Rajamandala Electric Power*
Lain-lain		27.011	0,01%	36.320	0,07%	Others
Sub jumlah		523.470	0,25%	478.758	0,27%	*Subtotal*
Kas dan setara kas	10					*Cash and cash equivalent*
Bank Negara Indonesia		962.769	0,44%	515.617	0,23%	*Bank Negara Indonesia*
Bank Rakyat Indonesia		63.984	0,03%	123.870	0,05%	*Bank Rakyat Indonesia*
Bank Mandiri		413.982	0,19%	203.466	0,09%	*Bank Mandiri*
Sub jumlah		1.440.735	0,66%	842.953	0,37%	*Subtotal*
Piutang usaha	11					*Trade accounts receivable*
PT PLN (Persero)		21.615.875	9,79%	24.442.578	10,79%	*PT PLN (Persero)*
Jumlah		**23.580.080**	**10,70%**	**25.764.289**	**11,43%**	***Total***

	Catatan/ *Notes*	2016 Rp	2016 %	2015 Rp	2015 %	
Utang usaha	18					*Trade accounts payable*
PT Pertamina		87.169	1,14%	389.358	3,35%	*PT Pertamina*
PT Bukit Asam (Persero) Tbk		430.811	5,62%	296.832	2,56%	*PT Bukit Asam (Persero) Tbk*
PT Nusantara Regas		92.815	1,21%	143.100	1,23%	*PT Nusantara Regas*
PT Perusahaan Gas Negara		117.718	1,54%	129.945	1,12%	*PT Perusahaan Gas Negara*
PT Pelayaran Bahtera Adhiguna		17.034	0,22%	63.495	0,55%	*PT Pelayaran Bahtera Adhiguna*
Lain-lain		209.866	2,74%	202.691	1,75%	*Others*
Sub jumlah		955.413	12,47%	1.225.421	10,56%	*Subtotal*
Biaya masih harus dibayar						*Accrued expenses*
Bunga pinjaman		--	0,00%	34	0,00%	*Interest*
Utang pihak berelasi						*Payable to related parties*
PT PLN (Persero)		24.670	0,32%	59.270	0,51%	*PT PLN (Persero)*
PT Indonesia Comnets Plus		9.238	0,12%	6.663	0,06%	*PT Indonesia Comnets Plus*
PT Pembangkit Jawa Bali		--	0,00%	1.481	0,01%	*PT Pembangkit Jawa Bali*
Dana Pensiun PLN		--	0,00%	377	0,00%	*Dana Pensiun PLN*
PT Haleyora Power		3.888	0,05%	--	--	*PT Haleyora Power*
Sub jumlah		37.796	0,49%	67.791	0,58%	*Subtotal*
Jumlah		**993.209**	**12,97%**	**1.293.246**	**11,14%**	***Total***
Penjualan tenaga listrik	21					*Sales of electricity*
PT PLN (Persero)		34.504.119	94,00%	30.680.909	95,82%	*PT PLN (Persero)*
Pendapatan Jasa	22					*Service revenues*
PT PLN (Persero)		2.179.956	5,94%	1.282.455	4,01%	*PT PLN (Persero)*
Jumlah		**36.684.075**	**99,94%**	**31.963.364**	**99,83%**	***Total***
Beban bahan bakar dan pelumas	23					*Fuel and lubricants expense*
PT Pertamina (Persero)		766.551	2,35%	2.930.645	9,79%	*PT Pertamina (Persero)*
PT Bukit Asam (Persero) Tbk		2.364.553	7,25%	2.900.058	9,69%	*PT Bukit Asam (Persero) Tbk*
PT Perusahaan Gas Negara		1.525.235	4,68%	1.721.742	5,75%	*PT Perusahaan Gas Negara*
PT Nusantara Regas		4.349.006	13,34%	1.924.531	6,43%	*PT Nusantara Regas*
Lain-lain		201.430	0,62%	945.917	3,16%	*Others*
Sub jumlah		9.206.775	28,24%	10.422.893	34,82%	*Subtotal*
Beban usaha lain-lain						*Other operating expenses*
Asuransi						*Insurance*
PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero)		108.302	30,65%	122.803	34,27%	*PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero)*
Sub jumlah		108.302	30,65%	122.803	34,27%	*Subtotal*
Jumlah		**9.315.077**	**58,89%**	**10.545.696**	**69,09%**	***Total***
Beban keuangan						*Financial cost*
Penerusan Pinjaman		52	0%	54.285	100%	*Two step loan*

*) Persentase terhadap jumlah aset/ liabilitas/ pendapatan/ beban yang bersangkutan

*) *Percentage to related total assets/ liabilities/ revenues/ expenses*

Jumlah kompensasi yang dibayarkan kepada Direksi dan Komisaris Perusahaan tahun 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp29.430 dan Rp24.290.

Total remuneration paid to the Company Board of Directors and Commissioners in 2016 and 2015 amounted to Rp29,430 and Rp24,290.

32. Aset dan Liabilitas Moneter Dalam Mata Uang Asing / *32. Monetary Assets and Liabilities Denominated In Foreign Currencies*

Pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, Perusahaan dan entitas anak mempunyai aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing sebagai berikut:

As of December 31, 2016 and 2015, the Company and its subsidiaries had monetary assets and liabilities in foreign currencies as follows:

	2016				
	JPY *)	USD *)	EUR *)	Lain-lain / *Others* **)	
Aset Moneter					***Monetary assets***
Kas dan setara kas	180.389	2.105.079	334.230	457.750	*Cash and cash equivalent*
Piutang pihak berelasi	--	28.297.451	--	--	*Receivables from related parties*
Jumlah aset moneter	180.389	30.402.530	334.230	457.750	*Total monetary assets*
Liabilitas Moneter					***Monetary liabilities***
Utang sewa pembiayaan	--	13.343.608	--	--	*Lease liability*
Utang usaha	--	116.507.270	--	--	*Trade payables*
Jumlah liabilitas moneter	--	129.850.878	--	--	*Total monetary liabilities*
Asset (Liabilitas) moneter bersih	180.389	(99.448.348)	334.230	457.750	*Net monetary Assets (liabilities)*
Equivalent rupiah (dalam jutaan)	21	(1.336.188)	4.733	6.150	*Rupiah equivalent (in millions)*
Jumlah dalam rupiah - bersih (dalam jutaan)	**(1.325.284)**				***Total in Rupiah - net (in millions)***

	2015				
	JPY *)	USD *)	EUR *)	Lain-lain / *Others* **)	
Aset Moneter					***Monetary assets***
Kas dan setara kas	--	1.029.260	188.946	472.008	*Cash and cash equivalent*
Piutang pihak berelasi	--	30.399.293			*Receivables from related parties*
Jumlah aset moneter	--	31.428.553	188.946	472.008	*Total monetary assets*
Liabilitas Moneter					***Monetary liabilities***
Utang sewa pembiayaan	--	18.352.240	--	--	*Lease liability*
Utang usaha	--	99.019.914	--	--	*Trade payables*
Jumlah liabilitas moneter	--	117.372.154	--	--	*Total monetary liabilities*
Aset (Liabilitas) moneter bersih	--	(85.943.601)	188.946	472.008	*Net monetary Asset (liablilities)*
Equivalent rupiah (dalam jutaan)	--	(1.185.592)	2.847	6.511	*Rupiah equivalent (in millions)*
Jumlah dalam rupiah - bersih (dalam jutaan)	**(1.176.234)**				***Total in Rupiah - net (in millions)***

*) Dalam jumlah penuh
**) Aset dan liabilitas dalam mata uang asing lainnya disajikan setara US$ dengan menggunakan kurs tanggal pelaporan

*) *In full amount*
**) *Assets and liabilities denominated in other foreign currencies are presented as US$ equivalent using the exchange rate prevailing at the reporting date*

Sehubungan dengan fluktuasi kurs mata uang Rupiah terhadap mata uang asing, Perusahaan dan entitas anak mencatat laba kurs mata uang asing bersih sebesar Rp77.071 untuk tahun 2016 dan rugi kurs sebesar Rp5.509 untuk tahun 2015.

In relation to the fluctuation of the Rupiah against foreign currencies, the Company and its subsidiaries recorded net gain on foreign exchange of Rp77,071 for 2016 and net loss amounted to Rp5,509 for 2015.

Apabila aset dan liabilitas dalam mata uang asing pada tanggal 31 Desember 2016 dijabarkan dengan menggunakan kurs penutupan mata uang asing pada tanggal 30 Maret 2017, maka liabilitas bersih dalam mata uang asing Perusahaan dan entitas anak akan turun sebesar Rp11.930.

If assets and liabilities in foreign currencies as of December 31, 2016 had been translated using the closing rates at issuance of March 30, 2017, the total net foreign currency liabilities of the Company and its subsidiaries would have been decrease by Rp11,930

33. Ikatan dan Kontinjensi / *33. Commitments and Contingencies*

Perusahaan dan entitas anak memiliki perikatan penting dan kontijensi sebagai berikut:

The Company and its subsidiaries have significant commitments and contingencies as follows:

a. Perusahaan dan entitas anak memiliki sejumlah PPA dengan PT PLN (Persero). Dalam perjanjian tersebut, PT PLN (Persero) membayar pasokan tenaga listrik yang disediakan oleh Perusahaan sebesar jumlah yang ditentukan berdasarkan formula pembayaran. Pembayaran tersebut mencakup komponen biaya kapasitas, energi, operasional dan pemeliharaan yang tergantung pada tingkat pasokan energi serta variabel lain yang ditentukan dalam perjanjian.

a. The Company and its subsidiaries have various PPA with PT PLN (Persero). Under those agreements, PT PLN (Persero) will pay the Company for the supply of electricity at an amount determined in accordance with the payment formula. Such payment formula includes cost of capacity and energy components, as well as operations and maintenance components, which depends on the level of energy supplied and other variables stipulated in the agreement.

b. Perjanjian Pasokan Bahan Bakar / *b. Fuel Supply Agreements*

(i) Gas / *(i) Gas*

Sektor/ *Sector*	Pemasok/ *Suppliers*	No. Perjanjian/ *Agreement no.*	Period/ *Duration*	Satuan/ *Unit of measure*	yang disepakati/ *Agreed quantity *)*
Muara Karang					
dan Tanjung Priok	***)	652/BP00000/2003-SO	2004 - 2017	TBtu	679,44
	****)	273.PJ/041/DIR/2012	2012 - 2022	Bbtu	300,00
				Bbtu	200,00
Grati	*****)	--	2012 - 2018	Bbtu	90,10-0,99
		115.PJ/061/IP/2010	2011 - 2017	Bbtu	55
Tambak Lorok	******)	97.PJ/061/IP/2007	2011 - 2022	Bbtu	219
	*******)	107.PJ/061/IP/2012	2014 - 2026	Bbtu	354,78
Bali	********)	01888.PJ/EPI.01.02/DIR/2016	2016 - 2017	MMBTU	±7

*) Dalam angka penuh
**) PT Perusahaan Gas Negara ("PGN")
***) Pertamina Hulu Energi ONWJ Ltd.; Itochu Oil Exploration Co. Ltd., Orchard Energy Java BV.; Inpex Jawa Ltd.; CNOOC ONWJ Ltd.; dan Talisman Resources (North West Java) Ltd.

*) *In full amount*
**) *PT Perusahaan Gas Negara ("PGN")*
***) *Pertamina Hulu Energi ONWJ Ltd.; Itochu Oil Exploration Co. Ltd., Orchard Energy Java BV.; Inpex Jawa Ltd.; CNOOC ONWJ Ltd.; and Talisman Resources (North West Java) Ltd.*

****) PT Nusantara Regas. Perusahaan patungan antara PT Pertamina (Persero) dengan PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk
*****) Santos (Sampang) Pty Ltd., Singapore Petroleum Sampang Ltd dan Cue Sampang Pty Ltd. Perusahaan mempunyai fasilitas Stand By Letter of Credit ("SBLC") dengan PT Bank Rakyat Indonesia yang digunakan untuk menjamin kelancaran pembayaran pembelian gas oleh Perusahaan kepada PGN untuk penyediaan gas untuk UBP Tanjung Priok.
******) PT Sumber Petrindo Perkasa
*******) PC Muriah Ltd
********) PT Pertamina (Persero), Total E&P Indonesia

****) *PT Nusantara Regas, a Joint venture between PT Pertamina (Persero) with PT Perusahan Gas Negara (Persero) Tbk.*
*****) *Santos (Sampang) Pty Ltd., Singapore Petroleum Sampang Ltd and Cue Sampang Pty Ltd. The Company has Stand By Letter of Credit ("SBLC") with PT Bank Rakyat Indonesia which are used to guarantee the payment for gas purchases from PGN for the supply of gas to UBP Tanjung Priok.*
******) *PT Sumber Petrindo Perkasa*
*******) *PC Muriah Ltd*
********) *PT Pertamina (Persero), Total E&P Indonesia*

(ii) Batubara

(ii) Coal

Pemasok/ *Suppliers*	No. Kontrak/ *Contract No.*	Jumlah dalam metrik ton/ *Total in metric tons *)*	Periode/ *Duration*
PT Bukit Asam (Persero) Tbk	12.PJ/061/IP/2013	5.300.000	2013 - 2022
PT Eksploitasi Energi Indonesia	04/PJ/061/IP/2006	480.000	2006 - 2018
PT Natuna Energi Indonesia	16.PJ/061/IP/2006	480.000	2006 - 2017
PT Oktasan Baruna Persada	13.PJ/061/IP/2006	660.000	2006 - 2017
PT Berau Coal	84.PJ/061/IP/2008	2.500.000	2009 - 2018
PT Kideco Jaya Agung	85.PJ/061/IP/2008	1.500.000	2009 - 2018
PT Adaro Indonesia	117.PJ/061/IP/2014	1.500.000	2014 - 2023

*) Dalam angka penuh

**) In full amount*

Harga pembelian batubara berkisar antara Rp594.207 (angka penuh) dan Rp735.781 (angka penuh) per ton sebelum yang disesuaikan nilai kalor, kadar abu, sulfur, air, SFT dan HGI.

The purchase price of coal ranges from Rp594,207 (full amount) to Rp735,781 (full amount) per ton, which is adjusted against calorific value, ash content, sulphur, water, SFT and HGI.

(iii) Bahan Bakar Minyak

Perusahaan melalui PLN dan Pertamina mengadakan Perjanjian Payung Jual Beli Bahan Bakar Minyak No. 071.PJ/060/DIR/2001 tanggal 8 Oktober 2001. Perjanjian ini telah diadendum tanggal 16 Mei 2007 dimana Perusahaan dan Pertamina menyepakati antara lain: (i) penggunaan harga bahan bakar bulanan ditetapkan oleh Pertamina untuk periode 1 Januari sampai dengan 30 April 2007 dan harga bahan bakar 109,5% dari *Mean Oil Platts Singapore* (MOPS) ditambah Pajak Pertambahan Nilai untuk periode 1 Mei 2007 sampai dengan 31 Desember 2007; (ii) harga bahan bakar setelah tanggal 31 Desember 2007 akan ditetapkan oleh kedua belah pihak setiap tahun; (iii) jangka waktu pembayaran berikut pengenaan denda keterlambatan pembayaran sebesar tingkat bunga Sertifikat Bank Indonesia bulanan

(iii) Fuel

The Company, through PLN and Pertamina entered into a Fuel Sale and Purchase Agreement No. 071.PJ/060/DIR/2001 dated October 8, 2001. This agreement was amended on May 16, 2007, whereby, the Company and Pertamina agreed among others: (i) the monthly fuel price to be used for the period January 1 until April 30, 2007 is determined by Pertamina, and the fuel price of 109.5% from Mean Oil Platts Singapore (MOPS) plus Value Added Tax for the period May 1, 2007 until December 31, 2007; (ii) the fuel price subsequent to December 31, 2007 will be determined by both parties every year; (iii) the terms of payment and penalty charges on late payment with a rate of monthly Certificate of Bank Indonesia plus 1.3%; (iv) effective on May 1, 2007, the unpaid balance of payable for the purchases of fuel until

ditambah 1,3%; (iv) efektif mulai 1 Mei 2007, saldo utang yang belum dibayar atas pembelian bahan bakar sampai dengan 30 April 2007 dikenakan bunga sebesar tingkat bunga Sertifikat Bank Indonesia per tahun ditambah 1,3%, sampai diselesaikan dengan menerbitkan obligasi PLN selambat-lambatnya tanggal 31 Agustus 2007; (v) utang kepada Pertamina, termasuk obligasi yang akan diterbitkan maksimum sebesar Rp18 triliun; (vi) perjanjian ini berlaku untuk lima tahun sejak 1 Januari 2007 sampai dengan 31 Desember 2011.

April 30, 2007 will bear interest with a rate per annum of Certificate of Bank Indonesia plus 1.3%, until settled by issuance of PLN bonds, which is no later than August 31, 2007; (v) the maximum payable to Pertamina, includes bonds which will be issued amounting to Rp18 trillion; (vi) this agreement is valid for five years from January 1, 2007 until December 31, 2011.

Berdasarkan Surat Kesepakatan Bersama tanggal 16 Mei 2007, PT Sucofindo (Persero) ditunjuk sebagai *independent surveyor*.

Based on the Joint Deal Letter dated May 16, 2007, PT Sucofindo (Persero) is assigned as an independent surveyor.

Berdasarkan Addendum III Perjanjian Jual Beli Bahan Bakar Minyak tanggal 7 November 2011, Perusahaan dan Pertamina menyepakati dalam tahun 2011 sebagai berikut:

Based on Amendment III of the Fuel Sale and Purchase Agreement dated November 7, 2011, the Company and Pertamina agreed in 2011 on the following:

1. HSD
   - Harga pembelian HSD sampai dengan 2.537.161 kl di 18 titik penyerahan Pertamina adalah 105% dari MOPS.
   - Harga pembelian HSD sampai dengan 480.487 kl di titik penyerahan Pertamina Terminal Transit Manggis adalah 108% dari MOPS.
   - Harga pembelian HSD sampai dengan 2.978.360 kl di titik penyerahan Instalasi Tanjung Priok dan Instalasi Surabaya Group adalah 108,5% dari MOPS.
   - Harga pembelian HSD diatas 5.996.008 kl atau yang diserahkan diluar 21 titik penyerahan yang ditetapkan Pertamina adalah 109,5% dari MOPS.
2. Harga pembelian IDO sampai dengan 3.933 kl di titik penyerahan Kilang Plaju adalah 105% dari MOPS dan pembelian diatas 3.933 kl atau yang diserahkan diluar titik penyerahan Kilang Plaju adalah 109,5% dari MOPS.

1. *HSD*
   - *The price of HSD for purchase of up to 2,537,161 kl from 18 supply points of Pertamina is 105% from MOPS.*
   - *The price of HSD for purchase of up to 480,487 kl from supply points of Pertamina Terminal Transit Manggis is 108% from MOPS.*
   - *The price of HSD for purchase of up to 2,978,360 kl from supply points Instalasi Tanjung Priok and Instalasi Surabaya Group is 108.5% from MOPS.*
   - *The price of HSD in excess of 5,996,008 kl or supplied from suppy points other than the 21 supply points specified by Pertamina is 109.5% from MOPS.*
2. *The price of IDO for purchases of up to 3,933 kl from supply point Kilang Plaju is 105% from MOPS and for purchases in excess of 3,933 kl or supplied from supply point other than supply point Kilang Plaju is 109.5% from MOPS.*

3. Harga pembelian MFO sampai dengan 1.193.166 kl di titik penyerahan Kilang Cilacap adalah 105% dari MOPS dan pembelian diatas 1.193.166 kl atau yang diserahkan diluar titik penyerahan Kilang Cilacap adalah 109,5% dari MOPS.

3. The price of MFO for purchases of up to 1,193,166 kl from supply point Kilang Cilacap is 105% from MOPS and for purchases in excess of 1,193,166 kl or supplied from a supply point other than supply point Kilang Cilacap is 109.5% from MOPS.

Tahun 2013, Perusahaan dan Pertamina sepakat untuk menggunakan harga tahun 2011, karena amandemen Perjanjian Jual Beli Bahan Bakar Minyak belum diselesaikan.

In 2013, the Company and Pertamina agreed to use the 2011 price, since the Fuel Sale Purchase Agreement amendment has not been completed.

Dalam rangka penyelesaian harga jual Bahan Bakar Minyak ("BBM") (HSD dan MFO) Pertamina kepada PT PLN (Persero), telah dilakukan rapat koordinasi antara Menteri Keuangan, Menteri BUMN, Staf Ahli Menteri Bidang Investasi dan Produksi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ("ESDM"), Direktur Utama Pertamina dan Direktur Utama PT PLN (Persero) pada tanggal 30 Januari 2015. Berdasarkan rapat koordinasi tersebut pada tanggal 5 Februari 2015, Menteri Keuangan Republik Indonesia mengeluarkan surat No. S-74/MK.02/2015 kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral mengenai rekomendasi penetapan harga jual beli HSD dan MFO antara PT PLN (Persero) dan Pertamina tahun 2014. Penyelesaian harga jual beli tersebut berdasarkan audit BPKP atas harga jual BBM (HSD dan MFO) untuk periode tahun 2013 dan semester 1 2014 sebagai referensi harga jual BBM yang akan digunakan pada tahun 2014.

In settlement of fuel sales price of Pertamina's fuel (HSD and MFO) to PT PLN (Persero), coordination meeting was held between Minister of Finance, Minister of State Owned Enterprise, Expert Staff for the Minister of Energy and Mineral Resources ("MEMR") for Investment and Production, President Director of Pertamina and President Director of PT PLN (Persero), on January 30, 2015. Based on the coordination meeting, on February 5, 2015, Minister of Finance of Republic of Indonesia sent letter No. S-74/MK.02/2015 to Minister of Energy and Mineral Resources regarding recommendation of sales and purchase price of HSD and MFO between PT PLN (Persero) and Pertamina for 2014. The settled sales and purchase price based on BPKP audit of sales price of fuel (HSD and MFO) for period of 2013 and first semester of 2014 as a reference for fuel sales price that will be used in 2014.

Berdasarkan pertemuan tanggal 30 Januari 2015 tersebut diatas, pokok-pokok kesepakatan antara Pertamina dan PT PLN (Persero) antara lain:

a. Harga jual tahun 2014 menggunakan harga berdasarkan reviu Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan sebesar HSD: MOPS + 9,19% dan MFO: MOPS + 11,94%;

Based on meeting dated January 30, 2015 above, term of the agreement between Pertamina and PT PLN (Persero) are:

a. Sales price for 2014 are using price based on review of Board of Finance and Development Supervision as follow: for HSD: MOPS + 9.19% and for MFO: MOPS + 11.94%;

b. Dalam rangka efisiensi biaya pembelian di tahun 2015, PT PLN (Persero) diperkenankan untuk mencari sumber BBM selain Pertamina, dengan tetap menjaga keamanan pasokan BBM.

PLN telah mencatat pembelian HSD dan MFO tahun 2014 berdasarkan harga tersebut.

Dalam rangka penyelesaian harga jual Bahan Bakar Minyak (HSD dan MFO) Pertamina kepada Perusahaan, telah dilakukan pembahasan harga jual beli bahan bakar minyak (HSD dan MFO) antara Pertamina dan Perusahaan tahun 2015 di Kantor Kementerian Badan Usaha Milik Negara, difasilitasi oleh Deputi Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan dan Pariwisata Kementerian BUMN, untuk menentukan harga transaksi BBM di tahun 2015.

Berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Harga Jual Beli Bahan Bakar Minyak (HSD dan MFO) antara Pertamina dan Perusahaan tanggal 9 Februari 2016 dengan hasil sebagai berikut:

i. Harga transaksi HSD tahun 2016 adalah 107% dari MOPS
ii. Harga transaksi MFO tahun 2016 adalah 109,5% dari MOPS.

Sampai tanggal pelaporan keuangan konsolidasian, pembaruan kontrak BBM masih dalam proses.

Perusahaan telah mencatat pembelian HSD dan MFO tahun 2015 berdasarkan harga tersebut.

(iv) Uap Panas Bumi
Melalui PT PLN (Persero), Perusahaan mengadakan perjanjian dengan Pertamina untuk pengadaan uap panas bumi untuk daerah Kamojang selama 30 tahun yang berakhir tahun 2012 dan telah melalui Amandemen I Surat Perjanjian antara Pertamina dan PLN PLTP Unit 1,2,3 di Kamojang. Sampai tahun 2015, perjanjian masih menggunakan Amandemen V Perjanjian Interim antara PT Pertamina Geothermal Energy, PT PLN (Persero) dan

b. For the efficiency of purchase cost in 2015, PT PLN (Persero) is allowed to acquire from other source of fuel other than Pertamina, whilst maintaining security of fuel supply.

PLN has recorded purchase of HSD and MFO for the year 2014 based on that prices.

In settlement of the fuel sales price of Pertamina's fuel (HSD and MFO) to the Company, has conducted discussion on selling price of fuel (HSD and MFO) between Pertamina and the Company on 2015 in Minister of State Owned Enterprises ("SOE") office, facilitated by a deputy of the energy business logistics and tourism, to determine the selling price of fuel in 2015.

Based on Sales and Purchase Price Agreement of Fuel (HSD and MFO) between Pertamina and the Company on February 9, 2016 the results are:

i. HSD transaction price for 2016 is 107% fromMOPS:
ii. MFO transaction price for 2016 is 109.5% from MOPS.

Until the consolidated reporting date, the renewal of Fuel Supply Agreement is still in process.

The Company has recorded purchase of HSD and MFO for the year 2015 based on those prices.

(iv) Geothermal Steam
The Company, through PT PLN (Persero), entered into a geothermal procurement agreement with Pertamina to purchase Geothermal Steam for Kamojang area for 30 years until 2012 and has been amendment I agreement between Pertamina and PLN PLTP Unit 1,2,3 in Kamojang. Until 2015, The Agreement was still using the Fifth Amandement of the Interim Agreement between PT Pertamina Geothermal Energy, PT PLN (Persero), and PT

PT Indonesia Power. Pada tanggal 11 Februari 2016, dilakukan amandemen secara keseluruhan dan pernyataan kembali atas perjanjian induk, yang berlaku mulai 1 Agustus 2012 sampai dengan 31 Desember 2040. Untuk PLTP Gunung Salak dan Darajat perjanjian selama masa 30 tahun yang berakhir tahun 2030.

Indonesia Power. On February 11, 2016, the main agreement has been wholly amended and restated, which is valid from August 1, 2012 to December 31, 2040. For PLTP Gunung Salak and Darajat, the agreement valid for 30 years until 2030.

(v) Lainnya

(v) Other

Perjanjian Transportasi Gas Pembangkit Listrik Tambak Lorok

Pada tanggal 10 Desember 2012, Perusahaan melalui PT PLN (Persero) menandatangani surat perjanjian kerjasama no. 278-1.PJ/041/DIR/2012 terkait transportasi gas PC Muriah Ltd. Dengan PT Bakrie & Brothers Tbk untuk pembangkit listrik Tambak Lorok. Perjanjian transportasi gas tersebut kemudian dialihkan melalui novasi dan perubahan perjanjian pengangkutan gas melalui pipa yang ditandatangani tanggal 22 Februari 2016 oleh PT Bakrie & Brothers Tbk, PC Muriah Ltd., PT PLN (Persero), Saka Energi Muriah Ltd., dan PT Kalimantan Jawa Gas sebagai *transporter*. Perjanjian transportasi gas akan tetap berlangsung selama perjanjian penyaluran gas berlangsung.

Gas Transportation Agreeement for Tambak Lorok Power Plant

On December 10, 2012, the Company through PT PLN (Persero) signed Gas Transport Agreement of PC Muriah Ltd with PT Bakrie & Brothers Tbk for Tambak Lorok's Power Plant. The agreement then redirected through novation and amendment to gas transportation agreement through pipeline dated February 22, 2016 by PT Bakrie & Brothers Tbk, PC Muriah Ltd., PT PLN (Persero), Saka Energi Muriah Ltd., and PT Kalimantan Jawa Gas as transporter. The Gas Transport Agreement will remain effective as in the gas supply agreement.

Perjanjian Jasa Pengurusan Perkapalan, Fasilitas Penyimpanan Liquid Natural Gas (LNG) dan terminal LNG di PLTDG Pesanggaran

Pada tanggal 8 Desember 2015, Perusahaan menandatangani perjanjian jasa pengurusan perkapalan, fasilitas penyimpanan LNG dan terminal LNG di PLTDG Pesanggaran dengan PT Pelindo Energi Logistik. Perjanjian jasa pengurusan perkapalan dan fasilitas LNG berlangsung selama 7 tahun melalui kontrak No. 187.PJ/061/IP/2015 dan 188.PJ/061/IP/2015, sedangkan perjanjian jasa terminal LNG berlangsung selama 5 tahun melalui kontrak No. 189.PJ/061/IP/2015.

Agreement of Shipping Management Services, Liquid Natural Gas Storage Facilities and LNG Terminal in PLTDG Pesanggaran

On December 8, 2015, the Company signed agreement of Shipping Management Services, LNG Storage facility services and LNG terminal services in PLTDG Pesanggaran with PT Pelindo Energi Logistik. Shipping managemet services agreement and LNG Storage agreement are effective for 7 years based on contract No. 187.PJ/061/IP/2015 and 188.PJ/061/IP/2015 respectively, while LNG Terminal Agreement is effective for 5 years based on contract no 189.PJ/061/IP/2015.

Stand By Leter of Credit ("SBLC")

Perusahaan memliki fasilitas *Non Cash Loan* sebagai SBLC dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang

Stand By Leter of Credit ("SBLC")

The Company has Non Cash Loan facility as SBLC with PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, which is used

digunakan untuk jaminan perjanjian jual beli gas dengan Santos Sampang Pty. Ltd. Dengan nominal sebesar US$25.008.353,81 (nilai penuh) atau setara dengan Rp336.012 per 31 Desember 2016, dengan jangka waktu 25 Januari 2016 sampai dengan 24 Januari 2017 dan diperpanjang dengan nominal sebesar US$19.996.848,40 (nilai penuh) atau setara dengan Rp268.678 per 31 Desember 2016, dengan jangka waktu 25 Januari 2017 sampai dengan 24 Januari 2018.

as gas purchase guarantee with Santos Sampang Pty Ltd amounted of US$25,008,353.81 (full amount) or equivalent with Rp336.012 as per December 31, 2016, with period of January 25, 2016 to January 24, 2017 and extended amounted of US$19,996,848.40 (full amount) or equivalent with Rp268.678 as per December 31,2016, with period of January 25, 2017 to January 24, 2018.

Permohonan Pembatalan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Perwakilan Surabaya atas Perkara Arbitrase No. 18/ARB/BANI-SBY/VI/2015 antara konsorsium PT Boma Bisma Indra – PT Indosurya Persada dengan PT Indonesia Power Unit Pembangkitan Semarang

Yusuf Subiantoro, selaku penanggungjawab finansial pimpinan kerjasama konsorsium PT Boma Bisma Indra – PT Indosurya Persada (BBIISP), mengajukan permohonan pembatalan putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Perwakilan Surabaya kepada Pengadilan Negeri Semarang atas Perkara Arbitrase No. 18/ARB/BANI-SBY/VI/2015 yang telah dibacakan pada Selasa 17 Mei 2016, yang putusannya berisi tidak terbuktinya PT Indonesia Power Unit Pembangkitan Semarang melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Konsorsium BBIISP sebesar Rp7.671 ditolak oleh BANI.

Cancellation Request for the Decision of Indonesian National Arbitration Board Representatives of Surabaya on Arbitration Case No. 18 / ARB / BANI-SBY / VI / 2015 between the consortium of PT Boma Bisma Indra - PT Indosurya Persada and PT Indonesia Power Semarang Generation Units

Yusuf Subiantoro, who is in charge of financial co-led consortium of PT Boma Bisma Indra - PT Indosurya Persada (BBIISP), applied for cancellation of the decision of the Indonesian National Arbitration Board (BANI) Representative Surabaya to Semarang District Court on Arbitration Case No. 18 / ARB / BANI-SBY / VI / 2015 which was read out on Tuesday, May 17, 2016, the decision contains no evidence of the PT Indonesia Power Semarang Generation Units committed acts against the law, so that the compensation claim filed by the Consortium BBIISP Rp7,671 - rejected by BANI.

Atas tuntutan perkara tersebut, pada tanggal 29 November 2016 Pengadilan Negeri Semarang memutuskan untuk membatalkan Putusan Arbitrase Badan Arbitrase Nasional Indonesia Surabaya No. 18/ARB/BANI-SBY/VI/2015, dan menghukum PT Indonesia Power untuk membayar kepada Konsorsium atas kekurangan pembayaran sesuai Progres Laporan Kemajuan Pekerjaan senilai 26 % atau sebesar Rp2.600.

On the demands of the case, on 29 November 2016 Semarang District Court decided to cancel the Arbitral Indonesian National Arbitration Board Surabaya No. 18 / ARB / BANI-SBY / VI / 2015, and punish PT Indonesia Power to pay to the Consortium on deficiency payments according Progress Progress Report Employment worth 26% or Rp2,600.

Pada tanggal 20 Desember 2016, PT Indonesia Power melalui kuasa hukumnya Jaksa Pengacara Negara dari Kejaksaan Agung mengajukan Memori Banding Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Semarang dalam Perkara Perdata No. 01/Arbitrase/2016/PN.SMG Tanggal 29 November 2016 kepada Ketua Mahkamah Agung RI.

On December 20, 2016, PT Indonesia Power through his attorney state attorney from the Attorney General filed Appeal Against the Semarang District Court Decision in Civil Case No. 01 / Arbitration / 2016 / PN.SMG November 29, 2016 to the Chairman of the Supreme Court.

34. Instrumen Keuangan, Manajemen Risiko Keuangan dan Risiko Modal / *34. Financial Instruments, Financial Risk Management and Capital Risk Management*

a. Kategori dan klasifikasi instrumen keuangan / *a. Categories and classes of financial instruments*

Tabel berikut ini mengungkapkan rincian instrumen keuangan Perusahaan dan entitas anak berdasarkan klasifikasi instrumen keuangan:

The following table disclosed the details of the Company and its subsidiaries' financial instruments based on financial instruments classification:

	31 Desember/ *December 31,* 2016							
	Aset Keuangan/ *Financial Asset*				Liabilitas keuangan/ *Financial Liabilities*			
	Dimiliki hingga jatuh tempo/ *Held to maturity*	Pinjaman yang diberikan dan piutang/ *Loans and recevable*	Tersedian untuk dijual/ *Available for sale*	Nilai wajar melalui laba rugi/ *Fair value through profit or loss*	Liabilitas keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi/ *Financial liabilities at amortized cost*	Nilai wajar melalui laba rugi/ *Fair value through profit or loss*	Jumlah aset dan liabilitas keuangan/ *Total financial assets and liabilities*	
ASET KEUANGAN								***FINANCIAL ASSETS***
ASET KEUANGAN TIDAK LANCAR								***NON-CURRENT FINANCIAL ASSETS***
Piutang pihak berelasi	--	481.336	--	--	--	--	481.336	*Receivable from related parties*
Piutang lain-lain	--	34.116	--	--	--	--	34.116	*Other receivables*
ASET KEUANGAN LANCAR								***CURRENT FINANCIAL ASSETS***
Kas dan setara kas	--	1.500.820	--	--	--	--	1.500.820	*Cash and cash equivalents*
Piutang usaha	--	21.666.641	--	--	--	--	21.666.641	*Trade receivable*
Piutang lain-lain	--	12.025	--	--	--	--	12.025	*Other receivables*
Piutang pihak berelasi	--	42.134	--	--	--	--	42.134	*Receivables from related parties*
Jumlah aset keuangan	--	**23.737.072**	--	--	--	--	**23.737.072**	*Total financial assets*
LIABILITAS KEUANGAN								***FINANCIAL LIABILITIES***
LIABILITAS KEUANGAN TIDAK LANCAR								***NON-CURRENT LIABILITIES***
Utang pihak berelasi	--	--	--	--	--	--	--	*Payable to related parties*
Utang sewa pembiayaan	--	--	--	--	144.949	--	144.949	*Lease liabilities*
LIABILITAS LANCAR								***CURRENT LIABILITIES***
Utang usaha	--	--	--	--	3.336.147	--	3.336.147	*Trade payable*
Utang lain-lain	--	--	--	--	3.822	--	3.822	*Other payables*
Utang pihak berelasi	--	--	--	--	37.796	--	37.796	*Payable to related parties*
Biaya masih harus dibayar	--	--	--	--	555.569	--	555.569	*Accrued expenses*
Utang sewa pembiayaan	--	--	--	--	106.991	--	106.991	*Lease liabilities*
Jumlah liabilitas keuangan	--	--	--	--	**4.185.274**	--	**4.185.274**	***Total financial liabilities***

	31 Desember/ *December 31,* 2015							
	Aset Keuangan/ *Financial Asset*				Liabilitas keuangan/ *Financial Liabilities*			
	Dimiliki hingga jatuh tempo/ *Held to maturity*	Pinjaman yang diberikan dan piutang/ *Loans and recevable*	Tersedian untuk dijual/ *Available for sale*	Nilai wajar melalui laba rugi/ *Fair value through profit or loss*	Liabilitas keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi/ *Financial liabilities at amortized cost*	Nilai wajar melalui laba rugi/ *Fair value through profit or loss*	Jumlah aset dan liabilitas keuangan/ *Total financial assets and liabilities*	
ASET KEUANGAN								***FINANCIAL ASSETS***
ASET KEUANGAN TIDAK LANCAR								***NON-CURRENT FINANCIAL ASSETS***
Piutang pihak berelasi	--	395,387	--	--	--	--	395,387	*Receivable from related parties*
Piutang lain-lain	--	30,631	--	--	--	--	30,631	*Other receivables*
ASET KEUANGAN LANCAR								***CURRENT FINANCIAL ASSETS***
Kas dan setara kas	--	896,378	--	--	--	--	896,378	*Cash and cash equivalents*
Piutang usaha	--	24,493,692	--	--	--	--	24,493,692	*Trade receivable*
Piutang lain-lain	--	13,091	--	--	--	--	13,091	*Other receivables*
Piutang pihak berelasi	--	83,371	--	--	--	--	83,371	*Receivables from related parties*
Jumlah aset keuangan	--	25,912,550	--	--	--	--	25,912,550	*Total financial assets*
LIABILITAS KEUANGAN								***FINANCIAL LIABILITIES***
LIABILITAS KEUANGAN TIDAK LANCAR								***NON-CURRENT LIABILITIES***
Utang pihak berelasi	--	--	--	--	2,717	--	2,717	*Payable to related parties*
Utang sewa pembiayaan	--	--	--	--	256,731	--	256,731	*Lease liabilities*
LIABILITAS LANCAR								***CURRENT LIABILITIES***
Utang usaha	--	--	--	--	3,098,851	--	3,098,851	*Trade payable*
Utang lain-lain	--	--	--	--	8,435	--	8,435	*Other payables*
Utang pihak berelasi	--	--	--	--	65,074	--	65,074	*Payable to related parties*
Biaya masih harus dibayar	--	--	--	--	425,995	--	425,995	*Accrued expenses*
Utang sewa pembiayaan	--	--	--	--	95,377		95,377	*Lease liabilities*
Jumlah liabilitas keuangan	--	--	--	--	**3,953,180**	--	**3,953,180**	***Total financial liabilities***

b. Manajemen risiko modal

Perusahaan dan entitas anak mengelola risiko modal untuk memastikan bahwa mereka akan mampu untuk melanjutkan kelangsungan usaha dan untuk memastikan pemenuhan batasan rasio kecukupan modal. Struktur modal Perusahaan terdiri dari ekuitas pemegang saham induk, yang terdiri dari modal saham (Catatan 16), tambahan modal disetor (Catatan 17) dan saldo laba.

Direksi Perusahaan dan entitas anak secara berkala melakukan tinjauan struktur permodalan. Sebagai bagian dari tinjauan ini, Direksi mempertimbangkan biaya permodalan dan risiko yang berhubungan.

Perusahaan dan entitas anak berusaha untuk meminimalkan biaya modal sehingga dapat memaksimalkan nilai Perusahaan. Oleh karena itu, kebijakan Perusahaan dan entitas anak dalam mencari pendanaan akan selalu memperhitungkan risiko keuangan yang mungkin timbul di masa depan.

b. Capital risk management

The Company and its subsidiaries manages capital risk to ensure that they will be able to continue as going concern and to ensure compliance with covenants of capital adequacy ratio. The Company capital structure consist of equity shareholders that consist of capital stock (Note 16), additional paid-in capital (Note 17), and retained earnings.

Directors of the Company and its subsidiaries periodically review capital structure. As part of this review, the Directors consider the cost of capital and related risks.

The Company and its subsidiaries seeks to minimize the cost of capital, in order to maximize their value. Therefore, the Company and its subsidiaries policy to seek funding that will always take into account the financial risk that may arise in the future.

c. Tujuan dan kebijakan manajemen risiko keuangan

Tujuan dan kebijakan manajemen risiko keuangan Perusahaan dan entitas anak adalah untuk memastikan bahwa sumber daya keuangan yang memadai tersedia untuk operasi dan pengembangan bisnis, serta untuk mengelola risiko keuangan, antara lain risiko pasar (termasuk risiko mata uang asing dan risiko tingkat suku bunga), risiko kredit dan risiko likuiditas. Perusahaan dan entitas anak beroperasi dengan pedoman yang telah ditentukan oleh Dewan Direksi.

Dalam pengelolaan risiko, Perusahaan dan entitas anak membentuk Satuan Manajemen Risiko ("SMR") yang bertanggung jawab terhadap penyusunan kebijakan, kerangka kerja, pedoman penerapan manajemen risiko dan infrastruktur pengelolaan risiko, serta memastikan sosialisasi dan implementasi manajemen risiko tersebut di lingkungan Perusahaan dan entitas anak. Satuan ini juga bertugas untuk menyusun profil risiko yang bersifat strategis sebagai himbauan awal kepada manajemen Perusahaan dan entitas anak. SMR bertanggung jawab langsung kepada Direksi dengan pembinaan dibawah Direktur Keuangan.

Dalam kaitannya dengan risiko keuangan, manajemen menelaah dan mengeluarkan kebijakan untuk mengelola masing-masing risiko. Perusahaan dan entitas anak menerapkan kebijakan manajemen risiko yang bertujuan untuk meminimalkan pengaruh ketidakpastian risiko keuangan terhadap kinerja keuangan Perusahaan dan entitas anak. Berikut ini ringkasan kebijakan dan pengelolaan manajemen risiko tersebut:

i. Manajemen risiko mata uang asing

Perusahaan dan entitas anak melakukan sejumlah transaksi dalam mata uang asing. Akibatnya, timbul eksposur terhadap fluktuasi nilai tukar mata uang asing. Kebijakan Perusahaan dan entitas anak adalah untuk menjaga risiko mata uang asing dalam batas yang dapat diterima. Perusahaan dan entitas anak mencadangkan jumlah mata uang asing pada saat nilai tukar rupiah menguat dengan jumlah sesuai kebutuhan.

c. Financial risk management objectives and policies

The Company and its subsidiaries overall financial risk management and policies is to ensure that adequate financial resources are available for operation and development of their business, while managing their exposure to financial risk, which are market risk (including foreign currency risk and interest rate risk) credit risk, and liquidity risks. The Company and its subsidiaries operate within defined policy that are approved by the Board of Directors.

In managing risk, the Company and its subsidiaries established a Risk Management Unit ("RMU") which is responsible for the preparation of the policy, frameworks, risk management implementation guide and infrastructure of the risk management and ensuring the implementation of the risk management in the Company and its subsidiaries' environment. The unit is also tasked to formulate a strategic risk profile as an early warning to the Company and its subsidiaries management. RMU is responsible to the Director with guidance from Director of Finance.

Related to the financial risk, the management evaluate and established policies for managing each of these risks. The Company and its subsidiaries applies the financial risk management policies to minimize the impact of the unpredictability of financial risks on the Company and its subsidiaries financial performance. The summary of the financial risk management policies are as follows:

i. Foreign currency risk management

The Company and its subsidiaries undertake many transactions denominated in foreign currencies. Consequently, there are exposures to exchange rate fluctuations. The Company and its subsidiaries policy is to maintain foreign currency exposure within acceptable limits. The Company and its subsidiaries reserve the foreign currency amount at the time the rupiah strengthened with amount as needed.

Sensitivitas mata uang asing
Tabel di bawah ini memaparkan rincian sensitivitas Perusahaan dan entitas anak untuk setiap 10% kenaikan dan penurunan Rupiah terhadap mata uang asing yang relevan. 10% kenaikan dan penurunan menggambarkan penilaian manajemen terhadap perubahan yang rasional pada nilai tukar setelah mempertimbangkan kondisi ekonomi saat ini. Analisis sensitivitas ini hanya mencakup saldo item moneter setelah pajak dalam mata uang asing dan menyesuaikan translasi pada akhir tahun untuk 10% perubahan dalam nilai tukar mata uang asing.

Foreign currency sensitivity
The following table explains details of the Company and its subsidiaries sensitivity to a 10% increase and decrease in Rupiah against the relevant foreign currencies. 10% increase or decrease represents the management's assessment of the reasonably possible change in foreign currency exchange rates after considering the current economic conditions. The sensitivity analysis includes only after tax outstanding foreign denominated monetary items and adjusts their translation at the end of the year for a 10% change in foreign currency rates.

Dampak terhadap laba setelah pajak/ *Effect to profit after tax*
31 Desember/ *December 31,* 2016

	JPY		USD		EUR		CHF		
	10%	-10%	10%	-10%	10%	-10%	10%	-10%	
Aset Keuangan									***Financial Assets***
Kas dan setara kas	2	(2)	2.121	(2.121)	355	(355)	461	(461)	*Cash and cash equivalents*
Piutang pihak berelasi	--	--	28.515	(28.515)	--		--	--	*Receivable from related parties*
Sub jumlah aset keuangan	2	(2)	30.636	(30.636)	355	(355)	461	(461)	*Subtotal financial assets*
Liabilitas Keuangan									***Financial Liabilities***
Utang usaha	--	--	108.914	(108.914)	--	--	--	--	*Trade payables*
Sub jumlah liabilitas keuangan	--	--	108.914	(108.914)	--	--	--	--	*Subtotal financial liabilities*
Jumlah Laba (Rugi)	**2**	**(2)**	**(78.278)**	**78.278**	**355**	**(355)**	**461**	**(461)**	***Total Profit (Loss)***

Dampak terhadap laba setelah pajak/ *Effect to profit after tax*
31 Desember/ *December 31,* 2015

	JPY		USD		EUR		CHF		
	10%	-10%	10%	-10%	10%	-10%	10%	-10%	
Aset Keuangan									***Financial Assets***
Kas dan setara kas	--	--	1.420	(1.420)	284	(284)	651	(651)	*Cash and cash equivalents*
Piutang pihak berelasi	--	--	28.969	(28.969)	--	--	--	--	*Receivable from related parties*
Sub jumlah aset keuangan	--	--	30.389	(30.389)	284	(284)	651	(651)	*Subtotal financial assets*
Liabilitas Keuangan									***Financial Liabilities***
Utang usaha	--	--	91.394	(91.394)	--	--	--	--	*Trade payables*
Sub jumlah liabilitas keuangan	--	--	91.394	(91.394)	--	--	--	--	*Subtotal financial liabilities*
Jumlah Laba (Rugi)	**--**	**--**	**(61.005)**	**61.005**	**284**	**(284)**	**651**	**(651)**	***Total Profit (Loss)***

ii. Manajemen risiko tingkat suku bunga
Perusahaan dan entitas anak memiliki transaksi pada tingkat suku bunga tetap dan tingkat suku bunga mengambang. Transaksi dengan tingkat suku bunga mengambang terekspos terhadap risiko tingkat suku bunga. Perusahaan dan entitas anak mengelola risiko dengan menyeimbangkan porsi pinjaman dengan bunga tetap dan mengambang.

ii. Interest rate risk management
The Company and its subsidiaries have transactions at fixed and floating interest rates. Transaction at floating interest rate are exposed to interest rate risk. The Company and its subsidiaries manage the risk by maintaining an appropriate fixed and floating borrowing rate.

Sensitivitas tingkat suku bunga
Analisis sensitivitas berikut telah ditentukan berdasarkan eksposur Perusahaan dan entitas anak terhadap tingkat suku bunga untuk saldo instrumen keuangan terutang setelah pajak pada tanggal pelaporan. Analisis ini disusun dengan mengasumsikan jumlah saldo aset dan liabilitas terutang pada akhir periode pelaporan, terutang sepanjang tahun.

Analisis sensitivitas ini menggunakan asumsi kenaikan dan penurunan sebesar 50 basis poin pada tingkat suku bunga yang relevan dengan variable lainnya dianggap konstan. Kenaikan dan penurunan sebesar 50 basis poin merupakan penilaian manajemen atas kemungkinan perubahan yang rasional terhadap tingkat suku bunga setelah mempertimbangkan kondisi ekonomi saat ini.

Pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, jika tingkat suku bunga mengalami kenaikan 50 basis poin dengan semua variabel lainnya tetap, maka laba setelah pajak untuk tahun berjalan lebih tinggi masing-masing Rp4.380 dan Rp6.349. Sebaliknya jika tingkat suku bunga mengalami penurunan 50 basis poin, dengan semua variabel lainnya tetap, maka laba setelah pajak lebih rendah masing-masing Rp4.380 dan Rp6.349.

Interest rate sensitivity
The sensitivity analysis below have been determined based on the Company and its subsidiaries exposure to interest rates for financial instruments after tax outstanding at the reporting date. The analysis is prepared assuming the amount of assets and liabilities outstanding at the reporting period end date was outstanding for the whole year.

The sensitivity analysis uses an assumption of 50 basis point increase and decrease in the relevant interest rates with all other variables held constant. 50 basis points increase or decrease represents the management's assessment of the reasonably possible change in interest rates after considering the current economic conditions.

On December 31, 2016 and 2015, if interest rate increased by 50 basis point, with all other variables constant, the profit after tax for the current year increase by Rp4,380 and Rp6,349, respectively. Otherwise if the interest rate decreased by 50 basis point, with all other variables constant, the profit after tax decrease by Rp4,380 and Rp6,349, respectively.

iii. Manajemen risiko kredit
Risiko kredit timbul dari risiko kegagalan pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban kontraktual yang dapat mengakibatkan kerugian keuangan kepada Perusahaan dan entitas anak. Eksposur risiko kredit Perusahaan dan entitas anak timbul terutama atas piutang usaha dari pelanggan. Untuk aset keuangan lainnya seperti kas dan bank, Perusahaan dan entitas anak mengelola rekening pada beberapa Bank dengan reputasi baik dengan tujuan meminimalkan risiko kredit dan untuk menghindari konsentrasi kas yang signifikan dengan satu institusi. Perusahaan dan entitas anak menempatkan dana pada beberapa Bank yang kredibel (Catatan 10).

iii. Credit risk management
Credit risk arises from the risk that counterparty will default on its contractual obligations resulting in financial loss to the Company and its subsidiaries. The Company and its subsidiaries exposure to credit risk mainly arises from receivables from its customers. For other financial assets such as cash and cash in bank, in order to minimize the credit risk and to avoid significant concentration of cash with one institution, the Company and its subsidiaries place the funds in several credible banks (Note 10).

Nilai tercatat aset keuangan pada laporan keuangan setelah dikurangi dengan penyisihan untuk kerugian mencerminkan eksposur Perusahaan dan entitas anak terhadap risiko kredit.

The carrying amount of financial assets recorded in the consolidated financial statements, net of any allowance for losses represents the Company and its subsidiaries exposure to credit risk.

Tujuan Perusahaan dan entitas anak adalah untuk mencapai pertumbuhan pendapatan yang berkelanjutan dengan meminimalkan kerugian yang dapat terjadi karena meningkatnya eksposur risiko kredit.

The Company and its subsidiaries' objective is to seek continual revenue growth while minimizing losses incurred due to increase of credit risk exposure.

Perusahaan dan entitas anak tidak memiliki eksposur risiko kredit yang signifikan terhadap satu pelanggan atau kelompok pelanggan tertentu yang mempunyai karakteristik yang sama.

The Company and its subsidiaries do not have significant credit risk exposure to any single customer or group customers having similar characteristics.

Kualitas kredit aset keuangan

Tabel berikut ini menunjukkan kualitas aset keuangan Perusahaan dan entitas anak:

Credit quality of financial assets

The following table shows the quality of Company and its subsidiaries' financial assets:

	31 Desember/ *December 31,* 2016				
	Belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai/ *Neither past due nor impaired*	**Telah jatuh tempo tetapi tidak mengalami penurunan nilai/ *Past due but not impaired***	**Mengalami penurunan nilai/ *Impaired***	**Jumlah/ *Total***	
Kas dan setara kas	1.500.820	--	--	1.500.820	*Cash and cash equivalents*
Piutang usaha	4.749.998	16.916.643	--	21.666.641	*Trade receivables*
Piutang pihak berelasi	523.470	--	--	523.470	*Receivable from related parties*
Piutang lain-lain	46.141	--	--	46.141	*Other receivables*
Jumlah - neto	**6.820.429**	**16.916.643**	**--**	**23.737.072**	***Total – net***

	31 Desember/ *December 31,* 2015				
	Belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai/ *Neither past due nor impaired*	**Telah jatuh tempo tetapi tidak mengalami penurunan nilai/ *Past due but not impaired***	**Mengalami penurunan nilai/ *Impaired***	**Jumlah/ *Total***	
Kas dan setara kas	896.378	--	--	896.378	*Cash and cash equivalents*
Piutang usaha	2.573.043	21.920.649	--	24.493.692	*Trade receivables*
Piutang pihak berelasi	478.758	--	--	478.758	*Receivable from related parties*
Piutang lain-lain	43.722	--	--	43.722	*Other receivables*
Jumlah - neto	**3.991.901**	**21.920.649**	**--**	**25.912.550**	***Total – net***

Aset keuangan tertentu dinilai secara individu untuk penurunan nilai dan jika ditemukan terjadi penurunan nilai, rugi penurunan nilai harus diterapkan secara individu.

Certain financial assets are individually assessed for impairment and, if found to be impaired, have impairment loss assigned to them on an individual basis.

Tabel di atas termasuk aset keuangan yang mana penurunan nilainya dilakukan secara kolektif. Tidak praktis untuk mengidentifikasi penurunan nilai aset keuangan tersebut secara individual dalam portofolio aset keuangan dengan karakteristik risiko yang sama dimana penurunan nilainya dilakukan secara kolektif.

The table above includes financial assets on which collective impairment have been assessed. It is not practicable to individually identify impaired financial aset within the portfolio of financial assets with similar risk characteristics which are collectively assessed for impairment.

Kualitas kredit aset keuangan Perusahaan dan entitas anak dinilai dan dikelola berdasarkan peringkat internal. Kualitas kredit dimonitor dengan menggunakan Sistem Peringkat Perusahaan dan entitas anak. Sistem peringkat dinilai dan diperbarui secara berkala untuk menjaga akurasi dan konsistensi peringkat risiko. Kualitas kredit dan Sistem Peringkat Perusahaan Perusahaan dan entitas anak dinilai sebagai berikut:

The credit quality of Company and its subsidiaries' financial assets is assessed and managed using internal ratings. The credit quality is monitores using the Company and its subsidiaries Rating System. The rating system is assessed and updated regularly to maintain accurate and consistent risk rating. The internal rating of the Company and its subsidiaries' are as follow:

- Tingkat tinggi
  Aset keuangan tingkat tinggi meliputi kas dan setara kas kepada pihak ketiga atau bank yang memiliki kualitas kredit yang baik. Oleh sebab itu, risiko kredit adalah minimal. Untuk piutang usaha, pelanggan maupun pihak berelasi dapat diberi peringkat tingkat tinggi jika tidak memiliki kesulitan keuangan, tidak terjadi pelanggaran kontrak, tidak ada pemberian keringanan dan memiliki kelangsungan usaha.

- *High grade*
  High grade financial asset include cash and cash equivalents to counterparties with good credit rating or bank standing. Consequently, credit risk is minimal. For trade account receivables, a customer or a related party, is given a high grade rating if it does not has a financial difficulty, no breach of contract, no waivers and will be able to continue as a going concern.

- Tingkat rendah
  Aset keuangan peringkat rendah termasuk piutang usaha yang tidak diklasifikasikan sebagai tingkat tinggi. Untuk piutang usaha, pelanggan dapat diberi peringkat rendah jika pelanggan memiliki kesulitan keuangan, melakukan pelanggaran kontrak, menerima pemberian keringanan, dan tidak memiliki kelangsungan usaha.

- *Standard grade*
  Low grade financial assets include trade account receivables that are not classified as high grade. For trade account receivable, a customer given a low grade rating if it is deemed to have a financial difficullty, there is a breach of contract, waivers and will not be able to continue as going concern.

Per 31 Desember 2016, kualitas kredit semua aset keuangan Perusahaan dan anak perusahaan yang belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai berada dalam klasifikasi tingkat tinggi.

As of December 31, 2016, all the Company and its subsidiaries's credit quality of financial assets that are neither past due nor impaired are classified as high grade.

iv. Manajemen risiko likuiditas

Risiko likuiditas didefinisikan sebagai risiko bahwa Perusahaan dan entitas anak akan menghadapi kesulitan dalam memenuhi kewajiban terkait dengan liabilitas keuangan yang diselesaikan dengan pembayaran kas atau asset keuangan lainnya. Tanggung jawab utama manajemen risiko likuiditas terletak pada Dewan Direksi, yang telah membangun kerangka manajemen risiko likuiditas yang sesuai untuk persyaratan manajemen likuiditas dan pendanaan jangka pendek, menengah dan jangka panjang Perusahaan dan entitas anak. Perusahaan dan entitas anak mendapatkan fasilitas non-cash loan dari beberapa bank khususnya untuk pembukaan L/C dan Bank Garansi.

Selanjutnya Perusahaan dan entitas anak juga memelihara kecukupan dana untuk membiayai kebutuhan modal kerja berkelangsungan dengan cara mempertahankan kecukupan jumlah kas dan setara kas yang mudah dikonversi menjadi uang tunai ketika mengalami gangguan yang tak terduga dari penagihan kas.

Tabel berikut ini Perusahaan dan entitas anak memberikan rincian tanggal jatuh tempo kontraktual untuk liabilitas keuangan dengan pembayaran yang telah disepakati pada periode 31 Desember 2016 dan 2015. Tabel tersebut telah disusun berdasarkan arus kas liabilitas keuangan yang tidak didiskontokan berdasarkan tanggal paling awal dimana Perusahaan dan entitas anak diwajibkan untuk membayar. Untuk arus bunga dengan tingkat suku bunga mengambang, nilai arus kas yang tidak terdiskonto diperoleh dari kurva tingkat suku bunga pada akhir periode. Untuk liabilitas keuangan yang didenominasi dengan mata uang asing, jumlah yang tidak didiskontokan ditranslasi dengan kurva nilai tukar forward yang relevan pada akhir periode pelaporan. Tanggal jatuh tempo kontraktual berdasarkan pada tanggal paling awal dimana Perusahaan dan entitas anak diwajibkan untuk membayar.

iv. Liquidity risk management

Liquidity risk is defined as the risk that the Company and its subsidiaries will encounter difficulty in meeting its obligations associated with financial liabilities that are settled by delivering cash or another financial asset. Ultimate responsibility for liquidity risk management rests with the Board of Directors, which has built an appropriate liquidity risk management framework for the management of the Company and its subsidiaries short, medium and long-term funding and liquidity management requirements. The Company and its subsidiaries obtained non-cash loan facilities from several banks in particularly for opening L/C and Bank Guarantee.

In addition, the Company and its subsidiaries maintain an adequate amount of cash and cash equivalents which may be readily converted to cash in any unforeseen interruption of its cash collections.

The following table details the Company and its subsidiaries remaining contractual maturity for its financial liabilities with agreed repayment period as of December 31, 2016 and 2015. The table has been drawn up based on the undiscounted cash flow of financial liabilities based on the earliest date on which the Company and its subsidiaries can be required to pay. To the extend that interest flows are floating rate, the undiscounted is derived from interest rate curves at the end of the reporting period. For foreign currency denominated financial liabilities, the undiscounted amortization is translated using the relevant forwards exchange curve at the end of the reporting period. The contractual maturity is based on the earliest date on which the Company and its subsidiaries may be required to pay.

	31 Desember/ *December 31,* 2016					
	Dalam satu tahun/ *Within one year*	Lebih dari satu tahun tetapi tidak lebih dari tiga tahun/ *over one year but not longer that three years*	lebih dari tiga tahun tetapi tidak lebih dari lima tahun/ *over three years but not longer that five years*	Lebih dari lima tahun/ *Over five years*	Jumlah/ *Total*	
Liabilitas						***Liabilities***
Utang pihak berelasi	37,796	--	--	--	37,796	*Payable to related parties*
Utang usaha	3,336,147	--	--	--	3,336,147	*Trade payables*
Utang lain-lain	3,822	--	--	--	3,822	*Other payables*
	3,377,765	**--**	**--**	**--**	**3,377,765**	

	31 Desember/ *December 31,* 2015					
	Dalam satu tahun/ *Within one year*	Lebih dari satu tahun tetapi tidak lebih dari tiga tahun/ *over one year but not longer that three years*	lebih dari tiga tahun tetapi tidak lebih dari lima tahun/ *over three years but not longer that five years*	Lebih dari lima tahun/ *Over five years*	Jumlah/ *Total*	
Liabilitas						***Liabilities***
Utang pihak berelasi	65.074	2.717	--	--	67.791	*Payable to related parties*
Utang usaha	3.098.851	--	--	--	3.098.851	*Trade payables*
Utang lain-lain	8.435	--	--	--	8.435	*Other payables*
	3.172.360	**2.717**	**--**	**--**	**3.175.077**	

d. Nilai wajar instrumen keuangan

Manajemen berpendapat bahwa nilai tercatat aset dan liabilitas keuangan yang dicatat sebesar biaya perolehan diamortisasi dalam laporan keuangan konsolidasian mendekati nilai wajarnya karena jatuh tempo dalam jangka pendek atau memiliki tingkat suku bunga yang sesuai dengan tingkat suku bunga pasar.

d. Fair value of financial instruments

The management considers that the carrying amounts of financial assets and financial liabilities recorded at amortized cost in the consolidated financial statements approximate their fair values either because of their short-term maturities or they carry market interest rate.

35. Transaksi Non-Kas / *35. Non-Cash Transactions*

	2016 Rp	2015 Rp	
Aktivitas investasi dan pendanaan yang tidak mempengaruhi arus kas:			*Non-cash investing and financing activities:*
Piutang usaha diperhitungkan dengan utang usaha	7.274.664	8.317.679	*Offsetting accounts receivable with accounts payable*
Pembayaran pajak revaluasi aset tetap dengan piutang usaha	5.046.909	--	*Payment of tax revaluation on property, plant and equipment with trade receivables*
Pembayaran dividen dengan memperhitungkan piutang usaha pemegang saham	4.207.869	1.467.971	*Dividend payment by offsetting to trade receivables from a stockholder*
Perolehan aset tetap melalui :			*Addition to property, plant and equipment through:*
Pengampunan pajak	10.244	--	*Tax amnesty*
Reklasifikasi persediaan ke aset tetap	--	38.506	*Reclasification of inventory to property, plant and equipment*

36. Penyajian Kembali Laporan Keuangan / *36. Restatement of the Financial Statement*

Di tahun 2015, manajemen berpendapat bahwa perjanjian jual beli listrik bukan merupakan perjanjian, atau mengandung, sewa berdasarkan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan 8, "Penentuan Apakah Suatu Perjanjian Mengandung Suatu Sewa" ("ISAK 8"), dan karenanya Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 30, "Sewa" ("PSAK 30") dalam menentukan apakah perjanjian tersebut termasuk dalam sewa keuangan atau sewa operasi tidak diterapkan. Pada tahun 2016, opini manajemen berubah dan memutuskan untuk mengubah metode akuntansi untuk perjanjian jual beli listrik yang menyebabkan dilakukannya penyajian kembali informasi keuangan konsolidasian pada dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2015 sebagaimana dipersyaratkan oleh Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

In the year 2015, the management was of the opinion that power purchase agreements are not arrangements that are, or contain, leases based on Interpretations of Financial Accounting Standards 8, "Determining Whether an Arrangement Contains a Lease" ("ISFAS 8"), and hence Statement of Financial Accounting Standards 30, "Lease" ("SFAS 30") in determining whether such arrangements fall into finance lease or operating lease are not applied. In 2016, the management's opinion was changed and decided to change its method of accounting for power purchase agreements which caused the restatement of the consolidated financial statements as at December 31, 2015 and for the year then ended as required by Indonesian Financial Acccounting Standards.

Akun-akun laporan keuangan berikut ini disesuaikan untuk mencerminkan dampak dari penyajian kembali ISAK 8:

The following financial statement line items were adjusted to reflect implication of restatement of ISFAS 8:

	Jumlah sebelum penyesuaian/ *Balance before adjustment* 31 Desember/ *December 31,* 2015 Rp	Penyesuaian ISAK 8/ *Adjustment ISFAS 8* Rp	Jumlah setelah penyesuaian/ *Balance after adjustment* 31 Desember/ *December 31,* 2015 Rp	
Laporan laba rugi dan penghasilan lain komprehensif konsolidasian				***Consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income***
Penyusutan aset tetap	2.728.472	61.331	2.789.803	*Depreciation*
Pemeliharaan	2.405.605	35.522	2.441.127	*Maintenance*
Pembelian tenaga listrik dan sewa	244.555	(130.690)	113.865	*Purchase of electricity and lease*
Kerugian kurs mata uang asing - bersih	(5.358)	10.867	5.509	*Loss of foreign exchange rate - net*
Beban bunga	(238)	(54.047)	(54.285)	*Interest expense*
Laba sebelum pajak	2.098.886	(9.343)	2.089.543	*Profit before tax*
Manfaat (beban) pajak	2.580.643	2.336	2.582.979	*Tax benefit (expense)*
Laba tahun berjalan	4.679.529	(7.007)	4.672.522	*Income for the year*

37. Tanggung Jawab Manajemen dan Persetujuan atas Laporan Keuangan Konsolidasian

Penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian merupakan tanggung jawab manajemen, dan telah disetujui oleh Direksi untuk diterbitkan pada tanggal 24 Maret 2017.

37. Managements Responsibility and Approval of Consolidated Financial Statements

The preparation and fair presentation of the consolidated financial statements were responsibilities of the management, and were approved by the Directors and authorized for issue on March 24, 2017.

REFERENSI KRITERIA ANNUAL REPORT AWARD 2016

2016 CRITERIA REFERENCES FOR ANNUAL REPORT AWARD

	KRITERIA Criteria	PENJELASAN Description	Halaman Page
I. Umum/ General			
1.	Laporan tahunan disajikan dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar dan dianjurkan menyajikan juga dalam bahasa Inggris. The annual report is presented in proper and correct Bahasa Indonesia and is recommended to be presented in English as well.		√
2.	Laporan tahunan dicetak dengan kualitas yang baik dan menggunakan jenis dan ukuran huruf yang mudah dibaca. The annual report is printed in fine quality, with easy-to-read font types and sizes.		√
3.	Laporan tahunan mencantumkan identitas perusahaan dengan jelas. The annual report presents clear identity of the company.	Nama perusahaan dan tahun annual report ditampilkan di: 1. Sampul muka; 2. Samping; 3. Sampul belakang; dan 4. Setiap halaman. Company's name and the year of Annual Report are shown in: 1. Front cover; 2. Side margin; 3. Back cover; and 4. Every page.	√
4.	Laporan tahunan ditampilkan di website perusahaan. The annual report is available on the company's website.	Mencakup laporan tahunan terkini dan paling kurang 4 tahun terakhir. Includes the current annual report and at the very least the last 4 years.	√
II. Ikhtisar Data Keuangan Penting/ Financial Highlights			
1.	Informasi hasil usaha perusahaan dalam bentuk perbandingan selama 3 (tiga) tahun buku atau sejak memulai usahanya jika perusahaan tersebut menjalankan kegiatan usahanya selama kurang dari 3 (tiga) tahun.	Informasi memuat antara lain: 1. Penjualan/pendapatan usaha; 2. Laba (rugi): a. Diatribusikan kepada pemilik entitas induk; dan b. Diatribusikan kepada kepentingan nonpengendali; 3. Penghasilan komprehensif periode berjalan: a. Diatribusikan kepada pemilik entitas induk; dan b. Diatribusikan kepada kepentingan nonpengendali; dan 4. Laba (rugi) per saham. **Catatan:** Apabila perusahaan tidak memiliki entitas anak, perusahaan menyajikan laba (rugi) dan penghasilan komprehensif periode berjalan secara total.	18-31

	KRITERIA Criteria	PENJELASAN Description	Halaman Page
	Information on the Company's operational results with comparisons of 3 (three) fiscal years or since the establishment of the company if the business activities have run for less than 3 (three) years.	The information encloses, among others: 1. Sales/revenues; 2. Profit (loss): a. Attributable to the owner of the parent entity; and b. Attributable to the non-controlling interest; 3. Comprehensive income for the period: a. Attributable to the owner of the parent entity; and b. Attributable to the non-controlling interest; and 4. Profit (loss) per share. Remark: If the company does not have any subsidiary, the company presents profit (loss) and comprehensive income for the period in total.	
2.	Informasi posisi keuangan perusahaan dalam bentuk perbandingan selama 3 (tiga) tahun buku atau sejak memulai usahanya jika perusahaan tersebut menjalankan kegiatan usahanya selama kurang dari 3 (tiga) tahun. IInformation on the Company's financial position with comparisons of 3 (three) fiscal years or since the establishment of the company if the business activities have run for less than 3 (three) years.	Informasi memuat antara lain: 1. Jumlah investasi pada entitas asosiasi; 2. Jumlah aset; 3. Jumlah liabilitas; dan 4.Jumlah ekuitas. The information encloses, among others: 1. Total investments in associates entities; 2. Total assets; 3. Total liabilities; and 4. Total equity.	18-31
3.	Rasio keuangan dalam bentuk perbandingan selama 3 (tiga) tahun buku atau sejak memulai usahanya jika perusahaan tersebut menjalankan kegiatan usahanya selama kurang dari 3 (tiga) tahun. Financial ratios in the form of comparisons throughout 3 (three) fiscal years or since the establishment of the company if the business activities have run for less than 3 (three) years.	Informasi memuat 5 (lima) rasio keuangan yang umum dan relevan dengan industri perusahaan. The information encloses 5 (five) financial ratios that are common and relevant to company's industry.	18-31

	KRITERIA Criteria	PENJELASAN Description	Halaman Page
4.	Informasi harga saham dalam bentuk tabel dan grafik. Information on stock price in tables and charts.	1. Jumlah saham yang beredar; 2. Informasi dalam bentuk tabel yang memuat: a.Kapitalisasi pasar berdasarkan harga pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan; b.Harga saham tertinggi, terendah, dan penutupan berdasarkan harga pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan; dan c.Volume perdagangan saham pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan. 3. Informasi dalam bentuk grafik yang memuat paling kurang: a.Harga penutupan berdasarkan harga pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan; dan b.Volume perdagangan saham pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan. untuk setiap masa triwulan dalam 2 (dua) tahun buku terakhir. **Catatan:** apabila perusahaan tidak memiliki kapitalisasi pasar, informasi harga saham, dan volume perdagangan saham, agar diungkapkan. 1. Number of outstanding shares; 2. The information in tables covers: a. Market capitalization based on the Stock Exchange price where the shares were listed; b. The highest, lowest, and closing price of shares based on the Stock Exchange where the shares were listed; and c. Share trading volume on the Stock Exchange where the shares were listed. 3. Information in charts contains at least: a. The closing price of shares based on the Stock Exchange where the shares were listed; and b. Share trading volume on the Stock Exchange where the shares were listed. For every quarter in the last 2 (two) fiscal years. Remark: if the company does not have market capitalization, information on shares price, and share trading volume, explanation shall be given.	20
5.	Informasi mengenai obligasi, sukuk atau obligasi konversi yang masih beredar dalam 2 (dua) tahun buku terakhir. Information on outstanding bonds, sukuk, or convertible bonds of the last 2 (two) fiscal years.	Informasi memuat: 1. Jumlah obligasi/sukuk/obligasi konversi yang beredar (outstanding); 2. Tingkat bunga/imbalan; 3. Tanggal jatuh tempo; dan 4. Peringkat obligasi/sukuk tahun 2015 dan 2016. **Catatan**: apabila perusahaan tidak memiliki obligasi/sukuk/ obligasi konversi, agar diungkapkan. The information covers: 1.Number of outstanding bonds/sukuk/convertible bonds; 2.Interest rate/yield; 3.Maturity date; and 4.Bonds/sukuk rating in 2015 and 2016. Remark: if the company does not have bonds/sukuk/convertible bonds, explanation shall be given.	21

KRITERIA Criteria		PENJELASAN Description	Halaman Page
III. Laporan Dewan Komisaris dan Direksi/ Reports of the Board of Commissioners and Board of Directors			
1.	Laporan Dewan Komisaris Report of the Board Of Commissioners	Memuat hal-hal sebagai berikut: 1. Penilaian atas kinerja Direksi mengenai pengelolaan perusahaan dan dasar penilaiannya; 2. Pandangan atas prospek usaha perusahaan yang disusun oleh Direksi dan dasar pertimbangannya; 3. Pandangan atas penerapan/pengelolaan whistleblowing system (WBS) di perusahaan dan peran Dewan Komisaris dalam WBS tersebut; dan 4. Perubahan komposisi Dewan Komisaris (jika ada) dan alasan perubahannya. Contains the following: 1. Assessment on the Board of Directors' performance on company's management and the basis for the assessment; 2. Perspective on company's business prospects set by Board of Directors and its basic consideration; 3. Assessment on the whistleblowing system (WBS) implementation/management in the company, and the Board of Commissioners' role in the WBS; and 4. Changes in Board of Commissioners' composition and the reason behind the change (if any).	46-53
2.	Laporan Direksi Report of the Board of Directors	Memuat hal-hal sebagai berikut: 1. Analisis atas kinerja perusahaan, yang mencakup antara lain: a. Kebijakan strategis; b. Perbandingan antara hasil yang dicapai dengan yang ditargetkan; dan c. Kendala-kendala yang dihadapi perusahaan dan langkah-langkah penyelesaiannya; 2. Analisis tentang prospek usaha; 3. Perkembangan penerapan tata kelola perusahaan pada tahun buku; dan 4. Perubahan komposisi anggota Direksi (jika ada) dan alasan perubahannya. Contains the following: 1. Analysis on company's performance, which among others covers: a. Strategic policies; b. Comparisons between realizations and targets; and c. Challenges faced by the company, and the steps for solving them; 2. Analysis on business prospects; 3. Development of good corporate governance implementation on the fiscal year; and 4. Changes in Board of Directors' composition and the reason behind the change (if any).	60-71

KRITERIA Criteria		PENJELASAN Description	Halaman Page
3.	Tanda tangan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Signatures of members of Board Of Commissioners and Board of Directors	Memuat hal-hal sebagai berikut: 1. Tanda tangan dituangkan pada lembaran tersendiri; 2. Pernyataan bahwa Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan; 3. Ditandatangani seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dengan menyebutkan nama dan jabatannya; dan 4. Penjelasan tertulis dalam surat tersendiri dari yang bersangkutan dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi yang tidak menandatangani Laporan Tahunan, atau penjelasan tertulis dalam surat tersendiri dari anggota yang lain dalam hal tidak terdapat penjelasan tertulis dari yang bersangkutan. Contains the following: 1. Signatures are given on separate sheets; 2. Statement on full accountability by the Board of Commissioners and Board of Directors on the truthfulness of the Annual Report's contents; 3. Signed by all members of Board of Commissioners and Board of Directors by stating names and positions; and 4. Written explanation in separate letter from the person(s) concerned in the event that a member of Board of Commissioners or Board of Directors fail to sign the annual report; or written explanation in separate letter from the other member(s) in the event that the person(s) concerned fails to provide a written explanation.	80-81
IV. Profil Perusahaan/ Corporate Profile			
1.	Nama dan alamat lengkap perusahaan Name and complete address of the company	Informasi memuat antara lain: nama dan alamat, kode pos, no. Telp, no. Fax, email, dan website. The information contains among others: name and address, postal code, phone number(s), facsimile, e-mail, and website address.	84-85
2.	Riwayat singkat perusahaan Company's brief history	Mencakup antara lain: tanggal/tahun pendirian, nama, perubahan nama perusahaan (jika ada), dan tanggal efektif perubahan nama perusahaan. **Catatan**: apabila perusahaan tidak pernah melakukan perubahan nama, agar diungkapkan Consists of: date/year of establishment, name, changes in company's name and the effective date of changes on the company's name (if any). Remark: explanation shall be given in the event that the entity has never conducted name changes	88-89
3.	Bidang usaha Field of business	Uraian mengenai antara lain: 1. Kegiatan usaha perusahaan menurut Anggaran Dasar terakhir; 2. Kegiatan usaha yang dijalankan; dan 3. Produk dan/atau jasa yang dihasilkan. Description of, among others: 1. Company's business activities in accordance with the updated Articles Of Association; 2. Business activities conducted; and 3. The outcome of products and/or services.	103-109

KRITERIA Criteria		PENJELASAN Description	Halaman Page
4.	Struktur Organisasi Organizational Structure	Dalam bentuk bagan, meliputi nama dan jabatan paling kurang sampai dengan struktur satu tingkat di bawah Direksi. In the form of chart, consists of names and positions, at least until the position reporting directly to the Board of Directors.	112-113
5.	Visi, Misi, dan Budaya Perusahaan Vision, Mission, and Corporate Culture	Mencakup: 1. Visi perusahaan; 2. Misi perusahaan; 3. Keterangan bahwa visi dan misi tersebut telah direviu dan disetujui oleh 4. Direksi/Dewan Komisaris pada tahun buku; dan 5. Pernyataan mengenai budaya perusahaan (*corporate culture*) yang dimiliki perusahaan. Includes: 1. Corporate vision; 2. Corporate mission; 3. Explanation that the vision and mission have been reviewed and agreed upon by 4. Board of Directors/Board of Commissioners on fiscal year; and 5. Statement on the Company's corporate culture.	92-97
6.	Identitas dan riwayat hidup singkat anggota Dewan Komisaris Identity and brief CV of members of Board of Commissioners	Informasi memuat antara lain: 1. Nama; 2. Jabatan dan periode jabatan (termasuk jabatan pada perusahaan atau lembaga lain); 3. Umur; 4. Domisili; 5. Pendidikan (Bidang Studi dan Lembaga Pendidikan); 6. Pengalaman kerja (Jabatan, Instansi, dan Periode Menjabat); dan 7. Riwayat penunjukkan (periode dan jabatan) sebagai anggota Dewan Komisaris di Perusahaan sejak pertama kali ditunjuk. The information encloses, among others: 1. Name; 2. Position and tenure (including position in the company or other institutions); 3. Age; 4. Domicile; 5. Educations (Field of Study and Educational Institution); 6. Work experience (Position, Institution, and Tenure Period); and 7. Appointment history (period and tenure) as the member of Board Of Commissioners in the Company since first appointed.	54-58

KRITERIA Criteria		PENJELASAN Description	Halaman Page
7.	Identitas dan riwayat hidup singkat anggota Direksi Identity and brief CV of members of Board of Directors	Informasi memuat antara lain: 1. Nama; 2. Jabatan dan periode jabatan (termasuk jabatan pada perusahaan atau lembaga lain); 3. Umur; 4. Domisili; 5. Pendidikan (Bidang Studi dan Lembaga Pendidikan); 6. Pengalaman kerja (Jabatan, Instansi, dan Periode Menjabat); dan 7. Riwayat penunjukkan (periode dan jabatan) sebagai anggota Direksi di Perusahaan sejak pertama kali ditunjuk. The information encloses, among others: 1. Name; 2. Position and tenure (including position in the company or other institutions); 3. Age; 4. Domicile; 5. Educations (Field of Study and Educational Institution); 6. Work experience (Position, Institution, and Tenure); and 7. Appointment history (period and tenure) as the member of Board Of Directors in the Company since first appointed.	72-79
8.	Jumlah karyawan (komparatif 2 tahun) dan data pengembangan kompetensi karyawan yang mencerminkan adanya kesempatan untuk masing-masing level organisasi. Total number of employees (2 years' comparison) and description of competency development which reflects the opportunity for each level of organization.	Informasi memuat antara lain: 1. Jumlah karyawan untuk masing-masing level organisasi; 2. Jumlah karyawan untuk masing-masing tingkat pendidikan; 3. Jumlah karyawan berdasarkan status kepegawaian; 4. Data pengembangan kompetensi karyawan yang telah dilakukan pada tahun buku yang terdiri dari pihak (level jabatan) yang mengikuti pelatihan, jenis pelatihan, dan tujuan pelatihan; dan 5. Biaya pengembangan kompetensi karyawan yang telah dikeluarkan pada tahun buku. The information encloses, among others: 1. Number of employees on each organizational level; 2. Number of employees on each educational level; 3. Number of employees by employment status; 4. Data of employee competence development conducted on fiscal year, which includes the employee (position) attended training, type of training, and the purposes of training; and 5. Incurred costs for employee competency development on fiscal year.	116-128

KRITERIA Criteria		PENJELASAN Description	Halaman Page
9.	Komposisi Pemegang Saham. Shareholders Composition.	Mencakup antara lain: 1. Rincian nama pemegang saham yang meliputi 20 pemegang saham terbesar dan persentase kepemilikannya; 2. Rincian pemegang saham dan persentase kepemilikannya meliputi: a. Nama Pemegang Saham yang memiliki 5% atau lebih saham; dan b. Kelompok pemegang saham masyarakat dengan kepemilikan saham masing-masing kurang dari 5%. 3. Nama Direktur dan Komisaris serta persentase kepemilikan sahamnya secara langsung dan tidak langsung. **Catatan**: apabila Direktur dan Komisaris tidak memiliki saham langsung dan tidak langsung, agar diungkapkan. Consists of: 1. Detailed name of shareholders comprises of 20 largest shareholders and their shareholding percentage; 2. Details of shareholders and their shareholding percentage include: a. Name of shareholders with 5% or more percent of shares; and b. Community shareholding groups with their respective shareholding of less than 5%. 3. Name of Director and Commissioner as well as their shareholding percentage, directly or indirectly. Remark: if Director and Commissioner do not have direct and indirect share, explanation shall be given.	110
10.	Daftar entitas anak dan/atau entitas asosiasi. List of subsidiaries and/or associates.	Dalam bentuk tabel memuat informasi antara lain: 1. Nama entitas anak dan/atau asosiasi; 2. Persentase kepemilikan saham; 3. Keterangan tentang bidang usaha entitas anak dan/atau entitas asosiasi; dan 4. Keterangan status operasi entitas anak dan/atau entitas asosiasi (telah beroperasi atau belum beroperasi). In the form of table, covers information: 1. Name of subsidiaries and/or associates; 2. Shareholding percentage; 3. Explanation on the subsidiaries and/or associates' field of business; and 4. Explanation on the operational status of the subsidiaries and/or associates (in operation or has not yet operate).	131-148
11.	Struktur grup perusahaan. Company's group structure.	Struktur grup perusahaan dalam bentuk bagan yang menggambarkan entitasminduk, entitas anak, entitas asosiasi, joint venture, dan special purpose vehicle (SPV). Company's group structure in the form of chart, describing the parent entity, subsidiaries, associates, joint ventures, and special purpose vehicles (SPVs).	129-130

	KRITERIA Criteria	PENJELASAN Description	Halaman Page
12.	Kronologi penerbitan saham (termasuk private placement) dan/atau pencatatan saham dari awal penerbitan sampai dengan akhir tahun buku. Chronologies of shares issuance (including private placement) and/or listing of shares from the issuance date until the end of fiscal year.	Mencakup antara lain: 1. Tahun penerbitan saham, jumlah saham, nilai nominal saham, dan harga penawaran saham untuk masing-masing tindakan korporasi (*corporate action*); 2. Jumlah saham tercatat setelah masing-masing tindakan korporasi (*corporate action*); dan 3. Nama bursa dimana saham perusahaan dicatatkan. **Catatan**: apabila perusahaan tidak memiliki kronologi pencatatan saham, agar diungkapkan. Consists of: 1. Year of share issuance, number of shares, shares' nominal value, and shares price for each corporate action; 2. Shares number listed after each corporate action; and 3. Name of stock exchange where the shares are listed. Remark: if the company does not have share listing chronologies, explanation shall be given.	87
13.	Kronologi penerbitan dan/atau pencatatan efek lainnya dari awal penerbitan sampai dengan akhir tahun buku. Chronologies of issuance and/or listing of other securities from the issuance date until the end of fiscal year.	Mencakup antara lain: 1. Nama efek lainnya, tahun penerbitan efek lainnya, tingkat bunga/imbalan efek lainnya, dan tanggal jatuh tempo efek lainnya; 2. Nilai penawaran efek lainnya; 3. Nama bursa dimana efek lainnya dicatatkan; dan 4. Peringkat efek. **Catatan**: apabila perusahaan tidak memiliki kronologi penerbitan dan pencatatan efek lainnya, agar diungkapkan. Consists of: 1. Name of other securities, year of other securities issuance, interest rate/exchange for other securities, and other securities maturity date; 2. Offer value of other securities; 3. Name of stock exchange where the other securities are listed; and 4. Other securities rating. Remark: if the company does not have other securities issuance and listing chronologies, explanation shall be given.	87
14.	Nama dan alamat lembaga dan/atau profesi penunjang. Names and addresses of supporting insitutions and/or professions.	Informasi memuat antara lain: 1. Nama dan alamat BAE/pihak yang mengadministrasikan saham perusahaan; 2. Nama dan alamat Kantor Akuntan Publik; dan 3. Nama dan alamat perusahaan pemeringkat efek. The information encloses, among others: 1. Name and address of Securities Administration Bureau (BAE)/ parties administrating company's securities; 2. Name and address of Public Accounting Firm; and 3. Name and address of rating agency.	149

KRITERIA Criteria		PENJELASAN Description	Halaman Page
15.	Penghargaan yang diterima dalam tahun buku terakhir dan/atau sertifikasi yang masih berlaku dalam tahun buku terakhir baik yang berskala nasional maupun internasional. Awards received in the current fiscal year and/or certification that is still valid in the current fiscal year, both national and international scale.	Informasi memuat antara lain: 1. Nama penghargaan dan/atau sertifikasi; 2. Tahun perolehan penghargaan dan/atau sertifikasi; 3. Badan pemberi penghargaan dan/atau sertifikasi; dan 4. Masa berlaku (untuk sertifikasi). The information encloses, among others: 1. Name of the award and/or certification; 2. Year of the achievement of awards and/or certification; 3. The agency appreciator and/or certificates; and 4. Validity period (for certification).	35-43
16.	Nama dan alamat entitas anak dan/atau kantor cabang atau kantor perwakilan (jika ada). Name and address for subsidiaries and/or branch offices or representative office (if any).	Memuat informasi antara lain: 1. Nama dan alamat entitas anak; dan 2. Nama dan alamat kantor cabang/perwakilan. **Catatan:** apabila perusahaan tidak memiliki entitas anak, kantor cabang, dan kantor perwakilan, agar diungkapkan. The information encloses, among others: 1. Names and addresses of subsidiaries; and 2. Names and addresses of branch/representative offices. Remark: explanation shall be given in the event that the company does not have any subsidiaries/branches/representatives.	152-153
17.	Informasi pada Website Perusahaan. Information on Company's Website.	Meliputi paling kurang: 1. Informasi Pemegang Saham sampai dengan pemilik akhir individu; 2. Isi Kode Etik; 3. Informasi Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) paling kurang meliputi bahan mata acara yang dibahas dalam RUPS, ringkasan risalah RUPS, dan informasi tanggal penting yaitu tanggal pengumuman RUPS, tanggal pemanggilan RUPS, tanggal RUPS, tanggal ringkasan risalah RUPS diumumkan; 4. Laporan keuangan tahunan terpisah (5 tahun terakhir); 5. Profil Dewan Komisaris dan Direksi; dan 6. Piagam/Charter Dewan Komisaris, Direksi, Komite-komite, dan Unit Audit Internal. Covers at least: 1. Information on Shareholders to last individual owner; 2. Code of Conducts; 3. Information on General Meeting of Shareholders (GMS) at least covers the agenda discussed in the GMS, Minutes of GMS, and important dates, i.e. announcement of GMS date, summoning date for GMS, date of GMS, date of announcement for Minutes of GMS; 4. Separate annual financial statements (the last 5 years); 5. Board Of Commissioners and Board of Directors' Profile; and 6. Charters of Board of Commissioners, Board of Directors, Committees, and Internal Audit Unit.	86

KRITERIA Criteria		PENJELASAN Description	Halaman Page
18.	Pendidikan dan/atau pelatihan Dewan Komisaris, Direksi, Komite-komite, Sekretaris Perusahaan, dan Unit Audit Internal. Education and/or training for Board of Commissioners, Board of Directors, Committees, Corporate Secretary, and Internal Audit Unit.	Meliputi paling kurang informasi (jenis dan pihak yang relevan dalam mengikuti): 1. Pendidikan dan/atau pelatihan untuk Dewan Komisaris; 2. Pendidikan dan/atau pelatihan untuk Direksi; 3. Pendidikan dan/atau pelatihan untuk Komite Audit; 4. Pendidikan dan/atau pelatihan untuk Komite Nominasi dan Remunerasi; 5. Pendidikan dan/atau pelatihan untuk Komite Lainnya; 6. Pendidikan dan/atau pelatihan untuk Sekretaris Perusahaan; dan 7. Pendidikan dan/atau pelatihan untuk Unit Audit Internal, yang diikuti pada tahun buku. **Catatan:** apabila tidak terdapat pendidikan dan/atau pelatihan pada tahun buku, agar diungkapkan Covers at least information (type and party relevant in attending): 1. Education and/or training for Board of Commissioners; 2. Education and/or training for Board of Directors; 3. Education and/or training for Audit Committee; 4. Education and/or training for Nomination and Remuneration Committee; 5. Education and/or training for other Committee; 6. Education and/or training for Corporate Secretary; and 7. Education and/or training for Internal Audit Unit, attended on the fiscal year. Remark: if there is no education and/or training on fiscal year, explanation shall be given.	433-434 491-492 445 458-459 519 525-526
V. Analisa dan Pembahasan Manajemen atas Kinerja Perusahaan/ Management Discussion and Analysis on Company's Performance			
1.	Tinjauan operasi per segmen usaha. Operational review per business segment.	Memuat uraian mengenai: 1. Penjelasan masing-masing segmen usaha. 2. Kinerja per segmen usaha, antara lain: a. Produksi; b. Peningkatan/penurunan kapasitas produksi; c. Penjualan/pendapatan usaha; dan d. Profitabilitas. Contains descriptions of: 1. Explanation of each business segment. 2. Performance of each business segment, among others: a. Productions; b. Increase/decrease in productions capacity; c. Sales/revenues; and d. Profitability.	176-208

KRITERIA Criteria		PENJELASAN Description	Halaman Page
2.	Uraian atas kinerja keuangan perusahaan. Description of company's financial performance.	Analisis kinerja keuangan yang mencakup perbandingan antara kinerja keuangan tahun yang bersangkutan dengan tahun sebelumnya dan penyebab kenaikan/penurunan suatu akun (dalam bentuk narasi dan tabel), antara lain mengenai: 1. Aset lancar, aset tidak lancar, dan total aset; 2. Liabilitas jangka pendek, liabilitas jangka panjang dan total liabilitas; 3. Ekuitas; 4. Penjualan/pendapatan usaha, beban, laba (rugi), penghasilan komprehensif lain, dan penghasilan komprehensif periode berjalan; dan 5. Arus kas. Analysis on financial performance containing comparisons between current financial performance and previous year's financial performance and causes for the increase/decrease (in narration and tables), among others concerning: 1. Current assets, non-current assets, and total assets; 2. Short-term liabilities, long-term liabilities, and total liabilities; 3. Equity; 4. Sales/revenues, expenses, profit (loss), other comprehensive incomes, and total comprehensive profit of the current period; and 5. Cash flow.	219-245
3.	Bahasan dan analisis tentang kemampuan membayar utang dan tingkat kolektibilitas piutang perusahaan, dengan menyajikan perhitungan rasio yang relevan sesuai dengan jenis industri perusahaan. Discussion and analysis on company's solvency and liquidity by presenting ratios that are relevant to company's industry.	Penjelasan tentang : 1.Kemampuan membayar hutang, baik jangka pendek maupun jangka panjang; dan 2.Tingkat kolektibilitas piutang. Explanation on: 1. Solvency for short-term and long-term debts; and 2. Collectability Level of Receivables.	246-255
4.	Bahasan tentang struktur modal (*capital structure*) dan kebijakan manajemen atas struktur modal (*capital structure policy*). Discussion on capital structure and capital structure policy.	Penjelasan atas: 1. Rincian struktur modal (*capital structure*) yang terdiri dari utang berbasis bunga/sukuk dan ekuitas; dan 2. Kebijakan manajemen atas struktur modal (*capital structure policies*); dan 3. Dasar pemilihan kebijakan manajemen atas struktur modal. Explanation on: 1. Capital structure, consists of interest/sukuk-based debt and equity; and 2. Management policy on capital structure policies; and 3. The management basis for the capital structure policy chosen.	256-258

KRITERIA Criteria		PENJELASAN Description	Halaman Page
5.	Bahasan mengenai ikatan yang material untuk investasi barang modal (bukan ikatan pendanaan) pada tahun buku terakhir. Discussion on material commitments for capital investments (not funding investment) in the current fiscal year.	Penjelasan tentang: 1. Nama pihak yang melakukan ikatan; 2. Tujuan dari ikatan tersebut; 3. Sumber dana yang diharapkan untuk memenuhi ikatan-ikatan tersebut; 4. Mata uang yang menjadi denominasi; dan 5. Langkah-langkah yang direncanakan perusahaan untuk melindungi risiko dari posisi mata uang asing yang terkait. **Catatan**: apabila perusahaan tidak mempunyai ikatan terkait investasi barang modal pada tahun buku terakhir agar diungkapkan. Explanation on: 1. Name of the party involved in the commitments; 2. The purpose of the commitments; 3. Sources of funds expected to meet these commitments; 4. Currency used; and 5. Planned measures to protect the company from risks arising from relevant currency. Remark: explanation shall be given in the event that the company does not have any commitments relating to capital investments in the current fiscal year.	278-288
6.	Bahasan mengenai investasi barang modal yang direalisasikan pada tahun buku terakhir. Discussion on capital expenditures realized in the current fiscal year.	Penjelasan tentang: 1.Jenis investasi barang modal; 2.Tujuan investasi barang modal; dan 3. Nilai investasi barang modal yang dikeluarkan pada tahun buku terakhir. **Catatan**: apabila tidak terdapat realisasi investasi barang modal, agar diungkapkan. Explanation on: 1. Type of capital expenditure; 2. Purposes of the capital expenditures; and 3. Investment value of capital expenditures spent in the current fiscal year. Remark: explanation shall be given in the event that there were no capital expenditures realizations.	289-294
7.	Informasi perbandingan antara target pada awal tahun buku dengan hasil yang dicapai (realisasi), dan target atau proyeksi yang ingin dicapai untuk satu tahun mendatang mengenai pendapatan, laba, dan lainnya yang dianggap penting bagi perusahaan. Information on comparisons between the fiscal year's targets and realizations, and expected targets or projection for the coming year relating to revenue, profit, capital structure, and other matters considered important to the company.	Informasi memuat antara lain: 1. Perbandingan antara target pada awal tahun buku dengan hasil yang dicapai (realisasi); dan 2. Target atau proyeksi yang ingin dicapai dalam 1 (satu) tahun mendatang. The information contains, among others: 1. Comparisons between the fiscal year's targets and realizations; and 2. Expected targets or projection for the coming year.	259-268

KRITERIA Criteria	PENJELASAN Description	Halaman Page
8. Informasi dan fakta material yang terjadi setelah tanggal laporan akuntan. Material fact and information after the accounting reporting date.	Uraian kejadian penting setelah tanggal laporan akuntan termasuk dampaknya terhadap kinerja dan risiko usaha di masa mendatang. Catatan: apabila tidak ada kejadian penting setelah tanggal laporan akuntan, agar diungkapkan. Description of significant events after accountant's reporting date including their effects on business performance and risks in the future. Remark: explanation shall be given in the event that there were no significant events after accountant's reporting date.	310
9. Uraian tentang prospek usaha perusahaan. Description on company's business prospect.	Uraian mengenai prospek perusahaan dikaitkan dengan industri dan ekonomi secara umum disertai data pendukung kuantitatif dari sumber data yang layak dipercaya. Description on company's business prospects, related to industry and economy in general accompanied by quantitative supporting data from trustworthy source.	317-327
10. Uraian tentang aspek pemasaran. Description on marketing aspects.	Uraian tentang aspek pemasaran atas produk dan/atau jasa perusahaan, antara lain strategi pemasaran dan pangsa pasar. Description on marketing aspect on company products and/or services, among others marketing strategies and market share.	330-334
11. Uraian mengenai kebijakan dividen dan jumlah dividen kas per sahamdan jumlah dividen per tahun yang diumumkan atau dibayar selama 2 (dua) tahun buku terakhir. Description on dividend policy and amount of cash dividends per share and amount of dividends per year announced or paid for the last 2 (two) fiscal years.	Memuat uraian mengenai: 1. Kebijakan pembagian dividen; 2. Total dividen yang dibagikan; 3. Jumlah dividen kas per saham; 4. *Payout ratio*; dan 5. Tanggal pengumuman dan pembayaran dividen kas. untuk masing-masing tahun. **Catatan**: apabila tidak ada pembagian dividen, agar diungkapkan alasannya. Contains descriptions of: 1. Policy on distribution of dividends; 2. Total dividends distributed; 3. Amount of cash dividends per share; 4. Payout ratio; and 5. Date of announcement and payment of cash dividends for each year. Remark: explanation shall be given in the event that any distribution of dividends is nonexistent.	275-277

KRITERIA Criteria		PENJELASAN Description	Halaman Page
12.	Program kepemilikan saham oleh karyawan dan/atau manajemen yang dilaksanakan perusahaan (ESOP/MSOP) yang masih ada sampai tahun buku. Employee and/or Management Stock Ownership Plan (ESOP/MSOP) carried out by the company until the fiscal year.	Memuat uraian mengenai: 1. Jumlah saham ESOP/MSOP dan realisasinya; 2. Jangka waktu; 3. Persyaratan karyawan dan/atau manajemen yang berhak; dan 4. Harga *exercise*. **Catatan:** apabila tidak memiliki program dimaksud, agar diungkapkan. Contains descriptions of: 1. Total ESOP/MSOP shares and its realization; 2. Term; 3. Requirements for entitled employees and/or management; and 4. Exercise price. Remark: explanation shall be given in the event that there is no program concerned.	309
13.	Realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum (dalam hal perusahaan masih diwajibkan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana). Realization of the use of proceeds from public offering (in the event that the company still has the obligation to report the proceed use realization).	Memuat uraian mengenai: 1. Total perolehan dana; 2. Rencana penggunaan dana; 3. Rincian penggunaan dana; 4. Saldo dana; dan 5. Tanggal persetujuan RUPS/RUPO atas perubahan penggunaan dana (jika ada). **Catatan:** apabila tidak memiliki informasi realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum, agar diungkapkan. Contains descriptions of: 1. Total proceeds; 2. Planned use of the proceeds; 3. Detailed use of the proceeds; 4. Balance of proceeds; and 5. Date of GMS/GMB approval on changes in the use of proceeds (if any). Remark: If there is no information on realization of the use of proceeds from public offering, explanation shall be given.	308

KRITERIA Criteria		PENJELASAN Description	Halaman Page
14.	Informasi transaksi material yang mengandung benturan kepentingan dan/ atau transaksi dengan pihak afiliasi. Information on material transactions with conflict of interest and/or transactions with affiliated or related parties.	Memuat uraian mengenai: 1. Nama pihak yang bertransaksi dan sifat hubungan afiliasi; 2. Penjelasan mengenai kewajaran transaksi; 3. Alasan dilakukannya transaksi; 4. Realisasi transaksi pada periode tahun buku terakhir; 5. Kebijakan perusahaan terkait dengan mekanisme review atas transaksi; dan 6. Pemenuhan peraturan dan ketentuan terkait. **Catatan**: apabila tidak mempunyai transaksi dimaksud, agar diungkapkan. Contains descriptions of: 1. Name of affiliates and the nature of affiliation; 2. Explanation on the fairness of transaction; 3. Reason behind the transaction; 4. Realization of transactions in the current fiscal year; 5. Company policy relating to review mechanism on transactions; and 6. Compliance with relevant regulations and provisions. Remark: explanation shall be given in the event that there is no transaction concerned	295-302
15.	Uraian mengenai perubahan peraturan perundang-undangan terhadap perusahaan pada tahun buku terakhir. Description on regulatory changes having significant impact on the company in the current fiscal year.	Uraian memuat antara lain: 1. Nama peraturan perundang-undangan yang mengalami perubahan; dan 2. Dampaknya (kuantitatif dan/atau kualitatif) terhadap perusahaan (jika signifikan) atau pernyataan bahwa dampaknya tidak signifikan. **Catatan**: apabila tidak terdapat perubahan peraturan perundang-undangan pada tahun buku terakhir, agar diungkapkan. The descriptions contain, among other: 1. Name of the law changed; and 2. Its impacts (quantitative and/or qualitative) on the company (if significant) or statement that the impact was not significant. Remark: explanation shall be given in the event that there was no regulatory change on the current fiscal year.	314

KRITERIA Criteria		PENJELASAN Description	Halaman Page
16.	Uraian mengenai perubahan kebijakan akuntansi yang diterapkan perusahaan pada tahun buku terakhir. Description on changes in accounting policies applied by the company in the current fiscal year.	Uraian memuat antara lain: 1. Perubahan kebijakan akuntansi; 2. Alasan perubahan kebijakan akuntansi; dan 3. Dampaknya secara kuantitatif terhadap laporan keuangan. **Catatan**: apabila tidak terdapat perubahan kebijakan akuntansi pada tahun buku terakhir, agar diungkapkan. The descriptions contain, among other: 1. Amendment to accountancy policy; 2. The reasons to the amendment; and 3. Its impact quantitatively towards financial statement. Remark: explanation shall be given in the event that there is no changes in accounting policies.	311-313
17.	Informasi kelangsungan usaha. Business continuity information.	Pengungkapan informasi mengenai: 1. Hal-hal yang berpotensi berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha perusahaan pada tahun buku terakhir; 2. *Assessment* manajemen atas hal-hal pada angka 1; dan 3. Asumsi yang digunakan manajemen dalam melakukan *assessment*. **Catatan**: apabila tidak terdapat hal-hal yang berpotensi berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha perusahaan pada tahun buku terakhir, agar diungkapkan asumsi yang mendasari manajemen dalam meyakini bahwa tidak terdapat hal-hal yang berpotensi berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha perusahaan pada tahun buku terakhir. Disclosure of information includes: 1. Potential matters that may significantly affect the business continuity on the current fiscal year; 2. Management assessment on matters in point 1; and 3. Management assumption in carrying out the assessment. Remark: if there were no issues that would affect Company's business continuity in the current fiscal year, the Management's assumption as the base to ensure that there was no potential issues that would significantly affect the business continuity on the current fiscal year shall be disclosed.	315-316

KRITERIA Criteria		PENJELASAN Description	Halaman Page
VI. Good Corporate Governence			
1.	Uraian Dewan Komisaris. Board of Commissioners' description.	Uraian memuat antara lain: 1. Uraian tanggung jawab Dewan Komisaris; 2. Penilaian atas kinerja masing-masing komite yang berada di bawah Dewan Komisaris dan dasar penilaiannya; dan 3. Pengungkapan mengenai Board Charter (pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris). The descriptions contain, among other: 1. Description of responsibilities of the Board of Commissioners; 2. Assessment on performance of each committee reporting directly to the Board of Commissioners and the basis of assessment; and 3. Disclosure of the Board Charter (guidelines and codes of conduct of Board of Commissioners).	413-437
2.	Komisaris Independen (jumlahnya minimal 30% dari total Dewan Komisaris). Independent Commissioners (the number is minimum 30% from the total of Board of Commissioners).	Meliputi antara lain: 1. Kriteria penentuan Komisaris Independen; dan 2. Pernyataan tentang independensi masing-masing Komisaris Independen. Includes, among others: 1. The criteria of Independent Commissioner appointment; and 2. Statement of independence from each Independent Commissioner.	424-427
3.	Uraian Direksi. Board of Directors' descriptions.	Uraian memuat antara lain: 1. Ruang lingkup pekerjaan dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi; 2. Penilaian atas kinerja komite-komite yang berada di bawah Direksi (jika ada); dan 3. Pengungkapan mengenai *Board Charter* (pedoman dan tata tertib kerja Direksi). The descriptions contain, among other: 1. Scopes of work and responsibilities of each Board of Directors' member; 2. Assessment on performance of committees reporting directy to the Board of Directors (if available); and 3. Disclosure of the Board Charter (guidelines and codes of conduct of Board of Directors).	469-493

KRITERIA Criteria		PENJELASAN Description	Halaman Page
4.	Penilaian Penerapan GCG untuk tahun buku 2015 yang meliputi paling kurang aspek Dewan Komisaris dan Direksi. Assessment on GCG Implementation for the fiscal year of 2015 consisting of the very least aspects on Board of Commissioners and Directors.	Memuat uraian mengenai: 1. Kriteria yang digunakan dalam penilaian; 2. Pihak yang melakukan penilaian; 3. Skor penilaian masing-masing kriteria; 4. Rekomendasi hasil penilaian; dan 5. Alasan belum/tidak diterapkannya rekomendasi. **Catatan**: apabila tidak ada penilaian penerapan GCG untuk tahun buku 2015, agar diungkapkan. Contains descriptions of: 1. The criteria utilized in assessment; 2. Assessing party; 3. Assessment score on each criteria; 4. Assessment result recommendation; and 5. Reasons on why recommendations are not/have not yet implemented. Remark: If there is no assessment on GCG implementation for the fiscal year of 2015, it shall be disclosed.	389-394
5.	Uraian mengenai kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi. Description on remuneration policy for Board of Commissioners and Directors.	Mencakup antara lain: 1. Pengungkapan prosedur pengusulan sampai dengan penetapan remunerasi Dewan Komisaris; 2. Pengungkapan prosedur pengusulan sampai dengan penetapan remunerasi Direksi; 3. Struktur remunerasi yang menunjukkan komponen remunerasi dan jumlah nominal per komponen untuk setiap anggota Dewan Komisaris; 4. Struktur remunerasi yang menunjukkan komponen remunerasi dan jumlah nominal per komponen untuk setiap anggota Direksi; 5. Pengungkapan indikator untuk penetapan remunerasi Direksi; dan 6. Pengungkapan bonus kinerja, bonus non kinerja, dan/atau opsi saham yang diterima setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi (jika ada). **Catatan**: apabila tidak terdapat bonus kinerja, bonus non kinerja, dan opsi saham yang diterima setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi, agar diungkapkan.	494-499

KRITERIA Criteria		PENJELASAN Description	Halaman Page
		Includes, among others: 1. Disclosure of remuneration procedure, from nomination to determination of remuneration for Board of Commissioners; 2. Disclosure of remuneration procedure, from nomination to determination of remuneration for Board of Directors; 3. Remuneration structure that indicates components of remuneration and nominal amount of each component for each Board of Commissioners' member; 4. Remuneration structure that indicates components of remuneration and nominal amount of each component for each Board of Directors' member; 5. Disclosure of indicators for the determination of Board of Directors' remuneration; and 6. Disclosure of performance bonus, non-performance bonus, and/or stock option that are received by each Board of Commissioners and Directors' member (if available). Remark: If there is no performance bonus, non-performance bonus, and/or stock option that are received by each Board of Commissioners and Directors' member, it shall be disclosed.	
6.	Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Rapat yang dihadiri mayoritas anggota pada rapat Dewan Komisaris (minimal 1 kali dalam 2 bulan), Rapat Direksi (minimal 1 kali dalam 1 bulan), dan Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi (minimal 1 kali dalam 4 bulan). Frequency and Meeting Attendance Rate that is attended by the majority of members on Board of Commissioners' meeting (at least once in two months), Board of Directors' meeting (at least once in a month), and Joint Meeting between Board of Commissioners and Directors (at least once in four months).	Informasi memuat antara lain: 1. Tanggal Rapat; 2. Peserta Rapat; dan 3. Agenda Rapat. untuk masing-masing rapat Dewan Komisaris, Direksi, dan rapat gabungan The information contains, among others: 1. Meeting Date; 2. Meeting Participants; and 3. Meeting Agenda. for each meeting of Board of Commissioners, Board of Directors, and Joint Meetings. .	428-433 482-491

KRITERIA Criteria		PENJELASAN Description	Halaman Page
7.	Informasi mengenai pemegang saham utama dan pengendali, baik langsung maupun tidak langsung, sampai kepada pemilik individu. Information on major and controlling shareholders, both directly and indirectly, to individual holders.	Dalam bentuk skema atau diagram yang memisahkan Pemegang Saham utama dengan pemegang saham pengendali. **Catatan**: yang dimaksud pemegang saham utama adalah pihak yang, baik secara langsung maupun tidak langsung, memiliki sekurang-kurangnya 20% (dua puluh perseratus) hak suara dari seluruh saham yang mempunyai hak suara yang dikeluarkan oleh suatu Perseroan, tetapi bukan pemegang saham pengendali. In the form of a scheme or diagram that separates major Shareholders from controlling shareholders. Remark: what referred to as major shareholders is the party that, both directly and indirectly, has at least 20% (twenty percent) of voting right from the total of shares that are published by a company, but is not the controlling shareholders.	404
8.	Pengungkapan hubungan afiliasi antara anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Utama dan/atau pengendali. Disclosure of affiliations between members of the Board of Directors, Board of Commissioners, and the Major and/or Controlling Shareholders.	Mencakup antara lain: 1. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan anggota Direksi lainnya; 2. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris; 3. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama dan/atau Pengendali; 4. Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dengan anggota Komisaris lainnya; dan 5. Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham Utama dan/atau Pengendali. **Catatan**: apabila tidak mempunyai hubungan afiliasi dimaksud, agar diungkapkan. Includes, among others: 1. Affiliate relationship between fellow members of Board of Directors; 2. Affiliate relationship between members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners; 3. Affiliate relationship between members of the Board of Directors and the Major and/or Controlling Shareholders; 4. Affiliate relationship between fellow members of Board of Commissioners; and 5. Affiliate relationship between members of the Board of Commissioners and the Major and/or Controlling Shareholders. Remark: If there is no aforementioned affiliation, it shall be disclosed.	509-510

KRITERIA Criteria		PENJELASAN Description	Halaman Page
9.	Komite Audit. Audit Committee.	Mencakup antara lain: 1. Nama, jabatan, dan periode jabatan anggota komite audit; 2. Riwayat pendidikan (Bidang Studi dan Lembaga Pendidikan) dan pengalaman kerja (Jabatan, Instansi, dan Periode Menjabat) anggota komite audit; 3. Independensi anggota komite audit; 4. Uraian tugas dan tanggung jawab; 5. Uraian pelaksanaan kegiatan komite audit pada tahun buku; dan 6. Frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran komite audit. Includes, among others: 1. The name, position, and work period of audit committee members; 2. Education history (field of study and education institution) and work experience (position, institution, and work period) of audit committee members; 3. Independence of audit committee members; 4. Description of duties and responsibilities; 5. Description of audit committee activities implementation on the fiscal year; and 6. Meeting frequency and attendance of audit committee.	438-451
10.	Komite Nominasi dan/atau Remunerasi. Nomination and/or Remuneration Committee.	Mencakup antara lain: 1. Nama, jabatan, dan riwayat hidup singkat anggota komite nominasi dan/atau remunerasi; 2. Independensi komite nominasi dan/atau remunerasi; 3. Uraian tugas dan tanggung jawab; 4. Uraian pelaksanaan kegiatan komite nominasi dan/atau remunerasi pada tahun buku; 5. Frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran komite nominasi dan/atau remunerasi; 6. Pernyataan adanya pedoman komite nominasi dan/atau remunerasi; dan 7. Kebijakan mengenai suksesi direksi. Includes, among others: 1. Names, positions, and brief life history of nomination and/or remuneration committee members; 2. Independence of nomination and/or remuneration committee; 3. Description of duties and responsibilities; 4. Description of nomination and/or remuneration committee activities implementation on the fiscal year; 5. Meeting frequency and attendance of nomination and/or remuneration committee; 6. Statements about the existence of guidelines for nomination and/or remuneration committee; and 7. Policy relating to the board of directors' succession.	464-468

KRITERIA Criteria		PENJELASAN Description	Halaman Page
11.	Komite-komite lain di bawah Dewan Komisaris yang dimiliki oleh Perusahaan. Other committees reporting directly to the Board of Commissioners that are owned by Company.	Mencakup antara lain: 1. Nama, jabatan, dan riwayat hidup singkat anggota komite lain; 2. Independensi komite lain; 3. Uraian tugas dan tanggung jawab; 4. Uraian pelaksanaan kegiatan komite lain pada tahun buku; dan 5. Frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran komite lain. Includes, among others: 1. Names, positions, and brief life history of others committee members; 2. Independence of others committee; 3. Description of duties and responsibilities; 4. Description of others committee activities implementation on the fiscal year; and 5. Meeting frequency and attendance of others committee.	452-463
12.	Uraian tugas dan Fungsi Sekretaris Perusahaan. Description of duties and functions of Corporate Secretary.	Mencakup antara lain: 1. Nama, dan riwayat jabatan singkat sekretaris perusahaan; 2. Domisili; 3. Uraian tugas dan tanggung jawab; dan 4. Uraian pelaksanaan tugas sekretaris perusahaan pada tahun buku. Includes, among others: 1. Name, and brief CV of corporate secretary; 2. Domicile; 3. Description of duties and responsibilities; and 4. Description of corporate secretary's duties implementation on the fiscal year.	515-519
13.	Uraian mengenai unit audit internal. Description on internal audit unit.	Mencakup antara lain: 1. Nama ketua unit audit internal; 2. Jumlah pegawai (auditor internal) pada unit audit internal; 3. Sertifikasi sebagai profesi audit internal; 4. Kedudukan unit audit internal dalam struktur perusahaan; 5. Uraian pelaksanaan kegiatan unit audit internal pada tahun buku; dan 6. Pihak yang mengangkat dan memberhentikan ketua unit audit internal.	520-530

KRITERIA Criteria		PENJELASAN Description	Halaman Page
		Includes, among others: 1. Name of head of internal audit unit; 2. The number of employee (internal auditor) on internal audit unit; 3. Certification as internal audit profession; 4. The position of internal audit unit within organizational structure; 5. Description of internal audit unit activities implementation on the fiscal year; and 6. Parties appointing and discharging head of internal audit unit.	
14.	Akuntan Publik. Public Accountant.	Informasi memuat antara lain: 1. Nama dan tahun akuntan publik yang melakukan audit laporan keuangan tahunan selama 5 tahun terakhir; 2. Nama dan tahun Kantor Akuntan Publik yang melakukan audit laporan keuangan tahunan selama 5 tahun terakhir; 3. Besarnya fee untuk masing-masing jenis jasa yang diberikan oleh Kantor Akuntan Publik pada tahun buku terakhir; dan 4. Jasa lain yang diberikan Kantor Akuntan Publik dan akuntan publik selain jasa audit laporan keuangan tahunan pada tahun buku terakhir. **Catatan**: apabila tidak ada jasa lain dimaksud, agar diungkapkan. The information contains, among others: 1. The name and year of public accountant that performs audit on annual financial statements for the past 5 years; 2. The name and year of Public Accountants Firm that performs audit on annual financial statements for the past 5 years; 3. The amount of fee for each type of service that is provided by Public Accountants Firm on the last fiscal year; and 4. Other service provided by Public Accountants Firm and public accountant other than auditing service on annual financial statement on the current fiscal year. Remark: explanation shall be given in the event that there is no service aforementioned.	571-574

KRITERIA Criteria		PENJELASAN Description	Halaman Page
15.	Uraian mengenai manajemen risiko perusahaan. Description on company's risk management.	Mencakup antara lain: 1. Penjelasan mengenai sistem manajemen risiko yang diterapkan perusahaan; 2. Penjelasan mengenai hasil reviu yang dilakukan atas sistem manajemen risiko pada tahun buku; 3. Penjelasan mengenai risiko-risiko yang dihadapi perusahaan; dan 4. Upaya untuk mengelola risiko tersebut. Includes, among others: 1. Explanation on risk management system implemented by company; 2. Explanation on review result carried out over risk management system on the fiscal year; 3. Explanation on risks experienced by company; and 4. Efforts implemented in managing those risks.	539-570
16.	Uraian mengenai sistem pengendalian intern. Description on internal control system.	Mencakup antara lain: 1. Penjelasan singkat mengenai sistem pengendalian intern, antara lain mencakup pengendalian keuangan dan operasional; 2. Penjelasan kesesuaian sistem pengendalian intern dengan kerangka yang diakui secara internasional (COSO – *internal control framework*); dan 3. Penjelasan mengenai hasil reviu yang dilakukan atas pelaksanaan sistem pengendalian intern pada tahun buku. Includes, among others: 1. Brief explanation on internal control system, among them are financial and operational control. 2. Explanation of compliance between applied internal control system and regulated framework that is acknowledged internationally (COSO-internal control framework); and 3. Explanation on review result carried out over internal control system implementation on the fiscal year.	531-538

KRITERIA Criteria		PENJELASAN Description	Halaman Page
17.	Uraian mengenai *corporate social responsibility* yang terkait dengan lingkungan hidup. Description on corporate social responsibility related to environment.	Mencakup antara lain informasi tentang: 1.Target/rencana kegiatan pada tahun 2016 yang ditetapkan manajemen; 2. Kegiatan yang dilakukan dan dampak kuantitatif atas kegiatan tersebut; dan terkait program lingkungan hidup yang berhubungan dengan kegiatan operasional perusahaan, seperti penggunaan material dan energi yang ramah lingkungan dan dapat didaur ulang, sistem pengolahan limbah perusahaan, mekanisme pengaduan masalah lingkungan, pertimbangan aspek lingkungan dalam pemberian kredit kepada nasabah, dan lain-lain. 3. Sertifikasi di bidang lingkungan yang dimiliki. Includes information on: 1. Goals/activity plan on the year 2016 that was established by management; 2. Activities that have been carried out and quantitative effects out of those activities; and Related to the environment program that is connected with company's operational activities, such as energy and material utilization that is environment friendly and recyclable, company's waste processing system, environmental issues complaint mechanism, considerations on credit grants to customer related to environmental aspects, etc. 3. Certification acquired in the environmental field.	619-644
18.	Uraian mengenai *corporate social responsibility* yang terkait dengan ketenagakerjaan, kesehatan, dan keselamatan kerja. Description on corporate social responsibility that is related with employment, health, and work safety.	Mencakup antara lain informasi tentang: 1.Target/rencana kegiatan pada tahun 2016 yang ditetapkan manajemen; dan 2. Kegiatan yang dilakukan dan dampak kuantitatif atas kegiatan tersebut terkait praktik ketenagakerjaan, kesehatan, dan keselamatan kerja, seperti kesetaraan gender dan kesempatan kerja, sarana dan keselamatan kerja, tingkat turnover karyawan, tingkat kecelakaan kerja, remunerasi, mekanisme pengaduan masalah ketenagakerjaan, dan lain-lain.	645-663

KRITERIA Criteria		PENJELASAN Description	Halaman Page
		Includes information on: 1. Goals/activity plan on the year 2016 that was established by management; and 2. Activities that have been carried out and quantitative effects out of those activities related to employment, occupational health, and safety practices, such as gender equality and equal work opportunity, occupational facilities and safety, employee turnover rate, workplace accidents, remuneration, whistleblowing mechanism on employment, etc.	
19.	Uraian mengenai *corporate social responsibility* yang terkait dengan pengembangan sosial dan kemasyarakatan. Description on corporate social responsibility that is related with social and community development.	Mencakup antara lain informasi tentang: 1.Target/rencana kegiatan pada tahun 2016 yang ditetapkan manajemen; 2. Kegiatan yang dilakukan dan dampak atas kegiatan tersebut; dan 3. Biaya yang dikeluarkan terkait pengembangan sosial dan kemasyarakatan, seperti penggunaan tenaga kerja lokal, pemberdayaan masyarakat sekitar perusahaan, perbaikan sarana dan prasarana sosial, bentuk donasi lainnya, komunikasi mengenai kebijakan dan prosedur anti korupsi, pelatihan mengenai anti korupsi, dan lain-lain. Includes information on: 1. Goals/activity plan on the year 2016 that was established by management; 2. Activities that have been carried out and effects from those activities; and 3. Expenditure Related to social and community development, such as the use of local workforce, empowerment of surrounding communities, reparation of social facilities and infrastructure, other forms of donations, dissemination on anti-corruption policies and procedures, training on anti-corruption, etc.	664-682
20.	Uraian mengenai *corporate social responsibility* yang terkait dengan tanggung jawab kepada konsumen. Description on corporate social responsibility that is related with responsibilities to consumer.	Mencakup antara lain: 1.Target/rencana kegiatan yang pada tahun 2016 ditetapkan manajemen; dan 2. Kegiatan yang dilakukan dan dampak atas kegiatan tersebutterkait tanggung jawab produk, seperti kesehatan dan keselamatan konsumen, informasi produk, sarana, jumlah dan penanggulangan atas pengaduan konsumen, dan lain-lain.	683-695

KRITERIA Criteria		PENJELASAN Description	Halaman Page
		Includes, among others: 1. Goals/activity plan on the year 2016 that was established by management; and 2. Activities that have been carried out and effects from those activities Related to product responsibility, such as consumer's health and safety, product information, facilities, number and response on customers' complaints, etc.	
21.	Perkara penting yang sedang dihadapi oleh perusahaan, entitas anak, serta anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang menjabat pada periode laporan tahunan. Significant cases currently faced by the company, subsidiaries, Board of Directors and/or Board of Commissioners member(s) serving during the period of the annual report.	Mencakup antara lain: 1. Pokok perkara/gugatan; 2. Status penyelesaian perkara/gugatan; 3 Risiko yang dihadapi perusahaan dan nilai nominal tuntutan/ gugatan; dan 4. Sanksi administrasi yang dikenakan kepada perusahaan, anggota Dewan Komisaris dan Direksi, oleh otoritas terkait (pasar modal, perbankan dan lainnya) pada tahun buku terakhir (atau terdapat pernyataan bahwa tidak dikenakan sanksi administrasi). **Catatan**: dalam hal perusahaan, entitas anak, anggota Dewan Komisaris, dan anggota Direksi tidak memiliki perkara penting, agar diungkapkan. Includes, among others: 1. Principle case/lawsuit; 2. Dispute/lawsuit settlement status; 3. Risks faced by the company and nominal value of dispute/ lawsuit; and 4. Administrative sanctions imposed to Entity, Board of Commissioners and Board of Directors members, by relevant authorities (capital market, banking, and others) on the current fiscal year (or statement confirming no imposition of administrative sanction exists). Remark: explanation shall be given in the event that the company, subsidiaries, or member of Board of Commissioners and Board of Directors do not have any disputes.	587-593
22.	Akses informasi dan data perusahaan. Access to information and corporate data.	Uraian mengenai tersedianya akses informasi dan data perusahaan kepada publik, misalnya melalui *website* (dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris), media massa, mailing list, buletin, pertemuan dengan analis, dan sebagainya. Description on the availability of company information and data to public, such as through website (in Bahasa Indonesia and English), mass media, mailing list, bulletin, analyst meeting, etc.	594-598

KRITERIA Criteria		PENJELASAN Description	Halaman Page
23.	Bahasan mengenai kode etik. Discussion on code of ethics.	Memuat uraian antara lain: 1. Pokok-pokok kode etik; 2. Pengungkapan bahwa kode etik berlaku bagi seluruh level organisasi; 3. Penyebarluasan kode etik; 4. Sanksi untuk masing-masing jenis pelanggaran yang diatur dalam kode etik (normatif); dan 5. Jumlah pelanggaran kode etik beserta sanksi yang diberikan pada tahun buku terakhir. **Catatan**: apabila tidak terdapat pelanggaran kode etik pada tahun buku terakhir, agar diungkapkan. The descriptions contain, among other: 1. Code of ethics basis; 2. Disclosure that the code of ethics applies to all levels of organization; 3. Dissemination of the code of ethics; 4. Sanctions on each type of violations that is regulated on the code of ethics (normative); and 5. Number of code of ethics violation with the sanctions given on current fiscal year. Remark: explanation shall be given in the event that there is no code of ethics violation in the current fiscal year.	575-579
24.	Pengungkapan mengenai *whistleblowing system*. Disclosure on whistleblowing system.	Memuat uraian tentang mekanisme *whistleblowing system* antara lain: 1. Penyampaian laporan pelanggaran; 2. Perlindungan bagi *whistleblower*; 3. Penanganan pengaduan; 4. Pihak yang mengelola pengaduan; dan 5. Jumlah pengaduan yang masuk dan diproses pada tahun buku terakhir; dan 6. Sanksi/tindak lanjut atas pengaduan yang telah selesai diproses pada tahun buku. **Catatan**: apabila tidak terdapat pengaduan yang masuk dan telah selesai diproses pada tahun buku terakhir, agar diungkapkan. Consists of the description on whistleblowing system, i.e.: 1. Submission of violation reports; 2. Whistleblower protection; 3. Handling of complaints; 4. Parties handling the complaints; and 5. Number of complaints received and processed in the current fiscal year; and 6. Sanctions/follow up on the complaints when the process is finished on fiscal year. Remark: Explanation shall be given in the event that there is no complaints received and processed until finish on the current fiscal year.	580-586

KRITERIA Criteria		PENJELASAN Description	Halaman Page
25.	Kebijakan mengenai keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi. Diversity policy for the composition of the Board of Commissioners and Board of Directors.	Uraian kebijakan tertulis Perusahaan mengenai keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi dalam pendidikan (bidang studi), pengalaman kerja, usia, dan jenis kelamin. Catatan: apabila tidak ada kebijakan dimaksud, agar diungkapkan alasan dan pertimbangannya. Description of Company's policy on composition diversity of Board of Commissioners and Board of Directors by education (field of study), work experience, age, and gender. Remark: explanation and consideration shall be given in the event that concerned policy is nonexistent.	500-508
VIII. Informasi Keuangan/ Financial Information			
1.	Surat Pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris tentang Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan. Statements from Board of Directors and/or Board of Commissioners on the Accountability of Financial Statements.	Kesesuaian dengan peraturan terkait tentang Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan. Compliance with related regulations on Accountability of Financial Statements.	703
2.	Opini auditor independen atas laporan keuangan. Independent auditor's opinion on financial statements.		699-701
3.	Deskripsi Auditor Independen di Opini. Independent auditor's description on the opinion.	Deskripsi memuat tentang: 1. Nama dan tanda tangan; 2. Tanggal Laporan Audit; dan 3. Nomor izin KAP dan nomor izin Akuntan Publik. The description consists of: 1. Names and signatures; 2. Dates of audit report; and 3. Public Accountants Firm's and Public Accountant's license numbers.	699-701
4.	Laporan keuangan yang lengkap. Comprehensive Financial Statements.	Memuat secara lengkap unsur-unsur laporan keuangan: 1. Laporan posisi keuangan; 2. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain; 3. Laporan perubahan ekuitas; 4. Laporan arus kas; 5. Catatan atas laporan keuangan; 6. Informasi komparatif mengenai periode sebelumnya; dan 7. Laporan posisi keuangan pada awal periode sebelumnya ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan, atau ketika entitas mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya (jika relevan).	704-809

KRITERIA Criteria		PENJELASAN Description	Halaman Page
		Consists comprehensively of elements of financial statements: 1. Statements of financial position; 2. Statements of profit or loss and other comprehensive income; 3. Statements of changes in equity; 4. Statements of cash flows; 5. Notes on financial statements; 6. Comparative information regarding previous period; and 7. Statements of financial position at the beginning of comparative period presented when an entity applies an accounting policy retrospectively or makes statements of post financial statements, or when an entity reclarifies posts in the financial statements (if relevant).	
5.	Perbandingan tingkat profitabilitas. Comparison of profitability level.	Perbandingan kinerja/laba (rugi) tahun berjalan dengan tahun sebelumnya. Comparison of performance/profit (loss) between current year and previous year.	706-707
6.	Laporan Arus Kas. Statements of Cash Flow.	Memenuhi ketentuan sebagai berikut: 1. Pengelompokan dalam tiga kategori aktivitas: operasi, investasi, dan pendanaan; 2. Penggunaan metode langsung (*direct method*) untuk melaporkan arus kas dari aktivitas operasi; 3. Pemisahan penyajian antara penerimaan kas dan atau pengeluaran kas selama tahun berjalan pada aktivitas operasi, investasi dan pendanaan; dan 4. Pengungkapan transaksi non kas harus dicantumkan dalam catatan atas laporan keuangan. Fulfills the following regulations: 1. Classification in three categories of activity: operation, investment, and funding; 2. The use of direct method in cash flow reporting from operational activities; 3. Separation of presentation between cash receipts and/or cash expenses for the current year in operation, investment, and funding activities; and 4. Disclosure of non-cash transaction must be included in the notes to the financial statements.	709 807
7.	Ikhtisar Kebijakan Akuntansi. Accountancy Policy Highlights.	Meliputi sekurang-kurangnya: 1. Pernyataan kepatuhan terhadap SAK; 2. Dasar pengukuran dan penyusunan laporan keuangan; 3. Pajak penghasilan; 4. Imbalan kerja; dan 5. Instrumen Keuangan.	714-745

KRITERIA Criteria		PENJELASAN Description	Halaman Page
		Consists at least: 1. Statement of compliance with Financial Accounting Standards (SAK); 2. Basis for the measurement and preparation of financial statements; 3. Income tax; 4. Employee benefits; and 5. Financial instruments.	
8.	Pengungkapan transaksi pihak berelasi. Disclosure of transactions with related parties.	Hal-hal yang diungkapkan antara lain: 1.Nama pihak berelasi, serta sifat dan hubungan dengan pihak berelasi; 2. Nilai transaksi beserta persentasenya terhadap total pendapatan dan beban terkait; dan 3. Jumlah saldo beserta persentasenya terhadap total aset atau liabilitas terkait. Matters to be disclosed are as follows: 1. Names of related parties and the nature of relationship with these parties; 2. Transactional value and its percentage against total revenue and relevant expenses; and 3. Total balance and its percentage against total assets or liabilities related.	788-790
9.	Pengungkapan yang berhubungan dengan perpajakan. Disclosure of matters relating to taxation.	Hal-hal yang harus diungkapkan: 1. Rekonsiliasi fiskal dan perhitungan beban pajak kini; 2. Penjelasan hubungan antara beban (penghasilan) pajak dan laba akuntansi; 3. Pernyataan bahwa Laba Kena Pajak (LKP) hasil rekonsiliasi dijadikan dasar dalam pengisian SPT Tahunan PPh Badan tahun 2016; 4. Rincian aset dan liabilitas pajak tangguhan yang diakui pada laporan posisi keuangan untuk setiap periode penyajian, dan jumlah beban (penghasilan) pajak tangguhan yang diakui pada laporan laba rugi apabila jumlah tersebut tidak terlihat dari jumlah aset atau liabilitas pajak tangguhan yang diakui pada laporan posisi keuangan; dan 5. Pengungkapan ada atau tidak ada sengketa pajak.	773 775-779

KRITERIA Criteria		PENJELASAN Description	Halaman Page
		Matters to be disclosed: 1. Fiscal reconciliation and current tax expense calculation; 2. Explanation of relationship between tax expense (income) and accounting profit; 3. Statement acknowledging that Taxable Profits (LKP) from the reconciliation serves as the basis for Corporate Income Tax's Annual Tax Returns (SPT) year 2016; 4. Details of assets and deferred tax liabilities recognized in the financial position statement for each presenting period, and the amount of deferred tax (income) expenses recognized in the income statements if the amount is not visible in the total assets or liabilities of deferred tax recognized in the statements of financial position; and 5. Disclosure of any tax disputes.	
10.	Pengungkapan yang berhubungan dengan aset tetap. Disclosure of matters relating to fixed assets.	Hal-hal yang harus diungkapkan: 1. Metode penyusutan yang digunakan; 2. Uraian mengenai kebijakan akuntansi yang dipilih antara model revaluasi dan model biaya; 3. Metode dan asumsi signifikan yang digunakan dalam mengestimasi nilai wajar aset tetap (untuk model revaluasi) atau pengungkapan nilai wajar aset tetap (untuk model biaya); dan 4. Rekonsiliasi jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan aset tetap pada awal dan akhir periode dengan menunjukkan: penambahan, pengurangan dan reklasifikasi. Matters to be disclosed: 1. Depreciation method used; 2. Description of accounting policy selected, either revaluation or cost model; 3. Methods and significant assumptions used to estimate fixed assets' fair value (for revaluation model) or disclosure of fixed assets' fair value (for cost model); and 4. Reconciliation of the gross carrying amount and accumulated depreciation of fixed assets at the beginning and the end of period by presenting: addition, reduction, and reclassification.	752-760
11.	Pengungkapan yang berhubungan dengan segmen operasi. Disclosure of matters relating to operational segment.	Hal-hal yang harus diungkapkan: 1. Informasi umum yang meliputi faktor-faktor yang digunakan untuk mengidentifikasi segmen yang dilaporkan; 2. Informasi tentang laba rugi, aset, dan liabilitas segmen yang dilaporkan; 3. Rekonsiliasi dari total pendapatan segmen, laba rugi segmen yang dilaporkan, aset segmen, liabilitas segmen, dan unsur material segmen lainnya terhadap jumlah terkait dalam entitas; dan 4. Pengungkapan pada level entitas, yang meliputi informasi tentang produk dan/atau jasa, wilayah geografis dan pelanggan utama.	773

KRITERIA Criteria		PENJELASAN Description	Halaman Page
		Matters to be disclosed: 1. General information covering the factors used to identify unreported segment; 2. Information regarding profit and loss, assets, and liabilities of the reported segment; 3. Reconciliation of total revenue, profit and loss, assets, liabilities of the reported segment, and material elements of the other segments against relevant amount in the entity; and 4. Disclosure at the level of entity, covering information on products and/or services, geographical area, and main customer.	
12.	Pengungkapan yang berhubungan dengan Instrumen Keuangan. Disclosure related to financial instruments.	Hal-hal yang harus diungkapkan: 1. Rincian instrumen keuangan yang dimiliki berdasarkan klasifikasinya; 2. Nilai wajar dan hirarkinya untuk setiap kelompok instrumen keuangan; 3. Penjelasan risiko yang terkait dengan instrumen keuangan: risiko pasar, risiko kredit dan risiko likuiditas; 4. Kebijakan manajemen risiko; dan 5. Analisis risiko yang terkait dengan instrumen keuangan secara kuantitatif. Matters to be disclosed: 1. Details on financial instruments that are owned along with the classifications; 2. Fair value of each group of financial instruments; 3. Explanation on risks related to financial instruments; market risk, credit risk, and liquidity risk; 4. Risk management policy; and 5. Quantitative risk analysis relating to financial instruments.	799-807
13.	Penerbitan laporan keuangan. Publication of financial statements.	Hal-hal yang diungkapkan antara lain: 1. Tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit; dan 2. Pihak yang bertanggung jawab mengotorisasi laporan keuangan. Matters to be disclosed are as follows: 1. Authorization date of publication of the financial statements; and 2. Party responsible for authorizing financial statements.	708 809

INDONESIA POWER

2016 Laporan Tahunan Annual Report

HEAD OFFICE
PT INDONESIA POWER
Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 18
Jakarta 12950

Telp. 62-21-5267666
Fax. 62-21-5251923 , 5252623
Email kontak-ip@indonesiapower.co.id
www.indonesiapower.co.id